bankriaukepri
tumbuh kembangkan usaha

bersama membangun Indonesia



IMPLEMENTASI KONVERSI SYARIAH MENUJU KEBERKAHAN UNTUK INDONESIA

IMPLEMENTATION OF SHARIA CONVERSION TO BLESSING FOR INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN 2021
ANNUAL REPORT

PEMBUKAAN
OPENING





IMPLEMENTASI KONVERSI SYARIAH
MENUJU KEBERKAHAN UNTUK INDONESIA

IMPLEMENTATION OF SHARIA CONVERSION TOWARDS A BLESSED INDONESIA

Sistem Ekonomi Islam perlahan mulai bergerak dan menuju titik terang. Bukan hanya sebagai minoritas, namun alternatif perbankan yang menjadi tujuan berjangka panjang.

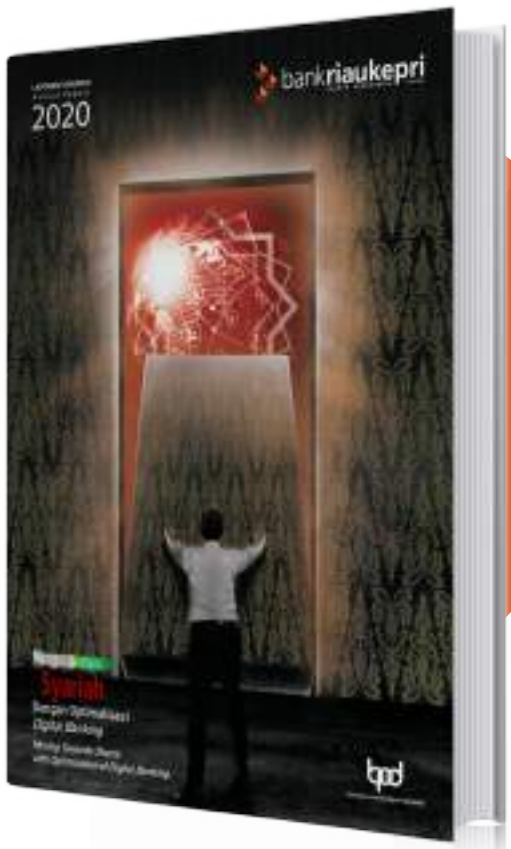
Pelaku ekonomi memiliki andil besar, menggeser arah kemajuan atau kemunduran. Sebagai institusi perbankan, Bank Riau Kepri mengarahkan layar mengikuti angin,menuju keberkahan sistem syariah yang terus berkembang dan berjalan.

Luasnya keberkahan di dalam proses ekonomi syariah menjadi satu harapan, dalam upaya memandirikan pelaku ekonomi islam. Keberkahan yang bersifat memeratakan, mensejahterakan, dan membersihkan harta, adalah keniscayaan di depan mata. Sunatullah dalam berkegiatan ekonomi, menjadi upaya mentaati perintah Allah dalam kitab suci *Al Quran*. Harta yg baik ada di tangan orang baik. Maka institusi perbankan sebagai rumah berkegiatan ekonomi, tidak lantas lemah karena mengambil jalan alternatif di tengah sistem konvensional. Perbankan Syariah, tetap unggul sebagai'orang baik'yang membantu kelola ekonomi secara islami.

The Islamic Economic System is slowly starting to move and towards a bright spot. No longer a minority, but a banking alternative which has been a long-term goal.

Economic actors have a big stake in shifting the direction of progress or decline. As a banking institution, Bank Riau Kepri directs the sails to follow the wind, towards the blessings afforded by the sharia system that continues to grow and develop.

The breadth of blessings in the Islamic economic process becomes a hope in the effort to make Islamic economic actors independent. Blessings that are equal, prosper, and cleanse wealth, are an inevitability in front of our eyes. Sunatullah in conducting economic activities is an effort to obey Allah's commands in the holy book Al-Quran. Good wealth is in the hands of good people. Therefore, banking institutions, as houses of economic activity, are not necessarily weak because they take alternative paths in the midst of the conventional system. Sharia banking continues to excel as 'good people' who help manage the economy in an Islamic way.



2020

Menggesa Menuju Syariah Dengan Optimalisasi Digital Banking

Moving Towards Sharia with Optimization of Digital Banking

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 April 2019 memutuskan PT Bank Riau Kepri akan dikonversi dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Oleh karena itu, Bank telah membentuk *Tim Project Management* Konversi PT Bank Riau Kepri menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah. Konversi ini telah mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah setempat. Memperhatikan *asistensi* yang telah dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), progress kesiapan pelaksanaan terkait dengan pemenuhan administrasi dari nasabah, kelengkapan dokumen Perda dan NIB (terkait izin operasional kantor) dan *review* independen terhadap implementasi *core banking* syariah, maka Bank telah melakukan *review* komprehensif terhadap realisasi yang telah dicapai. Pada tahun 2020, telah disusun program kerja konversi PT Bank Riau Kepri menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah dengan 9 (Sembilan) bidang prioritas Indikator Utama.

Untuk mendukung kesiapan konversi menjadi bank syariah, pada tahun 2020 Bank telah menetapkan strategi "Optimalisasi layanan melalui digitalisasi transaksi, persiapan Konversi Bank Umum Syariah dan implementasi keuangan yang berkelanjutan". Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Bank Riau Kepri akan melakukan perbaikan dan penyempurnaan produk/layanan dalam rangka implementasi Digital Solution, otomasi proses operasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan tetap berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik dan lima pilar Kebijakan Manajemen, yakni: (i) Dana Pihak Ketiga, (ii) Kredit, (iii) Sumber Daya Manusia, (iv) Teknologi, dan (v) Modal. Kelima pilar ini menjadi dasar untuk menentukan aspek kinerja organisasi yang fokus menuju posisi bertumbuh, beserta level kinerja yang harus dicapai.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on 22 April 2019 decided that PT Bank Riau Kepri would be converted from a Conventional Commercial Bank (BUK) to a Sharia Commercial Bank (BUS). Therefore, Bank Riau Kepri has formed a Project Management Team for the Conversion of PT Bank Riau Kepri to PT Bank Riau Kepri Syariah. This conversion has received full support from the local government. Taking into account the assistance that has been carried out with the Financial Services Authority (OJK), the progress of implementation readiness related to administrative fulfillment from customers, completeness of local regulations and NIB documents (related to office operational permits) and independent reviews of the implementation of Islamic core banking, the Bank has conducted a comprehensive review the realization that has been achieved. In 2020, a work program for the conversion of PT Bank Riau Kepri to PT Bank Riau Kepri Syariah has been compiled with 9 (nine) priority areas of Main Indicators.

To support the readiness to convert to a sharia bank, in 2020 the Bank has established a strategy of "Optimizing services through digitization of transactions, preparation for the conversion of Islamic Commercial Banks and implementation of sustainable finance". To realize this policy, Bank Riau Kepri will make improvements and refinement of products/services in the context of implementing Digital Solution, automation operational processes and improving the quality of human resources (HR) while still based on good corporate governance and the five pillars of Management Policy, namely : (i) Third Party Funds, (ii) Credit, (iii) Human Resources, (iv) Technology, and (v) Capital. These five pillars form the basis for determining aspects of organizational performance that are focused towards a growth position, along with the level of performance that must be achieved.

2019

Akar Budaya Melayu yang Terintegrasi dalam Pelayanan Berbasis Digital Banking

The Root of Malay Culture Integrated in Services Based on Digital Banking



NIlai-nilai perusahaan Bank Riau Kepri yaitu Teguh, Utuh, Tumbuh merupakan penjabaran dari akar budaya melayu, dimana masyarakat melayu mempunyai moral-spiritual pada nilai, kepercayaan dan peninggalan sosial budaya melayu yang dijadikan acuan bertingkah laku. Modal kepercayaan inilah yang menjadikan Bank Riau Kepri terus tumbuh dan berkembang menjadi Bank primadona masyarakat Riau dan Kepri di tengah arus globalisasi informasi dan perkembangan teknologi digital.

Perkembangan teknologi digital saat ini menciptakan berbagai kemudahan di sejumlah aspek kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali di industri perbankan, saat ini masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan akses untuk mengelola keuangan melalui sejumlah produk yang ditawarkan. Kegiatan bank beberapa tahun belakangan ini sudah didukung oleh teknologi, seperti penggunaan mobile banking dan internet banking yang menjadikan proses transaksi menjadi lebih efisien. Digital banking merupakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabahnya untuk melakukan seluruh kegiatannya melalui smartphone, mulai dari pembukaan rekening hingga transaksi lainnya.

Bank Riau Kepri sebagai bank milik masyarakat Riau dan Kepri tidak terlepas dari pengaruh teknologi digital banking. Untuk itu kami senantiasa melakukan inovasi produk dan pelayanan, sehingga memudahkan masyarakat untuk menggunakan jasa kami. Bank Riau Kepri berkomitmen sebagai bank daerah yang senantiasa mengembangkan pelayanan perbankan berbasis digital banking.

Bank Riau Kepri's corporate values namely Firm, Intact, Growing are the translation of Malay cultural roots, where Malay people have moral-spiritual values, beliefs and Malay social cultural heritage which are used as a reference for behavior. This trust capital makes Bank Riau Kepri continue to grow and develop into the beloved Bank of Riau and Kepri people in the midst of globalization of information and the development of digital technology.

The development of digital technology currently creates various facilities in a number of aspects of people lives. The banking industry is no exception, now people can more easily get access to manage their finance through a number of products offered. Bank activities in recent years have been supported by technology, such as the use of mobile banking and internet banking, which makes the transaction process more efficient. Digital banking is a banking service that allows its customers to carry out all their activities through smartphones, from opening accounts to other transactions.

Bank Riau Kepri as a bank owned by the people of Riau and Kepri is inseparable from the influence of digital banking technology. For this reason, we are constantly innovating products and services, making it easier for people to use our services. Bank Riau Kepri is committed as a regional bank that continues to develop digital banking-based services.



Sebagai Bank yang telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, Bank Riau Kepri selalu berkomitmen untuk meningkatkan kinerja yang berkelanjutan dan berkesinambungan, berkontribusi penuh dalam pembangunan di daerah, juga sebagai motor penggerak perekonomian guna mewujudkan kemudahan bagi nasabah melalui penyelarasan teknologi *Digital Banking* yang pada akhirnya akan menjadi stimulus untuk Bertransformasi Menjadi Lebih Unggul sehingga bisa menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

Waktu telah membuktikan ketangguhan Bank Riau Kepri untuk tetap berprestasi dan bertumbuh. Kami telah berhasil mengatasi berbagai tantangan, yang kami anggap sebagai bagian yang tidak tepisahkan dalam proses pertumbuhan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, menatap peluang yang membentang.

As a Bank that has taken root in the lives of the people of Riau and Riau Islands, Bank Riau Kepri has always been committed to improving sustainable and sustainable performance, contributing fully to development in the region, as well as driving the economy to create convenience for customers through alignment of Digital Banking technology in finally it will be a stimulus to transform into more superior so that it can become a host in its own area.

Time has proven the resilience of Bank Riau Kepri to keep on achieving and growing. We have managed to overcome various challenges, which we consider to be an inseparable part of the growth process to achieve better performance, staring at opportunities a head.

2018

Menyelaraskan Teknologi Digital Banking dan Bertransformasi Menjadi Lebih Unggul

Aligning Digital Banking Technology and Transforming to Be Better



2017

Akselerasi Kinerja Melalui Optimalisasi IT dan Peningkatan Proses Layanan

Performance Acceleration through IT Optimization and Services Process Improvement

Di tengah kondisi perekonomian Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang belum stabil, Alhamdulillah berkat kerja keras, *team work* dan soliditas seluruh jajaran perusahaan, Kami mampu melewati dan mengakhiri tahun buku 2017 dengan kinerja finansial yang baik.

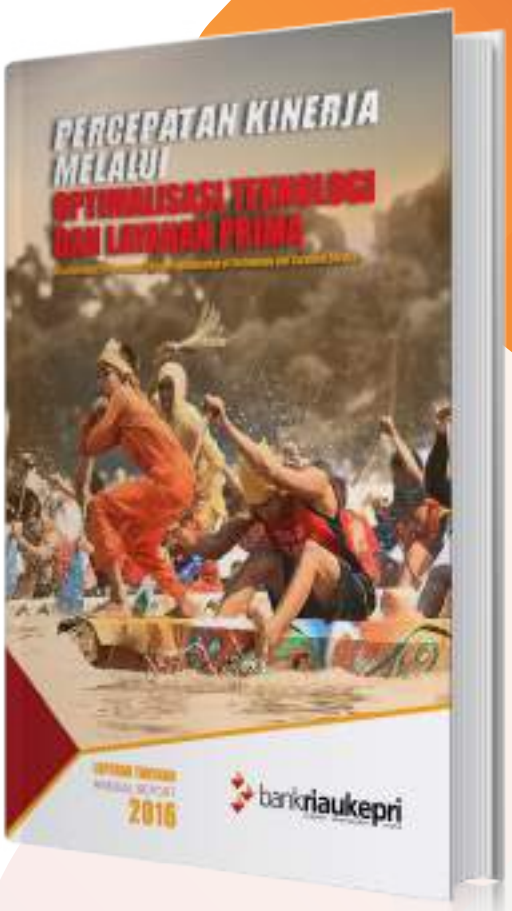
Tahun 2017 Kami canangkan sebagai tahun Akselerasi Kinerja melalui Optimalisasi Informasi Teknologi dan Peningkatan Proses Layanan. Untuk merealisasikan hal tersebut, serangkaian program dan aktifitas telah kami laksanakan, terutama kami fokuskan pada perbaikan sistem infomasi teknologi berbasis digital, perbaikan dan penyempurnaan produk dan layanan, serta peningkatan kualitas SDM yang berlandaskan tatanan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam rangka membangun kinerja prima yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan memberikan kepuasan layanan kepada masyarakat.

Kami yakin akan semakin unggul dalam persaingan dan memiliki kinerja keuangan dan operasional yang senantiasa tumbuh secara berkelanjutan. Kami optimis dapat secara konsisten berkontribusi positif bagi seluruh stakeholder, tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau namun juga pada kemajuan ekonomi nasional.

In the midst of the unstable economic conditions of Riau and Riau Islands Provinces, Praise be to God thanks for their hard work, teamwork and solidity of the entire level of the company, We are able to pass through and end the financial year of 2017 with remarkable financial performance.

We are presenting the year of 2017 as the Performance Acceleration through IT Optimization and Services Process Improvement. In order to realize that idea, we have been implemented series of programs and activities, especially we are focusing on digital-based technology information systems improvement, products and services improvement and enhancement, and human resources quality improvement based on the Good Corporate Governance (GCG) in order to build an excellent performance shall increasing stakeholders trust and providing service satisfaction to the community in the end.

We believe to excel in competition and having financial and operational performance which is growing sustainably. We are optimistic that we may consistently to contribute positively to the entire stakeholders, not just for the welfare of the community in Riau and Riau Islands Provinces however to the national economy progress.



2016

Percepatan Kinerja Melalui Optimalisasi Teknologi dan Layanan Prima

Accelerated Performance Through Optimization of Technology and Excellent Service

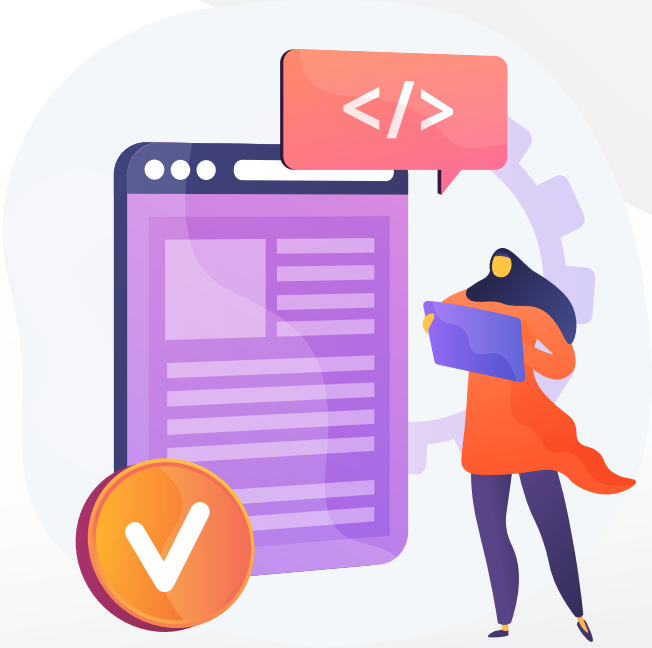
Sebagai Bank yang telah mengakar dalam kehidupan Masyarakat Riau dan Kepulauan Riau, Bank Riau Kepri terus berusaha menjalankan operasi bisnis dengan selalu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan serta menjaga kepercayaan nasabah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa industri keuangan memiliki persaingan yang semakin ketat, penuh tantangan dan tanggung jawab, untuk itu diperlukan budaya kerja yang produktif untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat meraih prestasi.

Untuk meningkatkan kinerja yang berkelanjutan, Manajemen Bank Riau Kepri menyadari bahwa kunci utamanya adalah pada Sumber Daya Manusia. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia di Bank Riau Kepri harus terus ditingkatkan sebagai upaya berkesinambungan untuk pengembangan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya guna menghadapi berbagai tantangan untuk menjadi pemenang. Mengambil filosofi Pacu Jalur, maka semangat dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya menjadi inspirasi kami di dalam meraih kesuksesan

As a Bank that has been rooted in the life of the People of Riau and Kepulauan Riau, Bank Riau Kepri continues to run business operations by always applying the principles of Good Corporate Governance, harmonious cooperation with stakeholders as well as maintaining customer confidence. We are fully aware that the financial industry has increasingly intense competition, full of challenges and responsibilities, for it needs a productive work culture to improve performance in order to achieve success.

To improve the sustainable performance, Bank Riau Kepri Management realizes that the main key is on Human Resources. Therefore, Human Resources at Bank Riau Kepri must be continuously improved as a continuous effort to develop the quality of human resources in the widest sense to face various challenges to be a winner. Taking the Pacu Jalur philosophy, then the spirit and cultural values contained in it becomes our inspiration in achieving success.

DAFTAR ISI
Table of Content



2	**TEMA DAN ARTI TEMA** *Theme and Explanation of Theme*
2	**KESINAMBUNGAN TEMA** *Continuity of Theme*
8	**DAFTAR ISI** *Table of Contents*
13	**SEKILAS TENTANG BANK RIAU KEPRI** *Overview of Bank Riau Kepri*
14	**JEJAK LANGKAH** *Milestones*
16	**KEUNGGULAN KAMI** *Our advantage*
18	**KILAS KINERJA** *Performance Highlights*
20	Pencapaian Kinerja Penting 2020 *2020 Important Performance Achievements*
21	Ikhtisar Data Keuangan Penting *Overview of Important Financial Data*
21	Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan *Financial Overview and Financial Ratios*
26	Ikhtisar Operasional *Operational Overview*
26	Informasi Harga Saham *Share Price Information*
27	Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*) *Suspension and/or Delisting of Shares*
27	Informasi Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi *Bond, Rate or Convertible Bond Information*
27	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya *Other Funding Sources Information*
28	Peristiwa Penting *Important Events*
41	Testimoni *Testimonial*
42	**PROFIL PERUSAHAAN** *Company Profile*
44	Identitas Perusahaan *Corporate Identity*
45	Brand Perusahaan *Corporate Brand*
46	Riwayat Singkat Perusahaan *Brief History of the Company*
47	Keterangan Perubahan Nama *Description of Name Change*
48	Bidang Usaha *Business Fields*
48	Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan *Business Activities According to Articles of Association and Executed*
49	Produk dan Jasa *Products and Services*
63	Peta Wilayah Usaha *Business Area Map*
64	Struktur Organisasi *Organizational structure*
66	Visi, Misi dan Budaya Perusahaan *Vision, Mission and Corporate Culture*
68	Penjelasan Misi *Explanation of Mission*
72	Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan *Company Objectives, Goals, and Strategies*
78	Sambutan Dewan Komisaris *Board of Commissioners Report*
89	Profil Dewan Komisaris *Board of Commissioners Profiles*
94	Sambutan Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board Report*
97	Sambutan Dewan Direksi *Board of Director Report*
98	Profil Dewan Pengawas Syariah *Profile of The Sharia Supervisory Board*
118	Profil Direksi *Board of Directors Profile*
125	Profil Pejabat Di Bawah Direksi *Profile of Officers Under The Board of Directors*
146	Lembar Pengesahan *Responsibility for the Annual Report*
148	Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan *Number of Employees Based on Position Level*
148	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan *Number of Employees Based on Education Level*

148 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Number of Employees Based on Employment Status

149 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Number of Employees Based on Age Range

149 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Number of Employees by Gender

149 Pengembangan Kompetensi Pegawai
Employee Competency Development

150 Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan
Competency Development Based on Position

153 Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Evaluation of the Implementation of Competency Development

154 Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

155 Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar
Composition of the 20 Largest Shareholders

155 Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih
Shareholders Composition of 5% or More

156 Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang Dari 5%
Composition of Community Shareholders Group Less Than 5%

156 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
Share Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors

156 Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi
List of Subsidiaries and/or Associated Entities

156 Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure

156 Kronologi Penerbitan Saham
Chronology of Shares Issuance

157 Kronologi Penerbitan Obligasi
The Chronology of Bond Issuance

157 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya
Chronology of Issuance and / or Listing Of Other Securities

157 Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Name and Address of Supporting Institutions and / or Professionals

159 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certifications

162 Alamat Kantor
Office address

169 Informasi yang Tersedia pada Website
Information Available on the Website

170 Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal
Education and/or training for the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit Unit

180 **ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERSEROAN**
Management Discussion and Analysis of the Company's Performance

182 Tinjauan Perekonomian
Economic Overview

182 Analisis Perekonomian Nasional
National Economic Analysis

184 Analisis Perekonomian Riau
National Economic Analysis

186 Analisis Perekonomian Kepulauan Riau
Kepulauan Riau Economic Analysis

191 Analisis Posisi Bank Riau Kepri Dalam Industri Perbankan
Analysis of the Position of Bank Riau Kepri in the Banking Industry

192 Tinjauan Operasional
Operational Review

192 Strategi Bank
Bank Strategy

192 Arah Kebijakan Bank
Bank Policy Direction

192 Program Transformasi BPD
BPD Transformation Program

195 Strategi Pengembangan Bisnis
Business Development Strategy

197 Aspek Pemasaran
Marketing Aspects

197 Strategi Pemasaran Tahun 2021
Marketing Strategy In 2021

198 Pangsa Pasar
Market Share

199 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operations Review Per Business Segment

200 Segmen Operasi
Operating Segments

214 Segmen Geografis
Geographical Segment

217 Tinjauan Keuangan
Financial Overview

217 Kinerja Keuangan
Financial performance

245 Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang
Ability to Pay Debt and Collectability of Accounts Receivable

249 Current Account Saving Account
Current Account Saving Account

249 Aset Produktif
Earning Asset

251 Kualitas Aset Produktif
Productive Asset Quality

254 Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko
Capital Structure and Risk Management Practices

309 Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal
Material Bonds Related to Capital Goods Investment

309 Investasi Barang Modal
Capital Goods Investment

310 Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Hutang/Modal
Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Acquisition and Debt/Capital Restructuring

311 Komitmen dan Kontinjensi
Commitments and Contingencies

313 Pencapaian Target dan Target Ke Depan
Achievement of Targets and Future Targets

320 Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts after the Date of the Accountant's Report

325 Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen
Policies, Announcements and Dividend Payment

326 Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)
Share Ownership Program by Employees and/or Management (ESOP / MSOP)

326 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Use of Proceeds from Public Offering

327 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Transaction Information Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

332 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya terhadap Perseroan
Amendments to the Prevailing Laws and their Impact on the Company

334 Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

340 Tingkat Kesehatan Bank
Health Level of the Bank

342 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

343 Aspek Perpajakan
Taxation Aspects

344 Larangan, Batasan dan/atau Hambatan Signifikan untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain dalam Suatu Kelompok Usaha
Significant Restrictions, Limits and/or Barriers to Provision of Funds Between Banks and Other Entities in a Business Group

346 **TATA KELOLA PERUSAHAAN**
Corporate Governance

348 Pencapaian Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Achievements in Implementation of Corporate Governance

349 Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Basic Implementation of Good Corporate Governance

350 Tujuan Penerapan Tata Kelola Yang Baik
Purpose of Implementing Good Governance

351 *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan
Roadmap of Corporate Governance

352 Tahapan Implementasi Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Implementation Stage

357 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance Structure and Mechanism

369 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Mechanism of Corporate Governance

384 Dewan Komisaris
Board of Commissioners

398 Rapat Dewan Komisaris
Meeting of The Board of Commissioners

411 Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board

415 Rapat Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Meeting

424 Direksi
Directors

465 Komite Audit
Audit Committee

475 Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

485 Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee

493 Sekretaris Perusahaan
Company Secretary

493 Divisi Internal Audit
Internal Audit Division

498 Akuntan Publik
Public Accountant

538 Manajemen Risiko
Risk Management

515 Sistem Pengendalian Intern Terkait Pengendalian Keuangan
Internal Control System Related To Financial Control

586 Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
Anti Money Laundering (APU) and Prevention of Terrorism Financing (PPT) Program

589 Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik
Provision of Funds for Social and/or Political Activities

589 Perkara Penting
Important Matters

590 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data

593 Program Anti Korupsi
Anti Corruption Program

602 Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi
Gratification Policy Socialization

602 *Whistleblowing System*
Whistleblowing System

603 Tata Kelola Unit Usaha Syariah
Sharia Business Unit Governance

621 *Buyback* Saham dan *Buyback* Obligasi
Buyback Shares and Buyback Bonds

622 Rencana Strategis Bank
Bank's Strategic Plan

622 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds

623 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
Transactions Containing Conflict of Interest

624 Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian
Number of Deviations (Internal Fraud) and Settlement Efforts

625 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
Transparency of Financial and Non-Financial Conditions

626 *Good Corporate Governance Assessment*
Good Corporate Governance Assessment

628 Praktik *Bad Corporate Governance*
Bad Corporate Governance Practice

629 Pengungkapan (*Disclosure*) Tata Kelola Remunerasi Bank
Disclosure of Bank Remuneration Governance

634 **TEKNOLOGI INFORMASI**
Information Technology

636 Kebijakan Dan Tata Kelola
Policy And Governance

637 Struktur Divisi Teknologi Informasi
Structure Of Information Technology Division

637 Profil Divisi Teknologi Informasi
Profile Of Information Technology Division

638 Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi
Development Strategy Plan Information Technology

638 Rencana Strategi Pengembangan
Development Strategy Plan

640 Inovasi Teknologi Informasi
Information Technology Innovation

642 Rencana Pengembangan
Expansion Plan

642 **SUMBER DAYA MANUSIA**
Human Resources

644 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia
Human Resource Management Development and Strategy

645 *Roadmap* Pengembangan SDM
HR Development Roadmap

645 Manajemen Sumber Daya Manusia
Human Resource Management

654 Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia
Human Resource Management Information System

655 Internalisasi Budaya
Internalization of Culture

657 Profil Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Human Resource Management Profile Division

659 Komposisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Composition Of Human Resource Management

659 Rencana Tahun 2022
Plan For 2022

662 **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**
Corporate Social Responsibility

664 Komitmen Pada Tanggung Jawab Sosial
Commitment To Social Responsibility

665 Visi Dan Misi CSR
CSR Vision And Mission

666 Dasar Kebijakan Pelaksanaan Csr
Policy Basic For Implementation Of Csr

666 Prinsip Pelaksanaan Csr
Csr Implementation Principles

676 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Hak Asasi Manusia
Corporate Social Responsibility Related To Human Rights

679 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Operasi Yang Wajar
Corporate Social Responsibility Related To Reasonable Operations

682 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Related To Community Social Development

686 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Lingkungan Hidup
Corporate Social Responsibility Related To The Environment

699 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Tanggung Jawab Kepada Konsumen
Corporate Social Responsibility Related to Consumer Responsibility

703 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan
Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

Referensi OJK
OJK Reference

Laporan Keuangan
Financial Statements





Pemegang Saham
Shareholders

Pemerintah Provinsi Riau 38,00% (seri A)

Riau Provincial Government 38.00% (series A)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 1,09% (seri A)

Riau Islands Provincial Government 1.09% (series A)

Pemerintah Kota/Kabupaten se Riau dan Kepri 60,64% (seri A)

City/Regency Governments in Riau and Riau Islands 60.64% (series A)

Koperasi Amanah Riau Kepri 0,27% (seri B)

Riau Kepri Trust Cooperative 0.27% (series B)

Segmen Usaha
Business Segments

Total Aset
Rp30,78 triliun
Total Assets
IDR 30.78 trillion

Produk dan Jasa
Products and Services

Konvensional (Produk Dana, Produk Kredit dan Layanan Konvensional)
Produk Syariah (Produk Dana, Produk Pembiayaan dan Layanan Syariah)

Conventional (Fund Products, Credit Products and Conventional Services)
Sharia Products (Fund Products, Financing Products and Sharia Services)

Jaringan Kantor
174 Jaringan Kantor
Office Network
174 Office Networks

JEJAK LANGKAH
Milestones

1966

01 April 1966

Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah Riau began with its status as a Government Owned Bank of Riau in accordance with Act no. 13 of 1962 regarding Regional Development Bank.

1975

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1975.

The establishment status of the Riau Regional Development Bank is adjusted to the Riau Provincial Regulation Level I No. 10 of 1975.

1986

Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

The establishment status of the Riau Regional Development Bank is adjusted to the Riau Provincial Regulation Level I No. 18 of 1986.

26 April 2010

Dilakukan perubahan nama PT Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang disingkat PT Bank Riau Kepri.

The name PT Bank Pembangunan Daerah Riau was changed to PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, abbreviated as PT Bank Riau Kepri.

22 Juli 2010

Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui keputusan No. AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tentang perubahan nama.

Approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-36484.AH.01.02 of 2010 regarding the name change.

2018

Bank Riau Kepri meluncurkan berbagai produk inovasi berbasiskan teknologi digital seperti uang elektronik (e-money), samsat online, pelayanan pajak daerah secara online dan dengan sistem host to host. Ini adalah upaya menyelaraskan teknologi digital banking untuk menjadikan Bank Riau Kepri sebagai bank yang unggul.

Bank Riau Kepri launched a variety of innovative products based on digital technologies such as e-money, samsat online, online local tax services and a host-to-host system. This is an effort to harmonize digital banking technology to make Bank Riau Kepri a superior bank.

28 Januari 2016

Peresmian kantor pusat dan Cabang Utama Bank Riau Kepri di Menara Dang Merdu, sebagai ikon pembangunan ekonomi Riau dan Kepri.

Inauguration of the head office and Main Branch of Bank Riau Kepri in Dang Merdu Tower, as an icon of Riau and Riau Islands' economic development

23 September 2010

Persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/59/ KEP.GBI/2010 tetang perubahan nama dari BPD Riau menjadi BPD Riau Kepri.

Approval of Bank Indonesia in the Bank Indonesia Governor Decree No.12/59/KEP.GBI/2010 regarding the name change from BPD Riau to BPD Riau Kepri.

Menuju Bank Umum Syariah Sebagaimana yang telah diamanatkan pada RUPSLB pada tanggal 22 April tahun 2019, bahwa Bank Riau Kepri akan berubah menjadi Bank Umum Syariah. Bank yang dalam aktivitas usahanya dilandaskan atas dasar prinsip syariah dan diyakini akan lebih diterima masyarakat Riau Kepri yang berbudaya melayu dengan mayoritas agama Islam.

As mandated at the EGMS on April 22, 2019, Bank Riau Kepri will turn into a Sharia Commercial Bank. Banks whose business activities are based on sharia principles and are believed to be more accepted by the people of Riau Kepri, who have a Malay culture with a majority Muslim religion.

Implementasi Konversi syariah

Siap untuk Konversi. Bank Riau Kepri telah melakukan pemenuhan kewajiban untuk terbitnya izin konversi menjadi Bank Umum Syariah

Implementation of Sharia Conversion

Ready for Conversion. Bank Riau Kepri has fulfilled its obligation to issue a conversion permit to become a Sharia Commercial Bank

2019

2020

2021

Menggesa Menuju Syariah Bank Riau Kepri berupaya untuk menggesa proses konversi menjadi Bank Umum Syariah dengan melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan regulator. Mulai dari Core Banking System IT Konversi, BPP dan SOP, Pengembangan SDM dan pelatihan perbankan syariah maupun melaksanakan asistensi dan audisi dengan regulator, dan juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah serta masyarakat.

Moving Towards Sharia *Bank Riau Kepri seeks to accelerate the conversion process into a Sharia Commercial Bank by completing the requirements that must be met according to regulatory requirements. Starting from the IT Conversion Core Banking System, BPP and SOP, HR development and Islamic banking training as well as conducting assistance and auditions with regulators, as well as providing outreach and education to customers and the public.*

K3 (KONVERSI-KINERJA-KULTUR) Dalam rangka visi pengembangan Bank Riau Kepri ke depan yang berkelanjutan, Direktur Utama Bank Riau Kepri mencanangkan Visi K3 (KONVERSI-KINERJA-KULTUR), Visi K3 menjadi haluan sekaligus energi baru dalam menghadapi tantangan dan persaingan yang semakin ketat, menuju era baru yang cemerlang, baik pada jangka pendek (proses konversi), jangka menengah (kinerja pasca konversi), maupun jangka panjang (kultur syariah yang produktif dan tercermin dalam pertumbuhan positif kinerja Bank).

K3 (CONVERSION-PERFORMANCE-CULTURE) *In the framework of a sustainable future development vision for Bank Riau Kepri, the President Director of Bank Riau Kepri launched the Vision of K3 (KONVERSI-KINERJA-KULTUR). both in the short term (conversion process), medium-term (post-conversion performance), and long term (productive sharia culture reflected in the positive growth of the Bank's performance).*

22 Juli 2003

Mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 5/30/KEP.DGS/2003.

Received the approval of the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia Number 5/30/KEP.DGS/2003.

13 Juni 2003

Perubahan badan hukum dari PD menjadi PT telah disahkan dalam RUPS

Change in the legal entity from Regional Company (PD) into Limited Liability Company (PT) has been approved in the GMS.

5 Mei 2003

Pengesahan perubahan status dari PD menjadi PT oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor: C-09851. HT.01.01. TH.2003

Ratification of the change in status from PD to PT by the Minister of Justice and Human Rights by Decree Number: C-09851. HT.01.01. TH.2003

26 Juni 2002

Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadiPerseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS.

The Riau Regional Development Bank was approved to change its status from a Regional Company (PD) to a Limited Liability Company (PT) according to the resolution of the GMS.

1992

Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadiPerseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS.

The establishment status of the Riau Regional Development Bank is adjusted to the Regional Regulation Number 14 of 1992 concerning the Riau Regional Development Bank pursuant to Act No. 7 of 1992 regarding Banking.

KEUNGGULAN KAMI
Our advantage

1

Memiliki Kualitas SDM yang Komitmen dan Tangguh di masa Pandemi Covid 19

Have Committed and Resilient Quality Human Resources during the COVID-19 Pandemic

2

Menjadi Revolusioner Bank menuju Bank Daerah Terbaik di Indonesia

Become a Revolutionary Bank towards the Best Regional Bank in Indonesia

3

Digitalisasi Bank

Bank Digitalization

4

Menjadi Bank Syariah Sebagai Amanah Pemegang Saham

Becoming a Sharia Bank as a Shareholder's Trust

5

Dukungan Masyarakat Menjadi Bank Syariah

Community Support to Become a Sharia Bank

6

***Awareness* terhadap Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Riau Kepri Cukup Tinggi**

Awareness of the Sharia Business Unit (UUS) of Bank Riau Kepri is quite high.

7

Bank menjadi *Top of Mind* nasabah untuk kategori bank konvensional dan bank utama yang digunakan nasabah untuk transaksi perbankan.

The bank becomes the customer's Top of Mind for the conventional bank category and the main bank customers use for banking transactions.

8

Bank mempunyai banyak jenis produk perbankan untuk bisa dijual kepada nasabah maupun *non* nasabah.

The bank has many types of banking products that can be sold to customers and non-customers.

9

Aspek permodalan Bank menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan yang stabil setiap tahunnya.

The Bank's capital aspect shows a positive trend with a steady increase every year.

10

Pelayanan

- **Peningkatan kompetensi Frontliner melalui tes E-Learning**
- **Peningkatan skill melalui role play baik yang live dan on line**
- **Coaching clinic bagi Frontliner dan Leader**
- **Pembuatan video standar layanan berbasis syariah**
- **Pemilihan Duta Layanan Bank Riau Kepri**
- **Service dan Culture Fair**

Pelayanan

- *Improvement of Frontliner competence through E-Learning test*
- *Skill enhancement through live and online role play*
- *Coaching clinic for Frontliners and Leaders*
- *Production of sharia-based service standard videos*
- *Selection of Service Ambassadors for Bank Riau Kepri*
- *Service and Culture Fair*

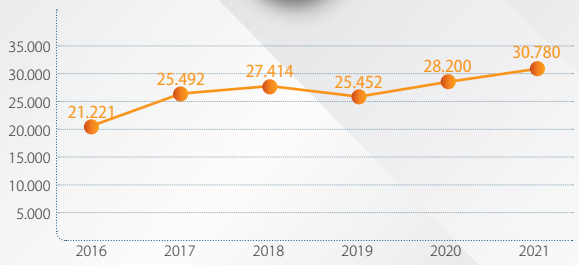

Selamat Hari Jadi
Selamat Hari Jadi



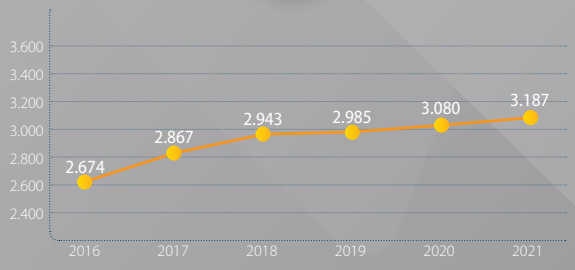
KILAS KINERJA
PERFORMANCE HIGHLIGHTS

PENCAPAIAN KINERJA PENTING TAHUN 2021
Important Performance Achievements In 2021

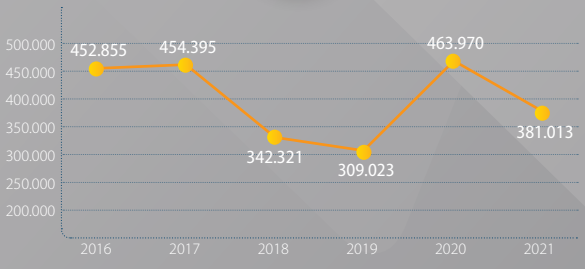
ASET
Assets



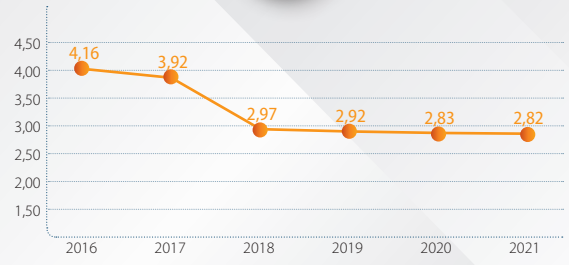
EKUITAS
Equity



LABA TAHUN BERJALAN
Profit For the Year



NPL GROSS
Gross Non-Perfoming Loan (NPL)



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Overview Of Important Financial Data

Ikhtisar Keuangan Dan Rasio Keuangan *Financial Overview And Financial Ratios*

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Overview and Financial Ratios Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017	2016	*Explanation*
LAPORAN POSISI KEUANGAN *FINANCIAL POSITION REPORT*							
ASET | *Asset*							
Kas	719.393.532.041	914.232.186.459	769.963.196.669	663.131.090.666	679.199.942.164	609.757.571.588	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2.042.746.021.054	1.496.657.126.730	1.692.218.365.713	1.328.102.368.521	1.585.767.692.362	1.223.605.422.380	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain – neto	88.760.460.917	121.445.736.792	73.992.763.120	63.944.187.789	40.613.851.084	67.967.483.161	*Current accounts with other banks - net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	3.334.381.279.547	616.985.351.609	1.058.796.986.898	2.673.919.872.221	2.858.959.627.464	2.129.833.984.354	*Placements with Bank Indonesia and other banks - net*
Efek-efek – neto	5.237.486.835.564	5.683.981.630.168	3.777.522.413.569	5.745.951.273.004	4.661.954.657.427	2.044.696.416.996	*Effects – net*
Kredit yang diberikan, Piutang dan Pembiayaan syariah - neto	18.388.304.138.811	18.433.640.599.171	17.395.620.348.553	16.168.452.515.901	14.938.055.055.641	14.406.608.293.187	*Loans, Receivables, and Sharia Financing - net*
Penyertaan saham, neto	1.555.783.335	1.555.783.335	1.555.783.335	1.555.783.335	1.555.783.335	1.555.783.335	*Investments in shares, net*
Aset tetap – neto	396.931.782.650	425.165.062.707	435.268.011.703	442.797.640.754	424.416.884.923	445.577.344.978	*Fixed assets - net*
Aset pajak tangguhan	32.099.204.792	33.214.581.626	27.963.897.068	62.947.048.515	61.909.372.998	34.226.426.890	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	538.026.741.803	473.087.722.475	219.211.857.224	263.470.626.552	240.116.627.955	257.110.916.109	*Other assets*
Jumlah Aset	30.779.685.780.515	28.199.965.781.072	25.452.113.623.852	27.414.272.407.258	25.492.549.495.353	21.220.939.642.979	***Total Assets***
LIABILITAS | *Liabilities*							
Liabilitas segera	667.015.299.353	769.525.236.968	504.651.221.098	388.901.289.538	617.162.791.309	598.600.377.330	*Current Liabilities*
Simpanan dari nasabah dan Dana Syirkah Temporer							*Deposits from customers and Temporary Syirkah Funds*
Jumlah Giro dan Wadiah	5.607.379.900.206	3.453.031.902.292	3.704.032.398.723	2.883.254.876.477	1.904.804.163.830	2.528.639.969.969	*Total Giro and Wadiah*
Jumlah Tabungan	7.449.292.829.276	6.352.385.268.653	6.052.373.970.981	5.518.607.249.357	4.859.216.185.323	4.475.889.156.285	*Total Savings*
Jumlah Deposito berjangka	12.559.059.956.121	12.337.227.232.379	10.180.645.277.133	8.562.392.644.424	9.756.325.658.874	5.044.545.644.626	*Total Time Deposits*
Jumlah simpanan, dana syrirkah	25.615.732.685.604	22.142.644.403.324	19.937.051.646.836	16.964.254.770.258	16.520.346.008.027	12.049.074.770.880	*Total savings, syirkah funds*
Jumlah simpanan dari bank lain	1.040.800.354.219	1.958.767.697.599	1.849.820.285.624	5.296.815.901.425	4.309.669.744.930	5.083.644.886.439	*Total deposits from other banks*
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		-	-	1.640.866.625.000	1.002.733.027.000	-	*Securities sold under a repurchase agreement*
Pinjaman yang diterima	151.442.499.737	113.909.104.169	81.077.709.702	70.084.573.594	77.808.774.999	622.104.329.779	*Loans received*
Utang pajak	32.036.137.593	41.546.514.105	21.677.093.848	37.917.672.052	25.934.796.206	55.963.400.945	*Tax debt*
Imbalan kerja	26.051.364.855	30.008.311.528	31.219.746.248	24.925.008.388	23.400.804.252	19.111.929.559	*Employee benefits*
Liabilitas lain-lain	59.448.707.344	63.956.619.625	41.323.026.115	47.699.476.667	48.789.506.847	117.980.394.263	*Other liabilities*
Jumlah Liabilitas	27.492.527.048.706	25.120.357.887.318	22.466.820.729.471	24.471.465.316.922	22.625.845.453.570	18.546.480.089.195	***Total Liabilities***
EKUITAS | *Equities*							
Modal saham							
Modal dasar - 34.000.000 saham Seri A dan 6.000.000 saham Seri B. Nilai nominal Rp100.000 per saham							*Authorized capital - 34,000,000 Series A shares and 6,000,000 Series B shares. Value of Rp. 100,000 per share*
Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.031.607 saham pada 31 Desember 2021 dan 11.004.607 saham pada 31 Desember 2020.	1.103.160.700.000	1.100.460.700.000	1.082.760.700.000	1.067.587.000.000	1.056.903.300.000	1.049.203.300.000	*Issued and fully paid-up capital was 11.031.607 shares on December 31, 2021and 11.004.607 shares on December 31, 2020.*

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Explanation
Tambahan modal disetor	4.085.300.525	4.785.300.525	19.785.300.525	11.935.300.524	7.085.300.524	9.785.300.524	*Additional paid-in capital*
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar untuk efek-efek tersedia untuk dijual	2.232.813.053	(687.391.990)	(2.479.860.563)	(7.788.293.266)	(1.356.492.417)	(5.919.367.847)	*Unrealized gain (loss) on changes in fair value for available- for-sale securities*
Saldo laba							*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	1.622.420.554.773	1.436.832.699.051	1.501.956.562.377	1.411.903.554.279	1.230.145.612.161	1.094.288.990.798	*Its use has been determined*
Belum ditentukan penggunaannya	455.259.363.458	538.216.586.168	383.270.192.042	459.169.528.798	573.926.321.515	527.101.330.309	*Its use has not been determined*
Jumlah Ekuitas	3.187.158.731.809	3.079.607.893.755	2.985.292.894.381	2.942.807.090.336	2.866.704.041.783	2.674.459.553.784	***Total Equity***
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	30.779.685.780.515	28.199.965.781.072	25.452.113.623.852	27.414.272.407.258	25.492.549.495.353	21.220.939.642.979	***Total Liabilities and Equities***
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN *STATEMENT OF PROFIT LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*							
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL							
Pendapatan bunga dan syariah							*Interest and sharia income*
Pendapatan bunga	1.781.784.319.588	2.047.932.048.466	2.239.945.488.883	2.213.893.705.175	2.318.891.568.799	2.291.484.325.051	*Interest income*
Pendapatan syariah	432.068.126.903	268.863.007.039	199.733.429.666	178.599.271.264	148.226.410.339	120.825.855.277	*Sharia income*
Jumlah pendapatan bunga, syariah	2.213.852.446.491	2.316.795.055.505	2.439.678.918.548	2.392.492.976.439	2.467.117.979.138	2.412.310.180.328	*Total interest income, sharia*
Beban bunga dan syariah							*Interest and sharia expenses*
Beban bunga	(768.749.403.220)	(879.843.243.876)	(1.076.305.751.673)	(1.019.435.377.742)	(1.145.323.521.478)	942.549.310.286	*Interest expense*
Beban syariah	(153.456.488.663)	(130.147.923.966)	(117.529.762.734)	(102.799.713.574)	(83.477.942.031)	57.292.344.631	*Sharia expense*
Provisi dan komisi	(243.677.558)	(1.162.303.427)	(1.481.337.593)	(1.547.721.410)	(1.580.598.626)	979.213.609	*Fees and commissions*
Jumlah beban bunga dan syariah	(922.449.569.440)	(1.011.153.471.269)	(1.195.316.851.999)	(1.123.782.812.726)	(1.230.382.062.135)	1.000.820.868.526	*Total interest and sharia expenses*
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah, neto	1.291.402.877.050	1.305.641.584.236	1.244.362.066.549	1.268.710.163.713	1.236.735.917.003	1.411.489.311.802	*Interest income and sharia income, net*
Pendapatan operasional lainnya	207.345.358.112	318.581.261.149	128.610.544.274	133.234.839.385	144.483.119.646	112.482.360.938	*Other operational income*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(35.018.680.750)	(44.672.647.185)	(41.522.059.698)	(35.697.070.073)	(14.710.573.366)	99.119.811.862	*Allowance for impairment losses on productive assets*
Beban operasional lainnya							*Other operating expenses*
Umum dan administrasi	(289.257.879.253)	(271.697.020.369)	(266.327.762.588)	(249.926.281.810)	(229.738.963.384)	248.134.311.580	*General and administration*
Tenaga kerja	(575.384.161.486)	(565.394.525.982)	(517.028.572.388)	(502.480.734.796)	(502.580.400.529)	430.456.125.122	*Labour*
Lainnya	(47.752.556.833)	(45.220.560.658)	(75.895.682.683)	(96.195.288.793)	(62.350.328.418)	126.151.087.733	*Others*
Jumlah beban operasional lainnya	(912.394.597.572)	(882.312.107.009)	(859.252.017.659)	(848.602.305.398)	(794.669.692.331)	804.741.524.435	*Total other operational expenses*
LABA (RUGI) OPERASIONAL	551.334.956.841	697.238.091.191	472.198.533.467	517.645.627.628	571.838.770.952	620.110.336.442	***Operational Profit (Loss)***
Pendapatan dan (beban) non-operasional							*Non-operational income and (expenses)*
Pendapatan non-operasional	12.428.426.821	6.515.013.570	18.801.172.474	18.284.503.919	38.674.104.559	12.815.191.666	***Non-operational income***
Beban non-operasional	(48.665.030.749)	(30.898.568.746)	(34.674.959.376)	(40.607.459.633)	(32.838.099.966)	(25.914.892.619)	*Non-operational expenses*
Jumlah pendapatan (beban) non-operasional	(36.236.603.928)	(24.383.555.176)	(15.873.786.902)	(22.322.955.714)	(5.836.004.593	(13.099.700.953)	*Total non-operational income (expense)*
LABA SEBELUM PAJAK	515.098.352.913	672.854.536.014	456.324.746.565	495.322.671.914	577.674.775.545	607.010.635.489	***PROFIT BEFORE TAX***

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017	2016	Explanation
BEBAN PAJAK - NETO	(134.084.914.867)	(208.884.896.710)	(147.301.501.387)	(153.000.889.980)	(123.279.920.250)	(154.155.230.945)	***TAX EXPENSES – NET***
LABA TAHUN BERJALAN	381.013.438.046	463.969.639.304	309.023.245.178	342.321.781.934	454.394.855.295	452.855.404.543	***CURRENT YEAR PROFIT***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN							*OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, bersih setelah pajak	2.920.205.043	1.792.468.573	5.308.432.703	(6.431.800.849)	4.562.875.430	(967.044.739)	*Items to be reclassified to profit or loss Gain (loss) from changes in the value of financial assets in the available-for-sale group, net after tax*
Penghasilan komprehensif lain	2.920.205.043	1.792.468.573	5.308.432.703	(6.431.800.849)	4.562.875.430	(967.044.739)	*Other comprehensive income*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	383.933.643.089	465.762.107.877	314.331.677.881	335.889.981.085	458.957.730.725	451.888.359.805	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME***
Laba bersih per saham	34.581	42.561	28.743	32.165	43.071	44.008	*Earnings per share*
LAPORAN ARUS KAS *CASH FLOW REPORT*							
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | *Cash Flow from Operational Activities*							
Penerimaan bunga dan syariah	2.194.214.083.829	2.278.853.513.949	2.458.952.394.279	2.389.481.264.438	2.468.756.993.360	2.414.323.337.071	*Interest and sharia received*
Pembayaran bunga, bagi hasil syariah	(936.799.662.988)	(1.012.330.495.560)	(1.191.426.680.126)	(1.138.143.356.792)	(1.219.748.558.566)	(1.497.978.594.999)	*Interest payments, sharia profit sharing*
Penerimaan operasional lainnya	113.045.775.367	294.369.247.695	73.714.861.591	55.402.313.560	83.770.490.229	(7.800.520.792)	*Other operational receipts*
Pembayaran beban umum dan administrasi	(241.611.754.644)	(198.496.639.198)	(208.963.234.823)	(226.225.833.331)	(185.953.742.550)	(226.702.272.531)	*Payment of general and administrative expenses*
Pembayaran beban tenaga kerja	(570.071.846.946)	(496.649.615.923)	(494.133.460.329)	(505.573.994.748)	(478.794.733.589)	(377.044.329.448)	*Payment of labor load*
Penerimaan (pembayaran) pendapatan (beban) non operasional bersih	(36.237.303.928)	(24.387.285.776)	(15.873.786.902)	(22.322.955.714)	5.836.004.593	(13.099.700.953)	*Receipt (payment) of net non-operational income (expense)*
Pembayaran pajak penghasilan	(144.733.252.417)	(197.311.409.024)	(165.239.714.173)	(141.393.587.961)	(152.421.327.000)	(138.933.306.000)	*Payment of income tax*
Arus kas sebelum perubahan aset operasi dan liabilitas operasi	377.806.038.274	644.047.316.162	457.030.379.519	411.223.849.453	521.445.126.477	152.764.612.347	*Cash flow before changes in operational assets and liabilities*
Penurunan (kenaikan) aset operasi							*Decrease (increase) in operating assets*
Surat berharga	451.142.646.856	(1.904.666.748.026)	1.973.737.292.138	(1.090.428.416.426)	(2.612.695.365.001)	(614.071.360.806)	*Securities*
Kredit yang diberikan	76.035.056.256	(1.082.692.897.802)	(1.268.689.892.350)	(1.266.094.530.333)	(546.157.335.820)	(395.629.846.002)	*Credit given*
Penyertaan Saham	100.000.000						*Share Participation*
Aset lain-lain	(49.728.809.151)	(221.880.915.732)	185.881.506.411	115.247.479.391	168.396.231.426	71.639.745.980	*Other assets*
(Penurunan) kenaikan liabilitas operasi							*Decrease (increase) in operating liabilities*
Simpanan dari nasabah	3.473.088.282.279	2.205.592.756.488	2.972.796.876.578	443.908.762.231	4.471.271.237.147	(1.046.267.560.505)	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	(917.967.343.380)	108.947.411.975	(3.446.995.615.801)	987.146.156.495	(773.975.141.509)	2.827.779.749.543	*Deposits from other banks*
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali		-	(1.640.866.625.000)	6 38.133.598.000	1.002.733.027.000		*Securities sold under a repurchase agreement*
Liabilitas segera	(57.530.672.547)	191.812.315.662	112.960.618.118	(188.401.772.901)	2.584.825.645	(487.851.194.321)	*Current liabilities*
Utang pajak	1.623.570.088	3.239.127.805	(130.419.044.204)	(127.098.433.905)	(182.619.878.989)	(121.559.374.549)	*Tax debt*
Liabilitas lain-lain	(34.903.792.216)	(8.586.152.738)	(31.305.852.999)	(24.712.947.767)	(88.304.098.294)	43.971.177.465	*Other liabilities*
Jumlah	2.941.858.938.186	(708.235.102.369)	(1.272.900.737.109)	(512.300.105.215)	1.441.233.501.604	278.011.336.804	*Total*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	3.319.664.976.460	(64.187.786.207)	(815.870.357.590)	(101.076.255.762)	1.962.678.628.081	430.775.949.152	***Net cash obtained from (used for) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | *Cash Flow From Investing Activities*							
Pembelian aset tetap	(23.857.477.082)	(21.842.593.963)	(36.403.111.479)	(36.403.111.479)	(16.655.479.984)	(18.636.810.393)	*Purchase of fixed assets*

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017	2016	*Explanation*
Penjualan aset tetap, bersih	700.000	3.730.600	-	-	-	(2.384.028.696)	*Sale of fixed assets, net*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(23.856.777.082)	(21.838.863.363)	(36.403.111.479)	(48.493.441.212)	(16.655.479.984)	(21.020.839.089)	***Net cash obtained from (used for) investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | *Cash Flow From Funding Activities*							
Pinjaman yang diterima	37.533.395.568	32.831.394.467	10.993.136.108	(7.724.201.405)	(544.295.554.780)	258.874.751.797	*Loans received*
Pembayaran dividen	(278.381.783.582)	(185.413.947.107)	(205.393.069.160)	(275.320.632.532)	(271.713.242.726)	(178.798.869.470)	*Dividend payment*
Koreksi Saldo Laba	(1.021.452)						*Dividend payment*
Koreksi CKPN penerapan PSAK 71	-	(188.733.161.397)	-	-	-	-	*Correction of CKPN application of PSAK 71*
Program kemitraan dan bina lingkungan	(21.000.000.000)	(21.000.000.000)	(21.000.000.000)	(18.362.762.967)	(1.637.699.000)	(21.000.000.000)	*Partnerships and community development programs*
Setoran modal saham	2.700.000.000	17.700.000.000	15.173.700.000	10.683.700.000	7.700.000.000	-	*Share capital depost*
Tambahan modal disetor	(700.000.000)	(15.000.000.000)	7.850.000.001	4.850.000.000	(2.700.000.000)	7.700.000.000	*Additional paid-in capital*
Cadangan umum - Dana Pembinaan Kemitraan		-	(46.875.704.676)	-	-	-	*General reserves – Partnership Development Fund*
Dividen tunai		-	(323.700.000)	-	-	-	*Cash dividends*
Dividen saham		-	(42.277.100.000)	-	-	-	*Share dividends*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(259.849.409.467)	(359.615.714.036)	(281.852.737.728)	(285.873.896.904)	(812.646.496.506)	66.775.882.327	***Net increase (decrease) in cash and cash equivalents***
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	3.035.958.789.911	(445.642.363.606)	(1.134.126.206.797)	(435.443.593.878)	1.133.376.651.591	476.530.992.390	***Net cash obtained from (used for) financing activities***
Kas dan setara kas awal tahun	3.149.328.948.794	3.594.971.312.400	4.729.097.519.197	5.164.541.113.074	1.133.376.651.591	3.554.633.469.094	***Cash and cash equivalents at the beginning of the year***
Kas dan setara kas akhir tahun	6.185.287.738.706	3.149.328.948.794	3.594.971.312.400	4.729.097.519.197	5.164.541.113.074	4.031.164.461.484	***Cash and cash equivalents at the end of the year***
RASIO KEUANGAN (%) | *FINANCIAL RATIO (%)*							
Rasio Kinerja | *Performance Ratio*							
PERMODALAN							***CAPITAL***
KPMM	21,07	20,77	21,01	20,35	22,43	18,39	*KPMM*
AKTIVA PRODUKTIF							***Productive Assets***
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,77	1,96	2,41	2,22	2,72	3,38	*CKPN of financial assets against productive assets*
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	1,68	1,98	2,25	2,08	2,72	3,64	*CKPN of financial assets against productive assets*
NPL (Gross)	2,82	2,83	2,92	2,97	3,92	4,16	*NPL (Gross)*
NPL Netto	0,88	1,01	0,27	0,19	0,09	0,12	*NPL Net*
NPF (Gross)	1,21	2,29	2,84	3,72	5,05	7,56	*NPF (Gross)*
NPF Netto	0,24	0,36	0,19	0,32	0,10	0,45	*NPF Net*
RENTABILITAS							***Profitability***
Laba Terhadap Asset (ROA)	1,93	2,54	1,74	1,97	2,30	2,74	*Return on Assets (ROA)*
Laba Terhadap Modal (ROE)	12,49	15,94	10,72	13,08	18,68	23,36	*Return on Equity (ROE)*
Pendapatan Bunga Bersih Terhadap Aktiva Produktif (NIM)	4,64	5,32	5,42	5,81	5,48	7,15	*Net Interest Income against Earning Assets (NIM)*
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	77,23	73,54	81,61	79,58	78,10	75,44	*Operational Costs against Operational Income (BOPO)*

Uraian	2021	2020	2019	2018	2017	2016	*Explanation*
Cost to Income Ratio (CIR)	63,87	61,48	63,34				*Cost to Income Ratio (CIR)*
LIKUIDITAS							***Liquidity***
LDR	73,72	85,63	89,70	98,05	94,10	125,19	*LDR*
CASA	50,97	44,28	48,94	49,53	40,94	58,13	*CASA*
FDR	90.59	78,09	99,60	82,21	71,83	97,86	*FDR*
Kepatuhan | *Compliance*							
Persentase pelanggaran BMPK							*Percentage of LLL violations*
Pihak terkait		-	-	-	-	-	*Related parties*
Pihak Tidak Terkait		-	-	-	-	-	*Unrelated parties*
Persentase pelampauan BMPK							*Percentage of BMPK excess*
Pihak terkait		-	-	-	-	-	*Related parties*
Pihak Tidak Terkait		-	-	-	-	-	*Unrelated parties*
Giro Wajib Minimum (GWM)							*Minimum Statutory Reserves (GWM)*
Konvensional							*Conventional*
GWM Utama Rupiah	8,93	6,50	7,89	7,08	7,24	7,96	*Main Statutory Reserves for Rupiah*
GWM Valuta asing	5,96	30,34	26,00	14,55	27,37	83,85	*Foreign exchange reserve requirement*
Syariah							*Sharia*
GWM Utama Rupiah	4,07	4,05	113	112	-	-	*Main Statutory Reserves for Rupiah*
GWM Valuta asing		-	-	-	-	-	*Foreign exchange reserve requirement*
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,98	2,29	0,55	0,57	0,47	3,52	*Overall Net Open Position (NOP)*

Ikhtisar Operasional

Operational Overview

Tabel Ikhtisar Operasional
Operational Overview Tables

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Keterangan	2021	2020	2019	2018	2017	2016	*Description*
Ikhtisar Kinerja | *Performance Overview*							
Dana Pihak Ketiga *Third-party Funds*							
Giro	5.607.380	3.453.032	3.704.032	2.883.255	7.059.537	2.479.210	*Current Accounts*
Tabungan	7.449.293	6.352.385	6.052.374	5.518.607	3.907.701	4.050.095	*Savings*
Deposito Berjangka	12.559.060	12.337.227	10.180.645	8.562.392	5.290.408	4.509.294	*Time deposit*
Total DPK	25.615.733	22.142.644	19.937.051	16.964.254	16.257.646	11.038.599	*Total DPK*
Penyaluran Kredit *Credit Distribution*							
Kredit Konsumer	14.755.885	14.972.124	14.263.996	11.846.531	9.892.700	11.607.727	*Consumer Credit*
Kredit Produktif	4.129.029	3.988.825	3.620.073	4.786.102	2.432.848	2.487.574	*Productive Credit*
Total Kredit	18.884.914	18.960.949	17.884.069	16.632.633	12.325.548	14.095.301	*Total Credit*
Ikhtisar Kinerja Unit Usaha Syariah | *Sharia Business Unit Performance Overview*							
Dana Pihak Ketiga	5.540.047	3.506.499	2.227.688	2.141.761	669.645	1.010.475	*Funding Products*
Penyaluran Pembiayaan	5.018.556	2.738.199	2.159.765	1.700.457	830.625	988.823	*Financing Products*

Informasi Harga Saham

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Sedangkan informasi modal saham selama tiga tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

Share Price Information

As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri has not yet become a company that has listed its shares on the stock exchange. Thus, there is no information on stock prices, stock market capitalization, and stock trading volume. Meanwhile, share capital information for the last three years is presented as follows:

Tabel Harga Saham
Share Price Table

(dalam Rupiah) | *(in Rupiahs)*

Uraian *Explanation*	2021	2020	2019
Modal dasar - 34.000.000 saham Seri A dan 6.000.000 saham Seri B. Nilai nominal Rp100.000 per saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.031.607 saham pada 31 Desember 2021 dan 11.004.607 saham pada 31 Desember 2020. *Authorized capital - 34,000,000 Series A shares and 6,000,000 Series B shares. Par value Rp100,000 per share Issued and fully paid-up capital was The issued and fully paid-up capital is 11,031,607 shares on December 31, 2021 and 11,004,607 shares on December 31, 2020.*	1.103.160.700.000	1.100.460.700.000	1.082.760.700.000



Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) Dan/Atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri belum mencatatkan sahamnya di bursa efek dengan demikian Perusahaan tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting).

Informasi obligasi, sukuk, dan/atau obligasi konversi

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri tidak menerbitkan obligasi/sukuk/obligasi Konversi, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai obligasi/ sukuk/obligasi Konversi.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri tidak memiliki sumber pendanaan yang berasal dari efek lainnya, dengan demikian tidak terdapat informasi mengenai sumber pendanaan lainnya.

Termination Of Action While Trading Shares (Suspension) And/Or Delisting Shares

As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri has not listed its shares on the stock exchange, thus the Company has never been subject to sanctions for temporarily suspending share trading (suspension) and/or delisting shares (delisting).

Information On Bonds, Rates, And/Or Conversion Bonds

As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri has not issued bonds/sukuk/convertible bonds, thus there is no information regarding bonds/sukuk/convertible bonds.

Information On Other Sources Of Funding

As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri does not have sources of funding originating from other securities, thus there is no information regarding other sources of funding.

PERISTIWA PENTING
Important Event

JANUARI | *JANUARY*

January 14-15, 2021 **14-15 Januari 2021**



Business Meeting 2021 "Implementasi Konversi Bank Umum Syariah dan Optimalisasi Layanan Digital"

Business Meeting 2021 "Implementasi Converse Bank Umum Syariah dan Optimalization Layanan Digital"

January 18, 2021 **18 Januari 2021**



Penyerahan CSR Bank Riau Kepri berupa 7 (tujuh) unit kendaraan operasional angkutan sampah 3 roda kepada Kabupaten Indragiri Hilir

Submission of Bank Riau Kepri CSR in the form of 7 (seven) units of 3-wheel waste transportation operational vehicles to Indragiri Hilir Regency

January 20, 2021 **20 Januari 2021**



Penandatanganan Nota Kesapahaman dan Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Riau Kepri dengan Universitas Muhammadiyah Riau

The signing of the Memorandum of Understanding and Cooperation Agreement between PT. Bank Riau Kepri with Muhammadiyah University of Riau



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Jasa Perbankan bersama Universitas Islam Riau

Signing of Cooperation Agreement on Banking Services with Riau Islamic University



Peresmian Relokasi Kantor Kas Bank Riau Kepri di Universitas Lancang Kuning

Inauguration of the Relocation of the Bank Riau Kepri Cash Office at Lancang Kuning University

Februari | *February*



Peresmian Kantor Kas Bank Riau Kepri di Kantor Walikota Pekanbaru Tenayan Raya oleh Walikota Pekanbaru

Inauguration of the Riau Kepri Bank Cash Office at the Pekanbaru Mayor's Office Tenayan Raya by the Mayor of Pekanbaru

February 01, 2021 **01 Februari 2021**



Peresmian Kantor Kas Bank Riau Kepri di Kantor Walikota Pekanbaru Tenayan Raya oleh Walikota Pekanbaru

Inauguration of the Riau Kepri Bank Cash Office at the Pekanbaru Mayor's Office Tenayan Raya by the Mayor of Pekanbaru

February 26, 2021 **26 Februari 2021**



Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Tahun 2021

Organizing the 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

Maret | *March*

March 19, 2021 **19 Maret 2021**



Penyerahan Bantuan Kemitraan Bank Riau Kepri berupa 2 (dua) Unit Bin Sampah kepada Pemerintah Kota Dumai

Submission of Bank Riau Kepri Partnership Assistance in the form of 2 (two) Garbage Bin Units to the Dumai City Government

March 23, 2021 **23 Maret 2021**



Penandatanganan Kerjasama Pembayaran Samsat Elektronik Provinsi Riau oleh Bank Riau Kepri dan Tim Pembina Samsat Provinsi Riau

The signing of the Riau Province Electronic Samsat Payment Cooperation by Bank Riau Kepri and the Riau Province Samsat Development Team

March 24, 2021 **24 Maret 2021**



Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah pada Nasabah non Muslim di daerah Kota Tanjung Pinang

Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah pada Nasabah non Muslim di daerah Kota Tanjung Pinang

March 24, 2021 **24 Maret 2021**



Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah pada Nasabah non Muslim di daerah Kota Batam

Socialization of the conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank to non-Muslim customers in the Batam City area

March 29, 2021

29 Maret 2021



Penyerahan Piagam Wakif Kolektif Wakaf Uang kepada Bank Riau Kepri

Submission of the Cash Waqf Collective Wakif Charter to Bank Riau Kepri

April | *April*

April 08, 2021

08 April 2021



Training of Trainer Islamic Banking for Executive (Overview)

Training of Trainer Islamic Banking for Executive (Overview)

April 11, 2021

11 April 2021



Gowes Santai karyawan/ti dalam memeriahkan Hari Jadi Bank Riau Kepri ke 55

Gowes Santa employees/ti in celebrating the 55th Anniversary of Bank Riau Kepri

April 12, 2021

12 April 2021



Vaksinasi Karyawan/ti Bank Riau Kepri dalam rangka meminimalisir penularan Covid-19

Vaccination of employees of Bank Riau Kepri in order to minimize the transmission of Covid-19

April16, 2021

16 April 2021



Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah kepada Nasabah non Muslim Cabang Selat Panjang

Socialization of the conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank to non-Muslim customers of the Selat Panjang Branch

April 22, 2021

22 April 2021



Penyerahan Piagam Wakif Kolektif Wakaf Uang kepada Bank Riau Kepri

Submission of the Cash Waqf Collective Wakif Charter to Bank Riau Kepri

April 23, 2021 | **23 April 2021**



Audiensi Bank Riau Kepri bersama Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin terkait Dukungan Konversi Bank Riau Kepri

Audience of Bank Riau Kepri with Vice President of the Republic of Indonesia KH Ma'ruf Amin regarding Conversion Support for Bank Riau Kepri

April 30, 2021 | **30 April 2021**



Bank Riau Kepri resmi menyampaikan seluruh Dokumen Perizinan ke DPPS OJK Pusat (softcopy) dan secara langsung ke OJK Riau (hardcopy)

Bank Riau Kepri officially submits all Licensing Documents to the Central OJK DPPS (softcopy) and directly to OJK Riau (hardcopy)

Mei | *May*

May 05, 2021 | **05 Mei 2021**



Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama tentang pelayanan pajak daerah Pemerintah Kota Dumai

Signing of the Collective Agreement and Cooperation Agreement on local tax services for the Dumai City Government

May 10, 2021

10 Mei 2021



Vaksinasi Covid-19 tahap II karyawan/ti Bank Riau Kepri

Covid-19 vaccination phase II for employees of Bank Riau Kepri

May 27, 2021

27 Mei 2021



Serahterima Program Kemitraan CSR Bank Riau Kepri berupa Bangunan Tugu Bismillah

Juni | *June*

June15, 2021

15 Juni 2021



Bank Riau Kepri serahkan bantuan berupa mesin *huller* kepada Kelompok Tani di Provinsi Riau

Bank Riau Kepri handed over assistance in the form of huller machines to Farmers Groups in Riau Province

June 18, 2021

18 Juni 2021



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) 2021

2020 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) and 2021 Ordinary Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

June 30, 2021

30 Juni 2021



Peletakan batu pertama, program CSR pembangunan ruang serba guna

Groundbreaking, CSR program for multi-purpose room development

Juli | *July*

July 16, 2021

16 Juli 2021



Penandatanganan MoU Jasa Layanan Perbankan bersama Kabupaten Indragiri Hulu

Signing of MoU on Banking Services with Indragiri Hulu Regency

Juli 16, 2021 **16 Juli 2021**



Program Kemitraan Bank Riau Kepri di bidang pendidikan berupa bantuan rehab asrama dan biaya pendidikan sekolah

Bank Riau Kepri Partnership Program in the field of education in the form of dormitory rehabilitation assistance and school education costs

Juli 23, 2021 **23 Juli 2021**



Penandatanganan MoU Jasa Layanan Perbankan antara Bank Riau Kepri tengan Pemerintah Kabupaten Siak

Signing of the MoU on Banking Services between Bank Riau Kepri and the Siak Regency Government

Agustus | *August*

August 20, 2021 **20 Agustus 2021**



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Riau Kepri Bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentang Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro dengan Subsidi Bunga/Margin

Signing of Memorandum of Understanding between Bank Riau Kepri and the Kepulauan Riau Provincial Government regarding Micro Business Credit/Financing with Interest/Margin Subsidy

August 25, 2021 **25 Agustus 2021**



HAPERNAS 2021, Akad Massal Debitur KPR FLPP Bank Riau Kepri

HAPERNAS 2021, Mass Contract of FLPP Mortgage Debturs Bank Riau Kepri

August 31, 2021 **31 Agustus 2021**



Penyerahan bantuan Pemerintah Provinsi Riau bagi pelaku usaha mikro dari APBD tahun 2021 melalui Bank Riau Kepri

Submission of Riau Provincial Government assistance for micro business actors from the 2021 APBD through Bank Riau Kepri

August 31, 2021 **31 Agustus 2021**



Launching fitur QRIS BRK pada Aplikasi BRK Mobile Bank Riau Kepri

Launching the QRIS BRK feature on the BRK Mobile Application for Bank Riau Kepri

September 01, 2021 **01 September 2021**



Launching aplikasi e-money Bank Riau Kepri untuk *retribution* parkir Kota Dumai

Launched Bank Riau Kepri e-money application for Dumai City parking fees

September 13, 2021 **13 September 2021**



Penandatanganan MoU Penggunaan Jasa Layanan Perbankan antara Bank Riau Kepri dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang

Signing of the MoU on the Use of Banking Services between Bank Riau Kepri and the Tanjung Pinang City Government

September 14, 2021 **14 September 2021**



Penandatanganan MoU Penggunaan Jasa Layanan Perbankan antara Bank Riau Kepri dan Pemerintah Kabupaten Bintan

Signing of the MoU on the Use of Banking Services between Bank Riau Kepri and the Government of Bintan Regency

September 16, 2021 **16 September 2021**



Penandatanganan MoU Penggunaan Jasa Layanan Perbankan antara Bank Riau Kepri dan Pemerintah Kabupaten Natuna

The signing of the MoU on the Use of Banking Services between Bank Riau Kepri and the Natuna Regency Government

September 23, 2021 **23 September 2021**



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas *Customisation* BSI Hasanah Card dengan Bank Riau kepri

Signing of the Cooperation Agreement for the Utilization of the BSI Hasanah Card Customization Facility with Bank Riau Kepri

September 27, 2021 **27 September 2021**



Penandatanganan MoU Penggunaan Jasa Layanan Perbankan antara Bank Riau Kepri dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Signing of the MoU on the Use of Banking Services between Bank Riau Kepri and the Meranti Islands Regency Government

Oktober | *October*

October 11, 2021 **11 Oktober 2021**



Launching Program Undian Bank Riau Kepri Bedelau Periode II

Launching of Bank Riau Kepri Bedelau Lottery Program Period II

October 12, 2021 **12 Oktober 2021**



Peletakan batu pertama Program CSR Bank Riau Kepri berupa pembangunan ruang kelas belajar Pondok Pesantren Darul Hadits Sultan Yahya

Laying the first stone of the Bank Riau Kepri CSR Program in the form of the construction of a class room for the Darul Hadith Islamic Boarding School Sultan Yahya

October 18, 2021 **18 Oktober 2021**



Peletakan batu pertama, Program CSR pembangunan Mushollah Ar-Rasyid Selensen Point

Laying the first stone, CSR Program for the construction of the Ar-Rasyid Selensen Point Mosque

October 29, 2021 **29 Oktober 2021**



Program CSR Bank Riau Kepri berupa peningkatan dan pengembangan UMKM Kota Tanjung Pinang kepada 479 pelaku usaha di 6 Kelurahan

Bank Riau Kepri CSR program in the form of improvement and development of MSMEs in Tanjung Pinang City to 479 business actors in 6 Kelurahan

November | *November*

November 5, 2021 **5 November 2021**



Asistensi bersama Direktorat Pengaturan dan Perizinan Syariah (DPPS) dan OJK Perwakilan Riau

Assistance with the Directorate of Sharia Licensing and Regulation (DPPS) and OJK Riau Representative

November 15, 2021 **15 November 2021**



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2021

2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders

November 15, 2021 | **15 November 2021**



Peresmian Ruang Serba Guna, Program CSR Bank Riau Kepri berupa pembangunan ruang serba guna di lt.3 STP Riau

Inauguration of the Multipurpose Room, Bank Riau Kepri CSR Program in the form of building a multi-purpose room on the 3rd floor of STP Riau

November 15, 2021 | **15 November 2021**



Pelaksanaan simulasi dan praktek bank mini BRK Syariah dalam rangka menguji kehandalan sistem dan keahlian karyawan sebagai persiapan menuju Bank Umum Syariah

Implementation of BRK Syariah mini bank simulation and practice in order to test system reliability and employee expertise in preparation for Sharia Commercial Bank

November 15, 2021 | **23-29 November 2021**



Kunjungan DPPS OJK Pusat dan OJK Riau dalam rangka Pemeriksaan khusus persiapan IT dan SDM terkait konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah

The visit of the Central OJK DPPS and Riau OJK in the context of a special examination of IT and HR preparation related to the conversion of Riau Kepri Bank into a Sharia Commercial Bank

November 29, 2021 | **29 November 2021**



Kunjungan DPPS OJK Pusat dan OJK Riau dalam rangka Pemeriksaan khusus persiapan IT dan SDM terkait konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah

The visit of the Central OJK DPPS and Riau OJK in the context of a special examination of IT and HR preparation related to the conversion of Riau Kepri Bank into a Sharia Commercial Bank

Desember | *December*

December 15, 2021 | **15 Desember 2021**



Penandatanganan perjanjian kerjasama Bank Riau Kepri bersama Real Estate Indonesia (REI) dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah

Signing of the cooperation agreement between Bank Riau Kepri and Real Estate Indonesia (REI) in the distribution of Home Ownership Loans

December 17, 2021 | **17 Desember 2021**



Program CSR Bank Riau Kepri berupa bantuan iuran jaminan sosial ketenaga kerjaan

Bank Riau Kepri CSR program in the form of employment social security contributions

December 17, 2021

17 Desember 2021



Program CSR Bank Riau Kepri berupa pembangunan rumah imam Masjid Nurul Imam

Bank Riau Kepri's CSR program in the form of building a house for the imam of the Nurul Imam Mosque

December 20, 2021

20 Desember 2021



Pelaksanaan persentasi, klarifikasi dan wawancara terhadap tim konversi, calon pihak utama, calon Dewan pengawas syariah pada kantor OJK Provinsi Riau

Implementation of presentations, classifications and interviews with the conversion team, prospective main parties, candidates for the sharia supervisory board at the Riau Province OJK office

December 28, 2021

28 Desember 2021



Dalam rangka perubahan kegiatan usaha Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah, segenap Insan Bank Riau Kepri lakukan penandatanganan Komitmen Syariah

In the context of changing the business activities of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank, all Bank Riau Kepri personnel signed the Sharia Commitment

TESTIMONI
Testimonial



Nama | *Name*:
Andini Leona Suhardi

keterangan | *description*:
Guru SMK Kansai Jl. Damai Ujung No.120 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru
Kansai Vocational High School Teacher Jl. Damai Ujung No.120 Delima Village, Handsome District, Pekanbaru

Alamat | *Address*:
Jl hassanudin RT 002 RW 004 Pekanbaru

Narasi | *Narrative*:
Menabung di Bank Riau Kepri sejak usia saya sekolah sampai menjadi Guru SMK dan saya juga tidak lupa mengajak siswa/I saya untuk menabung di Bank Riau Kepri, menabung aman dan tentunya mudah, fasilitas yang sangat lengkap dan tidak kalah dengan Bank Konvensional pada umumnya, semoga Bank Riau Kepri semakin maju dan semakin terdepan menjadi Bank Riau Kepri Syariah.
Saving at Bank Riau Kepri since I was in school until I became a SMK teacher and I also don't forget to invite my students to save at Bank Riau Kepri, saving is safe and of course easy, the facilities are very complete and not inferior to conventional banks in general, hopefully Bank Riau Kepri is progressing and is getting ahead of becoming Bank Riau Kepri Syariah.



Nama | *Name*:
Serly Serly Novianti

Keterangan | *description*:
Nasabah Prioritas
Priority Customers

Alamat | *Address*:
Jl. Tengku Bey, komp. Maya Sejahtera Blok.A.22. Simpang Tiga

Narasi | *Narrative*:
Saya merasa nyaman dan selalu dilayani dengan baik oleh petugas layanan prioritas serta stafnya, jika ada keluhan sangat cepat di tanggapi dan dilayani dan saya sangat senang sekali menjadi nasabah BRK Prioritas. Terimakasih.
I feel comfortable and always well served by the priority service officer and his staff, if there is a complaint it is very quickly responded and served and I am very happy to be a BRK Prioritas customer. Thank you.



Nama | *Name*:
Agustia Wijaya

Keterangan | *description*:
General Manager Fakar Laser Cutting
General Manager of Fakar Laser Cutting

Alamat | *Address*:
Jl. Danau Toba Arengka Pekanbaru

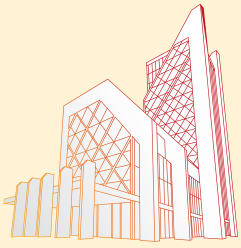
Narasi | *Narrative*:
Bermitra dengan Bank Riau Kepri untuk pengelolaan jasa keuangan termasuk pembayaran gaji, alhamdulilah selama ini layanan yang diberikan sangat luar biasa oleh Bank Riau Kepri yaitu layanan pembayaran Qris Bank Riau, merupakan layanan terbaru sehingga konsumen kami tidak dikenakan biaya transfer antar bank, selain itu kami mempercayakan pengelolaan keuangan dan gaji seluruh karyawan kami kepada Bank Riau Kepri, terimakasih Bank Riau Kepri atas pelayanan yang sangat luar biasa dan istimewa buat kami sebagai partner baru untuk Bank Riau Kepri, semoga kerjasama ini berlangsung terus dan sukses untuk Bank Riau Kepri yang akan menuju syariah, Bank Riau Syariah Jaya!!
Partnering with Bank Riau Kepri for the management of financial services including payment of salaries, thank God, so far the services provided by Bank Riau Kepri are extraordinary, namely the Qris Bank Riau payment service, which is the latest service so that our customers are not subject to interbank transfer fees, besides that we entrust financial management and salaries of all our employees to Bank Riau Kepri, thank you Bank Riau Kepri for a very extraordinary and special service for us as a new partner for Bank Riau Kepri, hopefully this collaboration will continue and be successful for Bank Riau Kepri which will go to sharia, Bank Riau Syariah Jaya!!





PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

IDENTITAS PERUSAHAAN
Corporate Identity



Nama Perusahaan *Company Name*	PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
Nama Panggilan *Nick name*	Bank Riau Kepri
Status Perusahaan *Company Status*	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) *Regional Owned Enterprises*
Bidang Usaha *Business Field*	Bank Pembangunan Daerah *regional development banks*
Tanggal Pendirian *Company Establishment*	1 April 1966 *April 1,1966*



Dasar Hukum Pendirian *Legal Basis of Establishment*	Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah *Law no. 13 of 1962 regarding Regional Development Bank*
Kepemilikan *Ownership*	Pemerintah Provinsi Riau 38,00% (seri A) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 1,09% (seri A) Pemerintah Kota/Kabupaten se Riau dan Kepri 60,64% (seri A) Koperasi Amanah Riau Kepri 0,27% (seri B) *Riau Prov.Gov. 38,00% (series A)* *Kepri Prov.Gov. 1.09% (series A)* *Municipal/Regency Gov. of Riau & Kepri 60.64% (series A)* *Riau Kepri Amanah Cooperatives 0.27% (series B)*



Modal Dasar *Authorized Capital*	Rp4.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh *Paid-up Capital*	Rp1.103.160.700.000



Data Jaringan Kantor *Office Network Data*	174 Jaringan Kantor | *174 Office Networks* 1 Kantor Pusat | *1 Head Office* 21 Kantor Cabang | *21 Branch Offices* 41 Kantor Cabang Pembantu | *41 Sub-Branch Offices* 38 Kedai | *38 Kedai* 56 Kantor Kas | *56 Kas Office* 3 Butik | *3 Butik* 14 *Payment Point* | *14 Payment Points*



Jumlah Pegawai *Number of Employees*	2.657 Orang Per Desember 2021. *2.657 People as of December 2021.*
Sekretaris Perusahaan *Company secretary*	**Wahyudi Gustiawan** Email: corsec@Bankriaukepri.co.id



Alamat Kantor Pusat *Head Office Address*	Jalan Jendral Sudirman No. 462 Pekanbaru 28116, PO Box 1102
Situs Web | *Website*	www.bankriaukepri.co.id
Call Center	1500470
Contact Address	Telp: (0761) 47070 Fax: (0761) 42389 Media Sosial: bankriaukepri.co.id bankriaukepriid bankriaukepri.co.id bankriaukepri.co.id

BRAND PERUSAHAAN
Company Brand

Logo Bank Riau Kepri adalah stilasi dari tiga layar (dan perahunya) sebagai simbolisasi dari adanya aktivitas dan dinamika kehidupan masyarakat sehubungan dengan transportasi air.

The logo of Bank Riau Kepri is a stylization of three screens (and the boat) as a symbol of the activities and dynamics of community life related to water transportation.

Layar terkembang merupakan representasi dari:
The expand screen is a representation of:

bankriaukepri
tumbuh kembangkan usaha

bankriaukepri
syariah mitra syariah terpercaya
iB Perbankan Syariah

- Simbol kedaerahan yang khas
  Symbols to a typical area
- Semangat menjaga keteguhan
  The spirit of keeping presistence
- Terjaganya keutuhan dalam kesatuan identitas
  Maintaining wholeness in identity unity Symbols to a typical area
- Kesiapan mengarungi perjalanan (menuju satu tujuan yang lebih baik)
  Readiness for traveling (to a better destination)

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
Brief History of The Company

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ("Bank") didirikan sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Status pendirian Bank disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau No.10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No. 18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962. Status pendirian Bank diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau No. 5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau No.14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Persetujuan perubahan status Bank dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta No. 33, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 No. 50. Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru No.36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan No. C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH Notaris di Batam, dan telah mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Perubahan nama Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. AHU- 36484. AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No. AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010, serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/59/KEP. GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

Berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No. 6/7/DPbs/ Pbr tanggal 27 Februari 2004 dinyatakan bahwa Bank Indonesia Menyetujui Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Riau dengan memperhatikan ketentuan PBI No. 4/1/PBI/2002.

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ("Bank") was established in accordance with Law no. 13 of 1962 concerning the Regional Development Bank. As of April 1, 1966, the activities of the Riau Regional Development Bank officially began with the status as a Bank Owned by the Regional Government of Riau.

The status of the establishment of the bank was adjusted to the Riau Provincial Regulation No. 10 of 1975, which was then re-regulated by the Riau Province Regulation No. 18 of 1986 based on Law No. 13 of 1962. The status of the establishment of the Bank is regulated and adjusted to Regional Regulation No. 14 of 1992 concerning the Regional Development Bank of Riau based on Law No.7 of 1992 concerning Banking. Finally, with the Provincial Regulation of the Province of Riau Province No. 5 of 1998 concerning the First Amendment to the Riau Provincial Regulation No. 14 of 1992 concerning the Riau Regional Development Bank.

Approval of changing the status of the Bank from a Regional Company (PD) to a Limited Liability Company (PT) in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders dated June 26, 2002 made by notary Ferry Bakti, SH with Deed No. 33, which was later stipulated by Regional Regulation No. 10 of 2002 dated August 26, 2002 and has been promulgated in the Riau Province Regional Gazette of 2002 No. 50. The change in legal form has been made with the Notary Deed of Muhammad Dahad Umar, SH Notary in Pekanbaru No. 36 dated January 18, 2003 which has been ratified by the Minister of Justice and Human Rights with Decree No. C-09851.HT.01.01.TH.2003 dated May 5, 2003. This change in legal entity was ratified at the GMS on June 13, 2003 as stated in the Notary Deed No. 209 dated 13 June 2003 Notary Yondri Darto, SH Notary in Batam, and has received approval from the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia No.5 / 30 / KEP.DGS / 2003 dated 22 July 2003.

Changing the name of the Bank from PT Bank Pembangunan Daerah Riau to PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri in accordance with the resolution of the EGMS dated April 26, 2010, has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU- 36484.AH.01.02 of 2010 dated 22 July 2010 and the Letter of the Director General of General Law Administration of the Director of Civil Affairs No. AHU.2-AH.01.01-6849 dated 25 August 2010, as well as approval from Bank Indonesia through the Decree of the Governor of Bank Indonesia No. 12/59 / KEP.GBI / 2010 dated 23 September 2010.

Based on Bank Indonesia Letter No. 6/7 / DPbs / Pbr dated 27 February 2004 stated that Bank Indonesia Approved the Principles of Opening a Sharia Branch Office for Bank Riau with due observance to the provisions of PBI No. 4/1 / PBI / 2002.

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 9/5/KEP.DpG/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau sebagai Bank Umum Devisa ditetapkan bahwa Bank harus melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan nasabahnya dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri. Bank juga wajib menyampaikan laporan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi devisa dan kegiatan valuta asing yang telah dan sedang dilakukan kepada Bank Indonesia setempat.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 pada tanggal 26 April 2010 Notaris Fery Bakti, SH yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-36484.AH.01.02.Tahun 2010 pada tanggal 22 Juli 2010 bahwa Bank mengganti nama Perseroan dari semula "PT Bank Pembangunan Daerah Riau" atau disingkat "PT Bank Riau" berubah menjadi "PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" atau disingkat "PT Bank Riau Kepri".

Selanjutnya berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan oleh Notaris Yondri Darto, SH dengan Akta No.125 pada tanggal 19 Agustus 2010 dijelaskan bahwa tujuan dari dirubahnya nama Perseroan menjadi PT Bank Riau Kepri adalah guna meningkatkan kemampuan Perseroan dalam menghimpun dana masyarakat yang berada di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.

Keterangan Perubahan Nama

Perubahan nama Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No. AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010, serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/59/ KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

Based on the Decree of the Deputy Governor of Bank Indonesia No. 9/5 / KEP.DpG / 2007 dated March 15, 2007 concerning the appointment of a Limited Liability Company Regional Development Bank of Riau as a Foreign Exchange Commercial Bank, it is stipulated that Banks must carry out banking business activities in foreign currency with their customers and / or carry out banking transactions with parties abroad . Banks are also required to submit written reports relating to the implementation of foreign exchange transactions and foreign exchange activities that have been and are being carried out to local Bank Indonesia.

Based on the Deed of Meeting Decision Statement No. 41 on 26 April 2010 Notary Fery Bakti, SH who has received the approval of the Minister of Law and Human Rights No.AHU-36484.AH.01.02.Year 2010 on 22 July 2010 that the Bank changed the name of the Company from the original "PT Bank Pembangunan Daerah" Riau "or abbreviated as" PT Bank Riau "changed to" PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri "or abbreviated as" PT Bank Riau Kepri ".

Furthermore, based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders notarized by Notary Yondri Darto, SH with Deed No. 125 on August 19, 2010, it was explained that the purpose of changing the Company's name to PT Bank Riau Kepri was to improve the Company's ability to collect public funds residing in in the province of Riau and the province of the Riau Islands.

Name Change Description

Changing the name of the Bank from PT Bank Pembangunan Daerah Riau to PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri in accordance with the resolution of the EGMS dated April 26, 2010, has received approval from the Minister of Law and Human Rights RI through Decree No.AHU-36484.AH.01.02 Year 2010 dated July 22 2010 and the Letter of the Director General of General Law Administration, Director of Civil Affairs No. AHU.2-AH.01.01-6849 dated 25 August 2010, as well as approval from Bank Indonesia through the Decree of the Governor of Bank Indonesia No.12 / 59 / KEP.GBI / 2010 dated 23 September 2010.

BIDANG USAHA
Business Fields

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3 ayat 2, kegiatan usaha Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:

Business Activities According to The Fundamental Budget and That are Performed

In accordance with the Articles of Association of the Company Article 3 paragraph 2, the business activities of Bank Riau Kepri are as follows:

Tabel Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan Yang Dijalankan
Table of Business Activities According to Articles of Association and Executed

No.	Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Telah/ Belum Dijalankan *Already / Not Executed*	*The Scope of Business Activities Based on the Articles of Association*
1.	Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.	√	*Collecting funds from the public in the form of deposits in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings and / or other equivalent forms.*
2.	Memberikan kredit.	√	*Give credit.*
3.	Menerbitkan surat pengakuan hutang	-	*Issuing an acknowledgment of debt*
4.	Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.	√	*Buy, sell or guarantee at own risk or for the benefit of and at the behest of its customers.*
5.	Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.	√	*Transferring money either for own interest or for the benefit of customers.*
6.	Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.	√	*Placing funds with, borrowing funds from, or lending funds to other Banks, either by letter, telecommunication facilities or by display draft, check or other means.*
7.	Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.	√	*Receive payments from bills on securities and perform calculations with or between third parties.*
8.	Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.	√	*Provide a place to store valuables and securities.*
9.	Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak berdasarkan suatu kontrak.	√	*Carry out custodian activities for the benefit of parties based on a contract.*
10.	Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.	-	*Placing funds from one customer to another in the form of securities that are not listed on the Stock Exchange.*
11.	Membeli agunan, baik semua ataupun sebagian, baik melalui lelang ataupun dengan cara lain berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan oleh Perseroan, dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.	-	*Purchasing collateral, either in whole or in part, either through an auction or by other means based on the procedures stipulated by the Company, in the event that the Debtor does not fulfill his obligations to the Bank, provided that the purchased collateral must be cashed as soon as possible.*
12.	Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit* dan kegiatan wali amanat.	√	*Perform factoring, credit card * and trustee activities.*
13.	Menghimpun dan menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	√	*Collect and provide financing and / or carry out other activities based on Sharia Principles, in accordance with applicable regulations.*
14.	Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang.	√	*Conducting activities in foreign currency and / or as a Foreign Exchange Bank by complying with the provisions stipulated by the competent authority.*
15.	Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.	√	*Conducting equity participation in a Bank or company in the field of other financial services or establishing a new company as long as it does not conflict with the prevailing regulations.*
16.	Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaanya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.	-	*Conducting temporary equity participation activities to overcome credit defaults or financing failures based on sharia principles, provided that they must withdraw their participants by complying with applicable regulations.*
17.	Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku.	√	*Acting as a pension fund founder in accordance with the provisions of the applicable pension fund regulations.*
18.	Membantu pemerintah Provinsi, kota/kabupaten se-Riau dan Kepulauan Riau dalam membina Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah provinsi, kota/kabupaten se-Riau dan Kepulauan Riau.	√	*Assisting the provincial, city / regency governments throughout Riau and the Riau Islands in fostering People's Credit Banks (BPR) belonging to the provincial, city / regency governments throughout Riau and the Riau Islands.*
19.	Melaksanakan fungsi sebagai lembaga yang menunjang otonomi daerah.	√	*Carry out functions as an institution that supports regional autonomy.*
20.	Menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah baik di dalam maupun di luar negeri.	√	*Carrying out other businesses commonly carried out by a Commercial Bank both conventionally and based on sharia principles, both at home and abroad.*

**Co Branding* dengan Bank Mega

PRODUK DAN JASA
Products and Services

Kegiatan usaha Bank Riau Kepri meliputi berbagai produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan sebagai berikut:

Bank Riau Kepri's business activities include various deposit products, loan products, and various services as follows:



Produk dan Jasa Perbankan Konvensional
Conventional Banking Products and Services



PRODUK DANA :

TABUNGAN SIMPEDA
Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (BPD) yang merupakan produk tabungan bersama yang diterbitkan secara bersama oleh BPD seluruh Indonesia yang dirancang secara khusus sebagai alat pemersatu BPD seluruh Indonesia.

FUND PRODUCTS :

SIMPEDA SAVINGS
Regional Development Savings Savings (BPD) which is a joint savings product issued jointly by BPDs throughout Indonesia which is specifically designed as a unifying tool for BPDs throughout Indonesia.



TABUNGAN SINAR PRIORITAS
Tabungan Sinar Prioritas Sinar Prioritas, Tabungan Khusus untuk Nasabah Prioritas.

SINAR PRIORITY SAVINGS
Sinar Prioritas Sinar Prioritas Savings, Special Savings for Priority Customers.



TABUNGAN SINAR
Tabungan Sinar Tabungan Simpanan Amanah Riau (SINAR) untuk perorangan dan non perorangan yang dapat ditarik melalui ATM Bank Riau Kepri, Jaringan ATM bersama dan ATM PRIMA.

SINAR SAVINGS
Sinar Amanah Riau Savings Savings Savings (SINAR) for individuals and non-individuals that can be withdrawn through Bank Riau Kepri ATMs, Joint ATM Networks and PRIMA ATMs.



TABUNGAN SINAR VALAS

Tabungan Simpanan Dana Pihak Ketiga dalam mata uang asing atas nama pribadi/perorangan dengan tambahan fitur "Buku" sebagai bukti kepemilikan rekening dan media mutasi transaksi rekening, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan persyaratan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek.

FOREIGN CURENCY SINAR SAVINGS

Third Party Fund Savings Savings in foreign currency under the name of a person/individual with the addition of the "Book" feature as proof of account ownership and media for account transaction mutations, the withdrawal of which can only be made with certain agreed conditions, but cannot be withdrawn by check.



TABUNGAN SINAR BELIA

Tabungan Sinar Belia Tabungan khusus bagi Pelajar dan Mahasiswa yang masih berstatus aktif atau masih dalam usia sekolah maksimal 28 tahun. Dengan persyaratan ringan.

SINAR BELIA SAVINGS

Sinar Belia Savings Special savings for students who are still active or still in school, a maximum of 28 years old. With light requirements.



TABUNGAN SINAR DELIMA

Tabungan Sinar Delima Tabungan Premium untuk segmen menengah keatas yang memiliki fitur lebih unggul.

SINAR DELIMA SAVINGS

Sinar Delima Savings Premium savings for the upper middle segment that has superior features.



TABUNGAN SINAR KPE

Tabungan Sinar KPE Tabungan khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (ASN).

SINAR KPE SAVINGS

Sinar KPE Savings Savings specifically for Civil Servants (ASN).



TABUNGAN SINAR COMMUNITY

Tabungan Sinar Community Tabungan khusus untuk komunitas yang bisa digunakan sebagai Kartu Anggota yang memberikan keuntungan kepada rekening Induk Komunitas.

SINAR COMMUNITY SAVINGS

A special savings account for the community that can be used as a Member Card that provides benefits to the Community Main account.

TABUNGAN SINAR PEGAWAI

Tabungan Sinar Pegawai Tabungan khusus untuk pegawai PT Bank Riau Kepri.

SINAR EMPLOYEE SAVINGS

Savings specifically for employees of PT Bank Riau Kepri.

TABUNGAN SINAR DBOS

Tabungan yang dikhususkan untuk sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (DBOS), di mana fitur utamanya yakni pembukaan rekening tanpa minimal setoran awal dan tanpa saldo minimum.

SINAR DBOS SAVINGS

Savings specifically for schools that receive the School Operational Assistance Fund (DBOS), where the main feature is opening an account with no minimum initial deposit and no minimum balance.



TABUNGAN SINAR PENDIDIKAN

Tabungan Sinar Pendidikan Tabungan Investasi untuk pendidikan yang memiliki manfaat asuransi dengan suku bunga yang lebih tinggi.

SINAR EDUCATION SAVINGS

Sinar Pendidikan Savings Investment savings for education that have insurance benefits with higher interest rates



TABUNGAN SIMPEL

Tabungan SimPel Tabungan untuk siswa PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA Sederajat yang diterbitkan secara Nasional oleh Bank-Bank di Indonesia dengan persyaratan mudah.

SIMPLE SAVINGS

SimPel Savings Savings for Playground, Kindegarten, Elementary School, Junior High School, Senior High School Equivalent students issued nationally by Banks in Indonesia with easy requirements.



TABUNGANKU

Produk tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TABUNGANKU

Savings product for individuals with easy and light requirements issued jointly by Banks in Indonesia to foster a culture of saving and improve people's welfare.



TABUNGAN SINARLAKU

Tabungan dalam rangka program inklusi keuangan melalui layanan Tanpa Kantor yang buka di Agen Laku Pandai.

SINARLAKU SAVINGS

Savings in the context of a financial inclusion program through an Officeless service that is open at Laku Pandai Agents.



GIRO BANK RIAU KEPRI

Simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/ bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya

BANK RIAU KEPRI CURRENT ACCOUNTS

Deposits of third party funds that can be withdrawn at any time by using a check/bilyet giro or other means of payment orders.



GIRO VALAS BANK RIAU KEPRI

Produk giro untuk mempermudah urusan bisnis global dan lebih aman. Kelancaran transaksi dalam valuta asing saat ini menjadi keharusan di era global. Bank Riau Kepri mempersembahkan Giro Valas Bank Riau Kepri yaitu rekening simpanan dalam valuta asing yang ditujukan untuk mendukung kelancaran aktivitas bisnis.

BANK RIAU KEPRI FOREIGN CURRENT ACCOUNT

Current account products to make global business easier and safer. Smooth transactions in foreign exchange are now a must in the global era. Bank Riau Kepri presents the Bank Riau Kepri Foreign Exchange Current Account, which is a foreign currency deposit account that is intended to support the smooth running of business activities.



DEPOSITO BANK RIAU KEPRI

Simpanan Berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dan Bank.

BANK RIAU KEPRI DEPOSITS

Time Deposits whose withdrawals can only be made for a certain period of time according to the agreement between the customer and the Bank.



DEPOSITO VALAS

Deposito Bank Riau Kepri yang menjadi pilihan terbaik untuk berinvestasi dalam Valuta Asing. Dengan kepastian tingkat suku bunga dalam kurun waktu yang dipilih maka investasi akan aman dan terjaga dari fluktuasi kurs valas sekaligus menguntungkan. Keuntungan yang didapatkan yakni Kemudahan dan kenyamanan bertransaksi jenis mata uang yang nasabah inginkan (USD,SGD, EURO), Biaya penyetoran dan penarikan yang ringan, dan Bunga Deposito Valas Bank Riau Kepri sangat bersaing sehingga dapat memberikan nilai lebih investasi.

FOREIGN CURRENCY DEPOSITS

Bank Riau Kepri deposits are the best choice for investing in foreign exchange. With the certainty of the interest rate within the selected period, the investment will be safe and protected from fluctuations in foreign exchange rates as well as profitable. The advantages obtained are the ease and convenience of transacting the type of currency that customers want (USD, SGD, EURO), low deposit and withdrawal fees, and very competitive foreign currency deposit interest rates so that they can provide more investment value.

PRODUK KREDIT

KREDIT KARYA PRIMA

Kredit kepada rekanan yang diberikan dengan sistem Transaksional dan *Standby*. Kredit Konstruksi dengan sistem Transaksional adalah kredit yang diberikan kepada rekanan yang telah mendapat kontrak pekerjaan dari instansi Pemerintah atau instansi lainnya. Kredit Konstruksi dengan sistem *Standby* adalah kredit yang diberikan kepada rekanan dan/atau groupnya dengan plafond tertentu untuk membiayai proyek yang telah dan atau akan diperoleh dari instansi Pemerintah atau instansi lainnya.

CREDIT PRODUCTS

KARYA PRIMA CREDIT

Credit to partners provided with Transactional and Standby systems. Construction Loans with a Transactional system are loans given to partners who have received work contracts from Government agencies or other agencies. Construction Loans with a Standby system are loans given to partners and/or their groups with a certain ceiling to finance projects that have been and/or will be obtained from government agencies or other agencies.

KREDIT NIAGA PRIMA

Kredit yang diberikan kepada Perseorangan atau Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar.

KREDIT BINA PRIMA

Kredit yang diberikan kepada Badan Usaha dengan tujuan untuk membiayai pengadaan aktiva tetap baik untuk usaha baru, perluasan, rehabilitasi dan relokasi.

BANK GARANSI

Surat berharga (surat jaminan) yang dikeluarkan Bank Umum/Lembaga Keuangan lainnya kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak yang terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya, kewajiban mana bersifat kontigensi yang timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dan prestasi dimasa yang akan datang.

SURAT DUKUNGAN KEUANGAN

Surat keterangan yang dikeluarkan Bank yang ditujukan kepada pihak pemilik proyek/pengguna anggaran/satuan kerja bahwa Bank menyatakan kesediaan memberikan dukungan finansial atau keuangan kepada pihak pelaksana proyek (nasabah) untuk pelaksanaan proyek tertentu sepanjang memenuhi ketentuan/persyaratan Bank.

KREDIT SINDIKASI

Kredit yang diberikan oleh dua bank/lembaga pembiayaan atau lebih atas dasar syarat dan ketentuan kredit (*terms and conditions*) yang sama, didudukkan dalam perjanjian kredit yang sama pula dan diadministrasikan/dimonitor oleh agent bank (agen).

SKBDN

Setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat Bank untuk:

a. Melakukan pembayaran kepada penerima (*beneficiary*) atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima.
b. Memberi kuasa kepada Bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima (*beneficiary*) ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang akan ditarik oleh penerima, atau
c. Memberi kuasa kepada Bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima (*beneficiary*), atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi SKBDN dipenuhi.

NIAGA PRIMA CREDIT

Loans granted to individuals or business entities to meet the needs of current assets.

BINA PRIMA CREDIT

Loans granted to Business Entities with the aim of financing the procurement of fixed assets for new businesses, expansion, rehabilitation and relocation.

BANK GUARANTEE

Securities (guarantee letters) issued by Commercial Banks/ other Financial Institutions to the recipient of the guarantee that the Bank will pay a certain amount of money to him at a certain time if the guaranteed party cannot fulfill its obligations, which obligations are contingent the arising of which depends on the occurrence or non-occurrence of one or more future events and accomplishments.

FINANCIAL SUPPORT LETTER

Statement letter issued by the Bank addressed to the project owner/budget user/work unit that the Bank states its willingness to provide financial or financial support to the project implementing party (customer) for the implementation of certain projects as long as they meet the Bank's provisions/requirements.

SYNDICATION CREDIT

Credit granted by two or more banks/financing institutions on the basis of the same terms and conditions, placed in the same credit agreement and administered/monitored by the bank agent (agent).

SKBDN

Each written promise based on the written request of the applicant (applicant) which binds the Bank to:

a. Make payments to the beneficiary or the order, or accept and pay the draft drawn by the beneficiary.

b. Authorize other Banks to make payments to the beneficiary of the order, or to accept and pay the draft to be withdrawn by the beneficiary, or

c. Authorize other Banks to negotiate drafts drawn by the beneficiary (beneficiary), upon the submission of documents, as long as the terms and conditions of the Domestic L/C are met.

LETTER OF CREDIT

Kredit yang diberikan berdasarkan permintaan tertulis pemohon (*applicant*) yang mengikat Bank untuk:

a. Melakukan pembayaran kepada penerima (*importir*) atau ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima.
b. Memberi kuasa kepada Bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima (*importir*) ordernya, atau mengaksep dan membayar wesel yang akan ditarik oleh penerima, atau
c. Memberi kuasa kepada Bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh penerima (*importir*), atas penyerahan dokumen, sepanjang persyaratan dan kondisi *Letter of Loan* dipenuhi.

LETTER OF CREDIT

Credit granted based on the written request of the applicant (applicant) which binds the Bank to:

a. Make payments to the recipient (importer) or the order, or accept and pay the draft drawn by the recipient.

b. Authorize other Banks to make payments to the recipient (importer) of the order, or to accept and pay the draft to be withdrawn by the recipient, or

c. Authorize other Banks to negotiate drafts drawn by the beneficiary (importer), upon the submission of documents, as long as the terms and conditions of the Letter of Loan are met.

KREDIT VALAS

Fasilitas kredit yang diberikan kepada eksportir, baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja, dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/preshipment) dan/atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.

FOREIGN CREDIT

Credit facilities provided to exporters, both in rupiah and foreign currencies for working capital purposes, in the context of procuring goods to be exported (before the goods are shipped/preshipment) and/or for financing investment projects in the framework of producing export goods.

KREDIT ANEKA GUNA (KAG)

Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur berpenghasilan tetap (ASN, CPNS, pegawai BUMN/BUMD, pegawai tetap perusahaan swasta, dll) dan pekerja profesi (dokter, notaris, dll) untuk berbagai kebutuhan yang bersifat konsumtif antara lain pendidikan, pernikahan, kesehatan dan lain-lain.

ANEKA GUNA CREDIT

Aneka Guna Credit Bank Riau Kepri is a credit facility granted to debtors with fixed income (ASN, civil servants, state-owned enterprises employees, permanent employees of private companies, etc.) and professional workers (doctors, notaries, etc.) for various consumptive needs, including education, marriage, health and others.



KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (KKB)

Kredit yang diberikan Bank untuk memenuhi kebutuhan debitur bersifat konsumtif dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan atau roda 4 (empat) atau lebih dengan *system* pembayaran angsuran baik secara kolektif maupun non kolektif.

MOTOR VEHICLE CREDIT

Credit provided by the Bank to meet the needs of debtors is consumptive in the context of ownership of 2 (two) and or 4 (four) or more wheels motorized vehicles with an installment payment system both collectively and non-collectively.



KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR)

Fasilitas kredit yang digunakan untuk, Pembelian Rumah, Renovasi Rumah, Pembelian Rumah melalui KPR Program Pemerintah, KPR *Refinancing*, KPR *Top Up* maupun *take over* dari bank lain

HOUSE OWNERSHIP CREDIT

Credit facilities used for Home Purchases, Home Renovations, Home Purchases through Government Program Mortgages, Refinancing Mortgages, Top Up Mortgages and take overs from other banks



KPR SEJAHTERA FLPP BANK RIAU KEPRI

Fasilitas Kredit Perumahan dengan Bunga Terjangkau dan Tetap Selama Jangka Waktu Kredit. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana ini merupakan bentuk kerja sama antara Bank Riau Kepri dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

KPR PROSPEROUS FLPP BANK RIAU KEPRI

Housing Loan Facility with Affordable and Fixed Interest during the Loan Term. This Simple Home Ownership Loan is a form of collaboration between Bank Riau Kepri and the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia.

KARTU KREDIT

Adalah kartu Kredit yang merupakan produk *co-branding* antara Bank Mega, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Riau Kerpi yang memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkan secara hutang termasuk transaksi pembayaran atau untuk melakukan penarikan tunai dengan kewajiban melakukan pelunasan/ pembayaran pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus atau angsuran.

CREDIT CARD

Credit card which is a co-branding product between antara Bank Mega, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Riau Kerpi which allows the bearer to buy the items needed on a debt basis including payment transactions or to make cash withdrawals with the obligation to make repayments/payments at the agreed time either in lump sum or installments.

KREDIT BPD PEDULI

Kredit yang diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok Usaha Kecil Berbasis Kerakyatan (UKBK) dimana kelompok tersebut telah dibina dengan metodologi BPD Peduli oleh Pihak Bank dan atau Pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank.

BPD PEDULI CREDIT

Credit given to the community who are members of the People-Based Small Business group (UKBK) where the group has been fostered with the BPD Peduli methodology by the Bank and or other parties who have collaborated with the Bank.

KREDIT PENGUSAHA KECIL (KPK)

Kredit yang diberikan kepada Pengusaha Kecil perorangan, perusahaan dan koperasi dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi.

SMALL BUSINESS LOANS

Loans granted to individual Small Entrepreneurs, companies and cooperatives for the purpose of productive businesses, both for working capital and investment.

KREDIT PENGUSAHA MIKRO (KPM)

Kredit yang diberikan kepada Pengusaha Mikro secara perorangan dengan tujuan untuk usaha produktif, baik untuk modal kerja maupun investasi.

MEDIUM BUSINESS LOANS

Credit given to Micro Entrepreneurs individually with the aim of productive businesses, both for working capital and investment.

KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Kredit KUR adalah kredit modal kerja dan/atau investasi kepada Debitur usaha yang produktif dan layak untuk diberikan kredit, namun agunan yang dimiliki belum *Bankable*.

PEOPLE'S BUSINESS CREDIT (KUR)

KUR loans are working capital loans and/or investments to business debtors who are productive and eligible to be given credit, but the collateral owned is not yet Bankable.

KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)

Kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan kepada petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati. KKP-E bermanfaat membantu petani/peternak di bidang permodalan untuk dapat menerapkan teknologi sehingga produktifitas dan pendapatan petani menjadi lebih baik serta meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

FOOD SECURITY AND ENERGY CREDIT

Investment credit and or working capital provided to farmers/breeders through farmer groups or cooperatives in order to support the implementation of the Food Security Program and the Plant Development Program for Biofuel Raw Materials. KKP-E is useful in helping farmers/breeders in the field of capital to be able to apply technology so that farmers' productivity and income will be better as well as increase national food security and support the development program for biofuel raw material plants.



LAYANAN

SERVICES

ATM SETOR TUNAI BANK RIAU KEPRI

Dengan layanan ATM Setor Tunai Bank Riau Kepri, nasabah lebih leluasa bertransaksi, mudah dan cepat. Melalui mesin ATM Setor Tunai (CDM) Bank Riau Kepri, nasabah dapat menyetorkan uangnya ke tabungan tidak terbatas waktu selama 24 jam dan 7 hari tanpa libur.

BANK RIAU KEPRI ATM CASH DEPOSIT

With the Bank Riau Kepri Cash Deposit ATM service, customers are more flexible, easier and faster to transact. Through the Bank Riau Kepri Cash Deposit (CDM) ATM machine, customers can deposit money into unlimited savings for 24 hours and 7 days without holidays.



KARTU ATM/DEBIT BANK RIAU KEPRI

Kartu ATM Bank Riau Kepri dapat digunakan untuk seluruh kegiatan transaksi melalui ATM Bank Riau Kepri, ATM Prima dan ATM Bersama juga sebagai Kartu Debit di *merchant* yang memiliki logo Prima.

BANK RIAU KEPRI ATM/DEBIT CARD

Bank Riau Kepri ATM cards can be used for all transaction activities through Bank Riau Kepri ATMs, Prima ATMs and ATM Bersama as well as Debit Cards at merchants that have the Prima logo.



EDC BANK RIAU KEPRI

Peralatan elektronik yang digunakan untuk layanan perbankan yang bekerja secara otomatis untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang memiliki kartu ATM secara non tunai.

BANK RIAU KEPRI EDC

Electronic equipment used for banking services that work automatically to provide services to customers who have ATM cards on a non-cash basis..



BRK MOBILE

Layanan mobile banking yang diperuntukkan kepada Nasabah Bank yang memiliki kartu ATM Debit Bank Riau Kepri.

BRK MOBILE

Mobile banking service intended for Bank Customers who have an ATM Debit card for Bank Riau Kepri.

BRK QRIS

Layanan penerimaan transaksi pembayaran QRIS bagi *merchant* BRK QRIS dan fitur layanan transaksi pembayaran QRIS bagi nasabah melalui Aplikasi BRK mobile.

BRK QRIS

QRIS payment transaction acceptance services for BRK QRIS merchants and QRIS payment transaction service features for customers through the BRK mobile application.



REMITTANCE

Jasa pengiriman uang dalam valuta asing antara lain USD, SGD dan Euro baik ke/dari Bank lokal maupun Bank luar negeri. *Remittance* Bank Riau Kepri memberikan berbagai keuntungan untuk nasabah yakni Cepat dan Aman, Mudah dan Biaya Ringan.

REMITTANCE

Money transfer services in foreign currencies include USD, SGD and Euros to/from local banks and overseas banks. Remittance Bank Riau Kepri provides various benefits for customers, namely Fast and Safe, Easy and Low Cost.

TRADE FINANCE & SERVICES

Trade Finance & Services merupakan layanan transaksi ekspor-impor baik yang menggunakan L/C (*Letter of Credit*) maupun Non L/C (*Documentary Collection*) serta layanan transaksi perdagangan lokal dengan menggunakan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri).

TRADE FINANCE & SERVICES

Trade Finance & Services is an export-import transaction service using both L/C (Letter of Credit) and Non L/C (Documentary Collection) as well as local trade transaction services using SKBDN (Domestic Letter of Credit).



CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

Fitur transaksi *real time* yang dapat dilakukan kapan dan dimana saja. CMS memberikan keleluasaan kepada nasabah/*Corporate* untuk melakukan transaksi secara *online* antar rekening sesama Bank Riau Kepri dan/atau dari rekening Bank Riau Kepri ke rekening Bank lain.

CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS)

Real time transaction feature that can be done anytime and anywhere. CMS provides flexibility to customers/ Corporate to conduct online transactions between accounts of other Bank Riau Kepri and/or from Bank Riau Kepri accounts to other bank accounts.



E-MONEY

Suatu alat pembayaran elektronik prabayar yang diterbitkan oleh Bank Mandiri (Persero) yang bekerjasama dengan PT Bank Riau Kepri dimana nilai uang tertentu melekat padanya yang dapat diisi ulang dan dapat digunakan untuk pembayaran transaksi pada *Merchant* tertentu yang bersifat *Off line*.

E-MONEY

A prepaid electronic payment instrument issued by Bank Mandiri (Persero) in collaboration with PT Bank Riau Kepri where a certain money value is attached to it which can be refilled and can be used for payment transactions at certain Merchants that are Off line.



Produk dan Jasa Perbankan Syariah
Sharia Banking Products and Services

Bank Riau Kepri memberikan perhatian khusus kepada para Nasabah yang ingin menjalankan proses perbankan melalui sistem syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah. Sampai dengan tahun 2021 produk Bank Riau Kepri yang berbasis syariah terdiri dari Produk Dana, Produk Pembiayaan, dan Produk Layanan Syariah dengan rincian sebagai berikut:

Bank Riau Kepri gives special attention to customers who wish to carry out the banking process through the sharia system by opening a Sharia Business Unit. Until 2021 Bank Riau Kepri products that are based on sharia consist of Fund Products, Financing Products, and Sharia Service Products, with the following details:







PRODUK DANA

TABUNGAN iB SINAR

Tabungan iB Sinar memiliki 2 akad:

a. *Mudharabah*, tabungan dengan akad bagi hasil, dimana *mudharib* (Bank) mengelola dana *shahibul maal* (Nasabah) dan berbagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut kepada *shahibul maal*.
b. *Wadiah*, Tabungan dengan akad *Wadiah yad Dhamanah* (titipan). Nasabah hanya menitipkan dananya kepada Bank dan Bank dapat memberikan bonus kepada Nasabah namun tidak diperjanjikan.

TABUNGAN iB DHUHA

Tabungan iB Dhuha adalah produk tabungan haji yang dirancang khusus untuk membantu nasabah merencanakan ibadah haji regular (melalui SISKOHAT), Haji plus, dan umrah. Tabungan iB Dhuha membantu Anda merencanakan ibadah haji SISKOHAT, haji Plus dan Umrah. Pemasaran produk Tabungan iB Dhuha dilaksanakan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*.

FUND PRODUCTS

SINAR iB SAVINGS

iB Sinar Savings has 2 agreements:

a. *Mudharabah, a savings account with a profit-sharing agreement, where the mudharib (Bank) manages the shahibul maal (customer) fund and shares the proceeds from the profits of the fund management to shahibul maal.*
b. *Wadi'ah, savings with a Wadiah yad Dhamanah (deposit) agreement. Customers only entrust their funds to the Bank and the bank can give bonuses to the customer but cannot be agreed upon.*

DHUHA iB SAVINGS

Tabungan iB Dhuha is a Hajj savings product specifically designed to help customers plan for regular Hajj pilgrimages (through SISKOHAT), Haj plus and Umrah. IB Dhuha Savings helps you plan the Reguler, Haj Plus and Umrah pilgrimages. Marketing of iB Dhuha Savings products is carried out using mudharabah and wadiah contracts.



TABUNGAN SIMPEL iB

Tabungan SimPel iB adalah tabungan yang menggunakan prinsip *wadiah* (titipan) yang diperuntukkan hanya untuk nasabah perorangan dengan status pelajar/siswa WNI (PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA atau sederajat). Pembukaan Rekening dilakukan berdasarkan PKS antara pihak sekolah dengan bank maupun tanpa PKS.

SIMPEL iB SAVINGS

SimPel iB savings are savings that use the wadiah principle (deposit) that are intended only for individual customers with student status/WNI students (PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA or equivalent). Account opening is carried out based on MCC between the school and the bank or without MCC.



TABUNGAN iB SINAR PRIORITAS

Tabungan iB Sinar Prioritas dijalankan dengan 2 (dua) prinsip/akad sebagai berikut:

a. Tabungan iB Sinar Prioritas dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* adalah Tabungan iB Sinar yang ditujukan untuk memberikan pelayanan eksklusif kepada Nasabah prioritas yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk bonus yang besarannya berdasarkan kebijaksanaan Bank serta tidak diperjanjikan di dalam akad.
b. Tabungan iB Sinar Prioritas dengan prinsip *mudharabah* adalah produk tabungan penghimpunan dana yang ditujukan untuk memberikan pelayanan eksklusif kepada Nasabah prioritas dalam bentuk simpanan perorangan atau non perorangan dengan menggunakan akad *mudharabah* (memperoleh bagi hasil).

iB SINAR PRIORITAS SAVINGS

iB Sinar Prioritas is carried out with 2 (two) principles/agreements as follows:

a. iB Sinar Prioritas Savings with the principle of wadiah yad dhamanah is the iB Sinar Savings which is intended to provide exclusive services to priority customers which can be withdrawn at any time and there is no required reward, except in the form of a bonus whose amount is based on the Bank's discretion and is not agreed in the contract.

b. iB Sinar Prioritas Savings with the principle of mudharabah is a savings product to raise funds that are intended to provide exclusive services to priority customers in the form of individual or non-individual savings using a mudharabah agreement (obtaining profit sharing).



TABUNGAN SINAR PENDIDIKAN iB

Tabungan Sinar Pendidikan iB adalah tabungan berjangka dengan akad *mudharabah* yang hanya dapat ditarik setelah jangka waktu yang diperjanjikan dengan setoran bulanan yang jumlahnya tetap.

iB SINAR PENDIDIKAN SAVINGS

Sinar Pendidikan iB Savings is a term savings account with a mudharabah contract which can only be withdrawn after the agreed period with a fixed monthly deposit.



TABUNGAN iB SINAR QURBAN

Tabungan iB Sinar Qurban adalah tabungan yang diperuntukkan kepada Nasabah yang merencanakan ibadah Qurban dengan cara menabung melalui pola setoran secara bulanan.

iB SINAR QURBAN SAVINGS

iB Sinar Qurban Savings is a savings account intended for customers who plan to perform Qurban worship by saving through a monthly deposit pattern.

TABUNGAN iB SINAR BANSOS

Tabungan iB Sinar Bansos dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* adalah Tabungan iB Sinar yang ditujukan untuk menerima penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat penerima bantuan.

iB SINAR BANSOS SAVINGS

The iB Sinar Bansos Savings with the wadiah yad dhamanah principle is the iB Sinar Savings which is intended to receive distribution of social assistance from the Central/Provincial/ Regency/City Government to the beneficiary community.



GIRO iB

Giro iB BRKS dibedakan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan akad yang digunakan:

a. Giro *Wadiah*, Nasabah (*shahibul maal*) hanya menitipkan dananya ke Bank dan tidak mendapatkan imbalan dari hal tersebut. Namun Bank diperbolehkan untuk memberikan bonus namun tidak diperjanjikan ke Nasabah.
b. Giro *Mudharabah*, adalah produk penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan perorangan maupun non perorangan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan dan memperoleh bagi hasil atas dana yang ditempatkan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan.

iB CURRENT ACCOUNT

iB Current Account is divided into 2 (two) types based on the agreement used:

a. Wadiah Current Account, Customers (shahibul maal) only entrust their funds to the Bank and do not get compensation from it. However, the bank is allowed to give bonuses cannot be made by the agreement to the customer.
b. Mudharabah Current Account, is a product of collecting public funds in the form of individual and non-individual savings in Rupiah using a mudharabah contract, the withdrawal of which can be made according to an agreement using a check, bilyet giro, other payment order facilities, or by transfer order and obtaining profit sharing on funds placed by a predetermined ratio.



DEPOSITO iB

Deposito iB Bank Riau Kepri Syariah adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian (akad).

iB DEPOSITS

iB Bank Riau Kepri Syariah time deposit is a time deposit using a mudharabah mutlaqah contract, the withdrawal of which can only be made at a certain time based on the agreement (contract).

PRODUK PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN KOMERSIAL iB

Pembiayaan Komersial iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang bergerak pada sektor perdagangan, jasa, industri *manufacturing*/pabrikasi, agro industri, peternakan, konstruksi, pengembangan kawasan industri/ perumahan, dan sektor ekonomi lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dan/atau modal kerja baik atas dasar kontrak maupun non kontrak.

FINANCING PRODUCTS

iB COMMERCIAL FINANCING

iB Commercial Financing is financing provided to individuals or business entities engaged in the trade, service, manufacturing/fabrication industry, agro-industry, livestock, construction, industrial/housing area development, and other economic sectors in order to meet the needs of investment financing and/or Working capital both on contract and non-contract basis.

PEMBIAYAAN SINDIKASI

Pembiayaan Sindikasi adalah akad atau perjanjian antara beberapa lembaga keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah, maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama.

SYNDICATION FINANCING

Syndicated Financing is a contract or agreement between several financial institutions, both among Islamic Financial Institutions, as well as between Islamic Financial Institutions and Conventional Financial Institutions, in order to jointly finance certain projects.

PEMBIAYAAN UMKM iB

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah iB untuk selanjutnya disebut juga dengan Pembiayaan UMKM iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang bergerak pada sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau investasi.

iB MSME FINANCING

iB Micro, Small, and Medium Enterprises Financing, hereinafter also referred to as iB MSME Financing, is financing provided to micro, small, and medium enterprises engaged in the economic sector that does not conflict with sharia principles and laws and regulations in order to meet working capital needs and /or investment.

PEMBIAYAAN KUR iB

Pembiayaan KUR iB adalah pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada Nasabah usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

iB KUR FINANCING

KUR iB financing is financing for working capital and/or investment to business customers who are productive and feasible but do not have additional collateral or the additional collateral is not sufficient.

PEMBIAYAAN iB MULTIJASA UMRAH DAN WISATA RELIGI

Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah yang bertujuan untuk membiayai paket ibadah umrah dan wisata religi di beberapa negara timur tengah yang menggunakan akad *Ijarah* Multijasa dengan memperhitungkan uang muka pembiayaan.

iB MULTISERVICE UMROH AND RELIGIOUS TOUR FINANCING

Financing provided to customers for the purpose of financing Umrah packages and religious tourism in several Middle Eastern countries using the Ijarah Multijasa contract by taking into account the down payment.



PEMBIAYAAN ANEKA GUNA (PAG) iB

Pembiayaan yang diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan Nasabah yang bersifat konsumtif. Pembiayaan ini dijalankan dengan prinsip/akad *murabahah, ijarah*, dan *musyarakah mutanaqishah*.

iB ANEKA GUNA FINANCING

Financing provided in order to meet the customer's consumptive needs. This financing is carried out with the principle of murabahah, ijarah, and musyarakah mutanaqishah.



PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS (PKE) iB

Pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah dalam bentuk emas padu/lantakan/batangan (*gold bar*) dengan memperhitungkan uang muka pembiayaan.

iB GOLD OWNERSHIP FINANCING (PKE)

Financing for gold ownership using a murabahah contract in the form of solid gold/bullion/bullion (gold bar) and/or gold jewelry by taking into account the down payment on financing.



PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB) iB

Pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dengan menggunakan akad *Murabahah*.

iB MOTOR VEHICLE FINANCING

Financing provided to employees with fixed income, professional workers, and entrepreneurs in the context of ownership of motorized vehicles, both 2 (two) and 4 (four) wheels using a Murabahah contract.



PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH (PPR) iB

Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) adalah pembiayaan konsumtif dalam rangka pembelian dan/atau renovasi properti berdasarkan prinsip syariah.

iB HOME OWNERSHIP FINANCING

Home Ownership Financing (PPR) is consumptive financing for the purchase and/or renovation of property based on sharia principles.



RAHN iB

Fasilitas pinjaman yang diberikan Bank kepada Nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai.

RAHN iB

Loan facility provided by the Bank to customers with collateral in the form of gold jewelry or gold bullion by following the principle of pawning.

PEMBIAYAAN ULANG SYARIAH (*REFINANCING* iB)

Pemberian fasilitas pembiayaan bagi Nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya, yang dilaksanakan berdasarkan akad *musyarakah mutanaqishah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak berkurang disebabkan pengambilalihan secara bertahap oleh pihak lainnya.

REFINANCING iB

Provision of new financing facilities or customers who have not paid off their previous financing, which is carried out based on a musyarakah mutanaqishah (cooperation (musyarakah/syirkah) contract in which the ownership of assets (goods) or capital of one party is reduced due to a gradual takeover by the other party).



LAYANAN SYARIAH

KARTU ATM/DEBIT iB

Guna memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi keuangan, Bank Riau Kepri telah mengembangkan layanan Kartu ATM/ Debit iB. Kartu ATM/Kartu Debit iB Bank Riau Kepri dapat digunakan untuk semua kegiatan transaksi melalui ATM Bank Riau Kepri Syariah, ATM Bank Riau Kepri, ATM Prima, dan ATM Bersama juga berfungsi sebagai Kartu Debit di *merchant* yang memiliki logo Prima.

BANK GARANSI (*KAFALAH*)

Kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada Pihak Penerima Jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika Pihak Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

SHARIA SERVICES

iB ATM/DEBIT CARD

In order to provide convenience to customers in making financial transactions, Bank Riau Kepri has developed the iB ATM/ Debit Card service. The Bank Riau Kepri iB ATM Card / DEBIT Card can be used for all transaction activities through Bank Riau Kepri Syariah ATMs, Riau Kepri Bank ATMs, Prima ATMs, and Bersama ATMs as well as Debit Cards at merchants that have the Prima logo.

BANK GUARANTEE (KAFALAH)

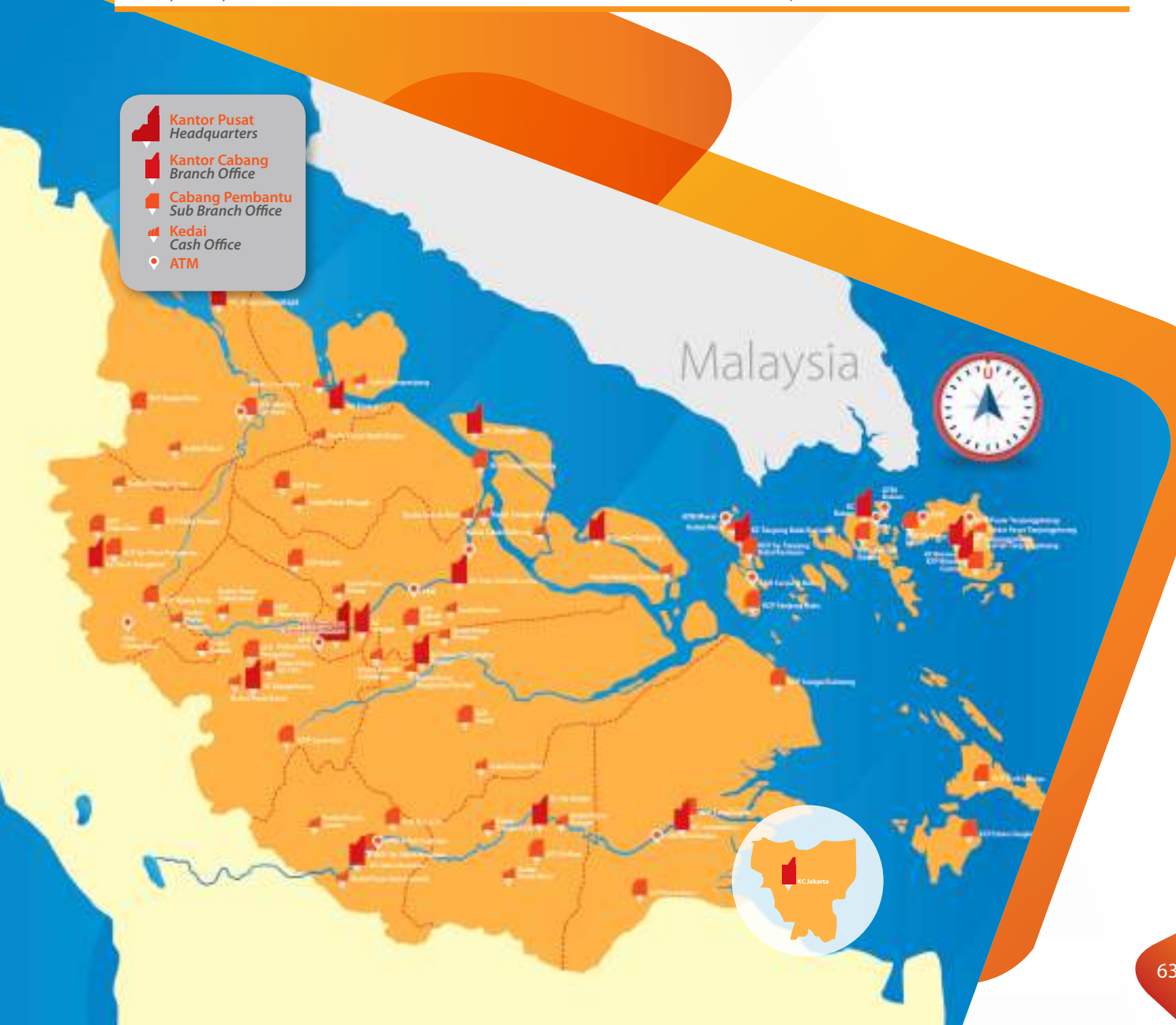
Written commitment given by the Bank to the Guarantee Recipient that the Bank will pay a certain amount of money to him at a certain time if the Guaranteed Party is unable to fulfill its obligations.

PETA WILAYAH USAHA
Map of Business Area

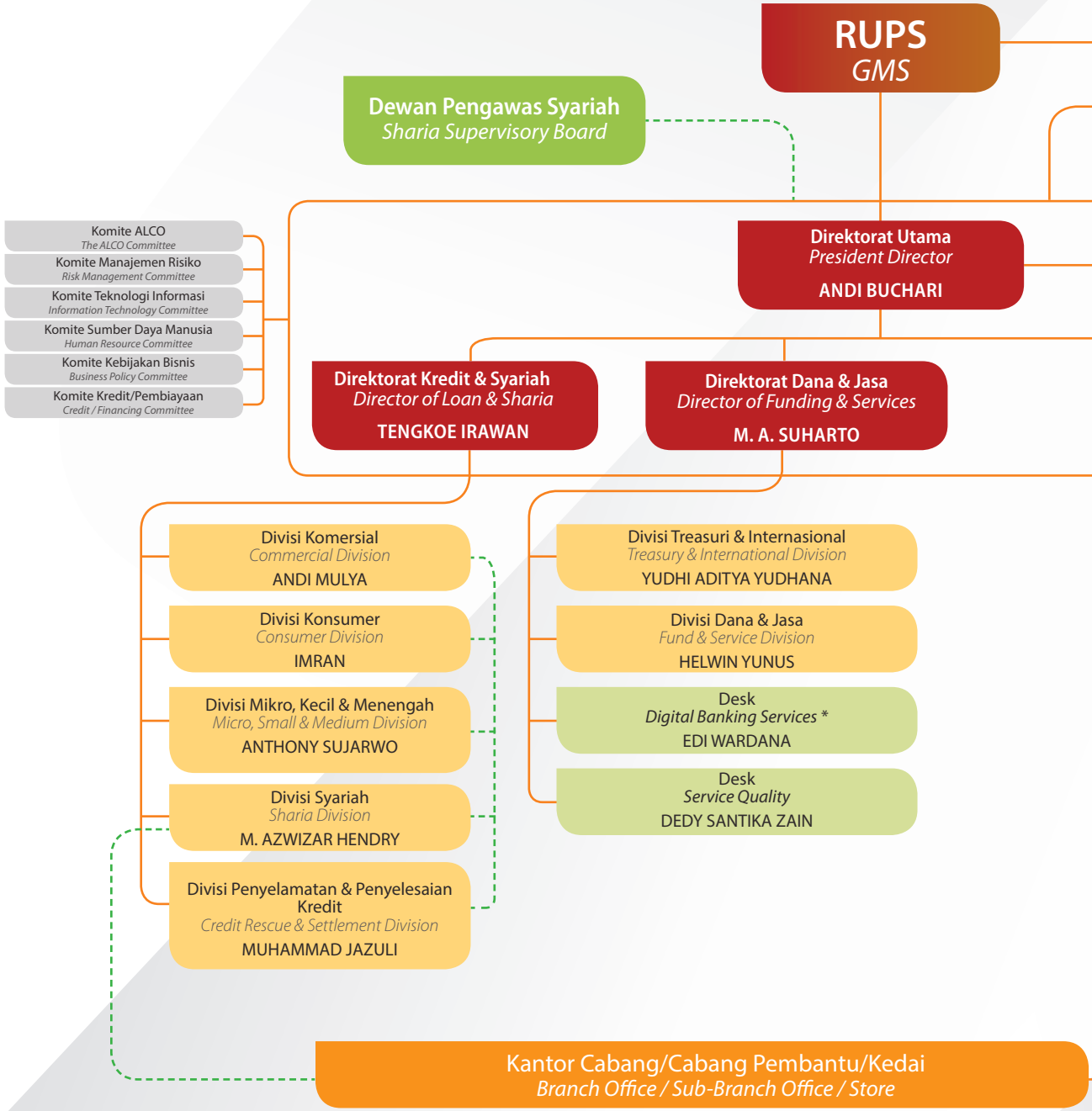
Per 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri memiliki 1 Kantor Pusat, 21 Kantor Cabang, 41 Kantor Cabang Pembantu, 38 Kedai, 56 Kantor Kas, 3 Butik, 14 *Payment Point*, dan jaringan kantor lainnya sebagai berikut.

As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri has 1 Head Office, 20 Branch Offices, 41 Sub-Branch Offices, as well as 423 other networks such as Kedai, Cash Office, Boutique, Payment Point, ATM, CDM and OTO Banking.

Keterangan	2021	2020	2019	2018	2017	2016	*Description*
Jaringan Kantor	174	169	167	153	151	142	*Office Network*
Kantor Pusat	1	1	1	1	1	1	*Headquarters*
Kantor Cabang	21	21	20	20	20	19	*Branch Office*
Kantor Cabang Pembantu	41	41	42	42	42	42	*Sub-Branch Office / Supporting Branch Office*
Kedai	38	35	35	35	35	35	*Shop*
Kantor Kas	56	56	53	42	37	34	*Cash Office*
Butik	3	4	4	4	4	4	*Boutique*
Payment Point	14	11	12	9	8	7	*Payment Points*
ATM	335	336	337	305	215	205	*ATM*
CDM	2	2	2	2	2	2	*CDM*
OTO *Banking*	16	16	16	6	6	6	*OTO Banking*
EDC	664	787	597	425	177	166	*EDC*
Unit Layanan Syariah	87	87	52	52	52	52	*Syariah Service Unit*



STRUKTUR ORGANISASI
Organizational Structure



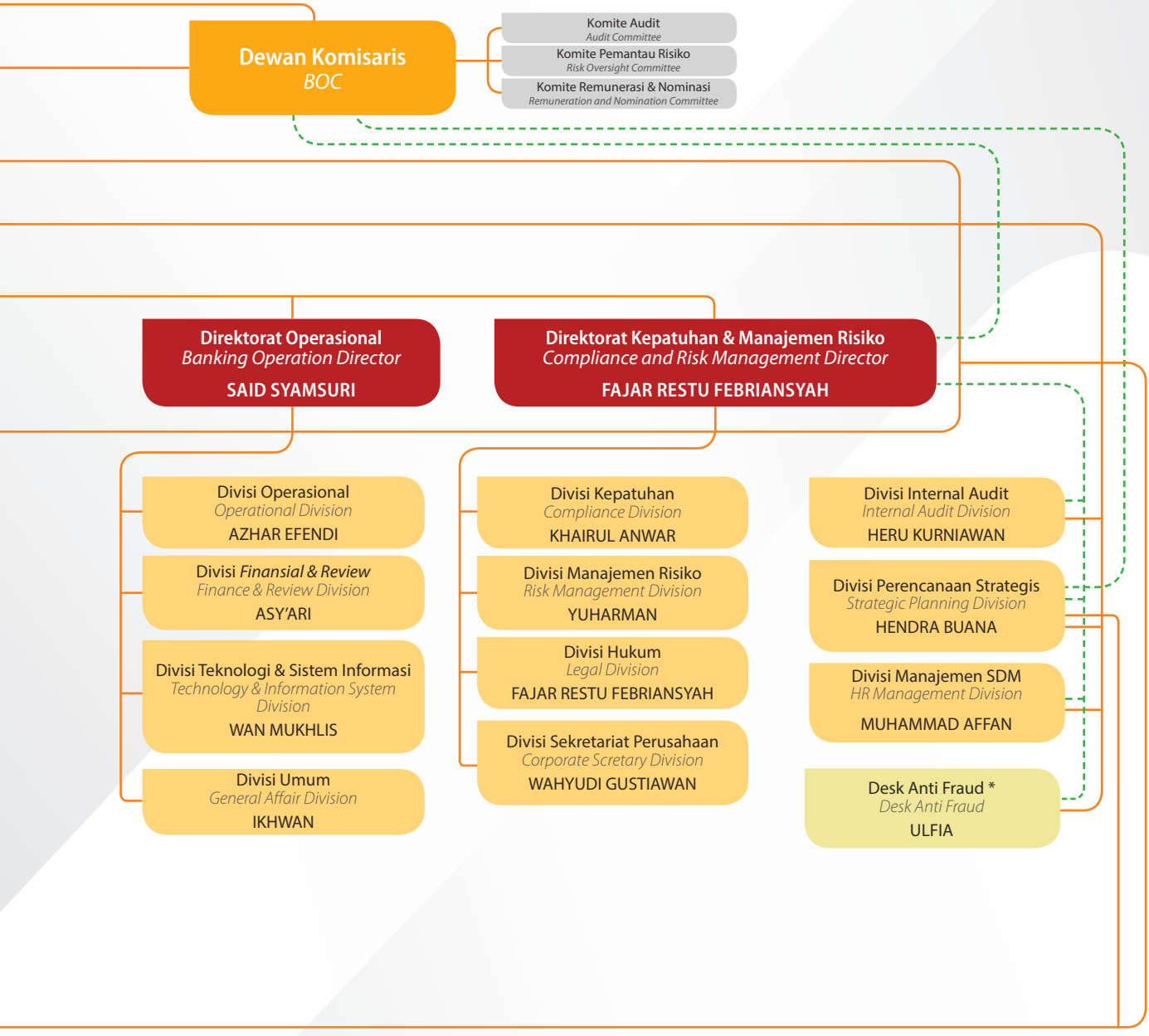
Keterangan :
Explanation :

Garis Pelaporan
Reporting Line

Garis Koordinasi
Coordination Line

Lampiran Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 053/KEPDIR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Attachment to the Decision of the Board of Directors of PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No. 053/KEPDIR/2021 dated August 9, 2021 concerning Organizational Structure and Work Procedures.


Dewan Komisaris
BOC
Komite Audit
Audit Committee
Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee
Komite Remunerasi & Nominasi
Remuneration and Nomination Committee
Direktorat Operasional
Banking Operation Director
SAID SYAMSURI
Direktorat Kepatuhan & Manajemen Risiko
Compliance and Risk Management Director
FAJAR RESTU FEBRIANSYAH
Divisi Operasional
Operational Division
AZHAR EFENDI
Divisi Finansial & Review
Finance & Review Division
ASY'ARI
Divisi Teknologi & Sistem Informasi
Technology & Information System Division
WAN MUKHLIS
Divisi Umum
General Affair Division
IKHWAN
Divisi Kepatuhan
Compliance Division
KHAIRUL ANWAR
Divisi Manajemen Risiko
Risk Management Division
YUHARMAN
Divisi Hukum
Legal Division
FAJAR RESTU FEBRIANSYAH
Divisi Sekretariat Perusahaan
Corporate Scretary Division
WAHYUDI GUSTIAWAN
Divisi Internal Audit
Internal Audit Division
HERU KURNIAWAN
Divisi Perencanaan Strategis
Strategic Planning Division
HENDRA BUANA
Divisi Manajemen SDM
HR Management Division
MUHAMMAD AFFAN
Desk Anti Fraud *
Desk Anti Fraud
ULFIA

VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE

VISI

"Mewujudkan Bank Riau Kepri Terkemuka, Terpercaya, dan Berdaya Saing Dalam Menggerakkan Perekonomian"

"Becoming a Leading, Trusted, and Competitive Islamic Bank in Driving the Economy"

MISI

- Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi nasional;
- Memberikan solusi layanan keuangan berbasis syariah dengan dukungan teknologi terkini;
- Memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mencapai kesejahteraan umat;
- Mengelola dana daerah dan dunia usaha nasional secara optimal dan profesional;
- Mengembangkan SDI berkualitas yang siap menghadapi transformasi dalam nilai-nilai syariah universal.

- *Encourage sustainable regional economic growth towards national economic development;*
- *Provide sharia-based financial service solutions with the support of the latest technology;*
- *Strengthen the development of micro, small, and medium enterprises to achieve the welfare of the people;*
- *Manage regional and national business funds optimally and professionally;*
- *Develop quality human resources that are ready to face transformation in universal sharia values.*

Kata "terkemuka" bermakna bahwa Bank Riau Kepri berkeinginan untuk menjadi lokomotif penggerak di dalam menjalankan mandatnya sebagai agen pembangunan daerah serta menjadi mitra handal bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Bank Riau Kepri merupakan bank kebanggaan bagi masyarakat Riau Kepri.

Leading" means that Bank Riau Kepri wish to be locomotive activator in performing its mandate as an agent of regional development and becoming a reliable partner for the regional government to encourage regional economic growth. Bank Riau Kepri is a pride bank for Riau and Riau Kepri people.

Kata "terpercaya" bermakna bahwa baik para stakeholder maupun investor memiliki kepercayaan terhadap Bank Riau Kepri sebagai suatu institusi keuangan. Stakeholder (Pemerintah Daerah, OJK) memiliki trust bahwa Bank Riau Kepri mampu memberikan layanan perbankan prima untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi unggulan di Daerah dengan tetap menjaga kesehatan bank pada level yang baik. Dari sisi investor, Bank Riau Kepri dipercaya dapat memberikan imbal hasil yang kompetitif.

Trusted" means that the stakeholders and investors are having trust in Bank Riau Kepri as a financial institution. Stakeholders (regional government, Finance Service Authority (OJK)) have a trust that Bank Riau Kepri is able to provide excellent banking services in driving the leading economic sectors in the region while maintaining the bank soundness to the good level. From the investor, Bank Riau Kepri is believed to provide the competitive returns.

Frasa "berdaya saing" bermakna Bank Riau Kepri memiliki level kinerja yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan bank-bank lain yang beroperasi di Provinsi Riau dan Kepri. Ketika melebarkan sayap operasinya ke luar wilayah Riau dan Kepri, mereka juga mampu menunjukkan kinerja yang setara dengan bank umum nasional.

"Competitive" phrase that Bank Riau Kepri has an equivalent or better performance level compared to other banks which is operating in Riau and Riau Kepri Province. When they expanded their operations outside of Riau and Riau Kepri, they were also able in demonstrating equivalent performance to national commercial banks

MENJADI BANK **TERKEMUKA, TERPERCAYA**, DAN **BERDAYA SAING** DALAM MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN REGIONAL

Frasa ini mencerminkan pemenuhan amanat bahwa sebagai bank pembangunan Daerah, Bank Riau Kepri memiliki aspirasi untuk menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan bagi sektor ekonomi unggulan dan potensial di Daerah yang berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

This phrase reflects the fulfillment of the mandate that as a regional development bank, Bank Riau Kepri has aspirations to become the locomotive of growth for leading and potential economic sectors in the region that contribute to increasing national economic growth.



PENJELASAN MISI
EXPLANATION OF MISSION

Mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah yang berkelanjutan
Encouraging sustainable economic growth and regional development

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan tumbuhnya ekonomi di berbagai sektor usaha, baik mikro, kecil, menengah maupun komersial. Bank Riau Kepri mendorong pertumbuhan sejumlah sektor usaha berikut:

- Sektor usaha yang telah menjadi andalan Bank Riau Kepri selama ini dalam hal penyaluran kredit,
- Sektor usaha unggulan di wilayah Riau dan Kepri,
- Sektor usaha potensial (maritim dan pariwisata).

Dalam konteks ini, Bank Riau Kepri memiliki kepiawaian di dalam menyalurkan kredit produktif ke sektor-sektor tersebut dan sekaligus menekan angka kredit macet jauh di bawah ambang yang dipersyaratkan. Frasa ini juga bermakna bahwa Bank Riau Kepri turut membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah.

Mendorong pembangunan Daerah menunjukkan bahwa Bank Riau Kepri mampu berperan di dalam menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya masyarakat yang lebih sejahtera.

Frasa "yang berkelanjutan" bermakna Bank Riau Kepri akan selalu mencari cara-cara inovatif agar dampak positif yang diberikan kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah berlangsung untuk horizon waktu yang panjang.

Economic growth was marked by economic growth in various business sectors, both micro, small, medium or commercial. Bank Riau Kepri encouraged the growth of the following business sectors:

- *Business sector that has becoming the mainstay of Bank Riau Kepri so far in terms of lending,*
- *The leading business sectors in Riau Kepri,*
- *Potential business sector (maritime and tourism).*

In this context, Bank Riau Kepri are having expertise in disbursing productive loans to these sectors and pressing the number of non-performing loans below the limit required. This words also means that Bank Riau Kepri participates in nurturing and developing for micro, small and medium business.
Encouraging the regional development shown that Bank Riau Kepri able to play a role in creating an equal business opportunity, at in the end for the communityto be more prosperous.



Memberikan solusi layanan keuangan yang prima
Providing excellent financial services solution

Nasabah Bank Riau Kepri memiliki beragam kebutuhan sesuai dengan usianya. Tahap kehidupan manusia dimulai dari kebutuhan biaya kelahiran anak, pendidikan anak, sampai ke persiapan hari tua. Produk dan solusi keuangan untuk konsumer maupun bisnis akan selalu berinovasi mengikuti perkembangan pasar dan teknologi.

Nasabah Bank Riau Kepri memiliki beragam kebutuhan sesuai dengan usianya. Tahap kehidupan manusia dimulai dari kebutuhan biaya kelahiran anak, pendidikan anak, sampai ke persiapan hari tua. Produk dan solusi keuangan untuk konsumer maupun bisnis akan selalu berinovasi mengikuti perkembangan pasar dan teknologi.

Mengelola dana Daerah secara optimal dan profesional
Managing regional funds optimally and professionally

Mengelola dana Daerah secara optimal dan professional bermakna bahwa bank memiliki sumber daya yang kompeten dengan menerapkan sistem yang unggul dalam menyalurkan dana tersebut menjadi kredit produktif yang mampu menggerakkan dunia usaha disertai jaminan bahwa pengembaliannya berada pada tingkat yang wajar.

Managing regional funds optimally and professionally means that the Bank are having competent resources by applying an excellent system in disbursing these funds into productive loans that are capable of driving the business world along with assurance that the returns on Loan are at reasonable level.

Dasar Pengesahan Visi dan Misi Perusahaan
Ratification Basis for the Vision and Mission of the Company

Visi Misi Bank Riau Kepri disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi bersamaan dengan pengesahan Corporate Plan Bank Riau Kepri tahun 2018-2021 berdasarkan SK Direksi No. 096/KEPDIR/2018 tanggal 29 November 2018.

Vision and Mission of Bank Riau Kepri are ratified by Board of Commissioners and Board of Director along with the ratification of Bank Riau Kepri Corporate Plan in 2018-2021 based on Board of Director Decree No.096/KEPDIR/2018 dated November 29, 2018.

Review Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Di tahun 2021, Direksi dan Dewan Komisaris secara periodik telah melakukan penelaahan atas Visi dan Misi Bank. Visi dan misi telah tertuang dalam Corporate Plan Bank Riau Kepri tahun 2017-2021 yang telah dimuat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021-2023. Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa Visi, Misi masih relevan dan belum diputuskan untuk dirubah. Berdasarkan hasil evaluasi di tahun 2020, arah pencapaian visi dan misi telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Review of The Vision and Mission by The Board of Commissioners and The Board of Directors

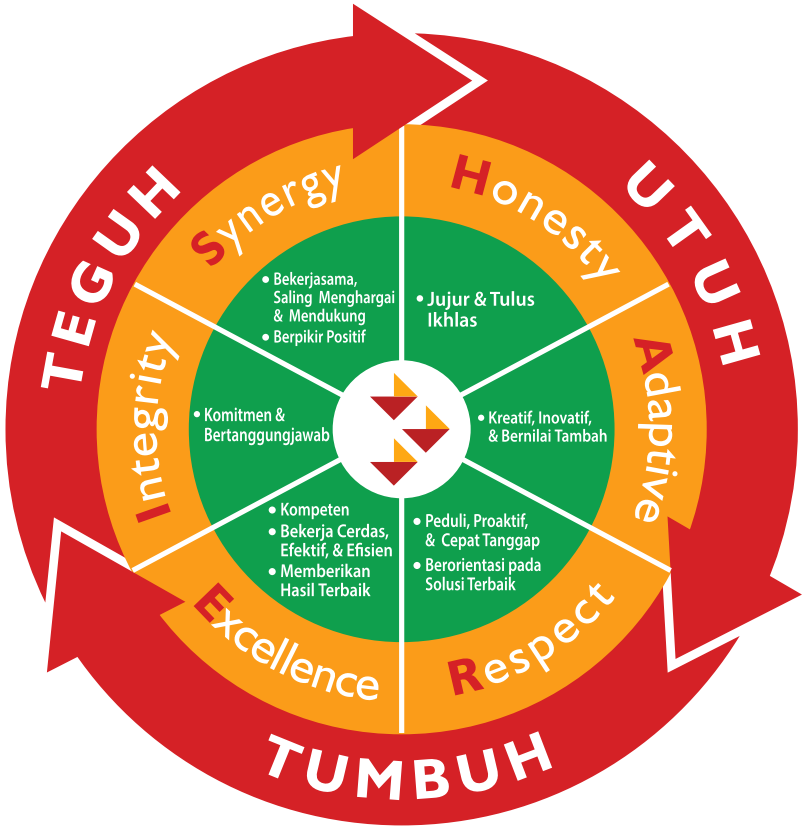
In 2021, the Board of Directors and the Board of Commissioners have periodically reviewed the Bank's Vision and Mission. The vision and mission have been stated in the 2017-2021 Bank Riau Kepri Corporate Plan which has been included in the Bank's Business Plan (RBB) 2021-2023. The Board of Commissioners and the Board of Directors consider that the Vision and Mission are still relevant and have not yet been decided to be changed. Based on the results of the evaluation in 2020, the direction for achieving the vision and mission is in accordance with what has been set.Corporate Values

Nilai-Nilai Perusahaan

Guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Perusahaan, Bank Riau Kepri merumuskan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai ini lahir dari Filosofi/Pernyataan Korporat yang dituangkan dalam pernyataan perilaku utama sebagai berikut:

Corporate Values

In order to support the achievement of the Company's Vision and Mission, Bank Riau Kepri formulates company values. These values are born from the Corporate Philosophy / Statement which is outlined in the main statement of behavior as follows:



Budaya Perusahaan

Dalam rangka upaya mendukung konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah secara mendasar dan menyeluruh maka Bank Riau Kepri tahun 2021 telah melakukan penajaman kultur perusahaan guna menyatukan pola pikir dan gerak langkah para pemangku kepentingan khususnya pegawai sebagai ujung tombak institusi.

Corporate Culture

In an effort to support the conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank in a fundamental and comprehensive manner, Bank Riau Kepri in 2021 has sharpened corporate culture in order to unite the mindset and actions of stakeholders, especially employees as the spearhead of the institution.

Penjabaran pernyataan budaya perusahaan (*corporate culture statement*) Bank Riau Kepri tetap bersumber dari filosofi perusahaan yang sudah ditumbuh- kembangkan di setiap insan Bank Riau Kepri, yaitu: "Teguh, Utuh, Tumbuh". Dari pernyataan budaya perusahaan Bank Riau Kepri dijabarkan "nilai-nilai budaya Bank Riau Kepri" yang menjadi landasan dan pedoman setiap insan dalam berpikir, bertindak dan berperilaku melaksanakan aktivitas keseharian.

The elaboration of the corporate culture statement of Bank Riau Kepri still comes from the corporate philosophy that has been developed in every person of Bank Riau Kepri, namely: "True, Whole, Grow". From the statement of the corporate culture of Bank Riau Kepri, it is described "the cultural values of Bank Riau Kepri" which are the basis and guidelines for every human being in thinking, acting and behaving in carrying out daily activities.

Nilai-nilai budaya Bank Riau Kepri yang baru adalah "*I SHARE*" yang terdiri dari:

The new cultural values of Bank Riau Kepri are "I SHARE" which consists of:



Nilai-nilai budaya tersebut di atas, dijabarkan ke dalam perilaku utama secara nyata yang dapat menjadi landasan dan pedoman bagi insan Bank Riau Kepri dalam berperilaku dan bertindak untuk mengambil keputusan. Proses penajaman nilai-nilai budaya dan Perilaku Utama Insan Bank Riau Kepri dilakukan melalui kebijakan strategis, kompetisi internal, wawancara & observasi, focus grup discussion, dan survey, maka telah disusun 10 (sepuluh) perilaku utama yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai penajaman kultur yaitu sebagai berikut :

The cultural values mentioned above are translated into real main behaviors that can be the basis and guidelines for Bank Riau Kepri personnel in behaving and acting to make decisions. The process of sharpening cultural values and the main behavior of Bank Riau Kepri personnel is carried out through strategic policies, internal competition, interviews & observations, focus group discussions, and surveys. namely as follows:

Integrity	1. Komitmen & bertanggungjawab *1. Commitment and responsibility*
Sinergy	2. Bekerjasama, Saling Menghargai dan Mendukung 3. Berpikir Positif *2. Cooperate, Respect, and Support* *3. Positive Thinking*
Honesty	4. Jujur & tulus ikhlas *4. Honest and sincere*
Adaptive	5. Kreatif, Inovatif dan bernilai tambah *5. Creative, Innovative and value added*
Respect	6. Peduli, proaktif dan cepat tanggap 7. Berorientasi pada hasil terbaik *6. Caring, proactive and responsive* *7. Best result oriented*
Excellence	8. Kompeten 9. Bekerja cerdas, efektif dan efisien 10. Memberikan hasil terbaik *8. Competent* *9. Work smart, effective and efficient* *10. Gives the best results*

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PERUSAHAAN
Company Objectives, Goals, and Strategies

TUJUAN PERUSAHAAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 3 ayat 1, maksud dan tujuan Bank Riau Kepri adalah Berusaha di Bidang Perbankan. Adapun fokus tujuan Perusahaan untuk tahun 2018-2021 sesuai dengan *Corporate Plan* Bank Riau Kepri adalah:

a. Menjadi agen pertumbuhan pembangunan.
b. Menjadi tuan rumah di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
c. Menjadi bank berkelas nasional.
d. Peningkatan *customer-based retail* sebagai sumber pendanaan.
e. Menjadi bank yang sehat dengan koridor *Good Corporate Governance* (GCG).

SASARAN PERUSAHAAN

Seuai dengan *Corporate Plan* Bank Riau Kepri, Sasaran Perusahaan untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya perolehan laba secara berkelanjutan.
b. Meningkatnya pendapatan.
c. Terjaganya efisiensi operasi.
d. Terjaganya ketahanan kelembagaan yang tinggi.
e. Menguatnya peran Bank Riau Kepri sebagai agen pembangunan Daerah.
f. Meningkatnya kepuasan nasabah.
g. Memperkuat permodalan.
h. Meningkatkan inovasi produk dan layanan sesuai kebutuhan segmen.
i. Mendorong perluasan *delivery* channel untuk meningkatkan akses masyarakat.
j. Mendorong pertumbuhan DPK berbiaya murah.
k. Memastikan stabilitas likuiditas.
l. Meningkatkan pangsa pasar kredit produktif sektor usaha unggulan dan potensial di Daerah.
m. Meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran.
n. Memperluas sumber *fee-based income*.
o. Meningkatkan akselerasi pengembangan BUS.
p. Meningkatkan tata kelola dan kepatuhan yang efektif.
q. Mengelola risiko untuk memberi nilai tambah.
r. Meningkatkan pemenuhan SLA dan standarisasi kerja.
s. Mendorong pengembangan kompetensi strategis.
t. Membangun sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi.
u. Membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja.
v. Menerapkan digital banking untuk meningkatkan bisnis.

COMPANY OBJECTIVES

In accordance with the Articles of Association of the Company Article 3 paragraph 1, the purpose and objective of Bank Riau Kepri is to do business in the banking sector. The focus of the Company's objectives for 2020 -2022 in accordance with the Corporate Plan of Bank Riau Kepri are:

a. Become an agent of development growth.
b. To host in Riau Province and Riau Islands Province.
c. Become a national class bank.
d. Increase in customer-based retail as a source of funding.
e. Become a healthy bank with the corridor of Good Corporate Governance (GCG).

COMPANY GOALS

In accordance with the Corporate Plan of Bank Riau Kepri, the Company's targets for the next 5 (five) years are as follows:

a. Increase profit in a sustainable manner.
b. Increase income.
c. Maintain operating efficiency.
d. Maintain high institutional resilience.
e. Strengthen the role of Bank Riau Kepri as an agent for regional development.
f. Increase customer satisfaction.
g. Strengthen capital.
h. Increase product and service innovation according to segment needs.
i. Encourage the expansion of delivery channels to increase public access.
j. Encourage the growth of low-cost third party funds.
k. Ensure liquidity stability.
l. Increase the market share for productive credit in the leading and potential business sectors in the Region.
m. Increase the effectiveness of marketing communications.
n. Expand the source of fee-based income.
o. Increase the acceleration of BUS development.
p. Promote effective governance and compliance.
q. Manage risk to add value.
r. Improve compliance with SLA and work standardization.
s. Encourage the development of strategic competencies.
t. Build an integrated HR management system.
u. Build a performance-oriented organizational culture.
v. Implement digital banking to improve business.

Untuk mewujudkan tujuan Perusahaan, Bank Riau Kepri telah menetapkan langkah-langkah strategis Perusahaan tahun 2018-2021 sebagai berikut :

To realize the Company's goals, Bank Riau Kepri has set the Company's strategic steps for 2018-2021 as follows:

Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi Perusahaan
Table of Company Objectives, Goals, and Strategies

Tujuan	*Purpose*	Sasaran Strategis yang Mendukung	*Supporting Strategic Goals*
Menjadi agen pertumbuhan pembangunan	*Become an agent of development growth*	Menguatnya peran Bank Riau Kepri sebagai agen pembangunan daerah.	*Strengthening the role of Bank Riau Kepri as an agent for regional development.*
Menjadi tuan rumah di Provinsi Riau dan Kepri	*To host in Riau and Riau Islands Provinces*	Meningkatnya kepuasan nasabah.	*Increased customer satisfaction.*
		Meningkatkan inovasi produk dan layanan sesuai kebutuhan segmen.	*Increase product and service innovation according to segment needs.*
		Mendorong perluasan *delivery channel* untuk meningkatkan akses masyarakat.	*Encouraging the expansion of delivery channels to increase public access.*
		Meningkatkan pangsa pasar kredit produktif sektor usaha unggulan dan potensial di daerah.	*Increase the market share for productive credit in the leading and potential business sectors in the regions.*
		Mendorong pengembangan kompetensi strategis.	*Encourage the development of strategic competencies.*
Menjadi bank berkelas nasional	*To be a classy bank nationa*	Meningkatnya perolehan laba secara berkelanjutan.	*Increased profit in a sustainable manner.*
		Meningkatnya pendapatan.	*Increased income.*
		Terjaganya efisiensi operasi.	*Maintained operating efficiency.*
		Terjaganya ketahanan kelembagaan yang tinggi.	*Maintained high institutional resilience.*
		Memperkuat permodalan.	*Strengthen capital.*
		Memastikan stabilitas likuiditas.	*Ensuring liquidity stability.*
		Memperluas sumber *fee-based income*.	*Expanding the source of fee-based income.*
		Meningkatkan pemenuhan SLA dan standarisasi kerja.	*Improve compliance with SLA and work standardization.*
		Membangun sistem pengelolaan SDM yang terintegrasi.	*Building an integrated HR management system.*
		Membangun budaya organisasi yang berorientasi pada kinerja.	*Build a performance-oriented organizational culture.*
		Menerapkan *digital banking* untuk meningkatkan bisnis.	*Implementing digital banking to improve business.*
Peningkatan *Customer based retail* sebagai sumber pendanaan	*Increase in customer based retail as a source of funding*	Mendorong pertumbuhan DPK berbiaya murah.	*Encouraging the growth of low-cost third party funds.*
		Meningkatkan efektivitas komunikasi pemasaran.	*Increase the effectiveness of marketing communications.*
		Meningkatkan akselerasi pengembangan BUS.	*Increase the acceleration of BUS development.*
Menjadi bank yang sehat dengan koridor GCG	*Become a healthy bank with the GCG corridor*	Meningkatkan tata kelola dan kepatuhan yang efektif.	*Promote effective governance and compliance.*
		Mengelola risiko untuk memberi nilai tambah.	*Manage risk to add value.*

Adapun fokus Langkah-langkah strategis yang menjadi fokus Bank Riau Kepri tahun 2021 antara lain adalah:

a. Ayo Syariah

Pengelolaan Organisasi & SDI Berlandaskan Prinsip Syariah, meliputi :

1. Membangun *Corporate Culture*
   - *Service* dan *Culture Blue Print*
   - Bank *Service Excellence Monitor* (BSEM)
   - Evaluasi Kualitas Pelayanan Unit Kantor oleh Pihak Eksternal
   - Review Video Standar Pelayanan
   - *Refreshment Coaching, Role Play Intensive* dan Internalisasi Budaya Seluruh Jaringan Unit Kantor
   - Duta Layanan
   - *Culture & Service Fair*
2. Membangun Human Capital
   - Pelaksanaan *training* di bidang Syariah
   - Pelaksanaan Program Pengembangan Sharia *Leadership*
   - Pelaksanaan *Assessment* (Pegawai, Calon Direksi, dll)
   - Peningkatan Kompetensi Frontliner Berbasis Syariah (*Tes E-Learning*)
   - Review Ketentuan Melanjutkan Pendidikan
   - Pengembangan Sistem *E-Learning*
   - Kajian Digital Library
   - Sertifikasi Auditor
   - Sertifikasi ToT
3. Revitalisasi Brand Perusahaan
   - Konversi menjadi Bank Umum Syariah
   - Pembuatan *Corporate Identity* Bank Umum Syariah
   - Redesign tampilan *Website* dan medsos
   - Infrastruktur sesuai *Corporate Identity* seluruh Jaringan Kantor
4. Sosialisasi/Edukasi
   - Sosialisasi konversi Bank Riau Kepri Syariah pada media sosial
   - Video profil dan produk bank
   - Kebijakan *Website* & Medsos

b. Ayo GRC

Penguatan *Governance, Risk, & Compliance* (GRC), dan Pengembangan Kultur Positif meliputi :

1. Meningkatkan setoran modal dengan penyampaian proposal peningkatan setoran modal kepada pemegang saham
2. *Internal Control System*
   - Implementasi Aplikasi goAML
   - Penyesuaian Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK)
   - Implementasi *Middle Office Treasuri* untuk memitigasi Risiko
3. Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank
   - Optimalisasi Aplikasi TKB sejalan dengan prinsip syariah

The focus of the strategic steps that will be the focus of Bank Riau Kepri in 2021 include is:

a. Come on Sharia

Organizational Management & Human Resources Based on Sharia Principles, including:

1. *Building Corporate Culture*
   - *Service and Culture Blue Print*
   - *Bank Service Excellence Monitor (BSEM)*
   - *Evaluation of Service Quality of Office Units by External Parties*
   - *Service Standard Video Review*
   - *Refreshment Coaching, Intensive Role Play and Cultural Internalization of the Entire Office Unit Network*
   - *Service Ambassador*
   - *Culture & Service Fair*
2. *Building Human Capital*
   - *Implementation of training in the field of Sharia*
   - *Implementation of Sharia Leadership Development Program*
   - *Implementation of the Assessment (Employees, Candidates for Directors, etc.)*
   - *Sharia-Based Frontliner Competency Improvement (E-Learning Test)*
   - *Review of Conditions for Continuing Education*
   - *E-Learning System Development*
   - *Digital Library Study*
   - *Auditor Certification*
   - *ToT Sertifikasi Certification*
3. *Company Brand Revitalization*
   - *Conversion to Islamic Commercial Bank*
   - *Making Corporate Identity for Sharia Commercial Banks*
   - *Website and social media display redesign*
   - *Infrastructure according to Corporate Identity throughout the Office Network*
4. *Socialization/Education*
   - *Socialization of the conversion of Bank Riau Kepri Syariah on social media*
   - *Profile videos and bank products*
   - *Website & Social Media Policy*

b. Come on GRC

Strengthening Governance, Risk, & Compliance (GRC), and Developing a Positive Culture include:

1. *Increase paid-in capital by submitting proposals to increase paid-up capital to shareholders*

2. *Internal Control System*
   - *GoAML Application Implementation*
   - *Compliance Information System (ASIK) Application Adjustment*
   - *Implementation of Treasury Middle Office to mitigate Risk*
3. *Bank Soundness Level Improvement*
   - *Optimization of the TKB Application in line with sharia principles*

- Optimalisasi Aplikasi ICAAP sejalan dengan prinsip syariah
- Optimalisasi Aplikasi Profil Risiko Cabang sejalan dengan prinsip syariah
- Modeling *Industry Risk Rating* (IRR)
- BPP SALMA
- Annual Report 2020

4. Penguatan *Three Lines of Defense*
   - Rancangan Formulir Program APU-PPT Dalam Berhubungan Usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan Pemilik Manfaat
   - Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU PPT
   - Pelaksanaan Audit di Kantor Pusat dan jaringan kantor termasuk ATM
   - BPP Sekretaris Perusahaan
   - BPP Program Kemitraan
   - Penyusunan SOP *Credit Review and Institutional Review*
   - *Review* Kebijakan Pembiayaan Bank
   - *Review* Pedoman dan Mekanisme Kerjasama dengan Notaris/PPAT, Kantor Jasa Penilai Publik dan Kantor Akuntan Publik
   - *Review* Kebijakan Penyelesaian Kerugian Pihak Ketiga Akibat Kesalahan dan/atau Kelalaian Pegawai Bank
   - *Review* Kebijakan Prosedur Pelaksanaan Penanganan Perkara Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Wilayah Riau dan Wilayah Kepulauan Riau
   - Penggunaan Asuransi Hukum
   - Buku Kebijakan Kepatuhan terkait Konversi BUS
   - Buku Kebijakan *Quality Assurance* Kantor Pusat dan Kantor Cabang
5. *Anti Fraud & Whistle Blowing System*
   - Perubahan BPP Strategi Anti *Fraud*
   - Pengembangan Aplikasi Anti *Fraud*
   - *Sosialisasi & In House Training Fraud Awareness* & Aplikasi *Anti Fraud*
   - Pelatihan investigasi *fraud*
   - Otorisasi Transaksi mempergunakan *Finger Print*

c. Ayo Ritel

Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat Riau & Kepri, meliputi :

1. Mendorong pertumbuhan DPK berbiaya murah
   - Penambahan Agen Laku Pandai dan BSA
   - Kerja sama dengan BLUD, Institusi Pendidikan, BUMD
2. Mengembangkan produk dan layanan non tunai bagi PEMDA dan masyarakat
   - Peningkatan Klasifikasi Agen Laku Pandai
   - Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
   - Pengembangan Aplikasi E-Samsat
   - Aplikasi Layanan PBB Kolektif
   - Pengembangan fitur e-channel

- *Optimization of the ICAAP Application in line with sharia principles*
- *Optimization of Branch Risk Profile Applications in line with sharia principles*
- *Modeling Industry Risk Rating (IRR)*
- *BPP SALMA*
- *Annual Report 2020*

4. *Strengthening the Three Lines of Defense*
   - *Draft APU-PPT Program Forms in Business Relations with Prospective Customers, Customers, WIC and Beneficial Owners*
   - *Completion of Policies and Procedures for the Implementation of the AML-CFT Program*
   - *Audit implementation at Head Office and office network including ATM*
   - *BPP Corporate Secretary*
   - *BPP Partnership Program*
   - *Preparation of SOP Credit Review and Institutional Review*
   - *Bank Financing Policy Review*
   - *Review of Guidelines and Cooperation Mechanisms with Notaries/PPAT, Public Appraisal Service Offices and Public Accounting Firms*
   - *Review of Third Party Loss Settlement Policy Due to Errors and/or Negligence of Bank Employees*
   - *Review of Policies on Procedures for Handling Civil Cases by the State Attorney for the Riau Region and Riau Archipelago Region*
   - *Use of Legal Insurance*
   - *Compliance Policy Book regarding BUS Conversion*
   - *Quality Assurance Policy Book for Head Office and Branch Offices*
5. *Anti Fraud & Whistle Blowing System*
   - *Changes in BPP Anti-Fraud Strategy*
   - *Anti Fraud Application Development*
   - *Fraud Awareness Socialization & In House Training & Anti Fraud Application*
   - *Fraud investigation training*
   - *Transaction Authorization using Finger Print*

c. *Come on Retail*

To become the Sharia Bank of choice for the people of Riau & Riau Islands, including:

1. *Encouraging low-cost TPF growth*
   - *Addition of Laku Pandai Agent and BSA*
   - *Cooperation with BLUD, Educational Institutions, BUMD*
2. *Develop non-cash products and services for LGs and communities*
   - *Improved Classification of Laku Pandai Agen Agents*
   - *Local Government Information System (SIPD)*
   - *E-Samsat Application Development*
   - *United Nations Collective Service Application*
   - *Development of e-channel features*

d. Ayo Produktif

Menjadi Bank Syariah yang berperan penting dan nyata dalam mendorong perekonomian regional, meliputi :

1. Fokus pada *core business*
   - Penyaluran kredit/pembiayaan konsumtif (KAG, PAG, FLPP)
   - Penyaluran KUR
   - Prospek calon debitur kredit replanting
2. Meningkatkan inovasi produk & layanan sesuai kebutuhan segmen
   - Sistem Pemotongan Angsuran Pinjaman ASN melalui aplikasi CMS
   - Sosialisasi *Supply Chain Financing*
   - *Review pricing* seluruh produk
3. Terjaganya ketahanan kelembagaan tinggi
   - Pelatihan bagi pengurus KUD mengenai persiapan *Replanting* Perkebunan Sawit
   - Pengendalian NPL/NPF
   - Penyelamatan/Penyelesaian NPL/NPF dan Hapus Buku
   - Aplikasi monitoringNPL/NPF
   - Optimalisasi penagihan NPL/NPF dan Hapus Buku
   - Penyelesaian kredit/Pembiayaan bermasalah secara litigasi
   - Hapus Buku

e. Ayo Efisien

Menjadi Bank Syariah yang Sehat, Efisien, dan Menguntungkan, meliputi :

1. Program Pengendalian Biaya/Efisiensi & Efektifitas
   - Kebijakan Pengendalian Anggaran
   - Kajian kebijakan SDI terkait UU Cipta Kerja
   - Penghitungan WLA (*Work Load Analysis*)
   - Simplikasi formulir pembukaan rekening
   - Kajian Reklasifikasi Jaringan Kantor
   - Kajian Peningkatan Status Kedai menjadi Cabang Pembantu
   - Kajian pelaksanaan *central operation*
2. Program Peningkatan *Fee Based Income* (*Ujroh*)
   - Izin Debit *as Issuer*
   - Penambahan *Biller*
   - Layanan *Cross Border* ATM Al-Rajhi
   - EDC NSICCS
   - *Review* kebijakan biaya administrasi seluruh produk
3. Pemenuhan SLA & standarisasi kerja
   - Aplikasi *System Deposito Special Rate* berbasis *Web Service*
   - Sentralisasi pengelolaan CCTV ATM *off bank* untuk wilayah Pekanbaru
   - Aplikasi Perantara *Core Banking System* (CBS) dan *Call Center*
   - Aplikasi CBS Bank Indonesia
   - Aplikasi Naskah Dinas
   - Penanganan *fraud* (5 hari kerja)
   - Pembuatan Aplikasi *Monitoring* Perjanjian Kerjasama
   - Modul Scoring untuk Kredit Konstruksi

d. Let's be Productive

To become a Sharia Bank that plays an important and real role in encouraging the regional economy, including:

1. *Focus on core business*
   - *Credit distribution/consumptive financing (KAG, PAG, FLPP)*
   - *KUR distribution*
   - *Prospects of replanting credit debtors*
2. *Increase product & service innovation according to segment needs*
   - *ASN Loan Installment Withholding System through the CMS application*
   - *Supply Chain Financing Outreach*
   - *Price review for all products*
3. *Maintaining high institutional resilience*
   - *Training for KUD administrators on preparation for palm oil plantation replanting*
   - *NPL/NPF Control*
   - *Rescue/Resolve NPL/NPF and Erase Books*
   - *NPL/NPF monitoring application*
   - *Optimization of NPL/NPF billing and Delete Books*
   - *Settlement of non-performing loans/financing by litigation*
   - *Delete Book*

e. Come on Efficient

Becoming a Healthy, Efficient, and Profitable Sharia Bank, including:

1. *Program Cost Control/ Efficiency & Effectiveness*
   - *Budget Control Policy*
   - *Study of SDI policies related to the Job Creation Act*
   - *WLA Calculation (Work Load Analysis)*
   - *Simplify the account opening form*
   - *Office Network Reclassification Study*
   - *Study on the Improvement of Store Status to Sub-Branch*
   - *Study on the implementation of central operations*
2. *Fee Based Income (Ujroh) Improvement Program*
   - *Debit Permit as Issuer*
   - *Add Biller*
   - *Al-Rajhi ATM ATM Cross Border Service*
   - *EDC NSICCS*
   - *Review of all product administration fee policies*
3. *SLA fulfillment & work standardization*
   - *Web Service-based Special Rate Deposit System Application*
   - *Centralized management of off-bank ATM CCTV for the Pekanbaru area*
   - *Intermediary Application for Core Banking System (CBS) and Call Center*
   - *CBS Bank Indonesia Application*
   - *Official Manuscript Application*
   - *Fraud handling (5 working days)*
   - *Making the Cooperation Agreement Monitoring Application*
   - *Scoring Module for Construction Credit*

- Implementasi Aplikasi Kelolaan AO
- Implementasi Host to Host KPR FLPP versi 2
- Aplikasi Broker
- BPP Pengadaan Barang dan Jasa
- BPP Manajemen Building

f. Ayo Digital

Penguatan TI & Layanan Digital menuju *Open Banking*, meliputi :

1. Penguatan TI Infrastruktur
   - *Security Operation Center* (SOC)
   - Menyiapkan dan pemenuhan infrastruktur Jaringan Komunikasi di Lokasi DRC.
   - Pemenuhan infrastruktur aplikasi kritikal di lokasi DC dan DRC.
   - Implementasi *Load Traffic Management* untuk *Environment Production* (*New M-Banking*, CMS dan SKPD *Online*)
   - Penggantian perangkat HSM yang telah *End of Support DC* dan DRC
   - Penambahan DASD AS400 Production
   - Peremajaan Infrastruktur yang telah *End of Support, End of Live,* dan *End of Warranty*
   - *Upgrade Treasury System Quantum* dengan Modul Syariah
   - *Upgrade* SWIFT Versi 7.3 ke Versi 7.5
   - Konversi *corebanking system* konvensional ke BUS
2. Implementasi *Digital Banking*
   - *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS)
   - *Cash Management System* (CMS) *phase 2*(pengembangan fitur)
   - *Virtual Account Gen 2*
   - E Form
   - Tarik tunai tanpa kartu
   - Kajian digital branch
3. Kooperasi Bank-*fintech-paytech*
   - Aliansi pembiayaan dengan *Fintech peer to peer lending*
4. Integrated HC *Management* dengan Implementasi Aplikasi SKI online
5. Sentralisasi MIS-*Dashboard-Reporting*
   - Sistem Pelaporan ke Regulator
   - Upgrade Aplikasi KPI Online

- *AO Management Application Implementation*
- *Implementation of Host to Host KPR FLPP version 2*
- *Broker App*
- *BPP Procurement of Goods and Services*
- *BPP Building Management*

f. Come on Digital

Strengthening IT & Digital Services towards Open Banking, including:

1. *Strengthening IT Infrastructure*
   - *Security Operation Center (SOC)*
   - *Prepare and fulfill the Communication Network infrastructure at DRC Locations.*
   - *Fulfillment of critical application infrastructure at DC and DRC locations.*
   - *Implementation of Load Traffic Management for Environment Production (New M-Banking, CMS and SKPD Online)*
   - *Replacement of HSM devices that have End of Support DC and DRC*
   - *Added DASD AS400 Production*
   - *Infrastructure Rejuvenation with End of Support, End of Live, and End of Warranty*
   - *Upgrade Treasury System Quantum with Sharia Module*
   - *Upgrade SWIFT Version 7.3 to Version 7.5*
   - *Conversion of conventional core banking system to BUS*
2. *Implementation of Digital Banking*
   - *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*
   - *Cash Management System (CMS) phase 2(feature development)*
   - *Virtual Account Gen 2*
   - *E-Form*
   - *Withdraw cash without card*
   - *Digital branch study*
3. *Bank-fintech-paytech cooperation*
   - *Financing alliance with Fintech peer to peer lending*
4. *Integrated HC Management with Online SKI Application Implementation*
5. *Centralized MIS-Dashboard-Reporting*
   - *Reporting System to Regulator*
   - *Online KPI Application Upgrade*

SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Report



SYAHRIAL ABDI

Komisaris Utama
President Commissioners

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan Laporan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat atas jalannya kepengurusan Bank tahun 2021. Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian Direksi yang mampu memberikan kinerja yang terbaik di tengah kondisi lingkungan bisnis yang cukup menantang di tahun 2021.

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, khususnya pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut perundang-undangan, peraturan dari Otoritas Perbankan/Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.

Dewan Komisaris menukil perintah Allah SWT dalam kitab suci alquran yakni "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130). Dengan dukungan *stakeholder* dan perintah Alquran, Dewan Komisaris mendukung secara penuh Bank Riau Kepri dalam mentransformasikan diri Menjadi Bank Syariah Terkemuka, Terpercaya, dan Berdaya Saing Dalam Menggerakkan Perekonomian".

Beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi kami sampaikan sebagai berikut.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi Bank

Sepanjang tahun 2021 Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis sebagai bentuk tugas pengawasan Dewan Komisaris yang meliputi:

Memberikan persetujuan kepada Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Riau Kepri.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Our respected shareholders and other stakeholders,

On this occasion, please allow us to submit the Report of the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function and providing advice on the management of the Bank in 2021. The Board of Commissioners expresses its highest appreciation for the achievements of the Board of Directors who were able to provide the best performance in the midst of a quite challenging business environment in 2017. 2021.

In carrying out his supervisory duties and providing advice to the Board of Directors, he has directed, monitored and evaluated the implementation of strategic policies, in particular the supervision of management policies, the course of management, as well as carrying out tasks specifically assigned to him according to legislation, regulations from the Banking Authority/Financial Services Authority. , Articles of Association, and resolutions of the GMS.

The Board of Commissioners quoted the command of Allah SWT in the holy book of the Qur'an, namely "O you who believe, do not eat usury doubled and fear Allah so that you will get good luck. Protect yourselves from the fire of hell, which is prepared for the disbelievers." (Qs. Ali Imron [3]: 130). With the support of stakeholders and instructions from the Koran, the Board of Commissioners fully supports Bank Riau Kepri in transforming itself into a Leading, Trusted, and Competitive Sharia Bank in Driving the Economy".

Some important things related to the implementation of our supervisory duties and providing advice to the Board of Directors are as follows.

Supervision of Bank Strategy Implementation

Throughout 2021 the Board of Commissioners has directed, monitored and evaluated the implementation of strategic policies as a form of supervisory duties for the Board of Commissioners which include:

Give approval to the Board of Directors, among others as follows:

1. *Recommendation on the General Audit Report of PT Bank Riau Kepri.*

2. Rekomendasi atas *Progress* Konversi PT Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
3. Rekomendasi atas Penerapan Kebijakan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19.
4. Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit Umum Internal Audit PT Bank Riau Kepri.
5. Rekomendasi atas Laporan *Monitoring Risk Appetite Statement* PT Bank Riau Kepri.
6. Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan dari Divisi Internal Audit mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2021.
7. Rekomendasi atas Laporan Kinerja PT Bank Riau Kepri.
8. Rekomendasi atas Monitoring Kesiapan Bank dalam Pelaporan melalui BI-ANTASENA.
9. Rekomendasi Calon Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri.
10. Rekomendasi atas Laporan Tugas Direktur Kepatuhan PT Bank Riau Kepri.
11. Rekomendasi atas Pembahasan Risiko Kredit Inheren dan Risiko Kredit KPMR pada Laporan OJK kepada Direksi PT Bank Riau Kepri tentang Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2020.
12. Rekomendasi atas Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
13. Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit Tematik Internal Audit PT Bank Riau Kepri.
14. Rekomendasi atas *Action Plan* Penyelesaian Kredit Bermasalah.
15. Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit IT *Core Banking System Vision Sharia Modul* CIF.
16. Rekomendasi atas Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum terkait Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pendelegasian Wewenang Antar Direksi.
17. Rekomendasi atas Kewajiban Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM PT Bank Riau Kepri.
18. Rekomendasi atas Alur Kerja dan SOP pada Divisi di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Direktur Dana & Jasa.
19. Rekomendasi atas Perkembangan *Roadmap* IT *Masterplan* 2018 – 2021.
20. Rekomendasi atas *Risk Appetite Statement* PT Bank Riau Kepri tahun 2022.
21. Rekomendasi atas Peningkatan Pertumbuhan Kredit Minus dan Pertumbuhan NPL Naik.

Selain itu Dewan Komisaris juga Memberikan tanggapan dan saran kepada Direksi

1. Persetujuan Perpanjangan Masa Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Persetujuan Penyesuaian Rencana Keuangan dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT Bank Riau Kepri tahun 2021.

2. *Recommendation on the Conversion Progress of PT Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank (BUS).*
3. *Recommendations on the Implementation of OJK Policy on National Economic Stimulus as a Countercyclical Impact of the Spread of Covid-19.*
4. *Recommendations on the General Audit Report of the Internal Audit of PT Bank Riau Kepri.*
5. *Recommendations on the Monitoring Report on the Risk Appetite Statement of PT Bank Riau Kepri.*
6. *Recommendation on the Application for Approval from the Internal Audit Division regarding the 2021 Work Plan and Budget.*
7. *Recommendations on the Performance Report of PT Bank Riau Kepri.*
8. *Recommendations on Monitoring Bank Readiness in Reporting through BI-ANTASENA.*
9. *Recommendation for the Candidate for the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri.*
10. *Recommendation on the Task Report of the Compliance Director of PT Bank Riau Kepri.*
11. *Recommendations on the Discussion of Inherent Credit Risk and KPMR Credit Risk in the OJK Report to the Directors of PT Bank Riau Kepri regarding the Bank's Soundness Level as of December 2020.*
12. *Recommendations on the Business Plan Realization Report.*
13. *Recommendations on the Thematic Internal Audit Report of PT Bank Riau Kepri.*
14. *Recommendations on the Non-Performing Loans Action Plan.*
15. *Recommendation on the Audit Report of IT Core Banking System Vision Sharia Module CIF.*
16. *Recommendations on the Implementation of Commercial Bank Governance related to the Duties and Responsibilities of the Directors and Delegation of Authority among Directors.*
17. *Recommendations on the Obligation of Providing Credit or Financing for MSMEs at PT Bank Riau Kepri.*
18. *Recommendations on Workflows and SOPs in the Divisions under the Director of Compliance & Risk Management and the Director of Funds & Services.*
19. *Recommendations on the Development of the 2018-2021 IT Masterplan Roadmap.*
20. *Recommendations on the Risk Appetite Statement of PT Bank Riau Kepri in 2022.*
21. *Recommendations for Increasing Minus Credit Growth and Increasing NPL Growth.*

Recommendations on the General Audit Report of the Internal Audit of PT Bank Riau Kepri.

1. *Recommendations on the Monitoring Report on the Risk Appetite Statement of PT Bank Riau Kepri.*
2. *Recommendation on the Application for Approval from the Internal Audit Division regarding the 2021 Work Plan and Budget.*

3. Persetujuan Piagam Audit Intern PT Bank Riau Kepri.
4. Persetujuan Kebijakan dan Pedoman Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit.
5. Persetujuan Usulan Perubahan Pertama Kebijakan Remunerasi Pengurus Bank.
6. Persetujuan Usulan Kebijakan Fasilitas Pembiayaan kepada Pengurus Bank.
7. Persetujuan Divestasi Saham pada BPR Rohil, BPR Gemilang dan PT. Sarana Riau Ventura.
8. Keputusan Pengajuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Riau Kepri
9. Persetujuan Buku Pedoman *Middle Office*.
10. Persetujuan Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri
11. Selain itu dewan Komsiaris juga memberikan saran dalam rangka menghadapi covid 19
12. Dan lain sebagainya.

Nasihat Kepada Direksi

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dan memberikan masukan kepada Direksi, dengan fokus pada Pengawasan *Strategic*, Pengawasan Risiko, Pengawasan Penggunaan Modal dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola bank. Nasihat secara berkala disampaikan Dewan Komisaris pada saat rapat Gabungan dengan Direksi. Pada tahun 2021 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 19 (Sembilan belas) kali.

Penilaian Atas Kinerja Direksi

Di tengah tantangan perekonomian yang menantang, khususnya yang dikarenakan oleh pandemi global *COVID-19*, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian Direksi dalam menghadapi tantangan tersebut. Dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaiannya. Penilaian diberikan dengan mempertimbangkan capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan Bank.

Tahun 2021 dihadapkan pada pandemi *COVID-19* yang berawal dari Tiongkok dan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia dengan dampak yang sang besar terhadap perekonomian global. Krisis Kesehatan yang muncul akibat pandemi *COVID-19* bergeser ke krisis sosial karena beberapa negara melakukan pembatasan sosial untuk mengendalikan penyebaran virus. Namun ternyata pengendalian aktivitas tersebut berujung pada berkurangnya interaksi ekonomi yang justru

3. *Approval of PT Bank Riau Kepri Internal Audit Charter.*
4. *Approval of Credit Rescue and Settlement Policies and Guidelines.*
5. *Approval of the First Amendment to the Bank Management's Remuneration Policy.*
6. *Approval of the Proposed Financing Facility Policy to the Bank Management.*
7. *Approval of Shares Divestment in BPR Rohil, BPR Gemilang and PT. Sarana Riau Venture.*
8. *Decision on Submission of Candidates for Members of the Sharia Supervisory Board of the Sharia Business Unit.*
9. *Middle Office Manual Approval.*
10. *Approval of Temporary Substitute Director for Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri*
11. *In addition, the Board of Commissioners also provides advice in dealing with covid 19*
12. *And so forth.*

Advice to the Board of Directors

The Board of Commissioners carries out the supervisory function on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors periodically and from time to time and provides input to the Board of Directors, with a focus on Strategic Supervision, Risk Monitoring, Capital Use Supervision and Bank Governance Implementation. The Board of Commissioners regularly provides advice during joint meetings with the Board of Directors. In 2021 the Board of Commissioners has held joint meetings with the Board of Directors for 19 (nineteen) times.

Assessment of the Board of Directors Performance

In the midst of challenging economic challenges, especially those caused by the global COVID-19 pandemic, the Board of Commissioners expresses its highest appreciation for the achievements of the Board of Directors in facing these challenges. In assessing the performance of the Board of Directors, the Board of Commissioners considers several aspects as the basis for its assessment. The assessment is given by considering the performance achievements, namely operational performance, financial performance and the soundness of the Bank.

The year 2021 is faced with the COVID-19 pandemic that started in China and spread rapidly to all corners of the world with a huge impact on the global economy. The health crisis that emerged due to the COVID-19 pandemic shifted to a social crisis because several countries implemented social restrictions to control the spread of the virus. However, it turns out that controlling these activities has resulted in a reduction in economic interaction which has actually led to an economic crisis and a financial crisis due to disruption

menimbulkan krisis ekonomi dan krisis keuangan karena terganggunya interaksi pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi dunia menjadi terkoreksi menjadi negatif di tahun 2021 karena banyak negara yang harus mengurangi aktivitias ekonominya.

of market interactions. As a result, world economic growth will be corrected to negative in 2021 because many countries have to reduce their economic activities.

Pemulihan ekonomi global terus berlanjut, bahkan ketika pandemi muncul kembali. Garis patahan yang dibuka oleh *COVID-19* terlihat lebih persisten divergensi jangka pendek diperkirakan akan meninggalkan jejak yang bertahan lama pada kinerja jangka menengah. Akses vaksin dan dukungan kebijakan awal adalah pendorong utama kesenjangan tersebut.

The global economic recovery continues, even as the pandemic reappears. The fault line opened by COVID-19 looks more persistent near term divergence is expected to leave a lasting imprint on the medium term performance. Vaccine access and early policy support are key drivers of the gap.

Penyebaran Delta yang cepat dan ancaman varian baru telah meningkatkan ketidakpastian tentang seberapa cepat pandemi dapat diatasi. Pilihan kebijakan menjadi lebih sulit, menghadapi tantangan multidimensi penurunan pertumbuhan lapangan kerja, kenaikan inflasi, kerawanan pangan, kemunduran akumulasi modal manusia, dan perubahan iklim dengan ruang gerak yang terbatas.

Delta's rapid deployment and the threat of new variants have increased uncertainty about how quickly the pandemic can be contained. Policy choices are becoming more difficult, facing the multidimensional challenges of declining employment growth, rising inflation, food insecurity, declining human capital accumulation, and climate change with limited scope for movement.

Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin, dan Putranto dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau pada tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The Financial Statements have been audited by Public Accounting Firms Bustaman, Ezeddin, and Putranto and obtained an opinion that presents fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Riau as of December 31, 2021 as well as financial performance and cash flows for the year ended on December 31, 2021. the date is in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun oleh Direksi

Setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian dan industry perbankan, Dewan Komisaris berpandangan bahwa prospek usaha yang telah disusun Direksi sudah tepat. Pemulihan perekonomian global diprakirakan sem membaik. Perkembangan tersebut sejalan dengan implementasi vaksinasi di banyak negara untuk membangun *herd immunity* dan mendorong mobilitas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Di Indonesia, Bank Indonesia menempuh langkah-langkah kebijakan sebagai tindak lanjut sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam Paket Kebijakan Terpadu untuk Peningkatan Pembiayaan Dunia Usaha dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi. Berbagai langkah terus diperkuat dengan sinergi kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), perbankan, dan dunia usaha untuk menjaga optimisme dan mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha, dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

After considering the economic conditions and the banking industry, the Board of Commissioners is of the view that the business prospects that have been prepared by the Board of Directors are appropriate. The global economic recovery is predicted to improve. These developments are in line with the implementation of COVID-19 vaccination in many countries to build herd immunity and encourage mobility, as well as the continuation of fiscal and monetary policy stimulus. In Indonesia, Bank Indonesia took policy steps as a follow-up to the policy synergy of the Financial System Stability Committee (KSSK) in the Integrated Policy Package for Increasing Business Financing in the context of Accelerating Economic Recovery. Various steps were continuously strengthened by the policy synergy of the Financial System Stability Committee (KSSK), banks, and the business world to maintain optimism and overcome supply and demand side problems in the distribution of credit/financing from banks to the business world, in order to encourage national economic recovery.

Melihat prospek usaha tersebut serta efektifnya strategi usaha yang telah ditetapkan oleh Direksi, Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat memanfaatkan peluang yang ada. Peluang tersebut antara lain, potensi perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang positif di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dimana penduduk Provinsi Riau merupakan penduduk muslim yang besar di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, ketertarikan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah sangat tinggi. Selain itu, pemanfaatan daerah dan aktivitas pariwisata di Riau Kepri memungkinkan bagi Bank untuk mengembangkan transaksi *money changer* dan *remittance*.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Bagi Dewan Komisaris, penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah suatu keharusan. Untuk mencapai itu, sepanjang tahun 2021, secara konsisten dan dengan komitmen yang tinggi Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan dan pengarahan terhadap pelaksanaan strategi dan kebijakan yang diambil oleh pihak Manajemen Perusahaan. Dewan Komisaris senantiasa pro aktif memberikan arahan dan masukan kepada Direksi terkait dengan pengelolaan Perusahaan. Fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris tercermin melalui totalitas pelaksanaan program kerja Dewan Komisaris diantaranya adalah melihat proses kerja yang berjalan, kesesuaian prosedur yang diterapkan guna menjaga integritas, keterbukaan serta *profesionalisme* Perusahaan, rapat internal rutin Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, rapat Komite-Komite dan rapat-rapat lainnya.

Sepanjang tahun 2021 , ketiga komite telah menunjukkan kinerja yang baik dan telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan BRK selain melalui implementasi program kerja yang tepat, fungsi masing-masing komite juga senantiasa ditingkatkan untuk lebih mendukung tugas dan tanggung jawab dewan komisaris. dibantu dengan ketiga komite tersebut, dewan komisaris senantiasa mendorong penerapan standar tata kelola yang baik secara menyeluruh di semua aspek bisnis Bank.

Penilaian Kinerja terhadap Komite Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite dan hasil *Self assessment* GCG. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Komite merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota

Looking at the business prospects and the effectiveness of the business strategy set by the Board of Directors, the Board of Commissioners believes that the Company will be able to take advantage of the opportunities that exist. These opportunities include the potential for positive development of Islamic banking and finance in Riau Province and Riau Islands where the population of Riau Province is a large Muslim population in Riau Province and Riau Islands Province. Therefore, public interest in becoming a customer of a sharia bank is very high. In addition, regional utilization and tourism activities in Riau Kepri make it possible for the Bank to develop money changer and remittance transactions.

Implementation of Good Corporate Governance

For the Board of Commissioners, the application of the principles of Good Corporate Governance is a must. To achieve this, throughout 2021, the Board of Commissioners consistently and with high commitment has carried out the function of supervising and directing the implementation of strategies and policies taken by the Company's Management. The Board of Commissioners is always pro-active in providing direction and input to the Board of Directors related to the management of the Company. The supervisory function that has been carried out by the Board of Commissioners is reflected in the totality of the implementation of the work program of the Board of Commissioners, including observing the ongoing work processes, conformity of procedures implemented to maintain the integrity, openness and professionalism of the Company, regular internal meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors, meetings Committees and other meetings.

Throughout 2021, the three committees have shown good performance and have made a major contribution to the growth of BRK. Apart from implementing proper work programs, the functions of each committee are also continuously improved to better support the duties and responsibilities of the board of commissioners. assisted by the three committees, the board of commissioners always encourages the implementation of good governance standards as a whole in all aspects of the Bank's business.

Performance appraisal of the Committees of the Board of Commissioners is determined based on the duties and responsibilities listed in the Committee Charter, Committee Work Programs and the results of the GCG Self-assessment. The results of the performance evaluation of each Committee Member are one of the basic considerations for the Board of Commissioners to dismiss and/or reappoint the relevant

Komite yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite.

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan Tata Kelola Bank yaitu Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang dinilai dari 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Komite di bawah Dewan Komisaris.

Committee members. The results of the performance evaluation are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Committee.

Performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out using the parameters of the implementation of Bank Governance, namely the Completeness and Implementation of Committee Duties which are assessed from 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

Committees under the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities have implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in adequate compliance with the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Committee under the Board of Commissioners.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2021 , terdapat beberapa kali perubahan komposisi Dewan Komisaris yang dilakukan atas dasar pertimbangan kebutuhan Bank. Perubahan komposisi Dewan Komisaris disajikan sebagai berikut.

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

In 2021, there will be several changes to the composition of the Board of Commissioners based on consideration of the needs of the Bank. Changes in the composition of the Board of Commissioners are presented as follows.

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pelaksana *Executor*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Tanggal Efektif *Efective Date*
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama *President Commissioner*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri. Surat OJK Nomor No. S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Riau Islands Bank.* *OJK Letter No. S-492/KO.053/2021 December 23, 2021*	23 Desember 2021 *December 23, 2021*
Yan Prana Jaya Indra Rasyid **	Komisaris Utama *President Commissioner*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri. Surat OJK Nomor SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Riau Islands Bank.* *OJK Letter Number SR-120/KO.053/2020 dated 30 September 2020*	30 September 2020 *September 30th 2020*
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Akta Notaris Feri Mondro, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 04 Maret 2017 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri Surat OJK No. SR-122/KO.053/2017 *Notary Deed of Feri Mondro, SH, M.Kn Number 04 dated March 4, 2017 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri* *OJK Letter No. SR-122/KO.053/2017*	04 Maret 2017 *March 04, 2017*

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pelaksana *Executor*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Tanggal Efektif *Efective Date*
Roy Prakoso****	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri. Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Riau Islands Bank.* *OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022*	25 Januari 2022 *January 25, 2022*
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 09 dated 19 August 2019 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri* *OJK Letter No. SR-106/KO.053/2019 dated 5 September 2019*	05 September 2019 *September 05, 2019*

* Diangkat sebagai Komisaris Utama pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021
** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Utama per tanggal 07 April 2021
*** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen per tanggal 03 Maret 2021
**** Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, namun baru efektif menjabat per tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 202

* *Appointed as President Commissioner at the EGMS on 15 November 2021*
** *Term of office as President Commissioner ends on 07 April 2021*
*** *Term of office as Independent Commissioner ends on 03 March 2021*
**** *Appointed as Independent Commissioner at the EGMS on 15 November 2021, but only effective as of 25 January 2022 based on OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated 25 January 202*

Kami menghaturkan terimakasih atas dedikasi Bapak Yan Prana Jaya Indra Rasyid dan Bapak Taufiqurrahman atas dedikasinya kepada Bank Riau Kepri.

We thank you for the dedication of Mr. Yan Prana Jaya Indra Rasyid and Mr. Taufiqurrahman for their dedication to Bank Riau Kepri.

Penerapan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDK/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri, antara lain melakukan penilaian secara berkala, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank Riau Kepri serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya meliputi :

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank Riau Kepri secara signifikan.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurang-kurangnya secara triwulanan.

Application of Risk Management

The Board of Commissioners has clear guidelines for its duties and responsibilities as stated in the Decree of the Board of Commissioners Number 001/KEPDK/2021 dated May 25, 2021 regarding the Work Guidelines for the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri, including conducting regular assessments, evaluating management policies risk and provide recommendations on risk and the application of risk management at Bank Riau Kepri and evaluate the accountability of the Board of Directors for the implementation of Risk Management policies. The Board of Commissioners in carrying out the risk oversight function is supported by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration & Nomination Committee. The powers and responsibilities of the Board of Commissioners, at least include:

1. *Approve and evaluate risk management policies in the event that there are significant changes in factors that affect the business activities of Bank Riau Kepri.*
2. *Evaluating the accountability of the Board of Directors for the implementation of the risk management policies mentioned above, which is carried out at least on a quarterly basis.*

3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui wewenangan Direksi.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan manajemen risiko di Bank Riau Kepri telah berjalan dengan baik. Bank Riau Kepri secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja untuk menciptakan *risk awareness* yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta budaya risiko (*risk culture*) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada Bank. Media utama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi manajemen risiko dilakukan dengan cara *in class* (tatap muka). Kegiatan tatap muka tersebut mulai dilaksanakan pada saat pegawai diterima sebagai pegawai Bank Riau Kepri dan akan dilaksanakan secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun. Selain dengan cara tatap muka, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau monitoring ke seluruh jaringan kantor Bank Riau Kepri.
2. Menerbitkan ketentuan terkait pelaksanaan manajemen risiko.
3. Kegiatan *briefing* pada unit kerja sebelum melaksanakan kegiatan.
4. Menyampaikan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko lisan, tulisan maupun melalui intranet Bank Riau Kepri.

Pada tahun 2021 Bank Riau Kepri telah melaksanakan penilaian terhadap profil risiko. Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank untuk 8 (delapan) jenis risiko yang dikelola Bank. Tren hasil Laporan Profil Risiko Bank Riau Kepri sepanjang tahun 2020 relatif stabil dengan peringkat Risiko *Inheren Moderate* dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *fair*, sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah Peringkat 3 *Moderate*.

Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris memandang Sistem Pengendalian Internal Bank Riau Kepri telah melalui mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat dan pegawai Bank, yang dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku,

3. *Evaluate and decide on applications for proposals from the Board of Directors related to transactions or business activities that exceed the authority of the Board of Directors.*

The Board of Commissioners is of the opinion that the implementation of risk management at Bank Riau Kepri has gone well. Bank Riau Kepri routinely conducts socialization related to the implementation of risk management in all work units to create risk awareness which in the end is expected to create a risk culture in carrying out daily activities at the Bank. The main media in the implementation of risk management socialization activities is carried out in class (face to face). This face-to-face activity begins when the employee is accepted as an employee of Bank Riau Kepri and will be carried out periodically at least 2 (two) times a year. In addition to face-to-face, socialization activities are carried out by:

1. *Conduct socialization and/or monitoring throughout the Bank Riau Kepri office network.*
2. *Issuing provisions related to the implementation of risk management.*
3. *Briefing activities in work units before carrying out activities.*
4. *Delivering directions regarding the implementation of risk management verbally, in writing or via the Bank Riau Kepri intranet.*

In 2021 Bank Riau Kepri has carried out an assessment of the risk profile. Risk profile assessment is an assessment of the Inherent Risk and Quality of Risk Management Implementation in the Bank's operational activities for 8 (eight) types of risks managed by the Bank. The trend of the Bank Riau Kepri Risk Profile Report throughout 2020 was relatively stable with a Moderate Inherent Risk rating and a fair Risk Management Implementation Quality Rating, resulting in an overall composite risk rating of 3 Moderate.

Internal Control System

The Board of Commissioners views that the Internal Control System of Bank Riau Kepri has gone through a supervisory process mechanism determined by the Bank's management on an ongoing basis whose implementation is influenced by the Board of Commissioners, the Board of Directors and all officers and employees of the Bank, which is designed to provide adequate assurance to safeguard and secure assets. The Bank, ensures the availability of accurate reports, improves compliance with applicable regulations, reduces the impact of financial losses,

mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran aspek kehati- hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Dewan Komisaris senantiasa memberikan nasihat dan pandangan pandangan mengenai Sistem Pengendalian Bank yang mengacu kepada sistem pengendalian internal dari COSO (*Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*).

Whistleblowing System

Dewan Komisaris memandang keberadaan WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Kebijakan *whistleblowing* harus diimplementasikan untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank Riau Kepri untuk melaporkan fraud yang terjadi.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan *Whistleblowing System* di Bank telah berjalan dengan baik. Setiap pengaduan yang sampai kepada pengelola WBS, akan ditindaklanjuti ke Direksi untuk selanjutnya diadakan Rapat Direksi/Sirkulasi. Apabila dalam rapat Direksi tersebut didapat persetujuan untuk ditindaklanjuti, maka akan dilakukan investigasi oleh DIA /Tim Investigasi *Fraud* untuk pemeriksaan yang lebih mendalam. Hasil pemeriksaan dari DIA/Tim Investigasi *Fraud* akan diberikan kepada petugas WBS untuk selanjutnya disampaikan kepada pelapor (*whitsleblower*). Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pengaduan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui WBS.

Apresiasi Kami

Apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami tujukan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungannya selama ini. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah mampu menjalankan kepengurusan Bank dengan baik di tengah kondisi pandemi COVID-19. Kami juga mengucapkan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah atas bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan sehingga nantinya BRK senantiasa berjalan dalam menuju Bank Syariah seutuhnya.

irregularities including fraud and violations of prudential aspects, as well as increasing organizational effectiveness and increasing cost efficiency.

The Board of Commissioners always provides advice and views on the Bank's Control System which refers to the internal control system of COSO (Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission).

Whistleblowing System

The Board of Commissioners views the existence of WBS as part of the internal control system in preventing irregularities from occurring. A whistleblowing policy must be implemented to provide encouragement and awareness to employees and officials of Bank Riau Kepri to report fraud that occurs.

The Board of Commissioners is of the view that the management of the Whistleblowing System in the Bank has been running well. Every complaint that reaches the WBS manager, will be followed up to the Board of Directors for further Board of Directors/Circulation Meetings. If approval is obtained at the Board of Directors meeting to be followed up, then an investigation will be carried out by SKAI for a more in-depth examination. The results of the inspection from the SKAI will be given to the WBS officer for further submission to the whistleblower (whistleblower). Throughout 2021 there were no complaints of alleged violations submitted through WBS.

Our Appreciation

We extend our deepest appreciation and gratitude to the shareholders and stakeholders for their trust and support so far. The Board of Commissioners expresses its highest appreciation to the Board of Directors who have been able to carry out the management of the Bank well in the midst of the COVID-19 pandemic. We also express our gratitude to the Sharia Supervisory Board for the guidance and direction that has been given so that later BRK will always walk towards a fully Sharia Bank.

Apresiasi terdalam juga kami berikan kepada seluruh jajaran direksi, karyawan, serta mitra kerja yang turut berpartisipasi dan mendukung BRK untuk terus tumbuh dan berkembang. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua dalam mewujudkan harapan yang kita cita-citakan bersama. Amin.

Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

We also give our deepest appreciation to the entire board of directors, employees, and business partners who have participated in and supported BRK to continue to grow and develop. May Allah SWT provide convenience and blessings for all of us in realizing the hopes that we aspire to together. Amen.

Wabillahi taufik wal hidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 31 Desember 2021
Atas Nama Dewan Komisaris
Pekanbaru, December 31, 2021
On behalf of the Board of Commissioners



Komisaris Utama
President Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Profiles



SYAHRIAL ABDI

Komisaris Utama
President Commissioners

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Pekanbaru, 01 Oktober 1975. Usia 46 tahun per 31 Desember 2021.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth / Age:** Born in Pekanbaru, 01 October 1975. Age 46 as of 31 December 2021.*

Sertifikasi : Sertifikasi Level 1 oleh BSMR (2021).

Riwayat Pendidikan :
- Sarjana jurusan Pemerintahan di SPDN Jatinangor (1994)
- Magister Prodi Manajemen Pemerintah Daerah Universitas Riau, 2004

Pengalaman Kerja :
- Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Riau (2013)
- Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Riau (2013 s/d 2015)
- Plt. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Riau (2015)
- Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Riau (2015 s/d 2016)
- Pejabat Bupati Kampar (2016 s/d 2017)
- Kepala BPKAD Provinsi Riau (2017 s/d 2020)
- Plt. Kepala Dinas Energi dan SDA Prov. Riau (2017 s/d 2018)
- Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Riau (2020 s/d 2021)
- Plh. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Riau (2018)
- Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Riau (2020)
- Pejabat Bupati Bengkalis Prov. Riau(24 Sep 20 s/d 26 Feb 21)
- Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau (1 Desember 2021 s/d sekarang)
- Komisaris Utama Bank Riau Kepri Riau (15 November 2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan : Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.35 tanggal 15 November 2021 dan Surat OJK S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Periode Menjabat : 15 Nov 2021 s/d 14 Nov 2025.

Jabatan Rangkap : Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Riau.

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

***Certification**: Level 1 Certification by BSMR (2021).*

***Educational background** :*
- *Bachelor's degree in Government at SPDN Jatinangor (1994)*
- *Master of Regional Government Management Study Program, Riau University, 2004*

***Work experience** :*
- *Head of Administration Bureau for People's Welfare, Riau Regional Secretariat (2013)*
- *Head of the Riau Regional Secretariat Economic Administration Bureau (2013 to 2015)*
- *Act. Head of the Riau Regional Secretariat of the Economic and Natural Resources Administration Bureau (2015)*
- *Head of the Department of Energy and Mineral Resources Prov. Riau (2015 to 2016)*
- *Kampar Regent Official (2016 to 2017)*
- *Head of BPKAD Riau Province (2017 to 2020)*
- *Act. Head of the Department of Energy and Natural Resources Prov. Riau (2017 to 2018)*
- *Assistant for General Administration of the Riau Regional Secretariat (2020 to 2021)*
- *Pls. Head of the Riau Regional Secretariat People's Welfare Administration Bureau (2018)*
- *Act. Assistant for General Administration of the Riau Regional Secretariat (2020)*
- *Bengkalis Prov. Riau(24 Sep 20 to 26 Feb 21)*
- *Head of the Provincial Revenue Agency Office. Riau(1 December 2021 to present)*
- *President Commissioner of Bank Riau Kepri Riau (15 November 2021 to present).*

***Legal Basis of Appointmen**t: first time as President Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the statement of shareholder decision Deed No.35 dated November 15, 2021 and OJK Letter S-492/KO.053/2021 dated December 23, 2021.*

***Serving Period**: 15 Nov 2021 to 14 Nov 2025*

***Multiple Positions**: Head of the Provincial Revenue Agency Riau.*

***Affiliation Relationship**: Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*

***Share Ownership in Bank Riau Kepri**: -*



ROY PRAKOSO

Komisaris Independen

Independent Commissioners

(Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS LB tanggal 15 November 2021, namun baru efektif menjabat per tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan surat OJK nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022).

(Appointed as Independent Commissioner at the GMS lb on 15 November 2021, but only became effective on 25 January 2022 based on ojk letter number S-43/KO.053/2022 dated 25 January 2022)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Jakarta, 5 Januari 1964. Usia 57 tahun per 31 Desember 2021.

Citizenship: *Indonesian Citizen*
Domicile: *Pekanbaru, Riau*
Place and Date of Birth / Age: *Born in Jakarta, January 5, 1964. Age 57 as of December 31, 2021.*

Sertifikasi : Sertifikasi Level 2 oleh BSMR (2021).
Riwayat Pendidikan :

- Sarjana bidang Akuntansi dari STIE Malangkucecwara, Malang (1988).
- Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1999).
- Doktor (CAN) bidang Manajemen dari Universitas Pancasila, Jakarta.

Pengalaman Kerja :

- Sistem programer di PT Ekspor impor Indonesia (Bank Mandiri tbk) (1990 - 1994)
- Analis Kredit komersial kantor pusat di PT Ekspor impor Indonesia (bank mandiri tbk) (1994 - 1995)
- Kepala bagian kredit bank eksport impor indonesia cabang Solo (Bank Mandiri tbk) (1995-1997)
- *Cash Outlet Manager* di PT Ekspor impor Indonesia (Bank Mandiri tbk) (1997 - 1999)
- *Section Head of IT Support Credit Operation and Control Division* (bank mandiri tbk) (1997-2001)
- *Project Manager of Bank Mandiri's Core Banking System* (eMAS) PT Ekspor impor Indonesia (Bank Mandiri tbk) (2001 - 2004)
- Tim *Overseas Branch Core Banking System Application Implementation Singapure & Hongkong Branch* PT BankMandri Tbk (2004 – 2010)
- *Business Development* PT Mitra Bisnis (2010 – 2012)
- Direktur PT Mahesa Prima Solusindo (2012 – 2021)
- Komisaris PT Smartec Teknologi Indonesia (2020 – 2021)
- Komisaris Independen Bank Riau Kepri Riau (15November 2021 s/d sekarang)*

*Pengangkatan berdasarkan Akta Nomor 35 Tanggal 15 November 2021

Dasar Hukum Pengangkatan : Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.35 tanggal 15 November 2021 dan Surat OJK S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022.

Periode Menjabat : 15-11-2021 s/d 14-11-2025*

*efektif menjabat sejak tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan surat OJK nomor S-23/KO.053/2022 Tanggal 25 januari 2022

Jabatan Rangkap : Tidak ada.
Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

Certification: *Level 2 Certification by BSMR (2021).*
Educational background *:*

- *Bachelor's degree in Accounting from STIE Malangkucecwara, Malang (1988).*
- *Master of Management from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1999).*
- *Doctorate (CAN) in Management from Pancasila University, Jakarta.*

Work experience *:*

- *System programmer at PT Export Import Indonesia (Bank Mandiri tbk) (1990 - 1994)*
- *Head office commercial credit analyst at PT Export Import Indonesia (bank Mandiri tbk) (1994 - 1995)*
- *Head of the credit section of the Indonesian export import bank Solo branch (Bank Mandiri tbk) (1995-1997)*
- *Cash Outlet Manager at PT Export Import Indonesia (Bank Mandiri tbk) (1997 - 1999)*
- *Section Head of IT Support Credit Operation and Control Division (bank Mandiri tbk) (1997-2001)*
- *Project Manager of Bank Mandiri's Core Banking System (eMAS) PT Export Import Indonesia (Bank Mandiri tbk) (2001 - 2004)*
- *Overseas Branch Core Banking System Application Implementation Team Singapore & Hongkong Branch PT BankMandri Tbk (2004 – 2010)*
- *Business Development PT Business Partners (2010 – 2012)*
- *Director of PT Mahesa Prima Solusindo (2012 – 2021)*
- *Commissioner of PT Smartec Teknologi Indonesia (2020 – 2021)*
- *Independent Commissioner of Bank Riau Kepri Riau (15 November 2021 to present)**

**Appointment based on Deed Number 35 Dated November 15, 2021*

Legal Basis of Appointment: *Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the statement of shareholder decision Deed No. 35 dated November 15, 2021 and OJK Letter S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022.*

Serving Period*: 15-11-2021 to 14-11-2025**

**effectively serving since January 25, 2021 based on OJK letter number S-23/KO.053/2022 dated January 25, 2022*

Dual Position *: None.*
Affiliation Relationship*: Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.*
Share Ownership in Bank Riau Kepri*: -*



RITA ANUGERAH

Komisaris Independen
Independent Commissioners

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Rengat, 27 Maret 1961. Usia 60 tahun per 31 Desember 2021.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth / Age:** Born in Rengat, 27 March 1961. Age 60 years as of 31 December 2021.*

Sertifikasi : Sertifikasi Level 2 oleh BSMR (2018).

Riwayat Pendidikan :
- Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Riau (1988).
- *Master of Accountancy and Financial Information System* (MAFIS) dari *Cleveland* State University, Ohio, USA (1994).
- *Doctor Business Administration* (DBA) dari Universiti Kebangsaan Malaysia (2005).
- Profesor dari Universitas Riau (2019).

Pengalaman Kerja :
- Dosen di fakultas Ekonomi Universitas Riau (1989 s/d sekarang)
- Sekretaris Program D3 Akuntansi dan Perpajakan, Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1995 – 1997)
- Dosen di Program D3 Akuntansi dan Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1995-1996)
- Dosen Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Riau (1995 s/d 2012)
- Dosen Program Magister Manajamen Universitas Riau (1994-Sekarang)
- Dosen Program Profesi Akuntansi Universitas Riau (2004 s/d sekarang)
- Dosen Program Magister Akuntansi di Universitas Riau (2007 – sekarang)
- Komisaris independen di Bank Riau Kepri (2019 s/d Sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan : Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.09 tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019

Periode Menjabat: 19-08-2019 s/d 18-08-2023.

Jabatan Rangkap : Dosen di Universitas Riau

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama..
Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

***Certification:** Level 2 Certification by BSMR (2018).*

Educational background :
- *Bachelor of Accounting from Riau University (1988).*
- *Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS) from Cleveland State University, Ohio, USA (1994).*
- *Doctor of Business Administration (DBA) from Universiti Kebangsaan Malaysia (2005).*
- *A professor from Riau University (2019).*

Work experience :
- *Lecturer at the Faculty of Economics, University of Riau (1989 - present).*
- *Secretary of the D3 Accounting and Taxation Program, Faculty of Economics, University of Riau (1995 - 1997).*
- *Lecturer in the D3 Accounting and Taxation Program, Faculty of Economics, University of Riau (1995-1996).*
- *Lecturer at the Extension Program, Faculty of Economics, University of Riau (1995 - 2012).*
- *Lecturer at the Riau University Management Masters Program (1994-Present).*
- *Lecturer in the Accounting Professional Program at the University of Riau (2004 - present).*
- *Lecturer in the Master of Accounting Program at the University of Riau (2007 - present).*
- *Independent Commissioner at Bank Riau Kepri (2019 to present)*

***Legal Basis of Appointment:** Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No. 09 dated 19 August 2019 and OJK Letter No. SR-106/KO.053/2019 dated September 5, 2019*

***Serving Period:** 19-08-2019 to 18-08-2023.*

***Dual Position** : Lecturer at he University of Riau.*

***Affiliation Relationship:** Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*
***Share Ownership in Bank Riau Kepri:** -*



TAUFIQQURAHMAN

Komisaris Independen
Independent Commissioners

(Berakhir masa jabatan per tanggal 3 Maret 2021)
(Term of office expires on Maret 3, 2021)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Tambelan, 27 September 1970. Usia 51 tahun per 31 Desember 2021.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth / Age:** Born in Pekanbaru, 01 October 1975. Age 46 as of 31 December 2021.*

Sertifikasi : Sertifikasi Level 2 oleh BSMR (2016).
Riwayat Pendidikan :
- Sarjana bidang Manajemen dari Universitas Riau (1996).
- Magister bidang International Business dari The University of Salford, United Kingdom (2004).
- Master of Philosophy (MPhil) dari Maastricht School of Management, Netherlands (2007).

Pengalaman Kerja :
- Dosen di fakultas ekonomi (1998 - sekarang).
- Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, DIII Program Fakultas Ekonomi (2003 – 2004).
- Wakil Direktur Bidang Akademik, DIII Program Fakultas Ekonomi (2004 – 2005).
- Komisaris independen PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2017 - Maret 2021).

Dasar Hukum Pengangkatan : Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No. 04 tanggal 4 Maret 2017 dan Surat OJK No. SR-122/ KO.053/2017.
Periode Menjabat : 04-03-2017 s/d 03-03-2021
Jabatan Rangkap : Dosen di Universitas Riau
Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

***Certification**: Level 2 Certification by BSMR (2016).*
***Educational background** :*
- *Bachelor of Management from Riau University (1996).*
- *Master in International Business from The University of Salford, United Kingdom (2004).*
- *Master of Philosophy (MPhil) from Maastricht School of Management, Netherlands (2007).*

***Work experience** :*
- *Lecturer at the faculty of economics (1998 - present).*
- *Deputy Director for Student Affairs, DIII Program, Faculty of Economics (2003 - 2004).*
- *Deputy Director for Academic Affairs, DIII Program, Faculty of Economics (2004 - 2005).*
- *Independent commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2017 - March 2021).*

***Legal Basis of Appointment:** Appointed for the first time as Independent Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on Decree of Shareholders Deed No. 04 dated March 4, 2017, and OJK Letter No. SR-122 / KO.053 / 2017 .*

***Serving Period**: 04-03-2017 to 03-03-2021*
***Double function** : Lecturer at University of Riau.*
***Affiliation Relationship**: Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with controlling and major shareholders.*
***Share Ownership in Bank Riau Kepri**: -*



YAN PRANA JAYA INDRA RASYID

Komisaris Utama

President Commissioners

(Berakhir masa jabatan per tanggal 7 April 2021)
(Term of office expires on April 7, 2021)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Pekanbaru, 18 Oktober 1965. Usia 56 tahun per 31 Desember 2021.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth / Age:** Born in Pekanbaru, 18 October 1965. Age 56 as of 31 December 2021.*

Sertifikasi : Sertifikasi Level 1 oleh BSMR (2019).
Riwayat Pendidikan :

- Sarjana jurusan Fisipol di Universitas Riau (1991).
- Magister Prodi Politik Lokal Otonomi Daerah Universitas Gajah Mada (2004).

Pengalaman Kerja :

- Kepala Bagian TU Setda Kabupaten Bengkalis (2005 - 2009).
- Kepala Bagian TU Dinas Kimpras Kabupaten Bengkalis (2006 - 2009).
- Sekretaris Dinas BMP Kabupaten Bengkalis (2009 - 2010).
- Kepala Bappeda Kabupaten Siak (2011 - 2017).
- Komisaris PT Bumi Siak Pusako (2011 - 2016).
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak (2017 - 2019).
- Sekretaris Daerah Provinsi Riau (2019 - 2021).
- Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (15 September 2020 - 7 April 2021).

Dasar Hukum Pengangkatan : Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan pernyataan keputusan pemegang saham Akta No.14 tanggal 15 September 2020 dan surat OJK No.SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020.
Periode Menjabat : 15-09-2020 s/d 06-04-2021
Jabatan Rangkap : Tidak ada.
Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

***Certification**: Level 1 Certification by BSMR (2019).*
***Educational background** :*

- *Bachelor's degree in Social and Political Sciences at the University of Riau (1991).*
- *Gajah Mada University Regional Autonomy Local Politics Study Program (2004).*

***Work experience** :*

- *Head of Administration for the Regional Secretariat of Bengkalis Regency (2005 - 2009).*
- *Head of Administration for the Office of Kimpras, Bengkalis Regency (2006 - 2009).*
- *Secretary of the Bengkalis Regency BMP Service (2009 - 2010).*
- *Head of Bappeda Siak Regency (2011 - 2017).*
- *Commissioner of PT Bumi Siak Pusako (2011 - 2016).*
- *Head of the Regional Finance Agency of Siak Regency (2017 - 2019).*
- *Regional Secretary of Riau Province (2019 - 2021).*
- *President Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (15 September 2020 - 7 April 2021).*

***Legal Basis of Appointmen**t: Appointed for the first time as President Commissioner of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the shareholder's decree Deed No.14 dated September 15, 2020 and OJK letter No. SR-120/KO.053/2020 dated 30 September 2020.*
***Serving Period**: 2020 - 2021*
***Multiple Positions**: There is not any.*
***Affiliation Relationship**: Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*
***Share Ownership in Bank Riau Kepri**: -*

SAMBUTAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Sharia Supervisory Council Report



ZULHENDRI RAIS

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para Pemangku Kepentingan dan Pemegang Saham yang Terhormat,

Bismillaahirrahmaanirrahiim

"Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. .." (QS Al-Baqarah: 278-280).

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mencukupi. Shalawat dan salam semoga senantiasa melimpah atas Rasul-Nya, Muhammad SAW. Mudah-mudahan taufiq dan hidayah Allah SWT senantiasa tercurah bagi kita semua.

Perkenankan, saya mewakili Dewan Pengawas Syariah memberikan apresiasi kepada Direksi dalam upayanya membawa bank riau kepri dalam transformasi menjadi bank Syariah seutuhnya. Izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Bank selama tahun 2021

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dear Stakeholders and Shareholders,

Bismillahirrahmaanirrahiim

"O you who believe, leave what is left of usury, if you are believers. So if you do not leave, then declare war to Allah and His Messenger. So if you repent, then for you is the point your wealth. .." (Surat al-Baqarah: 278-280).

Praise be to Allah SWT, the Most Sufficient. Shalawat and greetings may always be abundant upon His Messenger, Muhammad SAW. Hopefully taufiq and guidance from Allah SWT will always be poured out for all of us.

Please, on behalf of the Sharia Supervisory Board, I would like to express my appreciation to the Board of Directors for their efforts to bring Riau Riau Islands into the transformation into a fully Sharia bank. Allow us to submit a report on the implementation of supervision of the Bank's activities during 2021

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah
Table of Composition and Basis of Appointment of the Sharia Supervisory Board

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pelaksana *Executor*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Tanggal Efektif *Effective Date*
Zulhendri Rais	Ketua *Leader*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Fervices Authority*	Surat No.SR-72/KO.053/2020 *Letter No. SR-72/KO.053/2020*	Tanggal 08 April 2020 *April 08 2020*
Suryan A. Jamrah*	Ketua *Leader*	Bank Indonesia *Bank Indonesia*	Surat No. 15/5/DPbS/PAdBS/Pbr *Letter No. SR-72/KO.053/2020*	Tanggal 13 Februari 2013 dan diperpanjang sampai 4 (empat) tahun terhitung tgl 13 Februari 2017 *February 13, 2013 and extended to 4 (four) years starting February 13, 2017*
T. Zulkarnain*	Anggota *Member*	Bank Indonesia *Bank Indonesia*	Surat No. 15/5/DPbS/PAdBS/Pbr *Letter No. SR-72/KO.053/2020*	Tanggal 13 Februari 2013 dan diperpanjang sampai 4 (empat) tahun terhitung tgl 13 Februari 2017 *February 13, 2013 and extended to 4 (four) 13 February 2017*
Saifuddin Yuliar**	Anggota *Member*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Fervices Authority*	Surat No.SR-234/KO.053/2021 *Letter No. SR-72/KO.053/2020*	Tanggal 07 Juni 2021 *Year commencing on 07 June 2021*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 13 Februari 2017
** Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah per tanggal 07 Juni 2021
** Term of office expires on February 13, 2017*
*** Appointed as member of Sharia Supervisory Board as of 07 June 2021*

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Di dalam ketentuan Bank Indonesia, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Selama tahun 2021 Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat sebanyak 34 kali.

Sharia Supervisory Board Meeting

The Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri has held and attended several meetings related to product development discussions, issuance of sharia opinions, bank services, bank operations and others related to sharia aspects. According to Bank Indonesia regulations, meetings are held at least 1 (one) time a month. During 2021 the Sharia Supervisory Board has held 34 meetings.

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2021

Selama tahun 2021 Dewan Pengawas Syariah telah meberikan opini :

Implementation of Sharia Supervisory Board Activities in 2021

During 2021 the Sharia Supervisory Board has provided the following opinion:

No.	Opini Nomor *Opinion Number*	Tanggal *Date*	Tentang *About*
1	001/O-DPS/IV/2021	29 April 2021 *April 29, 2021*	Hasil Mapping Produk Konversi Bank Riau Kepri *Mapping Results for Bank Riau Kepri Conversion Products*
2	002/O-DPS/IV/2021	29 April 2021 *April 29, 2021*	*Income Smoothing* Dana Pihak Ketiga *Income Smoothing Third Party Funds*
3	003/O-DPS/IV/2021	29 April 2021 *April 29, 2021*	Provisi Kredit Konvensional yang Dialihkan menjadi Pembiayaan Syariah *Conventional Credit Provisions Converted to Sharia Financing*
4	004/O-DPS/V/2021	27 Mei 2022 *May 27, 2022*	Draft Perubahan Surat Edaran No. 037/SE/2019 tenteng Pedoman Layanan CMS PT. Bank Riau Kepri *Draft Amendment to Circular Letter No. 037/SE/2019 regarding PT. Bank Riau Kepri*
5	005/O-DPS/VI/2021	25 Juni 2021 *June 25, 2021*	Bonus Giro Wadiah *Wadiah Current Account Bonus*
6	006/O-DPS/VII/2021	14 Juli 2021 *July 14, 2021*	Pemberian Hadiah Langsung untuk Penabung Sinar iB *Direct Rewards for iB Sinar Sinar Savers*
7	007/O-DPS/XI/2021	22 November 2021 *November 22, 2021*	Advis Dewan Pengawas Syariah terkait Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) *Sharia Supervisory Board's advice regarding PT. Civil National Capital (PNM)*
8	008/O-DPS/X/2021	22 Oktober 2021 *October 22, 2021*	Restrukturisasi Pembiayaan Pemalang Batang *Tol Road* (PBTR) *Pemalang Batang Toll Road (PBTR) Financing Restructuring*
9	009/O-DPS/XII/2021	07 Desember 2021 *December 07 2021*	Pengkinian Nisbah Nasabah Tabungan Existing *Updating the Ratio of Existing Savings Customers*
10	010/O-DPS/XII/2021	24 Desember 2021 *December 24, 2021*	Pedoman Teknis *Income Smoothing* Dana Pihak Ketiga *Third Party Fund Income Smoothing Technical Guidelines*
11	011/O-DPS/XII/2021	24 Desember 2022 *December 24, 2022*	Hal-hal Khusus terkait *Profit Distribution* *Special Matters related to Profit Distribution*

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Assesment dilakukan melalui laporan *self assesment* pelaksanaan GCG unit usaha syariah secara semesteran yang dilakukan oleh internal Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sharia Supervisory Board Performance Assessment

Procedure for the Performance Assessment of the Sharia Supervisory Board

The assessment is carried out through a self-assessment report on the implementation of GCG sharia business units on a semi-annual basis which is carried out by the Bank internally and submitted to the Financial Services Authority.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan GCG UUS yaitu Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah yang dinilai dari 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Pihak Yang Melakukan *Assessment*

Untuk penilaian sendiri (*self assessment*) Kinerja Dewan Pengawas Syariah secara independen dilakukan oleh Divisi Syariah guna melengkapi laporkan penilaian sendiri (*Self assessment*) pelaksanaan tata kelola Bank yang baik (GCG) Unit Usaha Syariah.

Demikian Laporan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2021. Ke depan Dewan Pengawas Syariah akan tetap komitmen dalam memastikan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dengan senantiasa mengingatkan kepada jajaran Manajemen Bank Riau Kepri. Dengan demikian Bank Riau Kepri dapat mencapai visi dan misi-nya dengan baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sharia Supervisory Board Performance Evaluation Criteria

Performance evaluation of the Sharia Supervisory Board is carried out using the parameters of the UUS GCG implementation, namely the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board which is assessed from 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

The Party Conducting the Assessment

For self-assessment, the performance of the Sharia Supervisory Board is carried out independently by the Sharia Division to complete a self-assessment report on the implementation of good bank governance (GCG) for the Sharia Business Unit.

This is the report of the Sharia Supervisory Board for 2021. Going forward, the Sharia Supervisory Board will remain committed to ensuring compliance with sharia principles and compliance with laws and regulations by constantly reminding the Management of Bank Riau Kepri. Thus Bank Riau Kepri can achieve its vision and mission well.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 31 Desember 2021
Atas nama Dewan Pengawas Syariah,
Pekanbaru, December 31, 2021
On behalf of the Sharia Supervisory Board,

Zulhendri Rais
Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of the Sharia Supervisory Board

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Profile of The Sharia Supervisory Board



Zulhendri Rais

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Padang, 19 Juli 1990. Usia 31 tahun per 31 Desember 2021.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth / Age:** Born in Padang, July 19, 1990. Age 31 years as of December 31, 2021.*

Sertifikasi :
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (2019).
- Sertifikasi Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) DSN-MUI (2019)

Riwayat Pendidikan :
- Sarjana bidang Sunnah dan Ilmu Hadits, Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (2013).
- Master bidang Sunnah dan Ilmu Hadist, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Omdurman Republik Arab Sudan (2016).

Pengalaman Kerja :
- Tenaga Pengajar/Dosen di Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau (2017 – sekarang).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2020 - sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan : Menjabat Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No. 06 tanggal 17 Januari 2020 dan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Surat OJK Nomor S-234/KO.053/2021 tanggal 19 Juni 2021.
Periode Menjabat : 08-04-2020 s/d 07-04-2024
Jabatan Rangkap : Tenaga Pengajar/Dosen di Fakultas Tarbiyah UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau (2017 – sekarang).
Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

Certification:
- *Sharia Supervisory Board Certification from the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) (2019).*
- *Sharia Supervisory Certification for Financial Institutions From the Professional Certification Institute (LSP) DSN-MUI (2019)*

Educational background :
- *Bachelor of Sunnah and Hadith Science, Faculty of Ushuluddin, Al-Azhar University Cairo, Egypt (2013).*
- *Master of Sunnah and Hadith Sciences, Faculty of Ushuluddin, Omdurman Islamic University, the Arab Republic of Sudan (2016).*

Work experience :
- *Lecturers / Lecturers at the Tarbiyah Faculty of UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau (2017 - present).*
- *Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2020 - present).*

***Legal Basis for Appointment:** Serving as Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on Decree of Shareholders Deed No. 06 dated January 17, 2020. and appointed as Chairman of the Sharia Supervisory Board based on OJK Letter Number S-234/KO.053/2021 dated June 19, 2021.*
***Serving Period:** 08-04-2020 to 07-04-2024*
***Double function :** Lecturers / Lecturers at the Tarbiyah Faculty of UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau (2017 - present).*
***Affiliation Relationship:** Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*
***Share Ownership in Bank Riau Kepri :** -*



SAIFUDDIN YULIAR

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Member

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Kampar, 10 Desember 1972. Usia 49 tahun per 31 Desember 2021.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth / Age:** Born in Kampar, December 10, 1972. 49 years old as of December 31, 2021.*

Sertifikasi :
- Accounting Syariah oleh Muamalah Institute (2005)
- Muamalah Maaliyah Dasar oleh Dewan Syariah Nasional MUI (2020)
- Pendidikan Dasar Perbankan Syariah oleh Dewan Syariah Nasional MUI (2021).

Riwayat Pendidikan :
- Sarjana dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1997)
- Magister Jurusan PMDI dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. (2000)

Pengalaman Kerja :
- Anggota DPRD Kabupaten Kampar (2009)
- Pemimpin Cabang Asuransi Mubarokah, Pekanbaru (2010)
- Dosen di UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2015)

Dasar Hukum Pengangkatan : Menjabat Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.16 tanggal 26 Februari 2021 dan Surat OJK No.S-220/KO.053/2021 tanggal 7 Juni 2021.
Periode Menjabat : 07-06-2021 s/d 06-06-2025
Jabatan Rangkap : Dosen di UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2015).
Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

Certification:
- *Sharia Accounting by Muamalah Institute (2005)*
- *Basic Muamalah Maaliyah by MUI National Sharia Council (2020)*
- *Basic Islamic Banking Education by MUI National Sharia Council (2021)*

Educational background :
- *Bachelor's Degree from Faculty of Sharia and Law Al-Azhar University Cairo Egypt (1997)*
- *Masters in PMDI from UIN Sultan Syarif Kasim Riau. (2000)*

Work experience :
- *Member of Kampar Regency DPRD (2009)*
- *Mubarokah Insurance Branch Manager, Pekanbaru (2010)*
- *Lecturer at UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2015).*

***Legal Basis for Appointment:** Served as Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No.16 dated February 26, 2021 and OJK Letter No.S-220/KO.053/2021 dated June 7, 2021..*
***Serving Period:** 07-06-2021 to 06-06-2025*
***Double function :** Lecturer at UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2015).*
***Affiliation Relationship:** Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners or with the controlling and major shareholders.*
***Share Ownership in Bank Riau Kepri :** -*



SURYAN A. JAMRAH

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

(Berakhir masa jabatan per tanggal 13 Februari 2021)
(Term of office expires on February 13, 2021)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Indragiri Hilir, 9 Oktober 1959. Usia 62 tahun per 31 Desember 2021.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth / Age:** Born in Indragiri Hilir, 19 July 1990. Age 31 years as of 31 December 2021.*

Sertifikasi : Sertifikasi Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) DSN-MUI (2018)
Riwayat Pendidikan :

- Sarjana bidang Perbandingan Agama dari IAIN SUKA Yogyakarta (1985).
- Master bidang Pemikiran Islam dari IAIN Syahid Jakarta (1991).
- Doctor Studi Islam dari IAIN Syahid, Jakarta (1997).

Pengalaman Kerja :

- Dosen, Asisten Direktur I Program Pasca Sarjana.
- Direktur Program Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru (2005 – 2010).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2013 s/d 2021).

Dasar Hukum Pengangkatan : Diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.11 tanggal 9 Februari 2018 (periode 2).
Periode Menjabat : 13-02-2013 s/d 12-02-2017 (periode 1)
13-02-2017 s/d 12-02-2021 (periode 2)
Jabatan Rangkap : Dosen di UIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru
Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.
Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

***Certification:** Sharia Supervisory Certification for Financial Institutions From the Professional Certification Institute (LSP) DSN-MUI (2018)*
Educational background :

- *Bachelor in Comparative Religion from IAIN SUKA Yogyakarta (1985).*
- *Master of Islamic Thought from IAIN Syahid Jakarta (1991).*
- *Doctor of Islamic Studies from IAIN Syahid, Jakarta (1997).*

***Work experience** :*

- *Lecturer, Assistant Director I of the Postgraduate Program.*
- *Director of the Postgraduate Program at Sultan Syarif Qasim State Islamic University Pekanbaru (2005 - 2010).*
- *Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2013 until 2021).*

***Legal Basis of Appointment:** Appointed as Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the Shareholders' Decision Statement Deed No.11 dated February 9, 2018 (period 2)..*
***Serving Period :** 02-13-2013 to 12-02-2017 (period 1)*
02-13-2017 to 12-02-2021 (period 2)
***Double function :** Lecturer at Sultan Syarif Qasim State Islamic University Pekanbaru.*
***Affiliation Relationship:** Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*
***Share Ownership in Bank Riau Kepri:** -*



KH. T. Zulkarnain

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Members

(Berakhir masa jabatan per tanggal13 Februari 2021)
(Term of office expires on February 13, 2021)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Medan, 14 Agustus 1963. Meninggal pada usia 57 tahun pada tahun 2021.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth / Age:** Born in Medan, 14 Agustus 1963. Died at the age of 57 in 2021.*

Sertifikasi :
- Sertifikasi Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) DSN-MUI (2018)
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perbankan Syariah angkatan VIII 2012.

Riwayat Pendidikan : Sarjana bidang Sastra Inggris dari Universitas Sumatera Utara (1987).

Pengalaman Kerja :
- Dosen Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara (1987 s/d 2000)
- Dosen Universitas Lancang Kuning.
- Dosen Universitas Al Azhar Jakarta (1988 – 1991).
- Staf Pembantu Rektor III Universitas Amir Hamzah (1991 1998).
- Staf Ahli Menejer Cabang LP3I Medan (1996 s/d 1998).
- Staf Ahli Direktur Utam LP3I (1998 s/d 1999).
- Komisaris PT Kopindo Travel Medan (1998 s/d 2000).
- Direktur Utama LP3I (2000 s/d 2001).
- Direktur Keuangan PT. Griya Kersalaksana (2001 s/d 2004).
- Staf Ahli Khusus LPIA (2005 s/d 2007).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Trihamas Finance (2007 2019).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri (2013 s/d 2021).

Dasar Hukum Pengangkatan : Diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.11 tanggal 9 Februari 2018 (periode 2).

Periode Menjabat : 13-02-2013 s/d 12-02-2017 (periode 1) 13-02-2017 s/d 12-02-2021 (periode 2)

Jabatan Rangkap : Menjabat Wakil Sekjen MUI Pusat, tahun 2015 – 2020.

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

Certification:
- *Sharia Banking Supervisory Board (DPS) Certification Class VIII 2012*
- *Sharia Supervisory Certification for Financial Institutions from the Professional Certification Institute (LSP) DSN-MUI (2018).*

***Educational background :** Bachelor of English Literature from the University of North Sumatra (1987).*

Work experience :
- *Lecturer at the Faculty of Letters, University of North Sumatra (1987-2000).*
- *Lancang Kuning University Lecturer.*
- *Lecturer at Al Azhar University Jakarta (1988 - 1991).*
- *The staff of Vice-Rector III of Amir Hamzah University (1991 - 1998).*
- *Expert Staff of Branch Manager of LP3I Medan (1996 - 1998).*
- *LP3I Chief Expert Staff (1998 - 1999).*
- *Commissioner of PT Kopindo Travel Medan (1998 - 2000).*
- *President Director of LP3I (2000 - 2001).*
- *Finance Director of PT. Griya Kersalaksana (2001 - 2004).*
- *LPIA Special Expert Staff (2005 - 2007).*
- *Chairman of the Sharia Supervisory Board of Trihamas Finance (2007–2019).*
- *Member of the Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri (2013 - February 2021).*

***Legal Basis of Appointment:** Appointed as a Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No.11 dated February 9, 2018 (period 2).*

***Serving Period:** 02-13-2013 to 12-02-2017 (period 1) 02-13-2017 to 12-02-2021 (period 2)*

***Double function :** Served as Deputy Secretary General of the Central MUI (2015 - 2020)*

***Affiliation Relationship:** Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*

***Share Ownership in Bank Riau Kepri:** -*

SAMBUTAN DEWAN DIREKSI
Board of Director Report



ANDI BUCHARI

Direktur Utama
President Director

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Segala Puji syukur kepada Allah SWT kami panjatkan, karena berkat rahmat-Nya Bank riau Kepri yang selanjutnya disebut BRK dapat menjalankan berbagai program kerja di tahun 2021 yang penuh tantangan. Kami optimis bahwa dengan semangat dan kerja keras dari seluruh elemen Bank, harapan bank untuk terus tumbuh dan berkembang dapat tercapai.

Kami senantiasa mendukung program pemerintah sebagai Agen Pembangunan Ekonomi yang bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan sebagai entitas usaha dengan prinsip pengelolaan usaha yang dapat menciptakan nilai tambah bagi negara, yang pada akhirnya akan menghasilkan dampak positif bagi kehidupan masyarakat luas.

Direksi memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada seluruh jajaran Bank atas kinerja yang baik di tahun 2021 Pada kesempatan ini, Direksi akan menyampaikan laporan jalannya kepengurusan Bank selama tahun 2021 terkait analisis kinerja Bank, analisis prospek Bank, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, penilaian kinerja atas kinerja komite di bawah Direksi dan perubahan komposisi Direksi.

Kondisi Makro Ekonomi

Tantangan yang terjadi di tahun 2021, khususnya yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 menjadi motivasi untuk memacu kinerja Bank dalam menetapkan strategi pencapaian kerja terhadap pekerjaan konversi syariah tahun 2021 sebagai tujuan dalam menggerakan perekonomian. Bermodalkan mengikuti perintah Alquran, dan dorongan serta dukungan masyarakat riau, pemangku kepentingan kami mantap bertansformasi untuk Menjadi Bank Syariah Terkemuka, Terpercaya, dan Berdaya Saing Dalam Menggerakkan Perekonomian.

Sebagaimana Misi Bank Riau Kepri, Sejumlah peluang di tahun 2021 telah meningkatkan kinerja BRK , dimana Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia , khususnya Kepulauan Riau dan Riau, dan saat ini terus mengalami perkembangan ekonomi yang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Industri keuangan syariah di Indonesia juga diyakini memiliki potensi untuk terus bertumbuh dan memiliki kemanfaatan yang besar bagi perekonomian. Kinerja BRK tahun 2021 secara umum mencapai hasil yang baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil kinerja Perusahaan yang lebih tinggi dari realisasi tahun 2020.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dear Shareholders and Stakeholders,

All praise be to Allah SWT, because thanks to His grace, Bank Riau Riau Islands, hereinafter referred to as BRK, was able to carry out various work programs in 2021 which were full of challenges. We are optimistic that with the enthusiasm and hard work of all elements of the Bank, the bank's hope to continue to grow and develop can be achieved.

We always support the government's program as an Economic Development Agent that works to fulfill the needs of people's lives, and as a business entity with business management principles that can create added value for the country, which in turn will have a positive impact on the lives of the wider community.

Directors expresses appreciation and gratitude to all levels of the Bank for their good performance in 2021. On this occasion, the Board of Directors will submit a report on the management of the Bank during 2021 related to the analysis of the Bank's performance, analysis of the Bank's prospects, developments in the implementation of corporate governance, performance appraisal of performance. committees under the Board of Directors and changes in the composition of the Board of Directors.

Macro Economic Condition

The challenges that occurred in 2021, especially those caused by the COVID-19 pandemic, became the motivation to spur the Bank's performance in setting a work achievement strategy for sharia conversion work in 2021 as a goal in moving the economy. With the capital following the instructions of the Koran, and the encouragement and support of the Riau community, our stakeholders are steadily transforming to become a Leading, Trusted, and Competitive Islamic Bank in Driving the Economy.

As with the Mission of Bank Riau Kepri, a number of opportunities in 2021 have improved the performance of BRK, where Indonesia is the largest Muslim country in the world, especially the Riau and Riau Islands, and currently continues to experience relatively high economic development from year to year. The Islamic finance industry in Indonesia is also believed to have the potential to continue to grow and have great benefits for the economy. BRK's performance in 2021 generally achieved good results. This can be seen from the results of the Company's performance which is higher than the realization in 2020.

Pemulihan ekonomi global terus berlanjut, bahkan ketika pandemi muncul kembali. Garis patahan yang dibuka oleh COVID-19 terlihat lebih persisten divergensi jangka pendek diperkirakan akan meninggalkan jejak yang bertahan lama pada kinerja jangka menengah. Akses vaksin dan dukungan kebijakan awal adalah pendorong utama kesenjangan tersebut.

The global economic recovery continues, even as the pandemic reappears. The fault line opened by COVID-19 looks more persistent near term divergence is expected to leave a lasting imprint on the medium term performance. Vaccine access and early policy support are key drivers of the gap.

Penyebaran Delta yang cepat dan ancaman varian baru telah meningkatkan ketidakpastian tentang seberapa cepat pandemi dapat diatasi. Pilihan kebijakan menjadi lebih sulit, menghadapi tantangan multidimensi penurunan pertumbuhan lapangan kerja, kenaikan inflasi, kerawanan pangan, kemunduran akumulasi modal manusia, dan perubahan iklim dengan ruang gerak yang terbatas.

Delta's rapid deployment and the threat of new variants have increased uncertainty about how quickly the pandemic can be contained. Policy choices are becoming more difficult, facing the multidimensional challenges of declining employment growth, rising inflation, food insecurity, declining human capital accumulation, and climate change with limited scope for movement.

Perkiraan: Ekonomi global diproyeksikan tumbuh 5,9 persen pada tahun 2021 (TW III) dan 4,4 persen pada tahun 2022 (0,1 poin persentase lebih rendah untuk tahun 2021 dibandingkan dengan Pembaruan *Outlook* Ekonomi Dunia (WEO) Juli 2021). Revisi penurunan untuk tahun 2021 mencerminkan penurunan peringkat untuk ekonomi maju sebagian karena gangguan pasokan dan untuk negara berkembang berpenghasilan rendah, sebagian besar karena memburuknya dinamika pandemi. Hal ini sebagian diimbangi oleh prospek jangka pendek yang lebih kuat di antara beberapa pasar negara berkembang pengekspor komoditas dan ekonomi berkembang. Ketenagakerjaan umumnya diperkirakan akan terus tertinggal dalam pemulihan *output*.

Forecast: The global economy is projected to grow 5.9 percent in 2021 (QW III) and 4.4 percent in 2022 (0.1 percentage points lower for 2021 compared to the July 2021 World Economic Outlook Update (WEO). The downgrade revision for 2021 reflects a downgrade for developed economies partly due to supply disruptions and for low-income developing countries, in large part due to deteriorating pandemic dynamics. This is partially offset by the stronger near-term outlook among some commodity-exporting emerging markets and emerging economies. Employment is generally expected to continue to lag behind in output recovery.

Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Pertumbuhan ekonomi dunia 2021 diprakirakan meningkat dengan pemulihan ekonomi di *Advanced Economies* (AEs), khususnya AS, yang kuat didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan yang sangat besar. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs), kecuali Tiongkok, secar umum melanjutkan perbaikan, namun tidak secepat proses pemulihan di AEs. Ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut sejalan dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan *tapering the Fed*, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi. Lebih lanjut, pandemi menimbulkan 7 (tujuh) hal penting yang perlu diwaspadai dan diantisipasi agar proses pemulihan perekonomian global dari dampak pandemi Covid-19 terus berlangsung, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah membaik dan tetap terjaga.
Proses pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung dengan stabilitas yang tetap terjaga. Proses pemulihan perekonomian domestik pada 2021 masih terpengaruh

The improvement in the global economy in 2021 will continue, although unevenly, with continued financial market uncertainty. World economic growth in 2021 is predicted to accelerate with economic recovery in the Advanced Economies (AEs), particularly the US, which is supported by accelerated vaccinations and very large policy stimulus. Meanwhile, economic growth in Emerging Market and Developing Economies (EMDEs), excluding China, generally continued to improve, but not as fast as the recovery process in AEs. Global financial market uncertainty continues in line with emerging risks, including the increased spread of the Delta variant of the Covid-19 virus, market anticipation for the Fed's tapering policy, and concerns that inflationary pressures will last longer due to supply chain disruptions and energy constraints. Furthermore, the pandemic raises 7 (seven) important things that need to be watched out for and anticipated so that the global economic recovery process from the impact of the Covid-19 pandemic continues, with macroeconomic and financial system stability that has improved and is maintained. The process of national economic recovery continues with maintained stability. The domestic economic recovery process in 2021 is still affected by the ongoing Covid-19 pandemic. The outbreak of the Delta variant of Covid-19 in the third quarter of 2021 hampered the process of Indonesia's economic

oleh berlanjutnya pandemi Covid-19. Merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021 menahan proses pemulihan ekonomi Indonesia. Kinerja ekonomi diprakirakan meningkat pada triwulan IV 2021 didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan meredanya penyebaran Covid-19, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan kinerja ekspor yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2021 diprakirakan dalam kisaran 3,2-4,0%. Pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5%. Sementara itu, stabilitas eksternal terjaga tercermin dari peningkatan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2021, didukung oleh surplus transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial. Sejalan dengan kinerja NPI, nilai tukar Rupiah terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Inflasi tercatat rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Stabilitas sistem keuangan tetap baik dengan fungsi intermediasi yang meningkat. Perekonomian Indonesia diprakirakan meningkat lebih tinggi pada 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik, dengan stabilitas eksternal yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, dan stabilitas sistem keuangan yang tetap baik.

recovery. Economic performance is predicted to improve in the fourth quarter of 2021, supported by continued mobility in line with the acceleration of vaccination and the easing of the spread of Covid-19, the opening of wider economic sectors, continued policy stimulus, and export performance that remains strong. With these developments, economic growth in 2021 is predicted in the range of 3.2-4.0%. Economic growth in 2022 is predicted to increase to the range of 4.7-5.5%. Meanwhile, external stability was maintained as reflected in an increase in Indonesia's balance of payments (BOP) surplus in 2021, supported by a current account surplus and capital and financial transactions. In line with BOP performance, the Rupiah exchange rate was under control, supported by Bank Indonesia's stabilization policy. Inflation was recorded low in the midst of increasing domestic demand, maintained exchange rate stability, and the consistency of Bank Indonesia's policies in guiding inflation expectations. The stability of the financial system remains good with the intermediary function improving. The Indonesian economy is predicted to accelerate further in 2022 in line with improving domestic demand, with maintained external stability, controlled inflation, and sound financial system stability.

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Riau pada triwulan IV 2021 tumbuh tinggi dan melanjutkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2021. Namun demikian, pertumbuhan pada triwulan akhir 2021, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu tumbuh sebesar 3,81% (yoy). Perlambatan lebih didorong deselerasi pertumbuhan harga komoditas sehingga kinerja ekspor luar negeri menurun. Secara keseluruhan tahun 2021, seluruh elemen perekonomian mengalami peningkatan kinerja. Perekonomian Riau pada tahun 2021 tumbuh 3,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang terkontraksi 1,12% (yoy). Permintaan tinggi selama tahun 2021 terhadap komoditas utama Riau yaitu CPO dan pulp & paper, berdampak luas terhadap ekspor, investasi, maupun konsumsi domestik di Riau.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2021 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat, serta kegiatan dunia usaha. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepri tercatat Rp47.439,27 miliar (ADHK) atau tumbuh sebesar 5,27% (yoy), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,97% (yoy) dan secara keseluruhan tahun 2021 tumbuh sebesar 3,43% (yoy).

Regional Macroeconomic Development

Riau's economy in the fourth quarter of 2021 grew high and continued a positive growth trend throughout 2021. However, growth in the final quarter of 2021 slowed compared to the previous quarter, which grew by 3.81% (yoy). The slowdown was driven more by the deceleration of commodity price growth so that the performance of foreign exports declined. Overall in 2021, all elements of the economy will experience an increase in performance. Riau's economy in 2021 will grow by 3.36% (yoy), higher than in 2020 which contracted 1.12% (yoy). High demand during 2021 for Riau's main commodities, namely CPO and pulp & paper, has a broad impact on exports, investment, and domestic consumption in Riau.

The economy of the Riau Islands Province in the fourth quarter of 2021 grew higher than the previous quarter in line with increased mobility and community activities, as well as business activities. The Riau Islands Province's Gross Regional Domestic Product (GRDP) was recorded at IDR 47,439.27 billion (ADHK) or grew by 5.27% (yoy), strengthened compared to the previous quarter of 2.97% (yoy) and overall in 2021 it grew by 3 ,43% (yoy).

Analisis Industri Perbankan

Kinerja Bank Umum Konvensional secara nasional menunjukkan perbaikan, ditandai dengan kredit yang mulai tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya disertai DPK yang masih terus tumbuh meskipun dengan pace yang melambat. Kondisi likuiditas juga terpantau memadai tercermin dari rasio LDR 79,11% dan masih berada dalam threshold (78%- 92%) sedangkan rasio AL/NCD dan AL/DPK juga cukup tinggi yaitu masing-masing 152,71% dan 33,65%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%. Ketahanan BUK juga cukup solid dengan tingkat permodalan yang cukup tinggi. Namun demikian, perlu diperhatikan risiko kredit BUK yang masih tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Aset juga menunjukkan penurunan sebesar 7,25% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,68% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset seiring dengan perlambatan pertumbuhan DPK dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan kelompok bank, perlambatan pertumbuhan aset terjadi pada semua kelompok Bank kecuali kelompok Bank BUSN. Kelompok Bank BUSN yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar kedua (42,61%), tercatat tumbuh 8,64% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,38% (yoy).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 91,92% dari total kewajiban Bank, diikuti pinjaman yang diterima (3,04%). Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 7,61% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 12,70% (yoy). Sementara pinjaman yang diterima terkontraksi -19,90% (yoy) yang mengindikasikan bahwa perbankan mengurangi sumber pendanaan lain karena berlebihnya likuiditas dari DPK.

Program Transformasi BPD

Transformasi BPD yang dirancang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang bertujuan agar seluruh BPD mampu meningkatkan ketahanan usaha (*resilience*) dan memperkuat perannya sebagai agen pembangunan daerah dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 2015, dengan visi transformasi BPD "Menjadi bank regional yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan". Kerangka program transformasi BPD disusun dengan lebih holistic dan seimbang dengan menekankan pentingnya fondasi (termasuk GCG) dan aspek pendukung (infrastruktur dan SDM) untuk menopang 3 (tiga) pilar proses transformasi termasuk aspek bisnis guna mencapai outcome (destination statement) transformasi BPD.

Banking Industry Analysis

The performance of Conventional Commercial Banks nationally showed improvement, indicated by credit which began to grow compared to the previous year, accompanied by deposits that continued to grow even though the pace was slowing. Liquidity conditions are also adequately monitored as reflected in the LDR ratio of 79.11% and still within the threshold (78%-92%) while the LA/NCD and LA/DPK ratios are also quite high at 152.71% and 33.65% respectively. , or well above the 50% and 10% thresholds. The resilience of BUK is also quite solid with a fairly high level of capital. However, it should be noted that BUK credit risk is still recorded to increase compared to the previous year.

Asset growth also showed a decline of 7.25% (yoy), slower than the previous year's growth of 8.68% (yoy). The slowdown in asset growth was in line with the slower growth in deposits compared to the previous year. Based on bank group, the slowdown in asset growth occurred in all bank groups except for the BUSN bank group. The BUSN Bank group, which is the bank group with the second largest portion (42.61%), recorded a growth of 8.64% (yoy), an increase compared to the previous year which grew 6.38% (yoy).

Third Party Funds (TPF) are the main source of bank funding, reaching 91.92% of the Bank's total liabilities, followed by loans received (3.04%). During the reporting period, BUK deposits grew 7.61% (yoy), slower than the previous year's 12.70% (yoy). Meanwhile, loans received contracted by -19,90% (yoy) indicating that banks are reducing other funding sources due to excess liquidity from deposits.

BPD Transformation Program

BPD transformation designed by the Financial Services Authority (OJK) together with the Ministry of Home Affairs and the Association of Regional Development Banks (Asbanda) with the aim that all BPDs are able to increase business resilience and strengthen their role as agents of regional development and inaugurated by the President of the Republic of Indonesia on 26 May 2015, with the vision of BPD transformation "To become a regional bank that is highly competitive and strong and contributes significantly to sustainable regional economic growth and equity". The BPD transformation program framework is structured in a more holistic and balanced manner by emphasizing the importance of foundations (including GCG) and supporting aspects (infrastructure and human resources) to support the 3 (three) pillars of the transformation process including business aspects in order to achieve the BPD transformation outcome (destination statement).

Kinerja Keuangan Kami

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau pada tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kas tahun 2021 sebesar Rp719,39 miliar, menurun 21,31% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp914,23 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan kas Rupiah sebesar Rp205,71 miliar.

Liabilitas tahun 2021 sebesar Rp27,59 triliun, meningkat 9,84% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp25,12 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan liabilitas jangka pendek sebesar Rp2,45 triliun. Ekuitas tahun 2021 sebesar Rp3,19 triliun, meningkat 3,49% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,08 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp185,59 miliar.

Ekuitas tahun 2021 sebesar Rp3,19 triliun, meningkat 3,49% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,08 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp185,59 miliar.

Beban bunga dan syariah tahun 2021 sebesar Rp922,45 miliar, menurun 8,77% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,01 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya beban bunga sebesar Rp111,09 miliar.

Pendapatan bunga dan syariah tahun 2021 sebesar Rp2,21 triliun, menurun 4,44% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp2,32 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya pendapatan bunga sebesar Rp266,15 miliar.

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Laba bersih per saham tahun 2021 sebesar Rp34.581 menurun 18,75% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp42.561. Penurunan tersebut sejalan dengan menurunnya laba setelah pajak.

Our Financial Performance

The financial review described below refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2021 and 2020 which are presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm of Bustaman, Ezeddin & Putranto and obtained an opinion that presents fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Riau as of December 31, 2021 as well as financial performance and cash flows for the year ended December 31, 2021. is in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

Cash in 2021 was IDR 719.39 billion, decreased by 21.31% compared to 2020 which was IDR 914.23 billion. The decrease was mainly due to a decrease in Rupiah cash amounting to Rp205.71 billion.

Liabilities in 2021 amounted to Rp27.59 trillion, an increase of 9.84% compared to 2020 which was Rp25.12 trillion. The increase was mainly due to the growth in current liabilities of Rp2.45 trillion. Equity in 2021 is IDR 3.19 trillion, an increase of 3.49% compared to 2020 which was IDR 3.08 trillion. The increase was mainly derived from the growth in retained earnings that have been determined to be used by Rp185.59 billion.

Equity in 2021 is IDR 3.19 trillion, an increase of 3.49% compared to 2020 which was IDR 3.08 trillion. The increase was mainly derived from the growth in retained earnings that have been determined to be used by Rp185.59 billion.

Interest and sharia expenses in 2021 amounted to Rp922.45 billion, a decrease of 8.77% compared to 2020 which was Rp1.01 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in interest expense of Rp. 111.09 billion.

Interest and sharia income in 2021 amounted to IDR 2.21 trillion, a decrease of 4.44% compared to 2020 which was IDR 2.32 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in interest income of Rp.266.15 billion.

Earnings per share is calculated by dividing net income to shareholders by the weighted average number of shares outstanding in the year concerned. Earnings per share in 2021 amounted to Rp34,581, a decrease of 18.75% compared to 2020 which was Rp42,561. The decline was in line with the decline in profit after tax.

Laba tahun berjalan tahun 2021 sebesar Rp381,01 miliar, menurun 17,88% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp463,97 miliar. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan laba sebelum pajak.

Pendapatan (beban) non operasional tahun 2021 sebesar Rp36,24 miliar, meningkat 48,61% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp24,38 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan beban non operasional lain-lain.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

BRK memahami bahwa *Good Corporate Governance* merupakan acuan standar yang wajib diterapkan oleh sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan. Dalam jangka panjang, penerapan GCG mempunyai relevansi terhadap kinerja atau performance suatu perusahaan karena nilai akhir (*ultimate value*) penerapan GCG adalah meningkatkan kinerja *(high performance*) serta citra perusahaan yang baik (*good corporate image*).

Aktualisasi GCG di BRK dilakukan di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG bagi perusahaan. Optimalisasi penerapan GCG BRK terus dilakukan dengan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, penyesuaian sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang semakin efektif.

Bank Riau Kepri secara berkala melakukan penilaian penerapan Tata Kelola melalui *Self assessment* penerapan Tata Kelola untuk mengukur dan mengevaluasi implementasi Tata Kelola yang Baik di Bank Riau Kepri. Evaluasi implementasi Tata Kelola yang Baik diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu *governance structure, governance process* dan *Governance outcome*. Mekanisme pelaksanaan implementasi Tata Kelola yang baik dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut : Mengidentifikasi indikator/kriteria penilaian yang akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola secara keseluruhan. Melakukan *self assessment* pelaksanaan penerapan Tata Kelola termasuk perhitungan penilaian komposit. Melakukan evaluasi atas hasil self assessment pelaksanaan penerapan tata kelola dan menyusun. laporan kesimpulan umum *self assessment*. Menyusun laporan pelaksanaan implementasi tata kelola. Perubahan Komposisi dan Program Orientasi Direksi. Pada tahun 2021 Bank Riau Kepri telah melakukan beberapa kali perubahan komposisi Direksi yang dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Perubahan komposisi Direksi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Profit for the year in 2021 was IDR 381.01 billion, a decrease of 17.88% compared to 2020 which was IDR 463.97 billion. The decrease was in line with the decrease in profit before tax.

Non-operating income (expenses) in 2021 amounted to Rp36.24 billion, an increase of 48.61% compared to 2020 which amounted to Rp24.38 billion. The increase came from the growth of other non-operating expenses.

Implementation of Good Corporate Governance

BRK understands that Good Corporate Governance is a standard reference that must be applied as the operational basis for the company's business activities. In the long term, the implementation of GCG has relevance to the performance or performance of a company because the ultimate value of implementing GCG is to improve performance (high performance) and a good corporate image.

GCG actualization at BRK is carried out at all levels and levels of the organization by referring to the provisions and requirements related to the implementation of GCG for the company. Optimization of BRK's GCG implementation continues to be carried out by strengthening infrastructure to achieve best practices, adjusting systems and procedures needed to support more effective GCG implementation.

Bank Riau Kepri periodically assesses the implementation of Good Corporate Governance through self-assessment of the implementation of Governance to measure and evaluate the implementation of Good Governance at Bank Riau Kepri. Evaluation of the implementation of Good Governance is integrated into 3 (three) aspects, namely governance structure, governance process and governance outcome. The mechanism for implementing Good Governance is carried out in several steps, namely as follows: Identifying indicators/ assessment criteria that will affect the implementation of the implementation of Good Corporate Governance as a whole. Conduct a self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance including the calculation of the composite assessment. Evaluating the results of the self-assessment of the implementation of governance and compiling. self-assessment general conclusion report. Prepare reports on the implementation of governance implementation. Changes in the Composition and Orientation Program of the Board of Directors. In 2021 Bank Riau Kepri has made several changes to the composition of the Board of Directors which are carried out according to the needs of the Bank. Changes in the composition of the Board of Directors in 2021 are as follows:

Komposisi Direksi dan dasar pengangkatan Direksi sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut.

The composition of the Board of Directors and the basis for the appointment of the Board of Directors throughout 2021 are as follows.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Composition and Basis of Appointment of Directors Tables

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pelaksana *Implementing*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Tanggal Efektif *Effective Date*
Andi Buchari	Direktur Utama *President director*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Fervices Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri. Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Riau Islands Bank.* *OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 September 30, 2020*	30 September 2020 *September 30th 2020*
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Fervices Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri. Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Riau Islands Bank.* *OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 September 30, 2020*	30 September 2020 *September 30th 2020*
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah *Director of Credit and Sharia*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Fervices Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 13 tanggal 22 April 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri. Surat OJK No. SR-585/KO.053/2019 tanggal 16 Mei 2019 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 13 dated 22 April 2019 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Riau Islands Bank.* *OJK Letter No. SR-585/KO.053/2019 date May 16, 2019.*	16 Mei 2019 *May 16, 2019*
Said Syamsuri*	Direktur Operasional *Director of Operations*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Fervices Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri. Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Riau Islands Bank.* *OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 September 30, 2020*	30 September 2020 *September 30th 2020*
Fajar Restu Febriansyah **	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Fervices Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri. Surat OJK Nomor S-462/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Riau Islands Bank.* *OJK Letter Number S-462/KO.053/2021 dated 7 December 2021*	7 Desember 2021 *December 7th 2021*

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai Bank Riau Kepri. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai Bank Riau Kepri, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Program orientasi ini juga dilakukan untuk memberikan gambaran umum terhadap rencana bisnis Bank Riau Kepri, informasi mengenai kegiatan bisnis utama, garis besar tugas dan kegiatan Direksi berdasarkan peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Penilaian Kinerja Direksi

Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolegial seluruh anggota Direksi yang tercermin dalam satu kesatuan pada pencapaian/ realisasi atas Rencana Bisnis Bank (RBB) secara tahunan dan kebijakan umum Direksi. Selain itu, keberhasilan kinerja Direksi dapat diukur melalui hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup aspek profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan Bank.

Penilaian kinerja Direksi Bank Riau Kepri dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penilaian sendiri (self assessment) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek governance yaitu *governance structure, governance process,* dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

Sampai dengan akhir Desember 2021, seluruh anggota Direksi tidak mendapat sanksi atau penilaian buruk dari ketiga lembaga tersebut, dan juga oleh para Pemegang Saham

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh beberapa bahwa komite-komite dan telah memberikan masukan yang sangat berharga bagi Direksi, adapun komite-komite yang berada dibawah direksi adalah;

1. *Asset and Liability Committee* (ALCO)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)

Members of the Board of Directors who are appointed for the first time are given an orientation/introduction program regarding Bank Riau Kepri. This program aims to provide an understanding of the vision, mission and values of Bank Riau Kepri, code of ethics and code of conduct, organizational structure, as well as guidelines and work procedures for the Board of Directors. This orientation program is also carried out to provide an overview of the business plan of Bank Riau Kepri, information on the main business activities, an outline of the duties and activities of the Board of Directors based on banking regulations and other applicable laws and regulations.

Board of Directors Performance Assessment

The measurement of the success of the performance of the Board of Directors is the result of the collegial work of all members of the Board of Directors which is reflected in one unit in the achievement/realization of the Bank's Business Plan (RBB) on an annual basis and the general policies of the Board of Directors. In addition, the success of the performance of the Board of Directors can be measured through the results of the assessment of the Bank's Soundness Level which includes aspects of the risk profile, Good Corporate Governance, profitability and bank capital.

The performance assessment of the Board of Directors of Bank Riau Kepri is carried out through a self-assessment report on Governance that is submitted to the OJK periodically by referring to the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. . The self-assessment is carried out in a comprehensive and structured manner which is integrated into 3 (three) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcome, as a continuous process.

Sampai akhir 2021, seluruh anggota Direksi tidak mendapat sanksi atau penilaian buruk dari ketiga lembaga tersebut, dan juga oleh para Pemegang Saham

Performance Assessment of Committees Under the Board of Directors

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors is assisted by several committees and has provided invaluable input to the Board of Directors, while the committees under the management are;

1. *Asset and Liability Committee (ALCO)*
2. *Risk Management Committee*
3. *Information Technology (IT) Steering Committee*

4. Komite SDM
5. Komite Kebijakan Bisnis
6. Komite Kredit/Pembiayaan

Selama tahun 2021, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Selain melakukan penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi, Direksi juga melakukan penilaian kinerja kepada seluruh Unit Kerja di bawah Direksi. Penilaian kinerja dilakukan melalui penilaian Sistem Penilaian Kinerja *Key Performance Indicator* (KPI) yang dinilai berdasarkan 4 (empat) persfektif yaitu Keuangan, Pelanggan, Proses Internal dan Pembelajaran & Pertumbuhan. Selama tahun 2021, pencapaian KPI unit kerja dibawah Direksi memiliki predikat *Good* atau Baik.

Pengembangan Organisasi dan Sistem Manajemen

Sejalan dengan Road Map SDM BRK tahun 2021 perusahaan menjalankan strategi yang fokus pada terciptanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, profesional dan berkemampuan dalam menciptakan nilai tambah serta menjawab tantangan baru. Kami terus berupaya mengembangkan program pelatihan khusus dan berkala yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dan profesionalisme.

Komposisi pegawai BRK sepanjang tahun 2021 adalah 2,657 pegawai. Selama tahun 2021 terdapat 80 Turnover dengan rincian 10 Pegawai pensiun, 59 Resign, 5 PHK dan 5 meninggal dunia dan 1 habis kontrak Pegawai yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dasar Perbankan Syariah sampai dengan Desember Tahun 2021 sebanyak 2.195 pegawai. Realisasi Biaya pelatihan tahun 2021 sebesar Rp5,748,964,332

Bank Riau Kepri memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan kinerja perusahaan. Program pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan karir, pelatihan dan sertifikasi profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, pelatihan, sosialisasi, seminar, workshop dan pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank Riau Kepri.

Untuk mendorong peningkatan produktivitas pegawai, BRK menerapkan *Key Performance Indicator* (KPI) atau Kontrak Manajemen yang digunakan sebagai acuan kinerja dan dasar penyusunan program kerja tahun berjalan.

4. *HR Committee*
5. *Business Policy Committee*
6. *Credit/Financing Committee*

During 2021, the Board of Directors considered that the committees under the Board of Directors had carried out their duties and responsibilities well.

In addition to evaluating the performance of the Committees under the Board of Directors, the Board of Directors also conducts performance assessments of all Work Units under the Board of Directors. Performance assessment is carried out through an assessment of the Key Performance Indicator (KPI) Performance Assessment System which is assessed based on 4 (four) perspectives, namely Finance, Customers, Internal Processes and Learning & Growth. During 2021, the KPI achievement of work units under the Board of Directors has the title of Good or Good.

Organizational Development and Management System

In line with the 2021 BRK HR Road Map, the company carries out a strategy that focuses on creating quality Human Resources (HR) that are productive, professional and capable of creating added value and responding to new challenges. We continuously strive to develop special and periodic training programs aimed at improving quality, capability and professionalism.

The composition of BRK employees throughout 2021 is 2,657 employees. During 2021 there were 80 Turnovers with the death of 10 retired employees, 59 Resigned, 5 layoffs and 5 employees and 1 employee contract who had attended and passed the basic education in Islamic Banking until December 2021 as many as 2,195 employees. Realization of training costs in 2021 is IDR 5,748,964,332

Bank Riau Kepri provides equal opportunities for employees to continue to develop along with the development of company performance. The HR development program is carried out through career education, professional training and certification, skills, as well as various courses, training, socialization, seminars, workshops and management and technical training tailored to the needs of Bank Riau Kepri.

To encourage increased employee productivity, BRK implements Key Performance Indicators (KPI) or Management Contracts which are used as a performance reference and basis for preparing the current year's work program.

Bank Riau Kepri diharapkan juga telah memiliki *learning policy* sebagai pedoman kerja dan implementasi *learning center* serta telah memiliki instruktur internal bersertifikasi yang bertanggung jawab sebagai pengajar tetap pada learning center untuk dapat mengakselerasi guna menghasilkan SDM berkompetensi dan berkualitas sesuai dengan standar pelatihan tatap muka Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan adanya instruktur internal bersertifikasi ini diharapkan Bank Riau Kepri juga nantinya akanmemiliki modul pengajaran standar yang akan dapat langsung digunakan *di e-learning*. Pengiriman pegawai-pegawai yang berpotensi untuk disekolahkan pendidikan S-2 dan S-3 keluar negeri mulai berjalan ke beberapa universitas terbaik di Asia dan Australia. Bank Riau Kepri juga akan mempertimbangkan pegawai-pegawai yang dapat dipersiapkan menguasai S2 ilmu manajemen agribisnis khususnya kelapa sawit dengan menyekolahkan staf terpilih ke universitas dan institusi terbaik di Indonesia. Bank Riau Kepri telah memiliki Program database kepegawaian (*Human Resource Information System/* HRIS) yang akan dikembangkan *hingga level Self-Service Employee* (ESS), sehingga lebih efisien dan *paperless*.

Bank Riau Kepri is also expected to have a learning policy as a work guideline and implementation of a learning center and to have a certified internal instructor who is responsible as a permanent teacher at the learning center to accelerate the production of competent human resources in accordance with the face-to-face training standards of the National Professional Certification Agency (BNSP). With this certified internal instructor, it is hoped that Bank Riau Kepri will also have standard teaching modules that can be directly used in e-learning. The sending of employees who may be sent for postgraduate and doctoral education abroad is starting to run to some of the best universities in Asia and Australia. Bank Riau Kepri will also consider university employees who can be prepared to prepare Masters in agribusiness management, especially oil palm by sending selected staff to the best institutions in Indonesia. Bank Riau Kepri already has a Human Resource Information System (HRIS) program that will be developed to the Self-Service Employee (ESS) level, making it more efficient and paperless.

Partisipasi Pemangku Kepentingan

Perseroan mempunyai beberapa kebijakan/peraturan yang pada intinya memberikan perlindungan kepada para pemangku kepentingan dan tidak terbatas pada pemegang saham Bank Riau Kepri . Perlindungan itu antara lain dalam bentuk:

1. Strategi *Anti Fraud*
   Untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan dilakukan secara legal, *prudent*, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Bank Riau Kepri telah memiliki kebijakan Strategi *Anti Fraud*. Penerapkan Strategi Anti *Fraud* yang dilakukan Bank saat ini merupakan pelaksanaan atas diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember perihal Standar Operasional Prosedur Pencegahan Anti *Fraud*. Melalui unit Satuan Kerja Anti *Fraud*, maka penerapan Strategi Anti *Fraud* diwujudkan oleh manajemen Bank sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud* yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal Bank.
2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa
   Terkait dengan kegiatan pengadaan, Bank Riau Kepri telah memiliki kebijakan tentang seleksi Penyedia Barang dan Jasa (vendor) untuk memastikan agar Bank Riau Kepri memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan berkualitas. Kriteria seleksi vendor ditinjau secara periodik sebagai landasan

Stakeholder Participation

The Company has several policies/regulations that provide protection to stakeholders and are not limited to the shareholders of Bank Riau Kepri. This protection includes, among others:

1. *Anti Fraud Strategy*
   To ensure that the Company's business activities are carried out legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance, Bank Riau Kepri has an Anti Fraud Strategy policy. The implementation of the Anti-Fraud Strategy that is currently being carried out by the Bank is the implementation of the issuance of Bank Indonesia Circular Letter No. 13/28/DPNP dated December 9, the date of Standard Operating Procedures for Anti-Fraud Prevention. Through the Anti Fraud Unit, the implementation of the Anti Fraud Strategy is realized by the Bank's management as a form of the company's commitment to controlling fraud which is implemented in the form of fraud control which is part of the Bank's internal control system.

2. *Goods and Services Procurement Process*
   In relation to procurement, Bank Riau Kepri has a policy regarding the selection of Goods and Service Providers (vendors) to ensure that Bank Riau Kepri obtains the goods or services needed at competitive prices and with high quality. Vendor selection criteria are reviewed regularly as a basis for selection to become a partner.

seleksi menjadi rekanan. Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor di Bank Riau Kepri diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Setiap kegiatan seleksi pemasok atau vendor untuk pengadaan barang atau jasa, maka Pejabat Pembuat Komitmen di Bank akan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, sumber pendanaan, jangka waktu pelaksanaan, dan spesifikasi teknis, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor.

3. Nasabah
   Pemangku kepentingan lainnya adalah Nasabah dari Bank Riau Kepri . Untuk itu, Bank Riau Kepri menyusun kebijakan guna menjaga kepentingan nasabah yang ditetapkan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Pengaduan Nasabah dan Kebijakan yang mengharuskan di dalam setiap pemberian layanan produk dan/atau jasa memperhatikan hak-hak nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan PBI Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah maka pelaksanaan kewajiban Pelaporan Penanganan Pengaduan Nasabah disampaikan Bank Riau Kepri ke Bank Indonesia secara periodik triwulanan melalui mekanisme Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).
4. *Whistleblowing system*
   Whistleblowing system (WBS) di Bank Riau Kepri diimplementasikan melalui aplikasi WBS yang menjadi sarana penyampaian laporan pengaduan fraud atau indikasi *fraud*, baik dari pegawai maupun rekanan kepada Direksi sebagai sarana pengendalian internal di lingkungan Bank Riau Kepri.
5. Keterbukaan Informasi
   Bank Riau Kepri telah memanfaatkan TI secara luas sebagai media keterbukaan informasi melalui penggunaan situs web Bank Riau Kepri dan sarana teknologi lainnya seperti *SMS Banking*, *Phone Banking*, *Mobile Banking*, Instagram, dan Facebook. Laporan Tahunan Bank Riau Kepri juga telah mengungkapkan berbagai informasi penting termasuk informasi kepemilikan saham, khususnya informasi mengenai Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih saham Perseroan.
6. Pengendalian Gratifikasi
   Pada tahun 2021 kami telah memiliki pedoman pengendalian gratifikasi. Selain itu kami juga telah melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi yang di ikuti oleh *stakeholder* serta *shareholder* terkait.

The policy regarding the selection of suppliers or vendors at Bank Riau Kepri is regulated in the Guidelines for the Procurement of Goods and Services. Every supplier or vendor selection activity for the procurement of goods or services, the Commitment Making Officer at the Bank will make a Working Reference Framework (KAK) which contains the background, intent and objectives, legal basis, financial resources, implementation period, and technical specifications, and fulfillment of rights relating to suppliers or vendors.

3. *customer*
   Other stakeholders are customers from Bank Riau Kepri. For this reason, Bank Riau Kepri has developed a policy to protect the interests of customers as stipulated in the Standard Operating Procedures (SPO) for the Management of Customer Complaints and the Policies required in providing services and/or services to pay attention to the rights of customers as stipulated in the provisions of PBI Number 10/10/ PBI/2008 concerning Amendments to PBI Number 7/7/PBI/2005 dated January 20, 2005 concerning Settlement of Customer Complaints, the implementation of the obligation to report Customer Complaint Handling is submitted by Bank Riau Kepri to Bank Indonesia on a quarterly basis through the mechanism of the Commercial Bank Head Office Report (LKPBU).

4. *Violation reporting system*
   The Whistleblowing system (WBS) at Bank Riau Kepri is implemented through the WBS application which is a means of reporting fraud complaints or indications of fraud, both from employees and partners to the Board of Directors as a means of internal control within Bank Riau Kepri.
5. *Information Disclosure*
   Bank Riau Kepri has made extensive use of IT as a medium of information through the use of the Bank Riau Kepri website and other technological means such as SMS Banking, Phone Banking, Mobile Banking, Instagram, and Facebook. The Bank Riau Kepri Annual Report has also disclosed various important information including share ownership information, particularly information regarding Shareholders who own 5% or more of the Company's shares.

6. *Gratuity Control*
   In 2021 we have a gratuity control guideline. In addition, we have also carried out socialization of gratification control which was participated by stakeholders and related shareholders.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang efektif adalah salah satu elemen penting dari tata kelola yang baik. Perbankan harus secara proaktif memastikan dapat dicapainya kesinambungan usaha, pelayanan kepada pelanggan dan pengembangan tujuan organisasi yang sejalan dengan visi dan misi dalam perspektif memenuhi ekspektasi para *stakeholder*-nya.

Beberapa program penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan Bank Riau Kepri secara umum adalah tercapainya keseimbangan *risk-return trade off* secara optimal. Maka pengelolaan bisnis perlu diarahkan guna mencapai keseimbangan antara pencapaian return (*profitabilitas*) dan tingkat risiko usaha potensial yang optimal melalui alokasi pengelolaan portofolio bisnis (*portofolio management*).

Direksi telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang berfungsi memberikan rekomendasi persetujuan, peninjauan secara berkala dan perbaikan yang berkelanjutan atas kerangka manajemen risiko yang dikembangkan. Bank Riau Kepri telah menerapkan Tata Kelola dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite Manajemen Risiko dan Dewan Komisaris serta mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pejabat Bank Riau Kepri mulai level Pemimpin Seksi/Staf sebagai upaya penerapan Basel II dari aspek Sumber Daya Manusia.

Sasaran Kebijakan Manajemen Risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya aktivitas/kegiatan usaha Bank Riau Kepri dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank Riau Kepri yang senantiasa tidak lepas dari risiko.

Agar pengukuran, pemantauan dan pengendalian seluruh risiko usaha dapat berkesinambungan, maka proses pengelolaan dan pengendalian risiko perlu dilakukan secara sistematis dan *built in control* oleh setiap unit kerja. Dengan demikian setiap kebijakan dan keputusan bisnis yang diambil tidak akan menimbulkan pertentangan kepentingan antara satu unit dengan unit pengelolaan dan pengendalian bisnis.

Risk management

Effective risk management is one of the important elements of good governance. Banks must proactively ensure that business continuity, customer service and development of organizational goals are in line with the vision and mission in meeting the expectations of their stakeholders.

Several risk management implementation programs implemented by Bank Riau Kepri in general are achieving an optimal balance of risk-return trade-off. Therefore, business management needs to be directed towards achieving a balance between the management of returns (profitability) and the optimal level of business risk through the allocation of business portfolio management (portfolio management).

The Board of Directors has established a Risk Management Committee which works to provide approved recommendations, on a regular basis and improvements to the developed risk management framework. Bank Riau Kepri has implemented Good Corporate Governance in supporting the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Risk Management Committee and the Board of Commissioners as well as requiring risk management certification for all Bank Riau Kepri officials starting at the Section/Staff Leader level as an effort to implement Basel II from the Human Resources aspect.

The target of the Risk Management Policy is to identify, measure, control and control the activities/business activities of Bank Riau Kepri with a reasonable level of risk in a directed, integrated and included in the activities. So that risk management functions as a filter or early warning system for the business activities of Bank Riau Kepri which cannot be separated from risk.

In order for the measurement, monitoring and control of business risk control to be carried out, the risk management and control process is carried out systematically and controls are developed by each work unit. Thus, every policy and business decision taken will not create interest between one unit and the management and control of the business.

Penerapan Sistem Manajemen Risiko Bank Riau Kepri berdasarkan empat cakupan:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sejalan dengan visi misinya BRK terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat, di sekitar wilayah bisnis bank melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada tahun 2021 kegiatan CSR yang dialokasikan melalui program Peduli Sosial, Peduli Pendidikan, Peduli Kesehatan, Peduli Lingkungan, Peduli Keagamaan, dan Peduli Kemitraan dan Pemasok.

BRK saat ini berupaya terus untuk berusaha untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. Kami telah dan akan terus mengupayakan pengurangan pencemaran terhadap lingkungan berupa kerjasama dengan mitra atau nasabah yang memiliki reputasi baik dalam menjalankan bisnisnya.

Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Perseroan dan Langkah- Langkah Penyelesaiannya

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Bank Riau Kepri juga dihadapkan pada berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain, Jaringan/*channel*, inovasi produk dan layanan berbasis TI serta Kapabilitas pemasaran dan penjualan (diversifikasi pelanggan). Untuk mengatasi kendala tersebut, meningkatkan inovasi produk dan layanan sesuai kebutuhan segmen melalui Implementasi digital solution diantaranya pengembangan new *m-Banking, cash management system dan virtual account.* Bank juga melakukan optimalisasi strategi pemasaran dan penjualan produk dan layanan melalui peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha dan perusahaan swasta/pihak ketiga lainya terkait produk dan layanan.

Selain itu, terdapat kendala pada kemampuan analisis kredit dan penagihan serta budaya organisasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank telah meningkatkan peran SDM dalam mendukung pencapaian kinerja Bank melalui peningkatan kompetensi dan profesionalitas.

The implementation of the Bank Riau Kepri Risk Management System is based on four scopes:

1. *Active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
2. *Adequacy of Risk Management policies and procedures as well as risk limit setting.*
3. *Adequacy of process, measurement, monitoring and control as well as risk management information system.*
4. *A comprehensive internal control system.*

Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR)

In line with its vision and mission, BRK continues to be committed to contributing to the community around the bank's business area through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) programs. In 2021 CSR activities are allocated through Social Care, Education Care, Health Care, Environmental Care, Religious Care, and Partnership and Supplier Care programs.

BRK is currently trying to continue to pay attention to environmental aspects in carrying out each of its activities. We are and will continue to strive to reduce the work environment in the form of partners or customers who have a good reputation in running their business.

Constraints Faced by the Company and Steps to Solve It

In carrying out its operational activities, Bank Riau Kepri is also faced with various obstacles. These constraints include, among others, Network/channel, IT-based product and service innovation as well as marketing and sales capabilities (customer diversification). To overcome these obstacles, improve product and service innovation according to segment needs through the implementation of digital solutions, including the development of new m-Banking, cash management systems and virtual accounts. The Bank also optimizes the marketing and sales strategy of products and services by increasing cooperation with business actors and private companies/third parties related to other products and services.

In addition, there are constraints on the ability to analyze credit and collections as well as organizational culture. To overcome these obstacles, the Bank has increased the role of HR in supporting the Bank's performance through increasing competence and professionalism.

Apresiasi Kepada Pemangku Kepentingan

Sebagai rangkaian kata penutup, izinkan kami atas nama seluruh anggota Direksi mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah beserta Komite dibawah organ Dewan Komisaris atas segala arahan dan saran yang diberikan kepada Direksi dalam pengelolaan Bank sepanjang tahun 2021. Penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh Pemegang Saham, Regulator,Nasabah, mitra usaha serta Pemangku Kepentingan lainnya atas dukungan, dan kepercayaan.

Direksi juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran insan BRK disaat pandemic covid 19 ini tanpa lelah menorehkan karya, prestasi dengan penuh dedikasi dan integrasi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sehingga pencapaian kinerja yang menggembirakan dapat terlaksana dengan baik.

Mari, bersama-sama kita satukan langkah dan optimisme serta semangat tinggi kita menyongsong Keberkahan dengan semangat melayani tanah air tercinta dan menjadi kebanggaan bangsa.

Jazakallah khairan katsiran

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Appreciation to Stakeholders

As a series of closing remarks, allow us on behalf of all members of the Board of Directors to express our gratitude and high appreciation to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board and the Committees under the Board of Commissioners for all directions and suggestions given to the Board of Directors in managing the Bank throughout 2021. We also convey the same to all Shareholders, Regulators, Customers, business partners and other Stakeholders for their support and trust.

The Board of Directors also expresses gratitude and appreciation to all levels of BRK personnel during this covid 19 pandemic, tirelessly making works, achievements with dedication and integration in carrying out duties and responsibilities so that encouraging performance achievements can be carried out properly.

Let's, together, unite our steps and be optimistic and have high spirits towards Blessings with the spirit of serving our beloved homeland and becoming the pride of the nation.

Jazakallah Khairan Katsiran

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 31 Desember 2021
Pekanbaru, December 31, 2021

Atas Nama Direksi
On behalf of the Board of Directors



Andi Buchari
Direktur Utama
President director



PROFIL DEWAN DIREKSI
Profile of Director



ANDI BUCHARI

Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Jakarta, 31 Agustus 1966. Usia 55 tahun per 31 Desember 2021.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth/Age:** Born in Jakarta, 31 August 1966. 55 years old as of December 31, 2021.*

Sertifikasi :
- *Banking Risk Management* Level 5 oleh BSMR (2004)
- *Certified Risk Professional* oleh LSPPM-BNSP (2020)
- *Certified Personal Finance* oleh FFAI (2020)

Riwayat Pendidikan :
- Sarjana bidang Marine Product Technology dari IPB University (1988)
- Magister Manajemen bidang Finance dari Universitas Atmajaya Jakarta (1996).
- Doktor bidang Strategic Finance dari Sekolah Bisnis IPB University (2016).

Pengalaman Kerja :
- Kepala Divisi Marketing III, Bank Muamalat (1999).
- Kepala Divisi *Treasury & Investment Banking*, Bank Muamalat (1999 - 2000).
- Kepala Divisi Internal Audit , Bank Muamalat (2000 - 2001).
- *Corporate Secretary*, Bank Muamalat (2001 - 2002).
- Kepala Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumut, Riau, Sumbar, Aceh) Bank Muamalat (2002-2004).
- Direktur *Compliance dan Corporate Support*, Bank Muamalat (2004 - 2007).
- Direktur Keuangan dan Administrasi, Bank Muamalat (2007 - 2009).
- Project Director Pengembangan Bisnis Internasional Bank Muamalat (2008 - 2009).
- Executive Director, First Islamic Investment Bank (2009).
- Direktur *Risk Management and Compliance*, Bank Muamalat (2009 - 2014).
- Direktur Supervisi Team Anti Fraud, Bank Muamalat (2009 - 2014).

Certification:
- *Banking Risk Management Level 5 by BSMR (2004)*
- *Certified Risk Professional by LSPPM-BNSP (2020)*
- *Certified Personal Finance by FFAI (2020)*

Educational background :
- *Bachelor of Marine Product Technology from IPB University (1988)*
- *Master of Management in Finance from Atmajaya University Jakarta (1996).*
- *Doctorate in Strategic Finance from IPB University Business School (2016)*

Work experience :
- *Head of Marketing Division III, Bank Muamalat (1999).*
- *Head of the Treasury & Investment Banking Division, Bank Muamalat (1999 - 2000).*
- *Head of Divisi Internal Audit , Bank Muamalat (2000 - 2001).*
- *Corporate Secretary, Bank Muamalat (2001 - 2002).*
- *Head of the Northern Sumatra Region (North Sumatra, Riau, West Sumatra, Aceh) Bank Muamalat (2002-2004).*
- *Director of Compliance and Corporate Support, Bank Muamalat (2004 - 2007).*
- *Director of Finance and Administration, Bank Muamalat (2007 - 2009).*
- *Project Director of Bank Muamalat International Business Development (2008 - 2009)*
- *Executive Director, First Islamic Investment Bank (2009).*
- *Director of Risk Management and Compliance, Bank Muamalat (2009 - 2014).*
- *Director of Supervision of the Anti-Fraud Team, Bank Muamalat (2009 - 2014).*

- Direktur Supervisi Baitulmaal, Bank Muamalat (2009 - 2014).
- Direktur Utama PT Bahana Arha Ventura (2014 - 2016).
- Direktur PT Bahana Sekuritas (2016 - 2017).
- Komisaris Utama PT Sarana Surakarta Ventura (2015 - 2017).
- Komisaris PT Sarana NTB Ventura (2015 - 2017).
- Komisaris PT Sarana Bali Ventura (2015 - 2017).
- Direktur Utama PT Amanah Mikro Muamalat Indonesia (2017 - 2018).
- Kandidat terpilih Direktur Utama PT Lembaga Keuangan Wakaf Indonesia (2017 - 2018).
- *Senior Advisor Paytrend Group* (2018).
- Komisaris Utama PT Esa Sembilan Group (2018 - 2020).
- Direktur Utama PT Halal Ventures Indonesia (2018 - 2020).
- Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2020 - sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan : Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.14 tanggal 15 September 2020 dan Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020.

Periode Menjabat : 15-09-2020 s/d 14-09-2025

Jabatan Rangkap : Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

- *Director of Supervision of Baitulmaal, Bank Muamalat (2009 - 2014).*
- *President Director of PT Bahana Arha Ventura (2014 - 2016).*
- *Director of PT Bahana Sekuritas (2016 - 2017).*
- *President Commissioner of PT Sarana Surakarta Ventura (2015 - 2017).*
- *Commissioner of PT Sarana NTB Ventura (2015 - 2017).*
- *Commissioner of PT Sarana Bali Ventura (2015 - 2017).*
- *President Director of PT Amanah Mikro Muamalat Indonesia (2017 - 2018).*
- *The candidate was elected President Director of PT Indonesian Wakaf Financial Institutions (2017 - 2018).*
- *Senior Advisor of Paytrend Group (2018).*
- *President Commissioner of PT Esa Sembilan Group (2018 - 2020).*
- *President Director of PT Halal Ventures Indonesia (2018 - 2020).*
- *President Director of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2020 - present).*

Legal Basis of Appointment: *Appointed for the first time as President Director of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the Deed of Minutes of the Extraordinary GMS No.14 dated 15 September 2020 and OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 September 30, 2020.*

Serving Period: *15-09-2020 to 14-09-2025*

Multiple Positions: *Do not have concurrent positions in other companies or institutions.*

Affiliation Relationship: *Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*

Share Ownership in Bank Riau Kepri*: -*



TENGKOE IRAWAN

Direktur Kredit dan Syariah
Credit and Sharia Director

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Pekanbaru, 9 Oktober 1976. Usia 45 tahun per 31 Desember 2021.

Citizenship: *Indonesian Citizen*
Domicile: *Pekanbaru, Riau*
Place and Date of Birth/Age: *Born in Pekanbaru, October 9, 1976. Age 45 as of December 31, 2021.*

Sertifikasi : Sertifikasi Level 5 oleh BSMR (2017).

Riwayat Pendidikan :
- Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Riau (1999).
- Magister bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Riau (2007).

Pengalaman Kerja :
- Pemimpin Bagian Divisi Treasury & International 2009 s/d 2009
- Pemimpin Bagian Divisi Konsumer 2009 s/d 2010
- Pemimpin Bagian Divisi Komersial 2010 s/d 2012
- Pgs. Pemimpin Cabang Bagan Siapiapi 2012 s/d 2013
- Pemimpin Cabang Bagan Siapiapi 2013 s/d 2014
- Pgs. Pemimpin Divisi Kepatuhan 2014 s/d 2014
- Pemimpin Divisi Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2014).
- Pgs. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 2014 s/d 2015
- Rangkap Jabatan Sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Manajemen SDM 2016 s/d 2016
- Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis 2015 s/d 2019.
- Direktur Kredit & Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2019 - sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan : Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Kredit dan Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No. 13 tanggal 22 April 2019 dan Surat OJK No. SR-585/KO.053/2019 tanggal 16 Mei 2019.

Periode Menjabat : 22-04-2019 s/d 21-04-2024

Jabatan Rangkap : Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

Certification: *Level 5 Certification by BSMR (2017).*

Educational background :
- *Bachelor of Economics in Accounting from the University of Riau (1999).*
- *Masters in Financial Management from the University of Riau (2007).*

Work experience :
- *Head of Treasury & International Division 2009 to 2009*
- *Head of Consumer Division 2009 to 2010*
- *Head of Commercial Division 2010 to 2012*
- *Act. Bagan Siapiapi Branch Manager 2012 to 2013*
- *Bagan Siapiapi Branch Manager 2013 to 2014*
- *Act. Head of Compliance Division 2014 to 2014*
- *Head of the Compliance Division of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2014).*
- *Act. Head of Strategic Planning Division 2014 to 2015*
- *Concurrent Position as Act. Head of HR Management Division 2016 to 2016*
- *Head of Strategic Planning Division 2015 to 2019.*
- *Director of Credit & Sharia PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2019 - present).*

Legal Basis of Appointment*: Appointed for the first time as Director of Credit and Sharia of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on Decree of Shareholders Deed No. 13 dated April 22, 2019 and OJK Letter No. SR-585/KO.053/2019 dated May 16, 2019.*

Serving Period: *22-04-2019 to 21-04-2024*

Multiple Positions: *Do not have concurrent positions in other companies or institutions.*

Affiliation Relationship: *Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*

Share Ownership in Bank Riau Kepri: *-*



M. A. SUHARTO

Direktur Dana dan Jasa
Funds and Services Director

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Metro, 20 Desember 1965. Usia 56 tahun per 31 Desember 2021.

Citizenship: *Indonesian Citizen*
Domicile: *Pekanbaru, Riau*
Place and Date of Birth/Age: *Born in Metro, 20 December 1965. Age 56 as of December 31, 2021.*

Sertifikasi : • Sertifikasi Level 5 oleh LSPP (2019).
• Sertifikasi Treasury Dealer, Level Advance (2021)

Riwayat Pendidikan : Sarjana bidang Ekonomi dari Universitas Lampung (1988).

Pengalaman Kerja :
- Memulai karir di Bank Duta sejak 1991 terakhir menjabat *Representative office Head Lampung*.

Selanjutnya berkarir di Bank Syariah Mandiri jabatan yang pernah dijabat diantaranya :
- Manager Operasional dan Risiko Pembiayaan Cab. Pamekasan (2000-2001)
- Kepala Cabang Pamekasan Bank Syariah Mandiri (2001 - 2003).
- Kepala Cabang Yogyakarta Bank Syariah Mandiri (2003 - 2006).
- Kepala Cabang Lampung Bank Syariah Mandiri (2006 - 2008).
- Kepala Cabang Utama Medan Bank Syariah Mandiri (2008 - 2010).
- Regional Head Wilayah Surabaya Bank Syariah Mandiri (2010 - 2013).
- Pemegang Wewenang Memutus Pembiayaan (PWMP) Kantor Pusat (2013 s/ 2014)

Selanjutnya berkarir di Bank Mega Syariah jabatan yang pernah dipegang diantaranya :
- Staf Khusus Direksi Bidang *Network & Distibution Head* Bank Mega Syariah (2014 - 2015).
- *Micro on Small Business Group Head* Bank Mega Syariah (2015).
- *Micro and Small & Network* Group *Head* Bank Mega Syariah (2015-2016).
- *Financing Business & Network Group Head* Bank Mega Syariah (2016-2017).
- *Financing Business Group Head* Bank Mega Syariah (2017 - 2018).
- *Funding Business and Network Group Head* Bank Mega Syariah (2017-2018).
- *Network and Financing Support Group Head* Bank Mega Syariah (2018-2019).
- *Financing Support Group Head Bank Mega Syariah* (2019 - 2020).

Saat ini menjabat Direktur Dana dan Jasa Bank Riau Kepri (15 Sept 2020 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan : Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Dana dan Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.14 tanggal 15 September 2020 dan Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020.

Periode Menjabat : 15-09-2020 s/d 14-09-2025 (periode 1)

Jabatan Rangkap : Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

Certification: • *Level 5 Certification by LSPP (2019).*
• *Treasury Dealer Certification, Advance Level (2021)*

Educational background : *Bachelor's degree in Economics from the University of Lampung (1988).*

Work experience :
- *Started his career at Bank Duta in 1991, and last served as Representative Office Head in Lampung.*

Furthermore, he has a career at Bank Syariah Mandiri, the positions he has held include:
- *Manager of Operations and Risk Financing Branch Pamekasan (2000-2001)*
- *Branch Head of Pamekasan Bank Syariah Mandiri (2001 - 2003).*
- *Head of Yogyakarta Branch of Bank Syariah Mandiri (2003 - 2006).*
- *Branch Head of Bank Syariah Mandiri Lampung (2006 - 2008).*
- *Head of the Main Branch of Medan Bank Syariah Mandiri (2008 - 2010).*
- *Regional Head for the Surabaya Region of Bank Syariah Mandiri (2010 - 2013).*
- *Authority to Decide on Financing (PWMP) Head Office (2013 to 2014)*

Subsequently, he had a career at Bank Mega Syariah, the positions he had held were:
- *Special Staff of the Board of Directors for Network & Distribution Head of Bank Mega Syariah (2014 - 2015).*
- *Micro on Small Business Group Head of Bank Mega Syariah (2015).*
- *Micro and Small & Network Group Head of Bank Mega Syariah (2015-2016).*
- *Financing Business & Network Group Head of Bank Mega Syariah (2016-2017).*
- *Financing Business Group Head of Bank Mega Syariah (2017 - 2018).*
- *Funding Business and Network Group Head of Bank Mega Syariah (2017-2018).*
- *Network and Financing Support Group Head of Bank Mega Syariah (2018-2019).*
- *Financing Support Group Head of Bank Mega Syariah (2019 - 2020).*

Currently serves as Director of Funds and Services at Bank Riau Kepri (15 Sept 2020 to present.

Legal Basis of Appointment: *Appointed for the first time as Director of Funds and Services of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the Deed of Minutes of the Extraordinary GMS No.14 dated September 15, 2020 and OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 dated September 30, 2020.*

Serving Period: *15-09-2020 to 14-09-2025 (1st periode)*

Multiple Positions: *Do not have concurrent positions in other companies or institutions.*

Affiliation Relationship: *Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*

Share Ownership in Bank Riau Kepri: -



SAID SYAMSURI

Direktur Operasional
Operational Director

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : lahir di Rengat, 7 Desember 1965. Usia 56 tahun per 31 Desember 2021.

Citizenship: *Indonesian Citizen*
Domicile: *Pekanbaru, Riau*
Place and Date of Birth/Age: *Born in Rengat, December 7, 1965. Age 56 as of December 31, 2021.*

Sertifikasi : Sertifikasi Level 5 oleh BSMR (2011).

Riwayat Pendidikan :
- Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Riau (1993).
- Magister bidang Manajemen dari Universitas Riau (2012).

Pengalaman Kerja :
- Pemimpin Divisi Mikro dan Kecil PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2008 - 2010).
- Pemimpin Divisi Konsumer & Mikro PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2010 - Juli 2013).
- Staf Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2013 - 2016).
- Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2016 - 2019).
- Pemimpin Divisi Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2019 - 2020).
- Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2020 - sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan : Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.29 tanggal 23 September 2020 dan Surat OJK No.SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020.

Periode Menjabat : 15-09-2020 s/d 14-09-2025

Jabatan Rangkap : Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

Certification: *Level 5 Certification by BSMR (2011).*

Educational background :
- *Bachelor of Accounting from Riau University (1993).*
- *Master of Management from the University of Riau (2012).*

Work experience :
- *Head of the Micro and Small Division of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2008 - 2010).*
- *Head of the Consumer & Micro Division of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2010 - July 2013).*
- *Staff of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2013 - 2016).*
- *Head of the PKB Division of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2016 - 2019).*
- *Head of the Sharia Division of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2019 - 2020).*
- *Operational Director of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2020 - present).*

Legal Basis of Appointment: *Appointed for the first time as Operational Director of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on Deed No.29 dated September 23, 2020 and OJK Letter No.SR-120/KO.053/2020 dated September 30, 2020.*

Serving Period*: 15-09-2020 to 14-09-2025*

Multiple Positions: *Do not have concurrent positions in other companies or institutions.*

Affiliation Relationship: *Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*

Share Ownership in Bank Riau Kepri: *-*



FAJAR RESTU FEBRIANSYAH

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Compliance & Risk Management Director

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Pekanbaru, 1 Februari 1969. Usia 52 tahun per 31 Desember 2021.

Citizenship: *Indonesian Citizen*
Domicile: *Pekanbaru, Riau*
Place and Date of Birth/Age: *Born in Pekanbaru, February 1, 1969. Age 52 as of December 31, 2021.*

Sertifikasi : Sertifikasi Level 5 oleh BSMR (2021).

Riwayat Pendidikan : Sarjana bidang Ekonomi dan Pembangunan dari Universitas Riau (1990).

Pengalaman Kerja Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 1996. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai :
- Pemimpin Cabang Ranai (2007 s/d 2009)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (2009 s/d 2017)
- Pemimpin Cabang Tanjung Pinang (2017 s/d 2018)
- Pemimpin Divisi Hukum (2018 s/d 2021)
- Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan : Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No.35 tanggal 15 November 2021 dan Surat OJK No.S-462/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021.

Periode Menjabat : 15-11-2021 s/d 14-11-2026

Jabatan Rangkap : Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

Age: Certification: *Level 5 Certification by BSMR (2021).*

Educational background : *Bachelor in Economics and Development from the University of Riau (1990).*

Work experience *Joined Bank Riau Kepri starting in 1996. Some of the positions he has held include :*
- *Ranai Branch Manager (2007 to 2009)*
- *Bangkinang Branch Manager (2009 to 2017)*
- *Tanjung Pinang Branch Manager (2017 to 2018)*
- *Head of Legal Division (2018 to 2021)*
- *Director of Compliance & Risk Management (2021 to present)*

Legal Basis of Appointment: *Appointed for the first time as Director of Compliance and Risk Management of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on the Deed of Minutes of the Extraordinary GMS No. 35 dated November 15, 2021 and OJK Letter No.S-462/KO.053/2021 dated December 7, 2021.*

Serving Period: *15-11-2021 to 14-11-2026*

Multiple Positions: *Do not have concurrent positions in other companies or institutions.*

Affiliation Relationship: *Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*

Share Ownership in Bank Riau Kepri: *-*



EKA AFRIADI

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Compliance & Risk Management Director

(Berakhir masa jabatan per tanggal 5 Juli 2021)
(Term of office expires on July 5, 2021)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia: Lahir di Pekanbaru, 1 April 1967. Usia 54 tahun per 31 Desember 2021.

***Citizenship**: Indonesian Citizen*
***Domicile**: Pekanbaru, Riau*
***Place and Date of Birth / Age:** Born in Pekanbaru, April 1, 1967. Age 54 as of December 31, 2021.*

Sertifikasi: Sertifikasi Level 5 oleh BSMR (2011).

Riwayat Pendidikan:
- Sarjana bidang Ekonomi Akuntansi dari Universitas Andalas Padang (1993).

Pengalaman Kerja:
- Pemimpin Divisi Kepatuhan & Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2008 - 2009).
- Pemimpin Divisi Kepatuhan dan Hukum Merangkap Pgs. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2009 - 2010).
- Pjs. Pemimpin Divisi Hukum & Corporate Secretary PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2010).
- Pemimpin Divisi Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2010 - 2013).
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2013 - 04-07-2021).

Dasar Hukum Pengangkatan: Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No. 05 tanggal 5 Juli 2013 dan Surat BI No. 15/2/DPKP/Pbr tanggal 19 Juli 2013. Diangkat kembali berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No. 05 Tanggal 4 Maret tahun 2017 dan Surat OJK No. SR-144/KO.053/2017 tanggal 11 Juli 2017.

Periode Menjabat :
- 2013 - 2017 (periode 1)
- 2017 - 2021 (periode 2)

Jabatan Rangkap : Tidak memiliki rangkap jabatan di perusahaan maupun lembaga lain.

Hubungan Afiliasi : Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Kepemilikan Saham di Bank Riau Kepri : -

***Certification:** Level 5 Certification by BSMR (2011).*

Educational background :
- *Bachelor of Economics in Accounting from and alas University, Padang (1993).*

Work experience:
- *Head of Compliance & Legal Division of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2008 - 2009).*
- *Head of Compliance and Legal Division and concurrently Pgs. Leader of the Strategic Planning Division of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2009 - 2010).*
- *Acting. Head of Legal Division & Corporate Secretary of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2010).*
- *Head of Compliance Division of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2010 - 2013).*
- *Director of Compliance and Risk Management of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (2013 - present).*

***Legal Basis of Appointment:** Appointed for the first time as Director of Compliance and Risk Management of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri based on Decree of Shareholders Deed No. 5 dated 5 July 2013. and BI Letter No. 15/2 / DPKP / Pbr dated July 19, 2013. Reappointed based on the Shareholders Decree Deed No. 05 March 4, 2017, and OJK Letter No. SR-144 / KO.053 / 2017 dated July 11, 2017.*

Serving Period:
- *2013 - 2017 (period 1)*
- *2017 - 2021 (period 2)*

***Multiple Positions:** Do not have concurrent positions in other companies or institutions.*

***Affiliation Relationship:** Has no affiliation with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or with controlling and major shareholders.*

***Share Ownership in Bank Riau Kepri:** -*

PROFIL PEJABAT DI BAWAH DIREKSI
Profile of Officers Under The Board of Directors



ANDI MULYA

Pemimpin Divisi Komersial
Commercial Division Head

Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia: Lahir di Pekanbaru, 16 September 1966. Usia 55 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan:
Menyelesaikan Studi di Bidang Akuntasi dan meraih gelar Sarjana dari STIE-Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Bandung pada tahun 1993

Pengalaman Kerja:
Bergabung di Bank Riau Kepri pada tahun 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Pengelolaan Dana Divisi Treasury & Internasional (2002 s/d 2010)
- Pemimpin Divisi Treasury & Internasional (2010 s/d 2016)
- Pemimpin Divisi Treasury & Internasional merangkap sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Operasional (2013)
- Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa (2016 s/d 2017)
- Pemimpin Divisi Umum (2017 s/d 2019)
- Pemimpin Divisi Konsumer (2019 s/d 2020)
- Pemimpin Divisi Komersial (2020 s/d 2021)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2021)
- Pemimpin Divisi Komersial (2021 s/d Jan 2022).

Dasar Hukum Pengangkatan:
SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 9 Agustus 2021

Periode Menjabat : 12-08-2021 s/d 11-02-2022

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Pekanbaru, September 16, 1966. Age 55 as of December 31, 2021.*

Educational background :
Completed his studies in the field of accounting and earned a Bachelor's degree from STIE-Bandung Banking and Finance Education Foundation in 1993

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in 1994. Some of the important positions that have been held include :

- *Head of Fund Management Division of Treasury & International Division (2002 to 2010)*
- *Treasury & International Division Head (2010 - 2016).*
- *Treasury & International Division Head concurrently as Pgs. Operations Division Head (2013).*
- *Fund & Service Products Division Head (2016 - 2017).*
- *General Division Head (2017 - 2019).*
- *Consumer Division Head (2019 - 2020).*
- *Commercial Division Head (2020 - January 2021)*
- *Risk Management Division Head (2021)*
- *Commercial Division Head (2021 to Jan 2022)..*

Legal Basis of Appointment:
Decree No.84 / KEPDIR / MSDM / 2021 dated August 9, 2021

Serving Period: *12-08-2021 to 11-02-2022*



YUHARMAN

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Funds and Services Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Pasir Pengaraian, 6 Desember 1966. Usia 55 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi di Bidang Akuntasi dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau (UNRI) tahun 1993

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain :

- Pemimpin Cabang Bangkinang (2004 s/d 2007)
- Pemimpin Cabang Pasir Pengaraian (2007 s/d 2009)
- Pemimpin Cabang Pasar Pusat (2009 s/d 2014)
- Pemimpin Cabang Utama (2014 s/d 2016)
- Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (2016 s/d 2019)
- Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa (2019 s/d 2021)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Agus 2021 s/d Des 2021)

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021

Periode Menjabat : 12-08-2021 s/d 31-12-2021

Citizenship : *Indonesian Citizen*

Domicile : *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age : *Born in Pasir Pengaraian, December 6, 1966. Age 55 as of December 31, 2021*

Educational background :
Completed his studies in the field of accounting and earned a bachelor's degree from the University of Riau (UNRI) in 1993

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in 1994. Some of the important positions that have been held include:

- *Bangkinang Branch Manager (2004 - 2007).*
- *Pasir Pengaraian Branch Manager (2007 - 2009).*
- *Pasar Pusat Branch Manager (2009 - 2014).*
- *Main Branch Manager (2014 - 2016).*
- *Human Resource Management Division Head (2016 - 2019).*
- *Fund Products and Services Division Head (2019- 2021).*
- *Management Risk Division Head (August 2021-Dec 2021)*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 dated August 9, 2021

Serving Period: *12-08-2021 to 31-12-2021*



MUHAMMAD AFFAN

Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Head of Human Resources Management Division

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Cengar, 11 Juni 1970. Usia 51 tahun per 31 Desember 2021.

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi di Bidang Ekonomi Pembangunan dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau (UNRI) pada tahun 1994.

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri pada tahun 1996. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya :

- Pemimpin Cabang Pembantu Baserah (2009 s/d 2011)
- Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Dalam (2011 s/d 2014)
- Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (2014 s/d 2017)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (2017 s/d 2019)
- Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah (2019 s/d 2021)
- Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021

Periode Menjabat : 21-01-2021 s/d sekarang

***Citizenship**: Indonesian Citizen*

***Domicile:** Pekanbaru, Riau*

***Place and Date of Birth / Age :** Born in Cengar, 11 June 1970. Age 51 as of December 31, 2021.*

Educational background :
Completed his studies in Development Economics and earned a Bachelor's degree from the University of Riau (UNRI) in 1994.

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in 1996. Some of the important positions that have been held include :

- *Baserah Sub-Branch Leader (2009 s/d 2011)*
- *Lubuk Dalam Sub-Branch Leader (2011 to 2014)*
- *Kuantan Bay Branch Manager (2014 to 2017)*
- *Bangkinang Branch Manager (2017 to 2019)*
- *Micro, Small & Medium Division Leader (2019 to 2021)*
- *Head of Human Resources Management Division (2021 to present).*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 dated January 11, 2021

***Serving Period:** 21-01-2021 - present*



YUDHI ADITYA YUDHANA

Pemimpin Divisi Treasury & Internasional
Treasury & International Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Jakarta, 11 November 1975. Usia 46 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi di bidang Manajemen dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau (UNRI) pada tahun 1999.

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 2000. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain :

- Pemimpin Cabang Pembantu Tangkerang (2008 s/d 2010)
- Pemimpin Bagian Divisi Treasury & International (2010 s/d 2016)
- Pemimpin Divisi Treasury & Internasional (2016 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No.74/KEPDIR/MSDM/2016 tanggal 4 Oktober 2016

Periode Menjabat : 04-10-2016 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth/Age: *Born in Jakarta, November 11, 1975. Age 46 years as of December 31, 2021.*

Educational background :
Completed his studies in Management and earned a Bachelor's degree from the University of Riau (UNRI) in 1999.

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in 2000. Some of the important positions that have been held include:

- *Tangkerang Sub-Branch Leader (2008 s/d 2010)*
- *Sub Head of the Treasury & International Division (2010 - 2016).*
- *Treasury & International Division Head (2016 - present).*

Legal Basis of Appointment:
Decree No.74 / KEPDIR / MSDM / 2016 dated October 4, 2016

Serving Period: *04-10-2016 - present*



IMRAN

Pemimpin Divisi Konsumer
Consumer Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Kelanga, 28 Januari 1977. Usia 44 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi di bidang Manajemen dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Lancang Kuning pada tahun 2007

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 2000. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain :

- Pemimpin Cabang Pembantu Tj. Uban (2008 s/d 2014)
- Pemimpin Cabang Ranai (2014 s/d 2016)
- Pemimpin Cabang Bengkalis (2016 s/d 2019)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (2019 s/d 2020)
- Pgs. Pemimpin Divisi Konsumer (2020)
- Pgs. Pemimpin Divisi Konsumer merangkap Pemimpin Divisi Syariah (2020)
- Pemimpin Divisi Konsumer (2021 s/d sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No.01/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 4 Januari 2021

Periode Menjabat : 04-01-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Kelanga, January 28, 1977. Age 43 as of December 31, 2021.*

Educational background :
Completed his studies in Management and earned a Bachelor's degree from Lancang Kuning University in 2007

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri starting in 2000. Several positions he has held include :

- *Head of Sub-Branch Tj. Gray hair (2008 to 2014)*
- *Ranai Branch Manager (2014 to 2016)*
- *Bengkalis Branch Manager (2016 to 2019)*
- *Bangkinang Branch Manager (2019 to 2020)*
- *Act. Consumer Division Leader (2020)*
- *Act. Head of Consumer Division concurrently Head of Sharia Division (2020)*
- *Head of Consumer Division (2021 to present).*

Legal Basis of Appointment:
Decree No.01/KEPDIR/MSDM/2021 date January 4, 2021

Serving Period: *04-01-2021 - Present*



ANTHONY SUJARWO

Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah
Micro Small & Medium Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Jakarta, 03 Maret 1975. Usia 46 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi di bidang Perbankan dan meraih gelar Sarjana Muda dari STIE AKBAR tahun 1997.

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 1997. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain :

- Pemimpin Cabang Tanjung Balai Karimun (2013 s/d 2014)
- Pemimpin Cabang Tanjung Pinang (2014 s/d 2015)
- Pemimpin Cabang Batam (2015 s/d 2017)
- Pemimpin Bagian Proyek dan Sindikasi Divisi Komersial (2017 s/d 2020)
- Pemimpin Bagian Komersial I Divisi Komersial (2020)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (2020 s/d 2021)
- Pemimpin Divisi Mikro Keci & Menengah (2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No.04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021

Periode Menjabat : 21-01-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Jakarta, March 3, 1975. Age 46 as of December 31, 2021*

Educational background :
Completed his studies in banking and earned his baccalaureate degree from STIE AKBAR in 1997.

Work experience :

Joined Bank Riau Kepri starting in 1997. Several positions he has held include :

- *Tanjung Balai Karimun Branch Manager (2013 to 2014)*
- *Tanjung Pinang Branch Manager (2014 to 2015)*
- *Batam Branch Manager (2015 to 2017)*
- *Head of Commercial Project Division and Syndication Division (2017 to 2020)*
- *Head of Commercial Division I Commercial Division (2020)*
- *Bangkinang Branch Manager (2020 to 2021)*
- *Head of Micro Small & Medium Division (2021 to present).*

Legal Basis of Appointment:
Decree No.04/KEPDIR/MSDM/2021 date Januari 11, 2021

Serving Period: *21-01-2021 - Present*



KHAIRUL ANWAR

Pemimpin Divisi Kepatuhan
Compliance Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Pekanbaru, 17 Mei 1969. Usia 52 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi Sarjana Ekonomi di Universitas Riau.

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak 1 Agustus 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat :

- Pemimpin Cabang Selat Panjang (2008 - 2010)
- Pemimpin Cabang Bagan Siapi-api (2010 - 2012)
- Pemimpin Cabang Siak Sri Indapura (2012 - 2014)
- Pemimpin Divisi Syariah (2014 - 2016)
- Pemimpin Divisi Konsumer (2016 - 2017)
- Pemimpin Divisi Komersial (2017 - 2019)
- Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (2019 - Januari 2021).
- Pemimpin Divisi Komersial (2021)
- Pemimpin Divisi Kepatuhan (2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021

Periode Menjabat : 12-08-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Pekanbaru, May 17, 1969. Age 51 as of December 31, 2021.*

Educational background :
Completed his Bachelor of Economics at the University of Riau.

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in 1994. Some of the important positions that have been held include:

- *Selat Panjang Branch Manager (2008 - 2010)*
- *Bagan Siapi-api Branch Manager (2010 - 2012)*
- *Siak Sri Indapura Branch Manager (2012 - 2014)*
- *Sharia Division Head (2014 - 2016)*
- *Consumer Division Head (2016 - 2017)*
- *Commercial Division Head (2017 - 2019)*
- *Human Resources Management Division Head (2019 - Januari 2021).*
- *Commercial Division Head (2021)*
- *Compliance Division Head (2021 to present)*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 84 / KEPDIR / MSDM / 2021 dated August 9, 2021

Serving Period: *12-08-2021-present*



IKHWAN

Pemimpin Divisi Umum
General Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Bangkinang, 14 November 1967. Usia 54 tahun per 31 Desember 2021.

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi sarjana (S1) Manajemen Universitas Riau Tahun 1992.

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri sejak tanggal 10 Januari 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Pengembangan Bisnis dan Produk Divisi Riset dan Perencanaan (2006 s/d 2008)
- Pemimpin Cabang Kerinci (2008 s/d 2014)
- Pemimpin Cabang Bengkalis (2014)
- Pemimpin Divisi Kepatuhan (2014 s/d 2019)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2019 s/d 2021)
- Pemimpin Divisi Financial & Review (2021)
- Pemimpin Divisi Umum (2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021

Periode Menjabat : 12-08-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth/Age: *Born in Bangkinang, November 14, 1967. 54 years old as of December 31, 2021.*

Educational background :
Completed his undergraduate study (S1) in Management from Riau University in 1992.

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri since January 10, 1994. Several important positions he has held include :

- *Head of Business and Product Development Division Research and Planning Division (2006 to 2008)*
- *Kerinci Branch Manager (2008 to 2014)*
- *Bengkalis Branch Manager (2014)*
- *Compliance Division Head (2014 to 2019)*
- *Risk Management Division Head (2019 to 2021)*
- *Financial & Review Division Head (2021)*
- *General Division Head (2021 to present).*

Legal Basis of Appointment :
Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2019 dated August 9, 2019

Serving Period : *12-08-2021 - present*



M. AZWIZAR HENDRY

Pemimpin Divisi Syariah
Sharia Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia :Lahir di Tanjungpinang, 7 Januari 1969. Usia 52 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi di Bidang Akuntasi dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau (UNRI) tahun 1994

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri pada tahun 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Pengelolaan Dana Divisi Treasury & Internasional (2005 s/d 2006)
- Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura (2006 - 2012).
- Pemimpin Cabang Pasir Pangaraian (2012 - 2014).
- Pemimpin Divisi Konsumer dan Mikro (2014 - 2016).
- Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah (2016 - 2017).
- Pemimpin Divisi Konsumer (2017 - 2018).
- Ketua Tim Task Force Transaksi Non Tunai (2018 - 2019).
- Pemimpin Divisi Kepatuhan (2019 - 2021).
- Pemimpin Divisi Syariah (2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 9 Agustus 2021

Periode Menjabat : 12-08-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth/Age: *Born in Tanjungpinang, January 7, 1969. Age 52 as of December 31, 2021*

Educational background :
Completed his studies in the field of accounting and earned a Bachelor's degree from the University of Riau (UNRI) in 1994

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in 1994. Some of the important positions that have been held include:

- *Head of Treasury & International Division Fund Management Division (2005 s/d 2006)*
- *Siak Sri Indrapura Branch Manager (2006 - 2012).*
- *Pasir Pangaraian Branch Manager (2012 - 2014).*
- *Consumer and Micro Division Head (2014 - 2016).*
- *Micro, Small & Medium Division Head (2016 - 2017).*
- *Consumer Division Head (2017 - 2018).*
- *Non-Cash Transaction Task Force Head (2018 - 2019).*
- *Compliance Division Head (2019 - 2021).*
- *Sharia Division Leader (2021 to present)*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 dated August 9, 2019

Serving Period: *12-08-2021 - present*



AZHAR EFENDI

Pemimpin Divisi Operasional
Operational Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Selat Panjang, 10 Oktober 1970. Usia 51 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi di bidang Akuntansi dan meraih gelar Sarjana Muda dari AAI Padang

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri pada 1 Agustus 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Ranai (2009 - 2010).
- Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (2010 - 2014).
- Pemimpin Cabang Tanjung Pinang (2014).
- Pemimpin Cabang Bengkalis (2014 - 2016).
- Pemimpin Cabang Utama (2016 - 2018).
- Pemimpin Divisi Konsumer (2018 - 2019).
- Pemimpin Divisi Komersial (2019 - 2020).
- Pemimpin Divisi Umum (2020 - 2021).
- Pemimpin Divisi Operasional (2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 9 Agustus 2021

Periode Menjabat : 12-08-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age*: Born in Selat Panjang, October 10, 1970. Age 51 as of December 31, 2021*

Educational background :
Completed his Diploma Economics study majoring in accounting at AAI Padang

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in August 1, 1994. Some of the important positions that have been held include:

- *Ranai Branch Manager (2009 - 2010).*
- *Teluk Kuantan Branch Manager (2010 - 2014).*
- *Tanjung Pinang Branch Manager (2014).*
- *Bengkalis Branch Manager (2014 - 2016).*
- *Main Branch Manager (2016 - 2018).*
- *Consumer Division Head (2018 - 2019).*
- *Commercial Division Head (2019 - 2020).*
- *General Affair Division Head (2020 - 2021).*
- *Head of Operations Division (2021 to present)*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 84 / KEPDIR / MSDM / 2020 dated August 9, 2021

Serving Period*: 12-08-2021 to present*



HERU KURNIAWAN

Pemimpin Divisi Internal Audit
Internal Audit Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Selat Panjang, 2 Juli 1967. Usia 54 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :

- Sarjana Muda Perbankan di AKBP tahun 1989
- Meraih gelar sarjana di bidang Akuntansi di Universitas Islam Riau tahun 2000,
- Menyelesaikan Program pasca sarjana prodi Manajemen di Universitas Riau Tahun 2014.

Pengalaman Kerja :

Bergabung di Bank Riau Kepri pada tahun 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya:

- Pgs. Pemimpin Cabang Air Molek (2012).
- Pgs. Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (2012).
- Pgs. Pemimpin Cabang Tanjung Pinang (2012).
- Pemimpin Bagian Divisi Perencanaan Strategis (2013 - 2014).
- Pemimpin Bagian Operasional (2014 - 2015).
- Pemimpin Bagian Divisi Manajemen Risiko (2015 - 2017).
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2017 - 2019).
- Pemimpin Divisi SKAI (2019 - 2021).
- Pemimpin Divisi SKAI (2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :

SK No. 19/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Maret 2021

Periode Menjabat : 09-03-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Selat Panjang, July 2, 1967. Age 53 as of December 31, 2021.*

Educational background :

- *Diploma of Banking at AKBP in 1989*
- *Obtained a bachelor's degree in Accounting at the Riau Islamic University in 2000,*
- *Completing the Postgraduate Program in Management at the University of Riau in 2014.*

Work experience :

Joined Bank Riau Kepri in 1994. Some of the important positions that have been held include:

- *Act. Air Molek Branch Manager (2012).*
- *Act. Teluk Kuantan Branch Manager (2012).*
- *Act. Tanjung Pinang Branch Manager (2012).*
- *Strategic Planning Division Sub Head (2013 - 2014).*
- *Operations Sub Head (2014 - 2015).*
- *Risk Management Division Sub Head (2015 - 2017).*
- *Risk Management Division Head (2017 - 2019).*
- *Internal Audit Division Head (2019 - 2021).*
- *Head of Internal Audit Division (2021 to present)*

Legal Basis of Appointment:

Decree No. 19/KEPDIR/MSDM/2021 date March 09, 2021

Serving Period: *09-03-2021 to present*



HENDRA BUANA

Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
Strategic Planing Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Pekanbaru, 11 Juli 1970. Usia 51 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi di bidang Manajemen dan meraih gelar sarjana dari STIE Purna Graha Pekanbaru pada tahun 1994, meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Riau di bidang Manajemen pada tahun 2012.

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri pada tahun 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Perencanaan Divisi Perencanaan (2004 s/d 2008)
- Pemimpin Bagian Pengendali Risiko Divisi Manajemen Risiko (2008 s/d 2009)
- Pemimpin Bagian Divisi Human Capital (2009 s/d 2012)
- Pgs. Pemimpin Divisi Human Capital (2012 s/d 2014)
- Staff Direksi (2014)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2014 s/d 2015)
- Pemimpin SKAI (2015 s/d 2017)
- Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis (2017 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 tanggal 4 Juli 2019

Periode Menjabat : 12-07-2019 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Pekanbaru, July 11, 1970. Age 51 as of December 31, 2021*

Educational background :
Obtained a bachelor's degree in Economics at STIE Purna Graha Pekanbaru in 1994, earned a Postgraduate degree from Riau University in Management in 2012

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in 1994. Some of the important positions that have been held include:

- *Head of Planning Division Planning Division (2004 to 2008)*
- *Head of Risk Control Division Risk Management Division (2008 s/d 2009)*
- *Head of Human Capital Division (2009 to 2012)*
- *Act. Head of Human Capital Division (2012 to 2014)*
- *Board of Directors Staff (2014)*
- *Risk Management Division Head (2014 to 2015)*
- *SKAI Head (2015 to 2017)*
- *Strategic Planning Division of (2017 to present)*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 57 / KEPDIR / MSDM / 2019 dated July 4, 2019

Serving Period: *12-07-2019 - present*



WAN MUKHLIS

Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi
Information System & Technology Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Siak Sri Indrapura, 13 Mei 1972. Usia 49 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan studi S1 Teknik Informatika di STMIK Riau tahun 2005

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri pada 1 januri 1998. Berbagai jabatan pernah diduduki diantaranya :

- Pemimpin Bagian Operasional dan Pengembangan Prosedur Divisi Operasional (2009 - 2014).
- Pemimpin Divisi Operasional (2014).
- Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi (2015- sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No.34/KEPDIR/HC/2015 tanggal 16 Maret 2015

Periode Menjabat : 16-03-2015 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Siak Sri Indrapura, 13 May 1972. Age 48 years as of December 31, 2021.*

Educational background :
Completed his S1 Informatics Engineering study at STMIK Riau in 2005

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in 1998. Some of the important positions that have been held include:

- *Sub Head of Operations and Procedure Development for the Operational Division (2009 - 2014).*
- *Operations Division Head (2014).*
- *Information System & Technology Division Head (2014 - present).*

Legal Basis of Appointment:
Decree No.34 / KEPDIR / HC / 2015 dated March 16, 2015
Serving Period: *16-03-2015 - present*



WAHYUDI GUSTIAWAN

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
Corporate Secretary Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Teluk Pinang, 20 Agustus 1975. Usia 46 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi di bidang Manajemen dan meraih gelar Sarjana dari STIE Riau tahun 2005

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri pada tahun 2000. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Kredit Cabang Utama (2008 s/d 2010).
- Pemimpin Bagian Divisi Hukum dan Corsec (2010 s/d 2014).
- Pemimpin Cabang Air Molek (2014 s/d 2017).
- Pemimpin Cabang Pekanbaru (2017 s/d 2018).
- Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa (2018 s/d 2019)
- Pemimpin Divisi Umum (2019 s/d 2020)
- Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional (2021)
- Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (2021 s/d sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021

Periode Menjabat : 21-01-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Teluk Pinang, 20 August 1975. Age 46 years as of December 31, 2021.*

Educational background :
Completed his studies in Management and earned a Bachelor's degree from STIE RIAU in 2005

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in 2000. Some of the important positions that have been held include:

- *Head of Main Branch Credit Division (2008 s/d 2010).*
- *Head of Legal and Corsec Division (2010 to 2014).*
- *Air Molek Branch Manager (2014 - 2017).*
- *Pekanbaru Branch Manager (2017 - 2018).*
- *Fund & Services Products Division Head (2018 - 2019).*
- *General Division Head (2019 - 2020).*
- *Finance and Operations Division Head (2021).*
- *Head of Corporate Secretariat Division (2021 to present).*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 04 / KEPDIR / MSDM / 2021 dated January 11, 2020

Serving Period : *21-01-2021 to present*



MUHAMMAD JAZULI

Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit
Credit Rescue and Settlement Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Pekanbaru, 28 Februari 1980. Usia 41 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan studi di bidang Akuntansi dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau pada tahun 2003 dan meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Riau di bidang Manajemen Strategis pada tahun 2010

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di Bank Riau Kepri pada tahun 2003. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya :
- Pemimpin Cabang Jakarta (2016 s/d 2017)
- Pgs. Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura (2017 s/d 2018)
- Pemimpin Cabang Utama (2018 s/d 2019)
- Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (2019 s/d 2021)
- Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit (2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021

Periode Menjabat : 21-01-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Pekanbaru, February 28, 1980. Age 41 as of December 31, 2021.*

Educational background :
Received a bachelor's degree in Accounting from Riau University in 2003 and earned a Postgraduate degree from Riau University in Strategic Management in 2010

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in 2003. Some of the important positions that have been held include:
- *Jakarta Branch Manager (2016 to 2017)*
- *Act. Siak Sri Indrapura Branch Manager (2017 to 2018)*
- *Main Branch Manager (2018 to 2019)*
- *Head of Corporate Secretariat Division (2019 to 2021)*
- *Head of Credit Rescue & Settlement Division (2021 to present)*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 04 / KEPDIR / MSDM / 2019 dated January 11, 2021

Serving Period: *21-01-2021 to present*



HELWIN YUNUS

Pgs. Pemimpin Divisi Dana & Jasa
Act. Funds & Services Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Pekanbaru, 02 Juli 1973. Usia 48 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar sarjana di bidang Manajemen pada STIE Riau pada tahun 2016

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di Bank Riau Kepri pada tahun 1997. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya :

- Pemimpin Cabang Syariah Tanjung Pinang (2015 s/d 2018)
- Pemimpin Cabang Syariah Pekanbaru(2018 s/d 2021)
- Pgs. Pemimpin Cabang Bangkinang (2021)
- Pgs. Pemimpin Divisi Dana & Jasa (2021 s/d sekarang)

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 9 Agustus 2021

Periode Menjabat : 12-08-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Pekanbaru, July 02, 1973. Age 48 as of December 31, 2021.*

Educational background :
Earned a bachelor's degree in Management at STIE Riau in 2016

Work experience :
Started his career at Bank Riau Kepri in 1997. Some of the important positions that have been held include:

- *Tanjung Pinang Sharia Branch Manager (2015 to 2018)*
- *Pekanbaru Sharia Branch Manager(2018 to 2021)*
- *Act. Bangkinang Branch Manager (2021)*
- *Act. Head of Funds & Services Division (2021 to present).*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 date August 9, 2021

Serving Period: *12-08-2021 - present*



ASY'ARI

Pjs. Pemimpin Divisi Financial & Review
Act. Head of the Financial & Review Division

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Tanjung Uban, 13 Mei 1972. Usia 49 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar sarjana di bidang Teknik Informatika pada STMIK Riau pada tahun 2005

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di Bank Riau Kepri pada tahun 1996. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya :

- Pemimpin Bagian Pengembangan & Penerapan Kebijakan Divisi Manajemen Risiko (2008 s/d 2016)
- Pemimpin Bagian IT Security Divisi TSI (2016 s/d 2017)
- Pemimpin Bagian Pengawasan SKAI (2017 s/d 2019)
- Pgs. Pemimpin Cabang Batam (2018)
- Pgs. Pemimpin SKAI (2019)
- Pemimpin Bagian Audit Teknologi Informasi SKAI (2019 s/d 2020)
- PM Tim Project Core Banking System Konversi Syariah (2020)
- Pemimpin Bagian Operasional E-Channel Divisi Keuangan & Operasional (2020 s/d 2021)
- Pgs. Pemimpin Divisi Keuangan (2021)
- Pjs. Pemimpin Divisi Financial & Review (2021 s/d sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021

Periode Menjabat : 12-08-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Tanjung Uban, May 13, 1972. Age 49 as of December 31, 2021.*

Educational background :
Earned a bachelor's degree in Informatics Engineering at STMIK Riau in 2005

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in 1994. Some of the important positions that have been held include:

- *Head of Risk Management Division Policy Development & Implementation Division (2008 s/d 2016)*
- *Head of IT Security Division TSI Division (2016 to 2017)*
- *Head of SKAI Supervision Section (2017 to 2019)*
- *Act. Batam Branch Manager (2018)*
- *Act. SKAI Leader (2019)*
- *Head of Information Technology Audit Division of SKAI (2019 to 2020)*
- *PM Project Team Core Banking System Sharia Conversion (2020)*
- *Head of E-Channel Operations Division Finance & Operations (2020 to 2021)*
- *Act. Head of Finance Division (2021)*
- *Act. Head of Financial & Review Division (2021 to present).*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 date August 09, 2021

Serving Period: *12-08-2021 - present*



FAJAR RESTU FEBRIANSYAH

Pemimpin Divisi Hukum
Law Division Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Pekanbaru, 1 Februari 1969. Usia 52 tahun per 31 Desember 2020

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi di bidang Ekonomi Pembangunan dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau Tahun 1990

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri pada tahun 1996. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Cabang Ranai (2007 - 2009).
- Pemimpin Cabang Bangkinang (2009 - 2017).
- Pemimpin Cabang Tanjung Pinang (2017 - 2018).
- Pemimpin Divisi Hukum (2018 - 2021).

Dasar Hukum Pengangkatan :

- SK No.22/KEPDIR/MSDM/2018 tanggal 12 Maret 2018

Periode Menjabat :

- 2018 – 2021

Citizenship: *Indonesian Citizen*
Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Pekanbaru, February 1, 1969. Age 52 as of December 31, 2021.*

Educational background *:*
Obtained a Bachelor's degree in Economics and Development at the University of Riau in 1990

Work experience :
Joined Bank Riau Kepri in 1996. Some of the important positions that have been held include:

- *Ranai Branch Manager (2007 - 2009).*
- *Bangkinang Branch Manager (2009 - 2017).*
- *Tanjung Pinang Branch Manager (2017 - 2018).*
- *Legal Division Head (2018 - 2021).*

Legal Basis of Appointment:

- *Decree No.22/KEPDIR/MSDM/2018 dated March 12, 2018*

Serving Period:

- *2018 - 2021*



AS'ARI

Pemimpin Divisi Operasional
Operational Division Head
(Status pegawai MPP sejak tanggal 7 Juli 2021)
(MPP employee status since July 7, 2021)

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Batu Panjang, 27 Juni 1966. Usia 55 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Menyelesaikan Studi di bidang Manajemen Universitas Riau tahun 1991

Pengalaman Kerja :
Bergabung di Bank Riau Kepri pada tahun 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain:

- Pemimpin Cabang Selat Panjang (2006 s/d 2008)
- Pemimin Cabang Dumai (2008 s/d 2010)
- Pemimpin Cabang Bengkalis (2010 s/d 2014)
- Cabang Pasar Pusat (2014 s/d 2017)
- Pemimpin Divisi Keuangan & Operasional (2017 s/d 2020)
- Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit (2020)
- Pemimpin Divisi Operasional (2021).

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021

Periode Menjabat : 21-01-2021 s/d 21-01-2021

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Batu Panjang, June 27, 1966. Age 55 as of December 31, 2021.*

Educational background :
Completed Studies in Management, University of Riau in 1991

Work experience :
Started his career at Bank Riau Kepri in 1994. Some of the important positions that have been held include:

- *Selat Panjang Branch Manager (2006 to 2008)*
- *Dumai Branch Manager (2008 s/d 2010)*
- *Bengkalis Branch Manager (2010 to 2014)*
- *Central Market Branch (2014 to 2017)*
- *Head of Finance & Operations Division (2017 to 2020)*
- *Head of Credit Rescue and Settlement Division (2020)*
- *Head of Operations Division (2021).*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 date January 11, 2021

Serving Period: *21-01-2021 to 21-01-2021*



ULFIA

Pemimpin Desk Anti Fraud
Anti-Fraud Desk Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Pekanbaru, 23 April 1973. Usia 48 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar sarjana di bidang Hukum pada Universitas Indonesia pada tahun 1995

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di Bank Riau Kepri pada tahun 2000. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya :

- Pjs. Pemimpin Bagian Administrasi SDM Divisi SDM (2007 s/d 2008)
- Pemimpin Bagian UKPN Divisi Kepatuhan (2008 s/d 2017)
- Pgs. Pemimpin Cabang Utama (2014)
- Pemimpin Unit Investigasi Fraud (2017 s/d 2020)
- Pemimpin Bagian Anti Fraud Divisi Manajemen Risiko (2020)
- Pemimpin Bagian Penyelesaian Kredit Divisi P2K (2020 s/d 2021)
- Pemimpin Tim Anti Fraud (2021)
- Pemimpin Desk Anti Fraud (2021 s/d sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021
Periode Menjabat : 12-08-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Pekanbaru, April 23, 1973. Age 48 as of December 31, 2021.*

Educational background :
Earned a bachelor's degree in Law from the University of Indonesia in 1995

Work experience :
Started his career at Bank Riau Kepri in 2000.. Some of the important positions that have been held include:

- *Act. Head of HR Administration Division HR Division (2007 s/d 2008)*
- *Head of UKPN Compliance Division (2008 to 2017)*
- *Act. Main Branch Manager (2014)*
- *Fraud Investigation Unit Head (2017 to 2020)*
- *Anti Fraud Division Risk Management Division Head (2020)*
- *Credit Settlement Division P2K Division Head (2020 to 2021)*
- *Anti Fraud Team Head (2021)*
- *of the Anti Fraud Desk Head (2021 to present).*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 date August 09, 2021.

Serving Period: *12-08-2021 to present*



DEDY SANTIKA ZAIN

Pemimpin Desk Service Quality
Service Quality Desk Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Pekanbaru, 20 Februari 1973. Usia 48 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :
Meraih gelar sarjana di bidang Akuntansi pada Universitas Islam Bandung pada tahun 1997.

Pengalaman Kerja :
Memulai karir di Bank Riau Kepri pada tahun 2001. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya :

- Pemimpin Cabang Bagan Siapi-api (2017 s/d 2018)
- Pemimpin Pemimpin Cabang Tanjung Pinang (2018 s/d 2019)
- Pemimpin Cabang Utama (2019 s/d 2021)
- Pemimpin Desk Service Quality (2021 s/d sekarang).

Dasar Hukum Pengangkatan :
SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021

Periode Menjabat : 12-08-2021 s/d sekarang

Citizenship : *Indonesian Citizen*

Domicile : *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth/Age : *Born in Pekanbaru, April 23, 1973. Age 48 as of December 31, 2021.*

Educational background :
He earned a bachelor's degree in Accounting from the Islamic University of Bandung in 1997.

Work experience :
Started his career at Bank Riau Kepri in 2001. Some of the important positions that have been held include:

- *Branch Manager of Chart Prepared-api (2017 s/d 2018)*
- *Head of Tanjung Pinang Branch Manager (2018 to 2019)*
- *Main Branch Manager (2019 to 2021)*
- *Head of Service Quality Desk (2021 to present).*

Legal Basis of Appointment:
Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 date Agustus 09, 2021

Serving Period: *12-08-2021 - present*



EDI WARDANA

Pemimpin Desk Digital Banking Service
Digital Banking Service Desk Head

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Domisili : Pekanbaru, Riau

Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Lahir di Simpang Gaung, 21 Oktober 1978. Usia 43 tahun per 31 Desember 2021

Riwayat Pendidikan :

- Meraih gelar sarjana di bidang Manajemen pada Universitas Riau pada tahun 2006
- Meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Riau di bidang Manajemen pada tahun 2016

Pengalaman Kerja :

Memulai karir di Bank Riau Kepri pada tahun 2001. Beberapa jabatan pernah dijabat diantaranya :

- Pemimpin Bagian Pengadaan Divisi Umum (2014 s/d 2016)
- Pemimpin Bagian ATM Center Divisi Operasional (2016 s/d 2017)
- Pemimpin Bagian Pengembangan Produk Divisi Produk Dana Dan Jasa (2017 s/d 2021)
- Pemimpin Desk Digital Banking Services (2021 s/d 11 Februari 2022).

Dasar Hukum Pengangkatan :

SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021

Periode Menjabat : 12-08-2021 s/d sekarang

Citizenship: *Indonesian Citizen*

Domicile: *Pekanbaru, Riau*

Place and Date of Birth / Age: *Born in Simpang Gaung, October 21, 1978. Age 43 as of December 31, 2021.*

Educational background :

- *Earned a bachelor's degree in Management at the University of Riau in 2006*
- *Earned a Postgraduate degree from the University of Riau in Management in 2016*

Work experience :

Started his career at Bank Riau Kepri in 2001. Some of the important positions that have been held include:

- *Head of General Division Procurement Section (2014 to 2016)*
- *Head of ATM Center Operational Division (2016 to 2017)*
- *Head of Product Development Division of Fund Products and Services Division (2017 to 2021)*
- *Head of Desk Digital Banking Services (2021 to February 11, 2022).*

Legal Basis of Appointment:

Decree No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 date August 09, 2021

Serving Period: *12-08-2021 s/d present*

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI KOMISARIS
Responsibility for the Annual Report

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Laporan Tahunan 2021 PT Bank Riau Kepri

Statement of The Board of Commissioner and Directos Regarding of PT Bank Riau Kepri Responsibility Annual Report 2021

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT Bank Riau Kepri tahun 2021 telah dibuat secara lengkap dan benar, serta bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We who signed under this states that all information in the annual report of PT Bank Riau Kepri the year 2021 has been madei in full and true full responsibility for the truth of the contents of the annual report of the company.

DEWAN KOMISARIS
BOARD OF COMMISSIONERS

Roy Prakoso
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Syahrial Abdi
Komisaris Utama
President Commissioner

Rita Anugerah
Komisaris Independen
Independent Commissioner

DEWAN DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS

Andi Buchari
Direktur Utama
President Director

M. A. Suharto
Direktur Dana dan Jasa
Funds and Services Director

Said Syamsuri
Direktur Operasional
Operational Director

Tengkoe Irawan
Direktur Kredit dan Syariah
Credit and Sharia Director

Fajar Restu Febriansyah
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
Compliance and Risk Management Director

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan

Number of Employees Based on Position Level

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Jabatan
Table of Number of Employees Based on Position Level

(dalam Satuan Orang) | *(in Person Units)*

Level Jabatan	2021			2020			*Position Level*
	Pria *Men*	Wanita *Woman*	Total	Pria *Men*	Wanita *Woman*	Total	
Pemimpin Divisi	17	0	17	16	-	16	*Division Head*
Pemimpin Cabang Utama/ Setingkat	3	1	4	5	-	5	*Main Branch Manager / equivalent*
Pemimpin Bagian Kantor Pusat	46	8	54	49	8	57	*Dept. Head of Head Office Section*
Pemimpin Cabang Konvensional	18	0	18	14	-	14	*Conventional Branch Manager*
Pemimpin Cabang Syariah	1	1	2	2	-	2	*Sharia Branch Manager*
Staf Direksi	3	0	3	-	-	-	*Board of Directors staff*
Pemimpin Cabang Pembantu	40	1	41	39	2	41	*Sub Branch Manager*
Pemimpin Bagian Cabang Utama/ Setingkat	3	0	3	3	-	3	*Dept. Head of Main Branch / Equivalent*
Pemimpin Setingkat Pincapem	16	4	20	16	1	17	*Sub Branch Manager Level Leader*
Pemimpin Seksi Setingkat	287	123	410	267	110	377	*Equal Section Head Level*
Pegawai MPP (Masa Persiapan Pensiun)	4	1	5	5	1	6	*MPP Employees (Retirement Preparation Period)*
Pelaksana	173	136	309	215	164	379	*Officer*
Pegawai *Core* (Teller/CS/FO/RO)	404	535	939	376	502	878	*Core Staff (Teller / CS / FO / RO)*
Lain-Lain	794	38	832	750	22	772	*Etc*
Jumlah	**1.809**	**848**	**2.657**	**1.757**	**810**	**2.567**	***Total***

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Number of Employees Based on Education Level

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Table of Number of Employees Based on Education Level

(dalam Satuan Orang) | *(in Person Units)*

Tingkat Pendidikan	2021			2020			*Level of education*
	Pria *Men*	Wanita *Woman*	Total	Pria *Men*	Wanita *Woman*	Total	
Doktor (S3)	1	1	2	1	1	2	*Doctor (S3)*
Pasca Sarjana (S2)	60	29	89	58	27	85	*Postgraduate (S2)*
Sarjana (S1)	933	659	1592	906	626	1.532	*Bachelor degree)*
Diploma	119	140	259	121	138	259	*Diploma*
SMA/Sederajat	677	19	696	654	18	672	*Senior High School*
SMP/Sederajat	17	0	17	15	-	15	*Junior high school*
SD/Sederajat	2	0	2	2	-	2	*Primary School*
Jumlah	**1.809**	**848**	**2.657**	**1.757**	**810**	**2.567**	***Total***

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Number of Employees Based on Employment Status

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Table of Number of Employees Based on Employment Status

(dalam Satuan Orang) | *(in Person Units)*

Status Kepegawaian	2021			2020			*Employment status*
	Pria *Men*	Wanita *Woman*	Total	Pria *Men*	Wanita *Woman*	Total	
Pegawai Tetap	983	719	1,702	911	634	1.545	*Permanent employee*
PTT	348	92	440	416	155	571	*PTT*
Outsourcing	478	37	515	430	21	451	*Outsourcing*
Jumlah	**1.809**	**848**	**2.657**	**1.757**	**810**	**2.567**	***Total***

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Number of Employees by Age

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Table of Number of Employees by Age

(dalam Satuan Orang) | *(in Person Units)*

Usia *Age*	2021			2020		
	Pria *Men*	Wanita *Woman*	Total	Pria *Men*	Wanita *Woman*	Total
> 55	6	-	6	9	-	9
50 - 55	57	5	62	50	6	56
40 - 49	375	115	490	341	99	440
30 - 39	845	330	1.175	794	305	1.099
23 - 29	491	386	877	528	395	923
< 23	35	12	47	35	5	40
Jumlah | Total	**1.809**	**848**	**2.657**	**1.757**	**810**	**2.567**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Number of Employees by Gender

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Table of Number of Employees by Gender

(dalam Satuan Orang) | *(in Person Units)*

Jenis Kelamin	2021	2020	*Gender*
Pria	1.809	1.757	*Men*
Wanita	848	810	*Woman*
Jumlah	**2.657**	**2.567**	***Total***

Pengembangan Kompetensi Pegawai

Kebijakan

Ketentuan yang mengatur mengenai pengembangan kompetensi pegawai PT Bank Riau Kepri diatur pada kebijakan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 131/KEPDIR/2013 tanggal 17 Desember 2013 perihal Pemberlakuan Standar Operasional Prosedur Pendidikan dan Pelatihan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
2. BPP Kepegawaian BAB XI tentang Pendidikan Pegawai sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 092/KEPDIR/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi Nomor 010/KEPDIR/2019 Tentang Buku Pedoman (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 18/KEPDIR/HC/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Ketentuan Pelaksanaan, Tata Tertib dan Sanksi Pelanggaran Diklat *Inhouse Training.*

Employee Competency Development

Policy

The provisions governing the development of employee competencies of PT Bank Riau Kepri are regulated in the following policies:

1. *Decree of the Board of Directors Number 131/KEPDIR/2013 dated 17 December 2013 regarding the Enforcement of Standard Operating Procedures for Education and Training in PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
2. *BPP Kepegawaian CHAPTER XI concerning Employee Education by the Decree of the Board of Directors Number 092/KEPDIR/2020 dated 30 November 2020 regarding the First Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 010/KEPDIR/2019 concerning the Personnel Manual (BPP) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
3. *Decree of the Board of Directors Number 18 / KEPDIR / HC / 2015 dated 11 February 2015 regarding Implementation Provisions, Rules, and Sanctions for In-house Training Training Violations.*

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan

Competency Development Based on Position Level

Tabel Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan
Table of Competency Development Based on Position Level

No.	Level Jabatan *Position Level*	Jenis Pelatihan *Type of Training*	Tujuan Pelatihan *Training Objectives*	Jumlah Pegawai *Number of Employees*	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan *Number of employees who have attended training*	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan *Percentage who have attended training for each level of position*	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan *Percentage who have attended training for each type of training*
1	Pemimpin Divisi | Division Leader						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	17	17	100%	100,00%
		Soft Skill			17		100,00%
		Sertifikasi *Certification*			8		47,06%
2	Pemimpin Cabang Utama | *Main Branch Manager*						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	4	4	100%	100,00%
		Soft Skill			3		75,00%
		Sertifikasi *Certification*			1		25,00%
3	Pemimpin Cabang Konvensional *Conventional Branch Leader*						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	18	18	100%	100,00%
		Soft Skill			0		0,00%
		Sertifikasi *Certification*			9		50,00%
4	Pemimpin Cabang Syariah | *Sharia Branch Manager*						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	2	2	100%	100,00%
		Soft Skill			0		0,00%
		Sertifikasi *Certification*			1		50,00%
5	Staf Direksi | *Director Staf*						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	3	2	66,67%	66,67%
		Soft Skill			0		0,00%
		Sertifikasi *Certification*			0		0,00%

No.	Level Jabatan *Position Level*	Jenis Pelatihan *Type of Training*	Tujuan Pelatihan *Training Objectives*	Jumlah Pegawai *Number of Employees*	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan *Number of employees who have attended training*	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan *Percentage who have attended training for each level of position*	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan *Percentage who have attended training for each type of training*
6	Pemimpin Bagian | *Section Leader*						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	54	54	100%	100%
		Soft Skill			2		3.7%
		Sertifikasi *Certification*			23		42.59%
7	Pemimpin Cabang Pembantu | *Sub Branch Manager*						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	41	41	100%	100.00%
		Soft Skill			0		0.0%
		Sertifikasi *Certification*			0		0.0%
8	Pemimpin Bagian Cabang Utama/Setingkat *Leaders at the Level of Sub-Branch Managers*						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	3	3	100%	100%
		Soft Skill			0		0%
		Sertifikasi *Certification*			0		0%
9	Pemimpin Setingkat Pincapem | *Pincapem Level Leader*						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	20	20	100%	100%
		Soft Skill			0		0%
		Sertifikasi *Certification*			8		40%
10	Pemimpin Seksi Setingkat | *Equal Section Leader*						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	410	409	100%	99,76%
		Soft Skill			24		5.85%
		Sertifikasi *Certification*			54		13.17%
11	MPP						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	5	2	40%	40%
		Soft Skill			0		0%
		Sertifikasi *Certification*			0		0%

No.	Level Jabatan *Position Level*	Jenis Pelatihan *Type of Training*	Tujuan Pelatihan *Training Objectives*	Jumlah Pegawai *Number of Employees*	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pelatihan *Number of employees who have attended training*	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan *Percentage who have attended training for each level of position*	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan *Percentage who have attended training for each type of training*
12	Pelaksana | *Officer*						0%
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	309	309	100%	100%
		Soft Skill			4		1.29%
		Sertifikasi *Certification*			3		0.97%
13	Pegawai *Core* (Teller/CS/FO/RO) *Core Staff (Teller / CS / GO / RO)*						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	939	935	99.57%	99.57%
		Soft Skill			14		1.49%
		Sertifikasi *Certification*			72		7.67%
14	Lain-Lain | *Other*						
		Teknikal Skill *Technical Skill*	Peningkatan Wawasan *Increased insight*	832	308	37.02%	37.02%
		Soft Skill			0		0
		Sertifikasi *Certification*			1		0.12%
JUMLAH				2.657			



Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Selama tahun 2021 pengembangan kompetensi pegawai PT Bank Riau Kepri lebih memprioritaskan pelatihan pegawai dibidang perbankan syariah untuk memenuhi target kelulusan pegawai dalam Sertifikasi Pendidikan dasar Perbankan Syariah sebagai salah satu persyaratan proses konversi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Pegawai yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan dasar Perbankan Syariah sampai dengan Desember Tahun 2021 sebanyak 2.195 pegawai.

Dalam rangka menunjang kompetensi pegawai dibidang perbankan syariah juga telah dilaksanakan pelatihan syariah lainnya diantaranya keuangan syariah, bisnis syariah, *core Banking System* Bank Umum Syariah, *executive* perbankan Syariah dan lain sebagainya

Evaluation of the Implementation of Competency Development

In 2021, the competency development of PT Bank Riau Kepri employees will prioritize employee training in the field of Islamic banking to meet the employee graduation target in Islamic Banking Basic Education Certification as one of the requirements for the conversion process from a Conventional Commercial Bank to a Sharia Commercial Bank. There are 2,195 employees who have attended and passed the basic education in Islamic Banking until December 2021.

To support employee competence in the field of Islamic banking, another sharia training has also been carried out including sharia finance, sharia business, core banking system of sharia commercial banks, executive sharia banking and so on.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Competency Development Fee

Tabel Biaya Pelatihan Pegawai Tahun 2020- 2021
Table of Employee Training Costs for 2020- 2021

(dalam Rupiah) | *(in rupiah)*

No	Jenis Diklat	2021	2020	*Type of training*
1	*Inhouse Training*	4.894.636.037	12.098.677.681	*Inhouse Training*
2	Pelatihan Ekternal	854.328.295	1.138.934.741	*External Training*
Total		**5.748.964.332**	**13.237.612.422**	***Total***

Realisasi Biaya pelatihan tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan realisasi biaya pelatihan tahun 2020 hal ini karena peningkatan jumlah kasus pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya pelaksanaan kegiatan pelatihan dari yang semula pelatihan dilaksanakan secara klasikal (tatap muka) sekarang beralih menjadi *online class* (*zoom meeting*) hal ini sangat berdampak terhadap penurunan realisasi biaya pelatihan pada tahun 2021.

The realization of training costs in 2021 has decreased compared to the realization of training costs in 2019 due to the COVID-19 pandemic conditions where the implementation of training activities was limited and the training methods were initially carried out classically (face-to-face) switching to online classes (zoom meeting) so that there was a decrease in the realization of training costs in 2021.

Komposisi Pemegang Saham *Shareholders Composition*

Tabel Komposisi Pemegang Saham Bank Riau Kepri per Desember 2021
Table of Shareholder Composition of Bank Riau Kepri as of December 2021

Pemegang Saham	Struktur Kepemilikan Saham *Share Ownership Structure*			*Shareholders*
	Jumlah Lembar Saham *Number of Shares*	Nilai (Rp) *Value (Rp)*	Kepemilikan *Ownership*	
SAHAM SERI A				*SERIES A SHARE*
Provinsi Riau	4.191.682	419.168.200.000	38,00%	*Riau Province*
Kota Pekanbaru	150.000	15.000.000.000	1,36%	*Pekanbaru City*
Kabupaten Kampar	1.051.812	105.181.200.000	9,53%	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	1.316.062	131.606.200.000	11,93%	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	64.007	6.400.700.000	0,58%	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	678.772	67.877.200.000	6,15%	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	327.110	32.711.000.000	2,97%	*Siak Sri Indrapura Regency*
Kota Dumai	52.030	5.203.000.000	0,47%	*Dumai City*
Kabupaten Pelalawan	319.668	31.966.800.000	2,90%	*Pelalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hulu	82.807	8.280.700.000	0,75%	*Rokan Hulu Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	371.351	37.135.100.000	3,37%	*Rokan Hilir Regency*
Kabupaten Kuantan Singingi	152.086	15.208.600.000	1,38%	*Kuantan Singingi Regency*
Kabupaten Bintan	380.789	38.078.900.000	3,45%	*Bintan Regency*
Kota Batam	500.000	50.000.000.000	4,53%	*Batam City*
Kabupaten Karimun	71.900	7.190.000.000	0,65%	*Karimun Regency*
Kabupaten Natuna	339.381	33.938.100.000	3,08%	*Natuna Regency*
Kota Tanjung Pinang	83.913	8.391.300.000	0,76%	*Tanjung Pinang City*
Kabupaten Kepulauan Meranti	600.000	60.000.000.000	5,44%	*Kepulauan Meranti Regency*
Kabupaten Lingga	70.000	7.000.000.000	0,63%	*Lingga Regency*
Provinsi Kepulauan Riau	120.000	12.000.000.000	1,09%	*Riau Islands Province*
Kabupaten Kepulauan Anambas	78.237	7.823.700.000	0,71%	*Anambas Islands Regency*
TOTAL SAHAM SERI A	11.001.607	1.100.160.700.000	99,73%	*Total Shares Series A*
SAHAM SERI B				*Shares Series B*
Koperasi Amanah Riau Kepri	30.000	3.000.000.000	0,27%	*Koperasi Amanah Riau Kepri*
TOTAL SAHAM SERI B	30.000	3.000.000.000	0,27%	*Total Shares Series B*
TOTAL SAHAM	11.031.607	1.103.160.700.000	100,00%	*Total Shares*

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar *Composition of the 20 Largest Shareholders*

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank Riau Kepri per Desember 2021
Table of Composition of the 20 Largest Shareholders of Bank Riau Kepri as of December 2021

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham *Number of Shares*	Nilai (Rp) *Value (Rp)*	Kepemilikan *Ownership*	*Shareholders*
1	Provinsi Riau	4.191.682	419.168.200.000	38,00%	*Riau Province*
2	Kabupaten Bengkalis	1.316.062	131.606.200.000	11,93%	*Bengkalis Regency*
3	Kabupaten Kampar	1.051.812	105.181.200.000	9,53%	*Kampar Regency*
4	Kabupaten Indragiri Hilir	678.772	67.877.200.000	6,15%	*Indragiri Hilir Regency*
5	Kabupaten Kepulauan Meranti	600.000	60.000.000.000	5,44%	*Meranti Islands Regency*
6	Kota Batam	500.000	50.000.000.000	4,53%	*Batam city*
7	Kabupaten Bintan	380.789	38.078.900.000	3,45%	*Bintan Regency*
8	Kabupaten Rokan Hilir	371.351	37.135.100.000	3,37%	*Rokan Hilir Regency*
9	Kabupaten Natuna	339.381	33.938.100.000	3,08%	*Natuna Regency*
10	Kabupaten Siak Sri Indrapura	327.110	32.711.000.000	2,97%	*Siak Sri Indrapura Regency*
11	Kabupaten Pelalawan	319.668	31.966.800.000	2,90%	*Pelalawan Regency*
12	Kabupaten Kuantan Singingi	152.086	15.208.600.000	1,38%	*Kuantan Singingi Regency*
13	Kota Pekanbaru	150.000	15.000.000.000	1,36%	*Pekanbaru City*
14	Provinsi Kepulauan Riau	120.000	12.000.000.000	1,09%	*Riau Islands Province*
15	Kabupaten Rokan Hulu	82.807	8.280.700.000	0,75%	*Rokan Hulu Regency*
16	Kota Tanjung Pinang	83.913	8.391.300.000	0,76%	*Tanjung Pinang City*
17	Kabupaten Kepulauan Anambas	78.237	7.823.700.000	0,71%	*Anambas Islands Regency*
18	Kabupaten Karimun	71.900	7.190.000.000	0,65%	*Karimun Regency*
19	Kabupaten Lingga	70.000	7.000.000.000	0,63%	*Lingga Regency*
20	Kabupaten Indragiri Hulu	64.007	6.400.700.000	0,58%	*Indragiri Hulu Regency*

Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih *Shareholders Composition of 5% or More*

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% Atau Lebih Bank Riau Kepri per Desember 2021
Table of Shareholder Composition of 5% or More Bank Riau Kepri Per December 2021

No	Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham *Number of Shares*	Nilai (Rp) *Value (Rp)*	Kepemilikan (%) *Ownership*	*Shareholders*
1	Provinsi Riau	4.191.682	419.168.200.000	38,00%	*Riau Province*
2	Kabupaten Bengkalis	1.316.062	131.606.200.000	11,93%	*Bengkalis Regency*
3	Kabupaten Kampar	1.051.812	105.181.200.000	9,53%	*Kampar Regency*
4	Kabupaten Indragiri Hilir	678.772	67.877.200.000	6,15%	*Indragiri Hilir Regency*
5	Kabupaten Kepulauan Meranti	600.000	60.000.000.000	5,44%	*Meranti Islands Regency*

Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang Dari 5%

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri belum menjadi perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi pemegang saham masyarakat kurang dari 5% atau lebih.

Community Shareholder Group Composition Less than 5%

As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri has not yet become a company that has listed its shares on the stock exchange. Thus, there is no information regarding the composition of public shareholders of less than 5% or more.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2021, tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Share Ownership of the Board of Commissioners and the Board of Directors

As of December 31, 2021, there is no direct or indirect share ownership by the Board of Commissioners and Directors.

Daftar Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi

Per 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri tidak memiliki Entitas Anak/Entitas Asosiasi sehingga tidak tersedia informasi mengenai: Nama entitas anak dan/atau asosiasi; Persentase kepemilikan saham; Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

List of Subsidiaries and/or Associated Entities

As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri does not have any Subsidiaries/Associated Entities so that there is no information available regarding: Names of subsidiaries and/or associates; Percentage of share ownership; Information on the business fields of the subsidiaries and/or associated entities; and Description of the operating status of subsidiaries and/or associated entities (already operating or not yet operating).

Struktur Grup Perusahaan

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri tidak memiliki Entitas Induk, Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture*, dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Company Group Structure

As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri does not have a Parent Entity, Subsidiary Entity, Associated Entity, Joint Venture, and Special Purpose Vehicle (SPV).

Kronologi Penerbitan Saham

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau 38,71%, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 1,11%, Pemerintah Kota/Kabupaten se Riau dan Kepri 59,90% dan Koperasi Amanah Riau Kepri 0,28% (seri B).

Stock Issuance Chronology

As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri is owned by the Riau Province Government 38.71%, Riau Islands Provincial Government 1.11%, City/Regency Governments throughout Riau and Riau Islands 59.90% and Riau Kepri Amanah Cooperative 0.28% (series B).

Tabel Kronologis Penerbitan Saham Perseroan
Chronology of the Company's Share Issuance Table

Tanggal Penerbitan *Publication Date*	Jumlah Saham / Lembar *Number of Shares/Sheet*	Nominal/ Lembar (Rp) *Nominal/ Sheet (Rp)*	Total (Rp)	Akta	*Deed*
26 Desember 2008 *December 26, 2008*	5.791.968	100.000	579.196.800.000	Akta No. 277 tanggal 26 Desember 2008 oleh Notaris Yondri Darto, SH	*Deed No. 277 dated December 26, 2008 by Notary Yondri Darto, SH*
	6.683.031	100.000	668.303.100.000		
31 Desember 2010 *December 31, 2010*	7.479.441	100.000	747.944.100.000	Akta No. 53 tanggal 31 Desember 2010 oleh Notaris Fery Bakti, SH	*Deed No. 53 dated December 31, 2010 by Notary Fery Bakti, SH*
30 Mei 2011 *May 30, 2011*	8.268.739	100.000	826.873.900.000	Akta No. 45 tanggal 30 Mei 2011 oleh Notaris Fery Bakti, SH	*Deed No. 45 dated May 30, 2011 by Notary Fery Bakti, SH*
31 Mei 2011 *May 31, 2011*	8.400.739	100.000	840.073.900.000	Akta No. 47 tanggal 31 Mei 2011 oleh Notaris Fery Bakti, SH	*Deed No. 47 dated May 31, 2011 by Notary Fery Bakti, SH*
15 Juni 2012 *June 15, 2012*	8.948.748	100.000	894.874.800.000	Akta No. 45 tanggal 15 Juni 2012 oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum	*Deed No. 45 dated 15 June, 2012 by Notary Refizal, SH, M. Hum*
26 Juni 2012 *June 26, 2012*	9.023.748	100.000	902.374.800.000	Akta No. 60 tanggal 26 Juni 2012 oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum	*Deed No. 60 dated June 26, 2012 by Notary Refizal, SH, M. Hum*

Tanggal Penerbitan *Publication Date*	Jumlah Saham / Lembar *Number of Shares/Sheet*	Nominal/ Lembar (Rp) *Nominal/ Sheet (Rp)*	Total (Rp)	Akta	*Deed*
26 Juni 2013 *June 26, 2013*	9.571.461	100.000	957.146.100.000	Akta No. 68 tanggal 26 Juni 2013 oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum	*Deed No. 68 dated June 26, 2013 by Notary Refizal, SH, M.Hum*
1 Juni 2014 *June 1, 2014*	9.767.879	100.000	976.787.900.000	Akta No. 2 tanggal 1 Juni 2014 oleh Notaris Fery Bakti, SH	*Deed No. 2 dated June 1, 2014 by Notary Fery Bakti, SH*
8 November 2014 *November 8, 2014*	10.297.283	100.000	1.029.728.300.000	Akta No. 7 tanggal 8 November 2014 oleh Notaris Fery Bakti, SH	*Deed No. 7 dated November 8, 2014 by Notary Fery Bakti, SH*
20 Mei 2015 *May 20, 2015*	10.492.033	100.000	1.049.203.300.000	Akta No. 767 tanggal 20 Mei 2015 oleh Notaris Devi Ananji, SH., MKn	*Deed No. 767 dated May 20, 2015 by Notary Devi Ananji, SH., MKn*
3 April 2017 *April 3, 2017*	10.569.033	100.000	1.056.903.300.000	Akta No. 1 tanggal 3 April 2017 oleh Notaris Feri Mondro, SH., M.Kn	*Deed No. 1 dated April 3, 2017 by Notary Feri Mondro, SH., M.Kn*
11 September 2019 *September 1, 2019*	10.827.608	100.000	1.082.760.800.000	Akta No. 18 tanggal 11 September 2019 oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH	*Deed No. 18 dated September 11, 2019 by Notary Pupung Mulyantini, SH., MH*
8 Juli 2020 *July 8, 2020*	11.004.607	100.000	1.100.460.700.000	Akta No. 18 tanggal 8 Juli 2020 oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH	*Deed No. 18 dated July 8, 2020 by Notary Pupung Mulyantini, SH., MH*
18 juni 2021 *June 18, 2021*	11.031.607	100.000	1.103.160.700.000	Akta No. 22 tanggal 18 Juni 2021 oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH	*Deed No. 22 dated 18 June 2021 by Notary Pupung Mulyantini, SH., MH*

Bank Riau Kepri per 31 Desember 2021 belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai tindakan korporasi (***corporate action***), harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi dan nama bursa tempat saham perusahaan dicatatkan.

Bank Riau Kepri as of December 31, 2021 has not listed its shares on the Stock Exchange. Thus, there is no information regarding corporate actions, the share offering price for each corporate action, the number of shares listed after each corporate action and the name of the stock exchange where the company's shares are listed.

Kronologi Penerbitan Obligasi

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri tidak menerbitkan obligasi, sehingga tidak terdapat informasi kronologi penerbitan dan/atau pencatatan obligasi.

Chronology of Bond Issuance

As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri does not issue bonds, so there is no information on the chronology of the issuance and/or listing of bonds.

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri tidak melakukan penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya.

Chronology of Issuance and/or Listing of Other Securities

As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri has not issued and/or listed other securities.

Nama Dan Alamat Lembaga dan/ atau Profesi Penunjang

Name and Address of Supporting Institutions and/or Professionals

Lembaga / Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*		Keterangan *Information*	
KANTOR AKUNTAN PUBLIK *Public Accountant Office*	Nama	KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto	*Name*
	Alamat	Gedung Sentra Keramat Blok B No.18 Jl. Kramat Raya No. 7-9 Jakarta Pusat	*Address*
	Telp	021-3156131	*Telephone*
	Fax	021-3148966	*Faximile*
	Website	www.kapbep.com	*Website*
	Email	-	*Email Address*
	Jasa yang diberikan	Auditor Laporan Keuangan *Financial Report Auditor*	*Service provided*
	Periode Penugasan	17 Januari 2020, 29 Juni 2020, 15 September 2020	*Assignment period*
	Fee yang diterima	Rp.32.500.000	*Fee received*

Lembaga / Profesi Penunjang *Supporting Institutions / Professionals*		Keterangan *Information*	
NOTARIS *Notary*	Nama	Pupung Mulyantini, SH, M.H	*Name*
	Alamat	Jl. Prof. M. Yamin No. 110/14 Kota Pekanbaru Riau	*Address*
	Telp	0761 388 67	*Telephone*
	Fax	-	*Faximile*
	Website	-	*Website*
	Email	-	*Email Address*
	Jasa yang diberikan	Pembuatan Akta Notaris *Preparation of Notary Deed*	*Service provided*
	Periode Penugasan	17 Januari 2020, 29 Juni 2020, 15 September 2020	*Assignment period*
	Fee yang diterima	Rp.123.076.923	*Fee received*
PEMERINGKAT EFEK *Securities Rating*	Nama	PT Fitch Ratings Indonesia	*Name*
	Alamat	DBS BankTower 24 th Floor Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940	*Address*
	Telp	-	*Telephone*
	Fax	-	*Faximile*
	Website	-	*Website*
	Email	-	*Email Address*
	Jasa yang diberikan	Jasa Pemeringkatan Perusahaan *Company Rating Services*	*Service provided*
	Periode Penugasan	Penugasan: 17 Mei 2019 – 17 Mei 2021	*Assignment period*
	Fee yang diterima	-	*Fee received*
KONSULTAN HUKUM *Law Consultant*	Nama	Asep Ruhiat & Partners	*Name*
	Alamat	Jl. Handayani No. 369 Kota Pekanbaru	*Address*
	Telp	-	*Telephone*
	Fax	-	*Faximile*
	Website	-	*Website*
	Email	-	*Email Address*
	Jasa yang diberikan	-	*Service provided*
	Periode Penugasan	-	*Assignment period*
	Fee yang diterima	-	*Fee received*
KONSULTAN PAJAK *Tax Consultant*	Nama	KKP Didiet H Pujiadi CA, BKP	*Name*
	Alamat	Jl. Deltasari Indah Blok W 21 Waru Surabaya Provinsi Jawa Timur	*Address*
	Telp		*Telephone*
	Fax		*Faximile*
	Website		*Website*
	Email		*Email Address*
	Jasa yang diberikan		*Service provided*
	Periode Penugasan		*Assignment period*
	Fee yang diterima		*Fee received*

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certifications

Nama Penghargaan | *Award Name*:
Top Leader On CSR Commitment 2021

Acara | *Event*:
Top CSR Awards 2021

Penyelenggara | *Operators*:
Top Business

Tanggal | *Date*:
22 April 2021
April 22, 2021





Nama Penghargaan | *Award Name*:
Top CSR Awards 2021 # Star 3

Acara | *Event*:
Top CSR Awards 2021

Penyelenggara | *Operators*:
Top Business

Tanggal | *Date*:
22 April 2021
April 22, 2021

Nama Penghargaan | *Award Name*:
1 Best Call Center Regional Development Bank 9011

Acara | *Event*:
Banking Service Excelence Awards 2021

Penyelenggara | *Operators*:
infobank

Tanggal | *Date*:
29 Juni 2021
June 29, 2021





Nama Penghargaan | *Award Name*:
2 Best Overall Walk - in Channel Regional Development Bank 7478

Acara | *Event*:
Banking Service Excellence Awards 2021

Penyelenggara | *Operators*:
infobank

Tanggal | *Date*:
29 Juni 2021
June 29, 2021



Nama Penghargaan | *Award Name*:
5 Best Overall Plus Digital Regional Development Bank 7564

Acara | *Event*:
Banking Service Excellence Awards 2021

Penyelenggara | *Operators*:
infobank

Tanggal | *Date*:
29 Juni 2021
June 29, 2021

Nama Penghargaan | *Award Name*:
For Financial Performance Full-Year 2020

Acara | *Event*:
26 th Infobank Awards 2021

Penyelenggara | *Operators*:
infobank

Tanggal | *Date*:
07 September 2021
September 07, 2021





Nama Penghargaan | *Award Name*:
TOP CEO BUMD 2021

Acara | *Event*:
TOP BUMD Awards 2021

Penyelenggara | *Operators*:
Top Business

Tanggal | *Date*:
10 September 2021
September 10, 2021

Nama Penghargaan | *Award Name*:
TOP BUMD Awards 2021 # BPD - Bintang 4

Acara | *Event*:
TOP BUMD Awards 2021

Penyelenggara | *Operators*:
Top Business

Tanggal | *Date*:
10 September 2021
September 10, 2021





Nama Penghargaan | *Award Name*:
Bank Syariah Regional Terbaik "Kelompok Unit Usaha Syariah BPD"

Acara | *Event*:
Anugrah Syariah Republika 2021

Penyelenggara | *Operators*:
Republika

Tanggal | *Date*:
08 November 2021

Nama Penghargaan | *Award Name*:
Kategori Khusus "Achievement Motivation Person"

Acara | *Event*:
KI Riau Awards 2021

Penyelenggara | *Operators*:
Komisi Informasi Provinsi Riau
Riau Province Information Commission

Tanggal | *Date*:
29 November 2021
November 29, 2021





Nama Penghargaan | *Award Name*:
Capturing Next Normal Opportunitis

Acara | *Event*:
Indonesia Best BPD Awards 2021

Penyelenggara | *Operators*:
Certificate Of Appreciation

Tanggal | *Date*:
24 November 2021
November 24, 2021

Nama Penghargaan | *Award Name*:
The Best Indonesia Leader - II - 2021

Acara | *Event*:
Indonesia Leaders Award - II - 2021

Penyelenggara | *Operators*:
Economic Review

Tanggal | *Date*:
23 Desember 2021
December 23 2021



Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri belum memiliki sertifikasi.

As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri does not yet have certification.

ALAMAT KANTOR
Office address

Nama dan Alamat Entitas Anak dan/atau Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

Name and Address of Subsidiaries and/or Branch Offices or Representative Offices

KANTOR PUSAT | *Headquarters*

Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri
Jl. Jenderal Sudirman No. 462 Pekanbaru
Tel. (0761) 47070
Fax. (0761) 42389

Kantor Cabang

Branch Office

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Telepon dan Fax *Telephone and Fax*
Cabang Utama	Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Jl. Jenderal Sudirman No. 462 Pekanbaru	Tel. (0761)47170 Fax. (0761)43
Cabang Tembilahan	Jl. Baharudin Yusuf Tembilahan	Tel. 0768-22525/21334 Fax. 0768-22324
Cabang Tanjungpinang	Jl.Teuku Umar No. 21 Tanjung Pinang	Tel. 0771-21276/24334 Fax. 243290771-311370
Cabang Dumai	Jl. S. Syarif Kasim No. 111-112 Dumai	Tel. 0765-31079/32704 Fax. 3261-0765-36837
Cabang Selatpanjang	Jl. Diponegoro No. 58 Selat Panjang	Tel. 0763-31249/31719 Fax. 31250 0763-3130
Cabang Batam	Jl. Laksamana Bintan-Sei Panas Komp. Tana Mas Blok C No. 14 Batam	Tel. 0778-460264/460269/ 460277 Fax. 0778-460288
Cabang Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 377 Pekanbaru	Tel. (0761) 848711 Fax. (0761) 848712 (0761)32872
Cabang Bengkalis	Jl. Pahlawan No. 15A Bengkalis	Tel. 0766-21569/22541 Fax. 22549 0766-21784
Cabang Bangkinang	Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 29 Bangkinang	Tel. 0762-20027/20432 Fax. 0762-20137/20433
Cabang Airmolek	Jl. Jend. Sudirman, Air Molek	Tel. 0769-41435/41436 Fax. 41438/41363 0769-41437
Cabang Tanjung Balai Karimun	Jl. Pertambangan No. 23A Tj. Balai Karimun	Tel. 0777-31900/22900/23623 Fax. 0777-22012
Cabang Pangkalan Kerinci	Jl. Maharaja Indra No. 490 Pangkalan Kerinci	Tel. 0761-95731/95732 Fax. 0761-95735
Cabang Bagan Siapi-api	Jl. Pahlawan Kel. Bagan Timur Kec. Bangko Bagan Siapi-api	Tel. 0767-24369/24370 Fax. 22860 0767-24368
Cabang Teluk Kuantan	Jl. Imam Munandar, Desa Beringin, Teluk Kuantan	Tel. 0760-561651/561652 Fax. 0760-561653
Cabang Pasir Pangaraian	Jl. Tuanku Tambusai, Pasir Pengarayan	Tel. 0762-91260 Fax. 0762-91151/91301
Cabang Siak Sri Indrapura	Jl. Sutomo Kampung Dalam Siak Sri Indrapura	Tel. 0764-20461/20462/ 320770 Fax. 0764-20463
Cabang Ranai	Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng Natuna	Tel. 0773-31532/31077 Fax. 0773-31533
Cabang Syariah Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 628 Pekanbaru	Tel. 0761-32826 Fax. 0761-856356
Cabang Syariah Tanjungpinang	Jl. Raja Ali Haji Komplek Pamedan No. 1-2, Tanjung Pinang	Tel. 0771-317970 Fax. 0771-317971
Cabang Jakarta	Jl. Panglima Polim Raya No. 97A Kel.Melawai Kec.Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Tel. 021-7247701/ 7255834/7256415 Fax. 021-29126511
Cabang Bintan	Jl. WR Supratman / Jl. Raya Tanjung Uban Km. 16 No. 3, 4, 5 Kec. Toapaya	Tel. 0771-463445/463446 Fax. 0771-463451"

Kantor Cabang Pembantu *Sub Branch Office*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Telepon dan Fax *Telephone and Fax*
Cabang Pembantu Tangkerang	Jl. Imam Munandar No. 49 Pekanbaru	Tel. 0761-857201/857203 Fax. 0761-857202
Cabang Pembantu Rumbai	Jl.Sekolah No. 78 Pekanbaru	Tel. 0761-554459/554876 Fax. 0761-554857
Cabang Pembantu Senapelan	Jl. Jend. Ahmad Yani (Simp. Jl. H. Juanda) Pekanbaru	Tel. 0761-857412 Fax. 0761-857415
Cabang Pembantu Perawang	Jl. Raya Perawang Km. 5.5 RT/RW 01/06, Kel. Perawang, Kec. Tualang, Kab. Siak	Tel. 0761-693753, 693755, 92552. Fax. 0761-693754
Cabang Pembantu Duri	Jl. Hang Tuah No. 21-22 Duri	Tel. 0765-597675/597677 Fax. 0765-596808
Cabang Pembantu Tanjung Batu	Jl. Merdeka No. 14 Tanjung Batu	Tel. 0779-431555/431629 Fax. 0779-431630
Cabang Pembantu Sungai Pakning	Jl. Jend. Sudirman No. 149, Sungai Pakning	Tel. 0766-391657/391603 Fax. 0766-391654
Cabang Pembantu Dabo Singkep	Jl. Perusahaan, Dabo Singkep	Tel. 0776-322072/322279 Fax. 0776-322278
Cabang Pembantu Ujung Batu	Jl. Jend. Sudirman No. 86 Ujung Batu	Tel. 0762-62109/62103 Fax. 0762-61444
Cabang Pembantu Bagan Batu	Jl. Jend. Sudirman Bagan Sinembah	Tel. 0765-51290 Fax. 0765-51441
Cabang Pembantu Sorek	Jl. Raya Lintas Timur No. 105 Pangkalan Kuras, Sorek	Tel. 0761-492395/492396 Fax. 0761-492164
Cabang Pembantu Lubuk Baja	Jl. Pembangunan No. 1 Nagoya Lubuk Baja Batam	Tel. 0778-458343/458433/ 459015 Fax. 0778-455073
Cabang Pembantu Belilas	Jl. Lintas Timur, Belilas, Kec. Seberida	Tel. 0769-324347/324349 Fax. 0769-324348
Cabang Pembantu Panam	Komplek MTC Giant Panam BlokA 11-12 Jl. HR Soebrantas, Panam, Pekanbaru	Tel. 0761-587457 Fax. 0761-587454/587399
Cabang Pembantu Kandis	Jl. Lintas Pekanbaru - Duri, Kandis	Tel. 0761-598314/598302 Fax. 0761-598312
Cabang Pembantu Lipat Kain	Jl. Raya Lipat Kain - Teluk Kuantan, Kampar Kiri	Tel. 0761-676531/676532 Fax. 0761-676530
Cabang Pembantu Tuanku Tambusai	Jl. Tuanku Tambusai No. 135 A-B Pekanbaru	Tel. 0761-39915/39914 Fax. 0761-39913
Cabang Pembantu Tanjung Uban	Jl. Permaisuri Blok A No. 2, Kec. Bintan Utara	Tel. 0771-483400 Fax. 0771-483403
Cabang Pembantu Syariah Tembilahan	JL. Jend Sudirman - Pasar Baru Tembilahan	Tel. 0768-325715/325716 Fax. 0768-325717
Cabang Pembantu Sungai Guntung	Jl. Yos Sudarso Kec. Kateman Indragiri Hilir	Tel. 0779-551644 Fax. 0779-551645
Cabang Pembantu Jalan Riau	Jl. Riau 129 B. Kec, Senapelan Pekanbaru	Tel. 0761-39448/39450 Fax. 0761-39451
Cabang Pembantu Syariah Duri	Jl. Sudirman Kel. Air Jamban - Mandau Duri	Tel. 0765-94800/94801 Fax. 0765-94802
Cabang Pembantu Dalu-Dalu	Jl. Lintas Prov. Riau - SUMUT, Desa Talikumain, Tambusai Rokan Hulu	Tel. 0811-7530153 Fax. -
Cabang Pembantu Baserah	Jl. Desa Simpang Tanah Lapang Baserah - Kab.Kuansing	Tel. 0760-21077/21073 Fax. 0760-21076
Cabang Pembantu Kota Tengah	RT 02/02 Gelugur Kota Tengah Kel. Kepenuhan - Rohul	Tel. 0828-83039188/ 0828-83039189 Fax. -

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Telepon dan Fax *Telephone and Fax*
Cabang Pembantu Lubuk Dalam	Jl. Pertamina, Desa Rawang Kao Kec. Lubuk Dalam Siak Sri Indrapura	Tel. 0851-00816616/ 0851 00816617/0851-00816618 Fax. -
Cabang Pembantu Batu Aji	Komp Tunas Regency BlokA4 No.1-2, Jl. Brigjen Katamso, Batu Aji	Tel. 0778-3581262/ 3581263 Fax. 0778-3581265
Cabang Pembantu Ujung Tanjung	Jl. Riau, Bagansiapi- api, Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir	Tel. 0852-72572019 Fax. -
Cabang Pembantu Jalan Ahmad Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No.60, Pekanbaru	Tel. 0761-37486/37094 Fax. 0761-37201
Cabang Pembantu Syariah Batam	Komp. Ruko Tiban Impian Blok A.2 No. 1 Tiban- Sekupang Batam	Tel. 0778-326360 Fax. 0778-326359
Cabang Pembantu Tarempa	Jl. Imam Bonjol Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas	Tel. 0772-31044 Fax. 0722-31083
Cabang Pembantu Daik Lingga	Jl. Istana Robat Daik, Kec. Lingga, Kab. Lingga Kepri	Tel. 0812-7061174 Fax. -
Cabang Pembantu Kota Baru	Pasar Kota Baru Kec. Batang Gansal Kab. Inhil	Tel. – Fax. -
Cabang Pembantu Flamboyan	Jl. Raya Petapahan - Kota Garo No. 48-49, RT/RW 16/06 Desa Tanjung Sawit, Kec. Tapung, Kampar	Tel. 0828-83039152/ 0828 83039154 Fax. 0828-83039151/ 0828 83039153
	Jl. Jend Sudirman No. 114 Teluk Kuantan	Tel. 0760-20753, 20754, 561873 Fax. 0760-20975
Cabang Pembantu Syariah Panam	Jl. HR. Soebrantas Blok III A No. 5 Kec. Tampan, Pekanbaru	Tel. 0761-563847 Fax. 0761-563840
Cabang Pembantu Bintan Center	Jl. D.I Panjaitan Km 9 No. 5-6 Kec. Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang	Tel. 0771-442799 Fax. 0771-441600
Cabang Pembantu Botania	Komplek Graha Nusa Permai Blok CI No. 1- 3, Cikitsu - Botania Kota Batam	Tel. 0778-7434007, 7434008, 7434009 Fax. 0778-7434003, 7434005
Cabang Pembantu Petapahan	Jl. Raya Petapahan, Kec. Tapung	Tel. 0828-883039176 Fax. 0828-883039148
Cabang Pembantu Syariah Tanjung Balai Karimun	Jl. Ahmad Yani, Sei Lakam Kab. Karimun	Tel. 0777-327880 Fax. 0777-327881
Cabang Pembantu Syariah Pasir Pengaraiyan	Pasar Lama Pasir Pengaraiyan Kab. Rokan Hulu	Tel. 0762-7398050 Fax. 0762-7398049

Kantor Kedai *Store Office*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Telepon dan Fax *Telephone and Fax*
Kedai Marpoyan	Jl. Kaharudin Nasution No. 56 B Pekanbaru	Tel. 0761-674179 Fax. 0761-679057
Kedai Sail	Jl. Hangtuah No. 93B Pekanbaru	Tel. 0761-858701/20554 Fax. 0761-857496
Kedai Sei Apit	Jl. Gajahmada RT.001 RW.006 Kec. Sungai Apit Kab. Siak	Tel. 0766-51112/51222 Fax. 0766-51157
Kedai Air Tiris	Jl. Raya Pekanbaru- Bangkinang Air Tiris, Kampar	Tel. 0762-21631 Fax. 0761-21632
Kedai Pasar Kuok	Jl. RayaBangkinang- Padang Kuok, Kampar	Tel. 0762-323721 Fax. 0762-323722
Kedai Durian	Jl. Durian No. 27 b Pekanbaru Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki Pekanbaru	Tel. 0761-862050 Fax. 0761-864122
Kedai Minas	Jl. Yos Sudarso Kel. Minas Raya Minas	Tel. 0761-598901 Fax. 0761-598900
Kedai Ukui	Jl. Lintas Timur RT 02/01 Pasar Ukui Kec. Ukui Kab. Pelalawan	Tel. 0769-7445244 Fax. 0769-7445245
Kedai Bukit Kapur	Jl. Sukarno Hatta, Bukit Kapur - Dumai	Tel. 0811-750024 Fax.-
Kedai Pasar Pangkalan Kerinci	Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan	Tel. 0761-493365 Fax. 0761-493366
Kedai Pasar Pinggir	Jl. Lintas Duri Pekanbaru RT 02/RW 01 Desa Pinggir, Mandau	Tel. 0765-561500 Fax. 0765-561501
Kedai Peranap	Jl. Jend. Sudirman No. 22 LintasTaluk Kuantan, RT/RW 01/03,SimpangTugu Peranap, Kel. Peranap, Kec. Peranap, Kab. Indragiri Hulu	Tel. 0760-561030 Fax. 0760-561080
Kedai Pasar Sukaramai	Pasar Sukramai, Desa Sukaramai-Tapung Hulu, Kampar	Tel. 0762-61731 Fax. 0762-61
Kedai Pasar Tanjung Pinang	Jl. Pelontar II Kel. Tanjung Pinang Kota	Tel. 0771-312690 Fax. 0771-312690
Kedai Dayun	Pasar Dayun, Jl. Perawang - Siak	Tel. 0764-8001252/ 0764-8001251 Fax. -
Kedai Kabun	Jl. Lintas Pekanbaru-Pasir Pangarayan Kec. Kabun Rohul	Tel. 0828-83039155 Fax. 0828-8303915
Kedai Pasar Pagi Arengka	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Dilema, Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru	Tel. 0761-589176/589178 Fax. 0761-589179
Kedai Tanjung Samak	Jl. A. Yani,Tanjung Samak	Tel. 0812-7525600 Fax.-
Kedai Lubuk Jambi	Pasar Lubuk Jambi, Jl. Lintas Timur Kec. Kuantan Mudik	Tel. 0811-7535951 Fax. -
Kedai Rengat	Jl. Yos Sudarso No 44 Kel. Pasar Kota Kec. Rengat Inhu	Tel. 0769-21495 Fax. 0769-21496
Kedai Sei Lala	JL. Lintas air Molek- Taluk Kuantan, Desa Sei Lala Perkebunan, Kec. Sei Lala, Kab Inhu	Tel. 0769-7017666 Fax. -
Kedai Muara Lembu	Jl. Jend Sudirman, Kel. Muara Lembu, Kec. Singingi, Kab. Kuansing	Tel. - Fax. -
Kedai Kuala Kilan	Jl. Lintas Selatan No. 60, Desa Kuala Kilan Kec. Batang Cenaku, Inhu	Tel. 0828-83916666 Fax. 0828-83038603
Kedai Pasar Tandun	Jl. Raya Tandun- Ujung Batu, Kec. Tandun, Kab, Rokan Hulu	Tel. 0828-83039191 Fax. 0828-83039200
Kedai Rantau Kasai	Jl. Sultan Zainal Abidin, Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara, Kab. Rokan Hulu	Tel. 0828-830038160 Fax. -
Kedai Batupanjang Rupat	Jl. Pelajar RT/RW 02/02 Kec. Batupanjang Rupat Kab. Bengkalis	Tel. 0811-7077174 Fax. -

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Telepon dan Fax *Telephone and Fax*
Kedai Meral	Jl. A. Yani No. 12 RT/RW 03/08 Kel. Meral Kota, Kec.Meral, Kab. Karimun	Tel. 0777-361911 Fax. 0777-361611
Kedai Midai	Jl. Merdeka Sabang Barat, Kec. Midai Kab. Natuna	Tel. 0857-65613847 Fax. -
Kedai Serasan	Kampung Pelimpak RT/RW 03/01 Kec. Serasan, Kab. Natuna	Tel. 0821-70315022 Fax. -
Kedai Teluk Belitung	Pasar Suka Ramai Teluk Belitung, Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti	Tel. 0822-88279696 Fax. -
Kedai Bandar Sei Kijang	Jl. Lintas Timur KM 34, Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan	Tel. 0761-8403373 Fax. -
Kedai Pujud	Jl. Lintas Pujud - Mahato Pujud Kab. Rokan Hilir	Tel. 082384591885 Fax. -
Kedai Sabak Auh	Jl. Lintas Siak - Sungai Pakning Sabak Auh, Bandar Pedada Kab. Siak	Tel. 085218394750 Fax. -
Kedai Sungai Sembilan	Jl. Cut Nyak Dien Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai	Tel. 0765-4300321 Fax. -

Kantor Kas *Store Office*

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Telepon dan Fax *Telephone and Fax*
Kantor Kas RSUD Arifin Ahmad	RSUD Arifin Ahmad Jl. Diponegoro No. 2 Pekanbaru	Tel. 0761-44930
Kantor Kas Kantor Samsat Provinsi Riau	Kantor Samsat Provinsi Riau Jl. Jendral Sudirman No. 6 Pekanbaru	Tel. 0761-439427
Kantor Kas Kantor Walikota Pekanbaru	Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman 464 - Pekanbaru	Tel. 0761-839868
Kantor Kas Kantor Walikota Dumai	Kantor Walikota Dumai Jl. Perwira, Bagan Besar Dumai	Tel. 0765-440100
Kantor Kas Kantor Bupati Karimun	Komplek Perkantoran Poros Jl. Jend Sudirman, Tanjung Balai Karimun	Tel. 0777-323859
Kantor Kas Pematang Reba	Jl. Lintas Timur No. 72 Kec. Pasir Penyu Kab.Indragiri Hulu	Tel. 0769-341678/341679
Kantor Kas Kantor Walikota Batam	Kantor Walikota Batam Lantai 1 Jl. Engku Putri No. 1 Batam Center	Tel. 0778-465034
Kantor Kas RSUD Karimun	RSUD Karimun Jl. Poros No. 1 Tanjung Balai Karimun	Tel. 0777-328625
Kantor Kas Kantor Bupati Siak	Kantor Bupati Siak Jl. Sultan Ismail, Siak Sri Indrapura	-
Kantor Kas Kantor Bupati Natuna	Kompleks Kantor Bupati Natuna Jl. Batu Sisir – Bukit Arai, Ranai	-
Kantor Kas Kantor Walikota Tanjung Pinang	Kompleks Kantor Walikota Tj. Pinang Jl. Raya Sebauk - Senggarang	-
Kantor Kas Bupati Kampar	Kantor Bupati Kampar Jl. H.R. Soebrantas, Bangkinang	-
Kantor Kas Unilak	Universitas Lancang Kuning Jl. Dl. Panjaitan KM 8 Rumbai Pekanbaru	-
Kantor Kas Bupati Pelalawan	Kantor Bupati Pelalawan Lt. 1 Jl. Lintas Timur Pkl. Kerinci, Pelalawan	-
Kantor Kas Bupati Bengkalis	Kantor Bupati Bengkalis Jl. Jend. A. Yani, Bengkalis	-
Kantor Kas Chevron Rumbai	Kampus Politeknik Chevron Riau (PCR) Jl. Umban Sari - Rumbai	-
Kantor Kas Bupati Kuantan Singingi	Komplek Perkantoran Bupati Kuantan Singingi Jl. Senambek Sungai Jering Taluk Kuantan	-

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Telepon dan Fax *Telephone and Fax*
Kantor Kas Gubernur Riau	Kantor Gubernur Riau, Menara Lancang Kuning/Gedung 9 Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman 460	-
Kantor Kas Bupati Rokan Hilir	Jl. Merdeka No. 58, Bagan Siapi-api, Rohil	-
Kantor Kas Dispenda Kota Pekanbaru	Jl. Teratai No. 81 Pekanbaru	-
Kantor Kas Bupati Bintan	Bandar Seri Bentan KM 42 Bintan Bunyu Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan	-
Kantor Kas Belakang Padang	Jl. Hangtuah No. 01 (Depan Mesjid At Taqwa) Belakang Padang Kota Batam	-
Kantor Kas Mal Pelayanan Publik Kota Batam	Gedung Sumatera Promotion Centre Batam Lt. 2 Batam Centre	-
Kantor Kas BAPENDA Rokan Hulu	Kantor Bapenda Rokan Hulu Pasir Pengaraian	-
Kantor Kas Dispenda Kota Batam	Gedung Dispenda Kota Batam Jl. Engku Putri Batam Center	-
Kantor Kas Samsat Pekanbaru Kota	Gedung Samsat Pekanbaru Kota Jl. Gajah Mada Kota Pekanbaru	-
Kantor Kas Bupati Indragiri Hilir	Komplek Perkantoran Bupati Indragiri Hilir Tembilahan Kab. Indragiri Hilir	-
Kantor Kas Sawang	Jl. Sawang Besar Kec. Kundur Barat Tanjung Batu Kab. Karimun	-
Kantor Kas Gubernur Kepulauan Riau	Gedung Aula Komplek Perkantoran Pemerintahan Provinsi KEPRI Dompak Kota Tanjung Pinang	-
Kantor Kas Dispenda Rokan Hilir	Komplek Perkantoran Batu 6 Bagan Siapi-api Kab. Rokan Hilir	-
Kantor Kas DPPKAD Kep. Meranti	Jl. Merdeka, Selat Panjang Kota Selat Panjang	-
Kantor Kas Dinas Pendidikan Kota Batam	Komplek Perkantoran Kota Batam Jl. Pramuka Sekupang Kota Batam	-
Kantor Kas Syariah Kemenag Siak	Kantor Kemenag Siak Komplek Perkantoran Sungai Betung Kab. Siak	-
Kantor Kas RSUD Provinsi Kepulauan Riau	Jl. WR Supratman KM 8 No.100 Tanjung Pinang	-
Kantor Kas RSUD Dumai	RSUD Dumai Jl. Tanjung Jati No. 4 Dumai	-
Kantor Kas RSUD Embung Fatimah Batam	RSUD Embung Fatimah Batam Jl. Letjen Soeprapto Batam	-
Kantor Kas RSUD Petala Bumi	RSUD Petala Bumi Jl. Sutomo Pekanbaru	-
Kantor Kas Syariah Universitas Abdurrab	Universitas Abdurrab Jl. Riau Ujung No. 73 Pekanbaru	-
Kantor Kas RSUD Bengkalis	RSUD Bengkalis Jl. Kelapapati Tengah No. 90 Bengkalis	-
Kantor Kas RSUD Mandau Duri	RSUD Mandau Duri Jl. Stadion No. 1 Duri Kab. Bengkalis	-
Kantor Kas Palmatak	Jl. Usman H Pang, Ladan, Palmatak Kab. Kepulauan Anambas	-
Kantor Kas Senayang	Jl. Merdeka No. 172 Senayang Kab. Lingga	-
Kantor Kas Syariah Kemenag Indragiri Hilir	Jl. Keritang No. 12 Kab. Indragiri Hilir	-
Kantor Kas Kuala Kampar	Jl. Bono Sakti, Teluk dalam, Kuala Kampar, Kab. Pelalawan	-
Kantor Kas Syariah Kemenag Kuantan Singingi	Kantor Kemenag Kab. Kuantan Singingi Teluk Kuantan	-
Kantor Kas Teluk Meranti	Jl. Lintas Bono/Jl. Rambutan No.10 Teluk Meranti Kec. Teluk Meranti Teluk Meranti Kab. Pelalawan	-
Kantor Kas Letung	Jl. Merdeka Letung Kab. Kepulauan Anambas	-

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*	Telepon dan Fax *Telephone and Fax*
Kantor Kas Pancur	Depan Dermaga Pancur Kec. Lingga Utara Kab. Lingga	-
Kantor Kas Rupat Utara	Jl. Riau, Tanjung Medang Kec. Rupat Utara Kab. Bengkalis	-
Kantor Kas Kota Bangun KUD Bangun Desa	Jl. Pembangunan Koto Bangun Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar	-
Kantor Kas Syariah Kemenag Bengkalis	Kantor Kemenag Kab. Bengkalis Jl. Kelapapati Darat Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis	-
Kantor Kas Syariah Kepulauan Meranti	Jl. Dorak Selatpanjang Timur Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti	-
Kantor Kas Syariah Kemenag Rokan Hulu	Kantor Kemenag Kab. Rokan Hulu Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu	-
Kantor Kas Kijang	Jl. Kampung Kuala Lumpur Kijang Kab. Bintan	-
Kantor Kas BPKAD Kota Tanjungpinang	Jl. Basuki Rahmat / Jl. Pramuka Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari Kota Tanjungpinang	-
Kantor Kas Komplek Walikota Pekanbaru - Tenayan Raya	Komplek Walikota Pekanbaru - Tenayan Raya	-

Butik

Boutique

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*
Butik Mal Sentra Komersial Arengka (SKA) Pekanbaru	Mal SKA Lt 2 - Jl. Soekarno Hatta Pekanbaru
Butik Mal Ciputra Seraya Pekanbaru	Mal Ciputra Seraya Lt 1 # 14 Jl. Riau Pekanbaru
Butik Mal Nagoya Hill Batam	Mall Nagoya Hill Lt. Dasar # SM-Q9 Batam
Butik Mega Mall Batam	Mega Mall Batam Centre Lt. 1 /F. 255 Batam

Payment Point

Payment Point

Nama Kantor *Office Name*	Alamat *Address*
Payment Point Kantor Pelayanan Pajak Duri	Jl. Desa Harapan No. 28 Duri
Payment Point Kantor Dispenda Karimun	Jl. Pertambangan, Sei Ayam Kab. Karimun
Payment Point Kantor DPPA Kampar	Jl. Prof M. Yamin Bangkinang Kab. Kampar
Payment Point Kantor Dispenda Kota Dumai	Gedung Dispenda Kota Dumai Jl. HR Soebrantas, Dumai
Payment Point Kantor Dispenda Kab. Siak	Gedung Dispenda Siak Komplek Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indrapura
Payment Point Kantor Dispenda Kab. Bengkalis	Gedung Dispenda Bengkalis Jl. Jend Sudirman Bengkalis
Payment Point RSUD Indrasari Rengat	Jl. Raya Lintas Timur Pematang Reba Kab. Indragiri Hulu
Payment Point Kantor Bapenda Kab. Indragiri Hulu	Gedung Dispenda Indragiri Hulu Pematang Reba, Indragiri Hulu
Payment Point DPKAD Pelalawan	Kantor DPKAD Kab. Pelalawan
Payment Point Bapenda Indragiri Hilir	Kantor Bapenda Kab. Indragiri Hilir
Payment Point Bapenda Kuansing	Kantor Bapenda Kuantan Singingi Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi Prov. Riau

Oto Banking/ Kas Keliling

1. Otobanking Cabang Utama Pekanbaru
2. Otobanking Cabang Tanjungpinang Tanjungpinang
3. Mini Otobanking Cabang Dumai
4. Mini Otobanking Cabang Teluk Kuantan
5. Mini Otobanking Cabang Syariah Pekanbaru
6. Mini Otobanking Cabang Bangkinang
7. Otobanking Cabang Batam
8. Otobanking Cabang Bagan Siapi-api
9. Otobanking Cabang Pasir Pengaraian
10. Otobanking Cabang Airmolek
11. Otobanking Cabang Tembilahan
12. Otobanking Cabang Bangkinang
13. Otobanking Cabang Siak Sri Indrapura
14. Otobanking Cabang Bengkalis
15. Otobanking Cabang Pangkalan Kerinci
16. Otobanking Cabang Syariah Tanjungpinang

Informasi yang Tersedia pada *Website*

Bank Riau Kepri memiliki website resmi dengan alamat www.bankriaukepri.co.id yang merupakan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi bagi *stakeholders*, disamping sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Selain informasi yang bersifat umum, *website* Bank Riau Kepri juga memberikan informasi yang lebih spesifik, di antaranya terkait hal-hal sebagai berikut:

- Beranda: Menampilkan suku bunga giro dan lokasi jaringan serta simulasi pinjaman.
- Produk Layanan: Menampilkan semua produk dan layanan Bank Riau Kepri baik untuk Perorangan maupun Badan Usaha
- Jaringan: Menampilkan seluruh jaringan kantor Bank Riau Kepri
- Tentang Kami berisikan informasi: Sekilas Bank Riau Kepri, Struktur Organisasi, Manajemen, Makna Logo, Visi Misi, Budaya Kerja, Kode Etik.
- Informasi Perusahaan yang meliputi CSR, Prestasi, Tata Kelola Perusahaan, Penerapan GCG, Pengendalian Risiko, 10 Pedoman Perilaku
- Investor berisikan informasi: Ikhtisar Keuangan, Laporan Keuangan bulanan, triwulan, dan semester serta tahunan.
- Slide Bank Riau Kepri terdiri atas kartu Debit, SMS Banking Bank Riau Kepri, E-Samsat Riau Kepri, Investasi Bodong, Kartu Kredit Co-Brand Bank Riau Kepri, KUR, Kartu Debit GPN Bank Riau Kepri. Perubahan Tarif Telkomsel, Mobile Banking Bank Riau Kepri.

Informasi tambahan terkait website Bank Riau Kepri dapat dilihat di bagian Akses terhadap Informasi dan Data Perseroan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Ini.

Information Available on the Website

Bank Riau Kepri has an official website with the address www.bankriaukepri.co.id which is a means and infrastructure to support the delivery of information for stakeholders, as well as a form of public information disclosure. In addition to general information, the Bank Riau Kepri website also provides more specific information, including those related to the following:

- *Home: Displays current account interest rates and network locations as well as loan simulations.*
- *Service Products: Displays all products and services of Bank Riau Kepri for both Individuals and Business Entities*
- *Network: Displays the entire office network of Bank Riau Kepri*
- *About Us contains information: Bank Riau Kepri at a glance, Organizational Structure, Management, Meaning of Logo, Vision and Mission, Work Culture, Code of Ethics.*
- *Company Information which includes CSR, Achievement, Corporate Governance, GCG Implementation, Risk Control, 10 Code of Conduct*
- *Investors contains information: Financial Summary, Monthly, Quarterly, and Annually Financial Reports.*
- *Bank Riau Kepri slides consist of Debit cards, SMS Banking Bank Riau Kepri, E-Samsat Riau Kepri, Bodong Investments, Co-Brand Credit Cards Bank Riau Kepri, KUR, Bank Riau Kepri GPN Debit Cards. Tariff Changes for Telkomsel, Mobile Banking of Bank Riau Kepri.*

Additional information regarding the Bank Riau Kepri website can be found in the Access to Company Information and Data section of the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Divisi Internal Audit

Education and/or Training for the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Division

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, anggota Dewan Komisaris Bank Riau Kepri telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini.

Competency Development for the Board of Commissioners

Throughout 2021, members of the Board of Commissioners of Bank Riau Kepri have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars as shown in the following table.

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Table of Competency Development of Directors

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Judul Pelatihan *Title of Training*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan *Date and Year of Implementation*
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama *President Commissioner*	*Workshop Outlook* Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis & Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing Sharia Business & Finance Ecosystem*	Muamalat Institute	07/12/2021
		Training dan *Workshop* Eksekutif Perbankan Syariah untuk Komisaris dan Direksi Bank Syariah *Sharia Banking Executive Training and Workshop for Commissioners and Directors of Sharia Banks*	Iqtishad Consultan Indonesia	13/12/2021
		Workshop & Refreshement Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah *Workshop & Refreshment for Deepening the Sharia Banking Business Concept*	Karim Consulting Indonesia	15/12/2021
		Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop on Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Agency (BSMR)*	16/12/2021
		Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (Online Class)*	Karim Consulting Indonesia	18/12/2021
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	*Zoominar The Relantionship between GCG Principles and Three Lines of GCG*	Economic Review	05/02/2021
		Pelatihan Pembekalan Certified Fraud Examiner (CFE) *Certified Fraud Examiner (CFE) Debriefing Training*	Lembaga Pengembangan *Fraud Auditing* (LPFA) *Fraud Auditing Development Institute (LPFA)*	22/02/2021
		Webinar Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based *Webinar on the Effectiveness of the Board of Commissioners' Supervision in Maintaining Bank Compliance in Towards the Era of Principle Based Regulation*	*Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)* *Banking Compliance Director*	25/03/2021
		Workshop Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Analisa Rencana Bisnis *Workshop on the Preparation of the Board of Commissioners Supervision Report and Business Plan Analysis*	PT Sinergi Indonesia Pintar	09/06/2021

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Judul Pelatihan *Title of Training*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan *Date and Year of Implementation*
		Seminar dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2021 *FKDK BPDSI West Region Seminar and Regional Work Meeting in 2021*	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) *Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDKP BPD-SI)*	07/10/2021
Roy Prakoso*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	*Workshop Outlook* Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis & Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing Sharia Business & Finance Ecosystem*	Muamalat Institute	07/12/2021
		Training dan *Workshop* Eksekutif Perbankan Syariah untuk Komisaris dan Direksi Bank Syariah *Sharia Banking Executive Training and Workshop for Commissioners and Directors of Sharia Banks*	Iqtishad Consultan Indonesia	13/12/2021
		Workshop & Refreshement Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah *Workshop & Refreshment for Deepening the Sharia Banking Business Concept*	Karim Consulting Indonesia	15/12/2021
		Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop on Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Agency (BSMR)*	16/12/2021
		Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (Online Class)*	Karim Consulting Indonesia	18/12/2021

Pengembangan Kompetensi Direksi

Sepanjang tahun 2021, anggota Direksi Bank Riau Kepri telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Competency Development of the Board of Directors

Throughout 2021, members of the Board of Directors of Bank Riau Kepri have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars as shown in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Direksi
Table of Competency Development of Director

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Judul Pelatihan *Title of Training*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan *Date and Year of Implementation*
Andi Buchari	Direktur Utama President Director	Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3-5 *Maintenance of Risk Management Certification Level 3-5*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Risk Management Certification Agency (BSMR)	07/04/2021
		Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive*	Karim Consulting Indonesia	08/04/2021
		Pelatihan Online Serttifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun *Online Training of Pension Fund General Management Certification*	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) *Indonesian Pension Fund Association (ADPI)*	24/05/2021
		Training Leadership ' Mindset Transformation of Sharia Bankers ' for Executive *Leadership Training ' Mindset Transformation of Sharia Bankers ' for Executive*	Bank Riau Kepri	02/10/2021
		Pelatihan Online : Membangun Business Acumen Ketajaman Bisnis Melalui Simulasi Bisnis *Online Training : Building Business Accumen Business Acumen Through Business Simulation*	nuPMK Consulting	28/10/2021
		Seminar Nasional : Peluang pertumbuhan Kredit BPD melalui Proses Digitalisasi data Kredit dan Program Penjamin Kredit Nasional di Era New Normal *National Seminar: Opportunities for BPD Credit growth through the process of digitizing credit data and the National Credit Guarantee Program in the New Normal Era*	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) *Association of Regional Development Banks*	18/11/2021
		Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem*	Muamalat Institute	07/12/2021
		Workshop & Refreshement Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah *Workshop & Refreshment for Deepening the Sharia Banking Business Concept*	Karim Consulting Indonesia	15/12/2021
		Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop on Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Agency (BSMR)*	16/12/2021
		Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)*	Karim Consulting Indonesia	18/12/2021
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*	Pembekalan Sertifikasi Treasury Level Advance *Treasury Certification Advance Level*	PT Efektifpro Knowledge Source	05/02/2021
		Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive	Karim Consulting Indonesia	08/04/2021
		Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah	Muamalat Institute	07/12/2021
		Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Agency (BSMR)*	16/12/2021
		Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class)	Karim Consulting Indonesia	18/12/2021

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Judul Pelatihan *Title of Training*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan *Date and Year of Implementation*
Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*	*Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive* *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive*	Karim Consulting Indonesia	08/04/2021
		Training Leadership Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive *Training Leadership Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive*	Bank Riau Kepri	02/10/2021
		Workshop kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & Public Relation *Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations*	Bank Riau Kepri	26/11/2021
		Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem*	Muamalat Institute	07/12/2021
		Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Director of Operations* *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah Director of Operations*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Agency (BSMR)*	16/12/2021
		Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)*	Karim Consulting Indonesia	18/12/2021
Tengkoe Irawan	Direktur Keredit dan Syariah *Director of Credit and Sharia*	*Training of Trainer* (ToT) Islamic Banking For Executive *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive*	Karim Consulting Indonesia	08/04/2021
		Training Leadership ' Mindset Transformation of Sharia Bankers ' for Executive *Leadership Training ' Mindset Transformation of Sharia Bankers ' for Executive*	Bank Riau Kepri	02/10/2021
		Seminar Nasional : Peluang pertumbuhan Kredit BPD melalui Proses Digitalisasi data Kredit dan Program Penjamin Kredit Nasional di Era New Normal *National Seminar: Opportunities for BPD Credit growth through the process of digitizing credit data and the National Credit Guarantee Program in the New Normal Era*	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) *Association of Regional Development Banks (ASBANDA)*	18/11/2021
		Workshop kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & *Public Relation* *Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations*	Bank Riau Kepri	26/11/2021
		Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem*	Muamalat Institute	07/12/2021
		Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Risk Management Certification Agency (BSMR)	16/12/2021
		Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (*online Class*) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)*	Karim Consulting Indonesia	18/12/2021

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Judul Pelatihan *Title of Training*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan *Date and Year of Implementation*
Fajar Restu Febriansyah*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	Workshop kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & Public Relation *Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations*	Bank Riau Kepri	26/11/2021
		Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem*	Muamalat Institute	07/12/2021
		Training dan Workshop Eksekutif Perbankan Syariah untuk Komisaris dan Direksi Bank Syariah *Sharia Banking Executive Training and Workshop for Sharia Bank Commissioners and Directors*	Iqtishad Consultan Indonesia	13/12/2021
		Workshop & Refreshement Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah *Workshop & Refreshment for Deepening the Sharia Banking Business Concept*	Karim Consulting Indonesia	15/12/2021
		Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Risk Management Certification Agency (BSMR) *Risk Management Certification Agency (BSMR)*	16/12/2021
		Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (online Class) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)*	Karim Consulting Indonesia	18/12/2021
Eka Afriadi**	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	Webinar Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan Principle Based *Webinar on the Effectiveness of the Board of Commissioners' Supervision in Maintaining Bank Compliance in Towards the Era of Principle Based Regulation*	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	25/03/2021
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3-5 *Maintenance of Risk Management Certification Level 3-5*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Agency (BSMR)*	07/04/2021
		Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive	Karim Consulting Indonesia	08/04/2021

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop,* konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Competency Development of Sharia Supervisory Board

Throughout 2021, the Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri has participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars as shown in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah
Table of Competency Development for the Sharia Supervisory Board

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Judul Pelatihan *Training Title*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan *Implementation Date and Year*
Zulhendri Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah *Chairman of the Sharia Supervisory Board*	*Training Leadership 'Mindset Transformation of Sharia Bankers"* *Leadership Training 'Mindset Transformation of Sharia Bankers"*	Bank Riau Kepri *Bank Riau Kepri*	2 Oktober 2021 *October 2, 2021*
		Pra *Ijtima' Sanawi* 2021 *Pre Ijtima 'Sanawi 2021*	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)	4-5 Oktober 2021 *October 4-5 2021*
		Webinar Ijtima' Sanawi *Webinars Ijtima 'Sanawi*	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) *National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)*	2-3 Desember 2021 *December 2-3, 2021*
		Workshop Outlook Perbankan Syariah: Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing Business and Financial Ecosystems*	Muamalat Institute Muamalat Institute	7 Desember 2021 *December 7th 2021*
		Training dan *Workshop* Eksekutif Perbankan Syariah untuk Komisaris dan Direksi Bank Syariah *Sharia Banking Executive Training and Workshop for Sharia Bank Commissioners and Directors*	Iqtishad Consultan Indonesia Iqtishad Consultant Indonesia	13 Desember 2021 *December 13, 2021*
		Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Agency (BSMR)*	16 Desember 2021 *December 16, 2021*
		Workshop dan *Refreshment* (Pendalaman) Konsep Bisnis Perbankan Syariah *Workshop and Refreshment (Development) of Sharia Banking Business Concepts*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	18 Desember 2021 *December 18, 2021*
Saifuddin Yuliar	Anggota Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board Member*	*Training Leadership 'Mindset Transformation of Sharia Bankers"* *Leadership Training 'Mindset Transformation of Sharia Bankers"*	Bank Riau Kepri *Bank Riau Kepri*	2 Oktober 2021 *October 2, 2021*
		Pra *Ijtima' Sanawi* 2021 *Pre Ijtima 'Sanawi 2021*	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) *National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)*	4-5 Oktober 2021 *October 4-5 2021*
		Webinar Ijtima' Sanawi *Webinars Ijtima 'Sanawi*	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) *National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)*	2-3 Desember 2021 *December 2-3, 2021*
		Workshop Outlook Perbankan Syariah: Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing Business and Financial Ecosystems*	Muamalat Institute *Muamalat Institute*	7 Desember 2021 *December 7th 2021*
		Training dan *Workshop* Eksekutif Perbankan Syariah untuk Komisaris dan Direksi Bank Syariah *Sharia Banking Executive Training and Workshop for Sharia Bank Commissioners and Directors*	Iqtishad Consultan Indonesia *Iqtishad Consultant Indonesia*	13 Desember 2021 *December 13, 2021*
		Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	16 Desember 2021 *December 16, 2021*
		Workshop dan *Refreshment* (Pendalaman) Konsep Bisnis Perbankan Syariah *Workshop and Refreshment (Development) of Sharia Banking Business Concepts*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	18 Desember 2021 *December 18, 2021*

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Sepanjang tahun 2021, anggota Komite Audit Bank Riau Kepri telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Competency Development of Audit Committee

Throughout 2021, members of the Audit Committee of Bank Riau Kepri have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars as shown in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Audit Committee Competency Development Table

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan *Types of Training and Competency Development/Training Materials*	Waktu dan Tempat Pelaksanaan *Implementation Time and Place*	Penyelenggara *Organizer*
Rita Anugerah	Ketua Komite *Committee Chair*	Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris *Information on competency development can be seen in the competency development of the Board of Commissioners*		
Taufiqurrahman	Anggota Komite *Committee Member*	Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris *Information on competency development can be seen in the competency development of the Board of Commissioners*		
Roy Prakoso**	Anggota Komite *Committee Member*	Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris *Information on competency development can be seen in the competency development of the Board of Commissioners*		
Fahmi Oemar	Anggota Komite *Committee Member*	Pelatihan Pembekalan *Certified Fraud Examiner* (CFE) *Certified Fraud Examiner (CFE) Debriefing Training*	22 Februari 2021 di Pekanbaru *February 22, 2021 in Pekanbaru*	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) *Fraud Auditing Development Institute (LPFA)*
		Training of Trainer (ToT) Islamic Banking for Executive *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking for Executive*	8 April 2021 di Pekanbaru *April 8, 2021 in Pekanbaru*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*
		Workshop Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Analisa Rencana Bisnis *Workshop on the Preparation of the Board of Commissioners Supervision Report and Business Plan Analysis*	9 Juni 2021 di Yogyakarta *June 9, 2021 in Yogyakarta*	PT Sinergi Indonesia Pintar *PT Sinergi Indonesia Pintar*
		Workshop Treasury dan Manajemen Risiko *Treasury and Risk Management Workshop*	29 November 2021 di Jakarta *November 29, 2021 in Jakarta*	PT Rumah Edukasi Merah Putih (Red White Training & Consulting) *PT Rumah Edukasi Merah Putih (Red White Training & Consulting)*
Indarti	Anggota Komite *Committee Member*	Pelatihan Pembekalan Certified Fraud Examiner (CFE) *Certified Fraud Examiner (CFE) Debriefing Training*	22 Februari 2021 di Pekanbaru *February 22, 2021 in Pekanbaru*	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) *Fraud Auditing Development Institute (LPFA)*
		Training of Trainer (ToT) Islamic Banking for Executive *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking for Executive*	8 April 2021 di Pekanbaru *April 8, 2021 in Pekanbaru*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*
		Workshop Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Analisa Rencana Bisnis *Workshop on the Preparation of the Board of Commissioners Supervision Report and Business Plan Analysis*	9 Juni 2021 di Yogyakarta *June 9, 2021 in Yogyakarta*	PT Sinergi Indonesia Pintar *PT Sinergi Indonesia Pintar*
		Workshop Treasury dan Manajemen Risiko *Treasury and Risk Management Workshop*	29 November 2021 di Jakarta *November 29, 2021 in Jakarta*	PT Rumah Edukasi Merah Putih (*Red White Training & Consulting*) *PT Rumah Edukasi Merah Putih (Red White Training & Consulting)*

Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2021, anggota Komite Manajemen Risiko Bank Riau Kepri telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Competency Development of The Risk Management Committee

Throughout 2021, members of the Risk Management Committee of Bank Riau Kepri have participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars as shown in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee Competency Development Table

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan *Types of Training and Competency Development/Training Materials*	Waktu dan Tempat Pelaksanaan *Implementation Time and Place*	Penyelenggara *Organizer*
Taufiqurrahman	Ketua Komite *Committee Chair*	Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris *Information on competency development can be seen in the competency development of the Board of Commissioners*		
Roy Prakoso**	Ketua Komite *Committee Chair*	Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris *Information on competency development can be seen in the competency development of the Board of Commissioners*		
Rita Anugerah	Anggota Komite *Committee Member*	Informasi pengembangan kompetensi dapat dilihat pada pengembangan kompetensi Dewan Komisaris *Information on competency development can be seen in the competency development of the Board of Commissioners*		
Fahmi Oemar	Anggota Komite *Committee Member*	Pelatihan Pembekalan *Certified Fraud Examiner* (CFE) *Certified Fraud Examiner (CFE) Debriefing Training*	22 Februari 2021 di Pekanbaru *February 22, 2021 in Pekanbaru*	Lembaga Pengembangan *Fraud Auditing* (LPFA) *Fraud Auditing Development Institute (LPFA)*
		Training of Trainer (ToT) Islamic Banking for Executive *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking for Executive*	8 April 2021 di Pekanbaru *April 8, 2021 in Pekanbaru*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*
		Workshop Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Analisa Rencana Bisnis *Workshop on the Preparation of the Board of Commissioners Supervision Report and Business Plan Analysis*	9 Juni 2021 di Yogyakarta *June 9, 2021 in Yogyakarta*	PT Sinergi Indonesia Pintar *PT Sinergi Indonesia Pintar*
		Workshop Treasury dan Manajemen Risiko *Treasury and Risk Management Workshop*	29 November 2021 di Jakarta *November 29, 2021 in Jakarta*	PT Rumah Edukasi Merah Putih (*Red White Training & Consulting*) *PT Rumah Edukasi Merah Putih (Red White Training & Consulting)*
Indarti	Anggota Komite *Committee Member*	Pelatihan Pembekalan *Certified Fraud Examiner* (CFE) *Certified Fraud Examiner (CFE) Debriefing Training*	22 Februari 2021 di Pekanbaru *February 22, 2021 in Pekanbaru*	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) *Fraud Auditing Development Institute (LPFA)*
		Training of Trainer (ToT) Islamic Banking for Executive *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking for Executive*	8 April 2021 di Pekanbaru *April 8, 2021 in Pekanbaru*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*
		Workshop Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Analisa Rencana Bisnis *Workshop on the Preparation of the Board of Commissioners Supervision Report and Business Plan Analysis*	9 Juni 2021 di Yogyakarta *June 9, 2021 in Yogyakarta*	PT Sinergi Indonesia Pintar *PT Sinergi Indonesia Pintar*
		Workshop Treasury dan Manajemen Risiko *Treasury and Risk Management Workshop*	29 November 2021 di Jakarta *November 29, 2021 in Jakarta*	PT Rumah Edukasi Merah Putih (Red White Training & Consulting) *PT Rumah Edukasi Merah Putih (Red White Training & Consulting)*

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2021 Sekretaris Perusahaan Bank Riau Kepri telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Corporate Secretary Competency Development

Throughout 2021 the Corporate Secretary of Bank Riau Kepri has participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars as shown in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Table of Company Secretary Competency Development

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan *Types of Training and Development Materials Competence / Training*	Waktu Pelaksanaan *Time Implementation*	Penyelenggara *The organizers*
Wahyudi Gustiawan	Pemimpin Divisi *Head of Division*	Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive*	08/04/2021	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*
		Sosialisasi Pedoman Iklan dan Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan *Socialization of Advertising Guidelines and Standard Agreements for the Financial Services Sector*	11/06/2021	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Financial Services Authority (OJK)*
		Zoominar Indonesia Corpsecr & Corp Comm Award-VI-2021 *Zoominar Indonesia Corpsecr & Corp Comm Award-VI-2021*	11/06/2021	Economic Review *Economic Review*
		Seminar Online Leading Unprecedented Time Memanfaatkan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Jilid 3 dan Award *Leading Unprecedented Time Online Seminar Utilizing Loan Restructuring Relaxation Volume 3 and Award*	07/09/2021	Infobank Institute *Infobank Institute*
		Training Leadership ' Mindset Transformation of Sharia Bankers ' for Executive *Training Leadership ' Mindset Transformation of Sharia Bankers ' for Executive*	02/10/2021	Bank Riau Kepri *Riau Kepri Bank*
		Workshop kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & Publik Relation *Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations*	26/11/2021	Bank Riau Kepri *Riau Kepri Bank*
		Workshop Outlook Perbankan Syariah; Optimalisasi Ekosistem Bisnis & Keuangan Syariah II *Sharia Banking Outlook Workshop; Optimization of Islamic Finance & Business Ecosystem II*	07/12/2021	Muamalat Institute *Institute Muamalat*

Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Sepanjang tahun 2021 , Unit Internal Audit Bank Riau Kepri telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, workshop, konferensi maupun seminar, sebagaimana tabel berikut ini:

Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Throughout 2021, the Internal Audit Unit of Bank Riau Kepri has participated in various competency improvement programs in the form of training, workshops, conferences and seminars, as shown in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Unit Internal Audit
Internal Audit Unit Competency Development Table

Nama	Jabatan *Position*	Jenis Pelatihan dan Materi Pengemb Position Kompetensi/Pelatihan *Types of Training and Development Materials Competency / Training*	Waktu Pelaksanaan *Execution time*	Penyelenggara *Organizer*
Heru Kurniawan	Pemimpin Divisi *Division Leader*	Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3-5 *Maintenance of Risk Management Certification Level 3-5*	7 April 2021 *April 7, 2021*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Training of Trainer (ToT) Islamic Banking for Executive *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking for Executive*	8 April 2021 *April 8, 2021*	Karim Consulting Indonesia
		Sosialisasi Kartu Pembiayaan BSI iB Hasanah Card *Socialization of BSI iB Hasanah Card Financing Card*	4 Mei 2021 *May 4, 2021*	Bank Syariah Indonesia (BSI)
		Training Leadership 'Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive *Leadership Training 'Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive*	2 Oktober 2021 *October 2, 2021*	Bank Riau Kepri
		Workshop Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & Public Relation *Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations*	26 November 2021 *November 26, 2021*	Bank Riau Kepri
		Workshop Outlook Perbankan Syariah; Optimalisasi Ekosistem Bisnis & Keuangan Syariah *Optimization of Sharia Business & Finance Ecosystem*	7 Desember 2021 *December 7th 2021*	Muamalat Institute
Syah Ikhwan Mainputra	Pemimpin Bagian *Section Leader*	Sosialisasi Bedelau Ibadah, Bedelau Millenial, dan Bedelau Suka-suka Angkatan 1&2 *Socialization of Bedelau Worship, Millennial Bedelau, and Bedelau Likes Batch 1&2*	12 Januari 2021 *January 12, 2021*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Training Islamic Banking (Overview) bagi Pegawai Divisi Internal Audit dan Divisi Mikro, Kecil, dan Menengah *Islamic Banking Training (Overview) for Employees of the Internal Audit Division and the Micro, Small, and Medium Division*	22 April 2021 *April 22, 2021*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Pelatihan Pembiayaan UMKM bagi Pemimpin Kedai Wilayah Daratan *MSME Financing Training for Mainland Regional Store Leaders*	8 Oktober 2021 *October 8, 2021*	Bank Riau Kepri
Andri Eka Putra	Pemimpin Bagian *Section Leader*	Training Pendidikan Dasar Perbankan Syariah *Islamic Banking Basic Education Training*	26 Januari 2021 *January 26, 2021*	Muamalat Institute
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3-5 *Maintenance of Risk Management Certification Level 3-5*	7 April 2021 *April 7, 2021*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
		Training Islamic Banking (Overview) bagi Pegawai Divisi Internal Audit dan Divisi Mikro, Kecil, dan Menengah *Islamic Banking Training (Overview) for Employees of the Internal Audit Division and the Micro, Small, and Medium Division*	22 April 2021 *April 22, 2021*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Workshop Implementasi Business Continuity Management System (BCMS) *Workshop on Implementation of Business Continuity Management System (BCMS)*	25 Desember 2021 *December 25, 2021*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
Raja Bambang Gunawan	Pemimpin Bagian *Section Leader*	Sosialisasi Bedelau Ibadah, Bedelau Millenial, dan Bedelau Suka-suka Angkatan 3&4 *Socialization of Bedelau Worship, Millennial Bedelau, and Bedelau Likes Batch 3&4*	13 Januari 2021 *January 13, 2021*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Training Islamic Banking (Overview) bagi Pegawai Divisi Internal Audit dan Divisi Mikro, Kecil, dan Menengah *Islamic Banking Training (Overview) for Employees of the Internal Audit Division and the Micro, Small, and Medium Division*	22 April 2021 *April 22, 2021*	Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
		Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) *Integrity Builder Expert Certification (API)*	16 November 2021 *November 16, 2021*	Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK)





ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERSEROAN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS OF THE COMPANY'S PERFORMANCE

TINJAUAN PEREKONOMIAN
Economic Overview

Pemulihan ekonomi global terus berlanjut, bahkan ketika pandemi muncul kembali. Garis patahan yang dibuka oleh COVID-19 terlihat lebih persisten divergensi jangka pendek diperkirakan akan meninggalkan jejak yang bertahan lama pada kinerja jangka menengah. Akses vaksin dan dukungan kebijakan awal adalah pendorong utama kesenjangan tersebut.

The global economic recovery continues, even as the pandemic reappears. The fault line opened by COVID-19 looks more persistent near term divergence is expected to leave a lasting imprint on the medium term performance. Vaccine access and early policy support are key drivers of the gap.

Penyebaran Delta yang cepat dan ancaman varian baru telah meningkatkan ketidakpastian tentang seberapa cepat pandemi dapat diatasi. Pilihan kebijakan menjadi lebih sulit, menghadapi tantangan multidimensi penurunan pertumbuhan lapangan kerja, kenaikan inflasi, kerawanan pangan, kemunduran akumulasi modal manusia, dan perubahan iklim dengan ruang gerak yang terbatas.

Delta's rapid deployment and the threat of new variants have increased uncertainty about how quickly the pandemic can be contained. Policy choices are becoming more difficult, facing the multidimensional challenges of declining employment growth, rising inflation, food insecurity, declining human capital accumulation, and climate change with limited scope for movement.

Perkiraan: Ekonomi global diproyeksikan tumbuh 5,9 persen pada tahun 2021 (TW III) dan 4,4 persen pada tahun 2022 (1,05 poin persentase lebih rendah untuk tahun 2021 dibandingkan dengan Pembaruan Outlook Ekonomi Dunia (WEO) Juli 2021). Revisi penurunan untuk tahun 2021 mencerminkan penurunan peringkat untuk ekonomi maju sebagian karena gangguan pasokan dan untuk negara berkembang berpenghasilan rendah, sebagian besar karena memburuknya dinamika pandemi. Hal ini sebagian diimbangi oleh prospek jangka pendek yang lebih kuat di antara beberapa pasar negara berkembang pengekspor komoditas dan ekonomi berkembang. Ketenagakerjaan umumnya diperkirakan akan terus tertinggal dalam pemulihan output.

Forecast: The global economy is projected to grow 5.9 percent in 2021 (QW III) and 4.4 percent in 2022 (1.05 percentage points lower for 2021 compared to the July 2021 World Economic Outlook Update (WEO). The downgrade revision for 2021 reflects a downgrade for developed economies partly due to supply disruptions and for low-income developing countries, in large part due to deteriorating pandemic dynamics. This is partially offset by the stronger near-term outlook among some commodity-exporting emerging markets and emerging economies. Employment is generally expected to continue to lag behind in output recovery.

Di luar tahun 2022, pertumbuhan global diproyeksikan moderat menjadi sekitar 3,3 persen dalam jangka menengah. Output ekonomi maju diperkirakan melebihi proyeksi jangka menengah pra-pandemi sebagian besar mencerminkan antisipasi dukungan kebijakan lebih lanjut yang cukup besar di Amerika Serikat yang mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan potensi. Sebaliknya, kerugian produksi yang terus-menerus diantisipasi untuk pasar negara berkembang dan kelompok ekonomi berkembang karena peluncuran vaksin yang lebih lambat dan umumnya lebih sedikit dukungan kebijakan dibandingkan dengan ekonomi maju.

Beyond 2022, global growth is projected to moderate to around 3.3 percent in the medium term. Advanced economic output is forecast to exceed the pre-pandemic medium-term projections largely reflecting the anticipation of considerable further policy support in the United States that includes measures to boost potential. In contrast, ongoing production losses are anticipated for emerging markets and emerging economy groups due to slower vaccine rollouts and generally less policy support compared to developed economies.

Analisis Perekonomian Nasional

Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Pertumbuhan ekonomi dunia 2021 diprakirakan meningkat dengan pemulihan ekonomi di *Advanced Economies* (AEs), khususnya AS, yang kuat didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan yang sangat besar. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di *Emerging Market and Developing Economies* (EMDEs), kecuali Tiongkok, secara

National Economic Analysis

The improvement in the global economy in 2021 will continue, although unevenly, with continued financial market uncertainty. World economic growth in 2021 is predicted to accelerate with economic recovery in the Advanced Economies (AEs), particularly the US, which is supported by accelerated vaccinations and very large policy stimulus. Meanwhile, economic growth in Emerging Market and Developing Economies (EMDEs), except for China, generally continued to improve, but not as fast as the recovery

umum melanjutkan perbaikan, namun tidak secepat proses pemulihan di AEs. Ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut sejalan dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan *tapering the Fed*, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi. Lebih lanjut, pandemi menimbulkan 7 (tujuh) hal penting yang perlu diwaspadai dan diantisipasi agar proses pemulihan perekonomian global dari dampak pandemi Covid-19 terus berlangsung, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang telah membaik dan tetap terjaga.

Proses pemulihan ekonomi nasional terus berlangsung dengan stabilitas yang tetap terjaga. Proses pemulihan perekonomian domestik pada 2021 masih terpengaruh oleh berlanjutnya pandemi Covid-19. Merebaknya Covid-19 varian Delta pada triwulan III 2021 menahan proses pemulihan ekonomi Indonesia. Kinerja ekonomi diprakirakan meningkat pada triwulan IV 2021 didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan meredanya penyebaran Covid-19, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, stimulus kebijakan yang berlanjut, dan kinerja ekspor yang tetap kuat. Dengan perkembangan tersebut, ekonomi indonesia tumbuh sebesar 3.69% lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 2,07%. Pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5%. Sementara itu, stabilitas eksternal terjaga tercermin dari peningkatan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2021, didukung oleh surplus transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial. Sejalan dengan kinerja NPI, nilai tukar Rupiah terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Inflasi tercatat rendah di tengah permintaan domestik yang mulai meningkat, stabilitas nilai tukar yang terjaga, dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam mengarahkan ekspektasi inflasi. Stabilitas sistem keuangan tetap baik dengan fungsi intermediasi yang meningkat. Perekonomian Indonesia diprakirakan meningkat lebih tinggi pada 2022 sejalan dengan membaiknya permintaan domestik, dengan stabilitas eksternal yang tetap terjaga, inflasi yang terkendali, dan stabilitas sistem keuangan yang tetap baik.

process in AEs. Global financial market uncertainty continues in line with emerging risks, including the increased spread of the Delta variant of the Covid-19 virus, market anticipation for the Fed's tapering policy, and concerns that inflationary pressures will last longer due to supply chain disruptions and energy constraints. Furthermore, the pandemic raises 7 (seven) important things that need to be watched out for and anticipated so that the global economic recovery process from the impact of the Covid-19 pandemic continues, with macroeconomic and financial system stability that has improved and is maintained.

The process of national economic recovery continues with maintained stability. The domestic economic recovery process in 2021 is still affected by the ongoing Covid-19 pandemic. The outbreak of the Delta variant of Covid-19 in the third quarter of 2021 hampered the process of Indonesia's economic recovery. Economic performance is predicted to improve in the fourth quarter of 2021, supported by continued mobility in line with the acceleration of vaccination and the easing of the spread of Covid-19, the opening of wider economic sectors, continued policy stimulus, and export performance that remains strong. With these developments, the Indonesian economy grew by 3.69%, higher than the 2020 achievement of 2.07%. Economic growth in 2022 is predicted to increase to the range of 4.7-5.5%. Meanwhile, external stability was maintained as reflected in the increase in Indonesia's Balance of Payments (BOP) surplus in 2021, supported by the current account surplus and the capital and financial account. In line with BOP performance, the Rupiah exchange rate was under control, supported by Bank Indonesia's stabilization policy. Inflation was recorded at a low level in the midst of increasing domestic demand, maintained exchange rate stability, and the consistency of Bank Indonesia's policies in guiding inflation expectations. The stability of the financial system remains good with the intermediary function improving. The Indonesian economy is predicted to accelerate further in 2022 in line with improving domestic demand, with maintained external stability, controlled inflation, and sound financial system stability.

Analisis Perekonomian Riau

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Riau pada triwulan IV 2021 tumbuh tinggi dan melanjutkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2021. Namun demikian, pertumbuhan pada triwulan akhir 2021, melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu tumbuh sebesar 3,81% (yoy). Perlambatan lebih didorong deselerasi pertumbuhan harga komoditas sehingga kinerja ekspor luar negeri menurun. Secara keseluruhan tahun 2021, seluruh elemen perekonomian mengalami peningkatan kinerja. Perekonomian Riau pada tahun 2021 tumbuh 3,36% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang terkontraksi 1,12% (yoy). Permintaan tinggi selama tahun 2021 terhadap komoditas utama Riau yaitu CPO dan pulp & paper, berdampak luas terhadap ekspor, investasi, maupun konsumsi domestik di Riau.

Keuangan Pemerintah

Implementasi elektronifikasi keuangan pemerintah daerah meningkatkan efisiensi dan percepatan penyerapan anggaran. Pada triwulan IV 2021, realisasi APBD Provinsi Riau secara umum tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan belanja daerah didukung oleh meningkatnya realisasi belanja modal dan belanja transfer. Sementara itu, dari sisi penerimaan, berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan daya beli masyarakat mendorong realisasi pendapatan Provinsi Riau sehingga mencatatkan pertumbuhan positif. Meningkatnya realisasi penerimaan tidak terlepas dari perbaikan daya beli masyarakat, mengingat sebagian sumber pajak daerah berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Provinsi Riau pada triwulan IV 2021 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara spasial, tekanan inflasi tertinggi terjadi di Kota Dumai, diikuti oleh Kota Pekanbaru dan Kota Tembilahan. Realisasi inflasi Provinsi Riau sepanjang tahun 2021 sebesar 1,54% lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2020 sebesar 2,42% (yoy). Penurunan tekanan inflasi secara tahunan dipengaruhi oleh penurunan tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kesehatan; rekreasi, olahraga, dan budaya; pendidikan; dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Penurunan tekanan inflasi tahunan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan tekanan inflasi pada kelompok pakaian dan alas kaki; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga; transportasi; informasi, komunikasi, dan keuangan; dan penyediaan makanan dan minuman/ restoran.

Riau Economic Analysis

Regional Macroeconomic Development

Riau's economy in the fourth quarter of 2021 grew high and continued a positive growth trend throughout 2021. However, growth in the final quarter of 2021 slowed compared to the previous quarter, which grew by 3.81% (yoy). The slowdown was driven more by the deceleration of commodity price growth so that the performance of foreign exports declined. Overall in 2021, all elements of the economy will experience an increase in performance. Riau's economy in 2021 will grow by 3.36% (yoy), higher than in 2020 which contracted 1.12% (yoy). High demand during 2021 for Riau's main commodities, namely CPO and pulp & paper, has a broad impact on exports, investment, and domestic consumption in Riau.

Government Finance

The implementation of local government financial electronification increases efficiency and accelerates budget absorption. In the fourth quarter of 2021, the realization of the Riau Province APBD in general was higher than the realization in the same period the previous year. The increase in regional spending was supported by increased realization of capital expenditures and transfer spending. Meanwhile, from the revenue side, the continued economic recovery and improvement in people's purchasing power have pushed the realization of Riau Province's income so that it recorded positive growth. The increase in revenue realization is inseparable from the improvement in people's purchasing power, considering that some local tax sources come from receipts of Motor Vehicle Tax (PKB), Motor Vehicle Transfer Fee (BBNKB), and Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB).

Regional Inflation Development

Riau Province inflation in the fourth quarter of 2021 was recorded lower than the previous quarter. Spatially, the highest inflationary pressure occurred in Dumai City, followed by Pekanbaru City and Tembilahan City. The realization of inflation in Riau Province throughout 2021 was 1.54% lower than inflation in 2020 of 2.42% (yoy). The decrease in inflationary pressure on an annual basis was influenced by the decrease in inflationary pressure in the food, beverage and tobacco categories; health; recreation, sports, and culture; education; and personal care and other services. The deeper decline in annual inflationary pressures was restrained by rising inflationary pressures in the clothing and footwear category; housing, water, electricity, and fuel; household supplies, equipment, and maintenance; transportation; information, communication, and finance; and provision of food and beverages/restaurants.

Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kinerja pembiayaan daerah di Provinsi Riau tercatat menunjukkan perbaikan seiring pemulihan aktivitas ekonomi. Ketahanan sektor korporasi dan rumah tangga secara umum tercatat membaik di tengah aktivitas dunia usaha dan mobilitas masyarakat yang meningkat. Lebih lanjut, fungsi intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau turut membaik pada triwulan IV 2021. Perbaikan tercermin pada akselerasi kinerja penyaluran kredit perbankan yang disertai dengan penurunan risiko kredit. Kendati permintaan kredit mulai meningkat, likuiditas perbankan Riau terpantau masih longgar. Hal ini menunjukkan masih terdapat ruang yang cukup lebar bagi perbankan untuk mendorong ekspansi kredit dan pembiayaan, terutama kepada dunia usaha di tengah meningkatnya kegiatan ekonomi.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Sejalan dengan perekonomian Riau yang tumbuh positif pada triwulan IV 2021, penyelenggaraan sistem pembayaran di Provinsi Riau terpantau mengalami peningkatan. Aliran uang kartal melalui Bank Indonesia tercatat mengalami net outflow sebesar Rp 5,86 triliun. Demikian pula untuk perkembangan penyelesaian transaksi ritel yang diproses melalui SKNBI mencapai Rp 3,18 triliun, tercatat membaik dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Lebih lanjut, penyelesaian transaksi nilai besar yang diproses melalui BI RTGS mengalami peningkatan. Peningkatan ini juga diikuti oleh peningkatan rerata nilai transaksi per warkat, yang mengindikasikan transaksi oleh sektor industri yang meningkat. Dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem pembayaran sekaligus menjaga ketersediaan uang yang layak edar di masyarkat, Bank Indonesia telah melakukan layanan perkasan langsung kepada masyarakat dan terus mendorong program elektronifikasi pembayaran. Selain efisiensi, elektronifikasi juga dirancang untuk mendorong inklusi keuangan. Untuk itu Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, berusaha meningkatkan elektronifikasi transaksi Pemda khususnya untuk penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Riau pada trwiulan IV 2021 menunjukkan perbaikan sejalan dengan pemulihan perekonomian Riau. Perbaikan tersebut tercermin dari kenaikan indikator penggunaan tenaga kerja serta menurunnya persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan perbaikan penyerapan tenaga kerja, kondisi

Regional Financing and Development of Access to Finance and MSMEs

The performance of regional financing in Riau Province has shown improvement in line with the recovery of economic activity. In general, the resilience of the corporate and household sectors was noted to improve amidst business activity and increasing community mobility. Furthermore, the banking intermediation function in Riau Province was also observed to improve in the fourth quarter of 2021. Improvements were reflected in the acceleration of bank lending performance accompanied by a reduction in credit risk. Although demand for credit has begun to increase, Riau's banking liquidity is still loose. This shows that there is still ample room for banks to encourage credit and financing expansion, especially to the business world in the midst of increasing economic activity.

Payment System Operation and Rupiah Money Management

In line with the Riau economy which grew positively in the fourth quarter of 2021, the implementation of the payment system in Riau Province was observed to have increased. The flow of currency through Bank Indonesia recorded a net outflow of Rp 5.86 trillion. Likewise, the development of retail transaction settlements processed through the SKNBI reached Rp 3.18 trillion, an improvement compared to the same quarter the previous year. Furthermore, the settlement of large value transactions processed through the BI RTGS has increased. This increase was also followed by an increase in the average value of transactions per script, which indicates an increase in transactions by the industrial sector. In order to improve the efficiency of the payment system while at the same time maintaining the availability of money suitable for circulation in the community, Bank Indonesia has provided cash services directly to the public and continues to encourage the payment electronification program. In addition to efficiency, electronification is also designed to encourage financial inclusion. For this reason, Bank Indonesia, together with regional governments and related parties, are trying to increase the electronification of regional government transactions, especially for revenues originating from taxes and levies.

Employment and Welfare

The employment condition of Riau Province in the fourth quarter of 2021 showed improvement in line with the recovery of the Riau economy. This improvement is reflected in an increase in indicators for the use of labor and a decrease in the percentage of the Open Unemployment Rate (TPT) compared to the same period in the previous year. In line with the improvement in employment, welfare conditions in Riau Province have also improved. This is confirmed by

kesejahteraan di Provinsi Riau juga turut membaik. Hal ini terkonfirmasi dari penurunan persentase penduduk miskin pada September 2021. Lebih lanjut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang tercermin pada Gini Ratio dan persentase pengeluaran penduduk 40% terbawah berada pada level yang relatif rendah. Di sisi lain, kenaikan harga TBS sebagai dampak apresiasi harga CPO global turut mendorong kesejahteraan di wilayah pedesaan sebagaimana tercermin dari peningkatan nilai tukar petani.

Prospek Perekonomian Daerah

Proses pemulihan global dan domestik yang masih berlanjut, mendorong akselerasi ekonomi Riau pada tahun 2022. Sejumlah lembaga internasional memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia yang positif akan berlanjut pada tahun 2022. Permintaan global diyakini akan mendorong ekspor dan sektor-sektor utama Riau, khususnya perkebunan serta industri pengolahan. Selain itu, sektor Pertambangan dan Penggalian diperkirakan akan tumbuh membaik didorong peningkatan aktivitas eksplorasi Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak Agustus 2021. Lebih lanjut, inflasi Riau pada tahun 2022 diperkirakan terjaga pada level yang rendah dan berada pada kisaran target inflasi nasional 3,0% ± 1% (yoy), yang didukung oleh koordinasi yang kuat dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Analisis Perekonomian Kepulauan Riau

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan IV 2021 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan mobilitas dan aktivitas masyarakat, serta kegiatan dunia usaha. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepri tercatat Rp47.439,27 miliar (ADHK) atau tumbuh sebesar 5,27% (yoy), menguat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,97% (yoy) dan secara keseluruhan tahun 2021 tumbuh sebesar 3,43% (yoy).

Perkembangan Inflasi Daerah

Pada triwulan IV 2021 inflasi Provinsi Kepri tercatat 2,26% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,07% (yoy) seiring dengan peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat setelah sempat tertahan pada bulan Juli - Agustus. Inflasi pada triwulan IV 2021 terutama dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok transportasi khususnya tarif angkutan udara, dan peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang terutama didorong peningkatan harga minyak goreng, cabai rawit, dan telur ayam ras.

the decrease in the percentage of poor people in September 2021. Furthermore, the level of inequality in population expenditure as reflected in the Gini Ratio and the percentage of expenditure of the lowest 40% of the population is at a relatively low level. On the other hand, the increase in FFB prices as a result of the appreciation of global CPO prices has also boosted welfare in rural areas as reflected in the increase in farmer exchange rates.

Regional Economic Prospect

The ongoing global and domestic recovery process will encourage Riau's economic acceleration in 2022. A number of international institutions predict that positive world economic growth will continue in 2022. Global demand is believed to boost exports and Riau's main sectors, particularly plantations and industry. processing. In addition, the Mining and Quarrying sector is expected to grow better driven by increased exploration activities of Pertamina Hulu Rokan (PHR) since August 2021. Furthermore, Riau's inflation in 2022 is estimated to be maintained at a low level and within the national inflation target range of 3.0% ± 1% (yoy), supported by strong coordination from the Regional Inflation Control Team (TPID).

Kepulauan Riau Economic Analysis

Regional Macroeconomic Development

The economy of the Riau Islands Province in the fourth quarter of 2021 grew higher than the previous quarter in line with increased mobility and community activities, as well as business activities. The Riau Islands Province's Gross Regional Domestic Product (GRDP) was recorded at IDR 47,439.27 billion (ADHK) or grew by 5.27% (yoy), strengthened compared to the previous quarter of 2.97% (yoy) and overall in 2021 it grew by 3 ,43% (yoy).

Regional Inflation Development

In the fourth quarter of 2021, Riau Islands Province inflation was recorded at 2.26% (yoy), an increase compared to the previous quarter of 2.07% (yoy) in line with increased activity and community mobility after being held back in July - August. Inflation in the fourth quarter of 2021 was mainly influenced by the increase in inflation in the transportation group, especially air freight fares, and the increase in prices in the food, beverage and tobacco category, which was mainly driven by the increase in the prices of cooking oil, cayenne pepper, and chicken eggs.

Keuangan Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada triwulan IV 2021 didorong oleh akselerasi pada komponen utama yakni konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan net ekspor. Komponen konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 0,46% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -0,72% (yoy), sejalan dengan membaiknya permintaan masyarakat. Selain itu, komponen konsumsi pemerintah juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,13% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -19,04% (yoy) yang didorong oleh peningkatan realisasi belanja utamanya belanja modal. Sejalan dengan pemulihan ekonomi di negara mitra dagang utama, kinerja net ekspor Provinsi Kepri mengalami akselerasi dan mencatatkan pertumbuhan sebesar 32,40% (yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,70% (yoy).

Government Finance

The Riau Islands Province's economic growth in the fourth quarter of 2021 was driven by acceleration in the main components, namely household consumption, government consumption and net exports. The household consumption component grew by 0.46% (yoy), accelerating from -0.72% (yoy) in the previous quarter, in line with improving public demand. In addition, the government consumption component also grew by 1.13% (yoy), an increase compared to the previous quarter which contracted by -19.04% (yoy), driven by an increase in realized expenditures, primarily capital expenditures. In line with the economic recovery in major trading partner countries, the Riau Islands Province's net export performance accelerated and recorded growth of 32.40% (yoy), much higher than the previous quarter which grew by 19.70% (yoy).

Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), kebijakan pelonggaran pembatasan mobilitas sejalan dengan penurunan kasus Covid-19 serta adanya momentum akhir tahun menjadi pendorong ekonomi Provinsi Kepri pada triwulan IV 2021. Perbaikan ekonomi di negara mitra dagang juga turut pendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2021. Percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri utamanya didorong penguatan pada LU utama khususnya LU industri pengolahan, LU perdagangan, dan pertambangan dan penggalian. Pada saat yang sama LU konstruksi justru tercatat mengalami perlambatan.

Employment And Welfare

In terms of the Business Field (LU), the policy of easing mobility restrictions in line with the decline in Covid-19 cases and the end of the year momentum became the economic driver for the Riau Islands Province in the fourth quarter of 2021. Economic improvements in trading partner countries also contributed to economic growth in the fourth quarter of 2021. The acceleration of economic growth in the Riau Islands Province is mainly driven by the strengthening of the main foreign trade fields, especially the processing industry sector, trade sector, and mining and quarrying sector. At the same time, the construction sector was recorded as experiencing a slowdown.

Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah

Realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sampai triwulan IV 2021 mengalami penurunan dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan Pemda di wilayah Provinsi Kepri sampai dengan triwulan IV 2021 (atau secara keseluruhan tahun 2021) tercatat sebesar 95,33%, sementara realisasi belanja mencapai 87,15% dari total anggaran. Pencapaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan realisasi pendapatan dan belanja tahun lalu yang tercatat masing-masing sebesar 99,77% dan 91,94%. Penurunan realisasi terjadi karena faktor perkembangan kasus Covid-19 yang masih tinggi sehingga terjadi penurunan penerimaan pada pos pendapatan asli daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, dan realisasi belanja pemerintah.

Realization of Regional Income and Expenditure

The realization of Regional Government (Pemda) revenues and expenditures in the Riau Islands Province (Kepri) until the fourth quarter of 2021 decreased compared to the same quarter in the previous year. Realization of local government revenues in the Riau Islands Province until the fourth quarter of 2021 (or 2021 as a whole) was recorded at 95.33%, while expenditure realization reached 87.15% of the total budget. This achievement is lower than last year's realization of revenues and expenditures which were recorded at 99.77% and 91.94%, respectively. The decline in realization occurred due to the development of Covid-19 cases, which was still high, resulting in a decrease in receipts from regional original income (PAD), central government transfers, and realization of government spending.

Stabilitas Sistem Keuangan

Sejalan pertumbuhan ekonomi yang membaik, kinerja perbankan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada triwulan IV 2021 mengalami perbaikan yang tercermin dari penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek yang

Financial System Stability

In line with improving economic growth, banking performance in the Riau Islands Province (Kepri) in the fourth quarter of 2021 experienced an improvement as reflected in credit distribution based on project locations which grew to

tumbuh meningkat menjadi 16,53% (yoy). Lebih lanjut, jumlah dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 8,53% (yoy), meningkat dari sebelumnya yang tumbuh 5,07% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, Loan to Deposit Rasio (LDR) Kepri pada triwulan IV 2021 meningkat menjadi sebesar 93,22%, dari triwulan sebelumnya sebesar 88,15%. Di sisi lain, kualitas penyaluran kredit mengalami perbaikan, tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang mengalami penurunan menjadi sebesar 3,26%.

16.53% (yoy). Furthermore, the amount of third party funds (TPF) grew by 8.53% (yoy), an increase from the previous growth of 5.07% (yoy). With these developments, the Riau Islands Loan to Deposit Ratio (LDR) in the fourth quarter of 2021 increased to 93.22%, from 88.15% in the previous quarter. On the other hand, the quality of credit disbursement has improved, as reflected in the Non Performing Loan (NPL) ratio which has decreased to 3.26%.

Peningkatan Pembayaran Transaksi Non Tunai

Aktivitas transaksi pembayaran tunai pada triwulan IV 2021 tercatat mengalami penurunan ditandai dengan net outflow sebesar Rp1,89 triliun atau tumbuh sebesar 7,72% (yoy), Demikian halnya, transaksi nontunai melalui RTGS tercatat mencapai Rp46,8 triliun atau tumbuh sebesar 55,91% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp36,9 triliun (yoy). Serta transaksi nontunai melalui SKNBI yang terkontraksi sebesar 13,03% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 19,81% (yoy). Nilai transaksi SKNBI meningkat dari Rp2,40 triliun pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp2,60 triliun. Selain itu, transaksi penggunaan APMK baik debet maupun kredit, transaksi UE, serta transaksi QRIS mengalami peningkatan pada triwulan IV 2021.

Increased Non-Cash Transaction Payments

Cash payment transaction activities in the fourth quarter of 2021 recorded a decline, marked by a net outflow of Rp. 1.89 trillion, or grew by 7.72% (yoy). Likewise, non-cash transactions through RTGS were recorded at Rp. 46.8 trillion, or grew by 55.91. % (yoy), higher than the previous quarter of Rp36.9 trillion (yoy). As well as non-cash transactions through SKNBI which contracted by 13.03% (yoy), higher than the previous quarter which contracted 19.81% (yoy). The value of SKNBI transactions increased from Rp. 2.40 trillion in the previous quarter to Rp. 2.60 trillion. In addition, transactions using APMK both debit and credit, EU transactions, and QRIS transactions have increased in the fourth quarter of 2021.

Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau (Provinsi Kepri) pada Agustus 2021 tercatat mengalami perbaikan dibandingkan posisi Agustus 2020. Hal ini ditunjukkan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Agustus 2021 sebesar 9,91%, menurun dibandingkan periode Agustus 2020 sebesar 10,34%. Pada saat yang sama jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja pada Agustus 2021 berjumlah 1.087.419 orang, meningkat dibandingkan dengan periode Agustus 2020 yang berjumlah 1.016.600 orang. Secara spasial, TPT di wilayah perdesaan mengalami penurunan lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan yang menunjukkan aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan telah mengalami pemulihan. Selain itu, NTP pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 106,20 lebih baik dari triwulan sebelumnya sebesar 105,02. Perbaikan tersebut terjadi seiring peningkatan Indeks yang diterima (It) petani yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks yang Dibayar (Ib) petani. Kenaikan It terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual komoditas dan peningkatan hasil panen.

Public welfare

Employment conditions in the Riau Islands Province (Kepri Province) in August 2021 recorded an improvement compared to the position in August 2020. This is indicated by the Open Unemployment Rate (TPT) in the August 2021 period of 9.91%, a decrease compared to the August 2020 period of 10.34 %. At the same time, the number of Working Forces in August 2021 was 1,087,419 people, an increase compared to the August 2020 period which amounted to 1,016,600 people. Spatially, TPT in rural areas experienced a greater decline than urban areas, indicating that economic activity in rural areas had recovered. In addition, the NTP in the fourth quarter of 2021 was recorded at 106.20, better than the previous quarter of 105.02. This improvement occurred in line with the increase in the Received Index (It) of farmers which was higher than the increase in the Paid Index (Ib) of farmers. The increase in IT was mainly due to an increase in commodity selling prices and an increase in crop yields.

Prospek Perekonomian Daerah

Secara keseluruhan tahun 2022, perekonomian Kepri diperkirakan mengalami perbaikan yang didorong oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas usaha seiring terkendalinya kasus Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kepri diperkirakan akan ditopang oleh komponen

Regional Economic Prospect

Overall in 2022, the Riau Islands economy is expected to improve, driven by increased mobility and business activities in line with the control of Covid-19 cases. Riau Islands economic growth is expected to be supported by an increasing investment component in line with improved

investasi yang meningkat seiring kinerja net ekspor yang membaik pada sisi pengeluaran serta peningkatan pertumbuhan LU industri pengolahan, LU konstruksi, dan LU perdagangan pada sisi lapangan usaha. Dukungan belanja pemerintah melalui penyaluran bansos akan turut menjaga daya beli masyarakat dan memberikan berdampak terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga. Selain itu, dalam mendorong perkembangan pariwisata khususnya menarik kedatangan wisata mancanegara, travel *bubble* antara Singapura dan Batam-Bintan telah disepakati oleh kedua negara pada 24 Januari 2022.

net export performance on the expenditure side as well as increased growth in the manufacturing sector, construction sector and trade sector on the business side. Support for government spending through the distribution of social assistance will help maintain people's purchasing power and have an impact on increasing household consumption. In addition, in encouraging tourism development, especially attracting foreign tourist arrivals, the travel bubble between Singapore and Batam-Bintan was agreed upon by the two countries on January 24, 2022.

Tekanan inflasi Provinsi Kepri pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sejalan dengan membaiknya permintaan masyarakat. Membaiknya kinerja lapangan usaha utama akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong laju konsumsi. Sementara itu, pasokan bahan pangan diperkirakan masih terjaga normal meskipun terdapat risiko "*La Nina*" pada awal tahun yang dapat meningkatkan risiko penurunan pasokan pangan dan pergeseran musim tanam. Rencana peningkatan harga sembako oleh beberapa perusahaan *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) juga akan mendorong peningkatan inflasi di Provinsi Kepri.

Inflationary pressure in Riau Islands Province as a whole in 2022 is estimated to be higher than in 2021 in line with improving public demand. The improvement in the performance of the main business fields will encourage an increase in people's income and encourage the rate of consumption. Meanwhile, food supply is expected to remain normal despite the risk of a "La Nina" at the beginning of the year which could increase the risk of a decline in food supply and a shift in the growing season. The plan to increase the price of basic necessities by several Fast Moving Consumer Goods (FMCG) companies will also encourage an increase in inflation in the Riau Islands Province.

Analisis Industri Perbankan

Kinerja Bank Umum Konvensional secara nasional menunjukkan perbaikan, ditandai dengan kredit yang mulai tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya disertai DPK yang masih terus tumbuh meskipun dengan pace yang melambat. Kondisi likuiditas juga terpantau memadai tercermin dari rasio LDR 79,11% dan masih berada dalam threshold (78%- 92%) sedangkan rasio AL/NCD dan AL/DPK juga cukup tinggi yaitu masing-masing 152,71% dan 33,65%, atau jauh di atas threshold 50% dan 10%. Ketahanan BUK juga cukup solid dengan tingkat permodalan yang cukup tinggi. Namun demikian, perlu diperhatikan risiko kredit BUK yang masih tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Banking Industry Analysis

The performance of Conventional Commercial Banks nationally showed improvement, indicated by credit which began to grow compared to the previous year, accompanied by deposits that continued to grow even though the pace was slowing. Liquidity conditions are also adequately monitored, reflected in the LDR ratio of 79.11% and still within the threshold (78%-92%) while the LA/NCD and LA/DPK ratios are also quite high at 152.71% and 33.65%, respectively. , or well above the 50% and 10% thresholds. The resilience of BUK is also quite solid with a fairly high level of capital. However, it should be noted that BUK credit risk is still recorded to increase compared to the previous year.

Pertumbuhan Aset juga menunjukkan penurunan sebesar 7,25% (yoy), melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 8,68% (yoy). Perlambatan pertumbuhan aset seiring dengan perlambatan pertumbuhan DPK dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan kelompok bank, perlambatan pertumbuhan aset terjadi pada semua kelompok Bank kecuali kelompok Bank BUSN. Kelompok Bank BUSN yang merupakan kelompok Bank dengan porsi terbesar kedua (42,61%), tercatat tumbuh 8,64% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 6,38% (yoy).

Asset growth also showed a decline of 7.25% (yoy), slower than the previous year's growth of 8.68% (yoy). The slowdown in asset growth was in line with the slower growth in deposits compared to the previous year. Based on bank group, the slowdown in asset growth occurred in all bank groups except for the BUSN bank group. The BUSN Bank group, which is the bank group with the second largest portion (42.61%), recorded a growth of 8.64% (yoy), an increase compared to the previous year which grew 6.38% (yoy).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber utama pendanaan bank yaitu mencapai 91,92% dari total kewajiban Bank, diikuti pinjaman yang diterima (3,04%). Pada periode laporan, DPK BUK tumbuh 7,61% (yoy), melambat dibanding tahun sebelumnya sebesar 12,70% (yoy). Sementara pinjaman yang diterima terkontraksi -19,90% (yoy) yang mengindikasikan bahwa perbankan mengurangi sumber pendanaan lain karena berlebihnya likuiditas dari DPK.

Third Party Funds (TPF) are the main source of bank funding, reaching 91.92% of the Bank's total liabilities, followed by loans received (3.04%). During the reporting period, BUK deposits grew 7.61% (yoy), slower than the previous year's 12.70% (yoy). Meanwhile, loans received contracted by -19,90% (yoy) indicating that banks are reducing other funding sources due to excess liquidity from deposits.

Seiring dengan turunnya DPK, bank juga meningkatkan penyaluran dananya pada pinjaman/kredit yang diberikan maupun penempatan dananya pada Bank Indonesia. Sebagian besar (57,75%) dana perbankan disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga bukan bank diikuti penempatan dalam bentuk surat berharga (18,10%) dan penempatan pada Bank Indonesia (10,65%). Sejalan dengan mulai meningkatnya penyaluran kredit dibandingkan tahun sebelumnya, penempatan bank pada surat berharga dan pada Bank Indonesia tercatat mulai melambat, masing-masing dari 33,80% (yoy) dan 27,09% (yoy) menjadi masing- masing 28,97% dan 18,30% (yoy).

Along with the decline in third party funds, banks also increased their distribution of funds in loans/credits provided and their placements with Bank Indonesia. Most (57.75%) of banking funds were disbursed in the form of credit to non-bank third parties, followed by placements in securities (18.10%) and placements with Bank Indonesia (10.65%). In line with the increase in lending compared to the previous year, bank placements in marketable securities and with Bank Indonesia began to slow, from 33.80% (yoy) and 27.09% (yoy) to 28.97%, respectively. and 18.30% (yoy).

Pada September 2021, rentabilitas BUK tercatat membaik dengan meningkatnya ROA perbankan sebesar 15 bps menjadi 1,91% dari 1,76% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ROA didorong oleh laba sebelum pajak yang tumbuh 16,17% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi -24,28% (yoy), sementara rerata total aset tercatat stabil.

In September 2021, BUK's profitability was recorded to improve with an increase in banking ROA by 15 bps to 1.91% from 1.76% in the same period the previous year. The increase in ROA was driven by profit before tax which grew 16.17% (yoy) after contracting -24.28% (yoy) in the previous year, while the average total assets were stable.

Sementara itu, efisiensi BUK juga tercatat membaik tercermin dari rasio BOPO yang tercatat turun menjadi 83,68% dari 86,15% pada tahun sebelumnya. Secara umum, perbaikan efisiensi BUK disebabkan oleh meningkatnya pendapatan operasional yang tumbuh 5,19% (yoy) atau jauh lebih tinggi dibandingkan 0,53% (yoy) pada tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan operasional tersebut juga dibarengi turunnya biaya operasional sebesar 2,17% (yoy) dari 7,59% (yoy) pada tahun sebelumnya. NIM juga tercatat meningkat menjadi 4,62% dari 4,41% seiring dengan pendapatan bunga bersih yang tumbuh 12,60% (yoy) setelah tahun sebelumnya terkontraksi sebesar -3,05% (yoy).

Meanwhile, BUK efficiency also improved as reflected in the BOPO ratio, which fell to 83.68% from 86.15% in the previous year. In general, the improvement in BUK efficiency was due to an increase in operating income which grew by 5.19% (yoy) or much higher than 0.53% (yoy) in the previous year. The increase in operating income was also accompanied by a decrease in operating costs by 2.17% (yoy) from 7.59% (yoy) in the previous year. NIM also recorded an increase to 4.62% from 4.41% in line with net interest income which grew by 12.60% (yoy) after the previous year's contraction of -3.05% (yoy).

Analisis Posisi Bank Riau Kepri Dalam Industri Perbankan

Perbandingan kinerja Bank Riau Kepri terhadap Bank Umum Kelas Usaha KBMI I dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) disajikan sebagai berikut.

Analysis of the Position of Bank Riau Kepri in the Banking Industry

The comparison of the performance of Bank Riau Kepri against Commercial Banks for Business Class KBMI I and Regional Development Banks (BPD) is presented as follows.

Tabel Kinerja Pertumbuhan Bank Riau Kepri Dibanding Rata-Rata Bank KBMI 1 dan BPD
Table of Growth Performance of Bank Riau Kepri Compared to the Average of KBMI 1 and BPD Banks

(dalam miliar Rupiah) | *(in billion Rupiahs)*

Kinerja	Bank Riau Kepri			Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I			Bank Pembangunan Daerah (BPD)			*Performance*
	Desember 2021	Desember 2020	Growth (YoY)	Desember 2021	*Desember 2020*	Growth (YoY)	Desember 2021	*Desember 2020*	Growth (YoY)	
Aset	30.780	28.200	9,15%	1.348.864	897.206	50,34%	821.803	763.879	7,58%	*Asset*
Kredit	18.885	18.961	-0,40%	693.732	539.011	28,70%	516.091	493.422	4,59%	*Credit*
DPK	25.616	22.143	15,68%	970.137	648.871	49,51%	681.607	590.602	15,41%	*TPF*
Laba Bersih	381	464	-17,89%	4.510	8.403	-46,33%	13.776	13.002	5,95%	*Net profit*

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan Desember 2021; Data Internal Bank Riau Kepri

Keterangan: *) Pengelompokan bank dikonversi menjadi KBMI menggunakan KBMI I, sementara data Desember 2020 menggunakan KBMI I.

Kinerja Bank Riau Kepri tahun 2021 dari sisi aset lebih baik dibandingkan BPD. Aset Bank Riau Kepri berhasil tumbuh 9,15%, lebih tinggi dibandingkan BPD sebesar 7,58%. Demikian pula dari sisi DPK berhasil tumbuh sebesar 15,68%.

The performance of Bank Riau Kepri in 2021 in terms of assets is better than BPD. Bank Riau Kepri's assets managed to grow 9.15%, higher than BPD's 7.58%. Likewise, in terms of deposits, it managed to grow by 15.68%.

Tabel Perbandingan Rasio Bank Riau Kepri Dibanding Rata-Rata Bank KBMI 1 dan BPD
Table Comparison of the Ratio of Bank Riau Kepri Compared to the Average Bank KBMI 1 and BPD

(dalam %) | *(In %)*

Kinerja	Bank Riau Kepri			Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) I			Bank Pembangunan Daerah (BPD)			*Performance*
	Desember 2021	Desember 2020	Growth (YoY)	Desember 2021	*Desember 2020*	Growth (YoY)	Desember 2021	*Desember 2020*	Growth (YoY)	
CAR	21,07	20,77	1,44%	29,11	24,57	18,48%	22,77	22,11	2,99%	*CAR*
ROA	1,93	2,54	-24,02%	0,60	1,31	-54,20%	2,03	2,04	-0,49%	*ROA*
NIM	4,64	5,32	-12,78%	3,70	4,57	-19,04%	5,72	5,72	0,00%	*NIM*
BOPO	77,23	73,54	5,02%	95,91	91,71	4,58%	79,38	80,6	-1,51%	*BOPO*
LDR	73,72	85,63	-13,91%	71,51	82,73	-13,56%	75,87	83,15	-8,76%	*LDR*
CASA	50,97	44,28	15,11%	48,07	43,37	10,84%	55,68	54,11	2,90%	*CASA*

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia – Otoritas Jasa Keuangan Desember 2021; Data Internal Bank Riau Kepri

Keterangan: *) Pengelompokan bank dikonversi menjadi KBMI menggunakan KBMI I, sementara data Desember 2020 menggunakan KBMI I.

Strategi Bank

Arah Kebijakan Bank

Dengan menjalankan misinya, Bank Riau Kepri berupaya mencapai sejumlah tujuan jangka pendek organisasi, yaitu:

a. Implementasi konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
b. Optimalisasi operasional produk dan layanan bank yang didukung dengan digitalisasi teknologi.
c. Pengendalian efisiensi, efektifitas dan optimalisasi penggunaan biaya .
d. Meningkatkan peran Sumber Daya Insani (SDI) dalam mendukung pencapaian kinerja Bank melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan pengembangan kultur positif.
e. Penguatan peran Bank dalam pengelolaan keuangan daerah.
f. Peningkatan komposisi CASA.
g. Peningkatan pembiayaan produktif dengan tetap memperhatikan prinsip prudential banking.
h. Pengelolaan kualitas pembiayaan yang sehat.
i. Implementasi *Governance-Risk-Compliance* (GRC) secara konsisten dan berkesinambungan.
j. Peran aktif Bank dalam implementasi keuangan berkelanjutan.

Program Transformasi BPD

Transformasi BPD yang dirancang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama-sama Kementerian Dalam Negeri dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yang bertujuan agar seluruh BPD mampu meningkatkan ketahanan usaha (*resilience*) dan memperkuat perannya sebagai agen pembangunan daerah dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Mei 2015, dengan visi transformasi BPD "Menjadi bank regional yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan". Kerangka program transformasi BPD disusun dengan lebih holistic dan seimbang dengan menekankan pentingnya fondasi (termasuk GCG) dan aspek pendukung (infrastruktur dan SDM) untuk menopang 3 (tiga) pilar proses transformasi termasuk aspek bisnis guna mencapai *outcome (destination statement)* transformasi BPD.

Bank Strategy

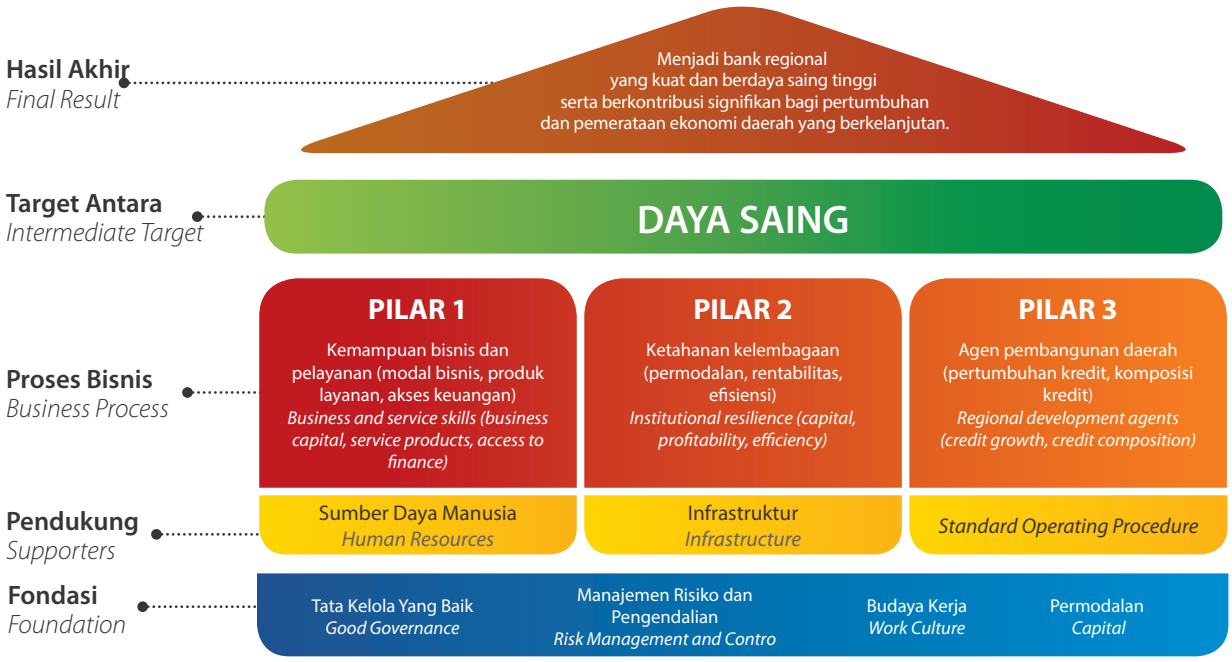
Bank Policy Direction

By carrying out its mission, Bank Riau Kepri seeks to achieve a number of short-term organizational goals, namely:

a. Implementation of the conversion into a Sharia Commercial Bank (BUS).
b. Optimizing the operation of bank products and services supported by digitalization of technology.
c. Controlling efficiency, effectiveness and optimizing the use of costs.
d. Increasing the role of Human Resources (HR) in supporting the achievement of the Bank's performance through increasing competence, professionalism, and developing a positive culture.
e. Strengthening the role of Banks in regional financial management.
f. Improved CASA composition.
g. Increasing productive financing while still paying attention to prudential banking principles.
h. Healthy financing quality management.
i. Implementation of Governance-Risk-Compliance (GRC) consistently and continuously.
j. The Bank's active role in the implementation of sustainable finance.

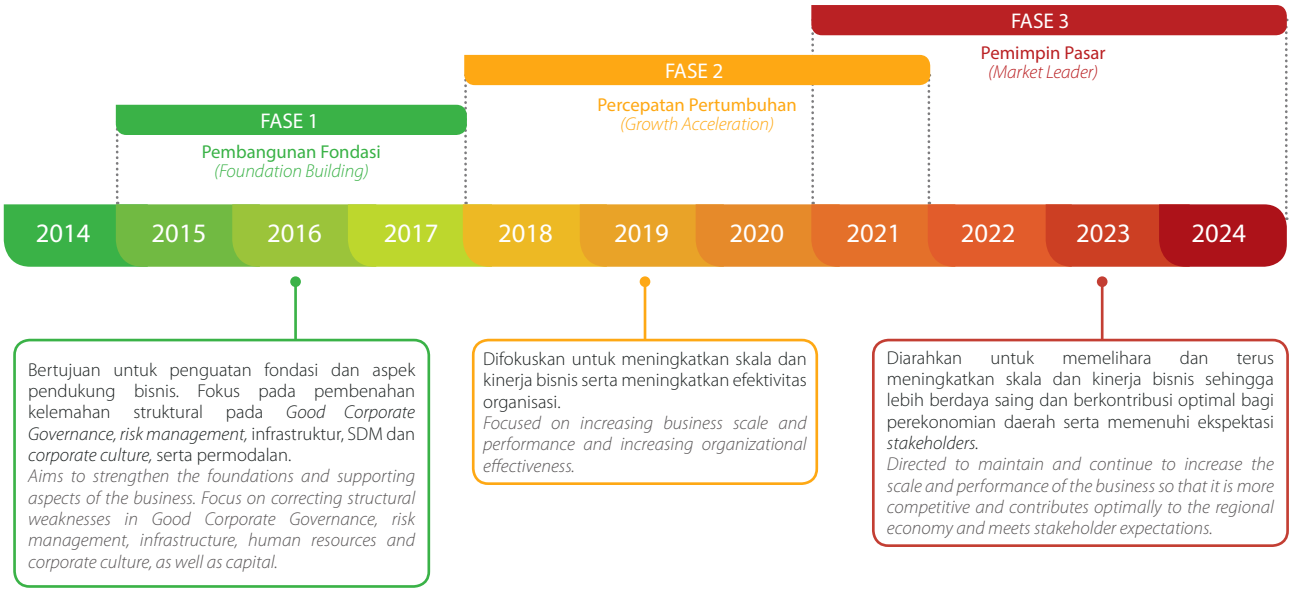
BPD Transformation Program

BPD transformation designed by the Financial Services Authority (OJK) together with the Ministry of Home Affairs and the Association of Regional Development Banks (Asbanda) with the aim that all BPDs are able to increase business resilience and strengthen their role as agents of regional development and inaugurated by the President of the Republic of Indonesia on 26 May 2015, with the vision of BPD transformation "To become a regional bank that is highly competitive and strong and contributes significantly to sustainable regional economic growth and equity". The BPD transformation program framework is structured in a more holistic and balanced manner by emphasizing the importance of foundations (including GCG) and supporting aspects (infrastructure and human resources) to support the 3 (three) pillars of the transformation process including business aspects in order to achieve the BPD transformation outcome (destination statement).



Adapun *roadmap* program transformasi BPD terbagi atas 3 (tiga) fase, yaitu:

The roadmap for the BPD transformation program is divided into 3 (three) phases:



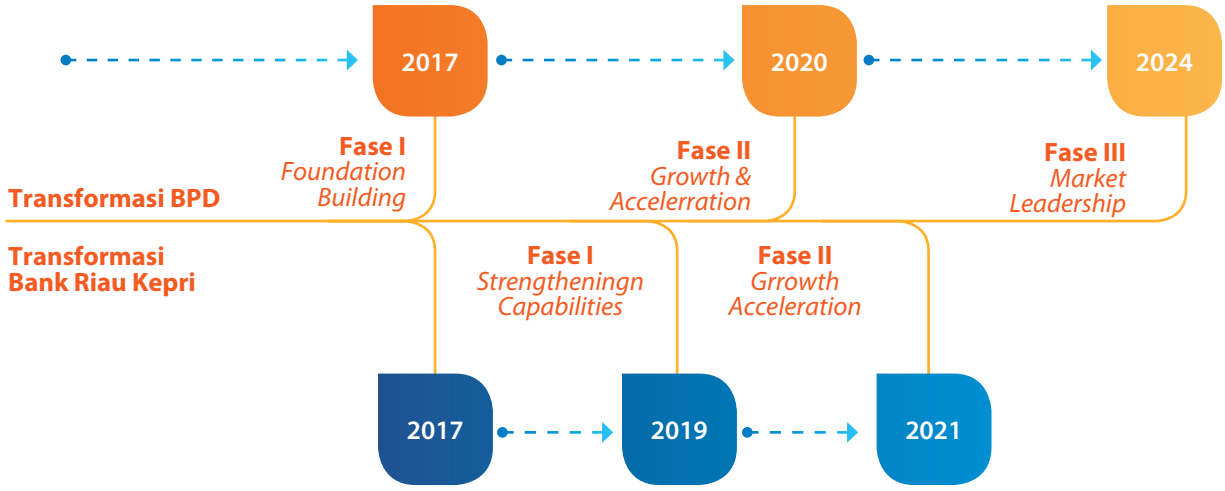
Bertujuan untuk penguatan fondasi dan aspek pendukung bisnis. Fokus pada pembenahan kelemahan struktural pada *Good Corporate Governance, risk management,* infrastruktur, SDM dan *corporate culture,* serta permodalan.
Aims to strengthen the foundations and supporting aspects of the business. Focus on correcting structural weaknesses in Good Corporate Governance, risk management, infrastructure, human resources and corporate culture, as well as capital.

Difokuskan untuk meningkatkan skala dan kinerja bisnis serta meningkatkan efektivitas organisasi.
Focused on increasing business scale and performance and increasing organizational effectiveness.

Diarahkan untuk memelihara dan terus meningkatkan skala dan kinerja bisnis sehingga lebih berdaya saing dan berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah serta memenuhi ekspektasi *stakeholders.*
Directed to maintain and continue to increase the scale and performance of the business so that it is more competitive and contributes optimally to the regional economy and meets stakeholder expectations.

Outcome (*Destination Statement*) Transformasi BPD merupakan milestone terukur dalam mencapai Visi baru yang dijabarkan sesuai 3 (tiga)Tema Transformasi BPD dan menjadi pedoman kerangka Transformasi Bank Riau Kepri yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Korporasi (*Corporate Plan*).

The Outcome (Destination Statement) of BPD Transformation is a measurable milestone in achieving the new Vision which is described in accordance with 3 (three) BPD Transformation Themes and becomes a guideline for the Bank Riau Kepri Transformation framework as outlined in the Corporate Long Term Plan.



Tahun 2021 merupakan titik awal menuju Fase III *roadmap* program transformasi BPD dan menjadi cerminan menuju Fase II transformasi Bank Riau Kepri, sehingga untuk mencapai *outcome* transformasi BPD sekaligus Bank Riau Kepri, maka Bank Riau Kepri menjabarkan mempersiapkan langkah-langkah strategis melalui Inisiatif Strategis tahun 2021 yang terbagi ke dalam 6 (enam) *workstream* transformasi BPD sebagai berikut :

1. *Workstream Strategic Group* BPD, antara lain :
   - Meningkatkan kemampuan permodalan melalui penyampaian proposal penambahan saham kepada pemegang saham
2. *Workstream* IT & MIS, antara lain :
   - Pemenuhan SLA & Standarisasi kerja, melalui :
     - Integrasi Pelaporan Kepada Otoritas
     - Pengembangan *e-los multi skim*
   - Penguatan teknologi informasi, melalui :
     - Konversi *corebanking system* konvensional ke BUS
3. *Workstream Governance, Risk, & Compliance*, antara lain :
   - Meningkatkan tata kelola dan kepatuhan yang efektif, melalui :
     - Implementasi Go AML-PPATK
     - Penyempurnaan Kebijakan Strategi Anti Fraud
4. *Workstream Human Capital & Culture* antara lain :
   - Mendorong Pengembangan Kompetensi Strategis, melalui :
     - Pendidikan Perbankan Syariah dalam rangka persiapan Konversi
     - Pengembangan Sistem *e-learning*
     - *Service & Culture Blueprint*

The year 2021 is the starting point for Phase III of the BPD transformation program roadmap and a reflection towards Phase II of the transformation of Bank Riau Kepri, so that in order to achieve the outcome of the transformation of BPD as well as Bank Riau Kepri, Bank Riau Kepri describes preparing strategic steps through the 2021 Strategic Initiative which divided into 6 (six) BPD transformation workstreams as follows:

1. *Workstream Strategic Group BPD, among others:*
   - *Increase capital capacity by submitting proposals for additional shares to shareholders*

2. *IT & MIS workstreams, including:*
   - *Fulfillment of SLA & work standardization, through:*
     - *Integration of Reporting to Authorities*
     - *Multi-skim e-lost development*
   - *Strengthening of information technology, through:*
     - *Conversion of conventional core banking system to BUS*
3. *Workstream Governance, Risk, & Compliance, including:*
   - *Improve effective governance and compliance, through:*
     - *Implementation of Go AML-PPATK*
     - *Improvement of the Anti-Fraud Strategy Policy*
4. *Human Capital & Culture Workstreams include:*
   - *Encouraging the Development of Strategic Competencies, through:*
     - *Sharia Banking Education in preparation for Conversion*
     - *Development of e-learning system*
     - *Service & Culture Blueprint*

5. *Workstream Product & Services* antara lain :
   - Menguatnya peran Bank sebagai Agen Pembangunan Daerah, melalui :
     - Implementasi Kredit/Pembiayaan MKM khususnya pada Sektor Prioritas Pemerintah dan KUR.
   - Meningkatkan Inovasi Produk dan layanan sesuai kebutuhan segmen, melalui:
     - Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
     - Pengembangan Aplikasi e-samsat
     - Pengembangan Aplikasi Layanan PBB Kolektif
   - Meningkatkan kepuasan nasabah, melalui :
     - Implementasi QRIS
     - Pengembangan fitur *Cash Management System* (CMS)
   - Mendorong perluasan *delivery channel* melalui :
   - Penambahan Agen Laku Pandai
6. *Workstream Sharia Banking* antara lain :
   - Konversi menjadi Bank Umum Syariah

Strategi Pengembangan Bisnis

Strategi pengembangan bisnis Bank tahun 2021 meliputi peningkatan dalam menyalurkan Kredit/Pembiayaan danpenghimpunan dana pihak ketiga. Berikut strategi yang dilakukan untuk masing-masing bidang :

a. Kredit/Pembiayaan Komersial
   1. Menyalurkan pembiayaan segmen komersial dengan akad syariah
   2. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan Instasi terkait (Dinas PUPR, DISDIK, dll) dan asosiasi-asosiasi (GAPENSI, GAPEKSINDO, dll) diwilayah kerja masing-masing unit kantor.
   3. Memonitor website LPSE terkait pemenang lelang.
   4. Prospek Kredit/Pembiayaan Sindikasi yang di-arrange oleh Bank BUMN.
   5. Meningkatkan hubungan dengan perbankan syariah dalam rangka pengalihan pembiayaan sindikasi dan hubungan Kelembagaan Pihak Agen Fasilitas dan Kreditur Lainnya.
   6. Meningkatkan pembiayaan berbasis Investasi di Riau dan Kepri.
   7. Melakukan sosialisasi ke unit kantor terkait produk *Supply Chain Financing* (SCF).

b. Kredit/Pembiayaan Mikro Kecil dan Menengah
   1. Meningkatkan pertumbuhan Kredit/Pembiayaan UMKM, termasuk penyaluran KUR untuk meningkatkan porsi Kredit/Pembiayaan UMKM diwilayah kerja Bank.
   2. Melakukan promosi secara berkelanjutan melalui media informasi (SMS blast, spanduk dan baleho).

5. *Workstream Products & Services include:*
   - *Strengthening the role of Banks as Regional Development Agents, through:*
     - *Implementation of MKM Credit/Financing especially in Government Priority Sector and KUR.*
   - *Improving Product and Service Innovation according to segment needs, through:*
     - *Implementation of Local Government Information System (SIPD)*
     - *e-samsat Application Development*
     - *United Nations Collective Service Application Development*

Increase customer satisfaction, through:
QRIS Implementation
Cash Management System (CMS) feature development
Encouraging the expansion of delivery channels through:
Addition of Laku Pandai Agent
Sharia Banking Workstreams include:
Conversion to Islamic Commercial Bank

Business Development Strategy

The 2020 Kepri Bank Riau business development strategy includes an increase in lending and raising third-party funds. The following strategies are carried out for each field:

a. Commercial Credit/Financing
   1. *Distributing commercial segment financing with sharia contracts*
   2. *Improve cooperative relationships with related institutions (PUPR, DISDIK, etc.) and associations (GAPENSI, GAPEKSINDO, etc.) in the work area of each office unit.*
   3. *Monitor the LPSE website regarding the auction winner.*
   4. *Prospects of Syndicated Loans/Financing arranged by state-owned banks.*
   5. *Improving relations with Islamic banking in the context of transferring syndicated financing and institutional relations with the Facility Agent and Other Creditors.*
   6. *Increase investment-based financing in Riau and Riau Islands.*
   7. *Conduct socialization to office units related to Supply Chain Financing (SCF) products.*

b. Small and Medium Micro Credit/Financing
   1. *Increase the growth of MSME Credit/Financing, including the distribution of KUR to increase the portion of MSME Credit/Financing in the Bank's work area.*
   2. *Promoting on an ongoing basis through information media (SMS blasts, banners and billboards).*

c. Kredit/Pembiayaan Konsumer
Meningkatkan pertumbuhan Kredit/Pembiayaan konsumer melalui penerapan strategi komunikasi yang efektif dan intensif serta pelayanan yang optimal terhadap ASN dan non ASN, dan menunjang penuh program penyediaan kebutuhan rumah oleh Pemerintah melalui KPR/PPR.

d. Dana Pihak Ketiga
Mendorong pertumbuhan DPK berbiaya murah, dengan dukungan digital banking system dan pengelolaan program non tunai secara optimal yang terukur seta implementasi marketing communication yang efektif dan efisien sebagai perwujudan dari citra bisnis yang positif bagi Bank.

e. Treasury
Pengelolaan dana secara optimal sesuai aturan yang berlaku dan mewujudkan peningkatan pendapatan Bank melalui instrumen-instrumen pasar uang yang dilakukan. Keseluruhan aktivitas dalam koridor GCG dan mitigasi risiko yang terkendali.

Strategi di aktivitas treasuri sehingga tidak terjadi peningkatan net taking PUAB yang signifikan pada tahun 2021 sebagai berikut:

- Implementasi ALCO, yaitu penerapan funding management mencakup kedua sisi neraca sehingga tidak hanya terkait di dalam mengelola penghimpunan dana, namun juga bagaimana upaya di dalam mengelola dana tersebut pada sisi aktiva. Dalam konteksnya, pengelolaan dana tersebut meliputi pemantauan dan pengarahan struktur dana (suistanable growth dari Dana Pihak Ketiga) sedemikian rupa sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan dan pengembangan portfolio di sisi aktiva.
- Implementasi penerapan Rasio AL/NCD, yaitu pengelolaan secara intensif *Primary Reserves, Secondary Reserves* dan *Tertiary Reserves* terutama dalam hal pemenuhan regulatory purpose (GWM dan PLM) melalui kecukupan alat likuid dalam jumlah memadai dan kualitas tinggi (*High Liquid*) sehingga mampu dikonversi dalam *cash flow*.
- Implementasi Komite Manajemen Risiko, yaitu penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan likuiditas, yang berpedoman kepada *risk appetite statement* bank.
- Implementasi dari *segregation of duty* dalam bentuk peran dan fungsi unit kerja *financial review* dan manajemen risiko dalam memonitor dan pengendalian aktivitas dan transaksi treasuri

Pengembangan bisnis didukung oleh strategi pengembangan operasional, teknologi dan GRC sebagai berikut :

c. Consumer Credit/Financing
Increase the growth of consumer credit/financing through the implementation of effective and intensive communication strategies as well as optimal services for ASN and non ASN, and fully support the government's housing needs provision program through KPR/PPR.

d. Third-party funds
Encouraging the growth of low-cost TPF, with the support of a digital banking system and optimally measurable non-cash program management as well as the implementation of effective and efficient marketing communications as a manifestation of a positive business image for the Bank.

e. Treasury
Optimal fund management in accordance with applicable regulations and realizing an increase in the Bank's income through money market instruments. All activities within the GCG corridor and controlled risk mitigation.

The strategy in treasury activities so that there is no significant increase in net taking PUAB in 2021 is as follows:

- *The implementation of ALCO, namely the application of funding management covers both sides of the balance sheet so that it is not only related to managing the collection of funds, but also how to manage these funds on the asset side. In its context, the management of these funds includes monitoring and directing the structure of funds (sustainable growth from Third Party Funds) in such a way that they can become a source of financing and portfolio development on the asset side.*
- *Implementation of LA/NCD Ratio, namely intensive management of Primary Reserves, Secondary Reserves and Tertiary Reserves, especially in terms of fulfilling regulatory purposes (GWM and PLM) through sufficient liquid assets in sufficient quantities and high quality (High Liquid) so that they can be converted into cash flow .*
- *Implementation of the Risk Management Committee, namely the implementation of risk management in liquidity management, which is guided by the bank's risk appetite statement.*
- *Implementation of segregation of duty in the form of roles and functions of financial review and risk management work units in monitoring and controlling treasury activities and transactions*

Business development is supported by the following operational, technology and GRC development strategies:

a. Operasional dan teknologi
   - Penguatan TI Infrastruktur
   - Implementasi Digital Banking
   - Kooperasi *Bank-fintech-paytech*
   - *Integrated HC Management dengan Implementasi* Aplikasi SKI online
   - Sentralisasi MIS-*Dashboard-Reporting*
   - Pemenuhan SLA & standardisasi kerja

b. *Governance, Risk, Compliance* (GRC)
   - *Internal Control System*
   - Perbaikan Tingkat Kesehatan Bank
   - Penguatan *Three Lines of Defense*
   - Penyempurnaan kebijakan *Anti Fraud*
   - Penyempurnaan SOT

Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran Tahun 2021

Bank Riau Kepri akan terus meningkatkan dana pihak ketiga yang berbasiskan low cost fund dengan berorientasi pada peningkatan inovasi produk dan layanan, mendorong perluasan *delivery channel* dan memperluas sumber *fee base income* yang dapat meningkatkan kapabilitas produk dan layanan dalam rangka peningkatan hubungan dengan nasabah. Hal ini didukung dengan komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien sebagai perwujudan dari citra bisnis yang positif, memberikan edukasi untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan engagement nasabah terhadap Bank Riau Kepri melalui event-event terbuka. Inisiatif strategis yang dilaksanakan Bank Riau Kepri antara lain:

a. Meningkatkan inovasi produk dan layanan sesuai kebutuhan segmen melalui Implementasi digital solution bagi pemda dan masyarakat diantaranya *QRIS* , *Virtual Account*, Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha dan perusahaan swasta/pihak ketiga lainya terkait produk dan layanan.
b. Optimalisasi strategi pemasaran dan penjualan produk dan layanan melalui peningkatan peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha dan perusahaan swasta/pihak ketiga.
c. Peningkatan *engangement* dan *customer loyalty* melalui layanan *priority banking*.
d. Optimalisasi *fee based income* melalui penambahan biller pembayaran pada electronic *channel*.
e. *Rebranding* produk konvensional menjadi produk syariah.
f. Peningkatan edukasi literasi keuangan melalui produk tabungan SimPel, pemanfaatan *otobanking* dan memperluas layanan melalui layanan keuangan tanpa kantor dan Tabungan Sinar Laku.
g. Penguatan program promosi melalui program hadiah dan undian, merchant discount, event-event, customer gathering dan expo
h. Peningkatan kompetensi frontliner dan funding officer melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi dengan learning center

a. Operations and technology
   - *Strengthening IT Infrastructure*
   - *Implementation of Digital Banking*
   - *Bank-fintech-paytech cooperation*
   - *Integrated HC Management with Online SKI Application Implementation*
   - *Centralized MIS-Dashboard-Reporting*
   - *SLA fulfillment & work standardization*

b. Governance, Risk, Compliance (GRC)
   - *Internal Control System*
   - *Bank Soundness Level Improvement*
   - *Strengthening the Three Lines of Defense*
   - *Improvement of Anti Fraud policy*
   - *SOT Improvements*

Marketing Aspects

Marketing Strategy In 2021

Bank Riau Kepri will continue to increase third party funds based on low cost funds with an orientation towards increasing product and service innovation, encouraging the expansion of delivery channels and expanding the source of fee base income that can improve product and service capabilities in order to improve customer relationships. This is supported by effective and efficient marketing communications as a manifestation of a positive business image, providing education to further increase customer knowledge and engagement with Bank Riau Kepri through open events. Strategic initiatives implemented by Bank Riau Kepri include:

a. Increasing product and service innovation according to segment needs through the implementation of digital solutions for local governments and the community including QRIS, Virtual Accounts, Local government information systems (SIPD). Increased cooperation with business actors and private companies/other third parties related to products and services.
b. Optimization of marketing strategies and sales of products and services through increased collaboration with business actors and private companies/third parties.
c. Increased engagement and customer loyalty through priority banking services.
d. Optimization of fee based income through the addition of biller payments on electronic channels.
e. Rebranding conventional products into sharia products.
f. Increasing financial literacy education through SIMPEL savings products, utilizing autobanking and expanding services through officeless financial services and Sinar Laku Savings.
g. Strengthening promotional programs through prizes and sweepstakes programs, merchant discounts, events, customer gatherings and expos
h. Improving the competence of frontliners and funding officers through integrated education and training with the learning center







Pangsa Pasar

Bank Riau Kepri secara khusus menghadapi persaingan dengan KBMI I dan BPD dalam menentukan penguasaan pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, dan jumlah kredit yang diberikan oleh Bank Riau Kepri.

Berdasarkan jumlah aset, kredit dan DPK penguasaan pangsa pasar Bank Riau Kepri terhadap KBMI I tahun 2021 mencapai 3,14%, 3,42%, 3,41% meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 3,14%, 3,42% dan 3,41%. Demikian pula dengan penguasaan pasar Bank Riau Kepri terhadap BPD juga mengalami peningkatan dari sisi aset, kredit dan DPK tahun 2021 mencapai 3,69%, 3,74% dan 3,75%.

Market Share

Bank Riau Kepri in particular faces competition with KBMI I and BPD in determining market share. This business competition can be seen, among others, based on the number of assets owned, the amount of third party funds that have been collected, and the amount of credit extended by Bank Riau Kepri

Based on the number of assets, loans and deposits, the market share of Bank Riau Kepri against KBMI I in 2021 reached 3.14%, 3.42%, 3.41% increased compared to 2020 which reached 3.14%, 3.42% and 3.41%. Likewise, Bank Riau Kepri's market share of BPD has also increased in terms of assets, credit and TPF in 2021, reaching 3.69%, 3.74% and 3.75%.

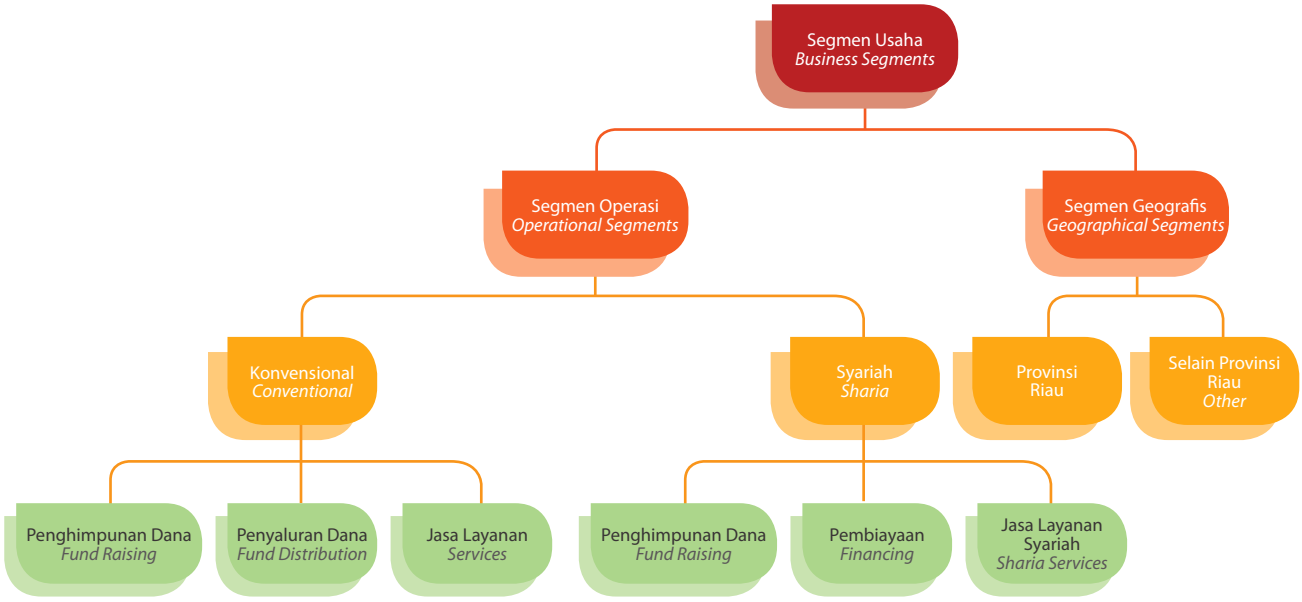


Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank Riau Kepri menjalankan segmen operasinya berdasarkan peraturan kebijakan akuntansi. Bank telah menyajikan segmen operasi berdasarkan PSAK 5 (Revisi 2009) mengenai "Segmen Operasi". Segmen operasi dilaporkan sesuai dengan laporan internal Bank yang disiapkan untuk mengambil keputusan operasional yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ke segmen tertentu dan penilaian atas performanya. Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah. Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Provinsi Bank adalah Riau dan selain Provinsi Riau.

Overview of Operations Per Business Segment

A business segment is a group of assets and operations that provide goods or services that are subject to risks and returns that are different from other business segments. In carrying out business activities, Bank Riau Kepri runs its operating segments based on accounting policy regulations. The Bank has presented operating segments based on PSAK 5 (Revised 2009) regarding "Operating Segments". Operating segments are reported in accordance with the Bank's internal reports which are prepared to make operational decisions that are responsible for allocating resources to certain segments and evaluating their performance. The Bank discloses its operational segments based on business segments which include conventional and Islamic banking. The geographical segment includes providing services within certain economic environments that are subject to risks and returns that are different from other operating segments in other economic environments. The Bank's geographical segment is Riau Provinceand other than Riau Provinces.



Segmen Operasi

Penjelasan Segmen Operasi

Bank Riau Kepri memiliki segmen operasi yang dijalankan oleh 2 (dua) unit usaha dan masing-masing mengelola satu di antara dua segmen operasi yaitu melalui segmen operasi tersebut, Bank Riau Kepri menawarkan produk yang beragam demi memberikan solusi keuangan yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Bank Riau Kepri berupaya untuk terus mengembangkan produk yang ditawarkan baik konvensional dan syariah. Masing-masing unit terdiri dari 3 (tiga) segmen yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana serta jasa dan layanan

Secara garis besar, aktivitas dalam bisnis perbankan baik konvensional maupun syariah, dibagi dalam 3 kegiatan utama yaitu:

a. Penghimpunan Dana

Dana pihak ketiga diperoleh dari masyarakat, baik sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Bank Riau Kepri menghimpun dana pihak ketiga melalui produk yang terdiri dari tabungan, giro dan deposito.

b. Penyaluran Dana

Sebagai lembaga intermediasi, Bank Riau Kepri melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga sebagai *surplus spending* unit dan menyalurkan kepada *deficit spending* unit dalam bentuk penyaluran kredit/pembiayaan. Produk penyaluran dana Bank Riau Kepri terdiri dari atas kredit/pembiayaan umum, kredit/pembiayaan program dan kredit/pembiayaan konsumtif. Bank Riau Kepri memberikan kemudahan layanan dengan memberikan keanekaragaman produk kredit/pembiayaan. Berbagai jenis kebutuhan dapat difasilitasi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para nasabah.

c. Jasa Layanan

Jasa layanan perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan keuntungan bagi bank semakin besar karena kelengkapan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki membuat calon nasabah tertarik untuk layanan yang masih harus dioptimalkan untuk dapat meningkatkan pendapatan Bank.

Operating Segments

Explanation of Operating Segments

Bank Riau Kepri has an operating segment that is run by 2 (two) business units and each manages one of the two operating segments, namely through this operating segment, Bank Riau Kepri offers a variety of products in order to provide financial solutions that are safe, comfortable and affordable for consumers. public. Bank Riau Kepri strives to continue to develop products offered both conventional and sharia. Each unit consists of 3 (three) segments, namely fundraising, distribution of funds and services and services.

Broadly speaking, activities in the banking business, both conventional and sharia, are divided into 3 main activities, namely:

a. Fundraising

Third party funds are obtained from the public, either as individuals, companies, governments, households, cooperatives, foundations and others, either in rupiah or foreign currencies. Bank Riau Kepri collects third party funds through products consisting of savings, current accounts and time deposits.

b. Disbursement of Funds

As an intermediary institution, Bank Riau Kepri collects funds from third parties as surplus spending units and distributes them to deficit spending units in the form of lending/financing. Bank Riau Kepri's fund distribution products consist of general credit/financing, program credit/financing and consumer credit/financing. Bank Riau Kepri provides ease of service by providing a variety of credit/financing products. Various types of needs can be facilitated according to the wishes and needs of the customers.

c. Services

Banking services are supporting activities to expedite the activities of collecting and distributing funds. This activity is very beneficial for banks and customers, even greater profits for banks because the completeness of the facilities and services they have makes prospective customers interested in services that still have to be optimized to increase the Bank's income.

Produktivitas Segmen Operasi

Segmen Konvensional

Penghimpunan Dana

Bank Riau Kepri sadar bahwa nasabah semakin selektif menggunakan produk dan layanan perbankan sehingga produk dan layanan yang ditawarkan pun terus memperhatikan faktor kepuasan nasabah.Bank Riau Kepri senantiasa melakukan inovasi dengan mengembangkan produk dan jasa serta menambah fitur produk sehingga berbagai produk yang ditawarkan dapat memberikan solusi bagi nasabah.

Giro

Giro adalah simpanan yang dapat ditarik sewaktu waktu menggunakan surat berharga berupa cek/bilyet giro/ surat pembayaran lainnya, serta dapat melakukan pemindahbukuan, dan uang yang terdapat dalam giro dapat berupa mata uang asing. Produk ini merupakan simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Uraian mengenai pertumbuhan simpanan nasabah dari produk giro, tergambar pada tabel di bawah ini:

Productivity of Operating Segments

Conventional Segments

Funding

Bank Riau Kepri is aware that customers are increasingly selective in using banking products and services so that the products and services offered continue to pay attention to customer satisfaction factors. Bank Riau Kepri continues to innovate by developing products and services and adding product features so that the various products offered can provide solutions for customer.

Demand Deposit

Demand deposits are deposits that can be withdrawn at any time using securities in the form of checks/bilyet giro/other payment documents, and can carry out book-entry, and the money contained in demand deposits can be in foreign currency. This product is a third party deposit which can be withdrawn at any time using cheques, bilyet giro and other means of payment orders in accordance with predetermined conditions.

A description of the growth of customer deposits from current accounts is illustrated in the table below:

Tabel Jumlah Dana Giro
Table of Demand Deposit Funds

(dalam jutaan Rupiah) | *(in millions of Rupiah)*

Dana Giro	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Current Account Fund*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Giro Rupiah	5.506.436	3.372.507	2.133.929	63,27	*Rupiah Current Account*
Giro Valas	13.149	12.594	555	4,40	*Forex Current Account*
Jumlah	**5.519.585**	**3.385.101**	**2.134.484**	**63,06**	***Amount***

Jumlah dana giro tahun 2021 sebesar Rp5,52 triliun, meningkat 63,06% atau Rp2,13 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,39 triliun.

The amount of current account funds in 2021 is IDR5.52 trillion, an increase of 63.06% or IDR2.13 trillion compared to 2020 which was IDR3.39 trillion.

Tabel Jumlah Nasabah Giro
Table of Current Account Customers

(Nasabah) | *(Customer)*

Nasabah Giro	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Current Account Customer*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Giro Rupiah	39.593	38.673	920	2,38	*Current Account Rupiah*
Giro Valas	380	366	14	3,83	*Forex Current Account*
Jumlah	**39.973**	**39.039**	**934**	**2,39**	***Amount***

Jumlah nasabah giro tahun 2021 sebanyak 39.973 nasabah, mengalami peningkatan sebesar 2,39% atau 934 nasabah dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 39.039 nasabah.

The number of current account customers in 2021 was 39,973customers, an increase of 2.39% or 934 customers compared to 2020 which were 39,039 customers.

Tingkat Suku Bunga Giro

Informasi mengenai tingkat suku bunga giro disajikan sebagai berikut.

Current Account Interest Rate

Information regarding the current account interest rate is presented as follows.

Tabel Suku Bunga Giro Per Desember 2021

Current Account Interest Rate Table As of December 2021

(dalam miliar Rupiah) | *(in billion Rupiahs)*

Keterangan *Description*	Saldo	*Balance*	Suku Bunga *Interest rate*
Giro *Current Account*	< Rp5 juta	*< IDR 5 million*	0,00%
	> Rp5 juta – Rp100 juta	*> IDR 5 million – IDR 100 million*	0,20%
	> Rp100 juta – Rp500 juta	*> IDR 100 million – IDR 500 million*	0,45%
	> Rp500 juta – Rp1 miliar	*> IDR 500 million – IDR 1 billion*	1,00%
	≥ Rp1 miliar	*IDR 1 billion*	2,00%

Tabungan

Tabungan adalah simpanan dengan denominasi rupiah serta dapat ditarik atau dipindahbukukan sewaktu waktu serta penarikannya tidak dapat menggunakan cek/bilyet giro. Tabungan merupakan sarana simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, dengan bunga yang menarik dan memberikan fasilitas kemudahan untuk bertransaksi.

Savings

Savings are deposits denominated in rupiah and can be withdrawn or overbooked at any time and cannot be withdrawn using checks/bilyet giro. Savings is a means of saving third-party funds that can be withdrawn at any time, with attractive interest rates and providing easy transaction facilities.

Uraian mengenai pertumbuhan simpanan nasabah dari produk tabungan, tergambar pada tabel di bawah ini:

A description of the growth of customer deposits from savings products is illustrated in the table below:

Tabel Jumlah Dana Tabungan

Table of Total Savings Funds

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Tabungan	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Savings*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Tabungan Simpeda	696.073	617.633	78.440	12,70	*Simpeda Savings*
Tabungan Simpeda UKM	70.481	66.245	4.236	6,39	*SME Simpeda Savings*
Tabungan Sinar	3.014.406	2.828.404	186.002	6,58	*Sinar Savings*
Tabungan Sinar Belia	53.984	46.349	7.635	16,47	*Sinar Belia Savings*
Tabungan Sinar Belia BSM	193	193	-	-	*BSM Sinar Belia Savings*
Tabungan Sinar Delima	442.856	342.719	100.137	29,22	*Sinar Delima Savings*
Tabungan Sinar Pegawai	1.228	2.067	(839)	-40,59	*Sinar Employee Savings*
Tabungan Sinar KPE	1.100.492	1.078.838	21.654	2,01	*KPE Sinar Savings*
Tabungan Sinar Community	1.296	1.429	(133)	-9,31	*Sinar Community Savings*
Tabungan Sinar DBOS	27.118	40.107	(12.989)	-32,39	*DBOS Sinar Savings*
Tabungan Sinar Pendidikan	23.532	24.521	(989)	-4,03	*Sinar Pendidikan Savings*
Tabungan Dhuha	3.514	3.574	(60)	-1,68	*Dhuha Savings*
Tabungan Simpel	18.589	18.161	428	2,36	*Simple Savings*
Tabungan Sinar Laku Pandai	3.679	2.916	763	26,17	*Sinar Laku Pandai Savings*
Tabungan Sinar Prioritas	61.886	30.881	31.005	100,40	*Sinar Priority Savings*
Tabunganku	36.016	33.938	2.078	6,12	*Tabunganku*
Jumlah	**5.555.343**	**5.137.975**	**417.368**	**8,12**	***Amount***

Dana tabungan tahun 2021 sebesar Rp.5.56 triliun, meningkat 8,12% atau Rp417 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp5,14 triliun, peningkatan tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan tabungan sinar dengan porsi sebesar 6,58% atau sebesar Rp186 miliar.

Savings funds in 2021 amounted to Rp.5.56 trillion, an increase of 8.12% or Rp.417 billion compared to 2020 which amounted to Rp.5.14 trillion, the increase mainly came from the growth of Sinar savings with a portion of 6,58% or Rp186 billion.

Tabel Jumlah Nasabah Tabungan
Table of Total Savings Customers

(Nasabah) | *(Customer)*

Nasabah Tabungan	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Customer Savings*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Tabungan Simpeda	36.107	41.393	(5.286)	-12,77	*Simpeda Savings*
Tabungan Simpeda UKM	2.495	2.465	30	1,22	*SME Simpeda Savings*
Tabungan Sinar	465.239	466.324	(1.085)	-0,23	*Sinar Savings*
Tabungan Sinar Belia	26.401	27.128	(727)	-2,68	*Sinar Belia Savings*
Tabungan Sinar Belia BSM	456	456	-	-	*BSM Sinar Belia Savings*
Tabungan Sinar Delima	7.364	6.963	401	5,76	*Sinar Delima Savings*
Tabungan Sinar Pegawai	2.145	2.203	(58)	-2,63	*Sinar Employee Savings*
Tabungan Sinar KPE	72.498	80.114	(7.616)	-9,51	*KPE Sinar Savings*
Tabungan Sinar Community	268	275	(7)	-2,55	*Sinar Community Savings*
Tabungan Sinar DBOS	15.227	9.550	5.677	59,45	*DBOS Sinar Savings*
Tabungan Sinar Pendidikan	2.824	3.077	(253)	-8,22	*Sinar Pendidikan Savings*
Tabungan Dhuha	5.095	5.114	(19)	-0,37	*Dhuha Savings*
Tabungan Simpel	35.991	49.614	(13.623)	-27,46	*Simple Savings*
Tabungan Sinar Laku Pandai	15.726	11.585	4.141	35,74	*Sinar Laku Pandai Savings*
Tabungan Sinar Prioritas	116	52	64	123,08	*Sinar Priority Savings*
Tabunganku	12.679	24.982	(12.303)	-49,25	*Tabunganku*
Jumlah	**700.631**	**731.295**	**(30.664)**	**-4,19**	***Amount***

Jumlah nasabah dana tabungan tahun 2021 sebanyak 700.631 nasabah, sedikit mengalami penurunan sebesar (4,19%) atau 30.664 nasabah dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 731.295 nasabah. Hal tersebut terutama dipengaruhi dari turunnya jumlah nasabah dari Tabungan Simpel, Tabunganku, dan Tabungan Sinar KPE di tahun 2021.

The number of savings fund customers in 2021 was 700,631 customers, a slight decrease of (4.19%) or 30,664 customers compared to 2020 which were 731,295 customers. This was mainly influenced by the decrease in the number of customers from Tabungan Simpel, Tabunganku, and Tabungan Sinar KPE in 2021.

Tingkat Suku Bunga Tabungan

Di samping promosi, Bank Riau Kepri memberikan bunga yang menarik untuk masing-masing produk tabungan. Tingkat suku bunga untuk beberapa jenis produk tabungan yang berlaku pada tahun 2021 sebagaimana di bawah ini.

Savings Interest Rate

In addition to promotions, Bank Riau Kepri provides attractive interest rates for each savings product. Interest rates for several types of savings products that apply in 2021 are as follows.

Tabel Suku Bunga Tabungan Per Desember 2021
Savings Interest Rate Table as of December 2021

(dalam %) | *(In %)*

Jenis Tabungan *Savings Type*	Saldo	*Balance*	Suku Bunga *Interest rate*
Tabungan Simpeda dan Tabungan Sinar *Simpeda Savings and Sinar Savings*	< Rp1 juta	*< IDR 1 million*	0,00%
	> Rp1 juta - Rp50 juta	*> IDR 1 million - IDR 50 million*	0,30%
	> Rp50 juta - Rp100 juta	*> IDR 50 million - IDR 100 million*	0,75%
	> Rp100 juta - Rp500 juta	*> IDR 100 million - IDR 500 million*	1,10%
	> Rp500 juta	*> IDR 500 million*	1,50%
Tabingan Sinar Delima *Sinar Delima Savings*	≤ Rp10 juta	*IDR 10 million*	0,00%
	> Rp10 juta - Rp50 juta	*> IDR 10 million - IDR 50 million*	0,75%
	> Rp50 juta – Rp500 juta	*> IDR 50 million – IDR 500 million*	1,75%
	> Rp500 juta	*> IDR 500 million*	2,50%

Jenis Tabungan *Savings Type*	Saldo	*Balance*	Suku Bunga *Interest rate*
Tabungan Sinar kartu PNS Elektronik (KPE) *Sinar PNS Electronic Card Savings (KPE)*	≤ Rp10 juta	*IDR 10 million*	0,00%
	> Rp10 juta - Rp50 juta	*> IDR 10 million - IDR 50 million*	0,50%
	> Rp50 juta	*> IDR 50 million*	1,50%
Tabungan Sinar Belia *Sinar Belia Savings*	≤ Rp5 juta	*IDR 5 million*	1,00%
	> Rp5 juta	*> IDR 5 million*	2,00%
Tabungan Sinar DBOS *DBOS Sinar Savings*	≤ Rp5 juta	*IDR 5 million*	0,00%
	> Rp5 juta	*> IDR 5 million*	0,50%
Tabungan Sinar Pendidikan *Sinar Pendidikan Savings*	≤ Rp20 juta	*IDR 20 million*	1,00%
	> Rp20 juta - Rp50 juta	*> IDR 20 million - IDR 50 million*	1,25%
	> Rp50 juta - Rp100 juta	*> IDR 50 million - IDR 100 million*	1,50%
	> Rp100 juta – Rp500 juta	*> IDR 100 million – IDR 500 million*	1,75%
	> Rp500 juta	*> IDR 500 million*	2,75%
Tabungan Sinar Community *Sinar Community Savings*			2,5% p.a
Tabungan Sinar Pegawai *Sinar Employee Savings*			2,0% p.a
Tabunganku *Tabunganku*	≤ Rp500 ribu	*IDR 500 thousand*	0,00%
	> Rp500 ribu - Rp1 juta	*> IDR 500 thousand - IDR 1 million*	0,25%
	> Rp1 juta	*> IDR 1 million*	1,00%

Deposito

Produk ini merupakan simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah disepakati dan diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum.

Deposits

This product is a third party fund deposit whose withdrawal is based on a certain agreed period of time and is intended for individuals and business entities in the form of legal entities.

Tabel Jumlah Dana Deposito
Table of Total Deposit Funds

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Dana Deposito	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Deposit Fund*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Deposito Rupiah	8.928.641	10.024.677	(1.096.037)	-10,93	*Rupiah Deposit*
Deposito Valas	72.116	88.392	(16.275)	-18,41	*Foreign Currency Deposit*
Jumlah	**9.000.757**	**10.113.069**	**(1.112.312)**	**-11,00**	***Amount***

Jumlah dana deposito tahun 2021 sebesar Rp9 triliun, menurun 11% atau Rp1,12 triliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp10,11 triliun. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan nasabah deposito.

The amount of time deposit funds in 2021 was IDR 9 trillion, a decrease of 11% or IDR 1.12 trillion compared to 2020 which was IDR 10.11 trillion. The decline was in line with the decline in deposit customers.

Tabel Jumlah Nasabah Deposito
Table of Total Deposit Customers

(Nasabah) | *(Customers)*

Nasabah Deposito	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Deposit Fund*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Deposito Rupiah	8.838	9.739	(901)	-9,25	*Rupiah Deposit*
Deposito Valas	36	38	(2)	-5,26	*Foreign Currency Deposit*
Jumlah	**8.874**	**9.777**	**(903)**	**-9,24**	***Amount***

Jumlah nasabah deposito tahun 2021 Sebanyak 8.874 Nasabah, Mengalami Penurunan Sebesar 9,24% Atau 903 Nasabah

The number of deposit customers in 2021 is 8,874 customers, experiencing a decrease of 9.24% or 903 customers

Tingkat Suku Bunga Deposito

Untuk meningkatkan pertumbuhan dana simpanan nasabah dari produk deposito, Bank Riau Kepri menawarkan beberapa pilihan deposito sesuai jangka waktunya dengan suku bunga bersaing, dapat diperpanjang secara otomatis sesuai konfirmasi awal. Keunggulan deposito berjangka dapat dipergunakan sebagai jaminan kredit. Tingkat suku bunga untuk beberapa jenis produk deposito yang berlaku pada tahun 2021 sebagaimana di bawah ini.

Deposit Interest Rate

To increase the growth of customer deposits from deposit products, Bank Riau Kepri offers several deposit options according to the time period with competitive interest rates, which can be automatically extended according to initial confirmation. The advantages of time deposits can be used as credit guarantees. Interest rates for several types of deposit products that apply in 2021 are as follows.

Tabel Suku Bunga Deposito Per Desember 2021
Table of Deposit Interest Rates as of December 2021

(dalam %) | *(In %)*

Jangka Waktu	1 Bulan	3,6,12 dan 24 Bulan	*Time Period*
Counter Rate p.a	3,25%	3,00%	*Counter Rate p.a*

Penyaluran Dana

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah seluruhnya diberikan dalam mata uang Rupiah sebagai berikut:

Distribution Of Funds

All loans and sharia financing are given in Rupiah as follows:

Tabel Kredit Berdasarkan Jenis Kredit
Credit Table by Credit Type

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Kredit	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Credit*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Modal kerja	1.664.316	1.590.371	73.945	4,65	*Working capital*
Investasi	2.184.900	2.166.710	18.190	0,84	*Investment*
Konsumtif	10.017.142	12.465.669	(2.448.527)	-19,64	*Consumptive*
Jumlah	**13.866.358**	**16.222.750**	**(2.356.392)**	**-14,53**	***Amount***
Cadangan kerugian penurunan nilai	(438.805)	(472.239)	33.434	-7,08	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**13.427.553**	**15.750.511**	**(2.322.958)**	**-14,75**	***Quantity - net***

Jumlah kredit bersih yang diberikan sebesar Rp13,43 triliun, menurun 14,75% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp15,75 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan kredit konsumtif sebesar Rp2,45 trilliun.

Total net loans disbursed amounted to Rp13,43 trillion, a decrease of 14,75% compared to 2020 which was Rp15,75trillion. The decrease was mainly due to a decrease in consumer loans of Rp.2,45 trillion.

Berdasarkan jenis kredit, jumlah dana *outstanding* masing-masing kredit konvensional adalah sebagai berikut:

Based on the type of credit, the amount of outstanding funds for each conventional loan is as follows:

Tabel Portofolio Produk Kredit
Credit Product Portfolio Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Kredit	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Credit*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Kredit Konstruksi	64.114	53.133	10.981	20,67	*Kredit Konstruksi*
Kredit Sindikasi	1.361.506	1.361.290	216	0,02	*Kredit Sindikasi*
Kredit Rekening Koran (R/K)	86.339	87.603	(1.264)	-1,44	*Kredit Rekening Koran (R/K)*
Kredit Berjadual	30.510	28.761	1.749	6,08	*Kredit Berjadual*
Kredit Investasi	37.852	48.497	(10.645)	-21,95	*Kredit Investasi*
Kredit Pengusaha Kecil	508.998	601.165	(92.167)	-15,33	*Kredit Pengusaha Kecil*
Kredit Mikro	29.660	31.051	(1.391)	-4,48	*Kredit Mikro*
Kredit Ketahanan Pangan	240	477	(237)	-49,69	*Kredit Ketahanan Pangan*

Kredit	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Credit*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Kredit Bank Riau Peduli	41	41	-	-	*Kredit Bank Riau Peduli*
Kredit KUMK SUP 005	66	68	(2)	-2,94	*Kredit KUMK SUP 005*
Kredit Linkage Program	867	1.031	(164)	-15,91	*Kredit Linkage Program*
Kredit Agribisnis	650.930	625.854	25.076	4,01	*Kredit Agribisnis*
Kredit Usaha Rakyat	1.078.092	918.109	159.983	17,43	*Kredit Usaha Rakyat*
Kredit Aneka Guna (KAG)	9.437.449	11.896.915	(2.459.466)	-20,67	*Kredit Aneka Guna (KAG)*
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)	1.246	1.435	(189)	-13,17	*Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)*
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	338.357	324.446	13.911	4,29	*Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*
Kredit Pegawai BPD RIAU	239.140	241.884	(2.744)	-1,13	*Kredit Pegawai BPD RIAU*
Kredit Konsumtif Lainnya	951	990	(39)	-3,94	*Kredit Konsumtif Lainnya*
Jumlah	**13.866.358**	**16.222.750**	**(2.356.392)**	**-14,53**	***Amount***



Jumlah dana *outsanding* kredit tahun 2021 sebesar Rp13,86 triliun, menurun 14,53% atau Rp2,36 trilliun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp16,22 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari Kredit Aneka Guna (KAG) sebesar Rp2,46 trilliun.

The amount of credit outsourcing funds in 2021 was IDR 13.86 trillion, a decrease of 14.53% or IDR 2.36 trillion compared to 2020 which was IDR 16.22 trillion. The decrease mainly came from the Aneka Guna Loans (KAG) of Rp2.46 trillion.

Tabel Jumlah Debitur Produk Kredit
Table of Number of Debtors for Credit Products

(dalam Nasabah) | *(in Customer)*

Debitur Kredit	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Debtors Credit*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Kredit Konstruksi	198	174	24	13,79	*Kredit Konstruksi*
Kredit Sindikasi	20	20	-	-	*Kredit Sindikasi*
Kredit Rekening Koran (R/K)	104	127	(23)	-18,11	*Kredit Rekening Koran (R/K)*
Kredit Berjadual	42	42	-	-	*Kredit Berjadual*
Kredit Investasi	74	80	(6)	-7,50	*Kredit Investasi*
Kredit Pengusaha Kecil	4.774	5.734	(960)	-16,74	*Kredit Pengusaha Kecil*

Debitur Kredit	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Debtors Credit*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Kredit Mikro	2.149	2.239	(90)	-4,02	*Kredit Mikro*
Kredit Ketahanan Pangan	24	32	(8)	-25,00	*Kredit Ketahanan Pangan*
Kredit Bank Riau Peduli	13	13	-	-	*Kredit Bank Riau Peduli*
Kredit KUMK SUP 005	10	10	-	-	*Kredit KUMK SUP 005*
Kredit Linkage Program	-	6	(6)	-100,00	*Kredit Linkage Program*
Kredit Agribisnis	11.322	10.952	370	3,38	*Kredit Agribisnis*
Kredit Usaha Rakyat	12.775	10.412	2.363	22,69	*Kredit Usaha Rakyat*
Kredit Aneka Guna (KAG)	60.502	73.276	(12.774)	-17,43	*Kredit Aneka Guna (KAG)*
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)	58	85	(27)	-31,76	*Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)*
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	2.945	2.856	89	3,12	*Kredit Pemilikan Rumah (KPR)*
Kredit Pegawai BPD RIAU	1.133	1.093	40	3,66	*Kredit Pegawai BPD RIAU*
Kredit Konsumtif Lainnya	209	217	(8)	-3,69	*Kredit Konsumtif Lainnya*
Jumlah	**96.352**	**107.368**	**(11.016)**	**-10,26**	***Amount***

Jumlah nasabah kredit tahun 2021 sebanyak 96.352 nasabah, turun 10,26% atau 11.016 nasabah dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebanyak 107.368 nasabah. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya nasabah Kredit Aneka Guna sebanyak 12.774 nasabah.

The number of credit customers in 2021 was 96.352 customers, a decrease of 10,26% or 11.016 customers compared to 2020 which were 107,368 customers. The decline was mainly due to the decrease in Aneka Guna Credit customers as many as 12.774 customers.

Tingkat Suku Bunga Kredit

Guna memberikan kemudahan dan meningkatkan daya saing produk, maka Bank Riau Kepri memberikan tingkat suku bunga untuk beberapa produk kredit yang berlaku pada tahun 2021 sebagaimana di bawah ini:

Credit Interest Rate

In order to provide convenience and increase product competitiveness, Bank Riau Kepri provides interest rates for several credit products that are valid in 2021 as follows:

Tabel Suku Bunga Kredit Per Desember 2021
Table of Credit Interest Rates as of December 2021

(dalam %) | *(In %)*

Jenis Kredit	Suku Bunga | *Interest rate*	*Credit Type*
Kredit Komersil		***Commercial Credit***
Kredit Modal Kerja atas Dasar Kontrak	11,5% - 15%	*Working Capital Credit on Contract Basis*
Kredit Investasi atas Dasar Kontrak	11,5% - 15%	*Investment Credit on Contract Basis*
Kredit Modal Kerja	11% - 14%	*Working capital credit*
Kredit Investasi	11% - 14%	*Investment Credit*
Kredit Kepada Pengembang/Developer	13% - 14%	*Credit to Developers*
Kredit Agribisnis Komersial	11% - 14%	*Commercial Agribusiness Loans*
Kredit Pinjaman Daerah	Minimal SBDK Korporasi Bulan terakhir +0,5% *Minimum Last Month's Corporate SBDK +0.5%*	*Regional Loans*
Kredit Kepada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	11% - 14%	*Credit to Regional Public Service Agency (BLUD)*
Kredit Sindikasi	Sesuai Kesepakatan Peserta Sindikasi *According to the agreement of the syndicated participants*	*Syndication credit*
Kredit Cash Collateral	+2% - 3 % dari suku bunga *cash collateral* yang diserahkan *+2% - 3% of the cash collateral interest rate submitted*	*Collateral Cash Credit*

Jenis Kredit	Suku Bunga | *Interest rate*	*Credit Type*
Kredit Mikro, Kecil dan Menengah		*Kredit Mikro, Kecil dan Menengah*
Kredit Usaha Mikro	11% - 15%	*Kredit Usaha Mikro*
Kredit Usaha Mikro Merdu Sejahtera (KUM MES)	18% - 20%	*Kredit Usaha Mikro Merdu Sejahtera (KUM MES)*
Kredit Usaha Kecil dan Menengah		*Kredit Usaha Kecil dan Menengah*
Kredit Usaha Kecil	11% - 12%	*Kredit Usaha Kecil*
Kredit Usaha Menengah	9,5% - 11%	*Kredit Usaha Menengah*
Kredit Agribisnis Mikro, Kecil dan Menengah		***Micro, Small and Medium Agribusiness Loans***
Agribisnis Mikro	11 % - 12 %	*Micro Agribusiness*
Agribisnis Kecil	11 % - 12 %	*Small Agribusiness*
Agribisnis Menengah	9,5 % - 11 %	*Medium Agribusiness*
Kredit Agribisnis Replanting Kelapa Sawit		***Palm Oil Replanting Agribusiness Credit***
Interest *During Construction*/IDC dan Kredit Investasi/KI (masa *grace* period)	11 %	*Interest During Construction/IDC and Investment Credit/KI (grace period)*
IDC dan KI (setelah masa grace period)	9,8%	*IDC and KI (after grace period)*
Kredit Usaha Rakyat	6%	*Kredit Usaha Rakyat*
BPD Peduli	21%	*BPD Cares*
Kredit Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro	Minimal SBDK Ritel + 2% *Minimum Retail prime lending rate + 2%*	*Credit Cooperatives/Microfinance Institutions*
Kredit kepada BPR	SBDK Ritel - SBDK Ritel + 3% *Retail prime lending rate - Retail prime lending rate + 3%*	*Credit to BPR*
Kredit Konsumer		***Consumer Credit***
Kredit Aneka Guna (KAG)	10,5% - 14%	*Kredit Aneka Guna (KAG)*
Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)	7,5%	*Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)*
Kredit Pegawai BPD Riau	8%	*Kredit Pegawai BPD Riau*
Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)		***Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)***
KPR Umum	11,02% - 12,20%	*General Mortgage*
KPR FLPP	5%	*KPR FLPP*

Jasa dan Layanan

Jasa layanan perbankan merupakan kegiatan penunjang untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi Bank dan nasabah, bahkan keuntungan bagi Bank semakin besar karena kelengkapan fasilitas dan pelayanan yang dimiliki membuat calon nasabah tertarik untuk menggunakan layanannya.

Services

Banking services are supporting activities to expedite the activities of collecting and distributing funds. This activity provides many benefits for the Bank and its customers, even greater profits for the Bank because the completeness of the facilities and services they have makes prospective customers interested in using their services.

Jasa dan layanan dalam negeri Bank Riau Kepri terdiri atas provisi dan komisi bank garansi, provisi RTGS, fee referensi bank dan administrasi giro, pendapatan safe deposit box, diskon/fee asuransi, fee transaksi payment PLN, PDAM, Telkom, resitusi biaya ATM Acquire dan Restitusi ATM.

Domestic services and services of Bank Riau Kepri consist of bank guarantee fees and commissions, RTGS provisions, bank reference fees and current account administration, safe deposit box income, discounts/insurance fees, payment transaction fees for PLN, PDAM, Telkom, ATM Acquire fee restitution and ATM refund.

Tabel Fee Jasa dan Layanan Transaksi
Table of Service Fees and Transaction Services

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Jasa dan Layanan	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Services and Services*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Pendapatan Provisi dan Komisi Bank Garansi	656	499	157	31.46	*Bank Guarantee Fees and Commission Income*
Pendapatan Provisi RTGS, Pendapatan *Fee* Referensi Bank dan Administrasi Giro	2.517	3.166	(649)	-20,50	*RTGS Provision Income, Fee Income Bank Reference and Current Account Administration*
Pendapatan *Safe Deposit Box*	452	429	23	5,36	*Safe Deposit Box Earnings*
Pendapatan Diskon/*Fee*/Komisi Asuransi	12.162	19.457	(7.295)	-37,49	*Income Discount/Fee/Insurance Commission*
Pendapatan *Fee* Transaksi *Payment* PLN	302	306	(4)	-1,31	*PLN Payment Transaction Fee Income*
Pendapatan *Fee* Transaksi *Payment* PDAM	10	8	2	25,00	*PDAM Payment Transaction Fee Income*
Pendapatan *Fee* Transaksi *Payment* Telkom	1.111	822	(289)	35,16	*Telkom Payment Transaction Fee Income*
Pendapatan Restitusi Biaya ATM *Acquire*	6.728	8.737	(2.009)	-22,99	*ATM Fee Refund Income Acquire*
Pendapatan Restitusi ATM	26.487	9.236	17.251	186,78	*Visa ATM Refund Income*
Jumlah *Fee* Jasa dan Layanan Transaksi	**50.425**	**42.660**	**7.765**	**18,20**	***Total Service Fee and Transaction Services***

Jumlah fee jasa dan layanan transaksi tahun 2021 sebesar Rp50,42 miliar, meningkat 18,20% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp42,66 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari Naiknya pendapatan restitusi ATM sebesar Rp17,25 miliar.

Total service fees and transaction services in 2021 amounted to IDR 50.42 billion, an increase of 18.20% compared to 2020 of IDR 42.66 billion. The increase was mainly from the increase in ATM refunds of Rp17.25 billion.

Segmen Syariah

Bank Riau Kepri memberikan perhatian khusus kepada para nasabah yang ingin menjalankan proses perbankan melalui sistem syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah.

Penghimpunan Dana

Produk dana syariah ini digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang ingin memiliki produk syariah tanpa harus beralih kepada bank kompetitor karena mereka yakin bahwa dana yang digunakan oleh Bank Riau Kepri akan kembali digunakan untuk kepentingan masyarakat yang berada di wilayah provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang identik dengan masyarakat melayu yang kental akan agama Islam.

Sharia Segment

Bank Riau Kepri pays special attention to customers who want to run the banking process through the sharia system by opening a Sharia Business Unit.

Fund Raising

This sharia fund product is used to raise funds from people who want to have sharia products without having to switch to competing banks because they believe that the funds used by Bank Riau Kepri will again be used for the benefit of people in the Riau province and Riau Islands which are identical with Malay society that is thick with Islam.

Giro iB

Jumlah dana giro iB tahun 2021 sebesar Rp87,80 miliar, meningkat 29,24% atau Rp19,87 miliar dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp67,93 miliar.

iB Current Account

The amount of iB current accounts in 2021 is IDR 87.80 billion, an increase of 29.24% or IDR 19.87 billion compared to 2020 which reached IDR 67.93 billion.

Tabel Jumlah Dana Giro iB
iB . Current Account Amount Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Giro iB	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Current Account iB*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Giro iB	87.795	67.930	19.865	29,24	*Current Account iB*

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah dana giro iB, jumlah Nasabah giro iB juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,30% atau sebanyak 126 Nasabah dari 1.024 Nasabah pada tahun 2020 menjadi 1.150 Nasabah pada tahun 2021.

In line with the growth in the number of iB current accounts, the number of iB current accounts also grew by 9.99% or 93 customers from 1,024 customers in 2020 to 1,024 customers in 2021.

Tabel Jumlah Nasabah Giro iB
Table of iB Current Account Customers

(dalam Nasabah) | *(in Customer)*

Giro iB	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Current Account iB*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Giro iB	1.150	1.024	126	12,30	*Current Account iB*

Tabungan iB

Jumlah dana Tabungan iB tahun 2021 sebesar Rp. 1,89 triliun, meningkat 55,96% atau Rp. 679,54 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 1,21 triliun.

iB Savings

Total iB savings funds in 2021 amounted to Rp1.89 trillion, an increase of 55.96% or Rp679.54 billion compared to 2020 which was Rp1.21 trillion.

Tabel Jumlah Dana Tabungan iB
Table of Total iB Savings Funds

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Tabungan iB	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Savings iB*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Tabungan iB	1.893.950	1.214.410	679.540	55,96	*iB Savings*

Jumlah Nasabah tabungan iB juga mengalami pertumbuhan sebesar 35,50% atau sebanyak 105.553 Nasabah dari 297.339 Nasabah pada tahun 2020 menjadi 402.892 Nasabah pada tahun 2021.

In line with the growth of iB savings funds, the number of iB savings customers also grew by 30.26% or 69,067 customers from 297,339 customers in 2020 to 297,339 customers in 2021

Tabel Jumlah Nasabah Tabungan iB
Table of Number of iB Savings Customers

(dalam Nasabah) | *(in Customer)*

Tabungan iB	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Savings iB*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Tabungan iB	402.892	297.339	105.553	35,50	*iB Savings*

Deposito iB

Jumlah dana deposito iB tahun 2021 sebesar Rp3,56 triliun, meningkat 59,98% atau Rp1,33 triliun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp2,22 triliun.

iB Deposits

Total iB deposit funds in 2021 amounted to Rp3.56 trillion, an increase of 59.98% or Rp1.33 trillion compared to 2020 which was Rp2.22 trillion.

Tabel Jumlah Dana Deposito iB
Table of Total iB Deposit Funds

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Deposito iB	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Deposit iB*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Deposito iB	3.558.302	2.224.158	1.334.145	59,98	*Deposit iB*

Sedangkan jumlah Nasabah deposito iB mengalami pertumbuhan sebesar 30,43% atau sebanyak 689 Nasabah dari 2.264 Nasabah pada tahun 2020 menjadi 2.953 Nasabah pada tahun 2021.

In line with the growth of iB deposit funds, the number of iB deposit customers also grew by 15.27% or 300 customers from 2,264 customers in 2020 to 2,264 customers in 2021.

Tabel Jumlah Nasabah Deposito iB
Table of Total Customers of iB Deposit Funds

(dalam Nasabah) | *(in Customer)*

Deposito iB	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Deposit iB*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Deposito iB	2.953	2.264	689	30,43	*Deposit iB*

Pembiayaan

Produk pembiayaan syariah yang digunakan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dilaksanakan berdasarkan akad-akad *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Qardh-Rahn*, dan Ijarah.

Jumlah pembiayaan bersih pada tahun 2021 sebesar Rp. 4,96 triliun, tumbuh Rp2,28 triliun atau 84,89% dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan ini umumnya berasal dari pembiayaan *Murabahah* pada produk Pembiayaan Aneka Guna (PAG) iB dan Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) FLPP iB yang bersifat konsumtif, serta Pembiayaan KUR iB (produktif). Peningkatan ini didukung oleh semangat konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah yang mencanangkan penyaluran pembiayaan khususnya pembiayaan konsumtif pada Jaringan Kantor Konvensional.

Financing

Sharia financing products used to channel funds to people in need are carried out based on Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Qardh-Rahn, and Ijarah contracts.

Total net financing in 2021 is Rp. 4.96 trillion, grew by Rp.2.28 trillion or 84.89% compared to 2020. This growth generally came from Murabahah financing in the Multipurpose Financing (PAG) iB product and the consumptive FLPP iB Home Ownership Financing (PPR), as well as consumer financing. KUR iB (productive). This increase was supported by the spirit of the conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank which launched the distribution of financing, especially consumptive financing in the Conventional Office Network.

Tabel Portofolio Pembiayaan
Financing Portfolio Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Pembiayaan	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Financing*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Pembiayaan Bagi Hasil	239.300	155.976	83.324	53,42%	*Profit Sharing Financing*
Pembiayaan Murabahah	4.452.712	2.344.049	2.108.663	89,96%	*Murabaha Financing*
Pembiayaan Qardh-Rahn	50.280	49.283	997	2,02%	*Qardh-Rahn . Financing*
Pembiayaan Ijarah	276.265	188.891	87.374	46,26%	*Ijarah Financing*
Sub-Jumlah	5.018.556	2.738.199	2.280.357	83,28%	*Sub-Amount*
CKPN	(57.804)	(55.070)	(2.734)	4,96%	*CKPN*
Jumlah Bersih	**4.960.751**	**2.683.129**	**2.277.622**	**84,89%**	***Net Amount***

Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan portofolio pembiayaan umumnya berasal dari sektor ekonomi lain-lain dalam hal ini pembiayaan bersifat konsumtif dengan nominal tumbuh sebesar Rp. 2,23 trilyun.

If viewed by economic sector, the increase in the financing portfolio generally came from other economic sectors, in this case consumptive financing with a nominal growth of Rp. 2.23 trillion.

Tabel Portofolio Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi
Table of Financing Portfolio by Economic Sector

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Pembiayaan	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Financing*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian	102.909	86.865	16.044	18,47	*Agriculture, labor and agricultural facilities*
Pertambangan	-	-	-	-	*Mining*
Industri pengolahan	2.932	2.054	878	42,75	*Processing industry*
Listrik, gas dan air	187	50	137	274,00	*Electricity, gas and water*
Konstruksi	76.161	75.030	1.131	1,51	*Construction*
Perdagangan, restoran dan hotel	57.689	50.176	7.513	14,97	*Trade, restaurant and hotel*
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1.135	1.223	-88	-7,20	*Transportation, warehousing and communication*
Jasa dunia usaha	26.801	6.158	20.643	335,22	*Business services*
Jasa sosial dan masyarakat	11.997	10.188	1.809	17,76	*Social and community services*
Lain-lain	4.738.743	2.506.456	2.232.287	89,06	*Etc*
Sub Jumlah	5.018.556	2.738.199	2.280.357	83,28	*Sub Quantity*
CKPN	(57.804)	(55.070)	(2.734)	4,96	*CKPN*
Jumlah - Net	**4.960.751**	**2.683.129**	**2.277.622**	**84,89**	***Total - Net***

Dengan beragamnya produk pembiayaan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Riau Kepri dan didukung oleh semangat konversi Bank Induk Konvensional, maka UUS Bank Riau Kepri mampu meningkatkan jumlah Nasabah pembiayaan dari 18.191 Nasabah pada 2020 menjadi 28.108 Nasabah pada akhir Desember 2021 dengan pertumbuhan 9.917 Nasabah atau 54,52%.

With a variety of financing products for the Sharia Business Unit (UUS) of Bank Riau Kepri and supported by the conversion spirit of the Conventional Parent Bank, UUS Bank Riau Kepri was able to increase the number of financing customers from 18,191 customers in 2020 to 18,191 customers at the end of December 2021 with a growth of 2,750 customers or 17 ,81%.

Tabel Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan
Table of Number of Customers of Financing Products

(dalam Nasabah) | *(in Customer)*

Pembiayaan	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Financing*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Pembiayaan Bagi Hasil	637	386	251	65,03	*Profit Sharing Financing*
Pembiayaan Murabahah	23.273	14.257	9.016	63,24	*Murabaha Financing*
Pembiayaan Qardh-Rahn	2.417	2.250	167	7,42	*Qardh-Rahn . Financing*
Pembiayaan Ijarah	1.781	1.298	483	37,21	*Ijarah Financing*
Jumlah	**28.108**	**18.191**	**9.917**	**54,52**	***Total***

Jasa dan Layanan Syariah

Jasa dan layanan syariah di Bank Riau Kepri terdiri dari layanan jasa kiriman uang melalui sistem SKN dan RTGS, jasa penerimaan pembayaran pajak negara, layanan ATM dan mobile banking, jasa penerimaan pembayaran tagihan kartu kredit Bank Riau Kepri, jasa penerimaan pembayaran tagihan PBB, jasa penerbitan Bank Garansi, serta jasa penerbitan referensi Bank dan dukungan Bank.

Sharia Services

Sharia services and services at Bank Riau Kepri consist of remittance services through the SKN and RTGS systems, state tax payment receipt services, ATM and mobile banking services, Bank Riau Kepri credit card bill payment services, PBB bill payment receipt services, issuance services Bank Guarantee, as well as Bank reference issuance services and Bank support.

Tabel Fee Jasa dan Layanan Transaksi Syariah
Table of Fees for Sharia Transaction Services and Services

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Jasa dan Layanan Transaksi Syariah	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Sharia Transaction Services and Services*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Fee/Komisi/Provisi	14.497	7.148	7.349	102,81	*Fee/Komision/Provisi*

Fee/komisi/provisi jasa dan layanan transaksi syariah tahun 2021 sebesar Rp. 14,50 miliar meningkat 102,83% atau sebesar Rp. 7,35 miliar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 7,15 miliar.

Fees/commissions/services provision and sharia transaction services in 2021 amounted to IDR7.15 billion, an increase of 17.24% or IDR1.05 billion compared to 2020 of IDR7.15 billion.

Pendapatan Segmen Operasi

Pendapatan operasional tahun 2021 sebesar Rp2,42 triliun, menurun 8,13% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp2,64 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan pendapatan operasional dari segmen konvensional sebesar Rp374,84 miliar.

Pendapatan operasional bersih tahun 2021 sebesar Rp1,49 triliun, menurun 7,73% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,62 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan pendapatan dari segmen konvensional sebesar Rp160,12 miliar.

Operating Segment Revenue

The operating income in 2021 was IDR2.42 trillion, decreased by 8,13% compared to 2020 which was IDR2.64 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in operating income from the conventional segment by Rp374.84 billion.

Net operating income in 2021 was Rp1.49 trillion, a decrease of 7.73% compared to 2020 which was Rp1.62 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in revenue from the conventional segment by Rp160.12 billion.

Tabel Pendapatan Segmen Usaha
Business Segment Revenue Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uaian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Pendapatan operasional *)					***Operating income *)***
Konvensional	1.969.238	2.343.720	(374,842)	-15,98	*Conventional*
Syariah	450.608	263.234	187.374	71,18	*Sharia*
Jumlah	**2.419.846**	**2.606.954**	**(187.108)**	**-7,18**	***Amount***
Eliminasi/penyesuaian	1.352	28.422	(27.070)	-95,24	*Elimination/adjustment*
Jumlah	**2.421.198**	**2.635.376**	**(214.178)**	**-8,13**	***Amount***
Pendapatan operasional bersih)**					***Net operating income**)***
Konvensional	1.433.513	1.593.632	(160.119)	-10,05	*Conventional*
Syariah	306.682	143.572	163.110	113,61	*Sharia*
Jumlah	**1.740.195**	**1.737.204**	**2.991**	**0,17**	***Amount***
Eliminasi/penyesuaian	(241.447)	(112.981)	(128.466)	113,71	*Elimination/adjustment*
Jumlah	**1.498.748**	**1.624.223**	**(125.475)**	**-7,73**	***Amount***

*) Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan syariah, dan pendapatan operasional lainnya.
**) Pendapatan operasional bersih terdiri dari pendapatan bunga dan syariah, dan pendapatan operasional lainnya dikurangi beban bunga dan syariah.
**) Operating income consists of interest and sharia income, and other operating income.*
***) Net operating income consists of interest and sharia income, and other operating income less interest and sharia expenses.*

Profitabilitas Segmen Operasi

Laba (rugi) segmen operasi tahun 2021 sebesar Rp381 miliar, turun 17,88% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp463,97 miliar. Hal tersebut berasal dari penurunan laba (rugi) dari segmen konvensional sebesar Rp221,92 miliar.

Operating Segment Profitability

The operating segment's profit (loss) in 2021 was IDR381 billion, a decrease of 17.88% compared to 2020 which was IDR463.97 billion. This came from a decrease in profit (loss) from the conventional segment of Rp.221.92 billion.

Tabel Profitabilitas Segmen Operasi
Operating Segment Profitability Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uaian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Laba (Rugi) Segmen Operasi					***Operating Segment Profit (Loss)***
Konvensional	150.199	372.075	(221.876)	-59,63%	*Conventional*
Syariah	230.814	91.895	138.919	151,17%	*Sharia*
Jumlah	**381.013**	**463.970**	**(82.957)**	**-17,88%**	***Amount***

Segmen Geografis

Penjelasan Segmen Geografis

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Riau dan selain Riau. Bank mempertimbangkan jenis usaha sebagai segmen sekunder.

Produktivitas Segmen Geografis

Informasi yang berkaitan dengan produktivitas segmen geografis Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

Geographic Segment

Explanation Of Geographic Segment

The geographical segment includes providing services within certain economic environments that are subject to risks and returns that are different from other operating segments in other economic environments. The Bank's geographical segment is Riau and other than Riau. The Bank considers the type of business as a secondary segment.

Geographic Segment Productivity

Information related to the productivity of the Bank's geographical segment is presented in the table below:

Tabel Produktivitas Segmen Geografis
Geographic Segment Productivity Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uaian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Simpanan Nasabah dan Bank Lain					***Customer Deposits and Other Banks***
Kota Pekanbaru	10.405.645	9.062.090	1.343.555	14,83	*Pekanbaru City*
Kabupaten Kampar	670.929	611.053	59.876	9,80	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	1.978.056	825.191	1.152.865	139,71	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	778.754	765.871	12.883	1,68	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	562.504	457.914	104.590	22,84	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	1.058.171	844.300	213.871	25,33	*Siak Sri Indrapura Regency*
Kota Dumai	531.719	578.803	(47.083)	-8,13	*Dumai City*
Kabupaten Pelalawan	472.972	456.086	16.886	3,70	*Pelalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hulu	514.997	371.842	143.155	38,50	*Rokan Hulu Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	867.824	754.483	113.341	15,02	*Rokan Hilir Regency*
Kabupaten Kuantan Singingi	625.131	586.926	38.205	6,51	*Kuantan Singingi Regency*
Kota Batam	720.841	735.575	(14.734)	-2,00	*Batam city*
Kabupaten Karimun	400.506	316.363	84.143	26,60	*Karimun Regency*

Uaian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Kabupaten Natuna	280.612	231.491	49.121	21,22	*Natuna Regency*
Kota Tanjung Pinang	968.876	904.948	63.928	7,06	*Tanjung Pinang City*
Kabupaten Kep. Meranti	197.259	196.904	355	0,18	*Kep. Meranti Regency*
Kabupaten Bintan	267.570	248.986	18.584	7,46	*Bintan Regency*
Kota Jakarta	5.354.166	6.152.587	(798.421)	-12,98	*Jakarta city*
Jumlah	**26.656.533**	**24.101.412**	**2.555.121**	**10,60**	***Amount***

Simpanan nasabah dan bank lain segmen geografis tahun 2021 sebesar Rp26,66 triliun, meningkat 10,60% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp24,10 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan simpanan nasabah dan bank lain segmen geografis dari Kabupaten Bengkalis sebesar Rp1,15 triliun.

Deposits from customers and other banks in the geographic segment in 2021 amounted to IDR26.66 trillion, an increase of 10.60% compared to 2020 which was IDR24.10 trillion. The increase mainly came from the growth of customer deposits and other banks in the geographical segment from Bengkalis Regency amounting to Rp1.15 trillion.

Pendapatan Segmen Geografis

Informasi yang berkaitan dengan pendapatan segmen geografis dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

Geographic Segment Revenue

Information related to geographical segment revenue from the Bank is presented in the table below:

Tabel Pendapatan Segmen Geografis
Geographic Segment Revenue Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uaian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Pendapatan Operasional					***Operating Income***
Kota Pekanbaru	1.028.630	884.680	143.951	16,27	*Pekanbaru City*
Kabupaten Kampar	139.608	170.480	(30.873)	-18,11	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	94.134	116.293	(22.159)	-19,05	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	96.318	136.138	(39.820)	-29,05	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	59.882	89.268	(29.387)	-32,92	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	123.664	148.331	(24.667)	-16,63	*Siak Sri Indrapura Regency*
Kota Dumai	78.232	94.835	(16.603)	-17,15	*Dumai City*
Kabupaten Pelalawan	92.532	98.899	(6.367)	-6,44	*Pelalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hulu	117.678	170.618	(52.940)	-31,03	*Rokan Hulu Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	108.889	128.666	(19.777)	-15,37	*Rokan Hilir Regency*
Kabupaten Kuantan Singingi	71.685	91.683	(19.997)	-21,81	*Kuantan Singingi Regency*
Kota Batam	109.760	134.618	(24.858)	-18,47	*Batam city*
Kabupaten Karimun	56.692	64.320	(7.628)	-11,86	*Karimun Regency*
Kabupaten Natuna	51.872	60.948	(9.076)	-14,89	*Natuna Regency*
Kota Tanjung Pinang	114.453	125.027	(10.573)	-8,46	*Tanjung Pinang City*
Kabupaten Kep. Meranti	49.944	64.647	(14.703)	-22,74	*Kep. Meranti Regency*
Kabupaten Bintan	25.226	27.082	(1.856)	-6,85	*Bintan Regency*
Kota Jakarta	647	422	225	53,41	*Jakarta city*
Jumlah	**2.419.846**	**2.606.954**	**(187.108)**	**-7,18**	***Amount***
Eliminasi/penyesuaian	(205.994)	(290.159)	84.165	-29,01	*Elimination/adjustment*
Jumlah	**2.213.852**	**2.316.795**	**(102.943)**	**-4,44**	***Amount***

Pendapatan operasional segmen geografis tahun 2021 sebesar Rp2,21 triliun, menurun 4,44% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp2,32 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya pendapatan operasional segmen geografis dari Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp52,94 miliar.

The operating income of the geographical segment in 2021 was Rp.2.21 trillion, a decrease of 4.44% compared to 2020 which was Rp.2.32 trillion. This decrease was mainly due to a decrease in operating income from the geographical segment of Rokan Hulu Regency by Rp52.94 billion.

Profitabilitas Segmen Geografis

Informasi yang berkaitan dengan profitabilitas segmen geografis dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

Geographic Segment Profitability

Information related to the profitability of the geographical segments of the Bank is presented in the table below:

Tabel Profitabilitas Segmen Geografis
Geographic Segment Profitability Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uaian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Explanation*
			Nominal	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	*(1)*
Laba Sebelum Pajak					*Profit before tax*
Kota Pekanbaru	(298.903)	(349.293)	50.390	-14,43	*Pekanbaru City*
Kabupaten Kampar	69.691	86.693	(17.002)	-19,61	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	70.998	75.868	(4.870)	-6,42	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	60.700	95.018	(34.319)	-36,12	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	40.024	62.259	(22.234)	-35,17	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	67.843	93.988	(26.146)	-27,82	*Siak Sri Indrapura Regency*
Kota Dumai	48.708	61.306	(12.597)	-20,55	*Dumai City*
Kabupaten Pelalawan	51.310	57.942	(6.632)	-11,45	*Pelalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hulu	42.907	87.271	(44.364)	-50,83	*Rokan Hulu Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	55.543	79.855	(24.312)	-30,44	*Rokan Hilir Regency*
Kabupaten Kuantan Singingi	43.455	58.630	(15.176)	-25,88	*Kuantan Singingi Regency*
Kota Batam	47.154	62.800	(15.646)	-24,91	*Batam city*
Kabupaten Karimun	27.685	30.621	(2.936)	-9,59	*Karimun Regency*
Kabupaten Natuna	17.763	29.493	(11.730)	-39,77	*Natuna Regency*
Kota Tanjung Pinang	51.459	74.708	(23.249)	-31,12	*Tanjung Pinang City*
Kabupaten Kep. Meranti	18.411	15.124	3.288	21,74	*Kep. Meranti Regency*
Kabupaten Bintan	12.451	26.712	(14.260)	-53,39	*Bintan Regency*
Kota Jakarta	85.558	13.479	72.079	534,74	*Jakarta city*
Jumlah	**512.758**	**662.474**	**(149.716)**	**-22,60**	***Amount***
Eliminasi/penyesuaian	2.340	10.381	(8.040)	-77,45	*Elimination/adjustment*
Jumlah	**515.098**	**672.855**	**(157.756)**	**-23,45**	***Amount***

Laba sebelum pajak segmen geografis tahun 2021 sebesar Rp515,1 miliar, menurun 23,45% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp672,85 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan laba sebelum pajak segmen geografis dari Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp44,36 miliar.

Profit before tax for geographic segment in 2021 amounted to Rp. 515.1 billion, a decrease of 23.45% compared to 2020 which was Rp. 672.85 billion. The decrease came from a decrease in profit before tax for the geographical segment of Rokan Hulu Regency by Rp. 44.36 billion.

Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto dan mendapat opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau pada tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Bank Riau Kepri terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

Laporan Posisi Keuangan

Financial Overview

The financial review described below refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2021 and 2020 which are presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm of Bustaman, Ezeddin & Putranto and received an opinion that presents fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Riau as of December 31, 2021 as well as the financial performance and cash flows for the year ended December 31, 2021, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

Financial Performance

The financial performance of Bank Riau Kepri consists of the performance of the Statement of Financial Position, the Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income and the Statement of Cash Flows are presented as follows.

Statement of Financial Position

Tabel Laporan Posisi Keuangan
Financial Position Report Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
ASET					
Kas	719.393	914.232	(194.839)	-21,31%	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2.042.746	1.496.657	546.089	36,49	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	88.767	121.448	(32.681)	-26,91%	*Current accounts with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6)	(2)	(4)	229,21%	*Allowance for impairment losses*
Jumlah neto	88.760	121.446	(32.686)	-26,91%	*Net amount*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.334.381	616.992	2.717.389	440,43%	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(7)	7	100%	*Allowance for impairment losses*
Jumlah neto	3.334.381	616.985	2.717.396	440,43%	*Net amount*
Efek-efek	5.238.384	5.689.527	(451.143)	-7,93%	*Securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(897)	(5.545)	4.648	-83,82%	*Allowance for impairment losses*
Jumlah neto	5.237.487	5.683.982	(446.495)	-7,86%	*Net amount*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Kredit yang diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah					*Loans, Receivables and Sharia Financing*
Pihak berelasi	902	2.470	(1.568)	-63,46%	*Related parties*
Pihak ketiga	18.884.011	18.958.479	(74.467)	-0,39%	*Third party*
Jumlah kredit yang diberikan	18.884.914	18.960.949	(76.035)	-0,40%	*Amount of credit granted*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(496.610)	(527.308)	30.699	-5,82%	*Allowance for impairment losses*
Jumlah neto	18.388.304	18.433.641	(45.336)	-0,25%	*net amount*
Penyertaan saham	1.556	1.656	(100)	-6,04%	*Share investment*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(100)	100	-100%	*Allowance for impairment losses*
Penyertaan saham, neto	1.556	1.556	-	-	*Investment in shares, net*
Aset tetap					*Fixed assets*
Harga perolehan	721.050	697.192	23.857	3,42%	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(324.118)	(272.027)	(52.091)	19,15%	*Accumulated depreciation*
Nilai buku, neto	396.932	425.165	(28.233)	-6,64%	*Nuku value, net*
Aset pajak tangguhan	32.099	33.215	(1.115)	-3,36%	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	538.027	473.088	64.939	13,73%	*Other assets*
JUMLAH ASET	**30.779.686**	**28.199.966**	**2.579.720**	**9,15%**	***Total assets***
LIABILITAS DAN EKUITAS					***Liability and equity***
LIABILITAS | *Liability*					
Liabilitas Segera	667.015	769.525	(102.510)	-13,32%	*Immediate Liability*
Simpanan dari nasabah dan Dana Syirkah Temporer					*Deposits from customers and Temporary Syirkah Funds*
Giro dan giro wadiah					*Current accounts and current accounts for wadiah*
Pihak berelasi	4.063.766	2.063.421	2.000.345	96,94%	*Related parties*
Pihak ketiga	1.543.614	1.389.611	154.003	11,08%	*Third party*
Jumlah giro	5.607.380	3.453.032	2.154.348	62,39%	*Total demand deposit*
Tabungan					*Savings*
Pihak berelasi	13.146	12.677	469	3,70%	*Related parties*
Pihak ketiga	7.436.147	6.339.709	1.096.438	17,29%	*Third party*
Jumlah tabungan	7.449.293	6.352.385	1.096.908	17,27%	*Savings amount*
Deposito berjangka					*Time deposit*
Pihak berelasi	31.757	11.301	20.456	181,01%	*Related parties*
Pihak ketiga	12.527.303	12.325.926	201.377	1,63%	*Third party*
Jumlah deposito berjangka	12.559.060	12.337.227	221.833	1,80%	*Amount of time deposits*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Jumlah simpanan, dana syirkah	25.615.733	22.142.644	3.473.088	15,69%	*Total savings, syirkah funds*
Simpanan dari bank lain					*Deposits from other banks*
Pihak berelasi	-	-	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	1.040.800	1.958.768	(917.967)	-46,86%	*Third party*
Jumlah simpanan bank lain	1.040.800	1.958.768	(917.967)	-46,86%	*Amount of other bank deposits*
Pinjaman Yang Diterima	151.442	113.909	37.533	32,95%	*Loans Received*
Utang pajak	32.036	41.547	(9.510)	-22,89%	*Tax money*
Imbalan kerja	26.051	30.008	(3.957)	-13,19%	*Work benefits*
Liabilitas lain-lain	59.449	63.957	(4.508)	-7,05%	*Other Liabilities*
Jumlah Liabilitas	**27.592.527**	**25.120.358**	**2.472.169**	**9,84%**	*Total Liabilities*
EKUITAS | *Equity*					
Modal saham	1.103.161	1.100.461	2.700	0,25%	*Capital stock*
Tambahan modal disetor	4.085	4.785	(700)	-14,63%	*Additional paid-in capital*
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari efek-efek tersedia untuk di jual	2.233	(687)	2.920	-424,82%	*Unrealized net gain (loss) on changes in fair value of available-for-sale securities*
Saldo Laba					*Retain earning*
Telah ditentukan penggunaannya	1.622.421	1.436.833	185.588	12,92%	*Its use has been determined*
Belum di tentukan penggunaannya	455.259	538.217	(82.957)	-15,41%	*Use has not been determined*
Jumlah saldo laba	2.077.680	1.975.049	102.631	5,20%	*Total retained earnings*
JUMLAH EKUITAS	**3.187.159**	**3.079.608**	**107.551**	**3,49%**	*Total equity*
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	**30.779.686**	**28.199.966**	**2.579.720**	**9,15%**	***Total liabilities and equity***

Aset

Aset tahun 2021 sebesar Rp30,80 triliun, meningkat 9,15% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp28,20 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan aset lancar sebesar Rp2,54 triliun.

Assets

Assets in 2021 amounted to IDR 30.80 trillion, an increase of 9.15% compared to 2020 which was IDR 28.20 trillion. The increase mainly came from the growth in current assets of Rp.2.54 trillion.

Tabel Aset
Table of Assets

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Aset Lancar	29.812.628	27.268.498	2.544.130	9,33%	
Aset Tidak Lancar	967.058	931.467	35.590	3,82%	
Total Aset	**30.779.686**	**28.199.966**	**2.579.720**	**9,15%**	

Aset Lancar

Aset lancar tahun 2021 sebesar Rp29,81 triliun, meningkat 9,33% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp27,27 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp2,71 triliun dan giro pada Bank Indonesia sebesar Rp546,09 miliar.

Current Assets

Current assets in 2021 amounted to Rp. 29.81 trillion, an increase of 9.33% compared to 2020 which amounted to Rp. 27.27 trillion. The increase was mainly due to the growth of placements with Bank Indonesia and other banks of Rp. 2.71 trillion and current accounts with Bank Indonesia of Rp. 546.09 billion.



Tabel Aset Lancar
Table of Current Assets

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Kas	719.393	914.232	(194.839)	-21,31%	*Kas*
Giro pada Bank Indonesia	2.042.746	1.496.657	546.089	36,49	*Giro pada Bank indonesia*
Giro pada bank lain	88.767	121.448	(32.681)	-26,91%	*Giro pada bank lain*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6)	(2)	(4)	229,21%	*Cadangan kerugian penurunan nilai*
Jumlah neto	88.760	121.446	(32.685)	-26,91%	*Jumlah neto*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.334.381	616.992	2.717.389	440,43%	*Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(7)	7	100%	*Cadangan kerugian penurunan nilai*
Jumlah neto	3.334.381	616.985	2.717.396	440,43%	*Jumlah neto*
Efek-efek	5.238.384	5.689.527	(451.143)	-7,93%	*Efek-efek*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(897)	(5.545)	4.648	-83,82%	*Allowance for impairment losses*
Jumlah neto	5.237.487	5.683.982	(446.495)	-7,86%	*net amount*
Kredit yang diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah					*Loans, Receivables and Sharia Financing*
Pihak berelasi	902	2.470	(1.568)	-63,46%	*Related parties*
Pihak ketiga	18.884.011	18.958.479	(74.467)	-0,39%	*Third party*
Jumlah kredit yang diberikan	18.884.914	18.960.949	(76.035)	-0,40%	*Amount of credit granted*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(496.610)	(527.308)	30.699	-5,82%	*Allowance for impairment losses*
Jumlah neto	18.388.304	18.433.641	(45.336)	-0,25%	*net amount*
Penyertaan saham	1.556	1.656	(100)	-6,04%	*Share investment*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(100)	100	-100%	*Allowance for impairment losses*
Penyertaan saham, neto	1.556	1.556	-	-	*Investment in shares, net*
Aset Lancar	**29.812.628**	**27.268.498**	**2.544.130**	**9,33%**	***Current assets***

Kas

Kas tahun 2021 sebesar Rp719,39 miliar, menurun 21,31% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp914,23 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan kas Rupiah sebesar Rp205,71 miliar.

Cash

Cash in 2021 was Rp. 719.39 billion, decreased by 21.31% compared to 2020 which was IDR 914.23 billion. The decrease was mainly due to a decrease in Rupiah cash amounting to Rp. 205.71 billion.

Tabel Kas
Cash Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Rupiah					*Rupiah*
Kas	605.487	811.199	(205.711)	-25,36%	*Cash*
Kas ATM	99.517	96.696	2.821	2,92%	*ATM cash*
Jumlah	705.004	907.894	(202.890)	-22,35%	*Amount*
Mata uang asing					*Foreign currency*
Dolar Amerika Serikat	12.488	3.452	9.036	261,78%	*United States Dollar*
Dolar Singapura	1.715	2.687	(972)	-36,19%	*Singapore Dollar*
Euro	186	199	(13)	-6,51%	*Euro*
Jumlah	14.389	6.338	8.051	127,04%	*Amount*
Total	**719.393**	**914.232**	**(194.839)**	**-21,31%**	***Total***

Giro Pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia tahun 2021 sebesar Rp2,04 triliun, meningkat 36,49% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,49 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya giro pada Bank Indonesia dari mata uang Rupiah sebesar Rp546,02 miliar.

Current account with Bank Indonesia

Current accounts with Bank Indonesia in 2021 amounted to Rp2.04 trillion, an increase of 36.49% compared to 2020 which amounted to Rp1.49 trillion. This increase was mainly due to an increase in current accounts with Bank Indonesia from Rupiah by Rp546.02 billion.

Tabel Giro Pada Bank Indonesia
Current Accounts with Bank Indonesia Table (in million Rupiah)

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Rupiah	2.037.686	1.491.669	546.017	36,60%	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	5.060	4.988	72	1,44%	*American Dollars*
Jumlah	**2.042.746**	**1.496.657**	**546.089**	**36,49%**	***Total***

Giro Pada Bank Lain

Giro pada Bank lain tahun 2021 sebesar Rp88,76 miliar, menurun 26,91% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp121,45 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan giro bank lain dari mata uang asing sebesar Rp32,68 miliar.

Current Accounts with Other Banks

Current accounts with other banks in 2021 amounted to Rp. 88.76 billion, decreased by 26.91% compared to 2020 which amounted to Rp. 121.45 billion. The decrease was mainly due to a decrease in demand deposits from other banks in foreign currencies by Rp. 32.68 billion.

Tabel Giro Pada Bank Lain
Current Account with Other Banks Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Rupiah	63.417	66.955	(3.537)	-5,28%	*Rupiah*
Mata uang asing	88.767	121.448	(32.681)	-26,91%	*Foreign currency*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6)	(2)	(4)	229,21%	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**88.760**	**121.446**	**(32.685)**	**-26,91%**	***Total - net***

Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain tahun 2021 sebesar Rp3,33 triliun, meningkat 440,43% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp616,99 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp2,42 triliun.

Placement with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other Banks in 2021 amounted to Rp3.33 trillion, an increase of 440.43% compared to 2020 which was Rp616.99 billion. This increase was mainly due to an increase in placements with Bank Indonesia by Rp2.42 trillion.

Tabel Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain
Placements with Bank Indonesia and Other Banks

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Penempatan pada Bank Indonesia	2.875.771	459.670	2.416.101	525,62%	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada Bank Lain	458.610	157.322	301.288	191,51%	*Placements with Other Banks*
	3.334.381	616.992	2.717.389	440,43%	
Dikurangi:					*Reduction:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(7)	7	-100%	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**3.334.381**	**616.985**	**2.717.396**	**440,43%**	***Total - net***

Efek-Efek

Efek-efek tahun 2021 sebesar Rp5,24 triliun, menurun 7,86% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp5,68 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) reksadana dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp1,94 triliun.

Securities

Securities in 2021 amounted to Rp5.24 trillion, a decrease of 7.86% compared to 2020 which was Rp5.68 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in held-to-maturity Money Market Securities (SBPU) by Rp1.94 trillion.

Tabel Efek-Efek
Securities Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
SBPM obligasi tersedia untuk dijual	2.832.346	975.434	1.856.912	190,37%	*SBPM bonds available for sale*
SBPU tersedia untuk dijual	-	-	-	-	*SPBU available for sale*
SBPU reksadana dimiliki hingga jatuh tempo	1.167.610	3.109.914	(1.942.304)	-62,46%	*Mutual fund SBPU is held to maturity*
Sukuk BI diperdagangkan	1.207.402	1.572.719	(365.317)	-23,23%	*BI Sukuk traded*
SBPM SBSN PD/SM dimiliki hingga jatuh tempo	30.000	30.000	-	-	*SBPM SBSN PD/SM held until maturity*
SBPM SBSN PD/SM HTM Premium	1.026	1.459	(433)	-29,70%	*SBPM SBSN PD/SM HTM Premium*
Jumlah Efek-efek	5.238.384	5.689.527	(451.143)	-7,93%	*Number of Securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(897)	(5.545)	4.648	-83,82%	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**5.237.487**	**5.683.982**	**(446.495)**	**-7,86%**	***Total***

Kredit Yang Diberikan, Piutang Dan Pembiayaan Syariah

Kredit bersih yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah tahun 2021 sebesar Rp18,39 triliun, menurun 0,25% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp18,43 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan kredit konsumtif sebesar Rp216,25 miliar.

Loans, Receivables And Sharia Financing

Net loans, receivables and sharia financing in 2021 amounted to IDR 18.39 trillion, a decrease of 0.25% compared to 2020 which was IDR 18.43 trillion. This decrease was mainly due to a decrease in consumer loans of Rp.216.25 billion.

Tabel Kredit Yang Diberikan, Piutang dan Pembiayaan Syariah
Loans, Receivables and Sharia Financing Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Modal kerja	1.728.705	1.624.915	103.789	6,39%	*Working capital*
Investasi	2.400.324	2.363.909	36.415	1,54%	*Investment*
Konsumtif	14.755.885	14.972.124	(216.239)	-1,44%	*Consumptive*
Jumlah	18.884.914	18.960.949	(76.035)	-0,40%	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(496.610)	(527.308)	30.699	-5,82%	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.388.304**	**18.433.641**	**(45.336)**	**-0,25%**	***Total - net***

Penyertaan Saham, Neto

Penyertaan saham, neto tahun 2021 sebesar Rp1,56 triliun, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp 1,65 triliun. Penurunan tersebut sejalan dengan proses konversi Bank menjadi Bank Umum Syariah, maka berdasarkan Peraturan OJK No.36/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal tersebut, pada tahun 2021 Bank melakukan divestasi atas penyertaan modal sebesar Rp100 juta Pada PD BPR GEMILANG .

Equity Participation, Net

Investments in shares, net in 2021, amounted to Rp. 1.56 trillion, a decrease compared to 2020 which was Rp. 1.65 trillion. The decrease was in line with the conversion process of the Bank into a Sharia Commercial Bank, so based on OJK Regulation No.36/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning Prudential Principles in Equity Participation Activities, in 2021 the Bank divested its equity participation of IDR 100 million at PD BPR GEMILANG.

Tabel Penyertaan Saham
Equity Participation Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
BPR Gemilang/Kateman	200	200	-	-	*BPR Gemilang/Kateman*
PD BPR Rokan Hilir	200	200	-	-	*PD BPR Rokan Hilir*
BPR Karimun	-	100	(100)	-100%	*BPR Karimun*
PT Sarana Ventura	1.155	1.155	-	-	*PT Sarana Venture*
Jumlah	**1.556**	**1.656**	**(100)**	**-6%**	***Amount***

Aset Tidak Lancar

Aset tidak lancar tahun 2021 sebesar Rp967,06 miliar, meningkat 3,82% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp931,47 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan aset lain-lain sebesar Rp64,94 miliar.

Non-current Assets

Non-current assets in 2021 amounted to Rp967.06 billion, an increase of 3.82% compared to 2020 which amounted to Rp931.47 billion. The increase mainly came from the growth in other assets of Rp64.94 billion.

Tabel Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Aset tetap					*Fixed assets*
Harga perolehan	721.050	697.192	23.857	3,42%	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(324.118)	(272.027)	(52.091)	19,15%	*Accumulated depreciation*
Nilai buku, neto	396.932	425.165	(28.233)	-6,64%	*Book value, net*
Aset pajak tangguhan	32.099	33.215	(1.115)	-3,36%	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	538.027	473.088	64.939	13,73%	*Other assets*
Aset Tidak Lancar	**967.058**	**931.467**	**35.590**	**3,82%**	**Non-Current Assets**

Aset Tetap

Aset tetap tahun 2021 sebesar Rp396,93 miliar, menurun 6,64% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp425,17 miliar. Aset tetap berupa gedung, kendaraan dan inventaris tertentu lainnya diasuransikan atas kemungkinan risiko kebakaran, kecelakaan dan risiko lain. Besarnya nilai pertanggungan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp450.220.358.136 dan Rp349.750.791.120 diasuransikan kepada Askrindo, PT Askrida, Bumiputera, Bumida, Tripakarta, Bumiputramuda, Jasindo, Parolamas dan Takaful. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari kebakaran dan gempa bumi.

Fixed Assets

Fixed assets in 2021 amounted to Rp396.93 billion, a decrease of 6.64% compared to 2020 which amounted to Rp425.17 billion. Fixed assets in the form of buildings, vehicles and certain other inventories are insured against possible risks of fire, accident and other risks. The sum insured as of December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp450,220,358,136 and Rp349,750,791,120, respectively, was insured with Askrindo, PT Askrida, Bumiputera, Bumida, Tripakarta, Bumiputramuda, Jasindo, Parolamas and Takaful. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from fire and earthquake.

Tabel Aset Tetap
Fixed Assets Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Harga perolehan	721.050	697.192	23.857	3,42%	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(324.118)	(272.027)	(52.091)	19,15%	*Accumulated depreciation*
Nilai buku, neto	**396.932**	**425.165**	**(28.233)**	**-6,64%**	***Book value, net***

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan tahun 2021 sebesar Rp32,1 miliar, menurun 3,36% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp33,21 miliar.

Deferred tax assets

Deferred tax assets in 2021 amounted to Rp32.1 billion, a decrease of 3.36% compared to 2020 which was Rp33.21 billion.

Tabel Aset Pajak Tangguhan
Deferred Tax Asset Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Aset pajak tangguhan	32.099	33.215	(1.115)	-3,36%	*Deferred tax assets*

Aset Lain-Lain

Aset lain-lain tahun 2021 sebesar Rp538,03 miliar, meningkat 13,73% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp473,09 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan uang muka dan beban dibayar di muka Rp24,47 miliar.

Other assets

Other assets in 2021 amounted to Rp538.03 billion, an increase of 13.73% compared to 2020 which amounted to Rp473.09 billion. The increase mainly came from the growth of advances and prepaid expenses of Rp24.47 billion.

Tabel Aset Lain-Lain
Miscellaneous Asset Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	161.511	141.346	20.164	14,27%	***Interest income that will still be received***
Uang muka dan beban dibayar dimuka	104.308	79.835	24.472	30,65%	***Advances and prepaid expenses***
Tagihan principle acquirer	197.182	197.693	(511)	-0,26%	*Principle acquirer bill*
Kerugian dan kecurangan dalam penyelesaian	1.570	1.873	(303)	-16,18%	*Loss and fraud in progress*
Nota debet dalam penyelesaian	286	1.308	(1.021)	-78,11	*Debit note in progress*
Selisih kas ATM dalam penyelesaian	850	896	(47)	-5,13%	*ATM cash difference in settlement*
Pembayaran lainnya dalam penyelesaian yadib	515	143	372	260,14%	*Other payments in progress of the yadib settlement*
Tagihan pembayaran affinity kartu kredit dalam penyelesaian	10	10	-	-	*Stationery and other supplies*
Persediaan alat tulis dan lainnya	7.227	6.711	516	7,70%	
Piutang sewa dan jasa, net	2.042	2.073	(31)	-1,50%	*Rental and service receivables, net*
Aset hak guna	25.105	27.543	(2.438)	-8,85%	*Usage right assets*
Pos-pos debet dalam penyelesaian lainnya	37.420	13.655	23.765	174,04%	*Other in-progress debit items*
Jumlah Lain-lain	**272.208**	**251.906**	**20.302**	**8,06%**	***Others***
Jumlah	**538.027**	**473.088**	**64.939**	**13,73%**	***Total***

Liabilitas

Liabilitas tahun 2021 sebesar Rp27,59 triliun, meningkat 9,84% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp25,12 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan liabilitas jangka pendek sebesar Rp2,45 triliun.

Liability

Liabilities in 2021 amounted to Rp27.59 trillion, an increase of 9.84% compared to 2020 which was Rp25.12 trillion. The increase was mainly due to the growth in current liabilities of Rp2.45 trillion.

Tabel Liabilitas
Liability Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Liabilitas jangka pendek	27.323.548	24.870.937	2.452.611	9,86%	*Short-term liabilities*
Liabilitas jangka panjang	268.979	249.421	19.558	7,84%	*Long-term liabilities*
Jumlah liabilitas	**27.592.527**	**25.120.358**	**2.472.169**	**9,84%**	***Total liabilities***

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek tahun 2021 sebesar Rp27,32 triliun, meningkat 9,86% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp24,87 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan simpanan dari nasabah dan dana syirkah temporer sebesar Rp3,47 triliun.

Short-Term Liabilities

Short-term liabilities in 2021 amounted to Rp27.32 trillion, an increase of 9.86% compared to 2020 which amounted to Rp24.87 trillion. The increase was mainly due to the growth in deposits from customers and temporary syrikah funds of Rp3.47 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Table of Short-Term Liabilities

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Liabilitas Segera	667.015	769.525	(102.510)	-13,32%	*Current Liability*
Simpanan dari nasabah dan Dana Syirkah Temporer					*Deposits from customers and Temporary Syirkah Funds*
Giro dan giro wadiah					*Current accounts and current accounts for wadiah*
Pihak berelasi	4.063.766	2.063.421	2.000.345	96,94%	*Related parties*
Pihak ketiga	1.543.614	1.389.611	154.003	11,08%	*Third party*
Jumlah giro	5.607.380	3.453.032	2.154.348	.62,39%	*Total Current Account*
Tabungan					*Savings*
Pihak berelasi	13.146	12.677	469	3,70%	*Related parties*
Pihak ketiga	7.436.147	6.339.709	1.096.438	17,29%	*Third Party*
Jumlah tabungan	7.449.293	6.352.385	1.096.908	17,27%	*Total Savings*
Deposito berjangka					*Time deposit*
Pihak berelasi	31.757	11.301	20.456	181,01%	*Related parties*
Pihak ketiga	12.527.303	12.325.926	201.377	1,63%	*Third party*
Jumlah deposito berjangka	12.559.060	12.337.227	221.833	1,80%	*Total time deposit*
Jumlah simpanan, dana syrikah	25.615.733	22.142.644	3.473.088	15,69%	*Total savings, syirkah funds*
Simpanan dari bank lain					*Deposits from other banks*
Pihak berelasi					*Related parties*
Pihak ketiga	1.040.800	1.958.768	(917.967)	-46,86%	*Third party*
Jumlah simpanan bank lain	1.040.800	1.958.768	(917.967)	-46,86%	*Total deposits from other banks*
Jumlah	**27.323.548**	**24.870.937**	**2.452.611**	**9,86%**	***Total***

Liabilitas Segera

Liabilitas segera tahun 2021 sebesar Rp667,01 miliar, menurun 13,32% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp769,53 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan kewajiban ***principle aqcuirer*** sebesar Rp27,24 miliar.

Current Liabilities

Current liabilities due immediately in 2021 amounted to Rp667.01 billion, decreased by 13.32% compared to 2020 which was Rp769.53 billion. The decrease was mainly due to a decrease in principal acquirments amounting to Rp27.24 billion.

Tabel Liabilitas Segera
Immediate Liability Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Kiriman uang dan inkaso	76.250	79.594	(3.343)	-4,20%	*Remittance and collections*
Jasa produksi karyawan	85.728	104.393	(18.665)	-17,88%	*Employee production services*
Beban masih harus dibayar	81.369	94.606	(13.236)	-13,99%	*Accrued expenses*
Setoran-setoran lain	86.433	103.450	(17.016)	-16,45%	*Other deposits*
Bunga deposito	12.816	27.166	(14.350)	-52,82%	*Deposit interest*
Bagi hasil	4.718	4.929	(211)	-4,28%	*Profit sharing*
Tantiem pengurus	9.525	11.599	(2.074)	-17,88%	*Management bonus*
Kewajiban principle aqcuirer	224.370	251.614	(27.243)	-10,83%	*The obligation of the principle acquirer*
Setoran jaminan jatuh tempo	23.614	23.434	180	0,77%	*The guarantee deposit is due*
Penampungan SPMU/SP2D Yadib	-	13.069	(13.069)	-100,00%	*Yadib SPMU/SP2D escrow*
Warkat kredit kliring	10.861	11.997	(1.136)	-9,47%	*Clearing credit notes*
Kewajiban transaksi Telkomsel	923	867	56	6,52%	*Telkomsel transaction obligations*
Rekening tabungan ditutup	439	439	-	-	*Closed savings account*
Setoran tagihan kartu kredit	28	28	-	-	*Credit card bill deposits*
Setoran kredit kelolaan	18	16	2	14,06%	*Managed credit deposits*
Rekening giro yang ditutup	10	10	-	1,26%	*Closed checking account*
Liabilitas segera lainnya	49.911	42.316	7.595	17,95%	*Other current liabilities*
Jumlah	***667.015***	***769.525***	***(102.510)***	***-13,32%***	***Total***

Simpanan Dari Nasabah Dan Dana Syirkah Temporer

Simpanan dari nasabah dan dana syirkah temporer tahun 2021 sebesar Rp25,62 triliun, meningkat 15,69% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp22,14 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan giro sebesar Rp2,15 triliun.

Deposits From Customers And Temporary Syirkah Funds

Deposits from customers and temporary syirkah funds in 2021 amounted to IDR 25.62 trillion, an increase of 15.69% compared to 2020 which was IDR 22.14 trillion. The increase mainly came from the growth in demand deposits of Rp2.15 trillion.

Tabel Simpanan dari Nasabah dan Dana Syirkah Temporer
Table of Deposits from Customers and Temporary Syirkah Funds

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Giro dan giro wadiah					*Wadiah demand deposits and current accounts*
Pihak berelasi	4.063.766	2.063.421	2.000.345	96,94%	*Related parties*
Pihak ketiga	1.543.614	1.389.611	154.003	11,08%	*Third party*
Jumlah giro	**5.607.380**	**3.453.032**	**2.154.348**	**62,39%**	***Total Current Account***
Tabungan					*Savings*
Pihak berelasi	13.146	12.677	469	3,70%	*Related parties*
Pihak ketiga	7.436.147	6.339.709	1.096.438	17,29%	*Third party*
Jumlah tabungan	**7.449.293**	**6.352.385**	**1.096.908**	**17,27%**	**Total savings**
Deposito berjangka					*Time deposit*
Pihak berelasi	31.757	11.301	20.456	181,01%	*Related parties*
Pihak ketiga	12.527.303	12.325.926	201.377	1,63%	*Third party*
Jumlah deposito berjangka	**12.559.060**	**12.337.227**	**221.833**	**1,80%**	***Total time deposit***
Jumlah simpanan, dana syrikah	**25.615.733**	**22.142.644**	**3.473.088**	**15,69%**	***Total savings, syirkah funds***

Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain tahun 2021 sebesar Rp1,04 triliun, menurun 46,86% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,96 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan *Interbank Call Money* (ICM) sebesar Rp660,00 miliar.

Deposits From Other Banks

Deposits from other banks in 2021 amounted to Rp1.04 trillion, a decrease of 46.86% compared to 2020 which was Rp1.96 trillion. This decrease was mainly due to a decrease in Interbank Call Money (ICM) of Rp.660.00 billion.

Tabel Simpanan dari Bank Lain
Table of Deposits from Other Banks

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Giro	21.148	23.005	(1.857)	-8,07%	*Current account*
Tabungan	14.977	12.607	2.370	18,80%	*Savings*
Deposito	88.675	136.625	(47.950)	-35,10%	*Deposits*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	-	200.000	(200.000)	-100%	*Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)*
Deposit On Call (DOC) Bank Lain	1.000	11.530	(10.530)	-91,33%	*Deposit on Call of Other Banks*
Interbank Call Money (ICM)	915.000	1.575.000	(660.000)	-41,90%	*Interbank Call Money (ICM)*
Jumlah	**1.040.800**	**1.958.768**	**(917.967)**	**-46,86%**	***Total***

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang tahun 2021 sebesar Rp268,98 miliar, meningkat 7,84% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp249,42 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan pinjaman yang diterima sebesar Rp37,53 miliar.

Long Term Liability

Long-term liabilities in 2021 amounted to Rp268.98 billion, an increase of 7.84% compared to 2020 which amounted to Rp249.42 billion. The increase mainly came from the growth of loans received by Rp37.53 billion.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Long-Term Liabilities Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Pinjaman Yang Diterima	151.442	113.909	37.533	32,95%	*Loans Received*
Utang pajak	32.036	41.547	(9.510)	-22,89%	*Tax debt*
Imbalan kerja	26.051	30.008	(3.957)	-13,19%	*Employee benefits*
Liabilitas lain-lain	59.449	63.957	(4.508)	-7,05%	*Other liabilities*
Jumlah	**268.979**	**249.421**	**19.558**	**7,84%**	***Total***

Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima tahun 2021 sebesar Rp151,44 miliar, meningkat 32,95% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp113,91 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan Dana KPR Sejahtera PPDPP sebesar Rp30,48 miliar.

Loan Accept

Loans received in 2021 amounted to Rp151.44 billion, an increase of 32.95% compared to 2020 which was Rp113.91 billion. The increase mainly came from the growth of the PPDPP Prosperous Mortgage Fund of Rp. 30.48 billion.

Tabel Pinjaman Yang Diterima
Accepted Loan Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Pinjaman Dana Kelolaan	463	1.100	(637)	-57,90%	*Managed Fund Loans*
Piutang Murabahah Perorangan					*Individual Murabahah Receivables*
Anuitas KPR FLPP	52.932	31.086	21.846	70,28%	*FLPP KPR Annuity*
Pinjaman Dana FLPP					*FLPP Fund Loans*
Kemenpera	17.441	19.706	(2.264)	-11,49%	*Ministry of Industry*
Pinjaman LPDB	-	11.888	(11.888)	-100,00%	*LPDB Loans*
Dana KPR Sejahtera PPDPP	80.606	50.130	30.476	60,79%	*PPDPP Prosperous KPR Fund*
Jumlah	**151.442**	**113.909**	**37.533**	**32,95%**	***Total***

Utang Pajak

Utang pajak tahun 2021 sebesar Rp32,04 miliar, menurun 22,89% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp41,55 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari menurunnya utang pajak PPh Pasal 29 sebesar Rp12,55 miliar.

Tax Debt

Taxes payable in 2021 amounted to Rp32.04 billion, a decrease of 22.89% compared to 2020 which was Rp41.55 billion. The decrease was mainly due to a decrease in Article 29 income tax payable by Rp12.55 billion.

Tabel Utang Pajak
Tax Payable Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
PPh Pasal 4 (2)	5.011	9.875	(4.863)	-49,25%	*Income Tax Article 4(2)*
PPh Pasal 21	9.964	3.679	6.286	170,87%	*Income Tax Article 21*
PPh Pasal 23	325	215	110	51,37%	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 25	2.851	1.431	1.420	99,26%	*Income Tax Article 25*
PPh Pasal 29	13.566	26.120	(12.554)	-48,06%	*Income Tax Article 29*
PPN Keluaran	169	171	(2)	-1,41%	*Output VAT*
Lainnya	150	56	93	165,85%	*Others*
Jumlah	**32.036**	**41.547**	**(9.510)**	**-22,89%**	***Total***

Imbalan Kerja

Imbalan kerja tahun 2021 sebesar Rp26,05 miliar, menurun 13,19% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp30,01 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya imbalan cuti besar sebesar Rp2,90 miliar.

Employment Benefits

Employee benefits in 2021 amounted to Rp26.05 billion, a decrease of 13.19% compared to 2020 which was Rp30.01 billion. The decrease was mainly due to a decrease in benefits for long leave of Rp.2.90 billion.

Tabel Imbalan Kerja
Employee Benefits Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Imbalan cuti besar	13.731	16.627	(2.896)	-17,42%	*Big leave rewards*
Imbalan penghargaan masa bakti	12.320	13.381	(1.061)	-7,93%	*Service award rewards*
Jumlah	**26.051**	**30.008**	**(3.957)**	**-13,19%**	***Total***

Liabilitas Lain-Lain

Liabilitas lain-lain tahun 2021 sebesar Rp59,45 miliar, menurun 7,05% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp63,96 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan liabilitas lainnya sebesar Rp6,14 miliar.

Other Liabilities

Other liabilities in 2021 amounted to Rp59.45 billion, a decrease of 7.05% compared to 2020 which amounted to Rp63.96 billion. The decrease was mainly due to a decrease in other liabilities of Rp6.14 billion.

Tabel Liabilitas Lain-Lain
Other Liabilities Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Setoran jaminan bank garansi	12.109	13.953	(1.844)	-13,22%	*Bank guarantee deposit*
Rek. perantara sistem dan ATM	8	5.897	(5.889)	-99,86%	*REC. intermediary system and ATM*
Beban bunga yang akan dibayar	334	1.171	(837)	-71,50%	*Interest expense to be paid*
Pos kredit dalam penyelesaian	27.703	16.596	11.107	66,93%	*Credit item in progress*
Kredit kelolaan belum disalurkan	26	880	(854)	-97,07	*Managed credit has not been disbursed*
Pendapatan bunga ditangguhkan	-	388	(388)	-100,00%	*Deferred interest income*
Titipan jaminan kunci save deposit	668	611	58	9,46%	*Security deposit key to save deposit*
Selisih pasiva dalam penyelesaian	3.836	3.630	207	5,70%	*Difference in liabilities in progress*
Liabilitas sewa	5.701	5.624	77	1,37%	*Lease liabilities*
Lainnya	9.063	15.209	(6.145)	-40,41%	*Others*
Jumlah	**59.449**	**63.957**	**(4.508)**	**-7,05%**	***Total***

Ekuitas

Ekuitas tahun 2021 sebesar Rp3,19 triliun, meningkat 3,49% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp3,08 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp185,59 miliar.

Equity

Equity in 2021 is IDR 3.19 trillion, an increase of 3.49% compared to 2020 which was IDR 3.08 trillion. The increase was mainly derived from the growth in retained earnings that have been determined to be used by Rp185.59 billion.

Tabel Ekuitas
Equity Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Modal saham	1.103.161	1.100.461	2.700	0,25%	*Capital stock*
Tambahan modal disetor	4.085	4.785	(700)	-14,63%	*Additional paid-in capital*
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari efek-efek tersedia untuk di jual	2.233	(687)	2.920	-424,82%	*Unrealized gain(loss) on changes in fair value of available-for-sale securities*
Saldo Laba					*Retain earning*
Telah ditentukan penggunaannya	1.622.421	1.436.833	185.588	12,92%	*Use has been determined*
Belum di tentukan penggunaannya	455.259	538.217	(82.957)	-15,41%	*Use has not been determined*
Jumlah saldo laba	2.077.680	1.975.049	102.631	5,20%	*Total retained earnings*
Jumlah Ekuitas	**3.187.159**	**3.079.608**	**107.551**	**3,49%**	***Total Equity***

Modal Saham

Modal saham tahun 2021 sebesar Rp1,10 triliun, meningkat 0,24% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,10 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan saham seri A sebesar Rp2,70 miliar.

Capital Stock

The share capital in 2021 is IDR 1.10 trillion, an increase of 0.24% compared to 2020 which was IDR 1.10 trillion. The increase mainly came from the growth of series A shares of Rp2.70 billion.

Tabel Modal Saham
Share Capital Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Modal Ditempatkan dan disetor penuh					*Issued and fully deposited capital*
Saham Seri A	1.100.161	1.097.461	2.700	0,25%	*Series A Shares*
Saham Seri B	3.000	3.000	-	-	*Series B Shares*
Jumlah	**1.103.161**	**1.100.461**	**2.700**	**0,24%**	***Total***

Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor tahun 2021 sebesar Rp4,08 miliar, menurun 14,63% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp4,79 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari berkurangnya tambahan modal disetor dari Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp2,70 miliar.

Additional Paid-Up Capital

Additional paid-in capital in 2021 amounted to IDR4.08 billion, a decrease of 14.63% compared to 2020 which was IDR4.79 billion. The decrease was mainly due to a decrease in additional paid-in capital from Indragiri Hilir Regency by Rp. 2.70 billion.



Tabel Tambahan Modal Disetor
Additional Paid-in Capital Tabel Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Dana setoran modal	2.085	2.085	-	-	*Capital deposit funds*
Provinsi Riau	-	-	-	-	*Riau Province*
Kota Pekanbaru	-	-	-	-	*Pekanbaru City*
Kota Tanjung Pinang	-	-	-	-	*Tanjung Pinang City*
Kota Batam	-	-	-	-	*Batam city*
Kabupaten Kampar	-	-	-	-	*Kampar District*
Kabupaten Bengkalis	-	-	-	-	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	-	-	-	-	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	-	2.700	(2.700)	-100,00%	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Bintan	-	-	-	-	*Bintan Regency*
Kabupaten Pelalawan	-	-	-	-	*Pelalawan District*
Kabupaten Rokan Hilir	-	-	-	-	*Rokan Hilir District*
Kabupaten Natuna	-	-	-	-	*Natuna Regency*
Kabupaten Lingga	-	-	-	-	*Lingga County*
Kabupaten Anambas	-	-	-	-	*Anambas District*
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	2.000	0	2.000	100,00%	*Riau Kepri Amanah Sharia Consumer Cooperative (Series B)*
Jumlah	**4.085**	**4.785**	**(700)**	**-14,63%**	***Amount***

Keuntungan (Kerugian) Bersih Yang Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai Wajar Dari Efek-Efek Tersedia Untuk Di Jual

Keuntungan bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari efek-efek tersedia untuk di jual tahun 2021 sebesar Rp2.232,81 juta, meningkat 425,04% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami kerugian sebesar Rp687,39 juta.

Unrealized Net Profit (Loss) On Changes In The Fair Value Of Securities Available For Sale

Unrealized net gain on changes in fair value of available-for-sale securities in 2021 amounted to Rp2,232.81 million, an increase of 425.04% compared to 2020 which experienced a loss of Rp.687.39 million.

Tabel Keuntungan (Kerugian) Bersih Yang Belum Direalisasi Atas Perubahan Nilai Wajar Dari Efek-Efek Tersedia Untuk Di Jual
Table of Unrealized Net Gain (Loss) on Changes in Fair Value of Available-For-Sell Securities

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari efek-efek tersedia untuk di jual	2.863	(881)	3.744	-424,97%	*Unrealized net gain (loss) on changes in fair value of available-for-sale securities*
Pajak tangguhan	(630)	194	(824)	-424,74%	*Deferred tax*
Jumlah	**2.233**	**(687)**	**2.920**	**-425,04%**	***Total***

Saldo Laba

Saldo laba tahun 2021 sebesar Rp2,08 triliun, meningkat 5,20% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,98 triliun. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp185,59 miliar.

Retain Earning

Retained earnings in 2021 amounted to IDR2.08 trillion, an increase of 5.20% compared to 2020 which was IDR1.98 trillion. The increase was mainly derived from the growth in retained earnings that have been determined to be used by Rp185.59 billion.

Tabel Saldo Laba
Profit Balance Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Telah ditentukan penggunaannya	1.622.421	1.436.833	185.588	12,92%	*Use has been determined*
Belum di tentukan penggunaannya	455.259	538.217	(82.957)	-15,41%	*Use has not been determined*
Jumlah saldo laba	**2.077.680**	**1.975.049**	**102.631**	**5,20%**	***Total retained earnings***

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

Statement Of Profit Loss And Other Comprehensive Income

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Table of Income Statements and Other Comprehensive Income

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Pendapatan dan beban operasional					*Operating income and expenses*
Pendapatan bunga dan syariah					*Interest income and sharia*
Pendapatan bunga	1.781.784	2.047.932	(266.148)	-13,00%	*Interest income*
Pendapatan syariah	432..068	268.863	163.205	60,70%	*Sharia income*
Jumlah pendapatan bunga, syariah	2.213.852	2.316.795	(102.943)	-4,44%	*Total interest income, sharia*
Beban bunga dan syariah					*Interest and Sharia expenses*
Beban bunga	(768.749)	(879.843)	111.094	-12,63%	*Interest expenses*
Beban syariah	(153.456)	(130.148)	(23.309)	17,91%	*Sharia expenses*
Provisi dan komisi	(244)	(1.162)	919	-79,03%	*Fees and commissions*
Jumlah beban bunga, syariah	(922.449)	(1.011.153)	88.704	-8,77%	*Total interest expense, net sharia*
Pendapatan bunga dan syariah, neto	1.291.403	1.305.642	(14.239)	-1,09%	*Interest income and sharia, net*
Pendapatan operasional lainnya	207.345	318.581	(111.236)	-34,92%	*Other operating income*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(35.019)	(44.673)	9.654	-21,61%	*Allowance for impairment losses on productive assets*
Beban operasional lainnya		-			*Other operating expenses*
Umum dan administrasi	(289.258)	(271.697)	(17.561)	6,46%	*General and administration*
Tenaga kerja	(575.384)	(565.395)	(9.990)	1,77%	*Labour*
Lainnya	(47.752)	(45.221)	(2.532)	5,60%	*Others*
Jumlah beban operasional lainnya	(912.394)	(882.312)	(30.082)	3,41%	*Total of other operating expenses*
Laba operasional	551.335	697.238	(145.903)	-20,93%	*Operational profit*
Pendapatan dan (beban) non operasional					*Non-operational income and (expenses)*
Pendapatan non operasional	12.428	6.515	5.913	90,77%	*Non-operational income*
Beban non operasional	(48.655)	(30.899)	(17.766)	57,5%	*Non-operational expenses*
Jumlah	(36.237)	(24.384)	(11.853)	48,61%	*Total*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Laba sebelum pajak	515.098	672.855	(157.756)	-23,45%	*Profit before tax*
Manfaat (beban) pajak penghasilan		-			*Income tax benefit (expense)*
Pajak kini	(126.372)	(171.864)	45.492	-26,47%	*Current tax*
Pajak tangguhan	(486)	5.057	(5.542)	-109,6%	*Deferred tax*
Penyesuaian pajak tahun lalu	(7.227)	(42.078)	34.851	-82,82%	*Last year's tax adjustment*
Beban pajak – neto	(134.085)	(208.885)	74.800	-35,81%	*Tax burden – net*
Laba tahun berjalan	381.013	463.970	(82.956)	-17,88%	*Current year profit*
Penghasilan komprehensif lain					*Other comprehensive income*
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-			*Items to be reclassified to profit or loss*
Keuntungan/(kerugian) atas perubahan nilai wajar dari efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	3.744	2.425	1.319	54,37%	*Gain/(loss) on changes in fair value of available-for-sale securities*
Pajak penghasilan lain	(824)	(633)	(191)	30,17%	*Other income tax*
	2.920	1.792	1.128	62,92%	
Jumlah laba komprehensif	**383.934**	**465.762**	**(81.828)**	**-17,57%**	***Total comprehensive profit***
Laba bersih per saham (nilai penuh)	34.581	42.561	(7.980)	-18,75%	*Earnings per share (full amount)*

Pendapatan Bunga Dan Syariah

Pendapatan bunga dan syariah tahun 2021 sebesar Rp2,21 triliun, menurun 4,44% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp2,32 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya pendapatan bunga sebesar Rp266,15 miliar.

Interest And Sharia Income

Interest and sharia income in 2021 amounted to IDR 2.21 trillion, a decrease of 4.44% compared to 2020 which was IDR 2.32 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in interest income of Rp.266.15 billion.

Tabel Pendapatan Bunga dan Syariah
Interest and Sharia Income Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Pendapatan bunga	1.781.784	2.047.932	(266.148)	-13%	*Interest income*
Pendapatan syariah	432..068	268.863	163.205	60,7%	*Sharia income*
Jumlah pendapatan bunga, syariah	**2.213.852**	**2.316.795**	**(102.943)**	**-4,44%**	***Total interest income, sharia***

Beban Bunga Dan Syariah

Beban bunga dan syariah tahun 2021 sebesar Rp922,45 miliar, menurun 8,77% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,01 triliun. Penurunan tersebut terutama berasal dari turunnya beban bunga sebesar Rp111,09 miliar.

Interest Cost And Sharia

Interest and sharia expenses in 2021 amounted to Rp922.45 billion, a decrease of 8.77% compared to 2020 which was Rp1.01 trillion. The decrease was mainly due to a decrease in interest expense of Rp. 111.09 billion.

Tabel Beban Bunga dan Syariah
Table of Interest and Sharia Expense

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Beban bunga	768.749	879.843	(111.094)	-12,63%	*Interest expense*
Beban syariah	153.456	130.148	23.309	17,91%	*Sharia burden*
Provisi dan komisi	244	1.162	(919)	-79,03%	*Fees and commissions*
Jumlah beban bunga, syariah	**922.449**	**1.011.153**	**(88.704)**	**-8,77%**	***Total interest expense, sharia***

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya tahun 2021 sebesar Rp207,34 miliar, menurun 34,92% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp318,58 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan pemulihan CKPN aset sebesar Rp118,93 miliar.

Other Operating Income

Other operating income in 2021 was IDR 207.34 billion, a decrease of 34.92% compared to 2020 which was IDR 318.58 billion. The decrease was mainly due to a decrease in the recovery of CKPN assets of Rp. 118.93 billion.

Tabel Pendapatan Operasional Lainnya
Other Operating Income Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Pendapatan administrasi	72.737	55.676	17.060	30,64%	*Administration income*
Provisi dan komisi selain kredit	40.573	31.436	9.137	29,07%	*Fees and commissions other than credit*
Pendapatan restitusi biaya	9.519	14.513	(4.994)	-34,41%	*Fee refund income*
Pemulihan CKPN aset	70.128	189.057	(118.929)	-62,91%	*Asset CKPN recovery*
Kredit hapus buku	7.999	6.406	1.593	24,87%	*Book delete credit*
Pendapatan fee	3.596	2.827	768	27,17%	*Fee income*
Keuntungan penjualan efek-efek	2.730	17.291	(14.561)	-84,21%	*Profits from the sale of securities*
Provisi dan komisi bank lain	5	32	(27)	-84,33%	*Other bank fees and commissions*
Dividen dari penyertaan	11	13	(2)	-19,24%	*Dividend from investment*
Selisih kurs	48	1.329	(1.281)	-96,39%	*Exchange rate gap*
Jumlah	**207.345**	**318.581**	**(111.236)**	**-34,92%**	***Amount***

Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif tahun 2021 sebesar Rp35,02 miliar, menurun 21,61% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp44,67 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan beban CKPN aset produktif dari kredit yang diberikan sebesar Rp9,89 miliar.

Reserve Loss For Improvement Of Earning Assets

The allowance for impairment losses on productive assets in 2021 amounted to Rp35.02 billion, a decrease of 21.61% compared to 2020 which was Rp44.67 billion. The decrease was mainly due to a decrease in CKPN expenses for productive assets from loans of Rp9.89 billion.

Tabel Beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif
Table of Allowance for Impairment Losses on Earning Assets

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Kredit yang diberikan	34.627	44.518	(9.890)	-22,22%	*Credit granted*
Giro pada bank lain	3	2	1	73,54%	*Current accounts with other banks*
Kelonggaran tarik	388	153	235	153,63%	*Pull allowance*
Jumlah	**35.019**	**44.673**	**(9.654)**	**-21,61%**	***Amount***

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya tahun 2021 sebesar Rp912,39 miliar, meningkat 3,41% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp882,31 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari pertumbuhan beban umum dan administrasi sebesar Rp17,56 miliar.

Other Operational Expenses

Other operating expenses in 2021 amounted to Rp912.39 billion, an increase of 3.41% compared to 2020 which was Rp882.31 billion. The increase mainly came from the growth in general and administrative expenses of Rp17.56 billion.

Tabel Beban Operasional Lainnya
Other Operating Expenses Tabel

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Umum dan administrasi	289.258	271.697	17.561	6,46%	*General and administration*
Tenaga kerja	575.384	565.395	9.990	1,77%	*Labor*
Lainnya	47.752	45.221	2.532	5,60%	*Other*
Jumlah beban operasional lainnya	**912.394**	**882.312**	**30.082**	**3,41%**	***Total other operating expenses***

Laba Operasional

Laba operasional tahun 2021 sebesar Rp551,33 miliar, menurun 20,93% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp697,24 miliar. Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp111,24 miliar.

Operational Profit

Operating profit in 2021 was Rp551.33 billion, a decrease of 20.93% compared to 2020 which was Rp697.24 billion. The decrease was mainly due to a decrease in other operating income by Rp111.24 billion.

Tabel Laba Operasional
Operating Profit Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Pendapatan bunga dan syariah, neto	1.291.403	1.305.642	(14.239)	-1,09%	*Interest and sharia income, net*
Pendapatan operasional lainnya	207.345	318.581	(111.236)	-34,92%	*Other operating income*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(35.019)	(44.673)	9.654	-21,61%	*Allowance for impairment losses on productive assets*
Jumlah beban operasional lainnya	(912.394)	(882.312)	(30.082)	3,41%	*Total other operating expenses*
Laba operasional	**551.335**	**697.238**	**(145.903)**	**-20,93%**	***Operational profit***

Pendapatan Dan (Beban) Non Operasional

Pendapatan (beban) non operasional tahun 2021 sebesar Rp36,24 miliar, meningkat 48,61% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp24,38 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan beban non operasional lain-lain.

Income And Non-Operating Expenses

Non-operating income (expenses) in 2021 amounted to Rp36.24 billion, an increase of 48.61% compared to 2020 which amounted to Rp24.38 billion. The increase came from the growth of other non-operating expenses.

Tabel Pendapatan dan (Beban) Non Operasional
Table of Non-Operational Income and (Expenses)

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Pendapatan non operasional					*Non-operating income*
Sewa	458	437	22	4,96%	*Rent*
Keuntungan penjualan aset tetap	1	4	(3)	-81,24%	*Gain on sale of fixed assets*
Lain-lain	11.969	6.074	5.895	97,04%	*Etc*
Jumlah	**12.428**	**6.515**	**5.913**	**90,77%**	***Amount***
Beban non operasional					*Non-operating expenses*
Denda yang dibayar	24	433	(408)	-94,35%	*Paid fines*
Iuran keanggotaan	15.676	12.086	3.590	29,70%	*Membership fee*
Lain-lain	32.965	18.380	14.585	79,35%	*Etc*
Jumlah	**48.665**	**30.899**	**17.766**	**57,50%**	***Amount***
Jumlah - bersih	**(36.237)**	**(24.384)**	**(11.853)**	**48,61%**	***Quantity - net***

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak tahun 2021 sebesar Rp515,10 miliar, menurun 23,45% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp672,85 miliar. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan laba operasional di tahun 2021.

Profit Before Tax

Profit before tax in 2021 was IDR 515.10 billion, a decrease of 23.45% compared to 2020 which was IDR 672.85 billion. This decrease is in line with the decline in operating profit in 2021.

Tabel Laba Sebelum Pajak
Profit Before Tax Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Laba operasional	551.335	697.238	(145.903)	-20,93%	*Operational profit*
Pendapatan dan (beban) non operasional	(36.237)	(24.384)	(11.853)	48,61%	*Non-operating income and (expenses)*
Laba sebelum pajak	**515.098**	**672.855**	**(157.756)**	**-23,45%**	***Profit before tax***

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan tahun 2021 sebesar Rp134,08 miliar, menurun 35,81% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp208,88 miliar. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan pajak kini sebesar Rp45,49 miliar.

Income Tax Benefits (Expenses)

Income tax expense in 2021 was Rp. 134.08 billion, a decrease of 35.81% compared to 2020 which was Rp. 208.88 billion. The decrease was in line with the decrease in current taxes of Rp45.49 billion.

Tabel Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan
Income Tax Benefit (Expense) Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Pajak kini	(126.372)	(171.864)	45.492	-26,47%	*Current tax*
Pajak tangguhan	(486)	5.057	(5.542)	-109,6%	*Deferred tax*
Penyesuaian pajak tahun lalu	(7.227)	(42.078)	34.851	-82,82%	*Last year's tax adjustment*
Beban pajak – neto	**(134.085)**	**(208.885)**	**74.800**	**-35,81%**	***Tax burden – net***

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan tahun 2021 sebesar Rp381,01 miliar, menurun 17,88% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp463,97 miliar. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan laba sebelum pajak.

Current Year Profit

Profit for the year in 2021 was IDR 381.01 billion, a decrease of 17.88% compared to 2020 which was IDR 463.97 billion. The decrease was in line with the decrease in profit before tax.

Tabel Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year Tabel

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Laba sebelum pajak	515.098	672.855	(157.756)	-23,45%	*Profit before tax*
Beban pajak – neto	(134.085)	(208.885)	74.800	-35,81%	*Tax burden – net*
Laba tahun berjalan	**381.013**	**463.970**	**(82.956)**	**-17,88%**	***Current year profit***

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain tahun 2021 sebesar Rp2,92 miliar, meningkat 62,92% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp1,79 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari meningkatnya keuntungan/(kerugian) atas perubahan nilai wajar dari efek dalam kelompok tersedia untuk dijual sebesar Rp1,32 miliar.

Other Comprehensive Income

Other comprehensive income in 2021 was IDR2.92 billion, an increase of 62.92% compared to 2020 which was IDR1.79 billion. The increase was mainly due to the increase in gain/(loss) on changes in the fair value of available-for-sale securities of Rp1.32 billion.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain
Other Comprehensive Income Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					*Items to be reclassified to profit or loss*
Keuntungan/(kerugian) atas perubahan nilai wajar dari efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	3.744	2.425	1.319	54,37%	*Gain/(loss) on changes in fair value of available-for-sale securities*
Pajak penghasilan lain	(824)	(633)	(191)	30,17%	*Other income tax*
Jumlah	**2.920**	**1.792**	**1.128**	**62,92%**	*Amount*

Laba Bersih Per Saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Laba bersih per saham tahun 2021 sebesar Rp34.581 menurun 18,75% dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar Rp42.561. Penurunan tersebut sejalan dengan menurunnya laba setelah pajak.

Net Profit Per Share

Earnings per share is calculated by dividing net income to shareholders by the weighted average number of shares outstanding in the year concerned. Earnings per share in 2021 amounted to Rp34,581, a decrease of 18.75% compared to 2020 which was Rp42,561. The decline was in line with the decline in profit after tax.

Tabel Laba Bersih Per Saham
Earnings Per Share Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Laba bersih setelah pajak	381.013	463.970	(82.956)	-17,88%	*Net profit after tax*
Rata2 tertimbang modal disetor	1.101.811	1.090.136	11.675	1,07%	*Weighted average paid-in capital*
Laba bersih per saham (dalam nilai penuh)	**34.581**	**42.561**	**(7.980)**	**-18,75%**	***Earnings per share (in full amount)***

Laporan Arus Kas

Cash Flow Statement

Tabel Laporan Arus Kas
Cash Flow Statement Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | *CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES*					
Penerimaan bunga dan syariah	2.194.214	2.278.854	(84.639)	-3,71%	*Acceptance of interest and sharia*
Pembayaran bunga, bagi hasil syariah	(936.800)	(1.012.330)	75.531	-7,46%	*Interest payments, sharia profit sharing*
Penerimaan operasional lainnya	113.046	294.369	(181.323)	-61,60%	*Other operational receipts*
Pembayaran beban umum dan administrasi	(241.612)	(198.497)	(43.115)	21,72%	*Payment of general and administrative expenses*
Pembayaran beban tenaga kerja	(570.072)	(496.650)	(73.422)	14,78%	*Payment of labor load*
Penerimaan (pembayaran) pendapatan (beban) non operasional bersih	(36.237)	(24.387)	(11.850)	48,59%	*Receipt (payment) of net non-operating income (expense)*
Pembayaran pajak penghasilan	(144.733)	(197.311)	52.578	-26,65%	*Income tax payment*
Arus kas sebelum perubahan aset operasi dan liabilitas operasi	377.806	644.047	(266.241)	-41,34%	*Cash flows before changes in operating assets and operating liabilities*
Penurunan (kenaikan) aset operasi					*Decrease (increase) in operating assets*
Surat berharga	451.143	(1.904.667)	2.355.809	-123,69%	*Securities*
Kredit yang diberikan	76.035	(1.082.693)	1.158.728	-107,02%	*Credit granted*
Penyertaan Saham	100		100	100%	*Share Participation*
Aset lain-lain	(49.729)	(221.881)	172.152	-77,59%	*Other assets*
(Penurunan) kenaikan liabilitas operasi					*(Decrease) increase in operating liabilities*
Simpanan dari nasabah	3.473.088	2.205.593	1.267.495	57,47%	*Deposits from customers*
Simpanan dari bank lain	(917.967)	108.947	(1.026.915)	-942,58%	*Deposits from other banks*
Liabilitas segera	(57.531)	191.812	(249.343)	-129,99%	*Immediate liability*
Utang pajak	1.624	3.239	(1.615)	-49,88%	*Tax debt*
Liabilitas lain-lain	(34.904)	(8.586)	(26.318)	306,51%	*Other Liabilities*
Jumlah	**2.941.859**	**(708.235)**	**3.650.094**	**-515,38%**	***Amount***
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	3.319.665	(64.188)	3.383.853	-5.271,80%	*Net cash is obtained from (used for) operating activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | *CASH FLOW FROM INVESTMENT ACTIVITIES*					
Pembelian aset tetap	(23.857)	(21.843)	(2.015)	9,22%	*Purchase of fixed assets*
Penjualan aset tetap, bersih	1	4	(3)	-81,24%	*Sales of fixed assets, net*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(23.857)	(21.839)	(2.018)	9,24%	*Net cash is obtained from (used for) investing activities*
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | *CASH FLOW FROM FUNDING ACTIVITIES*					
Pinjaman yang diterima	37.533	32.831	4.702	14,32%	*Loans accepted*
Pembayaran dividen	(278.382)	(185.414)	(92.968)	50,14%	*Dividend payment*
Koreksi Saldo Laba	(1)	-	(1)	-100%	*Profit Balance Correction*
Koreksi CKPN penerapan PSAK 71	-	(188.733)	188.733	100%	*Correction of CKPN application of PSAK 71*
Program kemitraan dan bina lingkungan	(21.000)	(21.000)	-	-	*Partnerships and community development program*
Setoran modal saham	2.700	17.700	(15.000)	-84,75%	*Share capital deposit*
Tambahan modal disetor	(700)	(15.000)	14.300	-95,33%	*Additional paid-in capital*

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan *Growth*		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(259.849)	(359.616)	99.766	-27,74%	*Net cash is obtained from (used for) financing activities*
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	3.035.959	(445.642)	3.481.601	-781,25%	*Net increase (decrease) in cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas awal tahun	3.149.329	3.594.971	(445.642)	-12,40%	*Cash and cash equivalents at the beginning of the year*
Kas dan setara kas akhir tahun	6.185.288	3.149.329	3.035.959	96,40%	*End of year cash and cash equivalents*
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN | *ADDITIONAL DISCLOSURE*					
Kas dan setara kas terdiri dari:					*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas	719.393	914.232	(194.839)	-21,31%	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2.042.746	1.496.657	546.089	36,49%	*Current Account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	88.767	121.448	(32.681)	-26,91%	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.334.381	616.992	2.717.389	440,43%	*Placements with Bank Indonesia and other banks*
Jumlah kas dan setara kas	**6.185.288**	**3.149.329**	**3.035.959**	**96,40%**	***Total cash and cash equivalents***



Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2021 sebesar Rp3,32 triliun, meningkat 5.271,80% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp64,19 miliar.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2021 sebesar Rp23,86 miliar, meningkat 9,24% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp21,84 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi meningkatnya pembelian aset tetap.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2021 sebesar Rp259,85 miliar, menurun 27,74% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp359,62 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi adanya pembayaran dividen.

Kemampuan Membayar Utang Dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang tercermin dari likuiditas dan solvabilitas Bank. Berkenaan dengan obligasi yang diterbitkan, kemampuan membayar utang tercermin dari lancarnya pembayaran bunga. Selama Tahun 2021 BRK tidak menerbitkan Obligasi.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Rasio likuiditas diukur melalui perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah simpanan nasabah (LDR) untuk mengetahui kemampuan Bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menyimpan dananya dengan kredit dan pembiayaan yang telah diberikan kepada para debitur sebagai sumber likuiditasnya.

Sampai dengan akhir tahun 2021, LDR Bank Riau Kepri tercatat sebesar 73,72%. Membaik jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 85,63%. Dalam ketentuan batas bawah LDR sebesar 78% dan batas atas LDR sebesar 92%, walaupun LDR bank riau kepri berada dibawah batas ketentuan bawah rasio LDR, dengan LDR sebesar 73,72% mencerminkan bahwa likuiditas bank riau kepri dalam kondisi baik yang artinya bank mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya.

Cash Flow From Operating Activities

Net cash obtained from operating activities in 2021 amounted to Rp3.32 trillion, an increase of 5,271.80% compared to 2020 of Rp64.19 billion.

Cash Flow From Investment Activities

Net cash used for investment activities in 2021 amounted to Rp23.86 billion, an increase of 9.24% compared to 2020 of Rp21.84 billion. This was mainly due to the increase in purchases of fixed assets.

Cash Flow From Funding Activities

Net cash used for financing activities in 2021 amounted to Rp259.85 billion, a 27.74% decrease compared to 2020 of Rp359.62 billion. This is mainly influenced by the payment of dividends.

Ability To Pay Debt And Receivable Collectibility

Ability To Pay Debt

The ability to pay debts is reflected in the liquidity and solvency of the Bank. With regard to bonds issued, the ability to pay debts is reflected in the smooth interest payments. During 2021 BRK did not issue bonds.

Capability To Pay Short-Term Debt (Bank Liquidity)

The liquidity ratio describes the Bank's ability to meet short-term obligations or obligations that are past due. The liquidity ratio is measured through a comparison between the amount of credit extended to the number of customer deposits (LDR) to determine the Bank's ability to repay obligations to customers who have deposited their funds with credit and financing provided to debtors as a source of liquidity.

Until the end of 2021, the LDR of Bank Riau Kepri was recorded at 73.72%. Improved when compared to 2020 which was 85.63%. In the provisions of the lower LDR limit of 78% and the upper LDR limit of 92%, although the ldr of bank riau kepri is below the lower limit of the ldr ratio, the ldr of 73.72% reflects that the liquidity of the riau kepri bank is in good condition which means the bank is able to meet its short-term obligations.

Tabel Rasio Likuiditas
Liquidity Ratio Table

(dalam %) | *(in %)*

Uraian *Description*	2021	2020	Kenaikan/Penurunan *Ascension/ Decrease*
Loan to Deposit Ratio (LDR)	73,72%	85,63%	-11,91%

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan modal (*Capital Adequacy Ratio*/CAR), merupakan salah satu indikator kesehatan dari modal Bank yang menunjukkan seberapa besar modal Bank telah memadai untuk menunjang kebutuhannya dan sebagai dasar untuk menilai prospek kelanjutan usaha Bank.

Ability To Pay Long-Term Debt (Bank Solvency)

The Solvency Ratio describes the Bank's ability to meet long-term obligations or capital capacity (Capital Adequacy Ratio/CAR), which is an indicator of the health of the Bank's capital which shows how much the Bank's capital is sufficient to support its needs and as a basis for assessing the prospects for the Bank's business continuity.

Tabel Rasio Solvabilitas
Solvency Ratio Table

(dalam %) | *(in %)*

Uraian *Description*	2021	2020	Kenaikan/Penurunan *Ascension/ Decrease*
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,07%	20,77%	0,30%

Rasio kecukupan modal Bank Riau Kepri naik sebesar 0,3% dari 20,77% di tahun 2020 menjadi sebesar 21,07% di tahun 2021. berdasarkan rasio kecukupan modal tersebut bank riau kepri telah memenuhi kewajiban regulasi untuk menyediakan kecukupan modal minimum 20% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko 2 (hasil penilaian secara self assessment periode desember 2021 berada pada peringkat komposit 2 (pk 2)). Kewajiban penyediaan kecukupan modal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tanggal 2 Februari 2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Rasio Kecukupan Modal yang meningkat ditahun 2021 menunjukkan kemampuan Bank Riau Kepri untuk mengatasi risiko khususnya risiko kredit, pasar dan operasional.

The capital adequacy ratio of Bank Riau Kepri increased by 0.3% from 20.77% in 2020 to 21.07% in 2021. Based on the capital adequacy ratio, Bank Riau Kepri has fulfilled its regulatory obligations to provide a minimum capital adequacy of 20% of ATMR for banks with a risk profile of 2 (the results of the self-assessment for the december 2021 period are at composite rating 2 (pk 2)). The capital adequacy requirement is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2016 dated February 2, 2016 concerning the Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks. The Capital Adequacy Ratio which increases in 2021 shows the ability of Bank Riau Kepri to overcome risks, especially credit, market and operational risks.

Rasio Rentabilitas

Rasio Rentabilitas menggambarkan tingkat profitabilitas dan efisiensi usaha yang dicapai oleh Bank. Rasio Rentabilitas untuk menggambarkan tingkat profitabilitas diukur melalui rasio *Return on Assets* (RoA), *Return on Equity* (RoE) dan *Net Interest Margin* (NIM), sedangkan untuk menggambarkan tingkat efisiensi usaha diukur melalui rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Profitability Ratio

Profitability Ratio describes the level of profitability and business efficiency achieved by the Bank. Profitability ratio to describe the level of profitability is measured by the ratio of Return on Assets (RoA), Return on Equity (RoE) and Net Interest Margin (NIM), while to describe the level of business efficiency is measured by the ratio of Operating Expenses to Operating Income (BOPO).

Tabel Rasio Rentabilitas
Profitability Ratio Table

(dalam %) | *(in %)*

Uraian *Description*	2021	2020	Kenaikan/Penurunan *Ascension/ Decrease*
Return on Assets (RoA)	1,93%	2,54%	-0,61%
Return on Equity (RoE)	12,49%	15,94%	-3,45%
Net Interest Margin (NIM)	4,64%	5,32%	-0,68%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	77,23%	73,54%	3,69%

RoA dan RoE Bank Riau Kepri mengalami penurunan tahun 2021 masing-masing menjadi 1,93% dan 12,49%. Sedangkan NIM sedikit mengalami penurunan dari 5,32% di 2020 menjadi 4,64% di tahun 2021. Berkebalikan dengan rasio BOPO Bank Riau Kepri mengalami peningkatan dari 73,54% di tahun 2020 menjadi 77,23% di tahun 2021. Dari rasio rentabilitas Bank Riau Kepri ditahun 2021 tersebut, tergambar bahwa bank masih mampu membayar seluruh kewajibannya melalui profit yang didapat serta memaksimalkan upaya efisiensi oleh Bank.

Bank Riau Kepri's RoA and RoE decreased in 2021 to 1.93% and 12.49%, respectively. Meanwhile, NIM slightly decreased from 5.32% in 2020 to 4.64% in 2021. In contrast, Bank Riau Kepri's BOPO ratio increased from 73.54% in 2020 to 77.23% in 2021. From the profitability ratio Bank Riau Kepri in 2021, it is illustrated that the bank is still able to pay all its obligations through the profits obtained and maximize efficiency efforts by the Bank.

Kolektibiltas Piutang

Rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur kolektibilitas piutangnya adalah rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio ini adalah salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Ini artinya NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank.

Receivables Collectibility

The ratio used by the company to measure the collectibility of its receivables is the ratio of Non Performing Loans (NPL). This ratio is one of the keys to assessing the quality of bank performance. This means that the NPL is an indication of a problem in the bank, which if not immediately get a solution, it will have a dangerous impact on the bank.

Tabel Rasio *Non Perfoming Loan* (NPL)
Table of Non-Performing Loan (NPL) Ratio

(dalam %) | *(in %)*

Uraian *Description*	2021	2020	Kenaikan/Penurunan *Ascension/ Decrease*
Non Perfoming Loan (NPL) Gross	2,82%	2,83%	-0,01%
Non Perfoming Loan (NPL) Nett	0,88%	1,01%	-0,22%

NPL *Gross* sebesar 2,83% pada tahun 2020 menjadi 2,82% di tahun 2021, sedangkan NPL Netto dari 1,01% pada tahun 2020 menjadi 0,88% di tahun 2021. Dengan penurunan rasio NPL tersebut di tahun 2021 baik gross maupun nett menunjukkan kemampuan bank riau kepri dalam melakukan penanganan non performing loan dan ketersediaan Kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Gross NPL is 2.83% in 2020 to 2.82% in 2021, while Net NPL is from 1.01% in 2020 to 0.88% in 2021. With the decrease in the NPL ratio in 2021, both gross and nett shows the ability of the Riau Islands Bank in handling non-performing loans and the availability of adequate reserves for impairment losses (CKPN).

Tabel Tingkat Kolektibilitas Kredit
Credit Collectibility Rate Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan *Ascension/ Decrease*		*Description*
			Nominal	(%)	
Lancar	18.015.137	17.990.164	24.973	0,14%	*Fluent*
Dalam Peratian Khusus	337.889	433.641	-95.752	-22,08%	*In Special Care*
Kurang Lancar	10.445	4.558	5.887	129,15%	*Not that smooth*
Diragukan	13.430	8.117	5.313	65,46%	*Doubtful*
Macet	508.013	524.469	-16.456	-3,14%	*Congested*
Jumlah kredit/Pembiayaan	**18.884.914**	**18.960.949**	**-76.035**	**-0,40%**	***Amount***
Jumlah NPL					*Total NPL*
Nominal	531.888	537.144	-5.256	-0,98%	*Nominal*
Persentase	2,82%	2,83%		-0,02%	*Percentage*

Kualitas kredit yang diberikan pada posisi tahun 2021 mengalami perbaikan, dengan NPL (Non Performaing Loan) turun sebesar 0,02% atau sebesar Rp5,26 miliar menjadi 2,82% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan NPL tahun 2020 sebesar 2,83%

The quality of loans granted in 2021 has improved, with npl (Non-Performing Loans) down of 0.02% or Rp5.26 billion to 2.82% in 2021 when compared to NPL in 2020 of 2.83%

Tabel Kredit Bermasalah Berdasarkan Kolektibilitas 3, 4 dan 5
Non-performing Loans Based on Collectibility 3, 4 and 5

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021		2020		*Description*
	Kredit Bermasalah *Troubled Credit*	CKPN	Kredit Bermasalah *Troubled Credit*	CKPN	
Modal Kerja	183.027	(112.955)	191.572	(105.058)	*Working capital*
Investasi	163.013	(107.401)	179.744	(129.295)	*Investment*
Konsumtif	185.848	(145.569)	165.828	(111.762)	*Consumptive*
Jumlah	**531.888**	**(365.924)**	**537.144**	**(346.116)**	***Amount***

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja mengalami perbaikan NPL dari Rp191,57 miliar ditahun 2020 menjadi Rp183,03 miliar pada tahun 2021, kredit Investasi juga mengalami perbaikan NPL dari Rp179,74 miliar ditahun 2020 menjadi RP163,01 miliar pada tahun 2021, sedangkan untuk kredit konsumtif mengalami peningkatan NPL dari Rp165,83 miliar ditahun 2020 menjadi Rp185,85 miliar pada tahun 2021. peningkatan NPL didominasi pada skim kredit konsumtif. Manajemen terus melakukan langkah-langkah strategis untuk menurunkan NPL baik dengan pendekatan secara persuasif maupun secara litigasi dimana bank telah menjalin hubungan kerjasama dengan KPKNL

Based on the type of use, working capital loans experienced an improvement in NPL from IDR 191.57 billion in 2020 to IDR 183.03 billion in 2021, Investment credit also experienced an improvement in NPL from IDR 179.74 billion in 2020 to IDR 163.01 billion in 2021. consumer credit experienced an increase in NPL from Rp. 165.83 billion in 2020 to Rp. 185.85 billion in 2021. The increase in NPL was dominated by the consumptive credit scheme. Management continues to take strategic steps to reduce NPL, both with a persuasive approach and litigation where the bank has established a cooperative relationship with the KPKNL

Current Account Saving Account (Casa)

Jika dilihat dari jenis-jenis DPK maka dapat dibagi menjadi dana murah dan dana mahal. Pengertian dana murah adalah bank memberikan bunga simpanan dalam persentase yang rendah, adapun yang masuk dalam golongan ini adalah giro dan tabungan. Dana mahal adalah bank memberikan bunga simpanan lebih tinggi dibanding dana murah, adapun yang masuk dalam golongan ini adalah deposito. Latar belakang deposito mendapatkan bunga yang lebih besar dibandingkan giro dan tabungan karena deposito penarikannya berjangka sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan bank. Kondisi tersebut menjadikan bank dapat mengatur kebutuhan likuiditasnya sehingga kegiatan operasional bank dapat berlangsung dengan optimal. Sedangkan giro dan tabungan dapat ditarik sewaktu-waktu dan bank wajib menyediakan dana nasabah tabungan atau giro jika dilakukan penarikan. Jika bank tidak mampu menyediakan uang yang ditarik nasabah tabungan dan giro maka bank tersebut mengalami gagal bayar (likuiditas kurang).

Salah satu komponen yang terpenting bank dalam menghasilkan laba selain kredit yang berkualitas adalah sumber dana yang memadai. Semakin besar komposisi dana murah (*current account saving account/ CASA*) dalam bank, maka semakin besar pula potensial laba yang dapat diperoleh dari penyaluran kredit. CASA Bank Riau Kepri ditahun 2021 adalah sebesar 50,97%, dimana dana murah yang terhimpun adalah sebesar Rp13,06 triliun atau naik 33,16% dari tahun 2020 yakni sebesar Rp9,81 triliun. Pertumbuhan CASA Bank Riau Kepri tergambar pada tabel di bawah ini.

Current Account Saving Account (Casa)

When viewed from the types of deposits, it can be divided into cheap funds and expensive funds. The definition of low-cost funds is that banks provide interest on deposits in a low percentage, while those included in this group are current accounts and savings. Expensive funds are banks that provide higher deposit rates than cheap funds, while those that fall into this category are deposits. The background of time deposits is that they earn higher interest than current accounts and savings accounts because time deposits are withdrawn according to the terms set by the bank. This condition allows banks to regulate their liquidity needs so that bank operations can take place optimally. Meanwhile, current accounts and savings accounts can be withdrawn at any time and banks are required to provide savings or demand deposits to customers if withdrawals are made. If the bank is unable to provide the money withdrawn by the savings and current account customers, the bank will fail to pay (lack of liquidity).

One of the most important components of a bank in generating profits other than quality credit is an adequate source of funds. The greater the composition of low-cost funds (current account saving account / CASA) in the bank, the greater the potential profit that can be obtained from lending. The CASA of Bank Riau Kepri in 2021 is 50.97%, where the low-cost funds collected are Rp. 13.06 trillion, an increase of 33.16% from 2020, which is Rp. 9.81 trillion. CASA growth of Bank Riau Kepri is illustrated in the table below.

Tabel Dana CASA Bank Riau Kepri
Table of CASA Funds for Bank Riau Kepri

(dalam %) | *(in %)*

Uraian *Description*	2021	2020	2019	2018	2017
Current Account Saving Account	50,97	44,28	48,94	49,53	40,94

Aset Produktif

Pengklasifikasian aset produktif Bank Riau Kepri berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No.14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013. Bank Riau Kepri melakukan klasifikasi aset produktif berdasarkan evaluasi atas kinerja debitur, prospek usaha, dan kemampuan membayar kepada Bank.

Earning Asset

The classification of productive assets of Bank Riau Kepri is based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No.7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 as lastly amended by PBI No.14/15/PBI/2012 dated October 24, 2012 and Bank Circular Letters Indonesia No. 15/28/DPNP dated 31 July 2013. Bank Riau Kepri classified productive assets based on evaluation of debtor performance, business prospects, and ability to pay to the Bank.

Terkait Unit Usaha Syariah, pengklasifikasian aset produktif dilakukan berdasarkan PBI No. 10/24/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008 sebagaimana dalam pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/10/DPbs tanggal 13 April 2011.

Regarding Sharia Business Units, the classification of earning assets is based on PBI No. 10/24/PBI/2008 dated October 16, 2008 as in certain articles has been amended by PBI No. 13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 13/10/DPbs dated April 13, 2011.

Aset produktif Bank Riau Kepri tahun 2021 Rp24,67 triliun menurun 1,04% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp24,93 triliun. Faktor utama penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan surat berharga sebesar Rp451,14 Milyar

The productive assets of Bank Riau Kepri in 2021 were IDR 24.67 trillion, a decrease of 1.04% compared to 2020 of IDR 24.93 trillion. The main factor for the decline was a decrease in marketable securities of Rp.451.14 billion

Tabel Aset Produktif
Earning Assets Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan *Ascension/ Decrease*		*Description*
			Nominal	(%)	
Penempatan pada Bank Lain	547.377	278.770	268.607	96,35%	*Placements with Other Banks*
Surat Berharga	5.238.384	5.689.527	(451.143)	-7,93%	*Securities*
Kredit yang diberikan	18.884.914	18.960.949	(76.035)	-0,40%	*Credit granted*
Jumlah	**24.670.675**	**24.929.246**	**258.571**	**-1,04%**	***Amount***



Tabel Kualitas Aset Produktif
Earning Asset Quality Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

No.	POS-POS	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI											
		31 Desember 2021						31 Desember 2020					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
I.	**PIHAK TERKAIT**												
1.	Penempatan pada bank lain												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Tagihan spot dan derivatif												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Surat berharga												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)												

No.	POS-POS	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI											
		31 Desember 2021						31 Desember 2020					
		Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bukan debitur UMKM												
	i. Rupiah	902	-	-	-	-	902	2.470	-	-	-	-	2.470
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kredit yang direstrukturisasi												
	i. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Komitmen dan kontinjensi												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	**PIHAK TIDAK TERKAIT**												
1.	Penempatan pada bank lain												
	a. Rupiah	450.765	-	-	-	-	450.765	224.277	-	-	-	-	224.277
	b. Valuta asing	96.612	-	-	-	-	96.612	54.493	-	-	-	-	54.493
2.	Tagihan spot dan derivatif												
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Surat berharga												
	a. Rupiah	5.238.384	-	-	-	-	5.238.384	5.689.527	-	-	-	-	5.689.527
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)						-						-
	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)												

	a. Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kredit	18.014.235	337.889	10.445	13.430	508.013	18.884.012	17.987.694	433.641	4.558	8.117	524.469	18.958.479
	a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)												
	i. Rupiah	3.711.104	71.885	1.200	2.212	342.628	4.129.029	3.486.259	131.250	1.018	2.249	368.050	3.988.825
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Bukan debitur UMKM												
	i. Rupiah	14.303.131	266.004	9.245	11.218	165.385	14.754.983	14.501.435	302.391	3.540	5.868	156.419	14.969.654
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kredit yang direstrukturisasi												
	i. Rupiah	1.114.056	23.512	342	985	13.852	1.152.747	1.025.835	24.480	139	288	51.622	1.102.364
	ii. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Penyertaan Modal	1.556	-	-	-	-	1.556	1.556	-	-	-	100	1.656
9	Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Komitmen dan Kontinjensi												
	a. Rupiah	463.504	-	-	-	-	463.504	472.695	-	-	-	-	472.695
	b. Valuta asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	INFORMASI LAIN												
1.	Total aset bank yang dijaminkan:							-	-	-	-	-	-
	a. Pada Bank Indonesia							-	-	-	-	-	-
	b. Pada pihak lain							-	-	-	-	-	-
2	Agunan yang diambil alih							-	-	-	-	-	-

Struktur Permodalan dan Praktik Manajemen Risiko

Struktur Permodalan

Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Bank Riau Kepri berupaya meningkatkan nilai Bank diantaranya melalui penetapan struktur modal yang optimal. Hal tersebut juga menjadi bagian dalam memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan perhitungan dan telaah atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini.

Rencana Permodalan tersebut disusun oleh Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank senantiasa menghubungkan antara sasaran keuangan dan kecukupan modal dengan risiko melalui proses perencanaan modal. Demikian pula, dengan ekspansi bisnis yang didasarkan pada kecukupan permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

Dalam kebijakan permodalan Bank Riau Kepri selalu disinkronkan dengan rencana strategis jangka panjang dan mengalokasikan modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki potensi untuk memberikan profit yang optimal.

Bank Riau Kepri memastikan memiliki kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Bank mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dalam melakukan perhitungan kecukupan modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Untuk risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan Standar Basel II (*Standardized Approach*).

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Bank wajib menyediakan kecukupan modal sebesar 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua).

Konsekuensi dari pelanggaran terhadap peraturan ini adalah teguran dan denda dari Regulator. Regulator menganalisa modal dalam dua tingkatan:

Capital Structure and Risk Management Practices

Capital Structure

Management Policy on Capital Structure

Bank Riau Kepri seeks to increase the value of the Bank, including by determining the optimal capital structure. This is also part of complying with the provisions of the Financial Services Authority (OJK) regarding the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM). Adequate capital adequacy can increase stakeholder confidence. The Bank prepares a Capital Plan based on calculations and studies of the required capital adequacy requirements and combines it with a review of the latest economic developments.

The Capital Plan is prepared by the Board of Directors as part of the Bank's Business Plan and approved by the Board of Commissioners. The Bank always connects financial targets and capital adequacy with risk through the capital planning process. Likewise, with business expansion based on the adequacy of capital and liquidity requirements of the Bank.

In Bank Riau Kepri's capital policy, it is always synchronized with the long-term strategic plan and allocates capital efficiently to business segments that have the potential to provide optimal profits.

Bank Riau Kepri ensures that it has sufficient capital to meet credit risk, market risk and operational risk. The Bank refers to Bank Indonesia regulations in calculating capital adequacy for credit risk, market risk and operational risk. For credit risk, the Bank uses the Basel II Standard approach (Standardized Approach).

Basis for Choosing Management Policy on Capital Structure

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No.34/POJK.03/2016 dated 22 September 2016 regarding amendments to Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements, Banks are required to provide adequate capital of 9% (nine percent) to less than 10% (ten percent) of RWA, for Banks with risk profile rating 2 (two).

The consequences of violating this regulation are warnings and fines from the Regulator. Regulators analyze capital at two levels:

1. Modal Tier 1 yang terdiri dari:
   a. Kerugian penurunan nilai atas aset produktif dan perhitungan pajak tangguhan.
   b. Modal Inti Tambahan (AT-1) terdiri dari instrumen yang memenuhi persyaratan Modal Inti Tambahan setelah dikurangi faktor pengurang.
2. Modal Tier 2 terdiri dari cadangan umum PPA.

Bank telah melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan ketentuan yang berlaku, dimana modal yang dimiliki diklasifikasikan dalam 2 Tier yaitu Modal Tier 1 dan Modal Tier 2. Modal Tier 1 terdiri dari Modal Inti Utama (CET 1) dan Modal Inti Tambahan (AT-1) namun saat ini Bank tidak memiliki modal tambahan yang memenuhi kriteria Modal Inti Tambahan (AT-1) sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Rincian Struktur Modal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, struktur modal bank terdiri dari Modal Inti (Tier 1) dan Modal Pelengkap.

Modal Inti

Modal Inti terdiri dari modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan umum, dan saldo laba setelah dikurangi dengan selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan pajak tangguhan. Modal inti Bank Riau Kepri pada tahun 2021 adalah Sebesar RP2.995.038 juta, tahun 2020 sebesar RP2.868.537 juta.

Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari instrumen modal dalam bentuk saham atau bentuk lainnya yang telah memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal dan tergolong sebagai modal pelengkap, cadangan umum Penghapusan Aset Produktif (PPAP) (Maksimum 1,25% dari ATMR). Modal pelengkap terdiri dari cadangan umum PPA. Pada tahun 2021, modal pelengkap Bank Riau Kepri adalah sebesar Rp152.190 juta sedangkan pada 2020 adalah sebesar Rp149.049 juta

1. *Tier 1 capital consisting of:*
   a. *Impairment losses on earning assets and deferred tax calculation.*
   b. *Additional Core Capital (AT-1) consists of instruments who meet the requirements for Additional Core Capital after deducting the deducting factor.*
2. *Tier 2 capital consists of PPA general reserves.*

The Bank has calculated the capital adequacy based on applicable regulations, where the owned capital is classified into 2 Tiers, namely Tier 1 Capital and Tier 2 Capital. Tier 1 Capital consists of Main Core Capital (CET 1) and Additional Core Capital (AT-1) but Currently, the Bank does not have additional capital that meets the criteria for Additional Core Capital (AT-1) in accordance with the applicable BI regulations.

The Bank complies with all capital requirements set by the regulator throughout the reporting period, particularly with regard to the calculation of the Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) and Risk Weighted Assets (RWA).

Capital Structure Details

In accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 11/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks and POJK No. 34/ POJK.03/2016 concerning Amendments to POJK No. 11/ POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks, the bank's capital structure consists of Core Capital (Tier 1) and Supplementary Capital.

Core Capital

Core Capital consists of paid-in capital, additional paid-in capital, general reserves, and retained earnings after deducting the less difference between Allowance for Asset Losses (PPA) and deferred tax. The core capital of Bank Riau Kepri in 2021 is IDR 2,995,038 million, in 2020 it is IDR 2,868,537 million.

Supplementary Capital

Supplementary capital consists of capital instruments in the form of shares or other forms that have met the requirements, premium or disagio originating from the issuance of capital instruments and classified as supplementary capital, general reserves for Earning Assets Loss (PPAP) (Maximum 1.25% of RWA). Supplementary capital consists of PPA general reserves. In 2021, the complementary capital of Bank Riau Kepri is Rp. 152,190 million, while in 2020 it is Rp. 149,049 million

Tabel Rincian Struktur Permodalan
Tabel Liabilitas Bank Riau Kepri Tahun 2020-2021

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan		*Description*
			Nominal	(%)	
Modal	3.147.228	3.017.586	129.642	4,30%	*Capital*
- Inti (Tier 1)	2.995.038	2.868.537	126.501	*4,41%*	*- Core (Tier 1)*
- Pelengkap (Tier 2)	152.190	149.049	3.142	2,11%	*- Complement (Tier 2)*
ATMR Kredit	12.175.240	11.923.906	251.334	2,11%	*RWA Credit*
ATMR Kredit dan Operasional	14.906.485	14.456.804	449.681	3,11%	*RWA Credit and Operations*
ATMR Kredit, Operasional dan Pasar	14.937.265	14.525.997	411.268	2,83%	*RWA Credit, Operations and Market*
Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Kredit (%)	25,85%	25,31%	0,54	2,14%	*Capital Adequacy Ratio for Credit Risk (%)*
Rasio Kecukupan Modal Untuk Risiko Kredit dan Operasional (%)	21,11%	20,87%	0,24	1,15%	*Capital Adequacy Ratio for Credit and Operational Risk (%)*
Rasio kecukupan modal untuk Risiko Kredit, Pasar, dan Operasional (%)	21,07%	20,77%	0,30	1,44%	*Capital adequacy ratio for Credit, Market and Operational Risks (%)*

Praktik Manajemen Risiko

Seiring dengan perkembangan bisnis bank yang semakin kompleks, kondisi eksternal dengan ketidakpastian, serta pandemi COVID-19 yang terjadi sejak awal tahun sehingga terjadi peningkatan eksposure risiko, maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif yang bertujuan agar perusahaan tetap mampu memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham melalui pengelolaan modal secara komprehensif, memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas operasional bank.

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengelola setiap jenis risiko yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di Bank Riau Kepri dengan tujuan memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis Bank untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dalam mencapai laba, menjaga permodalan Bank, mendukung proses pengambilan keputusan, meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi reputasi Bank. Risiko adalah bagian dari bisnis Bank, sehingga dalam penerapan manajemen risiko, Bank menggunakan pendekatan pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional.

Pengelolaan risiko melalui permodalan disesuaikan dengan rencana strategis dan bisnis jangka panjang, serta kebijakan alokasi modal secara efisien sesuai dengan segmen bisnis yang memiliki profil risk-return yang optimal yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko,

Risk Management Practice

Along with the increasingly complex development of the bank's business, external conditions with uncertainty, as well as the COVID-19 pandemic that has occurred since the beginning of the year resulting in increased risk exposure, it is necessary to implement effective risk management with the aim that the company is still able to maximize added value for shareholders through comprehensive capital management, ensuring profitability and sustainable business growth as well as anticipating potential losses from bank operational activities.

The implementation of risk management is carried out by implementing an integrated risk management pattern to identify, assess, monitor and manage each type of risk in accordance with the policies and procedures that have been established at Bank Riau Kepri with the aim of providing a consistent risk management framework for the risks that exist in the process. the Bank's business to optimize business growth to achieve profit, maintain the Bank's capital, support the decision-making process, increase company value and protect the Bank's reputation. Risk is part of the Bank's business, so in implementing risk management, the Bank uses a risk management approach through capital and risk management through operational activities.

Risk management through capital is adjusted to strategic and long-term business plans, as well as an efficient capital allocation policy in accordance with business segments that have an optimal risk-return profile that includes 8 (eight) types of risk, namely credit risk, market risk, operational risk,

yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi dan risiko stratejik. Pengelolaan risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *road map Basel* I, *Basel* II dan *Basel* III serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai saat ini, Bank Riau Kepri senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Pengungkapan Kuantitatif Eksposure Risiko

Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional Bank seperti perkreditan (penyediaan dana), akibat kegagalan settlement dan *counterparty credit risk*. Selain kredit, Bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontinjensi. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana Bank Riau Kepri tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada Bank Riau Kepri. secara umum eksposur risiko kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama sehingga kemampuan Bank Riau Kepri untuk mengidentifkasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting.

Bank Riau Kepri saat ini telah memiliki portofolio guideline dalam penetapan risk appetite dan risk tolerance berdasarkan beberapa parameter seperti penyaluran kredit berdasarkan segmen, komposisi portofolio serta pencadangan potensi kerugian portofolio kredit. Adapun terkait dengan limit kewenangan memutus kredit saat ini Bank Riau Kepri telah menerapkan mekanisme keputusan kredit secara berjenjang sesuai dengan tingkat risiko yang tercermin dari *plafond* pengajuan fasilitas kredit. Dalam analisa kredit, Bank Riau Kepri telah menerapkan proses identifikasi atas potensi risiko yang melekat. Proses identifikasi tersebut menjadi lebih optimal

liquidity risk, legal risk, compliance risk, reputation risk and strategic risk. Risk management continues to be pursued to be in line with the Basel I, Basel II and Basel III road maps and the provisions of the Financial Services Authority. Until now, Bank Riau Kepri has always followed and adjusted the latest developments and regulations issued by banking authorities, including Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

Quantitative Disclosure of Risk Exposure

In accordance with the complexity of its business, the Bank has managed 8 (eight) types of risk, namely credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk.

Credit Risk

Credit risk is the risk that occurs due to the failure of the counterparty to fulfill its obligations. Credit risk is the risk that occurs due to the failure of the counterparty to fulfill its obligations. Credit risk can come from various functional activities of the Bank, such as credit (providing funds), due to settlement failures and counterparty credit risk. In addition to credit, the Bank faces credit risk from various financial instruments such as securities, acceptances, inter-bank transactions, trade finance transactions, exchange rate transactions and derivatives as well as commitments and contingencies. The main purpose of risk management for credit risk is to ensure that the activities of providing funds for Bank Riau Kepri are not exposed to credit risk that can cause losses to Bank Riau Kepri. In general, credit risk exposure is one of the main risk exposures, so the ability of Bank Riau Kepri to identify, measure, monitor, and control credit risk and provide sufficient capital for this risk is very important.

Bank Riau Kepri currently has a portfolio of guidelines in determining risk appetite and risk tolerance based on several parameters, such as lending by segment, portfolio composition and reserves for potential loan losses. As for the current credit limit, Bank Riau Kepri has implemented a credit decision mechanism in stages according to the level of risk as reflected in the credit facility application ceiling. In credit analysis, Bank Riau Kepri has implemented an identification process for the inherent risk potential. The identification process has become more optimal with the establishment of a Financial Review Division which specifically carries out reviews and further analysis of the

dengan dibentuknya Divisi *Financial review* yang khusus melaksanakan review dan analisa lanjutan atas proses pengajuan fasilitas kredit.

credit facility application process.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank Riau Kepri.

Bank telah memiliki kebijakan terkait penetapan limit dealer yang diajukan oleh Divisi *Treasury* & Internasional untuk dilakukan evaluasi oleh Divisi Manajemen Risiko. Beberapa strategi pengelolaan risiko pasar yang dilakukan Bank Riau Kepri adalah mencakup sistem dan prosedur dengan menggunakan teknik *Value at Risk* (VaR) dan *stress testing*.

Bank Riau Kepri melakukan pemantauan secara berkala melalui penerbitan laporan yang disampaikan kepada Direksi. Bank juga membatasi jenis transaksi atau instrumen tertentu untuk ditransaksikan oleh bisnis unit, serta mengurangi risiko dengan cara memberikan batas maksimum transaksi atau portofolio sesuai dengan *risk appetite* Bank.

Market Risk

Market risk is the risk in the balance sheet and off balance sheet positions, including derivative transactions, due to changes in overall market conditions, including the risk of changes in option prices. The main objective of risk management for market risk is to minimize the possible negative impact due to changes in market conditions on the assets and capital of Bank Riau Kepri.

The Bank has a policy regarding dealer limit determination proposed by the Treasury & International Division for evaluation by the Risk Management Division. Several market risk management strategies implemented by Bank Riau Kepri include systems and procedures using Value at Risk (VaR) and stress testing techniques.

Bank Riau Kepri conducts periodic monitoring through the issuance of reports submitted to the Board of Directors. The Bank also limits certain types of transactions or instruments to be transacted by business units, as well as reduces risk by providing a maximum limit for transactions or portfolios in accordance with the Bank's risk appetite.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank Riau Kepri untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Bank telah memiliki kebijakan terkait penerapan manajemen risiko likuiditas sebagai upaya menghadapi permasalahan likuiditas dalam penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* dalam memelihara aktiva likuid maupun menjaga struktur pendanaan agar dapat mempertahankan kemampuan likuiditas Bank dalam berbagai kondisi ekonomi. Bank juga telah memiliki kebijakan *Contingency Funding Plan* yang mengatur tentang langkah-langkah penanganan dampak gangguan dan proses pemulihan likuiditas dalam kondisi kritis. Dalam kebijakan ini mendefinisikan berbagai tingkat krisis tergantung pada ruang lingkup krisis, kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak kepada Bank.

Satuan kerja manajemen risiko juga melakukan stress testing likuiditas dan memberikan informasi kondisi kecukupan aset likuid yang dipandang memadai untuk mengcover penarikan dana oleh nasabah secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk due to the inability of Bank Riau Kepri to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be pledged without disrupting the Bank's activities and financial condition.

The Bank has policies related to the implementation of liquidity risk management as an effort to deal with liquidity problems in determining risk appetite and risk tolerance in maintaining liquid assets and maintaining the funding structure in order to maintain the Bank's liquidity capability in various economic conditions. The Bank also has a Contingency Funding Plan policy that regulates steps to deal with the impact of disruptions and the process of recovering liquidity in critical conditions. This policy defines various levels of crisis depending on the scope of the crisis, the likelihood of its occurrence and the magnitude of the impact on the Bank.

The risk management unit also performs liquidity stress testing and provides information on the condition of adequacy of liquid assets which is deemed adequate to cover sudden and large withdrawals of funds by customers.

Bank Riau Kepri melakukan pemantauan secara berkala melalui penerbitan laporan yang disampaikan kepada Direksi. Melalui laporan Ini Bank mengidentifikasi indikator peringatan dini untuk membantu proses identifikasi krisis likuiditas, pengawasan peningkatan risiko atau kerentanan dalam posisi risiko likuiditas Bank sehingga menjadi *Early Warning Signal* untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Bank Riau Kepri conducts periodic monitoring through the issuance of reports submitted to the Board of Directors. Through this report, the Bank identifies early warning indicators to assist the process of identifying liquidity crises, monitoring increased risk or vulnerabilities in the Bank's liquidity risk position so that it becomes an Early Warning Signal for immediate action.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadiankejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Bank Riau Kepri melakukan pengelolaan risiko operasional pada seluruh aktivitas, dimana seluruh pegawai wajib berperan serta dalam mengelola risiko operasional pada unit kerja masing-masing serta memperhatikan kontrol yang efektif dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Bank.

Bank Riau Kepri telah memiliki kebijakan terkait penerapan manajemen risiko operasional sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko operasional pada Bank. Selain itu Bank Riau Kepri memiliki kebijakan terkait limit kewenangan dalam kegiatan operasional, pemisahan tugas dan tanggung jawab pada setiap level jabatan, serta adanya *approval* untuk setiap eskalasi.

Dalam mendukung penerapan majemen risiko operasional untuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, Bank Riau Kepri telah mengembangkan alat bantu manajemen risiko yaitu *Operational Risk Self Assessment* (ORSA) yang terdiri dari *Risk Control Self Assessment* (RCSA), Key Risk Indicator dan Loss event database. Dimana Bank secara berkala melakukan pemantauan risiko operasional melalui penerbitan laporan yang disampaikan kepada Direksi.

Operational Risk

Operational risk is the risk due to inadequate and/or malfunctioning internal processes, human error, system failure, and/or external events that affect the Bank's operations.

Bank Riau Kepri manages operational risk in all activities, where all employees are required to participate in managing operational risk in their respective work units and pay attention to effective controls in anticipating possible risks that can harm the Bank.

Bank Riau Kepri already has a policy related to the implementation of operational risk management so as to minimize the possibility of operational risk in the Bank. In addition, Bank Riau Kepri has policies related to limits of authority in operational activities, separation of duties and responsibilities at each level of office, as well as approval for each escalation.

To support the implementation of operational risk management for the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risk, Bank Riau Kepri has developed a risk management tool, namely Operational Risk Self Assessment (ORSA) which consists of Risk Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicators and Loss event database. Where the Bank periodically monitors operational risk through the issuance of reports submitted to the Board of Directors.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari pada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar Negara Bank Riau Kepri telah memiliki kebijakan serta pedoman penerapan manajemen risiko hukum. Selain itu Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam pengelolaan di

Legal Risk

Legal Risk is the risk due to lawsuits and/or the weakness of the juridical aspect. Weaknesses in the juridical aspect are, among others, due to lawsuits, the absence of supporting laws and regulations, or weaknesses in the engagement such as not fulfilling the conditions for a valid contract and imperfect binding of collateral. Legal risks can be sourced from operations, agreements with third parties, legal uncertainty and negligence in applying the law, obstacles in the litigation process for claim settlement, as well as jurisdictional issues between countries. Bank Riau Kepri already has policies and guidelines for implementing legal risk management. In addition, the Bank also has policies and procedures in legal management to ensure that the Bank's activities are in accordance with the provisions of the

bidang hukum untuk memastikan bahwa aktivitas Bank telah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan serta peraturan lainnya yang berlaku, sehingga Bank Riau Kepri dapat terhindar dari risiko hukum. Bank juga melakukan kajian risiko hukum untuk setiap produk dan aktivitas baru sebagai langkah untuk memitigasi risiko hukum.

Divisi Hukum tersebut bertindak sebagai "*legal watch*" yang berfungsi untuk memberikan analisis/ advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi, selain itu juga berfungsi dalam memberikan legal opini dalam setiap perjanjian kerjasama yang akan dilakukan oleh Bank Riau Kepri.

legislation and other applicable regulations, so that Bank Riau Kepri can avoid legal risks. The Bank also conducts legal risk studies for each new product and activity as a step to mitigate legal risk.

The Legal Division acts as a "legal watch" which functions to provide legal analysis/advice to all employees at every level of the organization, besides that it also functions to provide legal opinions in every cooperation agreement that will be carried out by Bank Riau Kepri.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya komunikasi bank yang kurang efektif.

Bank Riau Kepri telah membentuk unit kerja tersendiri yang mengelola risiko reputasi yaitu Divisi Sekretaris Perusahaan dimana unit kerja tersebut berfungsi untuk melakukan pengelolaan terhadap reputasi Bank Riau Kepri.

Bank Riau Kepri telah memiliki kebijakan serta pedoman manajemen risiko reputasi. Bank Riau Kepri juga telah memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan yang harus dilakukan oleh unit kerja operasional, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko reputasi akibat kurang memadainya pelayanan Bank Riau Kepri, terdapat juga kebijakan mengenai penanganan keluhan nasabah. Selain itu Bank Riau Kepri telah memiliki *Call Center* sebagai sarana untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan serta penyampaian permasalahan terkait dengan Bank Riau Kepri. Terkait hubungan dengan pihak investor Bank Riau Kepri telah memiliki unit kerja investor *relationship* yang bertugas melakukan komunikasi dengan pihak investor.

Reputational Risk

Reputation risk is the risk due to a decrease in the level of stakeholder trust originating from negative perceptions of the bank. This is partly due to negative media coverage and/or rumors about banks, as well as ineffective bank communications.

Bank Riau Kepri has formed a separate work unit that manages reputation risk, namely the Corporate Secretary Division where the work unit functions to manage the reputation of Bank Riau Kepri.

Bank Riau Kepri already has policies and guidelines for reputation risk management. Bank Riau Kepri also has a policy regarding service standards that must be carried out by operational work units, this is done to minimize the occurrence of reputation risk due to inadequate Bank Riau Kepri services, there are also policies regarding the handling of customer complaints. In addition, Bank Riau Kepri already has a Call Center as a means to serve people who need banking services and deliver problems related to Bank Riau Kepri. Regarding relations with investors, Bank Riau Kepri already has an investor relations work unit in charge of communicating with investors.

Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul antara lain karena bank menerapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang kurang komprehensif dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik. Selain itu risiko stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan

Strategic Risk

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. This risk arises, among others, because the bank implements a strategy that is not in line with the bank's vision and mission, conducts a less comprehensive strategic environmental analysis and/ or there is a discrepancy in the strategic plan. In addition, strategic risk also arises due to failure to anticipate changes in the business environment, including failure to anticipate changes in technology, changes in macroeconomic conditions, dynamics of competition in the market, and

kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan dari regulator.

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan penetapan serta pengarahan mengenai strategi bisnis Bank Riau Kepri sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam menerapkan strategi bisnis tersebut dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) yang penyusunannya ditetapkan oleh Direksi dengan meminta persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dalam melakukan pengelolaan strategi Bank, Direksi dibantu oleh Divisi Perencanaan Strategis dalam memonitor implementasi strategi bank termasuk implementasi Rencana Bisnis Bank. Seluruh unit bisnis/unit pendukung bertanggung jawab dalam membantu Direksi menyusun perencanaan stratejik dan mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan secara efektif. Adapun upaya pengendalian yang dilakukan untuk risiko stratejik adalah dengan melakukan analisa atas pencapaian kinerja Bank dengan melakukan evaluasi kinerja secara berkala antara Pemimpin Unit Kantor, Pemimpin Divisi dan Direksi.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern yang konsisten.

Dalam melakukan pengelolaan risiko kepatuhan, Bank Riau Kepri telah membentuk unit kerja kepatuhan yaitu Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh unit yang ada di bank telah mematuhi peraturan-peraturan yang berlakuBank Riau Kepri telah memiliki kebijakan serta pedoman penerapan manajemen risiko kepatuhan. Selain itu Bank Riau Kepri juga telah memiliki kebijakan mengenai Kebijakan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang diantaranya membahas mengenai transaksi transaksi yang mencurigakan serta pengkinian data nasabah serta kebijakan mengenai pengendalian gratifikasi dan terdapat prosedur kepatuhan untuk unit kerja sebagaimana diatur dalam pedoman fungsi kepatuhan Bank Riau Kepri. Selain itu terkait dengan penerbitan produk dan aktivitas baru terlebih dahulu dilakukan uji petik kepatuhan terkait kebijakan yang akan diterbitkan.

Pemantauan risiko kepatuhan Bank juga dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) dimana melalui aplikasi ini dapat dipantau parameter yang harus dikendalikan sesuai dengan ketentuan regulator.

policy changes from regulators.

The Board of Commissioners and the Board of Directors determine and direct the business strategy of Bank Riau Kepri in accordance with their duties and authorities. In implementing the business strategy, it is stated in the Bank's Business Plan (RBB) whose preparation is determined by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

In managing the Bank's strategy, the Board of Directors is assisted by the Strategic Planning Division in monitoring the implementation of the bank's strategy, including the implementation of the Bank's Business Plan. All business units/support units are responsible for assisting the Board of Directors in formulating strategic plans and implementing the strategies that have been determined effectively. The control efforts carried out for strategic risk are by analyzing the achievement of the Bank's performance by conducting periodic performance evaluations between the Head of Office Units, Division Leaders and Directors.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk due to the bank not complying with and/or not implementing the applicable laws and regulations. Compliance risk management is carried out through the implementation of a consistent internal control system.

In managing compliance risk, Bank Riau Kepri has established a compliance work unit, namely the Compliance Division, which is responsible for ensuring that all units in the bank comply with applicable regulations. Bank Riau Kepri already has policies and guidelines for implementing compliance risk management. In addition, Bank Riau Kepri also has a policy regarding the Anti-Money Laundering Program (APU) and Prevention of Terrorism Financing (PPT) policies which include discussing suspicious transactions and updating customer data as well as policies regarding gratuities control and compliance procedures for work units as follows. regulated in the guidelines for the compliance function of Bank Riau Kepri. In addition, related to the issuance of new products and activities, a compliance test is carried out first regarding the policies to be issued.

Bank compliance risk monitoring is also carried out through the Compliance Information System Application (ASIK) where through this application parameters that must be controlled can be monitored in accordance with regulatory provisions.

Tabel Laporan Ukuran Utama (*Key Metrics Report*) PT Bank Riau Kepri (Individu) Posisi Laporan Desember 2021
Main Measures Report (Key Metrics Report) PT Bank Riau Kepri (Individual) Position Report December 2021 Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Deskripsi	a	b	c	d	e	*Description*
		Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	
Modal Yang Tersedia (Nilai)							***Available Capital (Value)***
1	Modal Inti Utama (CET1)	2.995.038	2.971.229	3.111.954	3.228.462	2.868.537	*Main Core Capital (CET1)*
2	Modal Inti (Tier 1)	2.995.038	2.971.229	3.111.954	3.228.462	2.868.537	*Core Capital (Tier 1)*
3	Total Modal	3.147.228	3.122.340	3.262.834	3.379.106	3.017.586	*Total Capital*
Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)							***Risk Weighted Assets (Value)***
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	14.937.265	14.851.484	14.869.523	14.696.478	14.525.997	*Total Risk Weighted Assets (RWA)*
4a	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (*pre-floor*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*Total Risk Weighted Assets (pre-floor)*
Rasio Modal berbasis Risiko Dalam Bentuk Persentase Dari ATMR							***Risk-based Capital Ratio in Percentage of RWA***
5	Rasio CET1 (%)	20,05%	20,01%	20,93%	21,97%	19,75%	*CET1 Ratio (%)*
6	Rasio Tier 1 (%)	20,05%	20,01%	20,93%	21,97%	19,75%	*Tier 1 Ratio (%)*
7	Rasio Total Modal (%)	21,07%	21,02%	21,94%	22,99%	20,77%	*Total Capital Ratio (%)*
Tambahan CET1 Yang Berfungsi Sebagai Buffer Dalam Bentuk Persentase Dari ATMR							***Additional CET1 That Serves As A Buffer In The Form Of A Percentage Of RWA***
8	Capital conservation buffer (2.5% dari ATMR) (%)	-	-	-	-	-	*Capital conservation buffer (2.5% of RWA) (%)*
9	*Countercyclical Buffer* (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	-	-	-	-	-	*Countercyclical Buffer (0 - 2.5% of RWA) (%)*
10	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%)	-	-	-	-	-	*Capital Surcharge for Systemic Banks (1% - 2.5%) (%)*
11	Total CET1 sebagai buffer (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	-	-	-	-	-	*Total CET1 as buffer (Line 8 + Line 9 + Line 10)*
12	Komponen CET1 untuk buffer	11,78%	11,73%	11,60%	13,65%	10,44%	*CET1 component for buffer*
Rasio Pengungkit Sesuai Basel III							
13	Total Eksposur	30.793.937	30.003.755	30.087.735	29.300.354	28.214.020	*Total Exposure*
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	9,73%	9,90%	10,34%	11,02%	10,17%	*Leverage Ratio Value, including the impact of adjustments to temporary exceptions to the placement of demand deposits with Bank Indonesia in order to comply with the Statutory Reserves requirement (if any)*
14a	Nilai Rasio pengungkit sesuai dengan Basel III dengan adanya Model Kerugian Kredit Ekspektasian sesuai PSAK 71 secara Penuh. (%) (baris 2a / baris13)						*The Leverage Ratio value is in accordance with Basel III with the Full Expected Credit Loss Model in accordance with PSAK 71. (%) (line 2a / line13)*
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	9,73%	9,90%	10,34%	11,02%	10,17%	*Leverage Ratio Value, excluding the impact of adjustments to temporary exceptions to the placement of demand deposits with Bank Indonesia in order to comply with the Statutory Reserves requirement (if any)*

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Deskripsi	a	b	c	d	e	*Description*
		Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset *Securities Financing Transaction* (SFT) secara gross	9,73%	9,90%	10,34%	11,02%	10,17%	*The value of the Leverage Ratio, including the impact of the adjustment to the temporary exception of the placement of demand deposits with Bank Indonesia in order to comply with the Statutory Reserves requirement (if any), which has included the average value of the carrying value of Securities Financing Transaction (SFT) assets on a gross basis*
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara gross	9,73%	9,90%	10,34%	11,02%	10,17%	*Leverage Ratio Value, excluding the impact of adjustments to the temporary exception of the placement of demand deposits with Bank Indonesia in order to comply with the Statutory Reserves requirement (if any), which has included the average value of the gross carrying value of SFT assets*
Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)							***Liquidity Adequacy Ratio (LCR)***
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*Total High Quality Liquid Assets (HQLA)*
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (*net cash outflow*)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*Total Net Cash Outflow (net cash outflow)*
17	LCR (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*LCR (%)*
Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)							
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*Total Available Stable Funding (ASF)*
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*Total Stable Funding Required (RSF)*
20	NSFR (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	*NSFR (%)*

Analisis Kualitatif

Rasio KPMM :
Rasio KPMM Bank Riau Kepri pada Desember 2021 sebesar 21,07% meningkat sebesar 0,05% dari posisi September 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan Modal sebesar Rp24.288 juta atau sebesar 0,80%.
Jika dibandingkan Desember 2020 rasio KPMM mengalami peningkatan sebesar 0,30%. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Modal sebesar Rp129.642 juta.
KPMM Ratio:
The KPMM ratio of Bank Riau Kepri in December 2021 was 21.07%, an increase of 0.05% from the position in September 2021. This increase was due to an increase in capital of Rp. 24,288 million or 0.80%.
When compared to December 2020, the CAR ratio has increased by 0.30%. This increase was mainly due to an increase in Capital of Rp129,642 million.

Rasio Pengungkit :
Rasio Pengungkit periode 31 Desember 2021 sebesar 9,73% menurun dibanding periode September 2021 sebesar 9,90%. Hal ini disebabkan total eksposur dalam rasio pengungkit pada periode 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,63% dengan nilai tercatat sebesar Rp30.793.937 juta dibanding periode September 2021 dengan nilai sebesar Rp30.003.755 juta dan peningkatan modal inti sebesar 0,80%. Namun secara keseluruhan rasio pengungkit periode 31 Desember 2021 masih berada di atas ketentuan minimum rasio pengungkit sebesar 3%.
Leverage Ratio:
The Leverage Ratio for the 31 December 2021 period was 9.73%, a decrease compared to the September 2021 period of 9.90%. This was due to the total exposure in the leverage ratio for the period of December 31, 2021, which increased by 2.63% with a recorded value of Rp. 30,793,937 million compared to the period of September 2021 with a value of Rp. 30,000,755 million and an increase in core capital of 0.80%. However, the overall leverage ratio for the period of December 31, 2021 is still above the minimum leverage ratio of 3%.

Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) :
N/A
Liquidity Adequacy Ratio (LCR):
N/A

Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR) :
N/A
Net Stable Funding Ratio (NSFR):
N/A

*T adalah periode triwulanan, T-1 adalah periode 1 triwulan sebelumnya
**T is the quarterly period, T-1 is the period 1 of the previous quarter*

Template LI1: Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi sesuai standar akuntansi dengan ketentuan kehati-hatian.

Analisa kuantitatif: Bank diharapkan untuk menyediakan penjelasan kualitatif atas aset keuangan yang dikenakan lebih dari satu risiko.

LI1 Template: Differences between Consolidated Scope according to accounting standards and prudential provisions.

Quantitative analysis: Banks are expected to provide a qualitative description of financial assets that are subject to more than one risk.

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

Deskripsi	a	b	c	d	e	f	g	*Description*
			Nilai Tercatat Masing-Masing Risiko *Carrying Value of Each Risk*					
	Nilai Tercatat Sebagaimana Tercantum Dalam Publikasi Laporan Keuangan *Carrying Value as Listed in the Publication of Financial Statements*	Nilai Tercatat Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian *Carrying Value Based on the Precautionary Principle*	Sesuai Kerangka Risiko Kredit *According to the Credit Risk Framework*	Sesuai Kerangka *Counterparty* Credit Risk *According to the Counterparty Credit Risk Framework*	Sesuai Kerangka Sekuritisasi *According to the Securitization Framework*	Sesuai Kerangka Risiko Pasar *According to Market Risk Framework*	Tidak Mengacu Pada Persyaratan Permodalan Atau Berdasarkan Pengurangan Modal *Not Referring to Capital Requirements or Based on Capital Reduction*	
Indonesia								***Indonesia***
Aset								***Asset***
Kas	719.394	719.394	719.394	-	-	-	-	*Cash*
Penempatan pada Bank Indonesia	4.918.517	4.918.517	4.918.517	-	-	-	-	*Placement with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank lain	547.377	547.377	547.377	-	-	-	-	*Placement with other banks*
Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	-	-	-	-	*Spot bills and derivatives*
Surat berharga	5.238.384	5.238.384	5.238.384	-	-	-	-	*Securities*
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-	-	-	-	-	-	-	*Securities sold under agreements to repurchase (repo)*
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repo)*	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on securities purchased under agreements to resell (reverse repo)*
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	*Acceptance bill*
Kredit yang diberikan	13.866.358	13.866.358	13.866.358	-	-	-	-	*Credit granted*
Pembiayaan syariah	5.018.556	5.018.556	5.018.556	-	-	-	-	*Sharia financing*
Penyertaan	1.556	1.556	1.556	-	-	-	-	*Participation*
Aset Keuangan Lainnya	152.487	152.487	152.487	-	-	-	-	*Other Financial Assets*

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

Deskripsi	a	b	c	d	e	f	g	*Description*
	Nilai Tercatat Sebagaimana Tercantum Dalam Publikasi Laporan Keuangan *Carrying Value as Listed in the Publication of Financial Statements*	Nilai Tercatat Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian *Carrying Value Based on the Precautionary Principle*	Nilai Tercatat Masing-Masing Risiko *Carrying Value of Each Risk*					
			Sesuai Kerangka Risiko Kredit *According to the Credit Risk Framework*	Sesuai Kerangka *Counterparty* Credit Risk *According to the Counterparty Credit Risk Framework*	Sesuai Kerangka Sekuritisasi *According to the Securitization Framework*	Sesuai Kerangka Risiko Pasar *According to Market Risk Framework*	Tidak Mengacu Pada Persyaratan Permodalan Atau Berdasarkan Pengurangan Modal *Not Referring to Capital Requirements or Based on Capital Reduction*	
Indonesia								***Indonesia***
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(497.513)	(497.513)	(497.513)	-	-	-	-	*Allowance for impairment losses on financial assets -/-*
a. Surat berharga yang dimiliki	(897)	(897)	(897)	-	-	-	-	*a. Securities owned*
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(496.610)	(496.610)	(496.610)	-	-	-	-	*b. Credit granted and sharia financing*
c. Lainnya	(6)	(6)	(6)	-	-	-	-	*c. Other*
Aset tidak berwujud	-	-	-	-	-	-	-	*Intangible Assets*
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	-	-	-	-	-	*Accumulated amortization of intangible assets -/-*
Aset tetap dan inventaris	721.050	721.050	721.050	-	-	-	-	*Fixed assets and inventory*
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(324.118)	(324.118)	(324.118)	-	-	-	-	*Accumulated depreciation of fixed assets and inventory -/-*
Aset Non Produktif	-	-	-	-	-	-	-	*Non-Earning Assets*
a. Properti terbengkalai	-	-	-	-	-	-	-	*a. Abandoned property*
b. Aset yang diambil alih	-	-	-	-	-	-	-	*b. Foreclosed assets*
c. Rekening Tunda	-	-	-	-	-	-	-	*c. Pending Account*
d. Aset antar kantor	-	-	-	-	-	-	-	*d. Inter-office assets*
Aset lainnya	417.638	417.638	417.638	-	-	-	-	*Other assets*
Total Aset	**30.779.686**	**30.779.686**	**30.779.686**	**-**	**-**	**-**	**-**	***Assets Total***
Giro	5.607.380	5.607.380	-	-	-	-	-	*Current Account*
Tabungan	7.449.293	7.449.293	-	-	-	-	-	*Savings*
Deposito	12.559.059	12.559.059	-	-	-	-	-	*Deposit*
Uang Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	*Electronic Money*

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

Deskripsi	a	b	c	d	e	f	g	*Description*
	Nilai Tercatat Masing-Masing Risiko *Carrying Value of Each Risk*							
	Nilai Tercatat Sebagaimana Tercantum Dalam Publikasi Laporan Keuangan *Carrying Value as Listed in the Publication of Financial Statements*	**Nilai Tercatat Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian** *Carrying Value Based on the Precautionary Principle*	**Sesuai Kerangka Risiko Kredit** *According to the Credit Risk Framework*	**Sesuai Kerangka *Counterparty* Credit Risk** *According to the Counterparty Credit Risk Framework*	**Sesuai Kerangka Sekuritisasi** *According to the Securitization Framework*	**Sesuai Kerangka Risiko Pasar** *According to Market Risk Framework*	**Tidak Mengacu Pada Persyaratan Permodalan Atau Berdasarkan Pengurangan Modal** *Not Referring to Capital Requirements or Based on Capital Reduction*	
Indonesia								***Indonesia***
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	*Liabilities to Bank Indonesia*
Liabilitas kepada bank lain	1.040.800	1.040.800	-	-	-	-	-	*Liabilities to other banks*
Liabilitas spot dan derivatif/ *forward*	-	-	-	-	-	-	-	*Spot and derivative/forward liabilities*
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	-	-	-	*Acceptance liability*
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	-	*Issued securities*
Pinjaman/ pembiayaan yang diterima	151.442	151.442	-	-	-	-	-	*Loans/financing accepted*
Setoran jaminan	12.777	12.777	-	-	-	-	-	*Guarantee deposit*
Liabilitas antar kantor	-	-	-	-	-	-	-	*Liabilities between offices*
Liabilitas lainnya	771.776	771.776	-	-	-	-	-	*Other liabilities*
Kepentingan minoritas *(minority interest)*	-	-	-	-	-	-	-	*Minority interests*
Total Liabilitas	**27.592.527**	**27.592.527**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	***Liability Totals***

Analisis Kualitatif | *Qualitative Analysis*

Nilai tercatat dalam publikasi laporan keuangan telah berdasarkan nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian.
Atas perhitungan masing-masing kerangka risiko pada aset keuangan telah mengikujti aturan OJK yaitu :

1. SEOJK Nomor 11/SEOJK.03/2018 mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar,
2. SEOJK Nomor 38/SEOJK/2016 mengenai Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar

The carrying amount in the published financial statements has been based on the carrying amount based on the precautionary principle.
The calculation of each risk framework on financial assets has followed OJK rules, namely:

1. *SEOJK Number 11/SEOJK.03/2018 regarding Guidelines for Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk using the Standard Approach,*
2. *SEOJK Number 38/SEOJK/2016 concerning Guidelines for Using Standard Methods in Calculation of the Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks by Taking Market Risk into account*

Tabel Template LI2: Sumber perbedaan utama antara eksposur sesuai ketentuan kehati-hatian dengan carrying values sesuai standar akuntansi keuangan
Template LI2: Sources of the main differences between prudential exposures and carrying values according to financial accounting standards Table

Deskripsi	a	b	c	d	e	*Description*
	Total	Item sesuai:				
		Kerangka risiko kredit *Credit risk framework*	Kerangka sekuritisasi *Framework securitization*	Kerangka *Counterparty credit risk* *Framework Counterparty credit risk*	Kerangka risiko pasar *Market risk framework*	
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1)	30.779.686	30.779.686	-	-	-	*The carrying amount of the asset is in accordance with the scope of the prudential consolidation (as reported in the LI1 template)*
Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada template LI1)	-	-	-	-	-	*The carrying amount of the liability according to scope is in accordance with the scope of the consolidated prudential provisions (as reported in the LI1 template).*
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	30.779.686	30.779.686	-	-	-	*Total net value according to the scope of the prudential consolidation*
Nilai rekening administratif	463.505	220.225	-	-	-	*Administrative account value*
Perbedaan valuasi	-	-	-	-	-	*Valuation difference*
Perbedaan antara netting rules, selain dari yang termasuk pada baris 2.	-	-	-	-	-	*Differences between netting rules, apart from those included in line 2.*
Perbedaan provisi	-	-	-	-	-	*Provision difference*
Perbedaan prudential filters	-	-	-	-	-	*Differences in prudential filters*
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	-	-	-	-	-	*The value of the considered exposure, according to the scope of the consolidated prudential provisions*
**Analisis Kualitatif	*Qualitative Analysis***					

Tabel Komposisi Permodalan PT Bank Riau Kepri Per 31 Desember 2021
Capital Composition PT Bank Riau Kepri As of 31 December 2021 Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah) *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1) *No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*	*Component*
CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor				***CET 1: Instruments and Additional Paid-in Capital***
1	Saham biasa (termasuk *stock* surplus)	1.105.161	b + c	*Common stock (including surplus stock)*
2	Laba ditahan	455.259	e + f	*Retained earnings*
3	Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	1.622.421	d	*Accumulated other comprehensive income (and other reserves)*
4	Modal yang termasuk *phase out* dari CET1	N/A	-	*Capital that include phase out of CET1*
5	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-	*Non-Controlling Interests that can be taken into account*
6	CET1 sebelum *regulatory adjustment*	3.182.841	-	*CET1 before regulatory adjustment*
CET 1: Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)				*CET 1: Regulatory Adjustment*
7	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*	-	-	*The difference in the amount of the fair value adjustment of the financial instrument in the trading book*
8	*Goodwill*	-	-	*Goodwill*
9	Aset tidak berwujud lainnya (selain *Mortgage-Servicing Rights*)	-	-	*Other intangible assets (other than Mortgage-Servicing Rights)*
10	Aset pajak tangguhan yang berasal dari *future profitability*	N/A	-	*Deferred tax assets derived from future profitability*
11	*Cash-flow hedge reserve*	N/A	-	*Cash-flow hedge reserve*
12	*Shortfall on provisions to expected losses*	N/A	-	*Shortfall on provisions to expected losses*
13	Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi	-	-	*Gain on asset sale in securitization transaction*
14	Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)	-	-	*Increase/decrease in fair value of financial liabilities (DVA)*
15	Aset pensiun manfaat pasti	N/A	-	*Defined benefit retirement assets*
16	Investasi pada saham sendiri (jika belum di net dalam modal di Laporan Posisi Keuangan)	N/A	-	*Investment in own shares (if not already netted in capital in the Statement of Financial Position)*
17	Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain	-	-	*Cross ownership of the CET 1 instrument in another entity*
18	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	-	*Investments in bank capital, financial entities and insurance companies outside the scope of the consolidation by regulation, net short positions are permitted, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above the 10% limit)*
19	Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi short yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)	N/A	-	*Significant investments in ordinary shares of Banks, financial entities and insurance companies outside the scope of the consolidated provisions, net short positions permitted (amount above the 10% limit)*
20	*Mortgage servicing rights*	-	-	*Mortgage servicing rights*
21	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, net dari kewajiban pajak)	N/A	-	*Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above the 10% threshold, net of tax liability)*
22	Jumlah melebihi batasan 15% dari:	N/A	-	*The amount exceeds the 15% limit of:*
23	investasi signifikan pada saham biasa financials	N/A	-	*significant investment in common stock financials*
24	*mortgage servicing rights*	N/A	-	*mortgage servicing rights*
25	pajak tangguhan dari perbedaan temporer	N/A	-	*deferred tax from temporary differences*

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah) *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1) *No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*	*Component*
26	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	-	*Adjustments based on national specific provisions*
26a.	Selisih PPKA dan CKPN	(137.375)	-	*Difference between PPKA and CKPN*
26b.	PPKA non produktif	-	-	*Non-productive PPKA*
26c.	Aset Pajak Tangguhan	(32.099)	a	*Deferred tax assets*
26d.	Penyertaan	-	-	*Participation*
26e.	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi	-	-	*Lack of capital in insurance subsidiary companies*
26f.	Eksposur sekuritisasi	-	-	*Securitization Exposure*
26g.	Lainnya	-	-	*Other*
27	Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	-	*The adjustment in CET 1 due to AT 1 and Tier 2 is smaller than the deduction factor*
28	Jumlah pengurang (regulatory adjustment) terhadap CET 1	(169.474)	-	*Amount of reduction (regulatory adjustment) to CET 1*
29	Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	3.013.367	-	*Number of CET 1 after subtracting factor*
Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen				***Additional Core Capital (AT 1): Instruments***
30	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock* surplus)	-	-	*AT 1 instrument issued by the Bank (including surplus stock)*
31	Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi	-	-	*Which is classified as equity under accounting standards*
32	Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi	-	-	*Which is classified as a liability under accounting standards*
33	Modal yang yang termasuk *phase out* dari AT 1	N/A	-	*Capital which includes phase out of AT 1*
34	Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	-	*AT 1 instrument issued by Subsidiaries recognized in the calculation of CAR on a consolidated basis*
35	Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*	N/A	-	*Instruments issued by Subsidiaries which are included in phase out*
36	Jumlah AT 1 sebelum *regulatory adjustment*	-	-	*Amount of AT 1 before regulatory adjustment*
Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)				***Additional Core Capital: Reducing Factors (Regulatory Adjustment)***
37	Investasi pada instrumen AT 1 sendiri	N/A	-	*Invest in own AT 1 instrument*
38	Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain	-	-	*Cross ownership of the AT 1 instrument in another entity*
39	Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net posisi short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)	-	-	*Investments in bank capital, financial entities and insurance companies outside the scope of the consolidation by regulation, net short positions are permitted, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above the 10% limit)*
40	Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (*net posisi short* yang diperkenankan)	-	-	*Significant investment in the capital of the Bank, financial entities and insurance outside the scope of consolidation under the provisions (net of allowed short positions)*
41	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	-	*Adjustments based on national specific provisions*
41a.	Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain	-	-	*Placement of funds in AT 1 instruments with other banks*

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah) *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1) *No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*	*Component*
42	Penyesuaian pada AT 1 akibat Tier 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya	-	-	*The adjustment in AT 1 due to Tier 2 is smaller than the deduction factor*
43	Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap AT 1	-	-	*The number of reducing factors (regulatory adjustment) to AT 1*
44	Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-	-	*Total AT 1 after subtracting factor*
45	Jumlah Modal Inti (Tier 1) (CET 1 + AT 1)	3.013.367	-	*Total Core Capital (Tier 1) (CET 1 + AT 1)*
Modal Pelengkap (Tier 2): Instrumen dan cadangan			-	***Supplementary Capital (Tier 2): Instruments and reserves***
46	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock* surplus)	-	-	*Tier 2 instruments issued by the Bank (including surplus stock)*
47	Modal yang yang termasuk *phase out* dari Tier 2	N/A	-	*Capital that includes phase out of Tier 2*
48	Instrumen Tier 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi	-	-	*Tier 2 instruments issued by Subsidiaries recognized in the calculation of CAR on a consolidated basis*
49	Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*	-	-	*Capital issued by Subsidiaries which includes phase out*
50	Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	150.880	-	*PPKA general reserves for productive assets that must be calculated with a maximum amount of 1.25% of RWA for Credit Risk*
51	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) sebelum faktor pengurang	150.880	-	*Total Supplementary Capital (Tier 2) before the deduction factor*
Modal Pelengkap (Tier 2): Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)				***Supplementary Capital (Tier 2): Regulatory Adjustment***
52	Investasi pada instrumen Tier 2 sendiri	N/A	-	*Invest in Tier 2 instruments yourself*
53	Kepemilikan silang pada instrumen Tier 2 pada entitas lain	-	-	*Cross ownership of Tier 2 instruments in other entities*
54	Investasi pada kewajiban TLAC modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, net posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan threshold 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik)	N/A	-	*Investments in TLAC liabilities as capital of banks, financial entities and insurance companies outside the scope of the consolidation according to the provisions, net short positions are permitted, where the Bank does not own more than 10% of the issued share capital; the previous value was set with a threshold of 5% but no longer meets the criteria (for Systemic banks)*
	Investasi pada kewajiban TLAC lainnya dari entitas perbankan, keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat (hanya untuk Bank Sistemik G-SIBs)	N/A	-	*Investments in other TLAC liabilities of banking, financial and insurance entities that fall outside the scope of regulatory consolidation and, for which the bank does not own more than 10% of the issued entity's common stock: amounts previously designated to the 5% limit but which are no longer eligible (only for G-SIBs Systemic Banks)*
55	Investasi signifikan pada modal atau instrumen TLAC Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (*net posisi short* yang diperkenankan)	N/A	-	*Significant investments in TLAC capital or instruments of Banks, financial and insurance entities outside the scope of the consolidation under the provisions (net of permitted short positions)*
56	Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional	-	-	*Adjustments based on national specific provisions*
56a.	*Sinking fund*	-	-	*Sinking fund*
56b.	Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada Bank lain	-	-	*Placement of funds in Tier 2 instruments with other banks*

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah) *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1) *No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*	*Component*
57	Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) Modal Pelengkap	-	-	*Amount of regulatory adjustment for Supplementary Capital*
58	Jumlah Modal Pelengkap (Tier 2) setelah *regulatory adjustment*	150.880	-	*Amount of Supplementary Capital (Tier 2) after regulatory adjustment*
59	Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	3.164.247	-	*Total Capital (Core Capital + Supplementary Capital)*
60	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	14.869.523	-	*Total Risk Weighted Assets (RWA)*
Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (*Capital Buffer*)				***Minimum Capital Adequacy Ratio (KPMM) and Additional Capital (Capital Buffer)***
61	Rasio Modal Inti Utama CET 1 (persentase terhadap ATMR)	20,27%	-	*Main Core Capital Ratio CET 1 (percentage to RWA)*
62	Rasio Modal Inti Tier 1 (persentase terhadap ATMR)	20,27%	-	*Tier 1 Core Capital Ratio (percentage to RWA)*
63	Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR)	21,28%	-	*Total Capital Ratio (percentage to RWA)*
64	Buffer (persentase terhadap ATMR)	0,00%	-	*Buffer (percentage to RWA)*
65	*Capital Conservation Buffer*	0,00%	-	*Capital Conservation Buffer*
66	*Countercyclical Buffer*	0,00%	-	*Countercyclical Buffer*
67	Capital Surcharge untuk Bank Sistemik	0,00%	-	*Capital Surcharge for Systemic Banks*
68	Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk memenuhi *Buffer* (persentase terhadap ATMR) Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi *Buffer*.	10,94%	-	*For conventional commercial banks: CET 1 available to meet the Buffer (percentage of RWA) For branch offices of a Bank domiciled overseas: The portion of Business Funds placed in CEMA (expressed as a percentage of RWA) available to fulfill the Buffer.*
National minima (jika berbeda dari Basel 3)				***National minima (if different from Basel 3)***
69	Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	-	*National lowest ratio of CET 1 (if different from Basel 3)*
70	Rasio terendah Tier 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	-	*Lowest national Tier 1 ratio (if different from Basel 3)*
71	Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)	N/A	-	*The lowest ratio of total national capital (if different from Basel 3)*
Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)				***Amount below the reduction limit (before risk weighting)***
72	Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban TLAC lainnya pada entitas keuangan lain	N/A	-	*Non-significant investments in capital or other TLAC liabilities in other financial entities*
73	Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan	N/A	-	*Significant investment in common stock of financial entities*
74	*Mortgage servicing rights* (net dari kewajiban pajak)	N/A	-	*Mortgage servicing rights (net of tax liability)*
75	Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (net dari kewajiban pajak)	N/A	-	*Deferred tax assets arising from temporary differences (net of tax liabilities)*
Cap yang dikenakan untuk provisi pada Tier 2				
76	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan cap)	N/A	-	*Provisions that can be recognized as Tier 2 according to exposures based on the standard approach (before stamping)*
77	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan standar	N/A	-	*Cap on provision that is recognized as Tier 2 under the standard approach*
78	Provisi yang dapat diakui sebagai Tier 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan cap)	N/A	-	*Provisions that can be recognized as Tier 2 according to exposure under the IRB approach (before stamping)*

No	Komponen	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah) *Amount (In Million Rupiah)*	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi 1) *No. Ref. originating from the Consolidated Balance Sheet 1)*	*Component*
79	Cap atas provisi yang diakui sebagai Tier 2 berdasarkan pendekatan IRB	N/A		*Cap on provision that is recognized as Tier 2 under the IRB approach*
Instrumen Modal yang termasuk *phase out* (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)				***Capital Instruments including phase out (only valid between 1 Jan 2018 to 1 Jan 2022)***
80	Cap pada CET 1 yang temasuk *phase out*	N/A		*Cap on CET 1 which includes phase out*
81	Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah *redemptions* dan *maturities*)	N/A		*Amount excluded from CET 1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*
82	Cap pada AT 1 yang temasuk *phase out*	N/A		*Cap on AT 1 which includes phase out*
83	Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah *redemptions* dan *maturities*)	N/A		*Amount excluded from AT 1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*
84	Cap pada Tier 2 yang temasuk *phase out*	N/A		*Cap on Tier 2 which includes phase out*
85	Jumlah yang dikecualikan dari Tier 2 karena adanya cap (kelebihan di atas cap setelah *redemptions* dan *maturities*)	N/A		*Amount excluded from Tier 2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*

Tabel Rekonsiliasi Permodalan PT Bank Riau Kepri Per 31 Desember 2021
Capital Reconciliation PT Bank Riau Kepri as of December 31, 2021 Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	POS-POS	Laporan Publikasi Posisi Keuangan *Financial Position Publication Report*	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Dengan Cakupan Konsolidasi Berdasarkan Ketentuan Kehati-hatian *Consolidated Statement of Financial Position With Consolidated Scope Based on Prudential Conditions*	No. Referensi *No. Reference*	*POST*
	ASET				***ASSET***
1	Kas	719.394	719.394	-	*Cash*
2	Penempatan pada Bank Indonesia	4.918.517	4.918.517	-	*Placement with Bank Indonesia*
3	Penempatan pada bank lain	302.377	302.377	-	*Placement with other banks*
4	Tagihan spot dan derivatif	-	-	-	*Spot bills and derivatives*
5	Surat berharga	5.483.384	5.483.384	-	*Securities*
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-	-	-	*Securities sold under agreements to repurchase (repo)*
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	-	-	-	*Claims on securities purchased under agreements to resell (reverse repo)*
8	Tagihan akseptasi	-	-	-	*Acceptance bill*
9	Kredit yang diberikan	13.866.358	13.866.358	-	*Credit granted*
10	Pembiayaan syariah	5.018.556	5.018.556	-	*Sharia financing*
11	Penyertaan	1.556	1.556	-	*Participation*
12	Aset Keuangan Lainnya	156.287	156.287	-	*Other Financial Assets*
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(497.513)	-497.513	-	*Allowance for impairment losses on financial assets -/-*
	a. Surat berharga yang dimiliki	(897)	-897	-	*a. Securities owned*
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(496.610)	-496.610	-	*b. Credit granted and sharia financing*
	c. Lainnya	(6)	-6	-	*c. Other*
14	Aset tidak berwujud	-	-	-	*Intangible Assets*

No	POS-POS	Laporan Publikasi Posisi Keuangan *Financial Position Publication Report*	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Dengan Cakupan Konsolidasi Berdasarkan Ketentuan Kehati-hatian *Consolidated Statement of Financial Position With Consolidated Scope Based on Prudential Conditions*	No. Referensi *No. Reference*	*POST*
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-	-	-	*Accumulated amortization of intangible assets -/-*
15	Aset tetap dan inventaris	721.050	721.050	-	*Fixed assets and inventory*
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(324.118)	-324.118	-	*Accumulated depreciation of fixed assets and inventory -/-*
16	Aset Non Produktif	-	-	-	*Non-Earning Assets*
	a. Properti terbengkalai	-	-	-	*a. Abandoned property*
	b. Aset yang diambil alih	-	-	-	*b. Foreclosed assets*
	c. Rekening Tunda	-	-	-	*c. Pending Account*
	d. Aset antar kantor	-	-	-	*d. Inter-office assets*
17	Aset lainnya	381.740	381.740	-	*Other assets*
	Aset pajak tangguhan	32.099	32.099	a	*Deferred tax assets*
	TOTAL ASET	**30.779.686**	**30.779.686**		***TOTAL ASSET***

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	POS-POS	Laporan Publikasi Posisi Keuangan *Financial Position Publication Report*	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Dengan Cakupan Konsolidasi Berdasarkan Ketentuan Kehati-hatian *Consolidated Statement of Financial Position With Consolidated Scope Based on Prudential Conditions*	No. Referensi *No. Reference*	*POST*
	LIABILITAS				***LIABILITY***
1	Giro	5.607.380	5.607.380	-	*Current Account*
2	Tabungan	7.449.293	7.449.293	-	*Savings*
3	Deposito	12.559.060	12.559.060	-	*Deposit*
4	Uang Elektronik	-	-	-	*Electronic Money*
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	*Liabilities to Bank Indonesia*
6	Liabilitas kepada bank lain	1.040.800	1.040.800	-	*Liabilities to other banks*
7	Liabilitas spot dan derivatif/forward	-	-	-	*Spot liabilities and derivatives / forward*
8	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-	-	-	*Payable on securities sold under agreements to repurchase (repo)*
8	Liabilitas akseptasi	-	-	-	*Acceptance liability*
9	Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	*Issued securities*
10	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	151.442	151.442	-	*Loans / financing received*
11	Setoran jaminan	12.777	12.777	-	*Guarantee deposit*
12	Liabilitas antar kantor	-	-	-	*Liabilities between offices*
13	Liabilitas lainnya	771.775	771.775	-	*Other liabilities*
14	Kepentingan minoritas (*minority interest*)	-	-	-	*Minority interests*
	TOTAL LIABILITAS	**27.592.527**	**27.592.527**	-	***TOTAL LIABILITY***
	EKUITAS				***EQUITY***
15	Modal disetor	1.103.161	1.103.161	b	*Paid-up capital*
	a. Modal Dasar	4.000.000	4.000.000	-	*a. Authorized capital*
	b. Modal yang belum disetor -/-	(2.896.839)	(2.896.839)	-	*b. Unpaid capital -/-*

No	POS-POS	Laporan Publikasi Posisi Keuangan *Financial Position Publication Report*	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Dengan Cakupan Konsolidasi Berdasarkan Ketentuan Kehati-hatian *Consolidated Statement of Financial Position With Consolidated Scope Based on Prudential Conditions*	No. Referensi *No. Reference*	*POST*
	c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	-	-	-	*c. Shares repurchased (treasury stock) -/-*
16	Tambahan modal disetor	4.085	4.085	-	*Additional paid-in capital*
	a. Agio	-	-	-	*a. Agio*
	b. Disagio-/-	-	-	-	*b. Disagio-/-*
	d. Dana Setoran Modal	2.000	2.000	c	*d. Capital Deposit Fund*
	e. Lainnya	2.085	2.085	-	*e. Other*
17	Penghasilan komprehensif lain	2.233	2.233	-	*Other comprehensive income*
	a. Keuntungan	2.920	2.920	-	*a. Profit*
	b. Kerugian	687	687	-	*b. Loss*
18	Cadangan	1.622.421	1.622.421	-	*Reserve*
	a. Cadangan Umum	1.622.421	1.622.421	d	*a. General Reserve*
	b. Cadangan Tujuan	-	-	-	*b. Destination Reserve*
19	Laba/rugi	455.259	455.259	-	*Profit and loss*
	a. Tahun-tahun Lalu	-	-	e	*a. Past Years*
	b. Tahun Berjalan	455.259	455.259	f	*b. Current year*
	c. Dividen yang Dibayarkan -/-			-	*c. Dividends Paid -/-*
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	**3.187.159**	**3.187.159**		***TOTAL EQUITY THAT CAN BE ATTRIBUTED TO OWNER***
	TOTAL EKUITAS	**3.187.159**	**3.187.159**		***TOTAL EQUITY***
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**30.779.686**	**30.779.686**		***TOTAL OF LIABILITIES AND EQUITIES***

Tabel Pengungkapan Fitur Utama Permodalan PT. Bank Riau Kepri Posisi Desember 2021
Disclosure of Key Features of PT. Bank Riau Kepri Position December 2021 Table

No	Saham *Share*	Informasi Kuantitatif/Kualitatif *Information Quantitative/Qualitative*
1	Penerbit *Publisher*	PT. Bank Riau Kepri
2	Nomor identifikasi *Identification number*	- Saham Seri A : I-01 s.d II-19 - Saham Seri B : III-01 *- Series A Shares : I-01 to II-19* *- Series B Shares : III-01*
3	Hukum yang digunakan *Laws used*	Hukum Indonesia *Indonesian Law*
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah TLAC tercapai (untuk instrumen TLAC sah lainnya yang diatur oleh hukum asing) *The means by which the performance obligations under Section 13 of the TLAC Term Sheet are achieved (for other legal TLAC instruments governed by foreign law)*	N/A
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM ***Instrument Treatment is based on the provisions of KPMM***	
4	Pada saat masa transisi *During the transition period*	N/A

No	Saham *Share*	Informasi Kuantitatif/Kualitatif *Information Quantitative/Qualitative*
5	Setelah masa transisi *After the transition period*	CET 1
6	Apakah instrumen eligible untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu *Is the instrument eligible for Individual/Consolidation or Consolidation and Individual*	Individu
7	Jenis Instrumen *Instrument Type*	Saham Biasa
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM *Amount recognized in the calculation of KPMM*	1.103.161
9	Nilai par dari instrumen *Par value of the instrument*	1.103.161
10	Klasifikasi sesuai standar akuntansi keuangan *Classification according to financial accounting standards*	Ekuitas
11	Tanggal penerbitan *Publication date*	31 Desember 2021
12	Tidak ada jatuh tempo (perpetual) atau dengan jatuh tempo *No maturity (perpetual) or with maturity*	Perpetual
13	Tanggal jatuh tempo *Due date*	Tidak ada tanggal jatuh tempo
14	Eksekusi *call option* atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan *Execution of call options with the approval of the Financial Services Authority*	Tidak
15	Tanggal *call option*, jumlah penarikan dan persyaratan *call option* lainnya (bila ada) *Call option date, withdrawal amount and other call option terms (if any)*	-
16	*Subsequent call option* *Subsequent call option*	-
	Kupon/dividen ***Coupons/dividends***	
17	Dividen/kupon dengan bunga tetap atau *floating* *Dividends/coupons with fixed or floating interest*	*Floating*
18	Tingkat dari *coupon rate* atau index lain yang menjadi acuan *The level of the coupon rate or other index that is the reference*	-
19	Ada atau tidaknya *dividend stopper* *Whether or not there is a dividend stopper*	Tidak
20	*Fully discretionary*; partial atau mandatory *Fully discretionary; partial or mandatory*	-
21	Apakah terdapat fitur *step up* atau insentif lain *Is there a step up feature or other incentives?*	Tidak
22	Non-kumulatif atau kumulatif *Non-cumulative or cumulative*	Kumulatif
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi *Convertible or non-convertible*	Tidak dapat dikonversikan
24	Jika dapat dikonversi, sebutkan trigger *point*-nya *If it can be converted, please state the trigger point*	-
25	Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian *If it is convertible, is it all or part*	-
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana rate konversinya *If it can be converted, what is the conversion rate*	-
27	Jika dapat dikonversi; apakah *mandatory* atau optional *If convertible; is it mandatory or optional?*	-
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya *If convertible, state the type of conversion instrument*	-
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan *issuer of instrument it converts into* *If it can be converted, mention the issuer of the instrument it converts into*	-
30	Fitur *write-down* *Write-down feature*	Tidak
31	Jika terjadi *write-down*, sebutkan trigger-nya *If a write-down occurs, state the trigger*	-
32	Jika terjadi *write-down*, apakah penuh atau sebagian *If there is a write-down, is it full or partial?*	-
33	Jika terjadi *write down*; permanen atau temporer *If there is a write down; permanent or temporary*	-
34	Jika terjadi *write down* temporer, jelaskan mekanisme *write-up* *If a temporary write down occurs, explain the write-up mechanism*	-

No	Saham *Share*	Informasi Kuantitatif/Kualitatif *Information Quantitative/Qualitative*
34a.	Tipe subordinasi *Subordination type*	-
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi *Instrument hierarchy at the time of liquidation*	Terakhir
36	Apakah terdapat fitur yang *non-compliant* *Are there non-compliant features*	Tidak
37	Jika Ya, jelaskan fitur yang *non-compliant* *If Yes, please describe non-compliant features*	-
	Analisis Kualitatif	

RISIKO KREDIT *CREDIT RISK*

Tabel 1 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual
Table 1st: Disclosure of Net Receivables by Region - Banks Individually

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021				31 Desember 2020				*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(3)	(4)	(5)	(8)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	10.096.600	-	-	10.096.600	7.418.403	-	-	7.418.403	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	311.273	-	53.575	364.848	370.075	156	67.920	438.151	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Multilateral Development Banks and International Agencies*
4	Tagihan Kepada Bank	547.377	-	-	547.377	393.669	98	4	393.771	*Bills to Bank*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	219.091	79.516	-	298.607	180.966	82.032	-	262.998	*Residential Backed Loans*
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.950	-	-	1.950	-	1.029	-	1.029	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	10.626.610	3.552.546	8.392	14.187.548	10.933.472	3.521.390	3.192	14.458.054	*Employee/Retired Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.966.472	290.894	-	2.257.366	1.843.085	269.130	-	2.112.215	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
9	Tagihan Kepada Korporasi	246.117	80.865	1.263.641	1.590.623	213.965	75.480	1.241.015	1.530.461	*Bills to Corporations*
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	156.327	8.301	1.148	165.776	173.366	16.229	1.672	191.267	*Claims That Have Been Due Date*
11	Aset Lainnya	1.542.431	370.015	7.378	1.919.824	1.548.609	31.093	268.412	1.848.114	*Other Assets*
	Total	**25.714.248**	**4.382.137**	**1.334.134**	**31.430.519**	**23.075.611**	**3.996.637**	**1.582.215**	**28.654.462**	***Total***

Tabel 2 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individual

Table 2nd: Disclosure of Net Receivables by Remaining Contract Term - Bank Individually

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

NO	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 | *December 31, 2021*						31 Desember 2020 | *December 31, 2020*						*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak *Net Billing Based on Contract Term*						Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak *Net Billing Based on Contract Term*						
		< 1 tahun *< 1 Year*	> 1 tahun s.d 3 tahun *> 1 Year to 3 Year*	> 3 tahun s.d 5 tahun *> 3 Year to 5 Year*	> 5 tahun *> 5 Year*	Non-Kontraktual *Non-Contractual*	Total	< 1 tahun *< 1 Year*	> 1 tahun s.d 3 tahun *> 1 Year to 3 Year*	> 3 tahun s.d 5 tahun *> 3 Year to 5 Year*	> 5 tahun *> 5 Year*	Non-Kontraktual *Non-Contractual*	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	*(2)*
1	Tagihan Kepada Pemerintah	7.593.528	1.239.223	1.109.183	154.665	-	10.096.600	7.418.403					7.418.403	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	60.191	-	250.972	53.685	-	364.848	37.757	95.166	67.920	237.308	-	438.151	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Multilateral Development Banks and International Agencies*
4	Tagihan Kepada Bank	547.377	-	-	-		547.377	344.188	49.583	-	-	-	393.771	*Bills to Bank*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	74.721	91.029	26.888	105.968	-	298.607	1.493	17.206	37.332	206.967	-	262.998	*Residential Backed Loans*
6	Kredit Beragun Properti Komersial	1.950	-	-	-	-	1.950	-	-	-	1.029	-	1.029	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	577.194	6.371.137	2.292.663	4.946.554	-	14.187.548	91.497	859.281	1.829.860	11.677.416	-	14.458.054	*Employee/ Retired Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.148.222	892.169	179.805	37.170	-	2.257.366	175.691	869.441	882.977	184.107	-	2.112.215	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
9	Tagihan Kepada Korporasi	127.062	338.157	1.019.924	105.481	-	1.590.623	125.704	17.801	23.464	1.363.492	-	1.530.461	*Bills to Corporations*
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.636	9.103	15.249	138.789	-	165.776	129.873	30.288	16.139	14.967	-	191.267	*Claims That Have Been Due Date*
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	1.919.824	1.919.824	-	-	-	-	1.848.114	1.848.114	*Other Assets*
	Total	**10.132.881**	**8.940.817**	**4.894.684**	**5.542.313**	**1.919.824**	**31.430.519**	**8.324.606**	**1.938.765**	**2.857.691**	**13.685.286**	**1.848.114**	**28.654.462**	***Total***

Tabel 3 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual
Table 3rd: Disclosure of Net Receivables by Economic Sector - Banks Individually

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah *Claims to Government*	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claims on Public Sector Entities*	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Bills to Multilateral Development Banks and International Agencies*	Tagihan Kepada Bank *Bills to Bank*	Kredit Beragun Rumah Tinggal *Residential Backed Loans*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
31 Desember 2021 | *December 31, 2021*							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	250.972	-	-	40	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	
3	Industri pengolahan	-	-	-	-	275	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	53.575	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	1.526	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	479	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	-	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	195	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	867	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-		
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-		-	
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-		295.225	
23	Lainnya	10.096.600	60.301	-	547.377		
	Total	**10.096.600**	**364.848**	**-**	**547.377**	**298.607**	

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

Kredit Beragun Properti Komersial *Commercial Property Backed Loans*	Kredit Pegawai/ Pensiunan *Employee/ Retired Loans*	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel *Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolios*	Tagihan Kepada Korporasi *Bills on Corporations*	Tagihan Yang telah Jatuh Tempo *Bills that are Matured*	Aset Lainnya *Other Assets*	*Economic Sector*
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
-	1.213	1.562.325	2.503	61.092	-	*Agriculture, Forestry and Fisheries*
-	-	197	-	155	-	*Mining and excavation*
-	-	24.280	123	1.159	-	*Processing industry*
-	-	794	-	-	-	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
-	-	1.138	-	6.211	-	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling*
-	-	9.669	1.104.794	14.671	-	*Construction*
1.950	593	482.700	24.571	40.781	-	*Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*
-	-	7.999	334	1.097	-	*Transportation and Warehousing*
-	-	51.876	316.763	2.036	-	*Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink*
-	-	2.868	33	75	-	*Information and Communication*
-	-	782	38.516	7	-	*Financial and Insurance Activities*
-	-	4.176	-	120	-	*Real Estate*
-	-	606	-	526	-	*Professional, Scientific and Technical Activities*
-	-	9.100	1.720	722	-	*Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agencies, and Other Business Support*
-	-	-	-	-	-	*Government Administration, Defense and Mandatory Social Security*
-	-	2.701	-	-	-	*Education*
-	-	3.898	6.630	-	-	*Human Health Activities and Social Activities*
-	258	4.948	130	3	-	*Arts, Entertainment and Recreation*
-	-	76.183	2.596	3.972	-	*Other Service Activities*
-	97	7.710	-	58	-	*Household Activities as Employer*
-		-	-	-	-	*Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies*
-	14.185.387	3.414	91.909	32.992	-	*Not a Business Field*
-	-	-	-	99	1.919.824	*Other*
1.950	**14.187.548**	**2.257.366**	**1.590.623**	**165.776**	**1.919.824**	**Total**

No	Sektor Ekonomi	Tagihan Kepada Pemerintah *Claims to Government*	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik *Claims on Public Sector Entities*	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Bills to Multilateral Development Banks and International Agencies*	Tagihan Kepada Bank *Bills to Bank*	Kredit Beragun Rumah Tinggal *Residential Backed Loans*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
31 Desember 2020 | *December 31, 2020*							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	257.626	-	-	67	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	
3	Industri pengolahan	-	-	-	-	302	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	67.920	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	156	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	1.880	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	343	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	112.449	-	393.771	-	
12	Real Estat	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	223	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	744	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	
22	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	259.438	
23	Lainnya	7.418.403	-	-	-	-	
	Total	**7.418.403**	**438.151**	**-**	**393.771**	**262.998**	

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

Kredit Beragun Properti Komersial *Commercial Property Backed Loans*	**Kredit Pegawai/ Pensiunan** *Employee/ Retired Loans*	**Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel** *Claims on Micro, Small Business and Retail Portfolios*	**Tagihan Kepada Korporasi** *Bills on Corporations*	**Tagihan Yang telah Jatuh Tempo** *Bills that are Matured*	**Aset Lainnya** *Other Assets*	*Economic Sector*
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	
-	109	1.411.332	6.546	58.257	-	*Agriculture, Forestry and Fisheries*
-	-	55	1.607	268	-	*Mining and excavation*
-	-	26.109	1.099	3.407	-	*Processing industry*
-	-	952	-	-	-	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
-	-	276	-	3	-	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling*
-	-	7.650	1.076.516	16.657	-	*Construction*
1.029	-	488.381	19.705	50.297	-	*Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*
-	-	13.094	1.819	1.124	-	*Transportation and Warehousing*
-	-	44.740	312.286	1.734	-	*Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink*
-	-	1.334	50	-	-	*Information and Communication*
-	-	1.408	3.425	9	-	*Financial and Insurance Activities*
-	-	4.422	-	120	-	*Real Estate*
-	-	3.887	614	360	-	*Professional, Scientific and Technical Activities*
-	-	7.778	2.863	64	-	*Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agencies, and Other Business Support*
-	-	-	-	-	-	*Government Administration, Defense and Mandatory Social Security*
-	-	2.963	-	22	-	*Education*
-	137	11.567	850	458	-	*Human Health Activities and Social Activities*
-	-	79.611	3.951	3.805	-	*Arts, Entertainment and Recreation*
-	-	158	-	358	-	*Other Service Activities*
-	103	4.402	-	20	-	*Household Activities as Employer*
-	-	-	-	-	-	*Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies*
-	14.457.705	2.095	99.129	54.305	-	*Not a Business Field*
-	-	-	-	-	1.848.114	*Other*
1.029	**14.458.054**	**2.112.215**	**1.530.461**	**191.267**	**1.848.114**	***Total***

Tabel 4 : Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individual
Table 4th: Disclosure of Claims and Provisions by Region - Bank Individually

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Keterangan	31 Desember 2021 *December 31, 2021*				Description
		Wilayah *Zone*				
		Wilayah 1 *Zone 1*	Wilayah 2 *Zone 2*	Wilayah 3 *Zone 3*	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(2)
1	Tagihan	26.106.394	4.497.603	1.468.274	32.072.271	*Bill*
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (stage 2 dan stage 3)			-		*Claims that have increased and worsened credit risk (stage 2 and stage 3)*
	a. Belum jatuh tempo	255.378	82.510	-	337.888	*a. Not yet due*
	b. Telah jatuh tempo	462.778	67.138	2.073	531.989	*b. It's due*
3	CKPN - Stage 1	40.063	11.817	20.168	72.047	*CKPN - Stage 1*
4	CKPN - Stage 2	45.161	14.474	-	59.635	*CKPN - Stage 2*
5	CKPN - Stage 3	306.185	58.722	925	365.832	*CKPN - Stage 3*
6	Tagihan yang dihapus buku	-	-	-	-	*Deleted book Claims*

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Keterangan	31 Desember 2020 *December 31, 2020*				Description
		Wilayah *Zone*				
		Wilayah 1 *Zone 1*	Wilayah 2 *Zone 2*	Wilayah 3 *Zone 3*	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(2)
1	Tagihan	23.508.089	4.069.921	1.729.521	29.307.532	*Bill*
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (stage 2 dan stage 3)					*Claims that have increased and worsened credit risk (stage 2 and stage 3)*
	a. Belum jatuh tempo	339.384	94.257	-	433.641	*a. Not yet due*
	b. Telah jatuh tempo	472.610	62.461	2.073	537.144	*b. It's due*
3	CKPN - Stage 1	42.521	12.142	25.577	80.239	*CKPN - Stage 1*
4	CKPN - Stage 2	75.178	17.629		92.808	*CKPN - Stage 2*
5	CKPN - Stage 3	246.115	45.605	401	292.121	*CKPN - Stage 3*
6	Tagihan yang dihapus buku	-	-	-	-	*Deleted book Claims*

Tabel 5 : Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individual

Table 5th: Disclosure of Claims and Provisions by Economic Sector - Banks Individually

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Tagihan *Bill*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai *Impaired Bills*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 1*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 2*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 3*	Tagihan yang dihapus buku *Deleted book Claims*	*Economic sector*
			Belum jatuh Tempo *Not yet due*	Telah jatuh Tempo *Due Date*					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
31 Desember 2021 | *December 31, 2021*									
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.033.910	41.507	158.585	11.070	8.709	97.493	-	*Agriculture, Forestry and Fisheries*
2	Pertambangan dan Penggalian	1.187	-	990	1	-	834	-	*Mining and excavation*
3	Industri pengolahan	31.579	790	6.888	312	55	5.729	-	*Processing industry*
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	54.369	-	-	889	-	-	-	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	7.345	-	6.207	6	-	7.188	-	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling*
6	Konstruksi	1.255.808	-	30.202	19.710	-	15.526	-	*Construction*
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	633.051	19.443	114.323	9.741	2.771	73.495	-	*Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*
8	Pengangkutan dan Pergudangan	10.750	166	2.193	80	1	1.096	-	*Transportation and Warehousing*
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	382.845	3.036	7.588	5.439	704	5.552	-	*Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink*
10	Informasi dan Komunikasi	3.318	-	358	28	-	282	-	*Information and Communication*
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	53.433	-	15	909	-	9	-	*Financial and Insurance Activities*
12	Real Estat	5.194	169	1.014	36	-	895	-	*Real Estate*
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	2.048	-	1.488	5	-	1.269	-	*Professional, Scientific and Technical Activities*
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	15.413	723	4.495	259	31	3.467	-	*Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agencies, and Other Business Support*
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	*Government Administration, Defense and Mandatory Social Security*
16	Pendidikan	2.708	385	-	21	-	-	-	*Education*

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Sektor Ekonomi	Tagihan *Bill*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai *Impaired Bills*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 1*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 2*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 3*	Tagihan yang dihapus buku *Deleted book Claims*	*Economic sector*
			Belum jatuh Tempo *Not yet due*	Telah jatuh Tempo *Due Date*					
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	10.524	1.236	164	103	-	19	-	*Human Health Activities and Social Activities*
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	423	-	364	-	-	364	-	*Arts, Entertainment and Recreation*
19	Aktivitas Jasa Lainnya	96.851	4.377	10.997	1.005	283	7.029	-	*Other Service Activities*
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	7.993	52	170	93	16	112	-	*Household Activities as Employer*
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-		*Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies*
22	Bukan Lapangan Usaha	14.808.649	266.004	185.948	22.340	47.065	145.473		*Not a Business Field*
23	Lainnya	12.654.873	-	-	-	-	-		*Other*
	Total	**32.072.271**	**337.888**	**531.989**	**72.047**	**59.635**	**365.832**	-	

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Sektor Ekonomi	Tagihan *Bill*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai *Impaired Bills*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 1*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 2*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 3*	Tagihan yang dihapus buku *Deleted book Claims*	*Economic sector*
			Belum jatuh Tempo *Not yet due*	Telah jatuh Tempo *Due Date*					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	
31 Desember 2020 | *December 31, 2020*									
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.915.198	77.301	174.242	13.689	22.123	115.914	-	*Agriculture, Forestry and Fisheries*
2	Pertambangan dan Penggalian	2.879	-	1.218	23	-	950	-	*Mining and excavation*
3	Industri pengolahan	40.701	1.859	12.802	474	372	9.393	-	*Processing industry*
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	68.872	-	-	1.523	-	-	-	*Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air*
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	454	-	22	7	-	19	-	*Water Management, Wastewater Management, Waste Management and Recycling*
6	Konstruksi	1.269.959	651	32.563	22.670	573	15.688	-	*Construction*

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Sektor Ekonomi	Tagihan *Bill*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai *Impaired Bills*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 1*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 2*	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3 *Allowance for impairment losses (CKPN) - Stage 3*	Tagihan yang dihapus buku *Deleted book Claims*	*Economic sector*
			Belum jatuh Tempo *Not yet due*	Telah jatuh Tempo *Due Date*					
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	659.626	37.150	124.573	9.927	8.281	74.265	-	*Wholesale and retail trade; Car and Motorcycle Repair and Maintenance*
8	Pengangkutan dan Pergudangan	18.424	2.307	2.860	879	549	1.566	-	*Transportation and Warehousing*
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	370.501	3.223	7.390	7.438	1.256	5.656	-	*Provision of Accommodation and Provision of Food and Drink*
10	Informasi dan Komunikasi	1.387	19	-	14	3	-	-	*Information and Communication*
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.746.815	-	16	5.557	7	-	-	*Financial and Insurance Activities*
12	Real Estat	5.574	173	1.139	41	13	1.019	-	*Real Estate*
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	7.215	125	2.237	135	-	1.878	-	*Professional, Scientific and Technical Activities*
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	11.037	2.070	194	171	193	131	-	*Leasing and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agencies, and Other Business Support*
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	*Government Administration, Defense and Mandatory Social Security*
16	Pendidikan	3.012	-	49	33	-	27	-	*Education*
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	13.050	824	485	284	3	25	-	*Human Health Activities and Social Activities*
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	96.869	4.895	10.908	1.801	1.212	7.101	-	*Arts, Entertainment and Recreation*
19	Aktivitas Jasa Lainnya	516	-	358	1	-	-	-	*Other Service Activities*
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	4.792	692	259	123	27	239	-	*Household Activities as Employer*
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-		*Activities of International Agencies and Other Extra International Agencies*
22	Bukan Lapangan Usaha	15.039.762	302.352	165.828	29.737	58.729	111.125		*Not a Business Field*
23	Lainnya	7.030.888	-	-	-	-	100		*Other*
	Total	**29.307.531**	**433.641**	**537.144**	**94.527**	**93.341**	**345.094**	-	

Tabel 6 : Pengungkapan RincianMutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank Secara Individual
Table 6th: Disclosure of Details of Movements of Allowance for Impairment Losses - Banks Individually

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Keterangan	31 Desember 2021 *December 31, 2021*			31 Desember 2020 *December 31, 2020*			*Description*
		Stage 1	*Stage 2*	*Stage 3*	*Stage 1*	*Stage 2*	*Stage 3*	
(1)	(2)	(3)	(4)		(3)	(4)		*(2)*
1	Saldo awal CKPN	94.527	93.341	345.094	50.589	115.766	356.506	*Initial balance of CKPN*
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	-	-	-	-	-	-	*Establishment (recovery) of CKPN in the current period (Net)*
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	-	-	20.738	43.938	-	-	*2.a. Establishment of CKPN in the current period*
	2. b. Pemulihan CKPN pada periode pembentukan	22.480	33.706	-	-	(22.425)	(11.412)	*2. b. Recovery of CKPN in the formation period*
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	-	-	-	-	-	-	*CKPN used to write off bills for the current period*
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-	-	-	-	-	*Other formation (recovery) in the current period*
Saldo akhir CKPN		**72.047**	**59.634**	**365.832**	**94.527**	**93.341**	**345.094**	***CKPN ending balance***



Tabel 7 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individual

Table 7th : Disclosure of Net Receivables by Portfolio Category and Rating Scale - Banks Individually

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 | *December 31, 2021*														
			Tagihan Bersih | *Net Bill*												
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang *Long Term Rating*							Peringkat Jangka Pendek *Short Term Rating*				Tanpa Peringkat *No Rank*	Total	*Portfolio Category*
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+s.d BBB-	BB+s.d BB-	B+s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
		Fitch Rating	AAA	AA+s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+s.d BBB-	BB+s.d BB-	B+s.d B-	Kurang dari B-	F1+s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+ (idn) s.d A- (idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+s.d idAA-	idA+s.d id A-	id BBB+s.d id BBB-	id BB+s.d id BB-	id B+s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	10.096.600	10.096.600	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	60.301	-	-	-	-	-	-	-	-	304.547	364.848	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasinal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Development Banks and International Agencies*
4	Tagihan Kepada Bank	-	506.862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.515	547.377	*Bills to Bank*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298.607	298.607	*Residential Backed Loans*
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950	1.950	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.187.548	14.187.548	*Employee/Retired Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.257.366	2.257.366	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.590.623	1.590.623	*Bills to Corporations*
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.776	165.776	*Claims That Have Been Due Date*
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.919.824	1.919.824	*Other Assets*
	Total	-	506.862,20	-	60.301,29	-	-	-	-	-	-	-	-	30.863.355,49	31.430.519	***Total***

Tabel 7 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank Secara Individual

Table 7th : Disclosure of Net Receivables by Portfolio Category and Rating Scale - Banks Individually

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2020 | *December 31, 2020*														
		Tagihan Bersih | *Net Bill*														
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang *Long Term Rating*							Peringkat Jangka Pendek *Short Term Rating*				Tanpa Peringkat *No Rank*	Total	*Portfolio Category*
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+s.d BBB-	BB+s.d BB-	B+s.d B-	Kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3			
		Fitch Rating	AAA	AA+s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+s.d BBB-	BB+s.d BB-	B+s.d B-	Kurang dari B-	F1+s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3			
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	Kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	Kurang dari P-3			
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+ (idn) s.d A- (idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)			
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+s.d idAA-	idA+s.d id A-	id BBB+s.d id BBB-	id BB+s.d id BB-	id B+s.d id B-	Kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	7.418.403	7.418.403	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		5.079	-	107.369	-	-	-	-	-	-	-	-	325.702	438.151	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasinal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Development Banks and International Agencies*
4	Tagihan Kepada Bank		242.743	-	70.045		-	-	-	-	-	-	-	80.983	393.771	*Bills to Bank*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal													262.998	262.998	*Residential Backed Loans*
6	Kredit Beragun Properti Komersial													1.029	1.029	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/Pensiunan													14.458.054	14.458.054	*Employee/Retired Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel													2.112.215	2.112.215	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.530.461	1.530.461	*Bills to Corporations*
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo													191.267	191.267	*Claims That Have Been Due Date*
11	Aset Lainnya													1.848.113	1.848.113	*Other Assets*
	Total		**247.822,41**	**-**	**177.414,18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28.229.225,59**	**28.654.462**	***Total***

Tabel 8 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

Table 8th : Disclosure of Net Receivables Based on Risk Weight After Taking into account the Impact of Credit Risk Mitigation - Banks Individually

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021												Beban Modal	*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
A	**LAPORAN EKSPOSUR POSISI KEUANGAN**														***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION EXPOSURE***
1	Tagihan Kepada Pemerintah	10.096.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	53.575		-	-	-	-	262.138	-	-	-	-	131.069	10.486	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	547.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.475	8.758	*Bills to Bank*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	298.607	-	-	-	-	-	-	-	104.512	8.361	*Residential Backed Loans*
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950	-	-	1.950	156	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	14.187.548	-	-	-	-	7.093.774	567.502	*Employee/Retired Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	2.251.252	-	-	-	1.688.439	135.075	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
9	Tagihan Kepada Korporasi	-			-	-	-	16.636	-	1.382.416	-	-	1.390.734	111.259	*Bills to Corporations*
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-			29.621	136.155		233.854	18.708	*Claims That Have Been Due Date*
11	Aset lainnya	719.394	-	-	-	-	-	-	-	1.198.874	1.556	-	1.201.208	96.097	*Other assets*
	Total Eksposur Neraca	**10.869.568**	**547.377**	**-**	**298.607**	**-**	**-**	**14.466.323**	**2.251.252**	**2.612.861**	**137.711**	**-**	**11.955.015**	**956.401**	***Total Balance Sheet Exposure***
B	**EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN / KONTIJENSI PD TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF**														***EXPOSURE OF COMMITTED/ CONTINGENT LIABILITY ON ADMINISTRATIVE ACCOUNT TRANSACTIONS***

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021												Beban Modal	*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	49.135	-	-	-	-	24.568	1.965	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Bank*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Residential Backed Loans*
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Employee/Retired Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	6.115	-	-	-	4.586	367	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	1.000	-	190.571	-	-	191.071	15.286	*Bills to Corporations*
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims That Have Been Due Date*
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**50.136**	**6.115**	**190.571**	**-**	**-**	**220.225**	**17.618**	*Total Exposure of Administrative Account Transactions*
C	**EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)**														***EXPOSURE DUE TO COUNTERPARTY CREDIT RISK***
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021													Portfolio Category
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												Beban Modal	
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Bank*
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Corporations*
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***Total Counterparty Credit Risk Exposure***

Tabel 8 : Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual

Table 8th : Disclosure of Net Receivables Based on Risk Weight After Taking into account the Impact of Credit Risk Mitigation - Banks Individually

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020													Portfolio Category
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit												Beban Modal	
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
A	**LAPORAN EKSPOSUR POSISI KEUANGAN**														***STATEMENT OF FINANCIAL POSITION EXPOSURE***
1	Tagihan Kepada Pemerintah	7.418.403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	67.920	5.079	-	-	-	-	322.455	-	-	-	-	162.243	12.979	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	323.726	-	-	-	-	70.045	-	-	-	-	99.768	7.981	*Bills to Bank*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	262.998	-	-	-	-	-	-	-	92.049	7.364	*Residential Backed Loans*
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	1.029	-	-	1.029	82	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	14.458.054	-	-	-	-	7.229.027	578.322	*Employee/Retired Loans*

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020												Beban Modal	*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	2.097.078	-	-	-	1.572.809	125.825	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
9	Tagihan Kepada Korporasi	-			-	-	-	-	-	1.333.548	-	-	1.333.548	106.684	*Bills to Corporations*
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	35.480	155.787	-	269.160	21.533	*Claims That Have Been Due Date*
11	Aset lainnya		-	-	-	-	-	-	-	932.325	1.556	-	934.659	74.773	*Other assets*
	Total Eksposur Neraca	**7.486.323**	**328.806**	**-**	**262.998**	**-**	**-**	**14.850.554**	**2.097.078**	**2.302.381**	**157.343**	**-**	**11.694.291**	**935.543**	***Total Balance Sheet Exposure***
B	**EKSPOSUR KEWAJIBAN KOMITMEN / KONTIJENSI PD TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF**														***EXPOSURE OF COMMITTED/ CONTINGENT LIABILITY ON ADMINISTRATIVE ACCOUNT TRANSACTIONS***
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	42.697	-	-	-	-	21.349	1.708	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Bank*
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Residential Backed Loans*
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/ Pensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Employee/Retired Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	15.137	-	-	-	11.353	908	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	196.913	-	-	196.913	15.753	*Bills to Corporations*
10	Tagihan yang Telah jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims That Have Been Due Date*

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million rupiah)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2020												Beban Modal	*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit													
		0%	20%	25%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(2)
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-	**42.697**	**15.137**	**196.913**	-	-	**229.614**	**18.369**	*Total Exposure of Administrative Account Transactions*
C	**EKSPOSUR AKIBAT KEGAGALAN PIHAK LAWAN (COUNTERPARTY CREDIT RISK)**														***EXPOSURE DUE TO COUNTERPARTY CREDIT RISK***
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims to Government*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Bank*
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Corporations*
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***Total Counterparty Credit Risk Exposure***

Tabel 9 : Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank Secara Individual
Table 9 : Disclosure of Net Receivables and Credit Risk Mitigation Techniques - Banks Individually

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 *December 31, 2021*					
		Tagihan Bersih *Net Bill*	Bagian yang Dijamin Dengan *Guaranteed Parts With*				
				Garansi *warranty*	Asuransi kredit *Credit insurance*	Lainnya *Other*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
A	Eksposur Laporan Posisi Keuangan						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	10.096.600	-	-	-		
2	Tagihan Kepada Entitas Publik	315.713	-	53.575	-		
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan dan lembaga Internasional	-	-	-	-		
4	Tagihan Kepada Bank	547.377	-	-	-		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	298.607	-	-	-		
6	Kredi Beragun Properti Komersial	1.950	-	-	-		
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	14.187.548	-	-	-		
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan Portofolio Ritel	2.251.252	-	-	-		
9	Tagihan Kepada Korporasi	1.399.053	-	-	-		
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	165.776	-	-	-		
11	Aset Lainnya	1.919.824	-	-	-		
	Total Eksposur Laporan Posisi Keuangan	**31.183.698**	**-**	**53.575**	**-**	**-**	
B	Eksposur Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-		
2	Tagihan Kepada Entitas Publik	49.135	-	-	-		
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan dan lembaga Internasional	-	-	-	-		
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-		
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		
6	Kredi Beragun Properti Komersial	-	-	-	-		
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-		
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan Portofolio Ritel	6.115	-	-	-		
9	Tagihan Kepada Korporasi	191.571	-	-	-		
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-		
	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif	**246.821**	**-**	**-**	**-**	**-**	
C	Eksposur Risiko Kredit Akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-		
2	Tagihan Kepada Entitas Publik	-	-	-	-		
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan dan lembaga Internasional	-	-	-	-		
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-		
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan Portofolio Ritel	-	-	-	-		
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-		
	Total Eksposur Risiko Kredit Akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)	-	-	-	-	-	
	Total (A)+(B)+(C)	**31.430.519**	**-**	**53.575**	**-**	**-**	

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

Bagian yang Tidak Dijamin *Unsecured Parts*	31 Desember 2020 *December 31, 202*						*Portfolio Category*
	Tagihan Bersih *Net Bill*	Bagian yang Dijamin Dengan *Guaranteed Parts With*				Bagian yang Tidak Dijamin *Unsecured Parts*	
		Agunan *Collateral*	Garansi *warranty*	Asuransi kredit *Credit insurance*	Lainnya *Other*		
(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]*	*(2)*
							Statement of Financial Position Exposure
10.096.600	7.418.403	-	-	-		7.418.403	*Claims to Government*
262.138	395.454	-	67.920	-		327.534	*Bills to Public Entities*
-	-	-	-	-		-	*Bills to Development Banks and International institutions*
547.377	393.771	-	-	-		393.771	*Bills to Bank*
298.607	262.998	-	-	-		262.998	*Residential Backed Loans*
1.950	1.029	-	-	-		1.029	*Commercial Property Backed Credit*
14.187.548	14.458.054	-	-	-		14.458.054	*Employee/Retired Loans*
2.251.252	2.097.078	-	-	-		2.097.078	*Bills to Micro, Small Business, and Retail Portfolios*
1.399.053	1.333.548	-	-	-		1.333.548	*Bills to Corporations*
165.776	191.267	-	-	-		191.267	*Claims That Have Been Due Date*
1.919.824	1.848.113	-	-	-		1.848.113	*Other Assets*
31.130.124	**28.399.715**	**-**	**67.920**	**-**	**-**	**28.331.795**	**Total Exposure Statement of Financial Position**
							Administrative Account Transaction Exposure
-	-	-	-	-		-	*Claims to Government*
49.135	42.697	-	-	-		42.697	*Bills to Public Entities*
-	-	-	-	-		-	*Bills to Development Banks and International institutions*
-	-	-	-	-		-	*Bills to Bank*
-	-	-	-	-		-	*Residential Backed Loans*
-	-	-	-	-		-	*Commercial Property Backed Credit*
-	-	-	-	-		-	*Employee/Retired Loans*
6.115	15.137	-	-	-		15.137	*Bills to Micro, Small Business, and Retail Portfolios*
191.571	196.913	-	-	-		196.913	*Bills to Corporations*
-	-	-	-	-		-	*Claims That Have Been Due Date*
246.821	**254.747**	**-**	**-**	**-**	**-**	**254.747**	**Total Exposure of Administrative Account Transactions**
							Credit Risk Exposure Due to Counterparty Credit Risk
-	-	-	-	-		-	*Claims to Government*
-	-	-	-	-		-	*Bills to Public Entities*
-	-	-	-	-		-	*Bills to Development Banks and International institutions*
-	-	-	-	-		-	*Bills to Bank*
-	-	-	-	-		-	*Bills to Micro, Small Business, and Retail Portfolios*
-	-	-	-	-		-	*Bills to Corporations*
-	-	-	-	-	-	-	*Total Credit Risk Exposure Due to Counterparty Credit Risk*
28.654.462	**-**	**67.920**	**-**	**-**	**28.586.542**		***Total (A)+(B)+(C)***

Tabel 10 : Pengungkapan Perhitungan ATMR Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar - Bank Secara Individual
Table 10 : Disclosure of RWA Calculation for Credit Risk Using the Standard Approach - Individual Banks

1. Eksposur Aset di laporan Posisi Keuangan, Kecuali Eksposur Sekuritisasi
1. Exposure of Assets in the Statement of Financial Position, Except for Securitization Exposure

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 *December 31, 2021*			31 Desember 2020 *December 31, 2020*			*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih *Net Bill*	ATMR Sebelum MRK *RWA Before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	Tagihan Bersih *Net Bill*	ATMR Sebelum MRK *RWA Before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	10.096.600	-	-	7.418.403	-	-	*Claims to Government*
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	10.096.600	-	-	7.418.403	-	-	*Bills to the Government of Indonesia*
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-	*Bills to Governments of Other Countries*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	315.713	157.856	131.069	395.454	196.203	162.243	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	*Bills to Multilateral Development Banks and International Agencies*
4	Tagihan Kepada Bank	547.377	109.475	109.475	393.771	99.768	99.768	*Bills to Bank*
	a. Tagihan jangka Pendek	547.377	109.475	109.475	393.771	99.768	99.768	*a. Short term bill*
	b. Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	*c. Long Term Bills*
5	Kredit beragun Rumah Tinggal	298.607	104.512	104.512	262.998	92.049	92.049	*Residential Backed Loans*
6	Kredit beragun Properti Komersial	1.950	1.950	1.950	1.029	1.029	1.029	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	14.187.548	7.093.774	7.093.774	14.458.054	7.229.027	7.229.027	*Employee/Retired Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.251.252	1.688.439	1.688.439	2.097.078	1.572.809	1.572.809	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
9	Tagihan kepada Korporasi	1.399.053	1.390.734	1.390.734	1.333.548	1.333.548	1.333.548	*Bills to Corporations*
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	165.776	233.854	233.854	191.267	268.879	269.160	*Claims That Have Been Due Date*
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	29.621	29.621	29.621	35.480	35.480	35.480	*a. Residential Backed Loans*
	b. Selain kredit beragun rumah tinggal	136.155	204.233	204.233	155.787	233.399	233.680	*c. In addition to mortgage-backed housing*
11	Aset lainnya	1.919.823	-	1.201.208	1.848.113	-	934.659	*Other assets*
	a. Uang Tunai, Emas dan Commemorative Coin	719.394		-	914.232		-	*Cash, Gold and Commemorative Coin*
	b. Penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurang modal)	1.556	-	2.334	1.556	-	2.334	*Investments (other than those that are a factor in reducing capital)*
	1. Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	-		-	-		-	*Temporary equity participation for credit restructuring*
	2. Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	1.556		2.334	1.556		2.334	*Investments in financial companies that are not listed on the stock exchange*
	3. Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	-		-	-		-	*Investments in financial companies listed on the stock exchange*
	c. Aset tetap dan inventaris Neto	396.932		396.932	425.165		425.165	*Net fixed assets and inventory*
	d. Aset Yang Diambil Alih (AYDA)	-		-	-		-	*Foreclosed Assets (AYDA)*
	e. Antar Kantor Neto	231.816		231.816	858		858	*Net Interoffice*
	f. Lainnya	570.126		570.126	506.302		506.302	*Other*
	TOTAL	31.183.698	10.780.595	11.955.015	28.399.715	10.793.311	11.694.291	*TOTAL*

2. Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi Pada Transaksi Rekening Administratif, Kecuali Eksposur Sekuritisasi
2. Exposure of Committed/Contingent Liability in Administrative Account Transactions, Except Securitization Exposure

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 *December 31, 2021*			31 Desember 2020 *December 31, 2020*			*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih *Net Bill*	ATMR Sebelum MRK *RWA Before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	Tagihan Bersih *Net Bill*	ATMR Sebelum MRK *RWA Before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	*Claims to Government*
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-	-	-	-	-	*a. Bills to the Government of Indonesia*
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-	-	-	-	-	*b. Bills to Governments of Other Countries*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	49.135	24.568	24.568	42.697	21.349	21.349	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	*Bills to Bank*
	a. Tagihan jangka Pendek	-	-	-	-	-	-	*a. Short term bill*
	b. Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	*b. Long Term Bills*
5	Kredit beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	*Residential Backed Loans*
6	Kredit beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	*Commercial Property Backed Loans*
7	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-	*Employee/Retired Loans*
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.115	4.586	4.586	15.137	11.353	11.353	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
9	Tagihan kepada Korporasi	191.571	191.071	191.071	196.913	196.913	196.913	*Bills to Corporations*
10	Tagihan yang telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	*Claims That Have Been Due Date*
	a. Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	*a. Residential Backed Loans*
	b. Selain kredit beragun rumah tinggal	-	-	-	-	-	-	*b. In addition to mortgage-backed housing*
	TOTAL	**246.821**	**220.225**	**220.225**	**254.747**	**229.614**	**229.614**	***TOTAL***

3. Eksposur Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)
3. Exposures That Create Credit Risk Due to Counterparty Credit Risk

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 *December 31, 2021*			31 Desember 2020 *December 31, 2020*			*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih *Net Bill*	ATMR Sebelum MRK *RWA Before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	Tagihan Bersih *Net Bill*	ATMR Sebelum MRK *RWA Before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	*Claims to Government*
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia							*a. Bills to the Government of Indonesia*
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain							*b. Bills to Governments of Other Countries*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	*Bills to Bank*
	a. Tagihan jangka Pendek							*a. Short term bill*
	b. Tagihan Jangka Panjang							*b. Long Term Bills*
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	*Bills to Corporations*
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	

4. Eksposur Yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Setelment (*Settlement Risk*)
4. Exposures That Create Credit Risk Due to Settlement Risk

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2021 *December 31, 2021*			31 Desember 2020 *December 31, 2020*			*Transaction Type*
		Nilai Eksposur *Exposure Value*	Faktor Pengurang Modal *Exposure Value*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	Tagihan Bersih *Net Bill*	ATMR Sebelum MRK *RWA Before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)	(2)
1	Delivery versus payment	-	-	-	-	-	-	*Delivery versus payment*
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)							*a. Capital Expense 8% (5-15 days)*
	b. Baban Modal 50% (16-30 hari)							*b. Capital Baban 50% (16-30 days)*
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)							*c. Capital Expense 75% (31-45 days)*
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)							*d. Capital Expense 100% (more than 45 days)*
2	Non delivery versus payment	-	-	-	-	-	-	*Non delivery versus payment*
TOTAL		-	-	-	-	-	-	

5. Ekposur Sekuritisasi
5. Securitization Exposure

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

No	Jenis Transaksi	31 Desember 2021 *December 31, 2021*		31 Desember 2020 *December 31, 2020*		*Transaction Type*
		Faktor Pengurang Modal	*ATMR*	*Faktor Pengurang Modal*	*ATMR*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(2)
1	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode External *Rating Base Approach* (ERBA)	-	-	-	-	*RWA for Securitization Exposure calculated using External Rating Base Approach (ERBA) Method*
2	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode *Standardized Approach* (SA)	-	-	-	-	*RWA for Securitization Exposure calculated using the Standardized Approach (SA) Method*
3	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-	-	-	-	*Securitization Exposure which is the Main Core Capital Reduction Factor*
TOTAL		-	-	-	-	

6. Eksposur Derivatif
6. Derivative Exposure

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

No	Kategori Portofolio	31 Desember 2021 *December 31, 2021*			31 Desember 2020 *December 31, 2020*			*Portfolio Category*
		Tagihan Bersih *Net Bill*	ATMR Sebelum MRK *RWA Before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	Tagihan Bersih *Net Bill*	ATMR Sebelum MRK *RWA Before MRK*	ATMR Setelah MRK *RWA After MRK*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	*Claims to Government*
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia							*a. Bills to the Government of Indonesia*
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain							*b. Bills to Governments of Other Countries*
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	*Claims on Public Sector Entities*
3	Tagihan Kepada Bank Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	*Claims on Multilateral Banks and International Institutions*
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	*Bills to Bank*
	a. Tagihan jangka Pendek							*a. Short term bill*
	b. Tagihan Jangka Panjang							*b. Long Term Bills*
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	*Bills to Micro, Small Business and Retail Portfolios*
6	Tagihan kepada Korporasi							*Bills to Corporations*
7	Eksposur tertimbang dari Credit Valuation Adjusment (CVA risk weighted assets)	-	-	-	-	-	-	*Exposure weighted from Credit Valuation Adjustment (CVA risk weighted assets)*
TOTAL		-	-	-	-	-	-	

Tabel 11
Table 11

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million Rupiahs)*

		31 Desember 2021 December 31, 2021	*31 Desember 2020 December 31, 2020*	
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	(A)	12.175.240	11.923.906	*TOTAL ATMR CREDIT RISK*
"FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT : Selisih lebih antara cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit"	(B)	-	-	*"CREDIT RISK RWA REDUCTION FACTORS: The excess difference between PPKA general reserves for productive assets that must be calculated and 1.25% RWA for Credit Risk"*
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	12.175.240	11.923.906	*TOTAL RWA CREDIT RISK (A) - (B)*
TOTAL FAKTOR PENGURANGAN MODAL	(D)	-	-	*TOTAL CAPITAL REDUCTION FACTOR*

Tabel 12. Pengungkapan Kualitatif *Counterparty Credit Risk* (CCRA)
Table 12. Qualitative Counterparty Credit Risk (CCRA) Disclosures

Bank harus menyediakan :		**Deskripsi** *Description*	*Banks must provide:*	
Tujuan manajemen risiko dan kebijakan terkait risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk :		*NIHIL*	*Risk management objectives and policies related to credit risk due to counterparty credit risk, including:*	
a	Metode yang digunakan untuk menerapkan limit operasi yang didefinisikan pada internal capital untuk *counterparty credit exposures* dan untuk eksposur CCP		*a*	*The method used to apply defined operating limits on internal capital for counterparty credit exposures and for CCP exposures*
b	Kebijakan yang berkaitan dengan garansi dan mitigasi risiko dan penilaian terkait counterparty risk, termasuk eksposur towards CCP		*b*	*Policies related to guarantees and risk mitigation and assessments related to counterparty risk, including exposure towards CCP*
c	Kebijakan terkait eksposur wrong-way risk		*c*	*Policy regarding wrong-way risk exposure*
d	Dampak pada nilai jaminan yang dibutuhkan untuk menyediakan penurunan peringkat kredit		*d*	*Impact on the value of the collateral required to provide for a credit rating downgrade*

Tabel 13. Analisis Eksposur Counterparty Credit Risk (CCR1)
Table 13. Counterparty Credit Risk (CCR1) Exposure Analysis

		***Replacement cost* (RC)**	***Potential future exposure* (PFE)**	**EEPE**	**Alpha digunakan untuk perhitungan regulatory EAD** *Alpha is used for the calculation of regulatory EAD*	**"Tagihan Bersih"** *"Clean Bill"*	**ATMR** *ATMR*
1	SA-CCR (untuk derivatif) *SA-CCR (for derivatives)*	-	-	-	1,4	-	-
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT) *Internal Model Method (for derivatives and SFT)*	-	-	-	-	N/A	N/A
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT) *Simple approach to credit risk mitigation (for SFT)*	-	-	-	-	N/A	N/A
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT) *Comprehensive approach to credit risk mitigation (for SFT)*	-	-	-	-	-	-
5	VaR untuk SFT *VaR for SFT*					N/A	N/A
6	**Total** ***Total***	-	-	-	-	-	

Tabel 14. *Capital Charge Credit Valuation Adjusment* (CCR2)
Table 14. Capital Charge Credit Valuation Adjustment (CCR2)

	Deskripsi	a	b	*Description*
		Tagihan bersih Net bill	ATMR ATMR	
1	Total portfolios berdasarkan Advanced CVA *capital charge*	N/A	N/A	*Total portfolios based on Advanced CVA capital charge*
2	(i) komponen VaR (termasuk 3× multiplier)	-	N/A	*(i) VaR components (including 3× multiplier)*
3	(ii) komponen Stressed VaR (termasuk 3× multiplier)	-	N/A	*(ii) Stressed VaR component (including 3× multiplier)*
4	Semua Portfolio sesuai Standardised CVA *Capital Charge*	-	-	*All Portfolios comply with Standardized CVA Capital Charge*
	Total sesuai CVA *Capital Charge*	-	-	***Total according to CVA Capital Charge***

Tabel 15. Eksposur CCR Berdasarkan Kategori Portofolio Dan Bobot Risiko (CCR3)
Table 15. CCR Exposure by Portfolio Category and Risk Weight (CCR3)

Bobot Risiko	a	b	c	d	e	f	g	h	i	*Risk Weight*
Kategori Portofolio	0%	10%	20%	50%	75%	100%	150%	Lainnya Other	Total Tagihan Bersih Total Net Bill	*Portfolio Category*
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Government and Central Bank*
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Claims on Public Sector Entities*
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Multilateral Development Banks and International Agencies*
Tagihan kepada Bank Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Other Banks*
Tagihan kepada perusahaan sekuritas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to securities companies*
Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Corporations*
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Bills to Micro, Small Business, and Retail Portfolios*
Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Other Assets*
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**Total**

Tabel 16. Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR6)
Table 16. Net Receivable Credit Derivatives (CCR6)

Deskripsi	a	b	*Description*
	Proteksi yang Dibeli (*Protection Bought*) *Protection Bought*	Proteksi Yang Dijual (Protection Sold) *Protection Sold*	
Nilai Notional			***Notional Value***
Single-name credit default swaps			*Single-name credit default swaps*
Index credit default swaps			*Index credit default swaps*
Total return swaps			*Total return swaps*
Credit options			*Credit options*
Derivatif kredit lainnya			*Other credit derivatives*
….			….
Total Nilai Notional			***Total Notional Value***
Nilai wajar			***Fair value***
Nilai wajar positif (aset)			*Positive fair value (asset)*
Nilai wajar negatif (kewajiban			*Negative fair value (liability*
Analisis Kualitatif			

Tabel 18. Pengungkapan Kualitatif Mengenai Eksposur Sekuritisasi (SECA)
Table 18. Qualitative Disclosures Regarding Securitization Exposures (SECA)

No	Pengungkapan Kualitatif *Qualitative Disclosure*	Deskripsi *Description*
a	Bank harus mendeskripsikan tujuan manajemen risiko dan kebijakan untuk aktivitas sekuritisasi dan fitur utama dari aktivitas ini berdasarkan kerangka di bawah ini. Jika bank mempunyai eksposur sekuritisasi pada laporan *banking book* dan *trading book*, bank harus menjelaskan poin-poin dibawah ini dengan aktivitas berbeda pada setiap *banking book* dan *trading book* *Banks should describe the risk management objectives and policies for securitization activities and the main features of these activities based on the framework below. If the bank has securitization exposure in the banking book and trading book reports, the bank must explain the points below with different activities in each banking book and trading book*	
b	Tujuan bank terkait sekuritisasi dan aktivitas re-sekuritisasi, termasuk aktivitas pemindahan risiko kredit dari eksposur sekuritisasi yang mendasari dari bank kepada entitas lain, tipe risiko yang diasumsikan dan tipe risiko yang dipertahankan. *The bank's objectives related to securitization and re-securitization activities, including the activity of transferring credit risk from the underlying securitization exposure from the bank to other entities, the type of risk assumed and the type of risk retained.*	
c	Bank harus menyediakan daftar: *Banks must provide a list of:* 1. *special purpose entities* (SPV) dimana bank berlaku sebagai sponsor (namun tidak sebagai originator seperti *Asset Backed Commercial Paper* (ABCP) *conduit*), mengindikasikan dimana bank mengkonsolidasi SPV kepada lingkup *regulatory consolidation* *1. special purpose entities (SPV) where the bank acts as a sponsor (but not as the originator such as the Asset Backed Commercial Paper (ABCP) conduit), indicating where the bank is consolidating the SPV to the scope of regulatory consolidation* 2. entitas terafiliasi (i) yang diatur atau disarankan bank dan (ii) yang menginvestasikan tidak hanya pada eksposur sekuritisasi yang telah disekuritisasi oleh bank atau di SPV yang telah disponsori bank *2. affiliated entities (i) that are regulated or advised by the bank and (ii) that invest not only in securitization exposures that have been securitized by the bank or in bank-sponsored SPVs* 3. daftar entitas dengan dukungan implisit dari bank dan berhubungan dengan dampak pada permodalan bagi mereka *3. a list of entities with implicit support from banks and dealing with the impact on capital for them*	

No	Pengungkapan Kualitatif *Qualitative Disclosure*	Deskripsi *Description*
d	Rangkuman kebijakan akuntansi bank terkait aktivitas sekuritisasi *Summary of bank accounting policies related to securitization activities*	
e	Jika dapat diterapkan, nama lembaga pemeringkat eksternal yang digunakan untuk sekuritisasi untuk agen yang digunakan *If applicable, the name of the external rating agency used for securitization for the agency used*	
f	Bank harus menjelaskan fungsi asesmen internal *Banks must explain the function of internal assessment*	

Tabel 19. Eksposur Sekuritisasi Pada *Banking Book* (SEC 1)
Table 19. Securitization Exposure in Banking Book (SEC 1)

No	Deskripsi *Description*	a	b	c	d	e	f	g	h	i
		Bank Sebagai Originator *Bank as Originator*			Bank Sebagai Sponsor *Bank as Sponsor*			Bank Sebagai Investor *Banks as Investors*		
		Traditional *Traditional*	Sintetis *Synthetic*	Sub-total *Sub-Total*	Traditional *Traditional*	Sintetis *Synthetic*	Sub-total *Sub-Total*	Traditional *Traditional*	Sintetis *Synthetic*	Sub-total *Sub-Total*
1	Retail (total) – antara lain *Retail (total) – among others*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit Perumahan *Housing loans*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kartu Kredit *Credit card*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Eksposur Ritel Lainnya *More Retail Exposure*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Re-sekuritisasi *Re-securitization*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-Retail (total) – antara lain *Non-Retail (total) – among others*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Korporasi *Corporate Credit*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Komersil *Commercial Credit*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sewa dan Piutang *Rent and Receivable*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Non-Retail Lainnya *Other Non-Retail*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Re-sekuritisasi *Re-securitization*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Analisis Kualitatif									

Tabel 20. Eksposur Sekuritisasi Pada *Trading Book* (SEC 2)
Table 20. Securitization Exposure in the Trading Book (SEC 2)

No	Deskripsi *Description*	a	b	c	d	e	f	g	h	i
		Bank Sebagai Originator *Bank as Originator*			Bank Sebagai Sponsor *Bank as Sponsor*			Bank Sebagai Investor *Banks as Investors*		
		Traditional *Traditional*	Sintetis *Synthetic*	Sub-total *Sub-Total*	Traditional *Traditional*	Sintetis *Synthetic*	Sub-total *Sub-Total*	Traditional *Traditional*	Sintetis *Synthetic*	Sub-total *Sub-Total*
1	Retail (total) – antara lain *Retail (total) – among others*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kredit Perumahan *Housing loans*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kartu Kredit *Credit card*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Eksposur Ritel Lainnya *More Retail Exposure*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Re-sekuritisasi *Re-securitization*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Non-Retail (total) – antara lain *Non-Retail (total) – among others*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Korporasi *Corporate Credit*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Komersil *Commercial Credit*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Sewa dan Piutang *Rent and Receivable*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Non-Retail Lainnya *Other Non-Retail*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Re-sekuritisasi *Re-securitization*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Analisis Kualitatif										

Tabel 21. Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan terkait Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai Originator atau Sponsor (SEC3)
Table 21. Exposure to Securitization in the Banking Book and Related Capital Requirements – Banks Acting as Originators or Sponsors (SEC3)

No	Deskripsi	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	Description
		Nilai Eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai Eksposur (berdasarkan *Regulatory Approach*)				ATMR (berdasarkan *Regulatory Approach*)				*Capital charge after cap*				
		≤20% Bobot Risiko *<20% Risk Weight*	>20% to 50% Bobot Risiko *>20% to 50% Risk Weight*	>50% to 100% Bobot Risiko *>50% to 100% Risk Weight*	>100% to <1250% Bobot Risiko *>100% to <1250% Risk Weight*	1250% Bobot Risiko *1250% Risk Weight*	IRB RBA *IRB RBA*	IRB SFA *IRB SFA*	SA/ SSFA *SA/ SSFA*	1250% *1250%*	IRB RBA *IRB RBA*	IRB SFA *IRB SFA*	SA/ SSFA *SA/ SSFA*	1250% *1250%*	IRB RBA *IRB RBA*	IRB SFA *IRB SFA*	SA/ SSFA *SA/ SSFA*	1250% *1250%*	
1	Total Eksposur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Total Exposure*
2	Sekuritisasi Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Traditional Securitization*
3	Dimana Underlying Sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Where is Underlying Securitization*
4	Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Retail*
5	Non-Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Non-Retail*
6	Dimana Re-Sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Where is Re-Securitization*
7	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Senior*
8	Non-Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Non-Senior*
9	Sekuritisasi Sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Synthetic Securitization*
10	Dimana Underlying Sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Where is Underlying Securitization*
11	Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Retail*
12	Non-Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Non-Retail*
13	Dimana Re-Sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Where is Re-Securitization*
14	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Senior*
15	Non-Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Non-Senior*
Analisis Kualitatif																			

Tabel 22. Eksposur Sekuritisasi pada Banking Book dan Persyaratan Modalnya – Bank yang Bertindak Sebagai Investor (SEC4)
Table 22. Securitization Exposure in Banking Book and Capital Requirements – Banks Acting as Investors (SEC4)

No	Deskripsi	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	Description
		Nilai Eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai Eksposur (berdasarkan *Regulatory Approach*)				ATMR (berdasarkan *Regulatory Approach*)				*Capital charge after cap*				
		≤20% Bobot Risiko *<20% Risk Weight*	>20% to 50% Bobot Risiko *>20% to 50% Risk Weight*	>50% to 100% Bobot Risiko *>50% to 100% Risk Weight*	>100% to <1250% Bobot Risiko *>100% to <1250% Risk Weight*	1250% Bobot Risiko *1250% Risk Weight*	IRB RBA *IRB RBA*	IRB SFA *IRB SFA*	SA/SSFA *SA/SSFA*	1250% *1250%*	IRB RBA *IRB RBA*	IRB SFA *IRB SFA*	SA/SSFA *SA/SSFA*	1250% *1250%*	IRB RBA *IRB RBA*	IRB SFA *IRB SFA*	SA/SSFA *SA/SSFA*	1250% *1250%*	
1	Total Eksposur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Total Exposure*
2	Sekuritisasi Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Traditional Securitization*
3	Dimana Underlying Sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Where is Underlying Securitization*
4	Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Retail*
5	Non-Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Non-Retail*
6	Dimana Re-Sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Where is Re-Securitization*
7	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Senior*
8	Non-Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Non-Senior*
9	Sekuritisasi Sintetis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Synthetic Securitization*
10	Dimana Underlying Sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Where is Underlying Securitization*
11	Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Retail*
12	Non-Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Non-Retail*
13	Dimana Re-Sekuritisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Where is Re-Securitization*
14	Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Senior*
15	Non-Senior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Non-Senior*
Analisis Kualitatif																			

Tabel 23. Pengungkapan Kualitatif Umum
Table 23. General Qualitative Disclosures

a	Pengungkapan kualitatif secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, mengenai :	*Qualitative disclosure in general as regulated in the provisions of the Financial Services Authority regarding guidelines for calculating risk-weighted assets for credit risk using a standard approach, regarding:*
1)	Informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk risiko kredit, termasuk organisasi manajemen risiko kredit, strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan, kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit	*Information on the implementation of risk management for credit risk, including credit risk management organization, credit risk management strategies for activities with significant credit risk exposure, credit concentration risk management policies, and credit risk measurement and control mechanisms*
	-	-
2)	Definisi tagihan yang telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai (impairment); dan	*Definition of receivables that are past due and receivables that are impaired (impairment); and*
	-	-
3)	Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan CKPN individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN	*An explanation of the approach used for the formation of individual and collective CKPN, as well as the statistical methods used in calculating CKPN*
	-	-

b	Pengungkapan risiko kredit dengan pendekatan standar secara kualitatif mengenai:	*Disclosure of credit risk with a qualitative standard approach regarding:*
1)	Informasi mengenai kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit	*Information regarding the policy on the use of ratings in calculating RWA for Credit Risk*
	-	-
2)	Kategori portofolio yang menggunakan peringkat; dan	*Portfolio category using ratings; and*
	-	-
3)	Lembaga pemeringkat yang digunakan	*Rating agency used*
	-	-

c	Pengungkapan mitigasi risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar mengenai :	*Disclosure of credit risk mitigation using a standard approach regarding:*
1)	Informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan utama yang diterima	*Information regarding the Bank's policies for the main types of collateral accepted*
	-	-
2)	Informasi kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan	*Information on policies, procedures and processes for assessing and managing collateral*
	-	-
3)	Pihak-pihak utama pemberi jaminan atau garansi dan kelayakan kredit dari pihak-pihak tersebut; dan	*The main parties providing guarantees or guarantees and the creditworthiness of these parties; and*
	-	-
4)	Informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi risiko kredit	*Information on the level of concentration resulting from the use of credit risk mitigation techniques*
	-	-

RISIKO PASAR / *MARKET RISK*

Tabel 1 : Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar
Table 1: Disclosure of Market Risk Using Standard Method

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

No	Jenis Risiko	31 Desember 2021 *December 31, 2021*				31 Desember 2020 *December 31, 2020*				*Risk Type*
		Bank *Bank*		Konsolidasi *Consolidation*		Bank *Bank*		Konsolidasi *Consolidation*		
		Beban Modal *Capital Expense*	ATMR *ATMR*	Beban Modal *Capital Expense*	ATMR *ATMR*	Beban Modal *Capital Expense*	ATMR *ATMR*	Beban Modal *Capital Expense*	ATMR *ATMR*	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Risiko Suku Bunga			-	-			-	-	
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Risiko Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Risiko Nilai Tukar	2.462	30.779	-	-	5.535	69.193	-	-	
3	Risiko Ekuitas *)		-	-	-		-	-	-	
4	Risiko Komoditas *)		-	-	-		-	-	-	
5	Risiko Option	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL	2.462	30.779	-	-	5.535	69.193	-	-	

RISIKO OPERASIONAL / *OPERATIONAL RISK*

Tabel 1 : Bank Secara Individual
Table 1: Banks Individually

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

No	Pendekatan Yang Digunakan *Approach Used*	31 Desember 2021 *December 31, 2021*			31 Desember 2020 *December 31, 2020*		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) *Gross Income (Average of the last 3 years)*	Beban Modal *Capital Expense*	ATMR *ATMR*	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir) *Gross Income (Average of the last 3 years)*	Beban Modal *Capital Expense*	ATMR *ATMR*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1	Pendekatan Indikator Dasar *Basic Indicator Approach*	1.456.664	218.500	2.731.246	1.350.879	202.632	2.532.898
	Total	1.456.664	218.500	2.731.246	1.350.879	202.632	2.532.898

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2021, Bank Riau Kepri tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai: nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi dan langkah-langkah yang direncanakan bank riau kepri untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Material Bonds Related to Capital Goods Investment

Throughout 2021, Bank Riau Kepri has no material commitments for capital goods investment. Therefore, there is no information regarding: the name of the party making the ties, the purpose of the ties, the source of funds expected to fulfill the ties, the currency to be denominated and the steps planned by the Riau Islands Bank to protect the risks from the position. related foreign currency.

Investasi Barang Modal

Investasi berupa barang modal *(capital expenditure)* merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Capital Goods Investment

Investment in the form of capital goods (capital expenditure) is an activity of spending funds used to purchase a number of fixed assets or increase the value of fixed assets which are expected to provide value for benefits in the future.

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal

Jenis dan investasi barang modal disajikan dalam tabel berikut.

Types and Value of Capital Goods Investment

Types and investments of capital goods are presented in the following table.

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal – Aset Tetap
Table of Types and Values of Investment in Capital Goods – Fixed Assets

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian	2021	2020	*Description*
Tanah dan Bangunan	-	-	*Land and Building*
Mesin dan Peralatan Kantor	24.303	42.563	*Office Machinery and Equipment*
Kendaraan	1.671	1.537	*Vehicle*
Sub Jumlah	25.974	44.100	*Sub Quantity*
Aset dalam penyelesaian	3.068	13.440	*Assets in progress*
Total	29.042	57.540	*Total*

Tujuan Investasi Barang Modal

Investasi barang modal bertujuan untuk memperluas jaringan kantor yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat setempat serta dapat memberikan nilai tambah bagi Bank Riau Kepri di masa yang akan datang.

Capital Goods Investment Purpose

Capital goods investment aims to expand the office network which is expected to reach a wider community and provide greater benefits to the local community and can provide added value for Bank Riau Kepri in the future.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Akuisisi, Atau Restrukturisasi Hutang dan Modal

Investasi

Untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja, Bank Riau Kepri melakukan investasi pada sejumlah efek-efek. Adapun rincian investasi Bank Riau Kepri per 31 Desember 2020 dan 2021 disajikan sebagai berikut

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, Or Debt and Capital Restructuring

Investment

To increase profitability and performance, Bank Riau Kepri invests in a number of securities. The details of the investment of Bank Riau Kepri as of December 31, 2020 and 2021 are presented as follows:

Tabel Rincian Investasi Efek-Efek
Table of Securities Investment Details

Uraian	2021	2020	Pertumbuhan		*Description*
			Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)	
SBPM obligasi tersedia untuk dijual	2.832.346	975.434	1.856.912	190,37%	*SBPM bonds available for sale*
SBPU tersedia untuk dijual	-	-	-	-	*SBPU available for sale*
SBPU reksadana dimiliki hingga jatuh tempo	1.167.610	3.109.914	(1.942.304)	-62,46%	*SBPU mutual funds are held to maturity*
Sukuk BI diperdagangkan	1.207.402	1.572.719	(365.317)	*-23,23%*	*BI Sukuk traded*
SBPM SBSN PD/SM dimiliki hingga jatuh tempo	30.000	30.000	-	-	*SBPM SBSN PD/SM held to maturity*
SBPM SBSN PD/SM HTM Premium	1.026	1.459	(433)	-29,70%	*SBPM SBSN PD/SM HTM Premium*
Jumlah Efek-efek	5.238.384	5.689.527	(451.143)	-7,93%	*Number of Effects*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(897)	(5.545)	4.647	-83,82%	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	5.237.487	5.683.982	(446.495)	-7,86%	*Quantity - net*

Ekspansi

Informasi yang berkaitan dengan ekspansi Bank Riau Kepri disajikan dalam tabel di bawah ini:

Expansion

Information related to the expansion of Bank Riau Kepri is presented in the table below:

Tabel Ekspansi
Expansion Table

Jaringan Kantor	2021	2020	Ekspansi	*Office Network*
Cabang	21	21	0	*Branch*
Cabang Pembantu/Kedai	79	76	3	*Sub-Branch/Store*
Kantor Kas/Payment Point/Butik	73	71	2	*Cash Office/Payment Point/Butik*

Divestasi

Sejalan dengan proses konversi Bank menjadi Bank Umum Syariah, maka berdasarkan Peraturan OJK No.36/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal tersebut, pada tahun 2021 Bank melakukan divestasi atas penyertaan modal sebesar Rp100 juta Pada PD BPR GEMILANG .

Akuisisi

Bank Riau Kepri tidak melakukan kegiatan akuisisi sepanjang tahun 2021.

Restrukturisasi Hutang/Modal

Bank Riau Kepri tidak melakukan transaksi restrukturisasi utang dan/atau restrukturisasi modal sepanjang tahun 2021.

Komitmen dan Kontinjensi

Posisi jumlah kewajiban komitmen pada tahun 2021 adalah sebesar Rp433,37 miliar, menurun 0,58% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp435,90 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik lainnya (committed).

Tagihan kontijensi yaitu pendapatan bunga dalam penyelesaian bunga kredit yang diberikan meningkat sebesar 9,11% atau Rp43,66 miliar menjadi Rp522,67 miliar dibandingkan dengan posisi tahun 2020 sebesar Rp479,01 miliar, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada kualitas kredit yang diberikan yang sejalan dengan penurunan NPL gross.

Kewajiban kontinjensi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp30,14 miliar, menurun 18,10% dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp36,80 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2021 pemberian garansi yang diberikan menurun.

Posisi Komitmen Dan Kntijensi Pada Tahun 2021 Sebesar Rp560,810 Miliar, Mengalami Penurunan Sebesar 3,50% Atau Turun Sebesar Rp20,33 Miliar Dari Posisi Tahun 2020 Sebesar Rp581.142 Miliar

Divestment

In line with the conversion of the Bank to a Sharia Commercial Bank, based on OJK Regulation No.36/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning Prudential Principles in Equity Participation Activities, in 2021 the Bank will divest its equity participation of Rp. 100 million. PD BPR GEMILANG .

Acquisition

Bank Riau Kepri did not carry out acquisition activities throughout 2021.

Debt/Capital Restructuring

Bank Riau Kepri did not carry out debt restructuring transactions and/or capital restructuring throughout 2021.

Commitments And Contingencies

The position of total commitment obligations in 2021 is IDR 433.37 billion, a decrease of 0.58% compared to 2020 of IDR 435.90 billion. The decrease was mainly due to a decrease in credit facilities to other customers that have not been drawn (committed).

Contingent claims, namely interest income in the settlement of loan interest, increased by 9.11% or Rp43.66 billion to Rp522.67 billion compared to the position in 2020 of Rp479.01 billion, this indicates that there is an increase in the quality of loans which is in line with the decline in gross NPL.

Contingent liabilities in 2021 are IDR 30.14 billion, a decrease of 18.10% compared to 2020 of IDR 36.80 billion. This decrease is due to the fact that in 2021 the guarantee provided has decreased.

Commitment and Contingency Position in 2021 amounted to Rp560.810 billion, decreased by 3.50% or decreased by Rp20.33 billion from 2020 position of Rp581,142 billion

Tabel Komitmen dan Kontinjensi
Commitment and Contingency Table

Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan		*Description*
			Rp	%	
KOMITMEN					*COMMITMENT*
Tagihan komitmen					*Commitment bill*
Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-	-	-	*Loan facilities that have not been withdrawn*
Kewajiban komitmen					*Commitment obligation*
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	-	-	-	-	*Credit facilities to customers that have not been withdrawn*
BUMN	98.270	85.394	12.876	15,08%	*BUMN*
Lainnya	335.096	350.501	(15.405)	-4,40%	*Other*
Jumlah	433.367	435.895	(2.528)	-0,58%	*Amount*
Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-	-	-	-	*Credit facilities to other banks that have not been withdrawn*
Jumlah	433.367	435.895	(2.528)	-0,58%	*Amount*
KONTINJENSI					*CONTINGENCIES*
Tagihan kontinjensi					*Contingent bill*
Garansi yang diterima	-	-	-	-	*Accepted warranty*
Pendapatan bunga dalam penyelesaian					*Interest income in progress*
Bunga kredit yang diberikan	522.667	479.010	43.657	9,11%	*Credit interest given*
Bunga lainnya	-	-	-	-	*More flowers*
Jumlah	522.667	479.010	43.657	9,11%	*Amount*
Kewajiban kontinjensi					*Contingent liability*
Garansi yang diberikan	30.138	36.799	(6.662)	-18,10%	*Warranty provided*
Lainnya	-	-	-	-	*Other*
Jumlah	30.138	36.799	(6.662)	-18,10%	*Amount*
Penerusan kredit	223.777	224.162	(385)	-0,17%	*Credit forwarding*
Aset produktif yang dihapus buku					*Earning assets written off*
Aset produktif:					*Earning Assets:*
Kredit yang diberikan	270.322	278.321	(7.999)	-2,87%	*Credit granted*
Lainnya	259	259	-	-	*Other*
Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih :					*Earning assets written off books that are recovered or successfully invoiced:*
Kredit yang diberikan	66.451	78.399	(11.948)	-15,24%	*Credit granted*
Lainnya	-	-	-	-	*Other*
Jumlah	560.810	581.142	(20.332)	-3,50%	*Amount*

Pada tahun 2021 dan 2020 tidak terdapat kredit yang dihapus bukukan, saldo kredit hapus buku disajikan dalam laporan rekening administratif.

In 2021 and 2020 there are no written-off loans, the balance of write-off credits is presented in the off-balance sheet.

Tabel Kredit Penghapusbukuan
Write-off Credit Table

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian	2021	2020	*Description*
Penghapusbukuan kredit	-	-	*Credit write-off*
Penerimaan kembali pokok	7.999	6.406	*Receipt of principal*
Saldo kredit hapus buku	270.322	278.321	*Delete book credit balance*

Pencapaian Target Dan Target Ke Depan

Pencapaian Target 2021

Untuk mengetahui kinerja Bank dan memastikan bahwa strategi objektif terpenuhi, Bank Riau Kepri telah mengidentifikasi beberapa indikator penting dalam pengukuran kinerja Bank sebagai perbandingan antara kinerja tahun sebelumnya dengan kinerja yang akan datang yang telah disusun berdasarkan Rencana Bisnis Bank.

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Secara keseluruhan indikator realisasi pertumbuhan kinerja Bank Riau Kepri ditahun 2021 dapat dikatakan baik jika dibandingkan dengan rencana target yang ditetapkan di tahun 2021.

Achievement of Targets and Future Targets

Achieving Target 2021

To determine the Bank's performance and ensure that the strategic objectives are met, Bank Riau Kepri has identified several important indicators in measuring the Bank's performance as a comparison between the previous year's performance and future performance which has been prepared based on the Bank's Business Plan.

Comparison of Financial Targets and Realizations

Overall indicators for the realization of Bank Riau Kepri's performance growth in 2021 can be said to be good when compared to the planned target set in 2021.



Tabel Perbandingan Rencana Bisnis Bank dan Realisasi Keuangan 2021
Table Comparison of Bank Business Plans and Financial Realization 2021

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian	Realisasi Desember 2021	Target Desember 2021	Pencapaian		*Description*
1	2	3	4=2-3	(5) = (4)/(3)	
Posisi Keuangan					*Financial Position*
Aset	30.779.686	29.000.000	1.779.686	106,14%	*Asset*
Kredit yang diberikan	18.884.914	19.868.000	(983.086)	95,05%	*Credit granted*
Dana Pihak Ketiga	25.615.733	22.696.000	2.919.733	112,86%	*Third-party funds*
Giro	5.607.380	4.020.000	1.587.380	139,49%	*Current Account*
Tabungan	7.449.293	7.328.000	121.293	101,66%	*Savings*
Deposito	12.559.060	11.348.000	1.211.060	110,67%	*Deposit*
Laba Rugi					*Profit and loss*
Pendapatan bunga	2.213.852	2.258.408	(44.556)	98,03%	*Interest income*
Beban bunga	922.450	920.209	2.240	100,24%	*Interest expense*
Pendapatan (beban) bunga bersih	1.291.403	1.338.199	(46.796)	96,50%	*Net interest income (expense)*
Laba (rugi) tahun berjalan	381.013	337.500	43.513	112,89%	*Income for the year*
Rasio Keuangan (%)					*Financial Ratio (%)*
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,07%	20,97%	0,001	100,47%	*Capital Adequacy Ratio (CAR)*
Non Perfoming Loan (NPL) Gross	2,82%	2,69%	0,001	104,59%	*Non-Performing Loan (NPL) Gross*
Non Perfoming Loan (NPL) Net	0,88%	1,00%	-0,001	92,55%	*Non-Performing Loan (NPL) Net*
Return on Assets (RoA)	1,93%	1,62%	0,109	772,24%	*Return on Assets (RoA)*
Return on Equity (RoE)	12,49%	11,26%	-0,093	17,11%	*Return on Equity (RoE)*
Net Interest Margin (NIM)	4,64%	4,89%	-0,003	94,83%	*Net Interest Margin (NIM)*
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	77,23%	80,71%	-0,035	95,69%	*Operating Costs Operating Income (BOPO)*

Pencapaian total aset mencapai 106,41% berada di atas target dengan realisasi aset pada tahun 2021 sebesar Rp30,78 triliun. Kredit yang diberikan sedikit di bawah target sebesar 95,05% dengan realisasi sebesar Rp18,88 triliun. Dana pihak ketiga berhasil melampaui target 112,86% dengan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp25,616 triliun. Pencapaian tersebut sejalan dengan pencapaian giro dan tabungan masing-masing sebesar 139,49% dan 101,66%. Pencapaian pendapatan bunga bersih sebesar 96,50% dengan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp1,29 triliun. Demikian pula dengan laba tahun berjalan setelah pajak tahun 2021 terealisasi Rp381,013 miliar dengan pencapaian 112,89%

The achievement of total assets reached 106.41%, which was above the target with the realization of assets in 2021 of IDR 30.78 trillion. Loans disbursed were slightly below the target of 95.05% with a realization of Rp. 18.88 trillion. Third party funds managed to exceed the target of 112.86% with a realization in 2021 of Rp. 25.616 trillion. 139.49% and 101.66%. Achievement of net interest income of 96.50% with a realization in 2021 of Rp1.29 trillion. Similarly, the profit for the year after tax in 2021 was realized Rp381.013 billion with an achievement of 112.89%

Dana pihak ketiga berhasil melampaui target 107,96% dengan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp22,14 triliun. Pencapaian tersebut sejalan dengan pencapaian giro dan deposito masing-masing sebesar 105,79% dan 117,64%. Pencapaian pendapatan bunga bersih sebesar 101,87% dengan realisasi di tahun 2021 sebesar Rp1,31 triliun. Demikian pula dengan laba tahun 2021 terealisasi Rp463,97 miliar dengan pencapaian 123,73%.

Third party funds managed to exceed the target of 107.96% with realization in 2021 amounting to Rp22.14 trillion. This achievement was in line with the achievement of demand deposits and time deposits of 105.79% and 117.64%, respectively. Achievement of net interest income of 101.87% with a realization in 2021 of Rp1.31 trillion. Likewise, the profit in 2021 was realized at Rp463.97 billion with an achievement of 123.73%. In the future, Bank Riau Kepri will further

Ke depannya Bank Riau Kepri akan lebih meningkatkan pencapaian laba antara lain dengan cara meningkatkan penyaluran kredit yang berkualitas lancar, meningkatkan dan memperluas pendapatan *fee base income* melalui pengembangan layanan digital banking, peningkatan inovasi produk dan mendorong perluasan delivery channel dan efisiensi dalam hal menurunkan beban bunga DPK (*special rate deposito*) dan beban CKPN.

increase profit achievement, among others, by increasing the distribution of good quality loans, increasing and expanding fee income base income through the development of digital banking services, increasing product innovation and encourage the expansion of delivery channels and efficiency in terms of reducing the interest expense on deposits (special rate deposits) and CKPN expenses.

Pada tahun 2021 rasio CAR, RoA dan RoE telah mencapai capaian yang sangat baik yaitu masing-masing sebesar 100,47%, 110,90%, 119,17%. Ke depannya, Bank Riau Kepri akan senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan, sehingga kinerja Bank Riau Kepri di masa yang akan datang akan senantiasa mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

In 2021 the ratio of CAR, RoA and RoE has reached a very good achievement of 100.47%, 110.90%, 119.17%, respectively. Going forward, Bank Riau Kepri will always evaluate the implementation of the strategies that have been set, so that the performance of Bank Riau Kepri in the future will continue to experience continuous improvement.

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Comparison of Marketing Targets And Actuals

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Comparison Table of Marketing Targets and Realizations

No	Produk	Deskripsi	Realisasi
Produk			
1	Hasanah card (*Co-branding*)	Kartu Kredit Syariah bekerjasama dengan BNI Syariah *Sharia Credit Card in collaboration with BNI Syariah*	produk Hasanah Card (*Co-Branding*) berlaku mulai 23 September 2021 *Hasanah Card (Co-Branding) product is valid from 23 September 2021*
Aktivitas			
1	QRIS	'Fasilitas layanan yang diberikan kepada Nasabah Bank untuk melakukan transaksi pembayaran QRIS melalui aplikasi BRK mobile dan layanan penerimaan transaksi pembayaran QRIS bagi Merchant BRK QRIS. *'Service facilities provided to Bank Customers to make QRIS payment transactions through the BRK mobile application and QRIS payment transaction acceptance services for BRK QRIS Merchants.*	Implementasi Layanan QRIS Bank Riau Kepri berdasarkan Surat BI Nomor : 23/758/DKSP/Srt/B tanggal 5 Juli 2021 *Implementation of Bank Riau Kepri QRIS Services based on BI Letter Number: 23/758/DKSP/Srt/B dated July 5, 2021*
2	*Debit As Issuer*	layanan kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Bank Riau Kepri untuk mempermudah Nasabah melakukan transaksi pembayaran melalui mesin EDC Bank Riau Kepri atau mesin EDC Bank Lain secara non tunai. *electronic payment card service issued by Bank Riau Kepri to make it easier for customers to make payment transactions through Bank Riau Kepri EDC machines or other Bank EDC machines non-cash.*	Di *carry over* ke tahun 2022 *Carry over to 2022*
3	Layanan *Cross Border* ATM Al-rajhi	Sebagai sarana memudahkan dalam bertransaksi yang dapat diakses oleh nasabah tanpa harus membawa uang tunai pada saat mealkukan perjalanan keluar negeri khususnya pada saat ibadah umroh dan Haji. *As a means of facilitating transactions that can be accessed by customers without having to carry cash when traveling abroad, especially during Umrah and Hajj.*	Di *carry over* ke tahun 2022 (sudah mengajukan proses perizinan ke BI, menunggu izin dari BI) *Carry over to 2022 (already submitted the licensing process to BI, waiting for permission from BI)*
4	*Virtual account* (gen 2)	Produk simpanan yang bukan merupakan real account dan tidak masuk dalam kategori DPK namun terhitung sebagai asset dengan bertujuan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi (baik pembayaran, pembelian dan penyaluran dana) *Savings products that are not real accounts and are not included in the TPF category but are counted as assets with the aim of providing convenience to customers in transactions (both payments, purchases and distribution of funds)*	Di *carry over* ke tahun 2022 *Carry over to 2022*

Perbandingan Target Dan Realisasi Pengembangan SDM

Rencana pemenuhan SDM disesuaikan dengan pertumbuhan dan kebutuhan bisnis Bank. Sesuai dengan rencana pengembangan organisasi untuk mendukung perkembangan bisnis, maka realisasi pengembangan SDM sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Comparison of HR Development Targets and Realizations

The HR fulfillment plan is adjusted to the growth and business needs of the Bank. In accordance with the organizational development plan to support business development, the realization of HR development until the end of 2021 is as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2021
Table Comparison of Targets and Realization of Human Resources Development in 2021

Uraian	Realisasi Desember 2021	Target Desember 2021	Pencapaian	*Description*
1	2	3	4=2/3	
Jumlah peserta pelatihan (dalam orang)	10.356	3.380		*Number of trainees (in person)*
Biaya pelatihan (jutaan Rupiah)	Rp5,7 miliar	Rp25,733 miliar		*Training costs (millions of Rupiah)*

Realisasi biaya pelatihan tahun 2021 terdapat penurunan dibandingkan realisasi biaya pelatihan tahun 2020 dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 dimana pelaksanaan kegiatan pelatihan menjadi terbatas dan yang semula metode pelatihan dilaksanakan secara klasikal (tatap muka) beralih menjadi *online class* sehingga terdapat penurunan realisasi biaya pelatihan pada tahun 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan realisasi peserta yang jauh melebihi rencana dimana karena kondisi pandemi COVID-19 pelaksanaan kegiatan lebih banyak dilaksanakan dengan metode *online* sehingga dapat mengikutsertakan lebih banyak peserta tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

The realization of training costs in 2021 was a decrease compared to the realization of training costs in 2020 due to the COVID-19 pandemic conditions where the implementation of training activities was limited and what was originally a classical training method (face-to-face) switched to online classes so that there was a decrease in the realization of training costs in 2020. This is in contrast to the realization of participants which far exceeded the plan, where due to the COVID-19 pandemic conditions, most of the activities were carried out online so that more participants could be included without having to spend a lot of money.

Target Ke Depan

Manajemen Bank Riau Kepri telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk tahun 2022 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi perekonomian di tahun 2022, baik dari segi makro maupun mikro.

Future Targets

The management of Bank Riau Kepri has prepared a Bank Business Plan for 2022 by considering current economic conditions and economic projections in 2022, both in terms of macro and micro.

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi
Table of Assumptions in Compiling Projections

(dalam %) *(in %)*

Asumsi	2022	*Assumption*
ASUMSI MAKRO		
Pertumbuhan PDB	4,6% - 5,4%	*GDP growth*
Inflasi	3,0% ± 1%	*Inflation*
Kurs IDR/USD	Rp.14.900 - Rp.15.300	*IDR/USD Rates*
BI 7 Days Rate	3,50%	*BI 7 Days Rate*
ASUMSI MIKRO		*MICRO ASSUMPTION*
Pertumbuhan kredit	7% - 9%	*Credit growth*
Pertumbuhan dana pihak ketiga	9% -10%	*Growth of third party funds*
Tingkat bunga simpanan-tabungan	0%-2%	*Interest rate on savings*
Tingkat bunga kredit ritel komersial	5,25%-14%	*Commercial retail loan interest rate*

Sumber: Rencana Bisnis Bank Riau Kepri

Berdasarkan kondisi makro dan mikro pada tahun 2021 dan asumsi perbankan di tahun 2022, maka disusun proyeksi sebagai berikut

Based on macro and micro conditions in 2021 and banking assumptions in 2022, the following projections are prepared:

Proyeksi Keuangan Tahun 2022

Financial Projection for 2022

Tabel Proyeksi Keuangan 2022
Financial Projection Table 2022

Uraian	Proyeksi 2022	*Description*
(1)	(2)	
Posisi Keuangan		*Financial Position*
Aset	32.000.000	*Asset*
Kredit yang diberikan	19.800.000	*Credit granted*
Dana Pihak Ketiga	24.749.999	*Third-party funds*
Giro	4.535.514	*Current Account*
Tabungan	7.845.862	*Savings*
Deposito	12.368.623	*Deposit*
Laba Rugi		*Profit and loss*
Pendapatan bunga	2.196.535	*Interest income*
Beban bunga	756.429	*Interest expense*
Pendapatan (beban) bunga bersih	1.440.106	*Net interest income (expense)*
Pendapatan (beban) operasional selain bunga	897.305	*Operating income (expenses) other than interest*
Laba (rugi) tahun berjalan (setelah pajak)	390.000	*Income for the year*
Rasio Keuangan (%)		*Financial Ratio (%)*
Capital Adequacy Ratio (CAR)	22,45	*Capital Adequacy Ratio (CAR)*
Non Perfoming Loan (NPL) Gross	2,67	*Non-Performing Loan (NPL) Gross*
Non Perfoming Loan (NPL) Net	1,00	*Non-Performing Loan (NPL) Net*
Return on Assets (RoA)	1,72	*Return on Assets (RoA)*
Return on Equity (RoE)	12,60	*Return on Equity (RoE)*
Net Interest Margin (NIM)	5,26	*Net Interest Margin (NIM)*
Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)	77,51	*Operating Costs Operating Income (BOPO)*

Proyeksi Pemasaran Tahun 2022

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru Bank Riau Kepri tahun 2022 disajikan sebagai berikut

Marketing Projection for 2022

The plan for the issuance of new products and/or implementation of Bank Riau Kepri activities in 2022 is presented as follows

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Comparison Table of Marketing Targets and Realizations

No	Produk	Deskripsi	*Description*
Produk Bank dasar baru			
1	*Buyer Financing*	merupakan pemberian fasilitas kepada Buyer (nasabah) melalui mekanisme penjaminan pembayaran kepada supplier. Dimana penjaminan menggunakan Akad Kafalah bil Ujrah.	*is the provision of facilities to Buyers (customers) through a payment guarantee mechanism to suppliers. Where the guarantee uses the Kafalah bil Ujrah contract.*
2	*Supplier Financing*	merupakan pemberian fasilitas kepada Supplier (nasabah) dengan akad wakalah bil ujrah dimana Bank menerima kuasa dari Supplier untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen perdagangan dan penagihan piutang kepada Buyer. Bank dapat memberikan dana talangan (*Qardh*) dan akad tersebut tidak boleh terkait dengan wakalah bil ujrah.	*is the provision of facilities to the Supplier (customer) with a wakalah bil ujrah contract where the Bank receives the power of attorney from the Supplier to manage trade documents and collect receivables from the Buyer. Banks can provide bailout funds (Qardh) and the contract may not be related to wakalah bil ujrah.*
3	Negosiasi Wesel Ekspor	Dengan menggunakan Akad "Wakalah Bil Ujrah", dimana Bank menerima kuasa dari Supplier (Nasabah) untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen perdagangan dengan underlying L/C, SKBDN (*Documentary Credit*) dan penagihan piutang. Atas penagihan piutang tersebut Bank mendapatkan imbalan berupa ujrah/ fee. Dalam mempercepat arus kas, Supplier (Nasabah) juga dapat mengajukan pemberian pembiayaan/dana talangan (*qardh*) untuk membantu likuiditasnya. Dalam pelaksanaannya tidak boleh terdapat kaitan (ta'alluq) antara Akad Wakalah Bil Ujrah dan Akad Qardh, dimana penggunaan Akad Wakalah Bil Ujrah dilakukan terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh Akad Qardh	*By using the "Wakalah Bil Ujrah" Contract, where the Bank receives the power of attorney from the Supplier (Customer) to manage trade documents with underlying L/C, SKBDN (Documentary Credit) and collection of receivables. For the collection of the receivables, the Bank will receive compensation in the form of ujrah/fee. In accelerating cash flow, suppliers (customers) can also apply for financing/ bridging funds (qardh) to help with liquidity. In its implementation, there should be no link (ta'alluq) between the Wakalah Bil Ujrah contract and the Qardh contract, where the use of the Wakalah Bil Ujrah contract is carried out first which is then followed by the Qardh contract.*
Produk Bank lanjutan baru			
1	*Quick Response Indonesia Standard* (QRIS)	Fasilitas layanan yang diberikan kepada Nasabah Bank untuk melakukan transaksi pembayaran QRIS melalui aplikasi BRK mobile (*as issuer*) dan layanan penerimaan transaksi pembayaran QRIS bagi Merchant BRK QRIS (*as acquirer*)	*Service facilities provided to Bank Customers to conduct QRIS payment transactions through the BRK mobile application (as issuer) and QRIS payment transaction acceptance services for BRK QRIS Merchant (as acquirer)*
2	*Fitur Web QRIS Payment*	Pengembangan fitur untuk beberapa katergori merchant seperti : - Multi Cashier - Pembayaran BPHTB - Pembayaran restribusi - Pembayaran PDAM - Pembayaran Universitas - Pembayaran RS	*Feature development for several merchant categories such as:* *- Multi Cashier* *- BPHTB Payment* *- Payment of retribution* *- PDAM Payment* *- University Payment* *- RS Payment*
3	Layanan *Cross Border* ATM Service Al-Rajhi	Sebagai sarana memudahkan dalam bertransaksi yang dapat diakses oleh nasabah tanpa harus membawa uang tunai (*Cashless Money*) pada merchant-merchant yang telah berkerjasama	*As a means of facilitating transactions that can be accessed by customers without having to carry cash (Cashless Money) at collaborating merchants*
4	Pembiayaan melalui *fintech*	Wujud kerja sama dengan *fintech* dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada *fintech* untuk selanjutnya disalurkan kepada calon debitur.	*The form of cooperation with fintech is in the form of financing distribution to fintech to be further distributed to prospective debtors.*

Proyeksi Pengembangan SDM Tahun 2022

Transformasi organisasi menjadi perbankan syariah nasional perlu didukung penguatan Sumber Daya Insani (SDI) organisasi. Pendidikan dan pelatihan didorong agar seluruh pegawai kompeten sebagai SDI perbankan syariah dan sejalan dengan visi, misi dan strategi organisasi. Bank menyadari bahwa SDI merupakan faktor terpenting dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk itu, Bank menempatkan pegawai sebagai mitra strategis dalam menjalankan Rencana Bisnis Bank. Di sisi lain, pengembangan SDI dilakukan dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan kemampuan yang dimiliki dalam merespon tantangan dalam industri perbankan, yang pada saat bersamaan berupaya menyesuaikan diri terhadap kebutuhan nasabah yang dinamis dan kritis.

Inisiatif strategis pengembangan SDI untuk tahun 2022 difokuskan pada program:

1. Penyempurnaan BPP Kepegawaian
2. Rekrutmen Pegawai
3. Perubahan Status PTT *Core* menjadi Pegawai Tetap *Core*
4. Perubahan Status PTT non *Core* menjadi Pegawai Tetap
5. Program Assesment Pegawai
6. Implementasi Program *Work Load Analysis* (WLA)
7. Review Kebijakan Pembelajaran Daring
8. Kajian *Corporate University* BRK Syariah
9. Training Need Analysis Pegawai yang selaras dengan BUS

HR Development Projection in 2022

Organizational transformation into national Islamic banking needs to be supported by strengthening the organization's Human Resources (SDI). Education and training are encouraged so that all employees are competent as Islamic banking human resources and are in line with the vision, mission and strategy of the organization. The Bank realizes that HR is the most important factor in achieving sustainable growth. For this reason, the Bank places employees as strategic partners in carrying out the Bank's Business Plan. On the other hand, HR development is carried out by mobilizing all available resources and capabilities in responding to challenges in the banking industry, while at the same time trying to adapt to dynamic and critical customer needs.

SDI development strategic initiatives for 2022 are focused on the program:

1. *Completion of Personnel BPP*
2. *Employee Recruitment*
3. *Changes in PTT Core Status to Core Permanent Employees*
4. *Change of Non-Core PTT Status to Permanent Employee*
5. *Employee Assessment Program*
6. *Implementation of Work Load Analysis (WLA) Program*
7. *Online Learning Policy Review*
8. *BRK Syariah Corporate University Study*
9. *Employee Training Need Analysis in line with BUS*

Tabel Rencana Pengembangan SDM Tahun 2022
Table of HR Development Plans for 2022

(dalam orang)
(in person)

Uraian	Proyeksi 2022	*Description*
Jumlah pegawai	2252	*Number of employees*

Tabel Rencana Biaya Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2022
Table of Education and Training Cost Plans for 2022

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian	Proyeksi 2022	*Description*
Total biaya pendidikan dan pelatihan (diklat)	Rp25.886	*Total cost of education and training (training)*

Informasi Dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan

Pemulihan ekonomi global diprakirakan berlanjut di tengah kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron, tekanan inflasi yang tinggi, dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral. Perekonomian domestik diprakirakan tumbuh lebih tinggi pada 2022. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik. Nilai tukar Rupiah terjaga didukung oleh langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan ketahanan sektor eksternal Indonesia, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut. Inflasi 2021 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian. Kondisi likuiditas longgar didorong kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang longgar mendorong suku bunga kredit perbankan dalam tren terus menurun

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap. Bank Indonesia akan melanjutkan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi dan mempercepat pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif.

Atas pertimbangan berbagai asesmen tersebut, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Januari 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-*Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan serta upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat

Perekonomian domestik diprakirakan tumbuh lebih tinggi pada 2022. Perkembangan indikator ekonomi pada Desember 2021 mengindikasikan akselerasi proses pemulihan, antara lain mobilitas masyarakat, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2021 diprakirakan tetap berada dalam kisaran 3,2-4,0%. Pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat ke kisaran 4,7-5,5% pada 2022, sejalan dengan akselerasi konsumsi swasta dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal Pemerintah dan ekspor, meski risiko kenaikan kasus Covid-19 perlu terus

Material Information and Facts After the Date of the Accountant's Report

Until the end of the Annual Report, there is no description of significant events after the date of the accountant's report including their impact on future business performance and risks.

Business Prospects and Future Strategies

The global economic recovery is predicted to continue amid the increase in cases of the Omicron variant of the Covid-19 virus, high inflationary pressures, and accelerated normalization of monetary policy at several central banks. The domestic economy is forecasted to grow at a higher rate in 2022. Indonesia's Balance of Payments (BOP) is predicted to remain favorable. The Rupiah exchange rate was maintained, supported by Bank Indonesia's stabilization measures and the resilience of Indonesia's external sector, amidst continued uncertainty in global financial markets. Inflation in 2021 remains low and supports economic stability. The loose liquidity condition was driven by accommodative monetary policy and the impact of the synergy between Bank Indonesia and the Government in supporting the recovery of the national economy. Monetary policy interest rates that remain low and loose liquidity have pushed bank lending rates on a downward trend

Financial system resilience was maintained and banking intermediation continued to improve gradually. Bank Indonesia will continue to digitize the payment system to promote economic recovery and accelerate the establishment of an inclusive digital economy and finance ecosystem.

Based on the consideration of these various assessments, the Board of Governors Meeting (RDG) of Bank Indonesia on 19-20 January 2022 decided to maintain the BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) at 3.50%, the Deposit Facility interest rate at 2.75%, and Lending Facility interest rate is 4.25%. This decision is in line with the need to maintain stability in inflation, exchange rates, and the financial system as well as efforts to support economic growth, amidst mounting external pressures.

The domestic economy is forecasted to grow even higher in 2022. Developments in economic indicators in December 2021 indicate an accelerated recovery process, including public mobility, retail sales, and consumer confidence. Overall, economic growth in 2021 is predicted to remain in the range of 3.2-4.0%. Economic growth is forecasted to increase to the range of 4.7-5.5% in 2022, in line with the acceleration of private consumption and investment, while the Government's fiscal spending and exports are maintained, although the risk of an increase in Covid-19 cases requires continued vigilance. This forecast is supported

diwaspadai. Prakiraan tersebut didukung oleh mobilitas yang terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi

Sumber: Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2021, Bank Indonesia

Berdasarkan kondisi tersebut, Bank Riau Kepri memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki Bank Riau Kepri antara lain sebagai berikut:

a. Stabilitas Industri Perbankan Indonesia
   Indikator stabilitas industri perbankan terjaga dan menurut Bank Indonesia cukup kuat untuk menahan efek perubahan indikator makroekonomi global, seperti kemungkinan tappering oleh bank sentral Amerika Serikat, dengan cadangan devisa yang cukup besar dan BI 7DRR stabil pada level 3,5% yang merupakan BI 7DRR paling rendah dalam 3 tahun terakhir.
b. *Market Share* Industri Keuangan Syariah dan Tren Industri Halal Global
   1. Market share Aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) terhadap total Aset Bank Umum di Indonesia memperlihatkan tren peningkatan dari 5,79% pada tahun 2017 menjadi 6,55% pada Juni 2021;
   2. Laporan *State of Global Islamic Economy Report* 2020/2021 (Salaam Gateway, 2021) menyebutkan bahwa terdapat 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal secara global dengan pengeluaran mencapai USD$2,2 triliun per tahun, di mana 12,7% populasi muslim dunia berada di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai prospek pasar tujuan sekaligus produsen produk halal yang potensial, yang membutuhkan dukungan lembaga keuangan, baik dari sisi pembiayaan, maupun fasilitas dan layanan transaksi keuangan yang handal.
c. Kebijakan Pemerintah yang Mendorong Perbankan Syariah
   1. Pemerintah berkomitmen mendorong terciptanya kesetaraan perlakuan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah, dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang salah satu tugasnya adalah mengembangkan industri keuangan syariah.
   2. Melalui *roadmap* pengembangan perbankan Indonesia dan roadmap pengembangan perbankan syariah Indonesia, OJK memberikan dukungan untuk menjadikan BPD sebagai bank yang memiliki daya saing, dalam bentuk usaha konvensional atau syariah.
d. Profitabilitas Industri Perbankan
   1. Perkembangan perbankan konvensional dan syariah di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau menunjukkan trend yang positif;
   2. Pemanfaatan daerah dan aktivitas pariwisata di Riau Kepri memungkinkan bagi Bank Riau Kepri untuk mengembangkan transaksi *money changer* dan *remittance*;

by mobility which continues to increase in line with the acceleration of vaccination.

Source: Monetary Policy Report Quarter IV 2021, Bank Indonesia

Based on these conditions, Bank Riau Kepri has the opportunity to grow. Opportunities owned by Bank Riau Kepri include the following:

a. Stability of the Indonesian Banking Industry
   The banking industry stability indicators are maintained and according to Bank Indonesia are strong enough to withstand the effects of changes in global macroeconomic indicators, such as the possibility of tapering by the United States central bank, with large foreign exchange reserves and stable BI 7DRR at 3.5%, which is the lowest BI 7DRR. in the last 3 years.

b. Market Share of the Islamic Finance Industry and Global Halal Industry Trends
   1. Market share of Sharia Commercial Bank Assets (BUS) and Sharia Business Unit (UUS) to total Commercial Bank Assets in Indonesia shows an increasing trend from 5.79% in 2017 to 6.55% in June 2021;

   2. The State of Global Islamic Economy Report 2020/2021 (Salaam Gateway, 2021) reports that there are 1.8 billion Muslim residents who are consumers of the halal industry globally with expenditures reaching USD 2.2 trillion per year, of which 12.7% of the population the world's Muslims are in Indonesia. This makes Indonesia a potential destination market prospect as well as a potential halal product producer, which requires the support of financial institutions, both in terms of financing, as well as reliable financial transaction facilities and services.

c. Government Policies Encouraging Sharia Banking

   1. The government is committed to encouraging the creation of equal treatment between Conventional Banks and Islamic Banks, by establishing the National Committee for Islamic Economics and Finance (KNEKS) which one of its duties is to develop the Islamic finance industry.
   2. Through the Indonesian banking development roadmap and the Indonesian sharia banking development roadmap, OJK provides support to make BPD a competitive bank, in the form of conventional or sharia businesses.

d. Banking Industry Profitability
   1. The development of conventional and sharia banking in Riau Province and Riau Islands shows a positive trend;
   2. Regional utilization and tourism activities in Riau Kepri make it possible for Bank Riau Kepri to develop money changer and remittance transactions;

3. Kredit yang diberikan kepada ASN belum digarap secara maksimal, sehingga perlu meningkatan volume kredit dan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara;
4. Pembukaan cabang di luar Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
5. Potensi bisnis devisa di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

e. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
1. Berdasarkan kontribusi, PDRB Provinsi Riau memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Sumatera;
2. Perkembangan industri halal. Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata dari mancanegara kedua setelah Bali dan berbagai penghargaan banyak di dapat oleh Provinsi Kepulauan Riau. Di samping itu, Provinsi Riau juga dicanangkan sebagai halal destination dan pusat halal tourism. Hal ini dapat memacu berkembangnya peluang industri daerah menjadi industri halal. Bank Riau Kepri dapat memanfaatkan peluang ini, terutama dengan menjadi penyokong utama pemerintah dearah dalam mengembangkan berbagai potensi ekonomi dengan jenis usaha yang berlabel halal;
3. Pengembangan potensi pasar di luar ASN seperti, pembiayaan di bidang infrastruktur dan juga pembiayaan ekspor impor;

f. Perluasan Pasar Industri dengan Industri Unggulan Daerah dengan NPL Wajar
1. Adanya sektor ekonomi yang stabil seperti pertanian (khususnya industri sawit) yang ber NPL wajar ;
2. Provinsi Riau telah menjadi salah satu hub bisnis di sumatera.

g. Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
1. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau pada tahun 2019 sebesar 61,49 berada di bawah Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata provinsi se-Indonesia sebesar 63,70.
2. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 sebesar 67,98 berada di atas Indeks Reformasi Birokrasi rata-rata provinsi se-Indonesia sebesar 63,70.

Berdasarkan asumsi yang telah dijabarkan di atas disertai adanya berbagai peluang, Bank Riau Kepri optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang. Dengan kata lain, Bank Riau Kepri memiliki prospek usaha yang sangat baik. Hal ini di dasarkan pada kekuatan yang dimiliki oleh Bank Riau Kepri yaitu:

a. Aset
1. Pangsa pasar aset Bank Riau Kepri adalah sebesar 15,23%. Proporsi ini diperkirakan sepadan dengan bank pembanding, dan lebih tinggi dari perbandingan jumlah kantor cabang Bank Riau Kepri dengan jumlah kantor cabang bank umum di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang sebesar 13,82%. (posisi juni 2021)

3. Credit given to ASN has not been worked out optimally, so it is necessary to increase the volume of credit and services to the State Civil Apparatus;

4. Opening of branches outside Riau Province and Riau Archipelago Province;
5. Foreign exchange business potential in Riau Province and Riau Islands Province.

e. Regional Economic Growth
1. Based on the contribution, the GRDP of Riau Province has the second largest contribution to the economy of Sumatra;
2. Halal industry development. Riau Islands Province is the second gateway for foreign tourists after Bali and many awards have been received by the Riau Islands Province. In addition, Riau Province is also proclaimed as a halal destination and center for halal tourism. This can spur the development of regional industrial opportunities into halal industries. Bank Riau Kepri can take advantage of this opportunity, especially by being the main supporter of the regional government in developing various economic potentials with types of businesses that are labeled halal;

3. Development of market potential outside ASN such as financing in the infrastructure sector as well as export-import financing;

f. Expansion of the Industrial Market with Regional Leading Industries with Reasonable NPL
1. The existence of a stable economic sector such as agriculture (especially the palm oil industry) with reasonable NPLs;
2. Riau Province has become one of the business hubs in Sumatra.

g. Quality of Local Government Governance
1. The Bureaucratic Reform Index for Riau Province in 2019 was 61.49, which was below the average Bureaucratic Reform Index for all provinces in Indonesia of 63.70.
2. The Bureaucratic Reform Index for the Riau Islands Province in 2019 was 67.98, which was above the average Bureaucratic Reform Index for all provinces in Indonesia of 63.70.

Based on the assumptions described above along with various opportunities, Bank Riau Kepri is optimistic that it can continuously improve its performance in the long term. In other words, Bank Riau Kepri has very good business prospects. This is based on the strengths of Bank Riau Kepri, namely:

a. Asset
1. The market share of Bank Riau Kepri's assets is 15.23%. This proportion is estimated to be commensurate with the comparison bank, and higher than the comparison of the number of branch offices of Bank Riau Kepri with the number of branch offices of commercial banks in Riau Province and Riau Islands Province which amounted to 13.82%. (position June 2021)

2. Aset yang disumbangkan dari Bisnis Syariah cukup besar dan bertumbuh secara progresif, dari 9,13% pada 2017 menjadi 22,66% pada September 2021.

b. Dukungan Pemegang Saham
   1. RUPS Bank Riau Kepri pada tanggal 22 April 2019 memutuskan Bank Riau Kepri konversi menjadi bank Riau Kepri Syariah (Bank Umum Syariah/BUS);
   2. Dukungan pemegang saham dan pengurus merupakan modal utama dalam pengembangan Bank Riau Kepri. Pemegang saham berkomitmen untuk memastikan Bank Riau Kepri Syariah tetap sebagai bank bagi semua penduduk Riau dan Kepulauan Riau, dari latar belakang Agama atau etnis apapun. Begitu juga dengan pengurus Bank, secara umum manajemen Bank Riau Kepri sangat mendukung rencana konversi menjadi Bank Riau Kepri Syariah.
   3. Aspek pemodalan Bank Riau Kepri menunjukkan tren yang positif dengan peningkatan permodalan secara kumulatif pada tahun 2016 s/d 2020 sebesar 8,49% per tahun. Pertumbuhan permodalan menunjukkan keseriusan para pemilik terhadap pertumbuhan Bank Riau Kepri ke depan

c. Jaringan Layanan
   Bank Riau Kepri memiliki 21 Kantor Cabang. Total Kantor Cabang Bank Umum di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau adalah 152 (SPI Juli 2021), sehingga market share Bank Riau Kepri adalah sebesar 13,82%.

Sebagaimana tertuang di dalam Corporate Plan Bank Riau Kepri Syariah tahun 2022-2026, Bank Riau Kepri mentransformasikan diri " Mewujudkan Bank Syariah yang Inklusif, Resilient dan Modern Pilihan Utama Masyarakat yang Berkontribusi Signifikan Terhadap Pembangunan Daerah Berkelanjutan".

Bagan berikut menggambarkan kebijakan manajemen dan kerangka kerja Bank.

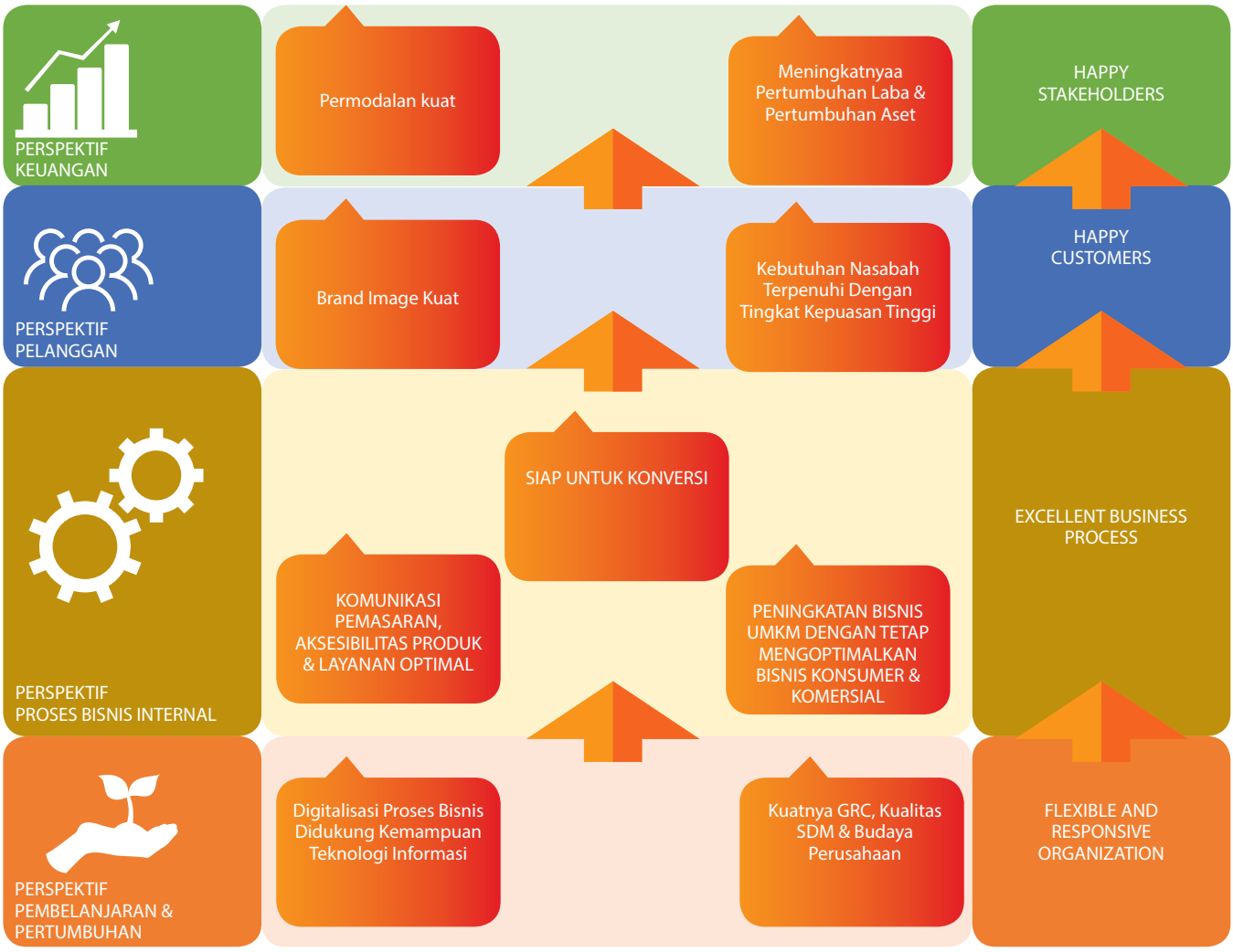
2. The assets donated from the Sharia Business are quite large and are growing progressively, from 9.13% in 2017 to 22.66% in September 2021.

b. Shareholder Support
   1. The GMS of Bank Riau Kepri on April 22, 2019 decided that Bank Riau Kepri was converted into a Riau Kepri Syariah bank (Islamic Commercial Bank/BUS);
   2. The support of shareholders and management is the main capital in the development of Bank Riau Kepri. Shareholders are committed to ensuring that Bank Riau Kepri Syariah remains a bank for all residents of Riau and Riau Islands, regardless of religion or ethnic background. Likewise with the bank's management, in general the management of Bank Riau Kepri strongly supports the conversion plan to become Bank Riau Kepri Syariah.
   3. The capital aspect of Bank Riau Kepri shows a positive trend with a cumulative increase in capital from 2016 to 2020 of 8.49% per year. Capital growth shows the seriousness of the owners towards the growth of Bank Riau Kepri in the future

c. Service Network
   Bank Riau Kepri has 21 Branch Offices. The total number of Commercial Bank Branch Offices in Riau Province and Riau Islands Province is 152 (SPI July 2021), so the market share of Bank Riau Kepri is 13.82%.

As stated in the Corporate Plan of Bank Riau Kepri Syariah for 2021-2025, Bank Riau Kepri is transforming itself "Creating an Inclusive, Resilient and Modern Islamic Bank the Main Choice of the Community that Contributes Significantly to Sustainable Regional Development".

The following chart illustrates the Bank's management policies and framework.



Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Insani (SDI) Berlandaskan Prinsip Syariah, meliputi:

1. Siap untuk Konversi (Pra dan Pasca)
2. Kuatnya GRC, SDM dan budaya perusahaan
3. Digitalisasi proses bisnis yang didukung oleh kemampuan Teknologi Informasi
4. Peningkatan Bisnis UMKM dengan tetap mengoptimalkan bisnis konsumtif & komersial
5. Komunikasi pemasaran, aksesibilitas produk dan layanan (Tangible dan Intangible) optimalnd image kuat
6. *Brand image* kuat
7. Kepuasan nasabah terpenuhi dengan tingkat kepuasaan tinggi
8. Pemodalan kuat
9. Meningkat perolehan laba dan pertumbuhan aset

Sasaran strategis Bank Riau Kepri dirangkai dalam hubungan sebab-akibat menjadi peta strategi Bank Riau Kepri. Sebagaimana dalam prinsip implementasi Balanced

Organizational Management and Human Resources (SDI) Based on Sharia Principles, including:

1. *Ready for Conversion (Pre and Post)*
2. *Strong GRC, HR and corporate culture*
3. *Digitizing business processes supported by Information Technology capabilities*
4. *MSME Business Improvement while still optimizing the consumptive & commercial business*
5. *Marketing communication, accessibility of products and services (Tangible and Intangible) optimal and strong image*
6. *Strong brand image*
7. *Customer satisfaction is met with a high level of satisfaction*
8. *Strong investment*
9. *Increase profit and asset growth*

The strategic objectives of Bank Riau Kepri are arranged in a cause-and-effect relationship to become a strategic map for Bank Riau Kepri. As in the principle of implementing

Scorecard, Peta Strategi Bank Riau Kepri mencakup 4 (empat) perspektif, yaitu :

1. Perspektif Keuangan (Financial), menunjukkan bagaimana Bank memberikan nilai kepada pelanggan yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan laba yang berkelanjutan dan pada saat yang sama mengendalikan biaya operasional. Di sisi lain perlunya menjaga ketahanan kelembagaan dengan memperkuat permodalan bank.

2. Perspektif Pelanggan (Customer), menunjukkan bagaimana proses value proposition bank dinilai oleh pelanggan. Lebih lanjut diterjemahkan bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau terpuaskan dan terpenuhi kebutuhan perbankannya. Proses value creation ini akan berujung pada tingkat keberhasilan Bank dalam bentuk customer acquisition, customer retention, dan market share.

3. Perspektif Proses Bisnis (Internal Business Process), menjabarkan sasaran strategis yang ingin dicapai Bank Riau Kepri dari proses-proses internal berlangsung. Pada perspektif ini ingin dicapai suatu kondisi excellent bisnis proses yang mampu meningkatkan performa bisnis bank.

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning & Growth), mewakili basis dari pengelolan organisasi, mulai dari SDM, culture, leadership hingga kesiapan IT. Target yang ingin dicapai adalah dicapainya suatu kondisi organisasi yang responsive dan flexible dalam menghadapi tantangan kedepan.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Penerapan Kebijakan Pembagian Dividen Bank Riau Kepri sebagai berikut:

1. Membayarkan dividen tunai minimum 50% dari laba bersih setiap tahunnya, yang besarnya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi .
2. Keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Bank Riau Kepri setelah memperoleh persetujuan RUPS.

the Balanced Scorecard, the Bank Riau Kepri Strategy Map includes 4 (four) perspectives, namely:

1. *Financial Perspective (Financial), shows how the Bank provides value to customers which has an impact on increasing revenue and sustainable profit while controlling operational costs. On the other hand, it is necessary to maintain institutional resilience by strengthening bank capital.*

2. *Customer Perspective, shows how the bank's value proposition process is assessed by customers. It is further translated how the community and local government in Riau Province and Riau Islands Province are satisfied and their banking needs are met. This value creation process will lead to the Bank's success rate in the form of customer acquisition, customer retention, and market share.*

3. *The Business Process Perspective (Internal Business Process), describes the strategic goals to be achieved by Bank Riau Kepri from ongoing internal processes. From this perspective, we want to achieve an excellent business process condition that is able to improve the bank's business performance.*

4. *Learning and Growth Perspective, representing the basis of organizational management, ranging from HR, culture, leadership to IT readiness. The target to be achieved is to achieve an organizational condition that is responsive and flexible in facing future challenges.*

Dividend Policy, Announcement and Payment

The implementation of the Bank Riau Kepri Dividend Distribution Policy is as follows:

1. *Pay a minimum cash dividend of 50% of net profit annually, the amount of which will be decided through the GMS based on the recommendation of the Board of Directors.*
2. *The decision to pay dividends depends on profit, financial condition and liquidity, compliance with laws and regulations and other factors deemed relevant by the Board of Directors of Bank Riau Kepri after obtaining approval from the GMS.*

Tabel Komposisi Pembagian Laba
Profit Sharing Composition Table

Pembagian Laba	Tahun Buku 2020	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018
Dividen Tunai	60%	60%	60%
Dividen Saham	0%	0%	0%
Cadangan umum	40%	40%	40%
Jumlah Laba yang dibagikan	100%	100%	100%

Adapun pembagian deviden selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah ditetapkan sebagai berikut:

The dividend distribution for the last 3 (three) years has been determined as follows:

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2018-2020
Table of Announcement and Payment of Dividends for Fiscal Year 2018-2020

Uraian	Tahun Buku 2020	Tahun Buku 2019	Tahun Buku 2018
Laba (Rugi) Bersih	463.969.639.304	309.023.245.178	342.321.781.934
Laba (Rugi) per Lembar Saham	42.561	28.743	32.165
Jumlah Dividen Tunai	278.381.783.582	185.413.947.107	205.393.069.160
Jumlah Dividen Saham	0	0	0
Cadangan Umum	185.587.855.722	123.609.298.071	136.928.712.774
Dividend Payout Ratio	60%	60%	60%
Tanggal Pembayaran	05 Juli 2021	17 Juli 2020	26 Agustus 2019
Tanggal Pengumuman	18 Juni 2021	08 Juli 2020	19 Agustus 2019

Program Kepemilikan Saham Oleh Pegawai dan/Atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Bank Riau Kepri bukan merupakan Bank yang mencatatkan saham nya di bursa efek, sehingga Bank Riau Kepri tidak memiliki program *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan Management Stock Ownership Program (MSOP). Oleh karena itu, Bank Riau Kepri tidak menyampaikan tentang jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; jangka waktu; persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan harga exercise.

Employee and/or Management Share Ownership Program (ESOP/MSOP)

Bank Riau Kepri is not a bank that lists its shares on the stock exchange, so Bank Riau Kepri does not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) and a Management Stock Ownership Program (MSOP). Therefore, Bank Riau Kepri did not convey the number of ESOP/MSOP shares and their realization; period of time; requirements for eligible employees and/or management; and exercise price.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Sampai dengan akhir tahun 2021, Bank belum melakukan penawaran umum saham maupun obligasi ke publik melalui pasar modal. Oleh karena itu, Bank tidak menyajikan informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, yang meliputi total perolehan dana; rencana penggunaan dana; rincian penggunaan dana; saldo dana; dan tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.

Realization of Use of Proceeds from Public Offering

Until the end of 2021, the Bank has not made a public offering of shares or bonds to the public through the capital market. Therefore, the Bank does not provide information on the realization of the use of proceeds from the public offering, which includes the total proceeds; plan for the use of funds; details of the use of funds; fund balance; and the date of approval of the GMS/RUPO for changes in the use of funds.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Transaksi material adalah setiap penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; sewa menyewa aset; pinjam meminjam dana; menjaminkan aset; dan/atau memberikan jaminan perusahaan; dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Transaksi Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Afiliasi

Afiliasi, adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Transaksi Afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan (Bapepam LK Nomor: Kep-412/BL/2009).

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori transaksi afiliasi.

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated

Material transaction is any participation in certain business entities, projects, and/or business activities; purchase, sale, transfer, exchange of assets or business segments; lease of assets; borrow and borrow funds; pledge assets; and/or provide company guarantees; with a value of 20% (twenty percent) or more of the Company's equity carried out in one time or in a series of transactions for a specific purpose or activity (Bapepam LK Number: Kep-412/BL/2009).

Conflict of Interest Transactions

Conflict of Interest is the difference between the economic interests of the Company and the personal economic interests of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders that may harm the Company (Bapepam LK Number: Kep-412/BL/2009).

Throughout 2021, there were no transactions containing conflicts of interest.

Affiliate Transaction

Affiliates, are:

1. *Family relations due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically;*
2. *The relationship between the Party and the employee, Director, or Commissioner of that Party;*
3. *Relationship between 2 (two) companies where there is one or more members of the same Board of Directors or Board of Commissioners;*
4. *The relationship between the Company and the Party, either directly or indirectly, controls or is controlled by the company;*
5. *Relationship between 2 (two) Companies that are controlled, either directly or indirectly, by the same Party; or*
6. *Relationship between the Company and Major Shareholders.*

Affiliated Transactions are Transactions carried out by the Company or Controlled Company with Affiliates of the Company or Affiliates of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or major shareholders of the Company (Bapepam LK Number: Kep-412/BL/2009).

Throughout 2021, there were no transactions that met the affiliated transaction category.

Transaksi Pihak Berelasi

1. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sesuai dengan PSAK 7 (Penyesuaian 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak berelasi", yang dimaksud dengan Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:
   a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
      - Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor; atau
      - Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
      - Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
   b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:
      Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
      - Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
      - Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
      - Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
      - Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
      - Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
      - Orang yang diidentifikasi huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas personil manajemen kunci entitas (entitas induk dari entitas).

      Semua transaksi yang jumlahnya signifikan dengan pihak berelasi, ba ik yang dilakukan dengan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan Pihak berelasi, maupun tidak, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

      Berdasarkan PSAK 7 (Penyesuaian 2015), transaksi antara bank dengan pemerintah, BUMN lainnya dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki, atau dikendalikan negara, termasuk Lembaga Penjamin Simpanan tidak dikategorikan sebagai transaksi dengan pihak berelasi.

Related Party Transactions

1. *Based on the Statement of Financial Accounting Standards. In accordance with PSAK 7 (2015 Adjustment) concerning "Related Party Disclosures", what is meant by a related party is a person or entity that is related to the reporting entity as follows:*
   a. *The person or the closest family member has a relationship with the reporting entity if that person:*
      - *Have control or joint control over the reporting entity; or*
      - *Has significant influence over the reporting entity; or*
      - *Is a key management personnel of the reporting entity or the parent of the reporting entity.*
   b. *An entity is related to a reporting entity if one of the following conditions is met:*
      The entity and the reporting entity are members of the same business group (meaning that the parent, subsidiary and subsequent subsidiaries are related to other entities).
      - *An entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture of a member of a business group, of which the other entity is a member).*
      - *The two entities are joint ventures of the same third party.*
      - *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of a third entity.*
      - *The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity.*
      - *An entity that is controlled or jointly controlled by the person identified in (a).*
      - *The person identified in (a) (i) has significant influence over the key management personnel of the entity (parent entity of the entity).*

      All significant transactions with related parties, whether carried out on normal terms, as with related parties, or not, have been disclosed in the financial statements.

      Based on PSAK 7 (2015 Adjustment), transactions between banks and the government, other SOEs and companies owned, or controlled by the state, including the Deposit Insurance Corporation are not categorized as transactions with related parties.

2. Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 Entitas yang berelasi dengan pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham dari entitas.

   Pihak yang bukan merupakan pihak berelasi adalah sebagai berikut:
   a. Dua entitas hanya karena memiliki Direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh sifnifikan atas entitas lain.
   b. Dua venturer hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.
   c. Penyandang dana, Serikat Dagang, Entitas Pelayanan Publik, Serta Kementerian dan Instansi Pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, hanya karena ada keharusan (*simply by virtue*) dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas (meskipun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan).
   d. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor, atau agen umum yang mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan yang hanya disebabkan ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

2. Based on the Attachment to the Decree of the Chairman of Bapepam-LK No.Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 Entities related to the government are entities that are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the government. The government in this case is the Minister of Finance or the Regional Government which is the shareholder of the entity.

Parties that are not related parties are as follows:

a. Two entities simply because they have the same Director or key management personnel or because key management personnel from one entity have significant influence over the other entity.
b. Two venturers simply because they jointly control the joint venture.
c. Funders, Trade Unions, Public Service Entities, as well as Ministries and Government Agencies that do not control, jointly control or have significant influence over the reporting entity, simply because there is a necessity (simply by virtue) in carrying out normal affairs with the entity (even though these parties are may limit the entity's freedom or participate in the decision-making process).

d. Customers, suppliers, franchisees, distributors, or general agents who enter into business transactions with significant volumes only because of economic dependence caused by circumstances.

Nama Pihak yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

The Name of the Transactional Party and the Nature of the Relationship

In normal business activities, the Bank conducts transactions with related parties due to ownership and/or management relationships. All transactions with related parties have been carried out under mutually agreed policies and terms.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2018-2020
Table of Announcement and Payment of Dividends for Fiscal Year 2018-2020

No	Pihak – Pihak Berelasi *Related Parties*	Sifat Hubungan Istimewa *Nature of Special Relationship*	Transaksi *Transaction*
1	Provinsi Riau *Riau Province*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro dan deposito
2	Kabupaten Bengkalis *Bengkalis Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
3	Kabupaten Siak Sri Indrapura *Siak Sri Indrapura Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
4	Kabupaten Pelalawan *Pelalawan Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro dan deposito
5	Kabupaten Indragiri Hulu *Indragiri Hulu Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro dan deposito
6	Kabupaten Indragiri Hilir *Indragiri Hilir Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro dan deposito
7	Kota Pekanbaru *Pekanbaru City*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
8	Kota Dumai *Dumai City*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro dan deposito
9	Kabupaten Bintan *Bintan Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
10	Kabupaten Rokan Hilir *Rokan Hilir District*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro dan deposito
11	Kabupaten Kuantan Singingi *Kuantan Singingi Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
12	Kota Tanjung Pinang *Tanjung Pinang City*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
13	Kabupaten Kep. Meranti *Meranti Islands Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
14	Provinsi Kepulauan Riau *Riau Islands Province*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
15	Kabupaten Kampar *Kampar Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
16	Kabupaten Lingga *Lingga Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
17	Kabupaten Karimun *Karimun Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
18	Kota Batam *Batam city*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro dan simpanan deposito
19	Kabupaten Natuna *Natuna Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
20	Kabupaten Rokan Hulu *Rokan Hulu Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
21	Kabupaten Kepulauan Anambas *Anambas Islands Regency*	Pemegang saham *Shareholders*	Simpanan giro
22	Karyawan kunci	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Tabungan, deposito, dan kredit yang diberikan
23	PD. BPR Rokan Hilir	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan tabungan, simpanan giro
24	PD Tuah Sekata	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan giro, simpanan deposito
25	PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito
26	Riau Airlines	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan giro, simpanan deposito

No	Pihak – Pihak Berelasi *Related Parties*	Sifat Hubungan Istimewa *Nature of Special Relationship*	Transaksi *Transaction*
27	PT PER	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan giro
28	PD BPR Rohul	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan tabungan
29	PT Yastera	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan giro dan pinjaman
30	PD Rokan Hulu Jaya	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan tabungan, simpanan giro
31	BPR Karimun	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan tabungan, simpanan giro
32	BPR Dana Amanah	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama *Owned by the same ultimate shareholder*	Simpanan giro

Kewajaran Dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Bank melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan dengan Pemegang Saham dan/atau manajemen yang sama dengan Bank Riau Kepri. Kecuali pinjaman karyawan untuk karyawan kunci, transaksi tersebut terutama berhubungan dengan pinjam meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Fairness and Reasons for the Transaction

The Bank conducts business transactions with companies that have a relationship with the Shareholders and/or the same management as Bank Riau Kepri. Except for employee loans for key employees, these transactions mainly relate to borrowing and borrowing funds in the normal course of business and substantially have been carried out on normal terms as was done with unrelated parties. In normal business activities, the Bank conducts transactions with related parties due to ownership and/or management relationships. All transactions with related parties have been carried out under mutually agreed policies and terms.

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Berikut rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Realization of Related Party Transactions

The details of the balance of transactions with related parties as of December 31, 2021 and 2020 are described in the table as follows.

Tabel Realisasi Transaksi Pihak Berelasi
Table of Realization of Related Party Transactions

(dalam jutaan Rupiah)
(in million rupiah)

Uraian	2021	2020	*Description*
ASET			*ASSET*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah			*Disbursed loans and sharia financing*
Karyawan kunci	902	2.470	*Key employees*
% terhadap jumlah aset	0,0029%	0,0088%	*% of total assets*
LIABILITAS			*LIABILITY*
Simpanan nasabah			*Customer deposits*
Simpanan dari nasabah	4.108.669	2.087.399	*Deposits from customers*
% terhadap jumlah liabilitas	14,89%	8,31%	*% of total liability*
Simpanan bank lain			*Other bank deposits*
Simpanan dari bank lain	-	-	*Deposits from other banks*
% terhadap jumlah liabilitas	0,00%	0,00%	*% of total liability*

Simpanan dari nasabah tersebut merupakan simpanan dari manajemen kunci, Pemerintah Daerah dan Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama. Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sahamnya dimiliki oleh Pemegang Saham akhir yang sama.

Deposits from these customers are deposits from key management, local governments and companies whose shares are owned by the same ultimate shareholder. Deposits from other banks are deposits from Rural Banks (BPR) whose shares are owned by the same ultimate shareholders.

Kebijakan Mekanisme Reviu atas Transaksi dan Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Seluruh transaksi telah melalui mekanisme reviu sesuai dengan jenis transaksi. Setiap transaksi dilakukan analisis kelayakan transaksi antara lain analisis kredit untuk transaksi kredit yang diberikan kepada pihak berelasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian demikian pula untuk transaksi lainnya seperti simpanan tabungan, simpanan giro dan simpanan deposito. Bank Riau Kepri senantiasa berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang prudent. Seluruh transaksi telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Policy Review Mechanism for Transactions and Compliance with Related Regulations and Provisions

All transactions have gone through a review mechanism according to the type of transaction. For each transaction, a transaction feasibility analysis is carried out, including credit analysis for credit transactions granted to related parties while still taking into account the precautionary principle as well as for other transactions such as savings deposits, demand deposits and time deposits. Bank Riau Kepri is always committed to running a prudent business. All transactions have complied with the applicable rules and regulations.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Bank

Uraian perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya disajikan sebagai berikut.

Changes in Legislation and Its Impact on Banks

A description of the changes to laws and regulations and their impact is presented as follows.



Tabel Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2021
Table of Changes in Legislation 2021

No	Peraturan Perundang-Undangan *Legislation*	Pokok Pengaturan *Setting Points*	Dampak Kuantitatif dan/ atau Kualitatif Terhadap Bank Riau Kepri *Quantitative and/or Qualitative Impact on Bank Riau Kepri*	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan Bank Riau Kepri *Information on Adjustments Made by Bank Riau Kepri*
1	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020. *Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 dated April 14, 2020.*	Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Regarding Special Treatment for People's Business Credit Recipients Affected by the 2019 Corona Virus Disease Pandemic.*	Dampak Kuantitatif: - Target Kredit tahun 2020 (RBB) sebesar Rp18.442.757 juta. - Realisasi Kredit tahun 2020 sebesar Rp18.960.949 juta atau tumbuh 6,02%. Dampak Kualitatif: - Secara pertumbuhan kredit tahun 2020 tercapai sesuai target RBB yang telah ditetapkan. - Dapat menjaga kualitas kredit. *Quantitative Impact:* *- Credit target for 2020 (RBB) of IDR 18,442,757 million.* *- Credit realization in 2020 amounted to Rp18,960,949 million or grew by 6.02%.* *Qualitative Impact:* *- Credit growth in 2020 was achieved according to the RBB target that had been set.* *- Can maintain credit quality.*	Ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut telah dijalankan oleh Bank Riau Kepri berdasarkan ketentuan internal sebagai berikut: - SK Direksi Nomor 026/KEPDIR/2020 tanggal 07 April 2020 Tentang Kebijakan Kredit Atau Pembiayaan Terkait Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 PT Bank Riau Kepri. - SK Direksi Nomor 101/KEPDIR/2020 tanggal 29 Desember 2020 Tentang Perubahan Atas SK Direksi Nomor 26/KEPDIR/2020 Tentang Kebijakan Kredit Atau Pembiayaan Terkait Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 PT Bank Riau Kepri. - SE Direksi Nomor 033/SE/2020 tanggal 29 Mei 2020 Tentang Teknis Pelaksanaan Kebijakan Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). - SE Direksi Nomor 004/SE/2021 tanggal 10 Februari 2021 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR)/(KUR-iB) Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *The provisions of the Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia and the Regulation of the Financial Services Authority have been carried out by Bank Riau Kepri based on the following internal provisions:* *- Decree of the Board of Directors Number 026/KEPDIR/2020 dated April 7, 2020 concerning Credit or Financing Policy Regarding the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 PT Bank Riau Kepri.* *- Decree of the Board of Directors Number 101/KEPDIR/2020 dated December 29, 2020 concerning Amendments to Decree of the Board of Directors Number 26/KEPDIR/2020 concerning Credit or Financing Policy Regarding the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 PT Bank Riau Kepri.* *- SE Board of Directors Number 033/SE/2020 dated May 29, 2020 concerning Technical Implementation of Special Treatment Policy for People's Business Credit (KUR) Recipients Affected by Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).* *- SE Board of Directors Number 004/SE/2021 dated February 10, 2021 concerning Implementation of Special Treatment Policy for People's Business Credit (KUR)/(KUR-iB) Recipients Affected by Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).*
2	Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 06 Mei 2020. *Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number 8 of 2020 dated May 6, 2020.*	Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Regarding Amendments to the Regulation of the Coordinating Minister for the Economy Number 6 of 2020 concerning Special Treatment for People's Business Credit Recipients Affected by the 2019 Corona Virus Disease Pandemic.*		
3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.03/ 2020 tanggal 13 Maret 2020. *Financial Services Authority Regulation Number 11/ POJK.03/ 2020 dated March 13, 2020.*	Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. *Regarding the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the 2019 Coronavirus Disease Spread.*		
4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/ POJK.03/2020 tanggal 01 Desember 2020. *Financial Services Authority Regulation Number 48/ POJK.03/2020 dated December 01, 2020.*	Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. *Regarding Changes to Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the 2019 Coronavirus Disease Spread.*		

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2021, Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Bank telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan dalam rangka mematuhi PSAK yang berlaku yang relevan dengan operasi Bank. Terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku yang relevan dengan operasi Bank yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut.

PSAK 71: "INSTRUMEN KEUANGAN"

PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan", mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen. PSAK ini juga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur pelunasan dipercepat yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah terutang. Bank telah menerapkan PSAK 71 mulai 1 Januari 2020.

Aset Keuangan

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi hanya jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (solely payments of principal and interest) dari jumlah pokok terutang.

Berikut ini ikhtisar perubahan-perubahan penting:

- Kategori aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo (Held To Maturity/ HTM) dan tersedia untuk dijual (Available For Sale/AFS) telah dihilangkan.
- Kategori aset baru yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Fair Value Other Comprehensive Income/ FVOCI) diperkenalkan. Hal ini berlaku untuk instrumen utang dengan karakteristik arus kas kontraktual yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga dan dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.

Changes in Accounting Policies

On January 1, 2021, the Bank adopted a new Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) which is effective from that date. Changes to the Bank's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations. Changes in accounting policies are made in order to comply with the applicable PSAK that is relevant to the Bank's operations. There are new standards and adjustments or amendments to several standards that are still in force that are relevant to the Bank's operations which are effective as of that date, namely as follows.

PSAK 71: "FINANCIAL INSTRUMENTS"

PSAK No. 71, "Financial Instruments", regulates the classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of the entity's contractual cash flows and business model; the expected credit loss method for impairment that produces information that is more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedges that better reflect the entity's risk management by introducing more general requirements based on management's judgment. This PSAK also stipulates that financial assets with an early repayment feature that can result in negative compensation qualify as contractual cash flows originating from payments of principal and interest on amounts owed. The Bank has implemented PSAK 71 starting January 1, 2020.

Financial Assets

Financial assets are measured at amortized cost only if the following two conditions are met:

a. *Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows, and*
b. *The contractual terms of a financial asset that, on a certain date, increase the cash flows from the sole payments of principal and interest on the principal amount owed.*

Here's an overview of the important changes:

- *The categories of financial assets held to maturity (Held To Maturity/ HTM) and available for sale (Available For Sale/AFS) have been removed.*
- *A new category of assets measured at fair value through other comprehensive income (Fair Value Other Comprehensive Income (FVOCI) was introduced. This applies to debt instruments with contractual cash flow characteristics that are solely principal and interest payments and are held in a business model whose objectives are achieved by obtaining contractual cash flows and selling financial assets.*

- Kategori aset baru untuk investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan yang diukur pada FVOCI diperkenalkan.

A new asset category for non-traded equity investments measured at FVOCI was introduced.

Liabilitas Keuangan

Klasifikasi liabilitas keuangan Bank tidak berubah. Liabilitas keuangan tetap diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*Financial Liability at Amortised Cost*/ FLAC). Kriteria untuk menetapkan liabilitas keuangan di FLAC dengan menerapkan opsi nilai wajar juga tetap tidak berubah.

Financial Liabilities

The classification of the Bank's financial liabilities has not changed. Fixed financial liabilities are measured at amortized cost (Financial Liability at Amortised Cost (FLAC). The criteria for assigning financial liabilities in FLAC by exercising the fair value option also remain unchanged.

Perubahan Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

Penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 mensyaratkan model kerugian kredit ekspektasian, menggantikan metodologi model *incurred loss* sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2014). Perubahan penting dalam kebijakan akuntansi Bank dalam penurunan nilai atas aset keuangan dijelaskan sebagai berikut:

Changes In Implementation Of Financial Assets

Impairment based on PSAK 71 requires the expected credit loss model, replacing the incurred loss model methodology in accordance with PSAK 55 (revised 2014). Significant changes in the Bank's accounting policy for impairment of financial assets are described as follows:

Bank menerapkan pendekatan tiga tahap untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Losses*/ ECL) pada instrumen utang yang dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI. Aset bermigrasi melalui tiga tahap berikut berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal:

The Bank applies a three-step approach to measuring Expected Credit Losses (ECL) on debt instruments carried at amortized cost and FVOCI. Assets migrate through the following three stages based on changes in credit quality since initial recognition:

i. Tahap 1: ECL 12 Bulan
   Untuk eksposur yang tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal dan bukan merupakan kredit yang pada awalnya mengalami penurunan nilai, bagian dari ECL sepanjang umurnya terkait dengan probabilitas kejadian default yang terjadi dalam 12 bulan ke depan diakui.

   i. Stage 1: 12 Month ECL
   For exposures that have not experienced a significant increase in credit risk since initial recognition and are not credits that are initially impaired, the share of the lifetime ECL related to the probability of a default occurring within the next 12 months is recognized.

ii. Tahap 2: ECL Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Mengalami Penurunan Nilai
   Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal tetapi tidak mengalami penurunan nilai, maka ECL sepanjang umurnya diakui.

   ii. Stage 2: Lifelong ECL - No Impairment Credit

   For credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition but not impaired, the lifetime ECL is recognized.

iii. Tahap 3: ECL Sepanjang Umurnya – Kredit Mengalami Penurunan Nilai
   Aset keuangan dinilai sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak yang merugikan terhadap perkiraan arus kas masa depan dari aset tersebut telah terjadi. Sebagaimana menggunakan kriteria yang sama seperti dalam PSAK 55 (revisi 2014), maka metodologi Bank untuk penyisihan spesifik tetap tidak berubah. Untuk aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai kredit, ECL sepanjang umurnya diakui dan pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif pada biaya perolehan diamortisasi (setelah dikurangi penyisihan) dan bukan jumlah tercatat bruto.

   iii. Stage 3: Lifetime ECL – Credit Impaired

   Financial assets are assessed as impaired credit when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the asset have occurred. As using the same criteria as in PSAK 55 (revised 2014), the Bank's methodology for specific allowances remains unchanged. For financial assets that have been credit impaired, ECL over the life of the asset is recognized and interest income is calculated applying the effective interest rate at amortized cost (net of allowance) and not the gross carrying amount.

PSAK 73: "SEWA".

PSAK No. 73, "Sewa", menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 (dua) pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah. Pada tahun berjalan, Bank telah menerapkan PSAK 73 (diterbitkan oleh DSAK IAI pada tahun 2017) yang mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Berbeda dengan akuntansi lessee, persyaratan untuk akuntansi lessor sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK 73 pada Laporan Keuangan dijelaskan di bawah ini.

Tanggal penerapan awal PSAK 73 untuk Bank adalah 1 Januari 2020. Bank telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK 73. Dengan demikian, informasi komparatif yang disajikan untuk tahun 2019 tidak disajikan kembali sebagaimana dilaporkan sebelumnya, pada PSAK 30 dan interpretasi terkait.

a. Dampak Definisi Baru Dari Sewa

- Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa atas dasar jika penyewa memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.
- Bank menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang diterapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak yang dicatat atau diubah pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Dalam persiapan untuk pertama kali penerapan PSAK 73, Bank telah melakukan proyek implementasi. Proyek tersebut telah menunjukkan bahwa definisi baru dari PSAK 73 tidak akan secara signifikan mengubah lingkup kontrak Bank untuk memenuhi definisi dari sewa.
- Bank menggunakan cara praktis yang terdapat pada panduan transisi dalam PSAK 73, yaitu penggunaan

PSAK 73: "RENT".

PSAK No. 73, "Leases", establishes the principles for recognizing, measuring, presenting and disclosing leases by introducing a single accounting model requiring the recognition of right-of-use assets and lease liabilities. There are 2 (two) optional exceptions in the recognition of leased assets and liabilities, namely for: (1) short-term leases and (2) leases where the underlying assets are of low value. In the current year, the Bank has implemented PSAK 73 (issued by DSAK IAI in 2017) which became effective on January 1, 2020.

PSAK 73 applies new or amended requirements in relation to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance leases, and requires the recognition of right-of-use assets and the recognition of a lease liability at inception of the lease for all leases, except for short-term leases and leases of low value assets. In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting are largely unchanged. The impact of the adoption of PSAK 73 on the Financial Statements is described below.

The initial application date of PSAK 73 for the Bank is January 1, 2020. The Bank has applied PSAK 73 using a modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact from the initial application of PSAK 73. Therefore, the comparative information presented for 2019 is not restated as previously reported, in PSAK 30 and related interpretations.

a. Impact of the New Definition of Lease

- *The main change from the definition of lease relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract is, or contains, a lease on the basis if the lessee has the right to control the use of the asset for a specified period of time in exchange for consideration. This is a difference in determining the contract is, or contains a lease based on PSAK 30, namely with the concept of risk and benefit.*
- *The Bank applies the definition of lease and the related guidance applied in PSAK 73 for all contracts recorded or amended on or after January 1, 2020. In preparation for the first application of PSAK 73, the Bank has carried out an implementation project. The project has demonstrated that the new definition of PSAK 73 will not significantly change the scope of the Bank's contract to meet the definition of a lease.*
- *The Bank uses the practical method contained in the transition guide in PSAK 73, namely the use of a single*

tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang hampir sama.

b. Dampak Pada Akuntansi Lessee

- Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa merupakan jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Biaya aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

discount rate for a rental portfolio with almost the same characteristics.

b. Impact on Lessee's Accounting

- *The Bank applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Bank recognizes a lease liability to make lease payments and a right-of-use asset that represents the right to use the underlying asset.*

The Bank recognizes the right of use asset on the commencement date of the lease. Right-of-use assets are measured at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, and are adjusted for any remeasurement of the lease liability. Lease liability is the amount of rental payments that must be paid until the end of the lease term which is discounted using the incremental loan interest rate. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liability recognized, initial direct costs paid, recovery costs and lease payments made on or before the lease commencement date less any rental incentives received. Right-of-use assets are depreciated using the straight-line method over the shorter of the lease term and the estimated useful life of the asset, as follows:

Keterangan	Tahun | *Year*	*Description*
Bangunan	10 tahun	*Building*
Kendaraan	5 tahun	*Vehicle*
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	5 tahun	*Office supplies, machinery and equipment*

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset. Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi. Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa,

If ownership of the leased asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with PSAK 48 Impairment of Assets. On the commencement date of the lease, the Bank recognizes a lease liability which is measured at the present value of future lease payments to be made over the term of the lease. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments) less rental incentive receivables, variable lease payments that depend on an index or interest rate, and amounts expected to be paid under a residual value guarantee. The lease payments also include the exercise price of a reasonable purchase option if it is determined to be exercised by the Bank and the payment of a penalty for terminating the lease, if the term of the lease reflects the Bank exercising the lease termination option. Variable lease payments that are independent of an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar. Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 (dua belas) bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemenelemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the tenant's incremental borrowing rate at the commencement date of the lease because the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the commencement date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the increase in interest and less any lease payments made. In addition, the carrying amount of the lease liability is remeasured if there is a modification, a change in the term of the lease, a change in lease payments, or a change in the valuation of the option to purchase the underlying asset. Short-term leases with a duration of less than 12 (twelve) months and leases of low-value assets, as well as elements of the lease, which partially or wholly do not apply the recognition principles determined by PSAK 73 will be treated the same as operating leases in PSAK 30. Banks will recognizes the lease payments on a straight-line basis over the lease term in the statement of profit or loss and other comprehensive income. These expenses are shown under general and administrative expenses in the income statement

Bank menyajikan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi pada PSAK 30, yang tidak diungkapkan dalam laporan posisi keuangan. Penerapan pencatatan PSAK 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), Bank: Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan; Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

The Bank presents leases previously classified as operating leases in PSAK 30, which are not disclosed in the statement of financial position. The application of PSAK 73 recording applies to all leases (except as previously stated), the Bank: Presents right-of-use assets as part of property, plant and equipment and lease liabilities are presented as part of other liabilities in the statement of financial position, which are measured at the present value of future rental payments; Record depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the statement of profit or loss and comprehensive income; and Separate the total amount of payments into principal (presented in financing activities) and interest (presented in operating activities) in the statement of cash flows.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah telah terjadi peningkatan signifikan dalam risiko kredit untuk aset keuangan sejak pengakuan awal dengan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang umur yang diharapkan antara tanggal pelaporan dan tanggal pengakuan awal. Dalam menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank menggunakan sistem penilaian risiko kredit internal, peringkat risiko eksternal dan informasi perkiraan untuk menilai memburuknya kualitas kredit dari suatu aset keuangan.

At each reporting date, the Bank assesses whether there has been a significant increase in credit risk for financial assets since initial recognition by comparing the expected lifetime risk of default between the reporting date and the initial recognition date. In determining whether credit risk has increased significantly since initial recognition, the Bank uses an internal credit risk assessment system, external risk rating and forecast information to assess the deterioration in the credit quality of a financial asset.

Bank menilai apakah risiko kredit pada aset keuangan telah meningkat secara signifikan berdasarkan individual atau kolektif. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit bersama, dengan mempertimbangkan jenis instrumen, peringkat risiko kredit, tanggal pengakuan awal, sisa umur jatuh tempo, industri dan faktor relevan lainnya.

The Bank assesses whether credit risk on financial assets has increased significantly on an individual or collective basis. For the purpose of evaluating collective impairment, financial assets are grouped according to their shared credit risk characteristics, taking into account the type of instrument, credit risk rating, date of initial recognition, remaining maturity, industry and other relevant factors.

Jumlah ECL diukur sebagai probabilitas nilai kini tertimbang dari seluruh *cash shortfall* atas umur yang diharapkan dari aset keuangan yang didiskontokan pada tingkat bunga efektif awalnya. *Cash shortfall* adalah selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang harus dibayar oleh Bank dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Jumlah kerugian diakui dengan menggunakan penyisihan kerugian
penurunan nilai.

The amount of ECL is measured as the probability weighted present value of all cash shortfalls over the expected life of the financial asset discounted at the original effective interest rate. Cash shortfall is the difference between all contractual cash flows that must be paid by the Bank and all cash flows that are expected to be received by the Bank. The amount of the loss is recognized using the allowance for losses impairment.

Bank mempertimbangkan pengalaman kerugian historisnya dan menyesuaikannya dengan data yang dapat diobservasi saat ini. Selain hal tersebut, Bank menggunakan perkiraan yang wajar dan mendukung kondisi ekonomi masa depan termasuk pertimbangan untuk mengestimasi jumlah kerugian penurunan nilai ekspektasian. PSAK 71 memperkenalkan penggunaan faktor-faktor ekonomi makro yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada tingkat pengangguran, suku bunga, produk domestik bruto, inflasi dan harga properti komersial, dan mensyaratkan evaluasi baik saat ini serta perkiraan arah siklus ekonomi. Memasukkan informasi forward looking dapat menambah tingkat justifikasi mengenai dampak perubahan dalam faktorfaktor makro ekonomi akan mempengaruhi ECL. Metodologi dan asumsi termasuk setiap perkiraan kondisi ekonomi masa depan yang ditelaah secara berkala.

The Bank considers its historical loss experience and adjusts it with currently observable data. In addition to this, the Bank uses reasonable and supportive estimates of future economic conditions including considerations for estimating the amount of expected impairment losses. PSAK 71 introduces the use of macroeconomic factors that include, but is not limited to, unemployment rates, interest rates, gross domestic product, inflation and commercial property prices, and requires evaluation of both the current and forecasted direction of the economic cycle. Incorporating forward looking information can increase the level of justification regarding the impact changes in macroeconomic factors will affect the ECL. The methodology and assumptions include any estimates of future economic conditions that are reviewed regularly.

Jika, pada periode berikutnya, kualitas kredit meningkat dan membaik maka setiap peningkatan risiko kredit yang sebelumnya dinilai signifikan sejak awal, selanjutnya penyisihan kerugian penurunan nilai berubah dari ECL sepanjang umur menjadi ECL 12 bulan.

If, in the next period, credit quality improves and improves, any increase in credit risk that was previously assessed as significant from the outset, then the allowance for impairment losses changes from lifetime ECL to 12 month ECL.

Dalam hal kategori aset yang baru untuk instrumen utang yang diukur pada FVOCI, pengukuran ECL didasarkan pada pendekatan tiga tahap sebagaimana diterapkan pada aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi. Bank mengakui penyisihan kerugian pada laporan laba rugi, dengan jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain, tanpa mengurangi jumlah tercatat aset di laporan posisi keuangan.

In the case of a new asset category for debt instruments measured at FVOCI, the measurement of ECL is based on a three-step approach as applied to financial assets at amortized cost. The Bank recognizes an allowance for losses in the income statement, with the amount recognized in other comprehensive income, without reducing the carrying amount of the asset in the statement of financial position.

Secara keseluruhan, penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 menghasilkan pengakuan kerugian kredit lebih awal dibandingkan dengan PSAK 55 (revisi 2014). Penyajian dan pengukuran CKPN berdasarkan PSAK 71 Konvensional yang telah diberlakukan pada awal tahun 2020 yang bersumber dari cadangan umum (ekuitas) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Disiingkat "PT Bank Riau Kepri" berdasarkan Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH. tanggal 22 April 2019 Nomor 12 adalah sebagai berikut:

Overall, impairment under PSAK 71 results in the recognition of credit losses earlier than PSAK 55 (revised 2014). Presentation and measurement of CKPN based on Conventional PSAK 71 which was implemented in early 2020 sourced from general reserves (equity) based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Abbreviated "PT Bank Riau Kepri" based on the Deed Notary Pupung Mulyantini, SH., MH. April 22, 2019 Number 12 is as follows:

Tabel Penyajian dan Pengukuran CKPN Berdasarkan PSAK 71 Konvensional Yang Telah Diberlakukan Pada Awal Tahun 2020
Table of Exposure and Measurement of CKPN Based on Conventional PSAK 71 realized in early 2020

(dalam jutaan Rupiah)
(in million IDR)

Aset Keuangan	Neraca		PSAK 71		Selisih	
	Nilai Tercatat	CKPN	Nilai Tercatat	CKPN	Nilai Tercatat	CKPN
Penempatan pada Bank Indonesia *Placement on Bank Indonesia*	2.063.932	-	2.063.932	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain *Placement on other Banks*	72.445	-	72.445	49	-	49
Tagihan Spot dan Derivatif *Spot and Derivative Receivables*	-	-	-	-	-	-
Efek-efek yang dimiliki *Stocks owned*	3.657.401		3.657.401	13.554		13.554
Efek-efek Repo *Stocks repo*	-	-	-	-	-	-
Tagihan Reverse Repo *Reverse Repo Bill*	-	-	-	-	-	-
Tagihan Akseptasi *Acceptance bill*	-	-	-	-	-	-
Kredit yang diberikan *Credits given*	15.665.107	429.252	15.665.107	604.382	-	175.130
Aset Keuangan Lainnya *Other financial assets*	1.656	100	1.656	100	-	-
Jumlah | *Total*	**21.460.541**	**429.352**	**21.460.541**	**618.085**	-	**188.733**

PT Bank Riau Kepri telah menerapkan PSAK 71 untuk perhitungan dan penyajian CKPN dan PSAK 73 untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa.

PT Bank Riau Kepri has implemented PSAK 71 for calculating and presenting CKPN and PSAK 73 for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases.

Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Riau Kepri melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating*).

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor berikut:
1. Profil Risiko (*Risk Profile*);
2. *Good Corporate Governance* (GCG);
3. Rentabilitas (*Earnings*);
4. Permodalan (*Capital*).

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap indikator yang ditentukan sebagaimana dalam POJK. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank terbagi dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:

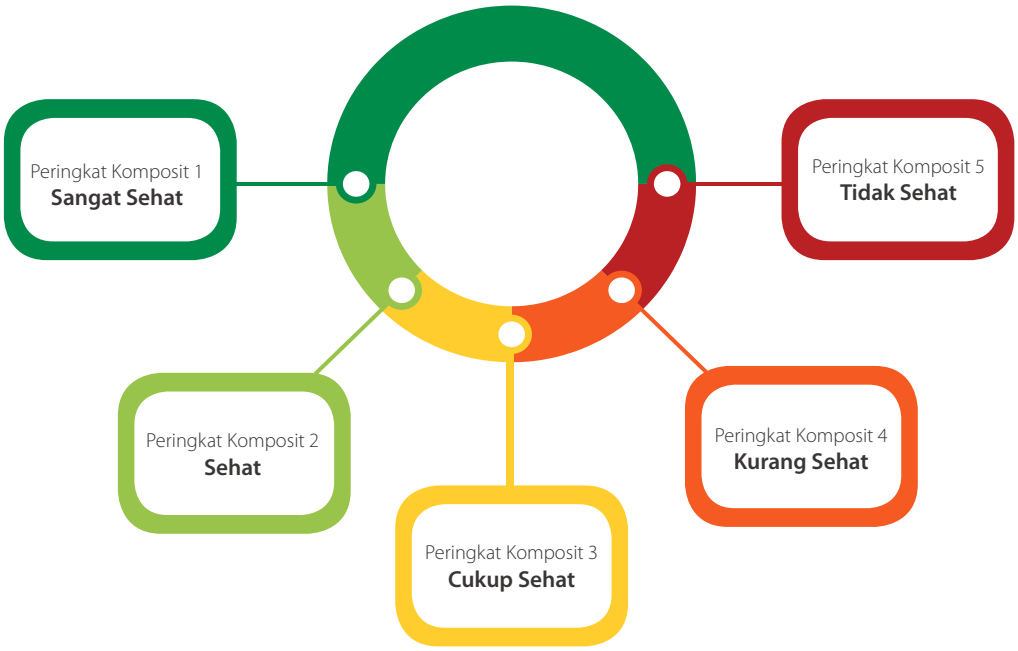
Bank Health Level

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 4/POJK.03/2016 concerning the Rating of the Soundness of Commercial Banks and the Financial Services Authority Letter No. 14/SEOJK.03/2017 regarding Assessment of Commercial Bank Soundness Level, Bank Riau Kepri assesses Bank Soundness Level using a Risk Based Bank Rating approach.

The Bank Soundness Rating includes an assessment of the following factors:
1. *Risk Profile;*
2. *Good Corporate Governance (GCG);*
3. *Profitability (Earnings);*
4. *Capital (Capital).*

The Composite Rating of Bank Soundness Level is determined based on a comprehensive and structured analysis of the ratings of each indicator as determined in the POJK. The Composite Rating of Bank Soundness Level is divided into 5 (five) levels, namely:

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank
Bank Soundness Level Composite Rating



Hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2021 berada pada Peringkat Komposit 3 (PK 3). Hal ini mencerminkan kondisi kesehatan Bank Riau Kepri secara umum adalah "Cukup Sehat" sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya yang tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian. Berikut hasil Tingkat Kesehatan Bank Riau Kepri Periode Desember 2021 dan Desember 2020.

The results of the assessment of the Bank Soundness Level for the December 2021 period are at Composite Rank 3 (PK 3). This reflects the health condition of Bank Riau Kepri in general is "Sufficiently Healthy" so that it is considered capable of dealing with significant negative effects from changes in business conditions and other external factors as reflected in the ratings of the assessment factors. The following are the results of the Health Level of Bank Riau Kepri for the period December 2021 and December 2020.

No	Faktor	Peringkat (Rating)		*Factor*
		Desember 2021 (OJK)	Desember 2020 (OJK)	
1	Profil Risiko	3	3	*Risk Profile*
2	Penerapan Tata Kelola	3	3	*Implementation of Governance*
3	Rentabilitas	2	2	*Profitability*
4	Permodalan	2	2	*Capital*
5	Peringkat Komposit	3	3	*Composite Rating*

Informasi Kelangsungan Usaha

Hal-Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Manajemen Bank Riau Kepri telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Sampai dengan akhir tahun 2021, tidak terdapat hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan Bank Riau Kepri.

Asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini hal tersebut ditunjukkan dalam analisis kekuatan *(strength)* dan kelemahan *(weakness),* peluang *(opportunities)* dan ancaman *(threats),* yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank Riau Kepri serta dikuatkan oleh hasil auditor independen atas laporan keuangan audited tahun buku 2021 yaitu "wajar dalam semua yang material".

Assessment Manajemen Atas Hal-Hal Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Bank Riau Kepri melakukan penilaian dan melakukan analisis posisi Bank untuk menganalisis mengenai hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Bank Riau Kepri untuk memitigasi hal tersebut. Penilaian dilakukan melalui telaah terhadap kondisi internal perusahaan, serta analisa mengenai peluang dan ancaman yang dihadapi Bank Riau Kepri yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi eksternal Bank. Berdasarkan catatan laporan keuangan audited tahun buku 2021 oleh auditor independen KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto, Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen Dalam Melakukan *Assesment*

Manajemen menggunakan asumsi-asumsi dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal yang di antaranya adalah indikator-indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat inflasi, nilai tukar serta data kinerja internal seperti laporan kinerja keuangan dan indikator pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

Business Continuity Information

Things That Have The Potential to Have A Significant Impact on Business Continuity

The management of Bank Riau Kepri has assessed the Bank's ability to continue its business continuity and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition, the Bank's management is not aware of any material uncertainty that could cause significant losses to the Bank's ability to continue its business. Until the end of 2021, there are no things that have a significant effect on the sustainability of Bank Riau Kepri.

The assumptions that underlie management in believing this are shown in the analysis of strengths and weaknesses, opportunities and threats, which are contained in the Bank Riau Kepri Business Plan and strengthened by the results of an independent auditor on the audited financial statements for the year. the 2021 book is "fair in all material respects".

Management Assessment on Matters That Have a Significant Influence on Business Continuity

Bank Riau Kepri assesses and analyzes the Bank's position to analyze matters that have the potential to significantly affect business continuity as well as the strengths and weaknesses of Bank Riau Kepri to mitigate this. The assessment is carried out through a study of the company's internal conditions, as well as an analysis of the opportunities and threats faced by Bank Riau Kepri which is carried out through a study of the Bank's external conditions. Based on the audited financial statements for the 2021 financial year by independent auditors KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto, the Bank's Management has assessed the Bank's ability to continue its business continuity and believes that the Bank has the resources to continue its business in the future. In addition, management does not perceive any material uncertainty that could cast significant doubt on the Bank's ability to continue its business.

Assumptions Used by Management in Conducting Assessments

Management uses assumptions from various internal and external sources, including economic indicators such as Gross Domestic Product (GDP), inflation rates, exchange rates as well as internal performance data such as financial performance reports and indicators of the implementation of Corporate Governance.

Tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Bank Riau Kepri pada tahun 2021 maupun tahun-tahun selanjutnya. Bank Riau Kepri meyakini hal ini berdasarkan:

1. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto menyatakan bahwa laporan keuangan Bank Riau Kepri telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
2. Bank Riau Kepri berhasil membukukan Laba tahun berjalan sebesar Rp.381.013.438.046 pada tahun 2021. Bank Riau Kepri juga berhasil membukukan laba komprehensif Rp.383.933.643.089, turun dari tahun sebelumnya.
3. Rasio keuangan Bank Riau Kepri tahun 2021 menunjukkan hasil positif sebagaimana dijelaskan pada subbab Analisis Kemampuan Membayar Utang, Tingkat Kolektibilitas Piutang, dan Rasio Keuangan Lainnya.
4. Tidak terdapat gugatan hukum yang menuntut pailit terhadap Bank Riau Kepri.

There are no things that have the potential to have a significant effect on the business continuity of Bank Riau Kepri in 2021 or in the following years. Bank Riau Kepri believes this based on:

1. *The financial report published by KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto states that the financial statements of Bank Riau Kepri have presented fairly in all material respects.*
2. *Bank Riau Kepri managed to record a profit for the year of Rp.381,013,438,046 in 2021. Bank Riau Kepri also managed to record a comprehensive profit of Rp.383,933,643,089, which decreased from the previous year.*
3. *The financial ratios of Bank Riau Kepri in 2021 showed positive results as described in the sub-chapter Analysis of Ability to Pay Debt, Accounts Receivable Collectibility Level, and Other Financial Ratios.*
4. *There are no lawsuits demanding bankruptcy against Bank Riau Kepri.*

Aspek Perpajakan

Publikasi Pembayaran Pajak

Bank Riau Kepri dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pembayaran Pajak

Kontribusi Bank Riau Kepri selama tahun 2021 kepada negara diwujudkan melalui pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak dan sebagai pemotong/pemungut pajak. Sebagai wajib pajak, kontribusi terbesar Bank Riau Kepri adalah memenuhi kewajiban PPh Badan. Sedangkan sebagai pemotong pajak, Bank Riau Kepri berperan aktif dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek kena pajak.

Tax Aspect

Tax Payment Publication

Bank Riau Kepri in its operational activities has implemented Good Corporate Governance which is carried out in a transparent and accountable manner, especially in managing its tax rights and obligations, its tax rights and obligations are carried out in accordance with applicable regulations.

Payment of taxes

The contribution of Bank Riau Kepri during 2021 to the state is realized through the fulfillment of the company's obligations as taxpayers and as tax cutters/collectors. As a taxpayer, Bank Riau Kepri's biggest contribution is to fulfill corporate income tax obligations. Meanwhile, as a tax cutter, Bank Riau Kepri plays an active role in making deductions for each taxable object.

Tabel Pembayaran Pajak
Tax Payment Table

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million IDR)*

Uraian Pajak	Tahun 2021	Tahun 2020
PPh Pasal 4(2)	5.011	9.875
PPh Pasal 21	9.964	3.679
PPh Pasal 23	325	215
PPh Pasal 25	2.851	1.431
PPh Pasal 29	13.566	26.120
PPN Keluaran	169	171
Lainnya	150	56
Jumlah	**32.036**	**41.547**

Ketidakpatuhan Dalam Pembayaran Pajak

Pada periode 2021, tidak terdapat ketidakpatuhan Bank Riau Kepri dalam kewajiban membayar pajak. Bank Riau Kepri tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban pajak. Baik PPH Karyawan, PPH Badan, PPN Masa dan Rampung serta PBB, tidak pernah melakukan keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT tahunan maupun bulanan), serta tidak terdapat keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator.

Non-compliance in Tax Payment

In the 2021 period, there was no non-compliance with Bank Riau Kepri in the obligation to pay taxes. Bank Riau Kepri has never been late in paying tax obligations. Both Employee PPH, Corporate PPH, Period and Complete PPN and PBB, have never been late in submitting tax obligation documents (annual and monthly SPT), and there is no delay in submitting mandatory documents to regulatory agencies.

Larangan, Batasan dan/aAtau Hambatan Signifikan Untuk Melakukan Penyediaan Dana Antara Bank dan Entitas Lain Dalam Suatu Kelompok Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Riau Kepri telah menetapkan kebijakan yang mencakup batasan dalam pemberian dana kepada pihak terkait sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum dan POJK No. 38 /POJK.03/2019 Tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 Tentang BMPK dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Riau Kepri memiliki Standar Operating Prosedur (SOP) terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana Besar serta Penyediaan Dana Kepada Pihak Lain.

Prohibition, Limitation and/or Significant Barriers to Provision of Funds Between Banks and Other Entities in a Business Group

In carrying out its business activities, Bank Riau Kepri has established a policy that includes limits in granting funds to related parties in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 32/POJK.03/2018 concerning the Maximum Limit for Lending (BMPK) and Provision of Large Funds for Commercial Banks. and POJK No. 38 /POJK.03/2019 Regarding Amendments to POJK No. 32/POJK.03/2018 concerning LLL and Provision of Large Funds for Commercial Banks. As a form of implementation in implementing the principles of Good Corporate Governance as regulated in the provisions of the Financial Services Authority. Bank Riau Kepri has a Standard Operating Procedure (SOP) related to the Maximum Limit for Loans and Provision of Funds to Related Parties, Provision of Large Funds and Provision of Funds to Other Parties.

Tabel Penyediaan Dana Pihak Tekait Tahun 2021
Table of Provision of Related Party Funds in 2021

(dalam jutaan Rupiah) | *(in million IDR)*

No	Penyedia Dana	Jumlah		*Fund Provider*
		Number of Account (NoA)	Nominal	
1	Kepada Pihak Terkait	6	7.038	*To Related Parties*
2	Kepada 20 Debitur Inti			*To 50 Core Debtors*
	a. Individu	26	611.108	*a. Individual*
	b. Group	0	0	*b. Group*
	Total Debitur Inti	**26**	***611.108***	

Tabel Total Penyediaaan Dana Bank Kepada Pihak Terkait Tahun 2021
Table of Total Provision of Bank Funds to Related Parties in 2021

(dalam jutaan Rupiah)
(in million IDR)

Uraian	Nominal 2021	*Description*
Modal Pada Tanggal Laporan	3.147.228	*Capital On Report Date*
BMPK (10% dari Modal) Pada Tanggal Laporan	314.723	*LLL (10% of Capital) On Report Date*
Outstanding Pihak Terkait	7.038	*Outstanding Related Parties*
Kelonggaran BMPK	0	*LLL allowance*
Pelampauan BMPK	0	*Exceeding LLL*





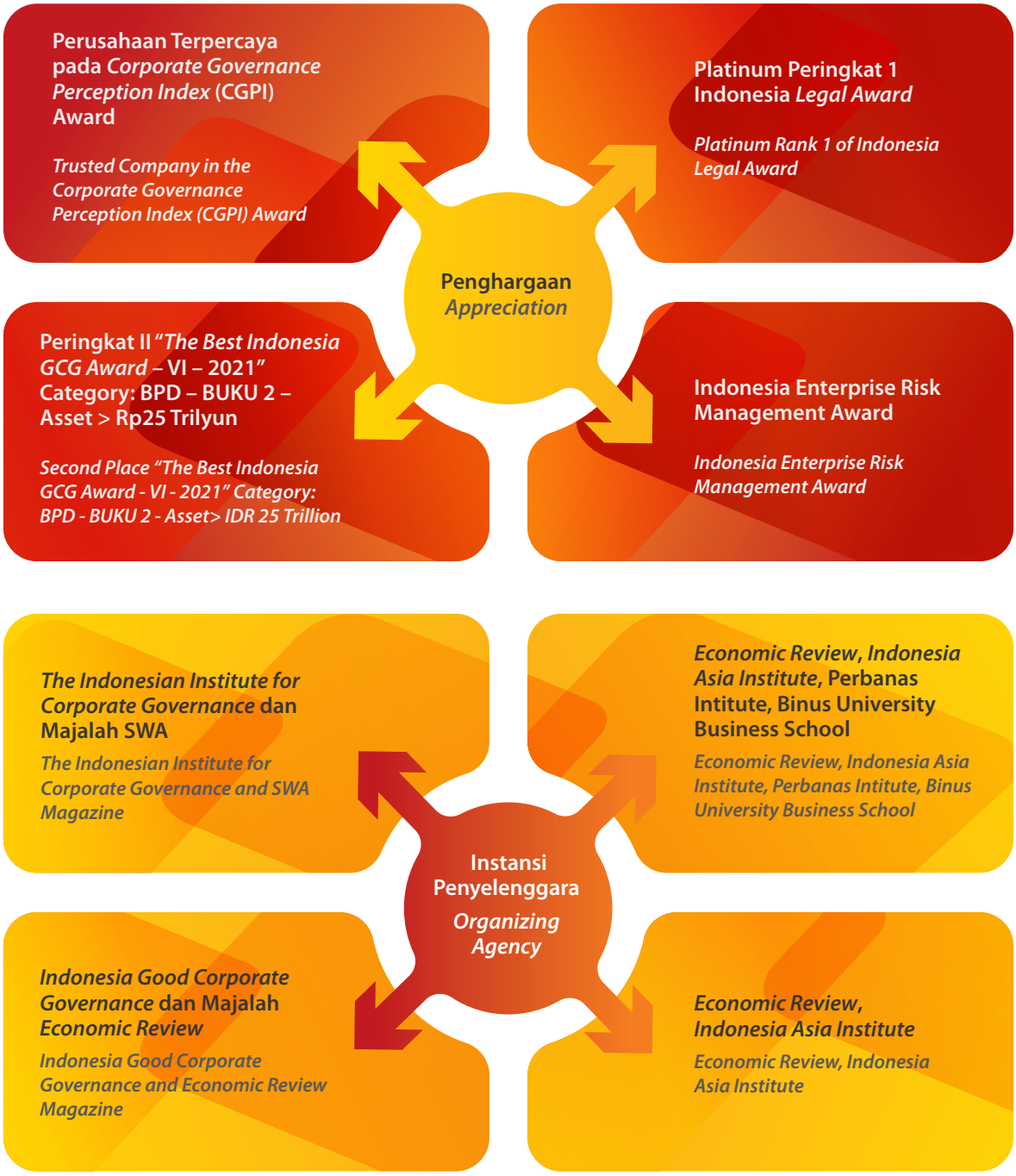


TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

PENCAPAIAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Achievements in Implementation of Corporate Governance

Tabel Pencapaian Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Achievements in Implementation of Corporate Governance



DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Basic Corporate Governance Implementation

Bank Riau Kepri menyadari bahwa sebagai Bank yang memiliki peran sebagai Bank Pembangunan Daerah yang mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, maka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Bank Riau Kepri bukan lagi merupakan suatu keharusan, tetapi sudah menjadi pondasi utama dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Bank Riau Kepri realizes that as a Bank that has a role as a Regional Development Bank that encourages economic growth and sustainable regional development, the implementation of good Corporate governance for Bank Riau Kepri is no longer a necessity, but has become the main foundation in running a business for maximizing benefits and added value for stakeholders as well as maintaining business continuity in the long term.

Dalam perjalanannya selama lebih dari 55 (lima puluh lima) Tahun, Bank Riau Kepri telah secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi bagi para pemangku kepentingan atas Bank Riau Kepri dalam rangka mencapai visi dan keberlanjutan usaha Bank Riau Kepri. Penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu kepada 4 (empat) aspek tata kelola, yaitu *governance commitment*, *governance structure, governance process,* dan *governance outcome* yang merupakan perwujudan tanggung jawab Bank Riau Kepri kepada pihak-pihak yang berkepentingan yakni nasabah, karyawan, pemangku kepentingan lainnya, serta masyarakat.

In its journey for more than 54 (fifty five) years, Bank Riau Kepri has consistently applied the principles of good Corporate governance to create added value and maintain a high level of trust for stakeholders in Bank Riau Kepri in order to achieve the vision. and the sustainability of the business of Bank Riau Kepri the implementation of Corporate Governance refers to 4 (four) aspects of governance, namely governance commitment, governance structure, governance process, and governance outcome, which embody the responsibility of Bank Riau Kepri to interested parties, namely customers, employees, other stakeholders, and the community.

Ketentuan yang menjadi ketentuan acuan bagi Bank Riau Kepri dalam penerapan Tata Kelola yang Baik antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut amandemennya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. POJK Nomor 4/POJK.3/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
5. POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.
6. POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/ SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/ SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
9. *Road Map* GCG Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2014.
10. Pedoman GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG)
11. Pedoman Umum GCG Indonesia dan GCG Perbankan Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).

The provisions that become the reference provisions for Bank Riau Kepri in implementing Good Governance include:

1. *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and its amendments.*
2. *Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Law Number 10 of 1998.*
3. *Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
4. *POJK Number 4/POJK.3/2016 concerning Assessment of the Soundness of Commercial Banks.*
5. *POJK Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*
6. *POJK Number 37/POJK.032019 dated 19 December 2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.*
7. *Financial Services Authority Circular Letter No.14/ SEOJK.03 /2017 concerning Assessment of the Soundness of Commercial Banks.*
8. *Financial Services Authority Circular Letter Number 13/SEOJK.03/2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks.*
9. *2014 Financial Services Authority GCG Road Map.*
10. *Indonesian Banking GCG Guidelines by the National Committee on Governance Policy (KNKG).*
11. *The General Guidelines for Indonesian GCG and Indonesian Banking GCG by the National Committee on Governance Policy (KNKG).*

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK
Purpose of Implementing Good Governance

Tata Kelola sebagai salah (1) satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*Stakeholders*), dengan pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan, dan akuntabel. Kepercayaan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Bank Riau Kepri. Kredibilitas Bank Riau Kepri dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Bank Riau Kepri dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Bank Riau Kepri selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Bank Riau Kepri.

Governance as a tool to increase value and long-term business growth in a sustainable manner, not only for Shareholders but also for all stakeholders, with business management that is not only for profit but also management that is full of trust, transparent, and accountable. Stakeholders' trust is a very decisive factor for the development and continuity of the business of Bank Riau Kepri. Bank Riau Kepri's credibility and stakeholder trust are closely related to the behavior of Bank Riau Kepri in interacting with stakeholders. Management of Bank Riau Kepri in addition to having to follow the applicable laws and regulations must also uphold ethical norms and values. Awareness to implement good ethics will enhance and strengthen the reputation of Bank Riau Kepri.

Penerapan tata kelola yang baik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan Bank dengan baik, sehingga mengarah pada praktik bisnis terbaik yang sesuai dengan standar yang dimiliki.
2. Dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya terhadap Bank Riau Kepri.
3. Memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditur, untuk memperoleh *return* atas investasinya.
4. Membantu menciptakan lingkungan kondusif sehingga terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor koRporat.
5. Mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.

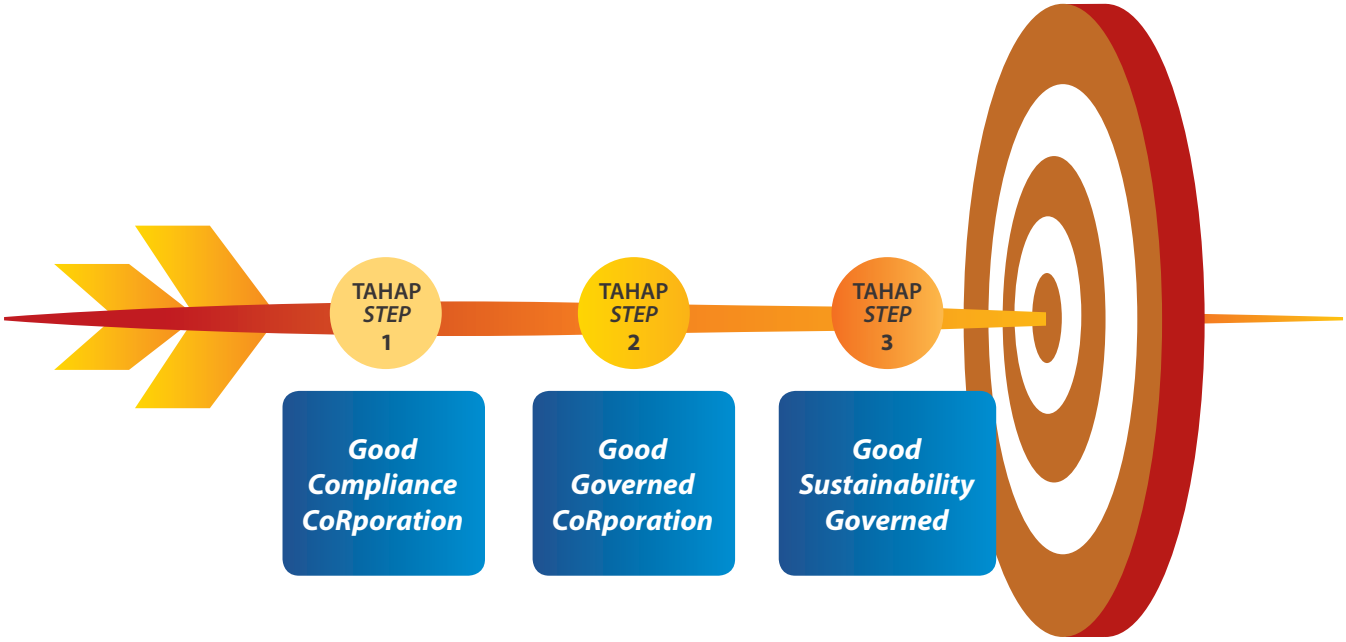
The implementation of good governance aims to:

1. *Improve and develop good Bank management, so as to lead to best business practices in accordance with existing standards.*
2. *Can guarantee long-term sustainable growth and in the end can increase the trust of shareholders and other stakeholders in Bank Riau Kepri.*
3. *Providing effective protection for shareholders and creditors to obtain a return on their investment.*
4. *Help create a conducive environment so as to create efficient and sustainable growth in the Corporate sector.*
5. *Regulate the relationship between shareholders, managers, creditors, government, employees, and other internal, and external stakeholders in accordance with their rights, and responsibilities.*

ROADMAP TATA KELOLA PERUSAHAAN
Roadmap of Corporate Governance

Roadmap Tata Kelola Perusahaan Bank Riau Kepri merupakan *grand strategy* dan *milest(1)* one implementasi GCG sampai Tahun 2021 menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tahapan *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:

The Bank Riau Kepri Corporate Governance Roadmap is a grand strategy and milest(1) one for GCG implementation until 2020 towards sustainable Corporate governance by integrating aspects of compliance, internal control, risk management, and Corporate social responsibility. The stages of the Bank Riau Kepri Corporate Governance Roadmap are as follows:



TAHAPAN IMPLEMENTASI TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance Implementation Stage

Bank Riau Kepri menyadari bahwa penerapan GCG merupakan proses jangka panjang yang akan menghasilkan *sustainable value*, sehingga Bank mutlak memerlukannya untuk menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai perusahaan sehingga Bank Riau Kepri mampu beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Oleh karenanya, Bank Riau Kepri terus berupaya optimal untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang sesuai guna mendorong terciptanya budaya yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kualitas layanan, dan *prudential Banking*.

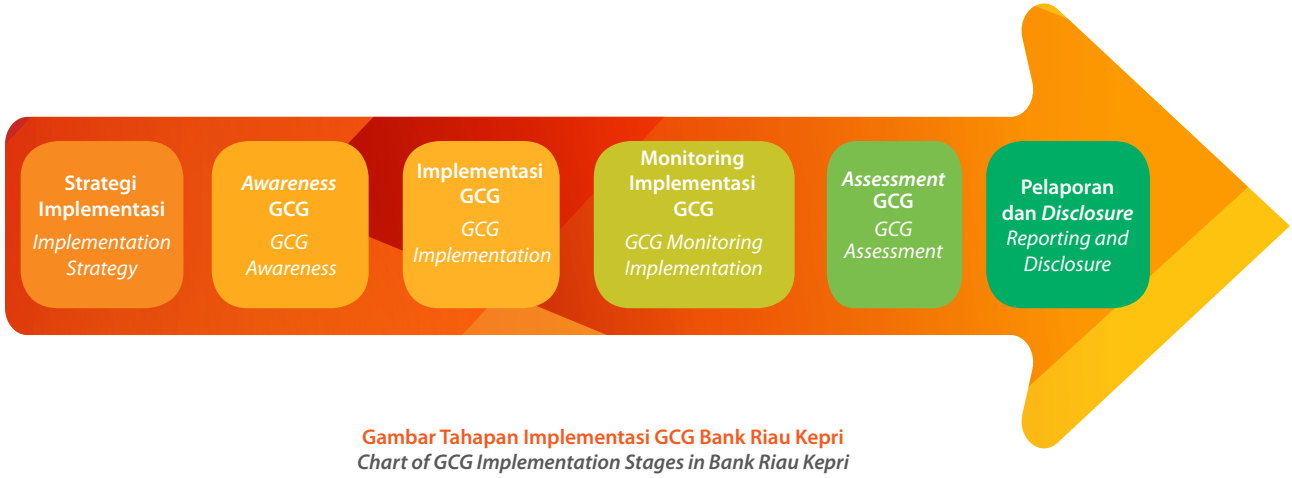
Bank Riau Kepri realizes that the implementation of GCG is a long-term process that will produce sustainable value, so that the Bank absolutely needs it to face business competition, increase effectiveness and efficiency in managing resources, maximize Corporate value so that Bank Riau Kepri is able to operate, and grow sustainably. Therefore, Bank Riau Kepri continues to make optimal efforts to internalize the principles of GCG into systems and procedures as well as the formation of appropriate behavior to encourage the creation of a culture that upholds professionalism, integrity, service quality, and prudential Banking.

Disadari bahwa upaya implementasi GCG perlu dilakukan secara terarah dan terencana sesuai standar *best practice* atau standar terbaik dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Aktualisasi GCG di Bank Riau Kepri dilakukan sejalan dengan ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Pelaksanaan GCG di Bank Riau Kepri beRpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016.

It is realized that efforts to implement GCG need to be directed and planned according to best practice standards or the best standards in supporting the achievement of the Company's goals. GCG actualization at Bank Riau Kepri is carried out in line with the provisions and requirements related to the implementation of GCG for Commercial Banks at all levels and levels of the organization. The implementation of GCG at Bank Riau Kepri is guided by the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016.

Tahapan Implementasi GCG Bank Riau Kepri diawali dengan Strategi Implementasi, selanjutnya diikuti tahapan secara berkelanjutan meliputi *Awareness* GCG, Implementasi GCG, *Monitoring*, *Assessment* GCG, serta Pelaporan dan *Disclosure*. Penahapan implementasi GCG Bank Riau Kepri dapat digambarkan sebagai berikut:

GCG Implementation Stages in Bank Riau Kepri begin with an Implementation Strategy, followed by continuous stages including GCG Awareness, GCG Implementation, Monitoring, GCG Assessment, and Reporting and Disclosure. The stages of GCG implementation in Bank Riau Kepri can be described as follows:



Gambar Tahapan Implementasi GCG Bank Riau Kepri
Chart of GCG Implementation Stages in Bank Riau Kepri

Strategi Implementasi

Bank Riau Kepri menyusun strategi implementasi GCG yang konsisten dan sesuai dengan tujuan serta sasaran pengelolaan Bank dalam *businees plan* maupun *strategic plan*. Strategi implementasi GCG Bank Riau Kepri selama Tahun 2021 dilaksanakan dengan inisiatif sebagai berikut:

- Perlindungan terhadap hak pemegang saham
- Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite
- Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal
- Efektivitas penanganan pengaduan nasabah
- Peningkatan fungsi kepatuhan

Implementation Strategy

Bank Riau Kepri formulates a GCG implementation strategy that is consistent and in accordance with the goals and objectives of Bank management in the business plan and strategic plan. The strategy for implementing Bank Riau Kepri's GCG during 2021 was implemented with the following initiatives:

- *Protection of shareholder rights*
- *Optimizing the roles and functions of the Board of Commissioners, Directors, and Committees*
- *Increased risk management and internal control functions*
- *Effectiveness of handling customer complaints*
- *Improved compliance function*

Implementasi Tata Kelola Bank Riau Kepri

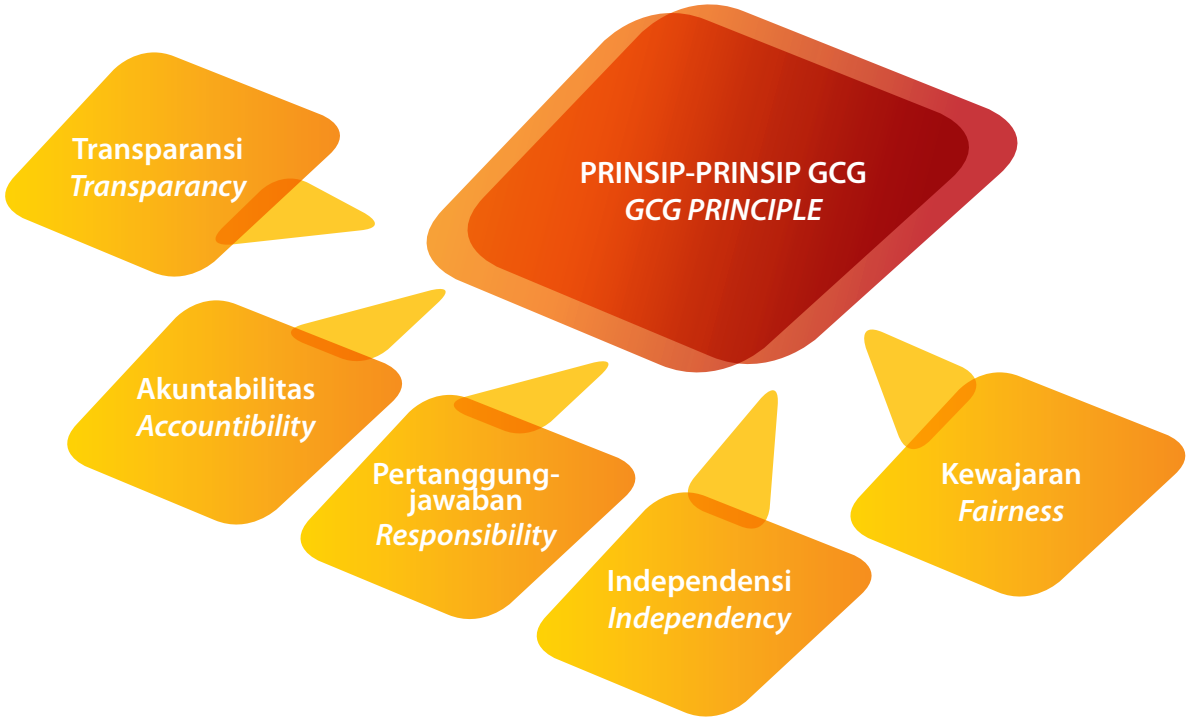
Untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan diperlukan landasan yang kuat bagi sebuah perusahaan. Untuk itu penerapan tata kelola yang baik sebagai kerangka utama dari pertumbuhan perusahaan harus diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola di Bank Riau Kepri dapat diuraikan sebagai berikut:

Implementation of Governance Bank Riau Kepri

To achieve sustainable growth requires a strong foundation for a company. For this reason, the application of good governance as the main framework for company growth must be applied consistently and continuously based on the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Professional, and Fairness.

The application of governance principles in Bank Riau Kepri can be described as follows:



Transparansi

Bank diharuskan memiliki inisiatif dalam pengungkapan informasi material dan relevan baik yang disyaratkan oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan maupun informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut disampaikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh siapa pun. Komitmen dalam mewujudkan prinsip transparansi ditunjukkan oleh Bank Riau Kepri antara lain melalui:

1. Memiliki Divisi Sekretariat Perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memastikan informasi perusahaan yang relevan telah tersampaikan kepada pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan masyarakat.
2. Memiliki *website* resmi perusahaan yang selalu diperbarui dalam menyajikan informasi sesuai standar transparansi dan publikasi yang ditetapkan oleh Regulator.
3. Senantiasa mengedepankan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan dan pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan secara tepat waktu kepada pemangku kepentingan.
4. Mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, Pemegang Saham Pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
5. Senantiasa menyajikan dan menyampaikan laporan kepada otoritas yang berwenang dan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku secara tepat waktu.

Akuntabilitas

Pengelolaan Bank Riau Kepri harus dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Perwujudan dari prinsip Akuntabilitas di Bank Riau Kepri tercermin antara lain melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Memiliki pedoman atau kebijakan yang menjadi pegangan bagi setiap organ perusahaan dan semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Transparency

Banks are required to have initiatives in disclosing material and relevant information, whether required by the provisions of laws and regulations or other important information that can influence decision making by shareholders, creditors, and other stakeholders. This information is conveyed quickly, accurately, and easily accessible by anyone. The commitment to realizing the principle of transparency is shown by Bank Riau Kepri, among others, through:

1. *Has a Corporate Secretary Division which has an obligation to ensure that relevant company information has been conveyed to stakeholders, including shareholders and the public.*
2. *Has an official company website which is always updated in providing information according to the transparency and publication standards set by the Regulator.*
3. *Always prioritize transparency in company management and disclosure of financial and non-financial conditions in a timely manner to stakeholders.*
4. *Disclose information which includes but is not limited to the vision, mission, business objectives, Corporate strategy, financial condition, composition and compensation of the management, controlling shareholder, share ownership by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners and their family members in other companies and companies, management system risk, internal supervision and control systems, systems and implementation of Good Corporate Governance and the level of compliance, and important events that may affect the condition of the company.*
5. *Always present and submit reports to the competent authorities and to other parties as stipulated in the applicable law in a timely manner.*

Accountability

Management of Bank Riau Kepri must be carried out correctly, measured, and in accordance with the interests of the Bank by taking into account the interests of shareholders and other stakeholders. The manifestation of the principle of Accountability at Bank Riau Kepri is reflected, among others, through the following:

1. *Have guidelines or policies that serve as guidelines for every organ of the company and all employees in carrying out their duties and responsibilities.*

2. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua pegawai secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.
3. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua pegawai memiliki kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
4. Memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
5. Memiliki unit kerja yang mengelola *anti fraud*.
6. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan, serta rencana kerja lainnya.
7. Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

2. Define the details of the duties and responsibilities of each company organ and all employees clearly and in line with the vision, mission, company values, and Corporate strategy.
3. Convinced that all company organs and all employees have the ability in accordance with their duties, responsibilities, and roles in the implementation of Good Corporate Governance.

4. Have an effective internal control system in managing the company.
5. Has a work unit that manages anti-fraud.
6. Prepare the Company's Long-Term Plan, the Company's Annual Work Plan, and Budget and other work plans.

7. Has a performance measure for all levels of the company that is consistent with the company's business goals, and has a reward and punishment system.

Pertanggungjawaban

Pengelolaan usaha Bank harus dipastikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Selain itu Pertanggungjawaban Bank juga berbentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini Bank Riau Kepri mewujudkan prinsip Pertanggungjawaban antara lain melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Senantiasa bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan beRpegang teguh pada hukum yang berlaku.
2. Memiliki kebijakan internal Bank sebagai panduan dan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan aktivitas operasional Bank.
3. Memiliki Divisi Internal Audit, Divisi Kepatuhan yang berfungsi sebagai *second line of defense* (*ex ante*) yaitu senantiasa memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
4. Senantiasa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan melalui implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Accountability

The management of the Bank's business must be ensured in accordance with the prevailing laws and regulations, the principles of sound Bank management. In addition, Bank Accountability also takes the form of concern for the environment and the surrounding community. In this case, Bank Riau Kepri embodies the principle of accountability, among others, through the following:

1. Always act with the principle of prudence and adhere to the applicable laws.
2. Have the Bank's internal policies as guidelines and guidelines for employees in carrying out the Bank's operational activities.
3. Having an Internal Audit Division, a Compliance Division that functions as a second line of defense (ex ante), which is to always ensure that the policies, regulations, systems, and procedures as well as the business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the laws and regulations applicable laws and regulations, as well as ensuring the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other competent supervisory authorities.
4. Always make a positive contribution to society and care about environmental sustainability through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR).

Kemandirian

Dalam mewujudkan prinsip Kemandirian, manajemen dan seluruh individu dalam Bank memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank. Prinsip ini dipegang teguh oleh Bank Riau Kepri dalam hal:

1. Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua.
2. Mayoritas anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Direktur Utama maupun Direktur lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.
3. Bank telah memiliki aturan mengenai Benturan Kepentingan yang diatur di dalam Kode Etik Kepatuhan Bank Riau Kepri maupun Pedoman Benturan Kepentingan.

Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) dipegang teguh oleh Bank Riau Kepri yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentanganan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan, perwujudan prinsip Kewajaran dan Kesetaraan di Bank Riau Kepri antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Independence

In realizing the principle of Independence, management and all individuals in the Bank are competent, able to act objectively, and are free from influence/pressure from any (independent) party and have a strong commitment to developing the Bank. This principle is firmly upheld by Bank Riau Kepri in terms of:

1. *The composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners are not mutually related to the second degree.*
2. *The majority of the members of the Board of Commissioners are Independent Commissioners. The President Director and other Directors come from parties that are independent of the controlling shareholder, because they do not have financial, management, share ownership and/or family relations with the controlling shareholder.*
3. *The Bank has rules regarding Conflict of Interest which are stipulated in the Code of Ethics for Bank Riau Kepri Compliance and Conflict of Interest Guidelines.*

Fairness and Equality

The Principle of Fairness and Equality (Fairness) is firmly adhered to by Bank Riau Kepri which is manifested in every decision taken by always taking into account the interests of the majority shareholder and providing protection to minority shareholders and other stakeholders from manipulation and transactions that are against the prevailing laws and regulations. . Overall, the embodiment of the principles of Fairness and Equality in Bank Riau Kepri includes the following:

1. *Paying attention to the interests of all stakeholders based on the principles of equality and fairness (equal treatment).*
2. *Provide opportunities for all stakeholders to provide input and convey opinions for the Bank's interests as well as open access to information in accordance with the principle of openness.*

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance Structure and Mechanism

Struktur Organ Perusahaan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur dan mekanisme tata kelola di Bank Riau Kepri mengacu kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Bank Indonesia dan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta praktik-praktik yang berlangsung di Perbankan. Struktur organ Bank Riau Kepri terdiri dari 3(tiga) organ, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum pengambilan keputusan bagi pemegang saham perseroan.
2. Dewan Komisaris sebagai Pengawas Perseroan.
3. Direksi sebagai Pengurus Perseroan yang posisinya sejajar dan memiliki fungsi saling *check and balances*.

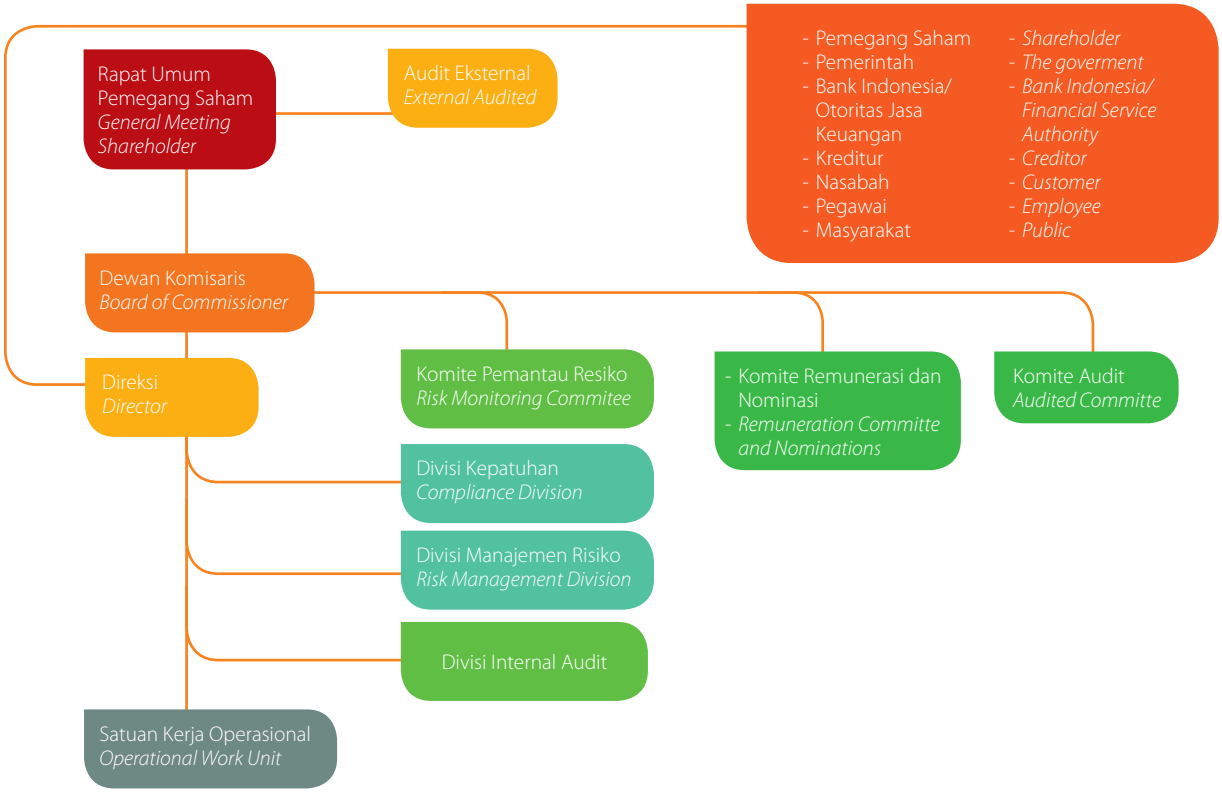
Struktur Organ Bank Riau Kepri disajikan dalam bagan di bawah ini:

Company Organ Structure

In accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), the structure and governance mechanism at Bank Riau Kepri refers to the applicable laws and regulations, Bank Indonesia regulations and Financial Services Authority regulations, as well as ongoing practices. in Banking. The organ structure of Bank Riau Kepri consists of 3(three) organs, namely:

1. *General Meeting of Shareholders (GMS) as a decision-making forum for the company's shareholders.*
2. *The Board of Commissioners as the Supervisor of the Company.*
3. *The Board of Directors as the Company's Management has an equal position and has the function of mutual checks and balances.*

The Organ Structure of Bank Riau Kepri is presented in the chart below:



Struktur Tata Kelola

1. Anggaran Dasar Bank Riau Kepri.
2. Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 001/KEPDK/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
3. Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 001/KEPDKS/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
4. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 082/KEPDIR/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
5. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 012B/KEPDIR/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
6. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 031/KEPDIR/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
7. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 046/KEPDIR/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
8. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 049/KEPDIR/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
9. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 071A/KEPDIR/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
10. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 028/KEPDIR/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
11. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 032/KEPDIR/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
12. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 048/KEPDIR/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
13. Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 080/KEPDIR/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Governance Soft Structure

1. *Articles of Association of Bank Riau Kepri.*
2. *Decision of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 001/KEPDK/2021 dated May 25, 2021 concerning the Work Manual for the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
3. *Decree of the Board of Commissioners of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 001/KEPDKS /III/2011 dated March 28, 2011 concerning Audit Committee Work Guidelines, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee for PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
4. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 082/KEPDIR/2017 dated October 30, 2017 concerning Company Guidelines (BPP) for the Implementation ofGovernance of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
5. *Decision of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 012B/KEPDIR/2021 dated February 26, 2021 regarding the Internal Audit Charter of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
6. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 031/KEPDIR/ 2019 dated June 21, 2019 concerning the Compliance Charter of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
7. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 046/KEPDIR/2019 dated August 21, 2019 concerning the Company Manual Book (BPP) for the Implementation of the Compliance Function of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
8. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 049/KEPDIR/2019 dated August 27, 2019 concerning Work Guidelines for Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
9. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 071A/KEPDIR/2019 dated October 28, 2019 concerning the Compliance Code of Conduct of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
10. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 028/KEPDIR/2021 dated April 30, 2021 regarding the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Anti-Fraud Strategy of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
11. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 032/ KEPDIR / 2020 dated April 22, 2020 concerning Guidelines for Gratification Control in PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri*
12. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 048/KEPDIR/2020 dated June 29, 2020 concerning Guidelines for Conflict of Interest of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
13. *Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 080/KEPDIR/2020 dated 27 October 2020 concerning Guidelines for the Reporting System for Alleged Violations (Whistleblowing System) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*

Komitmen Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

Laporan *Assesment* GCG

Periode Semester I Tahun 2021

Commitment to Implementing Sustainable Governance

GCG Assessment Report

Semester I Year 2021

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola *Results of Self-Assessment on Implementation of Governance*		
Peringkat *Rating*		Definisi Peringkat *Definition of Rank*
Individual	3	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. *The Bank's management has implemented good governance in general. This is reflected in the adequate compliance with the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the application of Good Corporate Governance principles, in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from the Bank's management.*
Analisis | *Analisys*		

Untuk periode Januari s.d. Juni 2021, Bank telah melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) terhadap penerapan Tata Kelola Bank Riau Kepri yang secara umum dinilai **cukup baik**. hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang termuat di dalam *Governance Structure*, *Governance Process* maupun pada *Governance Outcome*.

Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan penerapan Tata Kelola di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

*For the period January to d. June 2021, the Bank has conducted a self-assessment on the implementation of Bank Riau Kepri Governance which is generally considered **quite good**. this is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Governance contained in the Governance Structure, Governance Process as well as in the Governance Outcomes.*
The determination of the ranking of the results of the self-assessment of the implementation of Governance above, was produced with considerations covering the governance structure, governance process, and governance outcome.

Struktur Tatakelola

1. Aspek positif
   a. Sepanjang periode laporan (Januari s.d. Juni 2021), jumlah dan komposisi anggota Direksi Bank sudah memenuhi ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan ketentuan internal Bank yang mengatur tentang SOT Bank.
   b. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kemauan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kompetensi dan pengetahuan tentang perbankan serta perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

      Salah (1) satu bentuk pembelajaran yang berkelanjutan antara lain adalah dengan keikutsertaan Dewan Komisaris dan Direksi dalam berbagai pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya.

Governance Structure

1. *Positive aspects*
   a. Throughout the reporting period (January to June 2021), the number and composition of the members of the Bank's Board of Directors have complied with the OJK regulations concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and the Bank's internal regulations governing Bank SOT.
   b. Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors have the will to carry out continuous learning in order to increase competence and knowledge about Banking as well as the latest developments related to finance/other fields that support the implementation of their duties and responsibilities.

      (1) one form of continuous learning, among others, is the participation of the Board of Commissioners and the Board of Directors in various trainings/seminars and workshops related to their field of work.

c. Bank telah melakukan pengkinian dan evaluasi Pedoman Kerja Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang terkini. Di dalam pedoman tersebut telah memuat pengaturan tentang tata tertib kerja, etika kerja, waktu kerja, dan ketentuan rapat Dewan Komisaris.

2. Aspek Negatif
   a. Untuk jumlah anggota Dewan Komisaris Bank pada periode pelaporan adalah berjumlah 3 (dua) orang, yaitu :
      a). Yan Prana Jaya Indra Rasyid
      b). Taufiqurrahman
      c). Rita Anugerah
      Namun, dengan berakhirnya masa jabatan Taufiqurrahman (Komisaris Independen) yang telah berakhir masa jabatannya pada tanggal 3 Maret 2021, dan dengan pemberhentian Yan Prana Jaya Indra Rasyid sebagai Komisaris Utama (Komisaris Non Independen) melalui Keputusan para Pemegang Saham di luar RUPS-LB pada tanggal 7 April 2021, maka dengan demikian komposisi Dewan Komisaris Bank per Juni 2021 terdiri dari 1 (satu) orang yaitu Rita Anugerah (Komisaris Independen).
      Hal ini berdampak pada komposisi Dewan Komisaris Bank yang belum memenuhi persyaratan jumlah dan komposisi minimal Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mensyaratkan jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
   b. Dengan berakhirnya masa jabatan Taufiqurrahman (Komisaris Independen), seluruh Komite di bawah Dewan Komisaris diketuai oleh 1 (satu) orang Komisaris Independen (Rita Anugerah).
      Kondisi ini belum sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank, yang mengatur bahwa Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite pada 1 (satu) komite lainnya.
   c. Untuk periode penilaian (Juni 2021), komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) PT Bank Riau Kepri terdiri dari 1 (satu) orang ketua yang juga Komisaris Independen (diketuai oleh Rita Anugerah yang juga merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko), dan 1 (satu) orang anggota yang merupakan Pemimpin Divisi Manajemen SDM (Muhammad Affan).

c. The Bank has updated and evaluated the Work Guidelines for the Board of Commissioners with due observance of the latest statutory provisions. The guidelines contain regulations on work procedures, work ethics, working hours, and provisions for the Board of Commissioners meeting.

2. Negative Aspect
   a. The number of members of the Bank's Board of Commissioners in the reporting period is 3 (two) people, namely:
      a). Yan Prana Jaya Indra Rashid
      b). Taufiqurrahman
      c). Rita Anugerah
      However, with the end of Taufiqurrahman's term of office (Independent Commissioner) whose term of office has ended on March 3, 2021, and with the dismissal of Yan Prana Jaya Indra Rasyid as President Commissioner (Non Independent Commissioner) through the Decision of the Shareholders outside the EGMS on 7 April 2021, therefore the composition of the Bank's Board of Commissioners as of June 2021 consists of 1 (one) person, namely Rita Anugerah (Independent Commissioner).

      This has an impact on the composition of the Bank's Board of Commissioners which has not met the requirements for the minimum number and composition of the Board of Commissioners as stipulated in the OJK regulations concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks which requires the number of members of the Board of Commissioners to be at least 3 (three) people and not exceed the number of members. Directors.
   b. With the end of Taufiqurrahman's term of office (Independent Commissioner), all Committees under the Board of Commissioners are chaired by 1 (one) Independent Commissioner (Rita Anugerah).
      This condition is not in accordance with the provisions of the OJK concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Banks, which stipulates that the Committee Chair can only hold concurrent positions as committee chairman in 1 (one) other committee.
   c. For the assessment period (June 2021), the composition of the Remuneration and Nomination Committee (KRN) of PT Bank Riau Kepri consists of 1 (one) chairman who is also an Independent Commissioner (chaired by Rita Anugerah who also serves as Chair of the Audit Committee and Chair of the Risk Monitoring Committee), and 1 (one) member who is the Head of the HR Management Division (Muhammad Affan).

Komposisi ini belum sesuai dengan ketentuan OJK tentang Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum, yang mengatur bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia.

This composition is not in accordance with the provisions of the OJK concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, which stipulates that the Remuneration and Nomination Committee shall consist of at least 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) Executive Officer in charge of the function of human Resources.

Governance Process

1. Aspek positif
   a. Dengan teRpenuhinya kelengkapan struktur Direksi Bank dan tidak adanya rangkap tugas dari masing-masing Direksi sampai dengan periode laporan, maka pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab Direksi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan optimal, dimana saat ini pelaksanaan pengelolaan Bank telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan SOTK Bank serta ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Kerja Direksi.
   Di samping hal tersebut di atas, terkait penetapan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi, pengambilan keputusan rapat oleh Direksi telah dilakukan secara efektif dan efisien yang dihadiri oleh seluruh Direksi.
   b. Direksi sepanjang periode laporan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
   c. Direksi selalu memonitor pelaksanaan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank antara lain dengan melakukan Rapat Evaluasi Kinerja secara berkala. Strategi dan langkah korektif dibahas Direksi bersama unit kerja terkait pada saat pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja tersebut.

   Sepanjang periode laporan, Direksi telah melaksanakan 4 (empat) kali Rapat Evaluasi Kinerja dan 1 (satu) kali rapat evaluasi Tahunan, yaitu:
   - Rapat Evaluasi Tahunan (*Business Meeting*) yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Januari 2021;
   - Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan IV yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Januari 2021;
   - Rapat Evaluasi Kinerja Januari 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2021;
   - Rapat Evaluasi Kinerja Februari 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2021; dan
   - Rapat Evaluasi Kinerja April 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2021.

   Selain Rapat Evaluasi Kinerja dan Tahunan, Direksi secara rutin membahas langkah-langkah konkrit dan kebijakan strategis yang akan dilakukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan di

Governance Process

1. Positive aspects
   a. With the completeness of the structure of the Bank's Board of Directors and the absence of concurrent duties from each of the Directors until the reporting period, the implementation of the functions, duties and responsibilities of the Board of Directors can be carried out more effectively and optimally, where currently the implementation of Bank management is in accordance with the Articles of Association and SOTK. Bank and the provisions that govern the Work Guidelines for the Board of Directors.
   In addition to the above, related to the determination of policies and strategic decisions through the mechanism of the Board of Directors meeting, the decision making of the meeting by the Board of Directors has been carried out effectively and efficiently which was attended by all the Directors.
   b. The Board of Directors during the reporting period did not give general power of attorney to other parties which resulted in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.
   c. The Board of Directors always monitors the implementation and achievement of the Bank's Business Plan, among others by conducting periodic Performance Evaluation Meetings. Strategies and corrective steps are discussed by the Board of Directors together with the relevant work units during the Performance Evaluation Meeting.

   Throughout the reporting period, the Board of Directors has held 4 (four) Performance Evaluation Meetings and 1 (one) annual evaluation meeting, namely:
   - *Annual Evaluation Meeting (Business Meeting) which will be held on January 13-15, 2021;*
   - *Quarter IV Performance Evaluation Meeting which will be held on January 13-15, 2021;*
   - *January 2021 Performance Evaluation Meeting to be held on 02 February 2021;*
   - *Performance Evaluation Meeting February 2021 to be held on March 5, 2021; and*
   - *April 2021 Performance Evaluation Meeting to be held on 06 May 2021.*

   In addition to the Annual and Performance Evaluation Meetings, the Board of Directors regularly discusses concrete steps and strategic policies that will be carried out to achieve the targets set in the RBB

dalam RBB dengan unit kerja kantor pusat, baik yang dilaksanakan oleh seluruh Direksi maupun oleh masing-masing Direksi bersama Direktorat-nya.

2. Aspek Negatif
   a. Pada periode laporan, masih terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern Bank berupa lemahnya supervisi atasan terhadap pegawai di bawah supervisinya.

      Kelemahan ini berdampak pada terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh pegawai Bank akibat lemahnya supervisi dari atasan kepada bawahannya.
   b. Untuk komitmen temuan OJK Tahun 2020 periode komitmen bulan Januari – Juni 2021, dari 15 komitmen yang harus ditindaklanjuti, Bank menyelesaikan sebanyak 13 komitmen, sehingga masih terdapat 2 (dua) komitmen temuan yang masih dalam proses ditindaklanjuti.

Governance Outcome

1. Aspek positif
   a. Kelengkapan jumlah dan komposisi Direksi Bank saat ini beRpengaruh pada pencapaian target kinerja Bank posisi Juni 2021, hal ini terlihat dengan menggunakan indikator target kinerja Bank semester I Tahun 2021 pada RBB 2021.

      Target aset, laba, dan DPK tercapai melebihi target yang ditetapkan. Target yang belum tercapai hanya target kredit dengan deviasi 1,23% (realisasi 98,77% dari target).
   b. Sepanjang periode pelaporan Direksi telah mengungkapkan beberapa kebijakan yang bersifat strategis baik dibidang kepegawaian maupun operasional secara transparan kepada seluruh pegawai melalui media yang mudah diakses pegawai maupun melalui sosialisasi dan pertemuan langsung dengan pegawai.

2. Aspek Negatif
   Pada periode pelaporan masih terdapat kelemahan dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank, antara lain sebagai berikut:
   - Terdapat pelanggaran SOP pada jaringan kantor Bank yang berdampak pada terjadinya fraud yang dapat beRpotensi menimbulkan kerugian Bank.
   - Terdapat pengenaan sanksi denda dari pihak regulator yaitu denda atas ketidaksesuaian laporan debitur UMKM pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

with the head office work unit, both implemented by the entire Board of Directors and by each Board of Directors. with the Directorate.

2. *Negative Aspect*
   a. *During the reporting period, there were still weaknesses in the Bank's Internal Control System in the form of weak supervisory supervision of employees under their supervision.*

      This weakness has an impact on the occurrence of fraud committed by Bank employees due to weak supervision from superiors to subordinates.
   b. *For the commitments of OJK findings in 2020 for the commitment period of January – June 2021, of the 15 commitments that must be followed up, the Bank completed 13 commitments, so there are still 2 (two) findings commitments that are still in the process of being followed up.*

Governance Outcome

1. *Positive aspects*
   a. *The completeness of the number and composition of the Bank's current Board of Directors affects the achievement of the Bank's performance target for the position of June 2021, this can be seen by using the Bank's performance target indicators for the first semester of 2021 in the 2021 RBB.*

      Target assets, profits, and TPF are achieved exceeding the set targets. The target that has not been achieved is only the credit target with a deviation of 1.23% (98.77% realization of the target).
   b. *Throughout the reporting period, the Board of Directors has disclosed several strategic policies, both in the field of personnel and operations, transparently to all employees through media that are easily accessible to employees as well as through socialization and direct meetings with employees.*

2. *Negative Aspect*
   During the reporting period, there were still weaknesses in the implementation of the Bank's compliance function, including the following:
   - *There are SOP violations in the Bank's office network which have an impact on the occurrence of fraud which can potentially cause Bank losses.*
   - *There is the imposition of fines from the regulator, namely fines for non-compliance with MSME debitor reports in the Financial Information Service System (SLIK).*

Periode Semester II Tahun 2021 | ***Semester II Year 2021***

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola *Results of Self-Assessment on Implementation of Governance*		
Peringkat *Rating*		Definisi Peringkat *Definition of Rank*
Individual	3	Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip TataKelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank. *The Bank's management has implemented good governance in general. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Governance. In the event that there are weaknesses in the application of Good Corporate Governance principles, in general these weaknesses are quite significant and require sufficient attention from the Bank's management.*
Analisis | *Analisys*		
Untuk periode Juli s.d. Desember 2021, Bank telah melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) terhadap penerapan Tata Kelola Bank Riau Kepri yang secara umum dinilai **cukup baik**. hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang termuat di dalam *Governance Structure*, *Governance Process* maupun pada *Governance Outcome*. Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan penerapan Tata Kelola di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi *governance structure*, *governance process,* dan *governance outcome*. *For the period July to December 2021, the Bank has conducted a self-assessment (self-assessment) on the implementation of Bank Riau Kepri Governance which is generally considered **passable**. this is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Governance contained in the Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome.* *Determination of the ranking of the results of the self-assessment of the implementation of the above Governance implementation, is produced with considerations covering the governance structure, governance process, and governance outcome.*		

Governance Structure

1. Aspek positif
   a. Untuk susunan Direksi Bank periode Juli s.d. Desember 2021 adalah sebagai berikut:
      1). Dengan berakhirnya masa jabatan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Eka Afriadi) per tanggal 4 Juli 2021, maka jumlah anggota Direksi Bank sampai dengan tanggal 15 November 2021 adalah berjumlah 4 (empat) orang, yaitu sebagai berikut:
         a). Andi Buchari (Direktur Utama)
         b). Tengkoe Irawan (Direktur Kredit dan Syariah)
         c). M.A. Suharto (Direktur Dana dan Jasa)
         d). Said Syamsuri (Direktur Operasional)

      Untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risko selama periode 5 Juli – 15 November 2021, Direktur Operasional (Said Syamsuri) ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risko berdasarkan Rapat Direksi tertanggal 30 Juni 2021 dan persetujuan Dewan Komisaris Bank sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 081/KS.01/DK/2021 perihal Persetujuan Penggantian Sementara

Governance Structure

1. *Positive aspects*
   a. *The composition of the Bank's Board of Directors for the period July to December 2021 is as follows:*
      1). *With the end of the term of office of the Director of Compliance and Risk Management (Eka Afriadi) as of July 4, 2021, the number of members of the Board of Directors of the Bank up to November 15, 2021 is 4 (four) people, as follows:*
         a). *Andi Buchari (President Director)*
         b). *Tengkoe Irawan (Director of Credit and Sharia)*
         c). *M.A. Suharto (Director of Funds and Services)*
         d). *Said Syamsuri (Director of Operations)*

      To fill the vacancy of the Director of Compliance and Risk Management for the period 5 July – 15 November 2021, the Director of Operations (Said Syamsuri) was appointed as a temporary replacement for the Compliance and Risk Management Director based on the Board of Directors Meeting dated 30 June 2021 and the approval of the Bank's Board of Commissioners in accordance with the letter of the Board of Commissioners Number 081/KS.01/DK/2021 concerning Approval for Temporary Replacement

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri.

2). Dengan ditetapkannya Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan akta RUPS-LB tanggal 15 November 2021 dan telah diadministrasikan oleh OJK di dalam Sistem Administrasi Pengawasan OJK, maka dengan demikian jumlah dan komposisi Direksi Bank pada akhir periode laporan (Desember 2021) telah memenuhi ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Bank.

b. Sepanjang periode penilaian (Juli s.d. Desember 2021), seluruh Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan atau lembaga lain. Seluruh Direksi saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada Bank Riau Kepri saja.

c. Direksi dan Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang *up to date* dengan anggaran dasar Bank dan ketentuan regulator yang berlaku, dimana di dalamnya diatur ketentuan mengenai persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris, etika kerja, waktu kerja, dan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

d. Sepanjang periode laporan, Direksi dan Dewan Komisaris Bank telah mengikuti pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya khususnya peningkatan pengetahuan Perbankan Syariah dalam rangka Konversi menjadi Bank.

e. Sepanjang periode semester II 2021, Bank telah melakukan peningkatan kompetensi dalam bentuk pemberian pelatihan, *workshop,* dan sosialisasi kepada pegawai Bank. Pelatihan difokuskan pada peningkatan pemahaman pegawai terhadap pengetahuan Perbankan Syariah dalam rangka persiapan Bank untuk Konversi menjadi BUS.

Sampai dengan posisi Desember 2021, seluruh Pegawai Bank telah memiliki Sertifikat Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (PDPS).

2. Aspek Negatif

a. Untuk susunan anggota Dewan Komisaris Bank periode Juli s.d. Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1). Sepanjang periode Juli s.d 15 November 2021 jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris Bank hanya berjumlah 1 (satu) orang, yaitu Komisaris Independen (Rita Anugerah) sehingga dengan demikian belum memenuhi persyaratan jumlah dan komposisi minimal Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang mensyaratkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3

of the Director of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri.

2). With the stipulation of the Director of Compliance and Risk Management based on the deed of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated November 15, 2021 and has been administered by OJK in the OJK Supervision Administration System, therefore the number and composition of the Bank's Directors at the end of the reporting period (December 2021) has complied with OJK regulations concerning the Implementation Governance for Commercial Banks and Bank's Organizational Structure and Work Procedure (SOT).

b. Throughout the assessment period (July to December 2021), all of the Bank's Directors do not hold concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers in other Banks, companies and or institutions. The entire Board of Directors currently only serves as management at Bank Riau Kepri.

c. The Board of Directors and the Board of Commissioners have up-to-date work guidelines and procedures with the Bank's articles of association and the applicable regulatory provisions, which include provisions regarding the requirements of the Board of Directors and the Board of Commissioners, work ethics, working hours, and meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

d. Throughout the reporting period, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Bank have attended training/seminars and workshops related to their field of work, especially increasing knowledge of Islamic Banking in the context of Conversion to Bank.

e. Throughout the semester II 2021 period, the Bank has made competency improvements in the form of providing training, workshops, and socialization to Bank employees. The training was focused on increasing employees' understanding of Islamic Banking knowledge in preparation for the Bank's conversion to BUS.

As of the position of December 2021, all Bank Employees have obtained a Sharia Banking Basic Education Certificate (PDPS).

2. Negative Aspect

a. The composition of the members of the Bank's Board of Commissioners for the period July to December 2021 is as follows:

1). During the period from July to November 15, 2021, the number and composition of the members of the Bank's Board of Commissioners only amounted to 1 (one) person, namely the Independent Commissioner (Rita Anugerah) and thus did not meet the requirements for the minimum number and composition of the Board of Commissioners as stipulated in the OJK regulations concerning the Implementation of Governance. Management for Commercial Banks, which requires that the number of members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) people

(tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

2). Dengan telah ditetapkannya Komisaris Utama dan Komisaris Independen berdasarkan RUPS-LB tanggal 15 November 2021, maka jumlah dan komposisi Dewan Komisaris Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. namun untuk pencatatan salah seorang Komisaris Independen Bank (Bapak Roy Prakoso) baru ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK pada tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 perihal Laporan Pengangkatan Pengurus PT BPD Riau Kepri.

b. Untuk periode Juli s.d. 15 November 2021 terdapat kondisi rangkap jabatan Komisaris sebagai Ketua Komite Bank yaitu Rita Anugerah merangkap jabatan sebagai Ketua Komite pada 3 (tiga) Komite Bank yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Setelah pengangkatan Komisaris Utama dan Komisaris Independen pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, Ketua Komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1). Rita Anugerah (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Remunerasi & Nominasi.

2). Roy Prakoso (Komisaris Independen) sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.

Namun, sampai dengan akhir periode penilaian (Desember 2021) terdapat salah seorang Komisaris Independen (Bapak Roy Prakoso) yang juga Ketua Komite Pemantau Risiko belum tercatat pada Sistem Administrasi Pengawasan OJK dan baru ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK pada tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 perihal Laporan Pengangkatan Pengurus PT BPD Riau Kepri.

c. Sepanjang periode penilaian, dari 23 (dua puluh tiga) orang auditor internal Bank, masih terdapat 4 (empat) orang auditor internal Bank yang belum memiliki sertifikasi di bidang audit intern.

Governance Process

1. Aspek positif
   a. Dengan teRpenuhinya kelengkapan struktur Direksi Bank dan tidak adanya rangkap tugas dari masing-masing Direksi, maka pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direksi dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan optimal, dimana saat ini pelaksanaan pengelolaan Bank telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan SOTK

and does not exceed the number of members of the Board of Directors.

2). With the appointment of the President Commissioner and Independent Commissioner based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 15, 2021, the number and composition of the Bank's Board of Commissioners is in accordance with OJK regulations concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, but for the registration of (1) one of the Bank's Independent Commissioners (Mr. Roy Prakoso) was administered in the OJK supervision administration on January 25, 2022 based on OJK letter Number S-43/KO.053/2022 regarding the Appointment Report for the Management of PT BPD Riau Kepri.

b. For the period from July to November 15, 2021, there is a concurrent position of Commissioner as chairman of the Bank's committee, namely Rita Anugerah concurrently serving as Committee Chair in 3 (three) Bank Committees, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee.

After the appointment of the President Commissioner and Independent Commissioner at the EGMS on November 15, 2021, the Committee Chairs under the Board of Commissioners are as follows:

1). Rita Anugerah (Independent Commissioner) as Chairman of the Audit Committee and Chair of the Remuneration & Nomination Committee.

2). Roy Prakoso (Independent Commissioner) as Chairman of the Risk Monitoring Committee.

However, until the end of the assessment period (December 2021) there is an Independent Commissioner (Mr. Roy Prakoso) who is also the Chairman of the Risk Monitoring Committee who has not been registered in the OJK Supervision Administration System and has only been administered in the OJK supervisory administration on 25 January 2022 based on OJK letter No. S-43/KO.053/2022 regarding the Appointment Report of the Management of PT BPD Riau Kepri.

c. During the assessment period, of the 23 (twenty three) internal auditors of the Bank, there are still 4 (four) internal auditors of the Bank who do not have certification in the field of internal audit.

Governance Process

1. Positive aspects

a. With the completeness of the structure of the Bank's Board of Directors and the absence of dual duties from each of the Directors, the implementation of the functions, duties and responsibilities of the Board of Directors can be carried out more effectively and optimally, where currently the implementation of Bank management is in accordance with the Articles of Association and SOTK of the Bank

Bank serta ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Kerja Direksi.

Di samping hal tersebut di atas, terkait penetapan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi, pengambilan keputusan rapat oleh Direksi telah dilakukan secara efektif dan efisien yang dihadiri oleh seluruh Direksi.

b. Proses pemilihan, penunjukan, dan pengangkatan Direktur Kepatuhan Bank telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Bank, ketentuan OJK tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi Bank Umum, ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan & Kepatutan, dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

   Sdr. Fajar Restu Febriansyah sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank telah disetujui oleh OJK berdasarkan Surat OJK No. SR-249/PB.12/2021 tanggal 29 September 2021, yang ditindaklanjuti dengan pengangkatan ybs. pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, serta telah diadministrasikan oleh OJK di dalam Sistem Administrasi Pengawasan OJK berdasarkan Surat OJK No. S-463/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021.

c. Direksi sepanjang periode laporan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

d. Terhadap temuan audit pihak regulator, Direksi telah meminta unit kerja terkait untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut.
   Sampai dengan akhir periode penilaian (Desember 2021):
   1). Untuk komitmen temuan OJK Tahun 2020, seluruh komitmen tindaklanjut Bank telah selesai ditindaklanjuti.
   2). Untuk komitmen temuan OJK Tahun 2021, dari 26 (dua puluh enam) yang menjadi komitmen untuk bulan Desember 2021, seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu komitmen yang ditetapkan.

e. Direksi selalu memonitor pelaksanaan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank antara lain dengan melakukan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja secara berkala. Strategi dan langkah korektif dibahas Direksi bersama unit kerja terkait pada saat pelaksanaan Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja tersebut.

   Sepanjang periode penilaian, Direksi telah melaksanakan beberapa kali Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja, yaitu :
   - Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2021;
   - Rapat Monitoring Kinerja bulan September 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2021;

as well as the provisions laid down regulates the Work Guidelines for the Board of Directors.

In addition to the above, related to the determination of policies and strategic decisions through the mechanism of the Board of Directors meeting, the decision making of the meeting by the Board of Directors has been carried out effectively and efficiently which was attended by all the Directors.

b. The process of selecting, and appointing the Director of Compliance of the Bank has been carried out in accordance with the articles of association of the Bank, the provisions of the OJK regarding the Implementation of Good Governance for Commercial Banks, the provisions of the OJK concerning the Fit & Proper Test, and other applicable statutory provisions.

Mr. Fajar Restu Febriansyah as Director of Compliance and Bank Risk Management has been approved by OJK based on OJK Letter No. SR-249/PB.12/2021 dated September 29, 2021, which was followed up with the appointment of the person concerned at the EGMS on November 15, 2021, and has been administered by OJK in the OJK Supervision Administration System based on OJK Letter No. S-463/KO.053/2021 dated December 7, 2021.

c. The Board of Directors during the reporting period did not give general power of attorney to other parties which resulted in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.

d. Regarding the regulatory audit findings, the Board of Directors has asked the relevant work units to follow up on the findings.
Until the end of the assessment period (December 2021):
1). For the commitment of OJK findings in 2020, all follow-up commitments from the Bank have been followed up.
2). For the commitment of OJK findings in 2021, of the 26 (twenty six) commitments for December 2021, all of them have been followed up according to the commitment deadline set.

e. The Board of Directors always monitors the implementation and achievement of the Bank's Business Plan, among others by conducting periodic Performance Evaluation and Monitoring Meetings. Strategies and corrective steps are discussed by the Board of Directors together with the relevant work units during the Performance Evaluation and Monitoring Meeting.

Throughout the assessment period, the Board of Directors has held several Performance Evaluation and Monitoring Meetings, namely:
- *Quarter II Performance Evaluation Meeting in 2021 which will be held on 27 July 2021;*
- *September 2021 Performance Monitoring Meeting to be held on 13 October 2021;*

- Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021;
- Rapat Persiapan Tutup Buku Tahun 2021 dan Prognosa Pencapaian RBB 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021; dan
- Rapat Monitoring Kinerja Cabang bulan Desember 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021.

Selain Rapat Evaluasi dan Monitoring Kinerja, Direksi secara rutin membahas langkah-langkah konkrit dan kebijakan strategis yang akan dilakukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam RBB, dan kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka percepatan proses Konversi menjadi BUS, baik yang dilaksanakan oleh seluruh Direksi maupun oleh masing-masing Direksi bersama unit kerja terkait.

2. Aspek Negatif
   a. Terdapat temuan dari OJK terkait pembebanan biaya-biaya kepada Bank di luar dari remunerasi dan fasilitas lain Direksi yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, yaitu sebagai berikut :
      1). Biaya *Wrapping Bag*
      2). Biaya Laundry
      3). Biaya atas kelebihan bagasi

      Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Pengelolaan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang menyebutkan bahwa "Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS".

      Terkait temuan tersebut, Bank akan menindalanjutinya dimana Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) akan melakukan pembahasan mengenai hak dan fasiltas yang diterima pengurus dalam SK Remunerasi. Selanjutnya, Bank juga akan mengatur ketentuan biaya yang timbul akibat perjalanan dinas yang belum diatur di dalam SK Remunerasi yang berlaku saat ini.
   b. Pada periode penilaian, terdapat temuan OJK dimana Bank tidak melaksanakan kewajiban audit intern terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi sesuai kebutuhan, prioritas, dan hasil risiko Teknologi Informasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun sebagaimana diatur dalam POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Bank tidak melaksanakan kewajiban tersebut sejak POJK tersebut ditetapkan yaitu sejak Tahun 2016 hingga posisi pemeriksaan umum OJK Tahun 2021.

- *Quarter III Performance Evaluation Meeting in 2021 which will be held on October 26, 2021;*
- *The 2021 Book Closing Preparation Meeting and the 2021 RBB Achievement Prediction which will be held on 28 December 2021; and*
- *December 2021 Branch Performance Monitoring Meeting which will be held on 28 December 2021.*

In addition to the Performance Evaluation and Monitoring Meeting, the Board of Directors regularly discusses concrete steps and strategic policies that will be carried out to achieve the targets set in the RBB, and strategic policies in the context of accelerating the conversion process into BUS, whether implemented by the entire Board of Directors as well as by each Board of Directors together with the relevant work units.

2. *Negative Aspect*
   a. *There are findings from the OJK regarding the imposition of fees to the Bank outside of the remuneration and other facilities of the Board of Directors that have been determined based on the GMS decision, which are as follows:*
      1). Wrapping Bag Fee
      2). Laundry Fee
      3). Charges for excess baggage

      So that this is not in accordance with Article 22 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Corporate Governance for Commercial Banks, which states that "Members of the Board of Directors are prohibited from taking and/or receiving personal benefits from the Bank, in addition to remuneration and other facilities determined based on the resolution of the GMS".

      Regarding these findings, the Bank will follow up where the Remuneration and Nomination Committee (KRN) will discuss the rights and facilities received by the management in the Remuneration Decree. Furthermore, the Bank will also regulate the provisions for costs incurred due to official travel that have not been regulated in the current Remuneration Decree.
   b. *During the assessment period, there were OJK findings where the Bank did not carry out internal audit obligations on all aspects of the implementation and use of Technology according to the needs, priorities, and risk results of Information Technology at least 1 (one) time in 1 (one) year as stipulated in POJK No. 38/POJK.03/2016 dated December 1, 2016 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks. The Bank has not carried out these obligations since the POJK was stipulated, namely from 2016 until the OJK general examination position in 2021.*

Terkait temuan tersebut, Bank akan menindaklanjutinya dengan memuat rencana audit intern terhadap seluruh aspek dalam penyelenggaraan dan penggunaan Teknologi Informasi di dalam rencana audit Divisi Internal Audit Tahun 2022.

c. Pada periode laporan, masih terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern Bank berupa lemahnya supervisi atasan terhadap pegawai di bawah supervisinya dan rendahnya literasi pegawai Bank terhadap ketentuan-ketentuan internal yang berlaku seperti BPP, SOP, SK Direksi, dan SE Direksi.

   Kelemahan ini berdampak pada terjadinya fraud dan pelanggaran prosedur operasional & perkreditan yang dilakukan oleh pegawai pada beberapa jaringan kantor Bank.

Governance Outcome

1. Aspek positif
   a. Kelengkapan jumlah dan komposisi Direksi Bank saat ini beRpengaruh pada pencapaian target kinerja Bank posisi Desember 2021. Hal ini terlihat dengan menggunakan indikator target kinerja Bank semester II Tahun 2021 pada RBB 2021.

      Target aset, laba, dan DPK tercapai melebihi target yang ditetapkan. Target yang belum tercapai hanya target kredit/pembiayaan dengan deviasi sebesar 4,95% (realisasi 95,05% dari target).

   b. Sepanjang periode pelaporan Direksi telah mengungkapkan kebijakan yang bersifat strategis baik di bidang kepegawaian maupun operasional secara transparan kepada seluruh pegawai melalui media yang mudah diakses pegawai maupun melalui sosialisasi dan pertemuan langsung dengan pegawai.
2. Aspek Negatif
   Pada periode pelaporan masih terdapat kelemahan dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank yang terlihat dari masih adanya pelanggaran SOP yang berdampak pada terjadinya fraud pada 3 (tiga) jaringan kantor Bank yang beRpotensi menimbulkan kerugian Bank.

Regarding these findings, the Bank will follow up by including an internal audit plan for all aspects of the implementation and use of Information Technology in the Internal Audit Division's 2022 audit plan.

c. During the reporting period, there were still weaknesses in the Bank's Internal Control System in the form of weak supervisory supervision of employees under their supervision and low literacy of the Bank's employees regarding applicable internal regulations such as BPP, SOP, SK Directors, and SE Directors.

This weakness has an impact on the occurrence of fraud and violations of operational & credit procedures carried out by employees in several of the Bank's office network.

Governance Outcome

1. Positive aspects
   a. The completeness of the number and composition of the Bank's Directors currently affects the achievement of the Bank's performance target for the position of December 2021. This can be seen by using the Bank's performance target indicators for the second semester of 2021 in the 2021 RBB.

      Target assets, profits, and TPF are achieved exceeding the set targets. The target that has not been achieved is only the credit/financing target with a deviation of 4.95% (95.05% realization of the target).

   b. Throughout the reporting period, the Board of Directors has disclosed policies that are strategic in nature both in the field of personnel and operations transparently to all employees through media that are easily accessible to employees as well as through socialization and direct meetings with employees.
2. Negative Aspect
   During the reporting period, there were still weaknesses in the implementation of the Bank's compliance function as seen from the SOP violations that resulted in fraud in 3 (three) Bank office networks that could potentially cause losses to the Bank.

MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN
Corporate Governance Mechanism

Pemegang Saham

Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Bank Riau Kepri, berikut wewenang, hak, dan tanggung jawab Pemegang Saham:

Pemegang saham seri A

1. Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Memiliki hak khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Dapat menukarkan sahamnya dengan saham seri B.
4. Menerima Dividen.
5. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi yang didahulukan dari pemegang saham seri B.

Pemegang saham seri B

1. Menerima Dividen.
2. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Komposisi Pemegang Saham Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:

Shareholders

Authorities, Rights and Responsibilities of Shareholders

Based on the provisions of the Articles of Association of Bank Riau Kepri, the following are the powers, rights and responsibilities of the Shareholders:

Shareholders Series A

1. *Voting at the General Meeting of Shareholders (GMS).*
2. *Has special rights in proposing nominations for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.*
3. *Can exchange its shares with series B shares.*
4. *Receiving Dividends.*
5. *Receive the remaining assets resulting from the liquidation which takes precedence from series B shareholders.*

Shareholders Series B

1. *Receiving Dividends.*
2. *Receive the remaining assets from the liquidation.*

Information of Major and Controlling Shareholders

The composition of the Shareholders of Bank Riau Kepri is as follows:

Tabel Pemegang Saham PT Bank Riau Kepri
Sharehoder PT Bank Riau Kepri Table

Jenis saham *Types of Shares*	Pemegang Saham	*Shareholders*	Jumlah Lembar *Number of Sheets*	Nilai Saham *Share Value*	Presentase (%) *Percentage (%)*
Seri A	Provinsi Riau	*Riau Province*	4.191.682	100.000	38,00
	Provinsi Kepulauan Riau	*Riau Islands Province*	120.000	100.000	1,09
	Pemkot/Kab se-Riau & Kepri	*City/District of Riau & Kepri*	6.689.925	100.000	60,64
Seri B	Kopkar Bank Riau Kepri	*Kopkar Bank Riau Kepri*	30.000	100.000	0,27

Dengan demikian, Bank Riau Kepri tidak memiliki pemegang saham utama dan pengendali individu serta tidak terdapat pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

Thus, Bank Riau Kepri does not have a major and individual controlling shareholder and there are no shareholders acting on behalf of other shareholders.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Bank dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Bank yang berlaku. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the organ that holds the highest authority in the Bank and holds all the powers that are not delegated to the Board of Directors and Commissioners within the limits stipulated in the Law on Limited Liability Companies and the applicable Articles of Association of the Bank. The General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the Company which has authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Act and/or the Articles of Association.

Rapat Umum Pemegang Saham di Bank Riau Kepri terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan)
   RUPS Tahunan diadakan seTahun sekali setelah penutupan Tahun buku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pembahasan antara lain mengenai:
   a. Laporan Tahunan
   b. Usulan penggunaan Laba Bersih
   c. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS Tahunan
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)
   RUPS LB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS LB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

The General Meeting of Shareholders at Bank Riau Kepri consists of:

1. *Annual General Meeting of Shareholders (Annual GMS)*
   The Annual GMS is held once a year after the closing of the financial year which has been audited by a Public Accountant, with discussions including:
   a. Annual report
   b. Proposed use of Net Profit
   c. Other matters that require the approval of the Annual GMS
2. *Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS LB)*
   The EGMS may be held at any time based on the need for the interest of the Company at the request of the Board of Commissioners and/or Shareholders. The Board of Directors is required to hold an EGMS according to a written request from the Board of Commissioners or Shareholders.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tanggal 26 Februari 2021 dan Realisasinya

Implementation of the Extraordinary GMS on 26 February 2021 and its Realization

Pemanggilan *Summons*	Pelaksanaan *Implementation*	Hasil RUPS *Results of the GMS*
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 berdasarkan Surat Nomor : 079/PP.01.04/DIR/2021 tanggal 18 Februari 2021 perihal Penyampaian Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2020 *The summons was carried out on February 18, 2021 based on Letter Number: 079/PP.01.04/DIR/2021 dated February 18, 2021 regarding Submission of Invitations to the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2020 and Extraordinary General Meeting of Shareholders for 2020*	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2021 bertempat di Pekanbaru *The Annual GMS was held on Februari 26, 2021 at Pekanbaru*	Hasil RUPS disampaikan melalui surat kabar Riau Pos dan Batam Pos *The results of the GMS were submitted through the Riau Pos and Batam Pos newspapers*

Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Luar Biasa Tanggal 26 Februari 2021

Recapitulation of Attendance at the Extraordinary GMS on 26 February 2021

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hadir *Be present*	Tidak Hadir *Not present*	Keterangan *Information*
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si.	Gubernur Riau *Governor of Riau*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau *Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government*
2.	H. Firdaus ST., MT.	Walikota Pekanbaru *Mayor of Pekanbaru*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Ir. Hj. El Syabrina, MP. (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru *Based on the Power of Attorney under hand, represented by Ir. Hj. El Syabrina, MP. (Assistant for the Economy and Development of the Regional Secretariat of the Pekanbaru City Government) acting for and on behalf of the Pekanbaru City Government*
3.	Catur Sugeng Susanto, SH.	Bupati Kampar *Regent of Kampar*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar *Representing for and on behalf of the Kampar Regency Government*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hadir *Be present*	Tidak Hadir *Not present*	Keterangan *Information*
4.	Kasmarni, S.sos., MM.	Bupati Bengkalis *Bengkalis Regent*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Heri Indra Putra, SE., ME. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis *Based on the Power of Attorney under hand, represented by H. Heri Indra Putra, SE., ME. (Assistant for the Economy and Development of the Bengkalis Regency Government Secretariat) acting for and on behalf of the Bengkalis Regency Government*
5.	Hendrizal	Bupati Indragiri Hulu *Regent of Indragiri Hulu*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Ibrahim Alimin (Kepala BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu *Based on a personal power of attorney, represented by Ibrahim Alimin (Head of BPKAD Indragiri Hulu Regency) acting for and on behalf of the Indragiri Hulu Regency Government*
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir *Regent of Indragiri Hilir*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Syamsuddin Uti (Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir *Based on a personal power of attorney, represented by H. Syamsuddin Uti (Deputy Regent of Indragiri Hilir Regency) acting for and on behalf of the Indragiri Hilir Regency Government*
7.	Adi Prihantara	Bupati Bintan *Regent of Bintan*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Yandrisyah (Kepala BPKAD Kabupaten Bintan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan *Based on a power of attorney under the hand, represented by Yandrisyah (Head of BPKAD Bintan Regency) acting for and on behalf of the Bintan Regency Government*
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si.	Bupati Karimun *Regent of Karimun*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Dr. Muhammad Firmansyah, M.Sc. (Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun) untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun *Based on the power of attorney under the hand, represented by Dr. Muhammad Firmansyah, M.Sc. (Regional Secretary of Karimun Regency) for and on behalf of the Karimun Regency Government*
9.	Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si.	Bupati Natuna *Regent Natuna*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna *Representing for and on behalf of the Natuna Regency Government*
10.	Drs. H. Alfedri, M.Si.	Bupati Siak *Regent of Siak*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Hendrisan, S.Sos, M.Sc. (Assisten II Kabupaten Siak) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak *Based on the power of attorney under hand, represented by Hendrawan, S.Sos., M.Sc. (Assistant II Siak Regency) acting for and on behalf of the Siak Regency Government*
11.	H. Muhammad Haris	Bupati Pelalawan *Regent of Pelalawan*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Zardewan (Wakil Bupati Pelalawan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan *Based on the Power of Attorney under hand, represented by* H. Zardewan *(Deputy Regent of Pelalawan) acting for and on behalf of the Pelalawan Regency Government* *Based on the Power of Attorney under hand, represented by H. Zardewan (Deputy Regent of Pelalawan) acting for and on behalf of the Government of Pelalawan Regency of the Pelalawan Regency Government*
12.	Drs. H. Mursini, M.Si	Bupati Kuantan Singingi *Regent of Kuantan Singingi*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi *Representing for and on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency*
13.	H. Sukiman	Bupati Rokan Hulu *Regent of Rokan Hulu*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. M. Ruslan, M.Si. (Asisten II Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu *Based on the Power of Attorney under hand, represented by H. M. Ruslan, M.Si. (Assistant II of the Rokan Hulu Regency Government) acting for and on behalf of the Rokan Hulu Regency Government*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hadir *Be present*	Tidak Hadir *Not present*	Keterangan *Information*
14.	H. Suyatno	Bupati Rokan Hilir *Regent of Rokan Hilir*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Muhammad Job Kurniawan, M.Si. (Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir *Based on the Power of Attorney under hand, represented by Muhammad Job Kurniawan, M.Si. (Acting Regional Secretary of Rokan Hilir Regency) acting for and on behalf of the Rokan Hilir Regency Government*
15.	Paisal	Walikota Dumai *Mayor of Dumai*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai *Representing for and on behalf of the City Government of Dumai*
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam *Mayor of Batam*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. Jefridin, MP. (Sekretaris Daerah Kota Batam) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam *Based on the power of attorney under hand, represented by Drs. Jefridin, MP. (Regional Secretary of Batam City) acts for and on behalf of the Batam City Government*
17.	Hj. Rahma, S. IP.	Walikota Tanjung Pinang *Mayor of Tanjung Pinang*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Teguh Ahmad Syafari (Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang *Based on a personal power of attorney, represented by Teguh Ahmad Syafari (Tanjung Pinang City Regional Secretary) acting for and on behalf of the Tanjung Pinang City Government*
18.	Syamsudi, SP.	Bupati Kabupaten Lingga *Regent of Lingga Regency*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Yusrizal, SH. (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lingga) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga *Based on the Power of Attorney under hand, represented by Yusrizal, SH. (Lingga Regency Economic and Development Assistant) acting for and on behalf of the Lingga Regency Government*
19.	H. Muhammad Adil, SH.	Bupati Kepulauan Meranti *Regent of the Meranti Islands*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Bambang Suprianto, SE., Mkn. (Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti *Based on a power of attorney under the hand, represented by Bambang Suprianto, SE., Mkn. (Head of BPKAD of Meranti Islands Regency) acting for and on behalf of the Meranti Islands Regency Government*
20.	H. Ansar Ahmad, SE., MM.	Gubernur Kepulauan Riau *Governor of Riau Islands*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Syamsul Bahrum, Ph. D. (Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau *Based on the power of attorney under hand, represented by H. Syamsul Bahrum, Ph. D. (Assistant for Economic Administration and Development of the Riau Islands Province) acting for and on behalf of the Riau Islands Provincial Government*
21.	Sahtiar, SH., MM.	Bupati Kepulauan Anambas *Regent of Anambas Islands*	√		Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Dr. H. Yendi, MM. (Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kepulauan Anambas) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas *Based on the power of attorney under the hand, represented by Dr. H. Yendi, MM. (Assistant General Administration of the Anambas Islands Regency) acting for and on behalf of the Anambas Islands Regency Government*
22.	DR. Ir. H. Andi Buchari, MM.	Direktur Utama *President Director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan *Attending the meeting as President Director of the Company*
23.	Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Compliance and Management Risk Director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan *Attending the meeting as Compliance and Management Risk Director of the Company*
24.	Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan *Attending the meeting as Director of Operations of the Company*
25	M.A. Suharto, SE.	Direktur Dana dan Jasa *Director of Fund and Service*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa Perseroan *Attending the meeting as Director of Fund and Service of the Company*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hadir *Be present*	Tidak Hadir *Not present*	Keterangan *Information*
26	Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah *Credit and Sharia Director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kredit dan Syariah Perseroan *Attending the Meeting as Director of Credit and Sharia of the Company*
27.	Taufiqurrahman	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan *Attending the meeting as the Independent Commissioner of the Company*
28.	Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan *Attending the meeting as the Independent Commissioner of the Company*

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tanggal 26 Februari 2021

Resolution and Realization of the Extraordinary GMS on 26 February 2021

Agenda Pertama	*First Agenda*
Perkembangan dan tindak lanjut konversi PT Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah	*The development and follow-up of the conversion of PT Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank*
Keputusan Menyetujui menetapkan Pengurus Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri yang masa jabatannya belum berakhir pada saat pengajuan izin konversi (Perubahan Kegiatan Usaha) kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dimaksud, untuk dimasukkan nama-namanya dalam daftar Pengurus Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan.	***Decision*** *Approved the appointment of the Company's Management and Sharia Supervisory Board of the Sharia Business Unit of Bank Riau Kepri whose terms of office have not yet expired at the time of submitting the conversion permit (Change of Business Activities) to the OJK (Financial Services Authority), to include their names in the list of the Company's Management and Supervisory Board Company Sharia.*
Agenda Kedua	*Second Agenda*
Pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi Pengurus Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir Tahun 2021.	*Delegation of authority to the Governor of Riau as the Controlling Shareholder to form a Selection Committee for the Company's Management whose term of office will end in 2021.*
Keputusan Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi Pengurus Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir Tahun 2021.	***Decision*** *Approved the delegation of authority to the Governor of Riau as the Controlling Shareholder to form a Selection Committee for the Company's Management whose term of office will end in 2021.*
Agenda Ketiga	*Third Agenda*
Penetapan Dewan Pengawas Syariah Perseroan	*Determination of the Company's Sharia Supervisory Board*
Keputusan Menyetujui pengangkatan Saudara Haji Saifudin Yuliar, *Licence*, Magister Agama sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dengan masa jabatan selama 4 (empat) Tahun efektif terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan agar dilakukan proses pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	***Decision*** *Approved the appointment of Haji Saifudin Yuliar, License, Master of Religion as a member of the Sharia Supervisory Board with a term of office of 4 (four) years effective from the date of approval from the Financial Services Authority (OJK), and so that the appointment process in question is carried out in accordance with applicable regulations.*

Pelaksanaan RUPS Sirkuler Tanggal 7 April 2021 dan Realisasinya

Implementation of the Circular GMS on 7 April 2021 and its Realization

Pemanggilan *Summons*	Pelaksanaan *Implementation*	Hasil RUPS *Results of the GMS*
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan Surat Nomor: 196/PP.01.04/DIR/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Rencana Pelaksanaan RUPSLB Sirkuler *The summons was carried out on March 15, 2021 based on Letter Number: 196/PP.01.04/DIR/2021 dated March 15, 2021 regarding the Plan for the Implementation of the Circular EGMS*	RUPS Sirkuler dengan mendatangi seluruh Pemegang Saham secara sirkuler di Riau dan Kepulauan Riau. *Circular GMS by visiting all Shareholders in a circular manner in Riau and Riau Islands.*	Hasil RUPS disampaikan melalui surat kabar Riau Pos dan Batam Pos. *Circular GMS by visiting all Shareholders in a circular manner in Riau and Riau Islands.*

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Sirkuler Tanggal 7 April 2021

Table of Attendance Recapitulation at Circular GMS on April 7, 2021

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hadir *Be present*	Tidak Hadir *Not present*	Keterangan *Information*
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si.	Gubernur Riau *Governor of Riau*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau *Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government*
2.	H. Firdaus ST., MT.	Walikota Pekanbaru *Mayor of Pekanbaru*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru *Representing for and on behalf of the Pekanbaru City Government*
3.	Catur Sugeng Susanto, SH.	Bupati Kampar *Regent of Kampar*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar *Representing for and on behalf of the Kampar Regency Government*
4.	Kasmarni, Ssos., MM.	Bupati Bengkalis *Bengkalis Regent*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis *Representing for and on behalf of the Bengkalis Regency Government*
5.	Hendrizal	Plt. Bupati Indragiri Hulu *Act Regent of Indragiri Hulu*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu *Representing for and on behalf of the Indragiri Hulu Regency Government*
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir *Regent of Indragiri Hilir*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir *Representing for and on behalf of the Indragiri Hilir Regency Government*
7.	H. Apri Sujadi	Bupati Bintan *Regent of Bintan*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan *Representing for and on behalf of the Bintan Regency Government*
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si.	Bupati Karimun *Regent of Karimun*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun *Representing for and on behalf of the Karimun Regency Government*
9.	Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M.Si.	Bupati Natuna *Regent Natuna*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna *Representing for and on behalf of the Natuna Regency Government*
10.	Drs. H. Alfedri, M.Si.	Bupati Siak *Regent of Siak*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak *Representing for and on behalf of the Siak Regency Government*
11.	H. Muhammad Haris	Bupati Pelalawan *Regent of Pelalawan*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan *Representing for and on behalf of the Pelalawan Regency Government*
12.	Drs. H. Mursini, M.Si.	Bupati Kuantan Singingi *Regent of Kuantan Singingi*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi *Representing for and on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency*
13.	H. Sukiman	Bupati Rokan Hulu *Regent of Rokan Hulu*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu *Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency*
14.	H. Suyatno	Bupati Rokan Hilir *Regent of Rokan Hilir*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir *Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency*
15.	Paisal	Walikota Dumai *Mayor of Dumai*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai *Representing for and on behalf of the City Government of Dumai*
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam *Mayor of Batam*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam *Representing for and on behalf of the Batam City Government*
17.	Hj. Rahma, S. IP.	Walikota Tanjung Pinang *Mayor of Tanjung Pinang*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang *Representing for and on behalf of the Tanjung Pinang City Government*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hadir *Be present*	Tidak Hadir *Not present*	Keterangan *Information*
18.	Muhammad Nizar	Bupati Kabupaten Lingga *Regent of Lingga Regency*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga *Representing for and on behalf of the Lingga Regency Government*
19.	H. Muhammad Adil, SH.	Bupati Kepulauan Meranti *Regent of the Meranti Islands*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti *Representing for and on behalf of the Meranti Islands Regency Government*
20.	H. Ansar Ahmad, SE., MM.	Gubernur Kepulauan Riau *Governor of Riau Islands*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau *Representing for and on behalf of the Riau Islands Provincial Government*
21.	Abdul Haris, SH.	Bupati Kepulauan Anambas *Regent of Anambas Islands*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Anambas *Representing for and on behalf of the Anambas Regency Government*
22.	DR. Ir. H. Andi Buchari, MM.	Direktur Utama *President Director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan *Attending the meeting as President Director of the Company*
23.	Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Compliance and Management Risk Director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan *Attending the meeting as Compliance and Management Risk Director of the Company*
24.	Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan *Attending the meeting as Director of Operations of the Company*
25	M.A. Suharto, SE.	Direktur Dana dan Jasa *Director of Fund and Service*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa Perseroan *Attending the meeting as Director of Fund and Service of the Company*
26	Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah *Credit and Sharia Director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kredit dan Syariah Perseroan *Attending the Meeting as Director of Credit and Sharia of the Company*
27.	Taufiqurrahman	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan *Attending the meeting as the Independent Commissioner of the Company*
28.	Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan *Attending the meeting as the Independent Commissioner of the Company*

Keputusan dan Realisasi RUPS Sirkuler Tanggal 7 April 2021

Decision and Realization of Circular GMS on 7 April 2021

Agenda Pertama	*First Agenda*
Persetujuan memberhentikan Tuan Yan Prana Jaya Indra Rasyid sebagai Komisaris Utama PT BPD Riau Kepri	*Approval to dismiss Mr. Yan Prana Jaya Indra Rasyid as President Commissioner of PT BPD Riau Kepri*
Keputusan Menyetujui memberhentikan Tuan Yan Prana Jaya Indra Rasyid sebagai Komisaris Utama PT BPD Riau Kepri.	***Decision*** *Approved the dismissal of Mr. Yan Prana Jaya Indra Rasyid as President Commissioner of PT BPD Riau Kepri.*
Agenda Kedua	*Second Agenda*
Persetujuan Penentuan Pengganti Komisaris Utama dengan mekanisme oleh Pansel dilimpahkan kepada Gubenur Riau sebagai Pemegang Saham Pengendali bersamaan dengan Pansel yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 Februari 2021 yang telah dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 16 tanggal 26 februari 2021 di hadapan Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH. Notaris di Pekanbaru.	*Approval for the determination of the replacement for the President Commissioner with the mechanism by the Pansel delegated to the Governor of Riau as the Controlling Shareholder together with the Pansel determined at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 26, 2021, which has made Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Limited Liability Company Riau Kepri Regional Development Number 16 dated February 26, 2021 before Notary Pupung Mulyantini, SH., MH. Notary in Pekanbaru*

Keputusan	*Decision*
Menyetujui Penentuan Pengganti Komisaris Utama dengan mekanisme oleh Pansel dilimpahkan kepada Gubenur Riau sebagai Pemegang Saham Pengendali bersamaan dengan Pansel yang ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 Februari 2021 yang telah dibuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 16 tanggal 26 februari 2021 dihadapan Notaris Pupung Mulyantini,SH,MH Notaris di Pekanbaru.	*Approved the determination of the replacement for the President Commissioner with the mechanism by the Pansel delegated to the Governor of Riau as the Controlling Shareholder together with the Pansel determined at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on February 26, 2021, which had made Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of a Bank Limited Company Riau Kepri Regional Development Number 16 dated February 26, 2021 before Notary Pupung Mulyantini, SH, MH Notary in Pekanbaru.*

RUPS Tahunan dan Luar Biasa Tanggal 18 Juni 2021 dan Realisasinya

Annual and Extraordinary GMS dated 18 June 2021 and its Realization

Pemanggilan *Summons*	Pelaksanaan *Implementation*	Hasil RUPS *Results of the GMS*
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2021 berdasarkan Surat Nomor: 001/PP.01.04/PAN-RUPS/2021 tanggal 27 Mei 2021 perihal Penyampaian Undangan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 dan RUPSLB Tahun 2021 *The summons was carried out on 27 May 2021 based on Letter Number: 001/PP.01.04/PAN-RUPS/2021 dated 27 May 2021 regarding Submission of Invitations to the 2020 Annual GMS and 2021 EGMS.*	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2021 bertempat di Pekanbaru *The Annual GMS was held on June 18, 2021 at Pekanbaru*	Hasil RUPS disampaikan melalui surat kabar Riau Pos dan Batam Pos *The results of the GMS were submitted through the Riau Pos and Batam Pos newspapers*

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan dan Luar Biasa Tanggal 18 Juni 2021

Recapitulation of Attendance at the Annual and Extraordinary GMS on 18 June 2021

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hadir *Be present*	Tidak Hadir *Not present*	Keterangan *Information*
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si.	Gubernur Riau *Governor of Riau*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau *Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government*
2.	H. Firdaus ST., MT.	Walikota Pekanbaru *Mayor of Pekanbaru*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Mus Alimin, S.Ag., Msc. (Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru *Based on a power of attorney under the hand, represented by Mus Alimin, S.Ag., Msc. (Head of the Economic Section of the Pekanbaru City Regional Secretariat) acting for and on behalf of the Pekanbaru City Government*
3.	Catur Sugeng Susanto, SH.	Bupati Kampar *Regent of Kampar*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Yusri, Msc. (Sekretaris daerah Kabupaten Kampar) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar *Based on a power of attorney under the hand, represented by H. Yusri, Msc. (Secretary of the Kampar Regency) acting for and on behalf of the Kampar Regency Government*
4.	Kasmarni, S.sos., MM.	Bupati Bengkalis *Bengkalis Regent*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis *Representing for and on behalf of the Bengkalis Regency Government*
5.	Hendrizal	Plt. Bupati Indragiri Hulu *Act. Regent of Indragiri Hulu*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu *Representing for and on behalf of the Indragiri Hulu Regency Government*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hadir *Be present*	Tidak Hadir *Not present*	Keterangan *Information*
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir *Regent of Indragiri Hilir*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Afrizal (Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir *Based on a personal power of attorney, represented by Afrizal (Regional Secretary of Indragiri Hilir Regency) acting for and on behalf of the Indragiri Hilir Regency Government*
7.	H. Apri Sujadi	Bupati Bintan *Regent of Bintan*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. Adi Prihantara, MM. (Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan *Based on the power of attorney under the hand, represented by Drs. Adi Prihantara,MM (Regional Secretary of Bintan Regency) acts for and on behalf of the Bintan Regency Government*
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si.	Bupati Karimun *Regent of Karimun*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Fajar Harison Abidin (Asisten III Kabupaten Karimun) untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun *Based on a personal power of attorney, represented by Fajar Harison Abidin (Assistant III of Karimun Regency) for and on behalf of the Karimun Regency Government*
9.	Wan Siswandi	Bupati Natuna *Regent Natuna*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna *Representing for and on behalf of the Natuna Regency Government*
10.	Drs. H. Alfedri, M.Si.	Bupati Siak *Regent of Siak*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak *Representing for and on behalf of the Siak Regency Government*
11.	H. Zukri	Bupati Pelalawan *Regent of Pelalawan*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Tengku Mukhlis (Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan *Based on a power of attorney under the hand, represented by H. Tengku Mukhlis (Regional Secretary of Pelalawan Regency) acting for and on behalf of the Pelalawan Regency Government*
12.	Andi Putra, SH., MH.	Bupati Kuantan Singingi *Regent of Kuantan Singingi*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Suhardiman Amby, MM. (Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi *Based on a personal power of attorney, represented by H. Suhardiman Amby, MM. (Vice Regent of Kuantan Singingi Regency) acting for and on behalf of the Kuantan Singingi Regency Government*
13.	H. Abdul Haris, S.sos., Msc.	Plh. Bupati Rokan Hulu *Act. Regent of Rokan Hulu*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu *Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency*
14.	Afrizal	Bupati Rokan Hilir *Regent of Rokan Hilir*	√		Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Sulaiman (Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir *Based on a personal power of attorney, represented by H. Sulaiman (Vice Regent of Rokan Hilir Regency) acting for and on behalf of the Rokan Hilir Regency Government*
15.	Paisal	Walikota Dumai *Mayor of Dumai*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai *Representing for and on behalf of the City Government of Dumai*
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam *Mayor of Batam*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. Jefridin, MP. (Sekretaris Daerah Kota Batam) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam *Based on the power of attorney under the hand, represented by Drs. Jefridin, MP (Secretary of Batam City) acting for and on behalf of Batam City Government*
17.	Hj. Rahma, S. IP.	Walikota Tanjung Pinang *Mayor of Tanjung Pinang*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang *Representing for and on behalf of the Tanjung Pinang City Government*
18.	Muhammad Nizar	Bupati Kabupaten Lingga *Regent of Lingga Regency*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga *Representing for and on behalf of the Lingga Regency Government*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hadir *Be present*	Tidak Hadir *Not present*	Keterangan *Information*
19.	H. Muhammad Adil, SH.	Bupati Kepulauan Meranti *Regent of the Meranti Islands*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Meranti *Representing for and on behalf of the Meranti Regency Government*
20.	H. Ansar Ahmad, SE., MM.	Gubernur Kepulauan Riau *Governor of Riau Islands*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau *Representing for and on behalf of the Riau Islands Provincial Government*
21.	Abdul Haris, SH.	Bupati Kepulauan Anambas *Regent of Anambas Islands*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Anambas *Representing for and on behalf of the Anambas Regency Government*
22.	DR. Ir. H. Andi Buchari, MM.	Direktur Utama *President Director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan *Attending the meeting as President Director of the Company*
23.	Eka Afriadi	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Compliance and Management Risk Director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Perseroan *Attending the meeting as Compliance and Management Risk Director of the Company*
24.	Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan *Attending the meeting as Director of Operations of the Company*
25	M.A. Suharto, SE.	Direktur Dana dan Jasa *Director of Fund and Service*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa Perseroan *Attending the meeting as Director of Fund and Service of the Company*
26	Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah *Credit and Sharia Director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kredit dan Syariah Perseroan *Attending the Meeting as Director of Credit and Sharia of the Company*
27.	Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan *Attending the meeting as the Independent Commissioner of the Company*

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2020 Tanggal 18 Juni 2021

Resolution and Realization of the 2020 Annual GMS dated 18 June 2021

Agenda Pertama	*First Agenda*
Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2020	*Approval of the 2020 Fiscal Year Annual Report*
Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin & Putranto dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.	***Decision*** *Approved the Financial Year 2020 Annual Report, namely the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the Board of Directors Accountability Report and the Company's Financial Statements for the Financial Year 2020 which have been audited by the Public Accounting Firm Bustaman, Ezeddin & Putranto by providing full settlement and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to The Board of Commissioners and the Board of Directors for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ending on December 31, 2021.*
Agenda Kedua	*Second Agenda*
Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020	*Approval of Determination of the Use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2020*
Keputusan Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen perseroan Tahun Buku 2020 sesuai dengan yang diusulkan. a. Menyetujui penggunaan cadangan jasa produksi dan tantiem Tahun buku 2020 yang telah menjadi biaya Tahun buku 2020 dengan komposisi jasa produksi pegawai 22,5% dan tantiem pengurus 2,5%. Besaran ini telah disetujui pada RUPS Tahun buku 2019. b. Menyetujuiuntuk untuk Tahun buku 2021 komposisi cadangan jasa produksi pegawai dan tantiem pengurus sama dengan Tahun buku 2020.	***Decision*** *Approved the allocation of the use of the company's net profit and dividend distribution for the 2020 Fiscal Year as proposed.* *a. Approved the use of production service reserves and tantiem for the financial year 2020 which have become expenses for the financial year 2020 with a composition of 22.5% employee production services and 2.5% management bonus. This amount has been approved at the GMS for the 2019 financial year.* *b. Approved that for the 2021 financial year, the composition of reserves for production services for employees and management bonuses is the same as for the 2020 financial year.*

Agenda Ketiga	*Third Agenda*
Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2021 Keputusan	*Approval for Provision of Partnership Development Funds for 2021*
Keputusan Menyetujui Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2021 sebesar Rp 21.000.000.000 kepada pemegang saham seri A, dengan alokasi pembagian masing-masing pemegang saham sebesar Rp 500.000.000,- dan sisanya dibagi secara proporsional berdasarkan besaran sahan dan pelaksanaannya akan diatur oleh Direksi.	***Decision*** *Approved the Provision of Partnership Development Fund in 2021 amounting to Rp 21,000,000,000 to series A shareholders, with an allocation for each shareholder of Rp 500,000,000,- and the remainder is divided proportionally based on the number of shares and its implementation will be regulated by the Board of Directors.*
Agenda Keempat	*Fourth Agenda*
Persetujuan Pendelegasian Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PTBank Riau Kepri Tahun Buku 2021	*Approval of Delegation of Authority to the Board of Commissioners of the Company to establish a Public Accounting Firm for the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for the 2021 Financial Year*
Keputusan Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan public untuk melakukan audit Laporan Keuangan PTBank Riau Kepri Tahun buku 2021 dengan mempertimbangkan proses seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit, dimana data dab fakta terkait aspek independensi, profesionalisme, metode audit dan signing partner dari masing-masing Kantor Akuntan Publik tersebut masih harus dipelajari.	***Decision*** *Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to establish a public accounting firm to audit the Financial Statements of PTBank Riau Kepri for the 2021 financial year by considering the selection process for the selection of a Public Accounting Firm by the Audit Committee, where data and facts related to aspects of independence, professionalism, audit methods and signing partners of each of these Public Accounting Firms still has to be studied.*
Agenda Kelima	*Fifth Agenda*
Persetujuan Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PTBank Riau Kepri Tahun 2021	*Approval for Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors of PTBank Riau Kepri in 2021*
Keputusan Menyetujui besarnya anggaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PTBank Riau Kepri Tahun 2021 adalah sebesar Rp 40.657.354.983,- dengan catatan apabila ada sisa anggaran dikembalikan ke laba.	***Decision*** *Approved the amount of remuneration budget for the Board of Commissioners and Directors of PTBank Riau Kepri in 2021 is Rp 40,657,354,983, - with a note that if there is any remaining budget, it will be returned to profit.*

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tanggal 18 Juni 2021

Decision and Realization of Extraordinary GMS on 18 June 2021

Agenda Pertama	*First Agenda*
Persetujuan Tambahan Modal Disetor yang Telah Disetorkan ke Rekening Perseroan	*Approval of Additional Paid-In Capital That Has Been Deposited into the Company's Account*
Keputusan Menyetujui Penambahan Modal Disetor dari Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir sebeesar Rp 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus rupiah) .	***Decision*** *Approved the addition of Paid-in Capital from the Indra Giri Hilir Regency Government in the amount of IDR 2,700,000,000 (two billion seven hundred rupiah).*
Agenda Kedua	*Second Agenda*
Persetujuan Rencana Tambahan Modal Disetor Tahun 2021 dan Memberi Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membuat Akta Pencatatan Tambahan Modal yang akan Disetor Pemegang Saham	*Approval of Plan for Additional Paid-In Capital in 2021 and Authorize the Board of Commissioners to make a Deed of Registration of Additional Paid-Up Capital to be Paid-up by Shareholders*
Keputusan a. Menyetujui rencana penambahan Modal disetor Pemerintah Kabupaten Natuna berupa sebidang tanah seluas 2.000 m2 yang beralamat di Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Ranai yang akan diperuntukkan sebagai lokasi Gedung kantor PT Bank Riau Kepri Cabang Ranai (surat Bupati Natuna Nomor 030/Set-BPKAD/VIII/263/2020 tanggal 18 Agustus 2020 perihal persetujuan lokasi Gedung. Penilaian terhadap asset tanah yang akan dijadikan setoran modal oleh Pemerintah kabupaten Natuna tersebut akan dilakukan oleh pihak Appraisal Independen. Sebagai informasi awal berdasarkan harga pasar di Ranai nilai tanah tersebut diperkirakan sebesar Rp 4.000.000.000,- b. Menyetujui penambahan modal disetor Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (saham seri B) menambah modal disetor sebesar Rp 2.000.000.000,- RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membuat akta pencatatan tambahan modal Pemegang Saham tersebut sampai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (catatan Kabupaten Kuantan Singingi menambah asset sebidang tanah 1.5 hektar pada Jalan Sudirman dan kabupaten Lingga menambah modal sebesar 3 Milyar pada Tahun 2022.	***Decision*** *a. Approved the plan to increase the paid-up capital of the Natuna Regency Government in the form of a plot of land with an area of 2,000 m2 with the address at Jalan Datuk Kaya Wan Mohd Benteng Ranai which will be designated as the location for the office building of PT Bank Riau Kepri Branch Ranai (Letter of the Regent of Natuna Number 030/Set-BPKAD/VIII /263/2020 dated August 18, 2020 regarding the approval of the building location. The assessment of the land assets that will be used as a capital deposit by the Natuna Regency Government will be carried out by the Independent Appraisal. For initial information, based on the market price in Ranai, the land value is estimated at Rp 4,000,000,000,-* *b. Approved the addition of the paid-up capital of the Sharia Consumer Cooperative Amanah Riau Kepri (series B shares) to increase the paid-up capital of Rp 2,000,000,000,-* *The GMS authorized the Board of Commissioners to make a deed of recording the additional shareholder capital up to the Decree of the Ministry of Law and Human Rights (note that Kuantan Singingi Regency added assets to a 1.5 hectare plot of land on Sudirman St. and Lingga Regency to increase capital by 3 billion in 2022 .*

Agenda Ketiga	*Third Agenda*
Penetapan Perubahan Nama Pemegang Saham Seri B atas nama Koperasi Karyawan Bank Riau Kepri menjadi Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri	*Determination of the change in the name of the Series B Shareholder in the name of the Bank Riau Kepri Employee Cooperative to the Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative Amanah*
Keputusan Menyetujui Perubahan Nama Pemegang Saham Seri B atas nama Koperasi Karyawan Bank Riau Kepri menjadi Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri.	***Decision*** *Approved the change in the name of the Series B Shareholders on behalf of the Bank Riau Kepri Employee Cooperative to the Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative Amanah.*
Agenda Keempat	*Fourth Agenda*
Persetujuan Pemberian Manfaat Lainnya kepada Peserta Dana Pensiun PT Bank Riau Kepri	*Approval of Provision of Other Benefits to Pension Fund Participants of PT Bank Riau Kepri*
Keputusan Menyetujui pemberian manfaat lain dalam bentuk Dana manfaat Tambahan sebesar Rp 1.000.000 kepada setiap peserta dana pension dengan teknis pelaksanaannya dibantu Aktuaris dan diserahkan kepada Direksi Bank Riau kepri selaku Pemberi Kerja Dana Pensiun Bank Riau Kepri dengan tetap memperhatikan Ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun dan peraturan dana Pensiun (PDP) Bank Riau Kepri.	***Decision*** *Approved the provision of other benefits in the form of an additional benefit fund of Rp 1,000,000 to each pension fund participant with technical implementation assisted by an actuary and submitted to the Board of Directors of Bank Riau Kepri as the Employer of the Pension Fund of Bank Riau Kepri with due observance of the applicable provisions in the field of Pension Funds and regulations on Pension funds (PDP) of Bank Riau Kepri.*
Agenda Kelima	*Fifth Agenda*
Persetujuan Calon Pengurus Perseroan	*Approval of Prospective Company Management*
Keputusan Menyetujui Penetapan Calon Pengurus Perseroan ; a. Komisaris Utama : 1. Masrul Kasmy 2. Syahrial Abdi b. Komisaris Independen : 1. Roy Prakoso 2. Yandrisyah c. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: 1. Fajar Restu Febriansyah 2. Hendra Buana.	***Decision*** *Approved the determination of the candidate for the management of the company;* *a. President Commissioner : 1. Masrul Kasmy* *2. Syahrial Abdi* *b. Independent Commissioner : 1. Roy Prakoso* *2. Yandrisyah* *c. Director of Compliance and Risk Management: 1. Fajar Restu Febriansyah* *2. Hendra Buana.*

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tanggal 15 November 2021 dan Realisasinya

Implementation of the Extraordinary GMS on November 15, 2021 and its Realization

Pemanggilan *Summons*	Pelaksanaan *Implementation*	Hasil RUPS *Results of the GMS*
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan Surat Nomor: 003/PP.01.04/PAN-RUPS LB/DIR/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Penyampaian Undangan RUPSLB Tahun 2021 *The summons will be held on October 28, 2021 based on Letter Number: 003/PP.01.04/PAN-RUPS LB/DIR/2021 dated October 28, 2021 regarding Submission of Invitations to the 2021 EGMS.*	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021 bertempat di Pekanbaru *The Annual GMS was held on November 15, 2021 at Pekanbaru*	Hasil RUPS disampaikan melalui surat kabar Riau Pos dan Batam Pos *The results of the GMS were submitted through the Riau Pos and Batam Pos newspapers*

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tanggal 15 November 2021

Recapitulation of Attendance at the Extraordinary GMS on November 15, 2021

Tabel Rekapitulasi Kehadiran pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa Tanggal 18 Juni 2021

Table of Attendance Recapitulation at the Annual GMS and Extraordinary GMS on 18 June 2021

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hadir *Be present*	Tidak Hadir *Not present*	Keterangan *Information*
1.	Drs. H. Syamsuar, M.Si.	Gubernur Riau *Governor of Riau*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Riau *Representing for and on behalf of the Riau Provincial Government*
2.	H. Firdaus ST., MT.	Walikota Pekanbaru *Mayor of Pekanbaru*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Hj. El Syabrina, MP. (Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru *Based on the power of attorney under the hand, represented by Hj. El Syabrina, MP. (Assistant for the Economy and Development of the Pekanbaru City Regional Secretariat) acts for and on behalf of the Pekanbaru City Government*
3.	Catur Sugeng Susanto, SH.	Bupati Kampar *Regent of Kampar*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar *Representing for and on behalf of the Kampar Regency Government*
4.	Kasmarni, S.sos., MM.	Bupati Bengkalis *Bengkalis Regent*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis *Representing for and on behalf of the Bengkalis Regency Government*
5.	Rezita Meylani Yopi, SE.	Bupati Indragiri Hulu *Regent of Indragiri Hulu*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. H. Junaidi Rachmat, Msc. (Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu *Based on the power of attorney under the hand, represented by Drs. H. Junaidi Rachmat, Msc. (Vice Regent of Indragiri Hulu Regency) acts for and on behalf of the Pekanbaru City Government*
6.	H. Muhammad Wardan	Bupati Indragiri Hilir *Regent of Indragiri Hilir*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir *Representing for and on behalf of the* Indragiri Hilir *Regency Government*
7.	Roby Kurniawan	Bupati Bintan *Regent of Bintan*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Adi Prihantara (Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan *Based on the power of attorney under the hand, represented by Adi Prihantara (Regional Secretary of Bintan Regency) acts for and on behalf of the Bintan Regency Government*
8.	Drs. H. Aunur Rafiq, S.Sos., M.Si.	Bupati Karimun *Regent of Karimun*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun *Representing for and on behalf of the Karimun Regency Government*
9.	Wan Siswandi	Bupati Natuna *Regent Natuna*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna *Representing for and on behalf of the Natuna Regency Government*
10.	Drs. H. Alfedri, M.Si	Bupati Siak *Regent of Siak*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Husni Merza, BBA, MM (Wakil Bupati Kabupaten Siak) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak *Based on a power of attorney under the hand, represented by H. Husni Merza, BBA, MM (Vice Regent of Siak Regency) acting for and on behalf of the Siak Regency Government*
11.	H. Zukri	Bupati Pelalawan *Regent of Pelalawan*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Nasarudin, SH., MH. (Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan *Based on a personal power of attorney, represented by H. Nasarudin, SH., MH. (Vice Regent of Pelalawan Regency) acting for and on behalf of the Pelalawan Regency Government*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hadir *Be present*	Tidak Hadir *Not present*	Keterangan *Information*
12.	H. Suhardiman Amby, MM.	Plt. Bupati Kuantan Singingi *Act. Regent of Kuantan Singingi*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi *Representing for and on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency*
13.	H. Sukiman	Bupati Rokan Hulu *Regent of Rokan Hulu*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu *Representing for and on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency*
14.	Afrizal Sintong	Bupati Rokan Hilir *Regent of Rokan Hilir*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Muhammad Job Kurniawan (Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir *Based on a power of attorney under the hand, represented by Muhammad Job Kurniawan (Regional Secretary of Rokan Hilir Regency) acting for and on behalf of the Rokan Hilir Regency Government*
15.	Paisal	Walikota Dumai *Mayor of Dumai*	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai *Representing for and on behalf of the City Government of Dumai*
16.	Muhammad Rudi	Walikota Batam *Mayor of Batam*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Drs. Jefridin, MP. (Sekretaris Daerah Kota Batam) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam *Based on the power of attorney under the hand, represented by Drs. Jefridin, MP. (Secretary of Batam City) acting for and on behalf of Batam City Government*
17.	Hj. Rahma, S. IP.	Walikota Tanjung Pinang *Mayor of Tanjung Pinang*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Hermawan, SE., Msc. (Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjung Pinang *Based on a power of attorney under the hand, represented by Hermawan, SE., Msc. (Head of the Economic and Natural Resources Section of the Tanjung Pinang City Regional Secretariat) acting for and on behalf of the Tanjung Pinang City Government*
18.	Muhammad Nizar	Bupati Kabupaten Lingga *Regent of Lingga Regency*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Syarifah Riva Wartety Anugrah (Plt Kepala Bidang Pembiayaan Kabupaten Lingga) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga *Based on a power of attorney under the hand, represented by Syarifah Riva Wartety Anugrah (Plt Head of Lingga Regency Financing) acting for and on behalf of the Lingga Regency Government*
19.	H. Muhammad Adil, SH.	Bupati Kepulauan Meranti *Regent of the Meranti Islands*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Bambang Suprianto, SE., MM. (Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti *Based on a personal power of attorney, represented by Bambang Suprianto, SE., MM. (Head of BPKAD of Meranti Islands Regency) acting for and on behalf of the Meranti Islands Regency Government*
20.	H. Ansar Ahmad, SE., MM.	Gubernur Kepulauan Riau *Governor of Riau Islands*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh H. Syamsul Bahrum, PhD (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau *Based on a power of attorney under the hand, represented by H. Syamsul Bahrum, PhD (Assistant for Economics and Development of the Riau Islands Province) acting for and on behalf of the Government of the Riau Islands Province*
21.	Abdul Haris, SH.	Bupati Kepulauan Anambas *Regent of Anambas Islands*		X	Berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan, diwakili oleh Asmarullah, MP (Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas *Based on a power of attorney under the hand, represented by Asmarullah, MP (Expert Staff for Economics and Development of the Anambas Islands Regency) acting for and on behalf of the Anambas Islands Regency Government*
22.	DR. Ir. H. Andi Buchari, MM.	Direktur Utama *President Director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Utama Perseroan *Attending the meeting as President Director of the Company*
23.	Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional Perseroan *Attending the meeting as Director of Operations of the Company*

No.	Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hadir *Be present*	Tidak Hadir *Not present*	Keterangan *Information*
24	M.A. Suharto, SE.	Direktur Dana dan Jasa *Director of Fund and Service*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa Perseroan *Attending the meeting as Director of Fund and Service of the Company*
25	Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah *Credit and Sharia Director*	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kredit dan Syariah Perseroan *Attending the Meeting as Director of Credit and Sharia of the Company*

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tanggal 15 November 2021

Resolution and Realization of the Extraordinary GMS on November 15, 2021

Agenda Pertama	*First Agenda*
Penetapan Pengurus Perseroan	*Determination of Company Management*
Keputusan Menyetujui Penetapan Pengurus Perseroan: a. Komisaris Utama: Syahrial Abdi Untuk masa jabatan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu 4 (empat) Tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ditutup. b. Komisaris Independen: Roy Prakoso Untuk masa jabatan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu 4 (empat) Tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ditutup. c. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko: Fajar Restu Febriansyah Untuk masa jabatan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yaitu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) ditutup.	***Decision*** *Approved the appointment of the Company's Management:* *a. President Commissioner: Syahrial Abdi* *The term of office of the Commissioner is in accordance with the Company's Articles of Association, which is 4 (four) years from the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).* *b. Independent Commissioner: Roy Prakoso* *The term of office of the Commissioner is in accordance with the Company's Articles of Association, which is 4 (four) years from the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).* *c. Director of Compliance and Risk Management: Fajar Restu Febriansyah* *The term of office of the Board of Directors is in accordance with the Company's Articles of Association, which is 5 (five) years from the closing of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).*



Dewan Komisaris

Struktur Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank Riau Kepri melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris Bank Riau Kepri terdiri dari Komisaris Utama dan anggota Komisaris, dimana Komisaris Utama mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan dari Otoritas Perbankan/ Otoritas Jasa Keuangan, Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
2. Beritikad baik, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
3. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
4. Meneliti dan menelaah laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan peraturan internal perusahaan.
6. Memberikan nasihat, pendapat, dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan Perseroan.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Perseroan lainya (KUD/Kebijakan Umum Direksi, *Corporate Plan, Business Plan*) seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
8. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi.
9. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.
10. Menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
11. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank Riau Kepri baik dari informasi-informasi internal yang disediakan

Board of Commissioners

Board of Commissioners Structure

The Board of Commissioners is a Corporate organ that is collectively responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors and ensuring that Bank Riau Kepri implements GCG at all levels or levels of the organization. The position of each member of the Board of Commissioners including the President Commissioner is equal. The Board of Commissioners of Bank Riau Kepri consists of the President Commissioner and members of the Commissioner, where the President Commissioner coordinates the activities of the Board of Commissioners.

Duties and Obligations of The Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners as stipulated in the Work Guidelines for the Board of Commissioners are as follows:

1. *Subject to the provisions of laws and regulations,regulations from the Banking Authority / Financial Services Authority, the Articles of Association of the Company and resolutions of the GMS.*
2. *Have good intentions, be careful, and responsible in carrying out duties for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company.*
3. *Performing supervisory duties on the policies of the Board of Directors in carrying out the management of the Company including the implementation of the Company Long Term Plan, Work Plan and Company Budget, Business Plan as well as the provisions of the Articles of Association and General Meeting of Shareholders decisions and laws and regulations.*
4. *Examining and studying the annual report prepared by the Board of Directors and signing the report.*
5. *Supervise the Board of Directors to ensure that the Board of Directors complies with the provisions of the company's internal regulations.*
6. *Providing advice, opinions, and suggestions to the Board of Directors regarding the management of the Company.*
7. *Providing opinions and suggestions to the Board of Directors regarding the preparation of the Vision, Mission and other strategic plans of the Company (KUD/General Policy of the Board of Directors, Corporate Plan, Business Plan) as stipulated in the Articles of Association.*
8. *Providing opinions and suggestions as well as endorsement of the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget proposed bythe Board of Directors.*
9. *Reviewing reports from the Board of Directors and all ranks, especially those related to specific tasks that have been jointly decided.*
10. *Reviewing reports from the Committees under the Board of Commissioners.*
11. *Keeping abreast of the activities of Bank Riau Kepri both from internal information provided by the Company and*

oleh Perseroan maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
12. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
13. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode Tahun berjalan.
15. Memastikan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan *prudential Banking practices*
16. Memastikan Direksi dan jajarannya dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi menerapkan secara efektif prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.

Persyaratan Dewan Komisaris

Seluruh pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris disetujui oleh RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme, dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum, dan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank Umum.

Persyaratan Umum

Persyaratan umum Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia yang:
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan Taat kepada Negara dan Pemerintah.
3. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan Negara atau tindakan-tindakan yang tercela di bidang keuangan dan perbankan.
6. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
7. Tidak menjabat sebagai pengurus pada partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.

from external information that comes from the media and from other sources.

12. *Attending work/coordination meetings with the Board of Directors and all staff.*
13. *Make efforts to ensure that the Board of Directors and staff have complied with the provisions of laws and regulations.*
14. *Prepare a work plan for the Board of Commissioners for the current year.*
15. *Ensuring follow-up of the results of supervision and recommendations given, especially in the event of deviations from statutory provisions, Articles of Association, and prudential Banking practices.*
16. *Ensure that the Board of Directors and staff in every Bank business activity at all levels or levels of the organization effectively apply the principles of Good Corporate Governance, including by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.*

Board of Commissioners 'Requirements

All appointments and/or replacement of members of the Board of Commissioners are approved by the GMS by taking into account the integrity, competence, professionalism, and adequate financial reputation in accordance with the fit and proper test requirements set by the Financial Services Authority.

In addition, all members of the Bank's Board of Commissioners have met the requirements as members of the Board of Commissioners in accordance with the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007, the Financial Services Authority Regulation concerning Commercial Banks, and Fit and Proper Testing for Prospective Controlling Shareholders, Candidates for Members of the Board of Directors, and Candidates for Members of the Board of Commissioners of Commercial Banks.

General Requirement

General requirements for the Board of Commissioners are Indonesian citizens who:
1. *Devote to God Almighty.*
2. *Loyal and obedient to the State and Government.*
3. *Not involved directly or indirectly in activities treason against the State.*
4. *Physically and mentally healthy.*
5. *Have never carried out activities that harm the Stateor act disgraceful in the financial and Banking sector.*
6. *Their voting rights are not revoked based on a court decision.*
7. *Do not serve as administrators of political parties and/or candidates/members of the legislature.*

Persyaratan Khusus

Bagi anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat harus memenuhi Persyaratan Khusus yang rincian dari persyaratan khusus tersebut akan dituangkan dalam Akta RUPS tentang Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Dewan Komisaris.

Persyaratan Lainnya

Persyaratan lainnya yang disyaratkan antara lain:

1. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan dan telah lulus Penilaian Kemampuan, dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.
2. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK.
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Komisaris

1. RUPS – LB menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD untuk melaksanakan seleksi calon anggota Dewan Komisaris Bank.
2. Kepala Daerah menerima kewenangan dari RUPS-LB dan membentuk PANSEL yang berjumlah ganjil terdiri dari:
   a. Perangkat daerah;
   b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi;
   c. Komite Nominasi Bank Riau Kepri.
3. PANSEL
   a. Mengumumkan penerimaan calon anggota Dewan Komisaris Bank di Surat Kabar/*web*.
   b. Menerima surat lamaran.
   c. Melakukan Tahapan seleksi: administrasi, UKK dan Wawancara.
   d. Menetapkan calon anggota Dewan Komisaris Bank yang lulus seleksi.
   e. Menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Dewan Komisaris Bank melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
   f. Menyampaikan Nama calon anggota Dewan Komisaris Bank kepada Dewan Komisaris, untuk dinilai oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sebelum pengumuman hasil UKK.
4. Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi
   a. Dewan Komisaris menerima nama calon anggota Dewan Komisaris Bank dan menyampaikannya kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.

Special Requirements

For members of the Board of Commissioners to be appointed, they must meet the Special Requirements, the details of which will be stated in the Deed of the GMS concerning the System and Procedure for the Election and/or Replacement of the Board of Commissioners.

Other Requirements

Other requirements that are required include:

1. *Members of the Board of Commissioners must meet the requirements for integrity, competence, financial reputation, and have passed the Fit and Proper Test in accordance with OJK regulations.*
2. *Other requirements as stipulated in the OJK Regulation.*
3. *The majority of members of the Board of Commissioners are prohibited from having family ties to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.*

The Process of Nomination and Election of The Board of Commissioners

1. *The General Meeting of Shareholders - LB delegates the authority to the Regional Head as the largest shareholder and/or Region who initiates regional regulations regarding the establishment of BUMD to carry out the selection of candidates for the Board of Commissioners of the Bank.*
2. *The Regional Head receives authority from the EGMS and forms an odd number of PANSEL consisting of:*
   a. *Regional apparatus;*
   b. *Independent elements and/or tertiary institutions;*
   c. *Bank Riau Kepri Nomination Committee.*
3. *PANSEL*
   a. *Announce the acceptance of candidates for the Board of Commissioners of the Bank in the Newspaper/web.*
   b. *Receive a cover letter.*
   c. *Conducting the stages of selection: administration, UKK and interviews.*
   d. *Determine candidate members of the Bank's Board of Commissioners who pass the selection.*
   e. *Inform the implementation of each stage of the selection of candidates for the Board of Commissioners of the Bank through local/national mass media and/or electronically.*
   f. *Submit the names of the candidates for the Board of Commissioners of the Bank to the Board of Commissioners, to be assessed by the Remuneration and Nomination Committee prior to the announcement of the UKK results.*
4. *Board of Commissioners and Remuneration and Nomination Committee*
   a. *The Board of Commissioners accepts the names of candidates for the Board of Commissioners of the Bank and submits it to the Remuneration and Nomination Committee.*

b. Komite Remunerasi dan Nominasi menerima nama calon anggota Dewan Komisaris Bank untuk dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.
c. Komite Remunerasi dan Nominasi menyerahkan rekomendasi nama calon anggota Dewan Komisaris Bank kepada Dewan Komisaris untuk diserahkan kepada Pansel.

5. Pansel
   a. Menerima rekomendasi nama calon calon anggota Dewan Komisaris Bank dari Dewan Komisaris.
   b. Mengumumkan nama calon anggota Dewan Komisaris Bank yang lulus UKK, paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon.
   c. Menyerahkan nama calon anggota Dewan Komisaris Bank kepada Kepala Daerah selaku pemegang saham terbesar dan/atau Daerah yang menginisiasi peraturan daerah mengenai pendirian BUMD untuk dilakukan wawancara akhir.
6. Kepala Daerah melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir dan menetapkan maksimal 2 (dua) orang calon anggota Dewan Komisaris Bank untuk setiap jabatan yang lowong dan menyerahkan calon anggota Dewan Komisaris teRpilih kepada RUPS Luar Biasa.
7. RUPS – LB menetapkan calon anggota Dewan Komisaris Bank untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
8. Divisi Kepatuhan menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) dan menyampaikan dokumen persyaratan administratif calon anggota Dewan Komisaris Bank ke OJK.
9. Otoritas Jasa Keuangan
   a. Melakukan analisa dokumen calon anggota Dewan Komisaris Bank yang disampaikan oleh Bank melalui Divisi Kepatuhan.
   b. Melakukan proses klarifikasi/*fit and profer test*/ penilaian kemampuan dan kepatutan.
   c. Menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan disetujui atau tidak disetujui.
10. RUPS–LB mengangkat calon anggota Dewan Komisaris Bank yang telah disetujui oleh OJK.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pedoman Dewan Komisaris berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum koRporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris dan Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Komisaris merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Riau Kepri dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) tata kelola Bank yang baik.

b. The Remuneration and Nomination Committee accepts the names of candidates for the Board of Commissioners of the Bank to conduct an assessment of compliance with the requirements for integrity, financial reputation and competence.
c. The Remuneration and Nomination Committee submits recommendations for the names of candidates for the Board of Commissioners of the Bank to the Board of Commissioners to be submitted to the Pansel.

5. Pansel
   a. Receiving recommendations on the names of candidates for the Bank's Board of Commissioners.
   b. Announcing the names of candidates for the Board of Commissioners of the Bank who have passed UKK, at least 3 (three) or a maximum of 5 (five) candidates.
   c. Submit the names of the candidates for the Board of Commissioners of the Bank to the Head of the Region as the largest shareholder and / or Region who initiated the regional regulation regarding the establishment of BUMD for a final interview.
6. Regional Heads Conduct the final interview stage selection and determine a maximum of 2 (two) candidates for the Board of Commissioners of the Bank for each vacant position and submit the elected candidates for the Board of Commissioners to the Extraordinary GMS
7. The GMS - LB establish candidates for the Bank's Board of Commissioners to be submitted to the Financial Services Authority (OJK).
8. The Compliance Division compiles a compliance checklist and submits administrative requirements documents for prospective members of the Bank's Board of Commissioners to the OJK.
9. Financial Services Authority
   a. Analyzing documents for candidates for the Board of Commissioners of the Bank submitted by the Bank through the Compliance Division.
   b. Carry out the process of clarification / fit and profer test / fit and proper test.
   c. Determine whether the results of the fit and proper test are approved or not.
10. The GMS - LB appoints candidates for the Board of Commissioners of the Bank who have been approved by the OJK.

Board of Commissioners 'Guidelines

The Board of Commissioners 'Charter contains a compilation of the principles of Corporate law, applicable laws and regulations, Shareholders' directions and the provisions of the Articles of Association that govern the work procedures of the Board of Commissioners and the Board of Directors and their related organs. The work guidelines and rules of conduct for the Board of Commissioners are the result of the codification of various regulations applicable to Bank Riau Kepri and the best practices of good Bank governance.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank Riau Kepri dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris 001/KEPDK/2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri. Tujuan Pedoman Dewan Komisaris adalah mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris berikut organ kelengkapannya. Untuk itu pengembangannya haruslah selalu dilakukan sesuai kebutuhan Perseroan. Perubahan yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Adapun isi dari Pedoman Kerja Dewan Komisaris antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Visi, Misi, Tujuan
2. Fungsi
3. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris
4. Persyaratan untuk Menjadi Anggota Dewan Komisaris
5. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris
6. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
7. Etika Jabatan
8. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
9. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama
10. Waktu Kerja
11. Rapat Dewan Komisaris
12. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
13. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi
14. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris

Dalam mempertahankan keunggulan kompetitif, Bank Riau Kepri telah memiliki anggota Dewan Komisaris yang memiliki beragam latar belakang seperti perbankan, akademisi dan Pemerintahan, juga memiliki kompetensi, latar belakang dan pengalaman yang bervariasi. Hal ini dipandang penting oleh Bank untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang kuat dan pengurusan Bank yang efektif.

Penetapan komposisi Dewan Komisaris mengacu pada kebijakan keberagaman berdasarkan Anggaran Dasar Bank, SOT Bank dan ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang merupakan acuan pertimbangan dalam proses nominasi dan suksesi Dewan Komisaris dengan memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Dewan Komisaris yang optimal.

The Work Guidelines for the Board of Commissioners of Bank Riau Kepri are set out in the Decree of the Board of Commissioners Number 001 / KEPDKS / X / 2014. The Purpose of the Board of Commissioners Guidelines is to make it easier for the Board of Commissioners to understand the regulations related to the work procedures of the Board of Commissioners and their organs. For this reason, its development must always be carried out according to the needs of the Company. Changes made must be based on the applicable regulations and do not violate the provisions in the Articles of Association.

The contents of the Board of Commissioners and Directors Work Procedure Guidelines, among others, regulate the following:

1. *Vision, Mission, Goal*
2. *Function*
3. *Number, Composition and Independence of the Board of Commissioners*
4. *Requirements to Become a Member of the Board of Commissioners*
5. *Term of Service of Members of the Board of Commissioners*
6. *Orientation and Capacity Building Program*
7. *Job Ethics*
8. *Duties and Authorities of the Board of Commissioners*
9. *Duties and Responsibilities of the President Commissioner*
10. *Working time*
11. *Board of Commissioners Meeting*
12. *Performance Evaluation of the Board of Commissioners*
13. *Working Relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors*
14. *Organs under the Board of Commissioners*

Composition and Basis of Appointment of The Board of Commissioners

In maintaining a competitive advantage, Bank Riau Kepri already has members of the Board of Commissioners who have various backgrounds such as Banking, academics and government, also have varied competencies, backgrounds and experiences. This is considered important by the Bank to ensure a strong decision-making process and effective Bank management.

The determination of the composition of the Board of Commissioners refers to the diversity policy based on the Bank's Articles of Association, SOT of the Bank and the provisions contained in the Guidelines and Work Rules of the Board of Commissioners which is a reference for consideration in the process of nomination and succession of the Board of Commissioners by taking into account the knowledge, expertise and experience in accordance with the needs of the company. , so as to obtain an optimal composition of the Board of Commissioners.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum, dan Ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank Umum. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari beragam latar belakang kualifikasi pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, jenis kelamin dan keahlian.

In addition, all members of the Bank's Board of Commissioners have fulfilled the requirements as members of the Board of Commissioners in accordance with the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007, the Financial Services Authority Regulation concerning Commercial Banks, and OJK Provisions concerning Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Candidates Members of the Board of Directors, and Candidates for Members of the Board of Commissioners of Commercial Banks. The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors consists of various educational qualification backgrounds (fields of study), work experience, age, gender and expertise.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Table of Diversity in the Composition of the Board of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Usia *Age*	Jenis Kelamin *Gender*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja *Work experience*	Keahlian *Skill*
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama *President Commissioner*	46 Tahun *46 years old*	Pria *Man*	- Lulusan STPDN (Ilmu Pemerintahan) - Magister Manajemen Pemerintahan Daerah - *Graduated from STPDN (Government Science)* - *Master in Regional Government Management*	Memiliki pengalaman kerja dibidang Pemerintahan. *Have work experience in government.*	Bidang Pemerintahan *Government Sector*
Yan Prana Jaya Indra Rasyid **	Komisaris Utama *President Commissioner*	56 Tahun *56 years old*	Pria *Man*	- Sarjana jurusan Fisipol - Magister Prodi Politik Lokal Otonomi Daerah - *Bachelor's degree majoring in Social and Political Sciences* - *Master of Regional Autonomy Local Politics Study Program*	Memiliki pengalaman kerja dibidang Pemerintahan. *Have work experience in government.*	Bidang Pemerintahan *Government Sector*
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	51 Tahun *51 years old*	Pria *Man*	- Sarjana bidang Manajemen - Magister bidang International Business - *Bachelor in Management* - *Master in International Business*	Memiliki pengalaman kerja dibidang pendidikan *Have work experience in the field of education*	Manajemen, Bisnis. *Business management.*
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	60 Tahun *60 years old*	Wanita *Woman*	- Sarjana bidang Akuntansi - Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS) - Doctor Business Administration (DBA) - *Bachelor in Accounting* - *Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS)* - *Doctor of Business Administration (DBA)*	Memiliki pengalaman kerja dibidang pendidikan/akademis *Have work experience in the field of education/ academic*	Akuntansi, Bisnis Adminstrasi *Accounting, Business Administration*
Roy Prakoso*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	60 Tahun *60 years old*	Pria *Man*	- Sarjana Ekonomi - Magister Manajemen - *Bachelor of Economics* - *Master in Management*	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan *Have work experience in Banking*	Manajemen Risiko, Financial dan IT *Risk Management, Financial and IT*

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021
** Berakhir masa jabatan per tanggal 07 April 2021
*** Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

** Appointed as Member of the Board of Commissioners at the EGMS on 15 November 2021*
*** Term of office expires on 07 April 2021*
**** Term of office expires on 03 March 2021*

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.

Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

The supervisory duties of the Board of Commissioners are as follows.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Table of Duties of the Board of Commissioners

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Bidang Tugas *Task field*
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama *President Commissioner*	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. *Coordinate the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.*
Yan Prana Jaya Indra Rasyid**	Komisaris Utama *President Commissioner*	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. *Coordinate the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.*
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Ketua Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi *Head of Risk Monitoring Committee and Remuneration & Nomination Committee*
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi & Nominasi *Head of Audit Committee and Remuneration & Nomination Committee*
Roy Prakoso*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Ketua Komite Pemantau Risiko *Head of the Risk Monitoring Committee*

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021
** Berakhir masa jabatan per tanggal 07 April 2021
*** Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

** Appointed as Member of the Board of Commissioners at the EGMS on 15 November 2021*
*** Term of office expires on 07 April 2021*
**** Term of office expires on 03 March 2021*

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris sepanjang Tahun 2021

Jumlah, komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris sepanjang Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Number and Composition of the Board of Commissioners

Number and Composition of the Board of Commissioners throughout 2021

The number, composition and basis for the appointment of the Board of Commissioners throughout 2021 are as follows.

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pelaksana *Executor*	Dasar Pengangkatan *Basic Appointment*	Tanggal Efektif *Effective date*
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama *President Commissioner*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. 2. Surat OJK Nomor No. S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021 *1. Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank.* *2. OJK Letter No. S-492/KO.053/2021 December 23, 2021*	23 Desember 2021 *December 23, 2021*

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pelaksana *Executor*	Dasar Pengangkatan *Basic Appointment*	Tanggal Efektif *Effective date*
Yan Prana Jaya Indra Rasyid **	Komisaris Utama *President Commissioner*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. 2. Surat OJK Nomor SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 *1. Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank.* *2. OJK Letter Number SR-120/KO.053/2020 dated 30 September 2020*	30 September 2020 *September 30, 2020*
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	1. Akta Notaris Feri Mondro, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 04 Maret 2017 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri 2. Surat OJK No. SR-122/KO.053/2017 *1. Notary Deed of Feri Mondro, SH, M.Kn Number 04 dated March 4, 2017 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri* *2. OJK Letter No. SR-122/KO.053/2017*	04 Maret 2017 *March 04, 2017*
Roy Prakoso****	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. 2. Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 *1. Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank.* *2. OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022*	25 Januari 2022 *January 25, 2022*
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri 2. Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019 *1. Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 09 dated 19 August 2019 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri* *2. OJK Letter No. SR-106/KO.053/2019 dated 5 September 2019*	05 September 2019 *September 05, 2019*

* Diangkat sebagai Komisaris Utama pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021
** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Utama per tanggal 07 April 2021
*** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen per tanggal 03 Maret 2021
**** Diangkat sebagai Komisaris Independen pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021, namun baru efektif menjabat per tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022

* *Appointed as President Commissioner at the EGMS on 15 November 2021*
** *Term of office as President Commissioner ends on 07 April 2021*
*** *Term of office as Independent Commissioner ends on 03 March 2021*
**** *Appointed as Independent Commissioner at the EGMS on November 15, 2021, but only became effective on January 25, 2022 based on OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022*

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Affiliation Relations

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Affiliate Relationship Table

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris *Financial Relations, Family and Management of Commissioners*													
		Hubungan Keuangan Dengan *Financial Relations With*						Hubungan Keluarga Dengan *Financial Relations With*						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain. *Management Relationships with other companies.*	
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Directors*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholders*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Directors*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholders*			
		Ya *Yes*	Tidak *Not*	Ya *Yes*	Tidak *Not*	Ya *Yes*	Tidak *Not*	Ya *Yes*	Tidak *Not*	Ya *Yes*	Tidak *Not*	Ya *Yes*	Tidak *Not*	Ya *Yes*	Tidak *Not*
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama *President Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√
Yan Prana Jaya Indra Rasyid**	Komisaris Utama *President Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen *Independent Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√
Roy Prakoso*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*		√		√		√		√		√		√		√

* Diangkat sebagai Komisaris Utama pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021
** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Utama per tanggal 07 April 2021
*** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen per tanggal 03 Maret 2021

* *Appointed as President Commissioner at the EGMS on 15 November 2021*
** *Term of office as President Commissioner ends on 07 April 2021*
*** *Term of office as Independent Commissioner ends on 03 March 2021*

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Share Ownership of the Board of Commissioners

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Board of Commissioners Share Ownership Table

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kepemilikan Saham *Shareholding*			
		Bank Kepri *Bank Kepri*	Bank Lain *Other Banks*	Lembaga Keuangan Non Bank *Non-Bank financial institutions*	Perusahaan Lain *Other Companies*
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama *President Commissioner*	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Yan Prana Jaya Indra Rasyid**	Komisaris Utama *President Commissioner*	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Roy Prakoso*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Nihil	Nihil	Nihil	PT Mahesa Prima Solusindo dengan kepemilikan saham sebesar 30%

* Diangkat sebagai Komisaris Utama pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021
** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Utama per tanggal 07 April 2021
*** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen per tanggal 03 Maret 2021

* *Appointed as President Commissioner at the EGMS on 15 November 2021*
** *Term of office as President Commissioner ends on 07 April 2021*
*** *Term of office as Independent Commissioner ends on 03 March 2021*

Komisaris Independen

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dijelaskan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Keberadaan Dewan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Penentuan Komisaris Independen Bank dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) Tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.
d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
e. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
f. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
g. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Independent Commissioner

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, it is explained that an Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who has no financial, management, share ownership and/or family relationship with the members. Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and/or controlling shareholder, or relationship with the Bank that may affect the person's ability to act independently.

The existence of an Independent Board of Commissioners is intended to be able to encourage the creation of a more objective working climate and environment and to place fairness and equality among various interests, including the interests of shareholders and other stakeholders. As an Independent Commissioner, he must be free from conflicts of interest. In order to support the implementation of good Bank Corporate Governance, the shareholders in the GMS appoint an Independent Commissioner with the number and requirements as stipulated in the laws and regulations to carry out supervisory duties on Banks and Bank business groups that do not carry out Bank business activities.

Criteria for Determining Independent Commissioners

The determination of the Bank's Independent Commissioners is carried out by taking into account the following matters:

a. Independent Commissioners must be at least 50% (fifty percent) of the total members of the Board of Commissioners.
b. Have no family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.
c. Former members of the Board of Directors or Executive Officers of the Bank or parties who have a relationship with the Bank, which may affect the person's ability to act independently must undergo a cooling off period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner.
d. The provisions as referred to in point c do not apply to former members of the Board of Directors who supervised the supervisory function or Executive Officers who performed the supervisory function of the Bank.
e. Any proposal to replace and/or appoint members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must take into account the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.
f. Pass the Fit and Proper Test and get approval from the Financial Services Authority.
g. Non-Independent Commissioners can change to become Independent Commissioners after fulfilling the requirements as Independent Commissioners.

h. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
i. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pernyataan Komisaris Independen

Pernyataan Komisaris Independen

Masing-masing anggota Komisaris Independen telah membuat Surat Pernyataan Independen yang memuat bahwa masing-masing anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa salah (1) satu Komisaris Independen memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independennya dan bersedia untuk diganti, dan selanjutnya pernyataan ini disampaikan kepada OJK.

h. Non-Independent Commissioners who will change to become Independent Commissioners are required to undergo a cooling off period of at least 6 (six) months.
i. The transition from a Non-Independent Commissioner to an Independent Commissioner must obtain the approval of the Financial Services Authority.

Independent Commissioner Statement

Independent Commissioner Statement

Each member of the Independent Commissioner has made an Independent Statement Letter which states that each member of the Independent Commissioner has no financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder or relationship with the Bank, which may affect its ability to act independently as stipulated in the provisions on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

If in the future, it is found that (1) one of the Independent Commissioners has a financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholder or relationship with the Bank, which may affect its ability to act independently, then the person concerned is willing to relinquish the position of Independent Commissioner and is willing to be replaced, and then this statement is submitted to the OJK.

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
KOMISARIS INDEPENDEN PT. BANK RIAU KEPRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rita Anugerah
Tempat/tanggal lahir	: Rengat/27 Maret 1961
Alamat domisili	: Jl. Bahana Komp. BPD No. 03
(fotokopi KTP/SIM terlampir)	
Nomor telepon rumah	: (0761) 38287
Jabatan	: Komisaris Independen
Nama perusahaan	: PT. Bank Riau Kepri
Nomor telepon perusahaan	: (0761) 47070

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 10 Januari 2022

(Rita Anugerah)
Komisaris Independen

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
KOMISARIS INDEPENDEN PT. BANK RIAU KEPRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Roy Prakoso
Tempat/tanggal lahir	: Jakarta/ 5 Januari 1964
Alamat domisili	: Kp. Sawah RT/RW 010/002
(fotokopi KTP/SIM terlampir)	Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa
	Kota Jakarta Selatan
Nomor telepon	: 0811830150
Jabatan	: Komisaris Independen
Nama perusahaan	: PT Bank Riau Kepri
Nomor telepon perusahaan	: 0761 47070

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 26 Januari 2022

Roy Prakoso
Komisaris Independen

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur pelaksanaan Tata Kelola, ditetapkan bahwa Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif :

a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik Bank maupun bukan Bank;
b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsi dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Sesuai hal tersebut di atas, maka untuk jabatan rangkap Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Dual Position of Board of Commissioners

In the provisions of the Financial Services Authority which regulates the implementation of Governance, it is stipulated that the Board of Commissioners is prohibited from holding concurrent positions as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners or Executive Officer:

a. In financial institutions or financial companies, both Bank and non-Bank;
b. In more than 1 (one) non-financial institution or non-financial company, both domiciled at home and abroad.

Does not include concurrent positions in terms of:

a. Members of the Board of Commissioners serve as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executive Officers who carry out supervisory functions in 1 (one) non-Bank subsidiary company controlled by the Bank;
b. Non-Independent Commissioners carry out the functions of the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and/or
c. Members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organizations or institutions.

The duties and functions as referred to above can be carried out as long as the person concerned does not neglect the implementation of his duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Commissioners.

In accordance with the above, the concurrent positions of the Board of Commissioners can be seen in the following table:

RANGKAP JABATAN PADA DEWAN Komisaris | *MULTIPLE POSITIONS ON THE BOARD OF Commissioners*

Nama *Name*	**Jabatan di Bank Riau Kepri** *Position at Bank Riau Riau Islands*	**Jabatan pada Perusahaan / Lembaga Keuangan/ Bukan Keuangan** *Position in Companies / Financial Institutions / Non-Financial*
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama *President Commissioner*	Tidak Ada *Nothing*
Yan Prana Jaya Indra Rasyid**	Komisaris Utama *President Commissioner*	Tidak Ada *Nothing*
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Tidak Ada *Nothing*
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Tidak Ada *Nothing*
Roy Prakoso*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Tidak Ada *Nothing*

* Diangkat sebagai Komisaris Utama pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021
** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Utama per tanggal 07 April 2021
*** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen per tanggal 03 Maret 2021

* *Appointed as President Commissioner at the EGMS on 15 November 2021*
** *Term of office as President Commissioner ends on 07 April 2021*
*** *Term of office as Independent Commissioner ends on 03 March 2021*

Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang Tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Board of Commissioners Meeting

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of the Board of Commissioners' Meeting are as follows.

Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting Table

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participants*
1	10 Februari 2021 *February 10, 2021*	Pembahasan Draft Final Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris *Discussion of the Final Draft of the Board of Commissioners Work Manual*	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar (Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko)
2	18 Februari 2021 *February 18, 2021*	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi Rencana Bisnis Bank Semester II-2020 *Discussion on the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the Realization of the Bank's Business Plan Semester II-2020*	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
3	19 Februari 2021 *February 19, 2021*	Pemaparan mengenai Perhitungan *Stress Testing* Bank Riau Kepri *Presentation on Calculation of Stress Testing for Bank Riau Kepri*	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
4	19 Februari 2021 *February 19, 2021*	Pemaparan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 Divisi Internal Audit *Presentation on the 2021 Internal Audit Division's Work Plan and Budget*	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Internal Audit
5	22 Februari 2021 *February 22, 2021*	Pembahasan Penunjukan Pemimpin RUPSLB Tahun 2021 *Discussion on the appointment of the ChaiRperson of the 2021 EGMS*	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah
6	29 April 2021 *April 29, 2021*	Pembahasan Kepengurusan Komite di bawah Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri *Discussion on the Management of the Committee under the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri*	1. Rita Anugerah 2. Muhammad Affan (Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi)
7	30 April 2021 *April 30, 2021*	Membahas tentang Uji Petik atas Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Pick Test on the Work Manual for the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri* *Discuss other matters deemed necessary*	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti
8	2 Mei 2021 *May 2, 2021*	Pembahasan Harmonisasi Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri *Discussion on the Harmonization of the Work Manual for the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri*	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti
9	24 Mei 2021 *May 24, 2021*	Pembahasan Pemeriksaan Akhir Surat Keputusan dan Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri *Discussion on Final Examination of Decision Letters and Work Guidelines for the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri*	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti
10	25 Mei 2021 *May 25, 2021*	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi Rencana Bisnis PT Bank Riau Kepri Triwulan I Tahun 2021 *Discussion of the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the Realization of the Business Plan of PT Bank Riau Kepri Quarter I 2021*	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti
11	26 Agustus 2021 *26 August 2021*	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis PT Bank Riau Kepri Triwulan II Tahun 2021 *Discussion on the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the Business Plan of PT Bank Riau Kepri in the second quarter of 2021*	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participants*
12	27 Agustus 2021 *27 August 2021*	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis PT Bank Riau Kepri Semester I Tahun 2021 *Discussion on the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the Business Plan of PT Bank Riau Kepri Semester I 2021*	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti
13	25 Oktober 2021 *October 25, 2021*	Pembahasan Kick Off Meeting Kantor Akuntan Publik Bustaman, Ezeddin dan Putranto (KAP BEP) *Discussion on Kick Off Meeting Public Accounting Firm Bustaman, Ezeddin and Putranto (KAP BEP)*	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti 4. KAP BEP
14	15 November 2021 *November 15, 2021*	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis PT Bank Riau Kepri Triwulan III Tahun 2021 *Discussion on the Supervisory Report of the Board of Commissioners on the Business Plan of PT Bank Riau Kepri in the third quarter of 2021*	1. Rita Anugerah 2. Fahmi Oemar 3. Indarti
15	19 November 2021 *November 19, 2021*	Pembahasan Kepengurusan Komite dibawah Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri *Discussion on the Management of the Committee under the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri*	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso
16	31 Desember 2021 *December 31, 2021*	Pembahasan Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2022 *Discussion on the Work Program of the Board of Commissioners in 2022*	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi

Sepanjang Tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors are as follows.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Table of Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participants*
1	01 Februari 2021 *February 01, 2021*	Persetujuan Pembiayaan kepada Pihak Terkait an. Hj. Fariza *Financing Approval to On behalf of Hj. Fariza*	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Tengkoe Irawan 4. Pemimpin Divisi Syariah
2	23 Februari 2021 *February 23, 2021*	Pembahasan Penyesuaian RBB PT Bank Riau Kepri Tahun 2021 – 2023 *Discussion on Adjusting the RBB of PT Bank Riau Kepri in 2021 – 2023*	1. Taufiqurrahman 2. Rita Anugerah 3. Andi Buchari 4. M.A. Suharto 5. Tengkoe Irawan 6. Said Syamsuri 7. Eka Afriadi 8. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
3	16 Maret 2021 *March 16, 2021*	Pembahasan Draft Opini & Management Letter KAP Laporan Keuangan Tahun buku 2020 *Discussion on Draft Opinion & Management Letter of KAP Financial Report for the financial year 2020*	1. Rita Anugerah 2. Andi Buchari 3. M.A. Suharto 4. Tengkoe Irawan 5. Said Syamsuri 6. Eka Afriadi 7. Indarti 8. Pemimpin Divisi Internal Audit

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participants*
4	19 Maret 2021 *March 19, 2021*	Exit Meeting Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun buku 2020 *Exit Meeting Financial Statement Audit Results for the financial year 2020*	1. Rita Anugerah 2. Andi Buchari 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Eka Afriadi 6. Indarti 7. Fahmi Oemar 8. Pemimpin Divisi Internal Audit 9. Pemimpin Divisi Keuangan 10. Pemimpin Divisi Operasional 11. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi 12. Pemimpin Divisi Umum 13. Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah 14. Pemimpin Divisi Komersial
5	29 April 2021 *April 29, 2021*	Pembahasan Laporan OJK kepada Direksi PT Bank Riau Kepri tentang Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2020 *Discussion of the OJK Report to the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri regarding the Bank's Soundness Level as of December 2020*	1. Rita Anugerah 2. Tengkoe Irawan 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Komersial 6. Pemimpin Divisi Syariah 7. Pemimpin Divisi Konsumer
6	29 Juni 2021 *June 29, 2021*	Pembahasan Persetujuan Revisi RKAT PT Bank Riau Kepri Tahun 2021 *Discssion on Approval of Revised RKAT PT Bank Riau Kepri in 2021*	1. Rita Anugerah 2. Andi Buchari 3. Tengkoe Irawan 4. Said Syamsuri 5. Eka Afriadi 6. Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
7	29 Juni 2021 *June 29, 2021*	Pembahasan Persetujuan Buku Pedoman *Middle Office* *Middle Office Handbook Approval Discussion*	1. Rita Anugerah 2. Eka Afriadi 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
8	29 Juni 2021 *June 29, 2021*	Pembahasan Penerapan Program APU PPT PT Bank Riau Kepri Tahun 2021 *Discussion on the Implementation of the APU PPT PT Bank Riau Kepri in 2021*	1. Rita Anugerah 2. Eka Afriadi 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan
9	14 Juli 2021 *July 14, 2021*	Pembahasan Persetujuan Pembiayaan Aneka Guna kepada Pihak Terkait an. Andi Putra dan Suhardiman *Discussion of MultiPurpose Financing Approval to On behalf of Andi Putra and Suhardiman*	1. Rita Anugerah 2. Tengkoe Irawan 3. Pemimpin Divisi Konsumer
10	6 September 2021 *Sept 6, 2021*	Pembahasan Persetujuan Pembiayaan Aneka Guna kepada Pihak Terkait an. Nasarudin *Discussion of MultiPurpose Financing Approval to On behalf of Nasarudin*	1. Rita Anugerah 2. Tengkoe Irawan 3. Pemimpin Divisi Konsumer
11	5 Oktober 2021 *October 5, 2021*	Pembahasan Kewajiban Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM PT Bank Riau Kepri *Discussion on the Obligation of Providing Credit or Financing for MSMEs at PT Bank Riau Kepri*	1. Rita Anugerah 2. Tengkoe Irawan 3. Fahmi Oemar 4. Indarti 5. Pemimpin Divisi Komersial 6. Pemimpin Divisi MKM
12	8 November 2021 *November 8, 2021*	Pembahasan Progress Konversi Bank Riau Kepri *Discussion on the Conversion Progress of Bank Riau Kepri*	1. Rita Anugerah 2. Andi Buchari 3. M.A. Suharto 4. Said Syamsuri 5. Tengkoe Irawan 6. Fahmi Oemar 7. Indarti 8. Tim PMO Konversi BRK

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participants*
13	16 November 2021 *November 16, 2021*	Perkenalan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Riau Kepri Update Progress Konversi Hal-hal lain yang dianggap perlu *Introduction of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board (DPS) of PT Bank Riau Kepri* *Conversion Progress Update* *Other things deemed necessary*	1. Syahrial Abdi 2. Roy Prakoso 3. Andi Buchari 4. M.A. Suharto 5. Tengkoe Irawan 6. Said Syamsuri 7. Fajar Restu Febriansyah 8. Zulhendri Rais 9. Saifuddin Yuliar 10. Pemimpin Divisi Sekrtesariat Perusahaan 11. Ketua Tim PMO Konversi
14	6 Desember 2021 *December 6, 2021*	Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada PT Bank Riau Kepri *Workflow and SOPs at the Directorate of Compliance and Risk Management at PT Bank Riau Kepri*	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Desk Anti Fraud
15	9 Desember 2021 *December 9, 2021*	Pembahasan Persetujuan Pembiayaan Aneka Guna kepada Pihak Terkait an. Muhammad Rizki Saputra *Discussion of MultiPurpose Financing Approval to On behalf of Muhammad Rizki Saputra*	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Tengkoe Irawan 5. Divisi Konsumer
16	10 Desember 2021 *December 10, 2021*	Alur Kerja, SOP dan Progress Terkait dengan Pencapaian RBB/ Corporate Plan serta Persiapan ke BUS *Workflow, SOP and Progress Related to Achievement of RBB/ Corporate Plan and Preparation to BUS*	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. M.A. Suharto 5. Pemimpin Desk Digita Banking & Services
17	13 Desember 2021 *December 13, 2021*	Persiapan Launching BRK Syariah *Preparation for the Launching of Sharia BRK*	1. Rita Anugerah 2. Andi Buchari 3. M.A. Suharto 4. Tengkoe Irawan 5. Tim PMO Konversi
18	16 Desember 2021 *December 16, 2021*	Pembahasan Video Profil Bank Riau Kepri Syariah *Discussion of the Riau Riau Riau Islands Sharia Profile Video*	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Andi Buchari 4. M.A. Suharto 5. Tengkoe Irawan 6. Said Syamsuri 7. Fajar Restu Febriansyah 8. Tim PMO Konversi
19	18 Desember 2021 *December 18, 2021*	Presentasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Umum Syariah (BUS) dan Tingkat Kesehatan Bank Presentasi Materi Road Map Konversi Pemaparan Tim PMO konversi terkait Bahan Presentasi dengan PSP dan OJK *Presentation of Bank Business Plans (RBB) for Islamic Commercial Banks (BUS) and Bank Soundness Level* *Conversion Road Map Material Presentation* *Presentation of the conversion PMO Team regarding Presentation Materials with PSP and OJK*	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Andi Buchari 4. M.A. Suharto 5. Tengkoe Irawan 6. Said Syamsuri 7. Fajar Restu Febriansyah 8. Tim PMO Konversi
20	22 Desember 2021 *December 22, 2021*	Pembahasan Perkembangan Roadmap IT MasteRplan 2018 – 2021 *Discussion on the Development of the 2018 – 2021 IT MasteRplan Roadmap*	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Said Syamsuri 5. Indarti 6. Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting agenda*	Peserta *Participants*
21	27 Desember 2021 *December 27, 2021*	Pemaparan masing-masing Direktur Supervisi terkait Progress Pekerjaan Konversi Syariah dari bidang-bidang yang berada di bawah Supervisi-nya. *Presentation of each Supervising Director regarding the Progress of Sharia Conversion Work from the fields under his supervision.*	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Andi Buchari 4. M.A. Suharto 5. Tengkoe Irawan 6. Said Syamsuri 7. Fajar Restu Febriansyah 8. Tim PMO Konversi
22	28 Desember 2021 *December 28, 2021*	Pembahasan Penentuan Risk Appetite Statement Tahun 2022 *Discussion on Determining the Risk Appetite Statement for 2022*	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Fahmi Oemar 6. Indarti 7. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
23	28 Desember 2021 *December 28, 2021*	Presentasi Kinerja Cabang Presentasi Kolektibiliti dan Kredit Cabang *Branch Performance Presentation* *Branch Collectibility and Credit Presentation*	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Andi Buchari 5. M.A. Suharto 6. Tengkoe Irawan 7. Said Syamsuri 8. Fajar Restu Febriansyah 9. Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim 10. Seluruh Pemimpin Cabang
24	31 Desember 2021 *December 31, 2021*	Pembahasan Akta Setoran Modal *Discussion of Deed of Capital Deposit*	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Fajar Restu Febriansyah 5. Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan 6. Divisi Hukum

Frekuensi dan Kehadiran Rapat *Meeting Frequency and Attendance*

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Table of Frequency and Attendance of Board of Commissioners Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Direksi *Board of Directors Meeting*			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris *Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners*		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*			Jumlah dan Persentase Kehadiran *Number and Percentage of Attendance*		
		Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*	Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama *President Commissioner*	2	2	100%	12	11	92%
Yan Prana Jaya Indra Rasyid**	Komisaris Utama *President Commissioner*	5	0	0%	4	0	0%
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	5	5	100%	2	2	100%
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	16	16	100%	24	23	96%%
Roy Prakoso*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	2	2	100%	12	8	67%

* Diangkat sebagai Komisaris Utama pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021
** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Utama per tanggal 07 April 2021
*** Berakhir masa jabatan sebagai Komisaris Independen per tanggal 03 Maret 2021

* *Appointed as President Commissioner at the EGMS on 15 November 2021*
** *Term of office as President Commissioner ends on 07 April 2021*
*** *Term of office as Independent Commissioner ends on 03 March 2021*

Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2021

Sepanjang Tahun 2021 menghasilkan beberapa persetujuan/keputusan antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan PeRpanjangan Masa Kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
2. Persetujuan Penyesuaian Rencana Keuangan dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT Bank Riau Kepri Tahun 2021.
3. Persetujuan Piagam Audit Intern PT Bank Riau Kepri.
4. Persetujuan Kebijakan dan Pedoman Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit.
5. Persetujuan Usulan Perubahan Pertama Kebijakan Remunerasi Pengurus Bank.
6. Persetujuan Usulan Kebijakan Fasilitas Pembiayaan kepada Pengurus Bank.
7. Persetujuan Divestasi Saham pada BPR Rohil, BPR Gemilang dan PT Sarana Riau Ventura.
8. Keputusan Pengajuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Riau Kepri
9. Persetujuan Buku Pedoman *Middle Office*.
10. Persetujuan Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri.
11. Persetujuan Pembiayaan kepada Pihak Terkait.
12. Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PT Bank Riau Kepri.
13. Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Bank Riau Kepri dan Corporate Plan Bank Riau Kepri Syariah.
14. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Tahun buku 2021.
15. Persetujuan Rencana Keuangan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana Keuangan Aksi Berkelanjutan (RKAB) PT Bank Riau Kepri Tahun 2022.
16. Persetujuan *Corporate Plan* PT Bank Riau Kepri Tahun 2022 – 2026.
17. Persetujuan *Risk Appetite Statement* (RAS) PT Bank Riau Kepri Tahun 2022.

Decision of the Board of Commissioners in 2021

Throughout 2021 resulted in several approvals/decisions, including the following:

1. *Approval for the extension of the term of office of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee.*
2. *Approval for Adjustment of the Financial Plan and Annual Budget (RKAT) of PT Bank Riau Kepri in 2021.*
3. *Approval of the Internal Audit Charter of PT Bank Riau Kepri.*
4. *Approval of Credit Rescue and Settlement Policies and Guidelines.*
5. *Approval of the First Amendment to the Bank Management's Remuneration Policy.*
6. *Approval of the Proposed Financing Facility Policy to the Bank Management.*
7. *Approval of Shares Divestment in BPR Rohil, BPR Gemilang and PT Sarana Riau Venture.*
8. *Decision on Submission of Candidates for Members of the Sharia Supervisory Board of the Sharia Business Unit of PT Bank Riau Kepri*
9. *Middle Office Manual Approval.*
10. *Approval of Temporary Substitute for Compliance and Risk Management Director of PT Bank Riau Kepri.*
11. *Financing Approval to Related Parties.*
12. *Approval of Changes in Organizational Structure and Work Procedures (SOT) of PT Bank Riau Kepri.*
13. *Approval of Bank Riau Kepri Bank Business Plan (RBB) and Bank Riau Kepri Syariah Corporate Plan.*
14. *Determination of a Public Accounting Firm (KAP) for the Audit of the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for the 2021 financial year.*
15. *Approval of the Financial Plan and Annual Budget (RKAT) and Sustainable Action Financial Plan (RKAB) of PT Bank Riau Kepri for 2022.*
16. *Approval of the Corporate Plan of PT Bank Riau Kepri for 2022 – 2026.*
17. *Approval of the Risk Appetite Statement (RAS) of PT Bank Riau Kepri in 2022.*

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Tabel Sertifikasi Manejemen Risiko Dewan Komisaris
Board of Commissioners Risk Management Certification Table

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Sertifikasi Manajemen Risiko *Management Risk Certification*
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama *President Commissioner*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2025 *Level 1 Risk Management Certification, valid until April 30, 2025*
Yan Prana Jaya Indra Rasyid**	Komisaris Utama *President Commissioner*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, berlaku sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 *Level 1 Risk Management Certification, valid until December 7, 2023*
Taufiqurrahman***	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, berlaku sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 *Level 2 Risk Management Certification, valid until October 12, 2022*
Rita Anugerah	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, berlaku sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 *Level 2 Risk Management Certification, valid until 8 May 2024*

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Sertifikasi Manajemen Risiko *Management Risk Certification*
Roy Prakoso*	Komisaris Independen *Independent Commissioner*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2, berlaku sampai dengan tanggal 5 Maret 2025 *Level 2 Risk Management Certification, valid until March 5, 2025*

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021
** Berakhir masa jabatan per tanggal 07 April 2021
*** Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

* *Appointed as Member of the Board of Commissioners at the EGMS on 15 November 2021*
** *Term of office expires on 07 April 2021*
*** *Term of office expires on 03 March 2021*

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan Bank Riau Kepri. Dewan Komisaris juga bertugas melakukan pemantauan terhadap penerapan prinsip Tata Kelola Bank Riau Kepri.

Fungsi Pengawasan dari Dewan Komisaris terwujud dalam fungsi pengawasan dimana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan nasihat kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris juga harus memastikan nasihat yang diberikan kepada Direksi dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dan memberikan masukan kepada Direksi, dengan fokus pada Pengawasan Stratejik, Pengawasan Risiko, Pengawasan Penggunaan Modal dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

- Pengawasan stratejik dengan mengarahkan pemantauan dan mengevaluasi implementasi kebijakan stratejik.
- Pengawasan terhadap Pengelolaan Risiko dengan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa risk appetitedan risk tolerance serta kegiatan manajemen risiko sejalan dengan tujuan bisnis dan stratejik, lingkungan operasional, pengendalian internal yang efektif, kecukupan modal dan kepatuhan pada Peraturan OJK maupun peraturan Perundang-undangan lainnya.
- Pengawasan terhadap penggunaan Modal Bank yaitu dengan memastikan bahwa ketentuan kecukupan Modal dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan praktek Bisnis di Industri Perbankan.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola Bank sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola Bank dalam setiap kegiatan usaha Bank Riau Kepri pada seluruh tingkatan organisasi Bank Riau Kepri.

Procedure and Frequency of Giving Advice

The Board of Commissioners carries out general and specific supervisory functions in accordance with the articles of association and provides advice to the Board of Directors in carrying out the management of Bank Riau Kepri. The Board of Commissioners is also tasked with monitoring the implementation of the principles of Good Corporate Governance in Bank Riau Kepri.

The supervisory function of the Board of Commissioners is manifested in the supervisory function where the Board of Commissioners provides direction and guidance to the Board of Directors and provides advice to the General Meeting of Shareholders (GMS). The Board of Commissioners must also ensure that the advice given to the Board of Directors is carried out in accordance with applicable laws.

The Board of Commissioners in carrying out its supervisory function on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors periodically and from time to time and providing input to the Board of Directors, with a focus on Strategic Supervision, Risk Monitoring, Capital Use Supervision and Bank Governance Implementation.

- *Strategic oversight by directing monitoring and evaluating the implementation of strategic policies.*
- *Supervision of Risk Management by conducting supervision to ensure that risk appetite and risk tolerance as well as risk management activities are in line with business and strategic objectives, operational environment, effective internal control, capital adequacy and compliance with Financial Services Authority Regulations and other laws and regulations.*
- *Supervision of the use of Bank Capital is by ensuring that the provisions on Capital Adequacy are implemented by the Board of Directors in accordance with Bank Indonesia Regulations and Business Practices in the Banking Industry.*
- *Supervision of the implementation of Bank governance as an effort to ensure the implementation of Bank governance principles in every business activity of Bank Riau Kepri at all levels of the Bank Riau Kepri organization.*

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Dengan latar belakang Anggota Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar Anggota Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam (1) satu tim sebelumnya. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan. Program orientasi dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Program Orientasi mengenai PT Bank Riau Kepri wajib diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama menjabat di Perseroan. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Direktur Utama.

Materi yang diberikan pada Program Orientasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gambaran mengenai Bank Riau Kepri berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good Corporate governance* oleh Bank Riau Kepri.
3. Tanggung jawab hukum Anggota Dewan Komisaris.
4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
6. *Team building*. Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh Anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Komisaris.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, perkenalan dengan para Pemimpin Divisi, Kelompok, Unit dan Pegawai-pegawai di Perseroan serta program lainnya.

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, yaitu ditunjuknya Sdr. Syahrial Abdi sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Roy Prakoso sebagai Komisaris Independen, dan telah mengikuti program orientasi pengenalan bagi Dewan Komisaris baru pada tanggal 16 November 2021.

Orientation Program for New Commissioners

With the background of the members of the Board of Commissioners who come from various parties representing the Shareholders, the existence of the Orientation Program is very important to be implemented. This is because the members of the Board of Commissioners do not know each other and/or have never worked in a team before. The orientation program provided can be in the form of presentations, meetings, visits to the Company's facilities. The orientation program can also be in the form of other programs that are tailored to the needs.

The Orientation Program regarding PT Bank Riau Kepri must be given to Members of the Board of Commissioners who are new to the Company for the first time. The responsibility for implementing the Orientation Program rests with the President Commissioner. In the absence of the President Commissioner, the responsibility for implementing the orientation program rests with the President Director.

The materials given in the Orientation Program include the following:

1. *The description of Bank Riau Kepri relates to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks and various other strategic issues.*
2. *Implementation of the principles of good Corporate governance by Bank Riau Kepri.*
3. *Legal responsibilities of members of the Board of Commissioners.*
4. *Explanations relating to the delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies as well as the duties and roles of the Audit Committee and other committees established by the Board of Commissioners.*
5. *Explanation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.*
6. *Team building. This activity includes all members of the Board of Commissioners, both new and previously served with the aim of realizing team cohesion and teamwork as Commissioners.*

The orientation program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to the Company's facilities, introductions to the Heads of Divisions, Groups, Units and Employees in the Company and other programs.

In 2021 there will be a change in the composition of the Board of Commissioners, namely the appointment of Mr. Syahrial Abdi as President Commissioner and Mr. Roy Prakoso as Independent Commissioner, and has participated in the orientation program for the introduction of the new Board of Commissioners on November 16, 2021.

Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama Tahun 2021, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

Board of Commissioners Competency Training/ Development Program

During 2021, members of the Board of Commissioners have attended several trainings/seminars and workshops related to their field of duty, including the following:

Tabel Pelatihan Dewan Komisaris
Training Board of Commissioner Table

Nama *Name*	Judul Pelatihan *Training Title*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan *Implementation Date and Year*
Syahrial Abdi* (Komisaris Utama) *(President Comissioner)*	*Workshop Outlook* Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis & Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing Sharia Business & Finance Ecosystem*	Muamalat Institute *Muamalat Institute*	07/12/2021
	Training dan *Workshop* Eksekutif Perbankan Syariah untuk Komisaris dan Direksi Bank Syariah *Sharia Banking Executive Training and Workshop for Sharia Bank Commissioners and Directors*	Iqtishad Consultan Indonesia *Iqtishad Consultant Indonesia*	13/12/2021
	Workshop & *Refreshement* Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah *Workshop & Refreshment for Deepening the Sharia Banking Business Concept*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	15/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	16/12/2021
	Workshop & *Refreshment* Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (*online Class*) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	18/12/2021
Rita Anugerah (Komisaris Independen) *(Independent Comissioner)*	Zoominar *The Relantionship between GCG Principles and Three Lines of GCG* *Zoominar The Relationship between GCG Principles and Three Lines of GCG*	*Economic Review* *Economic Review*	05/02/2021
	Pelatihan Pembekalan *Certified Fraud Examiner* (CFE) *Certified Fraud Examiner (CFE) Debriefing Training*	Lembaga Pengembangan *Fraud Auditing* (LPFA) *Fraud Auditing Development Institute (LPFA)*	22/02/2021
	Webinar Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan *Principle Based* *Webinar on the Effectiveness of the Board of Commissioners' Supervision in Maintaining Bank Compliance in Towards the Era of Principle Based Regulation*	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) *Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP)*	25/03/2021
	Workshop Penyusunan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Analisa Rencana Bisnis *Workshop on the Preparation of the Board of Commissioners Supervision Report and Business Plan Analysis*	PT Sinergi Indonesia Pintar *PT Sinergi Indonesia Pintar*	09/06/2021
	Seminar dan Rakerwil FKDK BPDSI Wilayah Barat Tahun 2021 *FKDK BPDSI West Region Seminar and Regional Work Meeting in 2021*	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI) *Communication Forum for the Board of Commissioners of Regional Development Banks throughout Indonesia (FKDKP BPD-SI)*	07/10/2021

Nama *Name*	Judul Pelatihan *Training Title*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal dan Tahun Pelaksanaan *Implementation Date and Year*
Roy Prakoso* (Komisaris Independen) *(Independent Comissioner)*	*Workshop Outlook* Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis & Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing Sharia Business & Finance Ecosystem*	Muamalat Institute *Muamalat Institute*	07/12/2021
	Training dan *Workshop* Eksekutif Perbankan Syariah untuk Komisaris dan Direksi Bank Syariah *Sharia Banking Executive Training and Workshop for Sharia Bank Commissioners and Directors*	Iqtishad Consultan Indonesia *Iqtishad Consultant Indonesia*	13/12/2021
	Workshop & Refreshement Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah *Workshop & Refreshment for Deepening the Sharia Banking Business Concept*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	15/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (*online Class*) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	18/12/2021

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021
** Appointed as Member of the Board of Commissioners at the EGMS on 15 November 2021*

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, maka penilaian kinerja Dewan Komisaris senantiasa dilakukan secara priodik oleh beberapa lembaga independen diantaranya :

1. Penilaian Kinerja Oleh Pemegang Saham Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
2. Penilaian Kinerja Melalui Audit Kinerjaoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Penilaian Kinerja Melalui Audit Kinerjaoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Dan
4. Penilaian Kinerja Melalui Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Bank Yang Baik (GCG).

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Untuk penilaian sendiri (*self assessment*) Kinerja Dewan Komisaris Bank secara independen dilakukan oleh Divisi Kepatuhan guna melengkapi laporan penilaian sendiri (*Self assessment*) pelaksanaan tata kelola Bank yang baik (GCG) sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) Tahun terakhir yang mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Board of Commissioners Performance Assessment

As part of the implementation of good Corporate governance, the performance appraisal of the Board of Commissioners is always carried out periodically by several independent institutions including:

1. *Performance Assessment of Shareholders Through The Annual General Meeting of Shareholders (Gms);*
2. *Performance Assessment Through a Performance Audit by The Financial Services Authority (OJK);*
3. *Performance Assessment Through a Performance Audit by The Supreme Audit Agency (BPK); and*
4. *Performance Appraisal Through Self-Assessment of The Implementation of Good Bank Governance (GCG).*

Procedure for Implementing the Performance Assessment of The Board of Commissioners

For self-assessment, the performance of the Bank's Board of Commissioners is carried out independently by the Compliance Division to complete a self-assessment report on the implementation of good Bank governance (GCG) in accordance with the Bank Soundness Level assessment period in the last 1 (one) year referring to to the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13 / SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment*), penilaian kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui pertanggungjawaban laporan Tahunan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini terlihat pada saat pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun buku 2020 dimana pemegang saham (RUPS) menyetujui laporan Tahunan Tahun buku 2020 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun buku 2020.

In addition to self-assessment, the performance assessment of the Board of Commissioners is also carried out through the accountability of the annual report at the General Meeting of Shareholders (GMS). This can be seen during the implementation of the annual GMS for the financial year 2020 where the shareholders (GMS) approved the annual report for the financial year 2020, namely the Supervisory Report of the Board of Commissioners, the accountability report of the Board of Directors and the Company's Financial Report For The Financial Year 2020 by providing full settlement and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2020.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan Tata Kelola Bank yaitu Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yang dinilai dari 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Board of Commissioners Performance Evaluation Criteria

Performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out using the parameters of the implementation of Bank Governance, namely the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners which is assessed from 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome.

Pihak Yang Melakukan *Assessment*

Assesment dilakukan melalui Laporan *Self Assesment* pelaksanaan tata kelola secara semesteran yang dilakukan oleh internal Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

The Party Conducting the Assessment

The assessment is carried out through a self-assessment report on the implementation of governance on a semi-annual basis which is carried out by the Bank internally and submitted to the Financial Services Authority.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Performance Assessment Results

Tabel Penilaian Kinerja Dewan Komisaris (*Self Assesment*)
Board of Commissioners Performance Appraisal Table (self assessment)

Parameter GCG *GCG Parameters*	***Governance Structure***	***Governance Process***	***Governance Outcome***	**Peringkat** *Rating* / **Komposit** *Composite*
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris *Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners*	2	1	2	2 (Baik)

Dengan Peringkat 2 artinya:
Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Dewan Komisaris.

By Rank 2 means:
The Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in adequate compliance with the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Governance, in general, these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Board of Commissioners.

Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris.

Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is carried out not only to fulfill the transparency aspect as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide confidence, especially to shareholders or investors, on the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Commissioners.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Komite pendukung Dewan Komisaris Bank Riau Kepri terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Penilaian Kinerja terhadap Komite Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite dan hasil *Self assessment* GCG. Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota Komite merupakan salah (1) satu dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Komite yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite.

Evaluasi Kinerja Komite dibawah Dewan Komisaris dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan Tata Kelola Bank yaitu Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang dinilai dari 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Commissioners and Basis for Assessment

The supporting committee for the Board of Commissioners of Bank Riau Kepri consists of the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee.

Performance appraisal of the Committees of the Board of Commissioners is determined based on the duties and responsibilities listed in the Committee Charter, Committee Work Programs and the results of the GCG Self-assessment. The results of the performance evaluation of each Committee Member are (1) one of the basic considerations for the Board of Commissioners to dismiss and/or reappoint the relevant Committee members. The results of the performance evaluation are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Committee.

Performance evaluation of the Committees under the Board of Commissioners is carried out using the parameters of the implementation of Bank Governance, namely the Completeness and Implementation of the Committee's Duties which are assessed from 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

Tabel Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris(*Self Assesment*)
Table of Performance Appraisal of The Committee of the Board of Commissioners (Self-Assessment)

Parameter GCG *GCG Parameters*	***Governance Structure***	***Governance Process***	***Governance Outcome***	**Peringkat** *Rating*
				Komposit *Composite*
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite *Completeness and Implementation of Committee Duties*	2	1	2	2 (Baik)

Dengan Peringkat 2 artinya:
Komite di bawah Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Komite di bawah Dewan Komisaris.

By Rank 2 means:
Committees under the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities have implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in adequate compliance with the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Committee under the Board of Commissioners.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris selalu beRpedoman pada Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Tahunan, dan Program Kerja Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menggunakan program kerja ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan prinsip Tata Kelola diterapkan dengan baik.

Dalam menjalankan program kerja dimaksud, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Selama Tahun 2021, Dewan Komisaris menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Direksi antara lain sebagai berikut :

1. Rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PT Bank Riau Kepri.
2. Rekomendasi atas Progress Konversi PT Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
3. Rekomendasi atas Penerapan Kebijakan OJK tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19.
4. Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit Umum Internal Audit PT Bank Riau Kepri.
5. Rekomendasi atas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement PT Bank Riau Kepri.
6. Rekomendasi atas Permohonan Persetujuan dari Divisi Internal Audit mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021.
7. Rekomendasi atas Laporan Kinerja PT Bank Riau Kepri.
8. Rekomendasi atas Monitoring Kesiapan Bank dalam Pelaporan melalui BI-ANTASENA.
9. Rekomendasi Calon Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri.
10. Rekomendasi atas Laporan Tugas Direktur Kepatuhan PT Bank Riau Kepri.
11. Rekomendasi atas Pembahasan Risiko Kredit Inheren dan Risiko Kredit KPMR pada Laporan OJK kepada Direksi PT Bank Riau Kepri tentang Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2020.
12. Rekomendasi atas Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
13. Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit Tematik Internal Audit PT Bank Riau Kepri.
14. Rekomendasi atas Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah.
15. Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit IT *Core Banking System Vision Sharia* Modul CIF.
16. Rekomendasi atas Pelaksanaan Tata Kelola Bank Umum terkait Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Pendelegasian Wewenang Antar Direksi.
17. Rekomendasi atas Kewajiban Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM PT Bank Riau Kepri.

Board of Commissioners Recommendation

In carrying out its duties and functions, the Board of Commissioners is always guided by the Articles of Association, Resolutions of the Annual GMS, and the Work Program of the Board of Commissioners. The Board of Commissioners uses this work program as a guideline in carrying out its duties to ensure that the principles of Governance are implemented properly.

In carrying out the said work program, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee.

During 2021, the Board of Commissioners made several recommendations to the Board of Directors, including the following:

1. *Recommendation on the General Audit Report of PT Bank Riau Kepri.*
2. *Recommendation on the Conversion Progress of PT Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank (BUS).*
3. *Recommendations on the Implementation of OJK Policy on National Economic Stimulus as a Countercyclical Impact of the Spread of Covid-19.*
4. *Recommendations on the General Audit Report of the Internal Audit of PT Bank Riau Kepri.*
5. *Recommendations on the Monitoring Report on the Risk Appetite Statement of PT Bank Riau Kepri.*
6. *Recommendation on the Application for Approval from the Internal Audit Division regarding the 2021 Work Plan and Budget.*
7. *Recommendations on the Performance Report of PT Bank Riau Kepri.*
8. *Recommendations on Monitoring Bank Readiness in Reporting through BI-ANTASENA.*
9. *Recommendation for Candidates for the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri.*
10. *Recommendation on the Task Report of the Compliance Director of PT Bank Riau Kepri.*
11. *Recommendations on the Discussion of Inherent Credit Risk and KPMR Credit Risk in the OJK Report to the Directors of PT Bank Riau Kepri regarding the Bank's Soundness Level as of December 2020.*
12. *Recommendations on the Business Plan Realization Report.*
13. *Recommendations on the Thematic Internal Audit Report of PT Bank Riau Kepri.*
14. *Recommendations on the Non-Performing Loans Action Plan.*
15. *Recommendation on the Audit Report of IT Core Banking System Vision Sharia Module CIF.*
16. *Recommendations on the Implementation of GCG in relation to the Duties and Responsibilities of the Board of Directors and Delegation of Authority among Directors.*
17. *Recommendations on the Obligation of Providing Credit or Financing for MSMEs at PT Bank Riau Kepri.*

18. Rekomendasi atas Alur Kerja dan SOP pada Divisi di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dan Direktur Dana & Jasa.
19. Rekomendasi atas Perkembangan *Roadmap* IT *MasteRplan* 2018 – 2021.
20. Rekomendasi atas *Risk Appetite Statement* PT Bank Riau Kepri Tahun 2022.
21. Rekomendasi atas Peningkatan Pertumbuhan Kredit Minus dan Pertumbuhan NPL Naik.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan Bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha Bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/ atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
4. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk UUS yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah diatur di dalam Anggaran Dasar Bank yaitu anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya.

18. *Recommendations on Workflows and SOPs in the Divisions under the Director of Compliance & Risk Management and the Director of Funds & Services.*
19. *Recommendations on the Development of the 2018-2021 IT MasteRplan Roadmap.*
20. *Recommendations on the Risk Appetite Statement of PT Bank Riau Kepri in 2022.*
21. *Recommendations for Increasing Minus Credit Growth and Increasing NPL Growth.*

Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board is an independent body tasked with directing, consulting, evaluating and supervising sharia Bank activities in order to ensure that sharia Bank business activities comply with sharia principles as has been determined by fatwas and Islamic sharia. Based on Bank Indonesia regulations, all sharia Banking transactions must be carried out in accordance with the fatwa stipulated by the National Sharia Council.

Duties and Obligations of the Sharia Supervisory Board

In accordance with PBI No. 11/10/PBI/2009 dated March 19, 2009 regarding Sharia Business Units, the duties and responsibilities of DPS are as follows:

1. *Assess and ensure compliance with Sharia principles on operational and product guidelines issued by UUS.*
2. *Supervise the process of developing new UUS products from the beginning until the product is released.*
3. *Provide sharia opinion on new products and/or restructured financing.*
4. *Request a fatwa from the National Sharia Council for UUS products for which there is no fatwa.*
5. *Conduct periodic reviews on the fulfillment of sharia principles on the mechanism for collecting funds and distributing funds as well as Bank services.*
6. *Request data and information related to sharia aspects from the UUS work unit in the context of carrying out its duties.*

Term of Office of the Sharia Supervisory Board

The term of office of the Sharia Supervisory Board is regulated in the Bank's Articles of Association, namely that members of the Sharia Supervisory Board are appointed for a period of 4 (four) years and may be reappointed for a second term.

Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah pihak-pihak yang memiliki kriteria sebagai berikut:

Integritas, dapat dijabarkan menjadi:
1. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
4. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kompetensi, dapat dijabarkan menjadi:
1. Pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah.
2. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum. Anggota DPS adalah para ahli di bidang fiqih muamalat. Namun demikian anggota DPS dapat pula termasuk orang yang memiliki keahlian selain fiqih muamalat, tetapi harus memiliki pengalaman di bidang perbankan dan atau lembaga keuangan syariah.

Reputasi keuangan, dapat dijabarkan menjadi:
1. Pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar kredit/ pembiayaan macet
2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) Tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Proses Nominasi dan Pemilihan Dewan Pengawas Syariah

1. RUPS – LB menetapkan Calon Dewan Pengawas Syariah.
2. Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi
   a. Dewan Komisaris menerima nama calon Dewan Pengawas Syariah dan menyampaikannya kepada Komite Remunerasi dan Nominasi.
   b. Komite Remunerasi dan Nominasi menerima nama calon Dewan Pengawas Syariah untuk dilakukan penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.
   c. Komite Remunerasi dan Nominasi menyerahkan rekomendasi calon Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris.
   d. Dewan Komisaris menyerahkan rekomendasi calon Dewan Pengawas Syariah kepada Direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah untuk disampaikan kepada OJK.

Criteria for Members of the Sharia Supervisory Board

Those who can be appointed as members of the Sharia Supervisory Board are parties who have the following criteria:

Integrity, can be translated into:
1. *Have good character and morals.*
2. *Have a commitment to comply with applicable laws and regulations.*
3. *Have a high commitment to the development of healthy Bank operations.*
4. *Not included in the list of not passing in accordance with the provisions stipulated by Bank Indonesia.*

Competence, can be broken down into:
1. *Parties who have knowledge and experience in the field of sharia muamalah.*
2. *Have knowledge in Banking and/or finance in general. DPS members are experts in the field of muamalat fiqh. However, DPS members can also include people who have expertise other than fiqh muamalat, but must have experience in Banking and or Islamic financial institutions.*

Financial reputation, can be translated into:
1. *Parties not included in the list of bad credit/ financing*
2. *Have never been declared Bankrupt or have served as Directors or Commissioners who were found guilty of causing a company to be declared Bankrupt within the last 5 (five) years prior to being nominated.*

Sharia Supervisory Board Nomination and Selection Process

1. *The GMS – LB determines the Candidate for the Sharia Supervisory Board.*
2. *Board of Commissioners and Remuneration and Nomination Committee*
   a. *The Board of Commissioners receives the name of the candidate for the Sharia Supervisory Board and submits it to the Remuneration and Nomination Committee.*
   b. *The Remuneration and Nomination Committee accepts the names of candidates for the Sharia Supervisory Board to be assessed for compliance with the requirements for integrity, financial reputation, and competence.*
   c. *The Remuneration and Nomination Committee submits recommendations for candidates for the Sharia Supervisory Board to the Board of Commissioners.*
   d. *The Board of Commissioners submits recommendations for candidates for the Sharia Supervisory Board to the Director in charge of the Sharia Business Unit to be submitted to the OJK.*

3. Direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah menyampaikan dokumen persyaratan administratif calon anggota Dewan Pengawas Syariah ke OJK.
4. Otoritas Jasa Keuangan
   a. Melakukan analisa dokumen calon Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Bank.
   b. Melakukan proses klarifikasi/*fit and profer test*/ penilaian kemampuan dan kepatutan.
   c. Menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan disetujui atau tidak disetujui.
5. Calon Dewan Pengawas Syariah efektif menjabat sejak persetujuan dari OJK.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Direksi Bank Riau Kepri telah menerbitkan SK Direksi Nomor 09/KEPDIR/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri yang terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan rincian sebagai berikut:

3. The Director in charge of the Sharia Business Unit submits the administrative requirements for the prospective members of the Sharia Supervisory Board to the OJK.
4. Financial Services Authority
   a. Analyzing the candidate documents for the Sharia Supervisory Board submitted by the Bank.
   b. Carry out a process of clarification/fit and professional test/appropriation and fit.
   c. Determine whether the fit and proper test results are approved or disapproved.
5. Candidates for the Sharia Supervisory Board are effective as of the approval from OJK.

Sharia Supervisory Board Guidelines and Work Rules

The Board of Directors of Bank Riau Kepri has issued a Decree of the Board of Directors Number 09/KEPDIR/2014 dated March 11, 2014 regarding the Company Manual (BPP) of the Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri which consists of 5 (five) chapters with the following details:

Bab I *Chapter I*	Berisi mengenai pendahuluan dan latar belakang penyusunan, dasar hukum, serta pengertian-pengertian *Contains the introduction and background of the preparation, legal basis, and understanding*
Bab II *Chapter II*	Berisi uraian mengenai DPS secara kelembagaan, menyangkut ketentuan mengenai kedudukan DPS, persyaratan anggota DPS, tugas dan tanggung jawab DPS, mekanisme penetapan anggota DPS, jumlah dan perangkapan keanggotaan DPS, rapat DPS, masa jabatan DPS, serta hak dan fasilitas anggota DPS dan ketentuan lainnya. *Contains a description of the DPS institutionally, regarding the provisions regarding the position of the DPS, the requirements for DPS members, the duties and responsibilities of the DPS, the mechanism for determining the DPS members, the number and dual membership of the DPS, DPS meetings, the term of office of the DPS, as well as the rights and facilities of the DPS members and other provisions.*
Bab III *Chapter III*	Pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan DPS, berisi tentang mekanisme pelaksanaan pengawasan DPS terhadap proses pengembangan produk baru dan terhadap kegiatan Unit Usaha Syariah serta tata cara pelaporan DPS. *Guidelines for supervision and reporting procedures for DPS, contain the mechanism for implementing DPS supervision on the process of developing new products and on Sharia Business Unit activities as well as procedures for reporting DPS*
Bab IV *Chapter IV*	Objek material pengawasan DPS, berisi materi-materi bermuatan syariah dalam seluruh kegiatan operasional termasuk produk dan jasa Unit Usaha Syariah dengan beRpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan sesuai prinsip-prinsip umum syariah *The object of DPS supervision is material containing sharia in all operational activities including products and services of the Sharia Business Unit based on the DSN-MUI fatwa and in accordance with general sharia principles*
Bab V *Chapter V*	Lampiran-lampiran. *Attachments*

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Composition and Basis of Appointment of the Sharia Supervisory Board

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah
Table of Composition and Basis of Appointment of the Sharia Supervisory Board

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pelaksana *Executor*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Tanggal Efektif *Effective Date*
Zulhendri Rais	Ketua *Leader*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Surat No.SR-72/KO.053/2020 *Letter No. SR-72/KO.053/2020*	Tanggal 08 April 2020 *April 08 2020*
Suryan A. Jamrah*	Ketua *Leader*	Bank Indonesia *Bank Indonesia*	Surat No. 15/5/DPbS/PAdBS/Pbr *Letter No. SR-72/KO.053/2020*	Tanggal 13 Februari 2013 dan dipeRpanjang sampai 4 (empat) Tahun terhitung tgl 13 Februari 2017 *February 13, 2013 and extended to 4 (four) years starting February 13, 2017*
T. Zulkarnain*	Anggota *Member*	Bank Indonesia *Bank Indonesia*	Surat No. 15/5/DPbS/PAdBS/Pbr *Letter No. SR-72/KO.053/2020*	Tanggal 13 Februari 2013 dan dipeRpanjang sampai 4 (empat) Tahun terhitung tgl 13 Februari 2017 *February 13, 2013 and extended to 4 (four) 13 February 2017*
Saifuddin Yuliar**	Anggota *Member*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Surat No.SR-234/KO.053/2021 *Letter No. SR-72/KO.053/2020*	Tanggal 07 Juni 2021 *Year commencing on 07 June 2021*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 13 Februari 2017
** Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah per tanggal 07 Juni 2021
** Term of office expires on February 13, 2017*
*** Appointed as member of Sharia Supervisory Board as of 07 June 2021*

Program Orientasi Bagi Dewan Pengawas Syariah Baru

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, yaitu ditunjuknya Sdr. Saifuddin Yuliar sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dan telah mengikuti program orientasi pengenalan bagi Dewan Komisaris baru pada tanggal 08 Juni 2021.

Orientation Program for the New Sharia Supervisory Board

In 2021 there will be a change in the composition of the Board of Commissioners, namely the appointment of Mr. Saifuddin Yuliar as a member of the Sharia Supervisory Board and has participated in the orientation program for the introduction of the new Board of Commissioners on June 8, 2021.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) Bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah non Bank. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN-MUI. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah.

Policy for Concurrent Positions of the Sharia Supervisory Board

Members of the DPS may only hold concurrent positions as members of the DPS at a maximum of 2 (two) other Banks and 2 (two) non-Bank Islamic financial institutions. A maximum of 2 (two) DPS members can hold concurrent positions as members of the DSN-MUI. Members of DPS are prohibited from holding concurrent positions as consultants in all Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
Table of Concurrent Positions of the Sharia Supervisory Board

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain *Position in Other Companies/Agencies*	Nama Perusahaan/Instansi Lain *Name of Company/Other Agencies*
Zulhendri Rais	Ketua *Leader*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
Suryan A. Jamrah*	Ketua *Leader*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
T. Zulkarnain*	Anggota *Member*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
Saifuddin Yuliar**	Anggota *Member*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 13 Februari 2017
** Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah per tanggal 07 Juni 2021
** Term of office expires on February 13, 2017*
*** Appointed as member of Sharia Supervisory Board as of 07 June 2021*

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Setiap anggota DPS dilarang:

1. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank;
2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS;
3. Merangkap jabatan sebagai dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau UUS.

Management of Conflict of Interests Sharia Supervisory Board

Each DPS member is prohibited from:

1. *Utilizing the Bank for personal, family and/or other party interests that can reduce assets or reduce the Bank's profits;*
2. *Taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than the remuneration and facilities determined by the GMS;*
3. *Concurrently with that position, both individuals and companies, including owners of companies that provide consulting services in all Sharia Commercial Banks (BUS) and/or UUS.*

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Share Ownership Table

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kepemilikan Saham *Shareholding*			
		Bank *Bank*	Bank Lain *Other Bank*	Lembaga Keuangan Non Bank *Non-Bank financial institutions*	Perusahaan Lain *Other Companies*
Zulhendri Rais	Ketua *Leader*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
Suryan A. Jamrah*	Ketua *Leader*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
T. Zulkarnain*	Anggota *Member*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
Saifuddin Yuliar**	Anggota *Member*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 13 Februari 2017
** Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah per tanggal 07 Juni 2021

** Term of office expires on February 13, 2017*
*** Appointed as member of Sharia Supervisory Board as of 07 June 2021*

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Di dalam ketentuan Bank Indonesia, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Sharia Supervisory Board Meeting

The Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri has held and attended several meetings related to product development discussions, issuance of sharia opinions, Bank services, Bank operations and others related to sharia aspects. Under Bank Indonesia regulations, meetings are held at least 1 (one) time a month.

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang Tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut.

Sharia Supervisory Board Internal Meeting

Throughout 2021, the agenda, dates and participants of the Sharia Supervisory Board Meeting are as follows.

Tabel Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah
Sharia Supervisory Board Internal Meeting Table

No.	Tanggal *Date*	Jenis Rapat *Type of Meeting*	Peserta *Participants*
1	18 Januari 2021 *January 18, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCS Pekanbaru dan KCPS Panam *Supervision and inspection of sharia Banking products at KCS Pekanbaru and KCPS Panam*	KH. T. Zulkarnain Pemimpin KCS Pekanbaru Pemimpin KCPS Panam 1 orang Pegawai Divisi Syariah
2	19 Januari 2021 *January 19, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Teluk Kuantan *Supervision and inspection of Islamic Banking products at KCPS Teluk Kuantan*	KH. T. Zulkarnain Pemimpin KCPS Teluk Kuantan/mewakili

No.	Tanggal *Date*	Jenis Rapat *Type of Meeting*	Peserta *Participants*
3	25 Januari 2021 *January 25, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Tj. Balai Karimun *Supervision and inspection of sharia Banking products at KCPS Tj. Karimun Hal*	Dilakukan secara off site mengingat dampak pandemi Covid-19
4	26 Januari 2021 *January 26, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Pasir Pangaraian *Supervision and inspection of sharia Banking products at KCPS Pasir Pangaraian*	Zulhendri Rais Pemimpin KCPS Pasir Pangaraian 1 orang Pegawai Divisi Syariah
5	27 Januari 2021 *January 27, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCS Tanjung Pinang *Supervision and inspection of sharia Banking products at KCS Tanjung Pinang*	Dilakukan secara off site mengingat dampak pandemi Covid-19
6	3 Februari 2021 *February 3, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Batam *Supervision and inspection of sharia Banking products at KCPS Batam*	Zulhendri Rais Pemimpin KCPS Batam 1 orang Pegawai Divisi Syariah
7	11 Februari 2021 *February 11, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Duri *Supervision and inspection of sharia Banking products at KCPS Duri*	Suryan A. Jamrah Pemimpin KCPS Duri 1 orang Pegawai Divisi Syariah
8	24 Maret 2021 *March 24, 2021*	Rapat rutin DPS dengan agenda: Silaturahim DPS dengan Divisi Syariah Pembahasan Laporan GCG UUS Bank Riau Kepri Periode 2020 Permohonan Opini DPS terkait Rencana Pemberlakuan Pembiayaan akad Murabahah dengan metode Anuitas *DPS regular meeting with the following agenda:* *DPS Gathering with the Sharia Division* *Discussion on the GCG UUS Report of Bank Riau Kepri for the 2020 Period* *Request for DPS Opinion regarding the Plan for the Implementation of Murabahah Contract Financing using the Annuity Method*	Zulhendri Rais Pemimpin Divisi Syariah Pinbag dan Staf Divisi Syariah
9	29 April 2021 *April 29, 2021*	Rapat rutin DPS dengan agenda Permohonan Opini DPS terkait: Hasil Mapping Produk Konversi Bank Riau Kepri Income Smoothing Dana Pihak Ketiga Provisi Kredit Konvensional yang dialihkan menjadi Pembiayaan Syariah *Regular DPS meeting with the agenda for the DPS Opinion Request related:* *Mapping Results for Bank Riau Kepri Conversion Products* *Income Smoothing Third Party Funds* *Conventional Credit Provisions that are converted into Sharia Financing*	Zulhendri Rais PMO Ketua Bidang TPMK Divisi terkait
10	25 Mei 2021 *May 25, 2021*	Rapat rutin DPS dengan agenda: Permohonan Opini DPS terkait Layanan CMS Tindak lanjut Permohonan Opini DPS terkait Rencana Pemberlakuan Pembiayaan akad Murabahah dengan metode Anuitas (lanjutan) *DPS regular meeting with the following agenda:* *Request for DPS Opinion regarding CMS Services* *Follow-up to the Request for Opinion from DPS regarding the Plan for the Implementation of Murabahah Contract Financing using the Annuity Method (continued)*	Zulhendri Rais Pemimpin Divisi Syariah Pinbag dan Staf Divisi Syariah Pinbag dan Staf Desk Digital Banking Service

No.	Tanggal *Date*	Jenis Rapat *Type of Meeting*	Peserta *Participants*
11	15 Juni 2021 *June 15, 2021*	Rapat rutin DPS dengan agenda: Silaturahim DPS baru (Bpk. Saifuddin Yuliar) dengan PT Bank Riau Kepri khususnya Divisi Syariah Tindak lanjut Permohonan Opini DPS terkait Rencana Pemberlakuan Pembiayaan akad Murabahah dengan metode Anuitas (lanjutan) Pembahasan mengenai Pengawasan DPS ke Unit Kantor untuk Periode Pengawasan Januari s.d Juni 2021 *DPS regular meeting with the following agenda:* *The new DPS (Mr. Saifuddin Yuliar) friendship with PT Bank Riau Kepri especially the Sharia Division* *Follow-up to the Request for Opinion from DPS regarding the Plan for the Implementation of Murabahah Contract Financing using the Annuity Method (continued)* *Discussion regarding DPS Supervision to Office Units for the Supervision Period January to June 2021*	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Konsumer Pinbag dan Staf Divisi Syariah Pinbag dan Staf Divisi Konsumer
12	24 Juni 2021 *June 24, 2021*	Rapat rutin DPS dengan agenda Permohonan Opini DPS terkait: Pemberian Bonus Giro Wadiah Tabungan iB Wadiah dalam Program Hadiah Langsung Bedelau *Regular DPS meeting with the agenda for the DPS Opinion Request related:* *Wadiah Current Account Bonus* *iB Wadiah Savings in the Bedelau Direct Rewards Program*	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar Pinbag dan Staf Divisi Syariah Pinbag dan Staf Divisi Kepatuhan Pinbag dan Staf Divisi Produk Dana & Jasa
13	26 Juli 2021 *July 26, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Teluk Kuantan (LS) KCPS Teluk Kuantan *Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units:* *Teluk Kuantan Branch Office (Sharia services)* *Teluk Kuantan Sharia Sub Branch Office*	Saifuddin Yuliar Pemimpin KC Teluk Kuantan dan KCPS Teluk Kuantan Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
14	28 Juli 2021 *July 28, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Pasir Pengaraian (LS) KCPS Pasir Pengaraian *Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units:* *Pasir Pengaraian Branch Office (Sharia services)* *Sand Raiding Sharia Sub Branch Office*	Saifuddin Yuliar Pemimpin KC Pasir Pengaraian dan KCPS Pasir Pengaraian Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
15	3 Agustus 2021 *August 3, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Tembilahan *Supervision and inspection of Islamic Banking products at Tembilahan Sharia Sub Branch Office*	Saifuddin Yuliar Pemimpin KCPS Tembilahan Pinbag Pembiayaan Divisi Syariah Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
16	4 Agustus 2021 *August 4, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KC Tembilahan (LS) *Supervision and inspection of sharia Banking products at KC Tembilahan Branch Office (Sharia services)*	Saifuddin Yuliar Pemimpin KC Tembilahan Pinbag Pembiayaan Divisi Syariah Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
17	9 Agustus 2021 *August 9, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KCPS Panam *Supervision and inspection of sharia Banking products at Panam Sharia Sub Branch Office*	Saifuddin Yuliar Pemimpin KCPS Panam Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
18	10 Agustus 2021 *August 10, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KC Pekanbaru (LS) *Supervision and inspection of sharia Banking products at Pekanbaru Branch Office (Sharia services)*	Saifuddin Yuliar Pemimpin KC Pekanbaru Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah

No.	Tanggal *Date*	Jenis Rapat *Type of Meeting*	Peserta *Participants*
19	12 Agustus 2021 *August 12, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Duri (LS) KCPS Duri *Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units:* *Duri Branch Office (Sharia services)* *Duri Sharia Sub Branch Office*	Zulhendri Rais Pemimpin KC Duri dan KCPS Duri Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
20	12 Agustus 2021 *August 12, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Tanjung Balai Karimun (LS) KCPS Tanjung Balai Karimun Dilakukan secara *off site* mengingat dampak pandemi Covid-19 *Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units:* *Tanjung Balai Karimun Branch Office (Sharia services)* *Tanjung Balai Karimun Sharia Sub Branch Office* *D(1) one off site considering the impact of the Covid-19 pandemic*	Saifuddin Yuliar Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
21	13 Agustus 2021 *August 13, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Utama (LS) KCS Pekanbaru *Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units:* *Main Branch Office (Sharia services)* *Pekanbaru Sharia Sub Branch Office*	Zulhendri Rais Pemimpin KC Utama dan KCS Pekanbaru Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
22	18 Agustus 2021 *August 18, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah di KC Pangkalan Kerinci (LS) *Supervision and inspection of sharia Banking products at Pangkalan Kerinci Branch Office (Sharia services)*	Zulhendri Rais Pemimpin KC Pangkalan Kerinci Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
23	23 Agustus 2021 *August 23, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Batam (LS) KCPS Batam *Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units:* *Batam Branch Office (Sharia services)* *Batam Sharia Sub Branch Office*	Zulhendri Rais Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin KC Batam dan KCPS Batam Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
24	24 Agustus 2021 *August 24, 2021*	Pengawasan dan pemeriksaan produk perbankan syariah pada unit kantor berikut: KC Tanjung Pinang (LS) KCPS Tanjung Pinang Dilakukan secara off site mengingat dampak pandemi Covid-19 *Supervision and inspection of sharia Banking products at the following office units:* *Tanjung Pinang Branch Office (Sharia services)* *Tanjung Pinang Sharia Sub Branch Office* *D(1) one off site considering the impact of the Covid-19 pandemic*	Saifuddin Yuliar Pelaksana Pembiayaan Divisi Syariah
25	29 September 2021 *September 29, 2021*	Rapat pemaparan hasil pengawasan DPS ke unit kantor periode Januari-Juni 2021 *Meeting on the results of DPS supervision to office units for the period January-June 2021*	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar Pemiimpin Divisi Syariah Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Kepatuhan Ketua Tim PMO Pinbag dan Staff Divisi terkait
26	12 Oktober 2021 *October 12, 2021*	Menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Umum Tahun 2021 OJK *Attending the 2021 OJK General Examination Entry Meeting*	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar

No.	Tanggal *Date*	Jenis Rapat *Type of Meeting*	Peserta *Participants*
27	14 Oktober 2021 *October 14, 2021*	Menghadiri Pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja BPKH *Attending Meetings for BPKH Working Visits*	Zulhendri Rais Saifuddin Yuliar
28	9 November 2021 *November 9, 2021*	Menghadiri Rapat Pembahasan Kebijakan Income Smoothing BUS *Attending BUS Income Smoothing Policy Discussion Meeting*	DPS dan Direksi
29	16 November 2021 *November 16, 2021*	Menghadiri rapat BOD-BOC dan DPS terkait update progress konversi *Attending BOD-BOC and DPS meetings regarding conversion progress updates*	DPS
30	22 November 2021 *November 22, 2021*	Menghadiri rapat terkait permintaan opini syariah mengenai pengkinian nisbah nasabah existing *Attending a meeting regarding the request for sharia opinion regarding updating the ratio of existing customers*	DPS dan Divisi Syariah
31	22 November 2021 *November 22, 2021*	Menghadiri Silaturahmi Wakil Ketua DSN-MUI Pusat *Attending the Gathering of the Deputy ChaiRperson of the Central DSN-MUI*	DPS, BOD,BOC
32	24 November 2021 *November 24, 2021*	Silaturahim ke DSN-MUI Pusat *Gathering to the Central DSN-MUI*	DPS dan Tim PMO
33	20 Desember 2021 *December 20, 2021*	Menghadiri Undangan OJK terkait Klarifikasi Calon Pihak Utama PT Bank Riau Kepri Syariah *Attending OJK's Invitation regarding Clarification of Prospective Main Parties PT Bank Riau Riau Islands Syariah*	DPS, BOD, dan BOC
34	23 Desember 2021 *December 23, 2021*	Menghadiri Undangan OJK terkait Klarifikasi Calon Pihak Utama PT Bank Riau Kepri Syariah *Attending OJK's Invitation regarding Clarification of Prospective Main Parties PT Bank Riau Riau Islands Syariah*	DPS, BOD, dan BOC

Frekuensi dan Kehadiran Rapat *Meeting Frequency and Attendance*

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah
Table of Frequency and Attendance of Sharia Supervisory Board Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Dewan Pengawas Syariah *Sharia Supervisory Board Meeting*		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran *Attendance Number and Percentage*		
		Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Zulhendri Rais	Ketua *Leader*	34	23	*68%*
Suryan A. Jamrah*	Ketua *Leader*	7	3	*43%*
T. Zulkarnain*	Anggota *Member*	7	4	*57%*
Saifuddin Yuliar**	Anggota *Member*	24	20	*83%*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 13 Februari 2017
** Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah per tanggal 07 Juni 2021

** Term of office expires on February 13, 2017*
*** Appointed as member of Sharia Supervisory Board as of 07 June 2021*

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Opini

Realisasi tugas dan tanggung jawab dalam hal menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh UUS, DPS telah mengeluarkan pernyataan atas ketaatan UUS PT Bank Riau Kepri terhadap pelaksanaan prinsip syariah untuk laporan keuangan Tahun buku 2021, pernyataan ini dilampirkan di Laporan Aktifitas DPS yang dilaporkan per semester pada Tahun 2021.

Realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal mengawasi proses pengembangan produk baru UUS sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk dan memberikan opini syariah adalah DPS ikut mengawasi selama proses pembuatan produk baru UUS dengan mengadakan rapat koordinasi antara Divisi UUS dan Kantor Cabang Syariah.

Realisasi tugas dan tanggung jawab DPS dalam hal meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya, UUS PT Bank Riau Kepri telah memenuhi semua permintaan data yang diminta oleh DPS, baik pada saat proses audit yang rutin atau permintaan yang bersifat insidentil.

Sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 perihal Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS, DPS melakukan pengawasan terhadap Bank dan terhadap penerbitan produk dan aktifitas baru maka DPS dalam hal ini memberikan opini/pendapat, apakah telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Pendapat dimaksud disampaikan dalam bentuk opini dan Surat Keterangan Dewan Pengawas Syariah.

Frequency and Method of Giving Advice and Opinions

Realizing the duties and responsibilities in terms of assessing and ensuring compliance with Sharia principles on operational and product guidelines issued by UUS, DPS has issued a statement on UUS compliance with PT Bank Riau Kepri regarding the implementation of sharia principles for financial statements for the 2021 financial year, this statement is attached to the DPS Activity Report which is reported every semester in 2021.

The realization of the duties and responsibilities of DPS in terms of supervising the process of developing new UUS products from the beginning to the issuance of products and providing sharia opinions is that DPS participates in supervising the process of making UUS new products by holding coordination meetings between the UUS Division and Sharia Branch Offices.

Realization of the duties and responsibilities of DPS in terms of requesting data and information related to sharia aspects from the UUS work unit in the context of carrying out its duties, UUS PT Bank Riau Kepri has fulfilled all data requests requested by DPS, either during routine audit processes or incidental requests.

In accordance with PBI No. 11/10/PBI/2009 dated March 19, 2009 regarding Sharia Business Units, duties and responsibilities of DPS, DPS supervises the Bank and the issuance of new products and activities. . The said opinion is submitted in the form of an opinion and a Certificate of Sharia Supervisory Board.

No.	Opini Nomor *Opinion Number*	Tanggal *Date*	Tentang *About*
1	001/O-DPS/IV/2021	29 April 2021 *April 29, 2021*	Hasil Mapping Produk Konversi Bank Riau Kepri *Mapping Results for Bank Riau Kepri Conversion Products*
2	002/O-DPS/IV/2021	29 April 2021 *April 29, 2021*	*Income Smoothing* Dana Pihak Ketiga *Income Smoothing Third Party Funds*
3	003/O-DPS/IV/2021	29 April 2021 *April 29, 2021*	Provisi Kredit Konvensional yang Dialihkan menjadi Pembiayaan Syariah *Conventional Credit Provisions Converted to Sharia Financing*
4	004/O-DPS/V/2021	27 Mei 2022 *May 27, 2022*	Draft Perubahan Surat Edaran No. 037/SE/2019 tenteng Pedoman Layanan CMS PT Bank Riau Kepri *Draft Amendment to Circular Letter No. 037/SE/2019 regarding PT Bank Riau Kepri*
5	005/O-DPS/VI/2021	25 Juni 2021 *June 25, 2021*	Bonus Giro Wadiah *Wadiah Current Account Bonus*
6	006/O-DPS/VII/2021	14 Juli 2021 *July 14, 2021*	Pemberian Hadiah Langsung untuk Penabung Sinar iB *Direct Rewards for iB Sinar Sinar Savers*
7	007/O-DPS/XI/2021	22 November 2021 *November 22, 2021*	Advis Dewan Pengawas Syariah terkait Pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) *Sharia Supervisory Board's advice regarding PT Civil National Capital (PNM)*
8	008/O-DPS/X/2021	22 Oktober 2021 *October 22, 2021*	Restrukturisasi Pembiayaan Pemalang Batang *Tol Road* (PBTR) *Pemalang Batang Toll Road (PBTR) Financing Restructuring*

No.	Opini Nomor *Opinion Number*	Tanggal *Date*	Tentang *About*
9	009/O-DPS/XII/2021	07 Desember 2021 *December 07 2021*	Pengkinian Nisbah Nasabah Tabungan Existing *Updating the Ratio of Existing Savings Customers*
10	010/O-DPS/XII/2021	24 Desember 2021 *December 24, 2021*	Pedoman Teknis *Income Smoothing* Dana Pihak Ketiga *Third Party Fund Income Smoothing Technical Guidelines*
11	011/O-DPS/XII/2021	24 Desember 2022 *December 24, 2022*	Hal-hal Khusus terkait *Profit Distribution* *Special Matters related to Profit Distribution*

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Assesment dilakukan melalui laporan *Self Assesment* pelaksanaan GCG unit usaha syariah secara semesteran yang dilakukan oleh internal Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan GCG UUS yaitu Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah yang dinilai dari 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Pihak Yang Melakukan *Assessment*

Untuk penilaian sendiri (*self assessment*) Kinerja Dewan Pengawas Syariah secara independen dilakukan oleh Divisi Syariah guna melengkapi laporkan penilaian sendiri (*Self assessment*) pelaksanaan tata kelola Bank yang baik (GCG) Unit Usaha Syariah.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS PT Bank Riau Kepri: peringkat 2

Hasil analisis *self assessment* dari faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS PT Bank Riau Kepri menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG UUS sesuai dengan Kriteria/Indikator *Self Assesment*.

DPS PT Bank Riau Kepri telah melakukan audit ke Kantor Cabang Syariah dan Capem Syariah (KCS dan KCPS) secara rutin, dan telah melaporkan hasil temuan dan aktifitas DPS ke OJK, Komisaris dan Direksi PT Bank Riau Kepri dan hal ini sejalan dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Proses audit ini sangat menjaga stabilitas dan konsistensi UUS PT Bank Riau Kepri dalam melaksanakan operasional Bank sesuai dengan prinsip Syariah. Melihat dari Susunan DPS PT Bank Riau Kepri, jumlah anggota DPS telah sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

Sharia Supervisory Board Performance Assessment

Procedure for the Performance Assessment of the Sharia Supervisory Board

The assessment is carried out through a self-assessment report on the implementation of GCG Sharia Business Units on a semi-annual basis which is carried out by the Bank internally and submitted to the Financial Services Authority.

Sharia Supervisory Board Performance Evaluation Criteria

Performance evaluation of the Sharia Supervisory Board is carried out using the parameters of the UUS GCG implementation, namely the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board which is assessed from 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

The Party Conducting the Assessment

For self-assessment, the performance of the Sharia Supervisory Board is carried out independently by the Sharia Division to complete a Self-Assessment Report on the implementation of Good Corporate Governance Bank (GCG) for the Sharia Business Unit.

Sharia Supervisory Board Performance Assessment Results

Implementation of Duties and Responsibilities of DPS PT Bank Riau Kepri: 2nd Place

The results of the self-assessment analysis of the Implementation of Duties and Responsibilities of DPS PT Bank Riau Kepri shows that the implementation of UUS GCG is in accordance with the self-assessment criteria/indicators.

DPS PT Bank Riau Kepri has audited the Sharia Branch Offices and Sharia Head Offices (KCS and KCPS) on a regular basis, and has reported the findings and activities of DPS to OJK, Commissioners and Directors of PT Bank Riau Kepri and this is in line with PBI No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. This audit process really maintains the stability and consistency of UUS PT Bank Riau Kepri in carrying out Bank operations in accordance with Sharia principles. Looking at the composition of the DPS PT Bank Riau Kepri, the number of DPS members is in accordance with PBI No. 11/10/PBI/2009 concerning Sharia Business Units.

Hasil analisis *self assessment* dari subfaktor Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS PT Bank Riau Kepri telah sesuai dengan kriteria/indikator *Self Assesment*.

Untuk kriteria Anggota DPS dalam menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dinilai Baik, dan diharapkan kedepannya DPS PT Bank Riau Kepri mempunyai waktu yang lebih untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

UUS Bank Riau Kepri telah menyarankan kepada DPS Bank agar selanjutnya segala bentuk koordinasi yang melibatkan DPS dapat dilaksanakan melalui rapat. Apabila DPS tidak memungkinkan untuk hadir dalam rapat dikarenakan keterbatasan waktu, alternatif lain dapat dilakukan Rapat / permintaan opini melalui Surat dan Sarana Komunikasi lainnya.

Hasil analisis *self assessment* dari Transparansi DPS PT Bank Riau Kepri telah sesuai dengan kriteria/indikator *Self Assesment*. DPS telah menyampaikan laporan aktifitas DPS sepanjang Tahun 2021, laporan pemeriksaan dan pengawasan DPS, Daftar remunerasi DPS dalam seTahun, serta rangkap jabatan DPS di Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 09/ KEPDIR/2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah tanggal 11 Maret 2014 pada Bab II Dewan Pengawas Syariah, poin IV, nomor 6) disebutkan bahwa "Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan oleh Bank ke Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberhentian dan/ atau pengunduran diri efektif."

The results of the self-assessment analysis of the Composition, Criteria and Independence sub-factors of DPS PT Bank Riau Kepri has complied with the criteria/indicators of Self Assessment.

For the criteria of DPS Members in providing time to carry out their duties and responsibilities, it is considered Good, and it is hoped that in the future DPS PT Bank Riau Kepri has more time to carry out its duties and responsibilities optimally.

The UUS of Bank Riau Kepri has suggested to DPS Bank that all forms of coordination involving DPS can be carried out through meetings. If the DPS is unable to attend the meeting due to time constraints, another alternative can be a meeting / request for opinion through letters and other means of communication.

The results of the self-assessment analysis of the Transparency of DPS PT Bank Riau Kepri has complied with the criteria/ indicators of self-assessment. DPS has submitted DPS activity reports throughout 2021, DPS inspection and supervision reports, DPS remuneration list in a year, as well as concurrent positions of DPS in other Islamic Financial Institutions.

Mechanism of Termination and Resignation of Sharia Supervisory Board

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Regional Development Bank Riau Kepri Number 09/KEPDIR/2014 concerning Company Manual Book (BPP) Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri Sharia Business Unit dated March 11, 2014 in Chapter II of Sharia Supervisory Board, point IV, number 6) stated that "Dismissal and/or or the resignation of a DPS member must be reported by the Bank to Bank Indonesia no later than 10 (ten) days after the termination and/or resignation is effective."



Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal Perusahaan, penerapan manajemen risiko dan praktik-praktik akuntansi dan pembukuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengawasi pelaksanaan audit internal serta melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Melaksanaan kepengurusan Bank secara penuh.
2. Mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
3. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris yang diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.
9. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Bank dan/atau pada Bank lain serta tanggal saham itu diperoleh.
10. Bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Bank.

Directors

The Board of Directors is a company organ that is directly responsible for the management of the Company as regulated in the Company's Articles of Association. The Board of Directors is responsible for the Company's internal control structure, the implementation of risk management and the Company's accounting and bookkeeping practices in accordance with applicable regulations, overseeing the implementation of internal audits and carrying out necessary follow-up actions in accordance with the direction of the Board of Commissioners. The Board of Directors is responsible to the GMS which is the embodiment of accountability management of the company in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

The duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. *Carry out full management of the Bank.*
2. *Representing the Bank both inside and outside the court.*
3. *Manage the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*
4. *Implement the application of Risk Management and Good Governance principles in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.*
5. *Following up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, results of supervision by Bank Indonesia or the Financial Services Authority and/or results of supervision by other authorities.*
6. *Accountable for the implementation of their duties to shareholders through the General Meeting of Shareholders.*
7. *Disclosure to employees of the Bank's strategic policies in the field of personnel.*
8. *Provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners as needed in relation to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and control the implementation of Bank policies.*
9. *Organize and maintain a Special Register containing information regarding share ownership of members of the Board of Directors and Commissioners and their families in the Bank and/or in other Banks as well as the date the shares were acquired.*
10. *Personally responsible for negligence that harms the interests of the Bank.*

11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang timbul berdasarkan anggaran dasar Bank, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
12. Untuk Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, selain tugas dan tanggung jawab yang diatur secara umum di atas juga bertanggung jawab secara khusus sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Persyaratan Direksi

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Bank, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
   d. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
   e. Sehat Jasmani dan Rohani;
   f. Memiliki ijazah paling rendah Strata I (S1);
   g. Usia minimal 35 (tiga puluh lima) Tahun dan maksimal 55 (lima puluh lima) Tahun pada saat mendaftar pertama kali;
   h. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memahami manajemen perusahaan;
   i. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
   j. Tidak Sedang dilarang untuk menjadi Pemegang Saham dan atau pengurus Bank yang antara lain tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus;
   k. Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;
   l. Memiliki sertifikat manajemen risiko sesuai yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
   m. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
   n. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   o. Tidak sedang/pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan kategori sebagaimana yang diatur oleh ketentuan OJK dan Peraturan Pemerintah;
   p. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan bermasalah (kolektibility 3, 4 dan 5) dan/atau hapus buku;
   q. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif;

11. Carry out duties and responsibilities that arise based on the articles of association of the Bank, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and as stipulated in the Laws and Regulations, Bank Indonesia Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, Financial Services Authority Regulations and Financial Services Authority Circular Letters.
12. For the Director in charge of the Compliance function, in addition to the duties and responsibilities that are regulated in general above, they are also specifically responsible as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.

Directors Requirements

In order to be appointed as a member of the Bank's Board of Directors, the following requirements must be met:

1. General requirements
   a. Indonesian citizens;
   b. Fear God Almighty;
   c. Have good character and morals;
   d. Loyal and obedient to the State and Government of the Republic of Indonesia;
   e. Physically and mentally healthy;
   f. Have a diploma at least Strata I (S1);
   g. Minimum age 35 (thirty five) years and maximum 55 (fifty five) years at the time of first registration;
   h. Understanding regional government administration and understanding company management;
   i. Have expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good behavior, and high dedication to advancing and developing the company;
   j. Not being prohibited from becoming a Shareholder and/or Bank management which, among other things, is not included in the Disqualified List;
   k. Never committed a disgraceful act in the Banking sector;
   l. Have a risk management certificate as required in the provisions of the Financial Services Authority;
   m. Able to carry out legal actions;
   n. Never been declared Bankrupt and/or become a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors found guilty of causing a company to be declared Bankrupt;
   o. Not currently/have been punished for committing a criminal act with the categories as regulated by the provisions of the OJK and Government Regulations;
   p. Have a good financial reputation with no credit and/or non-performing financing (collectibility 3, 4 and 5) and/or write-off;
   q. Not currently serving as an administrator of a political party, candidate for regional head or candidate for deputy regional head, and/or candidate for member of the legislature;

r. Tidak merangkap jabatan sebagai :
   - Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain;
   - Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga Pemerintahan Pusat/ Daerah;
   - Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan atau pertentangan secara langsung/ tidak langsung dengan Perseroan yang dipimpinnya dan/atau yag bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

s. Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;

t. Memenuhi persyaratan administrasi lainnya bagi calon Anggota Direksi Bank sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Persyaratan Khusus
   a. Calon Dari Pihak Internal PT Bank Riau Kepri
      Minimal pernah menjadi pejabat eksekutif (1) satu level di bawah Direksi atau pejabat eksekutif aktif yang jabatan pada saat mencalonkan diri, (1) satu level di bawah Direksi dan menjabat Pemimpin Divisi atau selevel Pemimpin Divisi di Bank.
   b. Calon dari Pihak Eksternal
      a. Memiliki pengalaman operasional perbankan minimal 5 (lima) Tahun sebagai pejabat eksekutif dengan jabatan terakhir atau pada saat mencalonkan diri sebagai Pejabat Eksekutif 1 (satu) level di bawah Direksi ataupun pensiunan Pejabat Eksekutif yang jabatannya (1) satu level di bawah Direksi, pada suatu Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) minimal setara dengan Bank Riau Kepri.
      b. Rekomendasi atau Surat Keterangan dari Bank tempat kerja sebelumnya.

3. Persyaratan Lainnya
   a. Untuk jabatan Direktur Utama, wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
   b. Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) Tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank.
   c. Untuk calon Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

r. Not concurrently serving as:
   - *Members of the Board of Commissioners, Directors or Executive Officers at Banks, companies and or other institutions;*
   - *Other structural and functional positions in Central/Regional government agencies/ institutions;*
   - *Other positions that may cause direct/indirect conflict or conflict with the Company they lead and/or conflict with the prevailing laws and regulations.*

s. Every(1) one in the management of BUMD in 1 (one) Region is prohibited from having family relations up to the third degree based on a straight line up, down, or sideways, including relationships that arise due to marriage;

t. Fulfill other administrative requirements for prospective Members of the Bank's Board of Directors in accordance with the provisions of the Financial Services Authority.

2. Special Requirements
   a. Candidates from the Internal Party of PT Bank Riau Kepri
      At least have been an executive officer (1) one level below the Board of Directors or an active executive officer who held the position at the time of candidacy, (1) one level below the Board of Directors and served as Division Leader or at the level of Division Leader at the Bank.
   b. Candidates from External Parties
      a. Have a minimum of 5 (five) years of Banking operational experience as an executive officer with the last position or at the time of nomination as an Executive Officer 1 (one) level below the Board of Directors or a retired Executive Officer whose position is (1) one level below the Board of Directors, in a Commercial Bank Business Activities (BUKU) is at least equivalent to Bank Riau Kepri.
      b. Recommendation or Certificate from the Bank of the previous work place.

3. Other Requirements
   a. For the position of President Director, it must come from a party that is independent of the controlling shareholder.
   b. Members of the Board of Directors have at least 5 (five) years of experience in the operational field as Executive Officers at the Bank.
   c. Candidates for Director in charge of the Compliance Function are required to have sufficient integrity and knowledge regarding the provisions of Bank Indonesia and/or the Financial Services Authority and the prevailing laws and regulations.

d. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi dari 25 % modal disetor pada suatu Bank dan/atau perusahaan lain.

Proses Nominasi Dan Pemilihan Direksi

Proses nominasi dan pemilihan Direksi dilakukan dengan proses sebagai berikut:

1. Proses Penyerahan Kewenangan oleh RUPS
2. Proses Tahapan Seleksi Calon Anggota Direksi.
3. Penetapan Calon anggota Direksi Bank Riau Kepri oleh RUPS Luar Biasa.
4. Proses uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan keputusan lulus atau tidak lulus calon anggota Direksi dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pengangkatan Calon anggota Direksi Bank Riau Kepri oleh RUPS Luar Biasa.
6. Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Direksi.

Lebih rinci terkait proses nominasi dan pemilihan Direksi dijelaskan pada bagian Kebijakan Suksesi Direksi Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Pedoman Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam Pedoman kerja Direksi yang mengatur tentang Panduan dan Pedoman kerja dan tata tertib Direksi berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum koRporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Komisaris dan Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja & tata tertib Direksi merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Riau Kepri dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) tata kelola Bank yang baik.

Pedoman Kerja Direksi Bank Riau Kepri terdapat dalam Keputusan Direksi Nomor 049/KEPDIR/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Pedoman Kerja Direksi yang terdiri atas:

1. Visi dan misi
2. Tujuan
3. Fungsi
4. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi
5. Persyaratan untuk Menjadi Direksi
6. Masa Jabatan
7. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
8. Etika Kerja dan Jabatan
9. Waktu Kerja
10. Tugas dan Tanggung Jawab
11. Hak dan Kewenangan
12. Rapat Direksi
13. Pembagian Tugas antar Direksi

d. Members of the Board of Directors, either individually or jointly, are prohibited from owning shares of more than 25% of the paid-up capital in a Bank and/or other company.

Nomination and Selection Process for Directors

The nomination and selection process for the Board of Directors is carried out with the following process:

1. *Process of Handover of Authority by GMS*
2. *Process for Selection of Candidates for Members of Directors.*
3. *Determination of Candidates for members of the Board of Directors of Bank Riau Kepri by the Extraordinary GMS.*
4. *The fit and proper test process by the Financial Services Authority and the decision to pass or fail the candidate for the Board of Directors from the Financial Services Authority.*
5. *Appointment of Candidates for members of the Board of Directors of Bank Riau Kepri by the Extraordinary GMS.*
6. *Candidates for members of the Board of Directors must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions as members of the Board of Directors.*

More details regarding the nomination and selection process for the Board of Directors are explained in the Board of Directors Succession Policy section, GCG of this Annual Report.

Board of Directors Work Guidelines

The guidelines and work procedures of the Board of Directors are regulated in the Board of Directors' Work Guidelines which regulate the Guidelines and Work Guidelines and the Board of Directors' code of conduct which contains a compilation of the principles of Corporate law, applicable laws and regulations, the direction of the Shareholders and the provisions of the Articles of Association that govern the working procedures of the Commissioners. and the Board of Directors and their supporting organs. The work guidelines & regulations for the Board of Directors are the result of the codification of various regulations that apply to Bank Riau Kepri and best practices for good Bank governance.

The Work Guidelines for the Directors of Bank Riau Kepri are contained in the Directors' Decree Number 049/KEPDIR/2019 dated 27 August 2019 concerning the Work Guidelines for the Directors, which consist of:

1. *Vision and mission*
2. *Destination*
3. *Function*
4. *Number, Composition and Independence of Directors*
5. *Requirements to Become a Director*
6. *Length of service*
7. *Orientation and Capacity Building Program*
8. *Work Ethics and Position*
9. *Working time*
10. *Duties and responsibilities*
11. *Rights and Authorities*
12. *Board of Directors Meeting*
13. *Division of Duties between Directors*

14. Pendelegasian Wewenang Antar Direksi
15. Komite-Komite Direksi
16. Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris
17. Penggunaan Saran Profesional

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

1. Bank diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau lebih yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
3. Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).
4. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
5. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan dalam aspek kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Dasar pengangkatan Direksi adalah Surat Penetapan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Bank dari OJK. Selanjutnya calon anggota Direksi Bank yang telah disetujui oleh OJK ditetapkan untuk menjadi anggota Direksi Bank di dalam RUPS-LB untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan pada RUPS-LB.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Dalam mempertahankan keunggulan kompetitif, Bank Riau Kepri telah memiliki Direksi yang memiliki beragam latar belakang keahalian di bidang perbankan seperti perbankan syariah, keuangan, auditing/pengawasan, kepatuhan, perkreditan/pembiayaan, pendanaan dan operasional perbankan. Selain itu juga memiliki kompetensi, latar belakang dan pengalaman yang bervariasi. Hal ini dipandang penting oleh Bank untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang kuat dan pengurusan Bank yang efektif.

Penetapan komposisi Direksi mengacu pada kebijakan keberagaman berdasarkan Anggaran Dasar Bank, SOT Bank dan ketentuan yang dituangkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang merupakan acuan pertimbangan dalam proses nominasi dan suksesi Direksi dengan memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga mendapatkan komposisi Dewan Komisaris yang optimal.

14. Delegation of Authority Between Directors
15. Directors' Committees
16. Working Relations between the Directors and the Board of Commissioners
17. Use of Professional Advice

Composition and Basis of Appointment of the Board of Directors

1. *The Bank is managed and led by a Board of Directors consisting of at least 3 (three) or more persons consisting of 1 (one) President Director and 2 (two) members of the Board of Directors.*
2. *The Board of Directors is led by the President Director.*
3. *A member of the Board of Directors is appointed as the director in charge of the compliance function (Director of Compliance).*
4. *All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia.*
5. *The President Director must come from a party that is independent of the controlling shareholder. The independence assessment is based on the relevant relationship in the aspects of management, ownership and/or financial relationship, as well as family relationship with the controlling shareholder.*

The basis for the appointment of the Board of Directors is the Letter of Determination of Fit and Proper Test Results of Candidates for Members of the Bank's Board of Directors from the OJK. Furthermore, candidates for members of the Bank's Board of Directors who have been approved by the OJK are determined to become members of the Bank's Board of Directors at the EGMS for a term of office of 5 (five) years from the date of appointment at the EGMS.

Diversity Policy in the Composition of the Board of Directors

In maintaining a competitive advantage, Bank Riau Kepri already has Directors who have various expertise backgrounds in Banking such as sharia Banking, finance, auditing/supervision, compliance, credit/financing, funding and Banking operations. In addition, they also have various competencies, backgrounds and experiences. This is considered important by the Bank to ensure a strong decision-making process and effective Bank management.

The determination of the composition of the Board of Directors refers to the diversity policy based on the Bank's Articles of Association, SOT of the Bank and the provisions set forth in the Guidelines and Work Rules of the Board of Directors which is a reference for consideration in the process of nomination and succession of the Board of Directors by taking into account the knowledge, expertise and experience in accordance with the needs of the company, so as to obtain optimal composition of the Board of Commissioners.

Selain itu, seluruh Direksi Bank telah memenuhi persyaratan sebagai sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum, dan Ketentuan OJK tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari beragam latar belakang kualifikasi pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan keahlian.

In addition, all of the Bank's Directors have met the requirements in accordance with the Limited Liability Company Law Number 40 of 2007, the Financial Services Authority Regulation concerning Commercial Banks, and OJK Provisions concerning Fit and Proper Testing for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Directors, and Candidates Member of the Bank's Board of Commissioners. The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors consists of various educational qualification backgrounds (fields of study), work experience, age, and expertise.

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Table of Diversity in the Composition of the Board of Commissioners

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Andi Buchari	Direktur Utama *President director*	55 Tahun *Year*	Pria *Man*	Insinyur Perikanan/*Marine Product* Magister Manajemen Doktor Manajemen dan Bisnis *Fishery/Marine Product Engineer* *Master in Management* *Doctor of Management and Business*	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan syariah, *financial*/keuangan, audit/pengawasan, dan *compliance*. *Has work experience in Islamic Banking, finance/ finance, audit/supervision, and compliance.*	Bidang Perbankan, Manajemen, Audit, Keuangan dan *Compliance* *Banking, Management, Audit, Finance and Compliance*
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*	56 Tahun *Year*	Pria *Man*	Sarjana jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan *Bachelor majoring in Economics and Development Studies*	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan syariah, *financial*/keuangan, perkreditan/pembiayaan dan pendanaan. *Have work experience in the field of Islamic Banking, finance/finance, credit/ financing and funding.*	Bidang Perbankan, financial/keuangan, perkreditan/pembiayaan dan pendanaan *Banking sector, finance/ finance, credit/financing and funding*
Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*	56 Tahun *Year*	Pria *Man*	Sarjana jurusan Ekonomi/ Akuntansi Magister Manajemen *Bachelor majoring in Economics/Accounting* *Master in Management*	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan, operasional dan perkreditan/pembiayaan *Have work experience in Banking, operations and credit/financing*	Bidang perbankan, manajemen, operasional dan perkreditan/ pembiayaan *Banking, management, operations and credit/ financing sectors*
Tengkoe Irawan	Direkrtur Kredit dan Syariah *Director of Credit and Sharia*	45 Tahun *Year*	Pria *Man*	Sarjana jurusan Akuntansi Magister Manajemen Keuangan *Bachelor majoring in Accounting* *Master in Financial Management*	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan dan perkreditan/pembiayaan *Have work experience in Banking, law, operations and credit/financing*	Bidang perbankan, manajemen dan perkreditan/pembiayaan *Banking, management and credit/financing fields*
Fajar Restu Febriansyah*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	52 Tahun *Year*	Pria *Man*	Sarjana jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan *Bachelor majoring in Economics and Development Studies*	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan, hukum, operasional dan perkreditan/pembiayaan	Bidang perbankan, hukum dan perkreditan/ pembiayaan *Banking, law and credit/ financing fields*

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Eka Afriadi**	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	54 Tahun *Year*	Pria *Man*	Sarjana jurusan akuntansi *Bachelor of Accounting*	Memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan, audit/pengawasan, dan *compliance*. *Has work experience in Banking, audit/supervision, and compliance.*	Bidang Perbankan, Audit, Akuntansi dan *Compliance* *Banking, Audit, Accounting and Compliance Bidang*

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.
** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal tanggal 4 Juli 2021.
** Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.*
*** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.*

Jumlah dan Komposisi Direksi

1. Bank diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau lebih yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
3. Seorang anggota Direksi ditunjuk selaku direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Direktur Kepatuhan).
4. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
5. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan dalam aspek kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Dasar pengangkatan Direksi adalah Surat Penetapan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Bank dari OJK. Selanjutnya calon anggota Direksi Bank yang telah disetujui oleh OJK ditetapkan untuk menjadi anggota Direksi Bank di dalam RUPS-LB untuk masa jabatan 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan pada RUPS-LB.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Sepanjang Tahun 2021

Komposisi Direksi dan dasar pengangkatan Direksi sepanjang Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Number and Composition of Directors

1. *The Bank is managed and led by a Board of Directors consisting of at least 3 (three) or more persons consisting of 1 (one) President Director and 2 (two) members of the Board of Directors.*
2. *The Board of Directors is led by the President Director.*
3. *A member of the Board of Directors is appointed as the director in charge of the compliance function (Director of Compliance).*
4. *All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia.*
5. *The President Director must come from a party that is independent of the controlling shareholder. The independence assessment is based on the relevant relationship in the aspects of management, ownership and/or financial relationship, as well as family relationship with the controlling shareholder.*

The basis for the appointment of the Board of Directors is the Letter of Determination of Fit and Proper Test Results of Candidates for Members of the Bank's Board of Directors from the OJK. Furthermore, candidates for members of the Bank's Board of Directors who have been approved by the OJK are determined to become members of the Bank's Board of Directors at the EGMS for a term of office of 5 (five) years from the date of appointment at the EGMS.

Composition and Basis of Appointment of Directors Throughout 2021

The composition of the Board of Directors and the basis for the appointment of the Board of Directors throughout 2021 are as follows.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Composition and Basis of Appointment of Directors Tables

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pelaksana *Implementing*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Tanggal Efektif *Effective Date*
Andi Buchari	Direktur Utama *President director*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank.* *OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 September 30, 2020*	30 September 2020 *September 30th 2020*
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank.* *OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 September 30, 2020*	30 September 2020 *September 30th 2020*
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah *Director of Credit and Sharia*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 13 tanggal 22 April 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. Surat OJK No. SR-585/KO.053/2019 tanggal 16 Mei 2019 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 13 dated 22 April 2019 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank.* *OJK Letter No. SR-585/KO.053/2019 date May 16, 2019*	16 Mei 2019 *May 16, 2019*
Said Syamsuri*	Direktur Operasional *Director of Operations*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH Nomor 14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. Surat OJK No. SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH Number 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank.* *OJK Letter No. SR-120/KO.053/2020 September 30, 2020*	30 September 2020 *September 30th 2020*
Fajar Restu Febriansyah **	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. Surat OJK Nomor S-462/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021 *Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank.* *OJK Letter Number S-462/KO.053/2021 dated 7 December 2021*	7 Desember 2021 *December 7th 2021*

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pelaksana *Implementing*	Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	Tanggal Efektif *Effective Date*
Eka Afriadi***	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	Otoritas Jasa Keuangan *Financial Services Authority*	Akta Notaris Fery Bakti, SH Nomor 05 tanggal 05 Juli 2013 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. (Penetapan pertama kali). Akta Notaris Feri Mondro, SH, M.Kn Nomor 04 tanggal 04 Maret 2017 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri. (PeRpanjangan masa jabatan). Surat OJK No. SR-144/KO.053/2017 tanggal 11 Juli 2017 *Notary Deed of Fery Bakti, SH Number 05 dated July 5, 2013 regarding Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank. (First time setting).* *Notary Deed of Feri Mondro, SH, M.Kn Number 04 dated March 4, 2017 concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Riau Islands Bank. (Extended term of office).* *OJK Letter No. SR-144/KO.053/2017 dated 11 July 2017*	11 Juli 2017 *July 11, 2017*

* Ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
** Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021
*** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal 4 Juli 2021
** Appointed as a temporary replacement for the Director of Compliance and Risk Management as of July 5, 2021 until November 15, 2021*
*** Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on 15 November 2021*
**** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021*

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai Bank Riau Kepri. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai Bank Riau Kepri, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Program orientasi ini juga dilakukan untuk memberikan gambaran umum terhadap rencana bisnis Bank Riau Kepri, informasi mengenai kegiatan bisnis utama, garis besar tugas dan kegiatan Direksi berdasarkan peraturan perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Kebijakan Program Orientasi bagi Direksi Baru di Bank Riau Kepri:
1. Kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan Program Orientasi mengenai Bank.
2. Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengadakan program Orientasi atau jika Direktur Utama berhalangan atau tidak ada (jabatan Direktur Utama kosong), maka tanggung jawab pelaksanaan program Orientasi berada pada Direksi lainnya.
3. Program Orientasi yang diberikan kepada Direktur, antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:
   a. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan hukum;
   b. Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik oleh Bank;

Orientation Program for New Directors

Members of the Board of Directors who are appointed for the first time are given an orientation/introduction program regarding Bank Riau Kepri. This program aims to provide an understanding of the vision, mission and values of Bank Riau Kepri, code of ethics and code of conduct, organizational structure, as well as guidelines and work procedures for the Board of Directors. This orientation program is also carried out to provide an overview of the business plan of Bank Riau Kepri, information on the main business activities, an outline of the duties and activities of the Board of Directors based on Banking regulations and other applicable laws and regulations.

Orientation Program Policy for New Directors at Bank Riau Kepri:
1. *The Director who is serving for the first time must be given an Orientation Program regarding the Bank.*
2. *The President Director is responsible for conducting the Orientation program or if the President Director is unable or absent (the position of the President Director is vacant), then the responsibility for implementing the Orientation program rests with the other Directors.*
3. *The Orientation Program given to the Director includes, among others, the following:*
   a. *Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Directors under the law;*
   b. *Implementation of Good Governance principles by the Bank;*

c. Gambaran mengenai Bank berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal.

4. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Bank, perkenalan dengan para pejabat dan pegawai Bank serta program lainnya sesuai kebutuhan.
5. Program Peningkatan Kapabilitas menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang *core business Bank* di bidang perbankan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Bank.
6. Ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi sebagai berikut:
   a. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi.
   b. Rencana untuk melakukan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi.
   c. Setiap Direktur yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan atau pelatihan agar menyajikan presentasi mengenai materi seminar atau pelatihan kepada Direktur lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.

Pada Tahun 2021 terjadi perubahan komposisi Direksi, yaitu ditunjuknya Sdr. Fajar Restu Febriansyah sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risko, dan telah mengikuti program orientasi pengenalan bagi anggota Direksi baru pada tanggal 16 November 2021.

Pembidangan Tugas Direksi

Direksi bertugas dengan itikad baik dan bertanggungjawab penuh memimpin dan mengurus Bank sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta dalam batasan wewenang yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, adalah sebagai berikut:

c. Description of the Bank related to the vision, mission, objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;

d. Information relating to delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies.

4. The orientation program provided can be in the form of presentations, meetings or visits to Bank facilities, introductions to Bank officials and employees and other programs as needed.
5. The Capability Improvement Program is important so that the Board of Directors can always follow the latest developments regarding the Bank's core business in the Banking sector and are always ready to anticipate them for the sustainability and progress of the Bank.
6. Provisions regarding the Capability Improvement Program for the Board of Directors are as follows:
   a. The Capability Improvement Program is implemented in order to improve the effectiveness of the implementation of the duties, authorities and responsibilities of the Board of Directors.
   b. The plan to carry out the Capability Improvement Program must be included in the Work Plan and Budget of the Board of Directors.
   c. Every Director who participates in Capability Improvement Programs such as seminars and or training is required to present presentations on seminar or training materials to other Directors in order to share information and knowledge.

In 2021 there will be a change in the composition of the Board of Directors, namely the appointment of Mr. Fajar Restu Febriansyah as Director of Compliance and Risk Management, and has participated in the orientation program for the introduction of new members of the Board of Directors on November 16, 2021.

Division of Duties of the Board of Directors

The Board of Directors serves in good faith and is fully responsible for leading and managing the Bank in accordance with the vision, mission, and objectives that have been set and within the limits of authority set forth in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations. The duties and responsibilities of each Board of Directors are regulated in the Board of Directors' Guidelines and Work Rules, as follows:

Tabel Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan Yang Dijalankan
Table of Business Activities by Articles of Association and Executed

Jabatan *Position*	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Job Description and Responsibilities*
Direktur Utama *President director*	Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan. Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani surat saham dan surat kolektif saham. Mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Menjalin hubungan dengan pihak luar antara lain dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank-Bank dan lembaga lainnya. Bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas dan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank. Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Audit Internal. Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Bank secara menyeluruh. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Bank. Menyiapkan Rencana Kerja Bank. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Tahun buku Bank ditutup. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur. Direktur Utama berwenang mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Direktur Utama berwenang melakukan tindakan korektif dan/atau instruktif atas kebijakan yang telah diputuskan oleh Direktur yang menurut penilaian Direktur Utama menyimpang dari kebijakan Bank. *The President Director acts for and on behalf of the Board of Directors and represents the Bank inside and outside the court.* *Together with the President Commissioner signed the share certificate and collective share certificate.* *Bind the Bank with other parties and other parties with the Bank, and carry out all actions, both regarding management and ownership.* *Establishing relationships with external parties, among others with Regional Governments, Government Agencies, Bank Indonesia, Financial Services Authority, Banks and other institutions.* *Responsible for planning, leading, coordinating and directly overseeing the implementation of the duties and work of the work units under his/her supervision.* *Signing principal letters and other documents that may influence the Bank's policies.* *Obligation to pay attention and immediately take the necessary steps for everything that is stated in every report on the results of the examination made by the Internal Audit.* *Directing, developing and establishing a comprehensive Bank management strategy.* *Control and evaluate all activities of the Bank.* *Prepare Bank Work Plan.* *Submit the Annual Report to the GMS for approval within 6 (six) months after the Bank's financial year is closed.* *Coordinate activities and implementation of duties of all Directors.* *The President Director is authorized to make decisions in the context of carrying out his duties, authorities and responsibilities.* *The President Director is authorized to take corrective and/or instructive actions on policies that have been decided by the Director which according to the President Director's assessment deviates from the Bank's policies.*
Direktur Dana & Jasa *Director of Funds & Services*	Direktur Dana & Jasa dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Direktur Dana & Jasa bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Direktur Dana & Jasa menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi. *The Director of Funds & Services may act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party.* *The Director of Funds & Services is in charge of planning, leading, coordinating and directly overseeing the implementation of work units under his supervision.* *The Director of Funds & Services signs letters and other documents related to his/her field of work, except for very principal matters that may affect the Bank's policy, which must be carried out in a meeting of the Board of Directors.*

Jabatan *Position*	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab *Job Description and Responsibilities*
Direktur Kredit & Syariah *Credit Director and Sharia*	Direktur Kredit & Syariah dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Direktur Kredit & Syariah bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Direktur Kredit & Syariah menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi. *The Director of Credit & Syariah may act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party.* *The Director of Credit & Sharia is in charge of planning, leading, coordinating and directly overseeing the implementation of the work of the work units under his supervision.* *The Director of Credit & Syariah signs letters and other documents related to his/her field of work, except for very principal matters that may affect the Bank's policy, which must be carried out in a meeting of the Board of Directors.*
Direktur Operasional *Director Operational*	Direktur Operasional dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Direktur Operasional bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Direktur Operasional menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi. *The Director of Operations may act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party.* *The Director of Operations is in charge of planning, leading, coordinating and directly overseeing the implementation of the work of the work units under his supervision.* *The Director of Operations signs letters and other documents related to his/her field of work, except for very principal matters that may affect the Bank's policy, which must be carried out in a meeting of the Board of Directors.*
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi. Di samping melaksanakan hal-hal yang telah disebutkan di atas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko beRpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, antara lain yaitu: Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank. Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Direktur lainnya untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya. Memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkat organisasi. Memastikan penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank telah sesuai dengan Ketentuan Bank dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku. Melaporkan kepada pihak otoritas perbankan apabila terdapat pelanggaran kepatuhan. *The Director of Compliance & Risk Management may act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the President Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party.* *The Director of Compliance & Risk Management is in charge of planning, leading, coordinating and directly overseeing the implementation of the work of the work units under his supervision.* *The Director of Compliance & Risk Management signs letters and other documents related to his/her field of work, except for very principal matters that may affect the Bank's policy, which must be carried out at a meeting of the Board of Directors.* *In addition to carrying out the things mentioned above, the implementation of the duties and responsibilities of the Director of Compliance & Risk Management is guided by the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, including:* *Identify, measure and evaluate all compliance risks of the Bank, in accordance with the Risk Management Guidelines that have been owned by the Bank.* *Conduct testing of drafts and changes to work guidelines on other Directors to ensure compliance with laws and regulations.* *Determine the steps needed to ensure compliance with all Bank activities with the provisions and commitments with Bank Indonesia and laws and regulations as well as all agreements with other parties.* *Ensuring the implementation of the principles of Good Corporate Governance (GCG) has been running in accordance with the provisions at all levels of the organization.* *Ensuring that the implementation of the prudential principle in all Bank operational activities is in accordance with Bank Regulations and other applicable laws and regulations.* *Report to the Banking authority if there is a compliance violation.*

Hubungan Afiliasi Direksi

Board of Directors Affiliation Hubungan

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Board of Directors Affiliation Hubungan Tables

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi *Financial Relations, Family and Management of Director*													
		Hubungan Keuangan Dengan *Financial Relations With*						Hubungan Keluarga Dengan *Financial Relations With*						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain. *Management Relationships with other companies.*	
		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Directors*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholders*		Dewan Komisaris *Board of Commissioners*		Direksi *Directors*		Pemegang Saham Pengendali *Controlling Shareholders*			
		Ya *Yes*	Tidak *Not*	Ya *Yes*	Tidak *Not*	Ya *Yes*	Tidak *Not*	Ya *Yes*	Tidak *Not*	Ya *Yes*	Tidak *Not*	Ya *Yes*	Tidak *Not*	Ya *Yes*	Tidak *Not*
Andi Buchari	Direktur Utama *President Director*		√		√		√		√		√		√		√
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*		√		√		√		√		√		√		√
Said Syamsuri	Direktur Operasional *Director of Operations*		√		√		√		√		√		√		√
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah *Director of Credit and Sharia*		√		√		√		√		√		√		√
Fajar Restu Febriansyah *	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*		√		√		√		√		√		√		√
Eka Afriadi **	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*		√		√		√		√		√		√		√

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.

** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal tanggal 4 Juli 2021.

* *Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.*

** *Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.*

Kepemilikan Saham Direksi

Board of Directors Share Ownership

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Board of Directors Share Ownership Table

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kepemilikan Saham | *Shareholding*			
		Bank *Bank*	Bank Lain *Other Bank*	Lembaga Keuangan Non Bank *Non-Bank financial institutions*	Perusahaan Lain *Other Companies*
Andi Buchari	Direktur Utama *President Director*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Funds and Services Director*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
Said Syamsuri	Direktur Keuangan dan Operasional *Finance and Operations Director*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah *Credit and Sharia Director*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
Fajar Restu Febriansyah *	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Compliance and Risk Management Director*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*
Eka Afriadi **	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Compliance and Risk Management Director*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*	Tidak Ada *Nothing*

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.
** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal tanggal 4 Juli 2021.

** Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.*
*** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.*

Rangkap Jabatan Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non Bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Jabatan rangkap Direksi dapat dilihat pada tabel berikut :

Concurrent Position of the Board of Directors

All members of the Board of Directors do not hold concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at Banks, non-Bank financial institutions or other companies domiciled at home and abroad.

The concurrent positions of the Board of Directors can be seen in the following table:

Tabel Rangkap Jabatan
Multiple Positions on the Board of Director Table

RANGKAP JABATAN PADA Direksi | *MULTIPLE POSITIONS ON THE BOARD OF Directors*			
Nama Direksi *Director Name*	Jabatan *Position*	Pada Bank Lain *At Other Banks*	Lembaga Keuangan Non Bank/ Perusahaan Lain *Non-Bank Financial Institutions/Other Companies*
Andi Buchari	Direktur Utama *President Director*	Tidak ada *Nothing*	Tidak ada *Nothing*
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Funds and Services Director*	Tidak ada *Nothing*	Tidak ada *Nothing*
Said Syamsuri	Direktur Operasional Operational Director	Tidak ada *Nothing*	Tidak ada *Nothing*
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit & Syariah	Tidak ada *Nothing*	Tidak ada *Nothing*
Fajar Restu Febriansyah *	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Tidak ada *Nothing*	Tidak ada *Nothing*
Eka Afriadi **	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Tidak ada *Nothing*	Tidak ada *Nothing*

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.
** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal tanggal 4 Juli 2021.
** Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.*
*** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.*

Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama Tahun 2021, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

Board of Directors Competency Training/Development Program

During 2021, members of the Board of Commissioners have attended several trainings/seminars and workshops related to their field of duty, including the following:

Tabel Pelatihan Direksi
Board of Directors Training Table

Nama *Name*	Judul Pelatihan *Training Topic*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal & Tahun Pelaksanaan *Implementation Date & Year*
Andi Buchari (Direktur Utama) *(President Director)*	Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3-5 *Maintenance of Risk Management Certification Level 3-5*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	07/04/2021
	Training of Trainer (ToT) *Islamic Banking For Executive* *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	08/04/2021
	Pelatihan Online Serttifikasi Manajemen Umum Dana Pensiun *Online Training of Pension Fund General Management Certification*	Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) *Indonesian Pension Fund Association (ADPI)*	24/05/2021
	Training *Leadership ' Mindset Transformation of Sharia Bankers ' for Executive* *Leadership Training ' Mindset Transformation of Sharia Bankers ' for Executive*	Bank Riau Kepri *Bank Riau Kepri*	02/10/2021
	Pelatihan Online : Membangun *Business Acumen* Ketajaman Bisnis Melalui Simulasi Bisnis *Online Training : Building Business Accumen Business Acumen Through Business Simulation*	nuPMK *Consulting* *nuPMK Consulting*	28/10/2021
	Seminar Nasional : Peluang pertumbuhan Kredit BPD melalui Proses Digitalisasi data Kredit dan Program Penjamin Kredit Nasional di Era New Normal *National Seminar: Opportunities for BPD Credit growth through the process of digitizing credit data and the National Credit Guarantee Program in the New Normal Era*	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) *Association of Regional Development Banks (ASBANDA)*	18/11/2021
	Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem*	Muamalat Institute *Muamalat Institute*	07/12/2021
	Workshop & Refreshement Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah *Workshop & Refreshment for Deepening the Sharia Banking Business Concept*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	15/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (*online Class*) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)*	Karim *Consulting* Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	18/12/2021
M.A. Suharto (Direktur Dana dan Jasa) *(Funds & Services Director)*	Pembekalan Sertifikasi Treasury Level Advance *Treasury Certification Advance Level*	PT Efektifpro Knowledge Source *PT Effectivepro Knowledge Source*	05/02/2021
	Training of Trainer (ToT) *Islamic Banking For Executive* *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	08/04/2021
	Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem*	Muamalat Institute *Muamalat Institute*	07/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (*online Class*) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	18/12/2021

Nama *Name*	Judul Pelatihan *Training Topic*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal & Tahun Pelaksanaan *Implementation Date & Year*
Said Syamsuri (Direktur Operasional) *(Operatinal Director)*	*Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive* *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	08/04/2021
	Training *Leadership Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive* *Training Leadership Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive*	Bank Riau Kepri *Bank Riau Kepri*	02/10/2021
	Workshop kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & Public Relation *Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations*	Bank Riau Kepri *Bank Riau Kepri*	26/11/2021
	Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem*	Muamalat Institute *Muamalat Institute*	07/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (*online Class*) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	18/12/2021
Tengkoe Irawan (Direktur Kredit dan Syariah) *(Credit and Sharia Director)*	*Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive* *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	08/04/2021
	Training *Leadership Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive* *Training Leadership Mindset Transformation of Sharia Bankers' for Executive*	Bank Riau Kepri *Bank Riau Kepri*	02/10/2021
	Seminar Nasional : Peluang pertumbuhan Kredit BPD melalui Proses Digitalisasi data Kredit dan Program Penjamin Kredit Nasional di Era New Normal *National Seminar: Opportunities for BPD Credit growth through the process of digitizing credit data and the National Credit Guarantee Program in the New Normal Era*	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) *Association of Regional Development Banks (ASBANDA)*	18/11/2021
	Workshop kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & Public Relation *Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations*	Bank Riau Kepri *Bank Riau Kepri*	26/11/2021
	Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem*	Muamalat Institute *Muamalat Institute*	07/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (*online Class*) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	18/12/2021

Nama *Name*	Judul Pelatihan *Training Topic*	Penyelenggara *Organizer*	Tanggal & Tahun Pelaksanaan *Implementation Date & Year*
Fajar Restu Febriansyah* (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko) *(Compliance and Risk Management Director)*	*Workshop* kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & Public Relation *Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations*	Bank Riau Kepri *Bank Riau Kepri*	26/11/2021
	Workshop Outlook Perbankan Syariah : Optimalisasi Ekosistem Bisnis dan Keuangan Syariah *Sharia Banking Outlook Workshop: Optimizing the Sharia Business and Finance Ecosystem*	Muamalat Institute *Muamalat Institute*	07/12/2021
	Training dan Workshop Eksekutif Perbankan Syariah untuk Komisaris dan Direksi Bank Syariah *Sharia Banking Executive Training and Workshop for Sharia Bank Commissioners and Directors*	Iqtishad Consultan Indonesia *Iqtishad Consulting Indonesia*	13/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (*online Class*) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	15/12/2021
	Workshop Persiapan Menuju Bank Riau Kepri Syariah *Workshop Preparation Towards Bank Riau Kepri Syariah*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	16/12/2021
	Workshop & Refreshment Pendalaman Konsep Bisnis Perbankan Syariah (*online Class*) *Workshop & Refreshment for Deepening Sharia Banking Business Concepts (online Class)*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	18/12/2021
Eka Afriadi** (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko) *(Compliance and Risk Management Director)*	Webinar Efektivitas Pengawasan Dewan Komisaris dalam Menjaga Kepatuhan Bank dalam Menuju Era Pengaturan *Principle Based* *Webinar on the Effectiveness of the Board of Commissioners' Supervision in Maintaining Bank Compliance in Towards the Era of Principle Based Regulation*	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	25/03/2021
	Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3-5 *Maintenance of Risk Management Certification Level 3-5*	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) *Risk Management Certification Body (BSMR)*	07/04/2021
	Training of Trainer (ToT) *Islamic Banking For Executive* *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	08/04/2021

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.
** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal tanggal 4 Juli 2021.
** Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.*
*** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.*

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Tabel Sertifikasi Manajemen Resiko Direksi
Risk Management Certification of Board Direction Table

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Sertifikasi Manajemen Risiko *Risk Management Certification*
Andi Buchari	Direktur Utama *President Director*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 7 April 2023 *Risk Management Certification Level 5, valid until 7 April 2023*
M.A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Funds and Services Director*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 *Risk Management Certification Level 5, valid until October 5, 2023*
Said Syamsuri	Direktur Operasional *Operations Director*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 *Risk Management Certification Level 5, valid until 23 October 2022*
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah *Credit and Sharia Director*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2022 *Risk Management Certification Level 5, valid until 30 September 2022*
Fajar Restu Febriansyah*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Compliance and Risk Management Director*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 16 April 2023 *Risk Management Certification Level 5, valid until April 16, 2023*
Eka Afriadi**	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Compliance and Risk Management Director*	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5, berlaku sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 *Risk Management Certification Level 5, valid until 17 October 2021*

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.
** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal tanggal 4 Juli 2021.
**Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.*
*** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.*

Rapat Direksi

Sepanjang Tahun 2021, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Board of Directors Meeting

Throughout 2021, the agenda, date and participants of the Board of Directors Meeting are as follows.

Tabel Rapat Direksi
Table of Diector meeting

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
1	08 Januari 2021 *January 08, 2021*	Presentasi Progress Konversi Syariah *Presentation of Sharia Conversion Progress*	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Ketua *Project Management Office* (PMO) Ketua Bidang PMO
2	11 Januari 2021 *January 11, 2021*	Pembahasan SOT BRK Syariah *Discussion of Sharia BRK SOT*	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Pemimpin Divisi MSDM Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
3	13 Januari 2021 *January 13, 2021*	Evaluasi Kinerja Divisi/Desk Tahun 2021 Presentasi Program Kerja Tahun 2021 *Performance Evaluation of Division/Desk in 2021* *2021 Work Program Presentation*	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim
4	14 Januari 2021 *January 14, 2021*	Business Meeting dan Penyampaian Target Tahun 2021 *Business Meeting and Submission of Targets for 2021*	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim Seluruh Pemimpin Cabang

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
5	29 Januari 2021 *January 29, 2021*	Pembahasan Progress Pekerjaan Persiapan Konversi *Discussion on the progress of the conversion preparation work*	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Ketua PMO Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Pemimpin Divisi Financial Review
6	02 Februari 2021 *February 02, 2021*	Pembahasan Kinerja Januari 2021 *January 2021 Performance Discussion*	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi P2K Pemimpin Divisi Treasury & Internasional Pemimpin Divisi Keuangan Pemimpin Divisi Dana & Jasa Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Internal Audit Pemimpin Divisi Financial Review
7	05 Februari 2021 *February 05, 2021*	Pembahasan Presentasi Progress Konversi *Conversion Progress Presentation Discussion*	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Ketua PMO Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Treasury & Internasional Pemimpin Divisi TSI Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
8	08 Februari 2021 *February 08, 2021*	Pembahasan *Corporate Identity* Pembahasan Draft Agenda RUPS-LB Tahun 2021 *Corporate Identity Discussion* *Discussion of the 2021 EGMS Agenda Draft*	Andi Buchari Said Syamsuri Tengkoe Irawan Eka Afriadi M.A. Suharto Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Pemimpin Divisi Hukum
9	08 Februari 2021 *February 08, 2021*	Program Kerja (umum) Divisi MSDM Tahun 2021. *Mapping* Karyawan Unit Bisnis – Unit Support & Strategi Balancing Program ODP Pembiayaan Produktif Rencana Kebijakan Pengembangan Kompetensi SDM Rencana Rekrutmen *Work Program (general) of the Human Resources Division in 2021.* *Mapping Business Unit Employees – Support & Balancing Strategy Unit* *Productive Financing ODP Program* *HR Competency Development Policy Plan* *Recruitment Plan*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi MSDM Pemimpin Divisi Financial Review

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
10	09 Februari 2021 *February 09, 2021*	Pembahasan Bisnis Bank Riau Kepri *Bank Riau Kepri Business Discussion*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Dana & Jasa Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Treasury & Internasional Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Divisi MSDM Pemimpin Divisi P2K Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
11	10 Februari 2021 *February 10, 2021*	Pembahasan Alur Proses dan Limit Kredit/Pembiayaan *Discussion of Process Flow and Credit/Financing Limits*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi Treasury & Internasional Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Financial Review
12	19 Februari 2021 *February 19, 2021*	Pembahasan Progress Konversi Syariah *Discussion on Sharia Conversion Progress*	Andi Buchari Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua PMO Seluruh Pemimpin Divisi
13	22 Februari 2021 *February 22, 2021*	Pembahasan Ranperda dan Perubahan AD/ART BRK menjadi BUS *Discussion of Ranperda and Change of AD/ART BRK to BUS*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi Hukum
14	22 Februari 2021 *February 22, 2021*	Pembahasan Penyesuaian RBB Tahun 2021 – 2023 *Discussion on Adjusting the RBB for 2021 – 2023*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Seluruh Pemimpin Divisi
15	22 Februari 2021 *February 22, 2021*	Pembahasan Rancangan SOT BUS *SOT BUS Design Discussion*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi MSDM Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis
16	23 Februari 2021 *February 23, 2021*	Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Bank Riau Kepri *Discussion on Bank Soundness Level (TKB) of Bank Riau Kepri*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Kepatuhan
17	23 Februari 2021 *February 23, 2021*	Pembahasan Percepatan Konversi BRK *BRK Conversion Acceleration Discussion*	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Ketua Bidang PMO

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
18	24 Februari 2021 *February 24, 2021*	Pembahasan terkait Kebijakan Bagi Hasil Hi-1000 *Discussion regarding the Hi-1000 Profit Sharing Policy*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua PMO Ketua Bidang PMO
19	02 Maret 2021 *March 02, 2021*	Pembahasan Progress Konversi Syariah *Discussion on Sharia Conversion Progress*	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Ketua PMO Ketua Bidang PMO
20	05 Maret 2021 *March 05, 2021*	Pembahasan Evaluasi Kinerja Februari 2021 *Discussion on Performance Evaluation February 2021*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Seluruh Pemimpin Divisi Seluruh Pemimpin Cabang
21	08 Maret 2021 *March 08, 2021*	Pembahasan *Exit Meeting Draft* LHP PT Bank Riau Kepri Tahun buku 2021 *Discussion on Exit Meeting Draft LHP PT Bank Riau Kepri for fiscal year 2021*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi Keuangan Pemimpin Divisi Internal Audit Pemimpin Divisi Operasional Pemimpin Divisi P2K Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Komersial
22	16 Maret 2021 *March 16, 2021*	Rencana Strategis Teknologi Informasi Tahun 2021 – 2025 *Information Technology Strategic Plan 2021 – 2025*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Anggota Komite Pengarah TI
23	22 Maret 2021 *March 22, 2021*	Presentasi Progress Konversi Syariah *Sharia Conversion Progress Presentation*	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua Bidang PMO
24	22 Maret 2021 *March 22, 2021*	Presentasi Persetujuan Logo & *Corporate Identity* BRK Syariah *Presentation of BRK Syariah Logo & Corporate Identity Approval*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
25	30 Maret 2021 *March 30, 2021*	Pembahasan CKPN bulan Maret 2021 *Discussion on CKPN for March 2021*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi P2K
26	09 April 2021 *April 09, 2021*	Presentasi Progress Konversi Syariah *Sharia Conversion Progress Presentation*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua PMO Ketua Bidang PMO

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
27	14 April 2021 *April 14th 2021*	Pembahasan Penyaluran Kredit *Discussion of Credit Distribution*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Pemimpin Divisi MSDM Pemimpin Divisi Financial Review Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
28	19 April 2021 *April 19, 2021*	Pembahasan Tindak Lanjjt Pertemuan dengan Tim PMO bersama Karim Consulting *Discussion on Follow Up Meeting with the PMO Team with Karim Consulting*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua PMO Ketua Bidang PMO
29	26 April 2021 *April 26, 2021*	Pembahasan *Checklist* terkait Persyaratan IT Konversi Pembahasan *Checklist* terkait Dokumen yang dipersyaratkan *Discussion of the Checklist related to IT Conversion Requirements* *Discussion of the checklist related to the required documents*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua Bidang PMO
30	28 April 2021 *April 28, 2021*	Pembahasan Tindak Lanjut Rapat PMO tanggal 26 April 2021 *Discussion on the Follow-up to the PMO Meeting on April 26, 2021*	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua PMO Ketua Bidang PMO
31	28 April 2021 *April 28, 2021*	Konfirmasi Akhir Pemenuhan Submit Dokumen OJK *Final Confirmation of FSA Document Submit Fulfillment*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Ketua PMO Ketua Bidang PMO
32	06 Mei 2021 *May 06 2021*	Pembahasan Pencapaian Kinerja April 2021 (Kredit, Dana dan Layanan) Persiapan menghadapi Idul Fitri (Libur Operasional) *Discussion on April 2021 Performance Achievements (Credit, Funds and Services)* *Preparation for Eid Al-Fitr (Operational Holiday)*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Seluruh Pemimpin Divisi Seluruh Pemimpin Cabang
33	10 Mei 2021 *May 10, 2021*	Penetapan Pengurus Dapen Bank Riau Kepri *Determination of the Board of Trustees of Bank Riau Kepri*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Pemimpin Divisi MSDM
34	17 Mei 2021 *May 17, 2021*	Pembahasan Agenda RUPS Tahunan Tahun buku 2020 dan RUPS LB Tahun 2021 Pembahsan Skenario RUPS Tahunan Tahun buku 2020 dan RUPS LB Tahun 2021 Pembahasan Persiapan Acara *Discussion of the Agenda for the Annual GMS for the financial year 2020 and the Extraordinary GMS in 2021* *Discussion on the Scenario of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders and the 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders* *Event Preparation Discussion*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Eka Afriadi Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Pemimpin Divisi Hukum Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
35	22 Juni 2021 *June 22, 2021*	Pembahasan Revisi RBB PT Bank Riau Kepri Tahun 2021 *Discussion on the Revised RBB of PT Bank Riau Kepri in 2021*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi Seluruh Pemimpin Divisi

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
36	28 Juni 2021 *June 28, 2021*	Pembahasan Proyeksi Kinerja Juni 2021 dan Progress Konversi *Discussion of June 2021 Performance Projection and Conversion Progress*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi Hukum Pemimpin Divisi Keuangan Pemimpin Divisi MKM
37	30 Juni 2021 *June 30, 2021*	Pembahasan Review Kebijakan Perkreditan Bank (KKP) Pembahasan Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Prekreditan Bank (KKP) Pembahasab Susunan Keanggotaan Komite Kredit (KK) Pembahasan Kewenangan dan Tanggung Jawab *Financial Review* *Discussion of Bank Credit Policy Review (KKP)* *Discussion on the Membership Composition of the Bank Precredit Policy Committee (KKP)* *Discussion on the Membership Composition of the Credit Committee (KK)* *Discussion of Authority and Responsibilities Financial Review*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Anggota Komite Kebijakan Prekreditan (KKP)
38	30 Juni 2021 *June 30, 2021*	Penunjukan Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri *Appointment of Temporary Substitute Director of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Eka Afriadi
39	1 Juli 2021 *July 1, 2021*	Silaturahim Direksi bersama Majelis Ulama Indonesia Pusat terkait Progress Proses Izin Konversi *Friendship of the Board of Directors with the Central Indonesian Ulema Council regarding the Progress of the Conversion Permit Process*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
40	21 Juli 2021 *July 21, 2021*	Pembahasan Perubahan dan Pemenuhan SOT Bank Riau Kepri *Discussion on Changes and Fulfillment of SOT Bank Riau Kepri*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri
41	26 Juli 2021 *July 26, 2021*	Evaluasi Proses Bisnis Divisi/Desk/Tim *Division/Desk/Team Business Process Evaluation*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim
42	13 Agustus 2021 *August 13, 2021*	Pembahasan Pending Items dan Jadwal Streaming Lanjutan dengan OJK *Discussion of Pending Items and Advanced Streaming Schedule with OJK*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
43	14 Agustus 2021 *August 14, 2021*	Pembahasan Roadmap Bank Riau Kepri Syariah *Discussion of the Roadmap of Bank Riau Kepri Syariah*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
44	20 Agustus 2021 *August 20, 2021*	Pemaparan Draft Respon Surat OJK terkait Konversi BRK Syariah *Presentation of OJK Letter Response Draft related to Sharia BRK Conversion*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
45	31 Agustus 2021 *August 31, 2021*	Pembahasan Progress Konversi BRK Syariah *Discussion on Sharia BRK Conversion Progress*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
46	06 September 2021 *September 06 2021*	Pembahasan Program Diklat/Training BRK *Discussion of BRK Training Programs*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Pemimpin Divisi MSDM

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
47	06 September 2021 *September 06 2021*	Pembahasan Tindak Lanjut Surat OJK No. S-199/PB.101/2021 tentang Perbaikan/ Penyesuaian Dokumen terkait Teknologi dalam rangka Konversi BRK Syariah *Discussion on the Follow-up to OJK Letter No. S-199/PB.101/2021 concerning Repair/Adjustment of Technology-related Documents for Conversion of Sharia BRK*	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Tim PMO Konversi
48	06 September 2021 *September 06 2021*	Roadmap Teknologi Informasi Tahun 2021 – 2025 Hal-hal lainnya terkait IT *Information Technology Roadmap 2021 – 2025* *Other IT related matters*	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi
49	22 September 2021 *September 22, 2021*	Percepatan Proses Kerja dan Program Kerja Divisi Umum Bank Riau Kepri *Acceleration of Work Processes and Work Programs for the General Division of Bank Riau Kepri*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Pemimpin Divisi Umum Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
50	23 September 2021 *September 23, 2021*	Pembahasan dan Pemaparan Rancangan Roadmap Bank Riau Kepri Syariah oleh BSMR *Discussion and Presentation of the Draft Roadmap of Bank Riau Kepri Syariah by BSMR*	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Tim PMO Konversi
51	11 Oktober 2021 *October 11, 2021*	Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Audit Investigasi BPKP terhadap Rekening Titipan Cabang Batam *Discussion on the Follow-up of the BPKP Investigation Audit Report on the Batam Branch Custody Account*	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Pemimpin Divisi Financial & Review Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Pemimpin Divisi Teknologi Sistem Informasi Pemimpin Divisi Hukum
52	13 Oktober 2021 *October 13, 2021*	Monitoring Kinerja bulan September 2021 *Performance Monitoring for September 2021*	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Unit Kerja Terkait
53	14 Oktober 2021 *October 14, 2021*	Peningkatan Kolektibility 2 Kredit *2 Credits Collectibility Upgrade*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Pemimpin Divisi P2K Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Divisi MKM Pemimpin Divisi Komersial Unit Kerja Terkait
54	25 Oktober 2021 *October 25, 2021*	Pembahasan Progress Proses Izin Konversi dan Tindak Lanjut TPMK terhadap Verifikasi Dokumen oleh OJK *Discussion on the Progress of the Conversion Permit Process and TPMK Follow Up on Document Verification by OJK*	Andi Buchari Said Syamsuri Tim PMO Konversi
55	26 Oktober 2021 *October 26, 2021*	Pembahasan Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2021 *Action Plan* dan *Timeline* Pencapaian Target 2021 *Discussion on the Achievement of Quarter II Performance in 2021* *Action Plan and Timeline for Achieving Target 2021*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Seluruh Pemimpin Divisi/Desk/Tim/Staf Khusu Direksi Seluruh Pemimpin Cabang/Capem/Kedai
56	01 November 2021 *November 01, 2021*	Pembahasan Tindak Lanjut Pending Items Pengadaan Barang dan Jasa Program RBB Tahun 2021 *Discussion on the Follow-up of Pending Items for Procurement of Goods and Services for the 2021 RBB Program*	Andi Buchari M.A. Suharto Said Syamsuri Pemimpin Divisi Umum Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
57	01 November 2021 *November 01, 2021*	Pembahasan Revitalisasi Tim PMO Konversi *Discussion on the Revitalization of the Conversion PMO Team*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
58	08 November 2021 *November 08, 2021*	Penetapan Tim Revitalisasi PMO Tindak Lanjut Rapat Tim PMO bersama OJK terkait Permohonan Izin Konversi BRK Syariah *Appointment of PMO Revitalization Team* *Follow-up to the PMO Team Meeting with OJK regarding the Application for a Sharia BRK Conversion Permit*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Tim PMO Konversi
59	12 November 2021 *November 12, 2021*	Presentasi masing-masing Bidang sesuai Hasil Rapat Revitalisasi Tim PMO *Presentation of each field according to the results of the PMO Team Revitalization Meeting*	Andi Buchari M.A. Suharto Tim PMO Konversi
60	16 November 2021 *November 16, 2021*	*Report Progress Respon* Surat OJK No. 256 dan No. 261 *Report Progress Response to OJK Letter No. 256 and No. 261*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Fajar Restu Febriansyah Tim PMO Konversi
61	19 November 2021 *November 19, 2021*	Report Progress 2 (dua) Surat OJK terkait Proses Perizinan Konversi Report Progress masing-masing Bidang Tim PMO Konversi *Progress Report of 2 (two) OJK Letters related to the Conversion Licensing Process* *Progress Report of each Conversion PMO Team Field*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
62	06 Desember 2021 *December 06, 2021*	Presentasi Divisi Sekretariat Perusahaan (Bidang XI PMO) terkait Rangkaian Program *Launching* BRK Syariah *Presentation of the Corporate Secretariat Division (Field XI PMO) related to the Sharia BRK Launching Program Series*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Tim PMO Konversi
63	08 Desember 2021 *December 08, 2021*	Pembahasan Kesiapan Konversi Syariah Bidang SDM *Discussion on the Readiness of Sharia Conversion in the HR Sector*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Fajar Restu Febriansyah Tim PMO Konversi
64	28 Desember 2021 *December 28, 2021*	Persiapan Tutup Buku Tahun 2021 Pemaparan danri masing-masing Direksi terkait dengan Prognosa Pencapaian RBB 2021 untuk Parameter yang Menjadi Tanggung Jawabnya. Hal-hal Lain yang Dianggap Perlu *Preparation for closing the book in 2021* *Presentation from each Board of Directors related to the 2021 RBB Achievement Prognosis for the Parameters they are Responsible for.* *Other Things That Are Considered Necessary*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Fajar Restu Febriansyah Seluruh Pemimpin Divisi/Desk
65	30 Desember 2021 *December 30, 2021*	Langkah-langkah Tindak Lanjut Exit Meeting Pemeriksaan OJK Tahun 2021 *Follow-up steps for the 2021 OJK Examination Exit Meeting*	Andi Buchari M.A. Suharto Tengkoe Irawan Said Syamsuri Fajar Restu Febriansyah Pemimpin Divisi Internal Audit Pemimpin Divisi Kepatuhan

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

Agenda dan peserta rapat gabungan Direksi Dewan dengan Komisaris telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Joint Meeting of the Directors and Commissioners

The agenda and participants of the joint meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners have been presented in the Board of Commissioners' Meeting section of the Corporate Governance Chapter of this annual report.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Meeting Frequency and Attendance

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi
Table of Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Direksi *Board of Director Meeting*			Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris *Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners*		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran *Attendance Number and Percentage*			Jumlah dan Persentase Kehadiran *Attendance Number and Percentage*		
		Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*	Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Andi Buchari	Direktur Utama *President Director*	65	65	100%	24	12	50%
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa *Funds and Services Director*	65	63	97%	24	11	47%
Said Syamsuri	Direktur Keuangan dan Operasional *Finance and Operational Director*	65	61	94%	24	9	38%
Tengkoe Irawan	Direktur Kredit dan Syariah *Credit and Syariah Director*	65	54	83%	24	17	71%
Fajar Restu Febriansyah*	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Compliance and Risk Management Director*	6	4	67%	12	8	67%
Eka Afriadi**	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko *Compliance and Risk Management Director*	39	32	82%	8	6	75%

* Diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021.
** Berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko per tanggal tanggal 4 Juli 2021.
** Appointed as Director of Compliance and Risk Management at the EGMS on November 15, 2021.*
*** Term of office as Director of Compliance and Risk Management ends on July 4, 2021.*

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

1. Melaksanaan kepengurusan Bank secara penuh.
2. Mewakili Bank baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
3. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris yang diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.
9. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Bank dan/atau pada Bank lain serta tanggal saham itu diperoleh.
10. Bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Bank.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang timbul berdasarkan anggaran dasar Bank, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
12. Untuk Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, selain tugas dan tanggung jawab yang diatur secara umum di atas juga bertanggung jawab secara khusus sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Decisions and Implementation of the Duties Directors

1. *Carry out full management of the Bank.*
2. *Representing the Bank both inside and outside the court.*
3. *Manage the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*
4. *Implement the application of Risk Management and Good Governance principles in every business activity of the Bank at all levels or levels of the organization.*
5. *Following up on audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, results of supervision by Bank Indonesia or the Financial Services Authority and/or results of supervision by other authorities.*
6. *Accountable for the implementation of their duties to shareholders through the General Meeting of Shareholders.*
7. *Disclosure to employees of the Bank's strategic policies in the field of personnel.*
8. *Provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners as needed in relation to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and control the implementation of Bank policies.*
9. *Organize and maintain a Special Register containing information regarding share ownership of members of the Board of Directors and Commissioners and their families in the Bank and/or in other Banks as well as the date the shares were acquired.*
10. *Personally responsible for negligence that harms the interests of the Bank.*
11. *Carry out duties and responsibilities that arise based on the articles of association of the Bank, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and as stipulated in the Laws and Regulations, Bank Indonesia Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, Financial Services Authority Regulations and Financial Services Authority Circular Letters.*
12. *For the Director in charge of the Compliance function, in addition to the duties and responsibilities that are regulated in general above, they are also specifically responsible as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority concerning the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.*

Surat Keputusan Yang Dikeluarkan Direksi Selama Tahun 2021 *Decrees Issued by the Board of Directors During 2021*

Tabel Surat Keputusan Yang Dikeluarkan Direksi Selama Tahun 2021
Decrees Issued by the Board of Directors During 2021 Table

Tanggal Surat *Letter Date*	No. Surat Keputusan *No. Decree*	Isi Ringkas *Brief Contents*
13 Januari 2021 *January 13, 2021*	001/KEPDIR/2021	Bantuan Dalam Rangka Menghadapi Pandemi Covid- 19 PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri *Assistance in Facing the Covid-19 Pandemic PT Regional Development Bank Riau Kepri*
21 Januari 2021 *January 21, 2021*	002/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Panitia Pengadaan Pembangunan Aula TK Kemala Bhayangkari I Pekanbaru *The First Amendment to the Procurement Committee for the Development of the Kemala Bhayangkari I Kindergarten Hall Pekanbaru*
22 Januari 2021 *January 22, 2021*	003/KEPDIR/2021	Layanan Aku Bank Riau Kepri PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri *My Services Bank Riau Kepri PT Regional Development Bank Riau Kepri*
29 Januari 2021 *January 29, 2021*	004/KEPDIR/2021	Aplikasi GO AML Bank Riau Kepri *GO AML Bank Riau Kepri application*
05 Februari 2021 *February 05, 2021*	005/KEPDIR/2021	Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri *Information Technology Steering Committee PT Regional Development Bank Riau Kepri*
08 Februari 2021 *February 08, 2021*	006/KEPDIR/2021	Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun *Appointment of the ChaiRperson of the Pension Fund Supervisory Board*
11 Februari 2021 *February 11, 2021*	007/KEPDIR/2021	Bantuan Berupa Uang untuk Pakaian Kerja / Dinas Tahun 2021 *Assistance in the form of money for work / official clothes in 2021*
11 Februari 2021 *February 11, 2021*	008/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk Perangkat Server dan Lisensi Implementasi Aplikasi MIS PT Bank Riau Kepri *First Change of Composition of Committee for Procurement of Goods and Services for Server Equipment and License for Implementation of PT Bank Riau Kepri's MIS Application*
24 Februari 2021 *February 24, 2021*	009/KEPDIR/2021	Perubahan Kedua KEPDIR No. 54/KEPDIR/2013 tentang BPP Kebijakan Pengelolaan Dokumen/ Arsip *Second Amendment to KEPDIR No. 54/KEPDIR/2013 concerning BPP Document/Archive Management Policy*
24 Februari 2021 *February 24, 2021*	010/KEPDIR/2021	Perubahan Kelima Belas atas Keputusan Direksi NO.66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro,Kecil & Menengah *The Fifteenth Amendment to the Decision of the Board of Directors NO.66/KEPDIR/2016 concerning the Company Manual Book (BPP) for Micro, Small & Medium Segment Credit*
25 Februari 2021 *February 25, 2021*	012/KEPDIR/2021	Perubahan pertama susunan panitia pengadaan barang untuk perangkat *host security modul* (HSM) PT Bank Riau Kepri *The first change in the composition of the procurement committee for the host security module (HSM) of PT Bank Riau Kepri*
26 Februari 2021 *February 26, 2021*	012A/KEPDIR/2021	BPP Divisi Internal Audit *BPP Internal Audit Division*
26 Februari 2021 *February 26, 2021*	012B/KEPDIR/2021	Piagam Audit Intern PT BRK *Internal Audit Charter of PT BRK*
26 Februari 2021 *February 26, 2021*	012C/KEPDIR/2021	SOP Aplikasi Audit *Audit Application SOP*
02 Maret 2021 *March 02, 2021*	013/KEPDIR/2021	Susunan *Asset Liability Committee* (ALCO) PT Bank Riau Kepri *The composition of the Asset Liability Committee (ALCO) of PT Bank Riau Kepri*
02 Maret 2021 *March 02, 2021*	014KEPDIR/2021	Pedoman Klasifikasi kantor *Office Classification Guidelines*
02 Maret 2021 *March 02, 2021*	015/KEPDIR/2021	Penetapan Kelas Kantor *Office Class Assignment*
05 Maret 2021 *March 05, 2021*	016/KEPDIR/2021	Aplikasi Naskah Dinas *Official Manuscript Application*
19 Maret 2021 *March 19, 2021*	017/KEPDIR/2021	Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Riau Kepri *Organizational Structure and Work Procedures of PT Bank Riau Kepri*
19 Maret 2021 *March 19, 2021*	018/KEPDIR/2021	Penyesuaian Penghasilan Dana Pensiun An. Tengkoe Irawan *Adjustment of Pension Fund Income An. Tengkoe Irawan*
29 Maret 2021 *March 29, 2021*	018A/KEPDIR/2021	Layanan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang Terintegrasi dengan Sistem PT Bank Riau Kepri *Integrated Local Government Information System (SIPD) Services with PT Bank Riau Kepri System*

Tanggal Surat *Letter Date*	No. Surat Keputusan *No. Decree*	Isi Ringkas *Brief Contents*
30 Maret 2021 *March 30, 2021*	019/KEPDIR/2021	SOP Pengelolaan Data Nasabah (*Customer Identification File*) *Customer Data Management SOP (Customer Identification File)*
30 Maret 2021 *March 30, 2021*	020/KEPDIR/2021	BPP Kebijakan dan Pedoman Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit *BPP Credit Rescue and Settlement Policy and Guidelines*
30 Maret 2021 *March 30, 2021*	020A/KEPDIR/2021	Pedoman Layanan Informasi Publik *Public Information Service Guidelines*
31 Maret 2021 *March 31, 2021*	021/KEPDIR/2021	Pedoman Pengelolaan Situs WEB dan Medsos *Website and Social Media Management Guidelines*
31 Maret 2021 *March 31, 2021*	022/KEPDIR/2021	Standar Operasional Prosedur ATM *ATM Standard Operating Procedures*
31 Maret 2021 *March 31, 2021*	023/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi Nomor 36/KEPDIR/2020 tentang Pedoman Layanan Syariah Pembiayaan *First Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 36/KEPDIR/2020 concerning Guidelines for Sharia Financing Services*
31 Maret 2021 *March 31, 2021*	023A/KEPDIR/2021	Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri *Regulation of the Pension Fund of the Pension Fund of the Regional Development Bank of Riau Kepri*
01 April 2021 *April 01, 2021*	024/KEPDIR/2021	Wewenang Memutus dan Alur Proses pada Divisi Financial Review *Decision Authority and Process Flow in the Financial Review Division*
08 April 2021 *April 8, 2021*	025/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama atas Keputusan Direksi Nomor 019 /KEPDIR/20218 tentang Remunerasi Pengurus PT Bank Riau Kepri *First Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 019 /KEPDIR/20218 concerning Remuneration for the Management of PT Bank Riau Kepri*
27 April 2021 *April 27, 2021*	026/KEPDIR/2021	Perubahan Kedua atas KEPDIR No.010/KEPDIR/2019 Tentang Sistem dan Prosedur Sumber Daya Manusia PT Bank Riau Kepri *Second Amendment to KEPDIR No.010/KEPDIR/2019 Regarding Human Resources Systems and Procedures of PT Bank Riau Kepri*
28 April 2021 *April 28, 2021*	027/KEPDIR/2021	Tim Investigasi FRAUD PT Bank Riau Kepri *FRAUD Investigation Team of PT Bank Riau Kepri*
28 April 2021 *April 28, 2021*	028/KEPDIR/2021	Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan strategi Anti Fraud *Company Manual (BPP) Implementation of Anti-Fraud strategy*
30 April 2021 *April 30, 2021*	029/KEPDIR/2021	Penetapan Dokumen Pendukung Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha Konversi dari PT Bank Riau Kepri Menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah *Stipulation of Supporting Documents for Permit Application for Change of Conversion Business Activities from PT Bank Riau Kepri to PT Bank Riau Kepri Syariah*
30 April 2021 *April 30, 2021*	030/KEPDIR/2021	Kebijakan Pemberian Fasilitasi Pembiayaan kepada Pengurus PTBank Pembangunan Daerah Riau Kepri *Policy for Providing Financing Facilitation to the Management of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri*
30 April 2021 *April 30, 2021*	030A/KEPDIR/2021	Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham *General Meeting of Shareholders*
10 Mei 2021 *May 10, 2021*	031/KEPDIR/2021	Tim Task Force Penyelesaian Kredit *Credit Settlement Task Force Team*
10 Mei 2021 *May 10, 2021*	032/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Keputusan Direksi No.040/KEPDIR/2017 Ttntang Sharing Biaya Operasional Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri yang DibeBankan kepada Kantor Cabang Utama *First Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 040/KEPDIR/2017 Regarding the Sharing of Operational Costs of the Dang Merdu Tower Building Bank Riau Kepri Charged to the Main Branch Office*
11 Mei 2021 *May 11, 2021*	033/KEPDIR/2021	Penetapan Anggota Pengurus Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri *Determination of Members of the Pension Fund Management for the Regional Development Bank of Riau Kepri*
18 Mei 2021 *May 18, 2021*	034/KEPDIR/2021	Perubahan Ketiga atas Keputusan Direksi Nomor 010/KEPDIR/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri *Third Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 010/KEPDIR/2019 concerning the Company Manual (BPP) Personnel PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri*
18 Mei 2021 *May 18, 2021*	035/KEPDIR/2021	Susunan Anggota Komite Audit , Komite Pemantau Risiko dan Komoite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri *Composition of Members of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri*

Tanggal Surat *Letter Date*	No. Surat Keputusan *No. Decree*	Isi Ringkas *Brief Contents*
24 Mei 2021 *May 24, 2021*	036/KEPDIR/2021	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Aula TK Kemala Bhayangkari I Pekanbaru sebagai Kemitraan PT Bank Riau Kepri kepada Pemprov Riau *Appointment of Goods/Services Providers for the Construction of the Kemala Bhayangkari I Kindergarten Hall Pekanbaru as a Partnership for PT Bank Riau Kepri to the Riau Provincial Government*
31 Mei 2021 *May 31, 2021*	037/KEPDIR/2021	Penetapan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri *Determination of Members of the Supervisory Board of the Regional Development Bank Pension Fund Riau Kepri*
24 Juni 2021 *June 24, 2021*	038/KEPDIR/2021	Penanganan Pengaduan dan Permintaan Nasabah *Handling Customer Complaints and Requests*
28 Juni 2021 *June 28, 2021*	039/KEPDIR/2021	Pedoman Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan PT Bank Riau KeRpri *Guidelines for Providing Prosperous Home Ownership Loans through the Housing Financing Liquidity Facility of PT Bank Riau KeRpri*
29 Juni 2021 *June 29, 2021*	040/KEPDIR/2021	Penetapan Limit Kas dan Tata Cara Permintaan Kas Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kedai dan Divisi Umum *Determination of Cash Limits and Procedures for Cash Requests for Branch Offices, Sub-Branch Offices, Stores and General Divisions*
30 Juni 2021 *June 30, 2021*	041/KEPDIR/2021	Buku Pedoman Middle Office PT Bank Riau Kepri *Bank Riau Kepri Middle Office Manual Book*
30 Juni 2021 *June 30, 2021*	042/KEPDIR/2021	Perubahan Kedua atas KEPDIR No. 026/KEPDIR/2020 tentang kebijakan Kredit atau Pembiayaan terkait Dampak Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 *Second Amendment to KEPDIR No. 026/KEPDIR/2020 regarding Credit or Financing policies related to the Impact of the Spread of CORONA VIRUS DISEASE 2019*
30 Juni 2021 *June 30, 2021*	043/KEPDIR/2021	SOP Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) PT Bank Riau Kepri *SOP for Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI) PT Bank Riau Kepri*
01 Juli 2021 *July 01, 2021*	044/KEPDIR/2021	Penunjukan Rangkap Tugas Direktur Investasi Dana Pensiun Bank BPD Riau Kepri *Appointment of Concurrent Duties Director of Pension Fund Investment of Bank BPD Riau Kepri*
12 Juli 2021 *July 12, 2021*	045/ KEPDIR /2021	Perubahan Pertama SOP Admin Kredit *First Change of Credit Admin SOP*
19 Juli 2021 *July 19, 2021*	046/KEPDIR/2021	BPP Quality Assurance &Collateral Admin *BPP Quality Assurance & Collateral Admin*
26 Juli 2021 *July 26, 2021*	047/KEPDIR/2021	Penggunaan Autentikasi Biometrik PT Bank Riau Kepri *Use of Biometric Authentication PT Bank Riau Kepri*
28 Juli 2021 *July 28, 2021*	048/KEPDIR/2021	Perubahan Kedua Keputusan Direksi Nomor 36/KEPDIR/2020 tentang Pedoman Layanan Syariah Pembiayaan *Second Amendment to Decision of the Board of Directors Number 36/KEPDIR/2020 concerning Guidelines for Sharia Financing Services*
28 Juli 2021 *July 28, 2021*	049/KEPDIR/2021	Ketentuan Melanjutkan Pendidikan PT Bank Riau Kepri *Provisions for Continuing Education at PT Bank Riau Kepri*
28 Juli 2021 *July 28, 2021*	050/KEPDIR/2021	Perubahan ke-Enam Belas atas Keputusan Direksi No.66/KEPDIR/2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Mikro, Kecil & Menengah *The Sixteenth Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 66/KEPDIR/2016 concerning the Company Manual (BPP) for Micro, Small & Medium Loans*
29 Juli 2021 *July 29, 2021*	050A/KEPDIR/2021	SOP Pengelolaan Jaringan Komunikasi PT Bank Riau Kepri *SOP for Communication Network Management of PT Bank Riau Kepri*
30 Juli 2021 *July 30, 2021*	051/KEPDIR/2021	BPP Financial Review *BPP Financial Review*
30 Juli 2021 *July 30, 2021*	052/KEPDIR/2021	Pedoman Investigasi Fraud dan Penjatuhan Sanksi *Guidelines for Fraud Investigation and Imposition of Sanctions*
09 Agustus 2021 *August 09, 2021*	053/KEPDIR/2021	Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Riau Kepri *Organizational Structure and Work Procedures of PT Bank Riau Kepri*
10 Agustus 2021 *August 10, 2021*	054/KEPDIR/2021	Perubahan Kedua Keputusan Direksi tentang Pedoman PAG iB *Second Amendment to the Decision of the Board of Directors regarding the PAG iB . Guidelines*
16 Agustus 2021 *August 16, 2021*	055/KEPDIR/2021	*Risk Apetite Statement* Bank Riau Kepri Tahun 2021 *Risk Apetite Statement Bank Riau Kepri Year 2021*
20 Agustus 2021 *August 20, 2021*	055A / KEPDIR 2021	Layanan Cross Border ATM Service Al- Rajhi PT Bank Riau Kepri *Cross Border ATM Service Al-Rajhi PT Bank Riau Kepri*

Tanggal Surat *Letter Date*	No. Surat Keputusan *No. Decree*	Isi Ringkas *Brief Contents*
27 Agustus 2021 *August 27, 2021*	056/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama atas SK Direksi No. 024/KEPDIR/2021 tentang Wewenang Memutus dan Alur Proses pada Divisi *Financial & Review* *First Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 024/KEPDIR/2021 concerning Decision Authority and Process Flow in the Financial & Review Division*
27 Agustus 2021 *August 27, 2021*	057/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT Bank Riau Kepri *The First Change in the Composition of the Committee for the Procurement of Goods/Services Machine Teller Machines (ATM) PT Bank Riau Kepri*
30 Agustus 2021 *August 30, 2021*	058/KEPDIR/2021	Penetapan Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri An. M. Affan *Determination of Members of the Pension Fund Supervisory Board for the Regional Development Bank of Riau Kepri An. M. Affan*
07 September 2021 *September 07 2021*	059/KEPDIR/2021	Penunjukan Panitia Pengadaan Hadiah Program Undian Tabungan BRK Bedelau Periode 2 *Appointment of the Prize Procurement Committee for the BRK Bedelau Savings Lottery Program Period 2*
14 September 2021 *September 14th 2021*	060/KEPDIR/2021	Perubahan BPP Ke - 17 *Change of BPP to 17*
14 September 2021 *September 14th 2021*	060A/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perangkat *Host Security Module* (HSM) *First Change in Composition of the Committee for the Procurement of Goods/Services for Host Security Module (HSM) Devices*
20 September 2021 *September 20, 2021*	061/KEPDIR/2021	Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Teknologi Informasi *Information Technology Risk Management Company Manual*
21 September 2021 *September 21, 2021*	062/KEPDIR/2021	Standar Operasional BRK Pay Dashboard PT Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah *Standard Operational BRK Pay Dashboard PT Bank Riau Kepri Sharia Business Unit*
22 September 2021 *September 22, 2021*	063/KEPDIR/2021	Tim Penyelesaian Hak dan Kewajiban Nasabah (TPHKN) PT Bank Riau Kepri Syariah *Customer Rights and Obligations Settlement Team (TPHKN) PT Bank Riau Kepri Syariah*
23 September 2021 *September 23, 2021*	064/KEPDIR/2021	Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Security Operation Center (SOC) PT Bank Riau Kepri *Composition of the Committee for the Procurement of Goods/Services for the Security Operation Center (SOC) of PT Bank Riau Kepri*
23 September 2021 *September 23, 2021*	065/KEPDIR/2021	Susunan Organisasi *Asset Liability Committeee* (ALCO) PT Bank Riau Kepri *Organizational Structure of the Asset Liability Committee (ALCO) of PT Bank Riau Kepri*
27 September 2021 *September 27, 2021*	066/KEPDIR/2021	Perubahan Kedua atas KEPDIR No. 042/KEPDIR/2019 Tentang SOP Prosedur Admin Kredit *Second Amendment to KEPDIR No. 042/KEPDIR/2019 Regarding Credit Admin Procedure SOP*
27 September 2021 *September 27, 2021*	067/KEPDIR/2021	Penunjukan Panitia Pengadaan Kendaraan Bermotor di Lingkungan PT Bank Riau Kepri *Appointment of Motor Vehicle Procurement Committee at PT Bank Riau Kepri*
30 September 2021 *September 30, 2021*	068/KEPDIR/2021	Perubahan KE 9 BPP Komersil *Change to 9 BPP Commercial*
30 September 2021 *September 30, 2021*	069/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk Perangkat Load Traffic Manager PT Bank Riau Kepri *First Change of Composition of the Committee for the Procurement of Goods/Services for Load Traffic Manager Equipment for PT Bank Riau Kepri*
30 September 2021 *September 30, 2021*	070/KEPDIR/2021	Pedoman Kegiatan Referal PT Bank Riau Kepri *Guidelines for Referral Activities of PT Bank Riau Kepri*
30 September 2021 *September 30, 2021*	071/KEPDIR/2021	SOP Tabungan PT Bank Riau Kepri *SOP for Savings at PT Bank Riau Kepri*
30 September 2021 *September 30, 2021*	072/KEPDIR/2021	SOP Giro Rupiah PT Bank Riau Kepri *SOP for Demand Deposits of Rupiah at PT Bank Riau Kepri*
30 September 2021 *September 30, 2021*	073/KEPDIR/2021	SOP Deposito Berjangka Rupiah PT Bank Riau Kepri *SOP for Rupiah Time Deposits at PT Bank Riau Kepri*
15 Oktober 2021 *October 15, 2021*	074/KEPDIR/2021	
15 Oktober 2021 *October 15, 2021*	075/KEPDIR/2021	Pengadaan Perangkat Touter Backhaul DRC PT Bank Riau Kepri *Procurement of DRC Touter Backhaul Equipment for PT Bank Riau Kepri*
25 Oktober 2021 *October 25, 2021*	076/KEPDIR/2021	Aplikasi Rekonsiliasi Transaksi Electronic Channel di Jaringan Prima dan Bersama PT Bank Riau Kepri *Electronic Channel Transaction Reconciliation Application on the Prima Network and with PT Bank Riau Kepri*

Tanggal Surat *Letter Date*	No. Surat Keputusan *No. Decree*	Isi Ringkas *Brief Contents*
29 Oktober 2021 *October 29, 2021*	077/KEPDIR/2021	Penetapan Limit Kas dan Tata Cara Perubahan Limit Kas untuk Kantor Kas PT Bank Riau Kepri *Determination of Cash Limits and Procedures for Changing Cash Limits for the Cash Office of PT Bank Riau Kepri*
01 November 2021 *November 01, 2021*	078/KEPDIR/2021	Penetapan IT Strategic Plan 2021-2025 PT Bank Riau Kepri *Determination of the IT Strategic Plan 2021-2025 PT Bank Riau Kepri*
02 November 2021 *November 02, 2021*	079/KEPDIR/2021	Pemberian Reward Penagihan dan Penyelesaian Kredit NPL dan Hapus Buku *Rewards for Collection and Settlement of NPL Credits and Write Offs*
02 November 2021 *November 02, 2021*	080/KEPDIR/2021	Penetapan Anggota Pengurus Dana Pensiun Bank Riau Kepri *Determination of Members of the Riau Riau Islands Pension Fund Management*
12 November 2021 *November 12, 2021*	081/KEPDIR/2021	Penunjukan Penyedia Jasa Sewa Mesin ATM Bank Riau Kepri *Appointment of Bank Riau Kepri ATM Machine Rental Service Providers*
12 November 2021 *November 12, 2021*	082/KEPDIR/2021	Revitalisasi *Project Management Office* Konversi PT Bank Riau Kepri Menjadi Bank Umum Syariah *Revitalization of the Project Management Office Conversion of PT Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank*
15 November 2021 *November 15, 2021*	083/KEPDIR/2021	Penunjukan Panitia Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Kabupaten Natuna *Appointment of the Committee for the Procurement and Installation of Public Street Lighting in Natuna Regency*
16 November 2021 *November 16, 2021*	084/KEPDIR/2021	Penetapan Kantor Cabang Syariah Pekanbaru sebagai Kantor Cabang Induk untuk Kedai Syariah Tenayan Raya *Determination of the Pekanbaru Sharia Branch Office as the Parent Branch Office for the Tenayan Raya Sharia Store*
16 November 2021 *November 16, 2021*	085/KEPDIR/2021	Penetapan Kantor Cabang Syariah Pekanbaru sebagai Kantor Cabang Induk untuk Kedai Syariah Kubu *Determination of the Pekanbaru Sharia Branch Office as the Parent Branch Office for the Kubu Syariah Kedai*
22 November 2021 *November 22, 2021*	086/KEPDIR/2021	BPP Hubungan Kelembagaan Divisi Terasury dan International PT Bank Riau Kepri *BPP Institutional Relations Terasury Division and International PT Bank Riau Kepri*
22 November 2021 *November 22, 2021*	087/KEPDIR/2021	Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Riau Kepri *Composition of Members of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of Bank Riau Kepri*
25 November 2021 *November 25, 2021*	088/KEPDIR/2021	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sewa Mobil Dinas dan Mobil Operasional PT Bank Riau Kepri Kantor Pusat *Appointment of Goods/Services Providers for Procurement of Official Car Rentals and Operational Cars of PT Bank Riau Kepri Head Office*
26 November 2021 *November 26, 2021*	089/KEPDIR/2021	Komite Club Olahraga dan Seni Bank Riau Kepri *Sports and Arts Club Committee of Bank Riau Kepri*
26 November 2021 *November 26, 2021*	090/KEPDIR/2021	Penunjukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembuatan Facade PT Bank Riau Kepri Cabang Pekanbaru *Appointment of the Procurement Committee for the Facade Construction of PT Bank Riau Kepri Pekanbaru Branch*
26 November 2021 *November 26, 2021*	091/KEPDIR/2021	SOP SLIK *SLIK SOP*
26 November 2021 *November 26, 2021*	092/KEPDIR/2021	SOP ATM Kantor Pusat *Head Office ATM SOP*
30 November 2021 *November 30, 2021*	092A/KEPDIR/2021	Menu ATM Batch Processing pada *Core Banking System* *ATM Batch Processing menu on Core Banking System*
17 Desember 2021 *December 17, 2021*	092B/KEPDIR/2021	Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi No. 104/KEPDIR/2020 tentang Kewajiban dalam Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pengelolaan LHKPN di Lingkungan PT Bank Riau Kepri *First Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 104/KEPDIR/2020 concerning Obligations in Submission of State Administration Property Reports (LHKPN) and Management of LHKPN within PT Bank Riau Kepri*
21 Desember 2021 *December 21, 2021*	093/KEPDIR/2021	Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi Nomor 010/KEPDIR/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri *Fourth Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 010/KEPDIR/2019 concerning the Company Personnel Manual (BPP) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri*
21 Desember 2021 *December 21, 2021*	094/KEPDIR/2021	Kenaikan Gaji Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Tahun 2021 *Increase in Salary for PT Bank Riau Kepri Regional Development in 2021*

Tanggal Surat *Letter Date*	No. Surat Keputusan *No. Decree*	Isi Ringkas *Brief Contents*
27 Desember 2021 *December 27, 2021*	095/KEPDIR/2021	Perubahan Ketiga atas keputusan Direksi Nomor 026/KEPDIR/2020 tentang Kebijakan Kredit atau Pembiayaan terkait Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 *Third Amendment to the decision of the Board of Directors Number 026/KEPDIR/2020 concerning Credit or Financing Policies related to the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019*
27 Desember 2021 *December 27, 2021*	095A/KEPDIR/2021	Penunjukan Kantor Cabang Syariah Pekanbaru sebagai Kantor Cabang Induk untuk Kantor Kedai Syariah Bantan *Appointment of Pekanbaru Syariah Branch Office as Parent Branch Office for Bantan Syariah Kedai Office*
29 Desember 2021 *December 29, 2021*	096/KEPDIR/2021	Risk Appetite Statement Bank Riau Kepri Tahun 2022 *Risk Appetite Statement of Bank Riau Kepri in 2022*
31 Desember 2021 *December 31, 2021*	097/KEPDIR/2021	Standar Operasional Prosedur Aplikasi Permintaan User dan Wewenang *User Core Banking System* PT Bank Riau Kepri *Standard Operational Procedure for User Request Application and User Authority Core Banking System PT Bank Riau Kepri*
31 Desember 2021 *December 31, 2021*	098/KEPDIR/2021	Penunjukan dan Penetapan Penyediaan Barang / Jasa Perangkat *Security Operation Center* PT Bank Riau Kepri *Appointment and Determination of Provision of Goods / Services for Security Operation Center Equipment at PT Bank Riau Kepri*
31 Desember 2021 *December 31, 2021*	099/KEPDIR/2021	Buku Pedoman Perusahaan Sekretariat Perusahaan PT Bank Riau Kepri *Company Manual Company Secretariat PT Bank Riau Kepri*
31 Desember 2021 *December 31, 2021*	100/KEPDIR/2021	Bantuan Berupa Uang untuk Pakaian Kerja/Dinas Tahun 2022 Kepada Pegawai PT Bank Riau Kepri *Assistance in the form of money for 2022 work/service clothes to employees of PT Bank Riau Kepri*
31 Desember 2021 *December 31, 2021*	101/KEPDIR/2021	Bantuan Berupa Uang untuk Pakaian Kerja/Dinas Tahun 2022 Kepada Pengurus PT Bank Riau Kepri *Assistance in the form of money for 2022 work/service clothes to the management of PT Bank Riau Kepri*
31 Desember 2021 *December 31, 2021*	102/KEPDIR/2021	Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri *Regulation of the Pension Fund of the Pension Fund of the Regional Development Bank of Riau Kepri*
31 Desember 2021 *December 31, 2021*	103/KEPDIR/2021	Standar Operasional Prosedur Daftar Hitam Nasional PT Bank Riau Kepri *Standard Operating Procedures for the National Black List of PT Bank Riau Kepri*

Kebijakan Suksesi Direksi

Kebijakan Suksesi Direksi diatur di dalam Anggaran Dasar Bank dan Pedoman Kerja Direksi.

Kebijakan Pinjaman Anggota Direksi

Kebijakan Pinjaman Anggota Direksi diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 030/KEPDIR/2021 tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Di dalam kebijakan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :

- Tujuan Pembiayaan kepada Direksi
- Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan
- Plafond dan Jangka Waktu
- Biaya-Biaya
- Proses, Wewenang Persetujuan Pembiayaan dan Pencairan
- Akad dan Jenis Akad
- Pembayaran Pokok dan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo

Board of Directors Succession Policy

The Directors' Succession Policy is regulated in the Bank's Articles of Association and the Directors' Work Guidelines.

Board of Directors Loan Policy

The Loan Policy for Members of the Board of Directors is regulated in the Decree of the Board of Directors Number 030/KEPDIR/2021 concerning the Policy for Providing Financing Facilities to the Management of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. The policy regulates the following matters:

- *Purpose of Financing to the Board of Directors*
- *Financing Submission Terms*
- *Ceiling and Term*
- *Costs*
- *Process, Authority for Approval of Financing and Disbursement*
- *Contracts and Types of Contracts*
- *Principal Payment and Repayment Before Maturity*

Evaluasi Atas Strategi Perusahaan

Direksi selalu memonitor pelaksanaan dan pencapaian Rencana Bisnis Bank antara lain dengan melakukan Rapat Evaluasi Kinerja secara Triwulanan. Strategi dan langkah korektif dibahas Direksi bersama unit kerja terkait pada saat pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja tersebut.

Sepanjang Tahun 2021 Direksi telah melaksanakan beberapa Rapat Evaluasi Kinerja dan Rapat Evaluasi Tahunan. Selain Rapat Evaluasi Kinerja dan Tahunan, Direksi secara rutin membahas langkah-langkah konkrit dan kebijakan strategis yang akan dilakukan untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan di dalam RBB dengan unit kerja kantor pusat, baik yang dilaksanakan oleh seluruh Direksi maupun oleh masing-masing Direksi bersama direktoratnya.

Penilaian Kinerja Direksi

Sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, maka penilaian kinerja Direksi senantiasa dilakukan secara priodik oleh beberapa lembaga independen diantaranya :

1. Penilaian Kinerja oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
2. Penilaian Kinerja melalui Audit Kinerjaoleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
3. Penilaian Kinerja melalui Audit Kinerjaoleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
4. Penilaian Kinerja melalui penilaian sendiri (*Self assessment*) pelaksanaan tata kelola Bank yang baik (GCG).

Pengukuran keberhasilan kinerja Direksi merupakan hasil kerja kolegial seluruh anggota Direksi yang tercermin dalam (1) satu kesatuan pada pencapaian/ realisasi atas Rencana Bisnis Bank (RBB) secara Tahunan dan kebijakan umum Direksi. Selain itu, keberhasilan kinerja Direksi dapat diukur melalui hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang mencakup aspek profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan Bank.

Prosedur Pelaksanaan Assessment Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi Bank Riau Kepri dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penilaian sendiri (*self assessment*) tersebut dilakukan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu *governance structure, governance process,* dan *governance outcome*, sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

Evaluation of the Company's Strategy

The Board of Directors always monitors the implementation and achievement of the Bank's Business Plan, among others by conducting Quarterly Performance Evaluation Meetings. Strategies and corrective steps are discussed by the Board of Directors together with the relevant work units during the Performance Evaluation Meeting.

Throughout 2021 the Board of Directors has held several Performance Evaluation Meetings and Annual Evaluation Meetings. In addition to the Annual and Performance Evaluation Meetings, the Board of Directors regularly discusses concrete steps and strategic policies that will be carried out to achieve the targets set in the RBB with the head office work unit, both implemented by the entire Board of Directors and by each Board of Directors. with the directorate.

Board of Directors Performance Assessment

As part of the implementation of good Corporate governance, the performance appraisal of the Board of Directors is always carried out periodically by several independent institutions including:

1. *Performance Assessment of Shareholders through the annual General Meeting of Shareholders (GMS);*
2. *Performance Assessment through a performance audit by the Financial Services Authority (OJK);*
3. *Performance Assessment through a performance audit by the Supreme Audit Agency (BPK); and*
4. *Performance appraisal through self-assessment of the implementation of good Bank governance (GCG).*

The measurement of the success of the performance of the Board of Directors is the result of the collegial work of all members of the Board of Directors which is reflected in (1) one unit in the achievement/realization of the Bank's Business Plan (RBB) on an annual basis and the general policies of the Board of Directors. In addition, the success of the performance of the Board of Directors can be measured through the results of the assessment of the Bank's Soundness Level which includes aspects of the risk profile, Good Corporate Governance, profitability and Bank capital.

Procedure for the Implementation of the Board of Directors' Performance Assessment

The performance assessment of the Board of Directors of Bank Riau Kepri is carried out through a self-assessment report on Governance that is submitted to the OJK periodically by referring to the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. . The self-assessment is carried out in a comprehensive and structured manner which is integrated into 3 (three) aspects of governance, namely governance structure, governance process, and governance outcome, as a continuous process.

Penilaian sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*self assessment*) Penerapan Tata Kelola sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Parameter penilaian kinerja Direksi meliputi prinsip-prinsip TARIF dalam Tata Kelola yang Baik terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola Bank Riau Kepri.

Self-assessment of the Implementation of Governance is carried out using the Self-Assessment of the Implementation of Governance in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. Parameters for evaluating the performance of the Board of Directors include the principles of Good Governance in relation to the entire function of managing Bank Riau Kepri.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment*), penilaian kinerja Direksi juga dilakukan melalui pertanggungjawaban laporan Tahunan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini terlihat pada saat pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2021 dimana pemegang saham (RUPS) menyetujui laporan Tahunan Tahun buku 2020 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun buku 2020.

In addition to self-assessment, the Board of Directors' performance assessment is also carried out through the annual report accountability at the General Meeting of Shareholders (GMS). the supervisory report of the Board of Commissioners, the accountability report of the Board of Directors and the company's financial statements for the financial year 2020 by providing full settlement and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year 2020.

Sampai dengan akhir Desember 2021, seluruh anggota Direksi tidak mendapat sanksi atau penilaian buruk dari ketiga lembaga tersebut, dan juga oleh para Pemegang Saham.

Until the end of December 2021, all members of the Board of Directors have not received any sanctions or bad judgment from the three institutions, as well as by the Shareholders.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan Tata Kelola Bank yaitu Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris yang dinilai dari 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome*

Directors Performance Evaluation Criteria

Performance evaluation of the Board of Commissioners is carried out using the parameters of the implementation of Bank Governance, namely the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners which is assessed from 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Assesment dilakukan melalui laporan *Self Assesment* pelaksanaan tata kelola secara semesteran yang dilakukan oleh internal Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

The Party Conducting the Assessment

The assessment is carried out through a self-assessment report on the implementation of governance on a semi-annual basis which is carried out by the Bank internally and submitted to the Financial Services Authority.

Tabel penilaian kinerja Direksi (*Self Assesment*)
Board of Directors performance appraisal table (self assessment)

Parameter GCG *GCG Parameters*	*Governance Structure*	*Governance Process*	*Governance Outcome*	Peringkat *Rating*
				Komposit *Composite*
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi *Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors*	2	2	2	2 (Baik) *(Good)*

Dengan Peringkat 2 artinya:
Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Direksi.

Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Direksi.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi Bank Riau Kepri telah membentuk organ pendukung Direksi untuk membantu kelancaran tugasnya. Direksi Bank Riau Kepri dibantu oleh Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri telah membentuk 6 (enam) Komite yang bertugas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh Direksi dalam mengambil keputusan.

Berikut adalah 6 (enam) Komite di bawah Direksi:
1. Komite ALCO (*Asset & Liabilities*)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi
4. Komite Sumber Daya Manusia
5. Komite Kebijakan Perkreditan
6. Komite Pembiayaan

Selama Tahun 2021, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Komite *Asset and Liability Committee* (ALCO) merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam proses pelaksanaan pengelolaan *asset* dan *liability*. Selama Tahun 2021, ALCO telah melaksanakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

By Rank 2 means:
The Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in adequate compliance with the principles of Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Governance, in general, these weaknesses are less significant and can be resolved by normal actions by the Board of Directors.

Disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is carried out not only to fulfill the aspect of transparency as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide confidence, especially to shareholders or investors, on the efforts that need to be made to improve the performance of the Board of Directors.

Performance Assessment of Committees Under the Board of Directors, Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Risk Management Unit and Basis for Assessment

In carrying out their duties, the Board of Directors of Bank Riau Kepri has established a supporting organ for the Board of Directors to assist the smooth running of their duties. The Board of Directors of Bank Riau Kepri is assisted by committees whose task is to provide advice and recommendations related to the policies and directives of the Board of Directors. As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri has established 6 (six) Committees whose task is to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors through suggestions and recommendations that can be used as reference by the Board of Directors in making decisions.

The following are 6 (six) Committees under the Board of Directors:
1. *ALCO (Assets & Liabilities) Committee*
2. *Risk Management Committee*
3. *Information Technology Steering Committee*
4. *Human Resources Committee*
5. *Credit Policy Committee*
6. *Financing Committee*

During 2021, the Board of Directors considered that the committees under the Board of Directors had carried out their duties and responsibilities well.

The Asset and Liability Committee (ALCO) is a committee formed to assist the Board of Directors in the process of implementing asset and liability management. During 2021, ALCO has held 13 (thirteen) meetings and has carried out its duties well.

Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, menyusun strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif. Selama Tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

The Risk Management Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in making decisions and evaluating implementation, formulating strategies and guidelines for implementing risk management, determining matters related to business decisions and improving the implementation of risk management based on the evaluation results of the implementation of an effective risk management process and system. . During 2021, the Risk Management Committee has held 2 (two) meetings and has carried out its duties well.

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memberikan pandangan dan rekomendasi tentang kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi. Selama Tahun 2021, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

The Information Technology Steering Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in providing views and recommendations on policies for the management and development of information technology and systems. During 2021, the Information Technology Steering Committee has held 2 (two) meetings and has carried out its duties well.

Komite Sumber Daya Manusia merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam perencanaan dan penerimaan pegawai, mutasi, manajemen jalur karir serta manajemen imbalan. Selama Tahun 2021, Komite Sumber Daya Manusia telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

The Human Resources Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in planning and hiring employees, transfers, career path management and remuneration management. During 2021, the Human Resources Committee has held 9 (nine) meetings and has carried out its duties well.

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam perencanaan, riset dan evaluasi mendalam atas kebijakan-kebijakan sektor perkreditan dan mengevaluasi implementasi secara tepat dan dalam pengawasan yang cukup ketat. Selama Tahun 2021, Komite Kebijakan Perkreditan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

The Credit Policy Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in planning, researching and in-depth evaluation of credit sector policies and evaluating their proper implementation and under strict supervision. During 2021, the Credit Policy Committee has carried out its duties well.

Komite Pembiayaan merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam memberikan masukan dan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan pembiayaan. Selama Tahun 2021, Komite Pembiayaan telah menjalankan tugasnya dengan baik.

The Financing Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in providing input and recommendations in the form of approval or rejection of financing. During 2021, the Financing Committee has carried out its duties well.

Selain melakukan penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi, Direksi juga melakukan penilaian kinerja kepada seluruh Unit di bawah Direksi. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan Divisi Manajemen Risiko dilakukan melalui penilaian Sistem Penilaian Kinerja *Key Performance Indicator* (KPI) yang dinilai berdasarkan 4 (empat) persfektif yaitu Keuangan, Pelanggan, Proses Internal dan Pembelajaran & Pertumbuhan

In addition to assessing the performance of the Committees under the Board of Directors, the Board of Directors also conducts performance assessments of all units under the Board of Directors. Performance assessment for the Corporate Secretary, Internal Audit and Risk Management Division is carried out through the assessment of the Key Performance Indicator (KPI) Performance Assessment System which is assessed based on 4 (four) perspectives namely Finance, Customers, Internal Processes and Learning & Growth

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pengungkapan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris untuk periode laporan Tahun 2017 mengacu pada kebijakan Tata Kelola yang Baik sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Kebijakan pemberian remunerasi dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pemberian remunerasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan insan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibeBankan kepadanya. Pemberian remunerasi didasarkan atas pertimbangan kinerja dan tanggung jawab individual, serta level jabatan yang dilakukan secara transparan sehingga dapat memotivasi dalam mencapai tujuan Bank Riau Kepri. Adapun indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Riau Kepri antara lain:

1. Faktor skala usaha.
2. Faktor kompleksitas usaha.
3. Tingkat inflasi.
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentanganan dengan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Penetapan Remunerasi

Ketentuan tentang besarnya gaji/honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Bank Riau Kepri ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Secara garis besar, proses penetapan dan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:

Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Remuneration for the Board of Commissioners and the Directors

Disclosure of the remuneration policy for the Board of Commissioners for the 2017 reporting period refers to the Good Governance policy as regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. The policy of providing remuneration and other benefits for the Board of Commissioners and the Board of Directors refers to the decision of the shareholders as determined in the General Meeting of Shareholders. The provision of remuneration is an activity to assess the level of success or failure of company personnel in carrying out the duties and responsibilities assigned to them. The remuneration is based on considerations of individual performance and responsibility, as well as the level of position that is carried out transparently so that it can motivate in achieving the goals of Bank Riau Kepri. The indicators for determining remuneration for the Board of Commissioners and Directors of Bank Riau Kepri include:

1. *Business scale factor.*
2. *Business complexity factor.*
3. *Inflation rate.*
4. *Company's financial condition and capability.*

Other relevant factors, and must not conflict with the laws and regulations.

Remuneration Determination Procedure

Provisions regarding the amount of salary/honorarium or remuneration and/or allowances for members of the Board of Commissioners of Bank Riau Kepri shall be determined by the GMS with due observance of the proposals and recommendations of the Remuneration and Nomination Committee. The recommendations of the Remuneration and Nomination Committee are submitted to the Board of Commissioners and submitted to the GMS for approval. Broadly speaking, the process of determining and providing remuneration for the Board of Commissioners of Bank Riau Kepri is as follows:



Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Sistem remunerasi dirumuskan dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, dan level jabatan, serta bertujuan untuk memotivasi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Sistem remunerasi yang dibangun harus adil dan transparan.

Indicator of Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors

The remuneration system is formulated taking into account performance, responsibilities, and level of position, and aims to motivate the Board of Commissioners, Directors and employees in achieving company goals. The remuneration system that is built must be fair and transparent.

Tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Structure Table

Jenis Penerimaan	Jumlah Komisaris *Total Commissioners*	Nominal *Nominal*	*Acceptance Type*
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura	4	7.179.538.495,-	*Remuneration (salary, bonus, routine allowance, bonus, other fixed income and other facilities in the form of non-in kind*
Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	3	192.623.763,-	*Other facilities in the form of Natura (housing, transportation, health care, etc.)*

Rincian Remunerasi Dewan Komisaris

Rincian Remunerasi Dewan Komisaris selama Tahun 2021 terlihat dalam tabel berikut:

Details of Remuneration for the Board of Commissioners

Details of the Remuneration for the Board of Commissioners for 2021 are shown in the following table:

Tabel Rincian Remunerasi Dewan Komisaris
Board of CommissionerRemuneration Details Table

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah Remunerasi (Rp) *Total Remuneration(Rp)*	*Acceptance Type*
1	Gaji	1.114.455.000	*Salary*
2	Pakaian Dinas	112.893.000	*Service Clothes*
3	Cuti	-	*Paid leave*
4	THR	351.000.000	*THR*
5	Tunjangan Perumahan	87.360.000	*Housing Allowance*
6	Tunjangan Listrik	28.442.264	*Electricity Allowance*
7	Tunjangan Telepon	70.610.599	*Teleph(1) one Allowance*
8	Tunjangan Kesehatan	6.210.900	*Health benefits*
9	Tunjangan Hari Tua	191.422.445	*Pension*
10	Tunjangan Purna Bakti Jabatan	1.051.770.616	*Retirement Allowance for Position*
11	Tunjangan Pajak	783.978.549	*Tax Allowances*
12	Tantiem	3.574.018.885	*Bonus*
Total		**7.372.162.258**	***Total***

Tabel Struktur Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Structure Tabel

Jenis Penerimaan	Jumlah Direksi *Total Director*	Nominal *Nominal*	*Acceptance Type*
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura	7	24.073.010.528,-	*Remuneration (salary, bonus, routine allowance, bonus, other fixed income and other facilities in the form of non-in kind*
Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan, transportasi, perawatan kesehatan, dsb)	7	618.012.928,-	*Other facilities in the form of Natura (housing, transportation, health care, etc.)*

Rincian Remunerasi Direksi

Rincian Remunerasi Direksi selama Tahun 2021 terlihat dalam tabel berikut:

Directors' Remuneration Details

Details of the Directors' Remuneration for 2021 are shown in the following table:

Tabel Rincian Remunerasi Direksi
Directors' Remuneration Details Table

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah Remunerasi (Rp) *Total Remuneration(Rp)*	*Acceptance Type*
1	Gaji	4.887.200.660	*Salary*
2	Pakaian Dinas	395.718.000	*Service Clothes*
3	Cuti	610.000.000	*Paid leave*
4	THR	1.320.000.000	*THR*
5	Tunjangan Perumahan	223.200.000	*Housing Allowance*
6	Tunjangan Listrik	115.758.336	*Electricity Allowance*
7	Tunjangan Telepon	213.934.005	*Teleph(1) one Allowance*
8	Tunjangan Kesehatan	65.120.587	*Health benefits*
9	Tunjangan Hari Tua	677.939.504	*Pension*
10	Tunjangan Purna Bakti Jabatan	3.617.173.766	*Retirement Allowance for Position*
11	Tunjangan Pajak	4.539.756.500	*Tax Allowances*
12	Tantiem	8.025.222.098	*Bonus*
Total		**24.691.023.456**	***Total***

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam (1) satu Tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

The remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors in (1) one year is grouped in the range of income levels as follows.

Tabel Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan Yang Dijalankan
Table of Total Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors

Jumlah Remunerasi	Jumlah Komisaris *Total Commissioners*	Jumlah Direksi *Total Director*	*Acceptance Type*
Di atas Rp2 Milyar	2	5	*Above IDR 2 billion*
Di atas Rp1 Milyar - Rp2 Milyar	-	1	*Above IDR 1 billion - IDR 2 billion*
Di atas Rp500 juta - Rp1 Milyar	1	1	*Above IDR 500 million - IDR 1 billion*
Rp500 juta ke bawah	1	-	*IDR 500 million and below*

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Untuk perbandingan/ratio gaji antara gaji Dewan Komisaris tertinggi dengan yang terendah, gaji Direksi tertinggi dengan yang terendah, gaji pegawai tertinggi dengan yang terendah, dan antara gaji Direksi tertinggi dengan gaji pegawai yang tertinggi sepanjang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Highest and Lowest Salary Ratio

For salary comparisons/ratio between the highest and lowest salaries for the Board of Commissioners, the highest and lowest salaries for the Board of Directors, the highest and lowest salaries for employees, and between the highest salaries for the Board of Directors and the highest salaries for the entire year 2021 can be seen in the following table:

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Highest and Lowest Salary Ratio Tabel

No	Jabatan	Gaji (Rp) *Salary*		Rasio Perbandingan *Comparison Ratio* (%)	*Position*
		Tertinggi *Highest*	Terendah *Lowest*		
1	Gaji Dewan Komisaris	65.000.000,-	58.500.000,-	90	*Board of Commissioners Salary*
2	Gaji Direksi	100.000.000,-	85.000.000,-	85	*Directors Salary*
3	Gaji Pegawai Tetap	35.950.000,-	3.800.000,-	10,57	*Permanent Employee Salary*
4	Gaji Direksi Tertinggi & Pegawai Tetap Tertinggi	100.000.000,-	35.950.000,-	35,95	*Highest Directors' Salaries & Highest Permanent Employees*

Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris

Hubungan kerja yang baik dan harmonis antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan salah (1) satu hal yang sangat penting agar masing-masing organ tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai fungsinya masing-masing. Dalam menjaga hubungan kerja yang baik dan harmonis antara Direksi dengan Dewan Komisaris, Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan atas jalannya kepengurusan Bank dan memberikan nasihat terhadap kebijakan kepengurusan Bank oleh Direksi.
2. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Direksi dan Komisaris, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Bank secara tepat waktu dan lengkap dan untuk itu Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi Bank yang diminta diberikan kepada Komisaris secara akurat, tepat waktu dan lengkap.
5. Direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan-laporan yang diperlukan oleh Komisaris secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Setiap hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris merupakan hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Direksi dan Dewan Komisaris merupakan jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan

Working Relations of Directors and the Board of Commissioners

A good and harmonious working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners is (1) one of the most important things so that each of these organs can work effectively and efficiently according to their respective functions. In maintaining a good and harmonious working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Board of Directors applies the following principles:

1. *The Board of Directors respects the function and role of the Board of Commissioners in supervising the management of the Bank and providing advice on the Bank's management policies by the Board of Directors.*
2. *Every working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners is a formal relationship, in the sense that it must always be based on a standard mechanism or correspondence that can be accounted for.*
3. *Every informal working relationship can be carried out by the respective Directors and Commissioners, but cannot be used as a formal policy before going through an accountable mechanism or correspondence.*
4. *The Board of Commissioners has the right to obtain access to Bank information in a timely and complete manner and for that the Board of Directors is responsible for ensuring that requested Bank information is provided to the Commissioners in an accurate, timely and complete manner.*
5. *The Board of Directors is responsible for submitting reports required by the Commissioners on a regular basis in accordance with applicable regulations.*
6. *Every working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners is an institutional relationship in the sense that the Board of Directors and the Board of Commissioners are collective*

anggota-anggotanya sehingga setiap hubungan kerja antara Direktur dengan Anggota Komisaris harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direktur lainnya.

Organ dan Komite Di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selalu mengawasi kebijakan yang diambil Direksi berdasarkan laporan yang diterima atau temuan langsung dari Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris. Untuk membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan penerapan kebijakan Tata Kelola tersebut, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Riau Kepri dengan tugasnya adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris

Sampai dengan Tahun 2021, Bank Riau Kepri belum membentuk Sekretaris Dewan Komisaris secara khusus di bawah Organisasi Dewan Komisaris, namun dalam pelaksanaannya fungsi Sekretaris Dewan Komisaris telah dijalankan oleh pejabat yang berada di bawah koordinasi Divisi Sekretariat Perusahaan.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dasar pembentukan Komite Audit adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit.

Susunan anggota Komite Audit PT Bank Riau Kepri telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 41 ayat (1) yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Audit PT Bank Riau Kepri ditetapkan di dalam suatu Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, diatur bahwa

positions that represent all of its members so that any working relationship between the Director and the Board of Commissioners must be known by the Members of the Board of Commissioners and other Directors.

Organs and Committees Under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners always supervises the policies taken by the Board of Directors based on reports received or direct findings from the Board of Commissioners and the Committees under the Board of Commissioners. To assist the duties of the Board of Commissioners in implementing the implementation of the Governance policy, the Board of Commissioners has established an Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee as stipulated in the Decree of the Board of Directors of Bank Riau Kepri with their duties to monitor, evaluate, and provide recommendations. to the Board of Commissioners.

Secretary to the Board of Commissioners

Until 2021, Bank Riau Kepri has not formed a Secretary to the Board of Commissioners specifically under the Organization of the Board of Commissioners, but in practice the function of the Secretary to the Board of Commissioners has been carried out by officials under the coordination of the Corporate Secretary Division.

Audit Committee

Basis for Establishing the Audit Committee

The basis for the establishment of the Audit Committee is the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks which stipulates that in order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish an Audit Committee.

The composition of the members of the Audit Committee of PT Bank Riau Kepri has met the requirements set by the Financial Services Authority in Article 41 paragraph (1) which confirms that the members of the Audit Committee shall at least consist of an Independent Commissioner, an independent party with expertise in finance or accounting and an independent party with expertise in law or Banking.
The composition of the membership and composition of the Audit Committee of PT Bank Riau Kepri is stipulated in a Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Governance for Commercial Banks,

Komite Audit Bank wajib untuk membantu Komisaris untuk/dalam:

1. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap struktur dan sistem pengendalian intern serta kepatuhan Bank terhadap kebijakan GCG.
2. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja Divisi Internal Audit (DIA) dan pelaksanaan tugas fungsi Audit Intern.
3. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap Auditor Ekstern dan pelaksanaan tugas fungsi Audit Ekstern.
4. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap Profil Risiko dan *Compliance* Bank serta prinsip kehati-hatian lainnya melalui hasil kaji ulang DIA.

it is regulated that the Bank Audit Committee is required to assist the Commissioners in:

1. *Monitoring and evaluating the structure and internal control system as well as the Bank's compliance with GCG policies.*
2. *Monitoring and assessing the performance of the Internal Audit Division (DIA) and the implementation of the Internal Audit function's duties.*
3. *Monitoring and evaluating the External Auditor and carrying out the duties of the External Audit function.*
4. *Monitoring and assessing the Bank's Risk and Compliance Profile as well as other prudential principles through the results of the DIA review.*

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/III/2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Riau Kepri Tahun 2011. Dalam Piagam tersebut telah diatur beberapa ketentuan, antara lain:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
   a. Kedudukan
   b. Keanggotaan
   c. Persyaratan keanggotaan
   d. Rapat
   e. Etika kerja
   f. Waktu kerja
4. Kewenangan
5. Tugas
6. Tanggung Jawab
7. Penutup.

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners Number 001/KEPDKS/III/2011 concerning the Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Riau Kepri Year 2011. The charter has regulated several provisions, including:

1. *Destination*
2. *Legal basis*
3. *Organization*
   a. *position*
   b. *Membership*
   c. *Membership requirements*
   d. *Meeting*
   e. *work ethic*
   f. *Working time*
4. *Authority*
5. *Task*
6. *Responsibility*
7. *Closing.*

Independensi Komite Audit

Komite Audit secara independen melapor dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Audit tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham.

Independence of the Audit Committee

The Audit Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out its duties. The independence of the members of the Audit Committee is reflected in family relationships, financial relationships, management and share ownership.

Tabel Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence Table

Aspek Independensi	Rita Anugerah	Taufiqurrahman*	Roy Prakoso**	Fahmi Oemar	Indarti	*Independence Aspect*
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	*Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors*
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	*Does not have a management relationship in the company, subsidiary, or affiliated company*
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	√	*Does not have a share ownership relationship in the company*

Aspek Independensi	Rita Anugerah	Taufiqurrahman*	Roy Prakoso**	Fahmi Oemar	Indarti	*Independence Aspect*
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	*Does not have a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Audit Committee*
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	*Do not serve as administrators of political parties, officials and government*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021
** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris padaa RUPS tanggal 15 November 2021
* *Term of office expires on 03 March 2021*
** *Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021*

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit
Table Structure, Membership and Expertise of the Audit Committee

Nama *Name*	Jabatan *Position*	SK Penetapan *Decree of Determination*	Keahlian *Skill*	Bidang Tugas *Task field*
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit *Independent Commissioner/ Chairman of the Audit Committee*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021*	- Manajemen Risiko - Akuntan Profesional - PeRpajakan - Pengajar akademik *- Risk management* *- Professional Accountant* *- Taxation* *- Academic teacher*	Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi *Chairman of the Audit Committee* *Member of the Risk Monitoring Committee* *Remuneration and Nomination*
Taufiqurrahman*	Komisaris Independen/ Anggota Komite Audit *Independent Commissioner/ Audit Committee Member*	SK Direksi Nomor 067/ KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019 *Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 August 19, 2019*	- Manajemen Risiko - Bisnis internasional - Pengajar Akademik - Trainer NCEE *- Risk management* *- International business* *- Academic Lecturer* *- NCEE Trainers*	Ketua Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit *Committee Member* *Head of the Risk Monitoring Committee* *Chairman of the Remuneration and Nomination Committee* *Audit Committee Member*
Roy Prakoso**	Komisaris Independen/ Anggota Komite Audit *Independent Commissioner/ Audit Committee Member*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 November 22, 2021*	- Manajemen Risiko - Keuangan - Konsultan Perbankan dan IT - Pengajar Akademik *- Risk management* *- Finance* *- Banking and IT Consultant* *- Academic Lecturer*	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit *Head of the Risk Monitoring Committee* *Audit Committee Member*
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit *Independent Party/ Audit Committee Member*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021*	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit *- Risk management* *- Accounting & Audit*	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko *Audit Committee Member* *Member of the Risk Monitoring Committee*
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit *Independent Party/ Audit Committee Member*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021*	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit *- Risk management* *- Accounting & Audit*	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko *Audit Committee Member* *Member of the Risk Monitoring Committee*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021
** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris padaa RUPS tanggal 15 November 2021
* *Term of office expires on 03 March 2021*
** *Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021*

RITA ANUGERAH

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Periode Jabatan : 05 September 2019 s/d sekarang

Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.09 tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019.

Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Audit : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report.

Term of Office: *05 September 2019 until now*

Basis of Appointment as Member of the Board of Commissioners : *Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No.09 dated 19 August 2019 and OJK Letter No. SR-106/KO.053/2019 dated September 5, 2019.*

Basis for Appointment as Chairman of the Audit Committee : *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

TAUFIQURRAHMAN *

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan : 04 Maret 2017 s/d 03 Maret 2021

Riwayat Penunjukan : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.04 Tanggal 4 Maret 2017 dan Surat OJK No. SR-122/KO.053/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Audit : SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report

Term of Office : *04 March 2017 to 03 March 2021*

Appointment History : *Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No. 04 dated March 4, 2017 and OJK Letter No. SR-122/KO.053/2017 dated June 22, 2017.*

Basis for Appointment as a Member of the Audit Committee : *Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 dated August 19, 2019*

** Term of office expires on 03 March 2021*

ROY PRAKOSO*

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Periode Jabatan : 15 November 2021 s/d 14 November 2025

Riwayat Penunjukan : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 dan Surat OJK No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022.

Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Audit : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada RUPS tanggal 15 November 2021

Term of Office: November 15, 2021 to November 14, 2025

History of Appointment : *Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 and OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022.*

Basis for Appointment as a Member of the Audit Committee : *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

** Appointed as Member of the Board of Commissioners at the GMS on November 15, 2021*

FAHMI OEMAR

Pihak Independen/Anggota Komite Audit
Independent Party/Audit Committee Member

Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkalis, 16 Februari 1962
Usia : 58 Tahun

Riwayat Pendidikan :
- Doktoral : UPI – YAI Jakarta, Manajemen Keuangan, 2016
- Pascasarjana : UPI – YPTK Padang, Manajemen Keuangan, 2008
- Sarjana : Universitas Riau, Ekonomi Akuntansi, 1988

Riwayat Jabatan : Bergabung di Bank Riau Kepri sejak 2013 sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko.

Dasar Pengangkatan : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

Periode Jabatan : 2013 s/d sekarang

Citizenship : *Indonesian citizenship*
Domicile : *Pekanbaru, Riau*
Place, Date of Birth: *Bengkalis, February 16, 1962*
Age : *58 Years*

Educational background :
- *Doctoral : UPI – YAI Jakarta, Financial Management, 2016*
- *Postgraduate : UPI – YPTK Padang, Financial Management, 2008*
- *Bachelor : University of Riau, Accounting Economics, 1988*

Position History : *Joined Bank Riau Kepri since 2013 as Audit Committee & Risk Monitoring.*

Basis of Appointment : *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

Term of Office: *2013 to now*

INDARTI

Pihak Independen/Anggota Komite Audit
Independent Party/Audit Committee Member

Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19 November 1975
Usia : 45 Tahun

Riwayat Pendidikan :
- Doktoral : Universitas Trisakti, Akuntansi, 2014
- Pascasarjana : Universitas Riau, Manajemen Keuangan, 2011

Riwayat Jabatan : Bergabung di Bank Riau Kepri sejak 2013 sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko.

Dasar Pengangkatan : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

Periode Jabatan : 2013 s/d sekarang

Citizenship : *Indonesian citizenship*
Domicile : *Pekanbaru, Riau*
Place, Date of Birth : *Pekanbaru, 19 November 1975*
Age : *45 Years*

Educational background :
- *Doctoral : Trisakti University, Accounting, 2014*
- *Postgraduate : University of Riau, Financial Management, 2011*

Position History : *Joined Bank Riau Kepri since 2013 as Audit Committee & Risk Monitoring.*

Basis of Appointment : *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

Term of Office: *2013 to now*

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit

Educational Qualifications and Work Experience of the Audit Committee

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit
Table of Educational Qualifications and Work Experience of the Audit Committee

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja *Work experience*
Rita Anugerah	Ketua Komite Audit *Chairman of the Audit Committee*	- Doctor Business Administration (DBA), Universiti Kebangsanaan Malaysia, 2005 - Profesor, Universitas Riau, 2019 - *Doctor Business Administration (DBA), Universiti Kebangsana Malaysia, 2005* - *Professor, Riau University, 2019*	- Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak Maret Tahun 2019 hingga sekarang - Dosen di Universitas Riau - *Served as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since March 2019 until now* - *Lecturer at Riau University*
Taufiqurrahman*	Anggota Komite Audit *Audit Committee Member*	- M.SC dibidang International Business dari The University Of Salford, UK - M.Phil dari The Masstricht School of Management - *M.SC in International Business from The University Of Salford, UK* - *M.Phil from The Masstricht School of Management*	- Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak Maret Tahun 2017 hingga Maret 2021 - Dosen di Universitas Riau - *Served as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since March 2017 to March 2021* - *Lecturer at Riau University*
Roy Prakoso**	Anggota Komite Audit *Audit Committee Member*	- Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malang - Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada (UGM) - *Bachelor of Economics from the College of Economics (STIE) Malang* - *Master of Management from Gajah Mada University (UGM)*	- Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak 25 Januari 2022 - Dosen di Universitas Pancasila Jakarta - *Effectively serving as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since January 25, 2022* - *Lecturer at Pancasila University Jakarta*
Fahmi Oemar	Anggota Komite Audit *Audit Committee Member*	- Doktoral : UPI – YAI Jakarta, Manajemen Keuangan, 2016 - *Doctoral : UPI – YAI Jakarta, Financial Management, 2016*	Menjabat sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko sejak 2013 *Served as Audit & Risk Monitoring Committee since 2013*
Indarti	Anggota Komite Audit *Audit Committee Member*	- Doktoral : Universitas Trisakti, Akuntansi, 2014 - *Doctoral : Trisakti University, Accounting, 2014*	Menjabat sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko sejak 2013 *Served as Audit & Risk Monitoring Committee since 2013*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021
** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris padaa RUPS tanggal 15 November 2021
* *Term of office expires on 03 March 2021*
** *Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021*

Rapat Komite Audit

Sepanjang Tahun 2021, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

Audit Committee Meeting

Throughout 2021, the implementation date, meeting agenda and participants of the Audit Committee meetings are as follows.

Tabel Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting Table

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
1	12 Januari 2021 *January 12, 2021*	Membahas tentang Progress Konversi Syariah dan Proses Asistensi pada PT Bank Riau Kepri untuk dilaporkan ke OJK Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Sharia Conversion Progress and Assistance Process at PT Bank Riau Kepri to be reported to OJK* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti Ketua PMO
2	29 Januari 2021 *January 29, 2021*	Membahas tentang Hasil Rapat dengan OJK mengenai Kinerja dan Tingkat Kesehatan Bank pada PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussed the results of the meeting with the OJK regarding the performance and soundness of the Bank at PT Bank Riau Kepri* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Taufiqurrahman Fahmi Oemar Indarti
3	15 Februari 2021 *February 15, 2021*	Membahas tentang proses pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan jasa audit umum atas Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Tahun buku 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discusses the procurement process for a Public Accounting Firm (KAP) to perform general audit services on the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for fiscal year 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Taufiqurrahman Fahmi Oemar Indarti
4	16 Februari 2021 *February 16, 2021*	Membahas draft Piagam Internal Audit PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the draft of the Internal Audit Charter of PT Bank Riau Kepri* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Taufiqurrahman Fahmi Oemar Indarti
5	16 Februari 2021 *February 16, 2021*	Membahas tentang Permohonan Persetujuan dari Divisi Internal Audit mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Application for Approval from the Internal Audit Division regarding the 2021 Work Plan and Budget* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Taufiqurrahman Fahmi Oemar Indarti
6	04 Maret 2021 *March 04, 2021*	Membahas Laporan Hasil Audit IT tentang Security Audit Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the IT Audit Report on Security Audit* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
7	09 Maret 2021 *March 09, 2021*	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Januari 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri for January 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
8	16 – 17 Maret 2021 *March 16 – 17, 2021*	Membahas tentang Laporan Opini KAP atas Hasil Audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Tahun buku 2020 oleh KAP Bustaman, Ezeddin dan Putranto (KAP BEP) Membahas tentang Laporan Management Letter dari KAP Bustaman, Ezeddin dan Putranto (KAP BEP) atas Audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Tahun buku 2020 Membahas tentang Draft Final Laporan Hasil Pemeriksaan dari KAP Bustaman, Ezeddin dan Putranto (KAP BEP) atas Audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Tahun buku 2020 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the KAP Opinion Report on the Audit Results of the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for fiscal year 2020 by KAP Bustaman, Ezeddin and Putranto (KAP BEP)* *Discussed the Management Letter Report from KAP Bustaman, Ezeddin and Putranto (KAP BEP) on the Audit of the Financial Statements of PT Bank Riau Riau Islands fiscal year 2020* *Discussed the Final Draft of the Audit Result Report from KAP Bustaman, Ezeddin and Putranto (KAP BEP) on the Audit of the Financial Statements of PT Bank Riau Riau Islands fiscal year 2020* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
9	17 Maret 2021 *March 17, 2021*	Membahas tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Changes in Organizational Structure and Work Procedures (SOT) of PT Bank Riau Kepri* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti Pemimpin Divisi MSDM
10	29 Maret 2021 *March 29, 2021*	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Februari 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri for February 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
11	29 Maret 2021 *March 29, 2021*	Membahas tentang Pengajuan Revisi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan dan Pedoman Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit (P2K) oleh Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussed the Submission of Revision of the Company Manual (BPP) Policies and Guidelines for Credit Rescue and Settlement (P2K) by the Credit Rescue and Settlement Division* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
12	05 April 2021 *April 05, 2021*	Membahas Laporan Hasil Audit Umum BRK Cabang Dumai Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Dumai Branch BRK General Audit Report* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
13	09 April 2021 *April 09, 2021*	Membahas Laporan Hasil Audit Umum BRK Cabang Pangkalan Kerinci Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the General Audit Report of BRK Pangkalan Kerinci Branch* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
14	02 Juni 2021 *June 02, 2021*	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan April 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri for April 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
15	28 Juni 2021 *June 28, 2021*	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Mei 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
16	29 Juni 2021 *June 29, 2021*	Membahas tentang Laporan Hasil Audit Tematik Deposito Tahun 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri in May 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
17	09 Juli 2021 *July 09, 2021*	Membahas Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the 2021 Deposit Thematic Audit Results Report* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
18	16 Juli 2021 *July 16, 2021*	Membahas Action Plan Penyelesaian Kredit Bermasalah Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Action Plan for the Resolution of Non-Performing Loans* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
19	26 Agustus 2021 *August 26, 2021*	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Juni 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Action Plan for the Resolution of Non-Performing Loans* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
20	30 Agustus 2021 *August 30, 2021*	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Juli 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri in June 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
21	06 September 2021 *September 06 2021*	Membahas Laporan Hasil Audit Tematik "Komisi Tagihan Premi Asuransi" pada PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Thematic Audit Report "Commission on Insurance Premium Receipts" at PT Bank Riau Kepri* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti Pemimpin Divisi Internal Audit

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
22	09 September 2021 *September 09, 2021*	Membahas Laporan Hasil Audit IT tentang Security Audit Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the IT Audit Report on Security Audit* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
23	14 September 2021 *September 14th 2021*	Membahas Laporan Hasil Audit IT tentang SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the IT Audit Report on SLIK (Financial Information Service System)* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
24	27 September 2021 *September 27, 2021*	Membahas Laporan Kewajiban Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Report on the Obligation of Providing Credit or Financing for MSMEs at PT Bank Riau Kepri* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
25	05 Oktober 2021 *October 05, 2021*	Membahas Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RpIM) Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RpIM) Lending or Financing MSMEs at PT Bank Riau Kepri* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
26	13 Oktober 2021 *October 13, 2021*	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Agustus 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri in August 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
27	22 Oktober 2021 *October 22, 2021*	Membahas tentang Tanggapan Direksi PT Bank Riau Kepri atas Surat OJK terkait dengan Perkembangan Kinerja PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussed the response of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri to the OJK Letter related to the Performance Development of PT Bank Riau Kepri* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
28	25 Oktober 2021 *October 25, 2021*	Membahas tentang Kick Off Meeting KAP Busraman, Ezedin dan Putranto dengan PT Bank Riau Kepri Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussed the Kick Off Meeting of KAP Busraman, Ezedin and Putranto with PT Bank Riau Kepri* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
29	08 November 2021 *November 08, 2021*	Membahas Perkembangan Konversi PT Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Development of the Conversion of PT Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
30	10 Desember 2021 *December 10, 2021*	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan Oktober 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri for October 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
31	23 Desember 2021 *December 23, 2021*	Membahas Laporan Hasil Audit Tematik Deposito Syariah Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Sharia Deposit Thematic Audit Report* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Frequency and Attendance of Audit Committee Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Komite Audit *Audited Committe Meeting*		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran *Attendance Number and Percentage*		
		Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Rita Anugerah	Ketua *Chairman*	31	31	100 %
Taufiqurrahman*	Anggota *Member*	5	4	80%
Roy Prakoso**	Anggota *Member*	0	0	0%
Fahmi Oemar	Anggota *Member*	31	34	100 %
Indarti	Anggota *Member*	31	34	100 %

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021
** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris per tanggal 15 November 2021, namun baru efektif menjabat per tanggal 25 Januari 2022 berdasarkan Surat OJK Nomor S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022
* *Term of office expires on 03 March 2021*
** *Appointed as Member of the Board of Commissioners on November 15, 2021, but only effective on January 25, 2022 based on OJK Letter Number S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022*

Rekomendasi Komite Audit

Sepanjang Tahun 2021, Komite Audit memberikan beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:
- Rekomendasi atas Piagam Audit Intern PT Bank Riau Kepri.
- Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit Tematik.
- Rekomendasi atas Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri.
- Rekomendasi atas Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Dana dan Jasa PT Bank Riau Kepri
- Rekomendasi atas *Risk Appetite Statement* PT Bank Riau Kepri Tahun 2022.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2021

Kegiatan Komite Audit Tahun 2021

a. Pembahasan Laporan Hasil Audit Umum, Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi dan Laporan Hasil Audit Tematik.
b. Pembahasan Kinerja dan Tingkat Kesehatan Bank.
c. Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun buku 2021.
d. Pembahasan Piagam Internal Audit PT Bank Riau Kepri.
e. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Divisi Internal Audit Tahun 2021.
f. Pembahasan Laporan Opini dan Management Letter KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun buku 2020.
g. Pembahasan Perubahan SOT PT Bank Riau Kepri.
h. Pembahasan *Action Plan* Penyelesaian Kredit Bermasalah.
i. Pembahasan Laporan Kewajiban Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM PT Bank Riau Kepri.

Audit Committee Recommendations

Throughout 2021, the Audit Committee made several recommendations, including the following:
- *Recommendation on the Internal Audit Charter of PT Bank Riau Kepri.*
- *Recommendations on the Thematic Audit Results Report.*
- *Recommendations on Workflows and SOPs at the Directorate of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri.*
- *Recommendations on Workflows and SOPs at the Directorate of Funds and Services PT Bank Riau Kepri*
- *Recommendations on the Risk Appetite Statement of PT Bank Riau Kepri in 2022.*

Brief Report on the Implementation of the Audit Committee Activities in 2021

Audit Committee Activities in 2021

a. Discussion of General Audit Report, Information Technology Audit Result Report and Thematic Audit Result Report.
b. Discussion of the Bank's Performance and Soundness Level.
c. Discussion on the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the Financial Statement Audit for the 2021 financial year.
d. Discussion of the Internal Audit Charter of PT Bank Riau Kepri.
e. Discussion of the 2021 Internal Audit Division's Annual Work Plan and Budget.
f. Discussion of KAP's Opinion Report and Management Letter) for the 2020 Financial Statement Audit.
g. Discussion of Changes in SOT of PT Bank Riau Kepri.
h. Discussion on the Action Plan for the Resolution of Non-Performing Loans.
i. Discussion on the Report on the Obligation of Providing Credit or Financing for MSMEs at PT Bank Riau Kepri.

j. Pembahasan Konversi BRK Syariah.
k. Rapat Komite Audit dengan Auditor Indenden/KAP.
l. Review kinerja KAP atas laporan hasil pemeriksaan.
m. Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
n. Mengusulkan dan mengikuti pendidikan dan pelatihan guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite .
o. Mendampingi kunjungan kerja Anggota Dewan Komisaris berkenaan dengan kunjungan pengawasan ke kantor Cabang.
p. Penugasan lain yang diberikan Dewan Komisaris kepada Komite Audit.
q. Rapat Komite Audit dengan Divisi dan unit kerja lainnya.
r. Menyiapkan laporan terkait dengan Komite Audit dalam rangka peyusunan Laporan Tahunan.

Komite Pemantau Risiko

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Komite Pemantau Risiko merupakan alat kelengkapan Komisaris yang berfungsi memonitor risiko dan menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Bank, mengevaluasi perbaikan yang dilakukan atas kebijakan, prosedur dan praktik manajemen risiko Bank guna memastikan telah dilakukannya pengelolaan risiko dengan baik, terutama pada pengelolaan risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko Bank lainnya.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Dasar pembentukan Komite Pemantau Risiko adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Pemantau Risiko.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 42 ayat (1) yang menegaskan bahwa anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari Pihak Independen memiliki keahlian di bidang keuangan dan memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

j. Discussion of Sharia BRK Conversion.
k. Audit Committee Meeting with Independent Auditor/KAP.
l. Review of KAP's performance on the report on the results of the examination.
m. Other meetings deemed necessary and carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners within the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners.
n. Propose and participate in education and training to support the implementation of the committee's duties and responsibilities.
o. Assisting members of the Board of Commissioners' working visits with regard to supervisory visits to Branch offices.
p. Other assignments given by the Board of Commissioners to the Audit Committee.
q. Audit Committee meetings with other divisions and work units.
r. Prepare reports related to the Audit Committee in the context of preparing the Annual Report.

Risk Monitoring Committee

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the Risk Monitoring Committee is a tool for the Commissioners that functions to monitor risk and assess risk tolerance that can be taken by the Bank, evaluate improvements made on the Bank's risk management policies, procedures and practices to ensure that risk management has been carried out properly, especially in the management of credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, and other Bank risks.

Basis for Establishing a Risk Monitoring Committee

The basis for establishing the Risk Monitoring Committee is the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks which stipulates that in order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish a Risk Monitoring Committee.

The composition of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Riau Kepri has met the requirements set by the Financial Services Authority in Article 42 paragraph (1) which confirms that the members of the Risk Monitoring Committee consist of Independent Commissioners and Independent Parties. Members of the Risk Monitoring Committee who come from Independent Parties have expertise in finance and have expertise in risk management.

Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri ditetapkan di dalam suatu Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu–isu manajemen risiko dan sistem pengawasan Internal serta langkah-langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.

Diantara tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko Bank Riau Kepri adalah:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara Tahunan.
4. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
5. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
6. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perseroan, agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
7. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.
8. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
9. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan tidak terbatas pada laporan pemeriksaan SKAI dan Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.
10. Melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Bank.

The composition of the membership and composition of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Riau Kepri is stipulated in a Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri.

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is tasked with assisting the implementation of the supervisory and guidance function by the Board of Commissioners towards the Board of Directors and their staff in the area of risk management implementation so that it can be carried out effectively, both regarding issues of risk management and the internal control system as well as anticipatory steps taken by the Board of Directors in risk management. and provide recommendations to the Board of Commissioners in reviewing the risk management system and improving risk management policies.

Among the duties and responsibilities of the Bank Riau Kepri Risk Monitoring Committee are:

1. *Evaluating the suitability between risk management policies and the implementation of these policies.*
2. *Monitoring and evaluating the implementation of the tasks of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.*
3. *Evaluate the risk management policies and strategies prepared by the Management on an annual basis.*
4. *Evaluating the Board of Directors' accountability reports on the implementation of Risk Management and Compliance policies.*
5. *Evaluate the steps taken by the Board of Directors in order to comply with Bank Indonesia Regulations, OJK Regulations and other applicable laws and regulations in the context of implementing prudential principles, particularly those relating to risk management and compliance.*
6. *Evaluating the results of the Board of Directors' monitoring of the Company's business activities, so as not to deviate from the applicable regulations.*
7. *Evaluating the results of monitoring of the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Board of Directors to Bank Indonesia/ Financial Services Authority.*
8. *Evaluating applications for proposals from the Board of Directors related to transactions or business activities that exceed the authority of the Board of Directors to be used by the Commissioners as a basis for decision making.*
9. *Evaluating compliance with the company's internal regulations is not limited to the inspection report of SKAI and the Director of Compliance & Risk Management.*
10. *Perform duties and responsibilities as mandated in the Guidelines for the Implementation of Bank Governance.*

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/III/2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Riau Kepri Tahun 2011. Dalam Piagam tersebut telah diatur beberapa ketentuan, antara lain:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
   a. Kedudukan
   b. Keanggotaan
   c. Persyaratan keanggotaan
   d. Rapat
   e. Etika kerja
   f. Waktu kerja
4. Kewenangan
5. Tugas
6. Tanggung Jawab
7. Penutup

Risk Monitoring Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners Number 001/KEPDKS/III/2011 concerning the Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Riau Kepri Year 2011. In the Charter, it has been regulated several provisions, including:

1. *Destination*
2. *Legal basis*
3. *Organization*
   a. *position*
   b. *Membership*
   c. *Membership requirements*
   d. *Meeting*
   e. *work ethic*
   f. *Working time*
4. *Authority*
5. *Task*
6. *Responsibility*
7. *Closing*

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko secara independen melapor dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham di Bank Riau Kepri dan perusahaan lainnya sebagaimana tabel berikut:

Independence of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out its duties. The independence of members of the Risk Monitoring Committee is reflected in family relationships, financial relationships, management and share ownership in Bank Riau Kepri and other companies as shown in the following table:

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Independence Table

Aspek Independensi	Taufiqurrahman*	Roy Prakoso**	Rita Anugerah	Fahmi Oemar	Indarti	*Independence Aspect*
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√		√	√	√	*Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors*
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√		√	√	√	*Does not have a management relationship in the company, subsidiary, or affiliated company*
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√		√	√	√	*Does not have a share ownership relationship in the company*
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	√		√	√	√	*Does not have a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Monitoring Committee*
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√		√	√	√	*Do not serve as administrators of political parties, officials and government*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021
** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris padaa RUPS tanggal 15 November 2021
* *Term of office expires on 03 March 2021*
** *Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021*

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Structure, Membership and Expertise of the Risk Monitoring Committee

The structure, membership and expertise of the Risk Monitoring Committee can be seen in the table below.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko
Structure, Membership and Expertise of the Risk Monitoring Committee Tabel

Nama *Name*	Jabatan *Position*	SK Penetapan *Decree of Determination*	Keahlian *Skill*	Bidang Tugas *Task field*
Taufiqurrahman*	Komisaris Independen/ Ketua Komite *Independent Commissioner/ Committee Chair*	SK Direksi Nomor 067/ KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019 *Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 August 19, 2019*	- Manajemen Risiko - Bisnis internasional - Pengajar Akademik - Trainer NCEE *- Risk management* *- International business* *- Academic Lecturer* *- NCEE Trainers*	Ketua Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Anggota Komite Audit Ketua Komite Audit *Head of the Risk Monitoring Committee* *Chairman of the Remuneration and Nomination Committee* *Audit Committee Member* *Chairman of the Audit Committee*
Roy Prakoso**	Komisaris Independen/ Ketua Komite *Independent Commissioner/ Committee Chair*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 November 22, 2021*	- Manajemen Risiko - Keuangan - Konsultan Perbankan dan IT - Pengajar Akademik *- Risk management* *- Finance* *- Banking and IT Consultant* *- Academic Lecturer*	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit *Head of the Risk Monitoring Committee* *Audit Committee Member*
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Anggota Komite *Independent Commissioner/ Committee Member*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021*	- Manajemen Risiko - Akuntan Profesional - PeRpajakan - Pengajar akademik *- Risk management* *- Professional Accountant* *- Taxation* *- Academic teacher*	Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi *Chairman of the Audit Committee* *Member of the Risk Monitoring Committee* *Remuneration and Nomination Committee Member*
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite *Independent Party/ Committee Member*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021*	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit *- Risk management* *- Accounting & Audit*	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko *Audit Committee Member* *Member of the Risk Monitoring Committee*
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite *Independent Party/ Committee Member*	SK Direksi Nomor 087/ KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021*	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit *- Risk management* *- Accounting & Audit*	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko *Audit Committee Member* *Member of the Risk Monitoring Committee*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021
** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris padaa RUPS tanggal 15 November 2021
* *Term of office expires on 03 March 2021*
** *Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021*

TAUFIQURRAHMAN *

Ketua Komite Pemantau Risiko
Head of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini
Periode Jabatan : 04 Maret 2017 s/d 03 Maret 2021

Riwayat Penunjukan : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.04 Tanggal 4 Maret 2017 dan Surat OJK No. SR-122/KO.053/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko : SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report
Term of Office : *04 March 2017 to 03 March 2021*

Appointment History : *Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No. 04 dated March 4, 2017 and OJK Letter No. SR-122/KO.053/2017 dated June 22, 2017.*

Basis for Appointment as Chairman of the Risk Monitoring Committee : *Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 dated August 19, 2019*

** Term of office expires on 03 March 2021*

ROY PRAKOSO*

Ketua Komite Pemantau Risiko
Head of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini
Periode Jabatan : 15 November 2021 s/d 14 November 2025

Riwayat Penunjukan : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 dan Surat OJK No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022.

Dasar Penetapan sebagi Ketua Komite Pemantau Risiko : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris padaa RUPS tanggal 15 November 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report
Term of Office: *November 15, 2021 to November 14, 2025*

History of Appointment : *Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 and OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022.*

Basis for Appointment as Chairman of the Risk Monitoring Committee : *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

** Appointed as Member of the Board of Commissioners at the GMS on November 15, 2021*

RITA ANUGERAH

Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Member

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan 05 September 2019 s/d sekarang

Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.09 tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019.

Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report
Term of Office *05 September 2019 to present*

Basis of Appointment as Member of the Board of Commissioners : *Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No.09 dated 19 August 2019 and OJK Letter No. SR-106/KO.053/2019 dated September 5, 2019.*

Basis for Appointment as Member of the Risk Monitoring Committee : *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021*

FAHMI OEMAR

Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Member

Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkalis, 16 Februari 1962
Usia : 58 Tahun

Riwayat Pendidikan :

- Doktoral : UPI – YAI Jakarta, Manajemen Keuangan, 2016
- Pascasarjana : UPI – YPTK Padang, Manajemen Keuangan, 2008
- Sarjana : Universitas Riau, Ekonomi Akuntansi, 1988

Riwayat Jabatan : Bergabung di Bank Riau Kepri sejak 2013 sebagai Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko.

Dasar Pengangkatan : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

Periode Jabatan : 2013 s/d sekarang

Citizenship : *Indonesian*
Domicile : *Pekanbaru, Riau*
Place, Date of Birth: *Bengkalis, February 16, 1962*
Age : *58 Years*

Educational background :

- *Doctoral : UPI – YAI Jakarta, Financial Management, 2016*
- *Postgraduate : UPI – YPTK Padang, Financial Management, 2008*
- *Bachelor : University of Riau, Accounting Economics, 1988*

Position History : *Joined Bank Riau Kepri since 2013 as Audit Committee & Risk Monitoring Member.*

Basis of Appointment : *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

Term of Office: *2013 to Present*

INDARTI

Anggota Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Member

Kewarganegaraan : Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19 November 1975
Usia : 45 Tahun

Riwayat Pendidikan :

- Doktoral : Universitas Trisakti, Akuntansi, 2014
- Pascasarjana : Universitas Riau, Manajemen Keuangan, 2011

Riwayat Jabatan : Bergabung di Bank Riau Kepri sejak 2013 sebagai Anggota Komite Audit & Pemantau Risiko.

Dasar Pengangkatan : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

Periode Jabatan : 2013 s/d sekarang

Citizenship : *Indonesian*
Domicile : *Pekanbaru, Riau*
Place, Date of Birth : *Pekanbaru, 19 November 1975*
Age : *45 Years*

Educational background :

- *Doctoral : Trisakti University, Accounting, 2014*
- *Postgraduate : University of Riau, Financial Management, 2011*

Position History : *Joined Bank Riau Kepri since 2013 as Audit Committee & Risk Monitoring Member.*

Basis of Appointment : *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated 22 November 2021*

Term of Office: *2013 to now*

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko

Educational Qualifications and Work Experience of the Risk Monitoring Committee

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Pemantau Risiko
Table of Educational Qualifications and Work Experience of the Risk Monitoring Committee

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja *Work experience*
Taufiqurrahman*	Komisaris Independen/ Ketua Komite *Independent Commissioner/ Committee Chair*	- M.SC dibidang International Business dari The University Of Salford, UK - M.Phil dari The Masstricht School of Management - *M.SC in International Business from The University Of Salford, UK* - *M.Phil from The Masstricht School of Management*	- Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak Maret Tahun 2017 hingga Maret 2021 - Dosen di Universitas Riau - *Served as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since March 2017 to March 2021* - *Lecturer at Riau University*
Roy Prakoso**	Komisaris Independen/ Ketua Komite *Independent Commissioner/ Committee Chair*	- Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Malang - Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada (UGM) - *Bachelor of Economics from the College of Economics (STIE) Malang* - *Master of Management from Gajah Mada University (UGM)*	- Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak 25 Januari 2022 - Dosen di Universitas Pancasila Jakarta - *Effectively serving as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since January 25, 2022* - *Lecturer at Pancasila University Jakarta*
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Anggota Komite *Independent Commissioner/ Committee Member*	- Doctor Business Administration (DBA), Universiti Kebangsanaan Malaysia, 2005 - Profesor, Universitas Riau, 2019 - *Doctor Business Administration (DBA), Universiti Kebangsana Malaysia, 2005* - *Professor, Riau University, 2019*	- Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak Maret Tahun 2019 hingga sekarang - Dosen di Universitas Riau - *Served as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since March 2019 until now* - *Lecturer at Riau University*
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite *Independent Party/ Committee Member*	- Doktoral : UPI – YAI Jakarta, Manajemen Keuangan, 2016 - *Doctoral : UPI – YAI Jakarta, Financial Management, 2016*	- Menjabat sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko sejak 2013 - *Served as Audit & Risk Monitoring Committee since 2013*
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite *Independent Party/ Committee Member*	- Doktoral : Universitas Trisakti, Akuntansi, 2014 - *Doctoral : Trisakti University, Accounting, 2014*	- Menjabat sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko sejak 2013 - *Served as Audit & Risk Monitoring Committee since 2013*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021
** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris padaa RUPS tanggal 15 November 2021
* *Term of office expires on 03 March 2021*
** *Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021*

Rapat Komite Pemantau Risiko

Sepanjang Tahun 2021, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut.

Risk Monitoring Committee Meeting

Throughout 2021, the implementation date, meeting agenda and meeting participants of the Risk Monitoring Committee are as follows.

Tabel Rapat Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee Meeting Table

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
1	25 Januari 2021 *January 25, 2021*	Membahas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement November 2020 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the November 2020 Risk Appetite Statement Monitoring Report* *Discuss other matters deemed necessary*	Taufiqurrahman Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
2	17 Februari 2021 *February 17, 2021*	Membahas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement Desember 2020 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Risk Appetite Statement Monitoring Report December 2020* *Discuss other matters deemed necessary*	Taufiqurrahman Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
3	29 Maret 2021 *March 29, 2021*	Membahas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement Januari 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Risk Appetite Statement Monitoring Report January 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
4	23 April 2021 *April 23, 2021*	Membahas Laporan Monitoring Risk Appetite Statement Februari 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Risk Appetite Statement Monitoring Report February 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
5	27 April 2021 *April 27, 2021*	Membahas tentang Laporan OJK kepada Direksi PT Bank Riau Kepri tentang Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2020 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussed the OJK Report to the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri regarding Bank Soundness Level as of December 2020* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
6	05 Mei 2021 *May 05 2021*	Membahas Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Triwulan I (periode Maret 2021) Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Report on the Implementation of the Duties of the Compliance Director Quarter I (period March 2021)* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
7	16 Juni 2021 *June 16, 2021*	Membahas Laporan *Monitoring Risk Appetite Statement* April 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Risk Appetite Statement Monitoring Report April 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
8	29 Juni 2021 *June 29, 2021*	Membahas tentang Potensi Risiko terkait dengan Laporan Hasil Audit Tematik Deposito 2021 yang telah dilakukan oleh Divisi Internal Audit Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Potential Risks related to the 2021 Deposit Thematic Audit Report that has been carried out by the Internal Audit Division* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
9	26 Agustus 2021 *August 26, 2021*	Membahas Laporan *Monitoring Risk Appetite Statement* bulan Juni 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Monitoring Risk Appetite Statement for June 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
10	03 September 2021 *September 03 2021*	Membahas Laporan *Monitoring Risk Appetite Statement* bulan Juli 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussed the Monitoring Risk Appetite Statement for July 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
11	26 Oktober 2021 *October 26, 2021*	Membahas Laporan *Monitoring Risk Appetite Statement* bulan Agustus 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Monitoring Risk Appetite Statement for August 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
12	01 November 2021 *November 01, 2021*	Membahas Laporan *Monitoring Risk Appetite Statement* bulan September 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Monitoring Risk Appetite Statement for September 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
13	08 November 2021 *November 08, 2021*	Membahas Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan Triwulan III (periode September 2021) Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Report on the Implementation of the Duties of the Compliance Director Quarter III (September 2021 period)* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
14	06 Desember 2021 *December 06, 2021*	Membahas tentang Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing Workflow and SOPs at the Compliance and Risk Management Directorate* *Discuss other matters deemed necessary*	Roy Prakoso Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
15	10 Desember 2021 *December 10, 2021*	Membahas tentang Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Dana dan Jasa Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing Workflows and SOPs at the Directorate of Funds and Services* *Discuss other matters deemed necessary*	Roy Prakoso Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
16	24 Desember 2021 *December 24, 2021*	Membahas Laporan Kinerja Bank Riau Kepri bulan November 2021 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Performance Report of Bank Riau Kepri for November 2021* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti
17	28 Desember 2021 *December 28, 2021*	Membahas tentang *Risk Appetite Statement* Tahun 2022 Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu *Discussing the Risk Appetite Statement for 2022* *Discuss other matters deemed necessary*	Rita Anugerah Fahmi Oemar Indarti

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Frequency and Attendance of Risk Monitoring Committee Meetings

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko
Table of Attendance at Risk Monitoring Committee Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Komite Pemantau Resiko *Risk Monitoring Committee Meeting*		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran *Attendance Number and Percentage*		
		Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Taufiqurrahman*	Ketua *Chairman*	2	2	100 %
Roy Prakoso**	Ketua *Chairman*	4	2	50%
Rita Anugerah	Anggota *Member*	17	17	100 %
Fahmi Oemar	Anggota *Member*	17	17	100 %
Indarti	Anggota *Member*	17	17	100 %

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021
** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris padaa RUPS tanggal 15 November 2021
* *Term of office expires on 03 March 2021*
** *Appointed as a Member of the Board of Commissioners at the GMS on 15 November 2021*

Rekomendasi Komite Pemantau Risiko

Sepanjang Tahun 2021, Komite Pemantau Risiko memberikan beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Laporan Tingkat Kesehatan Bank.
2. Rekomendasi atas Laporan Kinerja Bank.
3. Rekomendasi atas Laporan *Monitoring Risk Appetite Statement*.
4. Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan.
5. Rekomendasi atas Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri.
6. Rekomendasi atas Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Dana dan Jasa PT Bank Riau Kepri.
7. Rekomendasi atas *Risk Appetite Statement* PT Bank Riau Kepri Tahun 2022.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2021

a. Pembahasan Tingkat Kesehatan Bank.
b. Pembahasan Laporan *Monitoring Risk Appetite Statement Bank*.
c. Pembahasan Laporan Kinerja Bank.
d. Pembahasan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan.
e. Pembahasan Potensi Risiko terkait dengan Laporan Hasil Audit Tematik Deposito 2021 yang telah dilakukan oleh Divisi Internal Audit.
f. Pembahasan Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri.
g. Pembahasan Alur Kerja dan SOP pada Direktorat Dana dan Jasa PT Bank Riau Kepri.
h. Menyelenggarakan Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
i. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.
j. Memantau pelaksanaan dan perkembangan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK dan auditor eksternal lainnya.

Recommendations of the Risk Monitoring Committee

Throughout 2021, the Risk Monitoring Committee provided several recommendations, including the following:

1. *Recommendations on the Bank Soundness Level Report.*
2. *Recommendations on Bank Performance Reports.*
3. *Recommendations on the Monitoring Report Risk Appetite Statement.*
4. *Recommendations on the Compliance Director's Duties Implementation Report.*
5. *Recommendations on Workflows and SOPs at the Directorate of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri.*
6. *Recommendations on Workflows and SOPs at the Directorate of Funds and Services at PT Bank Riau Kepri.*
7. *Recommendations on the Risk Appetite Statement of PT Bank Riau Kepri in 2022.*

Brief Report on Implementation of Risk Monitoring Committee Activities in 2021

Risk Monitoring Committee Activities in 2021

a. Discussion of Bank Soundness Level.
b. Discussion of the Bank's Risk Appetite Statement Monitoring Report.
c. Discussion of the Bank's Performance Report.
d. Discussion of the Compliance Director's Duties Implementation Report.
e. Discussion of Potential Risks related to the 2021 Deposit Thematic Audit Results Report that has been carried out by the Internal Audit Division.
f. Discussion of Workflows and SOPs at the Directorate of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri.
g. Discussion of Workflows and SOPs at the Directorate of Funds and Services at PT Bank Riau Kepri.
h. Organizing other meetings as deemed necessary and carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners within the scope of duties and obligations of the Board of Commissioners.
i. Participate in training to improve competence to support the implementation of committee duties and responsibilities.
j. Monitor the implementation and progress of the results of examinations conducted by OJK and other external auditors.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite di tingkat Dewan Komisaris yang dibentuk untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan remunerasi di Bank Riau Kepri dan pencalonan nominasi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Bank Riau Kepri sesuai dengan Anggaran Dasar, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri per Desember 2021 telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 44 ayat (1) yang menegaskan bahwa anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari Komisaris Independen, Komisaris dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia.

Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia (Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia) memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan Bank*.

Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Riau Kepri ditetapkan di dalam suatu Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi Dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup dua bidang yaitu remunerasi dan nominasi, antara lain:

Terkait dengan bidang remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
   b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi

Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee is a committee at the Board of Commissioners level which was formed to review and provide recommendations to the Board of Commissioners related to remuneration policies at Bank Riau Kepri and nominations for members of the Board of Commissioners and Directors of Bank Riau Kepri in accordance with the Articles of Association, Bank Indonesia regulations, and Authority regulations. Financial Services and applicable laws and regulations.

The basis for the establishment of the Remuneration and Nomination Committee is the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks which stipulates that in order to support the effectiveness of the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is required to establish a Remuneration Committee and Nomination.

The composition of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Riau Kepri as of December 2021 has met the requirements set by the Financial Services Authority in Article 44 paragraph (1) which confirms that the members of the Remuneration and Nomination Committee consist of Independent Commissioners, Commissioners and Executive Officers in charge of the human resources function. man.

The Executive Officer in charge of human resources (Human Resource Management Division) has knowledge of the remuneration and/or nomination system as well as the Bank's succession plan.

The composition of the membership and composition of the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Riau Kepri is stipulated in a Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri.

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee cover two areas, namely remuneration and nomination, including:

Related to remuneration

1. *Evaluating the remuneration policy.*
2. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
   a. *Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS).*
   b. *Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors*

3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
   a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Prestasi kerja individual.
   c. Kewajaran dengan *peer group*.
   d. Perimbangan dan strategi jangka panjang Bank.

Terkait dengan bidang nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDKS/III/2011 tentang Pedoman Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Riau Kepri Tahun 2011. Dalam Piagam tersebut telah diatur beberapa ketentuan, antara lain:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
   a. Kedudukan
   b. Keanggotaan
   c. Persyaratan keanggotaan
   d. Rapat
   e. Etika kerja
   f. Waktu kerja
4. Kewenangan
5. Tugas
6. Tanggung Jawab
7. Penutup.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2021

Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2021

a. Pembahasan pergantian Anggota *Ex Officio* Komite Remunerasi Nominasi PT Bank Riau Kepri.
b. Pembahasan Tindak Lanjut Surat Somasi Armilis Ramaini Advocates and Law Consultan.
c. Menyelenggarakan Rapat lain yang dipandang perlu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

3. *Ensure that the remuneration policy is at least in line with:*
   a. Financial performance and fulfillment of reserves as regulated in the applicable laws and regulations.
   b. Individual work performance.
   c. Fairness with peer groups.
   d. The Bank's long-term balance and strategy.

Related to the nomination field

1. *Prepare and provide recommendations regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
2. *Provide recommendations regarding candidates for members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
3. *Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the Committee to the Board of Commissioners.*

Remuneration and Nomination Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Remuneration and Nomination Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners Number 001/KEPDKS/III/2011 concerning the Work Guidelines for the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Riau Kepri Year 2011. The Charter has stipulates several provisions, including:

1. *Destination*
2. *Legal basis*
3. *Organization*
   a. position
   b. Membership
   c. Membership requirements
   d. Meeting
   e. work ethic
   f. Working time
4. *Authority*
5. *Task*
6. *Responsibility*
7. *Closing.*

Brief Report on Implementation of Risk Remuneration and Nomination Activities in 2021

Remuneration and Nomination Committee Activities in 2021

a. Discussion on the replacement of Ex Officio Members of the Nomination Remuneration Committee of PT Riau Islands Bank.
b. Discussion on the Follow-up to Armilis Ramaini's Subpoena for Advocates and Law Consultants.
c. Holding other meetings as deemed necessary and carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners within the scope of duties and obligations

d. Mengikuti Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup dua bidang yaitu remunerasi dan nominasi, antara lain:

Terkait dengan bidang remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
   b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
   a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   b. Prestasi kerja individual.
   c. Kewajaran dengan *peer group*.
   d. Perimbangan dan strategi jangka panjang Bank.

Terkait dengan bidang nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

d. Participate in education and training to improve competence to support the implementation of committee duties and responsibilities.

Remuneration and Nomination Committee Duties and Responsibilities

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee cover two areas, namely remuneration and nomination, including:

Related to remuneration

1. *Evaluating the remuneration policy.*
2. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
   a. Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS).
   b. Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors
3. *Ensure that the remuneration policy is at least in line with:*
   a. Financial performance and fulfillment of reserves as regulated in the applicable laws and regulations.
   b. Individual work performance.
   c. Fairness with peer groups.
   d. The Bank's long-term balance and strategy.

Related to the nomination field

1. *Prepare and provide recommendations regarding the system and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
2. *Provide recommendations regarding candidates for members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
3. *Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the Committee to the Board of Commissioners.*

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Independence of the Remuneration and Nomination Committee

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Independence Table

Aspek Independensi	Taufiqurrahman*	Rita Anugerah	Syahrial Abdi**	Muhammad Affan	*Independence Aspect*
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	*Has no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors*
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	*Does not have a management relationship in the company, subsidiary, or affiliated company*
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	√	√	√	√	*Does not have a share ownership relationship in the company*
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	√	√	√	√	*Does not have a family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Nomination and Remuneration Committee*
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	X	√	*Do not serve as administrators of political parties, officials and government*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021 | ** Term of office expires on 03 March 2021*
** Merupakan Komisaris Non Independen yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah (Provinsi Riau) | *** Is a Non-Independent Commissioner who comes from elements of the Regional Government (Riau Province)*

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Structure, Membership and Expertise of the Remuneration and Nomination Committee

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Structure, Membership and Expertise

Nama *Name*	Jabatan *Position*	SK Penetapan *Decree of Determination*	Keahlian *Skill*
Taufiqurrahman*	Komisaris Independen/ Ketua Komite *Independent Commissioner/ Committee Chairman*	SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019 *Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 August 19, 2019*	- Manajemen Risiko - Bisnis internasional - Pengajar Akademik - Trainer NCEE *- Risk management* *- International business* *- Academic Lecturer* *- NCEE Trainers*
Rita Anugerah**	Komisaris Independen/ Anggota Komite dan Ketua Komite *Independent Commissioner/ Committee Member and Committee Chairman*	SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019 *Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 August 19, 2019*	- Manajemen Risiko - Akuntan Profesional - Perpajakan - Pengajar akademik *- Risk management* *- Professional Accountant* *- Taxation* *- Academic teacher*
Syahrial Abdi***	Komisaris Non Independen/ Anggota Komite *Independent Non Commissioner/ Committee Member*	SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021*	Bidang Pemerintahan *Government Sector*
Muhammaad Affan	Pemimpin Divisi MSDM/Anggota Komite *HRM Division Leader/Committee Member*	SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021 *Decree No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 dated January 11, 2021*	- Manajemen Risiko - HR Certified - Perkreditan *- Risk management* *- HR Certified* *- Credit*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021 | ** Term of office expires on March 03, 2021*
** Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 18 Mei 2021 | *** Became the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021*
*** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris per tanggal 15 November 2021 | ****Appointed as Member of the Board of Commissioners as of November 15, 2021*

TAUFIQURRAHMAN *

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Leader

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan : 04 Maret 2017 s/d 03 Maret 2021

Riwayat Penunjukan : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.04 Tanggal 4 Maret 2017 dan Surat OJK No. SR-122/KO.053/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko : SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report

Term of Office : *04 March 2017 to 03 March 2021*

Appointment History : *Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No. 04 dated March 4, 2017 and OJK Letter No. SR-122/KO.053/2017 dated June 22, 2017.*

Basis for Appointment as Chairman of the Risk Monitoring Committee : *Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 dated August 19, 2019*

** Term of office expires on 03 March 2021*

RITA ANUGERAH*

Anggota dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Member and Chair of the Remuneration and Nomination Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan : 19 Agustus 2019 s/d 18 Agustus 2023

Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris : Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Akta No.09 tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019.

Dasar Penetapan sebagai Anggota KomiteRemunerasi dan Nominasi : SK Direksi Nomor 067/KEPDIR/2019 tanggal 19 Agustus 2019

Dasar Penetapan sebagai Ketua KomiteRemunerasi dan Nominasi : SK Direksi Nomor 035/KEPDIR/2021 tanggal 18 Mei 2021 dan SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021

* Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 18 Mei 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report

Term of Office: *August 19, 2019 to August 18, 2023*

Basis of Appointment as Member of the Board of Commissioners : *Based on the Statement of Shareholders' Decision Deed No.09 dated 19 August 2019 and OJK Letter No. SR-106/KO.053/2019 dated September 5, 2019.*

Basis for Appointment as Member of the Remuneration and Nomination Committee : *Decree of the Board of Directors Number 067/KEPDIR/2019 dated August 19, 2019*

Basis for Appointment as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee : *Decree of the Board of Directors Number 035/KEPDIR/2021 dated May 18, 2021 and Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021*

** Became Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021*

SYAHRIAL ABDI*

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Member

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini

Periode Jabatan : 15 November 2021 s/d 14 November 2025

Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris : Berdasarkan Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Riau Kepri dan Surat OJK Nomor No. S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Dasar Penetapan sebagai Anggota KomiteRemunerasi dan Nominasi : SK Direksi Nomor 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021.

* Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 18 Mei 2021

His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of this Annual Report

Term of Office: *November 15, 2021 to November 14, 2025*

Basis of Appointment as Member of the Board of Commissioners : *Based on the Notary Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Bank Riau Kepri and OJK Letter No. S-492/KO.053/2021 dated December 23, 2021.*

Basis for Appointment as Member of the Remuneration and Nomination Committee : *Decree of the Board of Directors Number 087/KEPDIR/2021 dated November 22, 2021.*

* *Became Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021*

MUHAMMAD AFFAN

Pemimpin Divisi MSDM/ Anggota Komite
HRM Division Leader/ Committee Member

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Domisili : Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia : Cengar, 11 Juni 1970
Riwayat Pendidikan : Menyelesaikan Studi di Bidang Ekonomi Pembangunan dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau (UNRI) pada Tahun 1994.
Pengalaman Kerja : Bergabung di Bank Riau Kepri mulai Tahun 1996. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai :

- Pemimpin Cabang Pembantu Baserah (2009 s/d 2011)
- Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Dalam (2011 s/d 2014)
- Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (2014 s/d 2017)
- Pemimpin Cabang Bangkinang (2017 s/d 2019)
- Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah (2019 s/d 2021)
- Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (2021 s/d sekarang)

Dasar Pengangkatan : SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021
Periode Menjabat 21-01-2021 s/d sekarang

Nationality : *Indonesian Citizen*
Domicile : *Pekanbaru, Riau*
Place and Date of Birth/Age : C*engar, June 11, 1970*
Educational History : *Completed Studies in Development Economics and earned a Bachelor's degree from the University of Riau (UNRI) in 1994.*
Work Experience : *Joined Bank Riau Kepri starting in 1996. Some of the positions he has held include:*

- *Baserah Sub-Branch Leader (2009 s/d 2011)*
- *Lubuk Dalam Sub-Branch Leader (2011 to 2014)*
- *Kuantan Bay Branch Manager (2014 to 2017)*
- *Bangkinang Branch Manager (2017 to 2019)*
- *Micro, Small & Medium Division Leader (2019 to 2021)*
- *Head of Human Resources Management Division (2021 to present)*

Basis of Appointment : *Decree No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 dated January 11, 2021*
Serving Period *21-01-2021 until now*

Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Educational Qualifications and Work Experience of the Remuneration and Nomination Committee

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Educational Qualifications and Work Experience of the Remuneration and Nomination Committee

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Pendidikan *Education*	Pengalaman Kerja *Work experience*
Taufiqurrahman*	Komisaris Independen/ Ketua Komite *Independent Commissioner/ Chairman of the Committee*	- M.SC dibidang International Business dari The University Of Salford, UK - M.Phil dari The Masstricht School of Management - *M.SC in International Business from The University Of Salford, UK* - *M.Phil from The Masstricht School of Management*	- Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak Maret Tahun 2017 hingga Maret 2021 - Dosen di Universitas Riau - *Served as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since March 2017 to March 2021* - *Lecturer at Riau University*
Rita Anugerah**	Komisaris Independen/ Anggota Komite/Ketua Komite *Independent Commissioner/ Committee Member/ Chairman of the Committee*	- Doctor Business Administration (DBA), Universiti Kebangsanaan Malaysia, 2005 - Profesor, Universitas Riau, 2019 - *Doctor Business Administration (DBA), Universiti Kebangsana Malaysia, 2005* - *Professor, Riau University, 2019*	- Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Riau Kepri sejak Maret Tahun 2019 hingga sekarang - Dosen di Universitas Riau - *Served as Independent Commissioner of Bank Riau Kepri since March 2019 until now* - *Lecturer at Riau University*
Syahrial Abdi***	Komisaris Non Independen/ Anggota Komite *Independent Non Commissioner/ Committee Member*	- Lulusan STPDN (Ilmu Pemerintahan) - Magister Manajemen Pemerintahan Daerah - *Graduated from STPDN (Government Science)* - *Master in Regional Government Management*	- Menjabat sebagai Komisaris Utama (Komisaris Non Independen) Bank Riau Kepri sejak November tahun 2021 hingga sekarang. - Menjabat sebagai Kepala Bapenda Provinsi Riau sejak Desember 2021 hingga sekarang - *Served as President Commissioner (Non Independent Commissioner) of Bank Riau Kepri since November 2021 until now.* - *Served as Head of Bapenda Riau Province since December 2021 until now*
Muhammad Affan	Pemimpn Divisi MSDM/ Anggota Komite *HRM Division Leader/ Committee Member*	Sarjana Ekonomi di Universitas Riau, 1994 *Bachelor of Economics at Riau University, 1994*	Menjabat Pemimpin Divisi MSDM sejak Januari 2021 *Served as Head of HR Division since January 2021*

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021 | ** Term of office expires on March 03, 2021*
** Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 18 Mei 2021 | *** Became the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021*
*** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris per tanggal 15 November 2021 | ****Appointed as Member of the Board of Commissioners as of November 15, 2021*

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang Tahun 2021, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut.

Remuneration and Nomination Committee Meeting

Throughout 2021, the implementation date, meeting agenda and meeting participants of the Remuneration and Nomination Committee are as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Remuneration and Nomination Committee Meeting Agenda

No	Tanggal *Date*	Agenda Rapat *Meeting Agenda*	Peserta *Participant*
1	04 Februari 2021 *February 04 2021*	Membahas Pergantian Anggota *Ex Officio* Komite Remunerasi Nominasi PT Bank Riau Kepri *Discussing the Change of Ex Officio Members of the Nomination Remuneration Committee of PT Bank Riau Kepri*	Taufiqurrahman Rita Anugerah Muhammad Affan
2	15 September 2021 *September 15, 2021*	Tindak Lanjut Surat Somasi Armilis Ramaini Advocates and Law Consultan *Follow-up to Armilis Ramaini's Summons for Advocates and Law Consultants*	Rita Anugerah Muhammad Affan

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi

Frequency and Attendance of Remuneration and Nomination Committee Meetings

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Attendance at Remuneration and Nomination Committee Meetings

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi *Remuneration and Nomination Committee Meeting*		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran *Attendance Number and Percentage*		
		Jumlah Rapat *Number of Meetings*	Jumlah Kehadiran *Number of Attendance*	Persentase *Percentage*
Taufiqurrahman*	Ketua *Chairman*	1	1	100 %
Rita Anugerah**	Anggota/Ketua *Member/Chairman*	2	2	100 %
Syahrial Abdi***	Anggota *Member*	0	0	0 %
Muhammad Affan	Anggota *Member*	2	2	100 %

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021 | ** Term of office expires on March 03, 2021*
** Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 18 Mei 2021 | *** Became the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021*
*** Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris per tanggal 15 November 2021 | ****Appointed as Member of the Board of Commissioners as of November 15, 2021*

Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang Tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Pergantian Anggota *Ex Officio* Komite Remunerasi Nominasi PT Bank Riau Kepri.
2. Rekomendasi atas Tindak Lanjut Surat Somasi Armilis Ramaini *Advocates and Law Consultan*.

Remuneration and Nomination Committee Recommendations

Throughout 2021, the Remuneration and Nomination Committee made several recommendations, including the following:

1. *Recommendation on the Change of Ex Officio Members of the Nomination Remuneration Committee of PT Bank Riau Kepri.*
2. *Recommendations on the Follow-up to the Summons of Armilis Ramaini Advocates and Law Consultants.*

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

ORGANS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan Bank Riau Kepri memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya citra positif Bank Riau Kepri. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara Bank, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan publik.

COMPANY SECRETARY

The Corporate Secretary of Bank Riau Kepri has an important role in supporting the creation of a positive image of Bank Riau Kepri. The Corporate Secretary facilitates effective communication and ensures the availability of information for various parties and acts as the main liaison between the Bank, the Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange and the public.

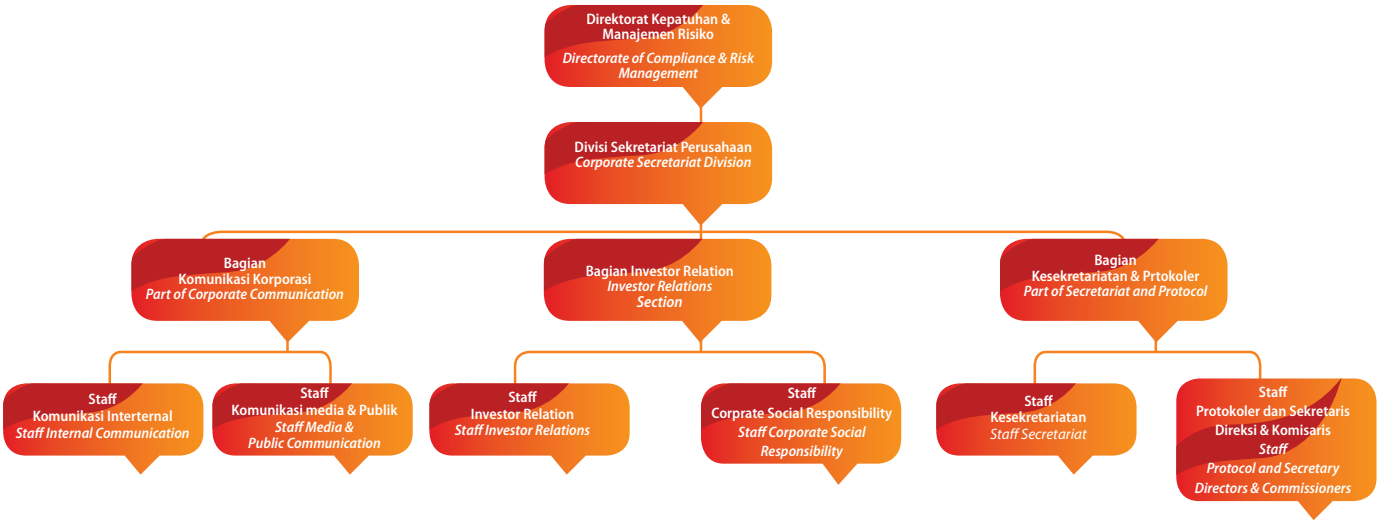
STRUKTUR SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam struktur organisasi Perusahaan, Sekretaris Perusahaan merupakan unit kerja setingkat satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Berikut struktur organisasi Sekretaris Perusahaan.

STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARY

In the organizational structure of the Company, the Corporate Secretary is a unit-level work unit which is under and responsible to the President Director. The following is the organizational structure of the Corporate Secretary.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARIAT DIVISION



FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan laporan yang dibutuhkan stakeholders secara up to date, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Mengelola informasi dan dokumentasi serta mengadministrasikan dokumen Bank seperti akta RUPS, perjanjian kerjasama/MoU, risalah rapat Direksi dan Komisaris, dan kebijakan internal Bank.
4. Melaksanakan fungsi Corporate Legal dan Humas sebagai single contact point hubungan antara Bank dengan berbagai stakeholders (Pemegang Saham, Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya).
5. Mengelola hubungan dengan media agar dapat berjalan dengan baik sehingga konsistensi pesan dan citra perusahaan dapat terus terbentuk.
6. Mengkoordinir penyusunan dan penyampaian proposal penambahan setoran modal atau saham kepada Pemegang Saham dan memonitor setoran modal atau saham.
7. Pengelolaan Dana Kemitraan dan/atau Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan memantau pelaksanaan Program Kemitraan dan Corporate Social Responsibility (CSR).
8. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian Laporan Tahunan (Annual Report) Bank.
9. Mengkoordinasikan penyusunan Corporate Identity Bank.

FUNCTIONS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CORPORATE SECRETARY

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary, among others are as follows:

1. *Provide up to date, correct and accountable reports required by stakeholders.*
2. *Carry out the function as Corporate Secretary.*
3. *Manage information and documentation as well as administering Bank documents such as deed of GMS, cooperation agreement/MoU, minutes of meetings of the Board of Directors and Commissioners, and Bank's internal policies.*
4. *Carry out Corporate Legal and Public Relations functions as a single contact point for relations between the Bank and various stakeholders (Shareholders, Regional Governments and other related parties).*
5. *Manage relationships with the media so that they can run well so that the consistency of the message and company image can continue to be formed.*
6. *Coordinate the preparation and submission of proposals for additional paid-in capital or shares to Shareholders and monitors paid-in capital or shares.*
7. *Management of the Partnership Fund and/or Social and Environmental Responsibility Fund, and monitoring the implementation of the Partnership and Corporate Social Responsibility (CSR) Program.*
8. *Coordinate the preparation, issuance and distribution of the Bank's Annual Report.*
9. *Coordinate the preparation of the Bank's Corporate Identity.*

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY PROFILE

Wahyudi Gustiawan Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan *Head of Corporate Secretariat Division*	
Kewarganegaraan *Noun*	Warga Negara Indonesia
Domisili *Domicile*	Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia *Place and Date of Birth/Age*	Lahir di Teluk Pinang, 20 Agustus 1975. Usia 46 tahun per 31 Desember 2021 *Born in Teluk Pinang, August 20, 1975. Age 46 as of December 31, 2021*
Riwayat Pendidikan *Educational History*	Menyelesaikan Studi di bidang Manajemen dan meraih gelar Sarjana dari STIE RIAU tahun 2005 *Completed Studies in Management and earned a Bachelor's degree from STIE RIAU in 2005*
Pengalaman Kerja *Work experience*	Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 2000. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain : - Pemimpin Bagian Kredit Cabang Utama (2008 s/d 2010) - Pemimpin Bagian Divisi Hukum dan Corsec (2010 s/d 2014) - Pemimpin Cabang Air Molek (2014 s/d 2017) - Pemimpin Cabang Pekanbaru (2017 s/d 2018) - Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa (2018 s/d 2019) - Pemimpin Divisi Umum (2019 s/d 2020) - Pemimpin Divisi Keuangan dan Operasional (2021) - Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (2021 s/d 11 Februari 2022) *Joined Bank Riau Kepri starting in 2000. Several positions he has held include:* *- Head of Main Branch Credit Division (2008 s/d 2010)* *- Head of Legal and Corsec Division (2010 to 2014)* *- Air Molek Branch Manager (2014 to 2017)* *- Pekanbaru Branch Manager (2017 to 2018)* *- Head of Fund Products & Services Division (2018 to 2019)* *- General Division Leader (2019 to 2020)* *- Head of Finance and Operations Division (2021)* *- Head of Corporate Secretariat Division (2021 to 11 February 2022)*
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis of Appointment*	SK No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 11 Januari 2021 *Decree No. 04/KEPDIR/MSDM/2021 dated January 11, 2021*
Periode Menjabat' *Serving Period*	21-01-2021 s/d 11 Februari 2022 *21-01-2021 to 11 February 2022*

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan tahun 2021

1. Membuat laporan-laporan baik yang bersifat internal maupun eksternal menyangkut Sekretariat Perusahaan.
2. Menyediakan laporan yang dibutuhkan ***stakeholders*** secara ***up to d***ate, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melaksanakan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Media Komunikasi Bank.
4. Menyampaikan laporan berkala kepada regulator antara lain Laporan Tahunan (***Annual Report***), Laporan Keberlanjutan (***Sustainability Report***), dan laporan lainnya.
5. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
6. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya.

Implementation of Corporate Secretary Duties in 2021

1. *Make reports both internal and external regarding the Company Secretariat.*
2. *Provide up to date, correct and accountable reports required by stakeholders.*
3. *Implement information disclosure to the public, including the availability of information on the Bank's Communication Media.*
4. *Submit periodic reports to regulators, including Annual Reports, Sustainability Reports, and other reports.*
5. *Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders.*
6. *Organizing and documenting the meetings of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners as well as compiling and administering the minutes of the meeting.*

7. Melaksanakan program orientasi terhadap perusahaan bagi anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang baru.
8. Mengelola hubungan dengan media agar dapat berjalan dengan baik sehingga konsistensi pesan dan citra perusahaan dapat terus terbentuk.
9. Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan ***Stakeholders*** lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
10. Memberikan informasi secara aktual terhadap ***issue*** yang berkembang, baik yang bersifat positif maupun negatif kepada stakeholders termasuk media.
11. Menyiapkan ***press release*** dan pidato untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
12. Menjadi juru bicara perusahaan terkait dengan aktivitas perusahaan.
13. Mengkoordinir penyusunan dan penyampaian proposal penambahan setoran modal atau saham kepada Pemegang Saham.
14. Memonitor kegiatan penerbitan sertifikat kolektif saham Bank.
15. Memonitor setoran modal atau saham.
16. Mengelola Dana Kemitraan dan/ atau Dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan memantau pelaksanaan Program Kemitraan dan kepedulian sosial (***corporate social responsibility*** (***CSR***)) serta ***sponsorship*** korporasi sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (***stakeholders***).
17. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian Annual Report dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) bekerjasama dengan unit kerja terkait.
18. Mengelola termasuk mengkinikan dan publikasi secara reguler :
19. Media Komunikasi internal, seperti: majalah internal Bank dan lain-lain
20. Media Komunikasi Eksternal, seperti: ***website,*** media sosial Bank dan lain-lain.
21. Laporan-laporan dan informasi lainnya yang wajib dimuat/ dipublikasikan di media komunikasi Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Mendesign secara kreatif pengelolaan media komunikasi perusahaan.
23. Mengkoordinasikan proses pemanfaatan media komunikasi untuk peningkatan corporate image perusahaan, baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun media luar ruang (***billboard***).
24. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Protokoler, Sekretaris Dewan Komisaris dan Direksi.
25. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dan RUPS/LB (lokasi, undangan, ***rundown*** acara, notulen rapat, sosialisasi hasil rapat, dokumentasi rapat).
26. Mendampingi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang melibatkan kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris.

7. Carry out an orientation program towards the company for new members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
8. Manage relationships with the media so that they can run well so that the consistency of the message and company image can continue to be formed.
9. Provide services to Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other Stakeholders for information related to the condition of the company.
10. Provide actual information on developing issues, both positive and negative, to stakeholders including the media.
11. Prepare press releases and speeches for the Board of Directors and the Board of Commissioners.
12. Become a spokesperson for the company related to company activities.
13. Coordinate the preparation and submission of proposals for additional paid-in capital or shares to Shareholders.

14. Monitor the activities of issuing collective certificates of Bank shares.
15. Monitor paid-in capital or shares.
16. Manage the Partnership Fund and/or the Social and Environmental Responsibility Fund (TJSL) and monitor the implementation of the Partnership Program and corporate social responsibility (CSR) as well as corporate sponsorship as an effort to provide guidance with stakeholders.
17. Coordinate the preparation, publication and distribution of Annual Reports and Sustainability Reports in collaboration with related work units.

18. Managing including updating and publishing regularly:

19. Internal Communication Media, such as: the Bank's internal magazine and others
20. External Communication Media, such as: website, Bank social media and others.
21. Reports and other information that must be published/ published in the Bank's communication media based on the prevailing laws and regulations.

22. Designing creatively managing the company's communication media.
23. Coordinate the process of utilizing communication media to improve the company's corporate image, both in print, electronic and outdoor media (billboards).

24. Coordinate the duties and functions of the Protocol, Secretary to the Board of Commissioners and the Board of Directors.
25. Coordinate the implementation of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and GMS/LB meetings (location, invitation, event rundown, meeting minutes, socialization of meeting results, meeting documentation).
26. Accompany and document all activities involving the presence of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

27. Mengadministrasikan dokumen-dokumen aktif bank termasuk semua surat masuk dan keluar dalam rangka pengarsipan.
28. Mengkoordinasikan administrasi dan distribusi seluruh surat atau dokumen masuk yang ditujukan kepada Bank untuk ditindaklanjuti dan memastikan seluruh surat atau dokumen yang membutuhkan tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan oleh unit yang terkait.
29. Mengikuti pelatihan/ workshop untuk peningkatan kompetensi terkait bidang tugasnya.
30. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Divisi Sekretariat Perusahaan.

27. Administering active bank documents including all incoming and outgoing letters for filing.

28. Coordinate the administration and distribution of all incoming letters or documents addressed to the Bank for follow-up and ensure that all letters or documents that require such follow-up have been carried out by the relevant unit.
29. Participate in training/workshops to improve competence related to their field of work.
30. Carry out other duties assigned by the Board of Directors, especially with regard to the implementation of the duties of the Corporate Secretariat Division.

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan tahun 2021
Corporate Secretary Competency Improvement Program in 2021

Nama *Name*	**Judul Pelatihan** *Training Title*	**Penyelenggara** *Organizer*	**Tanggal dan Tahun Pelaksanaan** *Implementation Date and Year*
Wahyudi Gustiawanl	Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive *Training of Trainer (ToT) Islamic Banking For Executive*	Karim Consulting Indonesia *Karim Consulting Indonesia*	08/04/2021
	Sosialisasi Pedoman Iklan dan Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan *Socialization of Advertising Guidelines and Standard Agreements for the Financial Services Sector*	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Financial Services Authority (OJK)*	11/06/2021
	Zoominar Indonesia Corpsecr & Corp Comm Award-VI-2021 *Zoominar Indonesia Corpsecr & Corp Comm Award-VI-2021*	Economic Review *Economic Review*	11/06/2021
	Seminar Online Leading Unprecedented Time Memanfaatkan Relaksasi Restrukturisasi Kredit Jilid 3 dan Award *Leading Unprecedented Time Online Seminar Utilizing Loan Restructuring Relaxation Volume 3 and Award*	Infobank Institute *Infobank Institute*	07/09/2021
	Training Leadership ' Mindset Transformation of Sharia Bankers ' for Executive *Training Leadership ' Mindset Transformation of Sharia Bankers ' for Executive*	Bank Riau Kepri *Riau Kepri Bank*	02/10/2021
	Workshop kebijakan Keterbukaan Informasi Publik & Publik Relation *Workshop on Public Information Disclosure & Public Relations*	Bank Riau Kepri *Riau Kepri Bank*	26/11/2021
	Workshop Outlook Perbankan Syariah; Optimalisasi Ekosistem Bisnis & Keuangan Syariah II *Sharia Banking Outlook Workshop; Optimization of Islamic Finance & Business Ecosystem II*	Muamalat Institute *Institute Muamalat*	07/12/2021

DIVISI INTERNAL AUDIT

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, ditetapkan bahwa Bank wajib menerapkan fungsi audit intern Bank, untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini Auditor Intern mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara on-site dan pemantauan secara off-site serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang di-review kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, Divisi Internal Audit harus mampu mengidentifikasikan segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana yang ada.

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis dan operasional, sejak awal Bank Riau Kepri telah membentuk unit kerja yang menjalankan fungsi audit intern yaitu Divisi Internal Audit untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern, serta kualitas kinerja manajemen pada seluruh aspek atau kegiatan Bank.

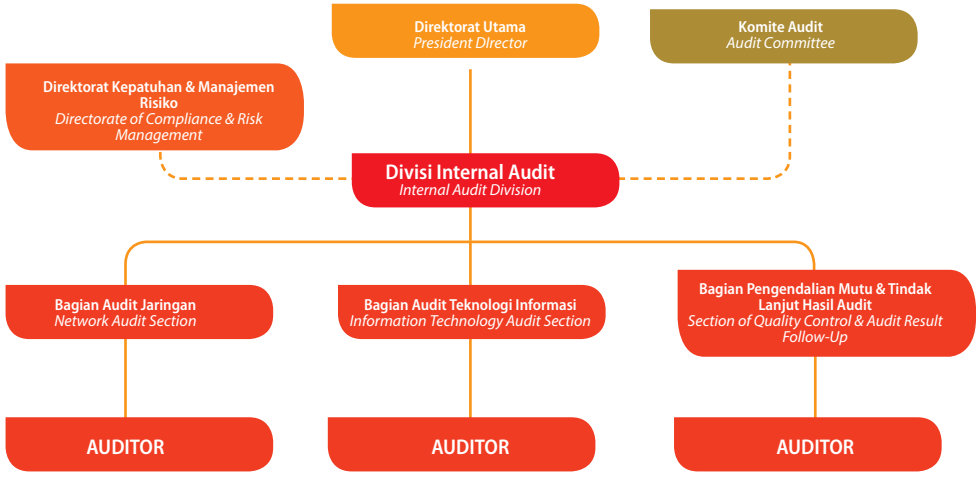
INTERNAL AUDIT DIVISION

In the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks, it is stipulated that Banks are required to implement the Bank's internal audit function, to assist the President Director and the Board of Commissioners by operationally describing the planning, implementation and monitoring of audit results. In carrying out this, the Internal Auditor represents the views and interests of his profession by conducting analysis and research in the fields of finance, accounting, operations and other activities through on-site inspections and off-site monitoring as well as providing suggestions for improvement and objective information on activities carried out. -review to all levels of management. In addition, the Internal Audit Division must be able to identify all possibilities to improve and increase the efficiency of the use of existing resources and funds.

In carrying out business and operational activities, since the beginning, Bank Riau Kepri has established a work unit that carries out the internal audit function, namely the Internal Audit Division to conduct inspections and assessments of the adequacy and effectiveness of the internal control structure, as well as the quality of management performance in all aspects or activities of the Bank.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI INTERNAL AUDIT

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI INTERNAL AUDIT



KEDUDUKAN DIVISI INTERNAL AUDIT DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan SK Direksi No. Nomor 053/KEPDIR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, Divisi Internal Audit (DIA) dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. DIA memiliki 3 (tiga) bagian di bawahnya, yaitu Bagian Audit Jaringan, Bagian Audit Teknologi Informasi dan Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit.

POSITION OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION IN THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Based on the Decree of the Board of Directors No. Number 053/KEPDIR/2021 dated August 9, 2021 regarding the Organizational Structure and Work Procedure (SOT) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, the Internal Audit Division (DIA) is led by a Division Leader who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to Financial Fervices Authority. DIA has 3 (three) sections under it, namely the Network Audit Section, the Information Technology Audit Section and the Quality Control & Audit Result Follow-up Section.

PROFIL PEMIMPIN DIVISI INTERNAL AUDIT

PROFILE OF INTERNAL AUDIT DIVISION LEADERS

Heru Kurniawan Pemimpin Divisi Internal Audit	
Kewarganegaraan *Noun*	Indonesia *Indonesian citizens*
Domisili *Domicile*	Pekanbaru, Riau *Pekanbaru, Riau*
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia *Place and Date of Birth/Age*	Selat Panjang, 2 Juli 1967 *Selat Panjang, July 2, 1967*
Usia Age	54 Tahun *54 years old*
Riwayat Pendidikan *Educational History*	Sarjana di bidang Akuntansi di Universitas Islam Riau tahun 2000, menyelesaikan Program pasca sarjana prodi Manajemen di Universitas Riau Tahun 2014. *Bachelor degree in Accounting at the Islamic University of Riau in 2000, completed the Postgraduate Program in Management at the University of Riau in 2014.*
Pengalaman Kerja *Work experience*	Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak tahun 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat diantaranya Pemimpin Cabang Pembantu Lubuk Baja, Pemimpin Bagian Divisi Treasury & Internasional, Pemimpin Bagian Divisi Perencanaan Strategis, Pemimpin Bagian Operasional, Pemimpin Divisi Manajemen Risiko dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin DIA. *Started his career at Bank Riau Kepri since 1994. Several positions he has held include Head of Sub-Branch Lubuk Baja, Head of Treasury & International Division, Head of Strategic Planning Division, Head of Operations Division, Head of Risk Management Division and lastly served as Head of DIA.*
Dasar Hukum Pengangkatan *Legal Basis of Appointment*	SK No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 tanggal 04 Juli 2019 *Decree No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 dated 04 July 2019*

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Divisi Internal Audit (DIA) dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pengangkatan Pemimpin DIA berdasarkan SK No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 tanggal 04 Juli 2019. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin DIA tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

PARTIES WHO APPOINTED AND REMOVED THE HEAD OF THE INTERNAL SUPERVISION UNIT

The Internal Audit Division (DIA) is led by a Division Leader who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. Appointment of DIA Leaders based on Decree No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 dated 04 July 2019. The appointment and dismissal of the DIA Leader is reported to the Financial Services Authority.

Pemimpin DIA bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit. Direktur Utama dapat memberhentikan Pemimpin DIA setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, apabila Pemimpin DIA tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Audit Internal atau gagal/tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

The DIA leader is responsible to the President Director and can communicate directly with the Board of Commissioners to inform various matters relating to the audit results. The President Director may dismiss the DIA Leader after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the DIA Leader does not meet the requirements as an Internal Audit auditor or fails/incompetent in carrying out his duties.

INTERNAL AUDIT *CHARTER*

Dalam melakukan tugasnya, DIA berpedoman pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Divisi Internal Audit yang tertuang di dalam SK Direksi Nomor 012A/KEPDIR/2021 tanggal 26 Februari 2021 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Divisi Internal Audit, yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan Standar Profesional Audit Intern (SPAI) sebagai pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) Bank Riau Kepri ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 012B/ KEPDIR/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Piagam Audit Intern PT Bank Riau Kepri yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur dan Kedudukan Divisi Internal Audit
2. Visi dan Misi Divisi Internal Audit
3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Internal Audit
4. Wewenang Divisi Internal Audit
5. Kode Etik
6. Independensi dan Obyektifitas
7. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Divisi Internal Audit
8. Persyaratan dan Pengembangan Auditor Divisi Internal Audit
9. Perlindungan Hukum
10. Program Pengendalian Mutu Audit
11. Hubungan Divisi Internal Audit dengan Auditor Eksternal
12. *Review*
13. Penggunaan Jasa Pihak Eksternal

INTERNAL AUDIT CHARTER

In carrying out its duties, DIA is guided by the Company Manual (BPP) of the Internal Audit Division as stated in the Decree of the Board of Directors Number 012A/KEPDIR/2021 dated February 26, 2021 concerning the Company Manual (BPP) of the Internal Audit Division, which in its preparation still refers to the Regulations. Financial Services Authority (POJK) No. 1/POJK.03/2019 dated January 28, 2019 regarding the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks and the Internal Audit Professional Standards (SPAI) as the implementation of a professional internal audit as determined by the internal audit professional association, including guidelines for implementing standards. The Internal Audit Charter of Bank Riau Kepri was stipulated through the Decree of the Board of Directors Number 012B/ KEPDIR/2021 dated February 26, 2021 concerning the Internal Audit Charter of PT Bank Riau Kepri which contained the following matters:

1. *Structure and Position of the Internal Audit Division*
2. *Vision and Mission of the Internal Audit Division*
3. *Duties and Responsibilities of the Internal Audit Division*
4. *Authority of the Internal Audit Division*
5. *Code of Ethics*
6. *Independence and Objectivity*
7. *Objectives and Scope of Activities of the Internal Audit Division*
8. *Internal Audit Division Auditor Requirements and Development*
9. *Legal protection*
10. *Audit Quality Control Program*
11. *Relationship between Internal Audit Division and External Auditor*
12. *Review*
13. *Use of External Party Services*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI INTERNAL AUDIT

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan SK Direksi No.053/ KEPDIR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, Piagam Audit Intern dan BPP Divisi Internal Audit PT Bank Riau Kepri, Divisi Internal Audit memiliki tugas pokok sebagai berikut:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION

Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks and the Board of Directors Decree No.053/KEPDIR/2021 dated 09 August 2021 concerning the Organizational Structure and Work Procedures (SOT) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, Charter Internal Audit and BPP Internal Audit Division of PT Bank Riau Kepri, Internal Audit Division has the following main tasks:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Melakukan audit sesuai dengan rencana tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh sumber daya Bank, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan Bank, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya (***risk based***). Yang pelaksanaan auditnya bisa dilakukan secara ***onsite*** (dilakukan audit lapangan ditempat auditee) atau dilakukan secara ***remote audit*** (pelaksanaan audit tidak dilakukan di tempat auditee, namun dilakukan di kantor pusat dengan pertimbangan tertentu, misalnya hasil ***risk assessment*** auditee adalah ***Low,*** pemantauan selama periode audit tidak dijumpai / ditemukan hal – hal yang bersifat kritikal dan berpotensi adanya ***fraud***);
6. Melakukan audit terhadap hal-hal diluar rencana yang dimaksud pada butir di atas atau atas dasar permintaan pihak internal mapun eksternal yang berwenang atau atas dasar inisiatif Divisi Internal Audit yang telah disetujui sebelumnya oleh Direktur Utama Bank;
7. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak intern Bank untuk memberikan nilai tambah sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai telah tersedia serta tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Divisi Internal Audit;

Selanjutnya tanggung jawab Divisi Internal Audit adalah:
1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan terdiri dari pelaksanaan Audit Dan Konsultasi ;
2. Melaporkan Realisasi Rencana Kerja Tahunan untuk audit dan Konsultasi kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
3. Melaporkan pelaksanaan dan pokok – pokok hasil audit intern secara semesteran;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh bank;
5. Memastikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko dan kontrol internal pada seluruh aktivitas yang ada di bank;
6. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan;
7. Menyusun Laporan Hasil Audit dan menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;

1. Assisting the duties of the President Director and the Board of Commissioners in carrying out supervision by explaining operationally the planning, implementation, and monitoring of audit results;
2. Make analysis and assessment in the fields of finance, accounting, operations, and other activities through audits;
3. Identify all possibilities to improve and increase the efficiency of the use of resources and funds;

4. Provide improvement suggestions and objective information on the activities examined at all levels of management;
5. Conduct audits in accordance with the annual plan that has been approved by the President Director and the Board of Commissioners of all Bank resources, including other organizations affiliated with the Bank, which are determined by taking into account the level of risk (risk based). The audit can be carried out onsite (a field audit at the auditee's place) or remote audit (the audit is not carried out at the auditee's place, but is carried out at the head office with certain considerations, for example, the auditee's risk assessment result is low, monitoring during the audit period is not sufficient). found / found things that are critical and potentially fraudulent);

6. Conduct audits on matters outside the plan as referred to in the points above or at the request of the authorized internal or external parties or on the basis of the initiative of the Internal Audit Division which has been previously approved by the President Director of the Bank;

7. Provide consulting services to the Bank's internal parties to provide added value as long as competent and adequate resources are available and do not affect the independence and objectivity of the Internal Audit Division;

Furthermore, the responsibilities of the Internal Audit Division are:
1. Prepare and implement the Annual Work Plan consisting of the implementation of Audit and Consultation;
2. Report the realization of the Annual Work Plan for audits and consultations to the President Director and the Board of Commissioners periodically in accordance with the stipulated time;
3. Report the implementation and the main results of the internal audit on a semester basis;
4. Conduct inspections and assessments of the efficiency and effectiveness of the financial, accounting, operational, human resources, information technology and other activities carried out by the bank;

5. Ensure and evaluate the implementation of risk control and internal control in all activities in the bank;

6. Provide recommendations on the results of the examination;
7. Prepare the Audit Result Report and submit it to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director;

8. Melakukan aktivitas konsultasi atas pemintaan unit kerja dalam rangka memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas manajemen risiko dan pengendalian internal serta tata kelola sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan ojektivitas serta sumber daya yang diperlukan tersedia;
9. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit dan melaporkan realisasinya secara periodik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
10. Melaporkan dengan segera kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris terhadap adanya temuan audit yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha bank;
11. Berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan pemrosesan kasus;
12. Memberikan masukan dan review terhadap kebijakan atau prosedur baru yang akan diberlakukan oleh manajemen;
13. Menyusun kebijakan dan prosedur Divisi Internal Audit sebagai pedoman pelaksanaan tugas Auditor serta melakukan review untuk keperluan penyempurnaan;
14. Mengajukan anggaran tahunan dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
15. Menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pokok Pokok Hasil Audit dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris ;
16. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
17. Menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah;
18. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan Jasa Pihak Ekstern untuk aktivitas audit intern telah terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota Divisi Internal Audit. Mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;
19. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern tidak memengaruhi independensi dan obyektifitas fungsi Divisi Internal Audit;
20. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas Audit intern telah mematuhi piagam Audit Intern Bank;
21. Menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara professional dan skeptis;
22. Menyusun kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota Divisi Internal Audit dan pihak ekstern.

8. Carry out consulting activities at the request of the work unit in order to provide added value and improve the quality of risk management and internal control as well as governance as long as it does not affect the independence and objectivity and the necessary resources are available;

9. Monitoring the follow-up on audit results and reporting on their realization periodically in accordance with the stipulated time;
10. Report immediately to the President Director and the Board of Commissioners on audit findings that have the potential to disrupt the bank's business activities;
11. Actively participate in the improvement of case processing;
12. Provide input and review on new policies or procedures that will be implemented by management;

13. Develop policies and procedures for the Internal Audit Division as a guide for the implementation of the duties of the Auditor and conduct reviews for improvement purposes;
14. Submit an annual budget and report its realization to the President Director periodically in accordance with the stipulated time;
15. Prepare the Implementation Report and Principal Audit Results and submit it to the Financial Services Authority after being signed by the President Director and the Board of Commissioners;
16. Reporting the results of follow-up monitoring of improvements on significant findings to the Board of Directors and the Board of Commissioners, with copies to the Audit Committee and the Director in charge of the compliance function;
17. Submit findings related to the implementation of compliance with Sharia principles to the Sharia Supervisory Board;
18. Ensure that in the event of use of External Party Services for internal audit activities, knowledge transfer has been carried out between external parties to members of the Internal Audit Division. Considering that the use of external party expert services is temporary;

19. Ensure that the use of external party services for internal audit activities does not affect the independence and objectivity of the Internal Audit Division function;

20. Ensuring that in the event of the use of external party services for internal Audit activities, the Bank has complied with the Bank's Internal Audit charter;
21. Apply knowledge, skills, and competencies carried out professionally and skeptically;

22. Develop a policy on periodic assignment restrictions and an adequate waiting period for assignments to members of the Internal Audit Division and external parties.

Dalam rangka evaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya, Divisi Internal Audit memiliki program pengendalian mutu audit yang terdiri dari:

1. Supervisi, dilakukan terhadap pekerjaan Auditor secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. ***Review*** Intern, dilakukan terhadap Tim Audit DIA secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan. Dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta objektivitas atas pelaksanaan audit, DIA melalui Pemimpin DIA dan atau Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit telah melakukan tugas ***Quality Assurance*** (QA) terhadap tim audit. Selain melaksanakan tugas QA, DIA juga melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil audit intern.
3. ***Review Ekstern***, dilakukan terhadap Divisi Internal Audit untuk menilai mutu kegiatan DIA Bank Riau Kepri atas pelaksanan audit yang telah dilakukan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/ POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, maka fungsi DIA harus di-***review*** oleh pihak ekstern minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun yang memuat pendapat tentang hasil kerja DIA dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Auditor Internal Bank harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam SK Direksi Nomor 012A/ KEPDIR/2021 tentang BPP Divisi Internal Audit. Persyaratan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Memiliki tingkat pendidikan minimal S1 atau memiliki pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun dengan minimal 2 (dua) jabatan berbeda dengan disiplin ilmu yang akan dipertimbangkan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas audit dan memenuhi kelengkapan kompetensi profesional Divisi Internal Audit secara kolektif.
2. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar audit, sehingga setiap auditor akan dipastikan telah mendapat pelatihan yang cukup baik dari bangku akademik maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Divisi Internal Audit sebelum yang bersangkutan diberikan tanggung jawab penuh sebagai auditor.
3. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar operasional perbankan sehingga akan selalu dipastikan bahwa setiap auditor telah memiliki kompetensi ***basic banking and product knowledge*** sebelum yang bersangkutan diberikan tanggung jawab penuh sebagai auditor.
    a. Prinsip dasar dan risiko tentang produk (sumber pendanaan, pembiayaan, jasa layanan, perhitungan h.i.-1.000 dsb) dan operasional perbankan syariah;

In order to evaluate the quality of its audit activities, the Internal Audit Division has an audit quality control program consisting of:

1. *Supervision is carried out on the work of the Auditor on an ongoing basis to ensure compliance with audit standards, policies, procedures and audit programs that have been prepared.*
2. *Internal Review, carried out on the DIA Audit Team on an ongoing basis on the quality of the audit work produced. In maintaining the quality of audit activities and maintaining the independence and objectivity of the audit implementation, DIA through the Head of the DIA and/or the Head of the Quality Control & Audit Result Follow-up Division has carried out Quality Assurance (QA) duties to the audit team. In addition to carrying out QA duties, DIA also monitors the completion of the follow-up to the results of the internal audit.*
3. *External Review, carried out on the Internal Audit Division to assess the quality of the activities of DIA Bank Riau Kepri on the implementation of the audit that has been carried out. In accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 1/ POJK.03/2019 dated January 28, 2019 regarding the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks, the DIA function must be reviewed by an external party at least once in 3 (three) years containing an opinion on the results of the DIA work and its compliance with the Implementation Standards The Bank's Internal Audit function as well as possible improvements.*

INTERNAL AUDITOR REQUIREMENTS

The Bank's Internal Auditor must meet the requirements as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 012A/KEPDIR/2021 concerning the Internal Audit Division's BPP. These requirements are as follows:

1. *Have a minimum education level of S1 or have a minimum work experience of 8 (eight) years with a minimum of 2 (two) different positions with different disciplines that will be considered in order to support the implementation of audit tasks and fulfill the complete professional competence of the Internal Audit Division collectively.*
2. *Having knowledge of the basics of auditing, so that each auditor will be ensured to have received adequate training both from the academic bench and training organized by the Internal Audit Division before he is given full responsibility as an auditor.*
3. *Have knowledge of the basics of banking operations so that it will always be ensured that each auditor has basic banking competence and product knowledge before he is given full responsibility as an auditor.*
    a. *Basic principles and risks regarding products (sources of funding, financing, services, calculation of h.i.-1,000, etc.) and sharia banking operations;*

b. Prinsip dasar dan risiko akuntansi perbankan syariah ;
c. Legal dan manajemen risiko;
d. Kegiatan usaha lain perbankan syariah;
e. BPP dan SOP yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan syariah.

b. Basic principles and risks of Islamic banking accounting;
c. Legal and risk management;
d. Other business activities of sharia banking;
e. BPP and SOP related to sharia banking business activities.

KOMPOSISI PERSONIL AUDITOR INTERNAL

COMPOSITION OF INTERNAL AUDITOR PERSONNEL

Tabel Komposisi Personil Auditor Internal
Internal Auditor Personnel Composition Table

No	Jabatan	Jumlah	*Department*
1	Pemimpin Divisi Internal Audit	1	*Head of Internal Audit Division*
2	Pemimpin Bagian Audit Jaringan	1	*Network Audit Section Leader*
3	Pemimpin Bagian Audit Teknologi Informasi	1	*Head of Information Technology Audit*
4	Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit (PMTLHA)	1	*Head of Quality Control & Audit Result Follow-up Section (PMTLHA)*
5	Auditor Bagian Audit TI	3	*IT Audit Section Auditor*
7	Auditor Bagian Audit Jaringan	13	*Network Audit Section Auditor*
8	Auditor Bagian PMTLHA	3	*PMTLHA Section Auditor*
Jumlah		23	***Total***

SERTIFIKASI PROFESI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

PROFESSIONAL CERTIFICATION OF INTERNAL SUPERVISION UNIT PERSONNEL

Tabel Sertifikasi Profesi Personil Satuan Pengawasan Internal
Tabel of Internal Control Unit Personnel Professional Certification

No.	Sertifikasi	Jumlah Auditor *Number of Auditors*	*Certification*
1	Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas	1	*Integrity Builder Expert Certification*
2	Sertifikasi Auditor Level Supervisor	9	*Supervisor Level Auditor Certification*
3	Sertifikasi Auditor Level Auditor	10	*Auditor Level Auditor Certification*
4	Sertifikasi COBIT	1	*COBIT Certification*
5	Sertifikasi ISO 27001	4	*ISO 27001 Certification*
6	Sertifikasi ITIL	1	*ITIL Certification*
7	Belum sertifikasi	4	*Not yet certified*

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN DIVISI INTERNAL AUDIT TAHUN 2021

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan Divisi Internal Audit (DIA) tahun 2021 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, DIA telah melakukan hal-hal terkait dengan rencana kerja tahun 2021 sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit umum terhadap 12 Kantor Cabang, dengan rincian pelaksanaa sebagai berikut:

BRIEF REPORT OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION ACTIVITIES IN 2021

In accordance with the 2021 Internal Audit Division (DIA) Annual Audit Work Plan which has been approved by the President Director and the Board of Commissioners, DIA has carried out the following matters related to the 2021 work plan:

1. *Carry out general audits of 12 Branch Offices, with details of implementation as follows:*

No.	Keterangan *Information*	Tanggal Pelaksanaan *Implementation date*
1	Audit Umum Cabang Ranai beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya *General Audit of Ranai Branch and all office units under it*	18 Januari s.d. 01 Februari 2021 *January 18 to February 01, 2021*
2	Audit Umum Cabang Pangkalan Kerinci beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya *General Audit of Pangkalan Kerinci Branch and all office units under it*	24 Februari s.d. 18 Maret 2021 *February 24 to March 18, 2021*
3	Audit Umum Cabang Tembilahan beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya *General Audit of the Tembilahan Branch and all office units under it*	24 Februari s.d. 10 Maret 2021 *February 24 to March 10, 2021*
4	Audit Umum Cabang Dumai beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya *Dumai Branch General Audit and all office units under it*	25 Februari s.d. 09 Maret 2021 *February 25 to 09 March 2021*
5	Audit Umum Cabang Pekanbaru beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya *Audit Umum Cabang Pekanbaru beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya*	05 s.d. 23 Juli 2021 *05 to 23 July 2021*
6	Audit Umum Cabang Siak Sri Indrapura, Capem dan Kedai Sungai Apit *General Audit of Siak Sri Indrapura Branch, Capem and Sungai Apit . Stores*	15 September s.d. 01 Oktober 2021 *September 15 to 01 October 2021*
7	Audit Umum Cabang Selat Panjang beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya *Selat Panjang General Audit Branch and all office units under it*	15 September s.d. 01 Oktober 2021 *September 15 to 01 October 2021*
8	Audit Umum Cabang Bangkinang, Capem Lipat Kain, Kedai Air Tiris *Bangkinang Branch General Audit, Cloth Folding Head, Water Tiris Shop*	15 September s.d. 01 Oktober 2021 *September 15 to 01 October 2021*
9	Audit Umum Cabang Batam, Capem Lubuk Baja dan Capem Batu Aji *General Audit of Batam Branch, Head of Lubuk Baja and Head of Batu Aji*	08 s.d. 23 November 2021 *08 to November 23, 2021*
10	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang, Capem Dabo Singkep dan Capem Daik Lingga *General Audit of Tanjung Pinang Branch, Head of Head of Dabo Singkep and Head of Head of Daik Lingga*	08 s.d. 25 November 2021 *08 to November 25, 2021*
11	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru, Capem Syariah Duri, Capem Syariah Taluk Kuantan, Capem Syariah Panam *Pekanbaru Sharia Branch General Audit, Duri Sharia Head, Taluk Kuantan Sharia Head, Panam Sharia Head*	15 November s.d. 10 Desember 2021 *November 15 to10 December 2021*
12	Audit Umum Cabang Pasir Pengaraian, Capem Dalu Dalu, Capem Kota Tengah dan Kedai Kabun *General Audit of Pasir Pengaraian Branch, Head of Dalu Dalu Branch, Head of Central City and Kedai Kabun*	15 November s.d. 03 Desember 2021 *November 15 to 03 December 2021*

2. Melaksanakan audit umum terhadap 8 Divisi/Desk Kantor Pusat

2. Carry out general audits of 8 Head Office Divisions/Desk

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation date	*Information*
1	Audit Umum Divisi Dana & Jasa	19 Mei s.d. 03 Juni 2021	*Fund & Services Division General Audit*
2	Audit Umum Desk Service Quality	19 Mei s.d. 25 Mei 2021	*General Audit Desk Service Quality*
3	Audit Umum Divisi P2K (Penyelamatan & Penyelesaian Kredit)	24 Mei s.d. 04 Juni 2021	*P2K Division General Audit (Credit Rescue & Settlement)*
4	Audit Umum Divisi Operasional	01 s.d. 09 Juli 2021	*Operational Division General Audit*
5	Audit Umum Divisi Perencanaan Strategis	16 s.d. 29 Desember 2021	*General Audit Strategic Planning Division*
6	Audit Umum Divisi Manajemen Risiko	16 s.d. 29 Desember 2021	*General Audit Risk Management Division*
7	Audit Umum Divisi Sekretariat Perusahaan	23 s.d. 29 Desember 2021	*General Audit Division of Corporate Secretariat*
8	Audit Umum Divisi Treasury & International	23 s.d. 29 Desember 2021	*Treasury & International Division General Audit*

3. Melaksanakan audit TI terhadap 11 objek.

3. Carry out IT audits on 11 objects.

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	*Information*
1	Audit ***Post Implementation Review*** BRK Mobile	28 Januari s.d. 19 Februari 2021 *January 28 to February 19, 2021*	*Audit Post Implementation Review BRK Mobile*
2	Audit Sistem Pembayaran Bank Indonesia	29 Januari s.d. 02 Maret 2021 *January 29 to 02 March 2021*	*Bank Indonesia Payment System Audit*
3	Audit Jaringan ATM	15 Maret s.d. 01 April 2021 *March 15 to 01 April 2021*	*ATM Network Audit*
4	Audit ***Core Banking System*** Vision Sharia Modul CIS	17 Mei s.d. 10 Juni 2021 *May 17 to 10 June 2021*	*Audit Core Banking System Vision Sharia Module CIS*
5	Audit Sistem Layanan Informasi Keuangan	12 s.d. 19 Juli 2021 *12 to 19 July 2021*	*Financial Information Service System Audit*
6	Audit ***Card Management System***	09 s.d. 20 Agustus 2021 *09 to August 20, 2021*	*Audit Card Management System*
7	Audit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu-Kartu ATM	09 s.d. 20 Agustus 2021 *09 to August 20, 2021*	*Audit of Payment Instruments Using ATM Cards*
8	Audit Aplikasi ***Payment***	16 s.d. 30 September 2021 *16 to September 30, 2021*	*Payment Application Audit*
9	Audit Laku Pandai	25 Oktober s.d. 12 November 2021 *October 25 to November 12, 2021*	*Smart Behavior Audit*
10	Audit ***Data Center***	29 November s.d. 08 Desember 2021 *November 29 to 08 December 2021*	*Data Center Audit*
11	Audit ***Business Continuity Management***	20 s.d. 24 Desember 2021 *20 to 24 December 2021*	*Audit Business Continuity Management*

4. Melakukan audit tematik terhadap 7 (tujuh) isu

4. Conduct a thematic audit of 7 (seven) issues

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	*Information*
1	Audit Tematik Pemberian Restrukturisasi Covid-19	11 s.d. 22 Januari 2021 *11 to January 22, 2021*	*Thematic Audit of Covid-19 Restructuring Award*
2	Audit Tematik Pemberian Special Rate Deposito	13 s.d. 16 April 2021 *13 to April 16, 2021*	*Thematic Audit on Provision of Special Rate Deposits*
3	Audit Tematik Komisi Tagihan Premi Asuransi Terkait Kredit	05 s.d. 16 Juli 2021 *05 to July 16, 2021*	*Thematic Audit of Credit-related Insurance Premium Billing Commission*
4	Audit Tematik Pemberian Dana Bantuan Masyarakat	13 s.d. 27 Juli 2021 *13 to 27 July 2021*	*Thematic Audit of Public Aid Funds*
5	Audit Tematik Pemberian Special Nisbah Deposito	26 Juli s.d. 06 Agustus 2021 *26 July to 06 August 2021*	*Thematic Audit on Provision of Special Time Deposit Ratio*
6	Audit Tematik Rekening Titipan pada Lap. Keuangan Cabang Batam	21 s.d. 27 September 2021 *21 to 27 September 2021*	*Thematic Audit of Custody Accounts on Lap. Batam Branch Finance*
7	Audit Tematik Pelanggaran Kode Etik Pegawai	02 s.d. 04 Agustus 2021 *02 to 04 August 2021*	*Thematic Audit of Employee Code of Conduct Violations*

5. Melakukan ***Quality Assurance*** terhadap 12 Tim Audit Umum Cabang, 8 Tim Audit Umum Divisi dan 11 Tim Audit TI.
6. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok Pokok Hasil Audit kepada OJK setiap semester**.**
7. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan personil DIA, maka kepada beberapa orang pegawai DIA setiap tahunnya diikutsertakan dalam pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan audit dan perkembangannya. Pada tahun 2021 ini pegawai DIA telah mengikuti beberapa pelatihan dan seminar yang diadakan oleh lembaga pendidikan audit atau organisasi yang bergerak di bidang audit dengan pemberi materi yang telah berpengalaman. Materi pelatihan yang didapat dari kegiatan tersebut, nantinya akan disampaikan kepada auditor lainnya melalui mekanisme ***"Sharing Moment"*** sebagai bahan masukan dan pembelajaran untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh auditor DIA.

Program Pengendalian Mutu

DIA memiliki program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya. Evaluasi tersebut terdiri dari:

1. Supervisi, dilakukan terhadap pekerjaan Auditor secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. ***Review Intern,*** dilakukan terhadap Auditor DIA secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang mereka hasilkan. Untuk tahun 2021, dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta obyektifitas atas pelaksanaan audit, DIA melalui Pemimpin DIA dan atau Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit telah melakukan tugas ***Quality Assurance*** (QA) terhadap 12 Tim Audit Umum Cabang, 8 Tim Audit Umum Divisi dan 11 Tim Audit TI**.** Selain melaksanakan QA untuk menjaga mutu audit, DIA juga melakukan edukasi dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil audit intern.

5. Performing Quality Assurance on 12 Branch General Audit Teams, 8 Divisional General Audit Teams and 11 IT Audit Teams.
6. Submit the Implementation Report and Principal Audit Results to OJK every semester.
7. To increase the insight and knowledge of DIA personnel, several DIA employees are annually included in education, training, and seminars related to audits and their development. In 2021, DIA employees have attended several trainings and seminars held by audit educational institutions or organizations engaged in auditing with experienced material providers. The training materials obtained from these activities will later be conveyed to other auditors through the "Sharing Moment" mechanism as input and learning materials to be able to provide added value to all DIA auditors.

Quality Control Program

DIA has a program to evaluate the quality of its audit activities. The evaluation consists of:

1. *Supervision is carried out on the work of the Auditor on an ongoing basis to ensure compliance with audit standards, policies, procedures and audit programs that have been prepared.*
2. *Internal Review, carried out on the DIA Auditor on an ongoing basis for the quality of the audit work they produce. For 2021, in maintaining the quality of audit activities and maintaining independence and objectivity in the implementation of audits, DIA through the Head of the DIA and/or the Head of the Quality Control & Follow-Up on Audit Results has performed Quality Assurance (QA) tasks for 12 Branch General Audit Teams, 8 Teams General Audit Division and 11 IT Audit Team. In addition to carrying out QA to maintain audit quality, DIA also provides education in order to accelerate the completion of follow-up to internal audit results.*

***Tabel Quality Assurance* Tim Audit Umum Cabang**
Quality Assurance Table of Branch General Audit Team

No.	Quality Assurance *Quality Assurance*	Tanggal Pelaksanaan *Information*
1	Audit Umum Cabang Ranai beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya General Audit of Ranai Branch and all office units under it	18 Januari s.d. 01 Februari 2021
2	Audit Umum Cabang Pangkalan Kerinci beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya General Audit of Pangkalan Kerinci Branch and all office units under it	24 Februari s.d. 18 Maret 2021
3	Audit Umum Cabang Tembilahan beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya General Audit of the Tembilahan Branch and all office units under it	24 Februari s.d. 10 Maret 2021
4	Audit Umum Cabang Dumai beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya Dumai Branch General Audit and all office units under it	25 Februari s.d. 09 Maret 2021

No.	Quality Assurance *Quality Assurance*	Tanggal Pelaksanaan *Information*
5	Audit Umum Cabang Pekanbaru beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya	05 s.d. 23 Juli 2021
6	Audit Umum Cabang Siak Sri Indrapura, Capem dan Kedai Sungai Apit	15 September s.d. 01 Oktober 2021
7	Audit Umum Cabang Selat Panjang beserta seluruh unit kantor yang berada dibawahnya	15 September s.d. 01 Oktober 2021
8	Audit Umum Cabang Bangkinang, Capem Lipat Kain, Kedai Air Tiris	15 September s.d. 01 Oktober 2021
9	Audit Umum Cabang Batam, Capem Lubuk Baja dan Capem Batu Aji	08 s.d. 23 November 2021
10	Audit Umum Cabang Tanjung Pinang, Capem Dabo Singkep dan Capem Daik Lingga	08 s.d. 25 November 2021
11	Audit Umum Cabang Syariah Pekanbaru, Capem Syariah Duri, Capem Syariah Taluk Kuantan, Capem Syariah Panam	15 November s.d. 10 Desember 2021
12	Audit Umum Cabang Pasir Pengaraian, Capem Dalu Dalu, Capem Kota Tengah dan Kedai Kabun	15 November s.d. 03 Desember 2021

Tabel *Quality Assurance* Tim Audit Umum Divisi/Desk
Quality Assurance Table of the Division/Desk General Audit Team

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	*Information*
1	Audit Umum Divisi Dana & Jasa	19 Mei s.d. 03 Juni 2021 *May 19 s.d. 03 June 2021*	*Thematic Audit of Covid-19 Restructuring Award*
2	Audit Umum Desk Service Quality	19 Mei s.d. 25 Mei 2021 *May 19 s.d. May 25, 2021*	*Thematic Audit on Provision of Special Rate Deposits*
3	Audit Umum Divisi P2K (Penyelamatan & Penyelesaian Kredit)	24 Mei s.d. 04 Juni 2021 *May 24 s.d. 04 June 2021*	*Thematic Audit of Credit-related Insurance Premium Billing Commission*
4	Audit Umum Divisi Operasional	01 s.d. 09 Juli 2021 *01 s.d. 09 July 2021*	*Thematic Audit of Public Aid Funds*
5	Audit Umum Divisi Perencanaan Strategis	16 s.d. 29 Desember 2021 *16 to December 29, 2021*	*Thematic Audit on Provision of Special Time Deposit Ratio*
6	Audit Umum Divisi Manajemen Risiko	16 s.d. 29 Desember 2021 *16 to December 29, 2021*	*Thematic Audit of Custody Accounts on Lap. Batam Branch Finance*
7	Audit Umum Divisi Sekretariat Perusahaan	23 s.d. 29 Desember 2021 *23 to December 29, 2021*	*Thematic Audit of Employee Code of Conduct Violations*
8	Audit Umum Divisi Treasury & International	23 s.d. 29 Desember 2021 *23 to December 29, 2021*	*Treasury & International Division General Audit*

Tabel Quality Assurance Tim Audit TI
Tabel of Quality Assurance IT Audit Team

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	*Information*
1	*Findings And Follow-Up On Audit Results*	28 Januari s.d. 19 Februari 2021 *January 28 s.d. February 19, 2021*	*FINDINGS AND FOLLOW-UP ON AUDIT RESULTS*
2	Audit Sistem Pembayaran Bank Indonesia	29 Januari s.d. 02 Maret 2021 *January 29 s.d. 02 March 2021*	*Bank Indonesia Payment System Audit*
3	Audit Jaringan ATM	15 Maret s.d. 01 April 2021 *March 15 s.d. 01 April 2021*	*ATM Network Audit*
4	Audit Core Banking System Vision Sharia Modul CIS	17 Mei s.d. 10 Juni 2021 *May 17 s.d. 10 June 2021*	*Audit Core Banking System Vision Sharia Module CIS*
5	Audit Sistem Layanan Informasi Keuangan	12 s.d. 19 Juli 2021 *12 to 19 July 2021*	*Financial Information Service System Audit*
6	Audit Card Management System	09 s.d. 20 Agustus 2021 *09 s.d. August 20, 2021*	*Audit Card Management System*
7	Audit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu-Kartu ATM	09 s.d. 20 Agustus 2021 *09 s.d. August 20, 2021*	*Audit of Payment Instruments Using ATM Cards*
8	Audit Aplikasi Payment	16 s.d. 30 September 2021 *16 to September 30, 2021*	*Payment Application Audit*
9	Audit Laku Pandai	25 Oktober s.d. 12 November 2021 *October 25 s.d. November 12, 2021*	*Smart Behavior Audit*
10	Audit Data Center	29 November s.d. 08 Desember 2021 *November 29 s.d. 08 December 2021*	*Data Center Audit*
11	Audit Business Continuity Management	20 s.d. 24 Desember 2021 *20 to 24 December 2021*	*Audit Business Continuity Management*

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemeriksaan Tahun 2020

a. Pada tahun 2020 telah dilakukan audit umum pada 11 Kantor Cabang beserta unit kantor (Capem/kedai) dibawahnya, dengan total 1.142 Temuan. Dari *monitoring progress* tindak lanjut yang dilakukan terdapat :
   - Sebanyak 1.139 temuan telah ditindaklanjuti, sehingga menyisakan temuan pada 1 unit Kantor Cabang.
   - Sebanyak 3 temuan yang masih dalam proses tindak lanjut yang terdiri dari: Cabang Pasir Pangaraian sebanyak 1 temuan, dan Capem Kota Tengah sebanyak 2 temuan, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Findings and Follow-Up on Audit Results

2020 Examination

a. In 2020, a general audit was carried out at 11 Branch Offices and the office units (Capem/kedai) under them, with a total of 1,142 findings. From the monitoring of the follow-up progress carried out, there are:
   - *A total of 1,139 findings have been followed up, leaving only 1 branch office finding.*
   - *A total of 3 findings are still in the follow-up process consisting of: Pasir Pangraian Branch with 1 finding, and Head of Kota Tengah Subdistrict with 2 findings, with the following recapitulation:*

No.	Divisi /Cabang/ Capem/Kedai	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut *In the Process of Follow Up*	Lewat Komitmen *Through Commitment*	*Division/Branch/Sub-Branch/Store*
1	Cabang Pasir Pangaraian	1	0	*Pasir Pangaraian Branch*
2	Capem Koto Tengah	2	0	*Koto Tengah Branch*
	Jumlah	**3**	**0**	***Totals***

b. Pada tahun 2020 telah dilakukan Audit Teknologi Informasi pada 6 objek (APMK *Issuer* Kartu Debet, SPBI, Aplikasi *Payment* PBB, LOS, Jaringan Komunikasi dan *Security* SPBI) dengan total 77 temuan. Dari *monitoring progress* tindak lanjut yang dilakukan semua temuan telah ditindaklanjuti

c. Pada tahun 2020 telah dilakukan audit umum pada 2 Divisi (Hukum dan *Treasury* & International) dengan total 14 temuan. Dari *monitoring progress* tindak lanjut yang dilakukan semua telah ditindaklanjuti.

b. In 2020, an Information Technology Audit was conducted on 6 objects (APMK Debit Card Issuer, SPBI, PBB Payment Application, LOS, Communication Network and SPBI Security) with a total of 77 findings. From monitoring the progress of the follow-up carried out, all findings have been followed up

c. In 2020 a general audit was carried out in 2 Divisions (Legal and Treasury & International) with a total of 14 findings. From monitoring the progress of the follow-up carried out, all have been followed up.

Pemeriksaan Tahun 2021

a. Pada tahun 2021 telah dilakukan audit umum pada 12 kantor Cabang dengan total 1.027 temuan. Dari monitoring *progress* tindak lanjut yang dilakukan terdapat:
   - Sebanyak 897 temuan sudah ditindaklanjuti:
   - Sebanyak 129 temuan sedang dalam proses penyelesaian dan 1 temuan telah melewati batas waktu komitmen penyelesaian, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

2021 Examination

a. In 2021, a general audit was carried out at 12 Branch offices with a total of 1,027 findings. From the monitoring of the follow-up progress carried out, there are:
   - *A total of 897 findings have been followed up:*
   - *A total of 129 findings are in the process of being completed and 1 finding has passed the deadline for completion commitments, with the following recapitulation:*

Tabel Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit
Table of Findings and Follow Up on Audit Results

No.	Cabang/ Capem/Kedai	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut *In the Process of Follow Up*	Temuan yang belum selesai sesuai komitmen s.d bulan Desember 2021 *Findings that have not been completed according to commitments until December 2021*	*Branch/Sub-Branch/ Store*
1	Cabang Ranai	0	1	*Ranai Branch*
2	Cabang Tembilahan	1	0	*Tembilahan Branch*
3	Capem Sei Guntung	1	0	*Capem Sei Guntung*
4	Capem Kota Baru	1	0	*Capem New Town*
5	Cabang Selat Panjang	1	0	*Long Strait Branch*
6	Cabang Bangkinang	16	0	*Bangkinang Branch*
7	Kedai Air Tiris	3	0	*Drain Water Shop*
8	Cabang Siak Sri Indraputa	7	0	*Siak Sri Indraputa Branch*
9	Capem Perawang	2	0	*sub branch Perawang*
10	Kedai Sungai Apit	2	0	*Apit River Shop*
11	Cabang Batam	13	0	*Batam Branch*
12	Capem Lubuk Baja	8	0	*Down Steel sub branch*
13	Capem Batu Aji	14	0	*Batu Aji sub branch*
14	Cabang Tanjung Pinang	4	0	*Tanjung Pinang Branch*
15	Capem Daik Lingga	4	0	*Capem Daik Linga*
16	Capem Dabo Singkep	1	0	*Capem Dabo Singkep*
17	Capem Syariah Duri	7	0	*Duri Sharia Head*
18	Capem Syariah Teluk Kuantan	5	0	*Kuantan Bay Sharia Head*
19	Capem Syariah Panam	4	0	*Panam Sharia Head*
20	Cabang Pasir Pengaraian	4	0	*Desert Sand Branch*
21	Capem Dalu Dalu	8	0	*Capem Dalu Dalu*
22	Capem Koteng	8	0	*Capem Koteng*
23	Kedai Kabun	**15**	0	*Kabun Shop*
	Jumlah	**129**	**1**	

b. Pada tahun 2021 telah dilakukan Audit pada 8 Divisi (P2K, *Desk Service Quality*, Dana dan Jasa, Operasional, Perencanaan Strategis, Manajemen Risiko, *Treasury* & Internasional dan Sekretariat Perusahaan) dengan total 65 temuan. Dari *monitoring progress* tindak lanjut terdapat:
   - Sebanyak 32 temuan sudah ditindaklanjuti.
   - Sebanyak 33 temuan yang masih dalam proses terdiri dari:
     - 1 temuan Divisi Dana & Jasa
     - 9 temuan Divisi Perencanaan Strategis
     - 11 temuan Divisi Manajemen Risiko
     - 6 temuan Divisi Trasury & International
     - 6 temuan Divisi Sekretariat Perusahaan

   Dengan rekapitulasi sebagai berikut:

b In 2021, audits were carried out in 8 Divisions (P2K, Service Quality Desk, Funds and Services, Operations, Strategic Planning, Risk Management, Treasury & International and Corporate Secretariat) with a total of 65 findings. From the follow-up progress monitoring, there are:

- *A total of 32 findings have been followed up.*
- *A total of 33 findings that are still in process consist of:*
  - *1 findings of the Fund & Services Division*
  - *9 findings of the Strategic Planning Division*
  - *11 findings of the Risk Management Division*
  - *6 findings of the Trasury & International Division*
  - *6 findings of the Corporate Secretariat Division*

With the following recapitulation:

No.	Divisi *Division*	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut *In the Process of Follow Up*	Temuan yang belum selesai sesuai komitmen s.d bulan Desember 2021 *Findings that have not been completed according to commitments until December 2021*	Divisi *Division*
1	Divisi Dana & Jasa	1	0	*Funds & Services Division*
2	Divisi Perencanaan Strategis	9	0	*Strategic Planning Division*
3	Divisi Manajemen Risiko	11	0	*Risk Management Division*
4	Divisi Treasury & International	6	0	*Treasury & International Division*
5	Divisi Sekretariat Perusahaan	6	0	*Corporate Secretariat Division*
Jumlah		**33**	**0**	***Total***

c. Pada tahun 2021 telah dilakukan Audit Teknologi Informasi pada 11 objek dengan total 124 temuan. Dari monitoring ***progress*** tindak lanjut yang dilakukan terdapat :
   - Sebanyak 95 temuan sudah ditindaklanjuti.
   - Sebanyak 29 temuan yang masih dalam proses penyelesaian terdiri dari :
     - 8 temuan audit Jaringan ATM
     - 6 temuan audit CIS
     - 2 temuan audit APMK kartu ATM
     - 6 temuan audit Laku Pandai
     - 7 temuan audit Payment

c. In 2021, Information Technology Audits have been conducted on 11 objects with a total of 124 findings. From the monitoring of the follow-up progress carried out, there are:
   - *A total of 95 findings have been followed up.*
   - *A total of 29 findings that are still in the process of completion consist of:*
     - *8 ATM Network audit findings*
     - *6 CIS audit findings*
     - *2 ATM card APMK audit findings*
     - *6 Laku Pandai audit findings*
     - *7 Payment audit findings*

Dengan rekapitulasi sebagai berikut: *With the following recapitulation:*

No.	Objek Audit / Unit Kerja Terkait Temuan yang sudah ditindaklanjuti	Sedang dalam Proses Tindak Lanjut *In the Process of Follow Up*	Temuan yang belum selesai sesuai komitmen s.d bulan Desember 2021 *Findings that have not been completed according to commitments until December 2021*	*Audit Object / Related Work Unit Follow-up findings*
1	Audit Jaringan ATM	8	0	*ATM Network Audit*
	a. Divisi Operasional	3	0	*a. Operational Division*
	b. Divisi Operasional & TSI	5	0	*b. Operations & TSI Division*
2	Audit CBSS modul CIS	6	0	*CIS module CBSS audit*
	a. Divisi Internal Audut	3	0	*a. Internal Audit . Division*
	b. Divisi Kepatuhan	1	0	*b. Compliance Division*
	c. Divisi TSI & Divisi Syariah	1	0	*c. TSI Division & Sharia Division*
	d. Divisi Hukum	1	0	*d. Legal Division*
3	Audit APMK Kartu ATM	2	0	*ATM Card APMK Audit*
	a. Divisi Operasional	1	0	*a. Operational Division*
	b. Divisi TSI	1	0	*b. TSI Division*
4	Audit Laku Pandai	6	0	*Smart Behavior Audit*
	a. Divisi Dana & Jasa	3	0	*a. Funds & Services Division*
	b. Divisi TSI	2	0	*b. TSI Division*
	c. Divisi Dana & Jasa/Divisi TSI	1	0	*c. Funds & Services Division/TSI wDivision*
5	Aplikasi Payment	7	0	*Payment Application*
	a. Divisi Operasional	1	0	*a. Operational Division*
	b. Divisi TSI	3	0	*b. TSI Division*
	c. Gabungan Divisi	3	0	*c. Combined Division*
	Jumlah	**29**	**0**	***Amount***

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh pejabat dan pegawai Bank, yang dirancang untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai guna menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk kecurangan (***fraud***) dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

TUJUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem Pengendalian Intern bertujuan:

1. Untuk menjamin semua kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

KERANGKA SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Sistem pendendalian intern Bank Riau Kepri mengacu kepada sistem pengendalian internal dari COSO. Sistem pengendalian intern yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System is a supervisory process mechanism determined by the Bank's management on an ongoing basis whose implementation is influenced by the Board of Commissioners, the Board of Directors and all officers and employees of the Bank, which is designed to provide adequate assurance to safeguard and secure the Bank's assets, ensuring the availability of reliable reports. accuracy, increasing compliance with applicable regulations, reducing the impact of financial losses, irregularities including fraud and violations of prudential aspects, as well as increasing organizational effectiveness and increasing cost efficiency.

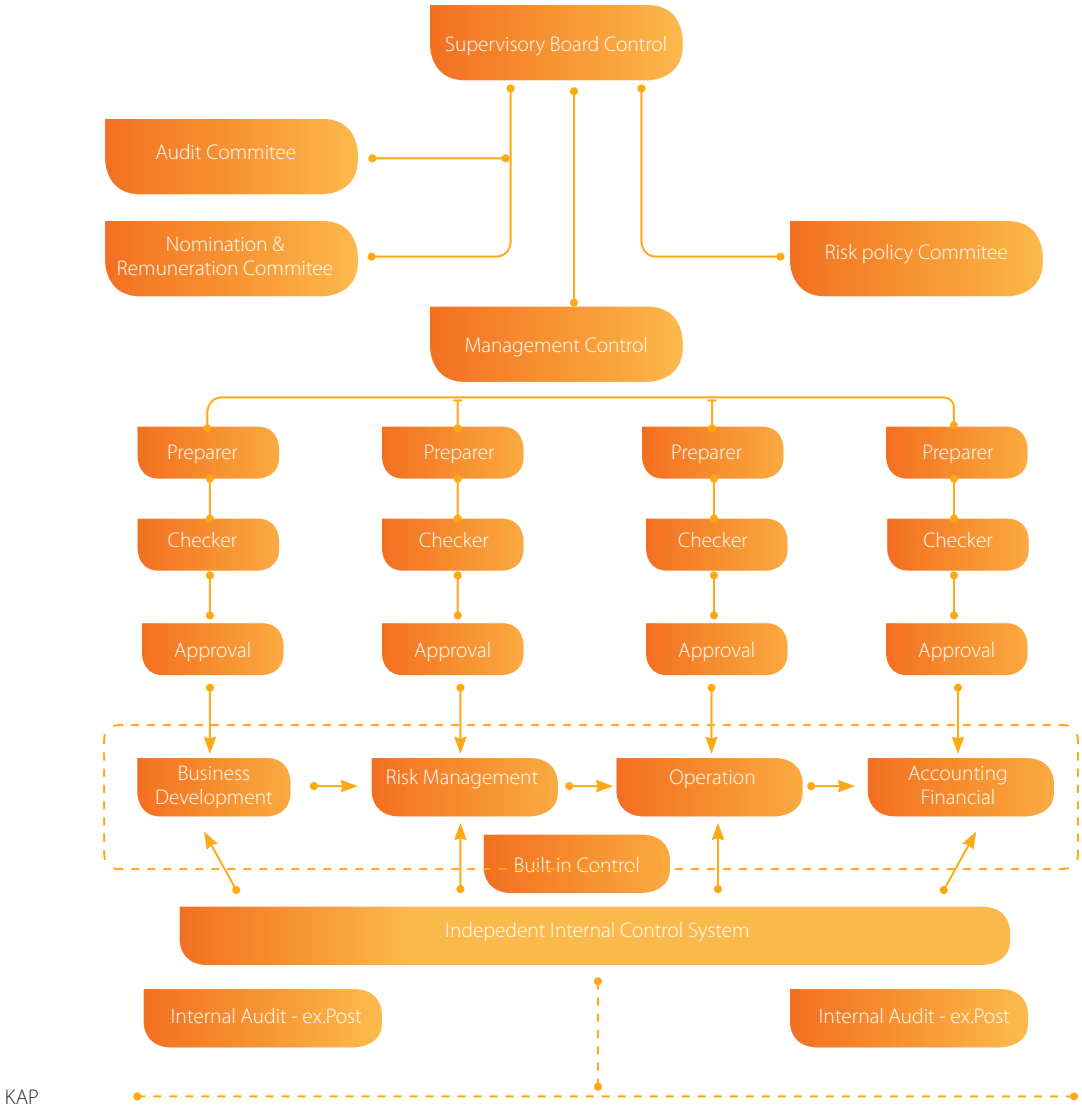
PURPOSE OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System aims to:

1. *To ensure that all business activities have been carried out in accordance with the provisions and laws and regulations, both regulations issued by the government, the Financial Services Authority as well as internal policies, provisions and procedures established by the Board of Directors.*
2. *To ensure the availability of complete, accurate, effective, timely and relevant reports that are needed in the context of making appropriate and accountable decisions.*
3. *To improve the effectiveness and efficiency of the use of assets and other resources in order to protect the Bank from the risk of loss.*
4. *To identify weaknesses and assess deviations early and reassess the reasonableness of existing policies and procedures at the Bank on an ongoing basis.*

INTERNAL CONTROL SYSTEM FRAMEWORK

The internal control system of Bank Riau Kepri refers to the internal control system of COSO. An effective internal control system is an important component in management and forms the basis for healthy and safe operations. An effective internal control system can help the Board of Directors and the Board of Commissioners maintain bank assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, improve compliance with laws and regulations, and reduce the risk of losses, irregularities and violations of prudential aspects.


Supervisory Board Control
Audit Commitee
Nomination & Remuneration Commitee
Risk policy Commitee
Management Control
Preparer
Preparer
Preparer
Preparer
Checker
Checker
Checker
Checker
Approval
Approval
Approval
Approval
Business Development
Risk Management
Operation
Accounting Financial
Built in Control
Indepedent Internal Control System
Internal Audit - ex.Post
Internal Audit - ex.Post
KAP

SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERKAIT PENGENDALIAN KEUANGAN

Sistem Pengendalian Internal dalam akuntansi memiliki peranan penting karena sistem pengendalian internal merupakan prosedur atau sistem yang dirancang untuk mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar dapat mencapai suatu tujuan. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, membantu menyediakan informasi akuntansi yang handal untuk laporan keuangan, dan menjamin dpatuhinya hukum dan peraturan yang berlaku.

Sistem pengendalian internal pada dasarnya meliputi pengorganisasian, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data keuangan, mendorong efisiensi dan dipenuhinya kebijakan menejemen atau dalam definisi yang lain, pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi harta organisasi dari kemungkinan penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi telah disajikan secara akurat dan memastikan bahwa peraturan telah dipatuhi sebagaimana mestinya.

Sistem pengendalian internal terkait pengendalian keuangan di Bank Riau Kepri telah dilakukan dengan cara:

1. Bank Riau Kepri telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi Bank Riau Kepri secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
2. Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan Bank Riau Kepri, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Bank Riau Kepri.
3. Direksi secara aktif melakukan/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis Bank Riau Kepri.
4. Bank Riau Kepri telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan keuangan dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibawakan dalam rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.

INTERNAL CONTROL SYSTEM RELATED TO FINANCIAL CONTROL

Internal Control System in accounting has an important role because the internal control system is a procedure or system designed to control, supervise, direct the organization in order to achieve a goal. The system can be used by management to plan and control the company's operations, help provide reliable accounting information for financial statements, and ensure compliance with applicable laws and regulations.

Internal control system basically includes organizing, coordinated methods and measures to maintain organizational wealth, check the accuracy and reliability of financial data, encourage efficiency and compliance with management policies or in another definition, internal control are policies and procedures that protect organizational assets from damage. possible misuse, ensuring that information is presented accurately and ensuring that regulations are properly complied with.

The internal control system related to financial control at Bank Riau Kepri has been carried out by:

1. *Bank Riau Kepri has prepared a Bank Business Plan which discusses the overall strategy of Bank Riau Kepri which includes the direction of business development.*
2. *The determination of the strategy has taken into account the impact on Bank Riau Kepri's capital, including capital projections and KPMM (Minimum Capital Adequacy Requirement), discussion/providing input and monitoring internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affect Bank Riau Kepri's business strategy.*
3. *The Board of Directors actively conducts/provides input and monitors internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affect the business strategy of Bank Riau Kepri.*
4. *Bank Riau Kepri has implemented a financial control process through efforts to monitor realization compared to finances in reports that are made periodically and brought to the Board of Directors meeting when a follow-up from the Board of Directors is needed.*

SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERKAIT PENGENDALIAN OPERASIONAL

Secara umum, pengendalian Intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Terkait pengendalian operasional, Bank Riau Kepri telah melakukan langkah sebagai berikut:

1. Bank Riau Kepri telah melengkapi ***standar operating procedure***/manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di Bank Riau Kepri terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait.
2. Bank Riau Kepri telah mempunyai desain sistem pengendalian intern pada kantor Cabang/Capem dan Kedai yang tertuang pada SE Direksi Nomor 16/SE/2021 tanggal 01 April 2021 yang mengatur tentang fungsi kontrol supervisi unit kerja (***first line of defense***), fungsi Quality Assurance dan fungsi Credit Review sebagai kontrol independen yang merupakan bagian dari pengawasan melekat yang tidak berada dibawah unit pelaksana transaksi. Kontrol independen bertugas melakukan pemeriksaan, verifikasi, ***proofing, monitoring, review***, analisa atas transaksi, review atas pemberian kredit/pembiayaan unit kantor. Divisi Internal Audit sebagai ***third line of defense*** melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas implementasi sistem pengendalian intern dan melakukan penilaian atas kualitas kinerja unit kantor.
3. Bank Riau Kepri telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/ pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional, diantaranya pembentukan unit kerja Credit Review (CR) dan Quality Assurance dan Collateral Admin (QACA) sebagai kontrol independen disetiap unit kantor Cabang**.**
4. ***Core Banking system*** telah dilengkapi dengan ***audit trail***.
5. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:
   a. Bank Riau Kepri memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
   b. Bank Riau Kepri telah memiliki Satuan Kerja/Divisi Kepatuhan yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.
   c. Adanya laporan bulanan pemantauan terhadap Ketentuan Kehati-hatian Bank Riau Kepri yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

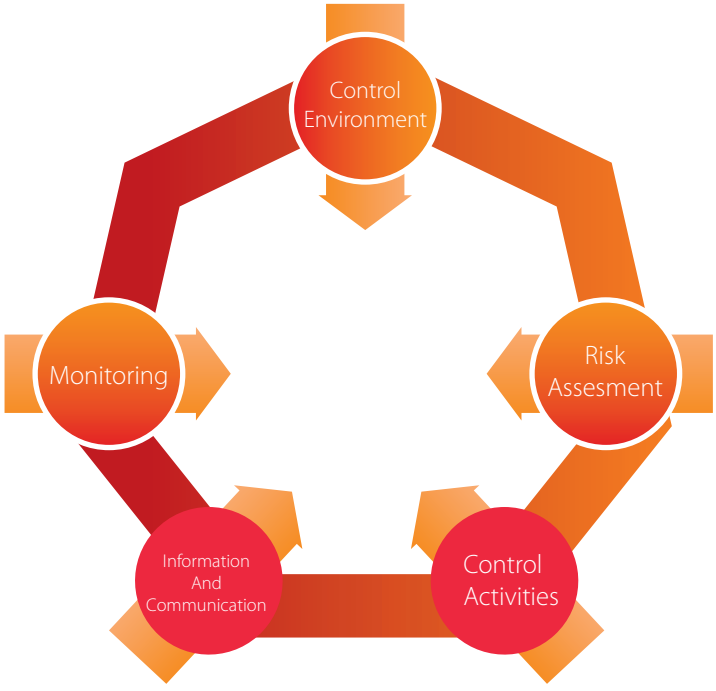
INTERNAL CONTROL SYSTEM RELATED TO OPERATIONAL CONTROL

In general, internal control is part of each system that is used as procedures and guidelines for the operational implementation of a particular company or organization. While the Internal Control System is a collection of internal controls that are integrated, related and mutually support one another. Regarding operational control, Bank Riau Kepri has taken the following steps:

1. *Bank Riau Kepri has completed a standard operating procedure/work manual that details the work procedures of every banking operational transaction carried out at Bank Riau Kepri related to new products and activities, including mitigating related operational risks.*
2. *Bank Riau Kepri already has an internal control system design at the Branch/Capem and Kedai offices as stated in the SE Board of Directors Number 16/SE/2021 dated April 1, 2021 which regulates the function of supervision of work units (first line of defense), Quality Assurance functions and Credit Review functions as an independent control which is part of the inherent supervision that is not under the transaction executing unit. Independent control is in charge of checking, verifying, proofing, monitoring, reviewing, analyzing transactions, reviewing the granting of credit/financing for office units. The Internal Audit Division as the third line of defense evaluates/assesses the effectiveness of the implementation of the internal control system and assesses the quality of office unit performance.*
3. *Bank Riau Kepri has established a good organizational structure, equipped with a supervisory/control unit so that it can support operational control, including the establishment of Credit Review (CR) and Quality Assurance and Collateral Admin (QACA) work units as independent controls in each branch office unit.*
4. *The Core Banking system has been equipped with an audit trail.*
5. *Compliance with other laws and regulations, namely:*
   a. *Bank Riau Kepri has a strong commitment to comply with applicable laws and regulations and take steps to correct weaknesses, if they occur.*
   b. *Bank Riau Kepri already has a Compliance Unit/ Division which is independent of the operational work unit in carrying out the compliance function.*
   c. *There is a monthly monitoring report on the Prudential Provisions of Bank Riau Kepri which is submitted to the Board of Commissioners and Directors.*

KESESUAIAN DENGAN COSO

COMPATIBILITY WITH COSO



Sistem pendendalian Internal Bank Riau Kepri mengacu kepada sistem pengendalian Intern dari COSO (Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission). Bank selalu berkomitmen menerapkan dan mengembangkan Sistem Pengendalian Intern pada semua tingkatan fungsional sesuai Struktur Organisasi yang dirancang menggunakan pendekatan COSO untuk memberikan keyakinan memadai tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan dan aktifitas operasional bank selalu mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Tersedianya informasi keuangan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memaksimalkan pemanfaatan seluruh Sumber Daya yang dimiliki dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional.
4. Penerapan GCG oleh setiap pelaku bisnis dalam perusahaan termasuk evaluasi keberlanjutan dan kesesuaian ketentuan GCG perusahaan dengan ketentuan eksternal yang berlaku.
5. Penerapan Manajemen Risiko dalam perusahaan dalam rangka membantu manajemen meminimalkan risiko, termasuk penilaian terhadap kecukupan, kehandalan, efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian intern serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.
6. Memastikan seluruh kegiatan perusahaan terbebas dari potensi ***fraud*** (kecurangan) maupun tindak pidana korupsi serta keberlangsungan mekanisme ***whistleblowing system***.

The internal control system of Bank Riau Kepri refers to the internal control system of COSO (Committe of Sponsoring Organization of the Treadway Commission). The Bank is always committed to implementing and developing the Internal Control System at all functional levels according to the Organizational Structure designed using the COSO approach to provide reasonable assurance on the following matters:

1. *The implementation of bank operational activities and activities is always guided by the applicable rules and regulations.*
2. *Availability of correct, complete, timely and relevant financial information in order to make appropriate and accountable decisions.*
3. *Maximizing the utilization of all available resources while taking into account the efficiency and effectiveness of operational activities.*
4. *The implementation of GCG by every business actor in the company includes an evaluation of the sustainability and conformity of the company's GCG provisions with applicable external regulations.*
5. *Implementation of Risk Management within the company in order to assist management in minimizing risk, including an assessment of the adequacy, reliability, efficiency and effectiveness of the internal control system as well as encouraging continuous improvement of internal control.*
6. *Ensuring that all company activities are free from potential fraud and corruption as well as the sustainability of the whistleblowing system mechanism.*

Kesesuaian pelaksanaan pengendalian intern Bank Riau Kepri dengan kerangka kerja pengendalian intern COSO adalah sebagai berikut.

Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Komponen ini merupakan pondasi awal untuk pengembangan Sistem Internal ***Control*** dengan menyediakan disiplin dan struktur yang bersifat fundamental. Hal ini diantaranya mencakup: Integritas dan Nilai Etika, Komitmen terhadap Kompetensi, Berfungsinya Auditor, Filosofi Manajemen dan Gaya Kepemimpinan, Struktur Organisasi, Pemberian Wewenang dan Tanggung Jawab, Kebijakan dan Praktik Sumber Daya Manusia (SDM).

Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian serta langkah pengurus Bank dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bank. Unsur-unsur lingkungan pengendalian meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai.
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi.
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia.
5. Atensi dan arahan manajemen Bank dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko, Komite Audit dan Komite ALCO.
6. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi operasional Bank dan penerapan manajemen risiko.

Bank Riau Kepri selalu menjunjung tinggi nilai integritas dan etika untuk semua karyawan, memastikan seluruh karyawan memiliki kompetensi pada setiap tingkatan jabatan di dalam perusahaan, memiliki struktur organisasi dan deskripsi pekerjaan yang jelas, pemisahan tugas dan kewenangan, kebijakan sumber daya manusia, dan bekerja sesuai dengan filosofi yang dimiliki perusahaan.

Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Komponen ini merupakan identifikasi dan analisis yang dilakukan oleh manajemen terhadap risiko terkait dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian risiko organisasi dapat dilakukan melalui identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko-risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan yang secara wajar disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum. Proses penilaian risiko harus mempertimbangkan kejadian dan keadaan baik yang bersifat eksternal dan internal yang mungkin timbul dan secara tidak baik mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dan laporan keuangan. Risiko organisasi dapat berasal dari perubahan dalam lingkungan operasi, personil baru, sistem informasi baru, pertumbuhan organisasi yang cepat, teknologi baru, dan lain-lain.

The suitability of the implementation of Bank Riau Kepri's internal control with the COSO internal control framework is as follows.

Control Environment

This component is the initial foundation for the development of the Internal Control System by providing discipline and a fundamental structure. These include: Integrity and Ethical Values, Commitment to Competence, Functioning of Auditors, Management Philosophy and Leadership Style, Organizational Structure, Assignment of Authority and Responsibilities, Human Resources (HR) Policies and Practices.

The control environment reflects the overall commitment, behavior, concern and steps of the Bank's management in carrying out operational control activities of the Bank. The elements of the control environment include:

1. *Adequate organizational structure.*
2. *Leadership style and philosophy of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
3. *Integrity and ethical values and competence.*
4. *Human resources policies and procedures.*
5. *Attention and direction of the Bank's management and other committees, such as the Risk Management Committee, Audit Committee and ALCO Committee.*
6. *External factors that affect the Bank's operations and the implementation of risk management.*

Bank Riau Kepri always upholds the values of integrity and ethics for all employees, ensures that all employees have competence at every level in the company, has an organizational structure and clear job descriptions, segregation of duties and authorities, human resource policies, and works in accordance with company philosophy.

Risk Assessment

This component is the identification and analysis carried out by management on risks related to achieving the goals that have been set. Organizational risk assessment can be carried out through identification, analysis, and management of risks relevant to the preparation of financial statements that are fairly presented in accordance with generally accepted accounting principles. The risk assessment process must consider both external and internal events and circumstances that may arise and adversely affect the entity's ability to record, process, summarize and report financial data consistent with management's assertions and financial statements. Organizational risk can come from changes in the operating environment, new personnel, new information systems, rapid organizational growth, new technologies, and others.

Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

Komponen ini berupa kegiatan, kebijakan, prosedur dan praktik yang menjamin pencapaian tujuan institusi. Kegiatan ini memungkinkan pengambilan berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Kegiatan pengendalian berlangsung di seluruh organisasi, semua tingkatan dan pada semua fungsi yang ada. Kegiatan ini mencakup rentang kegiatan mulai dari pengesahan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, pengkajian ulang kinerja, pengamanan aktiva dan pemisahan tugas. Kegiatan pengendalian yang dapat dilakukan diantaranya penelahaan kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik dan pemisahan fungsi.

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai Bank, termasuk Direksi. Oleh karena itu kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari.

Aktivitas Pengendalian terdiri dari kebijakan dan prosedur yang menjamin pegawai melaksanakan arahan manajemen. Aktivitas Pengendalian meliputi review terhadap sistem pengendalian, pemisahan tugas dan pengendalian terhadap sistim informasi. Pengendalian terhadap sistim informasi meliputi dua cara, yakni :

1. *Gen*eral controls, mencakup kontrol terhadap akses, perangkat lunak, dan sistem Development.
2. Application controls, mencakup pencegahan dan deteksi transaksi yang tidak terotorisasi. Berfungsi untuk menjamin kelengkapan, akurasi, autorisasi and validasi dari proses transaksi yang terjadi.

Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Komponen ini mendukung semua komponen pengendalian lainnya dengan mengkomunikasikan tanggung jawab pengendalian kepada seluruh pegawai dan menyediakan informasi dalam sebuah bentuk dan kerangka waktu yang mengizinkan orang menyelesaikan tugasnya. Sistem informasi yang ada menghasilkan laporan-laporan yang berisi informasi mengenai kegiatan organisasi, keuangan dan informasi yang ada hubungannya dengan kepatuhan, yang memungkinkan penggunaannya untuk menjalankan dan mengendalikan organisasi.

Informasi ini tidak hanya berhubungan dengan data yang dihasilkan Internal, tetapi juga mengenai peristiwa-

Control Activities

This component is in the form of activities, policies, procedures and practices that ensure the achievement of institutional goals. This activity allows taking various necessary actions to manage risks to the achievement of organizational goals.

Control activities take place throughout the organization, at all levels and at all existing functions. This activity covers a range of activities ranging from ratification, authorization, verification, reconciliation, performance review, asset security and segregation of duties. Control activities that can be carried out include performance review, information processing, physical control and separation of functions.

Control activities must involve all employees of the Bank, including the Board of Directors. Therefore, control activities will run effectively if they are planned and implemented to control the identified risks. Control activities include the establishment of control policies and procedures as well as an earlier verification process to ensure that these policies and procedures are consistently complied with, and are activities that are inseparable from every function or daily activity of the Bank.

Control activities consist of policies and procedures that ensure employees carry out management directives. Control activities include a review of the control system, segregation of duties and control over the information system. Control of information systems includes two ways, namely:

1. *General controls, including control over access, software, and system development.*
2. *Application controls, including prevention and detection of unauthorized transactions. Serves to guarantee the completeness, accuracy, authorization and validation of the transaction process that occurs.*

Information and Communication (Information and Communication)

This component supports all other control components by communicating control responsibilities to all employees and providing information in a form and time frame that allows people to complete their tasks. The existing information system produces reports containing information about the organization's activities, finances and information related to compliance, which allows its use to run and control the organization.

This information relates not only to internally generated data, but also to external events, activities and conditions needed

peristiwa eksternal, kegiatan-kegiatan dan kondisi yang dibutuhkan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan pelaporan untuk pihak luar. Komunikasi yang efektif juga harus terjadi dalam bentuknya yang luas, mengalir ke bawah, melintasi berbagai tingkatan dalam organisasi dan juga ke atas.

Semua pegawai harus menerima informasi atau pesan dari Manajemen secara jelas yang menegaskan bahwa tanggung jawab menjalankan kontrol harus dilakukan secara sangat serius. Pegawai harus mengerti peran mereka dalam sistem Internal ***Control***, sama seperti kegiatan masing masing secara individual memiliki hubungan dengan pekerjaan orang lain. Pegawai harus memiliki alat atau media untuk mengkomunikasikan informasi ke atasan mereka. Mereka juga butuh untuk berkomunikasi secara efektif dengan pihak luar, seperti halnya pelanggan, pemasok (vendor), pemilik saham dan regulator.

Pengawasan (*Monitoring*)

Komponen ini memberikan kepastian yang memadai bahwa tujuan suatu organisasi dapat tercapai, manajemen harus memonitor sistem Internal Control untuk menentukan apakah sistem beroperasi seperti yang diinginkan dan dimodifikasi agar sesuai dengan perubahan dalam kondisi. Pemantuan merupakan suatu proses yang menilai mutu sistem Internal Control sepanjang waktu. Pemantuan mencakup personil yang tepat untuk menilai desain dan operasi pengendalian dengan dasar yang tepat waktu dalam mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Pengawasan ini juga melibatkan unsur eksternal terhadap Internal Control yang dilakukan oleh manajemen atau pihak lain di luar proses serta pelaksanaan metodologi independen seperti prosedur atau standar cheklist yang biasa dilakukan oleh pegawai dalam proses.

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Evaluasi/kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Bank Riau Kepri dilakukan oleh DIA dan segera melaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Utama dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau rekomendasi tindakan korektif belum ditindaklanjuti.

Hasil evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tersebut menjadi salah satu dasar Direksi dan Dewan Komisaris menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern di Bank Riau Kepri dan untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri telah berjalan baik dan Bank Riau

to inform decision making and reporting for external parties. Effective communication must also occur in its broad form, flowing downwards, across various levels in the organization as well as upwards.

All employees must receive information or messages from Management clearly confirming that the responsibility to exercise control must be taken very seriously. Employees must understand their role in the Internal Control system, just as each individual activity has a relationship with the work of others. Employees must have tools or media to communicate information to their superiors. They also need to communicate effectively with outside parties, such as customers, suppliers (vendors), shareholders and regulators.

Supervision (Monitoring)

This component provides reasonable assurance that the objectives of an organization can be achieved, management should monitor the Internal Control system to determine whether the system is operating as intended and modified to suit changing conditions. Monitoring is a process that assesses the quality of the Internal Control system over time. Monitoring includes appropriate personnel to assess the design and operation of controls on a timely basis in taking necessary corrective action. This supervision also involves elements external to Internal Control carried out by management or other parties outside the process as well as the implementation of independent methodologies such as procedures or standard checklists that are usually carried out by employees in the process.

EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

Evaluation/review or other monitoring measures on the effectiveness of the implementation of the Internal Control System at Bank Riau Kepri are carried out by the DIA and immediately reports to the Board of Commissioners, the Audit Committee and the President Director in the event that there are weaknesses that have not been corrected or recommendations for corrective actions have not been followed up.

The results of the evaluation of the effectiveness of the implementation of the Internal Control System became one of the basis for the Board of Directors and the Board of Commissioners to assess the effectiveness of the Internal Control System at Bank Riau Kepri and to determine improvements and improvements in the future. The internal control system carried out by Bank Riau Kepri has been

Kepri akan tetap melakukan pengembangan, evaluasi dan perbaikan yang dilakukan terus-menerus agar lebih optimal.

Sepanjang tahun 2021, sistem pengendalian intern diterapkan oleh masing-masing fungsi dalam Bank Riau Kepri yang didokumentasikan dalam pedoman/kebijakan, prosedur kerja, sistem dan standar akuntansi, hasil audit, serta respon Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan hasil temuan audit. Bank Riau Kepri secara berkelanjutan melakukan perbaikan proses-proses internal di setiap fungsi di Bank Riau Kepri dengan mengacu pada hasil audit baik internal maupun eksternal.

Pelaksanaan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada tahun 2021 dilaporkan kepada OJK secara per semester oleh Divisi Internal Audit dengan menilai efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Interna pada beberapa jaringan kantor Bank yang dijadikan sebagai sampel penilaian efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Bank Riau Kepri.
Hasil evaluasi sistem pengendalian intern sepanjang tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penilaian efektifitas pengelolaan risiko dan pengendalian internal pada unit kantor Cabang Tembilahan dan Divisi Treasury & International dinilai efektif.
2. Penilaian efektifitas pengelolaan risiko dan pengendalian internal pada unit kantor Cabang Pangkalan Kerinci, Cabang Ranai, Cabang Dumai, Cabang Pekanbaru, Cabang Siak Sri Indrapura, Cabang Bangkinang, Cabang Tanjung Pinang, Cabang Syariah Pekanbaru, Cabang Batam, Cabang Selatpanjang dan Cabang Pasir Pengaraian secara konsolidasi dinilai kurang efektif, hal ini tercermin dari masih terjadinya ketidakpatuhan dalam penerapan BPP Perkreditan & SOP Operasional yang diakibatkan lemahnya pengendalian internal yang dilakukan tiap lini bagian unit kerja.

Penilaian efektifitas pengelolaan risiko dan pengendalian internal pada Divisi Dana & Jasa, Divisi Operasional, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Perencanaan Strategis, Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi P2K, dan DSQ dinilai kurang efektif, hal ini tercermin adanya beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti.

STRATEGI ANTI FRAUD

Semakin meningkatnya kasus fraud di industri perbankan nasional membawa dampak negatif dan menimbulkan kerugian bagi nasabah dan/atau Bank, membuat Bank harus memiliki strategi yang tepat sebagai upaya pencegahan.

Strategi anti fraud merupakan wujud komitmen manajemen Bank untuk mengendalikan fraud yang ditetapkan dalam bentuk sistem pengendalian fraud. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan

running well and Bank Riau Kepri will continue to develop, evaluate and improve continuously to make it more optimal. flowing downwards, across various levels in the organization as well as upwards.
Throughout 2021, the internal control system is implemented by each function within Bank Riau Kepri which is documented in guidelines/policies, work procedures, accounting systems and standards, audit results, as well as responses from the Board of Directors and Board of Commissioners based on audit findings. Bank Riau Kepri continuously improves internal processes in every function at Bank Riau Kepri by referring to the results of both internal and external audits.

The implementation of the evaluation on the effectiveness of the implementation of the Internal Control System in 2021 is reported to the OJK on a semester basis by the Internal Audit Division by assessing the effectiveness of the implementation of the Internal Control System in several Bank office networks which are used as samples for assessing the effectiveness of the implementation of the Internal Control System at Bank Riau Kepri.
The results of the evaluation of the internal control system throughout 2021 can be concluded as follows:

1. *The assessment of the effectiveness of risk management and internal control at the Tembilahan Branch office unit and the Treasury & International Division is considered effective.*
2. *Assessment of the effectiveness of risk management and internal control at the Pangkalan Kerinci Branch, Ranai Branch, Dumai Branch, Pekanbaru Branch, Siak Sri Indrapura Branch, Bangkinang Branch, Tanjung Pinang Branch, Pekanbaru Syariah Branch, Batam Branch, Selatpanjang Branch and Pasir Pengaraian Branch on a consolidated basis considered less effective, this is reflected in the continued non-compliance in the application of BPP Credit & Operational SOPs due to weak internal controls carried out by each line of the work unit.*

The assessment of the effectiveness of risk management and internal control in the Funds & Services Division, Operational Division, Risk Management Division, Strategic Planning Division, Corporate Secretariat Division, P2K Division, and DSQ is considered less effective, this is reflected in several findings that need to be followed up.

ANTI-FRAUD STRATEGY

The increasing number of fraud cases in the national banking industry has a negative impact and causes losses to customers and/or the Bank, making the Bank must have the right strategy as a prevention effort.

The anti-fraud strategy is a manifestation of the Bank's management's commitment to controlling fraud, which is set out in the form of a fraud control system. This strategy requires management to mobilize resources so that the

sumber daya agar sistem pengendalian fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

Strategi anti fraud Bank Riau Kepri tertuang dalam Buku Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud No SK: 028/ KEPDIR/2021 Tanggal 30 April 2021. Strategi Anti Fraud diimplemetasikan dalam 4 pilar yaitu :

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Bank telah membentuk Divisi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/ KEPDIR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, yang bertanggung jawab kepada Direksi untuk melakukan fungsi pengelolaan risiko secara independen, menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya, Divisi Manajemen Risiko disupport oleh 2 (dua) bagian yaitu Bagian Pengendalian Risiko yang melakukan strategi manajemen risiko dan pengelolaan risiko yang terjadi di Bank, dan Bagian Pengembangan dan Penerapan Kebijakan yang berfungsi menyusun dan me***review*** kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian risiko terhadap seluruh aktivitas operasional Bank.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank Riau Kepri telah membentuk struktur organisasi terkait manajemen risiko. Organisasi ini adalah organisasi independen yang bertugas untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mengendalikan seluruh eksposur risiko yang melekat pada aktivitas bisnis Bank Riau Kepri. Pengelolaan manajemen risiko Bank Riau Kepri dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

fraud control system can be implemented effectively and sustainably.

The anti-fraud strategy of Bani Riau Riau Islands is stated in the Guidebook for the Implementation of Anti-Fraud Strategy No. SK: 028/KEPDIR/2021 dated April 30, 2021. The Fraud Queuing Strategy is implemented in 4 pillars, namely:

1. *Prevention*
2. *Detection*
3. *Investigation, Reporting and Sanctions*
4. *Monitoring, Evaluation and Follow-up*

RISK MANAGEMENT DIVISION

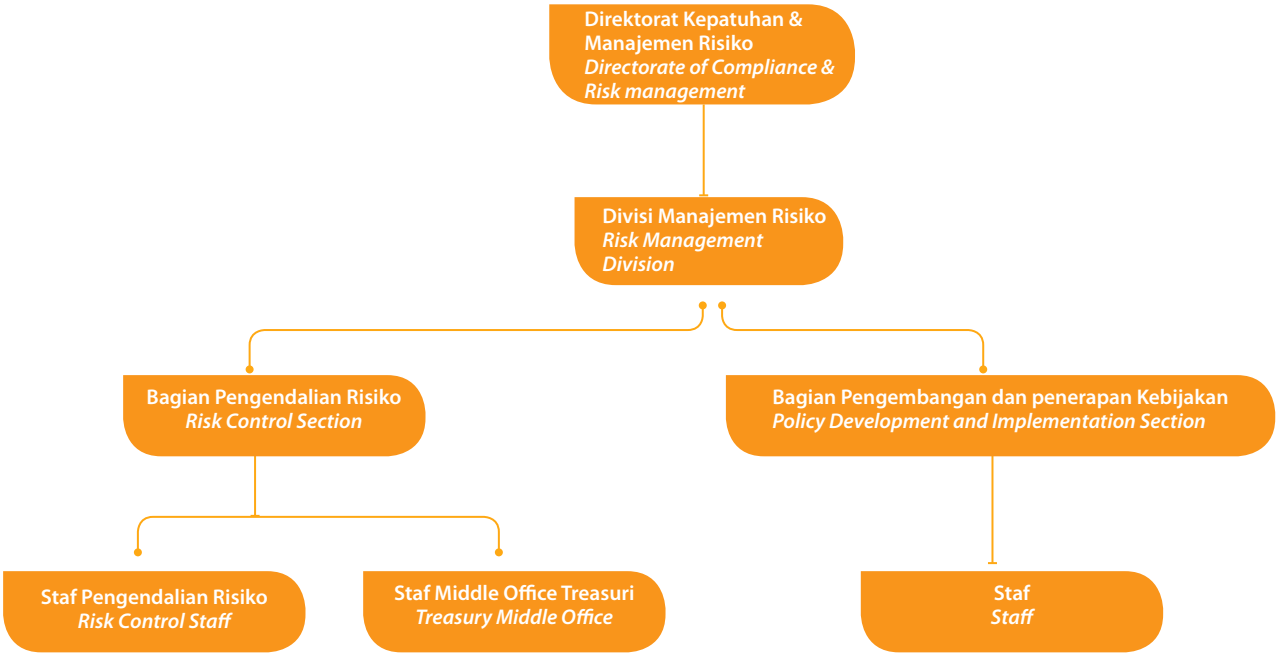
The Bank has established a Risk Management Division based on the Decree of the Board of Directors Number 053/KEPDIR/2021 dated August 9, 2021 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, which is responsible to the Board of Directors to carry out risk management functions independently, comprehensively, integratedly, measurable and controllable. In carrying out its operational activities, the Risk Management Division is supported by 2 (two) major divisions, namely the Risk Control Division which carries out risk management strategies and risk management in the Bank, and the Policy Development and Implementation Division which functions to formulate and review policies related to the management of the Bank. and risk control of all operational activities of the Bank.

RISK MANAGEMENT DIVISION ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In order to implement effective risk management, Bank Riau Kepri has established an organizational structure related to risk management. This organization is an independent organization tasked with identifying, measuring, monitoring, and controlling all risk exposures inherent in the business activities of Bank Riau Kepri.

Adapun bagan struktur organisasi manajemen risiko yaitu

The risk management organizational structure chart is



PROFIL PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

PROFIL PEMIMPIN DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Andi Mulya Pemimpin Divisi Diviisi Manajmeen Risiko (Periode Januari 2021- Agustus 2021)	
Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Pekanbaru, 16 September 1966. Usia 55 tahun per 31 Desember 2021
Riwayat Pendidikan	Menyelesaikan Studi di Bidang Akuntasi dan meraih gelar Sarjana dari STIE-Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Bandung pada tahun 1993
Pengalaman Kerja	Bergabung di Bank Riau Kepri pada tahun 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya : - Pemimpin Bagian Pengelolaan Dana Divisi Treasury & Internasional (2002 s/d 2010) - Pemimpin Divisi Treasury & Internasional (2010 s/d 2016) - Pemimpin Divisi Treasury & Internasional merangkap sebagai Pgs. Pemimpin Divisi Operasional (2013) - Pemimpin Divisi Produk Dana & Jasa (2016 s/d 2017) - Pemimpin Divisi Umum (2017 s/d 2019) - Pemimpin Divisi Konsumer (2019 s/d 2020) - Pemimpin Divisi Komersial (2020 s/d 2021) - Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (2021) - Pemimpin Divisi Komersial (2021 s/d Jan 2022)
Dasar Hukum Pengangkatan	SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 9 Agustus 2021
Periode Menjabat	11 Januari 2021- 09 Agustus 2021

Yuharman **Pemimpin Divisi Manajemen Risiko** (Periode Agustus- Desember 2021)	
Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
Domisili	Pekanbaru, Riau
Tempat dan Tanggal Lahir/Usia	Lahir di Pasir Pengaraian, 6 Desember 1966. Usia 55 tahun per 31 Desember 2021
Riwayat Pendidikan	Menyelesaikan Studi di Bidang Akuntasi dan meraih gelar Sarjana dari Universitas Riau (UNRI) tahun 1993
Pengalaman Kerja	Bergabung di Bank Riau Kepri mulai tahun 1994. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain : - Pemimpin Cabang Bangkinang (2004 s/d 2007) - Pemimpin Cabang Pasir Pengaraian (2007 s/d 2009) - Pemimpin Cabang Pasar Pusat (2009 s/d 2014) - Pemimpin Cabang Utama (2014 s/d 2016) - Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (2016 s/d 2019) - Pemimpin Divisi Produk Dana dan Jasa (2019 s/d 2021) - Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Agus 2021 s/d Des 2021)
Dasar Hukum Pengangkatan	SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021
Periode Menjabat	12-08-2021 s/d 31-12-2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengelola strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh ***Risk Management Committee*** (RMCO) dan telah disetujui oleh Direksi serta memantau pelaksanaannya.
2. Mengidentifikasi risiko dan mengumpulkan data/ informasi yang relevan untuk pengukuran, analisa dan pemantauan risiko.
3. Melakukan pengukuran dan analisa risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank.
4. Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank.
5. Menetapkan dan mengembangkan metode, model dan parameter yang digunakan untuk pengukuran risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional.
6. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai ***middle office treasury***.
7. Membuat Laporan Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko Bank dan Laporan lainnya yang terkait risiko untuk kepentingan internal dan eksternal.
8. Melakukan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
9. Mengkaji dan mengidentifikasi kebutuhan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) sesuai arah pengembangan manajemen risiko Bank.
10. Melakukan identifikasi risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru dan menetapkan sistem pengendalian serta mitigasi risikonya.
11. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi risiko kepada satuan kerja operasional (***risk taking unit***) dan atau kepada RMCO.
12. Mengelola pemenuhan Sertifikasi Manajemen Risiko yang wajib dipenuhi oleh Pengurus dan Pejabat Bank
13. Melakukan peninjauan ulang terhadap penerapan manajemen risiko pada ***risk taking unit.***

PELAKSANAAN TUGAS DIVISI MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan ***stress testing*** dampak pandemi Covid-19 pada kinerja keuangan Bank secara berkala.
2. Melakukan kajian risiko terhadap rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktifitas bank yang dilakukan oleh seluruh unit bisnis.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT DIVISION

The duties and responsibilities of the Risk Management Division are as follows:

1. *Manage risk management strategies recommended by the Risk Management Committee (RMCO) and have been approved by the Board of Directors and monitor their implementation.*
2. *Identify risks and collect relevant data/information for risk measurement, analysis and monitoring.*
3. *Perform measurement and analysis of credit risk, market risk, operational risk and other risks in each of the Bank's functional activities.*
4. *Monitoring and controlling credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk and other risks in each of the Bank's functional activities.*
5. *Establish and develop methods, models and parameters used for measuring credit risk, market risk, liquidity risk and operational risk.*
6. *Coordinate the implementation of duties and responsibilities as a middle office treasury.*
7. *Making Bank Soundness Level Reports, Bank Risk Profiles and other reports related to risks for internal and external interests.*
8. *Performing the calculation of the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM).*
9. *Reviewing and identifying the need for a Risk Management Information System (SIMR) in accordance with the direction of the Bank's risk management development.*
10. *Identifying risks inherent in new products or activities and establishing control systems and risk mitigation.*
11. *Recommend tactical and strategic steps to mitigate risk to operational work units (risk taking units) and/or to RMCO.*
12. *Manage the fulfillment of Risk Management Certification that must be fulfilled by Bank Management and Officials*
13. *Reviewing the implementation of risk management in the risk taking unit.*

IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE RISK MANAGEMENT DIVISION IN 2021

The implementation of the Tasks of the Risk Management Division in 2021 is as follows:

1. *Carry out stress testing of the impact of the Covid-19 pandemic on the Bank's financial performance on a regular basis.*
2. *Conduct risk studies on plans for product issuance and/ or implementation of bank activities carried out by all business units.*

3. Melakukan perhitungan ATMR Kredit, ATMR Risiko Operasional dan ATMR Risiko Pasar, sekaligus menganalisis dalam menunjang rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
4. Menghitung kecukupan modal sesuai dengan profil risiko dan strategi untuk memelihara tingkat permodalan, termasuk menetapkan ***Risk Appettite***.
5. Melakukan perhitungan ***Leverage ratio***.
6. Melakukan perhitungan ***Sentivity to market***.
7. Dalam penerapan ***Business Continuity Plan*** untuk meminimalisir dampak Covid-19 Bank telah mengeluarkan SE Direksi yang memuat protokol yang wajib dijalankan oleh seluruh pegawai dalam menjaga kelangsungan usaha dan bisnis Bank.
8. Mengembangkan kepedulian dan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi salah satunya dengan sosialisasi Aplikasi ***Operational Risk Self assessment*** (ORSA) dan budaya peduli risiko.
9. Mengelola risiko, baik yang dapat diperkirakan (***expected***) maupun yang tidak dapat diperkirakan (***unexpected***), yang melekat pada setiap produk, aktivitas dan kegiatan usaha/bisnis Bank.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi Bank Riau Kepri telah membentuk organ pendukung Direksi untuk membantu kelancaran tugasnya. Direksi Bank Riau Kepri dibantu oleh Komite-komite yang bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Sampai dengan 31 Desember 2021, Bank Riau Kepri telah membentuk 6 (enam) Komite yang bertugas untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh Direksi dalam mengambil keputusan.

Berikut adalah 6 (enam) Komite di bawah Direksi:
1. Komite ALCO (Asset & Liabilities)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi
4. Komite Sumber Daya Manusia
5. Komite Kebijakan Perkreditan (Komite Kebijakan Bisnis)
6. Komite Pembiayaan

ASSET AND LIABILITIY COMMITTEE (KOMITE ALCO)

Pengelolaan seluruh risiko bisnis Bank harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk itu, dalam proses pelaksanaan pengelolaan ***asset*** dan ***liability***, Bank Riau Kepri telah memiliki Komite ALCO.

3. Perform calculations of RWA for Credit, Operational Risk RWA and Market Risk RWA, as well as analyzing the ratio to support the Minimum Capital Adequacy Ratio.

4. Calculating capital adequacy in accordance with the risk profile and strategy to maintain the level of capital, including determining the Risk Appetite.
5. Performing Leverage ratio calculations.
6. Performing Sentivity to market calculations.
7. In implementing the Business Continuity Plan to minimize the impact of Covid-19, the Bank has issued an SE Board of Directors which contains protocols that must be carried out by all employees in maintaining the continuity of the Bank's business and business.
8. Developing awareness and risk management culture at all levels of the organization, one of which is by socializing the Operational Risk Self-assessment (ORSA) application and a risk-aware culture.
9. Manage the risks, both expected and unpredictable, which are inherent in every product, activity and business activity of the Bank.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out their duties, the Board of Directors of Bank Riau Kepri has established a supporting organ for the Board of Directors to assist the smooth running of their duties. The Board of Directors of Bank Riau Kepri is assisted by committees whose task is to provide advice and recommendations related to the policies and directives of the Board of Directors. As of December 31, 2021, Bank Riau Kepri has established 6 (six) Committees whose task is to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors through suggestions and recommendations that can be used as reference by the Board of Directors in making decisions.
The following are 6 (six) Committees under the Board of Directors:
1. ALCO (Assets & Liabilities) Committee
2. Risk Management Committee
3. Information Technology Steering Committee
4. Human Resources Committee
5. Credit Policy Committee (Business Policy Committee)
6. Financing Committee

ASSET AND LIABILITIY COMMITTEE (ALCO COMMITTEE)

Management of all Bank business risks must be carried out in a systematic, integrated and sustainable manner. For this reason, in the process of implementing asset and liability management, Bank Riau Kepri already has an ALCO Committee.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN ALCO

Susunan keanggotaan Komite ALCO Bank Riau Kepri berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 065/KEPDIR/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Susunan Organisasi Asset Liability Committee (ALCO) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri adalah sebagai berikut:

ALCO STRUCTURE AND MEMBERSHIP

The membership composition of the ALCO Committee of Bank Riau Kepri based on the Decree of the Board of Directors Number 065/KEPDIR/2021 dated September 23, 2021 concerning the Organizational Structure of the Asset Liability Committee (ALCO) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri is as follows:

Tabel Rapat Komite ALCO 2021
ALCO Committee Meeting Table 2021

Ketua I merangkap anggota tetap	Direktur Utama	*President director*
Ketua II merangkap anggota tetap	Direktur Dana dan Jasa	*Director of Funds and Services*
Wakil Ketua merangkap anggota tetap	Direktur Kredit dan Syariah Direktur Operasional Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	*Director of Credit and Sharia* *director of Operations* *Director of Compliance and Risk Management*
Sekretaris merangkap anggota tetap	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional	*Treasury & International Division Leader*
Anggota tetap	Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Pemimpin Divisi Operasional Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi ***Financial & Review***	*Head of Commercial Division* *Consumer Division Leader* *Micro, Small & Medium Division Leader* *Sharia Division Leader* *Head of Funds and Services Division* *Head of Operations Division* *Compliance Division Leader* *Head of Risk Management Division* *Strategic Planning Division Leader* ***Head of Financial & Review Division***
Anggota Tidak Tetap	Pemimpin Divisi Umum Pemimpin Divisi Hukum Pemimpin Divisi Internal Audit Pemimpin Divisi Manajemen SDM Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit	*General Division Leader* *Legal Division Leader* *Head of Internal Audit Division* *HR Management Division Leader* *Head of Information Technology and Systems Division* *Credit Rescue and Settlement Division Leader*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ALCO

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO adalah melakukan pengelolaan ***Asset*** dan ***Liabilities Management*** (ALMA) yang meliputi liq***uidity management, gap management, forex management, earning and investment management,*** dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya kepada posisi Bank Riau Kepri dengan menghitung ***cost of funds,*** menetapkan ***base lending rate/prime landing rate*** dan menetapkan internal ***fund transfer price***.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF ALCO

The duties and responsibilities of the ALCO Committee are to manage Asset and Liabilities Management (ALMA) which includes liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management, by evaluating the development and prospects of economic indicators and their impact on the position of Bank Riau Kepri by calculating cost of funds, determine the base lending rate/ prime landing rate and determine the internal fund transfer price.

PELAKSANAAN TUGAS ALCO

Sepanjang tahun 2021, Komite ALCO telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat/pembahasan, dengan rincian sebagai berikut:

ALCO'S TASK IMPLEMENTATION

Throughout 2021, the ALCO Committee has held 13 (thirteen) meetings/discussions, with the following details:

Tabel Rapat Komite ALCO 2021
ALCO Committee Meeting Table 2021

RAPAT KOMITE ALCO TAHUN 2021 *ALCO COMMITTEE MEETING IN 2021*		
Tanggal *Date*	Agenda	*Agenda*
29 Januari 2021	***Review*** Keputusan ALCO terakhir ***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	*Last ALCO Decision Review* *Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Interest Rates and Price Management* *Other Discussion*

RAPAT KOMITE ALCO TAHUN 2021 *ALCO COMMITTEE MEETING IN 2021*		
Tanggal *Date*	Agenda	*Agenda*
19 Februari 2021	***Review*** Keputusan ALCO terakhir ***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	*Last ALCO Decision Review* *Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Interest Rates and Price Management* *Other Discussion*
12 Maret 2021	***Review*** Keputusan ALCO terakhir ***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	*Last ALCO Decision Review* *Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Interest Rates and Price Management* *Other Discussion*
15 April 2021	***Review*** Keputusan ALCO terakhir ***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	*Last ALCO Decision Review* *Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Interest Rates and Price Management* *Other Discussion*
10 Mei 2021	***Review*** Keputusan ALCO terakhir ***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	*Last ALCO Decision Review* *Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Interest Rates and Price Management* *Other Discussion*
11 Juni 2021	***Review*** Keputusan ALCO terakhir ***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	*Last ALCO Decision Review* *Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Interest Rates and Price Management* *Other Discussion*
19 Juli 2021	***Review*** Keputusan ALCO terakhir ***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	*Last ALCO Decision Review* *Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Interest Rates and Price Management* *Other Discussion*
31 Agustus 2021	***Review*** Keputusan ALCO terakhir ***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	*Last ALCO Decision Review* *Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Interest Rates and Price Management* *Other Discussion*
21 September 2021	***Review*** Keputusan ALCO terakhir ***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	*Last ALCO Decision Review* *Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Interest Rates and Price Management* *Other Discussion*
25 Oktober 2021	***Review*** Keputusan ALCO terakhir ***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	*Last ALCO Decision Review* *Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Interest Rates and Price Management* *Other Discussion*
08 November 2021	***Review*** Keputusan ALCO terakhir ***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	*Last ALCO Decision Review* *Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Interest Rates and Price Management* *Other Discussion*
30 November 2021	***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Proyeksi Asset dan Laba Rugi Desember 2021 Pembahasan Lainnya	*Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Projected Assets and Profit and Loss December 2021* *Other Discussion*
23 Desember 2021	***Review*** Keputusan ALCO terakhir ***Update*** Ekonomi dan Pasar Manajemen Likuiditas Tingkat Suku Bunga dan Manajemen Harga Pembahasan Lainnya	*Last ALCO Decision Review* *Economic and Market Update* *Liquidity Management* *Interest Rates and Price Management* *Other Discussion*

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Direksi Bank sebagai wadah pengambilan keputusan dan pengevaluasian pelaksanaan, menyusun strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis dan menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif. Selain itu, pembentukan Komite Manajemen Risiko juga bertujuan untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen sekaligus sebagai filter atau pemberi peringatan dini (***early warning system***) terhadap kegiatan usaha Bank yang senantiasa tidak lepas dari risiko.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (RMCO) dibentuk bertujuan untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen. Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor NO.099/KEPDIR/2020 tentang Komite Manajemen Risiko. Susunan keanggotaan Komite Manajemen Risiko di Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee is a committee formed by the Board of Directors of the Bank as a forum for decision making and evaluating implementation, formulating strategies and guidelines for implementing risk management, determining matters related to business decisions and improving the implementation of risk management based on the results of the evaluation of the implementation of the risk management process and system. effective. In addition, the establishment of the Risk Management Committee also aims to carry out the function of evaluating risk management independently as well as as a filter or early warning system for the Bank's business activities which are always subject to risk.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

The Risk Management Committee (RMCO) was formed to carry out the function of evaluating risk management independently. The establishment of the Risk Management Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors Number NO. 099/KEPDIR/2020 concerning the Risk Management Committee. The membership structure of the Risk Management Committee at Bank Riau Kepri is as follows.

Tabel Susunan Keanggotan Komite Manajemen Risiko
Table of Risk Management Committee Membership Composition

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO *RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEMBERSHIP*		
Ketua I *Chief I*	Direktur Utama	*President director*
Ketua II *Chief II*	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	*Director of Compliance & Risk Management*
Sekretaris *Secretary*	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	*Head of Risk Management Division*
Anggota *Member*	Direktur Operasional Direktur Dana dan Jasa Direktur Kredit dan Syariah Pemimpin Divisi Komersial Pemimpin Divisi Konsumer Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Pemimpin Divisi Treasuri & Internasional Pemimpin Divisi Dana & Jasa Pemimpin Divisi Keuangan Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis Pemimpin Divisi ***Financial Review***	*director of Operations* *Director of Funds and Services* *Director of Credit and Sharia* *Head of Commercial Division* *Consumer Division Leader* *Micro Small & Medium Division Leader* *Sharia Division Leader* *Credit Rescue & Settlement Division Leader* *Treasury & International Division Leader* *Head of Funds & Services Division* *Head of Finance Division* *Compliance Division Leader* *Strategic Planning Division Leader* *Head of Financial Review Division*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

1. Bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko yang efektif di Bank Riau Kepri.
2. Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman manajemen risiko.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposure risiko.
4. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
5. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko.
6. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia yang menyangkut penerapan manajemen risiko.
7. Mengembangkan budaya risiko pada seluruh jenjang organisasi.
8. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
9. Berwenang dan bertanggung jawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala, sebagaimana diatur/dipersyaratkan di dalam Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
10. Menjalankan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

1. *Responsible for the implementation of effective risk management at Bank Riau Kepri.*
2. *Develop risk management policies, strategies and guidelines.*
3. *Responsible for the implementation of risk management and risk exposure policies.*
4. *Determine the steps needed to ensure that the Bank has complied with Bank Indonesia regulations and other laws and regulations related to the implementation of risk management.*
5. *Monitor and maintain that the Bank's business activities do not deviate from the applicable provisions regarding the implementation of risk management.*
6. *Monitor and maintain the Bank's compliance with all agreements and commitments made by the Bank to Bank Indonesia regarding the implementation of risk management.*
7. *Develop a risk culture at all levels of the organization.*
8. *Determine matters related to business decisions that deviate from normal procedures.*
9. *Authorized and responsible for the improvement or improvement of risk management implementation that is carried out periodically, as regulated/required in the Standard Guidelines for the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*
10. *Carry out and pay attention to the prudential principle of the Bank in every implementation of duties and responsibilities.*

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2021 Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini:

IMPLEMENTATION OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE'S TASKS

Throughout 2021 the Risk Management Committee has held 2 (two) meetings with discussions as contained in the following table:

Tabel Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2021
Table 2021 of Risk Management Committee Meeting

RAPAT KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2021 *RISK MANAGEMENT COMMITTEE MEETING IN 2021*	
Tanggal *Date*	**Agenda** *Agenda*
23 Februari 2021 *February 23, 2021*	Pembahasan Laporan Tingkat Kesehatan Bank periode Desember 2020 *Discussion on the Bank Soundness Level Report for the period December 2020*
23 Desember 2021 *December 23, 2021*	Pembahasan ***Risk Appetite Statement*** tahun 2022 *Discussion of the 2022 Risk Appetite Statement*

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Teknologi Informasi adalah komite yang bertugas memberikan pandangan dan rekomendasi tentang kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi di Bank Riau Kepri. Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 005/KEPDIR/2021 tanggal 05 Februari 2021 tentang Komite Pengarah Teknologi dan Sistem Informasi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The Information Technology Committee is a committee in charge of providing views and recommendations on policies for the management and development of information technology and systems at Bank Riau Kepri. The Information Technology Steering Committee was formed based on the Decree of the Board of Directors Number 005/KEPDIR/2021 dated February 5, 2021 regarding the Technology and Information System Steering Committee of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Tabel Struktur Dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi
Table of Structure and Membership of the Information Technology Steering Committee

Ketua (Merangkap Anggota)	Direktur Utama	*President director*
Wakil Ketua (Merangkap Anggota)	Direktur Operasional	*director of Operations*
Sekretaris (Merangkap Anggota)	Pemimpin Divisi Teknologi dan Sistem Informasi	*Head of Information Technology and Systems Division*
Anggota	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	*Director of Compliance & Risk Management*
	Direktur Dana dan Jasa	*Director of Funds and Services*
	Direktur Kredit dan Syariah	*Director of Credit and Sharia*
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	*Head of Risk Management Division*
	Pemimpin Divisi Keuangan	*Head of Finance Division*
	Pemimpin Divisi Operasional	*Head of Operations Division*
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis	*Strategic Planning Division Leader*
	Pemimpin Unit Kerja Pengguna Utama TI	*Head of IT Main User Work Unit*
	Pemimpin Divisi Internal Audit selaku Satuan Kerja Pemantau	*Head of Internal Audit Division as Monitoring Work Unit*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain mencakup:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
2. Perumusan kebijakan, standar dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (***project charter***).
5. Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.
6. Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalikan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Bank.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Sepanjang tahun 2021 Komite Teknologi Informasi telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel di bawah ini:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Provide recommendations to the Board of Directors, including among others:

1. *Information Technology Strategic Plan which is in line with the Bank's business activity strategic plan.*
2. *Formulation of major Information Technology policies, standards and procedures.*
3. *Conformity between the approved Information Technology project and the Information Technology Strategic Plan.*
4. *Conformity between the implementation of the Information Technology project and the agreed project plan (project charter).*
5. *Conformity between Information Technology with the needs of management information systems and the needs of the Bank's business activities.*
6. *The effectiveness of measures in minimizing the risk of the Bank's investment in the Information Technology sector so that the Bank's investment in the Information Technology sector contributes to the achievement of the Bank's business objectives.*
7. *Monitoring of Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance.*
8. *Efforts to resolve various problems related to Information Technology that cannot be resolved by the work unit of users and organizers of Information Technology in an effective, efficient and timely manner.*
9. *Adequacy and allocation of resources owned by the Bank.*

IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

Throughout 2021 the Information Technology Committee has held 2 (two) meetings with discussions as contained in the table below:

Tabel Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi
Table of the Implementation of the Tasks of the Information Technology Steering Committee

RAPAT KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI TAHUN 2021 *INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE MEETING IN 2021*	
Tanggal *date*	**Agenda** *Agenda*
16 Maret 2021 *March 16, 2021*	Rencana Strategis Teknologi Informasi tahun 2021 -2025 *Information Technology Strategic Plan 2021 -2025*
6 September 2021 *September 6, 2021*	1. Roadmap Teknologi Informasi tahun 2021 – 2025 2. Hal-hal lainnya terjkait TI *1. Information Technology Roadmap 2021 – 2025* *2. Other IT related matters*

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Komite Sumber Daya Manusia merupakan komite yang dibentuk untuk membantu Direksi dalam perencanaan dan p enerimaan pegawai, mutasi, manajemen jalur karir serta manajemen imbalan

HUMAN RESOURCES COMMITTEE

The Human Resources Committee is a committee formed to assist the Board of Directors in planning and hiring employees, transfers, career path management and remuneration management.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Tabel Susunan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia
Table of Membership Composition of Human Resources Committee

Susunan Keanggotaan Komite Sumber Daya Manusia *Human Resources Committee Membership*	
Direktur Utama *President director*	Ketua (merangkap Anggota) *Chairman concurrently member)*
Direktur Operasional *director of Operations*	Anggota *Member*
Direktur Kepatuhan dan Manejemen Risiko *Director of Compliance and Risk Management*	Anggota *Member*
Direktur Dana dan Jasa *Director of Funds and Services*	Anggota *Member*
Direktur Kredit dan Syariah *Director of Credit and Sharia*	Anggota *Member*
Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia *Head of Human Resources Management Division*	Sekretaris (bukan Anggota) *Secretary (not Member)*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Tugas Umum dan Tanggung Jawab Utama Komite SDM, meliputi:

1. Perencanaan dan penerimaan Pegawai
   a. Mempertimbangkan dan menyetujui prakiraan Pegawai
   b. Menyetujui rencana-rencana kegiatan tertentu dan waktu pelaksanaan yang diusulkan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
   c. Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran SDM secara keseluruhan
   d. Mempertimbangkan ragam dan target penerimaan pegawai (jumlah dan kualifikasinya)
2. Memutus usul/rekomendasi mengenai mutasi tenaga Pimpinan.
3. Manajemen Jalur Karir
   a. Memutus sistem dan pelaksanaan manajemen jalur karir
   b. Menentukan Program Jalur Karir tahunan bagi peserta manajemen jalur karir
   c. Menentukan penambahan/pengurangan peserta manajemen jalur karir
4. Manajemen Imbalan
   a. Menyetujui sistem/pedoman fasilitas pegawai (***employee benefits***).
   b. Menyetujui pedoman cara-cara penggajian dan pemberian imbalan lainnya.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE HUMAN RESOURCE COMMITTEE

General Duties and Main Responsibilities of the HR Committee, including:

1. *Employee Planning and Recruitment*
   a. *Consider and approve Employee forecasts*
   b. *Approve certain activity plans and implementation times proposed by the Human Resources Management Division*
   c. *Consider and approve the overall HR budget*
   d. *Considering the variety and target of employee recruitment (number and qualifications)*
2. *Decide on proposals/recommendations regarding the transfer of leadership staff.*
3. *Career Path Management*
   a. *Terminate the system and implementation of career path management*
   b. *Determine the annual Career Path Program for career path management participants*
   c. *Determine the addition/removal of career path management participants*
4. *Rewards Management*
   a. *Approving employee facilities/guidelines (employee benefits).*
   b. *Approve guidelines for methods of remuneration and other remuneration.*

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Sepanjang tahun 2021 Komite Sumber Daya Manusia telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan sebagaimana termuat di dalam tabel berikut ini:

IMPLEMENTATION OF HUMAN RESOURCES COMMITTEE'S TASKS

Throughout 2021 the Human Resources Committee has held meetings with discussions as contained in the following table:

Tabel Rapat Komite Sumber Daya Manusia Tahun 2021
Table of 2021 Human Resources Committee Meeting

RAPAT KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2021 *HUMAN RESOURCES COMMITTEE MEETING IN 2021*	
Tanggal *Date*	**Agenda** *Agenda*
11 Januari 2021 January 11, 2021	Rapat Mutasi/Promosi Pejabat Bank *Transfer Meeting/Promotion of Bank Officers*
08 Februari 2021 08 February 2021	Rapat BOD dengan Divisi MSDM *BOD Meeting with HR Division*
22 Februari 2021 February 22, 2021	Rapat Pembahasan Rencana SOT Bank Riau Kepri Syariah *Discussion Meeting on the SOT Plan of Bank Riau Kepri Syariah*
01 Juli 2021 01 July 2021	Rapat Pemenuhan Kebutuhan SOT dan Kebijakan Strategis SDM *SOT Needs Meeting and HR Strategic Policy*
21 Juli 2021 21 July 2021	Rapat Pembahasan Perubahan dan Pemenuhan SOT Bank Riau Kepri *Discussion Meeting on Changes and Fulfillment of SOT Bank Riau Kepri*
28 Juli 2021 July 28, 2021	Rapat Pembahasan Kebutuhan SDM dan Perubahan SOT *HR Needs Discussion Meeting and SOT Changes*
29 Juli 2021 29 July 2021	Rapat Komite Lanjutan (Pembahasan Pemenuhan Kebutuhan SDM atas Perubahan SOT) *Follow-up Committee Meeting (Discussion on Fulfilling HR Needs for Changes in SOT)*
10 Agustus 2021 August 10, 2021	Keputusan Sanksi Pelanggaran Pegawai *Employee Violation Sanction Decision*
13 Desember 2021	Keputusan Sanksi Pelanggaran Pegawai *Employee Violation Sanction Decision*

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan merupakan sektor yang sangat strategis di setiap usaha keuangan dan perbankan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor tersebut membutuhkan perencanaan, riset dan evaluasi mendalam. Setelah itu, harus diimplementasikan secara tepat dan dalam pengawasan yang cukup ketat.

CREDIT POLICY COMMITTEE

The Credit Policy Committee is a very strategic sector in every financial and banking business. Therefore, policies related to this sector require in-depth planning, research and evaluation. After that, it must be implemented properly and under strict supervision.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

STRUCTURE AND MEMBERSHIP OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan
Table Structure and Membership of the Credit Policy Committee

Ketua	Direktur Utama *President director*
Wakil Ketua *Vice Chairman*	Direktur Kredit dan Syariah *Director of Credit and Sharia*
Wakil Ketua *Vice Chairman*	Direktur Operasional *director of Operations*
Sekretaris I *Secretary I*	Pemimpin Divisi Komersial *Head of Commercial Division*
Sekretaris II *Secretary I*	Pemimpin Divisi Konsumer *Consumer Division Leader*
Sekretaris III *Secretary III*	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah *Micro, Small & Medium Division Leader*
Anggota *Member*	Pemimpin Divisi Syariah Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern Pemimpin Divisi Penanganan Kredit Bermasalah Pemimpin Divisi Manajemen Risiko *Sharia Division Leader* *Head of Internal Audit Unit* *Head of Troubled Loans Handling Division* *Head of Risk Management Division*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Fungsi Komite Kebijakan Perkreditan, meliputi sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/ kendala dalam penerapan KPB.
3. Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.
4. Memantau dan mengevaluasi:
   a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
   b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
   c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
   d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
   e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
   f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai denganyang ditetapkan dalam KPB.
   g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE

The functions of the Credit Policy Committee include the following:

1. *Provide input to the Board of Directors in the context of preparing the KPB, especially with regard to the formulation of the prudential principle in credit.*
2. *Supervise that CDE can be implemented and implemented consistently and consistently and formulate solutions if there are obstacles/obstacles in the implementation of CDE.*
3. *Conduct periodic reviews of KPB and provide advice to the Board of Directors if changes/improvements to KPB are needed.*
4. *Monitor and evaluate:*
   a. *The overall development and quality of the loan portfolio.*
   b. *The truth of the implementation of the authority to decide on credit.*
   c. *The correctness of the granting process, development and quality of credit granted to parties related to the Bank and certain large debtors.*
   d. *The validity of the implementation of the LLL provisions.*
   e. *Compliance with statutory provisions and other regulations in the implementation of lending.*
   f. *Settlement of non-performing loans in accordance with those stipulated in the KPB.*
   g. *The Bank's efforts to meet the adequate amount of Allowance for Impairment Losses (CKPN).*

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
   b. Hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan.
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Sepanjang tahun 2021 Komite Kebijakan Perkreditan telah melaksanakan tugasnya antara lain dengan memantau dan mengevaluasi:

1. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
2. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
3. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
4. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
5. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
6. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
7. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

KOMITE PEMBIAYAAN

Bank telah membentuk Komite Pembiayaan yang bertujuan memberikan masukan dan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Direktur Utama dalam mengambil keputusan. Pembentukan Komite Pembiayaan ditetapkan di dalam Keputusan Direksi Nomor 033/KEPDIR/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Susunan dan Tata Tertib Komite Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah.

The duties and responsibilities of the Credit Policy Committee are as follows:

1. *Submit periodic written reports to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:*
   a. *Results of supervision over the implementation and implementation of CDE.*
   b. *The results of the monitoring and evaluation that have been carried out.*
2. *Provide suggestions for improvement steps to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners.*

IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE CREDIT POLICY COMMITTEE

Throughout 2021 the Credit Policy Committee has carried out its duties, among others, by monitoring and evaluating:

1. *The overall development and quality of the loan portfolio.*
2. *The truth of the implementation of the authority to decide on credit.*
3. *The correctness of the granting process, development and quality of credit granted to parties related to the Bank and certain large debtors.*
4. *The validity of the implementation of the LLL provisions.*
5. *Compliance with statutory provisions and other regulations in the implementation of lending.*
6. *Settlement of non-performing loans in accordance with those stipulated in the KPB.*
7. *The Bank's efforts to meet the adequate amount of Allowance for Impairment Losses (CKPN).*

FINANCING COMMITTEE

The Bank has established a Financing Committee which aims to provide input and recommendations in the form of approval or rejection of financing as material for the President Director's consideration in making decisions. The establishment of the Financing Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 033/KEPDIR/2017 dated April 20, 2017 concerning the Structure and Order of the Financing Committee of PT Bank Riau Kepri Sharia Business Unit.

STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMBIAYAAN

FINANCING COMMITTEE STRUCTURE AND MEMBERSHIP

Tabel Struktur dan Keanggotaan Komite Pembiayaan
Table of Structure and Membership of the Financing Committee

Ketua *Chairman*	Direktur Kredit dan Syariah *Director of Credit and Sharia*
Sekretaris *Secretary*	Pemimpin Divisi Syariah *Sharia Division Leader*
Anggota *Member*	Direktur Dana dan Jasa Pemimpin Bagian Pembiayaan – Divisi Syariah Pemimpin Bagian Perencanaan, Pengembangan Produk dan Jasa – Divisi Syariah *Director of Funds and Services* *Head of Financing Division – Sharia Division* *Head of Planning, Development Products and Services – Sharia Division*
Supporting *Support*	Staf Pembiayaan – Divisi Syariah Staf Analis Pembiayaan – Divisi Syariah *Financing Staff – Sharia Division* *Financing Analyst Staff – Sharia Division*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMBIAYAAN

Untuk tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan, antara lain sebagai berikut:

1. Membahas permohonan pembiayaan nasabah di atas plafon tertentu yang diusulkan oleh kantor Cabang dan permohonan pembiayaan sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Keputusan Direktur Utama.
3. Rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan mengedepankan integritas.

Jika diperlukan komite pembiayaan dapat melakukan koordinasi dengan ALCO dalam aspek pendanaan pembiayaan.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE FINANCING COMMITTEE

The duties and responsibilities of the Financing Committee are as follows:

1. *Discussing customer financing applications above a certain ceiling proposed by Branch offices and syndicated financing applications, by prioritizing the principle of prudence.*
2. *Provide recommendations for approval or recommendation for rejection of financing as a material for consideration of the President Director's Decision.*
3. *Recommendations for approval or recommendation for rejection of financing are carried out professionally based on their competence, are objective and prioritize integrity.*

If necessary, the financing committee can coordinate with ALCO in the aspect of financing financing.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PEMBIAYAAN

Sepanjang tahun 2021 Komite Pembiayaan tidak ada menyelenggarakan rapat, mengingat selama tahun 2021 Unit Usaha Syariah (UUS) tidak memiliki pembiayaan yang diputuskan melalui rapat Komite Pembiayaan.

IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE FINANCING COMMITTEE

Throughout 2021 the Financing Committee did not hold meetings, considering that during 2021 the Sharia Business Unit (UUS) did not have financing which was decided through a meeting of the Financing Committee.

AUDITOR EKSTERNAL

EXTERNAL AUDITOR

Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi

Implementation of the External Audit Function

To ensure the effectiveness of the external audit function, the Bank has complied with the provisions regarding the relationship between Banks, Public Accounting Firms and the Financial Services Authority as stipulated in the Financial Services Authority provisions concerning Transparency and

dan Publikasi Laporan Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. RUPS memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris antara lain untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai auditor ekstern yang independen untuk memeriksa laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun buku 2021.
2. Bank telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2021 kepada Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit.
3. Proses pemilihannya dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Bank.

Penunjukan Akuntan Publik

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tahun buku 2020, Dewan Komisaris diberikan kewenangan oleh RUPS untuk menunjuk Auditor laporan keuangan Bank tahun buku 2021.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit melalui surat Komite Audit No. 024/KA-DK/2021 tanggal 19 Juli 2021, menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Selain penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) di atas, Dewan Komisaris berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit juga telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto untuk melaksanakan Audit Kinerja dan Kepatuhan & ***Review*** terhadap Teknologi Sistem Informasi Bank Riau Kepri tahun 2021.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Dan *Fee* Audit

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. Dalam penggunaan Auditor Eksternal, Bank Riau Kepri mengacu pada ketentuan POJK No. 13/POJK.03/2017 pada pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemberi jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik. Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilaksanakan secara efektif.

Publication of Bank Reports by doing the following:

1. *The GMS gave approval to the Board of Commissioners, among others, to appoint a Public Accounting Firm as an independent external auditor to examine the financial statements of Bank Riau Kepri for the 2021 financial year.*
2. *The Bank has assigned an audit assignment to the Annual Financial Statements for the period January to December 2021 to the Public Accounting Firm which was approved by the Board of Commissioners in accordance with the recommendations of the Audit Committee.*
3. *The selection process is carried out in accordance with the applicable goods and services procurement mechanism. To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed External Auditor may not have a conflict of interest with the Bank.*

Appointment of Public Accountant

In accordance with the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2020 financial year, the Board of Commissioners is authorized by the GMS to appoint an Auditor for the Bank's financial statements for the 2021 financial year.

Based on this authority, the Board of Commissioners in accordance with the recommendations of the Audit Committee through the letter of the Audit Committee No. 024/KA-DK/2021 dated 19 July 2021, appointed the Public Accounting Firm (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto to carry out an audit of the financial statements of Bank Riau Kepri for the 2021 financial year ending on 31 December 2021. In addition to the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) above, the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee has also appointed Public Accounting Firm (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto to carry out Performance and Compliance Audits & Review of Information System Technology of Bank Riau Kepri in 2021.

Public Accounting Firm, Accountant Name And Audit Fee

To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed External Auditor must not have a conflict of interest with the Company. In using the External Auditor, Bank Riau Kepri refers to the provisions of POJK No. 13/POJK.03/2017 in article 16 paragraph 1 which states that the general audit service provider of the financial statements of an entity is carried out by KAP for a maximum of 3 (three) consecutive financial years and by a Public Accountant. The audit by the Public Accounting Firm (KAP) has been carried out effectively.

KAP telah melaksanakan general audit terhadap Laporan Keuangan Bank Riau Kepri. Laporan Hasil Audit dan Management Letter telah disampaikan secara tepat waktu kepada Bank Riau Kepri sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar tidak pernah terlambat untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, KAP yang ditunjuk telah melaksanakan audit secara independen berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

KAP has conducted a general audit of the Financial Statements of Bank Riau Kepri. The Audit Result Report and Management Letter have been submitted in a timely manner to Bank Riau Kepri so that Publication Reports in newspapers are never too late to be submitted to Bank Indonesia/ Financial Services Authority and the Supreme Audit Agency. In carrying out its duties, the appointed KAP has conducted an independent audit based on the Professional Standards of Public Accountants compiled by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

Berikut daftar akuntan publik yang melakukan jasa audit Bank Riau Kepri.

The following is a list of public accountants who perform audit services for Bank Riau Kepri.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Fee Audit periode 5 (lima) tahun terakhir
Table of Public Accounting Firm, Accountant Name, Audit Fee for the last 5 (five) years

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	Fee Jasa Audit (Rp)
2021	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 3 *3rd period*	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Periode ke 3 *3rd period*	600.000.000
2020	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 2 *2nd period*	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Periode ke 2 *2nd period*	632.500.000
2019	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 1	Elviana Ezeddin, CA, CPA	Periode ke 1	600.000.000
2018	Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	Periode ke 3 *3rd period*	Defa Aulia Farhan, SE., Ak.,CA., CPA	Periode ke 2	645.370.000
2017	Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	Periode ke 2 *2nd period*	Defa Aulia Farhan, SE., Ak.,CA., CPA	Periode ke 1	615.000.000

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Kantor Akuntan Publik (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto selain untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan Bank Riau Kepri tahun buku 2021 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, juga melaksanakan Audit Kinerja dan Kepatuhan & ***Review*** terhadap Teknologi Sistem Informasi Bank Riau Kepri tahun 2021.

Other Services Provided by Accountants

Public Accounting Firm (KAP) Bustaman, Ezeddin & Putranto in addition to carrying out an audit of the financial statements of Bank Riau Kepri for the 2021 financial year ending on December 31, 2021, also carries out a Performance and Compliance Audit & Review of Information System Technology for Bank Riau Kepri in 2021.

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk identifikasi, pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan manajemen risiko, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dan diminimalisir dengan baik.

RISK MANAGEMENT

Risk management is an activity to control risk by going through a process for identification, measurement, monitoring and control of the portfolio to estimate potential losses that may occur. So with risk management, losses that may occur are expected to be properly mitigated and minimized.

Kebijakan manajemen risiko di Bank Riau Kepri berpedoman kepada Surat Keputusan Direksi Nomor 146/KEPDIR/2018 tanggal 20 Desember 2018 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

The risk management policy at Bank Riau Kepri is guided by the Decree of the Board of Directors Number 146/KEPDIR/2018 dated 20 December 2018 concerning Guidelines for the Implementation of PT Bank Riau Kepri Risk Management which refers to the Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 dated 16 March 2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks

Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Semakin kompleksnya produk dan aktifitas Bank maka risiko yang dihadapi Bank akan semakin meningkat. Peningkatan risiko tersebut perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai. Penerapan manajemen risiko dapat berjalan efektif sejauh adanya integrasi penuh dari kesadaran risiko (budaya risiko), pengukuran risiko dan strategi pengendaliannya. Sehingga peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko Bank akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan Bank Berbasis Risiko.

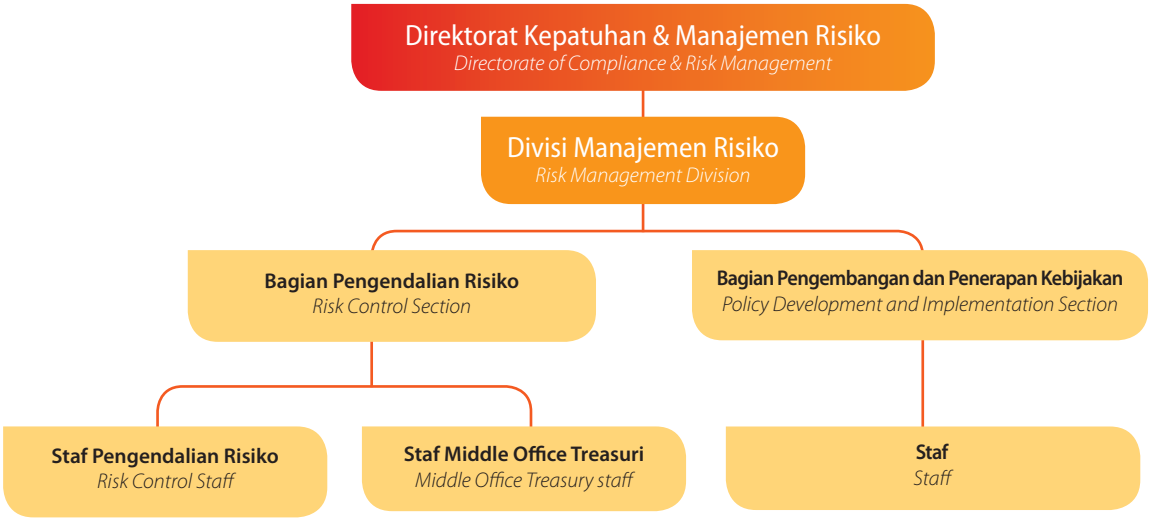
and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

The more complex the Bank's products and activities, the more risks faced by the Bank will increase. This increased risk needs to be balanced with an adequate quality of risk management implementation. The implementation of risk management can be effective as long as there is a full integration of risk awareness (risk culture), risk measurement and control strategies. Thus, improving the quality of the Bank's risk management implementation will support the effectiveness of the Risk-Based Bank's supervisory framework.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko & Unit Kerja Pendukung

Risk Management Organizational Structure & Supporting Work Units

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko
Organizational structure Risk Management Division



Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 146/KEPDIR/2018 tanggal 20 Desember 2018 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Struktur organisasi suatu Bank harus dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang berfungsi melakukan suatu transaksi (***risk taking unit***) adalah independen terhadap satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian intern (satuan kerja audit intern), serta independen pula terhadap Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Dalam kaitan dengan pengembangan struktur organisasi yang ada, Bank membentuk Komite Manajemen Risiko (***Risk Management Committee***) dan satuan kerja Manajemen Risiko (***Risk Management Unit***).

Struktur organisasi Bank harus mencerminkan alur pelaporan dan tanggung jawab yang jelas agar Satuan Kerja Pemilik Risiko (risk owner) dapat memantau dan mengendalikan risiko dengan baik di seluruh unit bisnis. Alur pelaporan dan tanggung jawab dibangun agar tercipta :

Based on POJK Number 18/POJK.03/2016 concerning Application of Risk Management for Commercial Banks and Books Guidelines for the Implementation of Risk Management for Bank Riau Kepriin accordance with the Decree of the Board of Directors Number 146/KEPDIR/2018 December 20, 2018 Regarding Implementation Guidelines Risk Management of PT Bank Riau Kepri Organizational structure a Bank should be designed to ensure that a work unit that functions to carry out a transaction (risk taking unit) is independent of the unit work that performs the function of internal control (unit) internal audit work), as well as being independent of Risk Management Unit.

In relation to the development of organizational structure existing, the Bank formed a Management Committee Risk (Risk Management Committee) and work unit Risk Management (Risk Management Unit).

The Bank's organizational structure must reflect the flow clear reporting and responsibilities so that the Unit The work of the risk owner (risk owner) can monitor and controlling risk well in all business units. Reporting flows and responsibilities are built so that created:

- Tanggung jawab yang jelas pada semua fungsi dan posisi.
- Tanggung jawab dan akuntabilitas manajemen terhadap seluruh komponen risiko.
- Limit risiko dan kebijakan risiko yang jelas melalui komunikasi ke seluruh organisasi.

Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan arah strategi bisnis.

1. Wewenang dan tanggung jawab Direksi meliputi :
   a. menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko;
   b. menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko;
   c. mengevaluasi dan memutuskan persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
   d. mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan;
   e. menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
   f. bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko;
   g. memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
   h. memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh Divisi Internal Audit (DIA);
   i. mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;

- *Clear responsibilities on all functions and position.*
- *Management responsibility and accountability to all risk components.*
- *Clear risk limits and risk policies through*

communication throughout the organization. Ability to adapt to change market conditions and the direction of business strategy.

1. *The powers and responsibilities of the Board of Directors include:*
   a. *formulate policies, strategies, and frameworks Risk Management in writing and comprehensive. After getting approval from the Board of Commissioners, the Board of Directors determines Management policies, strategies and framework Risk;*
   b. *compose, define, and update procedures and tools for identifying, measuring, monitoring and controlling Risk;*
   c. *evaluate and decide on approval transactions, including those that exceed the limit and authority for each level of office;*
   d. *evaluate and/or update policies, Risk Management strategy and framework in terms of there is a change in the factors that influence the Bank's business activities, Risk exposure, and/or Risk profile significantly;*
   e. *establish organizational structure including clear authority and responsibility at every level of position related to implementation of Risk Management;*
   f. *responsible for the implementation of policies, strategy, and Risk Management framework and Board-approved risk exposure Commissioners as well as evaluate and provide directions based on reports submitted by the Risk Management Unit including a report on the Risk profile;*
   g. *ensure that all material risks and the impact caused by the said Risk has been followed up and delivered accountability report to the Board Commissioner on a regular basis. The report in question among others, includes progress reports and problems related to material risks accompanied by corrective measures that have been, are being, and will do;*
   h. *ensure the implementation of the steps repair of problems or deviations in the Bank's business activities found by Internal Audit Division (DIA);*
   i. *develop a Risk Management culture including Risk awareness at all levels organization, including, among other things, communication that adequate for all levels of the organization about the importance of internal control effective; a. ensure an increase in resource competence*

j. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen Risiko;
k. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen
l. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan :
   1. keakuratan metodologi penilaian risiko
   2. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko
   3. ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
m. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait SDM, Direksi harus :
   1. Menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
   2. Memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di Bank dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit bisnis, SKMR maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko.
   3. Menetapkan dan mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko.
   4. Memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan dan personil satuan kerja bisnis, SKMR dan DIA dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak dan kemampuan yang memadai di bidang manajemen risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menjamin efektivitas proses manajemen risiko.
   5. Menempatkan pegawai yang kompeten pada masing-masing satuan kerja sesuai dengan sifat, jumlah dan kompleksitas kegiatan usaha.
   6. Memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan pada masing-masing satuan kerja tersebut memiliki:
      - Pemahaman mengenai risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau aktivitas Bank
      - Pemahaman mengenai faktor-faktor risiko yang relevan dan kondisi pasar yang mempengaruhi produk dan/atau aktivitas Bank serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor-faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha Bank
      - Kemampuan mengkomunikasikan implikasi eksposur risiko Bank kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara tepat waktu

j. human resources related to management Risk;

k. ensure that the Risk Management function has been applied independently
l. carry out periodic reviews for ensure:

   1. accuracy of risk assessment methodology
   2. adequacy of information system implementation risk management
   3. accuracy of management policies and procedures risk and risk limit setting
m. In order to carry out the responsibilities implementation of risk management related to HR, Directors must :
   1. Establish clear HR qualifications for every level of position related to implementation of risk management.
   2. Ensuring sufficient quantity and quality HR in the Bank and ensure HR meant to understand the duties and responsibilities the answer, both for business units, SKMR and support unit in charge of implementation of risk management.
   3. Establish and develop systems recruitment, development and training employees including managerial succession plans as well as adequate remuneration for ensure the availability of staff who competent in the field of risk management.
   4. Ensure competency improvement and integrity of the leadership and work unit personnel business, SKMR and DIA with attention factors such as knowledge, experience or track record and ability that adequate in the field of risk management through education and training programs that continuously to ensure effectiveness risk management process.
   5. Placing competent employees on each work unit in accordance with nature, number and complexity of business activities.
   6. Ensure that assigned employees in each of these work units have :
      - *Understanding of inherent risks on each product and/or activity of the Bank*
      - *Understanding of risk factors relevant and relevant market conditions affect products and/or activities Banks and the ability to estimate the impact of changing factors to business continuity Bank*
      - *Ability to communicate implications the Bank's risk exposure to the Board of Directors and Risk Management Committee appropriately*

7. Memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta memastikan seluruh SDM menerapkan secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

2. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris meliputi :
   a. menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (***risk appetite***) dan toleransi Risiko (***risk tolerance***) Bank;
   b. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan factor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan;
   c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko Bank secara efektif;
   d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
   e. memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.

3. Komite Manajemen Risiko
   a. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko umumnya bersifat tetap namun dapat ditambah dengan anggota tidak tetap sesuai dengan kebutuhan Bank.
   b. Keanggotaan Komite Manajemen Risiko paling sedikit terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
      1). Bank yang memiliki 5 (lima) orang Direksi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku, maka pengertian mayoritas Direksi dapat berarti Direktur Utama, Direktur Kepatuhan (***Compliance Director***) dan Direktur Bidang, atau Direktur Kepatuhan (***Compliance Director***) dengan 2 (dua) atau lebih Direktur Bidang.
      2). Bank menunjuk Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko sebagai anggota tetap Komite Manajemen Risiko.
      3). Pejabat eksekutif terkait merupakan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang memimpin ***Strategic Business Unit*** (SBU) dan ***Strategic Supporting Unit*** (SSU).

7. Ensure that all HR understand strategy, level of risk to be taken and risk tolerance, risk management framework which has been determined by the Board of Directors and approved by the Board of Commissioners and ensure that all HR implements consistently in activities handled.

2. The powers and responsibilities of the Board of Commissioners include:
   a. approve Risk Management policies including Risk Management strategies and frameworks that are determined in accordance with the level of Risk to be taken (risk appetite) and the Bank's risk tolerance;
   b. evaluate risk management policies and risk management strategies at least 1 (one) time in 1 (one) year or in a more frequent frequency in the event that there are changes in factors that significantly affect the Bank's business activities;
   c. evaluate the accountability of the Board of Directors and provide direction for improvement of the implementation of Risk Management policies on a regular basis. Evaluation is carried out in order to ensure that the Board of Directors manages the Bank's activities and Risks effectively;
   d. evaluate and decide on applications from the Board of Directors relating to transactions that require the approval of the Board of Commissioners;
   e. ensure that risk management policies and processes are implemented effectively and integrated into the overall risk management process.

3. Risk Management Committee
   a. The membership of the Risk Management Committee is generally permanent but can be added with non-permanent members according to the needs of the Bank.
   b. The membership of the Risk Management Committee shall at least consist of the majority of the Board of Directors and related executive officers, taking into account the following matters:
      1). Banks that have 5 (five) Directors as regulated in applicable regulations, the definition of majority of Directors can mean the President Director, Compliance Director and Director of Division, or Compliance Director with 2 (two) or more Directors Field.
      2). The Bank appointed the Director of Compliance & Risk Management as a permanent member of the Risk Management Committee.
      3). The relevant executive officers are officials one level below the Board of Directors who lead the Strategic Business Unit (SBU) and Strategic Supporting Unit (SSU).

4). Keanggotaan pejabat eksekutif dalam Komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam Komite Manajemen Risiko seperti Tresuri dan Investasi, Kredit dan Operasional, sesuai kebutuhan Bank.

c. Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang sekurang-kurangnya meliputi:
   1). Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi kondisi tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan ***Strategic Business Unit*** (SBU) dan ***Strategic Supporting Unit*** (SSU).
   2). Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.
   3). Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

4. Divisi Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.
Setiap unit organisasi wajib melaporkan kondisi risiko dan wajib memahami setiap perubahan risiko yang ada di unit kerjanya, dan melaporkan secara berkala kepada Divisi Manajemen Risiko bila terdapat perubahan-perubahan dan hal-hal spesifik.

Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
a. Pengelolaan strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko serta memantau pelaksanaannya.
b. Identifikasi risiko dan mengumpulkan data/ informasi yang relevan untuk pengukuran, analisa dan pemantauan Risiko.
c. Melakukan pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, dan Risiko Lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank.
d. Membuat laporan Tingkat Kesehatan bank, Profil Risiko Bank dan laporan lainnya yang terkait Risiko untuk kepentingan internal dan eksternal.

4). Membership of executive officers in the Risk Management Committee is adjusted to the issues discussed in the Risk Management Committee such as Treasury and Investment, Credit and Operations, according to the needs of the Bank.

c. The authority and responsibility of the Risk Management Committee is to provide recommendations to the President Director which at least includes:
   1). Formulation of Risk Management policies and their changes, including risk management strategies, level of risk taken and risk tolerance, risk management framework and contingency plans to anticipate abnormal conditions. The arrangement is carried out together with the leaders of the Strategic Business Unit (SBU) and the Strategic Supporting Unit (SSU).
   2). Improvement of the Risk Management process periodically or incidentally as a result of changes in the Bank's external and internal conditions that affect the capital adequacy, the Bank's risk profile and the ineffectiveness of risk management implementation based on the evaluation results.
   3). Determination of policies and/or business decisions that deviate from normal procedures, such as exceeding a significant business expansion compared to the Bank's previously determined business plan or taking positions or risk exposures that exceed the predetermined limits.

4. Risk Management Division

The Risk Management Division is directly responsible to the Director of Compliance & Risk Management.
Each organizational unit is required to report risk conditions and must understand any changes in risk in its work unit, and report periodically to the Risk Management Division if there are changes and specific matters.

The Risk Management Division has the following duties and responsibilities:
a. Management of risk management strategies recommended by the Risk Management Committee and monitoring their implementation.
b. Identify risks and collect relevant data/information for risk measurement, analysis and monitoring.
c. Monitoring and controlling Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, and Other Risks in each of the Bank's functional activities.
d. Make reports on bank soundness level, bank risk profile and other reports related to risk for internal and external interests.

e. Menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimun (KPMM).
f. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi Risiko kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) dan atau kepada Komite Manajemen Risiko (RMCO).
g. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka Sertifikasi Manajemen Risiko.
h. Meningkatkan penerapan Budaya Risiko

5. Satuan Kerja Operasional (SKO)
Penerapan secara efektif manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh unit kerja terutama Satuan kerja operasional (risk taking unit) di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang terutama yang terkait langsung dengan risiko. Tugasnya meliputi :
a. Melakukan seluruh kegiatan di masing– masing unit kerjanya dengan berpedoman pada penyelenggaraan pekerjaan yang ada serta kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko.
b. Mengendalikan eksposur risiko di unit kerja masing – masing
c. Menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Divisi Manajemen Risiko secara berkala.
d. Melakukan usulan terhadap hal–hal tertentu khususnya untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko.

Upaya Mengelola Risiko

Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko yang bertujuan untuk menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar yang dapat mengganggu permodalan Bank.

Langkah-langkah pengendalian Bank Riau Kepri berdasarkan profil risiko yang dimiliki Bank adalah sebagai berikut:
1. Bank telah membentuk struktur organisasi manajemen risiko yang terpusat dan independen yang memiliki fungsi mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola risiko-risiko dasar dan menetapkan kebijakan dan prosedur risiko.
2. Bank mengelola risiko dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.

e. Calculating the Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM).
f. Recommend tactical and strategic steps for risk mitigation to operational work units (risk taking units) and/or to the Risk Management Committee (RMCO).
g. Improving employee competence in the context of Risk Management Certification.
h. Improving the implementation of Risk Culture

5. Operational Work Unit (SKO)
Effective implementation of risk management is carried out by all work units, especially operational work units (risk taking units) at the Head Office and Branch Offices, especially those directly related to risk. His duties include:

a. Carry out all activities in each work unit based on the implementation of existing work as well as policies, guidelines, and strategies for implementing risk management.

b. Controlling risk exposure in each work unit

c. Submit reports or information on risk exposures managed by the relevant work unit to the Risk Management Division on a regular basis.

d. Make suggestions on certain matters, especially to improve the implementation of risk management.

Efforts to Manage Risk

Efforts in risk management include an assessment of the inherent risk profile and an assessment of the quality of risk management implementation that reflects a risk control system aimed at avoiding the potential for relatively larger losses that could disrupt the Bank's capital.

The control measures of Bank Riau Kepri based on the Bank's risk profile are as follows:

1. The Bank has established a centralized and independent risk management organizational structure that has the function of identifying, measuring, monitoring and managing basic risks and establishing risk policies and procedures.
2. The Bank manages risk by ensuring that all activities and relationships between the Bank's business activities and third parties are based on rules and requirements that can protect the interests of the Bank and ensure conformity between the Bank's business activities and other activities so that the Bank's reputation is maintained.

3. Dalam mengelola risiko khususnya risiko operasional seluruh pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola risiko pada unit kerja masing-masing serta memperhatikan kontrol yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Bank. Terkait hal ini Bank membuat aplikasi ***Operational Risk Self assessment*** (ORSA) untuk mendukung kemudahan dan efektivitas penerapan manajemen risiko khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional di Bank Riau Kepri.
4. Salah satu upaya Bank dalam mencegah dan mendeteksi fraud, Bank melakukan ***monitoring*** secara rutin terhadap data dan transaksi keuangan Bank melalui Aplikasi Anti ***Fraud***.
5. Bank melakukan ***stress testing*** secara berkala untuk mengukur tingkat ketahanan Bank dalam menghadapi skenario terburuk yang mungkin terjadi.
6. Me***review*** kebijakan dan prosedur Bank yang disesuaikan dengan ketentuan eksternal seperti POJK, SEOJK, PBI, SEBI dan peraturan eksternal lainnya serta ketentuan internal yang berlaku.

Penerapan Manajemen Risiko

Seiring dengan perkembangan bisnis bank yang semakin kompleks, kondisi eksternal dengan ketidakpastian, serta pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 sehingga terjadi peningkatan eksposure risiko, maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif yang bertujuan agar perusahaan tetap mampu memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham melalui pengelolaan modal secara komprehensif, memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas operasional bank.

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengelola setiap jenis risiko yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di Bank Riau Kepri dengan tujuan memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis Bank untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dalam mencapai laba, menjaga permodalan Bank, mendukung proses pengambilan keputusan, meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi reputasi Bank. Risiko adalah bagian dari bisnis Bank, sehingga dalam penerapan manajemen risiko, Bank menggunakan pendekatan pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional.

Pengelolaan risiko melalui permodalan disesuaikan dengan rencana strategis dan bisnis jangka panjang, serta kebijakan alokasi modal secara efisien sesuai dengan segmen bisnis yang memiliki profil risk-return

3. *In managing risk, especially operational risk, all employees have the duty and responsibility to manage risk in their respective work units and pay attention to effective controls to anticipate possible risks that could harm the Bank. In this regard, the Bank has developed an Operational Risk Self-Assessment (ORSA) application to support the ease and effectiveness of risk management implementation, especially in the process of identifying, measuring, monitoring and controlling operational risk at Bank Riau Kepri.*
4. *One of the Bank's efforts in preventing and detecting fraud, the Bank conducts regular monitoring of the Bank's financial data and transactions through the Anti Fraud Application.*
5. *The Bank conducts stress testing on a regular basis to measure the Bank's level of resilience in the face of the worst possible scenario.*
6. *Reviewing the Bank's policies and procedures in accordance with external regulations such as POJK, SEOJK, PBI, SEBI and other external regulations as well as applicable internal regulations.*

Application of Risk Management

Along with the increasingly complex development of the bank's business, external conditions with uncertainty, as well as the Covid-19 pandemic that has occurred since early 2020 resulting in an increase in risk exposure, it is necessary to implement effective risk management with the aim that the company is still able to maximize added value for shareholders. through comprehensive capital management, ensuring profitability and sustainable business growth as well as anticipating potential losses from bank operational activities.

Implementation of Risk Management is carried out by implementing an integrated risk management pattern to identify, assess, monitor and manage each type of risk in accordance with the policies and procedures that have been established at Bank Riau Kepri with the aim of providing a consistent risk management framework for the risks that exist in the process. the Bank's business to optimize business growth to achieve profit, maintain the Bank's capital, support the decision-making process, increase company value and protect the Bank's reputation. Risk is part of the Bank's business, so in implementing risk management, the Bank uses a risk management approach through capital and risk management through operational activities.

Risk management through capital is adjusted to strategic and long-term business plans, as well as an efficient capital allocation policy in accordance with business segments that have an optimal risk-return profile that includes 8 (eight)

yang optimal yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Stratejik. Pengelolaan risiko terus diupayakan agar sejalan dengan Road Map Basel I, Basel II dan Basel III serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai saat ini, Bank Riau Kepri senantiasa mengikuti dan menyesuaikan perkembangan maupun peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
Seiring dengan perkembangan bisnis bank yang semakin kompleks, kondisi eksternal dengan ketidakpastian, serta pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 sehingga terjadi peningkatan eksposure risiko, maka diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif yang bertujuan agar perusahaan tetap mampu memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham melalui pengelolaan modal secara komprehensif, memastikan profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mengantisipasi potensi kerugian dari aktivitas operasional bank

types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Compliance Risk, Reputational Risk and Strategic Risk. Risk management continues to be pursued to be in line with the Basel I, Basel II and Basel III Road Map as well as the provisions of the Financial Services Authority. Until now, Bank Riau Kepri has always followed and adapted the latest developments and regulations issued by banking authorities, including Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.
Along with the increasingly complex development of the bank's business, external conditions with uncertainty, as well as the Covid-19 pandemic that has occurred since early 2020 resulting in an increase in risk exposure, it is necessary to implement effective risk management with the aim that the company is still able to maximize added value for shareholders. through comprehensive capital management, ensuring profitability and sustainable business growth as well as anticipating potential losses from bank operational activities

Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui implementasi manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional Bank sehingga manajemen risiko mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas operasional Bank dan melalui pengelolaan permodalan agar mampu menyerap risiko yang dihadapi Bank Riau Kepri serta sesuai dengan persyaratan regulator. Manajemen risiko memiliki peran yang penting bagi Bank Riau Kepri dalam pengelolaan risiko guna mendukung kegiatan bisnis Bank secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan risiko yang baik, Bank berupaya meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Melalui pengelolaan risiko yang tepat dan efektif, Bank mendapatkan informasi terkini mengenai potensi risiko-risiko yang akan dihadapi sehingga dapat dengan cepat untuk mengambil langkah mitigasi risiko, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat memberikan nilai tambah (value added) bagi shareholder.

The implementation of risk management is carried out through the implementation of risk management in every operational activity of the Bank so that risk management is able to become an integral part in every operational activity of the Bank and through capital management in order to be able to absorb the risks faced by Bank Riau Kepri and in accordance with regulatory requirements.
Risk management has an important role for Bank Riau Kepri in managing risk in order to support the Bank's business activities in a sustainable manner. With good risk management, the Bank seeks to minimize potential losses that will occur. Through proper and effective risk management, the Bank obtains the latest information regarding the potential risks to be faced so that it can quickly take risk mitigation steps, which in the end is expected to be able to provide added value for shareholders.

Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi dan mengelola setiap jenis risiko yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan di Bank Riau Kepri dengan tujuan memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis Bank untuk mengoptimalkan pertumbuhan bisnis dalam mencapai laba, menjaga permodalan Bank, mendukung proses pengambilan keputusan, meningkatkan nilai perusahaan dan melindungi reputasi Bank. Kerangka Manajemen Risiko Bank Riau Kepri dikembangkan berdasarkan faktor-faktor Internal dan

Implementation of Risk Management is carried out by implementing an integrated risk management pattern to identify, assess, monitor and manage each type of risk in accordance with the policies and procedures that have been established at Bank Riau Kepri with the aim of providing a consistent risk management framework for the risks that exist in the process. the Bank's business to optimize business growth to achieve profit, maintain the Bank's capital, support the decision-making process, increase company value and protect the Bank's reputation. The Risk Management Framework of Bank Riau Kepri was developed based on internal and external factors which include but are not limited to Regulatory Provisions, development of

eksternal yang mencakup namun tidak terbatas pada Ketentuan Regulator, perkembangan metodologi dan best practices, bisnis Bank, data risiko, dan data kerugian.

Berdasarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Buku Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 146/KEPDIR/2018 tanggal 20 Desember 2018 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri, penerapan manajemen risiko mencakup 4 (empat) pilar, yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian secara berkala, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank Riau Kepri serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko (***risk oversight***) didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi.

Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyusunan, persetujuan, penerapan serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi didukung oleh Komite Sumber Daya Manusia, Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Kebijakan Bisnis dan Komite/Pembiayaan.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank Riau Kepri secara signifikan.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut di atas, yang dilakukan sekurangkurangnya secara triwulanan.
3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui wewenangan Direksi.

methodologies and best practices, Bank business, risk data, and loss data.

Based on POJK Number 18/POJK.03/2016 concerning the Application of Risk Management for Commercial Banks and the Guidelines for the Implementation of Risk Management for Bank Riau Kepri in accordance with the Decree of the Board of Directors Number 146/KEPDIR/2018 dated December 20, 2018 concerning Guidelines for the Implementation of Risk Management for PT Bank Riau Kepri, implementation of risk management includes 4 (four) pillars, namely:

1. *Active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners*
2. *Adequacy of risk management policies and procedures as well as setting limits*
3. *Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes and risk management information systems*
4. *Comprehensive internal control system*

Active Supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The Board of Commissioners conducts periodic assessments, evaluates risk management policies and provides recommendations on risk and the implementation of risk management at Bank Riau Kepri and evaluates the accountability of the Board of Directors for the implementation of Risk Management policies. The Board of Commissioners in carrying out the risk oversight function is supported by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration & Nomination Committee.

Active supervision of the Board of Directors is carried out, among others, by preparing, approving, implementing and evaluating the Bank's risk management policies and procedures. In carrying out its function of implementing effective risk management, the Board of Directors is supported by the Human Resources Committee, Information Technology Committee, Risk Management Committee, ALCO Committee, Business Policy Committee and Committee/ Financing.

The powers and responsibilities of the Board of Commissioners, at least include:

1. *Approve and evaluate risk management policies in the event that there are significant changes in factors that affect the business activities of Bank Riau Kepri.*
2. *Evaluating the accountability of the Board of Directors for the implementation of the risk management policies mentioned above, which is carried out at least on a quarterly basis.*
3. *Evaluate and decide on applications for proposals from the Board of Directors related to transactions or business activities that exceed the authority of the Board of Directors.*

Wewenang dan tanggung jawab Direksi, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional.
2. Penyusunan kebijakan dan strategi manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank Riau Kepri secara signifikan.
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank Riau Kepri secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada dewan Komisaris secara triwulanan.
4. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Bank Riau Kepri satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern yang berlaku
5. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
6. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan mengenai penerapan manajemen risiko.
7. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
8. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank Riau Kepri, untuk memastikan:
   a. Keakuratan metodologi penilaian risiko.
   b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko.
   c. Ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko.

KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO

Dalam tata kelola perbankan yang sehat (good governance) penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur yang ditetapkan secara jelas

The powers and responsibilities of the Board of Directors, at least include:

1. *Develop written and comprehensive risk management policies and strategies including the determination and approval of overall risk limits, per type of risk, and per functional activity.*
2. *Preparation of risk management policies and strategies in the event that there are changes in factors that significantly affect the business activities of Bank Riau Kepri.*
3. *Responsible for the implementation of risk management policies and risk exposures taken by Bank Riau Kepri as a whole, including evaluating and providing direction for risk management strategies based on reports submitted by the Risk Management Unit and submission of accountability reports to the Board of Commissioners on a quarterly basis.*

4. *Evaluating and deciding transactions that exceed the authority of Bank Riau Kepri officials one level below the Board of Directors or transactions that require approval in accordance with applicable internal policies and procedures*
5. *Develop a risk management culture at all levels of the organization, including, among others, adequate communication to all levels of the organization about the importance of effective internal control.*

6. *Ensuring the improvement of human resource competencies related to the implementation of risk management, among others by means of continuous education and training programs regarding the implementation of risk management.*
7. *Ensuring that the risk management function operates independently as reflected in, among other things, the separation of functions between the Risk Management Unit which carries out the identification, measurement, monitoring and control of risk and the work unit that performs and completes transactions.*

8. *Carry out periodic reviews with a frequency that is adjusted to the needs of Bank Riau Kepri, to ensure:*

   a. *The accuracy of the risk assessment methodology.*
   b. *Adequacy of risk management information system implementation.*
   c. *Accuracy of policies, procedures, and risk limit determination.*

ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT POLICIES AND PROCEDURES AND THE ESTABLISHMENT OF RISK LIMITS

In good banking governance, the implementation of effective risk management must be supported by a framework that includes clearly defined policies and procedures in line with the Bank's vision, mission and business strategy. Risk

sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana stratejik serta lebih berfokus pada risiko yang yang relevan dalam aktivitas usaha/bisnis Bank Riau Kepri, serta disusun dengan memperhatikan tingkat risiko yang bersedia diambil (risk appetite), toleransi risiko (***risk tolerance***) serta penetapan limit.

Sebagai acuan dalam pengelolaan risiko Bank Riau Kepri telah memiliki Kebijakan maupun prosedur Manajemen Risiko Bank yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus, misalnya di bidang perkreditan, treasury, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

Sebagai salah satu metode pengendalian Risiko, Bank Riau Kepri juga telah memiliki pedoman terkait limit risiko. Limit risiko merupakan ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh manajemen. Penetapan limit risiko Bank Riau Kepri ditetapkan dalam kebijakan tentang ***Risk Appetite Statement*** yang bersifat strategis dan memerlukan persetujuan dari Direksi. Dalam Risk Appetite Statement diatur tentang Limit risiko yang terkait dengan Penyelarasan Strategi, Kecukupan Modal, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum dan Risiko Stratejik.

Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen Bank. Bank terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem informasi manajemen risiko yang komprehensif sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin. Sebagai proses yang berkelanjutan Bank juga terus mengembangkan dan menyempurnakan berbagai model dan sistem dalam rangka pengendalian risiko yang mencakup seluruh jenis risiko.

Tujuan dari sistem informasi manajemen risiko adalah untuk memastikan data yang dibutuhkan tersedia, akurat, informatif dan tepat waktu. Sistem informasi manajemen risiko Bank Riau Kepri menggunakan aplikasi antara lain aplikasi ***Contingecy Funding Plan*** (CFP), aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB), aplikasi ICAAP dan aplikasi Operational ***Risk Self assessment*** (ORSA).

Management Policy is a written direction in implementing risk management and must be in line with the vision, mission, and strategic plan and focuses more on relevant risks in the business activities of Bank Riau Kepri, and is prepared by taking into account the level of risk that is willing to be taken (risk appetite).), risk tolerance and limit setting.

As a reference in risk management, Bank Riau Kepri already has a Bank Risk Management Policy and procedure which is used as the main guideline in implementing risk management. For more specific business areas, the Bank has more specific policies and procedures, for example in the areas of credit, treasury, and operations. The policies and procedures, among others, regulate the setting of limits for each activity, both at the portfolio and transactional levels.

As a method of risk control, Bank Riau Kepri also has guidelines regarding risk limits. Risk limit is a threshold to determine the intensity level of risk mitigation to be implemented by management. The determination of the risk limit of Bank Riau Kepri is stipulated in the policy regarding the Risk Appetite Statement which is strategic in nature and requires approval from the Board of Directors. The Risk Appetite Statement regulates risk limits related to Strategy Alignment, Capital Adequacy, Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk and Strategic Risk.

Adequacy of Risk Management Information System

The risk management information system is part of the Bank's management information system. The Bank continues to develop and improve a comprehensive risk management information system framework so that it can provide information on potential risks early and then take adequate steps to mitigate the impact of risks to a minimum. As a continuous process, the Bank also continues to develop and improve various models and systems in the context of risk control covering all types of risk.

The purpose of a risk management information system is to ensure that the required data is available, accurate, informative and timely. The Bank Riau Kepri risk management information system uses applications including the Contingecy Funding Plan (CFP) application, the Bank Soundness Level (TKB) application, the ICAAP application and the Operational Risk Self assessment (ORSA) application.

Sistem Informasi manajemen risiko ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
2. Mendeteksi setiap perkembangan yang kurang menguntungkan pada tahap awal, sehingga juga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif untuk meminimalisir kerugian Bank.

KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas Bank Riau Kepri. Proses manajemen risiko mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko. Proses Manajemen Risiko dilaksanakan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Bank pada seluruh jajaran Bank hingga level operasional baik secara transaksional maupun pada level portofolio. Bank terus melakukan pengembangan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian risiko yang komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin.

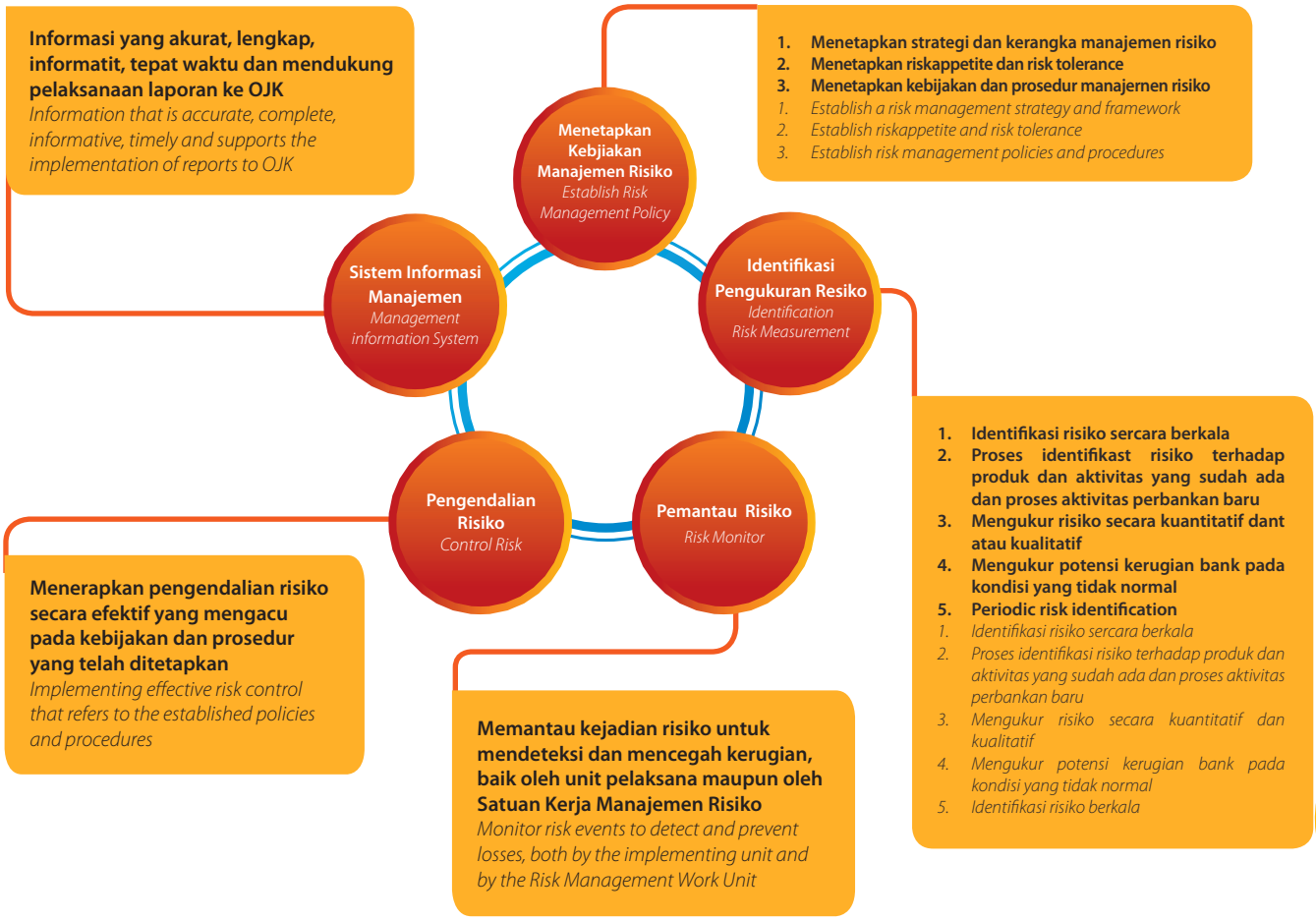
This risk management information system aims, among others, to:

1. *Support the implementation of Risk identification, measurement, monitoring and control processes.*
2. *Detect any unfavorable developments at an early stage, thus also enabling corrective actions to be taken to minimize the Bank's losses.*

ADEQUACY OF RISK IDENTIFICATION, MEASUREMENT, MONITORING AND CONTROL PROCESSES AND RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

The purpose of a good risk management process is to manage the risks inherent in the Bank's activities with the aim of providing maximum sustainable added value to all Bank Riau Kepri activities. The risk management process includes a continuous risk identification, measurement, monitoring and control process for all material risk factors supported by the Risk Management Information System. The Risk Management process is carried out on all risk factors that significantly influence the Bank's financial condition at all levels of the Bank to the operational level, both transactional and portfolio level. The Bank continues to develop and improve the framework of a comprehensive risk management system and risk control structure, so that it can provide information on potential risks early and then take adequate steps to mitigate the impact of risks to a minimum.

Diagram Proses Majamen Resiko pada Bank Kepri
Diagram of the Risk Management Process at Bank Kepri



a. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko dilakukan secara proaktif terhadap seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Proses identifikasi dilakukan secara berkala untuk seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha Bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang ada, di mana sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko utama dari produk dan aktivitas bisnis Bank. Selain itu, Bank melakukan identifikasi risiko dengan melakukan kajian risiko, advis dan review terhadap setiap produk dan/atau aktivitas Bank yang akan diterbitkan/ diimplementasikan oleh unit bisnis/unit fungsional atau ***risk owner*** guna memberikan gambaran terkait risiko-risiko yang dapat terjadi di kemudian hari beserta mitigasinya sebelum diperkenalkan atau dijalankan sesuai dengan permintaan unit bisnis/unit fungsional atau ***risk owner.***

a. Risk Identification

Risk identification is carried out proactively on all business activities in order to analyze the source, level of risk and its possible impact. The identification process is carried out periodically for all types and characteristics of risks contained in each of the Bank's business activities.

The risk identification process is carried out by analyzing all existing sources of risk, which at least is carried out on the main risks of the Bank's products and business activities. In addition, the Bank identifies risk by conducting risk studies, advice and reviews of each product and/or activity of the Bank that will be issued/ implemented by the business unit/functional unit or risk owner in order to provide an overview of the risks that may occur in the future. along with their mitigation before being introduced or carried out in accordance with the request of the business unit/functional unit or risk owner.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk memperkirakan besarnya eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada setiap produk dan/atau aktivitas yang dimiliki Bank dibandingkan dengan risk appetite sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko. Pendekatan pengukuran risiko dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan Manajemen Risiko dan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko serta menentukan modal untuk meng-cover risiko residual yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank.

c. Pemantauan Risiko

Bank memiliki prosedur pemantauan risiko yang antara lain mencakup pemantauan risiko terhadap besarnya kepatuhan limit internal maupun konsistensi pelaksanaan prosedur operasional dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik yang dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko terhadap produk dan aktivitas Bank dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko Bank yang bersifat material. Pemantauan dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (***Risk Taking Unit***) sebagai pemilik risiko (***Risk Owner***) maupun oleh ***Risk Control Unit***. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d. Pengendalian Risiko

Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mengelola seluruh eksposur risiko. Proses pengendalian risiko diterapkan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yang disesuaikan dengan ***risk appetite*** dan ***risk tolerance*** yang telah ditetapkan Bank.

Faktor yang mendukung terlaksananya pengendalian risiko yang handal pada Bank yaitu:

b. Risk Measurement

Risk measurement aims to estimate the amount of risk exposure as a whole as well as per type of risk on each product and/or activity owned by the Bank compared to risk appetite as a reference for controlling risk. The risk measurement approach can be quantitative, qualitative or a combination of the two which is used to measure the Bank's risk exposure in order to obtain an overview of the effectiveness of Risk Management implementation and can take risk mitigation actions and determine capital to cover residual risk that is adjusted to the characteristics and complexity of the Bank's business.

c. Risk Monitoring

The Bank has risk monitoring procedures which include, among others, monitoring the risk of compliance with internal limits as well as consistency in the implementation of operational procedures with established policies. The monitoring process is carried out to ensure that risk has been managed properly by evaluating risk exposure to the Bank's products and activities and improving the reporting process in the event of changes in the Bank's business activities, products, transactions, risk factors, information technology and risk management information systems. is material. Monitoring is carried out both by the Operational Work Unit (Risk Taking Unit) as the risk owner and by the Risk Control Unit. Monitoring results are presented in periodic reports submitted to management in order to mitigate risks and take necessary actions.

d. Risk control

The Bank has an adequate risk control system with reference to established policies and procedures aimed at managing all risk exposures. The risk control process is applied to 8 (eight) types of risk that are adjusted to the risk appetite and risk tolerance that have been determined by the Bank.

Factors that support the implementation of reliable risk control at the Bank are:

Proses Manajemen Risiko di Bank Riau Kepri
Risk Management Prosess at Bank Riau Kepri



e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen Bank. Bank terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem informasi manajemen risiko yang komprehensif sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin. Sebagai proses yang berkelanjutan Bank juga terus mengembangkan dan menyempurnakan berbagai model dan sistem dalam rangka pengendalian risiko yang mencakup seluruh jenis risiko.

Tujuan dari sistem informasi manajemen risiko adalah untuk memastikan data yang dibutuhkan tersedia, akurat, informatif dan tepat waktu. Sistem informasi manajemen risiko Bank Riau Kepri menggunakan aplikasi antara lain aplikasi ***Contingecy Funding Plan*** (CFP), aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB), aplikasi ICAAP dan aplikasi Operational ***Risk Self assessment*** (ORSA).

e. Risk Management Information System

The risk management information system is part of the Bank's management information system. The Bank continues to develop and improve a comprehensive risk management information system framework so that it can provide information on potential risks early and then take adequate steps to mitigate the impact of risks to a minimum. As a continuous process, the Bank also continues to develop and improve various models and systems in the context of risk control covering all types of risk.

The purpose of a risk management information system is to ensure that the required data is available, accurate, informative and timely. The Bank Riau Kepri risk management information system uses applications including the Contingecy Funding Plan (CFP) application, the Bank Soundness Level (TKB) application, the ICAAP application and the Operational Risk Self assessment (ORSA) application.

Sistem Informasi manajemen risiko ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
2. Mendeteksi setiap perkembangan yang kurang menguntungkan pada tahap awal, sehingga juga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif untuk meminimalisir kerugian Bank.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG MENYELURUH

Sistem pengendalian intern merupakan suatu mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan. Proses manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang handal dan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sistem pengendalian yang efektif dapat membantu menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang—undangan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk ***fraud*** dan pelanggaran aspek kehati-hatian serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya. Bank telah menerapkan prinsip pemisahan fungsi (***four eyes principle***) antara Unit Kerja Operasional (***business unit***) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian, agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, Bank menerapkan pendekatan ***Three Lines of Defence*** sebagai mekanisme pertahanan secara berlapis, yakni:

This risk management information system aims, among others, to:

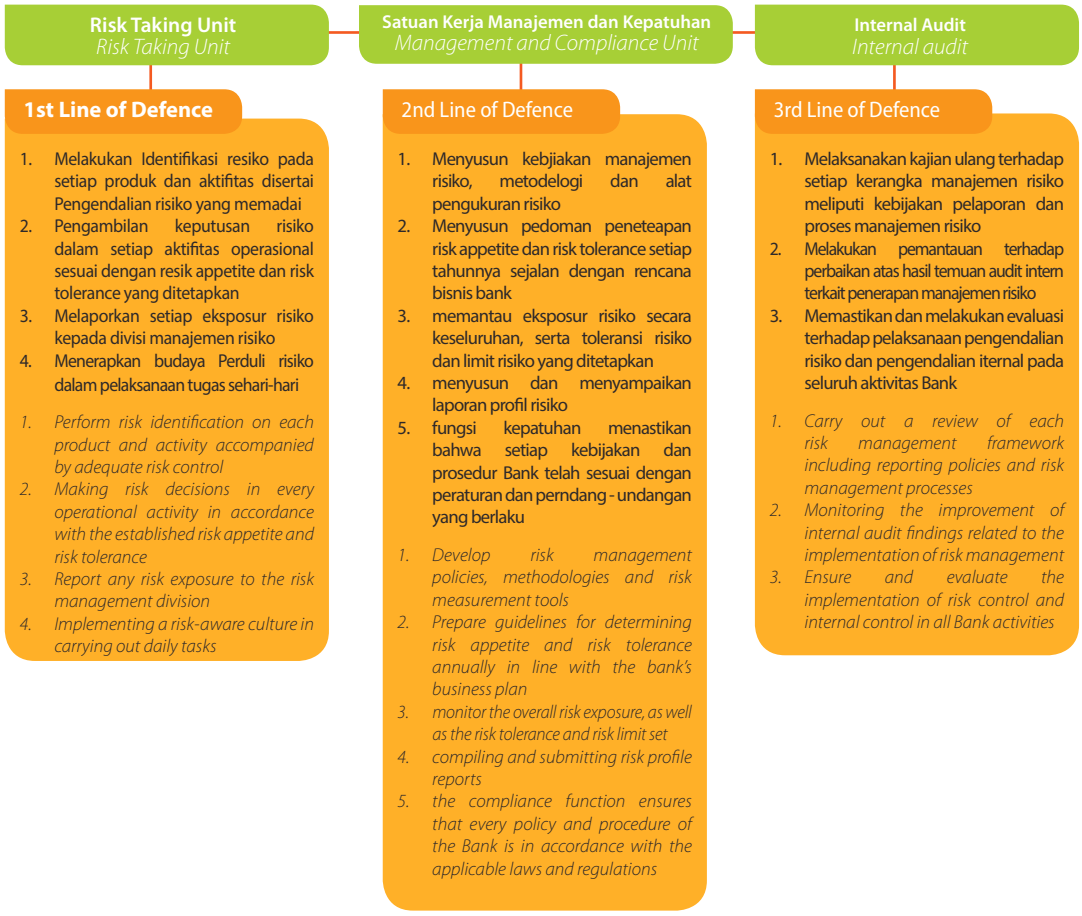
1. *Support the implementation of Risk identification, measurement, monitoring and control processes.*
2. *Detect any unfavorable developments at an early stage, thus also enabling corrective actions to be taken to minimize the Bank's losses.*

WHOLE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The internal control system is a supervisory process mechanism determined by the Bank's management on an ongoing basis. An effective risk management process must be equipped with a reliable internal control system and refer to the established policies and procedures. An effective control system can help safeguard the Bank's assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, improve compliance with applicable laws and regulations, reduce the impact of financial losses, irregularities including fraud and violations of prudential aspects as well as improve effectiveness and cost efficiency. The Bank has implemented the principle of separation of functions (four eyes principle) between the Operational Work Unit (business unit) and the Work Unit that carries out control, so that everyone in their position does not have the opportunity to commit and hide mistakes or irregularities in the implementation of their duties at all levels of the organization.

In order to improve the effectiveness of internal control, the Bank applies the Three Lines of Defense approach as a defense mechanism in layers, namely:

Bagan Three Lines of Defence
Three Lines of Defense Chart



Risk Taking Unit berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan dan memitigasi risiko dalam aktivitas operasional. Risk Taking Unit memiliki tanggung jawab yang utama atas pengelolaan eksposur risiko dalam aktivitas sehari-hari serta melakukan tindakan perbaikan dalm mengatasi kelemahan pada proses dan pengendalian.

The Risk Taking Unit acts as the first line of defense and is responsible for identifying, evaluating, controlling and mitigating risks in operational activities. The Risk Taking Unit has the main responsibility for managing risk exposure in daily activities as well as taking corrective actions to overcome weaknesses in processes and controls.

Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan berperan sebagai unit kunci dalam memberikan pertahanan tingkat kedua melalui fungsi pemantauan yang independen. Divisi Manajemen Risiko telah melakukan review atas

The Risk Management Division and the Compliance Division serve as key units in providing the second level of defense through an independent monitoring function. The Risk Management Division has reviewed the completeness and

kelengkapan dan keakuratan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko, serta atas kecukupan skenario mitigasi yang diusulkan oleh unit kerja operasional. Sedangkan Divisi Kepatuhan memastikan bahwa dalam setiap pelaksanaan aktivitas Bank yang dilakukan oleh risk taking unit mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Fungsi Internal Audit melakukan penilaian terhadap kecukupan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko serta efektivitas pengendalian Internal dalam rangka memberikan assurance yang independen dan objektif. Divisi Internal Audit (DIA) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank.

PENGAWASAN OLEH MANAJEMEN DAN BUDAYA PENGENDALIAN

Terselenggaranya sistem pengendalian intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pengawasan organisasi Bank Riau Kepri. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan sistem pengendalian intern pada Bank Riau Kepri adalah:

1. Direksi bertanggungjawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian intern yang ditetapkan.
2. Dewan Komisaris bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern

DIA melakukan evaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan independensi dan keahlian auditor yang memadai. DIA mempunyai tanggungjawab melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Bank. DIA juga mempunyai tanggung jawab dalam memastikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko dan pengendalian internal pada seluruh aktivitas yang ada di Bank.

accuracy of the identification, measurement, monitoring, control and reporting of risks, as well as the adequacy of the mitigation scenarios proposed by the operational work units. Meanwhile, the Compliance Division ensures that in every implementation of the Bank's activities carried out by the risk-taking unit, it follows the applicable rules and regulations.

The Internal Audit function assesses the adequacy of policies, strategies and Risk Management frameworks as well as the effectiveness of internal controls in order to provide independent and objective assurance. The Internal Audit Division (DIA) must be able to evaluate and play an active role in improving the effectiveness of the internal control system on an ongoing basis in relation to the implementation of the Bank's operations that have the potential to cause losses in achieving the targets set by the Bank's management.

SUPERVISION BY MANAGEMENT AND CULTURE OF CONTROL

The implementation of a reliable and effective internal control system is the responsibility of all parties involved in overseeing the organization of Bank Riau Kepri. The parties involved in the supervision of the internal control system at Bank Riau Kepri are:

1. *The Board of Directors is responsible for creating and maintaining an effective internal control system and ensuring that the system runs safely and healthily in accordance with the established internal control objectives.*
2. *The Board of Commissioners is responsible for supervising the implementation of internal control in general, including the policies of the Board of Directors that determine internal control*

DIA evaluates and plays an active role in improving the effectiveness of the internal control system on an ongoing basis related to the implementation of the Bank's operations that have the potential to cause losses in achieving the targets that have been set by taking into account the independence and adequate expertise of the auditor. DIA has the responsibility to examine and evaluate the efficiency and effectiveness of the financial, accounting, operational, human resources, information technology and other activities carried out by the Bank. DIA also has the responsibility to ensure and evaluate the implementation of risk control and internal control in all activities in the Bank.

IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh DIA sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PEMISAHAN FUNGSI

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari. Kegiatan pengendalian memberikan keyakinan bahwa pejabat dan pegawai Bank melaksanakan arahan Direksi dan Dewan Komisaris secara efektif.

SISTEM AKUNTANSI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Sistem pengendalian intern yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi intern yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar (kondisi ekstern) dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

Sistem pengendalian intern Bank menyediakan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pegawai Bank sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini secara jelas tercermin dalam struktur organisasi Bank Riau Kepri dalam menetapkan fungsi dan tanggung jawab (job desc) dan pemisahan fungsi pada ***back officce, front officce*** dan ***middle officce***.

KEGIATAN PEMANTAUAN DAN TINDAKAN KOREKSI PENYIMPANGAN

Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal agar meningkatkan efektivitas kapasitas sistem pengendalian intern. Pemantauan dilakukan oleh seluruh unit operasional dan bisnis serta DIA secara berkala dan terus menerus sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala.

RISK IDENTIFICATION AND ASSESSMENT

Risk assessment is a series of actions carried out by the Board of Directors in the context of identifying, analyzing and assessing the risks faced by the Bank in order to achieve the targets set. Risk assessment must also be carried out by SKAI so that the scope of the audit carried out is wider and comprehensive.

ACTIVITIES CONTROL AND SEPARATION OF FUNCTIONS

Control activities include the establishment of control policies and procedures as well as an earlier verification process to ensure that these policies and procedures are consistently complied with, and are activities that are inseparable from every function or day-to-day activity of the Bank. Control activities provide confidence that the Bank's officers and employees carry out the directions of the Board of Directors and the Board of Commissioners effectively.

ACCOUNTING, INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEMS

An effective internal control system at least provides sufficient and comprehensive internal data/information regarding finances, compliance with applicable rules and regulations, market information (external conditions) and any events and conditions required in order to make appropriate and accountable decisions. . The information system must be able to produce reports on business activities, financial conditions, implementation of risk management and compliance with provisions that support the implementation of the duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The Bank's internal control system provides an effective communication channel so that all Bank employees fully understand and comply with applicable policies and procedures in carrying out their duties and responsibilities. This is clearly reflected in the organizational structure of Bank Riau Kepri in determining the functions and responsibilities (job description) and the separation of functions in the back office, front office and middle office.

DEVELOPMENT MONITORING AND ACTION CORRECTION ACTIONS

The Bank monitors and evaluates the adequacy of the internal control system in relation to changes in internal and external conditions in order to increase the effectiveness of the internal control system capacity. Monitoring is carried out by all operational and business units as well as SKAI regularly and continuously as part of the Bank's daily activities including periodic evaluations.

PROFIL DAN PENGELOLAAN RISIKO

RISIKO KREDIT

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat kegagalan pihak lawan (***Counterparty***) memenuhi kewajibannya. Tujuan utama dari pengelolaan risiko kredit adalah menjaga agar semua aktivitas kredit bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Secara umum eksposur Risiko Kredit merupakan salah satu eksposur Risiko utama sehingga kemampuan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko kredit akibat terkosentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk), risiko kredit akibat kegagalan settlement (settlement risk) dan risiko kredit akibat country risk.

Untuk mitigasi risiko kredit, Bank Riau Kepri telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Budaya manajemen risiko kredit telah disosialisasikan kepada seluruh level organisasi tetapi perlu dievaluasi agar dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga timbulnya kesadaran risiko pada seluruh unit kerja.
2. Proses manajemen risiko kredit masih terus dilakukan perbaikan dalam rangka mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit khususnya kredit produktif.
3. Monitoring terhadap kualitas penyaluran kredit oleh Divisi Manajemen Risiko telah dilakukan secara berkala setiap bulannya melalui laporan pemantauan portofolio kredit yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya yaitu kepada Divisi Komersial, Divisi Konsumer, Divisi Mikro, Kecil & Menengah, Divisi Syariah dan Divisi P2K.
4. Divisi yang membidangi kredit bekerjasama dengan divisi terkait secara rutin melakukan monitoring, penagihan dan pembinaan kepada debitur serta memproses permohonan restrukturisasi kredit.
5. Dalam menghadapi pandemi ***Covid-19***, Bank telah mempersiapkan langkah-langkah restrukturisasi dalam penanggulangan terhadap nasabah terdampak ***Covid-19*** dengan mengacu ketentuan OJK dan ketentuan Internal, atas kemampuan bayar debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit yang berpotensi mengganggu kinerja Bank, selain itu juga telah dilakukan simulasi ***stress test*** untuk mengantisipasi potensi risiko yang timbul.

PROFILE AND RISK MANAGEMENT

CREDIT RISK

Credit risk is defined as the risk of loss that may occur due to the failure of the counterparty (counterparty) to fulfill its obligations. The main objective of credit risk management is to ensure that all bank credit activities do not cause losses that exceed the bank's ability or endanger the continuity of the Bank's business.

In general, Credit Risk exposure is one of the main Risk exposures so that the Bank's ability to identify, measure, monitor, and control Credit Risk and provide sufficient capital for that risk is very important. Included in credit risk are credit risk due to debtor failure, credit risk due to concentrated provision of funds (credit concentration risk), credit risk due to counterparty credit risk, credit risk due to settlement failure (settlement risk) and credit risk due to country risk.

To mitigate credit risk, Bank Riau Kepri has taken the following steps:

1. *The credit risk management culture has been socialized to all levels of the organization but needs to be evaluated so that it can be implemented consistently so that risk awareness arises in all work units.*
2. *The credit risk management process continues to be improved in order to identify, measure, monitor and control credit risk, especially productive credit.*
3. *Monitoring of the quality of credit disbursement by the Risk Management Division has been carried out regularly every month through a monitoring report on the credit portfolio submitted to related parties for immediate follow-up on the settlement, namely to the Commercial Division, Consumer Division, Micro, Small & Medium Division, Sharia Division and Division P2K.*
4. *The division in charge of credit cooperates with related divisions on a regular basis to monitor, collect and provide guidance to debtors as well as process requests for credit restructuring.*
5. *In the face of the Covid-19 pandemic, the Bank has prepared restructuring steps in dealing with customers affected by Covid-19 by referring to OJK regulations and internal regulations, regarding the ability to pay debtors to fulfill credit payment obligations that have the potential to disrupt the Bank's performance. stress test simulation to anticipate potential risks that arise.*

6. Dalam rangka Restrukturisasi Covid-19, Bank telah melakukan pembentukan cadangan melalui cadangan langsung ke nominatif pinjaman sesuai dengan tarif CKPN yang berlaku.
7. Bank melalui Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit telah melakukan langkah-langkah/***action plan*** dalam penanganan kredit NPL dan penagihan kredit hapus buku
8. Bank juga melalukan langkah-langkah sebagai berikut :
   - Menerbitkan Surat Tugas untuk percepatan penyelesaian kredit hapus buku untuk wilayah Pekanbaru
   - Melakukan monitoring NPL secara rutin dalam program "***Super Tuesday***" setiap hari Selasa melalui ***zoom meeting*** dengan unit kantor serta meminta komitmen NPL untuk posisi akhir bulan;
   - Penagihan kepada penanggung jawab atau debitur;
   - Memberikan saran dan masukan kepada penanggung jawab dalam rangka percepatan penyelesaian kredit bermasalah yang menjadi tanggung jawabnya;
   - Memberikan diskon bunga dalam rangka pelunasan kredit bermasalah.
9. Bank telah membentuk Tim Task Force Penyelesaian Kredit dengan tugas dan tanggung jawab mempercepat penyelesaian kredit bermasalah
10. Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pengelolaan risiko kredit antara lain:
    - Monitoring terhadap portofolio kredit baik dari sisi outstanding maupun dari sisi kualitas kredit pada seluruh jaringan kantor termasuk penetapan wilayah kerja PIC monitoring NPL;
    - Monitoring dan evaluasi melalui surat maupun WA Group serta menghubungi unit kantor untuk target kreditnya yang masih belum tercapai dan memonitoring secara rutin terhadap kredit kolektibiliti 2 agar kredit tersebut tidak turun menjadi kolektibiliti 3;
    - Monitoring kepada unit kantor untuk lebih pro aktif dalam meningkatkan potensi kredit, baik dengan melakukan prospek kepada debitur baru maupun debitur lama yang telah pindah ke bank lain serta melakukan top up debitur existing agar kredit dapat tercapai;
    - Memastikan terhadap penutupan pertanggungan asuransi kredit;
    - Memastikan pengajuan klaim asuransi sesuai ruang lingkup pertanggungan dan memperhatikan/ menaati masa kadaluarsa pengajuan;
    - Melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan yang terkena dampak pandemi Covid-19 sesuai kewenangan KPK+1 (Kelompok Pemutus Kredit);
    - Melakukan review kebijakan perkreditan secara berkala;
    - Monitoring terhadap pencapaian target yang telah di breakdown ke unit kantor;

6. In the context of the Covid-19 Restructuring, the Bank has established reserves through direct reserves to nominative loans in accordance with the applicable CKPN rates.

7. The Bank through the Credit Rescue and Settlement Division has taken steps/action plans in handling NPL loans and collecting write-off loans.

8. The Bank also takes the following steps:
   - *Issuing a Letter of Assignment to accelerate the settlement of write-off loans for the Pekanbaru area*
   - *Monitoring NPL regularly in the "Super Tuesday" program every Tuesday through zoom meetings with office units and asking for NPL commitments for the end of the month position;*
   - *Billing to the person in charge or debtor;*
   - *Provide advice and input to the person in charge in the context of accelerating the settlement of non-performing loans for which they are responsible;*
   - *Provide interest discounts in order to pay off non-performing loans.*

9. The Bank has formed a Credit Settlement Task Force Team with the duties and responsibilities of accelerating the settlement of non-performing loans

10. The steps that have been taken in managing credit risk include:
   - *Monitoring of the credit portfolio, both in terms of outstanding and in terms of credit quality in the entire office network, including the determination of the working area of PIC monitoring NPL;*
   - *Monitoring and evaluation by letter or WA Group as well as contacting the office unit for credit targets that have not been achieved and routinely monitoring collectibility 2 credit so that the credit does not decrease to collectibility 3;*
   - *Monitoring of office units to be more pro-active in increasing credit potential, both by prospecting for new debtors and old debtors who have moved to other banks and top up existing debtors so that credit can be achieved;*
   - *Ensuring the closing of credit insurance coverage;*
   - *Ensure the submission of insurance claims according to the scope of coverage and pay attention to / comply with the expiration period of the submission;*
   - *Restructuring financing affected by the Covid-19 pandemic in accordance with the authority of the KPK+1 (Credit Breaking Group);*
   - *Reviewing credit policies on a regular basis;*
   - *Monitoring of the achievement of targets that have been broken down to office units;*

- Melakukan coaching terhadap petugas Account Officer secara berkala;
- Melakukan on the spot ke debitur baik sebelum maupun sesudah pencairan kredit secara berkala;
- Melakukan pembinaan kepada debitur;
- Melakukan penilaian secara berkesinambungan untuk segmen kredit yang berisiko tinggi;
- Konsentrasi pada sektor ekonomi yang memiliki NPL rendah.

11. Dalam rangka meningkatkan tata kelola yang baik, pegawai telah menandatangani Pakta Integritas dan telah dilakukan couching & conseling oleh Divisi Manajemen Risiko, Divisi Kepatuhan, Divisi MSDM dan Divisi Internal Audit.
12. Dalam meningkatkan Capacity Building, Bank telah melaksanakan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang perkreditan.
13. Penambahan satu bagian pada Divisi Operasional yaitu Bagian Quality Assurance & Collateral Admin yang anggotanya juga ditempatkan pada seluruh kantor Cabang dengan tugas melakukan checklist pada seluruh persyaratan kredit (yang agunannya diikat sempurna) sebelum kredit dicairkan.

RISIKO PASAR

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif perubahan kondisi pasar terhadap Asset permodalan Bank.

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko pasar di Bank Riau Kepri terdiri dari:

1. Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan risiko pasar (***risk oversight***) melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
2. Direksi yang menjalankan fungsi kebijakan risiko (***risk policy***) melalui ***Executive Committee*** terkait manajemen risiko pasar yaitu ***Asset and Liability Committee*** (ALCO) dan ***Risk Management Committee*** (RMCO).
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama unit bisnis dan unit kerja kepatuhan melakukan fungsi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

Adapun langkah mitigasi risiko yang telah dilakukan Bank antara lain:

1. Bank telah memiliki prosedur dan identifikasi risiko suku bunga banking book yang didukung oleh pengoptimalan sistem informasi yang sangat memadai dan adanya pelaporan secara harian mengenai pergerakan nilai tukar, suku bunga, dan informasi pasar lainnya ke Direksi termasuk over limit.

- *Conduct regular coaching for Account Officers;*
- *Conduct on the spot to debtors both before and after credit disbursement on a regular basis;*
- *Provide guidance to debtors;*
- *Conduct continuous assessments for high-risk credit segments;*
- *Concentration on economic sectors that have low NPLs.*

11. *In order to improve good governance, employees have signed an Integrity Pact and couching & counseling has been carried out by the Risk Management Division, Compliance Division, HR Division and Internal Audit Division.*
12. *In improving Capacity Building, the Bank has conducted training to improve the quality of human resources in the field of credit.*
13. *The addition of one section to the Operational Division, namely the Quality Assurance & Collateral Admin Section whose members are also placed in all Branch offices with the task of checking all credit requirements (where the collateral is perfectly tied up) before the credit is disbursed.*

MARKET RISK

Market Risk is the risk in the balance sheet and off balance sheet positions including derivative transactions, due to changes in overall market conditions, including the risk of changes in option prices. Market risk management aims to minimize the possible negative impact of changes in market conditions on the Bank's capital assets.

The market risk management framework and governance at Bank Riau Kepri consists of:

1. *The Board of Commissioners carries out the function of market risk oversight (risk oversight) through the Risk Monitoring Committee and the Audit Committee.*
2. *The Board of Directors who carries out the risk policy function through the Executive Committee related to market risk management, namely the Asset and Liability Committee (ALCO) and the Risk Management Committee (RMCO).*
3. *The Risk Management Unit together with the business unit and compliance work unit perform the functions of risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control.*

The risk mitigation steps that have been taken by the Bank include:

1. *The Bank has procedures and identification of interest rate risk in the banking book, which is supported by a very adequate optimization of the information system and daily reporting of movements in exchange rates, interest rates, and other market information to the Board of Directors, including over limits.*

2. Bank telah menetapkan Risk Appetite untuk risiko pasar, dimana Bank aktif melakukan transaksi penempatan antar bank, jual beli surat berharga dalam rangka memperoleh pendapatan bunga atau selisih kurs dengan tetap memperhatikan risiko yang wajar pada kondisi normal guna meminimalkan dampak kerugian bank yang berasal dari kegiatan banking book.
3. Membentuk fungsi ***middle office*** yang bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap transaksi treasuri seperti limit, risiko likuiditas dan validasi kewajaran harga pasar.
4. Berorientasi pada Dana Pihak Ketiga (***low cost fund***), meningkatkan penyaluran kredit (UMKM, Komersial dan Konsumer), meningkatkan tata kelola dan kepatuhan yang efektif dan mengelola risiko untuk memberi nilai tambah, memperluas ***fee based income***, menerapkan ***digital banking*** untuk meningkatkan bisnis dan meningkatkan akselerasi pengembangan BUS.
5. menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan internal dan ketentuan Perundangundangan yang berlaku dimonitor secara periodik oleh unit kerja terkait.
6. Bank telah memiliki Komite ALCO sebagai perangkat organisasi dalam mendukung manajemen risiko pasar yang efektif.

RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul saat posisi arus kas Bank menunjukkan ketidakcukupan dalam jangka pendek untuk menutupi kebutuhan pengeluaran jangka pendek. Divisi Manajemen Risiko menyusun Kebijakan Risiko Likuiditas berupa pedoman penerapan manajemen risiko likuiditas yang merupakan panduan pelaksanaan manajemen risiko likuiditas, antara lain berupa:

1. Ketersediaan alat likuid berupa kas, GWM (Primer dan Sekunder), Secondary Reserve, dan Contingency Funding Plan
2. Pengukuran risiko likuidias meliputi proyeksi arus kas, rasio likuiditas, profil maturitas dan stress testing.
3. Pemantauan risiko likuiditas melalui hasil pengukuran risiko likuiditas termasuk kepatuhan terhadap limit yang telah ditetapkan, serta memperhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan risiko likuiditas.
4. Pengendalian risiko likuiditas melalui penetapan limit likuiditas yang mengacu pada ketentuan regulator.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas Bank Riau Kepri melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap faktor-faktor Risiko Likuiditas yang didukung melalui aplikasi *Contingency Funding Plan* (CFP).
Adapun langkah mitigasi risiko yang telah dilakukan Bank antara lain:

2. *The Bank has established a Risk Appetite for market risk, where the Bank is active in conducting interbank placement transactions, buying and selling securities in order to obtain interest income or foreign exchange differences while taking into account reasonable risks under normal conditions in order to minimize the impact of bank losses originating from banking book activities. .*
3. *Establishing a middle office function that is tasked with monitoring treasury transactions such as limits, liquidity risk and validating market price fairness.*
4. *Oriented to Third Party Funds (low cost funds), increase lending (MSMEs, Commercial and Consumer), improve effective governance and compliance and manage risk to provide added value, expand fee based income, implement digital banking to improve business and increase BUS development acceleration.*
5. *set limits that refer to internal provisions and the provisions of the applicable laws are monitored periodically by the relevant work units.*
6. *The Bank has an ALCO Committee as an organizational tool to support effective market risk management.*

LIQUIDITY RISK

Liquidity risk is the risk that arises when the Bank's cash flow position shows that it is insufficient in the short term to cover short term expenditure needs. The Risk Management Division prepares a Liquidity Risk Policy in the form of guidelines for the implementation of liquidity risk management which is a guide to the implementation of liquidity risk management, among others in the form of:

1. *Availability of liquid assets in the form of cash, Statutory Reserves (Primary and Secondary), Secondary Reserve, and Contingency Funding Plan*
2. *Liquidity risk measurement includes cash flow projections, liquidity ratios, maturity profiles and stress testing.*
3. *Monitoring liquidity risk through the results of liquidity risk measurements including compliance with predetermined limits, as well as paying attention to early warning indicators to identify potential increases in liquidity risk.*
4. *Liquidity risk control through the determination of liquidity limits that refer to the provisions of the regulator.*

In carrying out the liquidity risk management process, Bank Riau Kepri identifies, measures, monitors and controls Liquidity Risk factors which are supported through the Contingency Funding Plan (CFP) application.

The risk mitigation steps that have been taken by the Bank include:

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemimpin unit kantor untuk meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat (dana retail) sehingga bank tidak tergantung kepada dana Pemda dan korporasi dalam pengelolaan likuiditas.
2. Pemenuhan DPK serta monitoring kondisi likuiditas dengan lebih memperhatikan kondisi LDR di Capem dan Kedai yang ada dibawahnya.
3. Melakukan transaksi Repo atas SDBI yang dimiliki dalam pemenuhan likuiditas Bank.
4. Mengoptimalkan Pinjaman Antar Bank, dimana bank menggunakan dana antar bank lain sebagai salah satu penunjang likuiditas yang sifatnya temporer. Sedangkan untuk dana jangka panjang dengan memaksimalkan peningkatan limit antar bank dan commited line guna memenuhi kebutuhan likuiditas terhadap kewajiban antar bank yang jatuh tempo.
5. Penghimpunan dana pihak ketiga non pemda yang menjadi fokus utama dan tumbuh secara kontiniu dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito dengan menawarkan pricing yang relatif bersaing.
6. Membuat action plan dalam menjaga likuiditas dan peningkatan DPK (dana retail) antara lain dengan melakukan optimalisasi program inklusi dan literasi keuangan, optimalisasi Layanan Oto Banking dan optimalisasi fungsi unit funding officer.
7. Pengelolaan likuiditas yang optimal terkait Primary Reserves (Kas dan GWM), Secondary Reserves dan Tertiary Reserve dengan memperhatikan limit-limit yang telah ditetapkan.
8. Bank telah

RISIKO OPERASIONAL

Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses Internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Risiko operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti risiko reputasi, risiko strategik, risiko hukum, risiko pasar, risiko kredit, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas. Pengelolaan risiko operasional secara efektif dan konsisten dapat meminimalisir timbulnya risiko-risiko lain. Risiko operasional melekat pada seluruh aktivitas/ proses operasional Bank dalam menjalankan bisnis. Bank menerapkan Manajemen Risiko Operasional secara efektif untuk menurunkan frekuensi dan/atau dampak kerugian operasional. Secara umum penerapan Manajemen Risiko Operasional diharapkan memberikan dampak positif pada ***stakeholder*** Bank.

1. Conducting outreach to all office unit leaders to increase fundraising from the public (retail funds) so that banks do not depend on local government and corporate funds for liquidity management.

2. Fulfillment of TPF as well as monitoring of liquidity conditions with more attention to LDR conditions at the Head of Sub-district and the Stores under it.
3. Performing Repo transactions on SDBI held to fulfill Bank liquidity.
4. Optimizing Interbank Loans, where banks use other interbank funds as a temporary support for liquidity. Meanwhile, for long-term funds by maximizing the increase in interbank limits and committed lines to meet the liquidity needs of maturing interbank liabilities.

5. The collection of non-local government third party funds that is the main focus and grows continuously in the form of Current Accounts, Savings and Time Deposits by offering relatively competitive pricing.
6. Create an action plan to maintain liquidity and increase DPK (retail funds) among others by optimizing financial inclusion and literacy programs, optimizing Oto Banking Services and optimizing the function of the funding officer unit.

7. Optimal liquidity management related to Primary Reserves (Cash and Statutory Reserves), Secondary Reserves and Tertiary Reserves by taking into account the limits that have been set.
8. Banks have

OPERATIONAL RISK

Operational risk is the risk caused by, among other things, the inadequacy and/or malfunction of Internal processes, human error, system failure or external problems that affect the Bank's operations.

Operational risk can trigger other risks such as reputation risk, strategic risk, legal risk, market risk, credit risk, compliance risk and liquidity risk. Management of operational risk effectively and consistently can minimize the emergence of other risks. Operational risk is inherent in all activities/operational processes of the Bank in running the business. The Bank implements Operational Risk Management effectively to reduce the frequency and/or impact of operational losses. In general, the implementation of Operational Risk Management is expected to have a positive impact on the Bank's stakeholders.

Penerapan pengelolaan risiko operasional melibatkan semua unsur dalam Bank termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan, mekanisme dan praktik yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan kegagalan atau kerugian serta memastikan penerapan peluang bisnis baru secara tepat di bawah kendali manajemen risiko. Pemetaan risiko operasional dilaksanakan terhadap berbagai kegiatan operasional perbankan seperti produk dan layanan, jaringan kantor dan pengembangannya, serta perkembangan teknologi informasi.

Untuk mitigasi risiko operasional, Bank Riau Kepri melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. melakukan pengembangan dan penyempurnaan secara terus menerus terutama terkait produk penghimpunan DPK melalui upaya peningkatan kualitas layanan, peningkatan kompetensi tenaga ***frontliner,*** Layanan Bank Riau Kepri Prioritas, ***Cash Management System, Call Centre, New M-Banking, SKPD Online,*** penambahan Calon Agen Laku Pandai dan pengembangan produk DPK Syariah.
2. Terkait Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia telah dilakukan beberapa langkah maupun upaya perbaikan, diantaranya:
   - Pemenuhan tenaga kredit analis.
   - Pemenuhan Sertifikasi Treasury dan Treasury Syariah bagi pegawai di Divisi Treasury & Internasional dan Bagian Treasury Unit Usaha Syariah.
   - Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM termasuk kebijakan dan rencana pengembangan serta pelatihan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis bank terkait kompentensi teknis dan managerial secara inhouse maupun publik.
   - Meningkatkan penerapan prinsip dalam pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan (Know Your Employee).
3. Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko Bank telah menerapkan aplikasi ORSA di seluruh jaringan kantor dan divisi.
4. Penerapan Business Continuity Plan (BCP) untuk meminimalisir dampak wabah COVID-19, melalui Surat Edaran Direksi yang memuat protokol yang wajib dijalankan oleh seluruh pegawai dalam menjaga kelangsungan usaha dan bisnis bank.
5. Bank memiliki berbagai aplikasi pendukung yang terkoneksi dengan core banking system dengan pemilihan platform aplikasi yang memudahkan development, pemeliharaan dan integrasi, antara lain Branch delivery system, ATM/CDM, SMS Banking, Mobile Banking, EDC, Laku Pandai dan E Channels.
6. Melakukan pembenahan infrastruktur IT terkait security sehingga tidak rentan terhadap ancaman dan serangan dari eksternal.

The implementation of operational risk management involves all elements within the Bank including the active supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors, who are responsible for and ensure that the Bank has the right policies, mechanisms and practices to avoid or minimize failures or losses as well as ensure the proper implementation of new business opportunities under risk management control. Operational risk mapping is carried out on various banking operational activities such as products and services, office networks and their development, as well as developments in information technology.

To mitigate operational risk, Bank Riau Kepri takes the following steps:

1. *carry out continuous development and improvement, especially related to DPK collection products through efforts to improve service quality, increase the competence of frontliners, Priority Bank Riau Kepri Services, Cash Management Systems, Call Centers, New M-Banking, SKPD Online, addition of Prospective Laku Pandai Agents and Sharia DPK product development.*

2. *Regarding the implementation of Human Resource Management, several steps and improvement efforts have been made, including:*
   - *Fulfillment of credit analysts.*
     Fulfillment of Treasury and Treasury Sharia Certification for employees in the Treasury & International Division and Treasury Section of the Sharia Business Unit.
   - *Increasing the quantity and quality of human resources, including policies and plans for developing and training employees in accordance with the needs and development of the bank's business related to technical and managerial competence, both in-house and publicly.*
   - *Improve the application of principles in the introduction and monitoring of employee profiles (Know Your Employee).*
3. *In order to improve the quality of risk management implementation, the Bank has implemented the ORSA application in all office networks and divisions.*
4. *Implementation of the Business Continuity Plan (BCP) to minimize the impact of the COVID-19 outbreak, through the Circular of the Board of Directors which contains protocols that must be carried out by all employees in maintaining the continuity of the bank's business and business.*
5. *The Bank has various supporting applications that are connected to the core banking system with the selection of application platforms that facilitate development, maintenance and integration, including Branch delivery systems, ATM/CDM, SMS Banking, Mobile Banking, EDC, Laku Pandai and E Channels.*
6. *Improving IT infrastructure related to security so that it is not vulnerable to external threats and attacks.*

7. Pada proses Tata Kelola Divisi TSI telah dilakukan self-assessment terhadap IT Maturity pada proses pengelolaan Teknologi Informasi.
8. Melakukan pembenahan terhadap sistem TI, mempersiapkan infrastruktur pendukung yang handal dalam memonitoring aktif/tidaknya station atau unit kantor sehingga kegagalan sistem dapat cepat dideteksi dan dilakukan perbaikan.
9. Melakukan Pengendalian Mutu Audit (Quality Assurance) yang bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan audit intern terhadap standar internal audit (SPFAIB/IPPF), audit charter, kode etik, ketentuan internal dan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi aktivitas audit internal serta pemberian saran perbaikan.
10. Membentuk Bagian Quality Assurance dan Collateral Admin di bawah Divisi Operasional yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ***Quality Assurance*** (penyusunan, review dan perbaikan kebijakan QA, laporan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan QA) serta kebijakan dan prosedur administrasi jaminan (***collateral admin***).

RISIKO HUKUM

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor risiko yang meliputi adanya tuntutan hukum, kelemahan aspek yuridis yang muncul dari dokumen, kontrak dan perjanjian yang dibuat terutama terkait produk dan layanan baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Bank Riau Kepri melakukan pengukuran risiko hukum dengan menggunakan 3 (tiga) parameter yakni faktor litigasi, kelemahan perikatan, dan faktor ketiadaan dan atau adanya perubahan peraturan, perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku. Implementasi manajemen risiko hukum mengacu kepada Pedoman Manajemen Risiko Hukum dan kebijakan lain yang berkaitan dengan pengelolaan risiko hukum. Guna menghasilkan kebijakan manajemen risiko hukum yang tepat Divisi Hukum melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian risiko hukum secara berkala sesuai dengan perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, Bank Riau Kepri menerapkan kebijakan/ mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi risiko hukum secara berkala dan berkesinambungan.
2. Memberikan nasehat hukum/pendampingan hukum dalam hal terdapat kejadian yang berhubungan dengan hukum dalam aktivitas operasional Bank.
3. Melaksanakan pengukuran risiko hukum yang dilakukan berdasarkan perhitungan indikator/ parameter dalam mengidentifikasi risiko hukum dibandingkan dengan modal bank

7. In the TSI Division Governance process, a self-assessment of IT Maturity has been carried out in the Information Technology management process.
8. Making improvements to the IT system, preparing a reliable supporting infrastructure in monitoring the active/inactivity of a station or office unit so that system failures can be quickly detected and repaired.

9. Performing Quality Assurance Control which aims to evaluate internal audit compliance with internal audit standards (SPFAIB/IPPF), audit charters, code of ethics, internal regulations and assessment of the effectiveness and efficiency of internal audit activities as well as providing suggestions for improvement.
10. Establish a Quality Assurance and Collateral Admin Section under the Operations Division who is responsible for the implementation of Quality Assurance (preparation, review and improvement of QA policies, reports and monitoring of the implementation of QA policies) as well as guarantee administration policies and procedures (collateral admin).

LEGAL RISK

The Bank carries out legal risk identification based on risk factors which include lawsuits, weaknesses in the juridical aspects that arise from documents, contracts and agreements made, especially related to products and services, whether carried out by internal or external parties. Bank Riau Kepri measures legal risk using 3 (three) parameters, namely the litigation factor, the weakness of the engagement, and the absence and/or change in the applicable laws, regulations or provisions. Implementation of legal risk management refers to the Legal Risk Management Guidelines and other policies related to legal risk management. In order to produce the right legal risk management policy, the Legal Division evaluates and updates the legal risk control policies and procedures on a regular basis in accordance with the development of the prevailing laws and regulations.

In carrying out the risk control function and improving the quality of risk management implementation, Bank Riau Kepri applies the following risk mitigation/policies:

1. Identify legal risks on a regular and continuous basis.

2. Provide legal advice/legal assistance in the event that there are legal-related events in the Bank's operational activities.
3. Carry out legal risk measurements based on the calculation of indicators/parameters in identifying legal risk compared to bank capital

4. Melakukan pemantauan risiko hukum dengan mengevaluasi eksposur risiko hukum yang melekat terutama yang bersifat material atau berdampak terhadap permodalan
5. Proses pengendalian risiko hukum diutamakan terhadap kegiatan yang membahayakan kelangsungan usaha bank, dan hasil pemantauan risiko hukum yang dilaporkan secara berkala.
6. Melakukan analisis hukum terhadap produk dan/atau aktivitas baru Bank.

RISIKO REPUTASI

Risiko Reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau perspektif negatif terhadap bank, pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah, kelemahan tata kelola, budaya perusahaan dan kejadian lain yang dapat menurunkan citra Bank. Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme pemantauan, pengawasan, penanganan dan penyelesaian keluhan nasabah yang dikoordinasikan oleh Divisi Sekretariat Perusahaan dan Divisi Operasional.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko reputasi dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, Bank Riau Kepri menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Saat ini Bank Riau Kepri memiliki saluran resmi untuk menerima keluhan dan pertanyaan dari nasabah yaitu ***call center*** 1500-470, ***website***, kantor cabang dan media sosial. Dalam pelaksanaan tugas tersebut petugas ***call center*** dan ***customer service*** serta admin ***website*** dan media sosial berkoordinasi dengan unit kerja terkait.
2. Pemantauan dan pengendalian risiko reputasi yang dilakukan Bank melalui Divisi Sekretaris Perusahaan adalah bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan menyelesaikan pemberitaan negatif, komentar, keluhan nasabah yang berkembang di media cetak ataupun media sosial serta menjalankan ***public service*** dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (***Corporate Social Responsibility***/CSR).
3. Bank secara rutin melakukan penatausahaan terhadap setiap pengaduan nasabah dalam Laporan Pengaduan Nasabah dan pemberitaan negatif dimedia masa.
4. Bank Riau Kepri secara terus menerus melakukan penyempurnaan kebijakan internal Bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.
5. Telah dilakukan ***rating*** terhadap media yang bekerjasama saat ini dan ke depan akan terus dilakukan ***review*** terhadap media cetak maupun ***online*** dengan persyaratan yang lebih ketat.

4. Monitoring legal risk by evaluating the inherent legal risk exposure, especially those that are material or have an impact on capital

5. The process of controlling legal risk is prioritized on activities that endanger the continuity of the bank's business, and the results of monitoring legal risks are reported on a regular basis.
6. Conducting legal analysis of the Bank's new products and/or activities.

REPUTATION RISK

Reputational risk is the risk caused by, among other things, negative publications related to the bank's business activities or negative perspectives on the bank, violations of business ethics, customer complaints, governance weaknesses, corporate culture and other events that can degrade the image of the Bank. Reputation risk is managed through a mechanism for monitoring, supervising, handling and resolving customer complaints which are coordinated by the Corporate Secretariat Division and Operations Division.

In carrying out the reputation risk control function and improving the quality of risk management implementation, Bank Riau Kepri applies the following risk mitigation/policies:

1. *Currently, Bank Riau Kepri has official channels to receive complaints and questions from customers, namely the 1500-470 call center, website, branch offices and social media. In carrying out these tasks, call center and customer service officers as well as website and social media admins coordinate with related work units.*

2. *Monitoring and controlling reputation risk carried out by the Bank through the Corporate Secretary Division is responsible for implementing policies related to handling and resolving negative news, comments, customer complaints that develop in print or social media as well as running public services in the context of implementing corporate social responsibility. (Corporate Social Responsibility/CSR).*

3. *The Bank routinely administers every customer complaint in the Customer Complaint Report and negative news in the mass media.*
4. *Bank Riau Kepri continuously improves the Bank's internal policies related to customer complaints and customer service in order to minimize the potential for a decline in the Bank's reputation.*

5. *A rating has been carried out on the currently collaborating media and in the future, a review of the print and online media will continue to be carried out with stricter requirements.*

RISIKO STRATEGIK

Risiko Strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Bank Riau Kepri mengelola risiko stratejik melalui ***business plan*** yang disusun oleh Divisi Perencanaan Strategis sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD) melalui pengumpulan informasi strategis, pemantauan pasar, ekonomi daerah dan melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara menyeluruh.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko startejik dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, Bank Riau Kepri menerapkan kebijakan/ mitigasi risiko sebagai berikut :

1. Strategi pengembangan bisnis Bank Riau Kepri meliputi peningkatan penyaluran kredit, dana pihak ketiga, mendorong pertumbuhan Dana Pihak Ketiga berbiaya murah dengan dukungan digital banking system, GRC, teknologi informasi dan ***delivery chanel*** serta ***service quality.***
2. Dalam menghadapi persaingan bisnis, Bank membuat beberapa strategi antara lain perubahan struktur organisasi, proses kerja dan mekanisme monitoring.
3. Melakukan perbaikan atas rencana kerja sehingga target yang ditetapkan dalam corporate plan dapat tercapai.
4. Pemimpin Unit Kantor berkomitmen terhadap terhadap masing-masing gap terkait kredit, DPK dan NPL sesuai target yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun 2020.
5. Bank aktif mencari peluang bisnis baru sesuai potensi masing-masing daerah dengan membuat mapping potensi, mengoptimalkan sumber daya yang ada, usaha meningkatkan kredit usaha mikro dan kecil dan kredit produktif lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (***prudential banking***).

RISIKO KEPATUHAN

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Divisi Kepatuhan secara teratur membantu dan meninjau ulang kembali aspek kepatuhan Bank, khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar. Bank sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kebijakan APU & PPT. Ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi terutama yang terkait prinsip ***prudential banking*** seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), GWM, Kualitas Aktiva Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Posisi Devisa Neto (PDN)

STRATEGIC RISK

Strategic risk is a risk that is caused, among others, by the establishment and implementation of an inappropriate bank strategy, inappropriate business decision making or the bank's lack of responsiveness to external changes. Bank Riau Kepri manages strategic risk through a business plan prepared by the Strategic Planning Division as an elaboration of the General Policy of the Board of Directors (KUD) through strategic information gathering, market monitoring, regional economy and through a thorough consideration and decision-making process.

In carrying out the strategic risk control function and improving the quality of risk management implementation, Bank Riau Kepri implements the following policies/risk mitigation:

1. *The business development strategy of Bank Riau Kepri includes increasing lending, third party funds, encouraging the growth of low-cost Third Party Funds with the support of digital banking systems, GRC, information technology and delivery channels as well as service quality.*
2. *In facing business competition, the Bank made several strategies, including changes in organizational structure, work processes and monitoring mechanisms.*
3. *Make improvements to the work plan so that the targets set in the corporate plan can be achieved.*
4. *The Head of the Office Unit is committed to each gap related to credit, DPK and NPL according to the targets that must be achieved by the end of 2020.*
5. *The Bank is actively looking for new business opportunities according to the potential of each region by mapping potentials, optimizing existing resources, efforts to increase micro and small business loans and other productive loans while still paying attention to the principle of prudence (prudential banking).*

COMPLIANCE RISK

Compliance risk is the risk caused by the Bank not complying with or not implementing the prevailing laws and regulations and other provisions. The Compliance Division regularly assists and reviews the Bank's compliance aspects, particularly suspicious or inappropriate transactions. The Bank fully complies with the Law on Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and the AML & CFT Policy. Other provisions that must be complied with, especially those related to prudential banking principles such as Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM), Statutory Reserves, Earning Asset Quality, Maximum Lending Limit (BMPK) and Net Open Position (NOP)

Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko kepatuhan dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, Bank Riau Kepri menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

1. Bank telah membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai untuk mengelola risiko kepatuhan. ASIK memiliki beberapa modul antara lain memuat seluruh ketentuan eksternal dan internal terkait operasional Bank, ***monitoring*** tindak lanjut temuan eksternal, ***monitoring*** rasio prinsip kehati-hatian dan pengukuran budaya kepatuhan.
2. Bank telah melakukan review atas beberapa Kebijakan terkait fungsi kepatuhan seperti:
   - Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (***Whistleblowing System***)
   - Pedoman Benturan Kepentingan (***conflict of interest***)
   - Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Riau Kepri
   - Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang
3. Dalam pengelolaan risiko kepatuhan Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
   - Pengujian untuk setiap kebijakan yang akan diterbitkan oleh unit kerja terkait.
   - Menyampaikan ***review***/resume terhadap ketentuan eksternal (OJK/BI) yang baru diterbitkan kepada unit kerja yang terkait untuk disesuaikan dengan kebijakan internal.

PROFIL RISIKO

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank untuk 8 (delapan) jenis risiko yang dikelola Bank. Trend hasil Laporan Profil Risiko Bank Riau Kepri sepanjang tahun 2021 relatif stabil dengan peringkat Risiko Inheren Moderate dan Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Fair, sehingga menghasilkan peringkat risiko komposit secara keseluruhan adalah Peringkat 3 Moderate.

In carrying out the function of controlling compliance risk and improving the quality of risk management implementation, Bank Riau Kepri applies risk mitigation as follows:

1. *The Bank has built a compliance culture in the Bank's operational activities through the Compliance Information System Application (ASIK) which can be accessed by all employees to manage compliance risk. ASIK has several modules, among others, containing all external and internal regulations related to the Bank's operations, monitoring follow-up on external findings, monitoring the prudential principle ratio and measuring compliance culture.*
2. *The Bank has reviewed several policies related to the compliance function, such as:*
   - *Guidelines for Reporting Alleged Violations System (Whistleblowing System)*
   - *Conflict of Interest Guidelines*
   - *Guidelines for Gratification Control in PT Bank Riau Riau Islands*
   - *Guidelines for the Implementation of the Anti-Money Laundering Program*
3. *In managing compliance risk, the Bank has done the following:*
   - *Testing for each policy to be issued by the relevant work unit.*
   - *Submit a review/resume of the newly issued external regulations (OJK/BI) to the relevant work units to be adjusted to internal policies.*

RISK PROFILE

Risk profile assessment is an assessment of the Inherent Risk and Quality of Risk Management Implementation in the Bank's operational activities for 8 (eight) types of risks managed by the Bank. The trend of the Bank Riau Kepri Risk Profile Report throughout 2021 was relatively stable with a Moderate Inherent Risk rating and a Fair Risk Management Implementation Quality Rating, resulting in an overall composite risk rating of 3 Moderate.

Low to Moderate.

Low to Moderate.

No	Profil Risiko *Risk Profile*	Peringkat Risiko Inheren *Inherent Risk Rating*	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko *Risk Management Implementation Quality Rating*	Peringkat Tingkat Risiko *Risk Level Rating*
1	Risiko Kredit *Credit Risk*	Moderate	Fair	3
2	Risiko Pasar *Market Risk*	Low to Moderate	Satisfactory	2
3	Risiko Likuiditas *Liquidity Risk*	Low to Moderate	Satisfactory	2
4	Risiko Operasional *Operational Risk*	Moderate	Fair	3
5	Risiko Hukum *Legal Risk*	Low to Moderate	Satisfactory	2
6	Risiko Reputasi *Reputational Risk*	Low to Moderate	Fair	2
7	Risiko Stratejik *Strategic Risk*	Moderate	Fair	3
8	Risiko Kepatuhan *Compliance Risk*	Moderate	Fair	3
	Peringkat Komposit ***Composite Rating***	**Moderate**	**Fair**	**3**

UPAYA UNTUK MENGELOLA RISIKO

Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko yang bertujuan untuk menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar yang dapat mengganggu permodalan Bank.

Langkah-langkah pengendalian Bank Riau Kepri berdasarkan profil risiko yang dimiliki Bank adalah sebagai berikut:

1. Bank telah membentuk struktur organisasi manajemen risiko yang terpusat dan independen yang memiliki fungsi mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola risiko-risiko dasar dan menetapkan kebijakan dan prosedur risiko.
2. Bank mengelola risiko dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.
3. Dalam mengelola risiko khususnya risiko operasional seluruh pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola risiko pada unit kerja masing-masing serta memperhatikan kontrol yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan Bank. Terkait hal ini Bank membuat aplikasi ***Operational Risk Self assessment*** (ORSA) untuk mendukung kemudahan dan efektivitas

EFFORT TO MANAGE RISK

Efforts in risk management include an assessment of the inherent risk profile and an assessment of the quality of risk management implementation that reflects a risk control system aimed at avoiding the potential for relatively larger losses that could disrupt the Bank's capital.

The control measures of Bank Riau Kepri based on the Bank's risk profile are as follows:

1. *The Bank has established a centralized and independent risk management organizational structure that has the function of identifying, measuring, monitoring and managing basic risks and establishing risk policies and procedures.*
2. *The Bank manages risk by ensuring that all activities and relationships between the Bank's business activities and third parties are based on rules and requirements that can protect the interests of the Bank and ensure conformity between the Bank's business activities and other activities so that the Bank's reputation is maintained.*
3. *In managing risk, especially operational risk, all employees have the duty and responsibility to manage risk in their respective work units and pay attention to effective controls to anticipate possible risks that could harm the Bank. In this regard, the Bank has developed an Operational Risk Self-Assessment (ORSA) application to support the ease and effectiveness of risk management implementation, especially in the process of identifying,*

penerapan manajemen risiko khususnya dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional di Bank Riau Kepri.
4. Salah satu upaya Bank dalam mencegah dan mendeteksi fraud, Bank melakukan ***monitoring*** secara rutin terhadap data dan transaksi keuangan Bank melalui Aplikasi Anti ***Fraud***.
5. Bank melakukan ***stress testing*** secara berkala untuk mengukur tingkat ketahanan Bank dalam menghadapi skenario terburuk yang mungkin terjadi.
6. Me***review*** kebijakan dan prosedur Bank yang disesuaikan dengan ketentuan eksternal seperti POJK, SEOJK, PBI, SEBI dan peraturan eksternal lainnya serta ketentuan internal yang berlaku.

SOSIALISASI MANAJEMEN RISIKO

Bank Riau Kepri secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja untuk menciptakan ***risk awareness*** yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta budaya risiko (***risk culture***) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada Bank. Media utama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi manajemen risiko dilakukan dengan cara ***in class*** (tatap muka). Kegiatan tatap muka tersebut mulai dilaksanakan pada saat pegawai diterima sebagai pegawai Bank Riau Kepri dan akan dilaksanakan secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun. Selain dengan cara tatap muka, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau ***monitoring*** ke seluruh jaringan kantor Bank Riau Kepri.
2. Menerbitkan ketentuan terkait pelaksanaan manajemen risiko.
3. Kegiatan ***briefing*** pada unit kerja sebelum melaksanakan kegiatan.
4. Menyampaikan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko lisan, tulisan maupun melalui intranet Bank Riau Kepri.

Pada tahun 2021 Divisi Manajemen risiko telah melakukan sosialisasi pemantauan Aplikasi ***Operational Risk Self assessment*** (ORSA) pada seluruh Kantor Cabang Bank Riau Kepri.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Bank Riau Kepri secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja untuk menciptakan ***risk awareness*** yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta budaya risiko (***risk culture***) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada Bank. Media utama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi manajemen risiko dilakukan dengan cara ***in class*** (tatap muka). Kegiatan tatap muka tersebut mulai dilaksanakan pada saat pegawai diterima sebagai pegawai Bank Riau Kepri dan akan dilaksanakan secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun. Selain dengan cara tatap muka, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan cara:

measuring, monitoring and controlling operational risk at Bank Riau Kepri.

4. *One of the Bank's efforts in preventing and detecting fraud, the Bank conducts regular monitoring of the Bank's financial data and transactions through the Anti Fraud Application.*
5. *The Bank conducts stress testing on a regular basis to measure the Bank's level of resilience in the face of the worst possible scenario.*
6. *Reviewing the Bank's policies and procedures in accordance with external regulations such as POJK, SEOJK, PBI, SEBI and other external regulations as well as applicable internal regulations.*

RISK MANAGEMENT SOCIALIZATION

Bank Riau Kepri routinely conducts socialization related to the implementation of risk management in all work units to create risk awareness which in the end is expected to create a risk culture in carrying out daily activities at the Bank. The main media in the implementation of risk management socialization activities is carried out in class (face to face). This face-to-face activity begins when the employee is accepted as an employee of Bank Riau Kepri and will be carried out periodically at least 2 (two) times a year. In addition to face-to-face, socialization activities are carried out by:

1. *Conduct socialization and/or monitoring throughout the Bank Riau Kepri office network.*
2. *Issuing provisions related to the implementation of risk management.*
3. *Briefing activities in work units before carrying out activities.*
4. *Delivering directions regarding the implementation of risk management verbally, in writing or via the Bank Riau Kepri intranet.*

In 2021 the Risk Management Division has socialized the monitoring of the Operational Risk Self-Assessment (ORSA) Application in all Branch Offices of Bank Riau Kepri.

Competency Development in the Field of Risk Management

Bank Riau Kepri routinely conducts socialization related to the implementation of risk management in all work units to create risk awareness which in the end is expected to create a risk culture in carrying out daily activities at the Bank. The main media in the implementation of risk management socialization activities is carried out in class (face to face). This face-to-face activity begins when the employee is accepted as an employee of Bank Riau Kepri and will be carried out periodically at least 2 (two) times a year. In addition to face-to-face, socialization activities are carried out by:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau ***monitoring*** ke seluruh jaringan kantor Bank Riau Kepri.
2. Menerbitkan ketentuan terkait pelaksanaan manajemen risiko.
3. Kegiatan ***briefing*** pada unit kerja sebelum melaksanakan kegiatan.
4. Menyampaikan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko lisan, tulisan maupun melalui intranet Bank Riau Kepri.

Pada tahun 2021 Divisi Manajemen risiko telah melakukan sosialisasi pemantauan Aplikasi ***Operational Risk Self assessment*** (ORSA) pada seluruh Kantor Cabang Bank Riau Kepri.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Pada tahun 2021 Sertifikasi manajemen risiko dengan persentase kelulusan sebesar 94,77%, dimana terdapat 31 (tiga puluh satu) orang pegawai belum mengikuti sertifikasi dan 1 (satu) orang pegawai belum lulus sertifikasi.

EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Bank Riau Kepri senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko serta kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Salah satu bentuk evaluasi pada kebijakan manajemen risiko adalah evaluasi tahunan terhadap Kebijakan Manajemen Risiko dan Standar Prosedur. Dewan Komisaris berperan aktif dalam pelaksanaan evaluasi sistem manajemen risiko dengan mereviu hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Direksi sebagai organ yang bertanggung jawab atas efektivitas penerapan sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi tahunan menunjukkan bahwa manajemen risiko di Bank Riau Kepri selama tahun 2021 cukup memadai.

FUNGSI KEPATUHAN

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ***ex-ante*** (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan angan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank Riau Kepri telah menyusun dan memberlakukan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri sebagaimana tertuang

1. *Conduct socialization and/or monitoring throughout the Bank Riau Kepri office network.*
2. *Issuing provisions related to the implementation of risk management.*
3. *Briefing activities in work units before carrying out activities.*
4. *Delivering directions regarding the implementation of risk management verbally, in writing or via the Bank Riau Kepri intranet.*

In 2021 the Risk Management Division has socialized the monitoring of the Operational Risk Self-Assessment (ORSA) Application in all Branch Offices of Bank Riau Kepri.

Risk Management Certification

In 2021 risk management certification with a passing percentage of 94.77%, of which 31 (thirty one) employees have not taken certification and 1 (one) employee has not passed certification.

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

Bank Riau Kepri always evaluates the effectiveness of the risk management system. The evaluation includes adjustments to the strategy and risk framework as part of the risk management policy, the adequacy of the risk management information system and the adequacy of the risk identification, measurement, monitoring and control processes. One form of evaluation of risk management policies is an annual evaluation of Risk Management Policies and Standard Procedures. The Board of Commissioners plays an active role in the implementation of the evaluation of the risk management system by reviewing the evaluation results that have been carried out by the Board of Directors as the organ responsible for the effectiveness of the implementation of the risk management system. The results of the annual evaluation show that risk management at Bank Riau Kepri during 2021 is adequate.

COMPLIANCE FUNCTION

The Compliance Function is a series of actions or steps that are ex-ante (preventive) to ensure that the policies, provisions, systems and procedures, as well as the business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of Bank Indonesia/Financial Services Authority (OJK) and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, as well as ensuring the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to Bank Indonesia, and or other competent supervisory authorities.

Bank Riau Kepri has compiled and enforced the Company Manual (BPP) on the Implementation of the Compliance Function of Bank Riau Kepri as stated in the Decree

di dalam Surat Keputusan Direksi No. 046/KEPDIR/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. BPP Kepatuhan tersebut mengatur lebih spesifik mengenai Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan, yang nantinya diharapkan akan menjadi lebih ***forward looking*** dan lebih sensitif terhadap dinamika perubahan pada kegiatan usaha Bank.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Sesuai dengan struktur organisasi Bank Riau Kepri, Fungsi Kepatuhan berada di bawah tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang dibantu oleh satuan kerja Kepatuhan yang dalam hal ini adalah Divisi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan memiliki 2 (dua) bagian, yaitu Bagian Kepatuhan, Kebijakan & GCG dan Bagian Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN).

of the Board of Directors No. 046/KEPDIR/2019 dated August 21, 2019 regarding the Company Manual (BPP) for the Implementation of the Compliance Function. The Compliance BPP regulates more specifically the Role and Function of Compliance and the Compliance Work Unit, which is later expected to be more forward looking and more sensitive to the dynamics of changes in the Bank's business activities.

Organizational Structure Compliance Function

In accordance with the organizational structure of Bank Riau Kepri, the Compliance Function is under the responsibility of the Director of Compliance and Risk Management who is assisted by the Compliance work unit which in this case is the Compliance Division. The Compliance Division has 2 (two) sections, namely the Compliance, Policy & GCG Section and the Customer Identification Work Unit (UKPN).

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan
Compliance Division Organizational Structure



M. Azwizar Hendry
Pemimpin DIvisi Kepatuhan periode 4 Juli 2019 s/d 09 Agustus 2021
Head of the Compliance Division for the period 4 July 2019 to 09 August 2021

Kewarganegaraan *Citizenship*	:	Indonesia *Indonesia*
Domisili *Domicile*	:	Pekanbaru, Riau *Pekanbaru, Riau*
Tempat, Tanggal Lahir *Place and date of birth*	:	Tanjung Pinang, 7 Januari 1969 *Tanjung Pinang, January 7, 1969*
Usia *Age*	:	52 Tahun *52 years old*
Riwayat Pendidikan *Educational background*	:	Sarjana Akuntansi dari Universitas Riau *Bachelor of Accountancy from Riau University*
Riwayat Jabatan *Position History*	:	Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak 1 Agustus 1994. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat sebelum menjadi Pemimpin Divisi Kepatuhan diantaranya Pemimpin Bagian Pengelolaan Dana Divisi Treasury & Internasional, Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura, Pemimpin Cabang Pasir Pangarayan, hingga menjadi Pemimpin Divisi Konsumer dan Mikro, Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah, Pemimpin Divisi Konsumer, Ketua Tim Task Force Transaksi Non Tunai hingga akhirnya menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan. *Started his career at Bank Riau Kepri since August 1, 1994. Several important positions he held before becoming the Head of the Compliance Division include Head of Fund Management Division of Treasury & International Division, Head of Siak Sri Indrapura Branch, Head of Pasir Pangarayan Branch, to Head of Consumer and Micro Division , Head of the Micro, Small & Medium Division, Head of the Consumer Division, Head of the Non-Cash Transaction Task Force Team until finally serving as the Head of the Compliance Division.*
Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	:	SK No. 57/KEPDIR/MSDM/2019 tanggal 04 Juli 2019

Khairul Anwar
Pemimpin DIvisi Kepatuhan periode 09 Agustus 2021 s/d sekarang
Head of the Compliance Division for the period 09 August 2021 until now

Kewarganegaraan *Citizenship*	:	Indonesia *Indonesia*
Domisili *Domicile*	:	Pekanbaru, Riau *Pekanbaru, Riau*
Tempat, Tanggal Lahir *Place and date of birth*	:	Pekanbaru, 17 Mei 1969 *Pekanbaru, May 17, 1969*
Usia *Age*	:	51 Tahun *51 years old*
Riwayat Pendidikan *Educational background*	:	Menyelesaikan Studi Sarjana Ekonomi di Universitas Riau, 1994 *Completed his Bachelor of Economics at the University of Riau, 1994*
Riwayat Jabatan *Position History*	:	Memulai karir di Bank Riau Kepri sejak 1 Agustus 1994. Sebelum menjabat sebagai Pemimpin Divisi komersial, berbagai posisi jabatan pernah diduduki diantaranya sebagai Pemimpin Cabang Siak Sri Indapura, Pemimpin Cabang Bagan Siapi-api, Pemimpin Divisi Syariah, Pemimpin Divisi Konsumer, Pemimpin Divisi Komersial, Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia hingga menjadi Pemimpin Divisi Kepatatuhan. *Started his career at Bank Riau Kepri since August 1, 1994. Prior to serving as Head of the Commercial Division, he has held various positions including Head of Siak Sri Indapura Branch, Head of Bagan Ready-api Branch, Head of Sharia Division, Head of Consumer Division, Head of Commercial Division, Head of the Human Resources Management Division to become the Head of the Compliance Division.*
Dasar Pengangkatan *Basis of Appointment*	:	SK No. 84/KEPDIR/MSDM/2021 tanggal 09 Agustus 2021

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2021, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut :

1. Eka Afriadi (berakhir masa jabatan sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri per tanggal 04 Juli 2021)
2. Said Syamsuri (ditunjuk sebagai pengganti sementara Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri selama periode 05 Juli – 15 November 2021).
3. Fajar Restu Febriansyah (diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 15 November 2021 s/d 14 November 2026).

Untuk Profil ketiga Direksi tersebut di atas, dapat dilihat pada Bab Profil Direksi PT Bank Riau Kepri.

Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri, fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, diatur sebagai berikut :

1. Direktur Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan secara umum, meliputi :
   a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
   b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
   c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
   d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
   e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
   f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank

Director in Charge of Compliance Function

Throughout 2021, the Directors in charge of the Compliance Function at Bank Riau Kepri are as follows:

1. *Eka Afriadi (terminated as Director of Compliance and Risk Management at PT Bank Riau Kepri as of July 04, 2021)*
2. *Said Syamsuri (appointed as temporary replacement for the Director of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri for the period 05 July – 15 November 2021).*
3. *Fajar Restu Febriansyah (appointed as Director of Compliance and Risk Management of PT Bank Riau Kepri at the EGMS on November 15, 2021 with a term of office starting from November 15, 2021 to November 14, 2026).*

For the profiles of the three Directors mentioned above, it can be seen in the Profile of the Directors of PT Bank Riau Kepri Chapter.

Implementation of the Duties of the Director in Charge of the Compliance Function

In the Guidelines for the Implementation of the Compliance Function of Bank Riau Kepri, the functions, duties and responsibilities of the Compliance Director are regulated as follows:

1. *The Compliance Director functions to carry out a series of actions or steps to ensure that the policies, provisions, systems, and procedures, as well as the business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including the Principles of Compliance. Sharia, as well as ensuring the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other competent supervisory authorities.*

2. *Duties and Responsibilities of the Compliance Director in general, include:*
   a. *Formulate strategies to encourage the creation of a Bank Compliance Culture.*
   b. *Propose compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors.*
   c. *Establish compliance systems and procedures that will be used to formulate the Bank's internal provisions and guidelines.*
   d. *Ensuring that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with Bank Indonesia regulations and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Business Units.*
   e. *Minimizing Bank Compliance Risk.*
   f. *Take preventive action so that the policies and/or decisions taken by the Bank's Board of Directors do not deviate from the provisions of Bank Indonesia,*

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak pemeriksa eksternal lainnya.
h. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang dilakukan bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan.
i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab tersebut di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, meliputi :
   a. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Divisi Kepatuhan, dan Divisi lain yang di bawah struktur organisasinya.
   b. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggung jawab.
   c. Memantau dan mengevaluasi risiko kepatuhan Bank.
   d. Menyusun kebijakan dan prosedur di Divisi Kepatuhan.
   e. Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
   f. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan komitmen Bank dengan pihak otoritas pengawas.
   g. Menyampaikan laporan semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
   h. Memantau pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang baik berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkatan organisasi.
   i. Memastikan prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
   j. Menetapkan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan.
   k. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan yang menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan.
   l. Mengkoordinasikan dan meminta satuan kerja terkait untuk melakukan penyempurnaan

the Financial Services Authority and the prevailing laws and regulations.

g. Monitor and maintain the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to Bank Indonesia, the Financial Services Authority and other external audit parties.
h. Coordinate with the Sharia Supervisory Board regarding the implementation of the Compliance Function with Sharia Principles which is carried out together with the Compliance Division.
i. Perform other tasks related to the Compliance Function.

The duties and responsibilities mentioned above do not eliminate the rights and obligations of the Compliance Director as a member of the Bank's Board of Directors as stipulated in the Law on Limited Liability Companies, if certain actions require a decision from all members of the Bank's Board of Directors.

3. Duties and Responsibilities in the Implementation of the Bank's Compliance Function, including:
   a. Leading and coordinating the implementation of activities of the Compliance Division, and other Divisions under its organizational structure.
   b. Carry out coordination with other members of the Board of Directors in order to ensure the smooth running of duties and responsibilities.
   c. Monitor and evaluate the Bank's compliance risk.
   d. Develop policies and procedures in the Compliance Division.
   e. Conduct testing of policy designs and changes to ensure compliance with laws and regulations.
   f. Determine the steps needed to fulfill the Bank's compliance with the Bank's provisions and commitments with the supervisory authorities.
   g. Submit a semi-annual report to the Financial Services Authority regarding the implementation of the Compliance Director's duties with a copy to the Board of Commissioners.
   h. Monitor the implementation of Good Governance Principles in accordance with regulations at all levels of the organization.
   i. Ensuring that the prudential principles in each of the Board of Directors' policies are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Business Units.
   j. Establish a work plan and evaluate the implementation of compliance risk management.
   k. Evaluating and submitting reports which are the responsibility of the Compliance Director.
   l. Coordinate and request related work units to make improvements to Bank policies and procedures to

kebijakan dan prosedur Bank untuk disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.

m. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan Budaya Kepatuhan.
n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
o. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain terhadap langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan.
p. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Unit Usaha Syariah.
q. Menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme meliputi :
   a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
   b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Keluar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
   c. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ ***Risk Based Approach***.
   d. Memastikan bahwa penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan secara efektif.
   e. Memastikan bahwa Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan/atau transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi transfer dana dalam dan keluar negeri telah ditangani dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan BPP APU dan PPT.

comply with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Business Units.

m. Coordinate with other Directors to optimize the Bank's activities in line with the Compliance Culture.

n. Report the implementation of duties and responsibilities on a quarterly basis to the President Director with a copy to the Board of Commissioners.

o. Coordinate with other Directors on steps to be taken regarding compliance violations.

p. Report to the Financial Services Authority every policy and/or decision of the Board of Directors which according to the Compliance Director has deviated from the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Business Units.
q. Carry out his responsibilities as a member of the Board of Directors.

4. Duties and Responsibilities in the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs include:
   a. To determine the necessary steps to ensure that the Bank has complied with the regulations of the Financial Services Authority and the PPATK concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs through the preparation of Guidelines for the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs.
   b. Submit reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, Domestic and International Fund Transfers and the Integrated Service User Information System (SIPESAT) which has been prepared by the Compliance Division to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).
   c. Planning and monitoring Customer Data Update Program based on Risk/ Risk Based Approach.
   d. Ensure that the implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs has been implemented effectively.
   e. Ensure that Customers deemed to have high risk including state administrators, and/or suspicious financial transactions, cash financial transactions and domestic and international fund transfer transactions have been handled and reported to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in accordance with BPP APU and PPT .

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank Riau Kepri berada di Kantor Pusat yaitu Divisi Kepatuhan.
Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak pemeriksa eksternal lainnya.
7. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi dan Budaya Kepatuhan Bank.
8. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
9. Membuat laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Keluar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
10. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/Risk Based Approach.

Compliance Unit

The Compliance Unit of PT Bank Riau Kepri is located at the Head Office, namely the Compliance Division.
The duties and responsibilities of the Compliance Division include the following:

1. *Take steps to support the creation of a Compliance Culture in all business activities of the Bank at every level of the organization.*
2. *Monitoring and controlling Compliance Risk with reference to the Financial Services Authority Regulation concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*
3. *Assess and evaluate the effectiveness, adequacy, and conformity of the policies, provisions, systems and procedures of the Bank with the prevailing laws and regulations.*
4. *Review and/or recommend updating and improving the policies, provisions, systems and procedures of the Bank to comply with the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and applicable laws and regulations, including Sharia Principles for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
5. *Make efforts to ensure that the policies, provisions, systems and procedures, as well as the Bank's business activities are in accordance with the provisions of Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the prevailing laws and regulations.*
6. *Ensuring the Bank's compliance with the commitments made by the Bank to Bank Indonesia, the Financial Services Authority and/or other external auditors.*
7. *Conduct socialization to all Bank employees regarding matters related to the Bank's Compliance Function and Culture.*
8. *Assist the Compliance Director in determining the necessary steps to ensure that the Bank has complied with the regulations of the Financial Services Authority and PPATK concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs through the preparation of Guidelines for the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs.*
9. *Prepare reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, Domestic and International Fund Transfers and the Integrated Service User Information System (SIPESAT) to be submitted to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK).*
10. *Planning and monitoring Customer Data Update Program based on Risk/Risk Based Approach.*

11. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sesuai dengan pedoman Bank.
12. Menyusun laporan Direktur Kepatuhan berupa:
    a. Laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
    b. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Keluar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
    c. Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
        - Laporan Kepatuhan semesteran.
        - Laporan Khusus.
13. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.
14. Memantau penyampaian laporan ke Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pihak ekstern lainnya pada masing-masing satuan kerja.
15. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2021

A. Rencana Evaluasi Pedoman Internal
    1. Penyusunan Pedoman Compliance Checklist Calon Pengurus Bank.
    2. Penyusunan Pedoman Kebijakan Kepatuhan Bank Riau Kepri Syariah sebanyak 8 (delapan) kebijakan, yaitu :
        - Pedoman Good Corporate Governance (GCG);
        - Pedoman Fungsi Kepatuhan;
        - Pedoman Kode Etik Kepatuhan (Compliance Code of Conduct);
        - Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest);
        - Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
        - Pedoman Kerja Direksi;
        - Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing System); dan
        - Pedoman APU dan PPT.
    3. Melakukan penyesuaian Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK) berupa penambahan beberapa fitur yang dibutuhkan di dalam aplikasi seperti fitur untuk mengetahui jumlah pengawai yang login setiap hari dan fitur monitoring rasio prinsip kehati-hatian yang dihubungankan dengan MIS Bank, sehingga penggunaan aplikasi ini dapat lebih optimal dalam rangka implementasi fungsi kepatuhan Bank.
    4. Penambahan formulir Program APU PPT dalam berhubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), yang terdiri dari :
        a. rancangan formulir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
        b. rancangan formulir WIC dan Conductor;
        c. rancangan formulir Permintaan Informasi Pajak bagi Warga Negara Asing; dan

11. Implementing Good Corporate Governance for Commercial Banks in accordance with Bank guidelines.
12. Prepare the Compliance Director's report in the form of:
    a. Report to the President Director with a copy to the Board of Commissioners.
    b. Reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, Domestic and International Fund Transfers and the Integrated Service User Information System (SIPESAT).
    c. Report to the Financial Services Authority:
        - Semi-annual Compliance Report.
        - Special Report.
13. Monitor the development of systems and procedures related to processes that are under the scope of his authority.
14. Monitor the submission of reports to Bank Indonesia, the Financial Services Authority and other external parties in each work unit.
15. Perform other tasks related to the Compliance Function.

Compliance Function Work Program 2021

A. Internal Guidelines Evaluation Plan
    1. Preparation of Compliance Checklist Guidelines for Prospective Bank Management.
    2. The formulation of the Bank Riau Kepri Syariah Compliance Policy Guidelines as many as 8 (eight) policies, namely:
        - Guidelines for Good Corporate Governance (GCG);
        - Compliance Function Guidelines;
        - Compliance Code of Conduct Guidelines (Compliance Code of Conduct);
        - Conflict of Interest Guidelines;
        - Gratification Control Guidelines;
        - Board of Directors Work Guidelines;
        - Guidelines for Reporting Alleged Violations System (Whistle Blowing System); and
        - APU and PPT Guidelines.

    3. Adjusting the Compliance Information System Application (ASIK) in the form of adding several features needed in the application such as a feature to find out the number of employees who log in every day and the precautionary ratio monitoring feature associated with the Bank's MIS, so that the use of this application can be more optimal in for the implementation of the Bank's compliance function.

    4. Addition of APU PPT Program forms in business dealings with Prospective Customers, Customers, WIC and Beneficial Owners, which consist of:

        a. draft Beneficial Owner form;
        b. draft WIC and Conductor forms;
        c. draft of Tax Information Request form for Foreign Citizens; and

d. usulan penyempurnaan formulir Bank lainnya dalam rangka Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko.

5. Penyempurnaan kebijakan dan/prosedur Penerapan Program APU PPT yaitu kebijakan Pengelompokan Nasabah berdasarkan Tingkat Risiko.
6. Implementasi Aplikasi Pelaporan goAML BRK, yaitu aplikasi yang disiapkan dalam rangka kewajiban penyampaian laporan Bank kepada PPATK.

B. Rencana Kegiatan Untuk Mendorong dan/atau Memelihara Budaya Kepatuhan, Termasuk Rencana Sosialisasi Ketentuan
1. Melakukan pemantauan dan review terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk disesuaikan dengan kebijakan internal Bank.
2. Melakukan kajian dan pengujian atas rencana kebijakan/ketentuan yang akan diterbitkan Bank, termasuk pedoman dalam rangka konversi Bank Riau Kepri.
3. Mengelola laporan penyampaian ***Whistle Blowing System*** (WBS) yang dikelola oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai Pengelola WBS.
4. Memantau komitmen-komitmen Bank untuk menindaklanjuti permasalahan dan saran yang diberikan pihak pengawas atau pemeriksa eksternal dalam dokumen ***exit meeting***.
5. Memantau dan mengelola risiko kepatuhan.
6. Membuat pernyataan komitmen kepatuhan dari seluruh jajaran Bank.
7. Melakukan peningkatan budaya kepatuhan dengan melakukan sosialisasi mengenai :
   a. Kode Etik Kepatuhan
   b. Whistle Blowing System (WBS)
   c. Pedoman Pengendalian Gratifikasi
   kepada pegawai dan pengisian kuesioner ***assesment*** pengukuran budaya kepatuhan kepada pegawai dalam rangka monitoring implementasi budaya kepatuhan pada jaringan kantor Bank.
8. Peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan program APU dan melalui pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan pihak otoritas lainnya.

d. proposal for improvement of other Bank forms in the context of the Implementation of the Risk-Based APU PPT Program.

5. Completion of policies and/procedures for the implementation of the AML/CFT Program, namely the policy of Customer Grouping based on Risk Level.

6. Implementation of the BRK goAML Reporting Application, which is an application prepared for the purpose of submitting Bank reports to PPATK.

B. Plans of Activities to Promote and/or Maintain a Compliance Culture, Including Plans for Dissemination of Provisions

1. Monitoring and reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations to be adjusted to the Bank's internal policies.
2. Reviewing and testing the planned policies/ stipulations to be issued by the Bank, including guidelines for the conversion of Bank Riau Kepri.

3. Manage the Whistle Blowing System (WBS) submission report which is managed by the Compliance Division Leader as WBS Manager.
4. Monitor the Bank's commitments to follow up on problems and suggestions given by the supervisor or external examiner in the exit meeting document.

5. Monitor and manage compliance risk.
6. Make a statement of commitment to compliance from all levels of the Bank.
7. Improve the culture of compliance by conducting socialization regarding:
   a. Code of Ethics Compliance
   b. Whistle Blowing System (WBS)
   c. Gratuity Control Guidelines
   to employees and filling out an assessment questionnaire for measuring compliance culture to employees in the context of monitoring the implementation of compliance culture in the Bank's office network.
8. 8. Improved human resources in the implementation of the APU program and through training provided periodically to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of the APU program and employees related to the preparation of reports to PPATK and other authorities.

Strategi Kepatuhan Bank

Sehubungan dengan fungsi kepatuhan yang diatur di atas, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Menetapkan strategi Budaya Kepatuhan, antara lain :
   a. Menyusun ***Compliance Charter*** (piagam kepatuhan).
   b. Menyusun ***Compliance Code of Conduct*** (kode etik kepatuhan).
   c. Menyusun ***Compliance Policy*** (kebijakan kepatuhan).
2. Menetapkan Sistem Kepatuhan Bank yang dilaksanakan melalui serangkaian proses dan tahapan untuk menjamin kepatuhan Bank terhadap regulasi yang berlaku, meliputi :
   a. Prosedur Kepatuhan (***Compliance Procedure***)
   b. Pengujian Kepatuhan (***Compliance Review***)
3. Melakukan sosialisasi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Riau Kepri.
4. Melakukan sosialisasi Kode Etik Kepatuhan, ***Whistle Blowing System*** dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi**.**
5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pedoman APU & PPT serta pedoman Tata Kelola yang Baik.
6. Melakukan ***review*** terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
7. Memantau tindaklanjut pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia/OJK dan pihak regulator lainnya.
8. Melakukan pengujian terhadap kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2021

1. Menyusun Pedoman ***Compliance Checklist*** Calon Pengurus Bank.
2. Menyusun Pedoman Kebijakan Kepatuhan Bank Riau Kepri Syariah sebanyak 8 (delapan) kebijakan, yaitu :
   - Pedoman ***Good Corporate Governance*** (GCG);
   - Pedoman Fungsi Kepatuhan;
   - Pedoman Kode Etik Kepatuhan (***Compliance Code of Conduct);***
   - Pedoman Benturan Kepentingan (***Conflict of Interest***);
   - Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
   - Pedoman Kerja Direksi;
   - Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (***Whistle Blowing System***); dan
   - Pedoman APU dan PPT.
3. Menyesuaikan Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan

Bank Compliance Strategy

In connection with the compliance function set out above, the Director of Compliance and Risk Management of Bank Riau Kepri has determined the necessary steps in accordance with their duties and functions, including:

1. *Establish a Compliance Culture strategy, including:*
   a. Prepare a Compliance Charter (a charter of compliance).
   b. Develop a Compliance Code of Conduct (compliance code of ethics).
   c. Develop Compliance Policy (compliance policy).
2. *Establish a Bank Compliance System which is implemented through a series of processes and stages to ensure the Bank's compliance with applicable regulations, including:*
   a. Compliance Procedure (Compliance Procedure)
   b. Compliance Testing (Compliance Review)
3. *Conducting socialization of the Company Manual Book (BPP) Implementation of the Compliance Function of Bank Riau Kepri.*
4. *Disseminating the Compliance Code of Ethics, Whistle Blowing System and Gratification Control Guidelines.*
5. *Conduct socialization and training related to APU & PPT guidelines as well as Good Governance guidelines.*
6. *Reviewing the Bank's internal policies and procedures in accordance with changes in external regulations.*
7. *Monitor the follow-up to the fulfillment of the Bank's commitment to Bank Indonesia/OJK and other regulators.*
8. *Conduct testing of policies and/or decisions taken by the Bank's Board of Directors so as not to deviate from the provisions of Bank Indonesia and the Financial Services Authority as well as the prevailing laws and regulations.*

Implementation of the Compliance Function Work Program in 2021

1. *Prepare Compliance Checklist Guidelines for Prospective Bank Management.*
2. *Prepare the Compliance Policy Guidelines for Bank Riau Kepri Syariah as many as 8 (eight) policies, namely:*
   - *Guidelines for Good Corporate Governance (GCG);*
   - *Compliance Function Guidelines;*
   - *Compliance Code of Conduct Guidelines (Compliance Code of Conduct);*
   - *Conflict of Interest Guidelines;*
   - *Gratification Control Guidelines;*
   - *Board of Directors Work Guidelines;*
   - *Guidelines for Reporting Alleged Violations System (Whistle Blowing System); and*
   - *APU and PPT Guidelines.*
3. *Adjusting the Compliance Information System*

(ASIK) berupa penambahan beberapa fitur yang dibutuhkan di dalam aplikasi seperti fitur untuk mengetahui jumlah pengawai yang login setiap hari dan fitur monitoring rasio prinsip kehati-hatian yang dihubungankan dengan MIS Bank, sehingga penggunaan aplikasi ini dapat lebih optimal dalam rangka implementasi fungsi kepatuhan Bank.

4. Menambah formulir Program APU PPT dalam berhubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), yang terdiri dari :
   a. rancangan formulir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
   b. rancangan formulir WIC dan Conductor;
   c. rancangan formulir Permintaan Informasi Pajak bagi Warga Negara Asing; dan
   d. usulan penyempurnaan formulir Bank lainnya dalam rangka Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko.
5. Menyempurnakan kebijakan dan/prosedur Penerapan Program APU PPT yaitu kebijakan Pengelompokan Nasabah berdasarkan Tingkat Risiko.
6. Mengimplementasikan Aplikasi Pelaporan goAML BRK, yaitu aplikasi yang disiapkan dalam rangka kewajiban penyampaian laporan Bank kepada PPATK.
7. Melakukan pemantauan dan ***review*** terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk disesuaikan dengan kebijakan internal Bank.
8. Melakukan kajian dan pengujian atas rencana kebijakan/ketentuan yang akan diterbitkan Bank, termasuk pedoman dalam rangka konversi Bank Riau Kepri.
9. Mengelola laporan penyampaian ***Whistle Blowing System*** (WBS) yang dikelola oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai Pengelola WBS.
10. Memantau komitmen-komitmen Bank untuk menindaklanjuti permasalahan dan saran yang diberikan pihak pengawas atau pemeriksa eksternal dalam dokumen ***exit meeting***.
11. Memantau dan mengelola risiko kepatuhan.
12. Membuat pernyataan komitmen kepatuhan dari seluruh jajaran Bank.
13. Melakukan sosialisasi mengenai :
    a. Kode Etik Kepatuhan
    b. ***Whistle Blowing System*** (WBS)
    c. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

    kepada pegawai dan pengisian kuesioner ***assesment*** pengukuran budaya kepatuhan kepada pegawai dalam rangka monitoring implementasi budaya kepatuhan pada jaringan kantor Bank.
14. Mengadakan pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan pihak otoritas lainnya.

Application (ASIK) in the form of adding several features needed in the application such as a feature to find out the number of employees who log in every day and the precautionary ratio monitoring feature associated with the Bank's MIS, so that the use of this application can be more optimal in order implementation of the Bank's compliance function.

4. *Adding APU PPT Program forms in business dealings with Prospective Customers, Customers, WIC and Beneficial Owners, which consist of:*
   a. *draft Beneficial Owner form;*
   b. *draft WIC and Conductor forms;*
   c. *draft of Tax Information Request form for Foreign Citizens; and*
   d. *proposal for improvement of other Bank forms in the context of the Implementation of the Risk-Based APU PPT Program.*
5. *Improving policies and/procedures for the implementation of the AML/CFT Program, namely the policy on Customer Grouping based on Risk Level.*
6. *Implementing the goAML BRK Reporting Application, which is an application prepared for the purpose of submitting Bank reports to PPATK.*
7. *Monitoring and reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations to be adjusted to the Bank's internal policies.*
8. *Reviewing and testing the planned policies/stipulations to be issued by the Bank, including guidelines for the conversion of Bank Riau Kepri.*
9. *Manage the Whistle Blowing System (WBS) submission report which is managed by the Compliance Division Leader as the WBS Manager.*
10. *Monitor the Bank's commitments to follow up on problems and suggestions given by the supervisor or external examiner in the exit meeting document.*
11. *Monitor and manage compliance risk.*
12. *Make a statement of commitment to compliance from all levels of the Bank.*
13. *Conduct outreach regarding:*
    a. *Code of Ethics Compliance*
    b. *Whistle Blowing System (WBS)*
    c. *Gratuity Control Guidelines*

    to employees and filling out an assessment questionnaire for measuring compliance culture to employees in the context of monitoring the implementation of compliance culture in the Bank's office network.
14. *Conduct training that is provided periodically to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of the APU program and employees related to the preparation of reports to PPATK and other authorities.*

Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Terhadap Undang-Undang
   1. Pengujian Kebijakan
      Adalah memastikan bahwa setiap ketentuan, kebijakan dan standar operasional prosedur Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan eksternal lainnya.
   2. Pengujian Rencana Pemberian Kredit/Pembiayaan
      Adalah memastikan bahwa setiap rencana pemberian kredit/pembiayaan yang menjadi wewenang Direksi telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan eksternal lainnya.
   3. Melakukan pemantauan dan ***review*** terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk disesuaikan dengan kebijakan internal Bank.

B. Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas Berwenang
   Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko terus memantau dan mengingatkan unit kerja terkait atas temuan dan tindak lanjut komitmen Bank yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk teknis pelaksanaan pemantauan tindak lanjut komitmen Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dibantu oleh Divisi Kepatuhan sebagai unit kerja yang memonitoring terhadap temuan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

   Untuk memastikan bahwa Bank menyelesaikan tindak lanjut komitmen tersebut Divisi Kepatuhan telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut :
   1. Mengingatkan unit kerja pemilik temuan (peringatan I : 2 bulan sebelum jatuh tempo dan peringatan II : 1 bulan sebelum jatuh tempo).
   2. Memonitor tindaklanjut komitmen yang akan jatuh tempo maupun yang telah jatuh tempo yang diselesaikan oleh unit kerja terkait melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK).
   3. Untuk temuan yang telah jatuh tempo, namun belum selesai ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait Divisi Kepatuhan meminta unit kerja pemilik temuan untuk membuat/menyampaikan penyebab belum selesai ditindaklanjuti dan ***timeline*** atas rencana pemenuhan komitmen tersebut.

Implementation of the Compliance Function

A. Against the Law
   1. Policy Test
      It is to ensure that all provisions, policies and standard operating procedures of the Bank are in accordance with applicable regulations, including the Law, Bank Indonesia Regulation, Financial Services Authority Regulation, Bank Indonesia Circular Letter, Financial Services Authority Circular Letter and other external provisions.
   2. Testing of Credit/Financing Plans
      It is to ensure that every credit/financing plan under the authority of the Board of Directors is in accordance with and does not violate applicable laws, Bank Indonesia Regulations, Financial Services Authority Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, Financial Services Authority Circulars and other external provisions.

   3. Monitoring and reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations to be adjusted to the Bank's internal policies.

B. Fulfillment of Commitments to Authorized Authorities
   The Director of Compliance & Risk Management continues to monitor and remind the relevant work units of the findings and follow-up on the Bank's commitments that have been agreed with the Financial Services Authority. For the technical implementation of monitoring the follow-up commitments of the Director of Compliance & Risk Management assisted by the Compliance Division as a work unit that monitors the findings of the Financial Services Authority.

   To ensure that the Bank completes the follow-up to the commitment, the Compliance Division has taken the following steps:
   1. Remind the work unit owner of the findings (warning I : 2 months before the due date and warning II : 1 month before the due date).
   2. Monitor the follow-up on commitments that are due and those that have matured completed by the relevant work units through the Compliance Information System Application (ASIK).
   3. For findings that are due, but have not been followed up by the work unit related to the Compliance Division, ask the work unit owner of the finding to make/submit the cause of the unfinished follow-up and a timeline for the plan to fulfill the commitment.

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

A. Kebijakan APU PPT

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, bahwa Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang dimilikinya. Penyesuaian BPP dan SOP Penerapan Program APU dan PPT merupakan penyesuaian kebijakan dan prosedur yang bersifat teknis.
2. Dalam rangka mengoptimalkan Laporan Bank kepada PPATK, PPATK mewajibkan Bank untuk menyampaikan Laporannya melalui Aplikasi GoAML sebagai pengganti sarana pelaporan sebelumnya (***Gathering Report and Information Processing System*** /GRIPS), mulai tanggal 01 Februari 2021.

   Untuk pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut, ditetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor 004/ KEPDIR/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Aplikasi GoAML Bank Riau Kepri. Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan ini meliputi :
   a. memberlakukan Aplikasi GoAML Bank Riau Kepri;
   b. memberlakukan sistem identifikasi dan verifikasi pengguna jasa pada ***core banking system***;
   c. menetapkan formulir pendaftaran Conductor; formulir identifikasi dan verifikasi transaksi yang dilakukan oleh WIC dan Conductor; serta formulir identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (***beneficial owner***), pemilik/ pengurus/ orang yang diberikan kewenangan otorisasi dan orang yang memiliki akses ke rekening.
3. Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (***Risk Based Approach***) :
   a. Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (***risk based approach***), Bank melakukan identifikasi risiko bawaan (***inherent risk***) terhadap faktor risiko Nasabah, Negara atau Area Geografis, Produk, Jasa atau Transaksi, Jaringan Distribusi (***Delivery Channe***l) serta faktor risiko lainnya.
   b. Daftar Nasabah berisiko tinggi kategori ***Politically Exposed Person*** (PEP) dikelola Bank dengan baik, mencakup PEP dan Pihak Terkait PEP yang terdaftar sebagai Nasabah Bank serta PEP dan Pihat Terkait PEP yang belum terdaftar sebagai Nasabah Bank.
   c. Pengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko yang dibagi ke dalam beberapa kelompok Nasabah yaitu : Nasabah berisiko rendah, Nasabah berisiko sedang dan Nasabah berisiko tinggi.

Anti-Money Laundering (AML) and Prevention of Terrorism Financing (PPT) Programs

A. APU PPT Policy

1. In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs, Banks are required to make adjustments to policies and procedures for implementing Its APU and PPT programs. Adjustment of BPP and SOP for the implementation of APU and PPT programs is an adjustment of policies and procedures of a technical nature.
2. In order to optimize Bank Reports to PPATK, PPATK requires Banks to submit their Reports through the GoAML Application as a substitute for the previous reporting tool (Gathering Report and Information Processing System / GRIPS), starting on February 1, 2021.

For the implementation of this reporting obligation, a Decree of the Board of Directors Number 004/ KEPDIR/2021 dated January 29, 2021 regarding the GoAML Application of Bank Riau Kepri was stipulated. Matters regulated in this Decree include:
a. enforce the Bank Riau Kepri GoAML Application;
b. implement a system of identification and verification of service users in the core banking system;
c. establish the Conductor registration form; form of identification and verification of transactions made by WIC and Conductor; as well as identification and verification forms for the beneficial owner, the owner/management/ person who is authorized to authorize and the person who has access to the account.

3. Implementation of Risk-Based APU and PPT Programs (Risk Based Approach):
a. In implementing the risk-based APU and PPT programs (risk based approach), the Bank identifies the inherent risk of customer risk factors, countries or geographic areas, products, services or transactions, distribution networks (delivery channel) and other risk factors.
b. The list of high-risk Customers in the Politically Exposed Person (PEP) category is well managed by the Bank, including PEPs and PEP Related Parties who are registered as Bank Customers and PEPs and PEP Related Parties who have not been registered as Bank Customers.
c. Customer grouping based on the level of risk which is divided into several groups of customers, namely: low risk customers, medium risk customers and high risk customers.

4. Pengkinian dan pemantauan
   a. Pengkinian data Nasabah dilakukan secara berkelanjutan oleh Kantor Bank. Kegiatan pengkinian data dimaksud juga mencakup pengkinian terhadap Nasabah kategori ***Politically Exposed Person*** (PEP).
   b. Pemantauan terhadap Calon Nasabah dan Nasabah yang memiliki kemiripan data dengan data pada Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPSPM), dilakukan sebelum Bank melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan pada saat diterimanya DTTOT & DPSPM dari pihak otoritas yang berwenang.
   c. Pemantauan terhadap Nasabah wajib pajak dan/atau penanggung pajak dilakukan melalui pemberian informasi / data Nasabah sebagaimana data permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Pelaporan Bank
   Bank Riau Kepri telah menyampaikan kewajiban Pelaporan kepada Regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Struktur Organisasi
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, diatur bahwa Bank wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT.

Unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT pada Bank Riau Kepri berada di Bagian UKPN (Unit Kerja Pengenalan Nasabah) yang berada di Divisi Kepatuhan di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

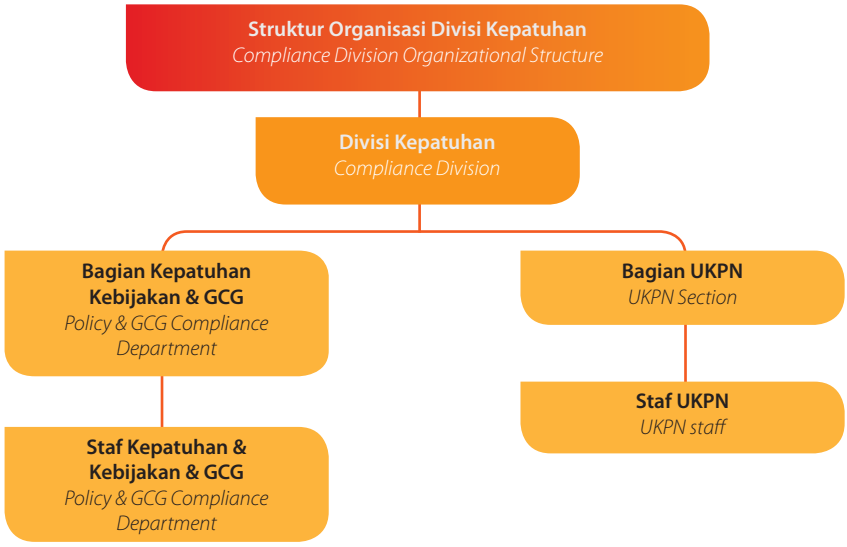
4. Updating and monitoring
   a. Customer data updates are carried out on an ongoing basis by the Bank Office. The said data updating activity also includes updating of Customers in the Politically Exposed Person (PEP) category.
   b. Monitoring of Prospective Customers and Customers who have data similar to the data on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (DPSPM), is carried out before the Bank enters into a business relationship with the Prospective Customer and upon receipt of DTTOT & DPSPM from the third party. competent authority.
   c. Monitoring of taxpayers and/or tax bearers is carried out by providing information/customer data as requested by the Directorate General of Taxes – Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

5. Bank Reporting
   a. Bank Riau Kepri has submitted reporting obligations to the regulator in accordance with applicable regulations.

B. Organizational structure
In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs, it is regulated that Banks are required to establish a special work unit and/or or appoint an official who is responsible for the implementation of the APU and PPT programs.

The special work unit responsible for the implementation of the APU and PPT programs at Bank Riau Kepri is in the UKPN (Customer Identification Work Unit) Section which is in the Compliance Division under the Directorate of Compliance and Risk Management.

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan
Compliance Division Organizational Structure



PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

PENGAWASAN AKTIF DIREKSI DAN KOMISARIS

1. Direksi telah menyetujui kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU dan PPT yang bersifat teknis, sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
2. Direksi telah melaksanakan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT antara lain melalui penyampaian kewajiban pelaporan kepada PPATK, OJK dan instansi lainnya yang berwenang serta melalui koordinasi dengan bagian UKPN Divisi Kepatuhan (penanggung jawab penerapan program APU dan PPT di Bank), atas pelaksanaan penerapan program APU dan PPT di jaringan kantor Bank.
3. Direksi telah menyetujui pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT bagi pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru.
4. Direksi dan Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND TERRORISM FINANCING PREVENTION PROGRAM (PPT)

ACTIVE SUPERVISION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSIONERS

1. *The Board of Directors has approved the policies and procedures regarding the implementation of the AML and CFT programs that are technical in nature, in line with changes and developments in products, services, and technology as well as in accordance with the development of the mode of Money Laundering and/or Terrorism Financing.*
2. *The Board of Directors has carried out supervision over the implementation of the APU and PPT programs, among others through submission of reporting obligations to PPATK, OJK and other authorized agencies and through coordination with the UKPN section of the Compliance Division (responsible for the implementation of the APU and PPT programs at the Bank), on the implementation of the APU program implementation. and PPT in the Bank's office network.*
3. *The Board of Directors has approved training related to the implementation of the APU and PPT programs for employees, particularly employees from related work units and new employees.*
4. *The Board of Directors and the Board of Commissioners have held discussion meetings related to Money Laundering and/or Terrorism Financing.*

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, bahwa Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan prosedur Penerapan Program APU dan PPT yang dimilikinya. Penyesuaian BPP dan SOP Penerapan Program APU dan PPT merupakan penyesuaian kebijakan dan prosedur yang bersifat teknis.
2. Dalam rangka mengoptimalkan Laporan Bank kepada PPATK, PPATK mewajibkan Bank untuk menyampaikan Laporannya melalui Aplikasi GoAML sebagai pengganti sarana pelaporan sebelumnya (***Gathering Report and Information Processing System*** /GRIPS), mulai tanggal 01 Februari 2021.
   Untuk pelaksanaan kewajiban pelaporan tersebut, ditetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor 004/ KEPDIR/2021 tanggal 29 Januari 2021 perihal Aplikasi GoAML Bank Riau Kepri. Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan ini meliputi :
   a. memberlakukan Aplikasi GoAML Bank Riau Kepri;
   b. memberlakukan sistem identifikasi dan verifikasi pengguna jasa pada ***core banking system***;
   c. menetapkan formulir pendaftaran Conductor; formulir identifikasi dan verifikasi transaksi yang dilakukan oleh WIC dan Conductor; serta formulir identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat (***beneficial owner***), pemilik/ pengurus/ orang yang diberikan kewenangan otorisasi dan orang yang memiliki akses ke rekening.
3. Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (***Risk Based Approach***) :
   a. Dalam melakukan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (***risk based approach***), Bank melakukan identifikasi risiko bawaan (***inherent risk***) terhadap faktor risiko Nasabah, Negara atau Area Geografis, Produk, Jasa atau Transaksi, Jaringan Distribusi (***Delivery Channe***l) serta faktor risiko lainnya.
   b. Daftar Nasabah berisiko tinggi kategori ***Politically Exposed Person*** (PEP) dikelola Bank dengan baik, mencakup PEP dan Pihak Terkait PEP yang terdaftar sebagai Nasabah Bank serta PEP dan Pihat Terkait PEP yang belum terdaftar sebagai Nasabah Bank.
   c. Pengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko yang dibagi ke dalam beberapa kelompok Nasabah yaitu : Nasabah berisiko rendah, Nasabah berisiko sedang dan Nasabah berisiko tinggi.
4. Pengkinian dan pemantauan
   a. Pengkinian data Nasabah dilakukan secara berkelanjutan oleh Kantor Bank. Kegiatan pengkinian data dimaksud juga mencakup pengkinian terhadap Nasabah kategori ***Politically Exposed Person*** (PEP).

POLICIES AND PROCEDURES

1. *In accordance with Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.01/2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.01/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Programs, Banks are required to make adjustments to policies and procedures for implementing Its APU and PPT programs. Adjustment of BPP and SOP for the implementation of APU and PPT programs is an adjustment of policies and procedures of a technical nature.*
2. *In order to optimize Bank Reports to PPATK, PPATK requires Banks to submit their Reports through the GoAML Application as a substitute for the previous reporting tool (Gathering Report and Information Processing System / GRIPS), starting on February 1, 2021.*
   For the implementation of this reporting obligation, a Decree of the Board of Directors Number 004/ KEPDIR/2021 dated January 29, 2021 regarding the GoAML Application of Bank Riau Kepri was stipulated. Matters regulated in this Decree include:
   a. *enforce the Bank Riau Kepri GoAML Application;*
   b. *implement a system of identification and verification of service users in the core banking system;*
   c. *establish the Conductor registration form; form of identification and verification of transactions made by WIC and Conductor; as well as identification and verification forms for the beneficial owner, the owner/ management/person who is authorized to authorize and the person who has access to the account.*
3. *Implementation of Risk-Based APU and PPT Programs (Risk Based Approach):*
   a. *In implementing the risk-based APU and PPT programs (risk based approach), the Bank identifies the inherent risk of customer risk factors, countries or geographic areas, products, services or transactions, distribution networks (delivery channel) and other risk factors. .*
   b. *The list of high-risk Customers in the Politically Exposed Person (PEP) category is well managed by the Bank, including PEPs and PEP Related Parties who are registered as Bank Customers and PEPs and PEP Related Parties who have not been registered as Bank Customers.*
   c. *Customer grouping based on the level of risk which is divided into several groups of customers, namely: low risk customers, medium risk customers and high risk customers.*
4. *Updating and monitoring*
   a. *Customer data updates are carried out on an ongoing basis by the Bank Office. The said data updating activity also includes updating of Customers in the Politically Exposed Person (PEP) category.*

b. Pemantauan terhadap Calon Nasabah dan Nasabah yang memiliki kemiripan data dengan data pada Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPSPM), dilakukan sebelum Bank melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan pada saat diterimanya DTTOT & DPSPM dari pihak otoritas yang berwenang.
c. Pemantauan terhadap Nasabah wajib pajak dan/atau penanggung pajak dilakukan melalui pemberian informasi / data Nasabah sebagaimana data permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

5. Pelaporan Bank
Bank Riau Kepri telah menyampaikan kewajiban Pelaporan kepada Regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program APU dan PPT

Program APU PPT untuk tahun 2021 meliputi sebagai berikut

1. Penambahan formulir Program APU PPT dalam berhubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), yang terdiri dari :
   a. rancangan formulir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
   b. rancangan formulir WIC dan Conductor;
   c. rancangan formulir Permintaan Informasi Pajak bagi Warga Negara Asing; dan
   d. usulan penyempurnaan formulir Bank lainnya dalam rangka Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko.
2. Penyempurnaan kebijakan dan/prosedur Penerapan Program APU PPT yaitu kebijakan Pengelompokan Nasabah berdasarkan Tingkat Risiko.
3. Implementasi Aplikasi Pelaporan goAML BRK, yaitu aplikasi yang disiapkan dalam rangka kewajiban penyampaian laporan Bank kepada PPATK.
4. Peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan program APU dan melalui pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan pihak otoritas lainnya.

b. Monitoring of Prospective Customers and Customers who have data similar to the data on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (DPSPM), is carried out before the Bank enters into a business relationship with the Prospective Customer and upon receipt of DTTOT & DPSPM from the third party. competent authority.
c. Monitoring of taxpayers and/or tax bearers is carried out by providing information/customer data as requested by the Directorate General of Taxes – Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

5. Bank Reporting
Bank Riau Kepri has submitted reporting obligations to the regulator in accordance with applicable regulations.

APU and PPT Program

The APU PPT program for 2021 includes the following

1. Addition of APU PPT Program forms in business dealings with Prospective Customers, Customers, WIC and Beneficial Owners, which consist of:

a. draft Beneficial Owner form;

b. draft WIC and Conductor forms;
c. draft of Tax Information Request form for Foreign Citizens; and
d. proposal for improvement of other Bank forms in the context of the Implementation of the Risk-Based APU PPT Program.

2. Completion of policies and/procedures for the Implementation of the AML/CFT Program, namely the policy of Customer Grouping based on Risk Level.
3. Implementation of the BRK goAML Reporting Application, which is an application prepared for the purpose of submitting Bank reports to PPATK.
4. Improvement of human resources in the implementation of the AML program and through training provided regularly to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of the APU program and employees related to the preparation of reports to PPATK and other parties. other authorities.

PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Dalam rangka mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dan sekitarnya Bank Riau Kepri telah menyediakan dana untuk kegiatan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemuda, olahraga, seni, budaya dan kesehatan, dan lainnya.

Pemberian dana kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan, yaitu:
1. Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.
2. Sepanjang tahun 2021, Pemberian Dana untuk kegiatan sosial yang dikemas Bank Riau Kepri adalah dengan melaksanakan berbagai aktivitas ***Corporate Social Responsibility*** (CSR).

Secara garis besar aktivitas CSR, terkait:
1. Program Bina Lingkungan.
2. Program Kemitraan.
3. Penyaluran masing-masing program.
4. Unit khusus

Penjelasan terkait dana kegiatan soaial lebih rinci dijelaskan pada Bab Corporate Social Responsibility pada Laporan Tahunan ini.

PERKARA PENTING

PROVISION OF SOCIAL AND/OR POLITICAL ACTIVITIES

In order to realize concern for the social environment and its surroundings, Bank Riau Kepri has provided funds for social activities in order to improve community welfare, community empowerment, youth activities, sports, arts, culture and health, and others.

Provision of funds for social activities and political activities during the reporting period, namely:
1. *Banks do not provide funds for political activities.*
2. *Throughout 2021, the Provision of Funds for social activities packaged by Bank Riau Kepri is to carry out various Corporate Social Responsibility (CSR) activities.*

Broadly speaking, CSR activities are related to:
1. *Community Development Program.*
2. *Partnership Program.*
3. *Distribution of each program.*
4. *Special units*

A more detailed explanation regarding social activity funds is explained in the Corporate Social Responsibility Chapter of this Annual Report.

IMPORTANT THING

Tabel Perkara Penting
Important Matters Table

No.	Perkara Penting *Important Matters*	Jumlah *Amount*		
		Perdata *Civil*	Pidana *Criminal*	Hubungan Industrial *Industrial relations*
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) *Completed (has had permanent legal force)*	7	5	-
2.	Dalam proses penyelesaian *In the process of completion*	10	9	-
Total		**17**	**14**	**-**

Dari total 31 (tiga puluh satu) permasalahan hukum yang dihadapi Bank, sebanyak 12 (dua belas) perkara telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap), sedangkan 19 (sembilan) perkara masih dalam proses penyelesaian. Dari beberapa permasalahan hukum tersebut, beberapa diantaranya telah mendapat putusan Pengadilan Negeri setempat, namun Penggugat ataupun Tergugat dalam permasalahan hukum tersebut mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi.

From a total of 31 (thirty one) legal issues faced by the Bank, as many as 12 (twelve) cases have been completed (have permanent legal force), while 19 (nine) cases are still in the process of being resolved. Of these legal problems, some of them have received decisions from the local District Court, but the Plaintiffs or Defendants in these legal issues have appealed to a higher level.

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT SERTA ENTITAS ANAK

Selama tahun 2021, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang sedang menjabat.

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI ENTITAS ANAK

Selama tahun 2021, Bank Riau Kepri belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIKENAKAN KEPADA PERUSAHAAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI OLEH OTORITAS PASAR MODAL DAN OTORITAS LAINNYA

Pada periode laporan, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal maupun Otoritas lainnya. Sanksi yang dikenakan hanya sebatas denda atas kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan dan jumlahnya tidak signifikan merugikan Bank.

Sepanjang tahun 2021, terdapat sanksi denda yang dikenakan kepada Bank, yaitu denda atas ketidaksesuaian laporan debitur UMKM pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Bank Riau Kepri menyadari sebagai perusahaan yang berbasiskan jasa pelayanan serta bentuk kepatuhan terhadap transparansi informasi, Bank Riau Kepri memandang perlu untuk menjalin dan menyediakan akses informasi publik kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Dalam penerapan keterbukaan informasi, Bank Riau Kepri senantiasa memberikan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu mengenai akses informasi dan data Bank kepada Pemegang Saham dan Stakeholders melalui berbagai media komunikasi seperti ***website***, laporan tahunan (***annual report***), social media perusahaan, bulletin/media cetak, investor relation, media gathering, dan lain-lain.

LEGAL PROBLEMS FACING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN SERVICE AND SUBSIDIARIES

During 2021, there are no legal issues being faced by the current Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank.

LEGAL PROBLEMS FACING SUBSIDIARIES

During 2021, Bank Riau Kepri does not yet have a Subsidiary, so there is no information on the legal issues being faced by the Subsidiary.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS IMPOSED ON COMPANIES, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS BY CAPITAL MARKET AUTHORITIES AND OTHER AUTHORITIES

During the reporting period, there were no administrative sanctions imposed on the company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors by the Capital Market Authority or other authorities. The sanctions imposed are limited to fines for errors and delays in submitting reports and the amount is not significantly detrimental to the Bank.

Throughout 2021, there will be fines imposed on Banks, namely fines for non-compliance with MSME debtor reports in the Financial Information Service System (SLIK).

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Bank Riau Kepri realizes that as a service-based company and a form of compliance with information transparency, Bank Riau Kepri considers it necessary to establish and provide access to public information for stakeholders and the public. In implementing information disclosure, Bank Riau Kepri always provides complete, accurate and timely information regarding access to information and Bank data to Shareholders and Stakeholders through various communication media such as websites, annual reports, company social media, bulletins/media. print, investor relations, media gathering, and others.

SIARAN PERS *PRESS CONFERENCE*

NO	ISU/PEMBAHASAN *ISSUES/DISCUSSION*	JENIS *TYPE*	TANGGAL TERBIT *DATE OF ISSUE*
1	Pembukaan Kantor Kas Tenayan Raya Pekanbaru Riau Opening of Tenayan Raya Pekanbaru Riau Cash Office	release	1/2/2021
2	Relokasi Kantor Kas Lancang Kuning di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Relocation of Lancang Kuning Cash Office at Lancang Kuning University Pekanbaru	release	5/2/2021
3	Sosialisasi Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah kepada Walikota Dumai dan nasabah Socialization of the conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank to the Mayor of Dumai and customers	release	10/3/2021
4	Konferensi terkait Pembobolan rekening oleh Oknum Pegawai di Pasir Pangaraian Conference related to account burglary by unscrupulous employees at Pasir Pangaraian	konferensi pers	31/03/2021
5	Dukungan Wakil Presiden RI pada Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah Support of the Vice President of the Republic of Indonesia on the Conversion of Bank Riau Kepri into Sharia Commercial Banks	release	22/04/2021
6	Bank Riau Kepri raih Penghargaan pada Top CSR Award Bank Riau Kepri wins Top CSR Award	release	26/04/2021
7	Dukungan BPKH pada Konversi BPKH Support on Conversion	release	30/4/2021
8	RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Annual GMS for Fiscal Year 2020	release	19/06/2021
9	Dukungan Konversi dari MUI Pusat Conversion Support from Central MUI	release	4/7/2021
10	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab Bengkalis Joint Agreement on Banking Services with Bengkalis Regency Government	release	8/7/2021
11	Program pinjaman tanpa bunga untuk UMKM dengan Pemprov Kepri dan Bank Riau Kepri Interest-free loan program for MSMEs with the Riau Islands Provincial Government and Riau Islands Bank	release	8/7/2021
13	Bank Riau Kepri resmikan peluncuran fitur pembayaran Qris Bank Riau Kepri officially launches the Qris payment feature	release	1/9/2021
14	Peluncuran Syariah Digital Center Bank Riau Kepri Launching of Sharia Digital Center Bank Riau Kepri	release	1/9/2021
15	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab Rohil Joint Agreement on Banking Services with the Rohil Regency Government	release	3/9/2021
16	Bank Riau Kepri raih peringkat excellent dalam Infobank Award 2021 Bank Riau Kepri achieves excellent rating in Infobank Award 2021	release	8/9/2021
17	Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah sebagai penggerak ekonomi di Riau' Conversion of Bank Riau Kepri into Sharia Commercial Bank as an economic driver in Riau'	release	8/9/2021
18	Dukungan LAM Pekanbaru terkait konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah LAM Pekanbaru's support regarding the conversion of Riau Kepri Bank into a Sharia Commercial Bank	release	9/9/2021
19	Bank Riau Kepri menerima Penghargaan Top BUMD Award tahun 2021 Bank Riau Kepri received the Top BUMD Award 2021	release	11/9/2021
20	Unit Syariah Bank Riau Kepri raih skor tertinggi dalam rating Institusi Keuangan Syariah Tahun 2021 The Sharia Unit of Bank Riau Kepri achieves the highest score in the rating of Sharia Financial Institutions in 2021	release	12/9/2021
21	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab Bintan *Joint Agreement on Banking Services with the Bintan Regency Government*	release	12/9/2021
22	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab Natuna *Joint Agreement on Banking Services with the Natuna Regency Government*	release	12/9/2021
23	Sosialisasi Qris Bank Riau Kepri pada Atlit PON Riau *Socialization of Qris Bank Riau Kepri to Riau PON Athletes*	release	19/09/2021
24	Sosialisasi penyaluran dana PSR pada petani sawit di Kandis Siak Sriindrapura *Socialization of the distribution of PSR funds to oil palm farmers in Kandis Siak Sriindrapura*	release	23/09/2021
25	Bank Riau Kepri masuk 10 terbaik se indonesia dalam penyaluran program perumahan *Bank Riau Kepri is in the top 10 in Indonesia in the distribution of government housing programs pemerintah*	release	23/09/2021
26	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab Meranti *Joint Agreement on Banking Services with Meranti Regency Government*	release	23/09/2021
27	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab Tanjung Pinang *Joint Agreement on Banking Services with the Tanjung Pinang Regency Government*	release	23/09/2021
28	Sosialisasi Qris Bank Riau Kepri di Kabupaten Indragiri Hulu *Socialization of Qris Bank Riau Kepri in Indragiri Hulu Regency*	release	29/09/2021

29	Kesepakatan Bersama Layanan jasa Perbankan dengan Pemkab *Joint Agreement on Banking Services with Regency Governments*	release	29/09/2021
30	Penyelenggaraan Training mindset transformation of sharia bankers *Implementation of training mindset transformation of sharia bankers*	release	2/10/2021
31	Sosialisasi Qris Bank Riau Kepri di Kota Batam *Socialization of Qris Bank Riau Kepri in Batam City*	release	5/10/2021
32	Program Undian Tabungan Bedelau 2021 *Bedelau Savings Lottery Program 2021*	Konferensi Pers	11/10/2021
33	MOU Bank Riau Kepri dengan Kejari Siak *MOU of Bank Riau Kepri with Prosecutor's Office Siak*	release	12/10/2021
34	Peluncuran Penggunaan Qris Bank Riau Kepri untuk tiket masuk istana siak *Launch of the use of Qris Bank Riau Kepri for Siak Palace entrance tickets*	release	12/10/2021
36	MOU dengan BSI dalam rangka perkuat bisnis dan transfer knowledge perbankan syariah *MOU with BSI in order to strengthen business and transfer knowledge of sharia banking*	release	16/10/2021
37	Pelaksanaan bantuan CSR peletakan batu pertama surau selensen *Implementation of CSR assistance laying the first stone of Selensen surau*	release	18/10/2021
38	Kontribusi Bank Riau Kepri dalam pencegahan Covid 19 dengan melaksanakan Vaksinasi massal bersama BMR tahap I *The contribution of Bank Riau Kepri in preventing Covid 19 by carrying out mass vaccination with BMR phase I*	release	21/10/2021
39	Pelaksanaan bantuan CSR Lapas Narkotika Rumbai Provinsi Riau *Implementation of CSR assistance for the Rumbai Narcotics Prison, Riau Province*	release	21/10/2021
40	CSR Bank Riau Kepri untuk Peningkatan dan Pengembangan UMKM Di Kota Tanjung Pinang *Bank Riau Kepri CSR for MSME Improvement and Development in Tanjung Pinang City*	release	28/10/2021
41	Penandatangan MOU antara Bank Riau Kerpi dengan Kejari Inhil *Signing of MOU between Bank Riau Kerpi and Kejari Inhil*	release	9/11/2021
42	Penyelenggaraan RUPSLB Bank Riau Kepri *Implementation of the EGMS of Bank Riau Kepri*	release	15/11/2021
43	Konferensi Pers terkai Perkenalan Pengurus Baru Bank Hasil RUPSLB dan progres Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah *Press Conference related to the introduction of the new management of the bank as a result of the EGMS and the progress of the conversion of Bank Riau Kepri to become a Sharia Commercial Bank*	Konferensi Pers	16/11/2021
44	Kontribusi Bank Riau Kepri dalam pencegahan Covid 19 dengan melaksanakan Vaksinasi massal bersama BMR tahap II *The contribution of Bank Riau Kepri in preventing Covid 19 by carrying out mass vaccination with BMR phase II*	release	20/11/2021
45	Percepatan Digitalisasi Keuangan di Provinsi Riau melalui Peluncuran Aplikasi QRIS Bank Riau Kepri *Acceleration of Financial Digitization in Riau Province through the Launch of the Bank Riau Kepri QRIS Application*	release	29/11/2021
46	Pemrov. Kepri bersama Bank Riau Kepri meluncurkan Program bantuan subsidi bunga pinjaman untuk pelaku UMKM *govt. Riau Islands together with Bank Riau Riau Islands launched a loan interest subsidy assistance program for MSME actors*	release	4/12/2021
47	Co branding kartu Pembiayaan Bank Riau Kepri dengan BSI *Co branding of Bank Riau Kepri Financing card with BSI*	release	10/12/2021
48	Penyerahan CSR Bank Riau Kepri berupa mobil Ambulan di Kabupaten Lingga *Bank Riau Kepri CSR submission in the form of an ambulance in Lingga Regency*	release	10/12/2021
49	Peluncuran sistem Qris untuk transaski pajak di Kabupaten Bengkalis *Launch of the Qris system for tax transactions in Bengkalis Regency*	release	14/12/2021
50	Pemberian Bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 5000 Pekerja rentan di Provinsi Riau *Providing BPJS Employment contribution assistance for 5000 vulnerable workers in Riau Province*	release	17/12/2021
51	Bantuan CSR Bank Riau Kepri berupa rumah imam masjid nurul Iman *Bank Riau Kepri CSR assistance in the form of the house of the imam of the Nurul Iman mosque*	release	17/12/2021
52	Penerimaan Penghargaan dari Gubernur Kepri atas dukungan percepatan pembangunan di Provinsi Kepri *Receipt of Award from the Governor of Riau Islands for supporting the acceleration of development in the Riau Islands Province*	release	30/12/2021
53	Peresmian Kantor Kedai Syariah Tenayan Raya Bank Riau Kepri *Inauguration of the Tenayan Raya Sharia Kedaian Office of Bank Riau Kepri*	release	31/12/2021

BULETIN

Volume	Tema

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Untuk kebijakan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan melekat di masing-masing kewajiban pelaporan Bank, seperti laporan LBU, LHBU, Laporan tahunan dan lainnya. Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para ***Stakeholders*** termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia/OJK dan para ***Stakeholders*** sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan non keuangan disesuaikan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. Hal tersebut dilakukan dengan tepat waktu, dan lengkap sesuai yang dipersyaratkan di dalam ketentuan Bank Indonesia dan OJK.

Dalam rangka efektivitas dan sentralisasi penyampaian laporan-laporan Bank kepada pihak regulator (BI dan OJK), Bank telah membentuk unit kerja khusus yaitu Bagian Pelaporan & Management Information System yang berada di bawah Divisi Financial & Review yang bertugas menyampaikan laporan-laporan Bank kepada pihak regulator baik ***online*** maupun ***offline*** secara terpusat.

Dengan adanya unit kerja ini, diharapkan Bank dapat menyampaikan laporan-laporan tersebut secara akurat, lengkap dan tepat waktu, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan keterlambatan dalam penyampaian laporan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi dari pihak regulator.

Selanjutnya, salah satu bentuk pengungkapan transparansi kondisi keuangan Bank antara lain Bank telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola tahun 2020 dan Laporan Tahunan tahun 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan disajikan pada ***Website*** Bank Riau Kepri.

PROGRAM ANTI KORUPSI

Dalam rangka penguatan penerapan Tata Kelola Perusahaan Bank yang baik, Bank Riau Kepri melalui penerapan etik telah menegaskan kembali Larangan Pencegahan/Anti Korupsi dan Gratifikasi bagi seluruh

REPORT SUBMITTING TRANSPARENCY

For policy procedures regarding procedures for implementing transparency of financial conditions inherent in each Bank's reporting obligations, such as LBU reports, LHBU reports, annual reports and others. The Bank has carried out transparency on financial and non-financial conditions to Stakeholders including published financial reports and has submitted these reports to related parties such as Bank Indonesia/OJK and Stakeholders in accordance with applicable regulations.

The preparation and presentation of financial and non-financial reports is adjusted to the procedures, types and scopes as stipulated in Bank Indonesia regulations concerning Transparency of Bank Financial Conditions. This is done in a timely and complete manner as required in the provisions of Bank Indonesia and OJK.

In order to be effective and centralize the submission of Bank reports to regulators (BI and OJK), the Bank has established a special work unit, namely the Reporting & Management Information System Division which is under the Financial & Review Division in charge of submitting Bank reports to the regulator. both online and offline centrally.

With this work unit, it is hoped that the Bank will be able to submit these reports accurately, completely and on time, so as to minimize errors and delays in submitting reports that may result in the imposition of sanctions from the regulator.

Furthermore, one form of disclosure of the transparency of the Bank's financial condition, among others, the Bank has submitted the 2019 Governance Implementation Report and the 2019 Annual Report to the Financial Services Authority and other relevant parties in accordance with the provisions of the Financial Services Authority and presented on the Bank Riau Kepri Website.

ANTI-CORRUPTION PROGRAM

In order to strengthen the implementation of good Bank Corporate Governance, Bank Riau Kepri through the application of ethics has reaffirmed the Prohibition of Prevention/Anti-Corruption and Gratification for all levels of

jajaran Bank Riau Kepri. Hal ini terkait dengan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan, yang antara lain mengatur mengenai conflict of interest, larangan penyalahgunaan jabatan dan pengaturan integritas karyawan Bank sangat menyadari perlunya menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, rekanan dan seluruh stakeholder dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan yang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menciptakan budaya anti korupsi.

Bank Riau Kepri. This is related to the shared commitment as stated in the Code of Ethics and Corporate Cultural Values, which among others regulates conflicts of interest, prohibits abuse of office and regulates employee integrity. The Bank is very aware of the need to maintain good cooperative relationships with customers, partners and all stakeholders. by paying attention to ethics and avoiding things that lead to actions that are categorized as gratification and creating an anti-corruption culture.

KODE ETIK

Bank Riau Kepri menyadari arti pentingnya implementasi Tata Kelola yang Baik (***Good Corporate Governance***/ GCG) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham (***Shareholders***) namun juga segenap pemangku kepentingan (***Stakeholderss***), dengan pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

CODE OF ETHICS

Bank Riau Kepri realizes the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) as a tool to increase value and sustainable long-term business growth, not only for shareholders but also for all stakeholders. with business management that is not only pursuing profit but also management that is full of trust, transparency and accountability.

Kepercayaan ***stakeholders*** sebagai pemangku kepentingan, merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Bank. Kredibilitas Bank dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Bank dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Bank selain harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Bank.

The trust of stakeholders as stakeholders is a very decisive factor for the development and continuity of the Bank's business. The Bank's credibility and stakeholder trust are closely related to the Bank's behavior in interacting with stakeholders. Bank management in addition to complying with applicable laws and regulations must also uphold ethical norms and values. Awareness to implement good ethics will enhance and strengthen the Bank's reputation.

Implementasi Nilai-nilai Budaya Bank dan Kode Etik Perilaku dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Pegawai Bank (selanjutnya disebut Insan Bank) yang diiringi dengan adanya komitmen bersama diharapkan akan membawa Bank terus maju, berkembang dan unggul sesuai dengan visi dan misi yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi Bank dan sekaligus memenuhi tuntutan pengelolaan Bank yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik. Pedoman ***Compliance Code of Conduct*** (Kode Etik Kepatuhan) Bank ini perlu dilakukan penyempumaan/ penyesuaian terhadap persaingan usaha Bank dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat agar tercipta keselarasan antara implementasi Tata Kelola yang Baik melalui penerapan Kode Etik Kepatuhan secara konsisten dengan praktik bisnis dan operasional Bank yang sesuai aturan namun juga sekaligus pro bisnis. Perlu dipahami bahwa konsekuensi dari pelanggaran serius terhadap Kode Etik Kepatuhan ini adalah dapat diberikannya sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

The implementation of the Bank's Cultural Values and Code of Conduct from the Board of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board (DPS) and Bank Employees (hereinafter referred to as Bank Personnel) accompanied by a shared commitment is expected to bring the Bank forward, develop and excel in accordance with the vision and a mission that ultimately provides added value to the Bank and at the same time fulfills the demands of good Bank management in accordance with the principles of Good Governance. This Bank's Compliance Code of Conduct guidelines need to be refined/adjusted to the Bank's business competition and rapid changes in the business environment in order to create harmony between the implementation of Good Governance through the implementation of the Compliance Code of Ethics consistently with the Bank's business and operational practices according to the rules but also pro business at the same time. It should be understood that the consequence of a serious violation of this Compliance Code of Ethics is that sanctions can be imposed according to the applicable provisions.

POKOK-POKOK KODE ETIK

Prinsip Etika Bisnis Bank

a. Kami Sajikan Mutu
   Kegiatan Operasional Bank dituntut untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari yang harus senantiasa berfokus pada mutu dengan kata lain adalah, setiap Insan Bank senantiasa memenuhi kebutuhan dan harapan para ***Stakeholders***.
b. Kami Bekerja Profesional
   Dalam setiap aktivitas operasional Bank, setiap Insan Bank dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Setiap Insan Bank wajib melayani setiap nasabah secara profesional dengan sikap sopan, ramah dan wajar. Harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan serta mencarikan altematif solusi atas masalah nasabah dengan sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Ketepatan dan efisiensi waktu pelayanan adalah faktor yang mendukung layanan yang berkualitas.
c. Kami Bertekad Mewujudkan Tata Kelola Bank yang Baik
   Good Corporate Governance merupakan tata kelola Bank yang baik dalam rangka memberikan nilai yang terbaik bagi para ***Stakeholders***. Di dalamnya terkandung 5 (lima) prinsip yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan ***Fairness*** (T-A-R-I-F). Setiap Insan Bank dalam melakukan aktivitas sehari-hari senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip dasar ***Good Corporate Governance***. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan terjadi proses ***check and balance***.
d. Kami Menjaga Semangat Kebersamaan
   Setiap Insan Bank harus menjaga rasa kebersamaan, tidak dipengaruhi oleh ancaman, tindak kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan yang didasari perbedaan suku bangsa, agama, wama kulit, jenis kelamin, usia, ataupun ketidakmampuan pribadi baik melalui komentar, gurauan dan atau tindakan, begitu pula hubungan antar pegawai dan pengurus Bank tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing.
e. Kami Menghargai Peranan dan Prestasi Pegawai
   Keberhasilan pencapaian kinerja Bank harus dipandang sebagai hasil kerja kolektif seluruh pegawai dan unit kerja. Penghargaan harus diberikan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan kontribusinya kepada Bank.

Prinsip Etika Kerja

Etika kerja merupakan tuntutan etika bagi pengurus dan pegawai Bank dalam menjalankan fungsi dan tugasnya guna mencapai dan mewujudkan visi dan misi Bank. Etika Kerja di Bank terdiri dari:

PRINCIPLES OF THE CODE OF ETHICS

Bank Business Ethics Principles

a. We Serve Quality
Bank Operational Activities are required to carry out daily activities that must always focus on quality in other words, every Bank Personnel always meets the needs and expectations of the Stakeholders.

b. We Work Professional
In every operational activity of the Bank, every Bank Person is required to understand their rights, obligations, authorities and responsibilities. Every Bank Person is required to serve every customer in a professional manner with a polite, friendly and reasonable attitude. Must be responsive and try to understand the needs and find alternative solutions to customer problems as well as possible and while still paying attention to the interests of the Bank. The accuracy and efficiency of service time are factors that support quality services.

c. We Are Determined to Realize Good Bank Governance

Good Corporate Governance is good Bank governance in order to provide the best value for the Stakeholders. It contains 5 (five) principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness (T-A-R-I-F). Every Bank Personnel in carrying out daily activities always prioritizes the basic principles of Good Corporate Governance. By implementing these principles, it is hoped that a process of checks and balances will occur.

d. We Maintain the Spirit of Togetherness
Every Bank Personnel must maintain a sense of togetherness, not be influenced by threats, acts of violence and various forms of discrimination and harassment based on differences in ethnicity, religion, skin color, gender, age, or personal incompetence either through comments, jokes and or actions. also the relationship between employees and the management of the Bank should not be influenced by their respective interests.

e. We Appreciate the Role and Achievement of Employees
The successful achievement of the Bank's performance must be seen as the result of the collective work of all employees and work units. Awards must be given to employees who excel in accordance with their contribution to the Bank.

Principles of Work Ethics

Work ethics is an ethical requirement for the management and employees of the Bank in carrying out their functions and duties in order to achieve and realize the vision and mission of the Bank. Work Ethics in the Bank consists of:

a. Patuh dan Taat Pada Ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan yang Berlaku
Setiap Insan Bank dituntut untuk selalu mematuhi ketentuan peraturan dan perundangundang yang berlaku, baik ketentuan ekstemal maupun internal (BPP, SOP, SK, SE dan Instruksi Direksi, dll) sebagai dasar dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan/kebijakan maupun dalam menjalankan kegiatan operasional Bank.

b. Melakukan Pencatatan yang Benar Mengenai Segala Transaksi yang Bertalian Dengan Kegiatan Bank
Segenap Insan Bank harus mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya secara jujur, tepat, benar dan akurat yaitu:
- Mencatat data transaksi, akuntansi, keuangan Bank, kekayaan Bank, kepegawaian dan data lainnya secara jujur, tepat, benar dan akurat sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- Menyusun laporan secara jujur, tepat, benar dan akurat, serta bertanggung jawab sepenuhnya atas isi laporan tersebut.
- Meminta penggantian biaya dan atau melakukan pembebanan biaya Bank dilakukan dengan jujur dan benar, disertai dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. Menggunakan dan Melindungi Harta Bank Dengan Baik
Pada prinsipnya penggunaan harta benda milik Bank adalah untuk pelaksanaan pekerjaan dan harus mengikuti prosedur yang berlaku serta demi kepentingan Bank. Seluruh Insan Bank bertanggung jawab atas penggunaan harta benda milik Bank yaitu dapat berupa harta fisik dan non fisik, termasuk semua sarana, prasarana dan perangkat lunak (informasi). Penggunaan untuk tujuan selain untuk kepentingan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Pemimpin Unit Kerja, dan Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan bertanggungjawab atas izin yang diberikan.

d. Menghindarkan Diri Dari Persaingan yang Tidak Sehat
Suatu persaingan dinilai tidak sehat apabila:
- Dalam melakukan usahanya, dengan sengaja atau karena kelalaian, berbuat sesuatu yang dapat merugikan nama baik Bank, pengurus dan pegawai.
- Mempromosikan jasa-jasa bank dengan cara-cara yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengelabui calon nasabah atau nasabah atau dengan pemyataanpemyataan yang implikasinya mengandung hal-hal yang tidak benar atau menjelekkan bank lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

e. Tidak Menyalahgunakan Wewenang Untuk Kepentingan Pribadi
Untuk menghindari praktik Kolusi, Korupsi dan

a. Obey and Obey the Provisions of Laws and Regulations Applicable
Every Bank Person is required to always comply with the applicable laws and regulations, both external and internal (BPP, SOP, SK, SE and Directors' Instructions, etc.) as the basis for taking action and making decisions/ policies as well as in carrying out the Bank's operational activities.

b. Doing Correct Recording of All Transactions Related to Bank Activities
All Bank personnel must record data and compile work reports related to their functions and responsibilities honestly, precisely, correctly and accurately, namely:
- *Record transaction data, accounting, Bank finance, Bank assets, personnel and other data honestly, precisely, correctly and accurately according to their duties and responsibilities.*
- *Prepare reports honestly, precisely, correctly and accurately, and take full responsibility for the contents of the report.*
- *Requesting reimbursement of fees and or charging Bank fees is carried out honestly and correctly, accompanied by complete documents in accordance with applicable provisions and regulations.*

c. Using and Protecting Bank Assets Well

In principle, the use of assets owned by the Bank is for the implementation of work and must follow applicable procedures and in the interest of the Bank. All Bank personnel are responsible for the use of the Bank's assets, which can be in the form of physical and non-physical assets, including all facilities, infrastructure and software (information). Use for purposes other than for work purposes must be accounted for and with prior written permission from the Head of the Work Unit, and the Head of the Work Unit concerned is responsible for the permit granted.

d. Avoiding Unfair Competition
A competition is considered unhealthy if:
- *In carrying out its business, intentionally or due to negligence, do something that can harm the good name of the Bank, management and employees.*
- *Promoting bank services in ways that can directly or indirectly deceive potential customers or customers or by making statements that have implications that contain things that are not true or vilify other banks, either directly or indirectly.*

e. Not Abusing Authority for Personal Interest
To avoid the practice of Collusion, Corruption and Nepotism (KKN) which can harm the Bank, both

Nepotisme (KKN) yang dapat merugikan Bank, baik secara financial maupun kinerja Bank, maka segenap Insan Bank melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diyakini dapat digolongkan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau tindakan-tindakan lain sejenis yang tergolong atau mengarah tindakan korporasi yang merugikan seperti ***fraud***, ***insider trading*** dan sejenisnya.
- Mengutamakan obyektivitas, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap kebijakan penilaian, seperti penilaian terhadap kualitas dan harga pengadaan barang, pemilihan dan penunjukan konsultan, pemilihan dan penetapan rekanan, perawatan harta benda Bank, pembangunan sarana dan prasarana serta aktivitas bisnis lainnya dalam arti seluas-luasnya.

f. Menghindarkan Diri Dari Keterlibatan Pengambilan Keputusan Dalam Hal Terdapat Pertentangan Kepentingan

Setiap Insan Bank menjauhi dan menghindari setiap konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Bank, diantaranya namun tidak terbatas pada:

- Tidak memanfaatkan posisi jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- Tidak melibatkan diri pada proses keputusan dimana calon nasabah/rekanan memiliki hubungan/keterkaitan seperti : hubungan bisnis, hubungan hutang piutang dan hubungan kekerabatan. Jika tidak dapat menghindari diri dari kondisi benturan kepentingan agar menyatakan kondisi benturan kepentingan yang terjadi di dalam keputusan yang diambil sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan tentang benturan kepentingan.
- Dilarang menikmati/menerima sebagian maupun seluruh dana dari kredit yang sedang diproses dan/atau telah disetujui/diberikan kepada debitur.
- Dilarang menggunakan atau menerima fasilitas milik Nasabah dan/atau Relasi/rekanan.
- Tidak diperkenankan memperoleh atau meminta pinjaman dari Nasabah dan/atau Relasi/rekanan yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Dilarang memberikan talangan atau membayar sebagian/seluruh pinjaman/kredit debitur dengan menggunakan dana pribadi Insan Bank.

g. Menjaga Kerahasiaan Nasabah dan Bank

Guna menjaga kerahasiaan data-data perbankan, data kepegawaian maupun data-data lainnya yang tergolong dalam kategori data rahasia Bank dari pihakpihak (internal maupun ekstemal Bank) yang tidak berkepentingan, setiap Insan Bank tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

financially and Bank performance, all Bank Personnel shall do the following:

- *Not taking advantage of his position and authority to carry out actions that are believed to be classified as Corruption, Collusion and Nepotism or other similar actions that are classified as or lead to detrimental corporate actions such as fraud, insider trading and the like.*
- *Prioritizing objectivity, honesty, and openness in every assessment policy, such as an assessment of the quality and price of procurement of goods, selection and appointment of consultants, selection and determination of partners, maintenance of Bank assets, construction of facilities and infrastructure as well as other business activities in the broadest sense.*

f. Avoiding Involvement in Decision Making When There is Conflict of Interest

Every Bank Person stays away from and avoids any conflicts between personal interests and the interests of the Bank, including but not limited to:

- *Do not take advantage of their position and authority for personal gain.*
- *Do not involve yourself in the decision process where prospective customers/partners have relationships/ relationships such as: business relationships, accounts payable relationships and kinship relationships. If you cannot avoid yourself from a conflict of interest condition, you must state the condition of the conflict of interest that occurs in the decisions taken as regulated in the provisions regarding conflicts of interest.*
- *It is forbidden to enjoy/receive part or all of the funds from credit that are being processed and/or have been approved/granted to debtors.*
- *It is prohibited to use or receive facilities belonging to the Customer and/or Relationships/partners.*
- *It is not permitted to obtain or request loans from customers and/or relationships/partners that are used for personal interests which may cause a conflict of interest.*
- *It is forbidden to give bailouts or pay part/all of debtor loans/credit using personal funds of Bank Personnel.*

g. Maintaining Customer and Bank Confidentiality

In order to maintain the confidentiality of banking data, employee data and other data that are classified as Bank confidential data from parties (internal and external to the Bank) who are not interested, each Bank Person does not do the following:

- Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai dengan aturan rahasia Bank dan rahasia jabatan.
- Memberikan data dan informasi yang tergolong dalam kategori rahasia Bank, baik itu yang menyangkut strategi bisnis keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan Bank.
- Membocorkan atau menggunakan data dan informasi yang tergolong rahasia Bank untuk kepentingan politik tertentu, dan atau pihak ketiga yang tidak berwenang.

h. Memperhitungkan Dampak Merugikan Dari Setiap Kebijakan yang Ditetapkan Bank Terhadap Keadaan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Dalam menetapkan suatu keputusan atau kebijakan wajib memperhitungkan dampak yang merugikan yang dapat terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang ditetapkan, baik yang menimbulkan keresahan ekonomi, sosial dan kerusakan lingkungan.

Contoh penerapan kode etik ini antara lain:

- Manajemen Bank dalam memutuskan dan menerapkan suatu kebijakan harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap lingkungan usaha dan lingkungan masyarakat baik dampak ekonomi maupun sosial.
- Pemimpin unit kantor dalam memberikan keputusan pemberian kredit harus memperhatikan dampak dari pemberian kredit yang diputuskan olehnya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, seperti pemberian kredit kepada kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan penolakan sosial sedapat mungkin harus dihindari.

i. Tidak Menerima Hadiah Atau Imbalan

Dalam menjalin hubungan dengan para nasabah/ debitur, segenap Insan Bank selalu memperhatikan aspek kejujuran, kewajaran dan fairness, dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak menerima imbalan, hadiah atau cindera mata atau sesuatu barang atau sesuatu benda dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya.
- Dalam rangka menjaga nama baik Bank, setiap Insan Bank menghindarkan diri dari segala bentuk penyuapan.

j. Tidak Melakukan Perbuatan Tercela Yang Dapat Merugikan Citra Profesinya

Sebagai Insan Bank tidak melakukan perbuatan tercela, seperti berjudi, mabuk, perbuatan asusila, menggunakan psikotropika, berhutang diluar kemampuan bayarnya.

k. Menjaga Hubungan Baik Antar sesama Insan Bank Insan

Bank dalam pekerjaannya harus saling berkomunikasi dan saling berinteraksi serta saling memberikan

- *Provide customer data and information to any party in accordance with the Bank's secret rules and job secrecy.*
- *Provide data and information classified as confidential by the Bank, whether it concerns financial business strategies, policies, products, services, technology, personnel and other data that are believed and deemed to be detrimental to the Bank.*
- *Divulge or use data and information classified as confidential by the Bank for certain political interests, and or by unauthorized third parties.*

h. Taking into account the Adverse Impact of Every Policy Implemented by the Bank on Economic, Social and Environmental Conditions

In determining a decision or policy, it is obligatory to take into account the adverse impacts that may occur as a result of the established policy, whether it causes economic, social unrest and environmental damage.

Examples of the application of this code of ethics vinclude:

- *Bank management in deciding and implementing a policy must pay attention to the impact caused by the policy on the business environment and the community environment, both economic and social impacts.*
- *The head of the office unit in giving credit decisions must pay attention to the impact of the credit granted by him on the environment and the surrounding community, such as granting credit to business activities that can cause environmental pollution and social rejection as much as possible should be avoided.*

i. Not Accepting Gifts Or Rewards

In establishing relationships with customers/debtors, all Bank personnel always pay attention to aspects of honesty, fairness and fairness, by not doing the following:

- *Do not accept rewards, gifts or souvenirs or any goods or objects in any form with the aim of enriching themselves or their families.*
- *In order to maintain the good name of the Bank, every Bank Personnel shall refrain from all forms of bribery.*

j. Not Doing Disgraceful Deeds That Can Harm His Professional Image

As Bank personnel, do not commit disgraceful acts, such as gambling, drunkenness, immoral acts, using psychotropic substances, debts beyond their ability to pay.

k. Maintaining Good Relations Between Bank Personnel

Banks in their work must communicate with each other and interact with each other and provide each other

masukan yang bersifat positif guna terciptanya hubungan yang harmonis dalam setiap tugas dan pekerjaannya.

Agar suasana kerja menjadi positif dan kondusif maka setiap Insan Bank harus menjauhkan diri dari:

- Penekanan
- Penghinaan
- Pelecehan
- Provokasi
- Persaingan tidak sehat

l. Menjaga Keamanan Kerja dan Kebersihan Lingkungan Kerja

Seluruh Insan Bank, harus:

- Mengamankan lingkungan kerja termasuk harta, data, dan transaksi perusahaan.
- Tidak melakukan pelanggaran hukum.
- Tidak membocorkan rahasia perusahaan.
- Tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma agama, etika, dan kesusilaan.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Kode Etik adalah salah satu bentuk komitmen Bank Riau Kepri untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja bank melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya. Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti peraturan perundang- undangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kode Etik berlaku bagi seluruh insan Bank Riau Kepri, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan. Seluruh insan Bank Riau Kepri mempunyai kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan.

Penyebarluasan Kode Etik

Sosialisasi kode etik dimaksudkan agar timbul kesadaran Insan Bank terhadap Kode Etik. Dari kesadaran itu dapat ditumbuhkan sikap yang dikehendaki oleh Bank terhadap Insan Bank dalam hubungan antar pegawai, mengambil keputusan dan menjaga harta dan reputasi Bank. Selanjutnya tujuan sosialisasi adalah membentuk perilaku Insan Bank sesuai dengan Kode Etik Kepatuhan. Sosialisasi Kode Etik menjadi tanggungjawab dari Divisi Kepatuhan, mencakup program:

1. Sosialisasi untuk karyawan baru agar dapat mengadopsi Kode Etik Kepatuhan.
2. Orientasi dan pelatihan terhadap Insan Bank secara berkesinambungan:
   a. ***Awareness*** dan ***reminder***.
   b. Menyampaikan saluran komunikasi untuk menampung pendapat dan masukan karyawan.
   c. Forum diskusi (***problem solving***)
   d. Apabila ada perubahan Kode Etik disebarluaskan.

with positive input in order to create a harmonious relationship in every task and work.

In order for the work atmosphere to be positive and conducive, every Bank Personnel must abstain from:

- *Emphasis*
- *Insult*
- *Abuse*
- *Provocation*
- *Unfair competition*

l. Maintaining Work Safety and Cleanliness of the Work Environment

All Bank Personnel, must:

- *Securing the work environment including company property, data and transactions.*
- *Do not violate the law.*
- *Do not divulge company secrets.*
- *Do not carry out activities that violate religious, ethical, and moral norms.v*

Compliance With Code of Conduct

The Code of Ethics is a form of Bank Riau Kepri's commitment to comply with legal provisions and the highest ethical standards wherever the bank conducts its business/ operational activities. The management of the Company in addition to following the applicable laws and regulations must also uphold ethical norms and values. The Code of Ethics applies to all Bank Riau Kepri personnel, namely the Board of Commissioners, Directors, and all employees. All personnel of Bank Riau Kepri have the awareness to implement good ethics which will enhance and strengthen the reputation of the Company.

Dissemination of Code of Conduct

The socialization of the code of ethics is intended to raise awareness of the Bank's personnel to the code of ethics. From this awareness, the attitude desired by the Bank towards Bank personnel can be developed in the relationship between employees, making decisions and maintaining the assets and reputation of the Bank. Furthermore, the purpose of socialization is to shape the behavior of Bank Personnel in accordance with the Compliance Code of Ethics. Dissemination of the Code of Ethics is the responsibility of the Compliance Division, including the following programs:

1. *Socialization for new employees to adopt the Compliance Code of Ethics.*
2. *Ongoing orientation and training for Bank Personnel:*
   a. *Awareness and reminders.*
   b. *Delivering communication channels to accommodate employee opinions and input.*
   c. *Discussion forums (problem solving)*
   d. *If there is a change to the Code of Ethics, it will be disseminated.*

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Sosialisali kepada Pegawai

Bank Riau Kepri telah melakuan sosialisasi kebijakan kode etik karyawan dan Direksi pada tahun 2021 melalui program pendidikan, kegiatan *workshop, In House Training*, Pembinaan dan Monitoring secara *onsite*, pembelajaran atau e-learning melalui portal internal Bank Riau Kepri, forum group discussion, dan lain-lain.

Akses Terhadap Kode Etik

Agar dapat memberikan pemahaman kepada seluruh Insan Bank Riau Kepri, di tahun 2021 Perusahaan telah melakukan sosialisasi Kode Etik melalui pelatihan dan email pegawai. Apabila informasi yang telah dipublikasikan kurang lengkap, Pegawai sewaktu-waktu dapat bertanya kepada atasan langsung maupun ke unit kerja yang bertanggung jawab atas implementasi GCG yaitu Divisi Kepatuhan.

Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik

Setiap tahun bagi Pengurus dan Pegawai Bank Riau Kepri diharuskan membuat pernyataan tahunan Pegawai Bank Riau Kepri tentang Kode Etik Bank Riau Kepri yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 071A/KEPDIR/2019 tentang Kode Etik Kepatuhan (Compliance Code of Conduct) PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis sanki yang diberikan kepada insan Bank Riau Kepri yaitu:
- Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.
- Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan I.
- Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan II.
- Teguran Tertulis Berupa Surat Peringatan III.
- Penundaan Gaji Berkala Untuk Paling Lama 1 Tahun.
- Penundaan Kenaikan Pangkat Paling Lama 1 Tahun.
- Penurunan *Grade* Setingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya.
- Penurunan *Grade* 2 (Dua) Tingkat Lebih Rendah Dari Peringkat Sebelumnya.
- Pemutusan Hubungan Kerja.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

Efforts for Implementation And Enforcement Of The Code Of Conduct

Socialization to Employees

Bank Riau Kepri has disseminated policies on the code of ethics for employees and Directors in 2021 through educational programs, workshop activities, In House Training, onsite coaching and monitoring, learning or e-learning through Bank Riau Kepri internal portals, group discussion forums, and others. -other.

Access to the Code of Ethics

In order to provide understanding to all Bank Riau Kepri Personnel, in 2021 the Company has disseminated the Code of Ethics through employee training and email. If the information that has been published is incomplete, employees can at any time ask their direct supervisor or the work unit responsible for GCG implementation, namely the Compliance Division.

Statement of Compliance with the Code

Every year the Management and Employees of Bank Riau Kepri are required to make an annual statement for Bank Riau Kepri employees regarding the Bank Riau Kepri Code of Ethics which has been regulated in the Decree of the Board of Directors Number: 071A/KEPDIR/2019 concerning the Compliance Code of Conduct of PT. Regional Development Bank Riau Kepri.

Types of Sanctions for Violation of Code of Conduct

The types of sanctions given to Bank Riau Kepri personnel are:
- *Statement of Dissatisfaction in Writing.*
- *Written warning in the form of a warning letter I.*
- *Written warning in the form of a warning letter II.*
- *Written warning in the form of a warning letter III.*
- *Periodic salary deferral for a maximum of 1 year.*
- *Postponement of promotion of a maximum of 1 year.*
- *Lower Grade Grade Drop Than Previous Rank.*
- *Drop of Grade 2 (Two) Levels Lower Than Previous Ranks.*
- *Work termination.*

Number of Violations and Sanctions Provided

Tabel Jumlah Pelanggaran dan Sanksi Yang Diberikan
Table of Number of Violations and Sanctions Given

Kategori *Category*	Keterangan	*Information*	Jumlah *Total*
Ringan *Light*	Peringatan Pertama Peringatan Kedua Peringatan Ketiga Teguran	*First Warning* *Second Warning* *Third Warning* *rebuke*	6 6 2 -
Sedang *Currently*	Pernyataan Tidak Puas *Demosi Grade*	*Dissatisfied Statement* *Demotion Grade*	1 -
Berat *Heavy*	Pemutusan Hubungan Kerja	*Work termination*	4

Review Pelaksanaan Kode Etik

Review Pelaksanaan Kode Etik pada Bank Riau Kepri dilakukan melalui revisi kebijakan terkait penerapan kode etik di lingkungan Bank Riau Kepri, sehingga kebijakan terkait pelaksanaan kode etik dapat lebih implementatif dan efektif dalam pelaksanaannya.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Ketentuan Pengendalian Gratifikasi Bank Riau Kepri diatur dalam Surat Keputusan (SK) Direksi No.032/KEPDIR/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Dimana dengan diberlakukannya ketentuan tersebut telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berkedudukan di Unit Kerja Divisi Kepatuhan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi kepatuhan di Bank Riau Kepri.

Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi Bank Riau Kepri dikelola Divisi Kepatuhan yang bertindak sebagai pelaksana Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Untuk membantu pelaksanaan tugas Pemimpin Divisi Kepatuhan dalam menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi, Pemimpin Divisi Kepatuhan menunjuk beberapa orang pegawai di Divisi Kepatuhan untuk mengelola dan melaksanakan program pengendalian gratifikasi.
Adapun ruang lingkup tugas pokok dan fungsi UPG meliputi sebagai berikut :

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi dari ketentuan terkait gratifikasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari insan Bank;
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Direksi;
6. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal di lingkungan Bank;
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank;
8. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifkasi; dan

Code of Conduct Implementation Review

Review of the Implementation of the Code of Ethics at Bank Riau Kepri is carried out through policy revisions related to the implementation of the code of ethics within Bank Riau Kepri, so that policies related to the implementation of the code of ethics can be more implementable and effective in its implementation.

Gratuity Control Policy

Gratification can be interpreted as a gift in a broad sense, which includes the provision of money, goods, rebates (discounts), commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment and other facilities, both received domestically and internationally. abroad and is carried out using electronic means or without electronic means.

Provisions for Control of Gratification for Bank Riau Kepri are regulated in the Decree (SK) of the Board of Directors No. 032/KEPDIR/2020 concerning Guidelines for Control of Gratification within PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Where with the enactment of these provisions, a Gratification Control Unit (UPG) has been established based in the Compliance Division Work Unit which has the task of carrying out the compliance function at Bank Riau Kepri.

Gratuity Control Management

Gratification control at Bank Riau Kepri is managed by the Compliance Division, which acts as the executor of the Gratification Control Unit (UPG). To assist the implementation of the duties of the Head of the Compliance Division in carrying out the gratification control function, the Head of the Compliance Division appointed several employees in the Compliance Division to manage and implement the gratification control program.
The scope of the main duties and functions of UPG includes the following:

1. *Prepare and/or evaluate the provisions related to gratification by taking into account the applicable provisions and other similar needs to support the implementation of gratification control;*
2. *Receive, analyze and administer reports of acceptance and rejection of gratuities from Bank personnel;*
3. *Forward the gratuity receipt report to the KPK;*
4. *Report the recapitulation of gratification reports periodically to the KPK;*
5. *Submitting the results of the management of the gratification report and the proposed gratification control policy to the Board of Directors;*
6. *Conducting socialization of gratification rules to internal parties within the Bank;*
7. *Performing the management of gratuities that are under the authority of the Bank;*
8. *Mapping vulnerable points of acceptance and granting of gratuities; and*

9. Melakukan ***monitoring*** dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

1. Sosialisasi untuk karyawan baru agar dapat mengimplementsikan kebijakan gratifikasi di lingungan Bank Riau Kepri.
2. Pelatihan dan pemahaman kebijakan gratifikasi di lingkungan Bank Riau Kepri terhadap Insan Bank secara berkesinambungan baik melalui kegiatan ***In House Training***, kunjungan ke jaringan kantor Bank maupun pembelajaran atau ***e-learning*** melalui portal internal Bank Riau Kepri.

Laporan Gratifikasi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 terdapat 1 (satu) laporan gratifikasi yang diterima oleh Unit pengendalian Gratifikasi (UPG) Bank Riau Kepri dan telah disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi Gratifikasi Online.

Kebijakan dan Skema WBS

Dalam rangka penyelenggaraan operasional Bank yang sehat dan penerapan tata kelola yang baik, seluruh pegawai/pejabat Bank Riau Kepri wajib melaporkan setiap dugaan tindakan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Bank. Kebijakan ***whistleblowing*** diimplementasikanuntuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank Riau Kepri untuk melaporkan ***fraud*** yang terjadi. Untuk pedoman dan kebijakan terkini mengenai W***histleblowing Syastem*** (WBS) diatur di dalam SK Direksi Nomor 080/KEPDIR/2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (***Whistleblowing System***).

Keberadaan Whistleblowing System

Bagi Bank Riau Kepri, keberadaan WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa keberadaan WBS bagi Bank Riau Kepri diharapkan menjadi sistem yang efektif dalam mengungkapkan terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat serta bertujuan untuk:

1. Menerapkan budaya kerja Bank Riau Kepri secara konsisten khususnya pelaksanaan nilai budaya integritas.
2. Memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial termasuk hal-hal yang dapat merusak citra PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri dalam rangka menjaga serta melindungi aset/kepentingan Bank Riau Kepri.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank Riau Kepri sekaligus memberdayakan serta mengoptimalkan penyelesaian secara internal Bank Riau Kepri sebelum dilakukan penyelesaian secara eksternal melalui jalur hukum yang dianggap perlu.
4. Meningkatkan reputasi Bank Riau Kepri.

9. Monitoring and evaluating the implementation of gratification control with the KPK.

Gratification Policy Socialization

1. *Socialization for new employees so that they can implement the gratification policy in the Bank Riau Kepri environment.*
2. *Training and understanding of gratification policies within the Bank Riau Kepri environment for Bank Personnel on an ongoing basis either through In House Training activities, visits to the Bank's office network as well as learning or e-learning through the internal portal of Bank Riau Kepri.*

2021 Gratification Report

Throughout 2021 there was 1 (one) gratification report received by the Gratification Control Unit (UPG) of Bank Riau Kepri and has been submitted to the KPK through the Online Gratification Application.

WBS Policy and Scheme

In the context of implementing sound Bank operations and implementing good governance, all employees/officers of Bank Riau Kepri are required to report any alleged irregularities that occur within the Bank. The whistleblowing policy was implemented to provide encouragement and awareness to Bank Riau Kepri employees and officials to report fraud that occurred. The latest guidelines and policies regarding the Whistleblowing System (WBS) are regulated in the Decree of the Board of Directors Number 080/KEPDIR/2020 concerning Guidelines for the Reporting System of Alleged Violations (Whistleblowing System).

The existence of a Whistleblowing System

For Bank Riau Kepri, the existence of WBS is part of the internal control system in preventing irregularities. In other words, it can be said that the existence of WBS for Bank Riau Kepri is expected to be an effective system in revealing the occurrence of various forms of fraud and be able to resolve it in a short time and aims to:

1. *Implementing the work culture of Bank Riau Kepri consistently, especially the implementation of the culture of integrity.*
2. *Strengthening the supervisory environment and encouraging reporting on things that can cause financial losses, including things that can damage the image of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri in order to maintain and protect the assets/interests of Bank Riau Kepri.*
3. *Make it easier for management to quickly and effectively deal with violations that occur within the Bank Riau Kepri environment while empowering and optimizing the internal settlement of Bank Riau Kepri prior to external settlement through legal channels deemed necessary.*
4. *Improve the reputation of Bank Riau Kepri.*

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Dalam penyampaian laporan pelanggaran dan mekanisme tindak lanjut laporan ***fraud***, Bank Riau Kepri menerapkan mekanisme WBS dimana ***whistleblower*** dapat menyampaikan pengungkapan kasus ***fraud*** dengan cara:

1. Pelapor menyampaikan laporan ***Whistleblowing System*** melalui Aplikasi ***Whistleblowing System*** pada ***website*** Bank Riau Kepri pada kolom/tab WBS.

Submission and Media of Violation Reports

In submitting violation reports and the mechanism for following up on fraud reports, Bank Riau Kepri applies the WBS mechanism where whistleblowers can submit disclosures of fraud cases by:

1. *The reporter submits the Whistleblowing System report through the Whistleblowing System Application on the Bank Riau Kepri website in the WBS column/tab.*

TATA KELOLA UNIT USAHA SYARIAH
Sharia Business Unit Governance

1. Pelapor mengisi data isian pada formulir aduan secara lengkap dan benar, memuat informasi berupa
   - Jenis Pelanggaran
   - Kronologi kejadian;
   - Informasi pelaku/terlapor
   - Bukti/dokumen yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran.
   - Data pelapor

1. *The reporter fills in the data on the complaint form completely and correctly, containing information in the form of:*
   - *Type of Violation*
   - *Chronology of events;*
   - *Perpetrator/reported information*
   - *Evidence/documents showing a suspected violation.*
   - *Reporting data*

Perlindungan Bagi *Whistleblower*

Perlindungan kepada pelapor WBS pada prinsipnya adalah hak dari pelapor guna memberikan rasa aman kepada pelapor terkait dengan ancaman/tindakan yang didapat akibat laporan WBS yang disampaikannya.

Untuk mendorong partisipasi semua pihak agar memanfaatkan WBS Bank Riau Kepri guna melaporkan adanya dugaan pelanggaran, maka Bank memberikan perlindungan bagi pelapor berupa:

1. Jaminan kerahasiaan identitas dan melindungi pelapor, termasuk jaminan kerahasiaan dari petugas, pengelola dan penanggung jawab WBS.
2. Perlindungan kepada pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas, pelapor dan isi laporan serta jaminan keamanan dari perlakuan yang merugikan, seperti intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya maupun adanya catatan yang merugikan dalam file data pribadi pelapor, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Pelapor adalah juga sebagai Terlapor atau pihak yang terlibat di dalam dugaan pelanggaran yang disampaikan.

Whistleblower Protection

Protection for WBS whistleblowers in principle is the right of the whistleblower in order to provide a sense of security to the whistleblower regarding the threats/actions he/she receives as a result of the WBS report he/she submits.

To encourage the participation of all parties to take advantage of the WBS of Bank Riau Kepri to report suspected violations, the Bank provides protection for whistleblowers in the form of:

1. *Guarantee the confidentiality of identity and protect the reporter, including the guarantee of confidentiality from the officers, managers and person in charge of WBS.*
2. *Protection for the whistleblower includes guarantees of the confidentiality of the identity, the reporter and the contents of the report as well as security guarantees from adverse treatment, such as intimidation, harassment or discrimination in all its forms as well as the existence of detrimental records in the personal data file of the reporter, unless based on the results of the examination it turns out that the Reporter is also the Reported Party. or parties involved in the alleged violation submitted.*

Penanganan Pengaduan

The Handling of Complaints

Prosedur Pelaporan WBS BRK

BRK WBS Reporting Procedure

Pelapor
Reporters



1

- Menyampaikan laporan melalui Website Bank
- *Submit reports through the Bank's Website*

Petugas WBS
WBS officer



2

- Verifikasi dan Analisa Laporan
- Klarifikasi dan konfirmasi kepada pelapor untuk melengkapi keterangan dan bukti
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada pengelola disertai *update* status laporan di WBS

- *Report Verification and Analysis*
- *Clarification and confirmation to the reporter to complete information and evidence*
- *Create and submit reports to managers accompanied by status updates on the WBS report*

Pengelola WBS
WBS Manager



3

- Menerima laporan dari Petugas WBS
- Membuat usulan tindak lanjut laporan untuk memperoleh persetujuan tindak lanjut
- menyampaikan hasil keputusan tindak lanjut kepada DIA/Tim Anti *Fraud* untuk proses investigasi/ pemeriksaan

- *Receive a report from the WBS Officer*
- *Make a follow-up report recommendation to obtain follow-up approval*
- *submit the results of follow-up decisions to the DIA / Anti-Fraud Team for the investigation / examination process*

Direksi
Directors

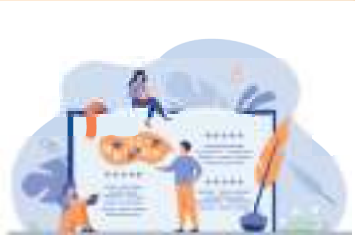


6

- Keputusan Sanksi
- Pelaksanaan Keputusan Sanksi

- *Sanction Decision*
- *Implementation of Sanction Decisions*

Divisi Internal Audit/Tim Intivigasi Fraud
Internal Audit Division/Fraud Investigation Team



5

- Melakukan proses pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada penanggung Jawab WBS

- *Carry out a more in-depth examination and investigation process*
- *Submit the results of the examination to the person in charge of the WBS*

Penanggung Jawab WBS
The Person in Charge of the WBS



4

- Memberikan Keputusan persetujuan atau penolakan tindak lanjut laporan
- Laporan disetujui untuk dilakukan investigasi/pemeriksaan mendalam

- *Provide a decision on approval or rejection of follow-up reports*
- *The report is approved for an in-depth investigation / examination*

Jenis Pelanggaran yang dapat Dilaporkan

1. Perbuatan ***fraud***.
2. Pelanggaran kode etik antara lain meliputi:
   a. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau dokumen.
   b. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar bank.
   c. Menginformasikan/mengungkapkan rahasia nasabah dan bank.
   d. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau mengakibatkan kerugian bank.
   e. Penyelewengan uang/kas bank.
   f. Penggelapan aset dan/atau inventaris bank.
   g. Pemerasan.
   h. Perbuatan Asusila.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Setiap pengaduan yang sampai kepada pengelola WBS, akan ditindaklanjuti ke Direktur Utama selaku Penanggung Jawab WBS melalui Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Selanjutnya Direktur Utama memberikan keputusan persetujuan atau penolakan tindak lanjut laporan. Jika Penanggung Jawab WBS setuju untuk ditindaklanjuti, maka Divisi Internal Audit atau Tim Investigasi *Fraud* melakukan proses pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direksi.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Mencetak, mensosialisasikan dan mendistribusikan dokumen kebijakan WBS.

1. *Website* perusahaan.
2. Forum internal pegawai.
3. Aplikasi Strategi Anti *Fraud* PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.
4. Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Sepanjang tahun 2021 terdapat 1 (satu) pengaduan dugaan pelanggaran yang disampaikan melalui WBS.

Good Corporate Governance Unit Usaha Syariah

Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* yang konsisten merupakan sebuah modal yang besar untuk terbentuknya citra perusahaan yang baik kepada masyarakat. Mengingat tingginya kompetensi perbankan syariah yang dirasakan saat ini, kami memandang perlunya pelaksanaan *GCG* secara konsisten dan baik

Types of Violations that can be Reported

1. *Acts of fraud.*
2. *Violations of the code of ethics include, among others:*
   a. *Misuse and falsification of data and/or documents.*
   b. *Misuse of position for personal/group interests or other interests outside the bank.*
   c. *Inform/disclose customer and bank secrets.*
   d. *Acceptance and/or granting of gratuities that may influence decision-making and/or result in bank losses.*
   e. *Misappropriation of money/bank cash.*
   f. *Embezzlement of bank assets and/or inventory.*
   g. *Extortion.*
   h. *Immoral acts.*

Violation Report Manager

Every complaint that reaches the WBS manager, will be followed up to the President Director as the WBS Responsible Person through the Director of Compliance and Risk Management. Furthermore, the President Director gives a decision on approval or rejection of follow-up reports. If the person in charge of WBS agrees to be followed up, the Internal Audit Division or the Fraud Investigation Team will carry out a more in-depth examination and investigation process and submit the results of the examination to the Board of Directors.

Whistleblowing System Socialization

Print, socialize and distribute WBS policy documents.

1. *Company website.*
2. *Employee internal forum.*
3. *Application of the Anti-Fraud Strategy of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.*
4. *Application of the Compliance Information System of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri*

Number of Complaints and Complaint Process

Throughout 2021, there were 1 (one) complaint of alleged violations submitted through WBS.

Good Corporate Governance Sharia Business Unit

The consistent implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a big capital for the formation of a good corporate image to the public. Given the current high level of competence in sharia banking, we view the need for consistent and good GCG implementation so as to generate public trust in the Sharia Business Unit (UUS) of PT. Bank Riau

sehingga menghasilkan kepercayaan masyarakat kepada Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Riau Kepri, khususnya masyarakat Riau dan Kepri. Penerapan *GCG* yang dilakukan secara konsisten dan baik akan meningkatkan keyakinan *stakeholders* terhadap kinerja dan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Riau Kepri.

Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Riau Kepri berkomitmen dalam melaksanakan *GCG* di seluruh aspek yang dimiliki dengan berlandaskan pada 5 prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi *(independency*) dan kewajaran (*fairness*).

Dalam pelaksanaan *GCG*, Bank perlu melakukan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan *(conflict of interest)* dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi kepentingan *stakeholders* khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip transparansi *(transparency),* Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan *GCG* kepada *stakeholders*. Laporan dimaksud diperlukan untuk meningkatkan pemahaman *stakeholders* dan mendorong *stakeholders* melakukan *check and balance***.** Penyusunan Laporan Pelaksanaan *GCG* ini disusun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/ DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Unit Usaha Syariah

Bank Riau Kepri telah mengubah susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) yang mana pada SOT Unit Usaha Syariah PT Bank Riau Kepri berada dibawah Direktur Kredit dan Syariah. Hal ini didasari dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/KEPDIR/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Untuk lebih jelasnya berikut SOT Unit Usaha Syariah PT Bank Riau Kepri

Kepri, especially the people of Riau and Riau Islands. The implementation of GCG that is carried out consistently and well will increase stakeholder confidence in the performance and operations of the Sharia Business Unit (UUS) of PT. Riau Islands Bank.

By referring to Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Sharia Business Unit (UUS) PT. Bank Riau Kepri is committed to implementing GCG in all its aspects based on 5 basic principles of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

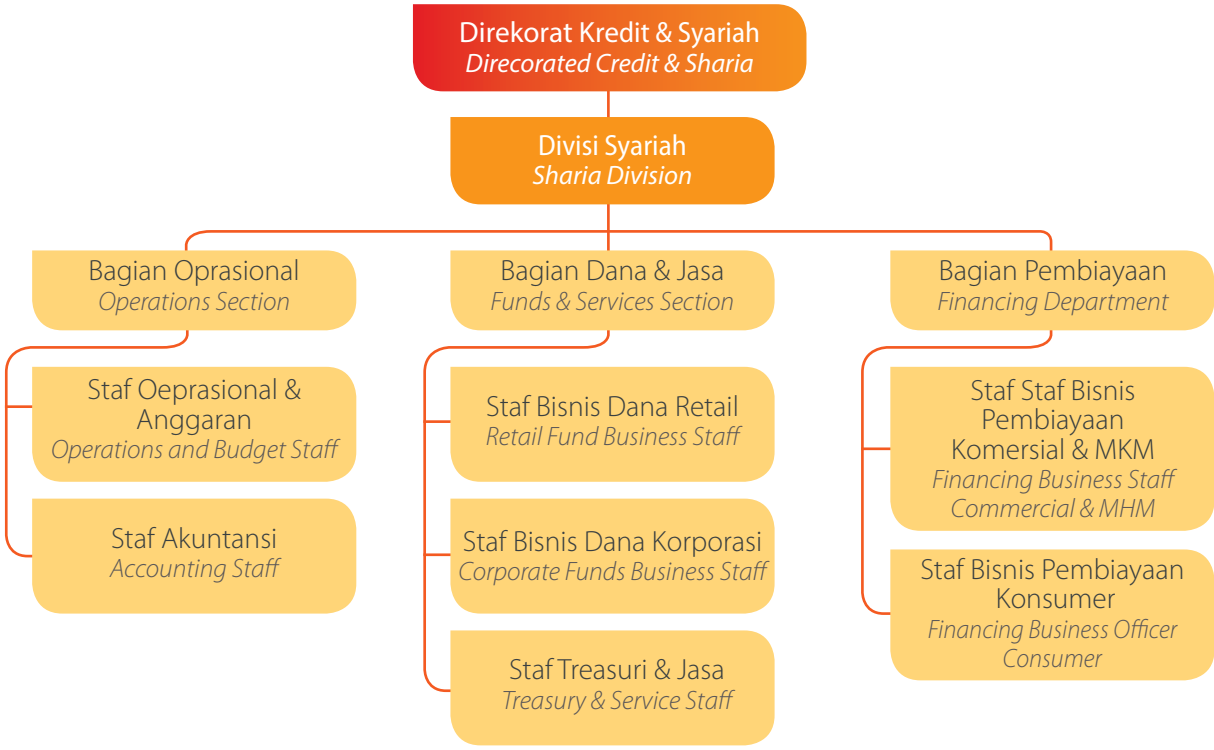
In implementing GCG, Banks need to carry out checks and balances, avoid conflicts of interest (conflict of interest) in carrying out their duties and improve protection for the interests of stakeholders, especially customers who own funds and minority shareholders.

As a form of implementation of the principle of transparency (transparency), Banks are required to submit a GCG Implementation Report to stakeholders. This report is needed to increase stakeholder understanding and encourage stakeholders to carry out checks and balances. The preparation of this GCG Implementation Report is prepared based on the provisions of Bank Indonesia Circular No. 12/13/ DPbS dated April 30, 2010 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Organizational Structure and Working Procedures (SOT) Sharia Business Units

Bank Riau Kepri has changed the composition of the Organizational Structure and Work Procedure (SOT) which in the previous SOT the Sharia Business Unit of PT. Bank Riau Kepri is under the Director of Credit and Sharia. This is based on the Decree of the Board of Directors of Bank Riau Kepri 084/KEPDIR/2020 dated November 6, 2020 regarding the Organizational Structure and Work Procedure of PT. Regional Development Bank Riau Kepri for more details, the following SOT Bank Riau Kepri:

Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah *Sharia Business Unit Organizational Structure*



Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kredit dan Syariah yang Mensupervisi Unit Usaha Syariah (UUS)

1. Direktur Kredit dan Syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
2. Direktur Kredit dan Syariah wajib menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah.
3. Direktur Kredit dan Syariah wajib menyediakan data dan informasi terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk penjelasan mengenai Dewan Pengasawas Syariah diuraikan pada bagian Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Duties and Responsibilities of The Director of Credit and Sharia Supervising Sharia Business Units (UUS)

1. *The Director of Credit and Sharia is fully responsible for the implementation of UUS management based on prudential principles and Sharia principles.*
2. *The Director of Credit and Sharia is required to follow up on recommendations from the results of the supervision of the Sharia Supervisory Board.*
3. *The Director of Credit and Sharia is required to provide data and information related to the fulfillment of Sharia Principles that are accurate, relevant and timely to the Sharia Supervisory Board.SHARIA*

Supervisory Board (DPS)

For an explanation of the Sharia Supervisory Board, it is described in the Sharia Supervisory Board (DPS) section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Remunerasi dan Fasilitas Lainnya DPS.

Remunerasi yang dimaksud adalah penghasilan dalam bentuk keuangan (non natura) antara lain gaji, tunjangan (***benefit***), kompensasi dalam bentuk saham, bonus dan bentuk remunerasi lainnya.

Fasilitas lain yang dimaksud adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan (natura), antara lain fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, fasilitas asuransi kesehatan, fasilitas telekomunikasi, dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Remuneration and Other Facilities DPS.

The remuneration referred to is income in the form of financial (non-kind) including salary, benefits (benefits), compensation in the form of shares, bonuses and other forms of remuneration.

Other facilities referred to are facilities received not in the form of finance (in kind), including housing facilities, transportation facilities, health insurance facilities, telecommunications facilities, and other facilities, which may or may not be owned.

Tabel Remunerasi dan Fasilitas Lainnya DPS PT. Bank Riau Kepri
Table of Remuneration and Other Facilities DPS PT. Bank Riau Kepri

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya *Types of Remuneration and Other Facilities*	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun *Amount received in 1 (one) year*	
		Orang *Person*	Rupiah (Juta) *Rupiah (Million)*
1.	Remunerasi *Remuneration*	4	537,6
2.	Fasilitas lainnya : *Other facilities:*	-	-
	Yang dapat dimiliki *What can be owned*	-	-
	Yang tidak dapat dimiliki *What you can't have*	-	-
TOTAL			537,6

Jumlah anggota DPS PT. Bank Riau Kepri yang menerima remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagaimana tabel dibawah ini :

The number of DPS members of PT. Bank Riau Kepri who receive remuneration in one year are grouped in the range of income levels, as shown in the table below:

Tabel Remunerasi dan Dewan Pengawas Syariah
Table of Remuneration and Sharia Supervisory Board

Jumlah Remunerasi *) per orang dalam 1 tahun *Total Remuneration *) per person in 1 year*	Jumlah Dewan Pengawas Syariah *Number of Sharia Supervisory Board*
di atas Rp. 2 miliar *above Rp. 2 billion*	-
di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2 miliar *above Rp. 1 billion to Rp. 2 billion*	-
di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar *above Rp. 500 million up to Rp. 1 billion*	-
Rp. 500 juta ke bawah *Rp. 500 million and below*	4

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)
*) received in financial form (non-kind)
) received in financial form (non-kind)
) received in financial form (non-kind)

Daftar Konsultan, Penasehat atau yang Dipersamakan Dengan itu yang Digunakan Oleh UUS Bank Riau Kepri

Pada tahun 2021 UUS Bank Riau Kepri tidak menggunakan jasa Konsultan, Penasihat ataupun yang dipersamakan dengan itu untuk program atau operasional apapun yang ada di UUS Bank Riau Kepri.

List of Consultants, Advisors or The Equivalent of Them Used by UUS Bank Riau Kepri

In 2021 the UUS of Bank Riau Kepri will not use the services of a Consultant, Advisor or equivalent for any program or operation at UUS Bank Riau Kepri.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) Yang Terjadi

Yang dimaksud dengan "***internal fraud***" adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorer dan ***outsourcing***) terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional UUS yang mempengaruhi kondisi keuangan UUS secara signifikan. Yang dimaksud dengan "mempengaruhi kondisi keuangan UUS Bank Riau Kepri secara signifikan" adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Untuk penyimpangan (***internal fraud***) sebagaimana yang disebut diatas telah terjadi pada UUS Bank Riau Kepri selama tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

The Number of Differences (Internal Fraud) That Happened

What is meant by „internal fraud" is deviation/cheating committed by the Board of Commissioners, Board of Directors, permanent employees, and/or non-permanent employees (honorary and outsourcing) related to UUS work processes and/or operational activities that significantly affect UUS financial condition. . What is meant by "significantly affects the financial condition of UUS Bank Riau Kepri" is if the impact of the deviation is more than Rp100,000,000 (one hundred million rupiah).

The deviation (internal fraud) as mentioned above has occurred in the UUS of Bank Riau Kepri during 2021, as can be seen in the table below:

Tabel Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) Yang Terjadi
Table of the Number of Deviations (Internal Fraud) That Happened

Internal Fraud dalam 1 tahun *Internal Fraud in 1 year*	Jumlah kasus yang Dilakukan oleh *Number of cases Performed by*					
	Dewan Komisaris/Direksi *Board of Commissioners/Directors*		Pegawai Tetap *Permanent employee*		Pegawai Tidak Tetap *Temporary employees*	
	Thn sebelumnya *Previous year*	Thn berjalan *Current year*	Thn sebelumnya *Previous year*	Thn berjalan *Current year*	Thn sebelumnya *Previous year*	Thn berjalan *Current year*
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan		-		-		-
Dlm proses penyelesaian di internal UUS.	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya.	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.		-		-		-

Jumlah Permasalahan Hukum

Yang dimaksud dengan "permasalahan hukum" adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS selama periode tahun 2021 dan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk pengertian permasalahan hukum sebagaimana yang disebut diatas pada UUS PT. Bank Riau Kepri selama tahun 2021, sebagaimana dapat dilihat tabel dibawah ini :

Total Legal Problems

What is meant by "legal issues" are civil and criminal law problems faced by UUS during the 2021 period and have been submitted through a legal process. For the understanding of legal issues as mentioned above in UUS PT. Bank Riau Kepri during 2021, as can be seen in the table below:

Tabel Jumlah Permasalahan Hukum
Table of Number of Legal Problems

Permasalahan Hukum *Legal Issues*	Jumlah *Total*	
	Perdata *Civil*	Pidana *Criminal*
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	1
Dalam proses penyelesaian	-	1
Total	-	2

Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti Dan Simpanan Dana Deposan Inti

Distribution of Funds to Core Financing Customers and Core Deposits Funds

Tabel Jumlah Permasalahan Hukum
Table of Number of Legal Problems

(juta)
(million)

No	Jenis *Type*	Jumlah Nasabah Inti *Number of Core Customers*	Nominal *Nominal*	Total Dana/Pembiayaan *Total Funds/Financing*	%
1	Penyaluran Dana Kepada Nasabah inti	15	111.356	5.018.556	2,22
2	Simpanan Nasabah Inti	15	2.557.701	5.540.047	46,17

Penyaluran Dana Yang Berasal Dari UUS Untuk Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Yang dimaksud dengan penyaluran dana adalah penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang dananya berasal dari UUS PT. Bank Riau Kepri. Selama tahun 2021 UUS Bank Riau Kepri telah menyalurkan dana untuk kegiatan sosial sebesar Rp 324.970.900,- (***tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah)*** dengan rincian sebagai berikut:

Distribution of Funds Coming From UUS for Community Social Activities

What is meant by disbursement of funds is the distribution of funds for social activities whose funds come from UUS PT. Riau Islands Bank. During 2021 the UUS of Bank Riau Kepri has distributed funds for social activities in the amount of Rp. 324,970,900,- (three hundred twenty four million nine hundred seventy thousand and nine hundred rupiah) with the following details:

No	Tanggal *Date*	Penerima Dana *Beneficiary*	Kegiatan *Activity*	Nominal (Rp) *Nominal (Rp)*
1	04/01/2021	Kemenag Meranti *Ministry of Religion Meranti*	Kegiatan Amal *Charity*	5,000,000
2	07/01/2021	TPQ Anugerah *TPQ Anugerah*	Bantuan Sewa Rumah Tahfiz TPQ Anugerah *Tahfiz TPQ Anugerah House Rental Assistance*	1,000,000
3	14/01/2021	KONI Rokan Hilir	Peralatan Olahraga *KONI Rokan Hilir*	500,000
4	15/01/2021	TPQ Raudhatul Jannah	Kegiatan Lomba MTQ *MTQ Competition Activities*	1,500,000
5	19/01/2021	Polres Inhil	HUT Satpam ke 40 tahun 2020 *40th Security Guard Anniversary 2020*	1,000,000
6	22/01/2021	Panitia HUT Satpam	Bantuan HUT Satpam ke 40 tahun 2020 *Security Guard 40th Anniversary Assistance 2020*	500,000
7	22/01/2021	Setdako Tanjungpinang	Acara Family Gathering Koperasi Konsumen UKM Penjahit Bertuah *Family Gathering Event for the Lucky Tailor UKM Consumer Cooperative*	3,285,500
8	05/02/2021	Nahdhatul Ulama Pinggir	Kegiatan Harlah Nahdhatul Ulama *Harlah Nahdhatul Ulama activities*	250,000
9	05/02/2021	Komunitas Hijrah Yuk Kota Tanjungpinang	Kegiatan Hijrah Yuk "Event Saturday Night" *Let's Hijrah Activities "Saturday Night Event"*	1,000,000
10	16/02/2021	Kantor Kemenag Kuansing Kuansing Ministry of Religion Office	Bantuan Posko Satpam Kantor Kemenag Kuansing *Assistance for the Kuansing Ministry of Religion Security Command Post*	2,000,000
11	17/02/2021	STIE Pembangunan Tanjungpinang STIE Tanjungpinang Development	Kegiatan Milad ke XXIII (23) *XXIII Anniversary Activities (23)*	10,000,000
12	19/02/2021	RT 01 RW 07	Pemilihan Ketua RW *Election of RW . Chair*	500,000
13	23/02/2021	Pelajar IPM	Lomba Ikatan Pelajar IPM *IPM Student Association Competition*	250,000
14	25/02/2021	TKT SMA Rohul Rohul High School TKT	Olimpiade Al Qur'an II Tingkat SMA *Al Qur'an II Olympiad for High School Level*	500,000
15	26/02/2021	Setdako Tanjungpinang	Family Gathering Jemaah Haji Kota Tanjungpinang Kloter 27 *Family Gathering of Hajj Congregants in Tanjungpinang City Group 27*	3,170,900
16	01/03/2021	Panitia STQ Kelurahan Tiban Baru New Tiban Village STQ Committee	STQ Kelurahan Tiban Baru *New Tiban Village STQ*	500,000
17	01/03/2021	Panitia STQ Kelurahan Tanjung Pinggir Tanjung Pinggir Village STQ Committee	STQ Kelurahan Tanjung Pinggir *STQ Tanjung Pinggir Village*	750,000
18	03/03/2021	STAI Miftahul U'lum	Kegiatan Lomba Pentas PAI tingkat SD/SMP/MTS/SMA/MA/SMK se Kota Tanjungpinang *PAI Stage Competition Activities at the SD/SMP/MTS/SMA/MA/SMK levels throughout Tanjungpinang City*	2,500,000
19	15/03/2021	ACT Duri	Tabligh Akbar *Tablighi Akbar*	350,000
20	15/03/2021	Forum Lingkar Pena Inhil Inhil Pen Circle Forum	Kegiatan Pengkaderan Penulis *Writer Recruitment Activities*	300,000
21	16/03/2021	Masjid Al Jihad Koto Taluk Kuansing Al Jihad Mosque Koto Taluk Kuansing	Bantuan Jam Digital Waktu Sholat *Prayer Times Digital Clock Help*	4,500,000

No	Tanggal *Date*	Penerima Dana *Beneficiary*	Kegiatan *Activity*	Nominal (Rp) *Nominal (Rp)*
22	19/03/2021	Satpol PP Kota Batam Batam City Satpol PP	Kegiatan HUT ke 71 Satpol PP Batam *Batam Satpol PP 71st Anniversary Activities*	998,500
23	19/03/2021	Setdako Tanjungpinang	Acara Silaturahmi antara Pemerintah Kota Tanjunginang dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini *Gathering Event between the Tanjunginang City Government and the Early Childhood Education Association*	3,057,300
24	22/03/2021	Masjid Agung Kuansing Kuansing Grand Mosque	Bantuan Pembangunan Masjid Agung Great Mosque Construction Assistance	200,000
23	19/03/2021	Setdako Tanjungpinang	Acara Silaturahmi antara Pemerintah Kota Tanjunginang dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini *Gathering Event between the Tanjunginang City Government and the Early Childhood Education Association*	3,057,300
24	22/03/2021	Masjid Agung Kuansing *Kuansing Grand Mosque*	Bantuan Pembangunan Masjid Agung *Great Mosque Construction Assistance*	200,000
25	24/03/2021	Kemenag Kab. Kuansing *Ministry of Religion District. Kuansing*	Posko Satpam Tahap II *Second Stage Security Command Post*	2,000,000
26	24/03/2021	Setdako Tanjungpinang	Acara MTQ XV Tingkat Kota Tanjungpinang Tahun 2021 *Tanjungpinang City Level MTQ XV 2021*	1,378,600
27	05/04/2021	Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Stain Sultan Abdurrahman Kepri *Student Association of Al-Quran and Tafsir Stain Sultan Abdurrahman Kepri*	Kegiatan Latihan Kepemimpinan HIMA IAT Ke 1 *1st HIMA IAT Leadership Training Activities*	750,000
28	06/04/2021	Dinas Pendidikan Inhil *Inhil Education Office*	Sosialisasi Pendidkan *Education Socialization*	5,000,000
29	08/04/2021	TPQ Fathun Qarib	Bantuan Speaker *Speaker Help*	1,500,000
30	16/04/2021	Musholla As Syifa Sialang *As Syifa Sialang Mosque*	Bantuan Pembangunan Musholla *Musholla Development Assistance*	1,000,000
31	16/04/2021	Baznas Siak	Santunan Anak Yatim *Donations for orphans*	5,000,000
32	20/04/2021	Dinas Kesehatan Kab. Bintan *District Health Office. Bintan*	Bantuan Ramadhan 1442 H Berupa 12 Paket Sembako *Ramadan 1442 H Aid in the Form of 12 Food Packages*	5,998,600
33	21/04/2021	Mesjid Nurul Yakin *Nurul Yakin Mosque*	Bantuan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan 1442 H Mesjid Nurul Yakin (Jl. Hangtuah - Pekanbaru) *Assistance for the Holy Month of Ramadan 1442 H Nurul Yakin Mosque (Jl. Hangtuah - Pekanbaru)*	10,000,000
34	21/04/2021	Evri Yossi	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) *Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)*	4,000,000
35	21/04/2021	Indunk Triono	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) *Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)*	4,000,000
36	22/04/2021	Helda Rama Oktarina	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) *Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)*	4,000,000
37	22/04/2021	Atni Indah Hayati	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) *Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)*	4,000,000

No	Tanggal *Date*	Penerima Dana *Beneficiary*	Kegiatan *Activity*	Nominal (Rp) *Nominal (Rp)*
38	22/04/2021	Adek Rahmah	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) *Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)*	4,000,000
39	22/04/2021	Panti Asuhan Ar Rahman *Ar Rahman Orphanage*	Bantuan Kebutuhan Lebaran *Eid Needs Assistance*	250,000
40	22/04/2021	Yayasan Bengkalis Qur'an Center *Bengkalis Qur'an Center Foundation*	Infaq Ta'jil Buka Puasa *Infaq Ta'jil Iftar*	250,000
41	23/04/2021	Rosmareni	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) *Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)*	4,000,000
42	23/04/2021	Irma Sari	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) *Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)*	4,000,000
43	23/04/2021	Kemenag Inhil *Ministry of Religion Inhil*	Sosialisasi Laporan Keuangan *Financial Report Socialization*	5,000,000
44	27/04/2021	Mesjid Nurul Falah *Nurul Falah Mosque*	Pembangunan Mesjid *Mosque Construction*	500,000
45	28/04/2021	Mushalla Arrazaq *Mushalla Arrazaq*	Renovasi Musholla *Mosque Renovation*	1,000,000
46	03/05/2021	BAZNAS PROV KEPRI *BAZNAS PROV KEPRI*	Program berbagi paket ifthar & santunan bagi marbot dan imam masjid *Program for sharing ifthar packages & compensation for marbots and mosque imams*	3,000,000
47	04/05/2021	Masjid Al Ikhlas Kualu Permai - Tarai Bangun *Al Ikhlas Mosque Kuala Permai - Tarai Bangun*	Bantuan Santunan Anak Yatim/Piatu dan Fakir *Compensation for Orphans/Orphans and the Poor*	1,000,000
48	06/05/2021	Agustin Nindarini	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) *Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)*	4,000,000
49	06/05/2021	Sri Saurin	Pencairan Dana Qard Al Hasan Akad (Pinjaman Tanpa Imbalan) *Disbursement of Qard Al Hasan Akad Funds (Loans Without Compensation)*	4,000,000
50	07/05/2021	Fauzan	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	400,000
51	07/05/2021	Desti Wantari	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	400,000
52	07/05/2021	Muhammad Hisyam	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	400,000
53	07/05/2021	Chaerul Fahmi	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	400,000
54	07/05/2021	Nuraimah	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	400,000
55	07/05/2021	Ahmad Rosidin	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	400,000
56	07/05/2021	Nani Sri Mulyani	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	400,000
57	07/05/2021	Feddy, M. Putra	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	350,000
58	07/05/2021	Windhary Triana Putri	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	350,000
59	25/05/2021	UNISI Tembilahan	Milad ke 13 UNISI	1,600,000

No	Tanggal *Date*	Penerima Dana *Beneficiary*	Kegiatan *Activity*	Nominal (Rp) *Nominal (Rp)*
60	04/06/2021	Fauzan	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	800,000
61	04/06/2021	Desti Wantari	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	800,000
62	04/06/2021	Muhammad Hisyam	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	800,000
63	04/06/2021	Chaerul Fahmi	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	800,000
64	04/06/2021	Nuraimah	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	800,000
65	04/06/2021	Ahmad Rosidin	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	800,000
66	04/06/2021	Nani Sri Mulyani	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	800,000
67	04/06/2021	Feddy, M. Putra	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	700,000
68	04/06/2021	Windhary Triana Putri	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	700,000
69	04/06/2021	SMK Muhammadiyah 3 Pekanbaru *Muhammadiyah 3 Pekanbaru*	Kegiatan Pencak Silat SMK *SMK Pencak Silat Activities*	3,500,000
70	23/06/2021	Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang *Tanjungpinang City Education Office*	Bantuan Pengadaan Baju Kurung *Brackets Shirt Procurement Assistance*	12,000,000
71	28/06/2021	Kelurahan Tobek Godang *Tobek Godang Village*	Bantuan Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Ketua RW Tobek Godang *Assistance for the Election of the Chairperson of the Tobek Godang RW*	800,000
72	29/06/2021	Lembaga Amil Zakat Kota Batam *Batam City Amil Zakat Institute*	Program 'Aku Bisa Sekolah" *'I Can Go To School' Program*	750,000
73	29/06/2021	Masyarakat Kurang Mampu *'I Can Go To School' Program*	Pembagian Sembako *Food Distribution*	2,000,000
74	02/07/2021	Musholla Quba Sei Jering	Bantuan Pembangunan Musholla Quba *Quba Sei Jering Mosque*	750,000
75	02/07/2021	MUI Kota Batam *MUI Batam City*	Kegiatan Musda IV MUI Kota Batam *Activities of Musda IV MUI Batam City*	500,000
76	13/07/2021	Dewan Kemakmuran Masjid An Nur *An Nur Mosque Prosperity Council*	Bantuan Hewan Qurban Idul Adha 1442H *Eid al-Adha Sacrificial Animal Aid 1442H*	15,000,000
77	13/07/2021	Mesjid Raya An-Nur Pekanbaru *An-Nur Grand Mosque Pekanbaru*	Bantuan Pembelian Baju Kaos bagi Petugas Penyembelihan Hewan *Qurban Idul Adha 1442 H Mesjid Raya An-Nur Pekanbaru*	4,056,000
78	14/07/2021	Ponpes Khalid bin Walid *Khalid bin Walid Islamic Boarding School*	Bantuan Dana Ponpes *Islamic Boarding School Fund Assistance*	2,000,000
79	15/07/2021	STIE Pembangunan Tanjungpinang *STIE Tanjungpinang Development*	Bantuan Hewan Qurban Idul Adha 1442H *Eid al-Adha Sacrificial Animal Aid 1442H*	15,000,000
80	15/07/2021	Lazismu Wilayah Riau Your typical Riau region	Hewan Qurban *Sacrificial animals*	17,500,000
81	16/07/2021	Tim PKK Kab Inhil	Pencegahan & Penanggulangan stunting *Stunting Prevention & Management*	3,000,000
82	16/07/2021	Yayasan Al Izhar School *Al Izhar School Foundation*	Bantuan Kegiatan Penyembelihan Hewan Qurban *Aid for the Slaughter of Sacrificial Animals*	500,000

No	Tanggal *Date*	Penerima Dana *Beneficiary*	Kegiatan *Activity*	Nominal (Rp) *Nominal (Rp)*
83	19/07/2021	AM12 FC	Bantuan Kegiatan Liga Akrab *Familiar League Activities Assistance*	500,000
84	28/07/2021	Kemenkumham	Bantuan Bakti Sosial Paket Sembako *Food Package Social Service Assistance*	2,000,000
85	30/07/2021	Aksi Cepat Tanggap *Action Quick Response*	Bantuan Dana Indonesia Darurat Solidaritas *Solidarity Emergency Indonesia Fund Assistance*	3,500,000
86	05/08/2021	SMKIT Al Izhar School *Al Izhar School*	Bantuan Pembuatan Meja Teller Bank Mini Syariah SMKIT Al Izhar School *Assistance in Making Mini Syariah Bank Teller Desks at SMKIT Al Izhar School*	4,500,000
87	06/08/2021	Remaja Mesjid AL Munawarah *Al Munawarah Mosque Youth*	Kegiatan peringatan 1 Muharram 1443 Hijriyah *Commemoration of 1 Muharram 1443 Hijriyah*	500,000
88	10/08/2021	Desa Tanjung Belit *Tanjung Belit Village*	Turnamen Fajar Cup I *Dawn Cup I . Tournament*	500,000
89	10/08/2021	Panitia HUT RI Jalan Karet *The Committee for the Republic of Indonesia Anniversary on Karet Street*	Bantuan Kegiatan HUT RI ke 76 *Assistance for 76th Indonesian Independence Day Activities*	200,000
90	16/08/2021	RT 02 dan RT 03 Tobek Godang *RT 02 and RT 03 Tobek Godang*	Bantuan HUT RI Ke 76 Menghias Kampung *Aid for the 76th Republic of Indonesia's Anniversary to Decorate the Village*	350,000
91	16/08/2021	Panitia HUT RI Kelurahan Titian Antui *Committee for the Anniversary of the Republic of Indonesia Titian Antui*	Bantuan Kegiatan HUT RI ke 76 *Assistance for 76th Indonesian Independence Day Activities*	250,000
92	20/08/2021	TPA Al Fatih *Al Fatih Landfill*	Bantuan Pembangunan TPA *Landfill Development Assistance*	500,000
93	24/08/2021	RW 11 *RW 11*	Peringatan HUT RI ke-76 *76th Indonesian Independence Day*	500,000
94	25/08/2021	Fauzan	Bantuan Uang Kuliah *Tuition Assistance*	1,200,000
95	12/09/2021	Desa Rokan *Rokan Village*	Turnamen Volly Rokan *Rokan Volly Tournament*	1,500,000
96	13/09/2021	Indofizka Futsal *Indofizka Futsal*	Futsal CUP III Inhil *Futsal CUP III Inhil*	500,000
97	15/09/2021	Bikers Subuhan Batam *Bikers Subuhan Batam*	Kegiatan Iktikaf dan Baksos Milad 2nd Bikers Subuhan Batam *Iktikaf and Social Service Activities for the 2nd Anniversary of Bikers Subuhan Batam*	1,000,000
98	16/09/2021	Desa Dusun 3 *Hamlet Village 3*	Turnamen Takraw Dusun III *Dusun III Takraw Tournament*	500,000
99	21/09/2021	TPQ Sentajo Raya *TPQ Sentajo Raya*	Bantuan Pembangunan Tempat Wudhu' dan Toilet TPQ *Assistance for the Construction of TPQ's for Wudhu' Places and Toilets*	1,000,000
100	21/09/2021	Panitia MTQ Kel. Air Jamban *MTQ Committee Kel. Toilet Water*	MTQ Ke 2 Tingkat Kelurahan Air Jamban *MTQ 2nd Level of Air Latrine Village*	500,000
101	24/09/2021	KORPRI BPS	Lomba dalam rangka Hari Statistik Nasional *Competition in the framework of National Statistics Day*	2,708,000
102	27/09/2021	Dinas Pendidikan Inhil *Inhil Education Office*	Kegiatan dalam rangka HUT RI ke 76 TH 2021 *Activities in the context of the 76th Republic of Indonesia Anniversary in 2021*	1,500,000
103	29/09/2021	Aksi Cepat Tanggap *Action Quick Response*	Bantuan Donasi Tabung Oksigen di Pulau Burung *Oxygen Cylinder Donation Aid on Burung Island*	2,500,000

No	Tanggal *Date*	Penerima Dana *Beneficiary*	Kegiatan *Activity*	Nominal (Rp) *Nominal (Rp)*
104	01/10/2021	Gerakan Cinta Masjid *Mosque Love Movement*	Kegiatan Maulid Nabi *Prophet's Birthday Activities*	1,000,000
105	04/10/2021	Dinas Kesehatan *public health Office*	Pemeriksaan Gula Darah *Blood Sugar Check*	2,000,000
106	12/10/2021	Musholla Al Ikhlas *Al Ikhlas Mosque*	Pengukuhan dan Penabalan Gelar Datuk *Inauguration and Confirmation of Datuk's Title*	5,000,000
107	19/10/2021	Mesjid Baitul Muttaqien *Baitul Muttaqien Mosque*	Bantuan Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad *Assistance in Commemorating the Birthday of the Prophet Muhammad*	280,000
108	22/10/2021	Lapas Pasir Pengaraian *Pengaraian Sand Prison*	Hari HDKD Lapas Kelas II B Pasir *Day HDKD Prison Class II B Sand*	750,000
109	26/10/2021	Panti Asuhan Al Muzakki *Al Muzakki Orphanage*	Bantuan Biaya Masuk Sekolah TA 2021/2022 Anak Yatim/Misikin *School Entrance Fee Assistance for FY 2021/2022 Orphans/Poor Children*	3,500,000
110	28/10/2021	Muhammadiyah Rambah *Muhammad Rambah*	Turnamen Futsal Muhammadiyah *Muhammadiyah Futsal Tournament*	500,000
111	05/11/2021	Masjid Al Jalil Dompak *Al Jalil Dompak Mosque*	Bantuan pembelian kipas angin untuk masjid *Help buying a fan for the mosque*	1,600,000
112	11/11/2021	Perguruan Pencak Silat Bintan *Bintan Pencak Silat College*	Pertandingan Pencak Silat Kecamatan Teluk Bitan *Bitan Bay District Pencak Silat Competition*	2,250,000
113	15/11/2021	Musholla Mutiara Al Hikmah *Al Hikmah Pearl Mosque*	Bantuan Dana Perluasan Musholla *Musholla Expansion Fund Assistance*	4,500,000
114	18/11/2021	Panitia Pembangunan Masjid Taqwa *Taqwa . Mosque Construction Committee*	Bantuan Pembangunan Masjid *Mosque Construction Assistance*	500,000
115	19/11/2021	Pemuda Rambah *Youth Rambah*	Turnamen Bola Pemuda Rambah *Youth Ball Tournament Encroached*	500,000
116	23/11/2021	Dusun Pintu Angin *Pintu Angin Village*	Turnamen Volly Dusun Pintu Angin *Door Wind Village Volly Tournament*	500,000
117	25/11/2021	Fekon UNRI *Fekon UNRI*	Bantuan Kegiatan Bimtek Aplikasi UNRI *UNRI Application Guidance Activities Assistance*	5,000,000
118	30/11/2021	Panitia Volly Ball Kec Gunung Toar *Volly Ball Committee for Gunung Toar District*	Bantuan Turnamen Volly Ball di Kec. Gunung Toar *Volly Ball Tournament Assistance in Kec. Mount Toar*	1,000,000
119	30/11/2021	Universitas Maritim Raja Ali Haji *King Ali Hajj Maritime University*	Bantuan Alat Pelindung Diri dan Vitamin Daya Tahan Tubuh pada Masa Pandemi Covid-19 *Personal Protective Equipment and Immune Vitamins during the Covid-19 Pandemic*	12,287,500
120	02/12/2021	Sail Chess Club *Sail Chess Club*	Bantuan Turnamen Catur *Chess Tournament Help*	2,500,000
121	09/12/2021	Mesjid Nurul Hikmah *Nurul Hikmah Mosque*	Pembelian Sound System *Sound System Purchase*	5,000,000
122	10/12/2021	Ponpes Syafa'aturrasul 2 Putra *Syafa'aturrasul Islamic Boarding School 2 sons*	Bantuan Pembuatan Sumur Bor Ponpes *Ponpes Drilling Well Drilling Assistance*	2,000,000
123	10/12/2021	Lembaga Amil Zakat Kota Batam *Batam City Amil Zakat Institute*	Program Khitanan Anak Sholeh *Sholeh . Child Circumcision Program*	800,000
124	10/12/2021	Ikatan Wartawan Online *Association of Online Journalists*	Rakernas IWO *IWO National Work Meeting*	400,000
125	20/12/2021	Ikatan Puan Melayu Bathin Solapan *Ikatan Puan Melayu Bathin Solapan*	Festival Kompang dan Milad *Kompang and Milad Festival*	500,000
126	21/12/2021	Kantor Camat Rambah *Rambah sub-district office*	Turnamen Sepak Bola dan Volly Kec Rambah *Rambah District Football and Volly Tournament*	2,000,000
127	21/12/2021	Yayasan Universias Islam Kuansing *Kuansing Islamic University Foundation*	Bantuan Kegiatan Olimpiade Kimia Tingkat SMA Sederajat se Kab Kuansing *Aid for Chemistry Olympiad for High Schools and Equivalents in Kuansing District*	3,500,000
128	22/12/2021	Kemenag Rohul *Ministry of Religion Rohul*	Kegiatan Subbag Kemenag Rohul *Activities of the Rohul Ministry of Religion Subdivision*	1,000,000
129	23/12/2021	SD IT Rambah *SD IT Rambah*	Kegiatan Outbond dan Perlombaan SDIT *Outbound Activities and SDIT Competition*	2,000,000
130	23/12/2021	Musholla Fastabiqul Khairat *Fastabiqul Khairat Mosque*	Bantuan Dana Proposal Pembangunan Musholla Fastabiqul Khairat *Fund Assistance for the Development of the Fastabiqul Khairat Mosque*	5,000,000

No	Tanggal *Date*	Penerima Dana *Beneficiary*	Kegiatan *Activity*	Nominal (Rp) *Nominal (Rp)*
131	27/12/2021	Panitia HUT Satpam *Security Guard Anniversary Committee*	Bantuan HUT Satpam Ke 41 Th 2021 *Security Guard's 41st Anniversary Assistance in 2021*	200,000
132	28/12/2021	Kemenag Rohul *Ministry of Religion Rohul*	Hari Amal Bakti Kemenag Rohul *Charity Day of the Ministry of Religion Rohul*	3,000,000
133	29/12/2021	Yayasan Bait Ta'allamul Qur'an *Bait Ta'allamul Qur'an Foundation*	Bantuan Pembangunan Rumah Tahfidz *Tahfidz . House Construction Assistance*	1,000,000
134	30/12/2021	Polres Inhil	HUT Satpam Ke 41 Th 2021 *Security Guard's 41st Anniversary in 2021*	1,000,000
135	30/12/2021	Polres Rohul	HUT Satpam Ke 41 Th 2021 *Security Guard's 41st Anniversary in 2021*	2,000,000
136	31/12/2021	Mesjid Hijratushabirin *Hijratushabirin Mosque*	Bantuan Dana Proposal Pembelian Perangkat Shalat Digital *Funding for Proposals to Purchase Digital Prayer Equipment*	11,500,000
137	31/12/2021	Desa Babussalam *Babussalam Village*	Turnamen Sepakbola Babussalam *Babussalam Football Tournament*	1,500,000

Pendapatan Non Halal Dan Penggunaannya

Pendapatan non Halal yang dimaksud adalah pendapatan yang didapatkan dari usaha berbasis bunga atau bertentangan dengan prinsip Syariah. Contoh dari pendapatan ini adalah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan ***Good Corporate Governance*** Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ditegaskan bahwa Bank wajib melaksanakan ***Self Assessment*** terhadap penerapan ***GCG***. Dari hasil ***Self Assessment*** yang dilakukan UUS PT. Bank Riau Kepri, dapat disampaikan ringkasan perhitungan peringkat masing-masing faktor sebagai berikut :

1. **Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS PT. Bank Riau Kepri : *peringkat 2***
   Kriteria, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS PT. Bank Riau Kepri menunjukkan bahwa pelaksanaan ***GCG*** UUS PT. Bank Riau Kepri telah sesuai sesuai dengan kriteria/indikator ***Self Assesment***, Direktur UUS PT. Bank Riau Kepri telah bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan UUS PT. Bank Riau Kepri dengan baik dan memiliki Indepedensi, ini dapat dilihat dengan meningkatnya secara signifikan Asset UUS PT. Bank Riau Kepri pada tahun 2021 sebesar 159,51 % atau menjadi sebesar Rp8.101,42 Milyar dibandingkan tahun 2020 Asset UUS PT. Bank Riau Kepri sebesar Rp5.078,85 Milyar. Pembiayaan Syariah UUS PT. Bank Riau Kepri tahun 2021 meningkat sebesar 183.28 % menjadi Rp5.018,55 Milyar dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp2.738,05 Milyar. Sedangkan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga tahun 2021 meningkat sebesar 157,99 % menjadi sebesar Rp5.540,05 Milyar dibandingkan posisi Desember

Non Halal Income And Their Use

Non-Halal income in question is income earned from interest-based businesses or contrary to Sharia principles. An example of this income is Based on Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, it is emphasized that Banks are required to carry out a Self Assessment of the implementation of GCG. From the results of the Self Assessment conducted by UUS PT. Bank Riau Kepri, can be submitted a summary of the calculation of the ranking of each factor as follows:

1. *Implementation of Duties and Responsibilities of UUS Director PT. Bank Riau Kepri : rank 2*
   Criteria, Independence, Duties and Responsibilities of UUS Director PT. Bank Riau Kepri shows that the implementation of GCG UUS PT. Bank Riau Kepri has complied with the criteria/indicators of Self Assessment, the Director of UUS PT. Bank Riau Kepri has been responsible for managing the UUS PT. Bank Riau Kepri well and has independence, this can be seen by the significant increase in UUS assets of PT. Bank Riau Kepri in 2021 amounted to 159.51% or to Rp. 8,101.42 billion compared to 2020 Asset UUS PT. Bank Riau Kepri amounting to IDR 5,078.85 billion. Sharia Financing UUS PT. Bank Riau Kepri in 2021 increased by 183.28% to IDR 5,018.55 billion compared to 2020 of IDR 2,738.05 billion. Meanwhile, Third Party Fund Collection in 2021 increased by 157.99% to Rp.5,540,05 billion compared to the position in December 2020 of Rp.3,506.50 billion. Profit in 2021 increased by

2020 sebesar Rp3.506,50 Milyar. Laba tahun 2021 meningkat 251.21 % menjadi sebesar 230,86 Milyar dibandingkan Laba tahun 2020 Rp91.90 Milyar. NPF 2021 membaik menjadi 1,21 % dibandingkan 2020 sebesar 2,29 %.

251.21% to 230.86 billion compared to profit in 2020 of Rp. 91.90 billion. NPF 2021 improved to 1.21% compared to 2020 at 2.29%.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS PT. Bank Riau Kepri: *peringkat 2*

Hasil analisis ***self assessment*** dari faktor Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS PT. Bank Riau Kepri menunjukkan bahwa pelaksanaan ***GCG*** UUS sesuai dengan Kriteria/Indikator ***self assesment***.

DPS PT. Bank Riau Kepri telah melakukan audit ke Kantor Cabang Syariah dan Capem Syariah (KCS dan KCPS) secara rutin, dan telah melaporkan hasil temuan dan aktifitas DPS ke BI, Komisaris dan Direksi PT. Bank Riau Kepri dan hal ini sejalan dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan ***Good Corporate Governance*** Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Proses audit ini sangat menjaga stabilitas dan konsistensi UUS PT. Bank Riau Kepri dalam melaksanakan operasional Bank sesuai dengan prinsip Syariah. Melihat dari Susunan DPS PT. Bank Riau Kepri, jumlah anggota DPS telah sesuai dengan PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.

Hasil analisis ***self assessment*** dari subfaktor Komposisi, Kriteria dan Independensi DPS PT. Bank Riau Kepri telah sesuai dengan kriteria/indikator ***Self Assesment***. Untuk kriteria Anggota DPS dalam menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dinilai Baik, dan diharapkan kedepannya DPS PT. Bank Riau Kepri mempunyai waktu yang lebih untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

UUS Bank Riau Kepri telah menyarankan kepada DPS Bank agar selanjutnya segala bentuk koordinasi yang melibatkan DPS dapat dilaksanakan melalui rapat. Apabila DPS tidak memungkinkan untuk hadir dalam rapat dikarenakan keterbatasan waktu, alternatif lain dapat dilakukan Rapat/permintaan opini melalui Surat, ***Virtual Meeting*** dan Sarana Komunikasi lainnya. Hasil analisis ***self assessment*** dari Transparansi DPS PT. Bank Riau Kepri telah sesuai dengan kriteria/ indikator ***self assesment***. DPS telah menyampaikan laporan aktifitas DPS sepanjang Tahun 2021, laporan pemeriksaan dan pengawasan DPS, Daftar remunerasi DPS dalam setahun, serta rangkap jabatan DPS dilembaga keuangan Syariah lainnya.

2. Implementation of Duties and Responsibilities of DPS PT. Bank Riau Kepri: 2nd place

The results of the self-assessment analysis of the Implementation of Duties and Responsibilities of DPS PT. Bank Riau Kepri shows that the implementation of UUS GCG is in accordance with the self-assessment criteria/ indicators.

DPS PT. Bank Riau Kepri has audited the Sharia Branch Offices and Sharia Head Offices (KCS and KCPS) on a regular basis, and has reported the findings and activities of DPS to BI, Commissioners and Directors of PT. Bank Riau Kepri and this is in line with PBI No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. This audit process really maintains the stability and consistency of UUS PT. Bank Riau Kepri in carrying out bank operations in accordance with Sharia principles. Looking at the composition of the DPS PT. Bank Riau Kepri, the number of DPS members is in accordance with PBI No. 11/10/PBI/2009 concerning Sharia Business Units.

The results of the self-assessment analysis of the Composition, Criteria and Independence sub-factors of DPS PT. Bank Riau Kepri has complied with the criteria/ indicators of Self Assessment.

For the criteria of DPS Members in providing time to carry out their duties and responsibilities, it is considered Good, and it is hoped that in the future DPS PT. Bank Riau Kepri has more time to carry out its duties and responsibilities optimally.

The UUS of Bank Riau Kepri has suggested to DPS Bank that all forms of coordination involving DPS can be carried out through meetings. If it is not possible for DPS to attend the meeting due to time constraints, another alternative can be a meeting/request for opinion through letters, virtual meetings and other means of communication.

The results of the self-assessment analysis of the Transparency of DPS PT. Bank Riau Kepri has complied with the criteria/indicators of self-assessment. DPS has submitted DPS activity reports throughout 2021, DPS inspection and supervision reports, DPS remuneration list in a year, as well as concurrent positions of DPS in other Islamic financial institutions.

3. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Unit Usaha Syariah : *peringkat 2*

Hasil analisis ***self assessment*** dari faktor Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa UUS PT. Bank Riau Kepri menunjukkan bahwa pelaksanaan ***GCG*** UUS telah sangat sesuai dengan Kriteria/Indikator ***self assesment***.

UUS PT. Bank Riau Kepri dalam melakukan ***review*** ketentuan produk telah berdasarkan PBI yang berlaku dan mengacu kepada Fatwa MUI-DSN, Opini Dewan Pengawas Syariah juga dikeluarkan oleh DPS terkait atas ***review*** ketentuan produk. Dan dalam pelaksanaannya terus dipantau oleh Dewan Pengawas Syariah dan Audit Internal PT. Bank Riau Kepri. Dapat juga disampaikan DPS telah mengeluarkan pernyataan atas ketaatan UUS PT. Bank Riau Kepri terhadap pelaksanaan prinsip Syariah untuk laporan keuangan tahun buku 2021.

4. Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti Dan Penyimpanan Dana Oleh Deposan Inti : *peringkat 2*

Hasil analisis ***self assessment*** dari faktor Penyaluran Dana Kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti menunjukkan bahwa pelaksanaan ***GCG*** UUS sesuai dengan Kriteria/ Indikator ***self assesment***.

Pedoman kebijakan dan prosedur tertulis tentang penyaluran dana kepada Nasabah Inti UUS PT. Bank Riau Kepri mengacu pada ketentuan yang ada di Bank. UUS PT. Bank Riau Kepri tidak memperlakukan Pedoman kebijakan dan prosedur yang berbeda untuk nasabah inti.

Dapat disampaikan bahwa penyaluran dana kepada Nasabah Pembiayaan Inti dan Penyimpanan Dana oleh Deposan Inti tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan mengacu kepada ketentuan/ Peraturan yang ada. Sehingga perlakuan tentang pemenuhan persyaratan terhadap Nasabah Inti (Pembiayaan Inti dan Deposan Inti) diperlakukan sama dengan Nasabah ***reguler***.

5. Transaparansi Kondisi Unit Usaha Syariah, Laporan Pelaksanaan *GCG* dan Pelaporan Internal : *peringkat 2*

Hasil analisis ***self assessment*** dari faktor Transparansi Kondisi UUS PT. Bank Riau Kepri, Laporan ***GCG*** dan Pelaporan Internal menunjukkan bahwa pelaksanaan ***GCG*** UUS sesuai dengan Kriteria/Indikator ***self assesment***.

UUS PT. Bank Riau Kepri telah transparan terhadap kondisi UUS yang mana UUS PT. Bank Riau Kepri telah menyajikan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan

3. *Implementation of Sharia Principles in Funds Raising and Distributing Funds and Services for Sharia Business Units: rank 2*

The results of the self-assessment analysis of the Implementation of Sharia Principles in Fundraising and Funding Distribution Activities and UUS Services PT. Bank Riau Kepri shows that the implementation of UUS GCG is in accordance with the self-assessment criteria/ indicators.

UUS PT. Bank Riau Kepri in reviewing product provisions has been based on the applicable PBI and refers to the MUI-DSN Fatwa, the opinion of the Sharia Supervisory Board is also issued by the relevant DPS on the review of product provisions. And in its implementation, it continues to be monitored by the Sharia Supervisory Board and the Internal Audit of PT. Riau Islands Bank. It can also be conveyed that DPS has issued a statement on the compliance of UUS PT. Bank Riau Kepri on the implementation of Sharia principles for the financial statements for the 2021 financial year.

4. Distribution of Funds to Core Financing Customers and Deposits of Funds by Core Depositors: rank 2

The results of the self-assessment analysis of the factors for channeling funds to core financing customers and depositing funds by core depositors show that the implementation of UUS GCG is in accordance with the self-assessment criteria/indicators.

Guidelines for written policies and procedures regarding the distribution of funds to UUS Core Customers PT. Bank Riau Kepri refers to the provisions in the Bank. UUS PT. Bank Riau Kepri does not treat different policy and procedure guidelines for core customers.

It can be conveyed that the distribution of funds to Core Financing Customers and Fund Deposits by Core Depositors is still carried out with the principle of prudence by referring to the existing provisions/regulations. So that the treatment of fulfilling the requirements for Core Customers (Core Financing and Core Depositors) is treated the same as regular customers.

5. Transparency of Sharia Business Unit Conditions, GCG Implementation Reports and Internal Reports: rating 2

The results of the self-assessment analysis of the Transparency of the Conditions of UUS PT. Bank Riau Kepri, GCG Reports and Internal Reports show that the implementation of UUS GCG is in accordance with self-assessment criteria/indicators.

UUS PT. Bank Riau Kepri has been transparent about UUS conditions in which UUS PT. Bank Riau Kepri has presented Quarterly Published Financial Reports and information on UUS activities of PT. Bank Riau Kepri

informasi kegiatan UUS PT. Bank Riau Kepri melalui media masa yang mempunyai peredaran luas dan ***website*** PT. Bank Riau Kepri.
Laporan Pelaksanaan ***GCG*** tahun 2021 juga telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 perihal Pelaksanaan ***GCG*** Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. SIM, SDM dan ***security system*** yang baik sangat berperan dalam pelaporan internal UUS PT. Bank Riau Kepri.

Dari hasil perhitungan peringkat masing-masing faktor diatas, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Penerapan ***Good Corporate Governance*** Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank telah melakukan ***Assessment*** terhadap 5 faktor. Hasil penilaian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan ***GCG*** pada UUS PT. Bank Riau Kepri termasuk kedalam predikat "**Baik**" dengan nilai Komposit sebesar **2.00**

through mass media that have wide circulation and the website of PT. Riau Islands Bank.
The 2021 GCG Implementation Report has also been reported in accordance with the provisions of Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 regarding the Implementation of GCG for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. SIM, HR and a good security system play a very important role in the internal reporting of UUS PT. Riau Islands Bank.

From the results of the calculation of the ranking of each of the factors above, and to comply with the provisions of Bank Indonesia Regulation No. 11/33/PBI/2009 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Bank has conducted an assessment of 5 factors. The results of the assessment show that the overall implementation of GCG at UUS PT. Bank Riau Kepri is included in the "Good" predicate with a Composite value of 2.00

Rincian hasil ***Self Assessment*** per-masing-masing aspek dapat tergambar di dalam tabel di bawah ini :

Details of the results of the Self Assessment for each aspect can be illustrated in the table below:

No.	Faktor	Peringkat (a) *Rating (a)*	Bobot (b) *Weight (b)*	Nilai (a) X (b) *Mark (a) X (b)*	*Factor*
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	2	35.00%	0,70	*Implementation of the duties and responsibilities of the UUS Director*
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	20.00%	0,40	*Implementation of the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board*
3	Pelaksanaan prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10.00%	0,20	*Implementation of Sharia principles in fund raising and distribution activities as well as services*
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti	2	10.00%	0,20	*Distribution of funds to core financing customers and depositing of funds by core depositors*
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan kecukupan pelaporan internal	2	25.00%	0,50	*Transparency of financial and non-financial conditions, reports on GCG implementation and adequacy of internal reporting*
	Nilai Komposit		100.00%	2.0	*Composite Value*
	Predikat : Baik				*Predicate : OK*

Terlampir disampaikan Hasil ***Self Assessment*** Pelaksanaan ***Good Corporate Governance*** UUS PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri per akhir tahun buku per 31 Desember 2021.

Attached are the results of the Self Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance at UUS PT. Riau Kepri Regional Development Bank as of the end of the financial year as of December 31, 2021.

Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Dalam menjalankan bisnisnya bank memiliki unit yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah yang berada di Divisi Syariah, yang membawahi Kantor Cabang Syariah. Sesuai ketentuan terkait dengan transparansi kondisi keuangan bank, bahwa dalam struktur organisasi bank terdapat fungsi Dewan Pengawas Syariah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap aspek syariah fungsi operasional Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri agar sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank khususnya, Unit Usaha Syariah melalui Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah selalu melaksanakan dan memenuhi prinsip syariah secara istiqomah sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pemenuhan prinsip syariah tersebut dilakukan antara lain dengan menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan dan universalitas, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, riswah, dan objek haram. Dalam pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga telah menggunakan akad-akad sesuai prinsip syariah, meliputi akad Wadi'ah, Mudharobah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqishah, Murabahah, Ijarah, Rahn, Qardh, Kafalah, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS dalam hal menilai, mengawasi, dan memastikan pemenuhan prinsip syariah terhadap kegiatan operasional Unit Usaha Syariah Bank Riau Kepri, UUS Bank Riau Kepri telah memiliki pedoman BPP Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana tertuang dalam SK Direksi No. 09/KEPDIR/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah yang berisi tentang pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan DPS, mekanisme pelaksanaan pengawasan, serta objek material pengawasan DPS dalam seluruh kegiatan operasional termasuk produk dan jasa Unit Usaha Syariah yang berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan sesuai prinsip-prinsip umum syariah.

Buyback Saham dan *Buyback* Obligasi

Pada tahun 2011 Bank menerbitkan Obligasi I dengan nilai sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 8 Juli 2016.
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank baik barang

Implementation Of Compliance With Sharia Principles

In running its business, the bank has a unit that conducts business based on sharia principles in the Sharia Division, which oversees the Sharia Branch Office. In accordance with the provisions related to the transparency of the bank's financial condition, that in the organizational structure of the bank there is a function of the Sharia Supervisory Board in charge of supervising the sharia aspects of the operational function of the Sharia Business Unit of Bank Riau Kepri in order to comply with the provisions issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

In carrying out the activities of collecting and distributing funds as well as banking services in particular, the Sharia Business Unit through the Sharia Branch Offices and Sharia Sub-Branch Offices always implements and fulfills sharia principles in an istiqomah manner as decreed by the National Sharia Council of MUI through the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS).

The fulfillment of sharia principles is carried out, among others, by applying the principles of justice and balance, benefit and universality, and does not contain gharar, maysir, usury, dzalim, riswah, and unlawful objects. In the implementation of the collection and distribution of funds, the bank has also used contracts according to sharia principles, including Wadi'ah, Mudharobah, Musyarakah, Musyarakah Mutanaqishah, Murabahah, Ijarah, Rahn, Qardh, Kafalah, and others contracts.

In carrying out the duties, authorities and responsibilities of the DPS in terms of assessing, supervising, and ensuring the fulfillment of sharia principles in the operational activities of the Sharia Business Unit of Bank Riau Kepri, the UUS of Bank Riau Kepri already has the BPP guidelines for the Sharia Supervisory Board as stated in the Decree of the Board of Directors No. 09/KEPDIR/2014 dated March 11, 2014 regarding the Company Manual Book (BPP) of the Sharia Supervisory Board of Bank Riau Kepri Sharia Business Units which contains guidelines for supervision and procedures for reporting DPS, mechanisms for implementing supervision, as well as material objects for supervision of DPS in all operational activities including Sharia Business Unit products and services guided by the DSN-MUI fatwa and in accordance with general sharia principles.

Share Buyback And Bond Buyback

In 2011 the Bank issued Bonds I with a value of Rp. 500,000,000,000,000 (five hundred billion rupiahs). These bonds were issued scripless and have a term of 5 (five) years from the issuance date until the maturity date on July 8, 2016. The Bonds are not guaranteed by special guarantees, but are guaranteed by all of the Bank's assets, both movable and immovable assets, both existing and future as collateral for

bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi. Sampai dengan periode pelaporan ini Bank belum pernah melakukan ***buy back shares dan buy back*** atas obligasi yang diterbitkan oleh Bank.

Rencana Strategis Bank

Dalam rangka mencapai tujuan sesuai visi dan misi, penyusunan Rencana Bisnis Bank perlu dilakukan secara matang dan realistis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Selain itu, perencanaan harus dilakukan Bank secara komprehensif sehingga lebih mencerminkan kompleksitas usaha dan dapat menampung arah pengembangan usaha Bank. Rencana Bisnis yang komprehensif juga dapat meningkatkan fleksibilitas operasional Bank dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa di tahun 2016 pihak Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank. Dengan diterbitkannya POJK tersebut Bank perlu memenuhi ketentuan tersebut yang diseleraskan dengan Rencana Bisnis Bank. Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /POJK.03/2016 tersebut penyusunan Rencana Bisnis Bank harus disusun secara realistis dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris, dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi yang ada di Bank Riau Kepri.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar

Sesuai dengan pasal 57 dan 58 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum diatur bahwa dalam rangka menghindari kegagalan usaha Bank sebagai akibat konsentrasi penyediaan dana dan meningkatkan independensi Direksi dan Dewan Komisaris Bank terhadap potensi intervensi dari pihak terkait, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana antara lain dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar (***large exposures***) wajib berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum.

Berdasarkan ketentuan OJK, Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada

the Bondholders. Up to this reporting period, the Bank has never bought back shares and buy back bonds issued by the Bank.

Bank Strategic Plan

In order to achieve the objectives according to the vision and mission, the preparation of the Bank's Business Plan needs to be carried out carefully and realistically while still taking into account the prudential principles and the application of risk management. In addition, the planning must be carried out by the Bank comprehensively so that it better reflects the complexity of the business and can accommodate the direction of the Bank's business development. A comprehensive Business Plan can also increase the Bank's operational flexibility in the face of increasingly fierce business competition.

Based on the foregoing, in 2016 the Financial Services Authority issued the Financial Services Authority Regulation Number 5/POJK.03/2016 dated 26 January 2016 concerning Bank Business Plans. With the issuance of the POJK, the Bank needs to comply with these provisions which are aligned with the Bank's Business Plan. In the Financial Services Authority Regulation Number 5 /POJK.03/2016, the preparation of a Bank Business Plan must be prepared realistically and has been approved by the Board of Commissioners, and communicated to shareholders and all levels of organization in Bank Riau Kepri.

Provision of Funds to Related Parties and Provision of Big Funds

In accordance with articles 57 and 58 of the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, it is regulated that in order to avoid the failure of the Bank's business as a result of concentration on the provision of funds and increase the independence of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Banks against potential intervention from related parties, Banks are required to apply the principle of prudence in the provision of funds, among others by implementing the spread or diversification of the portfolio of provision of funds provided. The implementation of the provision of funds to related parties and/or the provision of large funds (large exposures) must be guided by the provisions governing the maximum limit of commercial bank lending.

Based on OJK regulations, the Bank has implemented prudential principles in providing funds to related parties

pihak terkait dan penyediaan dana besar sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum Bank telah menetapkan kebijakan intern mengenai BMPK dan pengalokasian dana untuk pihak terkait serta debitur inti.

Selain itu, untuk meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait, Bank menyusun dan melakukan pengkinian daftar rincian pihak terkait secara terus menerus yang mempunyai hubungan pengendali dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan atau keuangan.

Sepanjang tahun 2021, Bank tidak pernah melanggar atau melampaui BMPK. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal BMPK dimaksud diatas secara konsekuen dan tepat waktu..

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank senantiasa menjunjung tinggi integritas pribadi dan profesionalisme yang luhur, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan internal mengenai Pedoman Kode Etik dan Nilainilai Budaya Perusahaan yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, karyawan maupun para pihak yang terkait kerjasama dengan Bank. Pedoman Kode Etik dan Tingkah Laku telah mengatur hal-hal yang harus dihindari untuk mencegah potensi terjadinya benturan kepentingan dalam setiap aktivitas, termasuk dalam pengambilan keputusan. Benturan kepentingan terjadi apabila pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai Pengambil Keputusan atau seorang Pelaksana membuat suatu keputusan dan dalam keputusan tersebut menyangkut kepentingan pribadi dari pihak yang bersangkutan termasuk kepentingan anggota keluarganya. Dalam hal pihak yang seharusnya mengambil keputusan memiliki benturan kepentingan terhadap Bank, maka pihak tersebut wajib mengungkapkan benturan kepentingannya sekaligus tidak diperbolehkan melibatkan diri dalam setiap tahapan

and providing large funds in accordance with:

1. *Financial Services Authority Regulation Number 55/ POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.*
2. *Financial Services Authority Regulation Number 32/ POJK.03/2018 dated 26 December 2018 concerning Maximum Limits for Loans and Provision of Large Funds for Commercial Banks as amended by Financial Services Authority Regulation Number 38/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.03/2018 concerning Maximum Limits for Loans and Provision of Large Funds for Commercial Banks Banks have established internal policies regarding the LLL and allocation of funds for related parties and core debtors.*

In addition, to improve and facilitate supervision of the provision of funds to related parties, the Bank compiles and continuously updates a detailed list of related parties who have a controlling relationship with the Bank, either directly or indirectly, through ownership, management and/or financial relationships.

Throughout 2021, the Bank has never violated or exceeded the LLL. The Bank has submitted periodic reports to the Financial Services Authority regarding the LLL referred to above in a consistent and timely manner.

Transactions Containing Conflict of Interest

The Bank always upholds personal integrity and noble professionalism, which is stated in the form of internal policies regarding the Code of Ethics Guidelines and Corporate Cultural Values that must be obeyed by all levels of Commissioners, Directors, Executive Officers, employees and parties related to cooperation with the Bank. The Code of Ethics and Conduct Guidelines have regulated things that must be avoided to prevent potential conflicts of interest in every activity, including in decision making. A conflict of interest occurs when the owner, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Executive Officers, Decision Making Employees or an Executor make a decision and the decision involves the personal interests of the parties concerned including the interests of their family members. In the event that the party who is supposed to make the decision has a conflict of interest with the Bank, then that party is required to disclose the conflict of interest at the same time is not allowed to be involved in any stages of decision making and is not allowed to take any action that could harm the bank because it is very likely that the decision is not independent, so that potentially harm or reduce profits.

pengambilan keputusan dan tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang dapat merugikan bank karena sangat besar kemungkinan bahwa keputusan tersebut tidak independen, sehingga berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan.

Unsur pokok yang harus dipenuhi oleh seluruh pegawai dan manajemen dalam pengelolaan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:
1. Patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku, budaya perusahaan dan ketentuan internal perusahaan.
2. Menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan.
3. Menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan maupun informasi yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam setiap kegiatan Bank, antara lain Dewan Komisaris Bank tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank maupun peraturan perundangan yang berlaku. Dewan Komisaris Bank juga wajib melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan.

Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Sesuai dengan ketentuan regulator, bahwa yang dimaksud dengan ***internal fraud*** adalah penyimpangan/ kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan ***outsourcing***) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan yaitu apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000 (Seratus juta rupiah).

Sepanjang tahun 2021 terdapat 5 (lima) penyimpangan internal (***internal fraud***) yang terjadi di Bank Riau Kepri dengan indikasi kerugian lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

The main elements that must be met by all employees and management in managing conflicts of interest are as follows:

Obey and comply with applicable laws and regulations, corporate culture and internal company regulations. The main elements that must be met by all employees and management in managing conflicts of interest are as follows:
1. *Obey and comply with applicable laws and regulations, corporate culture and internal company regulations.*
2. *Avoid activities that may cause a conflict of interest.*
3. *Store and maintain the confidentiality of company information and information related to parties who have business relations with the company.*

Compliance with laws and regulations is manifested in every activity of the Bank, among others, the Board of Commissioners of the Bank is not involved in making decisions on operational activities, except in terms of providing funds to related parties as stipulated in Bank Indonesia regulations concerning the LLL for Commercial Banks and other matters stipulated in the Bank's Articles of Association and the applicable laws and regulations. The Bank's Board of Commissioners is also required to disclose in the event of a conflict of interest.

Throughout 2021, there were no reports of transactions containing conflicts of interest.

Total Development (Internal Fraud) and Attention Attempts

In accordance with the provisions of the regulator, what is meant by internal fraud is irregularities/cheating committed by management, permanent and non-permanent employees (honorary and outsourcing) related to the work processes and operational activities of the Bank that significantly affect the financial condition of the Bank, i.e. if the impact of the deviation is more from IDR 100,000,000 (One hundred million rupiah).

Throughout 2021, there were 5 (five) internal frauds that occurred at Bank Riau Kepri with indications of losses of more than Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah) and have been reported to the Financial Services Authority.

The number of internal deviations can be seen in the following table:

Internal Fraud dalam 1 tahun *Internal Fraud in 1 year*	Jumlah Kasus yang Dilakukan Number of Cases Done					
	Pengurus *Manager*		Pegawai Tetap *Permanent employee*		Pegawai Tidak Tetap *Temporary employees*	
	Tahun 2020 *Year 2020*	Tahun 2021 *Year 2021*	Tahun 2020 *Year 2020*	Tahun 2021 *Year 2021*	Tahun 2020 *Year 2020*	Tahun 2021 *Year 2021*
Total Fraud *Total Fraud*	-	-	4	5	1	-
Telah diselesaikan *Completed*	-	-	4	2	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank *In the process of completion at the Bank's internal*	-	-	-	3	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya *Haven't tried to solve it yet*	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum *It has been followed up through the legal process*	-				-	-

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Kebijakan pencegahan transaksi orang dalam (Insider Trading) telah diatur di dalam Kode Etik Dealer pada Divisi Treasury dan Internasional.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank telah melakukan transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan kepada para ***Stakeholders*** termasuk laporan keuangan publikasi dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan para ***Stakeholders*** sesuai ketentuan yang berlaku. Seluruh laporan kondisi keuangan dan non keuangan telah disampaikan secara transparan kepada publik melalui berbagai sarana media cetak maupun elektronik, termasuk publikasi laporan keuangan di website yang tersedia secara tepat waktu, lengkap dan akurat.

Transparansi terhadap kondisi keuangan dan non keuangan tersebut diantaranya adalah Laporan Tahuan, Laporan Publikasi, Info Produk dan Jasa Bank, serta info seputar kegiatan Bank yang dimuat pada halaman ***website***, majalah, brosur, dan banner perusahaan. Informasi transparansi kondisi keuangan

Prevention of Inside Transactions (Insider Trading)

The insider trading prevention policy has been regulated in the Dealer Code of Ethics in the Treasury and International Divisions.

Transparency of Financial and Non Financial Conditions

The Bank has carried out transparency on financial and non-financial conditions to Stakeholders including published financial reports and has submitted these reports to related parties such as the Financial Services Authority and Stakeholders in accordance with applicable regulations. All financial and non-financial condition reports have been submitted transparently to the public through various means of print and electronic media, including the publication of financial reports on the website which are available in a timely, complete and accurate manner.

The transparency of financial and non-financial conditions includes Annual Reports, Publication Reports, Information on Bank Products and Services, as well as information about Bank activities published on website pages, magazines, brochures, and company banners. Transparency information on financial and non-financial conditions is prepared and

dan non keuangan disusun dan disampaikan kepada stakeholders dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia, yang terdiri atas Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasi.Informasi tersebut selalu diungkapkan dan diunggah di ***website*** Bank secara berkala.

Selain hal tersebut, Bank Riau Kepri juga telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan di surat kabar harian lokal dan nasional selain melaporkannya juga ke lembaga terkait, dengan harapan publik dapat memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi keuangan Bank Riau Kepri. Untuk memenuhi aspek transparansi non keuangan, Bank Riau Kepri telah mengungkapkan berbagai informasi dalam bentuk sebagai berikut:

1. ***Homepage*** Bank Riau Kepri telah menyajikan Laporan Tahunan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan GCG, informasi Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan lokasi ATM Bank Riau Kepri. Selain itu juga menyampaikan informasi produk dan layanan bank, yang mencakup jenis produk, tingkat bunga, layanan pembayaran tagihan pihak ketiga dan sebagainya,
2. Menyediakan brosur produk di setiap Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/Kantor Kas Bank Riau Kepri
3. Menginformasikan tingkat suku bunga dan kurs pada papan informasi elektronik.
4. Menginformasikan tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
5. Membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan nasabah di Kantor Pusat dan di setiap Kantor Cabang.

Good Corporate Governance Assessment

Bank Riau Kepri senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan terbaik dalam penerapan tata kelola Bank mengacu kepada ketentuan otoritas yang berlaku bagi Bank dan yang sesuai dengan kebutuhan praktik di industri Perbankan, sehingga penerapan tata kelola yang baik di Bank Riau Kepri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hasil penilaian atas penerapan tata kelola Bank yang dilakukan melalui ***self assessment*** menjadi masukan dalam memetakan dan meningkatkan praktik tata kelola yang baik di Bank Riau Kepri berdasarkan hasil rekomendasi yang diberikan.

Penilaian (***self assessment***) atas penerapan tata kelola Bank untuk periode tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran

submitted to stakeholders by compiling and presenting reports according to the procedures, types and scopes as stipulated in Bank Indonesia regulations, which consist of Annual Reports, Quarterly Published Financial Reports, Monthly Published Financial Reports and Financial Reports. Consolidation. This information is regularly disclosed and uploaded on the Bank's website.

In addition to this, Bank Riau Kepri has also announced Quarterly Published Financial Reports in local and national daily newspapers in addition to reporting it to related institutions, with the hope that the public can obtain complete and accurate information about the financial condition of Bank Riau Kepri. To fulfill the non-financial transparency aspect, Bank Riau Kepri has disclosed various information in the following forms:

1. *The Homepage of Bank Riau Kepri has presented the Bank's Annual Report, Quarterly Published Financial Report, GCG Implementation Report, information on Branch Offices, Sub-Branches, Cash Offices, and ATM locations of Bank Riau Kepri. In addition, it also conveys information on bank products and services, which include product types, interest rates, third party bill payment services and so on.*
2. *Provide product brochures at every Branch Office/Sub-Branch/Cash Office of Bank Riau Kepri*
3. *Inform interest rates and exchange rates on electronic information boards.*
4. *Inform the procedures for handling and resolving customer complaints.*
5. *Establish a customer complaint unit and/or function at the Head Office and at each Branch Office.*

Good Corporate Governance Assessment

Bank Riau Kepri always adapts to the best developments in the implementation of Bank governance referring to the provisions of the authorities that apply to the Bank and which are in accordance with the needs of practice in the Banking industry, so that the implementation of good governance at Bank Riau Kepri from year to year has increased. The results of the assessment on the implementation of bank governance through self-assessment are input in mapping and improving good governance practices at Bank Riau Kepri based on the recommendations given.

Self-assessment on the implementation of Bank governance for the 2016 period refers to the Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks and the Financial Services Authority

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bank Riau Kepri secara berkala melakukan penilaian penerapan Tata Kelola melalui Self assessment penerapan Tata Kelola untuk mengukur dan mengevaluasi implementasi Tata Kelola yang Baik di Bank Riau Kepri. Evaluasi implementasi Tata Kelola yang Baik diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu governance structure, governance process dan Governance outcome. Mekanisme pelaksanaan implementasi Tata Kelola yang Baik dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut: Mengidentifikasi indikator/kriteria penilaian yang akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan penerapan Tata Kelola secara keseluruhan. Melakukan self assessment pelaksanaan penerapan Tata Kelola termasuk perhitungan penilaian komposit. Melakukan evaluasi atas hasil self assessment pelaksanaan penerapan tata kelola dan menyusun. laporan kesimpulan umum self assessment. Menyusun laporan pelaksanaan implementasi tata kelola.

Kriteria Penilaian

Penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Bank Riau Kepri menggunakan kriteria dan metodologi yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang terdiri dari 11 (sebelas) kriteria penilaian pelaksanaan Tata Kelola, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure).
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal.
11. Rencana Strategis Bank.

Pihak Yang Melakukan *Assessment*

Setiap periode semester, Divisi Kepatuhan melakukan penilaian sendiri ***(self assesment)*** pelaksanaan Tata Kelola Bank yang hasil penilaiannya disampaikan di dalam Laporan Tingkat Kesehatan Bank untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Circular Letter Number 13/SEOJK. 03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

Bank Riau Kepri periodically assesses the implementation of Good Corporate Governance through self-assessment of the implementation of Governance to measure and evaluate the implementation of Good Governance at Bank Riau Kepri. Evaluation of the implementation of Good Governance is integrated into 3 (three) aspects, namely governance structure, governance process and governance outcome. The implementation mechanism for the implementation of Good Governance is carried out in several steps, namely as follows: Identifying indicators/assessment criteria that will affect the implementation of the implementation of Good Governance as a whole. Conduct a self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance including the calculation of the composite assessment. Evaluating the results of the self-assessment of the implementation of governance and compiling. self-assessment general conclusion report. Prepare reports on the implementation of governance implementation.

Assessment Criteria

The assessment of the implementation of Good Corporate Governance at Bank Riau Kepri uses the criteria and methodologies stipulated in the Financial Services Authority Circular No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, which consists of 11 (eleven) criteria for assessing the implementation of Governance, namely:

1. *Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors.*
2. *Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners.*
3. *Completeness and Implementation of Committee Duties.*
4. *Handling Conflicts of Interest.*
5. *Implementation of the Bank's Compliance Function.*
6. *Implementation of the Internal Audit Function.*
7. *Implementation of the External Audit Function.*
8. *Implementation of Risk Management Including Internal Control System.*
9. *Provision of Funds to Related Parties (Related Party) and Provision of Large Funds (Large Exposure).*
10. *Transparency of Financial and Non-Financial Conditions, Governance Implementation Report and Internal Reporting.*
11. *Bank's Strategic Plan.*

Parties That Conduct Assessment

Every semester period, the Compliance Division conducts a self-assessment of the implementation of Bank Governance, the results of which are submitted in the Bank Soundness Level Report to be further submitted to the Financial Services Authority (OJK).



Praktik *Bad Corporate Governance*

Bank Riau Kepri menyadari bahwa praktik-praktik ***bad corporate governance*** akan mengganggu sistem Tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun oleh Bank Riau Kepri. Oleh karena itu, selama tahun 2021, Bank Riau Kepri tidak melakukan segala tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan praktik itu yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Bad Corporate Governance Practices

Bank Riau Kepri realizes that bad corporate governance practices will disrupt the Good Governance (GCG) system that has been built by Bank Riau Kepri. Therefore, during 2021, Bank Riau Kepri did not take any actions and policies related to this practice which is shown in the table as follows:

Tabel Praktik Bad Corporate Governance
Table of Number of Legal Problems

No.	Keterangan	Praktik *Practice*	*Information*
1	Adanya laporan sebagai perusahaan yang mencemari lingkungan.	Nihil *Nothing*	*There are reports of companies polluting the environment.*
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam LaporanTahunan.	Nihil *Nothing*	*Important cases being faced by the company, subsidiaries, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who are currently serving are not disclosed in the Annual Report.*
3	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	Nihil *Nothing*	*Non-compliance in fulfilling tax obligations.*
4	Ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil *Nothing*	*Incompatibility of presentation of annual reports and financial statements with applicable regulations and SAK.*
5	Kasus terkait buruh dan karyawan.	Nihil *Nothing*	*Cases related to labor and employees.*
7	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada perusahaan listed.	Nihil *Nothing*	*There is no disclosure of operating segments in listed companies.*
8	Terdapat ketidaksesuaian antara LT hardcopy dengan LT softcopy.	Nihil *Nothing*	*There is a discrepancy between LT hardcopy and LT softcopy.*

Pengungkapan (*Disclosure*) Tata Kelola Remunerasi Bank

a. Komite Remunerasi Bank

Disclosure of Bank Remuneration Governance

a. Bank Remuneration Committee

No	Nama Anggota	Komposisi Tugas & Tanggung Jawab	Jumlah Rapat yang dilakukan selama tahun 2021
1	Taufiqqurahman*	Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib : 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang; 2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: a) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan b) Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi. *The remuneration and nomination committee has duties and responsibilities related to the mandatory remuneration policy:* *1. Evaluating the remuneration policy based on performance, risk, fairness with peer groups, targets, and the Bank's long-term strategy, fulfillment of reserves as regulated in laws and regulations and the potential for future income of the Bank;* *2. Submit evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:* a) *Remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and* b) *Remuneration policy for employees as a whole to be submitted to the Board of Directors;* *3. Ensure that the remuneration policy is in accordance with the provisions; and* *4. Conduct regular evaluations of the implementation of the remuneration policy.*	Aktifitas rapat Komite Remunerasai dan Nominasi sepanjang tahun 2021 dapat dilihat pada Bagian Komite Remunerasi dan Nominasi. *The activities of the Remuneration and Nomination Committee meetings throughout 2021 can be seen in the Remuneration and Nomination Committee Section.*
2	Rita Anugrah**		
3	Syahrial Abdi***		
4	Muhammad Affan		

* Berakhir masa jabatan per tanggal 03 Maret 2021 | * Term of office expires on March 03, 2021
* Menjadi Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 18 Mei 2021 | * Became the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021
* Diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris per tanggal 15 November 2021 | ***Appointed as Member of the Board of Commissioners as of November 15, 2021
** Term of office expires on March 03, 2021 | * Term of office expires on March 03, 2021*
** Became Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since 18 May 2021 | * Became the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee since May 18, 2021*
** Appointed as Member of the Board of Commissioners on November 15, 2021 | ***Appointed as Member of the Board of Commissioners as of November 15, 2021*

b. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi Bank

Sehubungan dengan kewajiban kepada Bank untuk memiliki kebijakan tertulis dan menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi Pengurus dan Pegawai dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk stabilitas keuangan Bank, terciptanya manajemen Risiko, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang serta potensi pendapatan dimasa yang akan datang serta meningkatkan ketahanan dalam menghadapi dinamika perekonomian dan industri perbankan yang dapat dilakukan melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi. Kebijakan Remunerasi Bank dibuat sehubungan dengan belum adanya kebijakan yang menyeluruh atas pengaturan terkait remunerasi yang berlaku pada PT Bank Riau Kepri. Kebijakan dibuat mencakup pengaturan secara umum Remunerasi bagi pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai PT Bank Riau Kepri. Adapun kebijakan khusus masing-masing diatur melalului ketentuan tersendiri.

b. Bank Remuneration Policy Preparation Process

In relation to the obligation to the Bank to have written policies and implement good governance in providing remuneration for Management and Employees by considering various aspects including the financial stability of the Bank, the creation of Risk management, short-term and long-term liquidity needs and potential future income as well as increasing resilience. in dealing with the dynamics of the economy and the banking industry, which can be done through improving governance in the provision of remuneration.
The Bank's Remuneration Policy was made in connection with the absence of a comprehensive policy on regulations related to remuneration applicable to PT Bank Riau Kepri. The policies made include general arrangements for remuneration for management, Sharia Supervisory Board and employees of PT Bank Riau Kepri. The specific policies of each are regulated through separate provisions.

Peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya ***prudent risk taking***, sehingga kelangsungan usaha Bank dapat terjaga maka sesuai ketentuan yang telah diatur dalam POJK Nomor : 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, bank wajib memiliki kebijakan tertulis terkait tata kelola dalam pemberian remunerasi. Untuk menetapkan kebijakan tata kelola remunerasi tersebut Direksi Bank berdasarkan pasal 12 anggaran dasar Bank berhak dan berwenang mengatur ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai perseroan.

Kebijakan Remunerasi Bank disusun dengan memperhatikan dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Bagi Pegawai di ***unit control***, remunerasi bersifat independen sehubungan dengan remunerasi pada PT Bank Riau Kepri telah tersistem sesuai dengan Ketentuan Remunerasi pegawai yang diatur dalam BPP Kepegawaian PT Bank Riau Kepri yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 010/KEPDIR/2019 Tanggal 27 Februari 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

C. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya per Unit Bisnis, per Wilayah, dan pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang

Mengingat program Remunerasi pada PT Bank Riau Kepri telah tersistem dan tersentralisasi yang dikelola oleh Divisi MSDM, maka implementasi kebijakan remunerasi bersifat menyeluruh dan sama pada semua unit bisnis yang tersebar diwilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta Cabang Jakarta.

d. Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

1). Jenis risiko utama (*key risk*) yang digunakan dalam menerapkan remunerasi
Jenis risiko utama (*Key Risk*) menggunakan 2 (dua) pendekatan dalam menerapkan remunerasi yaitu :
- Pendekatan kuantitatif, menetapkan *Material Risk Takers* (MRT) berdasarkan perolehan Remunerasi yang bersifat variable dengan nilai yang besar.

Improved governance in the provision of remuneration aims to encourage prudent risk taking, so that the continuity of the Bank's business can be maintained, so in accordance with the provisions stipulated in POJK Number: 45/POJK.03/2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks, banks are required to has a written policy related to governance in remuneration. To determine the remuneration management policy, the Board of Directors of the Bank based on article 12 of the Bank's articles of association has the right and authority to regulate the provisions regarding the company's employment including the determination of pension salaries, old-age benefits and other income for company employees.

The Bank's Remuneration Policy was prepared with due observance of and guided by the Financial Services Authority Regulation Number 45/POJK.03/2015 dated 23 December 2015 concerning the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks and the Financial Services Authority Circular Letter Number 40/SEOJK.03/2016 dated 26 September 2016 concerning Implementation of Good Corporate Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.

For employees in the control unit, remuneration is independent in relation to remuneration at PT Bank Riau Kepri which has been systemized in accordance with the Remuneration Provisions for employees regulated in the BPP for Personnel of PT Bank Riau Kepri which is stipulated through the Decree of the Board of Directors No. 010/KEPDIR/2019 dated 27 February 2019 regarding the Company Manual (BPP) for the Personnel of PT. Regional Development Bank Riau Kepri.

c. Remuneration Policy Scope and Implementation per Business Unit, per Region, and at Subsidiaries or Branch Offices

Given that the remuneration program at PT Bank Riau Kepri has been systematized and centralized managed by the HR Division, the implementation of the remuneration policy is comprehensive and the same for all business units spread across the Riau Province and Riau Islands Province as well as the Jakarta Branch.

d. Remuneration Associated with Risk

1). The main types of risk (key risk) used in implementing remuneration
The main types of risk (Key Risk) use 2 (two) approaches in implementing remuneration, namely:
- *Quantitative approach, determining Material Risk Takers (MRT) based on the acquisition of Remuneration which is variable with a large value.*

- Pendekatan Kualitatif, menetapkan Material Risk Takers (MRT) berdasarkan tugas dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

2). Dampak penetapan risiko
Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat variabel adalah diterapkannnya program ***Malus*** yaitu menunda pembayaran sebagian atau seluruh dari remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan.

Dalam hal ini, Bank menetapkan program malus sebesar 5 % dari remunerasi variable (jasa produksi) yang ditetapkan kepada pengurus dan pegawai yang telah ditetapkan sebagai ***material risk takers*** (MRT). Jangka waktu penangguhan remunerasi variabel ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan akan dibayarkan penangguhannya secara prorata pada setiap tahunnya. Remunerasi variabel yang ditangguhkan tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai waktu uang (***time value of money***).

e. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi yang meliputi :

1). Tinjauan mengenai kebijakan remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja.
Kebijakan remunerasi yang bersifat variabel khsususnya pada remunerasi yang berkaitan dengan bonus (Jasa Produksi) besaran diberikan berdasarkan capaian kinerja individu pegawai sesuai penilaian kinerja pada kertas penilaian Sasaran Kinerja Individu (SKI).

SKI dan KPI merupakan ***Metode Balance Score Card*** yang menilai empat perspektif kinerja yaitu finansial, pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Dari keempat perspektif tersebut akan dilakukan penilaian dalam hal ini untuk penilaian KPI dikelola oleh Divisi Perencanaan Strategis sedangkan untuk sasaran Kerja Indivisdu (SKI) dikelola oleh Divisi MSDM

2). Metode dalam mengaitkan remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja, dan kinerja individu.
Terdapat 2 (dua) macam bentuk Penilaian Kinerja yaitu sebagai berikut :
a). Penilaian Kinerja ***Key Performance Indicator*** (KPI), yakni suatu sistem penilaian yang diperuntukan bagi unit kerja yang membuat sasaran kinerja. Instrumen/alat yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian ini adalah Formulir Hasil Penilaian ***Key Performance Indicator*** (KPI).
b). Penilaian Sasaran Kinerja Individu (SKI), yakni suatu sistem penilaian yang diperuntukan bagi para pegawai Bank. Instrumen/alat yang

- *Qualitative Approach, determining Material Risk Takers (MRT) based on their duties and responsibilities in making decisions that have a significant impact on the Bank's risk profile.*

2). Impact of risk determination
The impact of determining the main risk on the variable remuneration policy is the implementation of the Malus program, namely delaying the payment of part or all of the deferred variable remuneration.

In this case, the Bank establishes a malus program of 5% of the variable remuneration (production services) assigned to management and employees who have been designated as material risk takers (MRT). The period of deferral of variable remuneration is set for 3 (three) years and the deferral will be paid on a pro rata basis every year. Deferred variable remuneration is not given additional or reduced nominal money, including those caused by changes in the time value of money.

e. Performance measurement is associated with remuneration which includes:

1). Overview of remuneration policies related to performance appraisal.
Remuneration policies that are variable in nature, especially in remuneration related to bonuses (Production Services) the amount is given based on individual employee performance achievements according to the performance assessment on the Individual Performance Target (SKI) assessment paper.
SKI and KPI are Balanced Score Card Methods that assess four performance perspectives, namely financial, customer, internal processes, learning and growth. From these four perspectives, an assessment will be carried out, in this case the KPI assessment is managed by the Strategic Planning Division, while for the Individual Work targets (SKI) it is managed by the HR Division.

2). The method of linking individual remuneration to the performance of the Bank, work unit performance, and individual performance.
There are 2 (two) forms of Performance Assessment, which are as follows:
a). Key Performance Indicator (KPI) Performance Assessment, which is an assessment system intended for work units that set performance targets. The instrument/tool used in the implementation of this assessment is the Key Performance Indicator (KPI) Assessment Result Form.
b). Assessment of Individual Performance Targets (SKI), which is an assessment system intended

digunakan dalam pelaksanaan penilaian ini adalah Formulir Penilaian Sasaran Kinerja Individu (SKI).

Di dalam proses penilaian kinerja, khususnya bagi tenaga pimpinan yang menetapkan sasaran kinerja harus secara aktif membimbing pegawai dalam mencapai sasaran/target unit kerja dibawahnya. Oleh karenanya, sistem ini erat kaitannya dengan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT) suatu unit, yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD).

for Bank employees. The instrument/tool used in the implementation of this assessment is the Individual Performance Target Assessment Form (SKI).

In the performance appraisal process, especially for leadership staff who set performance targets, they must actively guide employees in achieving the goals/targets of the work unit under them. Therefore, this system is closely related to the Bank's Business Plan and the Annual Work Plan & Budget (RKAT) of a unit, which is the elaboration of the General Policy of the Board of Directors (KUD).

f. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

Dalam hal pemberian remunerasi variable berupa jasa produksi bank memberikan besaran jasa produksi sesuai dengan persentase pencapaian kinerja pegawai dari penilaian akhir/ yudisium kinerja dengan predikat yang terdiri dari *Excellent* (4,5 -5,00), *Very Good* (3,5-4,49), *Good* (3,00 – 3,49), *Fair* (2,00 -2,99), dan *Minus* (< 2,00).

f. A description of the method used by the Bank to state that the agreed performance cannot be achieved so that it is necessary to make adjustments to the remuneration and the amount of remuneration adjustments if such conditions occur.

In terms of providing variable remuneration in the form of production services, the bank provides the amount of production services in accordance with the percentage of employee performance achievement from the final evaluation / performance appraisal with predicates consisting of Excellent (4.5 -5.00), Very Good (3.5-4, 49), Good (3.00 – 3.49), Fair (2.00 -2.99), and Minus (< 2.00).

g. Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko

Dalam menerapkan tata kelola pemberian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan Risiko. Dalam hal ini Bank menerapkan perbedaan nominal remunerasi antara Pegawai dengan Risiko Bisnis tinggi (Unit SBU) dan Unit non Bisnis (SSU) melalui dua pendekatan yaitu Pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif dengan menetapkan Pengurus dan Pegawai Bank dengan jabatan tertentu sebagai ***Material Risk Takers*** (MRT).

Untuk pengurus yaitu Direktur Utama dan Direksi sedangkan untuk Pegawai yang ditetapkan sebagai MRT adalah Seluruh Pemimpin Divisi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Pembantu. Pada Seluruh MRT diterapkan kebijakan penangguhan pendapatan Remunerasi (Jasa Produksi) sebesar 5 %. Penetapan kebijakan penahanan pendapatan variabel merujuk pada penerapan pada bank lain yang merupakan ***peer group*** Bank Riau Kepri. Remunerasi variabel yang ditangguhkan tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai waktu uang (***time value of money***).

Jangka waktu penangguhan remunerasi variabel ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan akan dibayarkan penangguhannya secara prorata pada setiap

g. Remuneration adjustment is linked to performance and risk

In implementing governance, remuneration is linked to performance and risk. In this case, the Bank applies a nominal difference in remuneration between Employees with high Business Risk (SBU Units) and Non-Business Units (SSU) through two approaches, namely a qualitative approach and a quantitative approach by assigning Bank Managers and Employees with certain positions as Material Risk Takers (MRT). .

For the management, namely the President Director and the Board of Directors, while for employees who are designated as MRT are all Division Leaders, Branch Managers and Sub-Branch Leaders. For all MRTs, a policy of deferring Remuneration (Production Services) revenues of 5% is applied. The determination of the variable income containment policy refers to the application of other banks which are the peer group of Bank Riau Kepri. Deferred variable remuneration is not given additional or reduced nominal money, including those caused by changes in the time value of money.

The period of deferral of variable remuneration is set for 3 (three) years and the deferral will be paid on a pro rata basis every year. The period of postponement of deferred

tahunnya. Jangka waktu penundaan pembayaran Remunerasi yang ditangguhkan dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor penunda, seperti:
- Presentase NPL Net > 5% setiap tahun.
- Terjadi fraud yang dilakukan oleh pihak yang menjadi material risk takers (MRT) yang merugikan Bank.

remuneration payments can be made by taking into account the delay factors, such as:
- *Net NPL percentage > 5% annually.*
- *There was a fraud committed by parties who were material risk takers (MRT) which harmed the Bank.*

h. Penggunaan Konsultan Eksternal

Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.

h. Use of External Consultants

In compiling and determining the remuneration policy, the Bank does not use the services of an external consultant.

i. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dapat dilihat pada tebel berikut :

I. Variable Remuneration

The number of Directors, Board of Commissioners and Employees receiving Variable Remuneration for 1 (one) year can be seen in the following table:

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun *Amount Received in 1 (one) Year*						*Variable Remuneration*
	Direksi *Director*		Dewan Komisaris *Board Of Commissioners*		Pegawai *Employee*		
	Orang *Person*	Juta *Million*	Orang *Person*	Juta *Million*	Orang *Person*	Juta *Million*	
Jasprod/Tantiem	7	8,025	4	3,574	2.167	104,345	*Jasprod/Tantiem*

j. Jumlah Pegawai Terkena PHK dan Total Nominal Pesangon Dibayarkan

Jumlah pegawai yang terkena PHK dan total nominal pesangon yang dibayarkan dapat dilihat pada tebel berikut :

j. Number of Employees Affected by Layoffs and Total Nominal Severance Pay Paid

The number of employees affected by layoffs and the total nominal amount of severance pay paid can be seen in the following table:

No	Jumlah nominal pesangon dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah (orang) *Number of people)*	*The nominal amount of severance pay is paid per person in 1 (one) year*
1	Di atas Rp1 milyar	0	*Above IDR 1 billion*
2	Di atas Rp500 juta s/d Rp1 milyar	6	*Above IDR 500 million to IDR 1 billion*
3	Rp500 juta kebawah	37	*IDR 500 million and below*

k. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers* (MRT)

Jabatan dan jumlah pihak yang ditetapkan sebagai MRT pada Bank Riau Kepri adalah sebagaimana pada tabel berikut :

k. Position and Number of Parties who are Material Risk Takers (MRT)

Position and the number of parties designated as MRT at Bank Riau Kepri is as shown in the following table:

No.	Jabatan	Jumlah (orang) *Number of people)*	*Position*
1.	Direksi	5	*Directors*
2.	Pemimpin Divisi/ Pemimpin Unit Kerja setingkat Pemimpin Divisi	21	*Division Leader/ Work Unit Leader at the level of Division Leader*
3.	Pemimpin Cabang	21	*Branch Leader*
4.	Pemimpin Cabang Pembantu	41	*Sub-Branch Leader*





TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

Teknologi Informasi sangat berperan penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis Bank. Oleh karenanya, Bank Riau Keprisenantiasa berupaya meningkatkan dan mengoptimalisasikan sarana dan prasarana Teknologi Informasi. Melalui layanan berbasis Teknologi Informasi, Bank Riau Kepriberharap mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan senantiasa melaksanakan perbaikan proses bisnis.

The Bank's business growth from Information is very important to support operational activities. Information Technology infrastructure Therefore, optimizing the facilities of Bank Riau Kepri always strives to improve. Through Information Technology-based services, Bank Riau Kepri hopes to be able to improve the quality of service to customers from continuing to improve business processes.

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

TEKNOLOGI INFORMASI

Dalam rangka penyempurnaan pengelolaan Teknologi Informasi dan penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi yang baik serta pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tanggal 1 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5963) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 21/SEOJK.03/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Bank Riau Kepritelah melakukan penyusunan Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi, yang tertuang dalam bentuk Keputusan Direksi. Didalam Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi tersebut berisi Kebijakan, Standar dan Prosedur mengenai:

1. Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi
2. Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi
3. Operasional Teknologi Informasi
4. Jaringan Komunikasi
5. Pengamanan Informasi
6. Rencana Pemulihan Bencana
7. Komputasi Pengguna Akhir
8. Layanan Perbankan Elektronik
9. Penggunaan Penyedia Jasa Teknologi Informasi
10. Penyediaan Jasa Teknologi Informasi oleh Bank

POLICY AND GOVERNANCE

INFORMATION TECHNOLOGY

In order to improve the management of Information Technology and the implementation of good Information Technology Risk Management as well as compliance with the Financial Services Authority Regulation Number 38/POJK.03/2016 dated December 1, 2016 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2016 number 267, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia number 5963) and Circular Letter of the Financial Services Authority number 21/SEOJK.03/2017 dated 6 June 2017 concerning the Implementation of Risk Management in the Use of Information Technology by Commercial Banks, Bank Riau Kepri has prepared the Governance Guidelines and Information Technology Management, which is contained in the Decision of the Board of Directors. The Information Technology Governance and Management Guidelines contain Policies, Standards and Procedures regarding:

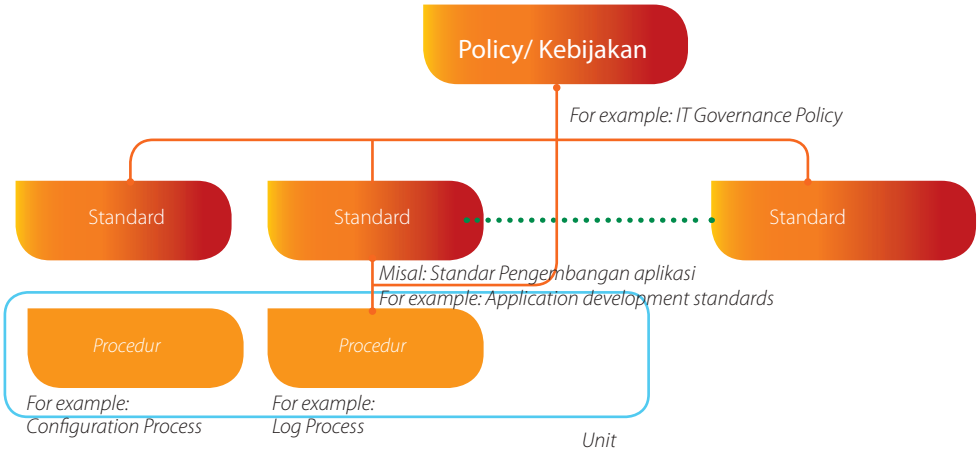
1. *Information Technology Governance and Management*
2. *Information Technology Development and Procurement*
3. *Information Technology Operations*
4. *Communication network*
5. *Information Security*
6. *Disaster Recovery Plan*
7. *End User Computing*
8. *Electronic Banking Services*
9. *Use of Information Technology Service Providers*
10. *Provision of Information Technology Services by Banks*

STRUKTUR DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI
Structure Of Information Technology Division

Arsitektur Kebijakan

Policy Architecture

Struktur Kebjiakan Tata Kelola
Governance Policy Structure



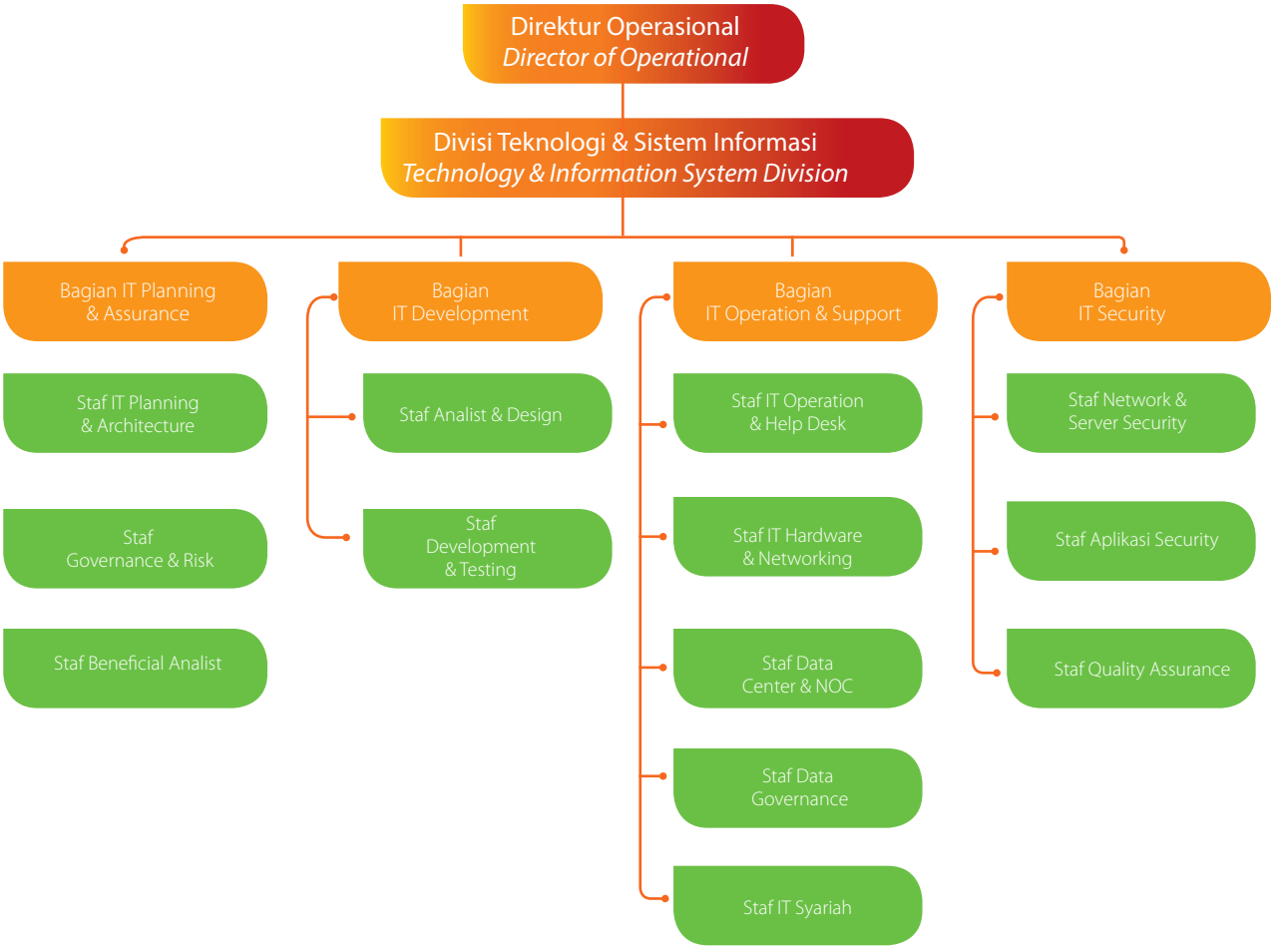
Profil Divisi Teknologi Informasi

Struktur Organisasi Divisi Teknologi & Sistem informasi Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:

Profile of Information Technology Division

The following is the organizational structure of the Information Systems & Technology Division of Bank Riau Kepri:

Organisasi Divisi Teknologi & Sistem informasi Bank Riau Kepri
Organization of Technology & Information System Division of Bank Riau Kepri



PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Divisi Teknologi Informasi diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi dan bisnis Bank Riau Kepriyang telah ditetapkan oleh manajemen. Guna mengembangkan dan menyiapkan kemampuan Sumber Daya Manusia agar dapat menunjang pekerjaan di bidang Teknologi Informasi, pegawai pada Divisi Teknologi Informasi telah mengikuti berbagai pelatihan, seminar dan ***workshop***. Pada tahun 2021 Bank Riau Kepritelah mengikutsertakan pegawai Divisi Teknologi Informasi dalam beberapa Pelatihan diantaranya:

RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN

TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi merupakan kebutuhan utama Bank Riau Kepriuntuk berkompetisi dengan Bank Berikut ini adalah ***Masterplan*** dari Rencana Strategis Teknologi Informasi Tahun 2021 – 2025 Penguatan Platform Teknologi Informasi untuk mendukung Aplikasi ***Digital Banking*** serta ***Management Information System*** (MIS)
Kegiatan penguatan ***Platform*** Teknologi Informasi meliputi:

a. Audit Teknologi Informasi CBS dan ***Gap Analysis***;
b. Penyusunan Rencana Kerja ***Upgrade*** CBS;
c. Proses pengadaan ***Upgrade*** CBS;
d. Persiapan ***Upgrade*** CBS;
e. Terimplementasinya Upgrade CBS;
f. Pengembangan ***Gateway*** transaksi dan ***Gateway*** antara CBS dengan ***surrounding application*** (***Open Banking API***);
g. Pengembangan ***Website*** Bank Riau Keprisecara mandiri;
h. Analisa kondisi ***Role Firewall***, ***Network*** serta analisa risiko;
i. Melakukan ***penetration test***;
j. Perbaikan Data ***Warehouse*** untuk menunjang aplikasi MIS, Pelaporan Bank dan sebagai sumber Data Audit; dan
k. Pengembangan MIS berbasis ***Web***.

1. Penguatan produk berbasis ***Mobile Device*** (***Electronic Channel***)
   Kegiatan penguatan produk berbasis ***Mobile Device*** (***Electronic Channel***) meliputi:
   a. Evaluasi kehandalan layanan SMS ***Mobile***;
   b. Peningkatan kehandalan SMS ***Mobile*** melalui pengembangan ***dashboard*** pemantauan kinerja SMS ***Mobile*** dan pengembangan transaksi ***Biller***;
   c. Pengembangan Modul Penerimaan Retribusi Pajak Daerah berbasis transaksi non-tunai;
   d. Pengembangan Aplikasi Antrian Nasabah berbasis ***Mobile***;

DEVELOPMENT STRATEGY PLAN INFORMATION TECHNOLOGY

Human Resource Development in the Information Technology Division is needed to meet the demands of Bank Riau Kepri's technological and business developments that have been set by management. In order to develop and prepare Human Resources capabilities in order to support work in the field of Information Technology, employees in the Information Technology Division have attended various trainings, seminars and workshops. In 2021 Bank Riau Kepri has included employees of the Information Technology Division in several trainings including:

DEVELOPMENT STRATEGY PLAN

INFORMATION TECHNOLOGY

Information Technology is the main requirement for Bank Riau Kepri to compete with Banks. The following is the Masterplan of the Information Technology Strategic Plan 2021 – 2025 Strengthening Information Technology Platforms to support Digital Banking Applications and Management Information Systems (MIS)
Information Technology Platform strengthening activities include:

a. CBS Information Technology Audit and Gap Analysis;
b. Preparation of the CBS Upgrade Work Plan;
c. CBS Upgrade procurement process;
d. CBS Upgrade Preparation;
e. Implementation of CBS Upgrade;
f. Development of transaction Gateway and Gateway between CBS and the surrounding application (Open Banking API);
g. Development of Bank Riau Kepri Website independently;

h. Analyze the condition of Role Firewall, Network and risk analysis;
i. Perform penetration tests;
j. Improvement of Data Warehouse to support MIS application, Bank Reporting and as a source of Audit Data; and
k. Web-based MIS development.

1. *Mobile Device (Electronic Channel) based product reinforcement*
   Mobile Device (Electronic Channel) based product strengthening activities include:
   a. Evaluation of the reliability of the SMS Mobile service;
   b. Improving the reliability of SMS Mobile through the development of the SMS Mobile performance monitoring dashboard and the development of Biller transactions;
   c. Development of the Regional Tax Retribution Receipt Module based on non-cash transactions;
   d. Mobile-based Customer Queue Application Development;

e. Kerjasama dengan PJTI dan perusahaan penyedia uang elektronik (***e-money server base***);
f. Terimplementasinya Kartu Debet (setelah mendapat izin dari OJK);
g. Pengembangan Mobile Banking berbasis jaringan GPRS;
h. Peningkatan kehandalan Mobile Banking melalui pengembangan fitur transaksi antar Bank Mobile Banking;
i. Peningkatan fitur e-money server base untuk pembayaran Angsuran Kredit;
j. Pengembangan Internet Banking;
k. Penguatan kehandalan Internet Banking;
l. Pengembangan fitur produk CMS dengan Korporasi;
m. Evaluasi kehandalan produk berbasis Mobile Device; dan
n. Penguatan kehandalan produk berbasis ***Mobile Device***.

2. Penguatan fungsi ***Internal Control***
Kegiatan penguatan Penguatan fungsi ***Internal Control*** yaitu Pengembangan sistem ***Anti Fraud*** berbasis TI (Pengembangan ***Website Whistle Blowing System*** secara mandiri).

3. Pengembangan Aplikasi Kredit dan Dana berbasis Digital
Kegiatan pengembangan aplikasi kredit dan dana berbasis digital meliputi:
a. Pengembangan Aplikasi Permohonan Kredit Konsumer berbasis ***Mobile***;
b. Pengembangan Aplikasi Permohonan dan Pencairan Kredit Konsumer berbasis ***Mobile***;
c. Pengembangan Aplikasi Permohonan, Analisa, Pencairan dan Transaksional Kredit Konsumer berbasis ***Mobile***;
d. Pengembangan Aplikasi Permohonan Kredit Mikro berbasis ***Mobile***;
e. Pengembangan Aplikasi Permohonan dan Pencairan Kredit Mikro berbasis ***Mobile***;
f. Pengembangan Aplikasi Permohonan, Analisa, Pencairan dan Transaksional Kredit Mikro berbasis ***Mobile***;
g. Kerjasama dengan perusahaan berbasis ***Fintech***;
h. Pengembangan Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan berbasis ***Mobile***;
i. Pengembangan fasilitas transaksi ***Virtual Account;***

4. Menjadi Bank Devisa
Kegiatan menjadi Bank Devisa meliputi:
a. Pengembangan Modul Bank Devisa; dan
b. Persiapan infrastruktur untuk menjadi Bank Devisa.

e. Cooperation with PJTI and companies providing electronic money (e-money server base);
f. Debit Card implementation (after obtaining permission from OJK);
g. Development of GPRS network-based Mobile Banking;
h. Improved Mobile Banking reliability through the development of inter-bank Mobile Banking transaction features;
i. Improved e-money server base feature for Credit Installment payments;
j. Internet Banking Development;
k. Strengthening the reliability of Internet Banking;
l. CMS product feature development with the Corporation;
m. Evaluation of product reliability based on Mobile Devices; and
n. Strengthening the reliability of Mobile Device-based products.

2. Strengthening the Internal Control function
Strengthening activities Strengthening the Internal Control function, namely the development of an IT-based Anti-Fraud system (Development of a Whistle Blowing System Website independently).

3. Digital-based Credit and Fund Application Development

Digital-based credit and fund application development activities include:
a. Mobile-based Consumer Credit Application Development;
b. Mobile-based Consumer Loan Application Development and Disbursement;
c. Development of Mobile-based Consumer Credit Application, Analysis, Disbursement and Transactional Applications;
d. Mobile-based Micro Credit Application Development;
e. Mobile-based Application Development and Disbursement of Micro Credit;
f. Development of Mobile-based Application, Analysis, Disbursement and Transactional Micro Credit Applications;
g. Cooperation with Fintech-based companies;
h. Development of Mobile-based Savings Account Opening Applications;
i. Development of Virtual Account transaction facilities;

4. Become a Foreign Exchange Bank
Activities to become a Foreign Exchange Bank include:
a. Development of the Foreign Exchange Bank Module; and
b. Infrastructure preparation to become a Foreign Exchange Bank.

INOVASI TEKNOLOGI INFORMASI

Bank Riau Keprisenantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas Teknologi Informasi yang dimiliki untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat umum dan nasabah pada khususnya. Untuk itu Kami senantiasa melakukan inovasi dan pengembangan Teknologi Informasi secara berkelanjutan seiring dengan rencana pengembangan dan perluasan jaringan Bank Riau Kepri, dengan tujuan mempermudah layanan transaksi dan jasa perbankan dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk, jasa dan layanan. Berikut ini adalah beberapa Inovasi Teknologi Informasi yang dikembangkan di tahun 2021 , diantaranya:

Realisasi Program Kerja Teknologi & Sistem Informasi 2021

1. Proses konversi core banking system menjadi core banking syariah system
2. Melaksanakan program sosialisasi core banking BUS lanjutan
3. Memperbaharui Kebijakan TI sesuai dengan POJK terkini
4. Mengembangkan Aplikasi Go Anti Money Laundry
5. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi QRIS
6. Pengembangan dan Implementasi Virtual Account
7. Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
8. Pengembangan dan Implementasi Mobile Banking fitur :
   a. Blokir Kartu ATM
   b. Pembayaran Ziswaf
   c. Pembayaran PLN
9. Migrasi Server (Aplikasi Kritikal) dari Server Konvensional ke Server Teknologi HCI di lokasi DC-DRC yang sudah terkonsolidasi (DMZ Server Farm)

INFORMATION TECHNOLOGY INNOVATION

Bank Riau Kepri always strives to improve the quality of its Information Technology to be able to provide the best service to the general public and customers in particular. For this reason, we always innovate and develop Information Technology in a sustainable manner in line with the plan to develop and expand the Bank Riau Kepri network, with the aim of facilitating transaction services and banking services by placing technology as the main element in the process of product, service and service innovation. The following are some Information Technology Innovations developed in 2021, including:

Realization of Information Systems & Technology Work Program 2021

1. *Process of converting core banking system to core banking sharia system*
2. *Carrying out the advanced BUS core banking socialization program*
3. *Updating IT Policy in accordance with the latest POJK*
4. *Developing the Go Anti Money Laundry Application*
5. *QRIS Application Development and Implementation*
6. *Virtual Account Development and Implementation*
7. *Development and Implementation of Local Government Information System (SIPD)*
8. *Development and Implementation of Mobile Banking features:*
   a. *Block ATM Card*
   b. *Ziswaf Payments*
   c. *PLN Payment*
9. *Server Migration (Critical Applications) from Conventional Servers to HCI Technology Servers on consolidated DC-DRC locations (DMZ Server Farm)*

RENCANA PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INFORMASI 2021

Divisi Teknologi Informasi telah membuat rencana pengembangan teknologi informasi Bank Riau Kepritahun 2021 yaitu sebagai berikut:

EXPANSION PLAN
INFORMATION TECHNOLOGY 2021

The Information Technology Division has made a plan for developing Bank Riau Kepri information technology in 2021, which is as follows:

NO	NAMA APLIKASI/ INFRASTRUKTUR BANK	DESKRIPSI	JENIS PENGEMBANGAN	LOKASI		WAKTU RENCANA IMPLEMENTASI
				DC	DRC	
1	Aplikasi ***Contigency Funding Plan (CFP)***	Aplikasi untuk mengelola pemenuhan kebutuhan dana dalam suatu periode tertentu *Application to manage the fulfillment of funding needs within a certain period*	Baru *New*		-	







SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Bertansformasi menuju bank Syariah untuk menggapai berkah kami senantiasa berkomitmen memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, profesional dan berkemampuan dalam menciptakan nilai tambah serta menjawab tantangan baru. Kami terus berupaya mengembangkan program pelatihan khusus dan berkala yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dan profesionalisme.

Transforming towards a Sharia bank to achieve blessings, we are always committed to having quality Human Resources (HR) who are productive, professional and capable of creating added value and responding to new challenges. We continue to strive to develop special and periodic training programs aimed at improving quality, capability and professionalism.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Sistem Manajemen Talenta perlu diimplementasikan oleh Bank Riau Kepri agar dapat dipetakan potensi SDM yang dimiliki organisasi saat ini, sehingga dapat diselaraskan dengan kebutuhan pencapaian tujuan organisasi, yang tertuang dalam visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Keselarasan tersebut diperoleh melalui identifikasi gap antara kompetensi individu pegawai dengan kebutuhan kompetensi jabatan yang telah diproyeksikan.

Kebutuhan kompetensi jabatan dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan dan proses bisnis organisasi, sedangkan strategi organisasi dituangkan ke dalam Sistem Manajemen Kinerja pegawai. Oleh karena itu, proses utama dalam manajemen talenta adalah asesmen kompetensi dan pengukuran kinerja pegawai. Hasil asesmen kompetensi dan pengukuran kinerja pegawai digunakan untuk membangun talent pool sebagai landasan pengembangan pegawai sehingga tidak saja dapat memenuhi kebutuhan jabatan saat ini, namun juga masa depan sesuai dengan jalur karir perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Sistem Manajemen Talenta memungkinkan organisasi untuk menempatkan orang yang tepat, pada posisi yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan strategi yang tepat pula.

- Menghubungkan kompetensi pegawai dengan strategi, visi dan misi organisasi;
- Menjadi dasar dalam proses rekrutmen pegawai dan suksesi dalam rangka promosi pegawai dengan dasar yang jelas dan objektif;
- Mendorong pencapaian kinerja individu dengan mengidentifikasi dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan pegawai yang dihubungkan dengan sistem *reward* atas kinerja kelompok maupun individu;
- Mengevaluasi kebutuhan dan menyelenggarakan ***training*** pegawai sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan organisasi;
- Menyelaraskan kompensasi dengan prestasi kerja;
- Mengembangkan sistem pembelajaran yang berkesinambungan;
- Mendukung pengelolaan manajemen kepegawaian melalui pengembangan Sistem ***Human Resources*** yang terintegrasi;

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DEVELOPMENT AND STRATEGY

The Talent Management System needs to be implemented by Bank Riau Kepri in order to map the potential of human resources owned by the organization at this time, so that it can be aligned with the needs of achieving organizational goals, which are stated in the vision, mission, goals and strategies of the organization. This alignment is obtained through identifying the gaps between individual employee competencies and the projected job competency needs.

The need for position competence is formulated based on the vision, mission, goals and business processes of the organization, while the organizational strategy is written into the Employee Performance Management System. Therefore, the main process in talent management is competency assessment and employee performance measurement. The results of the competency assessment and employee performance measurement are used to build a talent pool as a basis for employee development so that it can not only meet the needs of current positions, but also the future in accordance with the company's career path that is carried out consistently and consistently.

The Talent Management System enables organizations to place the right people, in the right position, at the right time, and with the right strategy.

- *Connecting employee competencies with the organization's strategy, vision and mission;*
- *Serving as the basis for employee recruitment and succession processes in the context of employee promotion on a clear and objective basis;*
- *Encouraging the achievement of individual performance by identifying and developing the competencies needed by employees linked to a reward system for group and individual performance;*
- *Evaluating needs and conducting employee training in accordance with the needs of work units and organizations;*
- *Aligning compensation with work performance;*
- *Developing a continuous learning system;*

- *Supporting the management of personnel management through the development of an integrated Human Resources System;*

- Meningkatkan peran sebagai strategic *business* partner bagi manajemen;
- Membuat peta pengelompokan SDM, sehingga dapat dilakukan *treatment* yang cocok yang menghasilkan sumber daya yang mampu bersaing;
- Mengelola data pegawai yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian, penyampaian data pegawai yang cepat dan akurat serta meningkatkan kontrol terhadap pengelolaan data pegawai;
- Implementasi *blue print* manajemen SDM yang selaras dengan struktur organisasi yang berbasis kompetensi;
- Pemenuhan kebutuhan tenaga, baik berupa rekrutmen tenaga maupun pemenuhan kebutuhan calon pemimpin;
- Menciptakan sumber daya yang berkualitas dan siap memenangkan kompetisi dan memiliki integritas.

ROADMAP PENGEMBANGAN SDM

Bank Riau Kepri menyusun perencanaan SDM jangka panjang untuk mendukung rencana pengembangan bisnis sejalan tuntutan pembangunan daerah dan tuntutan pasar. Perencanaan SDM dibuat dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu perkiraan beban kerja, rencana pensiun pegawai, dan rencana anggaran yang ditinjau secara periodik.

Perencanaan SDM Bank Riau Kepri dibuat sebelum tahun berjalan sebagai salah satu program kerja Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia. Perencanaan SDM meliputi perencanaan jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan pada tahun berjalan, analisis ketersediaan pegawai, dan analisis pemenuhan kebutuhan SDM.

Sistem pengembangan sumber daya manusia di Bank Riau Kepri dikembangkan sesuai dan selaras dengan strategi bisnis perusahaan menuju kinerja bisnis terbaik di era digital. Bank Riau Kepri menjadikan SDM sebagai tenaga pendukung utama setiap aktivitas operasional.

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

KEBIJAKAN REKRUTMEN

Proses rekrutmen dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi ***capacity gap*** terkait kebutuhan terhadap tenaga kerja yang semakin meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dan diselaraskan dengan strategi *deployment* yang dilakukan melalui penambahan pegawai yang dibutuhkan oleh Bank. Pelaksanaan rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan unsur suku, agama, ras, golongan, ***gender***, atau kondisi fisik untuk berkontribusi di Bank Riau Kepri. Selain itu, proses penerimaan pegawai baru dibantu oleh pihak ketiga untuk menjaga independensi.

- *Increasing the role as a strategic business partner for management;*
- *Creating a map of HR groupings, so that appropriate treatment can be carried out that produces competitive resources;*
- *Managing employee data that is integrated with the personnel information system, deliver employee data quickly and accurately and improve control over employee data management;*
- *Implementing HR management blue print that is in line with the competency-based organizational structure;*
- *Fulfilling the need for personnel, either in the form of recruitment of personnel or fulfilling the needs of prospective leaders;*
- *Creating quality resources that are ready to win the competition and have integrity.*

HR DEVELOPMENT ROADMAP

Bank Riau Kepri prepares long-term HR planning to support business development plans in line with regional development demands and market demands. HR planning is made by taking into account several factors, namely workload estimates, employee retirement plans, and budget plans that are reviewed periodically.

The HR Planning of Bank Riau Kepri was made before the current year as one of the work programs of the Human Resources Management Division. HR planning includes planning the number and qualifications of employees needed in the current year, analysis of employee availability, and analysis of meeting HR needs.

The human resource development system at Bank Riau Kepri is developed according to and in line with the company's business strategy towards the best business performance in the digital era. Bank Riau Kepri makes HR as the main support for every operational activity.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

RECRUITMENT POLICY

The recruitment process is carried out as an effort to fill the capacity gap related to the increasing need for manpower both in terms of quality and quantity and is aligned with the deployment strategy carried out by adding additional employees required by the Bank. The recruitment is carried out openly by providing equal opportunities to the entire community regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, or physical condition to contribute to Bank Riau Kepri. In addition, the process of recruiting new employees is assisted by third parties to maintain independence.

Bank Riau Kepri telah memiliki kriteria dan anggaran dalam melakukan proses rekrutmen. Kandidat pegawai diseleksi berdasarkan kriteria tersebut yang telah disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dalam level jabatan terkait.

Bank Riau Kepri already has criteria and budget in conducting the recruitment process. Employee candidates are selected based on these criteria which have been adjusted to the qualifications and competencies required at the relevant position level.

Tabel Perkembangan Penerimaan Pegawai Bank Riau Kepri 2017-2021
Bank Riau Kepri Employee Recruitment Development Table 2017-2021

Jabatan *Position*	2021	2020	2019	2018	2017	*Position*
Pegawai Tetap		-	-	-	-	*Permanent employee*
AO	13	-	73	28	63	
Funding Officer	2	1	10	2	18	*Funding Officer*
Teller	46	6	87	34	45	*Teller*
Customer Service	21	9	64	15	36	*Customer Service*
Customer Service ULS	2	-	6	2	6	*Customer Service ULS*
Administrasi	2	9	10	11	-	*Administration*
Jumlah	**86**	**25**	**250**	**92**	**168**	***Amount***

Sebagai wujud komitmen dalam keterbukaan informasi dan transparansi, dalam menjalankan rekrutmen pegawai, Bank Riau Kepri telah menerapkan proses rekrutmen secara online melalui sistem *e-Recruitment* Bank Riau Kepri. Hal ini demi tercapainya SDM yang berkualitas dengan menerapkan kualitas sistem rekrutmen yang baik.

As a form of commitment to information disclosure and transparency, in carrying out employee recruitment, Bank Riau Kepri has implemented an online recruitment process through the Bank Riau Kepri e-Recruitment system. This is in order to achieve quality human resources by implementing a good quality recruitment system.

TURNOVER

Selama tahun 2021 terdapat 80 *Turnover* dengan rincian 10 Pegawai pensiun, 59 ***Resign***, 5 PHK dan 5 meninggal dunia dan 1 habis kontrak.

TURNOVER

During 2021 there were 80 turnovers with details of 10 employees retired, 59 resigned, 5 layoffs and 5 died and 1 expired.

Tabel Perkembangan Turnover Pegawai Bank Riau Kepri 2017-2021
Bank Riau Kepri Employee Turnover Development Table 2017-2021

Tahun *Year*	Pensiun *Retired*	Mengundurkan Diri *Resigned*	PHK *Layoff*	Meninggal *Died*	Habis Kontrak *Contract Ended*	Jumlah *Total*
2017	16	36	4	2	-	58
2018	17	72	11	2	-	102
2019	13	97	2	4	3	119
2020	17	35	12	2	4	70
2021	**10**	**59**	**5**	**5**	**1**	**80**

SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Bank Riau Kepri memiliki sistem penilaian kinerja pegawai yang berkaitan dengan sistem penilaian unit kerja masing-masing yaitu berupa ***Key Performance Indicator*** (KPI) untuk menilai performa/kinerja unit kantor yang dinilai setiap triwulan/tahunan dan Sasaran Kinerja Individu (SKI) untuk mengukur kinerja pegawai setiap setahun sekali. Penilaian SKI secara aktif akan membimbing para pegawai dalam setiap unit kerja dalam mencapai sasaran unitnya dalam kerangka mencapai sasaran usaha Bank Riau Kepri serta memberikan penilaian kinerja dan potensi secara lebih objektif.

PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

Bank of Riau Kepri has an employee performance appraisal system that is related to the assessment system for each work unit, namely Key Performance Indicators (KPI) to assess the performance/performance of office units which are assessed quarterly/annually and Individual Performance Targets (SKI) to measure employee performance once a year. The SKI assessment will actively guide employees in each work unit in achieving their unit goals in the framework of achieving the business goals of Bank Riau Kepri as well as providing a more objective assessment of performance and potential.

Penilaian kinerja pegawai Bank Riau Kepri ini di atur melalui Keputusan Direksi No. 10/KEPDIR/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Tahapan Sistem Manajemen Kinerja Proses pelaksanaan penilaian kinerja dan potensi pegawai dilakukan sebagai berikut :

a. Seluruh pegawai membuat penilaian tahunan dengan menggunakan formulir lembaran penilaian SKI sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan dan mengisi form *job description* yang memuat pekerjaan utama dan tambahan masing-masing pegawai yang ditandatangani dan disetujui oleh atasan tertinggi di masing-masing unit kerja.
b. Proses kegiatan tersebut diselenggarakan pada:
   - Awal tahun
   - Akhir tahun
c. Dalam proses penilaian terlibat tiga pihak, yaitu:
   - Pegawai yang dinilai (Pihak I).
   - Atasan langsung pegawai yang dinilai (Pihak II), yaitu pejabat yang melakukan penilaian terhadap pegawai yang bersangkutan.
   - Atasan berikutnya (Pihak III), yaitu atasan langsung Pihak II yang dalam hal ini bertindak sebagai pemutus.

Penilaian kinerja ini telah memperhatikan kriteria yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

a. Sasaran Kinerja
   Adalah pernyataan singkat mengenai apa yang harus dikerjakan, agar target dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.
b. Indikator kerja
   Adalah pernyataan singkat dan nyata/konkrit tentang sasaran-sasaran yang dinyatakan sejalan dengan kriteria kinerja dan dinyatakan secara kuantitatif.
c. Bobot Indikator Kerja
   Adalah pembobotan indikator kerja dalam bentuk *prosentase* yang dibagi kepada keempat perspektif yaitu *Financial (F), Customer (C), Internal Proses (IP)* dan *learning and growth(LG)*, sesuai dengan bidang/ pekerjaan *(front office/SBU/back office/SSU)*.

The performance assesment of Bank of Riau Kepri employees is regulated through the Decree of the Directors No. 10/ KEPDIR/2019 dated February 27, 2019 concerning Company Manual Book (BPP) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri. Performance Management System Stages The process of implementing employee performance and potential appraisals is carried out as follows:

a. All employees make an annual assessment using the SKI assessment sheet form in accordance with the established form and fill in the job description form which contains the main and additional work of each employee which is signed and approved by the highest supervisor in each work unit.

b. The activity process is held during:
   - *Beginning of the year*
   - *End of the year*

c. There are three parties involved in the assessment process, namely:
   - *Employees who are assessed (Party I).*
   - *Direct supervisor of the assessed employee (Party II), namely the official who conducts an assessment of the employee concerned.*
   - *Next superior (Party III), namely the direct supervisor of Party II who in this case acts as the breaker.*

This performance appraisal has taken into account the criteria which include the following aspects:

a. Performance Goals
   a brief statement of what must be done, so that the target can be achieved as well as possible.
b. Work Indicator
   a short and real/concrete statement about the stated goals in line with the performance criteria and stated quantitatively.
c. Work Indicator Weight
   the weighting of work indicators in the form of percentages which are divided into four perspectives, namely Financial (F), Customer (C), Internal Process (IP) and learning and growth (LG), according to the field/job (front office/SBU/back office/ SSU).

Tabel Bobot Indikator Kerja Berdasarkan Bidang Pekerjaan
Table of Work Indicator Weights by Field of Work

Keterangan	F	C	IP	LC	Description
SBU	40%	30%	20%	10%	*SBU*
SSU	20%	30%	40%	10%	*SSU*

d. Pimpinan (Manajer).
   Adalah pimpinan unit yang selanjutnya disebut Pihak I yang penilaiannya dikelola dengan sistem ini.
e. Atasan (*Supervisor*).
   Adalah atasan dari pimpinan/manajer, yang selanjutnya disebut Pihak II yang berperan langsung dalam pengelolaan penilaian para pimpinan dimaksud.
f. Atasan Berikutnya (*Next Supervisor*).
   Adalah atasan dari *Superior* diatas yang selanjutnya disebut Pihak III.

d. Leader (Manager).
   It is the head of the unit, hereinafter referred to as Party I, whose assessment is managed by this system.
e. Supervisor (Supervisor).
   Is the supervisor of the leadership/manager, hereinafter referred to as Party II who has a direct role in managing the assessment of the said leaders.

f. Next Supervisor
   the superior of the Superior above, hereinafter referred to as Party III.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Bank Riau Kepri memberikan kesempatan yang sama bagi pegawai untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan kinerja perusahaan. Program pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan karir, pelatihan dan sertifikasi profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, pelatihan, sosialisasi, seminar, workshop dan pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank Riau Kepri.

Sebelum menentukan program pelatihan, maka dilakukan kajian kebutuhan melalui berbagai tahapan. Metode pelatihan dan pengembangan dalam pengelolaan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Bank Riau Kepri dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan
2. Penetapan Tujuan
3. Pengembangan Metode Pelatihan
4. Pengembangan Materi Pelatihan
5. Pelaksanaan Pelatihan
6. Evaluasi Pelatihan.

Penentuan pelatihan berfokus pada tugas, pekerjaan, atau posisi yang spesifik yang membuat seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu, topik pelatihan ditentukan oleh tingkat kepentingannya.

Disamping itu, dalam rangka melakukan fungsi *coaching* & *counceling* kepada pegawai-pegawai yang memiliki problem dalam pekerjaannya sehari-hari atau masalah dalam kehidupan pribadi atau rumah tangga sehingga tidak mempengaruhi kinerjanya, Bank Riau Kepri pada tahun 2010 membentuk Unit Layanan Konseling.

TUJUAN PELATIHAN

Setiap pegawai mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan karir pegawai itu sendiri. Pegawai akan mengikuti program pelatihan baik dalam rangka meningkatkan keterampilan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya sekarang dan antisipasi pengembangan tugas ke depan.

PESERTA PELATIHAN

Selama tahun 2021, Program Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 222 jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 10.356 orang yang dikelompokkan sebagai berikut :

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT COMPETENCY DEVELOPMENT

Bank Riau Kepri provides equal opportunities for employees to continue to develop along with the development of company performance. The HR development program is carried out through career education, professional training and certification, skills, as well as various courses, training, socialization, seminars, workshops and management and technical training tailored to the needs of Bank Riau Kepri.

Before determining the training program, a needs assessment was carried out through various stages. The method of training and development in the management of training and development of Human Resources at Bank Riau Kepri is carried out through several stages, namely as follows:

1. *Needs analysis*
2. *Goal Setting*
3. *Training Method Development*
4. *Training Material Development*
5. *Training Implementation*
6. *Training Evaluation.*

Training determination focuses on the specific task, job, or position that makes a person complete the job. Therefore, training topics are determined by their level of importance.

In addition, in order to perform the function of coaching & counseling for employees who have problems in their daily work or problems in personal or household life so as not to affect their performance, Bank Riau Kepri in 2010 formed a Counseling Service Unit.

TRAINING OBJECVTIVE

Every employee has the same opportunity to get an education according to the employee's career needs. Employees will participate in training programs both in order to improve skills and in carrying out their current duties and anticipate the development of future tasks.

TRAINING PARTICIPANTS

During 2021, the Education and Training Program of 222 types of education and training activities has been carried out with a total of 10,356 participants grouped as follows:

Tabel Jumlah Pelatihan dan Peserta Bank Riau Kepri Tahun 2021
Table of the Number of Training and Participants of Bank Riau Kepri in 2021

No	Jenis Diklat *Type of Training*	Jumlah Pelatihan *Total Training*	Peserta *Participants*	*Type of Training*
1	Inhouse Training	149	10,079	
2	Pelatihan Eksternal Dalam Negeri	73	277	*Domestic External Training*
3	Pelatihan Eksternal Luar Negeri	0	0	
Total		**222**	**10,356**	

Tabel Daftar Peserta Pelatihan Bank Riau Kepri Tahun 2021
Table of Participants in Bank Riau Kepri Training in 2021

No	Jenis Diklat	Inhouse Training	Pelatihan Eksternal Dalam Negeri *Domestic External Training*	Pelatihan Eksternal Luar Negeri *Overseas External Training*	*Type of Training*
1	Pemimpin Divisi	85	16	-	*Division Leader*
2	Pemimpin Cabang Utama	20	3	-	*Main Branch Manager*
3	Pemimpin Bagian Kantor Pusat	213	48	-	*Head of Head Office Bagian*
4	Pemimpin Cabang Konvensional	71	0	-	*Conventional Branch Leader*
5	Pemimpin Cabang Syariah	12	0	-	*Sharia Branch Manager*
6	Pemimpin Cabang Pembantu	6	0	-	*Sub-Branch Leader*
7	Pemimpin Bagian Cabang Utama/ Setingkat	137	0	-	*Head of Main Branch/*
8	Pemimpin Setingkat Pincapem	10	0	-	*level*
9	Pemimpin Seksi Setingkat	73	5	-	*Pincapem Level Leader*
10	Pegawai MPP (Masa Persiapan Pensiun)	2,312	107	-	*Section Leader Level*
11	Pelaksana	5	0		*MPP Employee (Preparation Period*
12	Pegawai Core (Teller/CS/FO/RO)	1,410	19	-	*Pension)*
13	Lain-Lain	5,250	79		*Executor*
Total		**10,079**	**277**		***Core Employees (Teller/CS/ FO/RO)***

Biaya Pelatihan

Selama tahun 2021, biaya pegawai untuk pelatihan dan pengembangan mengalami penurunan dengan pencapaian 43.43% menjadi sebesar Rp5,748 Juta dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp13,237 juta.

Training Fee

During 2021, employee costs for training and development decreased by 43.43% to Rp5,748 million compared to Rp13,237 million in 2020.

Tabel Biaya Pelatihan Pegawai Tahun 2020- 2021 (dalam Rp)
Table of Employee Training Costs for 2020-2021 (in IDR)

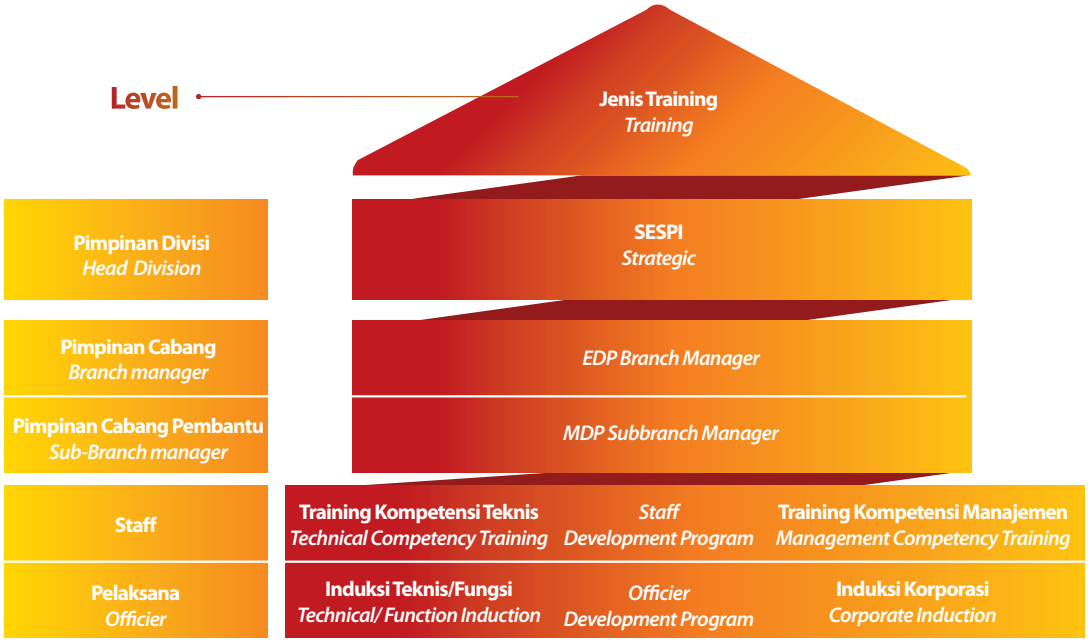
No	Jenis Diklat	2020	2021	*Type of Training*
1	Inhouse Training	12,098,677,681	4,894,636,037	*In-house Training*
2	Pelatihan Eksternal	1,138,934,741	854,328,295	*External Training*
Total		**13,237,612,422**	**5,748,964,332**	

PROGRAM PENGEMBANGAN KUALITAS DAN KOMPETENSI PEGAWAI

Pengembangan kualitas dan kompetensi Pegawai dilaksanakan sesuai dengan pedoman *blue print* edukasi Bank Riau Kepri yang telah dirumuskan sebagai berikut:

EMPLOYEE QUALITY AND COMPETENCE DEVELOPMENT PROGRAM

The development of employee quality and competence is carried out in accordance with the educational blueprint guidelines of Bank Riau Kepri which have been formulated as follows:



KESEMPATAN DAN PELUANG YANG SAMA

Untuk pengembangan kompetensi karyawan, Bank Riau Kepri selalu berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pegawainya agar bisa mengembangkan potensi dirinya guna menunjang karir diperusahaan. Bank membuat kebijakan design ketentuan promosi, dimana sistem atau metode yang memformulasikan indikator-indikator dari parameter yang terukur dalam rangka pemilihan kandidat pegawai yang memiliki *high performance* dan *high qualification* untuk dipromosi seperti tergambar pada skema dibawah ini.

Sistem pengembangan karir di Bank Riau Kepri dikembangkan dalam 4 (empat) tahapan yaitu: standar kompetensi, *mapping* potensi pegawai, *career planning* dan *development* program.

SAME CHANCE AND OPPORTUNITY

For employee competency development, Bank Riau Kepri is always committed to providing equal opportunities to all employees in order to develop their potential to support careers in the company. The Bank makes a policy on the design of promotion provisions, in which a system or method formulates indicators of measurable parameters in the context of selecting employee candidates who have high performance and high qualification to be promoted as illustrated in the scheme below.

The career development system at Bank Riau Kepri was developed in 4 (four) stages, namely: competency standards, employee potential mapping, career planning and program development.





KESEMPATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Bank Riau Kepri merupakan Perusahaan yang bergerak dalam lingkungan kinerja yang tidak memicu banyak risiko kecelakaan kerja, namun Bank Riau Kepri berusaha untuk memberikan perlindungan dalam bekerja, sehingga semua pihak dapat melakukan aktivitas dengan nyaman. Bank Riau Kepri berupaya memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja serta tercapainya kecelakaan nihil pada setiap unit kerja. Risiko yang diminimalisir berupa bahaya kebakaran, bahaya pencurian, dan fasilitas kesehatan. Penjelasan lebih lengkap terkait kesehatan dan keselamatan kerja ada pada bagian *Corporate Social Responsibility* (CSR).

WORK OPPORTUNITIES AND SAFETY

Bank Riau Kepri is a company that operates in a performance environment that does not trigger a lot of risk of work accidents, but Bank Riau Kepri strives to provide protection at work, so that all parties can carry out activities comfortably. Bank Riau Kepri strives to meet occupational health and safety standards and achieve zero accidents in each work unit. Minimized risks include fire hazard, theft hazard, and health facilities. A more complete explanation regarding occupational health and safety is in the Corporate Social Responsibility (CSR) section.

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Bank Riau Kepri menetapkan standarisasi penilaian kinerja pegawai menggunakan kamus dan *balance scorecard* untuk setiap jabatan yang disebut dengan istilah *Key Performance Indicator* (KPI). Penilaian ini sangat mempengaruhi jenjang karir, promosi, dan rotasi

EMPLOYEE PERFORMANCE ASSESSMENT

Bank Riau Kepri stipulates standardization of employee performance appraisal using a dictionary and a balanced scorecard for each position called the Key Performance Indicator (KPI). This assessment greatly affects the career path, promotion, and rotation of each employee. However,

masing-masing pegawai. Namun penilaian ini sedang dalam proses perbaikan dan perubahan untuk lebih memberikan nilai-nilai keadilan bagi seluruh pegawai.

REWARD AND PUNISHMENT

Sistem *reward and punishment* dari manajemen penting untuk diterapkan oleh Bank Riau Kepri. Sistem *reward and punishment* membantu manajemen dalam mewujudkan visi, misi, strategi, dan tujuan perusahaan. Selain itu, sistem *reward* and *punishment* dari manajemen menjadi alat manajemen untuk dapat memberikan pengaruh kepada karyawan agar bertindak positif guna pencapaian tujuan perusahaan. Karyawan akan kooperatif apabila manajemen dapat mengembangkan dan mengelola karyawan dengan tepat, sehingga target bank dapat berjalan sesuai harapan manajemen.

Sistem *reward and punishment* dari manajemen juga dirancang untuk memotivasi karyawan agar tujuan perusahaan tercapai. *Reward* merupakan salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi personel agar mencapai tujuan perusahaan dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sedangkan *punishment* merupakan sesuatu yang tidak disukai/disenangi oleh karyawan untuk menghasilkan efek jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan dan kesalahan yang sama. Bentuk-bentuk *punishment* antara lain kehilangan pekerjaan, tidak menerima kenaikan gaji, dihapus dari daftar karyawan yang akan dipromosi, kegagalan mendapatkan *reward*, ancaman pemecatan, dan lain sebagainya.

Dalam aktivitas dan operasional bank selama tahun 2021, Bank telah memberikan *reward* and *punishment* sebagai berikut:

this assessment is in the process of being improved and changed to better provide fairness values for all employees.

REWARDS AND PUNISHMENT

The reward and punishment system from management is important to be implemented by Bank Riau Kepri. The reward and punishment system assists management in realizing the company's vision, mission, strategy and goals. In addition, the reward and punishment system from management is a management tool to be able to influence employees to act positively in order to achieve company goals. Employees will be cooperative if management can develop and manage employees appropriately, so that the bank's targets can run according to management's expectations.

The reward and punishment system from management is also designed to motivate employees to achieve company goals. Reward is one of the important control tools used by companies to motivate personnel to achieve company goals with behavior as expected by the company. Meanwhile, punishment is something that employees do not like / like to produce a deterrent effect so that they will not commit the same actions and mistakes. Forms of punishment include losing a job, not receiving a salary increase, being removed from the list of employees to be promoted, failing to get a reward, threats of dismissal, and so on.

In bank activities and operations during 2021, the Bank has provided rewards and punishments as follows:

Tabel Jumlah Pegawai yang mendapatkan Reward Tahun 2021
Table of Number of Employees who get Rewards in 2021

Jenis Reward	Jumlah (Orang) *Number of people)*	*Reward Type*
15 tahun masa bakti	111	*15 years of service*
20 tahun masa bakti	35	*20 years of service*
25 tahun masa bakti	5	*25 years of service*
30 tahun masa bakti	0	*30 years of service*
Jumlah	**151**	***Total***

Rekapitulasi Sanksi Pegawai Periode Tahun 2021
Recapitulation of Employee Sanctions for the Year 2021

Kategori	Keterangan	Jumlah (Orang)	*Category*
Ringan	Peringatan Pertama | *First Warning*	6	*Light*
	Peringatan Kedua | *Second Warning*	6	
	Peringatan Ketiga | *Third Warning*	2	
	Teguran | *Rebuke*	-	
Sedang	Pernyataan Tidak Puas | *Dissatisfied Statement*	1	*Medium*
	Demosi Grade | *Demotion Grade*	-	
Berat	Pemutusan Hubungan Kerja | *Work termination*	4	*Heavy*
Jumlah		**19**	***Amount***

KEBIJAKAN REMUNERASI

Kebijakan Remunerasi Pegawai PT Bank Riau Kepri mengacu pada Buku Pedoman Perusahaan PT Bank Riau Kepri sebagaimana diatur pada SK No.093/KEPDIR/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Nomor 10/KEPDIR/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Rlau Kepri dan peraturan perusahaan Bank Riau Kepri yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.141/PHIJSK-PK/PP/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.

Tentang Kebijakan Remunerasi Pengurus PT Bank Riau Kepri ditetapkan dalam RUPS dengan terlebih dahulu diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku serta azas kepatutan dan kemampuan Bank Riau Kepri. Hal-hal yang diatur mencakup antara lain: Besaran Penghasilan Pengurus Bank Riau Kepri, Hak-hak dan Fasilitas dan Penghargaan Masa Bakti.

Sebagai salah satu cara memotivasi pegawai, maka Bank melalui Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia menjalankan program kesejahteraan karyawan maupun sistem Remunerasi dan Kompensasi. Beberapa pembayaran selain gaji yang telah diberikan perusahaan kepada pegawai selama tahun 2021 antara lain:

1. Pembayaran Jasa Produksi.
2. Pembayaran THR.
3. Pembayaran Bantuan Pakaian Dinas.
4. Pembayaran Uang Kehadiran
5. Bekal Cuti Tahunan & Cuti Besar
6. Pembayaran Perawatan Kesehatan baik Jaminan Perusahaan dan BPJS Kesehatan
7. Pembayaran Penghargaan Masa Pengabdian 15, 25 dan 30 Tahun.
8. Uang Santunan Kematian

REMUNERATION POLICY

The Employee Remuneration Policy of PT Bank Riau Kepri refers to the Company Manual of PT Bank Riau Kepri as regulated in SK No. 093/KEPDIR/2021 dated December 21, 2021 regarding the Fourth Amendment to the Decree of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Number 10/KEPDIR/2019 dated 27 February 2019 regarding the Company Manual (BPP) of PT Bank Riau Kepri Regional Development and Bank Riau Kepri company regulations which have been ratified by the Directorate General of Industrial Relations Development and Labor Social Security of the Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. KEP.141/PHIJSK-PK/PP/I/2017 dated January 31, 2017.

Regarding the Remuneration Policy for the Management of PT Bank Riau Kepri, it was determined at the GMS by first being proposed by the Remuneration and Nomination Committee based on the applicable rules and regulations as well as the principles of decency and capability of Bank Riau Kepri. Matters that are regulated include, among others: Amount of Income for Bank Riau Kepri Management, Rights and Facilities and Term of Service Awards.

As a way to motivate employees, the Bank through the Human Resources Management Division runs employee welfare programs as well as the Remuneration and Compensation system. Several payments other than salaries that have been given by the company to employees during 2021 include:

1. *Payment for Production Services.*
2. *THR payment.*
3. *Payment of Official Clothing Assistance.*
4. *Attendance Payment*
5. *Provision of Annual Leave & Big Leave*
6. *Payment of Health Care both Corporate Guarantee and BPJS Health*
7. *Payment of 15, 25 and 30 Years of Service Award.*
8. *Death Benefit*

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terpenting bagi sebuah bank dalam menghadapi kompetisi di era digital. Pertumbuhan bisnis Bank Riau Kepri kedepan akan selalu diikuti dengan kebutuhan akan ketersediaan SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sejalan dengan upaya mewujudkan visi dan misi di era yang kompetitif, Bank Riau Kepri telah mencanangkan program pengembangan kualitas SDM secara konsisten melalui sistem pengelolaan SDM yang terpadu melalui sebuah aplikasi database kepegawaian yaitu berupa aplikasi *HRIS (Human Resource Information System)* yang telah dikembangkan oleh Divisi MSDM secara simultan. Sistem aplikasi HRIS berdasarkan SK Direksi Nomor 084/KEPDIR/2017 tanggal 30 Oktober 2017 mengimplementasikan modul-modul aplikasi yaitu sebagai berikut:

a. Kepegawaian
   Mengelola informasi profil pegawai yaitu berupa biodata, keluarga, pendidikan, mutasi, promosi dan demosi pegawai.
b. *Payroll*/Penggajian
   Berfungsi untuk mengelola data gaji pegawai, dimana modul ini membantu petugas bagian penggajian di Divisi MSDM untuk menghitung dan mengolah data gaji seluruh pegawai setiap bulannya yang dimulai dari merekap posisi pegawai, menginput komponen potongan gaji, memproses data gaji hingga memposting gaji ke rekening masing-masing pegawai.
c. Cuti
   Memiliki fungsi untuk pengajuan cuti pegawai yang akan diteruskan dan di-*approve* oleh pimpinan pegawai di unit kantornya masing-masing pegawai. Modul aplikasi cuti baru dapat diterapkan setelah implementasi ESS ini.
d. Pelatihan
   Memiliki fungsi untuk merekap seluruh kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada bagian pengembangan SDM yang nantinya akan menambah informasi pelatihan di CV masing-masing pegawai.
e. Absensi
   Berfungsi untuk merecord dan mengolah data absen pegawai yang terkoneksi dengan mesin-mesin absen.
f. *Track Record*
   Merupakan modul yang berfungsi untuk mengelola data *track record* pegawai berupa administrasi sanksi pegawai dan penerimaan penghargaan masa bakti pegawai.
g. Perawatan Kesehatan (*Medical Record*)

Berfungsi untuk mengelola data perawatan kesehatan pegawai baik berupa tagihan dari rumah sakit maupun reimburs biaya perawatan dari pegawai.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

Human Resources (HR) is the most important asset for a bank in facing competition in the digital era. The business growth of Bank Riau Kepri in the future will always be followed by the need for the availability of human resources, both in terms of quantity and quality. In line with efforts to realize the vision and mission in a competitive era, Bank Riau Kepri has launched a consistent HR quality development program through an integrated HR management system through a personnel database application in the form of an HRIS (Human Resource Information System) application that has been developed by the HR Division. simultaneously. The HRIS application system based on the Decree of the Board of Directors Number 084/KEPDIR/2017 dated October 30, 2017 implements the following application modules:

a. Staffing
   Manage employee profile information in the form of biodata, family, education, transfers, promotions and employee demotions.
b. Payroll/Payroll
   Serves to manage employee salary data, where this module helps payroll officers in the HR Division to calculate and process salary data for all employees every month starting from recapitulating employee positions, inputting salary deduction components, processing salary data to posting salaries to their respective accounts. employee.

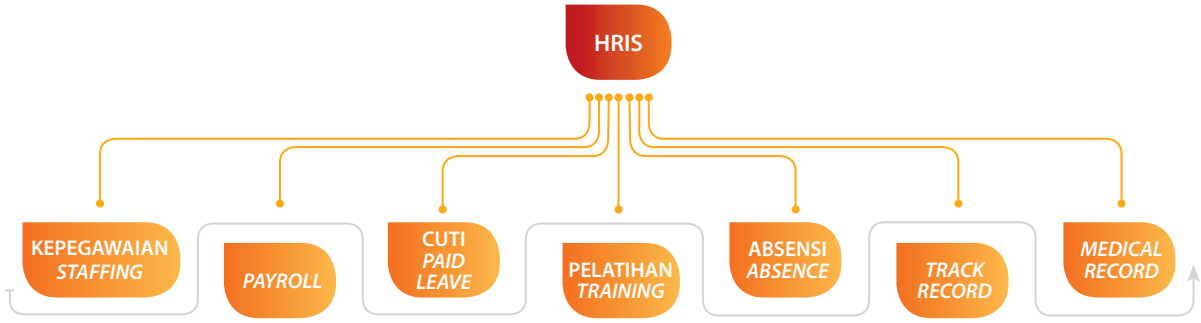
c. Paid leave
   Has a function for submitting employee leave which will be forwarded and approved by the employee leadership in each employee's office unit. The new leave application module can be applied after the implementation of this ESS.
d. Training
   Has a function to recap all training activities carried out in the HR development section which will later add training information in the CV of each employee.

e. Attendance
   Serves to record and process employee absent data connected to absentee machines.
f. Track Records
   Is a module that functions to manage employee track record data in the form of administrative sanctions for employees and receiving employee service awards.

g. Health Care (Medical Record)

Serves to manage employee health care data in the form of bills from hospitals and reimbursement of treatment costs from employees.

Diagram Aplikasi HRIS dan Modul-Modul yang dikembangkan
HRIS Application Diagram and Modules developed



INTERNALISASI BUDAYA

Dalam rangka upaya mendukung konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah secara mendasar dan menyeluruh maka Bank Riau Kepri tahun 2021 telah melakukan penajaman kultur perusahaan guna menyatukan pola pikir dan gerak langkah para pemangku kepentingan khususnya pegawai sebagai ujung tombak institusi.

Penjabaran pernyataan budaya perusahaan (*corporate culture statement*) Bank Riau Kepri tetap bersumber dari filosofi perusahaan yang sudah ditumbuh- kembangkan di setiap insan Bank Riau Kepri, yaitu: "Teguh, Utuh, Tumbuh". Dari pernyataan budaya perusahaan Bank Riau Kepri dijabarkan "nilai-nilai budaya Bank Riau Kepri" yang menjadi landasan dan pedoman setiap insan dalam berpikir, bertindak dan berperilaku melaksanakan aktivitas keseharian.

Nilai-nilai budaya Bank Riau Kepri yang baru adalah "I SHARE" yang terdiri dari:

1. *Integrity*
2. *Sinergy*
3. *Honesty*
4. *Adaptive*
5. *Respect*
6. *Excellence*

Nilai-nilai budaya tersebut di atas, dijabarkan ke dalam perilaku utama secara nyata yang dapat menjadi landasan dan pedoman bagi insan Bank Riau Kepri dalam berperilaku dan bertindak untuk mengambil keputusan. Proses penajaman nilai-nilai budaya dan Perilaku Utama Insan Bank Riau Kepri dilakukan melalui kebijakan strategis, kompetisi internal, wawancara & *observasi*, *focus grup discussion*, dan *survey*, maka telah disusun 10 (sepuluh) perilaku utama yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai penajaman kultur yaitu sebagai berikut :

CULTURE INTERNALIZATION

In an effort to support the conversion of Bank Riau Kepri into a Sharia Commercial Bank in a fundamental and comprehensive manner, Bank Riau Kepri in 2021 has sharpened corporate culture in order to unite the mindset and actions of stakeholders, especially employees as the spearhead of the institution.

The elaboration of the corporate culture statement of Bank Riau Kepri still comes from the corporate philosophy that has been developed in every person of Bank Riau Kepri, namely: "True, Whole, Grow". From the statement of the corporate culture of Bank Riau Kepri, it is described "the cultural values of Bank Riau Kepri" which are the basis and guidelines for every human being in thinking, acting and behaving in carrying out daily activities.

The new cultural values of Bank Riau Kepri are "I SHARE" which consists of:

1. *Integrity*
2. *Synergy*
3. *Honesty*
4. *Adaptive*
5. *Respect*
6. *Excellence*

The cultural values mentioned above are translated into real main behaviors that can be the basis and guidelines for Bank Riau Kepri personnel in behaving and acting to make decisions. The process of sharpening cultural values and the main behavior of Bank Riau Kepri personnel is carried out through strategic policies, internal competition, interviews & observations, focus group discussions, and surveys. namely as follows:

Nilai-Nilai Budaya *Cultural Values*	Perilaku Utama *Main Behavior*
Integrity *Integrity*	1. Komitmen & bertanggungjawab *1. Commitment and responsibility*
Sinergy *Synergy*	2. Bekerjasama, saling menghargai dan mendukung 3. Berpikir positif *2. Cooperate, respect and support each other* *3. Think positive*
Honesty *Honesty*	4. Jujur & tulus ikhlas *4. Honest and sincere*
Adaptive *Adaptive*	5. Kreatif, Inovatif dan bernilai tambah *5. Creative, Innovative and value added*
Respect *Respect*	6. Peduli, proaktif dan cepat tanggap 7. Berorientasi pada hasil terbaik *6. Caring, proactive and responsive* *7. Oriented to the best results*
Excellence *Excellence*	8. Kompeten 9. Bekerja cerdas, efektif dan efisien 10. Memberikan hasil terbaik *8. Competent* *9. Work smart, effective and efficient* *10. Gives the best results*

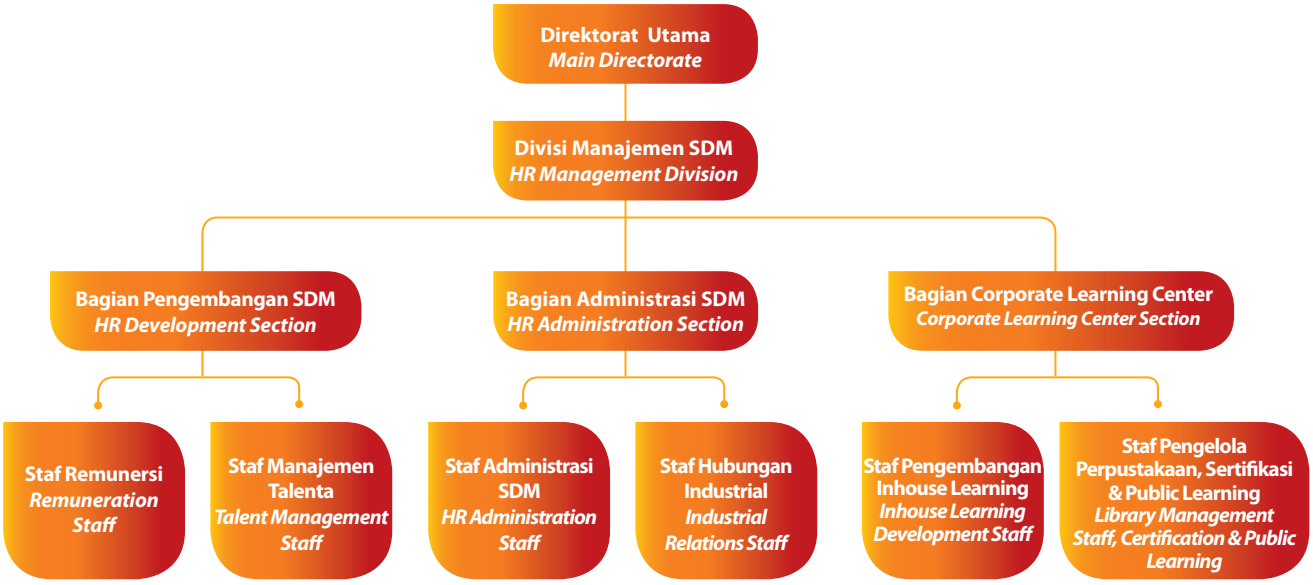
Struktur organisasi yang menjalankan fungsi Manajemen Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia di Bank Riau Kepri dipimpin oleh Pemimpin Divisi Manajemen Sumber

Organizational structure that carries out the Management function. The Human Resources Management Division at Bank Riau Kepri is led by the Head of the Management Division of Source



PROFIL DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources Division Profile

Sumber Daya Manusia di Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:
Human Resources at Bank Riau Kepri are as follows:



Divisi Manajmen Sumber daya Manusia di BAnk Riau Kepri dipimpin oleh Pemimpin Divisi MAnajemen Sumber Daya MAnusia dan berada dibawah di bawah Direktur Utama Profil Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Profil Pejabat Eksekutif pada Bab Profil Perusahaan Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Divisi Manajemen SDM.
2. Menyelenggarakan, memonitor, mengendalikan dan mengadministrasikan serta membuat laporan pelaksanaan RKAT Divisi Manajemen SDM sehubungan dengan bidang tugasnya dan kegiatan lain yang meliputi:
   a. Penjabaran rencana kerja dan anggaran serta strategi bisnis Divisi Manajemen SDM dalam bentuk KPI (*Key Performance Indicator*).
   b. Penyusunan dan pengkinian peraturan perusahaan yang berkaitan dengan Kepegawaian.
   c. Penyusunan program Kompensasi dan *Benefit* Pengurus dan Pegawai Bank.
   d. Penyelenggaraan, monitoring dan pengendalian seluruh Program pengembangan Pegawai melalui program magang, pendidikan dan pelatihan.
   e. Mengelola data base kepegawaian dari pengurus dan pegawai Bank.
   f. Tanggung jawab dalam penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten guna menunjang pencapaian target kinerja unit bisnis.

The Human Resources Management Division at BANK Riau Kepri is led by the Head of the Human Resources Management Division and is under the President Director.

Duties and Responsibilities of the Human Resources Management Division are as follows:

1. *Prepare annual work plan and budget for HR Management Division.*
2. *Organizing, monitoring, controlling and administering as well as making reports on the implementation of the HR Management Division's RKAT in relation to its field of duties and other activities which include:*
   a. *The elaboration of the work plan and budget as well as the HR Management Division's business strategy in the form of KPIs (Key Performance Indicators).*
   b. *Preparation and updating of company regulations related to Personnel.*
   c. *Preparation of Compensation and Benefit programs for Bank Managers and Employees.*
   d. *Organizing, monitoring and controlling all employee development programs through apprenticeship, education and training programs.*
   e. *Manage the personnel data base of the Bank's management and employees.*
   f. *Responsible for providing and developing competent human resources to support the achievement of business unit performance targets.*

g. Tanggung jawab dalam program pengembangan dan kaderisasi pegawai dan pengisian personel sesuai SOT.
h. Menjaga hubungan baik antara karyawan, manajemen, pemerintah, dan pihak pihak lain yang bersangkutan.
i. Melakukan proses mediasi terhadap permasalahan yang terjadi antara karyawan dan perusahaan.
j. Pemberian reward dan punishment untuk dan atas nama Direksi kepada pegawai.
k. *Review* standar budaya perusahaan.
l. Bertanggung jawab dalam pengembangan program budaya perusahaan.
m. Monitoring dalam proses pembangunan budaya layanan Bank agar budaya layanan menjadi jati diri (*image*) bagi seluruh jajaran Bank.
n. Tanggung jawab dalam penetapan dan penilaian.
o. Sasaran Kinerja Individu (SKI).

3. Merumuskan kebijakan dan pengarahan Direksi dalam suatu instruksi, ketetapan, keputusan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi staf dan pegawai baik di lingkungan Divisi Manajemen SDM maupun bank secara keseluruhan.
4. Melatih/membimbing bawahannya untuk meningkatkan keterampilan, prestasi dan mutu pegawai, termasuk diantaranya mengusulkan pelatihan/workshop.
5. Memberikan tanggapan atas temuan hasi pemeriksaan internal (SKAI) dan *eksternal* serta melakukan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.
6. Menetapkan satu orang staf yang juga berfungsi sebagai *support assistance* yang bertugas antara lain sebagai administrator, pemantauan SLA dan program kerja Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia.
7. Penetapan uraian tugas pokok untuk seluruh pegawai di Divisi masing-masing.
8. Penetapan rencana kerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk sasaran kinerja individu (SKI)
9. Dalam hal Pemimpin Divisi berhalangan baik tetap maupun sementara, maka pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan fungsi Pemimpin Divisi akan dilaksanakan oleh minimal dua orang Pemimpin Bagian/pejabat setingkat. Apabila di dalam suatu unit kerja (Divisi) hanya terdapat satu orang Pemimpin Bagian/pejabat setingkat maka akan dilaksanakan oleh Pemimpin Bagian/pejabat setingkat tersebut.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Divisi Manajemen SDM.

g. Responsibilities in employee development and regeneration programs and filling personnel according to SOT.
h. Maintain good relations between employees, management, government, and other parties concerned.
i. Conduct mediation process on problems that occur between employees and the company.
j. Providing rewards and punishments for and on behalf of the Board of Directors to employees.
k. Review of corporate culture standards.
l. Responsible for the development of corporate culture programs.
m. Monitoring in the process of developing the Bank's service culture so that the service culture becomes an identity (image) for all levels of the Bank.
n. Responsibility in determination and assessment.
o. Individual Performance Targets (SKI).

3. Formulate policies and directions for the Board of Directors in written instructions, stipulations, decisions and procedures as guidelines for staff and employees both within the HR Management Division and the bank as a whole.
4. Train/guide subordinates to improve the skills, achievements and quality of employees, including proposing training/workshops.
5. Provide responses to the findings of internal and external inspections and carry out follow-up improvements as needed.
6. Assign one staff member who also functions as support assistance whose duties include administrator, SLA monitoring and work program of the Human Resources Management Division.
7. Determination of the main job descriptions for all employees in each Division.
8. Determination of the work plan of subordinates as outlined in the form of individual performance targets (SKI)
9. In the event that the Division Leader is absent either permanently or temporarily, then the implementation of the duties, responsibilities and functions of the Division Leader will be carried out by a minimum of two Division Leaders/level officials. If in a work unit (Division) there is only one Section Leader/level official, it will be carried out by the Section Leader/official at that level.

10. Carry out other tasks assigned by the Board of Directors, especially with regard to the implementation of the duties of the HR Management Division.

KOMPOSISI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan tahun 2021 jumlah pegawai Bank Riau Kepri sebanyak 2.657 orang mengalami kenaikan 3,51% jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 2.567 orang. Terkait rincian komposisi pegawai telah diuraikan pada bagian Profil perusahaan.

RENCANA TAHUN 2022

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menawarkan banyak sekali kemudahan, salah satunya ialah memudahkan informasi menyebar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Proses pembelajaran secara serempak dapat dilaksankan untuk lingkup sasaran yang kecil maupun besar, dimanapun dan kapan pun serta dapat diikuti setiap pegawai.

Bank Riau Kepri akan melakukan *review* terhadap kebijakan pegawai pada BPP Kepegawaian terkait dengan tata tertib & disiplin pegawai, hak & fasilitas (usulan tunjangan komunikasi bagi pemasar, *review* tunjangan rayon, SPPD, dan biaya SPPD pindah), sistem penilaian kinerja unit & potensi pegawai dan kebijakan pemberian sanksi administratif bagi pegawai serta penyusunan kebijakan struktur organisasi bank.

Aturan -aturan kepegawaian harus selalu mendapatkan perhatian dalam dunia kerja dikarenakan pegawai merupakan asset bagi perusahaan yang terus bersinergi dalam pencapaian kinerja optimal. Semakin hari permasalahan kepentingan perusahaan dan pegawai selalu menjadi hal yang kompleks dan perbaikan-perbaikan diharapkan mampu mengakomodir perubahan tersebut.

Review kebijakan tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan, diantaranya berdasarkan kepada kondisi aturan-aturan (SOP/Juknis) yang dirasa sudah tidak lagi relevan digunakan untuk saat ini seperti dibutuhkannya tunjangan komunikasi, tunjangan rayon, perhitungan komponen dan kewenangan izin dan penandatangan SPPD serta penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan pemberian sanksi administratif sehingga perlu dilakukannya perubahan kebijakan dalam berorganisasi, terutama bagi pegawai.

Penerimaan Sumber Daya Insani (SDI) baru akan dilaksanakan guna menunjang pemenuhan pegawai pada jaringan kantor baru, mengisi formasi atau jenis pekerjaan baru, mengganti pegawai yang berhenti baik karena alasan pensiun ataupun lainnya serta mempertimbangkan hasil *Work Load Analysis* (WLA).

COMPOSITION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Until 2021 the number of employees of Bank Riau Kepri as many as 2,657 people, an increase of 3.51% when compared to 2020 as many as 2,567 people. The details of the composition of employees have been described in the Company profile section.

PLAN FOR 2022

The development of communication and information technology offers a lot of convenience, one of which is making it easier for information to spread without being limited by space and time. The learning process can be carried out simultaneously for small and large targets, wherever and whenever and can be followed by every employee.

Bank Riau Kepri will review employee policies at the Personnel BPP related to employee discipline & discipline, rights & facilities (proposed communication allowances for marketers, review of regional allowances, SPPD, and SPPD moving costs), unit performance appraisal system & employee potential and policies for providing administrative sanctions for employees as well as the formulation of policies on the bank's organizational structure.

Employment rules must always get attention in the world of work because employees are assets for companies that continue to synergize in achieving optimal performance. Every day the problems of the interests of the company and employees are always complex and improvements are expected to be able to accommodate these changes.

The policy review was carried out with several approaches, including based on the conditions of the rules (SOP/Juknis) which were deemed no longer relevant to be used at this time such as the need for communication allowances, regional allowances, calculation of components and permit authority and SPPD signing as well as adjustments and improvements. the policy of providing administrative sanctions so that it is necessary to make changes to policies in the organization, especially for employees.

The recruitment of new Human Resources (SDI) will be carried out to support the fulfillment of employees in the new office network, fill in new formations or types of work, replace employees who quit for reasons of retirement or other reasons and take into account the results of Work Load Analysis (WLA).

Pada tahun ini akan dilakukan perubahan status Pegawai Tidak Tetap *Core* menjadi Pegawai Tetap *Core* dan Pegawai Tidak Tetap *Non Core* menjadi Pegawai Tetap (teknis).

This year there will be a change in the status of Non-Permanent Core Employees to Core Permanent Employees and Non-Core Permanent Employees to Permanent (technical) Employees.

Sistem pembelajaran dimasa pandemi Covid-19 saat ini mengakibatkan industri perbankan di Indonesia harus melaksanakan pelatihan pegawai secara *daring*. Memperhatikan model pembelajaran dengan kondisi terkini bisa dilakukan secara daring Bank Riau Kepri Divisi Manajemen SDM akan melakukan kajian dalam bidang pendidikan bagi pegawai dengan salah satunya mengembangkan metode pembelajaran secara daring baik untuk *inhouse training* maupun *publik training,* selanjutnya biaya rendah, efektivitas dan kesempatan belajar yang sangat luas menjadikan pembelajaran daring lebih fleksibel, yang memungkinkan pegawai untuk melaksanakan pembelajaran pada waktu dan lokasi yang berbeda.

The learning system during the current Covid-19 pandemic has resulted in the banking industry in Indonesia having to carry out employee training online. Paying attention to the learning model with the latest conditions can be done online Bank Riau Kepri HR Management Division will conduct a study in the field of education for employees, one of which is developing online learning methods for both in-house training and public training, then low costs, effectiveness and excellent learning opportunities. breadth makes online learning more flexible, allowing employees to carry out learning at different times and locations.

Pada tahun ini *Learning Center* Bank Riau Kepri telah berjalan secara komprehensif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin terbaik Bank Riau Kepri di masa depan. Pada tahun ini Bank Riau Kepri akan melakukan kajian pendirian Bank Riau Kepri *Corporate University*.

This year the Bank Riau Kepri Learning Center has been running comprehensively to produce the best cadres of future leaders of Bank Riau Kepri. This year, Bank Riau Kepri will conduct a study on the establishment of Bank Riau Kepri Corporate University.

Training Need Analisys (TNA) atau analisis kebutuhan pelatihan perbankan syariah adalah suatu langkah yang dilakukan sebelum melakukan pelatihan dan merupakan bagian terpadu dalam merancang pelatihan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang materi, alokasi waktu tiap materi, dan strategi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan agar proses pelatihan bermanfaat bagi pegawai efektif dan efisien. Dari analisis ini akan diketahui pelatihan bisnis syariah apa saja yang relevan bagi Bank pada saat ini dan juga di masa yang akan datang dalam meningkatkan kompetensi pegawai sehingga mampu untuk bersaing.

Training Need Analysis (TNA) or sharia banking training needs analysis is a step taken before conducting training and is an integrated part in designing training to obtain a comprehensive picture of the material, time allocation for each material, and learning strategies that should be applied in the implementation of the training so that the training process is carried out properly. useful training for employees effectively and efficiently. From this analysis, it will be known what sharia business training is relevant for the Bank at this time and also in the future in improving employee competence so that they are able to compete.

Sebagai langkah antisipasi penanggulan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Bank Riau Kepri maka akan diterapkan penggunaan mesin absen *touchless* dengan teknologi *face recognition* dimana hal ini dilakukan guna menghindari kontak fisik pegawai dengan mesin absen serta dapat menjaga kedisiplinan pegawai khususnya dalam hal kehadiran di kantor.

As an anticipatory measure to deal with the spread of Covid-19 in the Bank Riau Kepri environment, the use of a touchless absent machine with facial recognition technology will be implemented where this is done to avoid physical contact of employees with absent machines and can maintain employee discipline, especially in terms of attendance at the office.

Bank Riau Kepri akan melakukan *updrage* pada beberapa menu aplikasi kepegawaian (*Human Resource Information System/HRIS)* yang berkaitan dengan penyempurnan formula/ perhitungan, perbaikan *bugs/ error,* penambahan menu/fitur serta penambahan laporan yang berkaitan dengan pengelolaan pegawai namun tetap menyesuaikan dengan kesiapan unit-unit terkait mengingat proses konversi yang masih berlangsung hingga tahun ini.

Bank Riau Kepri will upgrade several personnel application menus (Human Resource Information System/HRIS) related to formulate/calculation improvements, bugs/error fixes, menu additions/features and additional reports related to employee management but still adjusts to unit readiness. -related units considering the conversion process is still ongoing this year.


MARZUKI
SATPAM





TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

Tanggung jawab sosial Perusahaan (***Corporate Social Responsibility***/CSR) merupakan kontribusi Bank dalam membangun bangsa melalui kepedulian terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan, lingkungan, ketenagakerjaan serta kepada konsumen yang dimiliki. Seiring dengan kemajuan Bank, Bank menyadari bahwa kemajuan Bank tidak dapat dipisahkan dari faktor eksternal maupun internal tersebut. Atas dasar ini, Bank Riau Kepri berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan berlandaskan pada kesadaran bahwa keberlanjutan usaha Bank sangat tergantung pada terciptanya hubungan saling menguntungkan antara seluruh Pemangku Kepentingan.

Corporate Social Responsibility (CSR) is the Bank's contribution in building the nation through concern for social life, the environment, employment as well as to its consumers. Along with the progress of the Bank, the Bank realizes that the progress of the Bank cannot be separated from these external and internal factors. On this basis, Bank Riau Kepri is committed to fulfilling its social responsibilities based on the awareness that the sustainability of the Bank's business is highly dependent on the creation of mutually beneficial relationships between all Stakeholders.

Berdasarkan peraturan-peraturan dan kebijakan Bank, kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan secara konsisten oleh Bank adalah Program Kemitraan, Bina Lingkungan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Program-program tersebut dilaksanakan di wilayah sekitar operasional Bank untuk memastikan bahwa masyarakat sekitar dapat menerima manfaat langsung atas kehadiran Bank.

Based on the Bank's regulations and policies, the social responsibility activities carried out consistently by the Bank are the Partnership Program, Community Development and Corporate Social Responsibility. These programs are implemented in the areas surrounding the Bank's operations to ensure that the surrounding community can receive direct benefits from the Bank's presence.

KOMITMEN PADA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Bank Riau Kepri menyadari bahwa kinerja positif Bank tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan kinerja bisnis semata. Pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan karyawan, dan kepuasan pelanggan, merupakan bagian dari kinerja positif dan kunci kerberhasilan Bank. Hal tersebut adalah bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan/***Corporate Sosial Responsibility*** (CSR) yang secara konsisten dilakukan oleh Bank. Program CSR Perusahaan dilakukan dalam berbagai inisiatif yang berfokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pengelolaan ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta perlindungan dan pelayanan prima kepada konsumen.

COMMITMENT TO SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank Riau Kepri realizes that the Bank's positive performance is not only measured by business growth and performance. Environmental conservation, community empowerment, employee welfare, and customer satisfaction are part of the positive performance and the key to the Bank's success. This is part of the Corporate Social Responsibility (CSR) consistently carried out by the Bank. The Company's CSR programs are carried out in various initiatives that focus on sustainable environmental management, social and economic development of the community, improving the quality of labor management, Occupational Health and Safety (K3), as well as protection and excellent service to consumers.

Selaras dengan strategi pelaksanaan CSR Bank Riau Kepri, secara umum, Program CSR Bank Riau Kepri difokuskan pada 4 (empat) aspek Program CSR yaitu:

In line with the CSR implementation strategy of Bank Riau Kepri, in general, the CSR Program of Bank Riau Kepri is focused on 4 (four) aspects of the CSR Program, namely:

Diagram Program CSR
CSR Program Diagram



VISI DAN MISI CSR

VISI

Sebagai bank daerah yang mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di bidang lingkungan, kesehatan, sosial dan budaya, pendidikan, kegiatan keagamaan, pemuda dan olahraga serta ekonomi dengan membangun hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat yang berkelanjutan.

MISI

- Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan penyediaan saluran distribusi dan fasilitas untuk usaha-usaha kecil yang dibiayai Bank.
- Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dengan berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
- Berperan aktif dalam peningkatan kehidupan masyarakat dengan peduli dan tanggap terhadap lingkungan hidup, ketenagakerjaan/keselamatan kerja, kesehatan, sosial dan budaya, kegiatan keagamaan, pemuda dan olahraga, perlindungan nasabah, sosial kemasyarakatan, pendidikan, adat / budaya/seni, bencana alam, dan atau dukungan operasional kegiatan pemerintahan.

CSR VISION AND MISSION

VISION

As a regional bank that encourages regional economic growth, so as to be able to improve the quality of life and welfare of the community in the fields of environment, health, social and culture, education, religious activities, youth and sports as well as the economy by building a harmonious relationship between the Government, the Company and the Community that is sustainable .

MISSION

- *Encouraging regional economic growth by providing distribution channels and facilities for small businesses financed by the Bank.*
- *improving the quality of community human resources by participating in improving the quality of education in the regions.*
- *Take an active role in improving people's lives by caring and being responsive to the environment, employment/ work safety, health, social Vand culture, religious activities, youth and sports, customer protection, social community, education, customs/culture/arts, natural disasters, and or government operational support.*

TUJUAN

Program ***Corporate Social Responsibility*** (CSR) Bank Riau Kepri bertujuan untuk mendorong budaya kerja Bank yang lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas bisnis, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan Bank.

DESTINATION

Bank Riau Kepri's Corporate Social Responsibility (CSR) program aims to encourage the Bank's work culture to be more responsible in carrying out business activities, so that in the end the business world will be able to survive in a sustainable manner to achieve the Bank's goals.

DASAR KEBIJAKAN PELAKSANAAN CSR

Pelaksanaan program CSR Bank Riau Kepri mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
6. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
7. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/ POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
10. Selain itu, Bank Riau Kepri secara khusus menetapkan peraturan tentang CSR dalam regulasi internal yaitu Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang ditetapkanmelalui Surat Keputusan Direksi No.027/ KEPDIR/2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 22 Maret 2017.

POLICY BASIC FOR IMPLEMENTATION OF CSR

The implementation of the Bank Riau Kepri CSR program refers to the laws and regulations in Indonesia, both those that regulate in general and specifically regarding CSR, including:

1. *Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UU PM).*
2. *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT).*
3. *Government Regulation Number 32 of 1998 concerning Small Business Guidance and Development.*
4. *Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises.*
5. *Law Number 13 of 2011 concerning Handling the Poor.*
6. *Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 13 of 2012 concerning the Forum for the Responsibility of the Business World in the Implementation of Social Welfare.*
7. *Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility.*
8. *Financial Services Authority Regulation No. 1/ POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.*
9. *Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 of 2017 concerning Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals.*
10. *In addition, Bank Riau Kepri specifically stipulates regulations regarding CSR in internal regulations, namely the Company Manual (BPP) which is stipulated through the Decree of the Board of Directors No.027/KEPDIR/2017 concerning the Corporate Social Responsibility (CSR) Program Manual of PT Pembangunan Daerah Riau Kepri March 22, 2017.*

PRINSIP PELAKSANAAN CSR

Mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut, Bank menyusun kebijakan dan program CSR baik secara konsep maupun sasaran implementasi secara tertulis. Perusahaan telah memiliki kebijakan tertulis dari pimpinan Perusahaan terkait program CSR. Di samping itu, Bank Riau Kepri telah memiliki ***Standard Operating Procedure*** (SOP) CSR yang mengatur segala macam panduan kebijakan dalam melaksanakan program program CSR agar bisa berjalan efektif dan memberi dampak optimal kepada

CSR IMPLEMENTATION PRINCIPLES

Referring to a number of these policies, the Bank formulates CSR policies and programs both conceptually and in written implementation targets. The company already has a written policy from the company's leadership regarding the CSR program. In addition, Bank Riau Kepri already has a CSR Standard Operating Procedure (SOP) which regulates all kinds of policy guidelines in implementing CSR programs so that they can run effectively and have an optimal impact on the community.

para pemangku kepentingan. SOP juga dimaksudkan untuk menegakkan prinsip tata kelola yang baik (***good governance***) dalam pelaksanaan program CSR.

stakeholders. SOPs are also intended to enforce the principles of good governance in the implementation of CSR programs.

PELAKSANA PENGELOLA CSR

Berdasarkan BPP CSR Bank Riau Kepri, pelaksana pengelola CSR adalah Divisi Sekretariat Perusahaan dengan Struktur sebagai berikut:

CSR MANAGEMENT

Based on the BPP CSR of Bank Riau Kepri, implementing CSR management is the Corporate Secretary Desk with the following structure:

Diagram Struktur Organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan
Diagram of the Organizational Structure of the Company Secretariat Division



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Divisi Sekretariat Perusahaan sebagai penanggung jawab dari penyaluran program CSR Bank Riau Kepri memiliki kewenangan memutus CSR dan bertindak sebagai koordinator pelaksanaan serta melakukan evaluasi CSR Bank Riau Kepri. Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Pembina CSR adalah sebagai berikut:

1. Menyusun pengalokasian anggaran CSR;
2. Menyusun ketentuan terkait program CSR;
3. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) CSR untuk mendapatkan persetujuan;
4. Memonitor dan me-review realisasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) CSR;
5. Mengelola, mengadministrasikan dan menyusun laporan pelaksanaan CSR secara keseluruhan;
6. Menyusun dan menyampaikan laporan CSR;
7. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi realisasi CSR.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Corporate Secretary Desk as the person in charge of the distribution of the CSR program of Bank Riau Kepri has the authority to decide on CSR and acts as the coordinator of implementation and evaluates the CSR of Bank Riau Kepri. The duties and responsibilities of the CSR Fostering Work Unit are as follows:

1. *Prepare CSR budget allocation;*
2. *Prepare provisions related to CSR programs;*
3. *Prepare CSR Work Plan and Budget (RKA) for approval;*
4. *Monitor and review the realization of the CSR Work Plan and Budget (RKA);*
5. *Managing, administering and compiling reports on the overall CSR implementation;*
6. *Prepare and submit CSR reports;*
7. *Coordinate and evaluate the realization of CSR.*

SUMBER DANA

Sejalan dengan BPP CSR Bank Riau Kepri, sumber dana CSR dibagi dua bagian yaitu:

1. Dana Program Kemitraan:
   a. Sumber dana program kemitraan berasal dari dana Bank Riau Kepri yang menggunakan beban biaya dana kemitraan kantor pusat Bank yang besarannya ditentukan oleh keputusan

SOURCE OF FUNDS

In line with the CSR BPP of Bank Riau Kepri, the sources of CSR funds are divided into two parts, namely:

1. *Partnership Program Funds:*
   a. *The source of funding for the partnership program comes from Bank Riau Kepri funds which use the cost of partnership funds at the Bank's head office, the amount of which is determined by the decision of*

rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan. Sedangkan untuk perubahan besaran anggaran dapat dilaksanakan pada RUPS luar biasa.

b. Besaran ***plafond*** dana Program Kemitraan yang diterima oleh masing-masing Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) disampaikan dalam Surat Edaran Direksi.

2. Dana Program Bantuan Kemasyarakatan Sumber dana program bantuan kemasyarakatan berasal dari dana Bank Riau Kepri yang menggunakan biaya dana bantuan kemasyarakatan dimana besarnya ditentukan dalam penyusunan anggaran (RKAT) Bank Riau Kepri.

the annual general meeting of shareholders (GMS). Meanwhile, changes to the amount of the budget can be carried out at the extraordinary GMS.

b. The amount of the Partnership Program funding ceiling received by each Regional Government (Province, Regency, and City) is submitted in a Circular Letter of the Board of Directors.

2. Community Assistance Program Funds The source of funds for the community assistance program comes from Bank Riau Kepri funds which use the costs of community assistance funds where the amount is determined in the preparation of the Bank Riau Kepri budget (RKAT).

METODA DAN LINGKUP *DUE DILIGENT* TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERUSAHAAN

DUE DILIGENT METHODS AND SCOPE ON SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF COMPANY ACTIVITIES

Dalam rangka mencegah terjadinya dampak negatif dari keputusan dan kegiatan Bank, maka Bank Riau Kepri telah memiliki berbagai kebijakan, mekanisme pemantauan dan mekanisme penanganan keluhan. Metode dan lingkup ***due diligent*** disajikan sebagai berikut:

In order to prevent negative impacts from the decisions and activities of the Bank, Bank Riau Kepri already has various policies, monitoring mechanisms and complaints handling mechanisms. The methods and scope of due diligence are presented as follows:

Core Subject *Core Subject*	**Lingkup** *Scope*	**Kebijakan** *Policy*	**Mekanisme Pemantauan** *Monitoring Mechanism*	**Mekanisme Penangangan Keluhan** *Mechanism Complaint Handling*
Hak Azasi Manusia *Human Rights*	Penerapan prinsip-prinsip HAM kepada seluruh Pekerja *Application of human rights principles to all workers*	- Perjanjian Kerja Bersama - Code of Conduct/CoC - *Collective labor agreement* - *Code of Conduct/CoC*	Survei kepuasan karyawan *Employee satisfaction survey*	Pengaduan dapat disampaikan melalui pimpinan secara langsung. *Complaints can be submitted directly through the leadership.*
Operasi yang Wajar *Fair Operation*	Pencegahan benturan kepentingan, implementasi ***Whistleblowing System*** dan ***Code of Conduct***, larangan perilaku insiders serta hubungan dengan organisasi lain. *Prevention of conflicts of interest, implementation of the Whistleblowing System and Code of Conduct, prohibition of insiders behavior and relationships with other organizations.*	- Kebijakan pengendalian internal. - Whistleblowing System (WBS) - Code of Conduct - Kebijakan gratifikasi - *Internal control policies.* - *Whistleblowing System (WBS)* - *Code of conduct* - *Gratuity policy*	***Assessment*** GCG sebagai penilaian dalam pelaksanaan operasi yang adil. *GCG assessment as an assessment in the implementation of fair operations.*	Pengaduan dilaporkan kepada Tim Pengelola Laporan Pelanggaran melalui ***Whistle Blowing System.*** *Complaints are reported to the Violation Report Management Team through the Whistle Blowing System.*

Core Subject *Core Subject*	**Lingkup** *Scope*	**Kebijakan** *Policy*	**Mekanisme Pemantauan** *Monitoring Mechanism*	**Mekanisme Penangangan Keluhan** *Mechanism Complaint Handling*
Lingkungan Hidup Environment	Efisiensi di lingkungan internal Bank, pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup serta penerapan keuangan berkelanjutan. *Efficiency in the Bank's internal environment, environmental preservation and implementation of sustainable finance.*	Kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik di internal maupun eksternal. *Policies related to environmental aspects, both internally and externally.*	Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) *Evaluation of the implementation of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB)*	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat Bank Riau Kepri. *Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest Branch Office of Bank Riau Kepri.*
Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja *Employment, Health and Safety*	Berbagai program ketenagakerjaan seperti kesetaraan ***gender*** dalam kesempatan bekerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan kebebasan berserikat dan lainnya. Selain itu, dalam lingkup kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja, Bank memiliki program untuk memberikan fasilitas kesehatan serta memberikan jaminan keselamatan kerja kepada seluruh karyawan. *Various employment programs such as gender equality in employment opportunities, equality in education and training programs on freedom of association and others. In addition, within the scope of occupational health and safety activities, the Bank has a program to provide health facilities and provide work safety guarantees to all employees.*	Peraturan standar K3 Bank Riau Kepri *Bank Riau Kepri standard K3 regulations*	Survei Kepuasan Karyawan *Employee Satisfaction Survey*	Pengaduan dapat disampaikan melalui pimpinan secara langsung. *Complaints can be submitted directly through the leadership.*

Core Subject *Core Subject*	Lingkup *Scope*	Kebijakan *Policy*	Mekanisme Pemantauan *Monitoring Mechanism*	Mekanisme Penangangan Keluhan *Mechanism Complaint Handling*
Tanggung Jawab Konsumen *Consumer Responsibility*	- Kemudahan akses informasi dan jaringan layanan perbankan. - Peningkatan kualitas layanan. - Program literasi perbankan. - *Easy access to banking information and network services.* - *Improved service quality.* - *Banking literacy program.*	- SK Direksi Nomor 11/KEP-DIR/2006 tanggal 1 Februari 2006 tentang Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank Riau. - SK Direksi Nomor 27/KEP-DIR/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Perubahan BPP Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - SK nomor 77/KEPDIR/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penanganan Pengaduan Nasabah PT Bank Riau Kepri. - SE Nomor 51/SE/2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentang SLA Penanganan Pengaduan Nasabah PT Bank Riau Kepri. - SK Nomor 009/KEPDIR/2017 Tanggal 30 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penanganan Nasabah PT Bank Riau Kepri. - *Decree of the Board of Directors Number 11/KEPDIR/2006 dated February 1, 2006 concerning Policy for Settlement of Customer Complaints at Bank Riau.* - *Decree of the Board of Directors Number 27/KEPDIR/2008 dated April 7, 2008 concerning Changes in the BPP for the Settlement of Customer Complaints.* - *SK number 77/KEPDIR/2014 dated October 28, 2014 regarding the Company Handbook for Handling Customer Complaints of PT Bank Riau Kepri.* - *SE Number 51/SE/2015 dated December 30, 2015 concerning SLA for Handling Customer Complaints of PT Bank Riau Kepri.* - *SK Number 009/KEPDIR/2017 dated January 30, 2017 regarding the Company Manual for Handling Customers of PT Bank Riau Kepri.*	Survei kepuasan Nasabah *Customer satisfaction survey*	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat Bank Riau Kepri. *Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest Branch Office of Bank Riau Kepri.*
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan *Community Social Development*	Kontribusi kepada masyarakat. *Contribution to society.*	Kebijakan internal terkait pelaksanaan kegiatan CSR Bank Riau Kepri *Internal policies related to the implementation of CSR activities of Bank Riau Kepri*	Laporan pelaksanaan CSR *CSR implementation report*	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat Bank Riau Kepri. *Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest Branch Office of Bank Riau Kepri.*

STAKEHOLDER PENTING YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERUSAHAAN

Bank Riau Kepri mengidentifikasi pemangku kepentingannya berdasarkan kepentingan dan hubungannya dengan Bank. Berdasarkan hasil identifikasi, keterlibatan Pemangku Kepentingan Bank Riau Kepri dapat dilihat pada tabel berikut:

IMPORTANT STAKEHOLDERS WHO IMPACT OR AFFECT ON THE IMPACT OF COMPANY ACTIVITIES

Bank Riau Kepri identifies its stakeholders based on their interests and relationship with the Bank. Based on the identification results, the involvement of Bank Riau Kepri Stakeholders can be seen in the following table:

Pemangku Kepentingan	Topik Utama yang Diajukan
Pemegang Saham *Shareholders*	Kinerja keuangan/kinerja non finansial Bank/informasi terkini tentang aksi dan arahan strategis Bank. *Financial performance/non-financial performance of the Bank/latest information on the Bank's strategic actions and directions.*
Karyawan *Employee*	Kesejahteraan/kesehatan dan keselamatan kerja/pelatihan dan pengembangan. *Welfare/health and safety/training and development.*
Nasabah *Customer*	Pelayanan nasabah/kerahasiaan data nasabah. *Customer service/customer data confidentiality.*
Pemerintah *Government*	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Compliance with applicable laws and regulations.*
Masyarakat *Public*	Kontribusi kepada masyarakat. *Contribution to society.*

ISU SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN PENTING TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Dalam memaparkan isu-isu, data dan informasi terkini yang relevan dengan hak para Pemangku Kepentingan, Bank Riau Kepri melakukan ***Focus Group Discussion*** kepada para pemangku kepentingan. Adapun isu-isu penting pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi
2. Kepatuhan Lingkungan
3. Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja
4. Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepuasan Karyawan
6. Kesejahteraan Masyarakat

IMPORTANT SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES RELATED TO THE IMPACT OF COMPANY ACTIVITIES

In presenting the latest issues, data and information relevant to the rights of the Stakeholders, Bank Riau Kepri conducted a Focus Group Discussion with stakeholders. The important educational, social, cultural, economic and environmental issues are as follows:

1. *Economy*
2. *Environmental Compliance*
3. *Occupational Safety, Security and Health*
4. *education and training*
5. *Employee Satisfaction*
6. *Public welfare*

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BAIK YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Lingkup tanggung jawab sosial Bank Riau Kepri adalah sebagai berikut:

1. Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
2. Hak Azasi Manusia
3. Operasi Yang Adil
4. Lingkungan Hidup
5. Ketenagakerjaan
6. Pemenuhan Kepentingan Nasabah
7. Kemasyarakatan

SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY WHETHER THAT IS A LIABILITY OR EXCEEDS AN OBLIGATION

The scope of social responsibility of Bank Riau Kepri is as follows:

1. *Social Responsibility Governance*
2. *Human rights*
3. *Fair Operation*
4. *Environment*
5. *Employment*
6. *Fulfillment of Customer Interests*
7. *society*

Bank telah melaksanakan berbagai program CSR, baik yang merupakan kewajiban (***mandatory***) maupun melebihi kewajiban (***voluntary***). Rincian kegiatankegiatan tersebut diungkapkan sebagai berikut.

The Bank has implemented various CSR programs, both mandatory and voluntary. The details of these activities are disclosed as follows.

Core Subject *Core Subject*	**Peraturan Terkait** *Related Regulations*
Hak Asasi Manusia *Human rights*	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 2. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. *1. Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.* *2. Bank Indonesia Regulation No. 7/7/PBI/2005 concerning Settlement of Customer Complaints.*
Operasi yang Wajar *Fair Operation*	Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes*
Lingkungan Hidup *Environment*	1. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. 2. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *1. Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.* *2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.*
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja *Employment, Health and Safety*	UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 13 tahun 2013 *The Manpower Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2013*
Konsumen *Consumer*	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 2. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 Tentang perlindungan nasabah. *1. Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector.* *2. Bank Indonesia Regulation No. 7/7/PBI/2005 concerning Settlement of Customer Complaints, which has been amended by PBI No. 10/10/PBI/2008 Regarding customer protection.*
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan *Social and Community Development*	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises .*

Sedangkan lingkup tanggung jawab sosial yang melebihi kewajiban yaitu Bank turut mendukung dan berpartisipasi dalam mencapai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) melalui pelaksanaan aktivitas dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan.

Meanwhile, the scope of social responsibility that exceeds obligations is that the Bank also supports and participates in achieving the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) through the implementation of corporate social responsibility activities and programs.

STRATEGI DAN PROGRAM KERJA DALAM DALAM UPAYA *STEKEHOLDERS ENGAGEMENT* DAN MENINGKATKAN NILAI *STAKEHOLDERS*

STRATEGIES AND WORK PROGRAMS IN THE EFFORT OF STEKHOLDERS ENGAGEMENT AND INCREASING STAKEHOLDERS VALUE

Bank Riau Kepri telah mengidentifikasi pemangku kepentingannya dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dalam upaya ***stakeholders engagement*** dan meningkatkan ***value*** untuk ***stakeholder*** dan ***shareholder.*** Keterlibatan Pemangku Kepentingan Bank Riau Kepri dapat dilihat pada tabel berikut:

Bank Riau Kepri has identified its stakeholders in dealing with social, economic issues in an effort to engage stakeholders and increase value for stakeholders and shareholders. The involvement of Bank Riau Kepri Stakeholders can be seen in the following table:

Tabel Strategi dan Program Kerja Stakeholder Engagement
Tabel of Stakeholder Engagement Strategies and Work Program

Pemangku Kepentingan Stakeholder *Interest*	**Metode Pelibatan** *Engaging Method*	**Frekuensi** *Frequency*
Pemegang saham *Shareholders*	Rapat Umum Pemegang Saham *General Meeting of Shareholders*	Minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. *Minimum 1 (one) time in 1 (one) year.*
Nasabah *Customer*	Pertemuan langsung dengan Nasabah *Direct meeting with customers*	Sesuai dengan kebutuhan *As needed*
Karyawan *Employee*	Gathering *Gathering*	Minimal 1 (satu) tahun sekali *Minimum 1 (one) year*
Mitra Kerja *Work partners*	Proses Operasional *Operational Process*	Sesuai dengan kebutuhan *As needed*
Masyarakat *public*	Penerapan CSR *CSR Implementation*	Sepanjang tahun *year-round*

Di samping itu, strategi dan program kerja tanggungjawab sosial untuk tiap-tiap ***core subject*** tanggung jawab sosial disampaikan sebagai berikut:

1. Hak Asasi Manusia
   Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia yaitu menekankan pada pemenuhan prinsip hak asasi manusia terhadap Pekerja**.** Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia antara lain, pemenuhan hak pekerja dan program-program relevan lainnya.
2. Operasi yang Wajar
   Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil yaitu menekankan pada kegiatan operasional yang sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil antara lain, pengadaan barang dan jasa serta program-program relevan lainnya.

In addition, strategies and work programs for social responsibility for each core subject of social responsibility are presented as follows:

1. *Human rights*
   The strategy in social responsibility related to human rights is to emphasize the fulfillment of human rights principles for workers. Work programs in social responsibility related to human rights include the fulfillment of workers' rights and other relevant programs.

2. *Fair Operation*
   The strategy in social responsibility related to fair operations is to emphasize operational activities that are in accordance with applicable business ethics and business ethics. Work programs in social responsibility related to fair operations, among others, procurement of goods and services as well as other relevant programs.

3. Lingkungan Hidup
   Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup menekankan pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta penghematan energi listrik dan pengurangan emisi. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup antara lain, Penghematan energi listrik dan pengurangan emisi, penghematan penggunaan air, pengelolaan limbah, dan program-program relevan lainnya.
4. Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
   Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja yaitu menekankan pada hubungan industrial yang sehat dan kondusif antara Bank dengan karyawan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja antara lain, program-program kesejahteraan pekerja, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, serta program-program relevan lainnya.
5. Nasabah
   Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait nasabah yaitu menekankan pada upaya perlindungan nasabah serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait nasabah antara lain, kemudahan akses informasi dan jaringan layanan perbankan, peningkatan kualitas layanan nasabah, program literasi perbankan serta program-program relevan lainnya.
6. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
   Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan yaitu menekankan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan antara lain, program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program-program relevan lainnya.

PROGRAM YANG MELEBIHI TANGGUNG JAWAB MINIMAL PERUSAHAAN

Berdasarkan program-program kerja yang telah dijelaskan, beberapa program kerja yang melebihi tanggung jawab minimal di antaranya adalah:

1. Program Undian Tabungan Bank Riau Kepri Bedelau periode II.
2. Langsung Bedelau.
3. Bedelau Koper.

3. Environment
The strategy in social responsibility related to the environment emphasizes the management and protection of the environment as well as saving electrical energy and reducing emissions. Work programs in social responsibility related to the environment include saving electrical energy and reducing emissions, saving water use, waste management, and other relevant programs.

4. Employment, Health and Safety
The strategy in social responsibility related to employment, occupational health and safety is to emphasize healthy and conducive industrial relations between the Bank and employees. Work programs in social responsibility related to employment, occupational health and safety include, among others, worker welfare programs, implementation of health checks, and other relevant programs.

5. Customer
The strategy in customer-related social responsibility is to emphasize efforts to protect customers and improve product and service quality. Work programs in customer-related social responsibility include easy access to information and banking service networks, improvement of customer service quality, banking literacy programs and other relevant programs.

6. Social and Community Development
The strategy in social responsibility related to social and community development is to emphasize sustainable economic development. Work programs in social responsibility related to social and community development include the Partnership and Community Development program (PKBL) and other relevant programs.

PROGRAMS THAT EXCEED THE MINIMUM RESPONSIBILITY OF THE COMPANY

Based on the work programs that have been described, several work programs that exceed the minimum responsibilities include:

1. *Bank Riau Kepri Bedelau Savings Lottery Program period II.*
2. *Direct Bedelau.*
3. *Bedelau Koper.*

ANGGARAN DAN REALISASI BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Bank Riau Kepri memandang CSR sebagai sebuah investasi dalam jangka panjang, sehingga perencanaan harus diperhitungkan secara matang guna kelancaran realisasi semua program CSR dan pencapaian targetnya. Faktor penting dari pelaksanaan program CSR adalah tersedianya dana atau anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan CSR.

BUDGET AND COST REALIZATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank Riau Kepri views CSR as an investment in the long term, so that planning must be carefully considered for the smooth realization of all CSR programs and achieving their targets. An important factor in implementing CSR programs is the availability of funds or budgets that are specifically allocated for CSR activities.

Tabel Rekap Data Realisasi Program Kemitraan dan Program Dana Bantuan Kemasyarakatan Bank Riau Kepri Tahun 2021
Table of Data Recap of Realization of Partnership Program and Community Assistance Fund Program of Bank Riau Kepri in 2021

Anggaran Program Kemitraan Rp 21 Milyar
Partnership Program Budget IDR 21 Billion

Kegiatan	Biaya	*Activity*
Keagamaan	8.171.215.900	*Religious*
Adat/Budaya/Seni	378.130.200	*Custom/Culture/Art*
Sosial	3.427.424.189	*Social*
Pendidikan	3.028.037.690	*Education*
Lingkungan Hidup	129.742.000	*Environment*
Pemuda dan Olahraga	49.980.000	*Youth and Sports*
Jumlah	**15.184.529.979**	***Total***
Kegiatan tahun sebelumnya yang selesai di tahun 2021	9.209.847.669	
Jumlah	**24.394.377.648**	***Total***

Tabel Realisasi Program Dana Bantuan Kemasyarakaran Tahun 2021
Table of Realization of Community Assistance Fund Program in 2021

Anggaran Program Dana Bantuan Kemasyarakaran Rp 5,1 Milyar
The Community Assistance Fund Program Budget is IDR 5.1 Billion

Kegiatan	Biaya	*Activity*
Keagamaan	583.735.000	*Religious*
Kesehatan	159.000.000	*Health*
Sosial	77.209.500	*Social*
Pendidikan	119.000.000	*Education*
Lingkungan Hidup	24.180.000	*Environment*
Cabang/Capem/Lain-lain	2.225.750.500	*Branch/Capem/Others*
Jumlah	**3.188.875.000**	***Total***

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social responsibility Related to Human Rights

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Bank Riau Kepri memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Bank Riau Kepri juga memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, ***gender***, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan calon pekerja.

LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi perlakuan/tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi Serikat Pegawai, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerja jika ada sesuatu hal.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran operasional Bank dan Tidak diterimanya laporan terkait pelanggaran HAM.

PELAKSANAAN DAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Setiap tahun, Bank Riau Kepri senantiasa menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam program kerja yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Bank Riau Kepri (RKAP). Program kerja tersebut ditujukan untuk menjamin proses kerja di Bank Riau Kepri telah

COMMITMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY IN HUMAN RIGHTS SECTOR

Bank Riau Kepri has a full commitment to the enforcement of Human Rights (HAM). The scope of social responsibility related to human rights includes preventing acts of discrimination, freedom of association, working time arrangements, permits due to emergency conditions, and opportunities to practice worship. Bank Riau Kepri also provides equal rights and opportunities to work regardless of differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions, including the appointment of prospective workers.

SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR HUMAN RIGHTS

The scope of the Company's social responsibilities related to Human Rights, which is related to employment includes discrimination treatment/actions, recognition and guarantees for the Employee Union, the right to work time, annual leave, permission to rest in case of childbirth/ miscarriage or sick due to menstruation, permission to worship as well as permission to leave the worker if there is something wrong.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PLANNING FOR HUMAN RIGHTS

Establishing a harmonious working relationship and in accordance with the provisions of the legislation; Creating a conducive working environment to support the smooth operation of the Bank and not receiving reports related to human rights violations.

IMPLEMENTATION AND INITIATIVES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN HUMAN RIGHTS SECTOR

Every year, Bank Riau Kepri always prepares activity plans as outlined in the work program contained in the Work Plan and Budget of Bank Riau Kepri (RKAP). The work program is intended to ensure that the work process at Bank Riau Kepri also pays attention to the implementation of human rights,

memperhatikan juga implementasi HAM antara lain pengalokasian biaya untuk kegiatan-kegiatan pegawai.

Waktu Kerja

1. Memperhatikan kelancaran operasional Bank, kerja lembur dapat dilaksanakan dengan persetujuan bersama antara Bank Riau Kepri dengan Pegawai guna menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan untuk itu Bank Riau Kepri akan membayar upah kerja lembur kepada Pegawai.
2. Waktu Kerja Lembur disesuaikan dengan kebutuhan operasional Bank dan Bank menetapkan fasilitas lembur. Terhadap besarnya upah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bagi pegawai ***teller, customer service***, dan pegawai operasional lainnya pada jam istirahat tetap melayani nasabah, selanjutnya waktu istirahat dapat diatur secara bergilir dengan rekan sekerja lainnya.
4. Khusus bagi pegawai wanita yang menyusui, telah diberikan kesempatan yang sepatutnya untuk melakukan laktasi dan atau menyusui anaknya selama waktu kerja.

Izin Pernikahan

1. Bagi pegawai yang akan melangsungkan pernikahan harus mengajukan izin tertulis kepada Direksi melalui unit kerja dengan ketentuan bagi pegawai pria untuk istri pertama, bagi pegawai wanita menjadi istri pertama dengan menyebutkan identitas calon istri/ suami.
2. Permohonan izin tersebut harus melampirkan Surat Keterangan Belum Menikah atau yang bisa dipersamakan dari kantor kelurahan/kepala desa dari instasi berwenang lainnya bagi pegawai atau calon yang memiliki status belum pernah melakukan perkawinan.
3. Permohonan izin secara tertulis diajukan selambatlambatnya 15 hari sebelum melaksanakan pernikahan.

Cuti Tahunan

1. Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja di Bank selama 1 (satu) tahun secara terus menerus.
2. Selama menjalani masa cuti tahunan, Pegawai tetap menerima gaji penuh.
3. Lamanya cuti tahunan ditentukan berdasarkan jabatan Pegawai yang diatur oleh Bank.
4. Ketentuan pelaksanaan cuti tahunan diatur oleh Bank.
5. Hak cuti tahunan dilaksanakan berdasarkan permintaan pegawai dan/atau penugasan oleh Bank dan disesuaikan dengan beban kerja/kebutuhan Bank.

including the allocation of costs for employee activities.

Working time

1. *Taking into account the smooth operation of the Bank, overtime work can be carried out with mutual agreement between Bank Riau Kepri and employees in order to complete work that cannot be delayed and for that Bank Riau Kepri will pay overtime wages to employees.*
2. *Overtime Working Time is adjusted to the operational needs of the Bank and the Bank determines the overtime facility. The amount of wages refers to the applicable laws and regulations.*
3. *For teller employees, customer service, and other operational employees during break times they continue to serve customers, then rest periods can be arranged in rotation with other co-workers.*
4. *Especially for female employees who are breastfeeding, have been given appropriate opportunities to do lactation and or breastfeed their children during working hours.*

Marriage Permit

1. *For employees who are going to get married, they must apply for written permission to the Board of Directors through the work unit with provisions for male employees to be the first wife, for female employees to be the first wife by stating the identity of the prospective wife/husband.*
2. *The permit application must attach a Certificate of Unmarried or an equivalent from the kelurahan office/ village head from another authorized institution for employees or candidates who have never married status.*
3. *A written request for permission must be submitted at least 15 days before the wedding.*

Annual leave

1. *Annual leave is given to employees who have worked at the Bank for 1 (one) year continuously.*
2. *During the annual leave period, employees continue to receive their full salary.*
3. *The length of annual leave is determined based on the position of the employee as regulated by the Bank.*
4. *Provisions for the implementation of annual leave are regulated by the Bank.*
5. *Annual leave entitlements are implemented based on employee requests and/or assignments by the Bank and adjusted to the Bank's workload/needs by the Bank and adjusted to the Bank's workload/needs.*

6. Bagi pegawai yang mengajukan rencana cuti tahunan namun ditolak oleh kepala unit kerja yang bersangkutan, maka diwajibkan kepada kepala unit dimaksud untuk memberikan alasan penolakannya secara tertulis dan ditembuskan ke unit kerja Divisi Manajamen Sumber Daya manusia.

Izin Menjalankan Ibadah

Bank Riau Kepri senantiasa memberikan ijin kepada Pegawai untuk menjalankan ibadah yang ketentuan pelaksanaannya diatur oleh Bank Riau Kepri, termasuk izin untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Izin Meninggalkan Pekerjaan

Setiap pegawai yang berhalangan hadir di kantor karena alasan apapun wajib memberitahukan hal tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan pada hari yang bersangkutan. Dalam hal pemberitahuan secara lisan, harus disusun pemberitahuan secara tertulis kepada atasannya paling lambat pada kesempatan pertama masuk kantor. Izin meninggalkan pekerjaan diberikan pada saat:

1. Peristiwa khusus yaitu pernikahan pegawai, pegawai menikahkan anak, suami/istri/anak/menantu/orang tua/ mertua/anggota dalam satu rumah meninggal dunia, kelahiran anak, istri pegawai mengalami keguguran kandungan, khitanan anak, dan lain-lain.
2. Sakit, yaitu sakit dengan surat dokter selama maksimum 3 (tiga) hari, sakit tanpa surat dokter selama 1 (satu) hari dan sakit dengan rawat inap.
3. Keperluan pribadi yang penting, mendadak dan tidak dapat diwakilkan.

Bank Riau Kepri telah mengatur ketentuan pelaksanaan ijin meninggalkan pekerjaan.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG HAK AZASI MANUSIA

Dengan memberikan izin cuti dan menjamin pelaksanaan ibadah masing-masing pegawai, berdampak pada peningkatan kinerja karyawan serta kesungguhan dalam bekerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM, Bank Riau Kepri dapat meningkatkan keharmonisan dalam kegiatan operasional Bank. Selain itu, para karyawan akan merasa nyaman berada di lingkungan Bank. Hal ini berdampak pada meningkatnya survei kepuasan karyawan. Pada tahun 2021, Bank Riau Kepri belum mendapatkan penghargaan terkait hak asasi manusia.

6. For employees who submit an annual leave plan but are rejected by the head of the work unit concerned, it is required for the head of the unit to provide the reasons for his refusal in writing and copy it to the Human Capital work unit.

Permission to Run Worship

Bank Riau Kepri always gives permission to employees to carry out worship whose implementation provisions are regulated by Bank Riau Kepri, including permits to carry out Hajj and Umrah.

Permission to Leave Work

Every employee who is unable to attend the office for any reason is required to notify this matter either in writing or orally on the day concerned. In the case of verbal notification, a written notification must be prepared to his superior no later than the first opportunity to enter the office. Permission to leave work is granted when:

1. *Special events are employee marriages, employees marry off children, husband/wife/child/son-in-law/parent/in-law/member in one house dies, child is born, employee's wife experiences miscarriage, child circumcision, and others.*
2. *Sickness, namely illness with a doctor's letter for a maximum of 3 (three) days, illness without a doctor's letter for 1 (one) day and illness with hospitalization.*
3. *Important personal needs, sudden and cannot be represented.*

Bank Riau Kepri has set the conditions for the implementation of the permit to leave work.

ACHIEVEMENTS AND AWARDS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES IN HUMAN RIGHTS SECTOR

By giving leave permits and guaranteeing the implementation of worship for each employee, it has an impact on increasing employee performance and seriousness in work. By applying the principles of human rights, Bank Riau Kepri can improve harmony in the Bank's operational activities. In addition, employees will feel comfortable in the Bank's environment. This has an impact on increasing employee satisfaction surveys. In 2021, Bank Riau Kepri has not yet received an award related to human rights.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG WAJAR

Corporate Social Responsibility Related To Reasonable Operations

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG WAJAR

Sebagai salah satu perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Bank Riau Kepri memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. Bank Riau Kepri telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil diantaranya kebijakan pengendalian internal, ***Whistleblowing System*** (WBS), ***Code of Conduct***, dan kebijakan gratifikasi. Kebijakan tersebut khususnya ditujukan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat. Ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang ditekankan oleh Bank Riau Kepri saat ini adalah pencegahan benturan kepentingan, penerapan anti korupsi, kompetisi yang sehat, dan pencegahan perilaku insiders. Penerapan anti korupsi diwujudkan melalui pelaksanaan WBS, ***Code of Conduct*** dan Kebijakan Gratifikasi.

FAIR OPERATIONS COMMITMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY

As a manifestation of the implementation of good corporate governance, Bank Riau Kepri is committed to always implementing fair operating practices. Bank Riau Kepri already has various policies that regulate fair operations including internal control policies, Whistleblowing System (WBS), Code of Conduct, and gratification policies. This policy is specifically aimed at preventing conflicts of interest and implementing healthy business activities. The scope of the implementation of social responsibility related to fair operating practices that are currently emphasized by Bank Riau Kepri are prevention of conflicts of interest, application of anti-corruption, healthy competition, and prevention of insider behavior. Anti-corruption implementation is realized through the implementation of WBS, Code of Conduct and Gratification Policy.

RUMUSAN DAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG WAJAR

Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil meliputi pencegahan benturan kepentingan, implementasi ***Whistleblowing System*** dan ***Code of Conduct***, larangan perilaku insiders serta hubungan dengan organisasi lain.

FORMULATION AND SCOPE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FIELD OF REASONABLE OPERATION

The scope of social responsibility activities related to fair operations includes prevention of conflicts of interest, implementation of the Whistleblowing System and Code of Conduct, prohibition of insiders behavior and relationships with other organizations.

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG OPERASI YANG WAJAR

Bank Riau Kepri senantiasa mentargetkan dalam perencanaan tahunannya untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan Bank Riau Kepri dan peraturan yang berlaku.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PLANNING FOR FAIR OPERATIONS

Bank Riau Kepri always targets in its annual planning to ensure the implementation of all fair operating practice policies. Any violations that occur will be subject to strict sanctions in accordance with Bank Riau Kepri policies and applicable regulations.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG WAJAR

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang secara konsisten dilaksanakan oleh Bank Riau Kepri meliputi hal-hal berikut ini:

IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES IN FAIR OPERATIONS

The implementation of social responsibility related to fair operating practices consistently carried out by Bank Riau Kepri includes the following:

Pencegahan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interests*)

Bank Riau Kepri melalui penerapan kode etik telah menegaskan kembali Larangan Pencegahan/Anti Korupsi dan Gratifikasi bagi seluruh jajaran Bank Riau Kepri. Hal ini terkait dengan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan, yang antara lain mengatur mengenai conflict of interest, larangan penyalahgunaan jabatan dan pengaturan integritas karyawan Bank sangat menyadari perlunya menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan nasabah, rekanan dan seluruh stakeholder dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan yang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menciptakan budaya anti korupsi.

Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon) komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sanksi pelanggaran bagi yang melakukan gratifikasi adalah:

1. Setiap orang yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi, baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau UPG, secara hukum dapat diancam pidana sebagai pemberi suap, sepanjang unsurunsur pasal bagi pemberi suap, yaitu: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi.
2. Dalam hal penerima gratifikasi tidak melaporkan barang gratifikasi yang telah diterimanya sesuai jangka waktu yang telah diatur di atas, maka penerimaan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan.
3. Bagi insan Bank yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan penerimaan tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
4. Ketentuan sanksi atas tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UPG Bank Riau Kepri.

Prevention of Conflict of Interests

Bank Riau Kepri through the implementation of the code of ethics has reaffirmed the Prohibition of Prevention/Anti-Corruption and Gratification for all levels of Bank Riau Kepri. This is related to the shared commitment as stated in the Code of Ethics and Corporate Cultural Values, which among others regulates conflicts of interest, prohibits abuse of office and regulates employee integrity. The Bank is very aware of the need to maintain good cooperative relationships with customers, partners and all stakeholders. by paying attention to ethics and avoiding things that lead to actions that are categorized as gratification and creating an anti-corruption culture.

Abuse of Position and Gratification

Gratification is a gift in a broad sense, which includes the provision of money, goods, commission rebates (discounts), interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment and other facilities. The gratuities are received both domestically and abroad and which are carried out using electronic means or without electronic means. Sanctions for violations for those who do gratification are:

1. *Everyone who gives gratification to the recipient of gratification, whether the recipient of gratification reports or does not report the gratification he has received to the Corruption Eradication Commission or UPG, can be legally threatened with a criminal offense as a bribe giver, as long as the elements of the article for the bribe giver are: Article 5 paragraph (1) and Article 13 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption are fulfilled.*
2. *In the event that the recipient of the gratuity does not report the gratuity that has been received according to the period stipulated above, the acceptance is considered a bribe until proven otherwise in court.*
3. *Bank personnel who receive gratuities and do not report the receipts are threatened with life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years, and a minimum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).*
4. *The provisions of the above sanctions do not apply if the recipient of the gratuity reports the gratuity he received to the Corruption Eradication Commission (KPK) through the UPG Bank Riau Kepri.*

Implementasi *Whistleblowing System*

Dalam rangka penyelenggaraan operasional bank yang sehat dan penerapan tata kelola yang baik, seluruh pegawai/pejabat Bank Riau Kepri wajib melaporkan setiap dugaan tindakan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Bank. Kebijakan ***whistleblowing*** diimplementasikan untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank Riau Kepri untuk melaporkan fraud yang terjadi. Lingkup pengaduan meliputi:

a. Perbuatan ***fraud***.
b. Pelanggaran kode etik antara lain meliputi:
   - Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau dokumen.
   - Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar bank.
   - Menginformasikan/mengungkapkan rahasia nasabah dan bank.
   - Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau mengakibatkan kerugian bank.
   - Penyelewengan uang/kas bank.
   - Penggelapan aset dan/atau inventaris bank.
   - Pemerasan.
   - Perbuatan Asusila.

CAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG OPERASI YANG WAJAR

Komitmen Bank Riau Kepri dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil telah meningkatkan kepercayaan para ***stakeholders*** kepada Bank Riau Kepri. Dengan meningkatnya kepercayaan dari ***stakeholder*** diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bank. Sampai dengan tahun 2021, Bank tidak dikenakan sanksi dalam perkara hukum serta diakuinya kinerja Bank oleh pihak eksternal. Sampai dengan Desember 2021, Bank Riau Kepri belum memiliki penghargaan terkait operasi yang wajar.

Whistleblowing System Implementation

In the context of implementing sound bank operations and implementing good governance, all employees/officers of Bank Riau Kepri are required to report any alleged irregularities that occur within the Bank. The whistleblowing policy was implemented to provide encouragement and awareness to Bank Riau Kepri employees and officials to report fraud that occurred. The scope of the complaint includes:

a. Acts of fraud.
b. Violations of the code of ethics include, among others:
   - *Misuse and falsification of data and/or documents.*
   - *Misuse of position for personal/group interests or other interests outside the bank.*
   - *Inform/disclose customer and bank secrets.*
   - *Acceptance and/or granting of gratuities that may influence decision-making and/or result in bank losses.*
   - *Misappropriation of money/bank cash.*
   - *Embezzlement of bank assets and/or inventory.*
   - *Extortion.*
   - *Immoral acts.*

ACHIEVEMENTS AND AWARDS OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF REASONABLE OPERATIONS INITIATIVE

The commitment of Bank Riau Kepri in implementing social responsibility related to fair operating practices has increased the trust of stakeholders to Bank Riau Kepri. With increased trust from stakeholders, it is expected to improve the Bank's performance. Until 2021, the Bank is not subject to sanctions in legal cases and the Bank's performance is recognized by external parties. As of December 2021, Bank Riau Kepri does not yet have an award related to fair operations.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility Related To The Environment

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Institusi perbankan merupakan entitas bisnis yang menyediakan berbagai kebutuhan keuangan dalam bentuk jasa perbankan. Sebagai sebuah entitas bisnis, dampak terhadap berbagai aspek atas keberlanjutan organisasi menjadi sebuah perhatian yang penting. Dampak sosial dan ekonomi sangat erat, namun bukan berarti dampak akan lingkungan bukan menjadi perhatian utama, jika melihat operasional jasa perbankan tidak langsung merusak lingkungan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) adalah komitmen Bank untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Bank sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat pada umumnya. Beberapa program peduli lingkungan telah dilaksanakan Bank Riau Kepri. Program Peduli lingkungan tersebut dibagi kedalam dua kelompok, yaitu: program internal dan external.

Sebagai salah satu penerapan keuangan berkelanjutan, Bank Riau Kepri telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik di internal maupun eksternal.

COMMITMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR

Banking institutions are business entities that provide various financial needs in the form of banking services. As a business entity, the impact on various aspects of organizational sustainability becomes an important concern. The social and economic impacts are very close, but that does not mean that the impact on the environment is not a major concern, considering that banking service operations do not directly damage the environment.

The implementation of corporate social responsibility towards the environment is a follow-up to the provisions in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, namely Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) is the Bank's commitment to participate in sustainable economic development in order to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Bank itself, the local community, and society in general. Several environmental care programs have been implemented by Bank Riau Kepri. The Environmental Care Program is divided into two groups, namely: internal and external programs.

As one of the implementations of sustainable finance, Bank Riau Kepri already has several policies related to environmental aspects, both internally and externally.

DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup oleh Bank Riau Kepri juga dapat memberikan dampak dan risiko pada lingkungan. Risiko tersebut yaitu, jika Bank memberikan fasilitas kredit kepada nasabah menggunakan fasilitas tersebut ke dalam usaha yang dapat mencemari dan juga merusak lingkungan. Dalam hal ini, Bank harus melakukan seleksi dalam memberikan kredit agar kredit yang diberikan tersebut dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena berkembangan Bank tergantung pada fasilitas kreditnya.

ENVIRONMENTAL IMPACTS AND RISKS

The implementation of social responsibility related to the environment by Bank Riau Kepri can also have an impact and risk on the environment. The risk is, if the Bank provides credit facilities to customers using these facilities in a business that can pollute and also damage the environment. In this case, the Bank must make a selection in providing credit so that the credit provided can participate in environmental management, because the development of the Bank depends on the credit facility.

TARGET/RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Terjadinya efisiensi di lingkungan internal Bank Riau Kepri sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan profit kepada Bank dengan menekan biaya operasional.

TARGET/PLAN OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR

The occurrence of efficiency in the internal environment of Bank Riau Kepri so that in the end it can increase profits to the Bank by reducing operational costs. As for external

Sedangkan untuk kegiatan eksternal, dapat dijalin hubungan yang baik antara masyarakat dan Bank, sehingga citra Bank Riau Kepri di masyarakat dapat terjaga.

KEGIATAN LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL PERUSAHAAN

Wujud dukungan Bank Riau Kepri terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup tercermin dalam setiap kegiatan Bank baik itu operasional di kantor pusat maupun kegiatan bisnisnya, antara lain sebagai berikut.

PEDULI LINGKUNGAN INTERNAL

Bank Riau Kepri terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Bank termasuk kinerja kami pada lingkungan. Oleh sebab itu, Bank Riau Kepri senantiasa menerapkan peduli lingkungan di lingkungan operasional Bank. Bank menyadari, efisiensi energi dan air tidak hanya baik untuk keberlanjutan lingkungan, namun juga sebagai salah satu upaya penghematan biaya perusahaan dalam menghadapi perlambatan ekonomi. Bank Riau Kepri membuat kebijakan terkait lingkungan internal yaitu melalui program Bank Riau Kepri ***Go Green***. Melalui program Bank Riau Kepri ***Go Green*** ini, seluruh pegawai diminta untuk peduli akan 5 (lima) hal, yakni:

- Gunakan air sehemat mungkin;
- Nyalakan listrik jika diperlukan;
- Tanam pohon sebanyak mungkin;
- Gunakan bahan yang mudah didaur ulang;
- Buang sampah pada tempatnya.

Selain hal tersebut, manajemen telah menentukan kebijakan antara lain hemat penggunaan listrik terutama di gedung kantor pusat Bank Riau Kepri dimana seluruh bagian gedung akan dimatikan saat jam 18.00 sore untuk penghematan. Selain itu dalam melaksanakan rapat sudah jarang digunakan kertas dalam menduplikasi bahan rapat melainkan dengan presentasi melaui TV atau Infocus, selain itu dalam penggunaan kertas juga diminimalisasi dengan penggunaan email dan kertas yang sudah terpakai untuk dimanfaatkan sisi yang masih bisa digunakan.

MENARA BANK RIAU KEPRI HEMAT ENERGI

Di tengah krisis energi global ini, di mana suplai energi makin langka dan mahal, membangun gedung besar berarti menambah konsumsi energi dalam jumlah besar pula. Energi yang terbatas tersebut perlu dibagi secara bijak antara lain dengan menerapkan prinsip gedung hemat energi.

Gedung hemat energi adalah gedung yang menggunakan lebih sedikit energi tanpa mengurangi kualitas layanan energi. Sekitar 45% energi primer di Indonesia dikonsumsi

activities, a good relationship can be established between the community and the Bank, so that the image of Bank Riau Kepri in the community can be maintained.

ENVIRONMENTAL ACTIVITIES RELATED TO COMPANY OPERATIONAL ACTIVITIES

The form of Bank Riau Kepri's support for environmental preservation is reflected in each of the Bank's activities, both operational at the head office and business activities, including the following.

CARE FOR THE INTERNAL ENVIRONMENT

Bank Riau Kepri continues to strive to improve the Bank's performance, including our performance on the environment. Therefore, Bank Riau Kepri always applies environmental care in the Bank's operational environment. The Bank realizes that energy and water efficiency is not only good for environmental sustainability, but also as an effort to save the company's costs in the face of an economic slowdown. Bank Riau Kepri makes policies related to the internal environment, namely through the Bank Riau Kepri Go Green program. Through the Bank Riau Kepri Go Green program, all employees are asked to care about 5 (five) things, namely:

- *Use water sparingly;*
- *Turn on the power if needed;*
- *Plant as many trees as possible;*
- *Use materials that are easily recyclable;*
- *Throw garbage in its place.*

In addition to this, management has determined policies, including saving electricity use, especially in the Bank Riau Kepri head office building where all parts of the building will be turned off at 18.00 pm for savings. In addition, in conducting meetings, paper is rarely used in duplicating meeting materials, but with presentations via TV or Infocus, besides that, the use of paper is also minimized by using email and paper that has been used to use the side that can still be used.

RIAU KEPRI BANK TOWER SAVES ENERGY

In the midst of this global energy crisis, where energy supplies are increasingly scarce and expensive, building large buildings means increasing energy consumption in large quantities as well. This limited energy needs to be distributed wisely, among others, by applying the principle of energy-efficient buildings.

Energy efficient buildings are buildings that use less energy without compromising the quality of energy services. Around 45% of primary energy in Indonesia is consumed by

oleh bangunan, sehingga sektor bangunan bertanggung jawab terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) dalam proporsi siginifikan. Dengan menggunakan peralatan listrik efisiensi tinggi, dinding gedung yang keseluruhan mengunakan kaca membuat sistem pencahayaan yang mengkonsumsi sekitar 20 persen listrik di gedung perkantoran dapat dibuat efisien.

Begitu juga, sistem pengkondisi udara (AC) yang biasanya mendominasi konsumsi listrik di gedung perkantoran, disesuaikan dengan karakteristik gedung sehingga lebih hemat energi. Hal sama dapat diterapkan pada motor listrik (pada eskalator dan lift) yang hanya aktif ketika digunakan. Melalui implementasi hemat energi pada desain dan operasional bangunan Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, pengelola bangunan akan meraih keuntungan finansial besar, ikut membantu mengurangi emisi GRK, dan terlibat aktif menjaga suplai listrik di Propinsi Riau. Dari aspek lingkungan hidup, menghemat energi berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fossil sehingga mengurangi emisi GRK penyebab pemanasan global.

Penanaman Pohon Mangrove

Sebagai upaya kontribusi dalam lingkungan hidup, kami pada tahun 2021 melakukan Penanaman mangrove di kab Indragiri Hilir sebanyak 10 ribu bibit pohon selain itu melakukan penanaman pohon yang dilakukan karyawan Bank Riau Kepri sebanyak 1 pohon tiap karyawan di seluruh area Kantor Cabang Bank Riau Kepri.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Pada tahun 2021, Bank Riau Kepri melaksanakan Program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah program Layanan Kesehatan Masyarakat Keliling yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2021 Program ini dilaksanakan pada 5 (lima) titik lokasi, yakni 3 (tiga) titik lokasi di daratan Provinsi Riau dan 2 (dua) titik di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat selama masa pademi COVID-19 dan bagi perusahaan memberikan ***Awareness*** kepada ***stakeholder*** dan lingkungan setempat.

buildings, so the building sector is responsible for greenhouse gas (GHG) emissions in a significant proportion. By using high-efficiency electrical equipment, the walls of the building are entirely made of glass, making the lighting system that consumes about 20 percent of the electricity in an office building efficient.

Likewise, the air conditioning system (AC), which usually dominates electricity consumption in office buildings, is adjusted to the characteristics of the building so that it is more energy efficient. The same can be applied to electric motors (on escalators and elevators) which are only active when in use. Through the implementation of energy saving in the design and operation of the Dang Merdu Tower building at Bank Riau Kepri, the building manager will gain huge financial benefits, help reduce GHG emissions, and be actively involved in maintaining the electricity supply in Riau Province. From the environmental aspect, saving energy means reducing the burning of fossil fuels, thereby reducing GHG emissions that cause global warming.

Mangrove Tree Planting

As an effort to contribute to the environment, in 2021 we will plant mangroves in the downstream Indragiri Hilir district as many as 10 thousand tree seedlings in addition to planting trees by Bank Riau Kepri employees as many as 1 tree per employee in all areas of the Riau Kepri bank branch office.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR

SUSTAINABLE FINANCE APPLICATION

In 2021, Bank Riau Kepri will implement the Sustainable Finance Action Plan Program. One of the activities carried out is the Mobile Community Health Service program which will be held in December 2021. This program is carried out at 5 (five) location points, namely 3 (three) location points on the mainland of Riau Province and 2 (two) points in the Riau Archipelago Province. . This activity is expected to provide great benefits to the community during the COVID-19 pandemic and for companies to provide Awareness to stakeholders and the local environment.

PEDULI LINGKUNGAN EXTERNAL

Selain program internal, Bank Riau Kepri juga turut dalam beberapa program peduli lingkungan yang melibatkan pihak eksternal. Program CSR dibidang lingkungan hidup telah dilaksanakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Program Kemitraan) dan Organisasi/LSM/ Masyarakat (Dana Bantuan Kemasyarakatan), beberapa program yang telah dilaksanakan lebih terfokus dalam kegiatan yang segera dilaksanakan dan tidak berkelanjutan antara lain dalam peduli lingkungan seperti Pemberian Alat Pemadam Api ***Portable***, pemberian Tong Sampah, Truk Sampah dan lainnya namun tidak ada program keberlanjutannya. Pemberian CSR tersebut lebih kepada permintaan dari Pemerintah Daerah atau Organisasi/ LSM/Masyarakat.

CARE FOR THE EXTERNAL ENVIRONMENT

In addition to internal programs, Bank Riau Kepri also participates in several environmental care programs that involve external parties. CSR programs in the environmental field have been implemented in collaboration with the Regional Government (Partnership Program) and Organizations/NGOs/Society (Community Assistance Funds), several programs that have been implemented are more focused on activities that are immediately implemented and are not sustainable, among others in environmental care such as the Provision of Equipment Portable Fire Extinguishers, Trash Cans, Garbage Trucks and others but there is no sustainability program. The provision of CSR is more at the request of the Regional Government or Organizations/NGOs/Communities.

CAPAIAN DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bidang Lingkungan Hidup telah memberikan dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di lingkungan Bank Riau Kepri dan juga sekitar Bank.

ACHIEVEMENTS OF QUANTITATIVE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR

The implementation of Corporate Social Responsibility in the field of Environment has had an impact on the improvement and improvement of the quality of the environment in the Riau Kepri Bank environment and also around the Bank.

SERTIFIKASI DI BIDANG LINGKUNGAN

Sampai dengan tahun 2021 , Bank Riau Kepri belum memiliki sertifikasi di bidang lingkungan.

CERTIFICATION IN THE ENVIRONMENT

Until 2021, Bank Riau Kepri does not yet have certification in the environmental field.

SALURAN PENGADUAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Saluran pengaduan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup berada di divisi CSR, selama 2021 tidak ada pengaduan terkait hal tersebut.

SOCIAL RESPONSIBILITY COMPLAINTS CHANNELS RELATED TO THE ENVIRONMENT

The social responsibility complaint channel related to the environment is in the CSR division, during 2021 there will be no complaints related to this.

Vaksinasi masal pegawai BRK dan masyarakat sebanyak 10 rb dosis dan	Mass vaccination of BRK employees and the public is 10 thousand doses and the second stage is 3 thousand doses



BRK memiliki Klinik Amanah tersedia dokter perawat PCR antigen untuk pegawai BRK	*BRK has a trustworthy clinic, available doctors, nurses, PCR antigen for BRK employees*



KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

K3 (Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) adalah sebuah konsep untuk mencapai kondisi keselamatan yang bebas dari kecelakaan dan kerusakan dimana para karyawan bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi peralatan, keselamatan, dan kondisi karyawan sebagai pekerjanya. Yang paling utama adalah bagaimana perusahaan membuat sistem dan kebijakan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja biasanya adalah:

1. ***Unsafe Action***: Tindakan Membahayakan
2. ***Unsafe Condition***: Kondisi Membahayakan
3. ***Factor*** X: Faktor diluar kemampuan manusia

Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikemukakan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja disebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas "Keselamatan dan kesehatan kerja".

COMMITMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY IN THE FIELD OF EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

K3 (Employment, Occupational Health and Safety) is a concept to achieve safety conditions that are free from accidents and damage where employees work which includes building conditions, equipment conditions, safety, and employee conditions as workers. The most important thing is how the company makes systems and policies to avoid accidents at work. The causes of work accidents are usually:

1. *Unsafe Action: Harmful Action*
2. *Unsafe Condition: Dangerous Condition*
3. *Factor X: Factors beyond human capabilities*

In Law No. 1 of 1970 and Law no. 13 of 2003 concerning employment, it is stated that occupational safety and health states that every worker has the right to obtain protection for "occupational safety and health".

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Lingkup kegiatan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja antara lain meliputi berbagai program ketenagakerjaan. Selain itu, dalam lingkup kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja, Bank memiliki program untuk memberikan fasilitas kesehatan serta memberikan jaminan keselamatan kerja kepada seluruh karyawan.

SCOPE AND FORMULATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF LABOR, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

The scope of employment, occupational health and safety activities includes various employment programs. In addition, within the scope of occupational health and safety activities, the Bank has a program to provide health facilities and provide work safety guarantees to all employees.

RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Semua karyawan Bank Riau Kepri dapat memahami prosedur dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga jika pada suatu saat nanti terjadi kondisi ***force majure***, maka semua karyawan dapat melakukan tindakan yang benar demi keselamatan diri

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES PLAN FOR EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

All employees of Bank Riau Kepri can understand occupational safety and health management procedures and systems, so that if one day a force majeure condition occurs, all employees can take the right action for personal and environmental safety (safety officer). This is where the

dan lingkungan (***safety oficer***). Di sinilah pentingnya keberadaan ***safety oficer*** yang bertanggung jawab menakar risiko dan memberikan solusi atas permasalahan K3.

KEGIATAN DAN DAMPAK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN

KESETARAAN DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pada tahun 2021 dilakukan penyempurnaan jalur karir berbasis manajemen talenta dengan penyempurnaan aturan dan kebijakan jalur karir pegawai atau Career Path Manajemen. Pengembangan sistem E-learning yang terus dilanjutkan dalam pengelolaan knowledge management, Pengembangan Learning Center yang menjadi wadah bagi pegawai dalam pembelajaran baik melalui e-learning maupun inhouse training dengan menyiapkan kurikulum dan silabus (pendidikan yang terprogram) serta instruktur internal yang handal di bidangnya. Database kepegawaian juga terus dilakukan penyempurnaan sistem informasi mengenai kepegawaian.

Selama tahun 2021, Bank Riau Kepri telah menyelenggarakan 222 pelatihan/training baik itu yang berupa inhouse dan Pelatihan Ekstern Dalam Negeri yang dikuti oleh 10.356 pegawai. Bank Riau Kepri memberikan kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengoptimalkan potensi diri dan keahliannya dengan mengikuti berbagai pendidikan, kursus dan pelatihan. Seluruh program pelatihan dan pengembangan SDM yang diselengarakan oleh Bank Riau Kepri disesuaikan dengan standar kompetensi yang diinginkan, guna memenuhi kebutuhan bisnis dan suksesi SDM Bank Riau Kepri di masa depan.

Program Kesejahteraan Pegawai

Bank Riau Kepri senantiasa memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan berusaha memfasilitasi kebutuhan pegawai. Program peningkatan kesejahteraan pegawai yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, antara lain melalui materi maupun nonmaterial. Kesejahteraan pegawai secara material berkaitan langsung dengan prestasi pegawai, dan dapat diberikan berupa kenaikan gaji pegawai, kenaikan tunjangan pegawai, pemberian bonus, serta memberikan penghargaan pegawai berprestasi.

importance of having a safety officer who is responsible for measuring risks and providing solutions to K3 problems is.

ACTIVITIES AND IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN EMPLOYMENT, HEALTH AND SAFETY

LABOR AND HEALTH ACTIVITIES AND QUANTITATIVE IMPACT

EQUALITY IN EDUCATION AND TRAINING PROGRAM

In 2021, there will be improvements to the talent management-based career path by improving the rules and policies of the employee career path or Career Path Management. Continuous development of E-learning system in knowledge management management, Development of Learning Center which becomes a forum for employees in learning either through e-learning or in-house training by preparing curriculum and syllabus (programmed education) as well as internal instructors who are reliable in their fields. The personnel database is also continuously improving the information system regarding personnel.

During 2021, Bank Riau Kepri has held 222 trainings, both in-house and Domestic External Training attended by 10,356 employees. Bank Riau Kepri provides opportunities for every employee to optimize their potential and expertise by participating in various education, courses and training. All training and HR development programs organized by Bank Riau Kepri are adjusted to the desired competency standards, in order to meet the business needs and succession of human resources of Bank Riau Kepri in the future.

Employee Welfare Program

Bank Riau Kepri always pays attention to the welfare of employees by trying to facilitate the needs of employees. Employee welfare improvement programs that have been implemented in 2021, among others, are material and non-material. Employee welfare is materially directly related to employee performance, and can be given in the form of employee salary increases, employee benefits increases, bonuses, and employee awards.

Kesempatan Bekerja yang Adil dan Merata

Bank Riau Kepri menerapkan prinsip non diskriminasi dalam pengelolaan SDM. Rekrutmen pegawai dilakukan secara transparan dan fair tanpa adanya nepotisme dari kalangan internal dan eksternal. Proses rekrutmen pegawai mempertimbangkan kesesuaian kompetensi calon pegawai dengan formasi jabatan yang dibutuhkan.

Bank Riau Kepri menjamin keseteraan gender dan kesempatan kerja yang luas bagi semua pegawai tanpa memandang jenis kelamin, suku maupun agama dan kepercayaan pegawai.

Reward System dan Remunerasi

Reward System dan Remunerasi memiliki bagian yang penting dalam memotivasi produktivitas dan meningkatkan retention SDM. Untuk itu, sistem penggajian dan kesejahteraan terus di-review dengan mempertimbangkan prinsip ***internal equity*** dan ***external competitiveness***. Unsur-unsur penggajian adalah Gaji pokok dan Tunjangan jabatan.

Selain remunerasi, sesuai dengan kemampuan Bank terus berusaha meningkatkan kesejahteraan bagi pegawainya sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan dedikasi, diantaranya dengan memberikan fasilitas dan tunjangan sebagai berikut :

1. Fasilitas Perawatan Kesehatan baik Jaminan Perusahaan dan BPJS Kesehatan
2. Uang Makan (uang kehadiran)
3. Bekal Cuti Tahunan & Cuti Besar
4. Bantuan Pakaian Dinas
5. Uang santunan kematian
6. Jasa Produksi
7. THR
8. Pembayaran Penghargaan Masa Pengabdian 15, 25 dan 30 Tahun
9. Jaminan Hari Tua (BPJS Ketenagakerjaan)
10. Manfaat Pensiun
11. Tunjangan Hari Tua
12. Tunjangan Pajak

Cuti Tahunan dan Cuti Besar

Setiap pegawai di Bank Riau Kepri berhak atas cuti tahunan selama 12 hari kerja setiap tahun. Selain itu Pegawai juga berhak atas istirahat panjang/ cuti besar setelah menjalani masa dinas sebagai pegawai tetap selama setiap 5 (lima) tahun sekali, selama 30 (tiga puluh) hari kalender.

- **Kesetaraan *Gender* dalam Kesempatan Kerja**
  Dalam melakukan perekrutan pegawai, Bank Riau Kepri senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, ***gender***, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian juga dalamhal pengangkatan calon pekerja, Bank Riau Kepri tidak melakukan diskriminasi atas alasan apapun

Fair and Equal Employment Opportunities

Bank Riau Kepri applies the principle of non-discrimination in HR management. Employee recruitment is carried out in a transparent and fair manner without any nepotism from internal and external parties. The employee recruitment process considers the suitability of the competence of prospective employees with the required position formation.

Bank Riau Kepri guarantees gender equality and wide job opportunities for all employees regardless of gender, ethnicity or religion and employee beliefs.

Reward System

Reward System has an important part in motivating productivity and increasing HR retention. To that end, the payroll and welfare system is continuously reviewed by taking into account the principles of internal equity and external competitiveness. Salary elements are: basic salary and allowances.

In addition to remuneration, in accordance with the Bank's capabilities, the Bank continues to strive to improve the welfare of its employees as a form of appreciation for performance and dedication, including by providing the following facilities and benefits:

1. *Health Care Facilities, both Corporate Guarantee and BPJS Health*
2. *Meal Fee (attendance fee)*
3. *Provision of Annual Leave & Big Leave*
4. *Service Clothing Assistance*
5. *Death compensation money*
6. *Production service*
7. *THR*
8. *Payment of 15, 25 and 30 Years of Service Award*
9. *Old Age Security (BPJS*
10. *Retirement Benefits*
11. *Pension*
12. *Tax Allowance*

Annual Leave and Holiday

Every employee at Bank Riau Kepri is entitled to 12 working days annual leave every year. In addition, employees are also entitled to a long break/grand leave after serving a period of service as a permanent employee every 5 (five) years, for 30 (thirty) calendar days.

- *Gender Equality in Employment Opportunities*
  In recruiting employees, Bank Riau Kepri always provides equal rights and opportunities to everyone regardless of religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions. Likewise, regarding the appointment of prospective workers, Bank Riau Kepri does not discriminate for any reason because it bases its decisions on the results of selection, evaluation

karena mendasarkan keputusannya pada hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.

- **Kesetaraan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan**
  Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai, Bank Riau Kepri secara berkesinambungan menyelenggarakan beberapa metode program pendidikan dan pelatihan untuk menunjang kegiatan operasional Perusahaan. Bank Riau Kepri menjamin bahwa setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan Perusahaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai Program Pelatihan dan Pendidikan yang telah dilaksanakan di sepanjang 2021 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini.

- **Penggunaan Tenaga Kerja Lokal**
  Perusahaan selalu berupaya untuk melaksanakan praktik ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain praktik kesetaraan gender dalam kesempatan bekerja, Perusahaan juga senantiasa menggunakan tenaga kerja lokal sebagai sumber daya utama dalam seluruh kegiatan operasional maupun perbankan Perusahaan. Sampai dengan tahun 2021 jumlah pegawai Bank Riau Kepri tercatat sebanyak 2.657 orang dan semuanya tenaga kerja lokal.

- **Remunerasi**
  Bank Riau Kepri senantiasa mentaati seluruh aturan yang berlaku terkait remunerasi kepada pegawai. Besaran remunerasi yang diberikan telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan berada di atas standar Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional Bank Riau Kepri. Terkait dengan remunerasi, Bank Riau Kepri senantiasa berupaya menjaga ***gap*** rasio gaji seluruh pegawai agar tidak terdapat perbedaan yang terlalu tinggi.

  Pada tabel berikut, dapat dilihat rasio gaji tertinggi dan terendah Bank Riau Kepri selama tahun 2021

results during the probationary period and employee orientation.

- *Equality in Education and Training Programs*
  In order to improve the ability and capacity of employees, Bank Riau Kepri continuously organizes several methods of education and training programs to support the Company's operational activities. Bank Riau Kepri guarantees that every employee has the same opportunity to participate in every education and training program that is opened in accordance with the needs and development plans of the Company. Further explanation regarding the Training and Education Program that has been implemented throughout 2021 can be seen in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

- *Use of Local Labor*
  The company always strives to implement employment practices in accordance with applicable regulations. In addition to the practice of gender equality in employment opportunities, the Company also always uses local workers as the main resource in all of the Company's operational and banking activities. Until 2021 the number of employees of Bank Riau Kepri was recorded at 2,657 people and all of them were local workers.

- *Remuneration*
  Bank Riau Kepri always obeys all applicable regulations regarding remuneration for employees. The amount of remuneration given has been adjusted to the applicable provisions and is above the Minimum Wage standard applicable in the operational area of Bank Riau Kepri. Regarding remuneration, Bank Riau Kepri always strives to maintain the gap in the salary ratio of all employees so that there is no too high difference.

  In the following table, you can see the ratio of the highest and lowest salaries of Bank Riau Kepri during 2021

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
Table of Highest and Lowest Salary Ratio

Uraian	Rasio *Ratio*	*Description*
Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	35.950.000,- s/d 3.800.000,-	*Highest and lowest Employee Salary*
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	100.000.000,- s/d 85.000.000,-	*Highest and lowest Directors' salaries*
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	65.000.000,- s/d 58.500.000,-	*Highest and lowest commissioner salaries*
Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	100.000.000,- s/d 35.950.000,-	*The highest salary for the Board of Directors and the highest employee*

- **Kegiatan Kesejahteraan Pegawai**

  Bank Riau Kepri senantiasa memerhatikan kesejahteraan seluruh pegawainya agar dapat saling bersinergi demi terciptanya produktivitas kerja yang optimal. Program peningkatan kesejahteraan pegawai diberikan baik secara material maupun non-material. Program yang bersifat material merupakan program kesejahteraan yang berkaitan langsung dengan prestasi pegawai dan kompensasinya dapat diberikan dalam bentuk uang transportasi, uang makan, uang pensiun, tunjangan hari raya, uang jabatan, bonus, uang pendidikan, uang pengobatan, pakaian dinas, uang cuti, dan uang kematian. Sedangkan program yang bersifat non-material merupakan program kesejahteraan pegawai melalui pemberian fasilitas dan pelayanan kepada seluruh pegawai Bank Riau Kepri tanpa melakukan diskriminasi.

- *Employee Welfare Activities*

  Bank Riau Kepri always pays attention to the welfare of all its employees so that they can synergize with each other to create optimal work productivity. Employee welfare improvement programs are provided both materially and non-materially. Material programs are welfare programs that are directly related to employee performance and compensation can be given in the form of transportation money, meal allowances, pensions, holiday allowances, office fees, bonuses, education fees, medical fees, official clothes, leave money, and money. While the non-material program is an employee welfare program through the provision of facilities and services to all employees of Bank Riau Kepri without discriminating.

- **Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan**

  Sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 tahun2003, maka Bank Riau Kepri telah menyusun suatu mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. Pengaduan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis sebagaimana yang dijelaskan pada Skema Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan sebagai berikut:

- *Employment Problem Complaint Mechanism*

  As a form of the Company's compliance with applicable regulations, one of which is the Manpower Act No. 13 of 2003, Bank Riau Kepri has developed a mechanism for complaints on labor issues. Complaints can be submitted verbally and in writing as described in the Employment Problem Complaint Mechanism Scheme as follows:



- **Kegiatan Kreatifitas, Bakat Olah Raga dan Seni Pegawai**

  Bank Riau Kepri juga sangat mempedulikan terhadap Kreatifitas, Bakat, Olah Raga dan Seni Pegawai melalui dukungan pembentukan dan dana terhadap klub-klub olahragadan seni yang ada di internal Bank Riau Kepri. Sesuai dengan SK Direksi No.089/KEPDIR/2021 tanggal 26 November 2021 dibentuk Komite Club Olah Raga dan Seni Bank Riau Kepri yang merupakan wadah penyaluran bakat, prestasi dan ajang silaturahmi seluruh pegawai sehingga dengan adanya Komite ini seluruh kegiatan olah raga dan seni dapat dikoordinir dengan baik dan dapat diarahkan untuk prestasi yang lebih baik dimana kedudukan komite ini berada di luar struktur organisasi bank. Berikut daftar club olah raga dan seni yang telah ditetapkan melalui Komite Club Olah Raga & Seni Bank Riau Kepri yaitu :
  - BRK Biker's
  - BRK Golf
  - BRK Mancing Mania
  - BRK Futsal & Sepak Bola Club
  - BRK Badminton Club
  - BRK Basket Ball Club
  - BRK Billiard Club
  - BRK Tenis Lapangan Club
  - BRK Tenis Meja Club
  - BRK Catur Club
  - BRK BeneRun
  - BRK Senam Club
  - BRK Takraw Club
  - BRK Shooting Club (Menembak)
  - BRK Archery Club (Memanah)
  - BRK Bela Diri
  - BRK Seni

Dampak Kegiatan Ketenagakerjaan

1. Dampak dari pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial terkait dengan ketenagakerjaan adalah rendahnya tingkat *turnover* pegawai dan tingginya tingkat *engagemet* pegawai. Berbagai kegiatan kepegawaian dilakukan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif yang memberikan rasa nyaman para pegawai. Pada tahun 2021 terdapat 80 ***Turnover*** dengan rincian 10 Pegawai pensiun, 59 ***Resign***, 5 PHK, 5 meninggal dan 1 berakhir masa kontrak.

- *Creative Activities, Sports Talent and Employee Arts*

  Bank Riau Kepri also really cares about the Creativity, Talent, Sports and Art of Employees through support for the formation and funding of sports and arts clubs that exist within Bank Riau Kepri. In accordance with the Decree of the Board of Directors No.089/KEPDIR/2021 dated November 26, 2021, the Bank Riau Kepri Sports and Arts Club Committee was formed which is a forum for channeling talents, achievements and a gathering place for all employees so that with this Committee all sports and arts activities can be coordinated. properly and can be directed to better performance where the position of this committee is outside the bank's organizational structure. The following is a list of sports and arts clubs that have been established through the Sports & Arts Club Committee of Bank RIau Riau Islands, namely:
  - *BRK Biker's*
  - *BRK Golf*
  - *BRK Fishing Mania*
  - *BRK Futsal & Soccer Club*
  - *BRK Badminton Club*
  - *BRK Basket Ball Club*
  - *BRK Billiard Club*
  - *BRK Tennis Court Club*
  - *BRK Table Tennis Club*
  - *BRK Chess Club*
  - *BRK BeneRun*
  - *BRK Gymnastics Club*
  - *BRK Takraw Club*
  - *BRK Shooting Club (Shooting)*
  - *BRK Archery Club (Archery)*
  - *BRK Self Defense*
  - *BRK Art*

Impact of Labor Activities

1. *The impact of implementing social responsibility activities related to employment is the low level of employee turnover and high levels of employee engagement. Various staffing activities are carried out to encourage the creation of a conducive work environment that gives employees a sense of comfort. In 2021 there were 80 turnovers with details of 10 employees retired, 59 resigned, 5 layoffs, 5 died and 1 expired.*

Tabel Turnover Bank Riau Kepri tahun 2016-2021
Bank Riau Kepri Turnover Table 2016-2021

Tahun *Year*	Pensiun *Pension*	Mengundurkan Diri *Resign*	PHK	Meninggal *Die*	Habis Kontrak *Contract ends*	Jumlah *Amount*
2016	12	28	3	-	-	43
2017	16	36	4	2	-	58
2018	17	72	11	2	-	102
2019	13	97	2	4	3	119
2020	17	35	12	2	4	70
2021	10	59	5	5	1	80

2. Dengan banyaknya wadah untuk para karyawan dapat meningkatkan keakraban pegawai sehingga dapat menigkatkan kinerja perusahaan,baik langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan Pemberian Fasilitas Kesehatan

Kesehatan merupakan unsur penting bagi kehidupan setiap orang. Setiap individu diharapkan dapat menjaga kesehatannya dengan melaksanakan pola hidup sehat sedini mungkin. Terkait hal tersebut, Bank turut memperhatikan kesehatan pegawai, dengan memberikan fasilitas kesehatan bagi pegawai dan anggota keluarga. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi pegawai maka manfaat fasilitas kesehatan selalu di-***review*** demi penyempurnaannya.

Bank Riau Kepri sangat memperhatikan aspek kesehatan dan perlindungan terhadap kesehatan pegawai maupun keluarganya (istri dan maksimal 3 orang anak) melalui Buku Pedoman Perusahaan PT Bank Riau Kepri sebagaimana diatur pada SK Nomor 10/KEPDIR/2019 tanggal 27 Feburari 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri yang telah mengalami perubahan ke empat sesuai SK No.093/KEPDIR/2021 tanggal 21 Desember 2021.

Fasilitas kesehatan yang didapat oleh Pegawai Bank Riau Kepri yaitu berupa :
1. Biaya Rawat Jalan
2. Biaya Rawat Inap
3. Biaya *Medical Check up*
4. Biaya Penggantian kaca mata

Dampak Kuantitatif Kegiatan Pemberian Fasilitas Kesehatan

Program fasilitas kesehatan yang diberikan oleh Perseroan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi pegawai sehingga akan berpengaruh pada tingkat angka produktivitas pegawai.

Pengelolaan fasilitas kesehatan yang baik oleh Perusahaa sepanjang tahun 2021 telah berdampak pada tingkat produktivitas pegawai Bank Riau Kepri. Pada 2021 produktivitas pegawai Perusahaan tercatat sebesar 1,534 juta per pegawai .

Kegiatan Keselamatan Kerja

Bank Riau Kepri senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai. Terkait hal tersebut, maka Perseroan telah menyusun pedoman/panduan dalam menjaga kemanan dan keselamatan jiwa seluruh pegawai di lingkungan kerja Bank Riau Kepri. Prosedurnya terfokus pada kesiapan peralatan dan sarana keselamatan gedung, kesiapan pelaksanaan penyelamatan jiwa manusia, serta pelatihan kepada pegawai. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

2. *With so many forums for employees, it can increase employee intimacy so that it can improve company performance, either directly or indirectly.*

Activities for Providing Health Facilities

Health is an important element for everyone's life. Every individual is expected to be able to maintain their health by implementing a healthy lifestyle as early as possible. Related to this, the Bank also pays attention to the health of employees, by providing health facilities for employees and family members. To improve welfare and motivate employees, the benefits of health facilities are always reviewed for improvement.

Bank Riau Kepri is very concerned about the health aspect and protection of the health of employees and their families (wife and a maximum of 3 children) through the Company Manual of PT Bank Riau Kepri as regulated in SK Number 10/KEPDIR/2019 dated 27 February 2019 concerning the Company Manual (BPP).) The staffing of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri which has undergone the fourth change according to Decree No. 093/KEPDIR/2021 dated December 21, 2021.

Health facilities obtained by Bank Riau Kepri employees are in the form of:
1. *Outpatient Fee*
2. *Hospitalization Fee*
3. *Medical Check-up Fee*
4. *Glasses Replacement Cost*

Quantitative Impact of Health Facility Provision Activities

The health facility program provided by the Company aims to improve the welfare and motivate employees so that it will affect the level of employee productivity.

Good management of health facilities by the Company throughout 2021 has had an impact on the productivity level of Bank Riau Kepri employees. In 2021 the Company's employee productivity was recorded at 1.534 million per employee.

Work Safety Activities

Bank Riau Kepri always strives to create a decent and safe work environment for all employees. Regarding this, the Company has compiled guidelines/guidelines in maintaining the safety and security of all employees in the work environment of Bank Riau Kepri. The procedure focuses on the readiness of building safety equipment and facilities, readiness for the implementation of saving human lives, as well as training for employees. Some of the activities carried out include the following:

1. Melakukan inspeksi/pemeriksaaan terhadap peralatan proteksi kebakaran gedung secara rutin untuk memastikan bahwa peralatan kebakaran tersebut dapat berfungsi dengan baik. Pengecekan untuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dilakukan oleh Petugas ***Security*** setiap1 (satu) bulan sekali sedangkan untuk pemeriksaan terhadap Alat Pemadam Api Tersistem (APAT) dan ***Fire Alarm*** dilakukan oleh pengelola gedung yang bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Melakukan standardisasi spesifikasi, penempatan perangkat keselamatan gedung dan jalur evakuasi yang dimasukkan dalam buku panduan standar renovasi gedung kantor yang disusun bersama dengan konsultan perencana yang akan dilakukan ***review*** setiap 1 (satu) sekali atau sesuai kebutuhan.
3. Menerapkan standar operasional dalam rangka pengamanan gedung kantor pada saat jam kerja dan pada saat ***cash supply*** dengan menggandeng aparat kepolisian.

1. Carry out inspections/checks on building fire protection equipment on a regular basis to ensure that the fire equipment can function properly. Checks for Light Fire Extinguishers (APAR) are carried out by Security Officers every 1 (one) month while inspections for Systematic Fire Extinguishers (APAT) and Fire Alarms are carried out by building managers in collaboration with the Fire Department which are carried out every 1 (one) once a year.

2. Perform standardization of specifications, placement of building safety devices and evacuation routes that are included in the standard guide book for office building renovation which is prepared together with planning consultants which will be reviewed every 1 (one) time or as needed.
3. Implement operational standards in order to secure office buildings during working hours and during cash supply by cooperating with the police.

Dampak Kuantitatif Kegiatan Keselamatan Kerja

Sepanjang tahun 2021, Bank Riau Kepri tidak mencatat adanya kecelakaan kerja (***zero accident***) dalam kegiatan operasional Perseroan di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan operasional telah berjalan sesuai dengan prosedur dan standar keamanan kerja yang berlaku.

Sertifikasi

Sampai dengan tahun 2021 , Bank Riau Kepri belum memiliki sertifikasi di bidang keselamatan kerja pegawai.

Quantitative Impact of Work Safety Activities

Throughout 2021, Bank Riau Kepri did not record any work accidents (zero accidents) in the Company's operational activities at the Head Office or at Branch Offices. This shows that all operational activities have been carried out in accordance with applicable work safety procedures and standards.

Certification

Until 2021, Bank Riau Kepri does not yet have certification in the field of employee safety.

KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESEHATAN

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN

Bank telah melakukan berbagai kegiatan untuk memastikan dan menjamin aspek kesehatan dalam rangka menjaga produktivitas karyawan. Keseluruhan upaya Bank berdampak pada meningkatnya produktivitas karyawan.

KEGIATAN DAN DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESELAMATAN KERJA

Tugas ***safety officer*** meliputi penentuan jam kerja aman bagi karyawan, mengecek kondisi ***site***, hingga inspeksi peralatan kerja secara kontinyu setiap bulan. Dan juga diadakan simulasi setahun sekali, dimana pada keadaan yang darurat dan perlu evakuasi, lalu dilihat apakah para karyawan *aware* atau tidak dengan bahaya. Semua orang bekerja pasti ada risikonya. Meski bekerja di dalam ruangan kantor, bisa saja kecelakaan atau sakit. Kesadaran karyawan sama saja baik di kantor maupun di lapangan.

HEALTH ACTIVITIES AND QUANTITATIVE IMPACT

QUANTITATIVE IMPACT OF LABOR AND HEALTH ACTIVITIES

The Bank has carried out various activities to ensure and guarantee the health aspect in order to maintain employee productivity. All of the Bank's efforts have an impact on increasing employee productivity.

ACTIVITIES AND QUANTITATIVE IMPACT OF OCCUPATIONAL SAFETY ACTIVITIES

The safety officer's duties include determining safe working hours for employees, checking site conditions, to continuous inspection of work equipment every month. And a simulation is also held once a year, in which there is an emergency and requires evacuation, then it is seen whether the employees are aware of the danger or not. Everyone works there must be risks. Even if you work in an office space, it could be an accident or illness. Employee awareness is the same both in the office and in the field. But employees who are in the

Tapi karyawan yang berada di kantor, selalu diingatkan dan disosialisasikan. Ini karena karyawan yang berada di dalam kantor, tempatnya tenang, adem, sehingga tidak sedikit yang menyepelekan K3.

Baik bekerja di dalam maupun di luar kantor, risiko akan tetap ada. Tanda-tanda peringatan dan fasilitas keselamatan gedung kantor Menara Dang Merdu Bank telah dipasang di dalam ruangan, seperti ***emergency exit***, alat pemadam kebakaran, panel-panel tanda bahaya, dan sebagainya. Gedung mesti mempunyai perlengkapan pemadam kebakaran berbentuk hidran air didalam ataupun diluar gedung, ***sprinkler*** atau alat yang bisa menyemprotkan air apabila suhu meraih 68 derajat celcius.

KONSTRUKSI GEDUNG MENARA DANG MERDU BANK RIAU KEPRI

Menjadi ikon dan kebanggaan masyarakat Riau, secara resmi Menara Dang Merdu Bank Riau-Kepri diresmikan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016. Gedung megah yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.462 Kota Pekanbaru Provinsi Riau dirancang dengan konsep desain fesade modem yang dinarnis dengan mengadopsi bentuk atap tradisional masyarakat Riau, yakni atap kajang dengan ornamen selembayung, sehingga bentuk bangunan tetap mencerminkan simbol adat dan budaya Melayu. Bentuk massa diinspirasi dari bentuk keris yang merupakan simbol keutuhan, kebenaran dan keagungan bagi masyarakat Melayu. Menara Bank Riau Kepri didesain untuk menjadi satu kesatuan ***landmark*** Kota Pekanbaru dan menjadi ikon kota yang baru. Susunan gedung dengan seperti 3 (tiga) layar terkembang diilhami dari latar belakang alam dan masyarakat Riau dan Kepri yang sangat dekat dengan kebidupan air, gabungan tiga massa bangunan dirancang sebagai wujud representasi dari ide dasar ***corporate identity*** (logo) Bank Riau Kepri yakni tiga layar terkembang yang merupakan interpretasi dari simbol semangat kedearahan yang khas. Detil bangunan adalah sebagai berikut:

- Luas lahan: 13.670,56 m2
- Luas bangunan: 20.396 m2
- Luasan landscape: 10.719.17 m2
- Luasan Interior Kantor cabang dan Dang Merdu: 5.255 m2
- Luasan tower Bank Riau Kepri: 9.868 m2
- Luasan basement 4.570 m2
- Luasan semi basement 703 m2
- Tinggi bangunan: 74,94 m2
- Tinggi puncak tower: 83.00 m2
- Jumlah lantai: 15 lantai plus root garden
- Fasilitas: Dengan spesifikasi gedung ini, maka manajemen Bank Riau Kepri di pastikan tak dapat lagi meremehkan keselamatan gedung, terutama usaha antisipasi kebakaran. Sistem keamanan dan keselamatan pada gedung merupakan standarisasi yang harus diterapkan perusahaan.

office, are always reminded and socialized. This is because the employees who are in the office, the place is calm, cool, so that not a few underestimate K3.

Whether working inside or outside the office, risks will remain. Warning signs and safety facilities for the Dang Merdu Bank office building have been installed in the room, such as emergency exits, fire extinguishers, danger sign panels, and so on. The building must have fire fighting equipment in the form of water hydrants inside or outside the building, sprinklers or devices that can spray water when the temperature reaches 68 degrees Celsius.

CONSTRUCTION OF THE MERDU DANG TOWER BUILDING BANK RIAU KEPRI

Becoming an icon and pride of the people of Riau, the Dang Merdu Tower of Bank Riau-Kepri was officially inaugurated on Thursday, January 28, 2016. The magnificent building, which is located at Jalan Jenderal Sudirman No.462, Pekanbaru City, Riau Province, was designed with a modern facade design concept that is narrated by adopting the traditional roof form of the Riau people, namely the kajang roof with selembayung ornaments, so that the shape of the building still reflects the symbols of Malay customs and culture. The shape of the mass is inspired by the shape of the keris which is a symbol of wholeness, truth and majesty for the Malay community. The Riau Kepri Bank Tower is designed to become a unified landmark of Pekanbaru City and become a new city icon. The structure of the building with 3 (three) developed screens is inspired by the natural background and the people of Riau and Riau Islands which are very close to the life of water, the combination of the three building masses is designed as a representation of the basic idea of Bank Riau Kepri's corporate identity (logo), namely the three screens that are developed. which is an interpretation of the typical regional spirit symbol. The building details are as follows:

- *Land area: 13,670.56 m2*
- *Building area: 20,396 m2*
- *Landscape area: 10,719.17 m2*
- *Interior Area of Branch Office and Dang Merdu: 5,255 m2*

- *Bank Riau Kepri tower area: 9,868 m2*
- *Basement area 4,570 m2*
- *Semi basement area 703 m2*
- *Building height: 74.94 m2*
- *Tower top height: 83.00 m2*
- *Number of floors: 15 floors plus root garden*
- *Facilities: With the specifications of this building, the management of Bank Riau Kepri is ensured that they can no longer underestimate the safety of the building, especially efforts to anticipate fires. The security and safety system in the building is a standard that must be applied by the company.*

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PERKANTORAN

Kementrian Kesehatan mengeluarkan regulasi terbaru terkait Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, peraturan tersebut dimuat di dalam Permenkes No. 48 Tahun 2016 yang dikeluarkan pada bulan September 2016. Dengan dikeluarkan peraturan ini, maka standar keselamatan dan kesehatan kerja di perkantoran dapat ditingkatkan. Peraturan Standar K3 Perkantoran ini ditujukan sebagai acuan bagi pemimpin Kantor dan/atau pengelola gedung dalam mengelola Perkantoran untuk mewujudkan kantor yang aman, sehat, dan nyaman sehingga karyawan dapat bekerja dengan selamat, sehat, bugar dan tetap produktif.

Perkantoran adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat karyawan melakukan kegiatan perkantoran baik yang bertingkat maupun yang tidak bertingkat. Di dalam Permenkes No. 48 Tahun 2016 mewajibkan pengelola gedung atau pemimpin kantor untuk menyelenggarakan K3 Perkantoran dengan membentuk dan mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran dan menerapkan standar K3 Perkantoran.

Untuk itu perusahaan telah menunjuk bagian Manajemen ***Building*** sebagai pengelola gedung dan juga bertanggungjawab atas praktek-praktek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. Unit Manajemen Building berada dibawah Divisi Umum yang disupervisi oleh Direktur Operasional Bank Riau Kepri. Manajemen ***Building*** mempunyai visi yaitu: Nihil Kecelakaan (***Zero Accident***), Nihil pencemaran (***Zero Emission***), dan Keselamatan dan kesehatan kerja adalah prioritas utama. Tugas dan tanggungjawab Manajemen ***Building*** adalah:

- Menciptakan Lingkungan Kerja yang aman bagi karyawan, pihak yang terkait dan asset perusahaan.
- Turut serta dalam menjalankan aktivitas perusahaan yang ramah lingkungan.
- Membangun budaya peduli keselamatan kerja bagi seluruh anggota dan keluarga besar di PT. Bank Riau Kepri.

PENERAPAN SMK3 PERKANTORAN

Beberapa syarat Penerapan SMK3 Perkantoran Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri telah dipenuhi, seperti adanya hidran, alat pemadam, dan ada alarm sistem. Kelengkapan lainnya seperti tanda-tanda peringatan dan fasilitas keselamatan gedung kantor Menara Dang Merdu Bank telah dipasang di dalam ruangan, seperti ***emergency exit***, alat pemadam kebakaran, panel-panel tanda bahaya, dan sebagainya. Menara Dang Merdu Bank

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM (SMK3) OFFICES

The Ministry of Health issued the latest regulations regarding Office Occupational Safety and Health Standards, the regulations are contained in the Minister of Health Regulation No. 48 of 2016 which was issued in September 2016. With the issuance of this regulation, the standard of occupational safety and health in offices can be improved. This Office K3 Standard Regulation is intended as a reference for office leaders and/or building managers in managing offices to create a safe, healthy, and comfortable office so that employees can work safely, healthy, fit and remain productive.

Office is a building that functions as a place for employees to carry out office activities, both multi-storey and non-storied. In Permenkes No. 48 of 2016 requires building managers or office leaders to organize Office K3 by establishing and developing an Office Occupational Health and Safety Management System and applying Office K3 standards.

For this reason, the company has appointed the Building Management section as the building manager and is also responsible for the practices of the Office Occupational Health and Safety Management System at Dang Merdu Tower Bank Riau Kepri. The Building Management Unit is under the General Division which is supervised by the Operational Director of Bank Riau Kepri. Building management has a vision, namely: Zero Accident, Zero Emission, and Occupational safety and health are the main priorities. The duties and responsibilities of Building Management are:

- *Creating a safe work environment for employees, related parties and company assets.*
- *Participate in carrying out company activities that are environmentally friendly.*
- *Build a work safety care culture for all members and extended family at PT. Riau Islands Bank.*

IMPLEMENTATION OF OFFICE SMK3

Several requirements for the application of SMK3 Dang Merdu Tower Office Bank Riau Kepri have been met, such as the presence of hydrants, extinguishers, and an alarm system. Other accessories such as warning signs and safety facilities for the Dang Merdu Bank office building have been installed in the room, such as emergency exits, fire extinguishers, danger sign panels, and so on. The Dang Merdu Tower of Bank Riau Kepri also has fire fighting equipment in the form of water hydrants inside or outside the building, sprinklers or

Riau Kepri juga mempunyai perlengkapan pemadam kebakaran berbentuk hidran air didalam ataupun diluar gedung, sprinkler atau alat yang bisa menyemprotkan air apabila suhu meraih 68 derajat celcius.

Diluar itu, Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri juga dilengkapi dengan alarm, di mana akan berbunyi pada suhu diatas 50 derajat celcius dan ada ***smoke detector***. Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri juga lengkapi dengan perlengkapan ***siemese connection*** yang bermanfaat untuk ***supply air***. Penampung air sejumlah 120 kubik air dengan ketahanan persediaan air sepanjang 45 menit. Kesemua perlengkapan menjadi tanggungjawab dan dibawah pengawasan Manajemen ***Building***.

Dalam penerapan SMK3 Perkantoran, selain memiliki unit kerja Manajemen ***Building***, Bank Riau Kepri juga membentuk Organisasi Tanggap Darurat Kebakaran Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri yang beranggotakan operator dan teknisi gedung, ***security*** gedung, dan dua orang perwakilan dari setiap lantai gedung. Petugas tersebut ditunjuk sebagai koordinator yang bertugas untuk:

- Menginfokan kejadian bencana kepada setiap orang dilantai gedung.
- Menginstruksikan kepada setiap orang dilantai gedung untuk tetap tenang dan menjalankan prosedur keselamatan.
- Mengarahkan setiap orang untuk menuju tangga darurat.
- Mengarahkan setiap orang untuk menuju tempat kumpul yang aman.

Bank Riau Kepri senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang layak dan aman bagi seluruh pegawai. Terkait hal tersebut, maka Bank telah menyusun pedoman/panduan dalam menjaga kemanan dan keselamatan jiwa seluruh pegawai di lingkungan kerja Bank Riau Kepri. Prosedurnya terfokus pada kesiapan peralatan dan sarana keselamatan gedung, kesiapan pelaksanaan penyelamatan jiwa manusia, serta pelatihan kepada pegawai. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan inspeksi/pemeriksaaan terhadap peralatan proteksi kebakaran gedung secara rutin untuk memastikan bahwa peralatan kebakaran tersebut dapat berfungsi dengan baik. Pengecekan untuk Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dilakukan oleh Petugas ***Security*** setiap1 (satu) bulan sekali sedangkan untuk pemeriksaan terhadap Alat Pemadam Api Tersistem (APAT) dan ***Fire Alarm*** dilakukan oleh pengelola gedung yang bekerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Melakukan standardisasi spesifikasi, penempatan perangkat keselamatan gedung dan jalur evakuasi yang dimasukkan dalam buku panduan standar renovasi gedung kantor yang disusun bersama dengan konsultan perencana yang akan dilakukan ***review*** setiap 1 (satu) sekali atau sesuai kebutuhan.

devices that can spray water when the temperature reaches 68 degrees Celsius.

In addition, the Dang Merdu Tower of Bank Riau Kepri is also equipped with an alarm, which will sound at temperatures above 50 degrees Celsius and there is a smoke detector. The Dang Merdu Tower Building of Bank Riau Kepri is also equipped with Siemese connection equipment which is useful for water supply. A water reservoir of 120 cubic meters of water with a water supply resistance of 45 minutes. All equipment is the responsibility and under the supervision of the Building Management.

In implementing the Office SMK3, apart from having a Building Management work unit, Bank Riau Kepri also established an Emergency Response Organization for the Dang Merdu Tower Building, Bank Riau Kepri, which consists of building operators and technicians, building security, and two representatives from each floor of the building. The officer is appointed as coordinator in charge of:

- *Informing disaster events to everyone on the building floor.*
- *Instruct everyone on the building floor to remain calm and follow safety procedures.*
- *Direct everyone to the emergency stairs.*
- *Direct everyone to a safe gathering place.*

Bank Riau Kepri always strives to create a decent and safe work environment for all employees. In this regard, the Bank has compiled guidelines/guidelines in maintaining the safety and security of all employees in the work environment of Bank Riau Kepri. The procedure focuses on the readiness of building safety equipment and facilities, readiness for the implementation of saving human lives, as well as training for employees. Some of the activities carried out include the following:

1. *Carry out inspections/checks on building fire protection equipment on a regular basis to ensure that the fire equipment can function properly. Checks for Light Fire Extinguishers (APAR) are carried out by Security Officers every 1 (one) month while inspections for Systematic Fire Extinguishers (APAT) and Fire Alarms are carried out by building managers in collaboration with the Fire Department which are carried out every 1 (one) once a year.*
2. *Perform standardization of specifications, placement of building safety devices and evacuation routes that are included in the standard guide book for office building renovation which is prepared together with planning consultants which will be reviewed every 1 (one) time or as needed.*

3. Menerapkan standar operasional dalam rangka pengamanan gedung kantor pada saat jamkerja dan pada saat ***cash supply*** dengan menggandeng aparat kepolisian.

- *Implement operational standards in the context of securing office buildings during working hours and during cash supply by cooperating with the police.*

SIMULASI KEADAAN BENCANA

Kebakaran gedung bertingkat memiliki tingkat kesulitan tersendiri, karena akses ke gedung bertingkat diperlukan alat pemadam yang kuat, tangga, dan yang lebih penting adalah skill petugas. Untuk itu, Bank Riau Kepri harus melakukan simulasi kebakaran minimal sekali atau dua kali setahun. Simulasi ini akan menambah kepedulian dan keahlian pegawai disetiap lantai gedung akan keselamatan diri dan paham apa yang harus dilakukan.

Dengan simulasi yang diadakan rutin ini, maka Bank dapat mengevaluasi Standar Operasional dan Prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi ketikan terjadi keadaan darurat, sehingga kondisinya ia anggap sudah ideal dan baik.

DISASTER STATE SIMULATION

Fires in high-rise buildings have their own level of difficulty, because access to high-rise buildings requires strong extinguishers, ladders, and more importantly the skills of officers. For this reason, Bank Riau Kepri must conduct a fire simulation at least once or twice a year. This simulation will increase the awareness and expertise of employees on each floor of the building regarding personal safety and understanding what to do.

With these routine simulations, the Bank is able to evaluate the Standard Operating and Procedures for early warning and evacuation procedures when an emergency occurs, so that the condition is considered ideal and good.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN KESELAMATAN KERJA

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terkait keselamatan kerja telah memberikan dampak yang positif bagi Bank. Selama tahun 2021 tidak terdapat kecelakaan kerja di Bank Riau Kepri yang dialami oleh para karyawan.

QUANTITATIVE IMPACT OF OCCUPATIONAL SAFETY ACTIVITIES

The implementation of corporate social responsibility related to work safety has had a positive impact on the Bank. During 2021 there were no work accidents at Bank Riau Kepri experienced by employees.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPADA KONSUMEN

Corporate Social Responsibility Related to Consumer Responsibility

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KONSUMEN

Bank Riau Kepri berkomitmen dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada konsumen. Terkait komitmen tersebut, Bank telah memiliki berbagai kebijakan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya. Dalam melakukan pengelolaan hubungan dengan Nasabah, Bank Riau Kepri berlandaskan pada kebijakan yang tertuang dalam:

1. SK Direksi Nomor 11/KEPDIR/2006 tanggal 1 Februari 2006 tentang Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Bank Riau.
2. SK Direksi Nomor 27/KEPDIR/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Perubahan BPP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
3. SK nomor 77/KEPDIR/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penanganan Pengaduan Nasabah PT Bank Riau Kepri.
4. SE Nomor 51/SE/2015 Tanggal 30 Desember 2015 tentang SLA Penanganan Pengaduan Nasabah PT. Bank Riau Kepri.
5. SK Nomor 009/KEPDIR/2017 Tanggal 30 Januari 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penanganan Nasabah PT. Bank Riau Kepri.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

TARGET/RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KONSUMEN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan, dan dalam kondisi, dan dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya, maka Bank menargetkan untuk selalu menyelesaikan keluhan ataupun pengaduan sesuai dengan *standar level agreement*. Terkait dengan kepuasan pelanggan, Bank rutin melaksanakan kegiatan survei kepuasan nasabah yang hasilnya diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah sehingga berujung pada tingginya tingkat loyalitas nasabah kepada Bank.

COMMITMENT AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY RELATED TO CONSUMER

Bank Riau Kepri is committed to implementing social responsibility to consumers. Regarding this commitment, the Bank has various policies in the implementation of its social responsibility. In managing relationships with customers, Bank Riau Kepri is based on the policies contained in:

1. *Decree of the Board of Directors Number 11/KEPDIR/2006 dated February 1, 2006 concerning Policy for Settlement of Customer Complaints at Bank Riau.*
2. *Decree of the Board of Directors Number 27/KEPDIR/2008 dated April 7, 2008 concerning Changes in the BPP for the Settlement of Customer Complaints.*
3. *SK number 77/KEPDIR/2014 dated October 28, 2014 regarding the Company Handbook for Handling Customer Complaints of PT Bank Riau Kepri.*
4. *SE Number 51/SE/2015 dated December 30, 2015 regarding SLA for Handling Customer Complaints of PT. Riau Islands Bank.*
5. *SK Number 009/KEPDIR/2017 dated January 30, 2017 regarding the Handbook of Customer Handling Company PT. Riau Islands Bank.*
6. *Financial Services Authority Regulation Number 01/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Financial Services Authority Circular Letter Number 02/SEOJK.07/2014 concerning Services and Settlement of Consumer Complaints to Financial Services Businesses.*

TARGET/PLAN OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES RELATED TO CONSUMER

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 01/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, that Financial Services Businesses are required to immediately follow up and resolve complaints no later than 20 (twenty) working days after the date of receipt of the complaint, and in the following conditions: and under certain conditions it can be extended for the next 20 (twenty) working days, the Bank targets to always resolve complaints or complaints in accordance with the standard level agreement. In relation to customer satisfaction, the Bank routinely carries out customer satisfaction surveys, the results of which are expected to continue to improve the quality of service to customers, thus leading to a high level of customer loyalty to the Bank.

Adapun selama tahun 2021 terdapat pengaduan nasabah sebagai berikut :

Meanwhile, during 2021 there were customer complaints as follows:

Jenis Produk

Types of products

No.	Jenis Produk *Types of products*	Pengaduan Tahun 2021 *Complaint Year 2021*			Pengaduan Tahun 2020 *Complaint Year 2020*		
		Jumlah Pengaduan *Number of Complaints*	%	Nominal *Nominal*	Jlh	%	Nominal *Nominal*
1	Penghimpunan Dana *Fundraising*	-	0.00%		8	0.10%	2,283,754.00
2	Penyaluran Dana *Disbursement of Funds*	5	0.08%		1	0.01%	
3	Sistem Pembayaran *Payment system*	6,352	99.92%	8,172,304,712.00	8,364	99.89%	5,291,499,513.00
4	Produk Lainnnya *Other Products*	-	0.00%		0	0.00%	
Total		**6,357**	**100%**	**8,172,304,712.00**	**8,373**	**100%**	**5,293,783,267.00**

Catatan : Sistem pembayaran sebagian besar merupakan transaksi dengan ATM
Note: Most of the payment systems are transactions with ATMs

Waktu Penyelesaian

Completion Time

No.	Waktu Penyelesaian *Completion Time*	Tahun 2021 *Year 2021*		Tahun 2020 *Year 2020*	
		Pengaduan *Complaint*	%	Pengaduan *Complaint*	%
1	Diselesaikan s.d 20 hk *Completed up to 20 HK*	4955	77.95%	5686	67,80%
2	Diselesaikan 21 s.d 40 hk *Completed 21 to 40 HK*	430	6.76%	807	9,68%
3	Diselesaikan > 40 hk *Completed > 40 hk*	17	0.27%	141	19,45%
4	Dalam proses penyelesaian *In the process of completion*	955	15.02%	1739	3,07%
Total		**6,357**	**100%**	**8,373**	**100%**

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KONSUMEN

CONSUMER-RELATED CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES

PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DATA NASABAH

Kami komitmen menjaga dan melindungi kerahasiaan data nasabah.

CUSTOMER DATA CONFIDENTIAL PROTECTION

We are committed to maintaining and protecting the confidentiality of customer data.

KEMUDAHAAN AKSES INFORMASI DAN JARINGAN LAYANAN PERBANKAN

Akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian penting dari peningkatan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan membantu, menjaga, dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan persepsi positif dari para stakeholders dalam hal ini para nasabah terhadap kebijakan dan kegiatan Bank. Kemudahan akses informasi

EASY ACCESS TO INFORMATION AND NETWORK BANKING SERVICES

Access to information for all stakeholders is an important part of increasing the principle of transparency of information internally and externally, which is expected to help, maintain, and increase the knowledge, understanding and positive perception of stakeholders in this case customers towards the Bank's policies and activities. The Bank has provided easy access to information and banking service networks,

dan jaringan layanan perbankan telah disediakan oleh Bank antara lain:

- Melalui Situs Internet dengan alamat laman web: www.bankriaukepri.co.id.
- Jejaring sosial: facebook, twitter, facebook.
- Kemudahaan fasilitas mobile banking.
- Keberadaan kantor cabang dan ATM Bank.

Sedangkan pusat informasi dan pengaduan konsumen ini dapat diakses oleh konsumen melalui beberapa saluran antara lain melalui Customer service call dengan menghubungi nomor telepon (0761) 47070, Email: corsec@bankriaukepri.co.id serta ***Customer service*** yang berada di cabang-cabang Bank Riau Kepri terdekat.

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN NASABAH

Dalam meningkatkan loyalitas nasabah Bank Riau Kepri melakukan beberapa upaya yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat memenuhi harapan nasabah. Beberapa upaya yang dilakukan Bank Riau Kepri dalam meningkatkan kepuasan nasabah yaitu:

1. Terus menerus mengembangkan inovasi produk;
2. Menjaga kualitas produk;
3. Memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi;
4. Menyelesaikan keluhan nasabah;
5. Menjaga privasi nasabah;
6. Melakukan pembenahan terhadap kinerja karyawan;
7. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap nasabah;
8. Penanganan kejahatan *financial*;
9. Edukasi Nasabah.

PROGRAM UNDIAN

1. Undian Tabungan Bedelau periode 2
   Program Undian Tabungan Bedelau ini merupakan program promosi sebagai apresiasi bagi seluruh nasabah setia. Hadiah undian BRK Bedelau periode I : Grandprize : 19 unit mobil Honda Brio RS M/T, utk 19 kantor cabang konsolidasi. Sedangkan Non grandprize berupa Emas logam mulia antam seberat 600gram, utk 20 kantor cabang konsolidasi, masing masing kantor cabang konsolidasi mendapatkan 30 keping emas dengan berat 1gram

2. Program undian Bedelau langsung
   Program undian ini berhadiah berupa barang dan voucher yang memberikan kebebasan nasabah memilih hadiahnya. Selama tahun 2021 BRK telah menyalurkan hadiah sebesar 184,521 Milyar.
3. Bedelau Koper
   Program undangan ini berupa hadiah langsung berupa tas koper kepada nasabah dengan membuka rekening baru dengan menyimpan sdananya dengan jumlah dan jangka waktu tertentu. Selama 2021 BRK telah membagikan 894 buah koper dalam program ini.

including:

- *Through the Internet Site with the web page address: www.bankriaukepri.co.id.*
- *Social networks: facebook, twitter, facebook.*
- *Ease of mobile banking facilities.*
- *The existence of branch offices and Bank ATMs.*

While the information center and consumer complaints can be accessed by consumers through several channels, including through Customer service calls by calling telephone number (0761) 47070, Email: corsec@bankriaukepri.co.id and Customer service at Bank Riau Kepri branches. closest.

CUSTOMER SERVICE QUALITY IMPROVEMENT

In increasing customer loyalty, Bank Riau Kepri has made several efforts, namely by improving the quality of service that can meet customer expectations. Some of the efforts made by Bank Riau Kepri in increasing customer satisfaction are:

1. *Continuously develop product innovation;*
2. *Maintain product quality;*
3. *Provide convenience to customers in transactions;*
4. *Resolving customer complaints;*
5. *Maintain customer privacy;*
6. *Making improvements to employee performance;*
7. *Improving the speed and accuracy of service to customers;*
8. *Handling of financial crimes;*
9. *Customer Education.*

DRAWING PROGRAM

1. *Bedelau Savings Lottery period 2*
   The Bedelau Savings Lottery Program is a promotional program as an appreciation for all loyal customers. BRK Bedelau lottery prize period I: Grandprize: 19 units of Honda Brio RS M/T, for 19 consolidated branch offices. Meanwhile, non-grand prizes in the form of Antam's precious metal gold weighing 600 grams, for 20 consolidated branch offices, each consolidated branch office received 30 gold pieces weighing 1 gram.

2. *Live Bedelau lottery program*
   This lottery program has prizes in the form of goods and vouchers that give customers the freedom to choose their prizes. During 2021 BRK has distributed prizes of 184,521 billion.
3. *Bedelau Suitcase*
   This invitation program is in the form of a direct gift in the form of a suitcase to customers by opening a new account by saving their funds in a certain amount and period of time. During 2021 BRK has distributed 894 pieces of luggage in this program

DAMPAK KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KONSUMEN

Dengan dimudahkannya akses informasi bagi nasabah, loyalitas nasabah semakin meningkat dan pada akhirnya menjadikan peningkatan kinerja bagi Bank.

IMPACT OF CONSUMER RELATED CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES

With easy access to information for customers, customer loyalty is increasing and ultimately leads to increased performance for the Bank.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Community Social Development

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan pengembangan sosial kemasyarakatan merupakan penjabaran dari salah satu misi Bank Riau Kepri yaitu peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan, sebagai kontribusi perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program sosial bagi masyarakat ini, Bank Riau Kepri tentunya dapat mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Riau dan Kepri. Bank Riau Kepri percaya bahwa dengan melakukan hal yang baik, bagi masyarakat sekitar adalah bagian dari investasi untuk mendukung perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Pada Tahun 2021 dalam program kegiatan sosial bagi masyarakat, Bank Riau Kepri mempunyai kebijakan mendukung penuh program-program Pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat dengan pola kemitraan dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY AND COMMITMENTS IN THE FIELD OF COMMUNITY SOCIAL DEVELOPMENT

Corporate social responsibility related to community social development is an elaboration of one of the missions of Bank Riau Kepri, namely caring for the interests of the community and the environment, as the company's contribution to improving the welfare of the community. Through this social program for the community, Bank Riau Kepri can certainly support the progress and welfare of the people of Riau and Riau Islands. Bank Riau Kepri believes that doing good things for the surrounding community is part of an investment to support the company to grow and develop in a sustainable manner. In 2021 in the social activity program for the community, Bank Riau Kepri has a policy of fully supporting Government programs that have a direct impact on the community through partnership patterns and Community Social Assistance.

ISU-ISU SOSIAL YANG RELEVAN DENGAN PERUSAHAAN

Bank sebagai perusahaan yang memperoleh keuntungan dari masyarakat harus memperhatikan hubungan baik dengan masyarakat sekitar, dan masyarakat umum lainnya. Tujuan ***corporate social responsibility*** (CSR) mengacu kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Bank yang tidak hanya memperhatikan kinerja ekonomi, namun harus tetap memperhatikan kinerja sosial. Dengan adanya CSR Bank dapat berkonstribusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di bidang keagamaan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Konstributsi tersebut pada gilirannya akan membuka peluang lebih luas kepada Bank untuk memasarkan produknya kepada masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas karyawan.

SOCIAL ISSUES RELEVANT TO THE COMPANY

Banks as companies that benefit from the community must pay attention to good relations with the surrounding community, and other general public. The purpose of corporate social responsibility (CSR) refers to activities carried out by the Bank that do not only pay attention to economic performance, but must also pay attention to social performance. With CSR, the Bank can contribute in overcoming the problems faced by the community, both in the religious, social, economic, and cultural fields. This contribution in turn will open wider opportunities for the Bank to market its products to the public while increasing employee productivity.

RISIKO SOSIAL YANG DIKELOLA PERUSAHAAN

Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terkiat kemasyarakatan, Bank Riau Kepri menyadari kemungkinan adanya berbagai risiko yang dihadapi. Salah satunya terkait dampak negatif disebabkan oleh keputusan pemberian kredit/pembiayaan. Risiko tersebut dapat menyebabkan dampak keuangan langsung seperti, peningkatan ***non-performing loan*** (NPL) yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mematuhi kesepakatan-kesepakatan pinjaman.

SOCIAL RISK MANAGED BY THE COMPANY

In implementing social responsibility related to society, Bank Riau Kepri is aware of the possibility of various risks faced. One of them is related to the negative impact caused by the decision to grant credit/financing. These risks can lead to direct financial impacts, such as an increase in non-performing loans (NPL) caused by the inability to comply with loan agreements.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang kemasyarakatan adalah dalam hal memberikan kontribusi kepada masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan program-program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup yaitu kondisi pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau masyarakat untuk hidup layak. Kegiatan CSR ini ditujukan kepada seluruh pihak yang terkena pengaruh dan atau mempengaruhi kinerja Bank baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat sekitar Kantor Bank dan masyarakat luas.

TARGET/RENCANA KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Sebagai bagian dari masyarakat, Bank Riau Kepri senantiasa menyelaraskan kehadiran dan kegiatan usahanya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Bank Riau Kepri berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat mencapai masyarakat sejahtera.

KEGIATAN DAN DAMPAK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pada tahun 2021, Bank Riau Kepri telah mengadakan beberapa program dan kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan seperti bantuan sosial, keagamaan dan lain sebagianya sehingga memberikan dampak yang baik kepada masyarakat dan kepercayaan kepada bank.

SCOPE AND FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF COMMUNITY SOCIAL DEVELOPMENT

The scope and formulation of social responsibility in the community sector is in terms of contributing to society. The purpose of implementing these programs is to improve the quality of life, namely the condition of meeting basic human or community needs for a decent life. This CSR activity is aimed at all parties affected by and or influencing the performance of the Bank, either directly or indirectly, the community around the Bank's offices and the wider community.

TARGET/PLAN OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES IN THE FIELD OF COMMUNITY SOCIAL DEVELOPMENT

As part of the community, Bank Riau Kepri always harmonizes its presence and business activities in the community. Therefore, Bank Riau Kepri is committed to continuing to carry out community development and empowerment programs in order to achieve a prosperous society.

ACTIVITIES AND IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF COMMUNITY SOCIAL DEVELOPMENT

In 2021, Bank Riau Kepri has held several programs and activities in the social sector such as social, religious and other assistance in part so as to have a good impact on the community and trust in the bank.

BANTUAN CSR PT. BANK RIAU KEPRI
Penyerahan CSR Rumah Imam Masjid Nurul Iman
- Jl. Merak Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya
– Pekanbaru Program Kemitraan Provinsi Riau

CSR HELP PT. RIAU KEPRI BANK
Submission of CSR for the Imam's House of the Nurul Iman Mosque
- Jl. Peacock Ex. South Tangkerang Kec. Bukit Raya
– Pekanbaru Riau Province Partnership Program





Penyerahan CSR Kepada Pemerintah Provinsi Riau berupa Bantuan Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Riau
Submission of CSR to the Riau Provincial Government in the form of Employment Assistance to BPJS Employment of Riau Province





Penyerahan CSR kepada Provinsi Riau berupa Pendidikan untuk Kader Ulama Provinsi Riau
Submission of CSR to Riau Province in the form of Education for Cadre of Ulama in Riau Province





Penyerahan Bantuan CSR kepada Pemerintah
Provinsi Kepuluan Riau berupa Pembangunan Tugu Bismillah
Submission of CSR Assistance to the Government
Riau Islands Province in the form of Bismillah Monument Construction



Penyerahan CSR 2 Unit BIN Tempat Sampah Kepada Pemerintah Kota Dumai
Submission of CSR 2 Units of BIN Trash Cans to Dumai City Government





Penyerahan CSR Kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berupa Bantuan Kendaraan Operasional Angkutan Sampah Jenis Roda 3 (tiga) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Submission of CSR to the Indragiri Hilir Regency Government in the form of Assistance for Operational Vehicles for 3 (three) Wheel Garbage Transport at the Environment and Hygiene Service





Penyerahan CSR kepada Pemerintah Indragiri Hilir berupa Pembuatan Aula Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir

Submission of CSR to the Indragiri Hilir Government in the form of the Construction of the Indragiri Hilir District Attorney's Hall





Penyerahan CSR kepada Pemerintah Kota Pekanbaru berupa Bantuan Pendidikan SMP, SMA di Kota Pekanbaru

Submission of CSR to the Pekanbaru City Government in the form of Junior and High School Education Assistance in Pekanbaru City





KEGIATAN CSR DI MASA PANDEMI COVID-19

CSR ACTIVITIES IN THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC

ITEM *ITEMS*	TAHUN *YEAR*		TOTAL *TOTAL*
	2020	2021	
Biaya Penangan Covid-19 Cost of Handling Covid-19	2,593,014,271	1,961,830,871	4,554,845,142

Kebijakan dan Strategi CSR di masa Pandemi COVID-19 dan Kenormalan Baru

- Bantuan Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Masyarakat
- Bantuan Sanitaser dan Penyemprotan Disenfektan di Berbagai Daerah Riau dan Kepulauan Riau
- Program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk daerah Riau dan Kepulauan Riau dengan program Kesehatan Masyakarat Keliling secara gratis.
- Penyediaan tempat cuci tangan di berbagai lokasi strategis mengurangi dampak pademi COVID-19.

Program CSR Unggulan di masa Pandemi COVID-19 dan Kenormalan Baru

- Vaksinasi 5.000 Dosis untuk Masyarakat disekitar Operasional Bank
- Vaksinasi tahap II 3.000 Dosis untuk Masyarakat disekitar Operasional Bank
- Bantuan Bak Sampah Di Kota Dumai.
- Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB).
- Bantuan sarana Prasarana rumah ibadah di Riau dan Kepulauan Riau.
- Bantuan Seragam Sekolah SDN, SMPN di Kota Batam.
- Bantuan Beasiswa di Riau dan Kepulauan Riau.
- Bantuan Sanitasi/Sumur Bor
- Bantuan Ambulance
- Bantuan Penerangan Jalan Umum (PJU)

CSR Policies and Strategies during the COVID-19 Pandemic and the New Normal

- *Masks and Personal Protective Equipment (PPE) Assistance for the Community*
- *Sanitation Assistance and Disinfectant Spraying in Various Regions of Riau and Riau Islands*
- *Sustainable Finance Action Plan Program for the Riau and Riau Islands region with a free Mobile Community Health program.*
- *The provision of hand washing facilities in various strategic locations reduces the impact of the COVID-19 pandemic.*

Excellent CSR Program during the COVID-19 Pandemic and the New Normal

- *5,000 Doses of Vaccination for Communities around Bank Operations*
- *Vaccination Phase II 3,000 Doses for Communities around Bank Operations*
- *Trash Can Assistance in Dumai City.*
- *New Classroom Assistance (RKB).*
- *Assistance with infrastructure for houses of worship in Riau and the Riau Archipelago.*
- *School Uniforms for SDN, SMPN in Batam City.*
- *Scholarship Assistance in Riau and Riau Islands.*
- *Sanitation Assistance/Borewell*
- *Ambulance Assistance*
- *Public Street Lighting Assistance (PJU)*

KEGIATAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Di tahun 2021, berbagai kegiatan dilaksanakan Bank Riau Kepri dalam upaya meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui beberapa kegiatan sebagai salah satu sarana terbaik untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata. Program yang telah dilaksanakan dalam bentuk kontribusi berupa Rumah Layak Huni, bantuan sembako, sarana dan prasarana, bantuan organisasi sosial, bantuan untuk masyarakat miskin, pembangunan taman dan lain-lain. Dana Program Bank Riau Kepri Peduli yang disalurkan pada kegiatan ini sebesar Rp.3.557.166.189."

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ACTIVITIES

In 2021, Bank Riau Kepri will carry out various activities in an effort to improve Community Empowerment through several activities as one of the best means to help improve the quality of life of the community significantly. Programs that have been implemented in the form of contributions in the form of livable housing, basic food assistance, facilities and infrastructure, assistance to social organizations, assistance for the poor, park construction and others. The Bank Riau Kepri Peduli Program Funds distributed in this activity amounted to Rp.3,557,166,189."

KEGIATAN KEAGAMAAN

Bank Riau Kepri percaya, bahwa dengan agama maka kita mampu menata kehidupan sosial dan kemasyarakatan agamis yang madani. Rusaknya tatanan dan nilai-nilai moral dikarenakan ketidak pedulian masyarakat kepada nilai-nilai luhur dalam agama. Untuk itu, di tahun 2021 Bank Riau Kepri tetap mengutamakan program sosial bagi masyarakat pada bidang Keagamaan yang didasari dari Kultur suku yang berada di daerah Riau dan Kepulauan Riau yang bersuku Melayu. Bank Riau Kepri telah melaksanakan serangkaian kegiatan di antaranya, membantu lembaga dan organisasi keagamaan, membantu kegiatan dakwah organisasi keagamaan, pembangunan fasilitas rumah ibadah dan tempat belajar keagamaan.

KEGIATAN PENDIDIKAN

Di tahun 2021 berbagai kegiatan dilaksanakan Bank Riau Kepri dalam upaya untuk meningkatkan dunia pendidikan di Riau dan Kepri. Bank telah melaksanakan beberapa kegiatan khususnya dibidang Pendidikan diantaranya, kegiatan bantuan biaya pendidikan, sarana dan prasarna pendidikan, beasiswa bagi siswa dan mahasiswa, serta bantuan kepada tenaga pengajar maupun penyediaan fasilitas belajar mengajar. Bank Riau Kepri percaya, bahwa pendidikan mampu mambantu meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat secara nyata dan mencerdaskan bangsa dan daerah.

KEGIATAN KEPEMUDAAN DAN PEMBINAAN OLAH RAGA

Berbagai kegiatan dan program dilaksanakan Bank Riau Kepri dalam upaya membangun semangat kepemudaan yang terarah dan posisif, serta pembinaan keolah-ragaan agar jiwa-jiwa muda terpancing untuk aktif berprestasi. Sepanjang tahun 2021, Bank telah memberikan kontribusi berupa bantuan kegiatan olaharaga dalam bentuk sarana dan Prasarana.

KEGIATAN ADAT/BUDAYA/SENI

Di tahun 2021, Bank Riau Kepri tetap berkomitmen untuk turut mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan. Serangkaian program telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembangunan rumah adat, bantuan dan pembelian alat kesenian ke lingkung seni dan sebagainya.

DAMPAK KEGIATAN

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan Bina Lingkungan (BL) dan lebih dikenal ***Corporate Social Responbility*** (CSR) yang dilaksanakan Perusahaan sepanjang tahun 2021 diharapkan dapat memberikan dampak berupa pemerataan dan perbaikan ekonomi masyarakat di lingkungan pelaksanaan program TJSL dan BL sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

RELIGIOUS ACTIVITY

Bank Riau Kepri believes that with religion we are able to organize social and religious life in a civilized manner. The destruction of order and moral values is due to the people's ignorance of the noble values in religion. For this reason, in 2021 Bank Riau Kepri will continue to prioritize social programs for the community in the field of Religion based on tribal culture in the Riau and Riau Archipelago areas with Malay ethnicities. Bank Riau Kepri has carried out a series of activities including, assisting religious institutions and organizations, assisting the da'wah activities of religious organizations, building facilities for houses of worship and places of religious learning.

EDUCATIONAL ACTIVITIES

In 2021 various activities will be carried out by Bank Riau Kepri in an effort to improve the world of education in Riau and Riau Islands. The Bank has carried out several activities, especially in the field of Education, including, providing assistance for education costs, educational facilities and infrastructure, scholarships for students and students, as well as assistance to teaching staff as well as providing teaching and learning facilities. Bank Riau Kepri believes that education is able to significantly improve the standard of living and quality of life of the community and educate the nation and region.

YOUTH ACTIVITIES AND SPORTS DEVELOPMENT

Various activities and programs are carried out by Bank Riau Kepri in an effort to build a focused and positive youth spirit, as well as sports coaching so that young souls are provoked to actively excel. Throughout 2021, the Bank has contributed in the form of assistance for sports activities in the form of facilities and infrastructure.

TRADITIONAL/CULTURAL/ARTS ACTIVITIES

In 2021, Bank Riau Kepri remains committed to supporting arts and cultural activities. A series of programs have been implemented in the form of traditional house construction activities, assistance and purchase of art tools to the arts environment and so on.

IMPACT OF ACTIVITIES

The implementation of the Environmental Social Responsibility (TJSL) and Community Development (BL) programs and better known as Corporate Social Responsibility (CSR) carried out by the Company throughout 2021 is expected to have an impact in the form of equity and improvement in the community's economy in the implementation of the TJSL and BL programs so as to increase standard of living of the people.

PETUNJUK PENCEGAHAN CORONAVIRUS (COVID-19)

Petunjuk Penggunaan Hand Sanitizer

a. Kantor Pusat wajib menyediakan ***hand sanitizer*** di setiap lantai, antara lain:
   - Di dekat pintu lift;
   - Di dekat pintu masuk ruang kerja
   - Di dekat mesin absensi Pegawai;

b. Kantor Layanan (Cabang, Capem, Kedai, Butik, Kantor Kas, ***Payment Point)*** wajib menyediakan ***hand sanitizer*** di setiap lantai, antara lain:
   - Di dekat pintu masuk Kantor Layanan;
   - Di dekat mesin absensi Pegawai;
   - Di meja petugas front liner (Teller, Customer Service dan Counter voucher/slip))

Petunjuk Penggunaan Alat Pendeteksi Suhu Tubuh (*Thermal Scanner*) dengan Petunjuk Teknis

a. Unit Kantor dan Unit Kerja menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh (***Thermal Scanner***) dengan petunjuk teknis sebagai berikut:
   - Satpam (depan pintu masuk Kantor) bertugas melakukan deteksi suhu tubuh dari pegawai/ tamu/ nasabah yang datang.
     Batas normal suhu tubuh manusia:
     - Suhu tubuh normal bayi : 36,3 - 37,7 derajat Celsius;
     - Suhu tubuh normal anak : 36,1 - 37,7 derajat Celsius;
     - Suhu tubuh normal orang dewasa : 36,5 - 37,9 derajat Celsius.

     Deteksi dini terhadap gejala klinis terinfeksi Corona virus:
     - Gejala demam ≥ 38°C
     - Batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan
     - Gangguan pernapasan/pneumonia ringan hingga berat
   - Jika suhu tubuh pegawai/tamu/nasabah lebih dari 38°C dan mengalami gejala Coronavirus (seperti: batuk, pilek dan nyeri tenggorokan/ sesak napas), maka Pegawai/Tamu/Nasabah untuk diarahkan ke Rumah Sakit terdekat dan tidak diperbolehkan memasuki Kantor;
   - Dalam melakukan deteksi suhu tubuh maka Satpam yang berada di depan pintu masuk (untuk Kantor Layanan yang tidak tersedia Satpam dapat dilakukan oleh Pegawai lainnya yang ditunjuk) agar menjalankan skenario/script berikut :

CORONAVIRUS (COVID-19) PREVENTION INSTRUCTIONS

Instructions for Use of Hand Sanitizer

a. The Head Office is required to provide hand sanitizers on every floor, including:
   - *By the elevator doors;*
   - *Near the entrance of the study*
   - *Near the employee attendance machine;*

b. Service Offices (Branches, Head Offices, Shops, Boutiques, Cash Offices, Payment Points) are required to provide hand sanitizers on every floor, including:
   - *Near the entrance of the Service Office;*
   - *Near the employee attendance machine;*
   - *At the front liner clerk's desk (Teller, Customer Service and Counter voucher/slip))*

Instructions for Use of a Thermal Scanner with Technical Instructions

a. Office Units and Work Units provide a body temperature detector (Thermal Scanner) with the following technical instructions:
   - *The security guard (in front of the office entrance) is in charge of detecting the body temperature of employees / guests / customers who come.*
     Normal limits of human body temperature:
     - *Baby's normal body temperature: 36.3 - 37.7 degrees Celsius;*
     - *Child's normal body temperature: 36.1 - 37.7 degrees Celsius;*
     - *Normal body temperature for adults: 36.5 - 37.9 degrees Celsius.*

     Early detection of clinical symptoms of being infected with Coronavirus:
     - *Symptoms of fever 38°C*
     - *Cough/ runny nose/ sore throat*
     - *Mild to severe respiratory distress/pneumonia*

   - *If the employee/guest/customer's body temperature is more than 38°C and has symptoms of Coronavirus (such as: cough, runny nose and sore throat/ shortness of breath), then the Employee/Guest/ Customer should be directed to the nearest hospital and not allowed to enter the office;*
   - *In detecting body temperature, the security guard who is in front of the entrance (for service offices where security is not available can be done by other appointed employees) to run the following scenario/ script:*

No	Kerangka *Framework*	Skenario *(Script)*
1	Greeting *Greeting*	Assalamualaikum, Selamat pagi/siang/sore, Selamat datang di Bank Riau Kepri, Ada yang bisa dibantu Bapak/Ibu?" *Assalamualaikum, Good morning/afternoon/evening, Welcome to Bank Riau Kepri, Is there anything I can help you with?"*
2	Menyampaikan Tujuan *Delivering Goals*	Mohon maaf Bapak/Ibu Untuk mendukung pencegahan virus corona, Kami akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh *Sorry, sir / madam. To support the prevention of the corona virus, we will do a body temperature check*
3	Pengukuran suhu tubuh *Body temperature measurement*	
	Jika suhu tubuh pegawai/tamu/nasabah < 38° C *If the employee/guest/customer's body temperature is < 38°C*	Jika tidak lebih dari 38 derajat celcius, selanjutnya Satpam melakukan seperti biasa dengan mempersilahkan pegawai/tamu/ nasabah untuk memasuki kantor *If it is not more than 38 degrees Celsius, then the security guard will do as usual by allowing employees/guests/customers to enter the office*
	Jika suhu tubuh pegawai/tamu/nasabah ≥ 38° C *If the employee/guest/customer's body temperature is 38° C*	Jika pegawai/tamu/nasabah memiliki suhu badan ≥ 38 derajat celcius, agar Satpam melakukan wawancara kepada pegawai/tamu/nasabah dengan menanyakan : a. Apakah Bapak/ Ibu sedang mengalami batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan dan sesak napas? b. Apakah Bapak/ Ibu dalam kurun waktu <14 hari melakukan perjalanan ke Negara atau daerah terjangkit? (minta disebutkan nama Negara atau daerah)? c. Apabila salah satu jawaban dari poin a atau b, pegawai/tamu/nasabah menjawab "IYA" memiliki riwayat tersebut di atas, maka Satpam menyarankan pegawai/tamu/ nasabah untuk ke Rumah Sakit terdekat dan melarang pegawai/ tamu/ nasabah untuk memasuki kantor. *If the employee/guest/customer has a body temperature of 38 degrees Celsius, the security guard should conduct an interview with the employee/guest/customer by asking:* *a. Are you experiencing cough/cold/sore throat and shortness of breath?* *b. Have you traveled to the affected country or area within <14 days? (ask for the name of the country or region)?* *c. If one of the answers to points a or b, the employee/guest/customer answers "YES" having the above mentioned history, then the security guard advises the employee/guest/customer to go to the nearest hospital and prohibits the employee/guest/customer from entering the office.*

Petunjuk Pembersihan Lingkungan Kerja

1. ***Cleaning Service*** agar melakukan pembersihan di Lingkungan Kerja dengan prosedur sebagai berikut :
   - Wajib membersihkan meja dan kursi kantor setiap pagi hari (Jam 07.00 WIB), istirahat siang (Jam 12.00 WIB) dan setelah jam kantor selesai (Jam 17.00 WIB dan/atau setelah pegawai pulang kantor);
   - Membersihkan lift dan tombol lift dengan melap dan menyemprotkan cairan disinfektan setiap 1 (satu) jam sekali;
   - Membersihkan semua railing tangga dan semua gagang pintu, contoh pintu masuk, pintu ruang kerja dan pintu ruang ATM dll, setiap 1 (satu) jam sekali.
2. Dalam rangka pencegahan dan penyebaran penyakit/virus, Bank wajib melakukan penyemprotan desinfektan dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Kondisi normal penyemprotan desinfektan dilakukan sebulan sekali.
   b. Kondisi wabah penyakit/virus penyemprotan desinfektan dilakukan seminggu sekali.

Work Environment Cleaning Instructions

1. *Cleaning Service to carry out cleaning in the Work Environment with the following procedures:*
   - *Mandatory cleaning of office desks and chairs every morvning (7.00 WIB), lunch break (12.00 WIB) and after office hours are finished (17:00 WIB and/or after employees leave the office);*
   - *Cleaning the elevator and elevator buttons by wiping and spraying disinfectant every 1 (one) hour;*
   - *Clean all stair railings and all door handles, for example entrance doors, workspace doors and ATM room doors, etc., once every 1 (one) hour.*
2. *In the context of preventing and spreading disease/ virus, Banks are required to spray disinfectant with the following provisions:*
   a. Under normal conditions, disinfectant spraying is carried out once a month.
   b. In disease/virus outbreak conditions, disinfectant spraying is carried out once a week.

Tata Cara Etika Batuk

Cough etiquette



Tata Cara Mencuci Tangan

1. Kebersihan tangan dengan alkohol handrub selama 20-30 detik bila tangan tidak tampak kotor

How to Wash Hands

1. *Clean hands with alcohol handrub for 20-30 seconds if hands don't look dirty*



1. Kebersihan tangan dengan mencuci tangan di air mengalir pakai sabun selama 40-60 detik bila tangan tampak kotor

2. *Hand hygiene by washing hands in running water with soap for 40-60 seconds if hands look dirty*





Tata Cara Penggunaan Masker

How to Use Mask







1. Masker harus pas menutup wajah:
   a. Bagian masker yang berwarna menghadap keluar, dengan strip logam di bagian atas.
   b. Tali atau pita elastik ditempatkan dengan benar untuk menjaga masker tetap di tempatnya.
   c. Masker harus benar-benar menutupi hidung, mulut dan dagu.
   d. Strip logam menempel pada batang hidung dan masker harus pas menutup wajah.

1. *The mask must fit snugly over the face:*
   a. The colored part of the mask faces out, with a metal strip on top.
   b. The elastic band or strap is properly placed to keep the mask in place.
   c. The mask must completely cover the nose, mouth and chin.
   d. The metal strip is attached to the bridge of the nose and the mask must fit snugly over the face.

2. Hindari menyentuh masker setelah dipasang pada wajah Anda karena terlalu sering menyentuh masker akan mengurangi perlindungannya. Jika Anda harus melakukannya, cuci tangan Anda sebelum dan setelah menyentuh masker.
3. Saat melepaskan masker, hindari menyentuh bagian luar masker karena bagian ini mungkin dipenuhi kuman.
4. Setelah melepaskan masker, masukkan masker ke dalam kantung plastik atau kertas sebelum memasukkannya ke tempat sampah yang memiliki tutup.
5. Masker harus diganti sekurang-kurangnya setiap hari. Segera ganti masker jika masker rusak atau kotor.

Untuk Pegawai agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Tidak melakukan kontak fisik dengan orang yang sedang dalam kondisi batuk, demam, dan sesak nafas.
- Membersihkan tangan secara rutin dan dilarang memegang mulut, hidung dan mata. Mencuci tangan dengan sabun cair, bilas setidaknya 20 detik sebelum dikeringkan. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan dapat menggunakan cairan ***hand sanitizer***,
- Selalu menjalankan pola hidup sehat, hindari konsumsi daging yang tidak dimasak, dan penyediaan makanan dengan kondisi sanitasi yang tidak baik;
- Mengkonsumsi vitamin dan istirahat yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh;
- Gunakan masker bila dalam kondisi tidak fit, memiliki penyakit kronis dan berada di kerumunan orang.
- Bila mengalami gejala demam, batuk, disertai kesulitan bernafas, segera melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit terdekat.
- Petugas ***frontliner*** diperkenankan menggunakan masker dan sarung tangan karet (latex) saat melayani nasabah.

Petunjuk Penanganan Pegawai yang Terkonfirmasi Positif Terkena Coronavirus

(COVID-19)

Pegawai yang terbukti positif terkena Coronavirus, langkah penanganannya sebagai berikut:

a. Pegawai terbukti positif terkena Coronavirus :
   - Kasus konfirmasi tanpa gejala (OTG) untuk penanganan atau tempat isolasi melalui penjaminan Dinas Kesehatan (fasilitas isolasi yang disediakan oleh pemerintah). Dan apabila kapasitas tempat isolasi melalui penjaminan Dinas Kesehatan sudah penuh atau kurang memadai maka dapat di arahkan ke penjaminan Bank (Rumah sakit yang bekerja sama dengan PT Bank Riau Kepri).

2. Avoid touching the mask after it has been placed on your face as touching the mask too often will reduce its protection. If you must, wash your hands before and after touching the mask.

3. When removing the mask, avoid touching the outside of the mask because this area may be full of germs.

4. After removing the mask, place the mask in a plastic or paper bag before placing it in a trash can with a lid.

5. Masks should be changed at least every day. Immediately replace the mask if the mask is damaged or dirty.

For Employees to take the following steps:

- *Do not make physical contact with people who are in a condition of cough, fever, and shortness of breath.*
- *Clean hands regularly and do not touch the mouth, nose and eyes. Wash hands with liquid soap, rinse for at least 20 seconds before drying. If there are no hand washing facilities, you can use hand sanitizer.*
- *Always run a healthy lifestyle, avoid consuming meat that is not cooked, and providing food with unsanitary conditions;*
- *Consuming vitamins and adequate rest to maintain the immune system;*
- *Use a mask if you are not fit, have a chronic illness and are in a crowd.*
- *If you experience symptoms of fever, cough, accompanied by difficulty breathing, immediately go to the nearest hospital.*
- *Frontliner officers are allowed to use masks and latex gloves when serving customers.*

Instructions for Handling Employees Confirmed Positive for Coronavirus

(COVID-19)

Employees who are tested positive for Coronavirus, the steps for handling it are as follows:

a. Employees tested positive for Coronavirus:
   - *Asymptomatic confirmed cases (OTG) for treatment or isolation through the Health Office guarantee (isolation facilities provided by the government). And if the capacity of the isolation place through the Health Service guarantee is full or inadequate, it can be directed to a bank guarantee (a hospital in collaboration with PT Bank Riau Kepri).*

- Kasus konfirmasi dengan gejala untuk penanganannya melalui penjaminan Bank (Rumah sakit yang bekerja sama dengan PT Bank Riau Kepri).

b. Terhadap Unit Kantor/Unit Kerja terdapat Pegawai terbukti positif terkena Coronavirus maka :
   - Seluruh Pegawai di tempat Pegawai yang terbukti positif Coronavirus untuk segera dilakukan tracking agar mengetahui pegawai-pegawai yang mempunyai kontak erat dengan pegawai yang terkonfirmasi positif.
   - Berdasarkan hasil tracking yang dilakukan apabila terdapat pegawai yang mempunyai history kontak erat dengan pegawai terkonfirmasi positif untuk segera melakukan Swap Tes atau Rapid Tes Antigen difasilitas kesehatan;
   - Keluarga Pegawai yang terbukti positif Coronavirus untuk segera memeriksakan ke difasilitas kesehatan;
   - Kantor tempat Pegawai terbukti positif Coronavirus akan dilakukan pembersihan secara standar kesehatan pemerintah;
   - Operasional kantor dialihkan ke Backup Site/ lokasi kantor terdekat.
c. Terhadap pegawai yang telah selesai melaksanakan isolasi difasilitas pemerintah maupun rumah sakit dapat kembali bekerja dengan ketentuan sebagai berikut :
   - Pegawai yang terkonfirmasi positif tanpa gejala (OTG) yang telah selesai menjalankan isolasi untuk ditambah isolasi mandiri selama 3 (tiga) hari dirumah
   - Pegawai konfirmasi dengan gejala yang telah selesai menjalankan isolasi untuk ditambah isolasi mandiri selama mininal 7 (tujuh) hari dan maksimal 14 (empat belas) hari dirumah
d. Pedoman Eskalasi
   - Pedoman eskalasi status risiko Coronavirus dan Operasional di setiap Kantor Layanan dan Kantor Pusat, sebagai berikut :

- *Confirmed cases with symptoms for handling through bank guarantees (hospitals in collaboration with PT Bank Riau Kepri).*

b. For Office Units/Work Units there are employees who are tested positive for Coronavirus, then:
   - *All employees at the employees' premises who are proven positive for the Coronavirus must immediately be tracked to find out which employees have close contact with employees who are confirmed positive.*
   - *Based on the results of tracking carried out if there are employees who have a history of close contact with positive confirmed employees to immediately carry out Swap Tests or Rapid Antigen Tests at health facilities;*
   - *Employees' families who are tested positive for Coronavirus to immediately check in a health facility;*
   - *Offices where employees are tested positive for Coronavirus will be cleaned according to government health standards;*
   - *Office operations are transferred to the Backup Site/ nearest office location.*

c. Employees who have finished carrying out isolation in government facilities or hospitals can return to work with the following conditions:
   - *Employees who are confirmed positive without symptoms (OTG) who have finished carrying out isolation to be added to self-isolation for 3 (three) days at home*
   - *Confirmation employees with symptoms who have finished carrying out isolation to be added to self-isolation for a minimum of 7 (seven) days and a maximum of 14 (fourteen) days at home*

d. Escalation Guidelines
   - *Guidelines for escalating the Coronavirus and Operational risk status in each Service Office and Head Office, as follows:*

No	Definisi/Kondisi yang Terjadi *Definition/Conditions Happening*	Status Risiko Virus Corona *Corona Virus Risk Status*	Status Operasional Kantor *Office Operational Status*	Akses Masuk kantor *Office Login*	Tindakan *Action*	Komunikasi *Communication*
1	Belum ada konfirmasi kasus posistif *There is no confirmed positive case*	Hijau *Green*	Operasional penuh *Full operational*	Terbuka penuh *Fully open*	1. Penyediaan hand sanitizer dan alat ukur suhu tubuh 2. Himbauan untuk menunda perjalanan ke Negara dan daerah terjangkit 3. Deteksi suhu badan dan gejala Virus Corona sebelum masuk kantor maksimal 37,5° C 4. Melarang atau mencegah tamu/ nasabah yang mengalami gejala atau positif Virus Corona *1. Provision of hand sanitizers and body temperature measuring devices* *2. An appeal to postpone travel to affected countries and areas* *3. Detect body temperature and symptoms of Corona Virus before entering the office a maximum of 37.5° C* *4. Prohibit or prevent guests/customers who experience* symptoms or are positive for the Corona Virus	Internal *Internal*
2	Telah ada konfirmasi adanya kasus positif disekitar kantor *There has been confirmation of a positive case around the office*	Kuning *Yellow*	Operasional penuh dengan pencegahan *Full operation with prevention*	Terbuka dengan pengawasan *Open with supervision*		Internal *Internal*
3	Adanya dugaan pegawai dan/atau keluarga pegawai terpapar virus *There are suspicions that employees and/or employees' families have been exposed to the virus*	Oranye *orange*	Operasional penuh atau sebagian dengan kewaspadaan *Full or partial operation with vigilance*	Terbuka dengan pembatasan *Open with restrictions*	1. Evakuasi/isolasi sebagian 2. Membawa pegawai dan/atau anggota keluarga pegawai untuk diperiksa di Rumah Sakit yang telah ditunjuk Pemerintah *1. Evacuation/partial isolation* *2. Bringing employees and/or family members of employees to be examined at a hospital that has been appointed by the government*	Internal *Internal*

No	Definisi/Kondisi yang Terjadi *Definition/Conditions Happening*	Status Risiko Virus Corona *Corona Virus Risk Status*	Status Operasional Kantor *Office Operational Status*	Akses Masuk kantor *Office Login*	Tindakan *Action*	Komunikasi *Communication*
4	Adanya pegawai dan/ atau keluarga pegawai terbukti terkena Coronavirus *There are employees and/or employees' families who are proven to be infected with the Coronavirus*	Merah *Red*	Isolasi atau evakuasi *Isolation or evacuation*	Tutup *Closed*	1. Membawa pegawai dan/atau keluarga pegawai untuk diperiksa ke Rumah Sakit yang telah ditunjuk Pemerintah 2. Evakuasi/isolasi seluruh pegawai yang berada satu kantor 3. Kantor operasional dialihkan ke Cabang atau kantor alternatif 4. Pembersihan seluruh ruangan kantor dengan penyemprotan desinfektan. 5. Kantor tersebut ditutup minimal 1 (satu) hari dan atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan terhadap pegawai yang mempunyai riwayat kontak erat. 6. Terhadap pegawai yang menunggu hasil Pemeriksaan di wajibkan melakukan isolasi mandiri dirumah. *1. Bringing employees and/or their families for examination to a hospital that has been appointed by the government* *2. Evacuate/isolate all employees in the same office* *3. The operational office is transferred to an alternative branch or office* *4. Cleaning the entire office space by spraying disinfectant.* *5. The office is closed for at least 1 (one) day and or until the results of the examination of employees who have a history of close contact are released.* *6. Employees who are waiting for the results of the examination are required to self-isolate at home.*	Internal dan Eksternal *Internal and External*

a. Pegawai hamil dan pegawai yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti sakit paru-paru, asma, ginjal, lever, stroke, pneumonia diizinkan untuk tidak masuk kantor dalam waktu tertentu dengan persetujuan Direksi dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter.

a. Pregnant employees and employees who have a history of chronic diseases such as lung disease, asthma, kidney, liver, stroke, pneumonia are allowed to not enter the office within a certain time with the approval of the Board of Directors by attaching a certificate from the doctor.

LAPORAN KEUANGAN
FINANCIAL STATEMENT

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI

LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2021
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2021
AND
INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

DAFTAR ISI / *CONTENTS*

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2021
AND
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

DAFTAR ISI

CONTENTS

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
	Halaman/ *Page*	
Laporan Posisi Keuangan	1-3	*Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain	4	*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensif Income*
Laporan Perubahan Ekuitas	5-6	*Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas	7-8	*Statements of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan	9-191	*Notes of the Financial Statements*
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditors' Report***

SURAT PERNYATAAN DIREKSI /
BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER

bankriaukepri
tumbuh kembangkan usaha

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2021
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Andi Buchari
   Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru
   Nomor Telp : 0761-47070
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Said Syamsuri
   Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru
   Nomor Telp : 0761-47070
   Jabatan : Direktur Operasional

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusugan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Riau Kepri ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank.

Demikian pernyatsan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENT'S
FOR THE YEARS ENDED
31 DESEMBER 2021
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI

We, the undersigned :

1. *Name* : *Andi Buchari*
   Office Address : *Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru*
   Phone Number : *0761-47070*
   Function : *President Director*

2. *Name* : *Said Syamsuri*
   Office Address : *Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru*
   Phone Number : *0761-47070*
   Function : *Operational Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and representation of the company's financial statements.*
2. *The company's financial statements have been prepared and presented in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia.*
3. a. *All information in the company's financial statement has been disclosed in a complete and truthful manner.*
   b. *The company's financial statement do not contain any incorrect information or material fact, not do they omit information or material fact.*
4. *We are responsible for the company's internal control system.*

We certify the accuracy of this statement.

Pekanbaru, 15 Februari 2022 / *Pekanbaru, February 15th, 2022*
Atas nama dan mewakili Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors*

METERAI TEMPEL

DR. IR. H. Andi Buchari, MM.
Direktur Utama / *President Director*

H. Said Syamsuri, SE., MM., Ak. CA.
Direktur Operasional / *Operational Director*

Kantor Pusat :
Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri
Jl. Jend. Sudirman No. 462 Pekanbaru
Telp. : 0761-47070
Fax. : 0761-42389

LAPORAN KEUANGAN /
FINANCIAL STATEMENTS

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ *Notes*	2020	
Aset				***Assets***
Kas	719.393.532.041	2f,3	914.232.186.459	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2.042.746.021.054	2g,4	1.496.657.126.730	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	88.766.906.063	2g,5	121.447.694.571	*Current account with other banks*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.445.146)		(1.957.779)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah neto	88.760.460.917		121.445.736.792	*Total net*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.334.381.279.547	2h,6	616.991.941.034	*Placements with Bank Indonesia and other bank*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-		(6.589.425)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah neto	3.334.381.279.547		616.985.351.609	*Total net*
Efek-efek	5.238.383.991.729	2i,2j,7	5.689.526.638.585	*Marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(897.156.165)		(5.545.008.417)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah neto	5.237.486.835.564		5.683.981.630.168	*Total net*
Kredit yang diberikan, Piutang dan Pembiayaan syariah		2e,2k,2l, 2m,2v,8		*Loans, sharia Receivables and Financing*
- pihak berelasi	902.461.763		2.470.082.839	*related parties -*
- pihak ketiga	18.884.011.539.366		18.958.478.974.546	*third parties -*
Jumlah	18.884.914.001.129		18.960.949.057.385	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(496.609.862.319)		(527.308.458.214)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah neto	18.388.304.138.811		18.433.640.599.171	*Total net*
Penyertaan saham	1.555.783.335	2e,2n,9	1.655.783.335	*Investments in shares*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-		(100.000.000)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah neto	1.555.783.335		1.555.783.335	*Total net*
Aset tetap		2p,2r,10		*Fixed assets*
Harga perolehan	721.049.634.633		697.192.157.551	*Cost*
Akumulasi penyusutan	(324.117.851.983)		(272.027.094.844)	*Accumulated depreciation*
Nilai buku, neto	396.931.782.650		425.165.062.707	*Net book value*
Aset pajak tangguhan	32.099.204.792	2ae,11	33.214.581.626	*Deffered tax assets*
Aset lain-lain	538.026.741.803	2o,q,s,t,12	473.087.722.475	*Other assets*
Jumlah aset	**30.779.685.780.515**		**28.199.965.781.072**	*Total assets*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas				***Liabilities, Temporary Syirkah Funds and Equity***
Liabilitas				***Liabilities***
Liabilitas segera	667.015.299.353	2w,2ac,13	769.525.236.968	*Liabilities due immediately*
Simpanan dari nasabah dan Dana Syirkah Temporer		2e,2x,14		*Deposits from customers and Temporary Syirkah Funds*
Giro dan giro wadiah				*Currents account and Wadiah*
- pihak berelasi	4.063.765.989.048		2.063.421.080.336	*related parties -*
- pihak ketiga	1.543.613.911.158		1.389.610.821.956	*third parties -*
Jumlah	5.607.379.900.206		3.453.031.902.292	*Total*
Tabungan				*Savings*
- pihak berelasi	13.145.694.446		12.676.555.859	*related parties -*
- pihak ketiga	7.436.147.134.831		6.339.708.712.794	*third parties -*
Jumlah	7.449.292.829.276		6.352.385.268.653	*Total*
Deposito berjangka				*Time Deposits*
- pihak berelasi	5.344.000.000		11.301.085.714	*related parties -*
- pihak ketiga	12.553.715.956.121		12.325.926.146.665	*third parties -*
Jumlah	12.559.059.956.121		12.337.227.232.379	*Total*
Jumlah simpanan, dana syirkah	**25.615.732.685.604**		**22.142.644.403.324**	*Total deposits, syirkah funds*
Simpanan dari bank lain		2e,2y,15	-	*Deposit from other banks*
- pihak berelasi	-		-	*related parties -*
- pihak ketiga	1.040.800.354.219		1.958.767.697.599	*third parties -*
Jumlah	**1.040.800.354.219**		**1.958.767.697.599**	*Total*
Pinjaman yang diterima	151.442.499.737	2e,16	113.909.104.189	*Borrowings*
Utang pajak	32.036.137.593	2ae,18	41.546.514.105	*Taxes payable*
Imbalan kerja	26.051.364.855	2ac,19	30.008.311.528	*Employee benefit*
Liabilitas lain-lain	59.448.707.344	20	63.956.619.625	*Other liabilities*
Jumlah liabilitas	**27.592.527.048.706**		**25.120.357.887.318**	*Total liabilities*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN POSISI KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
Ekuitas				***Equity***
Modal saham Modal dasar - 34.000.000 saham Seri A dan 6.000.000 saham Seri B. Nilai nominal Rp100.000 per saham				*Share capital* *Authorized capital 34,000,000 Series A shares and 6,000,000 Series B shares. Nominal value of Rp 100,000 per share*
Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.031.607 saham pada 31 Desember 2021 dan 11.004.607 saham pada 31 Desember 2020	1.103.160.700.000	1a,21	1.100.460.700.000	*Issued and fully paid capital of 11,031,607 shares as of 31 December 2021 and 11.004.607 shares as of 31 December 2020.*
Tambahan modal disetor	4.085.300.525	22	4.785.300.525	*Additional paid in capital*
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari efek-efek tersedia untuk dijual	2.232.813.053	7	(687.391.990)	*Unrealized gains (loss) net on changes in fair value of available for sale marketable securities*
Saldo laba		23		*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya	1.622.420.554.773		1.436.832.699.051	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	455.259.363.458		538.216.586.168	*Unappropriated*
Jumlah saldo laba	2.077.679.918.231		1.975.049.285.220	*Total retained earnings*
Jumlah ekuitas	**3.187.158.731.809**		**3.079.607.893.755**	*Total equity*
Jumlah liabilitas dan ekuitas	**30.779.685.780.515**		**28.199.965.781.072**	*Total liabilities and equity*

Pekanbaru, 15 Februari 2022

Dr. Ir. H. Andi Buchari, MM.
Direktur Utama

H. Said Syamsuri, SE., MM., Ak., CA.
Direktur Operasional

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan/ Notes	2020	
Pendapatan dan beban operasional				***Operating income and expenses***
Pendapatan bunga dan syariah		2aa,24		*Interest and sharia income*
Pendapatan bunga	1.781.784.319.588		2.047.932.048.466	*Interest income*
Pendapatan syariah	432.068.126.903		268.863.007.039	*Sharia income*
Jumlah pendapatan bunga, syariah	**2.213.852.446.491**		**2.316.795.055.505**	*Total interest and sharia income*
Beban bunga dan syariah		2aa,2ab,		*Interest and sharia expenses*
Beban bunga	(768.749.403.220)	25	(879.843.243.876)	*Interest expenses*
Beban syariah	(153.456.488.663)		(130.147.923.966)	*Sharia expense*
Provisi dan komisi	(243.677.558)		(1.162.303.427)	*Fees and commission*
Jumlah beban bunga, syariah	**(922.449.569.440)**		**(1.011.153.471.269)**	*Total interest and sharia expenses*
Pendapatan bunga dan syariah, neto	**1.291.402.877.050**		**1.305.641.584.236**	*Net interest and sharia income*
Pendapatan operasional lainnya	207.345.358.112	26	318.581.261.149	*Other operating income*
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif	(35.018.680.750)	2m,2v,27	(44.672.647.185)	*Allowance for impairment losses of value productive assets*
Beban operasional lainnya		28		*Other operating expenses*
Umum dan administrasi	(269.257.879.253)		(271.697.020.369)	*General and administrative*
Tenaga kerja	(575.384.161.486)		(565.394.525.982)	*Personnel*
Lainnya	(47.752.556.833)		(45.220.560.658)	*Others*
Jumlah beban operasional lainnya	**(912.394.597.572)**		**(862.312.107.009)**	*Total other operating expenses*
Laba operasional	**551.334.956.841**		**697.238.091.191**	*Operating income*
Pendapatan dan (beban) non operasional		29		***Non operating income and (expenses)***
Pendapatan non-operasional	12.426.426.821		6.515.013.570	*Non-operating income*
Beban non-operasional	(48.665.030.749)		(30.898.568.746)	*Non-operating expenses*
Jumlah	**(36.236.603.928)**		**(24.383.555.176)**	*Total*
Laba sebelum pajak	**515.098.352.913**		**672.854.536.014**	*Income before tax*
Manfaat (beban) pajak penghasilan				***Income (expenses) tax***
Pajak kini	(126.372.383.280)		(171.864.077.880)	*Current tax expenses*
Pajak tangguhan	(485.609.050)		5.056.804.766	*Deferred tax*
Beban pajak tahun lalu	(7.226.922.537)		(42.077.623.596)	*Last year's tax expenses*
Beban pajak - neto	**(134.084.914.867)**	2ae,16	**(206.884.896.710)**	*Tax expenses - net*
Laba tahun berjalan	**381.013.438.046**		**463.969.639.304**	***Income for the year***
Penghasilan komprehensif lain				***Others comprehensive income***
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				*Items to be reclassified to profit or loss*
Keuntungan/ (kerugian) atas perubahan nilai wajar dari efek dalam kelompok tersedia untuk dijual	3.743.852.619		2.425.208.969	*Gain / (loss) on changes fair value of the effects in the group available for sale, after tax*
Pajak penghasilan terkait	(823.647.576)		(632.740.396)	*Income tax relating*
	2.920.205.043	jm	1.792.468.573	
Jumlah laba komprehensif	383.933.643.089		465.762.107.877	*Total comprehensive Income*
Laba bersih per saham	34.561	2af,32	42.561	*Net profit as authorized share capital*

Pekanbaru, 15 Februari 2022

Dr. Ir. H. Andi Buchari, MM.
Direktur Utama

H. Said Syamsuri, SE., MM., Ak., CA.
Direktur Operasional

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar untuk efek-efek tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan/ *Unrealized net gain (loss) on changes in fair value for available-for-sale securities - after deferred tax*	Saldo laba / *retained earnings*		Total ekuitas/ *Total equity*	
				Telah Ditentukan penggunaannya/*Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*		
Saldo per 31 Desember 2020	1.100.460.700.000	4.785.300.525	(687.391.990)	1.436.832.699.051	538.216.586.168	3.079.607.893.755	*Balance on December 31, 2020*
Tambahan modal disetor	-	2.000.000.000	-	-	-	2.000.000.000	*Additional paid - up capital*
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	2.700.000.000	(2.700.000.000)	-	-	-	-	*Reclasification from Additional paid-up capital*
Pembagian saldo laba							*Prior retained earnings*
Dividen	-	-	-	-	(278.381.783.582)	(278.381.783.582)	*Dividend*
Cadangan umum				185.587.855.722	(185.587.855.722)	-	*General reserve*
Koreksi saldo laba					(1.021.452)	(1.021.452)	
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	2.920.205.044	-	-	2.920.205.044	*Unrealised losses on available for sale marketable securities and government bonds*
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	381.013.438.046	381.013.438.046	*Net profit for the year*
Saldo per 31 Desember 2021	**1.103.160.700.000**	**4.085.300.525**	**2.232.813.053**	**1.622.420.554.773**	**455.259.363.458**	**3.187.158.731.809**	***Balance on December 31, 2021***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar untuk efek-efek tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan/ *Unrealized net gain (loss) on changes in fair value for available-for-sale securities - after deferred tax*	Saldo laba / *retained earnings*		Total ekuitas/ *Total equity*	
				Telah Ditentukan penggunaaannya/*Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unapproproriated*		
Saldo per 31 Desember 2019	1.082.760.700.000	19.785.300.525	(2.479.860.563)	1.501.956.562.377	383.270.192.042	2.985.292.894.381	*Balance on December 31, 2019*
Tambahan modal disetor	-	2.700.000.000	-	-	-	2.700.000.000	*Additional paid - up capital*
Reklasifikasi dari tambahan modal disetor	17.700.000.000	(17.700.000.000)	-	-	-	-	*Reclasification from Additional paid-up capital*
Pembagian saldo laba							*Prior retained earnings*
Dividen	-	-	-	-	(185.413.947.107)	(185.413.947.107)	*Dividend*
Cadangan umum	-	-	-	123.609.298.071	(123.609.298.071)	-	*General reserve*
							Application of PSAK 71
Koreksi CKPN penerapan PSAK 71	-	-	-	(188.733.161.397)	-	(188.733.161.397)	*Unrealised losses on available*
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	1.792.468.573	-	-	1.792.468.573	*for sale marketable securities and government bonds* *Net profit for the year*
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	463.969.639.304	463.969.639.304	*Net profit for the year*
Saldo per 31 Desember 2020	**1.100.460.700.000**	**4.785.300.525**	**(687.391.990)**	**1.436.832.699.051**	**538.216.586.168**	**3.079.607.893.755**	***Balance on December 31, 2020***

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
Arus kas dari aktivitas operasi			***Cash flows from operating activities***
Penerimaan bunga dan syariah	2.194.214.083.829	2.278.853.513.949	*Receipts of interest and sharia*
Pembayaran bunga, bagi hasil syariah	(936.799.662.988)	(1.012.330.495.560)	*Payments of Interest and sharia*
Penerimaan operasional lainnya	113.045.775.367	294.369.247.695	*Receipts of others operating*
Pembayaran beban umum dan administrasi	(241.611.754.644)	(198.496.639.198)	*Payments of general and administration*
Pembayaran beban tenaga kerja	(570.071.846.946)	(496.649.615.923)	*Payments of employee expenses*
Penerimaan (pembayaran) pendapatan (beban) non operasional bersih	(36.237.303.928)	(24.387.285.776)	*Receipts and payments of non operating income (expenses) net*
Pembayaran pajak penghasilan	(144.733.252.417)	(197.311.409.024)	*Payments of income taxes*
Arus kas sebelum perubahan aset operasi dan liabilitas operasi	377.806.038.274	644.047.316.162	*Cash flow before changes in operating assets and liabilities*
Penurunan (kenaikan) aset operasi			*Decrease (increase) in operating assets*
Surat berharga	451.142.646.856	(1.904.666.748.026)	*Marketable securities*
Kredit yang diberikan	76.035.056.256	(1.082.692.897.802)	*Loans*
Penyertaan saham	100.000.000	-	*Investments in shares*
Aset lain-lain	(49.728.809.151)	(221.880.915.732)	*Others Asset*
(Penurunan) kenaikan liabilitas operasi			*(Decrease) increase in operating liabilities*
Simpanan dari nasabah	3.473.088.282.279	2.205.592.756.488	*Deposit from costumers*
Simpanan dari bank lain	(917.967.343.380)	108.947.411.975	*Deposit from other banks*
Liabilitas segera	(57.530.672.547)	191.812.315.662	*Liabilities due immediately*
Utang pajak	1.623.570.088	3.239.127.805	*Tax payable*
Liabilitas lain-lain	(34.903.792.216)	(8.586.152.738)	*Others liabilities*
Jumlah	2.941.858.938.186	(708.235.102.369)	*Total*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	**3.319.664.976.460**	**(64.187.786.207)**	*Net cash provided by (used in) operating activities*
Arus kas dari aktivitas investasi			***Cash flows from investing activities***
Pembelian aset tetap	(23.857.477.082)	(21.842.593.963)	*Fixed asset buying*
Penjualan aset tetap, bersih	700.000	3.730.600	*Fixed asset selling, net*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	**(23.856.777.082)**	**(21.838.863.363)**	*Net cash provided by (used in) investing activities*
Arus kas dari aktivitas pendanaan			***Cash flows from financing activities***
Pinjaman yang diterima	37.533.395.568	32.831.394.467	*Borrowings*
Pembayaran dividen	(278.381.783.582)	(185.413.947.107)	*Dividend payment*
Koreksi saldo laba	(1.021.452)	-	*Correction of CKPN*
Koreksi CKPN penerapan PSAK 71	-	(188.733.161.397)	*application of PSAK 71*
Program kemitraan dan bina lingkungan	(21.000.000.000)	(21.000.000.000)	*Partnership and environment program*
Setoran modal saham	2.700.000.000	17.700.000.000	*Paid-up capital*
Tambahan modal disetor	(700.000.000)	(15.000.000.000)	*Additional paid-up capital*
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	**(259.849.409.467)**	**(359.615.714.036)**	*Net cash provided by (used in) financing activities*
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	3.035.958.789.911	(445.642.363.606)	*Net increase (decrease) cash and cash equivalents*
Kas dan setara kas awal tahun	3.149.328.948.794	3.594.971.312.400	*Cash and cash equivalents at the beginning of the year*
Kas dan setara kas akhir tahun	**6.185.287.738.706**	**3.149.328.948.794**	*Cash and cash equivalents at the end of the year*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2021
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	2020	
PENGUNGKAPAN TAMBAHAN			***SUPPLEMENTAL DISCLOSURES***
Kas dan setara kas terdiri dari:			*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas	719.393.532.041	914.232.186.459	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	2.042.746.021.054	1.496.657.126.730	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada bank lain	88.766.906.063	121.447.694.571	*Current account with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.334.381.279.547	616.991.941.034	*Placement with bank Indonesia and other bank*
Jumlah kas dan setara kas	**6.185.287.738.706**	**3.149.328.948.794**	*Total cash and cash equivalents*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN / *NOTES OF THE FINANCIAL STATEMENTS*

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ("Bank") didirikan sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Status pendirian Bank disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau No.10 Tahun 1975, yang kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No.18 tahun 1986 berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1962. Status pendirian Bank diatur dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah No.14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau No.5 Tahun 1998 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau No.14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Persetujuan perubahan status Bank dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 yang dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta No.33, yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 No.50. Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, SH Notaris di Pekanbaru No.36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan No.C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam RUPS tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan di dalam Akta Notaris No.209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto, SH Notaris di Batam, dan telah mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Perubahan nama Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Riau menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri sesuai keputusan RUPSLB tanggal 26 April 2010, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No.AHU-36484.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 dan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata No. AHU.2-AH.01.01-6849 tanggal 25 Agustus 2010, serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/59/KEP.GBI/2010 tanggal 23 September 2010.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ("the Bank") is established in accordance with Act No.13 of 1962 on Regional Development Banks. Commencing on April 1st, 1966 officially Bank Pembangunan Daerah Riau activities began with its status as a government owned Bank of Riau.

The status of the establishment of the Bank adjusted with Provincial Regulation Level Region Riau No.10 of 1975, which is then set back to the level I Riau Regional Regulation No. 18 of 1986 by Law No.13 Year 1962. Status of establishment of the Bank arranged and adapted to the Regional Regulation No.14 of 1992 about Regional Development Bank Riau pursuant to Act No.7 of 1992 on Banking. Finally the Provincial Regulation Level Region Riau No.5 of 1998 on First Amendment Regulations Provincial Level Region Riau No.14 of 1992 about Regional Development Bank Riau.

Status changing approval of the Bank from the Regional Company (PD) into a Limited Liability Company (PT) according to the results Decisions Annual General Meeting on June 26th, 2002 made by notary Ferry Bakti, SH by Deed No.33, which is then determined by the Regional Regulation No.10 of 2002 dated August 26th, 2002 and has been enacted in the Riau Provincial Gazette 2002 No.50. Conversion of the law has been made with Deed number 36 dated January 18th, 2003 by Muhammad Dahad Umar, SH, Notary in Pekanbaru which was approved by the Minister of Justice and Human Rights with Decree No.C-09851.HT.01.01.TH.2003 May 5th, 2003. Changes in the legal entity has been approved in the Annual General Meeting on June 13th, 2003 are set forth in the Deed No.209 dated June 13rd, 2003 Notary Yondri Darto, SH, Notary in Batam, and has also received the approval of the Senior Deputy Governor of Bank Indonesia No.5/30/KEP.DGS/2003 dated July 22nd, 2003.

Name Changing of the Bank from PT Bank Pembangunan Daerah Riau became PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri accordance to the EGM decision on April 26th, 2010, after the approval of the Minister of Justice and Human Rights through decision letter No.AHU-36484.AH.01.02 Year 2010 dated July 22nd, 2010 and the letter of the General Director of Legal Administration Director of Civil No.AHU.2-AH.01.01-6849 on August 25th, 2010, as well as the approval of Bank Indonesia in Bank Indonesia Governor Decree No.12/59/KEP.GBI/2010 dated September 23rd, 2010.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No.6/7/DPbs/Pbr tanggal 27 Februari 2004 dinyatakan bahwa Bank Indonesia Menyetujui Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank Riau dengan memperhatikan ketentuan PBI No.4/1/PBI/2002.

Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.9/5/KEP.DpG/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau sebagai Bank Umum Devisa ditetapkan bahwa Bank harus melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan nasabahnya dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri. Bank juga wajib menyampaikan laporan tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi devisa dan kegiatan valuta asing yang telah dan sedang dilakukan kepada Bank Indonesia setempat.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.41 pada tanggal 26 April 2010 Notaris Fery Bakti, SH yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-36484.AH.01.02.Tahun 2010 pada tanggal 22 Juli 2010 bahwa Bank mengganti nama Perseroan dari semula "PT Bank Pembangunan Daerah Riau" atau disingkat "PT Bank Riau" berubah menjadi "PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" atau disingkat "PT Bank Riau Kepri".

Selanjutnya berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan oleh Notaris Yondri Darto, SH dengan Akta No.125 pada tanggal 19 Agustus 2010 dijelaskan bahwa tujuan dari dirubahnya nama Perseroan menjadi PT Bank Riau Kepri adalah guna meningkatkan kemampuan Perseroan dalam menghimpun dana masyarakat yang berada di provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau.

b. Maksud dan Tujuan

Tujuan pendirian Bank adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menyediakan pembiayaan pembangunan, penghimpunan dana dan melaksanakan pekerjaan penyimpanan uang daerah serta kegiatan perbankan pada umumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank mempunyai Visi "Sebagai perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat".

***1. GENERAL** (continued)*

***a. Establishment and General Information** (continued)*

Based on the Letter from Bank Indonesia No.6/7/DPbs/Pbr dated on February 27th, 2004 stated that Bank Indonesia Approved the Principal of Opening the Branch Office of Sharia Bank Riau by considering the provisions of PBI No.4/1/PBI/2002.

Based on the Decree Letter by the Deputy Governor of Bank Indonesia No.9/5/KEP.DpG/2007 dated March 15th, 2007 on the appointment of Limited Liability Company Bank Pembangunan Daerah Riau as Foreign Exchange Public Bank resolving that the Bank must perform its banking business activities in foreign exchange with its customers and or performing banking transactions with parties overseas. The bank also is obligated to deliver written reports related to the performance of foreign exchange transaction and foreign exchange activities already and being performed to the local Bank Indonesia.

Based on Decision meeting was notarial deed No.41 dated April 26th, 2010 by Notary Fery Bakti, SH was have been aproved by Human Rights and Law Minister No.AHU-36484.AH.01.02. year 2010 dated on July 22nd, 2010 is Bank was replacement the company name which before are "PT Bank Pembangunan Daerah Riau" or "PT Bank Riau" became "PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" or "PT Bank Riau Kepri".

Then based on General Meeting Of Shareholders was notarial deed by Notary Yondri Darto, SH with No.125 on August 19th, 2010 representitive are purposed from changed the name of company to become PT Bank Riau Kepri is use to provide company ability in finding people fund in Riau Province and Kepulauan Riau Province.

b. Purpose and Objectives

The purpose of the Bank are to help and push the economical growth and regional development in every aspects, also as one of regional income source in the frame of increasing quality of life by preparing the development fund, collecting fund and carry out regional money saving works, and generally bank activity, as long as in the contrary with the regulation of law implemented.

Bank has a vision "As a Banking Incorporation which is capable to grow and become prominent in the region, has a professional management and push the regional economic growth so that it can empowering people's economy".

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen Eksekutif

Pada tanggal 15 November 2021 telah dilakukan RUPS-LB, untuk pengangkatan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komisaris Independen, dan Komisaris Utama PT Bank Riau Kepri berdasarkan Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH, No. 35 tanggal 15 November 2021. Pengangkatan Bapak Fajar Restu Febriansyah,S.E sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko efektif sejak 7 Desember 2021 berdasarkan Surat OJK No.S-462/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021. Pengangkatan Bapak Syahrial Abdi, A.P, M.Si sebagai Komisaris Utama efektif pada 23 Desember 2021 sesuai Surat OJK No.S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2021, susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Pengawas Syariah Bank adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

c. Executive Boards

On November 15, 2021, the EGMS was held, for the appointment of the Director of Compliance and Risk Management, Independent Commissioner, and President Commissioner of PT Bank Riau Kepri based on Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH, No. 35 dated November 15, 2021. Appointment of Mr. Fajar Restu Febriansyah, SE as Director of Compliance and Risk Management effective December 7, 2021 based on OJK Letter No.S-462/KO.053/2021 dated December 7, 2021. Appointment of Mr. Syahrial Abdi, AP, M.Si as President Commissioner is effective on December 23, 2021 according to OJK Letter No.S-492/KO.053/2021 dated December 23, 2021.

As of December 31st, 2021, the members of Bank's Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee, Board of Sharia Supervisors are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2021*	
a. Dewan Komisaris		*a. Commissioner*
• Komisaris Utama	Syahrial Abdi, A.P, M.Si	*President Commissioner* •
• Komisaris Independen	Roy Prakoso, S.E, M.M *)	*Independent Commissioner* •
• Komisaris Independen	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	*Independent Commissioner* •
b. Direksi		*b. Director*
• Direktur Utama	Dr. Ir. H. Andi Buchari, M.M	*President Director* •
• Direktur Dana dan Jasa	H. M.A. Suharto, S.E	*Funding and Services Director* •
• Direktur Kredit dan Syariah	H. Tengkoe Irawan, S.E., M.M., Ak.	*Credits and Sharia Director* •
• Direktur Operasional	H. Said Syamsuri, S.E., M.M., Ak. CA	*Operational Director* •
• Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Fajar Restu Febriansyah, S.E	*Director of Compliance and Risk Management* •
c. Komite Audit Bank		*c. Bank Auditor Committee*
• Ketua merangkap Anggota	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	*Chairman* •
• Anggota	Roy Prakoso, S.E, M.M	*Member* •
• Anggota	Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
• Anggota	Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
d. Komite Pemantau Risiko		*d. Risk Monitoring Committee*
• Ketua merangkap Anggota	Roy Prakoso, S.E, M.M	*Chairman* •
• Anggota	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	*Member* •
• Anggota	Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
• Anggota	Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
e. Komite Remunerasi dan Nominasi		*e. Remuneration and Nomination Committee*
• Ketua merangkap Anggota	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	*Chairman* •
• Anggota	Syahrial Abdi, A.P, M.Si	*Member* •
• Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen SDM (ex officio)	*Member* •
f. Dewan Pengawas Syariah		*f. Board of Sharia Supervisors*
• Ketua	H. Zulhendri Rais, Lc., M.A	*Chairman* •
• Anggota	Saifudin Yuliar, Lc, M.Ag	*Member* •

*) Bapak Roy Prakoso, S.E., M.M. menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Riau Kepri sejak diangkat pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021 dan saat ini masih menunggu keputusan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

*) *Mr. Roy Prakoso, S.E., M.M. He has served as Independent Commissioner of PT Bank Riau Kepri since being appointed at the EGMS on November 15, 2021 and is currently waiting for an effective decision from the Financial Services Authority.*

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen Eksekutif (lanjutan)

Persetujuan Penetapan Pengurus Perseroan PT Bank Riau Kepri tahun 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri, Akta No. 35 tanggal 15 November 2021, yang dibuat Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH. Akta perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah didata dalam sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0477876 tanggal 25 November 2021.

Susunan Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri No. 087/KEPDIR/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Susunan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Riau Kepri.

Pengangkatan H. Zulhendri Rais, Lc., M.A sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri Nomor 100/KEPDIR/MSDM/2021 Tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri tanggal 25 Agustus 2021.

Pengangkatan Saifudin Yuliar sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri Nomor 58/KEPDIR/MSDM/2021 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri tanggal 14 Juni 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020, susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Pengawas Syariah Bank adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***c. Executive Boards** (continued)*

Approval for Determination of the Company's Management of PT Bank Riau Kepri in 2021 based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions of PT Bank Riau Kepri, Deed No. 35 dated November 15, 2021, made by Notary Pupung Mulyantini, SH, MH. The deed of changes to the Board of Directors and Commissioners has been recorded in the Legal Entity Administration system by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0477876 November 25, 2021.

Changes in the composition of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee based on the Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri No. 067/KEPDIR/2019 dated October 1, 2019 regarding the Composition of Members of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and the Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Riau Kepri.

The appointment of H. Zulhendri Rais, Lc., M.A as Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri based on the Decree of the Directors of PT Bank Riau Kepri Number 100/KEPDIR/MSDM/2021 concerning the Appointment of the Chairman of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri dated August 25, 2021.

The appointment of Saifudin Yuliar as a Member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri based on the Decree of the Directors of PT Bank Riau Kepri Number 58/KEPDIR/MSDM/2021 concerning the Appointment of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri dated June 14, 2021.

As of December 31st, 2020, the members of Bank's Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee, Board of Sharia Supervisors are as follows:

	31 Desember/ *December 31, 2020*	
a. Dewan Komisaris		*a. Commissioner*
• Komisaris Utama	H. Yan Prana Jaya Indra Rasyid, M.Si	*President Commissioner* •
• Komisaris Independen	Taufiqurrahman, S.E., M.Sc., M.Phil	*Independent Commissioner* •
• Komisaris Independen	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	*Independent Commissioner* •
b. Direksi		*b. Director*
• Direktur Utama	Dr. Ir. H. Andi Buchari, M.M	*President Director* •
• Direktur Dana dan Jasa	H. M.A. Suharto, S.E	*Funding and Services Director* •
• Direktur Kredit dan Syariah	H. Tengkoe Irawan, S.E., M.M., Ak.	*Credits and Sharia Director* •
• Direktur Operasional	H. Said Syamsuri, S.E., M.M., Ak. CA	*Operational Director* •
• Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	H. Eka Afriadi, S.E., Ak	*Director of Compliance and Risk Management* •

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen Eksekutif (lanjutan)

1. GENERAL *(continued)*

c. Executive Boards *(continued)*

	31 Desember/ *December 31, 2020*	
c. Komite Audit Bank		*c. Bank Auditor Committee*
• Ketua	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	*Chairman* •
• Anggota	Taufiqurrahman, S.E., M.Sc., M.Phil	*Member* •
• Anggota	Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
• Anggota	Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
d. Komite Pemantau Risiko		*d. Risk Monitoring Committee*
• Ketua	Taufiqurrahman, S.E., M.Sc., M.Phil	*Chairman* •
• Anggota	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	*Member* •
• Anggota	Dr. H. Fahmi Oemar, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
• Anggota	Indarti, S.E., M.M., Ak., CA	*Member* •
e. Komite Remunerasi dan Nominasi		*e. Remuneration and Nomination Committee*
• Ketua	Taufiqurrahman, S.E., M.Sc., M.Phil	*Chairman* •
• Anggota	Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak., CA	*Member* •
• Anggota	Pemimpin Divisi Manajemen SDM (ex officio)	*Member* •
f. Dewan Pengawas Syariah		*f. Board of Sharia Supervisors*
• Ketua	Dr. H. Suryan A. Jamrah, M.A	*Chairman* •
• Anggota	Drs. KH. Tengku Zulkarnain, M.A	*Member* •
• Anggota	H. Zulhendri Rais, Lc., M.A	*Member* •

Persetujuan Penetapan Pengurus Perseroan PT Bank Riau Kepri tahun 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri, Akta No. 29 tanggal 23 September 2020, yang dibuat Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH. Akta perubahan Direksi dan Komisaris tersebut telah didata dalam sistem Administrasi Badan Hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0395337 tanggal 07 Oktober 2020, sebagai berikut:

Approval of the Determination of the Management of PT Bank Riau Kepri in 2020 based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions of PT Bank Riau Kepri, Deed No. 29 dated September 23rd, 2020, made by Notary Pupung Mulyantini, SH, MH. The deed of amendment to the Board of Directors and Commissioners has been recorded in the Legal Entity Administration system by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0395337 dated October 07th, 2020, as follows:

- Komisaris Utama	H. Yan Prana Jaya Indra Rasyid, M.Si	*President Commissioner* -
- Direktur Utama	Dr. Ir. H. Andi Buchari, M.M	*President Director* -
- Direktur Operasional	H. Said Syamsuri, S.E., M.M., Ak. CA	*Operational Director* -
- Direktur Dana dan Jasa	H. M.A. Suharto, S.E	*Funding and Services Director* -

Pengangkatan Komisaris Utama dan Direksi telah diadministrasikan oleh OJK dengan surat OJK Nomor SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020.

The appointment of the President Commissioner and the Board of Directors has been administrated by OJK with OJK letter Number SR-120/KO.053/2020 dated September 30th, 2020.

Penetapan calon pengurus PT Bank Riau Kepri tahun 2020 dan pengangkatan saudara Zulhendri Rais, Lc., MA sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri, Akta No. 06 tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH.

Determination of candidates for the management of PT Bank Riau Kepri in 2020 and the appointment of brother Zulhendri Rais, Lc., MA as a member of the Sharia Supervisory Board based on the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri, Deed No. 06 dated January 17th, 2020, made by Notary Pupung Mulyantini, SH, MH.

1. UMUM (lanjutan)

c. Manajemen Eksekutif (lanjutan)

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri Nomor 031A/KEPDIR/2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri tanggal 20 April 2020.

Pengangkatan Komisaris Independen Saudari Rita Anugerah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" yang dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH. MH, Akta tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 09 dan telah disetujui oleh OJK.

Pengangkatan Saudara Tengkoe Irawan sebagai Direktur Kredit dan Syariah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" yang dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH. MH, Akta tanggal 22 April 2019 Nomor 13 dan telah disetujui oleh OJK.

Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum telah diatur oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Jumlah karyawan Bank pada akhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebanyak 2.657 orang dan 2.569 orang (tidak diaudit).

d. Jaringan Kantor

Kantor pusat Bank untuk pelayanan konvensional dan syariah berlokasi di Menara Dang Merdu Jalan Jenderal Sudirman No. 464, Pekanbaru - Riau.

Posisi jaringan distribusi Bank yang tersebar di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***c. Executive Boards** (continued)*

The appointment of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri is based on the Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Number 031A / KEPDIR / 2020 concerning the Appointment of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri on April 20, 2020.

Appointment of Independent Commissioner Mrs. Rita Anugerah based on Deed Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Limited Company made by Notary Pupung Mulyantini, SH. MH, Deed of August 19th, 2019 No. 09 and approved by OJK.

The appointment of Mr. Tengkoe Irawan as Director of Credit and Syariah based on the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Limited Company made by Notary Pupung Mulyantini, SH. MH, Deed of April 22nd, 2019 No. 13 and approved by OJK.

The application of governance in remuneration for commercial banks regulated by OJK in the Regulation of Financial Services Authority (POJK) No.45/POJK.03/2015 concerning Governance Practices in Providing Remuneration for Commercial Banks.

The Bank's total employees at the end of December 31, 2021 and 2020 were 2,657 people and 2,569 people, respectively (unaudited).

d. Office Network

Head Office of the Bank for conventional and sharia services is located at Dang Merdu Tower on Jenderal Sudirman Street Number 464, Pekanbaru - Riau.

Net working position of the Bank office at Riau province and Riau Island Province as of December 31st, 2021 and 2020 are follows:

1. UMUM (lanjutan)

d. Jaringan Kantor (lanjutan)

***1. GENERAL** (continued)*

***d. Office Network** (continued)*

	2021	**2020**	
Jaringan kantor :			***Office network***
- Pusat	1	1	*Head office*
- Cabang utama konven	1	1	*Main branch office*
- Cabang konven	18	18	*Branch office*
- Cabang pembantu konven	34	34	*Sub-branch office*
- Unit usaha syariah	1	1	*Sharia office*
- Cabang syariah	2	2	*Branch sharia office*
- Cabang pembantu syariah	7	7	*Sub-branch sharia office*
- Kedai	38	35	*First class office*
- Kantor kas	56	56	*Cash office*
- Payment point	14	11	*Payment point office*
- Butik	3	4	*Boutique office*
- Anjungan Tunai Mandiri	298	299	*Automatic Teller Machine*
- *Cash Recycling Machine*	35	35	*Cash Recycling Machine*
- ATM Non Tunai	2	2	*ATM Non Cash*
- Unit kas mobil	16	16	*Oto banking mobile*
- *Cash Deposit Machine*	2	2	*Cash Deposit Machine*
- *Electronic Data Capture*	664	787	*Electronic Data Capture*
- Unit layanan syariah	87	87	*Sharia services units*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi utama yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti yang dijabarkan dibawah ini:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies adopted in preparing the financial statement of the Bank are set out below:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

a. Based on Prepared Financial Statement

Pernyataan Kepatuhan

Statement of Compliance

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The Financial statement for the year ended December 31st, 2021 and 2020 were prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

The financial statements are presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia that covers the Statements of Financial Accounting Standard (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standard (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board Indonesian Institute of Accountants (IAI) and regulation of Bapepam-LK No.VIII.G.7 annex the Chairman decision of Bapepam-LK No.Kep-347/BL/2012 dated June 25th, 2012 about "Presentation of Financial Statements and Disclosure of Issuers or Public Company".

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum tanggal 30 Juli 2021.

Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks dated 30 July 2021.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum tanggal 30 Juli 2021.

Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 13/POJK.03/2021 concerning the Operation of Commercial Bank Products dated 30 July 2021.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 tanggal 10 September 2021.

POJK No.11/POJK.03/2020, tanggal 13 Maret 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur mikro, kecil dan menengah, yang meliputi : a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan b. kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan.

Transparansi dan publikasi laporan Bank dilaksanakan berdasarkan POJK No.37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.

SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional; tanggal 30 Juni 2020. Lampiran-SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional; tanggal 30 Juni 2020.

SEOJK No.10/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ; tanggal 1 Juli 2020. Lampiran-SEOJK No.10/SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tanggal 1 Juli 2020.

Pelaporan Bank Umum dilakukan berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2019 Tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, tanggal 4 April 2019.

Laporan keuangan Unit Usaha Syariah yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang menggunakan prinsip akuntansi syariah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Based on Prepared Financial Statement *(continued)*

Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 17/POJK.03/2021 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Financial Services Authority Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 dated September 10, 2021.

POJK No.11/POJK.03.2020, dated March 13th, 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019. Banks can implement policies that support economic growth stimuli for debtors affected by the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) including micro debtors, small and medium enterprises, which include: a. asset quality determination policy; and b. credit and financing restructuring policies.

Transparency and publication of Bank reports are carried out based on POJK No.37/POJK.03/2019 dated December 19th, 2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.

SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports; June 30th, 2020. ATTACHMENT-SEOJK No.9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports; June 30th, 2020.

SEOJK No.10 /SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Reports for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units; July 1st, 2020. ATTACHMENT-SEOJK No.10/SEOJK.03/2020 Concerning Transparency and Publication of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit Reports, July 1st, 2020.

Commercial Bank reporting is carried out based on POJK No. 12/POJK.03/2019 Concerning Commercial Bank Reporting Through the Financial Services Authority Reporting System, April 4, 2019.

The financial statement of the sharia branches which operating in banking with sharia principal have been prepared that financial statement in conformity with Statement of Financial Accounting Standard with used sharia accounting principal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah menggunakan pedoman akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 101 (Revisi 2011) "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102 (Revisi 2014) "Akuntansi Murabahah", PSAK 103 "Akuntansi Salam", PSAK 104 "Akuntansi Istishna", PSAK 105 "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106 "Akuntansi Musyarakah", dan PSAK 107 "Akuntansi Ijarah", menggantikan PSAK 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap topik-topik tersebut dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan "Bank" disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan basis akrual, tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai non performing dicatat berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, kecuali untuk beberapa arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam laporan arus kas yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain, disajikan dalam Rupiah penuh.

b. Penjabaran transaksi dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal neraca.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Based on Prepared Financial Statement *(continued)*

Bank was implementation of accounting sharia principal with PSAK 101 (Revised 2011) "Sharia Financial Statement Presentation", PSAK 102 (Revised 2014) "Accounting for Murabahah", PSAK 103 "Accounting for Salam", PSAK 104 "Accounting for Istishna", PSAK 105 "Accounting for Mudharabah", PSAK 106 "Accounting for Musyarakah", and PSAK 107 "Accounting for Ijarah" which superseed PSAK 59 about "Accounting for Sharia Banking," in relation to the recognition, measurement, presentation and disclosure for the above mention topics and the Accounting guidelines for Indonesian Shariah Banking (PAPSI) issued by Bank Indonesia in cooperation with Indonesian of Institute of Accountant.

The financial statements of "Bank" are presented based on historical value, unless otherwise stated and prepared on an accrual basis, interest receivables on earning assets classified as non-performing are recorded on the cash basis.

Statement of cash flows was prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities, except for several cash flow statement in operating and financing activities was prepared based on indirect method. On the cash flow report, cash and cash equivalent include cash, current account with Bank Indonesia, current account with others banks and other short-term highly liquid investment with original maturities of three months or less, and not used as Collateral for borrowing and not restriced for in use.

The presentation currency used in the financial statement is Indonesian Rupiah (Rp), presented in the financial statement. Unless otherwise stated, presented in Rupiah full amount.

b. Translation of foreign currency transaction

Transactions denominated in foreign currencies are converted into rupiah at the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At the balance sheet date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at such date.

Gains and losses exchange rate arising from foreign currency transactions and from the translation of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in the statement of comprehensive income for the current year.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

b. Penjabaran transaksi dalam mata uang asing

Bank tidak mempunyai kantor cabang yang berada di luar negeri, sehingga Bank tidak mempunyai laporan keuangan kantor cabang yang akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan Bank. PSAK 1 (penyesuaian 2014) tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan laporan posisi keuangan, kecuali untuk akun rekening kantor pusat serta rekening administratif, menggunakan kurs pada tanggal pelaporan.

Akun rekening kantor pusat dijabarkan dengan kurs historis. Laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif - menggunakan kurs rata-rata dalam periode yang bersangkutan, yang mendekati kurs tanggal transaksi.

Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan tersebut diakui secara langsung pada pendapatan komprehensif lain.

Kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran dalam rupiah pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan menggunakan kurs pada tanggal laporan (penutupan) yang ditetapkan yaitu kurs tengah adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

b. Translation of foreign currency transaction

Bank doesn't have any branches at overseas, so that the bank doesn't have branches financial statement will be consolidated with Bank financial reports. Based on PSAK 1 (adjustment 2014) about Financial Report Disclousures mention that the Statements of Financial Position, with the exception of the head office accounts and off balance sheet accounts - at the exchange rates prevailing at the reporting date.

Head office accounts are translated at historical rates. Statements of income and statements of comprehensive income - at the average exchange rates during the related period, which approximate the transaction date rates.

The difference arising from the translation of such financial statements is recognized directly in other comprehensive income.

The main foreign exchange rates used for translation in rupiah as of December 31, 2021 and 2020 using the rates at the reporting date (closing) which are determined, namely the middle rates, are as follows:

	2021		2020		
1 Dollar Amerika Serikat (USD)	Rp	14.252,50	Rp	14.050,00	*1 United States Dollar (USD)*
1 Euro	Rp	16.112,46	Rp	17.234,43	*1 Euro*
1 Dollar Singapura (SGD)	Rp	10.554,67	Rp	10.606,18	*1 Singapore Dollar (SGD)*

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, penyertaan saham, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, tagihan derivatif dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi, liabilitas derivatif, obligasi yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, dan liabilitas lain-lain.

Efektif 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK 60 (Penyesuaian 2014) ”Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, PSAK 55 (Revisi 2014), ”Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, dan PSAK 50 (Revisi 2014), ”Instrumen Keuangan: Penyajian” dan PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar".

c. Financial Assets and Liabilities

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, marketable securities purchased under agreements to resell, investments in shares, loans, acceptances receivable, derivative receivable and other assets.

The Bank's financial liabilities consist of obligations due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, acceptances payable, derivative payable, bond issued, borrowings and other liabilities.

Effective on January 1st, 2015, Bank adopted PSAK 60 (Adjustment 2014) “Financial Instruments: Disclosure”, PSAK 55 (Revised 2014) “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, and PSAK 50 (Revised 2014) “Financial Instruments: Presentation” and PSAK 68, “Fair Value Measurement”.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi,

b. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;

c. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan

b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga atau *solely payments of principal and interest* (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendaptkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasi sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

1. Financial assets

The Bank classifies its financial assets based on the following categories at initial recognition:

a. Financial assets measured at amortized cost,

b. Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;

c. Financial assets measured at fair value through profit or loss;

Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:

a. Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and

b. The contractual terms of the financial asset entitles on a specific date to cash flows derived solely from payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:

a. Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and

b. The contractual terms of these financial assets meet the SPPI criteria.

Financial assets measured at fair value through profit or loss;

On initial recognition, the Bank may make an irrevocable option to present the non-held equity instruments for trading at fair value through other comprehensive income.

Other financial assets that do not meet the requirements for classification as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Saat pengakuan awal Bank dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch* ").

2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, atau jika Bank memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini. Perubahan dalam nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi.

b. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Bank mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi kecuali:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- Kontrak jaminan keuangan.
- Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar.
- Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

1. Financial assets *(continued)*

On initial recognition the Bank may make an irrevocable designation for measuring assets that meet the requirements for measurement at amortized cost or fair value through profit or loss, if that designation eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies (sometimes referred to as "accounting mismatch").

2. Financial liabilities

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

a. Financial liabilities measured at fair value through profit or loss, financial liabilities are classified in this category if they are classified as held for trading, or if the Bank chooses to designate the financial liabilities in this category. Changes in fair value are recognized immediately in profit or loss.

b. Financial liabilities measured at amortized cost.

The Bank classifies all financial liabilities after initial recognition at amortized cost except:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss.*
- *Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach is applied.*
- *Financial guarantee contract.*
- *Commitment to provide loans at below market interest rates.*
- *Contingent benefits recognized by the acquirer in the business combination.*

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are measured at fair value less transaction costs. After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortized cost using the effective interest method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi instrumen keuangan setelah penerapan PSAK 71 efektif setelah 1 Januari 2020 dan PSAK 55 sebelum 1 Januari 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

2. Financial liabilities *(continued)*

The Bank classifies financial instruments into certain classifications that reflect the nature of the information and take into account the characteristics of those financial instruments. The classification of financial instruments after the application of PSAK 71 is effective after January 1, 2020 and PSAK 55 before January 1, 2020 can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 71) / ***Category as defined by SFAS 71***		**Golongan (ditentukan oleh Bank)/** ***Class (as determined by the Bank)***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at fair value through profit or loss*	Efek-efek / *Marketable securities*
		Obligasi Pemerintah / *Government Bonds*
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	Kas / Cash
		Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*
		Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*
		Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/ *Placements with other bank and Bank Indonesia*
		Tagihan lainnya/ *Other receivables*
		Kredit yang diberikan/ *Loans*
		Pendapatan bunga yang masih akan diterima/ *Accrued interest receivable*
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Financial assets at fair value through other comprehensive income*	Efek-efek/*Securities*
		Obligasi Pemerintah/ *Government bonds*
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial liabilities at fair value through profit or loss*	Liabilitas derivatif – tidak terkait lindung nilai/ *Derivative payables-non hedging related*
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Liabilitas segera/ *Obligation due immediately*
		Simpanan nasabah/ *Deposits from customers*
		Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/ *Securities sold under agreements to repurchase*
		Beban yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*
		Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

2. Financial liabilities *(continued)*

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2014)/ *Category as defined by SFAS No. 55 (Revised 2014)*		**Golongan (ditentukan oleh Bank)/ *Class (as determined by the Bank)***
Aset keuangan/ *Financial assets*	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial assets at fair value through profit or loss*	Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan/ *Financial assets held for trading:* - Efek-efek/*Securities*
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ *Financial assets at amortized cost*	Kas / Cash
		Giro pada Bank Indonesia/ *Current accounts with Bank Indonesia*
		Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*
		Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/ *Placements with other bank and Bank Indonesia*
		Tagihan lainnya - transaksi perdagangan/ *Other receivables - trade transactions*
		Kredit yang diberikan/ *Loans*
		Pendapatan bunga yang masih akan diterima/ *Accrued interest receivable*
	Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo/ *Held to maturity investments*	Efek-efek/*Securities*
		Obligasi Pemerintah/ *Government bonds*
	Aset keuangan tersedia untuk dijual/ *Available for sale financial assets*	Efek-efek/*Securities*
		Obligasi Pemerintah/ *Government bonds*
Liabilitas keuangan/ *Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ *Financial liabilities at fair value through profit or loss*	Liabilitas derivatif – tidak terkait lindung nilai/ *Derivative payables-non hedging related*
	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ *Financial liabilities at amortized cost*	Liabilitas segera/ *Obligation due immediately*
		Simpanan nasabah/ *Deposits from customers*
		Simpanan dari bank lain/ *Deposits from other banks*
		Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali/ *Securities sold under agreements to repurchase*
		Beban yang masih harus dibayar/ *Accrued expenses*
		Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*

3. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu Liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, bank mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi dipasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan teratur dalam suatu transaksi yang wajar.

3. Determination of fair value

The reasonable value is the value where an asset can be exchanged, or a liability completed between the party understanding and desiring to perform reasonable transaction at the measuring date.

If available, the bank measures the reasonable value of financial instrument using the quotation price in active market for that instrument. A market is considered active if the quotation price at anytime and periodically is available and reflecting the market transaction actual and regular in a reasonable transaction.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

3. Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Jika pasar suatu instrumen keuangan tidak aktif, bank menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisis arus kas yang didiskontokan dan penggunaan model penetapan harga opsi (*option pricing model*). Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Bank, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang dapat diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk return*) yang melekat pada instrumen keuangan.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan terhadap transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi atau pengawasan ulang) atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi.

Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laporan laba rugi. Setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

3. Determination of fair value *(continued)*

When a financial instrument is not active, the bank decides the reasonable value by using the appreciation technique. The appreciation technique includes the use of the latest market transaction performed reasonably by the parties understanding, desiring, and if available, the reference on the latest reasonable value of other instrument substantially the same, the use of discounted cash flow analysis and the use of option pricing model. The selected appreciation technique maximizes the use of market input, and minimizes the use of estimation specifically from the Bank, inputting all the factors to be considered by the market actors in deciding a price and consistent with the acceptable economic method in pricing decision of financial instrument. The input used in the appreciation technique sufficiently reflects the market expectation and the measure on risk factor and risk return factor attached to the financial instrument.

The best proof for the financial instrument reasonable value at the initial acknowledgement is the transaction price that is the reasonable value of the payment given or received, unless the reasonable value of the financial instrument is determined by comparison to the latest market transaction that can be observed from a similar instrument (that is without modification or recheck) or based on an appreciation technique its variable only using the data from the market that can be observed.

If the transaction price gives the best proof of the reasonable value at the initial acknowledgement, then the financial instrument initially is measured on transaction price and the difference between the transaction price and the price previously obtained from the appreciation model acknowledged in the profit loss report. After the initial acknowledgement depending on each fact and condition of the transaction but not later than the time of the appreciation supported fully by market data that can be observed or when the transaction is closed.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

3. Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit dan pihak lawan, mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang bank yakin bahwa keterlibatan suatu pasar Pihak ketiga akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi.

Aset keuangan dan *long position* diukur dengan menggunakan harga penawaran, Liabilitas keuangan dan *short position* diukur menggunakan harga permintaan. Jika bank memiliki posisi aset dan Liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka bank dapat menggunakan nilai tengah dari harga pasar sebagai dasar menghapus untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto *(net open position*), mana yang lebih sesuai.

4. Penghentian pengakuan

Bank menghentikan aset keuangan, jika dan hanya jika:

a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

b. Bank mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Ketika entitas mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan (aset awal), tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih entitas (penerima akhir) maka entitas memperlakukan transaksi tersebut sebagai pengalihan aset keuangan, jika dan hanya jika, seluruh persyaratan ini terpenuhi:

a. Bank tidak wajib membayar nilai tertentu kepada penerima akhir, kecuali jika entitas memperoleh nilai tertentu yang ekuifalen dari aset awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

3. Determination of fair value *(continued)*

The reasonable value reflects the credit risk on the financial instrument and including the adjustment performed to input the credit risk and the contradicting party, whichever is more appropriate. The estimated reasonable value obtained from the appreciation model shall be adjusted to consider other factors, such as liquidity risk or the uncertainty of appreciation model, as long as the bank is convinced that the involvement of third party market shall consider those factors in deciding the price of a transaction.

The financial assets and long position shall be measure using the price offer, financial liabilities and the short position shall be measured using the demand price. If the bank has asset and liability position whereas its market risks are mutually erasing, then the bank may use the mid value of the market price as the basis for erasing to decide the reasonable price for the mutually erasing risk position and applying adjustment to the price offer or demand price against the net open position, whichever is more appropriate.

4. Derecognition

The bank discontinues a financial asset, if and only if:

a. The rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or

b. The Bank transfers a financial asset and the transfer meets the derecognition criteria.

When an entity retains the contractual right to receive cash flows from a financial asset (the original asset), but also bears a contractual obligation to pay the cash flows received to one or more entities (the final recipient), the entity treats the transaction as a transfer of a financial asset, if and only if, all of these conditions are met:

a. The bank is not obliged to pay a specified amount to the final recipient, unless the entity obtains a certain amount equivalent to the original asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

4. Penghentian pengakuan (lanjutan)

b. Bank tidak diizinkan berdasarkan persyaratan dalam kontrak pengalihan untuk menjual atau mengagunkan aset awal kecuali untuk menjamin hak penerima akhir untuk menerima arus kas.

c. Bank berkewajiban untuk menyerahkan setiap arus kas yang ditagih untuk dan atas nama penerima akhir tanpa penundaan yang signifikan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa.

Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

b. Bank tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

c. Bank telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa.

5. Reklasifikasi aset keuangan

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika hanya jika, model bisnis untuk aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

4. Derecognition *(continued)*

b. The bank is not permitted under the terms of the transfer contract to sell or pledge the original asset except to guarantee the final recipient's right to receive cash flows.

c. The bank is obliged to deliver any invoiced cash flows for and on behalf of the final recipient without significant delay.

Financial liabilities are derecognized when the financial liabilities are terminated, canceled or have expired.

A financial asset (or part of a group of similar financial assets) is derecognized if:

a. The rights to receive cash flows from the financial asset have expired;

b. The Bank retains the right to receive cash flows from the financial assets, but also bears a contractual obligation to pay third parties for the cash flows received in full without any significant delay under an agreement; or

c. The Bank has transferred its right to receive cash flows from the financial asset and (i) has transferred substantially all the risks and rewards incidental to the financial asset, or (ii) has not transferred substantially or retained all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of these financial assets.

Financial liabilities are derecognized when the financial liabilities are terminated, canceled or have expired.

5. Reclassification of financial assets

Banks reclassify financial assets only when the business model for financial assets changes.

Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through profit or loss is carried at fair value. The difference between the carrying value and the fair value is recognized as gain or loss in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

5. Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum diamortisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

6. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pengakuan Penurunan Nilai Aset Keuangan

Bank mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

5. Reclassification of financial assets *(continued)*

Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through other comprehensive income is stated at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is carried at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reclassification of financial assets from the fair value through other comprehensive income classification to the amortized cost classification is carried at carrying value. Unamortized gains or losses are removed from equity and adjusted for fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income is carried at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost is carried at fair value.

Banks are not allowed to reclassify financial liabilities.

6. Impairment of Financial Asset Value

Recognition of Impairment of Financial Assets

The Bank recognizes an allowance for possible losses on expected credit losses on financial assets measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income, lease receivables, contract assets or loan commitments and financial guarantee contracts that impose impairment requirements.

At each reporting date, an entity shall measure the allowance for losses on financial instruments at the amount of expected credit losses over their lifetime, if the credit risk on the financial instruments has increased significantly since initial recognition.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

6. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, entitas membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Pada tanggal pelaporan entitas hanya mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk.

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengakui dalam laba rugi jumlah perubahan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Entitas mengakui perubahan membaik atas kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya sebagai keuntungan penurunan nilai, meskipun kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya lebih kecil dari jumlah kerugian kredit ekspektasian yang termasuk dalam estimasi arus kas pada saat pengakuan awal.

Jika dalam periode pelaporan sebelumnya bank telah mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, tetapi pada tanggal pelaporan periode kini ditentukan bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut tidak lagi terpenuhi (tidak meningkat secara signifikan), maka bank mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan pada tanggal pelaporan periode kini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

6. Impairment of Financial Asset Value *(continued)*

Recognition of Impairment of Financial Assets *(continued)*

At each reporting date, the entity assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making that assessment, an entity considers changes in default risk that occur over the life of the financial instrument, not changes in the amount of expected credit losses. In making that assessment, the entity compares the risk of default on a financial instrument that occurs at the reporting date with the risk of default on initial recognition and considers reasonable and supportable information available without undue cost or effort, which is an indication of a significant increase in credit risk since recognition early.

At the reporting date, the entity recognizes only the cumulative changes in the expected life-long credit losses from the initial recognition of the financial asset as an allowance for losses on financial assets purchased or arising from deteriorating financial assets.

At each reporting date, the entity recognizes in profit or loss the amount of changes in credit losses lifetime expectations of an impairment gain or loss. An entity recognizes the improvement in the expected life-long credit losses as an impairment gain, even though the lifetime expected credit losses are less than the amount of expected credit losses that were included in the estimated cash flows on initial recognition.

If in the previous reporting period the bank has measured allowance for losses for financial instruments for the amount of expected credit losses over its lifetime, but at the reporting date of the current period it is determined that the credit risk on the financial instrument is no longer fulfilled (does not increase significantly), then the bank measures the allowance for losses. an amount of 12 months expected credit loss at the reporting date of the current period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

6. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Bank mengakui jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai. Jumlah yang dimaksud merupakan penyesuaian terhadap penyisihan kerugian pada tanggal pelaporan yang disyaratkan pengakuannya.

Untuk menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit, bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Bank mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan:

a. Jumlah yang tidak biasa dan probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi, Estimasi Kerugian Kredit Ekspektasian mencerminkan jumlah probabilitas tertimbang dan tidak bisa yang ditentukan dengan mengevaluasi rentang keluaran yang mungkin.

b. Nilai waktu atas uang-discount rate; dan

c. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan (*forward looking*).

Ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian, bank tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, bank mempertimbangkan risiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit, meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah.

Periode maksimum yang dipertimbangkan dalam mengukur kerugian kredit ekpektasian adalah periode kontraktual musiman (termasuk opsi perpanjangan) selama bank terekspos terhadap risiko kredit. Periode tersebut dimaksud tidak mencakup periode yang lebih panjang meskipun periode yang lebih panjang tersebut konsisten dengan praktis bisnis yang ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

6. Impairment of Financial Asset Value *(continued)*

Recognition of Impairment of Financial Assets *(continued)*

The bank recognizes the amount of the expected credit loss (or credit loss recovered) in profit or loss, as an impairment gain or loss. The amount referred to is an adjustment to the allowance for possible losses on the reporting date where recognition is required.

To determine whether there has been an increase in credit risk, banks consider reasonable and supportable information, including forward-looking information.

The bank measures the expected credit loss on financial instruments in a way that reflects:

a. Unusual and probability-weighted amounts determined by evaluating a series of probable outcomes. Estimated Expected Credit Loss reflects a probability-weighted and non-determinable amount by evaluating the possible range of outputs.

b. Time value of money-discount rate; and

c. Reasonable and supportable information available without undue cost or effort at the reporting date regarding past events, current conditions and forecasts of future economic conditions (forward looking).

When measuring expected credit losses, the bank does not have to identify all possible scenarios. However, bank consider the risk or probability of credit loss by reflecting the probability of credit loss occurring and not occurring, even though the possibility of credit loss is very low.

The maximum period considered in measuring expected credit losses is the seasonal contractual period (including extension options) during which the bank is exposed to credit risk. Such period does not cover a longer period even though the longer period is consistent with existing business practices.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

6. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;

b. Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;

c. Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomi atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

d. Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;

e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

f. Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian aset keuangan yang terjadi. Sulit untuk mengidentifikasikan peristiwa diskrit tunggal, namun demikian, dampak kombinasi dari beberapa peristiwa dapat menyebabkan aset keuangan mengalami penurunan nilai aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, tetapi bukan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk, entitas mengukur kerugian aset keuangan ekspektasian sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto aset dan nilai kini dari arus kas masa depan yang diestimasi didiskonto dengan suku bunga efektif awal aset keuangan. Penyesuaian diakui di laba rugi sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

6. Impairment of Financial Asset Value *(continued)*

Financial assets deteriorate

A financial asset is impaired a financial asset when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that the financial asset is impaired by a financial asset includes observable data about the following events:

a. Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;

b. Contract breaches, such as events of default or arrears;

c. The lender, for economic or contractual reasons in connection with the borrower's financial difficulties, has given the borrower a concession that would not have been possible if the borrower had not experienced such difficulties;

d. There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;

e. The disappearance of an active market for a financial asset due to financial difficulties; or

f. The purchase or issue of a financial asset at a deep discount that reflects the loss of the financial asset incurred. It is difficult to identify a single discrete event, however, the combined effect of several events can cause a financial asset to be impaired.

For financial assets that have deteriorated at the reporting date, but not financial assets that were purchased or originated from deteriorating financial assets, an entity shall measure the expected financial asset loss as the difference between the asset's gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows discounted at a discount rate. The initial effective interest of the financial asset is recognized in profit or loss as an impairment gain or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

6. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengelompokan kualitas /stage Aset Keuangan

a. Stage 1

Mencakup instrument keuangan yang tidak memiliki peningkatan resiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal atau memiliki resiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL 12 bulan.

b. Stage 2

Mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan resiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali Bank merasa resiko kredit tergolong rendah pada tanggal pelaporan) namun belum terbukti adanya bukti penurunan nilai secara objektif. Untuk aset-aset ini, akan berlaku perhitungan ECL seumur hidup. ECL seumur hidup adalah ekspektasi kerugian kredit yang diharapkan dari semua kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan tersebut.

c. Stage 3

Mencakup instrumen keuangan yang telah terbukti mengalami penurunan nilai secara objektif pada tanggal pelaporan. Tahap ini biasanya diisi oleh debitur yang mengalami gagal bayar.

Cross Staging

Cross Staging antar debitur yang sama akan diterapkan, jika satu debitur (CIF) memiliki multi rekening (fasilitas) dan stage yang berbeda akan dilakukan *worst stage* artinya satu debitur akan memiliki stage yang terburuk.

Faktor utama dalam menentukan apakah instrumen keuangan memerlukan perhitungan ECL 12 bulan (stage 1) atau ECL seumur hidup (stage 2) disebut dengan kriteria *Significant Increase in Credit Risk* (SICR). Penentuan kriteria SICR ini memerlukan pengkajian dan diskusi apakah telah terjadi peningkatan resiko kredit secara signifikan pada tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

6. Impairment of Financial Asset Value *(continued)*

Classification of the quality / stage of financial assets

a. Stage 1

Includes financial instruments that do not have a significant increase in credit risk since initial recognition or have a low credit risk at the reporting date. For these assets, a 12 month ECL calculation will apply.

b. Stage 2

Includes financial instruments that are subject to increased credit risk since initial recognition (unless the Bank feels the credit risk is low at the reporting date) but has not been objectively proven evidence of impairment. For these assets, ECL calculation will apply for life. ECL for life. is the expected credit loss expected from all default events that may occur during the estimated life of the financial instrument.

c. Stage 3

Includes financial instruments that have been objectively proven to be impaired at the reporting date. This stage is usually filled by debtors who experience defaults.

Cross Staging

Cross Staging between the same debtors will be applied, if one debtor (CIF) has multiple accounts (facilities) and the worst stage will be done, meaning that one debtor will have the worst stage.

The main factor in determining whether a financial instrument requires a 12-month ECL (stage 1) or lifetime (stage 2) ECL calculation is called the Significant Increase in Credit Risk (SICR) criterion. Determination of the SICR criteria requires assessment and discussion of whether there has been an increase in risk. credit significantly at the reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

6. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Cross Staging (lanjutan)

Dalam PSAK 71 terdapat sebuah rebuttable presumption bahwa resiko kredit terhadap aset keuangan akan dianggap meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika pembayaran kontraktual sudah lebih dari 30 DPD. Asumsi ini akan berlaku kecuali jika Bank dapat membuktikan, melalui argumen yang masuk akal dan berdasarkan fakta, bahwa resiko tidak meningkat secara signifikan pada 30 DPD. Selain itu, definisi gagal bayar (*Default*) pada PSAK 71 juga menyebutkan praduga (*rebuttable presumption*) bahwa aset keuangan yang sudah menunggak 90 hari telah gagal bayar.

Metode Kerugian Kredit Ekspektasian

a. Kredit Ekspektasian 12 bulan

Jika tidak terjadi peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kredit Ekspektasian Sepanjang Umurnya

Jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal- baik dinilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Kebijakan Perhitungan Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Kredit Yang Diberikan

a. Stage 1

- Adalah kredit dengan risiko rendah (tunggakan pokok dan atau bunga) sebesar Rp.0 (nol rupiah) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
- Perhitungan kerugian kredit ekspektasian dengan menggunakan *probability of default* (PD) 12 bulan (12 *Month Expected Credit Loss).*
- Pendapatan Bunga diakui selama periode kredit yaitu suku bunga efektif diperhitungkan dengan jumlah nilai bruto (*Effective Interest Rate To Gross Carrying Amount*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

6. Impairment of Financial Asset Value *(continued)*

Cross Staging *(continued)*

In PSAK 71, there is a rebuttable presumption that credit risk to financial assets will be considered to have increased significantly since initial recognition if the contractual payment is more than 30 DPD. This assumption will apply unless the Bank can prove, through reasonable arguments and based on facts, that the risk does not increase significantly at 30 DPD. In addition, the definition of default in PSAK 71 also states the rebuttable presumption that financial assets that are 90 days in arrears have defaulted.

Expected Credit Loss Method

a. 12 months Expected Credit

If there has been no significant increase since initial recognition. The losses represent expected credit losses arising from defaults on financial instruments that may occur within 12 months after the reporting date.

b. Lifetime Expected Credit

If the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition - whether assessed individually or collectively by considering all reasonable and supportable information, including information that is forward-looking.

Policy for Calculation of Allowance for Expected Credit Losses on Loans Provided

a. Stage 1

- *Is a credit with low risk (principal and / or interest arrears) of Rp. 0 (zero rupiah) up to 30 (thirty) days.*
- *Calculation of expected credit losses using a 12 month probability of default (PD) (12 Month Expected Credit Loss).*
- *Interest income is recognized during the credit period, namely the effective interest rate is calculated by the total gross value (Effective Interest Rate To Gross Carrying Amount).*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

6. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Kebijakan Perhitungan Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Kredit Yang Diberikan (lanjutan)

b. Stage 2

- Umur tunggakan (DPD) = 31 - 90 hari
- Kolektibiliti 2
- Ada *Flagging* Restrukturisasi.
- Perhitungan Kerugian kredit espektasian dengan menggunakan *probability of default* seumur pinjaman.
- Pendapatan Bunga diakui selama periode kredit yaitu suku bunga efektif diperhitungkan dengan jumlah nilai bruto (*Effective Interest Rate To Gross Carrying Amount*).

c. Stage 3

- Umur tunggakan (DPD) > 90 hari
- Kolektibiliti > 2
- *Flagging* POCI
- Perhitungan Kerugian kredit espektasian dengan menggunakan *probability of default* seumur pinjaman.
- Pendapatan Bunga diakui selama periode kredit yaitu suku bunga efektif diperhitungkan dengan jumlah nilai neto atau biaya diamortisasi (*Effective Interest Rate To Net Carrying Amount*).

Indikator kualitatif kriteria Stage 2 Aset Keuangan

a. Perubahan persyaratan kredit (keringanan), dalam hal perjanjian kredit masih berjalan dalam waktu yang singkat.

b. Tidak ada pembayaran angsuran.

c. Peningkatan signifikan pada risiko kredit pada instrumen lain dari peminjam yang sama.

d. Kebijakan peningkatan monitoring debitur karena peningkatan risiko kredit.

e. Meningkatnya premi risiko debitur yang disebabkan peningkatan risiko kredit pada debitur.

f. Perubahan faktor eksternal yang merugikan bisnis dan keuangan debitur.

g. Penurunan rating internal dan eksternal.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

6. Impairment of Financial Asset Value *(continued)*

Policy for Calculation of Allowance for Expected Credit Losses on Loans Provided *(continued)*

b. Stage 2

- *Age in arrears (DPD) = 31 - 90 days*
- *Kolektibiliti 2*
- *There are Restructuring Flagging.*
- *Calculation of expected credit losses using a probability of default for the duration of the loan.*
- *Interest income is recognized during the credit period, namely the effective interest rate is calculated by the total gross value (Effective Interest Rate To Gross Carrying Amount).*

c. Stage 3

- *Age in arrears (DPD)> 90 days*
- *Kolektibiliti > 2*
- *POCI flagging*
- *Calculation of expected credit losses using a probability of default for the duration of the loan.*
- *Interest income is recognized during the credit period, namely the effective interest rate is calculated by the net value or amortized cost (Effective Interest Rate To Net Carrying Amount).*

Qualitative indicators of Stage 2 Financial Assets criteria

a. Changes in credit terms (relief), if the credit agreement is still running for a short time.

b. No installment payments.

c. Significant increase in credit risk on other instruments from the same borrower.

d. Policy to increase debtor monitoring due to increased credit risk.

e. The increased risk premium for debtors is due to an increase in credit risk for debtors.

f. Changes in external factors that are detrimental to the debtor's business and finances.

g. Internal and external downgrades.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

6. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Indikator kualitatif kriteria Stage 3 Aset Keuangan

a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur.
   - Penurunan omset melebihi 50%
   - Penurunan laba melebihi 30%
   - Piutang usaha macet melebihi 50% dari total

b. Pelanggaran perjanjian kredit
   - Tidak dipenuhinya satu atau lebih syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian kredit seperti syarat penandatanganan, syarat pencairan/penarikan, pelanggaran terhadap covenant kredit.
     Penyalahgunaan penggunaan kredit.
   - Adanya masalah hukum dan ekonomi yang signifikan dari debitur.
   - Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) permasalahan hukum yang dialami debitur baik yang terkait dengan usaha maupun masalah hukum diluar usaha.
   - Terdapat permasalahan internal keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau penyalahgunaan dana oleh anggota keluarga debitur.

c. Terdapat kemungkinan bahwa debitur dinyatakan pailit.
   - Terdapat hutang macet kepada pihak ketiga.
   - Terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tuntutan hukum pailit oleh pihak ketiga.

Pengelompokan kredit berdasarkan umur tunggakan (*Delinquency Bucket*)

Aset Keuangan dikelompokan lagi kedalam kelompok tunggakan (*delinquency bucket*) yang merepresentasikan kualitas kredit yang terdiri dari :

a. Rating 1, yakni untuk kredit yang tidak memiliki tunggakan.
b. Rating 2, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
c. Rating 3, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

6. Impairment of Financial Asset Value *(continued)*

Qualitative indicators of Stage 3 Financial Assets criteria

a. Significant financial difficulties experienced by debtors.
   - *Decreased turnover by more than 50%*
   - *Profit reduction exceeding 30%*
   - *Bad trade receivables exceed 50% of the total*

b. Credit agreement violation
   - *Failure to fulfill one or more of the terms stipulated in the credit agreement, such as signing conditions, terms of disbursement / withdrawal, violation of credit covenants.*
     Misuse of credit.
   - *There are significant legal and economic problems from the debtor.*
   - *There is at least 1 (one) legal problem experienced by the debtor, whether related to business or legal problems outside the business.*
   - *There are internal family problems, for example divorce, death, prolonged illness, or misuse of funds by debtor family members.*

c. There is a possibility that the debtor will be declared bankrupt.
   - *There is bad debt to third parties.*
   - *There is at least 1 (one) bankruptcy lawsuit by a third party.*

Credit grouping based on the age of arrears (Delinquency Bucket)

Financial assets are further classified into delinquency bucket, which represent credit quality, consisting of:

a. Rating 1, which is for credits that are not in arrears.
b. Rating 2, namely for loans with arrears of principal and / or interest of up to 30 (thirty) days.
c. Rating 3, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 30 (thirty) days up to 60 (sixty) days.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

6. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pengelompokan kredit berdasarkan umur tunggakan (*Delinquency Bucket*) (lanjutan)

d. Rating 4, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.

e. Rating 5, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari.

f. Rating 6, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari.

g. Rating 7, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 150 (seratus lima puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.

h. Rating 8, yakni untuk kredit yang memiliki tunggakan pokok dan atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Teknik Evaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian

Teknik dalam mengevaluasi Kerugian Kredit Ekspektasian menggunakan metode Migration Analysis, dengan menggunakan pendekatan statistik dari data historis kredit berdasarkan segmentasi:

a. Bank *wide*
b. Rating (*stage*)
c. Produk kredit

Perhitungan Kerugian Kredit Ekspektasian atau *Expected Credit Loss* (ECL) Dalam menentukan besarnya Kerugian Kredit Ekspektasian, maka pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai mencakup:

a. *Probability of default*
b. *Exposure at default*
c. *Lost given default*
d. *Discount factor*
e. *Forward looking adjustment*

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

6. Impairment of Financial Asset Value *(continued)*

Credit grouping based on the age of arrears (Delinquency Bucket) *(continued)*

d. Rating 4, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 60 (sixty) days up to 90 (ninety) days.

e. Rating 5, namely for loans with arrears of principal and / or interest of more than 90 (ninety) days up to 120 (one hundred and twenty) days.

f. Rating 6, namely for loans with arrears in principal and / or interest of more than 120 (one hundred twenty) days up to 150 (one hundred and fifty) days.

g. Rating 7, namely for loans that have arrears in principal and or interest of more than 150 (one hundred and fifty) days up to 180 (one hundred and eighty) days.

h. Rating 8, namely for loans with arrears in principal and or interest of more than 180 (one hundred and eighty) days.

Technique for Evaluating Expected Credit Losses

Techniques in evaluating Expected Credit Losses use the Migration Analysis method, using a statistical approach from credit historical data based on segmentation:

a. Bank wide
b. Rating (stage)
c. Credit products

Calculation of Expected Credit Loss (ECL) In determining the amount of Expected Credit Loss, the formation of Allowance for Impairment Losses includes:

a. Probability of default
b. Exposure at default
c. Lost given default
d. Discount factor
e. Forward looking adjustment

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

7. Klasifikasi atas instrumen keuangan

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

7. Classes of financial instrument

The Bank classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments.

The classification can be seen in the table below:

Keterangan / *Explanation*	*Klasifikasi / Classification*
Aset Keuangan/ *Financial Assets*	
- Kas *Cash*	- *Pinjaman yang diberikan dan piutang* *Loans and receivables*
- Giro pada Bank Indonesia *Current accounts with Bank Indonesia*	- *Pinjaman yang diberikan dan piutang* *Loans and receivables*
- Giro pada bank lain *Current accounts with other banks*	- *Pinjaman yang diberikan dan piutang* *Loans and receivables*
- Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain *Placements with Bank Indonesia with other banks*	- *Pinjaman yang diberikan dan piutang* *Loans and receivables*
- Efek-efek *Marketable securities*	- *Tersedia untuk dijual* *Available for sale* - *Dimiliki hingga jatuh tempo* *Held to Maturity*
- Tagihan derivatif *Derivatives receivable*	- *Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi* *Financial assets designated at fair value through profit or loss.*
- Kredit yang diberikan *Loans*	- *Pinjaman yang diberikan dan piutang* *Loans and receivables*
- Tagihan akseptasi *Acceptances receivables*	- *Pinjaman yang diberikan dan piutang* *Loans and receivables*
- Penyertaan saham *Investment in shares of stock*	- *Pinjaman yang diberikan dan piutang* *Loans and receivables*
Liabilitas Keuangan/ *Financial Liabilities*	
- Liabilitas segera *Liabilities due immediatelly*	- *Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)* *Other liabilities (amortized cost)*
- Simpanan nasabah *Deposits from customers*	- *Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)* *Other liabilities (amortized cost)*
- Simpanan dari bank lain *Deposits from other banks*	- *Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)* *Other liabilities (amortized cost)*
- Liabilitas derivatif *Derivatives payables*	- *Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)* *Other liabilities (amortized cost)*
- Liabilitas derivatif *Derivatives payables*	- *Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)* *Other liabilities (amortized cost)*
- Liabilitas akseptasi *Acceptances payables*	- *Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)* *Other liabilities (amortized cost)*
- Pinjaman yang diterima *Borrowings*	- *Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)* *Other liabilities (amortized cost)*
- Beban yang masih harus dibayar *Accured expenses*	- *Liabilitas lainnya (biaya perolehan diamortisasi)* *Other liabilities (amortized cost)*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

8. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

9. Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

10. Pengukuran nilai wajar

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer* perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulating agency*) dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga penawaran; aset keuangan yang akan diperoleh atau liabilitas keuangan yang dimiliki diukur menggunakan harga permintaan. Jika Bank memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka Bank dapat menggunakan nilai tengah dari pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

8. Classes of financial instrument

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial posisition when the bank have a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

9. Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

10 Fair value measurement

When available, the Bank measure the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily available from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulating agency and represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank determines the fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using the recent arm's length transactions between knowledgeable, willing parties (if available), reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same and discounted cash flow analysis.

Owned financial assets or liabilities to be issued are measured at bid price; financial assets to be obtained or financial liabilities held are measured at ask price. If the Bank has an asset and liability position where the market risks are offset, the Bank can use the middle value of the market as a basis for determining the fair value of the offset risk positions and applying adjustments to the bid or ask price of open or net positions (net open position), whichever is more appropriate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

11. Perbedaan 1 (satu) hari

Pada saat transaksi berbeda dengan nilai wajar dari transaksi pasar lainnya yang dapat diobservasi saat ini atas instrumen yang sama atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan variabel data dari pasar yang dapat diobservasi, Bank secara langsung mengakui perbedaan antara nilai transaksi dan nilai wajar ("1 hari" keuntungan atau kerugian) pada laporan laba rugi.

Jika nilai wajar ditentukan berdasarkan data yang tidak dapat diobservasi, maka perbedaan antara nilai transaksi dan nilai model hanya dapat diakui pada laporan laba rugi pada saat data menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut tidak diakui lagi.

d. Signifikansi Instrumen Keuangan terhadap Posisi dan Kinerja Keuangan

1). Kategori Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Bank menetapkan kategori atas aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi seperti diungkapkan pada catatan 2.c.

Bank telah menetapkan pinjaman yang diberikan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, Bank telah mengungkapkan:

a. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit dari pinjaman atau kredit yang diberikan pada akhir periode laporan.

b. Jumlah derivatif kredit atau instrumen serupa terkait yang memitigasi eksposur maksimum terhadap risiko kredit.

c. Jumlah perubahan, selama periode dan secara kumulatif, nilai wajar kredit yang diberikan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit atas aset keuangan. Perubahan kondisi pasar yang menimbulkan risiko pasar termasuk perubahan suku bunga terobsesi (acuan), harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga dan tarif.

d. Jumlah perubahan nilai wajar dari derivatif kredit atau instrumen serupa terkait yang terjadi selama periode dan secara kumulatif sejak pinjaman yang diberikan ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Financial Assets and Liabilities *(continued)*

11. Day 1 (one) Difference

When the transaction price differs from the fair value of other observable current market transactions in the same instrument or based on a valuation technique whose variable include only data from observable markets, the Bank immediately recognises the difference between the transaction price and fair value (a "Day 1" profit or loss) in the income statement.

In cases where fair value is determined using data which is not observable, the difference between the transaction price and model value is only recognised in the statements of income when the inputs become observable or when the instrument is derecognised.

d. Financial Instrument Significant to Position and Financial Performance

1). Categories of Financial Assets and Financial

The Bank determine the categories of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted policies disclose in Note

The bank has stated the given loan to measure at fair value through profit and loss, the Bank has discloused:

a. The maximum exposure of credit risk of the loan or credit given at the end of financial report period.

b. Derivative credit amount or other similar related which mitigated the maximum exposure of to credit risks.

c. The sum of changes, during the period accumulatively, the fair value of credit that could atributed in the moving of credit risks on the financial assets. The changes of market condition afection market risks within the changes of obsesed the interest rate, commodities price, exchange rates, price indexes and tariffs.

d. The sum of derivative credit fair value or the related similar instruments happened during the period accummulatively since the loan given is stated to measure in fair value through profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Signifikansi Instrumen Keuangan terhadap Posisi dan Kinerja Keuangan (lanjutan)

2). Aset Keuangan atau Liabilitas Keuangan diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi

Bank telah menetapkan suatu liabilitas keuangan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan Bank telah mengungkapkan beberapa hal mengenai:

a. Jumlah perubahan, selama periode dan secara kumulatif, nilai wajar liabilitas keuangan yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit atas liabilitas keuangan. Perubahan kondisi pasar yang menimbulkan risiko pasar termasuk perubahan suku bunga terobsesi (acuan), harga instrumen keuangan Bank lain, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga dan tarif. Untuk kontrak yang memiliki fitur unit-link, perubahan kondisi pasar termasuk kinerja yang terkait dengan dana investasi internal atau eksternal.

b. Perbedaan antara jumlah tercatat liabilitas keuangan dan jumlah yang disyaratkan secara kontraktual bagi entitas untuk membayar pada saat jatuh tempo kepada pemegang kewajiban tersebut.

c. Reklasifikasi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, bukan nilai wajar atau pada nilai wajar, bukan perolehan yang diamortisasi. Jumlah yang direklasifikasi dari dan ke setiap kategori dan alasan direklasifikasi.

Untuk periode pelaporan ketika aset keuangan direklasifikasi, keuntungan atau kerugian nilai atas aset keuangan yang diakui dalam laba rugi atau pendapatan lain pada periode pelaporan tersebut dan periode pelaporan sebelumnya.

Untuk periode pelaporan setelah reklasifikasi (termasuk periode pelaporan dimana aset keuangan direklasifikasi) hingga penghentian pengakuan aset keuangan, keuntungan atau kerugian nilai wajar yang seharusnya diakui dalam laba rugi atau pendapatan lain, jika aset keuangan tersebut tidak direklasifikasi.

Keuntungan, kerugian, pendapatan dan beban yang diakui dalam laba rugi serta suku bunga efektif dan estimasi jumlah arus kas yang Bank perkirakan untuk pulih pada tanggal reklasifikasi aset keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Financial Instrument Significant to Position and Financial Performance *(continued)*

2). Financial assets or liabilities was determined of fair value from income statement

The bank has stated a financial liabilities to measure in fair value through profit and loss and the bank had stated several things about:

a. The sum of changes, during the period accumulatively, the fair value of financial liabilities that could atributed in the moving of credit risks on the financial liabilities. The changes of market condition afection market risks including the interest rate obsesed, other bank instruments price, commodities price, exchange rates, price indexes and tarifs. For the contracts used unit links fixture, the changes of market condition include in relative works with internal or external investment fund.

b. The differences of the liability financial amount recorded and the contractual amount for the entities to pay at the value date to that liability holder.

c. The Reclasification of financial assets measured on gained value amortised expense, not at fair value or on fair value, not on gained amortised. The sum reclasified from and to every category and reason of reclasification.

For the reporting period when financial assets reclasified, gain and loss value of the financial assets approved in profit and loss or other income in that reporting period and last period report.

For the reporting period after reclasification (include reporting the period where the financial assets report) due to the approvement of financial assets stopped, gain or loss of fair value which have been approved as profit and loss or other income, if that financial assets not reclasified.

Gain, loss, income and expenses which approved in the profit and loss statement and effective interest rate and estimation of cash flow amount estimated by the bank in recovery on the date of reclasification of financial assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Signifikansi Instrumen Keuangan terhadap Posisi dan Kinerja Keuangan (lanjutan)

2). Aset Keuangan atau Liabilitas Keuangan diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)

d. Jenis aset keuangan, jenis risiko dan manfaat atas kepemilikan di Bank, melanjutkan pengakuan atas seluruh aset (jumlah tercatat dan liabilitas terkait), melanjutkan pengakuan atas aset sejauh keterlibatan - berkelanjutannya.

e. Jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan sebagai agunan termasuk jumlah yang telah direklasifikasi dengan berpedoman pada syarat dan ketentuan yang terkait dengan penjaminan tersebut. Bank tidak memiliki agunan yang dijual dan atau dijaminkan kembali.

f. Rekonsiliasi atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai karena kerugian kredit dan penurunan nilai dalam akun terpisah dan bukan langsung mengurangi jumlah tercatat aset keuangan.

3). Nilai Wajar

Bank telah menguraikan nilai wajar untuk setiap kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Nilai wajar dari kelompok aset dan liabilitas keuangan tersebut dilakukan dengan cara yang memungkinkan untuk membandingkan dengan jumlah tercatatnya.

b. Saling hapus diantara kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan hanya dilakukan sepanjang jumlah tercatatnya juga saling hapus di laporan posisi keuangan.

c. Metode dan asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dengan cara menginformasikan perubahan dalam teknik penilaian dengan menyebutkan alasan yang digunakan dalam perubahan tersebut.

d. Klasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran harga kuotasian (tingkat 1), input observasi langsung dan tidak langsung (harga dan derivasi dari harga) (tingkat 2) dan data pasar yang diobservasi (tingkat 3).

e. Tingkat pada hirarki nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan dengan memisahkan nilai wajar sesuai tingkat yang telah ditentukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Financial Instrument Significant to Position and Financial Performance *(continued)*

2). Financial assets or liabilities was determined of fair value from income statement *(continued)*

d. The variation of financial assets, risk and usefulness of the ownership in the bank, to continue the approvement on all assets (the amount recorded and the liabilities related), as far as concern continously.

e. The recorded amount of financial assets guaranted include the amount reclasified based on the related clausule and decree with that guarantee. The bank did not own the sold guaranty the reguanty assets.

f. The reconciliation of the decreasing financial assets value causing by credit loss and decreasing value in seperating account or indirectly decrease the financial assets recorded.

3). Fair Value

Bank has classified the fair value for every groups of financial assets and financial liabilities by declare the following:

a. The fair value for every groups of financial assets and financial liabilities only done as far as possible way to compare with the amount recorded.

b. Depreciating of each other in between the groups of assets only done as long as the amount recorded depreciated each other too.

c. The method and assumption applied in stating the fair value by changing information in value technique and give the reason used in that changes.

d. The clasification of the measuring of fair value by using grade of fair value which shows the significant input used in measuring quotation price (grade 1), direct and indirect input observation (cost and derivation from cost) (grade 2) and market data observated (grade 3).

e. Level on grade of fair value categorated as a whole by seperating the fair value in accordance with the grade stated.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Signifikansi Instrumen Keuangan terhadap Posisi dan Kinerja Keuangan (lanjutan)

4). Sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan

Pengungkapan ini memfokuskan pada risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Risiko ini umumnya meliputi, tetapi tidak berbatas pada, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar.

a. Pengungkapan kualitatif yaitu Bank mengungkap eksposur risiko dan bagaimana risiko tersebut timbul. Tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode yang digunakan untuk mengukur risiko tersebut.

b. Pengungkapan kuantitatif yaitu ikhtisar mengenai eksposur Bank terhadap risiko pada akhir periode pelaporan. Pelaporan tersebut didasarkan pada informasi yang disajikan secara internal kepada personel manajemen kunci. Jika data kuantitatif pada akhir periode tidak mewakili eksposur atas risiko, maka Bank menyediakan informasi lebih lanjut yang mewakili.

c. Risiko kredit yaitu nilai maksimal eksposur pada akhir periode tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki, informasi dari aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan dan aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai yang telah dinegosiasi ulang.

d. Risiko likuiditas yaitu risiko analisa jatuh tempo untuk liabilitas keuangan *non derivatif* yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dimana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk memahami waktu arus kas.

e. Risiko pasar yaitu analisis sensitivitas dimana Bank terekspos pada akhir periode pelaporan, yang menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas mungkin terpengaruh oleh perubahan pada variabel risiko yang relevan pada tanggal tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Financial Instrument Significant to Position and Financial Performance *(continued)*

4). Nature and risk of extensive from the financial instrumen

This enclosure focused in risks which arise from financial instruments and how that risks worked. This risks generally include, but not limited on, credit risks, liquidity risks, and market risks.

a. The qualitative enclosure means the bank enclose the exposure of risks and how the risks arise. The aim of this rule and the process of work on risks and the method used to measure that risks.

b. The qualitative enclosure are the summary about bank exposure of the risks at the end of the year end report. That reporting based on the information stated internally to the key personal management. If qualitative data at the end of the period is unbehalf of the exposure on risks, though the bank prepare more information in accordance with the subject.

c. The Credit risk is the maximum exposure at the end of the period without calculating the own guaranty, the information of financial assets which un in value date or undecreased and financial assets which un in value date which value renegociated.

d. The liquidity risks is the analitical of the value date for financial liabilities non derivative that shows the balance of how contractual value date is so important to fulfil timing of cash flows.

e. Market risk is the analitical of sensitivity where the bank exposed at the end of the reporting period, which shows how the profit, loss and equity possibly concluded by the relevan risk variable at that date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak berelasi

1). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Sesuai dengan PSAK 7 (Penyesuaian 2015) tentang "Pengungkapan pihak-pihak berelasi", yang dimaksud dengan pihak berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor; atau
   (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   (iii) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:
   (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
   (ii) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a).
   (vii) Orang yang diidentifikasi huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas personil manajemen kunci entitas (entitas induk dari entitas).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Transaction with related parties disclosure

1). Based on Statement of Financial Accounting Standards

In accordance with PSAK 7 (Adjustment 2015) about "Related party disclosure", the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   (i) Has control or joint control over the reporting entity; or
   (ii) Has significant influence over the reporting entity; or
   (iii) Is a member of the key management personel of the reporting entity of a parent of the reporting entity.

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   (i) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
   (ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a group of which the other entity is a member).
   (iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
   (iv) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
   (v) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
   (vi) The entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
   (vii) A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personel of the entity (a parent of the entity).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak berelasi (lanjutan)

1). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Semua transaksi yang jumlahnya signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal, sebagaimana dilakukan dengan pihak berelasi, maupun tidak, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan arus kas terdiri dari Kas, Giro pada Bank Indonesia dan Giro pada Bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain serta fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam 3 bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Giro pada bank lain dan Bank Indonesia dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Giro Wajib Minimum

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, Bank diwajibkan untuk menempatkan sejumlah persentase tertentu atas simpanan nasabah pada Bank Indonesia.

Giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Transaction with related parties disclosure

1). Based on Statement of Financial Accounting Standards *(continued)*

All significant transaction with related parties whether conducted under normal requirement, which is conducted with related parties, or not, is disclosed in the financial statements.

f. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents presented in the statements of cash flows consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and other banks, placements with Bank Indonesia and other banks and Bank Indonesia Deposits Facility maturing within 3 (three) months from the acquisition date, and not used as collateral for borrowing and not restricted in use.

g. Current accounts with Bank Indonesia and other Banks

Current accounts with other banks and Bank Indonesia are classified as amortized cost. Current accounts with other banks and Bank Indonesia are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses.

Statutory Reserve Requirement

In accordance with Bank Indonesia regulations regarding the Minimum Statutory Reserves for Commercial Banks at Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Exchange, Banks are required to place a certain percentage of customer deposits with Bank Indonesia.

The current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks initially shall be measured at reasonable fair value and added with transaction cost that can be attributed directly and is the additional cost to obtain financial asset, and after the initial acknowledgement it shall be measured on the revenue costs amortized using the effective interest rate method. Current accounts with Bank Indonesia and other banks is classified as loans and receivables.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada bank Indonesia dan Bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

i. Efek-efek

Efek-efek yaitu surat pengakuan utang, Efek-efek komersil, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek-efek, dan setiap derivatif dari Efek-efek.

Efek-efek diklasifikasikan ke dalam kelompok untuk diperdagangkan, tersedia untuk dijual, atau dimiliki hingga jatuh tempo.

Efek-efek yang diklasifikasikan kedalam kelompok untuk diperdagangkan (*trading*) disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Efek-efek yang diklasifikasikan ke dalam kelompok tersedia untuk dijual (*available-for-sale*) disajikan sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari Efek-efek tersedia untuk dijual tersebut setelah dikurangi pajak yang tercacat dalam ekuitas diakui sebagai penghasilan atau beban pada periode dimana Efek-efek tersebut dijual. Penurunan permanen atas nilai Efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Efek-efek yang diklasifikasikan ke dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo (*held-to-maturity*) disajikan sebesar biaya perolehan yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi.

Bila terjadi penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehan (termasuk amortisasi premi dan/atau diskonto) yang bersifat permanen, maka biaya perolehan Efek-efek yang bersangkutan diturunkan sebesar nilai wajarnya dan jumlah penurunan nilai tersebut dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan.

Efek-efek yang dipindahkan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui dalam komponen ekuitas secara terpisah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Placement with Bank Indonesia and other banks

Placement in Bank Indonesia and other banks is stated as at cost and amortized used effective interest method subtracted with Allowance for impairment losses. Placement in Bank of Indonesia and other banks is classiffied to loans and receivable.

i. Marketable securities

Marketable securities is Letter of debt, commercial marketable securities, Share, obligation, list of payable, Unit contract investment of collective investment, contract to expect for effect, and derivatif from Marketable Securities.

Marketable securities are classified as either trading, available-for-sale, or held-to-maturity.

Marketable securities classified as trading are stated at fair value. The unrealized gains or losses resulting from the increase or decrease in fair value are recognized in the current period's statement of income.

Marketable securities classified as available-for-sale are stated at fair value. The unrealized gains or losses, net of tax, on the available-for-sale marketable securities recorded in equity are recognized as income or expense of the period when realized. Any permanent decline in the value of available-for-sale marketable securities is recognized in the current period's statement of income.

Marketable securities classified as held-to-maturity are stated at cost adjusted for unamortized premium or discount.

If it is probable that the cost (including amortization of premium and/or discount) of such marketable securities will not be fully recovered, a permanent diminution in value is considered to have occurred and the individual security is written down to its fair value. Any such write-down is recognized as loss in the current period's statement of income.

Marketable security transferred from held-to-maturity category to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gain or losses at the date of the transfer shall be recognized in equity separately.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Efek-efek (lanjutan)

Premi atau diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dan perubahan nilai wajar disajikan sebagai penambah / pengurang terhadap Efek-efek.

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

j. Surat-Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali disajikan sebesar harga jual kembali Efek-efek yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi.

Pendapatan bunga yang belum diamortisasi merupakan selisih antara harga beli dan harga jual kembali Efek-efek yang diakui sebagai pendapatan bunga dan diamortisasi selama jangka waktu sejak Efek-efek dibeli hingga dijual kembali.

Pendapatan bunga diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

k. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank membentuk penyisihan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan terhadap saldo masing-masing kredit pada akhir tahun. Cadangan kerugian penurunan nilai ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas yang besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Otoritas Jasa Kuangan (OJK).

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada saat akuisisi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Marketable securities *(continued)*

Premium or discount is amortized using effective interest rate method.

Provision for impairment losses and changes in fair value are presented as an increase / decrease in Securities.

The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment.

j. Marketable securities purchased with agreement to resell

Marketable securities purchased with agreements to resell are presented at their resale price less unamortized interest income.

Unamortized interest income is the defference between the purchase price and the selling price which is recognized as interest income and amortized during the period from the purchase of marketable securities.

The interest income is amortized using effective interest rate method.

Marketable securities purchased with agreements to resell are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment.

k. Loans

Credit given is certified as in the amount of credit balance minus the allowance for impairment losses. Bank establishes the setting aside of allowance for impairment losses based on the balance of each credit at year end. The reserve for value decreased loss is decided to be based on the evaluation to the collectability with the amount as arranged in the Regulation of Bank Indonesia (PBI) and OJK.

Loans are measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses.

Amortized cost calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and transaction that are an integral part of effective interest rate. Allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidance of impairment.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit sindikasi, kredit dalam rangka pembiayaan bersama dan kredit penerusan dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Kredit yang direstrukturisasi dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit yang diberikan pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi.

Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan penghasilan bunga secara proporsional.

Pada saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak.

Manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang direstrukturisasi untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Kredit akan terus menjadi subjek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif dengan menggunakan suku bunga efektif awal.

Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan penghasilan bunga secara proporsional.

Jumlah bruto kredit yang direstrukturisasi mencakup pokok kredit, bunga dan beban lainnya yang dikapitalisasi ke pokok kredit. Bunga yang dikapitalisasi ke pokok kredit tersebut diakui sebagai pendapatan bunga ditangguhkan.

Kredit diklasifikasikan sebagai "*non-performing*" pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan/atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut diragukan. Pendapatan bunga atas kredit yang telah diklasifikasikan sebagai "*non-performing*" diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Loans *(continued)*

Syndication loans, joint financing and channeling loans are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Bank.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value on the date of restructuring or value of the future cash receipts after the restructuring.

Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the statement of income. Thereafter, all cash receipts under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest revenue, on a proportionate basis.

When the credit requirements have been renegotiated or modified (restructuring credit), the existing decreased value shall be measured using the initial effective interest rate used before the requirements are amended and the credit is no longer counted as outstanding.

The management continuously reviews the restructured to assure the completion of all criteria and payment in the future. The credit shall be continuously become the subject individual or collective decreased value appreciation using the initial effective interest rate.

Losses resulting from the differences between the carrying value on the date of restructuring over the present value of future cash receipts after the restructuring is recognized in the statement of comprehensive income. Thereafter, all future cash receipts under the new terms shall be recorded as a return of principal loans and interest income proportionaly.

The total restructured credit gross includes the principal credit, interests and other liabilities capitalized to the principal credit. The interest capitalized to the principal credit shall be acknowledged as postponed interest income.

Loans are classified as non-performing at the time the basic is already over due and/or when the management assumes that the collection of the basic and/or its interest is questioned. Incomes from loan interest is classified as non-performing, acknowledged as income at the time of collection.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit yang diberikan dihapus buku dari penyisihan penghapusan kredit pada saat manajemen berpendapat bahwa kredit tersebut harus dihapus bukukan karena sudah tidak akan tertagih lagi. Sebelum tanggal 1 Januari 2010, penerimaan kembali kredit yang telah dihapus bukukan dikreditkan ke akun penyisihan penghapusan kredit. Kemudian setelah tanggal 1 Januari 2010 penerimaan kembali kredit yang telah dihapus bukukan dibukukan sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Penyaluran kredit pola *channeling* terdapat kredit yang disalurkan ke nasabah dengan penerusan pinjaman (*Channeling*), Bank hanya mengakui kredit sebesar porsi kredit yang risikonya ditanggung Bank. Jika Bank tidak mempunyai risiko atas penerusan kredit, maka Bank tidak mengakui kredit tersebut. Untuk kredit yang diberikan dengan perjanjian penerusan kredit antara lain kemitraan, pengentasan kemiskinan, pengembangan usaha kecil, pinjaman kredit yang berasal dari luar negeri, dan dana investasi pemerintah.

l. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah terdiri dari piutang *murabahah* pembiayaan *mudharabah* , pembiayaan *musyarakah* *ijarah* , *istishna* dan *qardh* .

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar lebih besar daripada nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa akad atau diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat.

Piutang *murabahah* disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi pendapatan murabahah ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang.

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

Piutang *istishna* disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar tagihan termin kepada pembeli dikurangi penyisihan kerugian.

Piutang *qardh* diakui sebesar jumlah dana dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman qardh diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

k. Loans *(continued)*

The given loans will be writen-off from an allocation for possible losses when the management assumes that those loans should be written-off since they will not be collectible anymore. Before January 1st, 2010, the recollection of the written-off loan is recorded as credit on the account for allocation for possible losses. After that, Starting on January 1st, 2010 the recollection of the written-off loan is recorded as operating income beside interest.

In the channelling pattern of loans to costumers, (Channelling), the Bank only acknowledges the loan equal to its portion of the risk guaranteed (borne) by the Bank. If the Bank has no risk of channeling the loans, hence Bank does not approve that loan. Examples of loans given with the agreement of Channeling loans are partnership loan, poor endeavoring credit, small-scale development loan, loan derived from abroad, and government investment fund.

l. Sharia Financing

Sharia financing consists of murabahah receivables, mudharabah financing, musyarakah financing, ijarah, istishna and qardh.

Mudharabah and musyarakah financing are stated in the statement of financial position at fair value and if the fair value is higher than the book value, the margin is recorded as deferred income and amortized over the period of financing or recorded as a loss and charged to the current period if the fair value is less than the book value.

Murabahah receivables are stated in the statement of financial position at net realizable value, which is the receivable balance less deferred murabahah income and allowance for impairment losses.

Ijarah income is presented net of related expenses such as depreciation, maintenance expense and repairs, and so forth.

Istishna receivables are presented in the statements of financial position at the istishna billing to the buyer less an allowance for losses.

A qardh receivable is recognized in the amount of financing granted at the transaction date. Any excess amount paid by the borrower in repaying a qardh receivable is recognized as revenue upon receipt.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Pembiayaan Syariah (lanjutan)

Murabahah adalah akad jual beli barang tertentu dengan harga ditentukan sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Bank sebagai penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli (debitur). Piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan ”marjin yang ditangguhkan” yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

Mudharabah adalah kerjasama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan manajer pendanaan (*mudharib)* berdasarkan rasio pendapatan dan pendanaan (*mudharib*) serta ratio kerugian yang ditentukan sebelumnya.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

m. Aset Produktif dan Penilaian Kualitas Aset

POJK No.11/POJK.03.2020, tanggal 13 Maret 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur mikro, kecil dan menengah, yang meliputi : a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan b. kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Sharia Financing *(continued)*

Murabahah is an agreement to buy and sell certain products at acquisition cost plus a certain margin to be agreed by both the buyer and seller and the Bank as the seller is required to disclose the acquisition cost to the buyer. Murabahah receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

Mudharabah is a commercial cooperation contract between the owner of funds (shahibul maal) and a funds manager (mudharib) based on a predetermined ratio of revenue or profit and loss sharing.

Musyarakah is a partnership contract among fund owners (partners musyarakah) to contribute funds and conduct business on a joint basis through partnership with profit sharing or loss is based on an agreement or capital contribution proportion.

Istishna is a purchase agreement between an al-mustashni (buyer) and an al-shani (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to make or to supply al-mashnu (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at an agreed price.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

m. Assets productif and value of quality assets

POJK No.11/POJK.03.2020, dated March 13th, 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019. Banks can implement policies that support economic growth stimuli for debtors affected by the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) including micro debtors, small and medium enterprises, which include: a. asset quality determination policy; and b. credit and financing restructuring policies.

Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia (OJK) Number 40/POJK.03/2019 dated December 19th, 2019 concerning Asset Quality Assessment for Commercial Banks.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Aset Produktif dan Penilaian Kualitas Aset (lanjutan)

Penilaian kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, terakhir dengan POJK No.19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yaitu:

a. prosfek usaha
b. kinerja *(performace)* debitur
c. kemampuan membayar

Komponen dalam faktor penilaian tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset Bank.

Klasifikasi aset produktif bank adalah sebagai berikut:
- Giro pada Bank lain;
- Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain;
- Efek-efek;
- Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali;
- Tagihan derivatif;
- Kredit yang diberikan;
- Tagihan akseptasi;
- Penyertaan;
- Komitmen dan kontinjensi yang berisiko kredit;
- Transaksi rekening administratif;
- Serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

n. Penyertaan

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan investasi jangka panjang, serta penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi kredit.

Perusahaan asosiasi adalah seluruh entitas di mana Bank mempunyai pengaruh signifikan, namun tidak memiliki kendali atas entitas-entitas tersebut. Dalam hal ini, Bank umumnya mempunyai persentase kepemilikan 20% sampai dengan 50% hak suara. Penyertaan saham pada perusahaan asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya dicatat sebesar harga perolehan dan disesuaikan dengan bagian Bank atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sesuai dengan jumlah persentase kepemilikan dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal akuisisi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Assets productif and value of quality assets *(continued)*

Asset quality assessment for Commercial Banks carrying out business activities based on sharia principles, most recently with POJK No.19/POJK.03/2018 dated September 20th 2018 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.03/2014 concerning Bank Asset Quality Assessment Sharia General and Sharia Business Units. Credit quality is determined based on assessment factors, namely:

a.business prospect
b. debtor performance
c. capability to pay

The component in these factors states in the legislation concerning the quality of bank assets.

Classification of productive bank assets are as follows:
- *Current account with other banks*
- *Placement with Bank Indonesia and other banks*
- *Marketable securities*
- *Marketable securities purchase with agreement to sell*
- *Derivatives receivable*
- *Loans*
- *Acceptances receivable*
- *Investment*
- *Commitment and contingencies which carry credit risk*
- *Transaction recening administration*
- *With bend prepare other fund to be able in resemble*

n. Investment

Investment in shares represent investment at the companies engaged in the financial services industry that are not listed in the stock market for a long-term investment purpose, as well as temporary investments, in order for loan restructuring purpose.

Associates are all entities over which the Bank has significant influence, but does not have control. Generally, the Bank's shareholding is between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for under the equity method and are initially recognized at cost and adjusted for the Bank's share in net profit or loss of the associated companies less dividends received after the acquisition date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Penyertaan (lanjutan)

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham dibentuk apabila berdasarkan pendapat manajemen terdapat penurunan nilai secara permanen atas nilai penyertaan.

Untuk penyertaan saham dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dicatat dengan metode biaya. Dengan metode ini, penyertaan saham dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan dividen diakui pada saat keputusan pembagian dividen diumumkan.

o. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing beban dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Aset tetap dan penyusutan

Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*Straight Line Method*) dari harga perolehan, yang didasarkan atas masa manfaat dari Aset tetap yang bersangkutan. Persentase tarif penyusutan Aset tetap dan inventaris ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri No.51/KEPDIR/2007 tanggal 1 Mei 2007, yang mengacu pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Keputusan Menteri Keuangan RI No.138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002, Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan RI No.520/KMK.04/2000, tanggal 14 Desember 2000.

Bank berkewajiban untuk memilih di antara model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansi atas aset tetapnya. Dalam hal ini, Bank memilih menggunakan model biaya.

Aset tetap diukur sebesar biaya perolehan, yang terdiri dari harga perolehannya dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen, serta estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Investment *(continued)*

Provision for impairment losses on investments in shares is made when in the opinion of the management there is a permanent decline in the of the investments.

Investments in shares with an ownership interest below 20% are recorded based on the cost method. Under this method, investments in shares are carried at cost less Allowance for impairment losses. Dividend income is recognized when the decision to distribute the dividend is declared.

o. Beban dibayar dimuka

Prepaid expenses are amortized over the beneficial periods using the straight-line method.

p. Fixed assets and depreciation

Fixed assets is written based on gain price. Depreciation is calculated by using Straight Line Method of gain price which is based on the above inward period of the fixed asset. The percentage of Fixed assets depreciation or inventory is defined based on the Decree of PT Bank Riau Kepri Board of Directors No.51/KEPDIR/2007 dated May 1st, 2007, referring to constitution No.17, 2000, on the third addendum of Constituent No 7 year 1983 about Income Tax, and Indonesia's Finance Minister No.138/KMK.03/2002 dated April 8th, 2002 in the front addendum of the Decree ot the Republic Indonesia's of Finance Minister No. 520/KMK.04/2000, dated December 14th, 2000.

Requires the bank to choose between the cost model and the revaluation model as the accounting policy for its property and equipment. The Bank choose for use cost model.

Fixed asset is measured in the amount of revenue costs, consisting of the revenue price and costs that can be attributed directly to carry asset to the location and the desired condition in order the asset ready to be used in accordance with the desire and objective of the management, as well as the initial estimated fixed asset unloading and transfer costs and restoration of local assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

Biaya-biaya setelah perolehan awal seperti penggantian komponen dan inspeksi yang signifikan, diakui dalam jumlah tercatat aset tetap jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan akan mengalir ke Bank dan biaya tersebut dapat diukur secara handal. Sisa jumlah tercatat biaya komponen yang diganti atau biaya inspeksi terdahulu dihentikan pengakuannya. Biaya perawatan sehari-hari aset tetap diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Tanah diakui sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Beban-beban tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang tahun yang lebih pendek antara hak atas tanah atau umur ekonomis tanah. Beban ditangguhkan ini disajikan dalam akun "Aset Lain-Lain" pada neraca.

Estimasi masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

Penggolongan harta berwujud	Masa manfaat/ *Useful life*	Tarif penyusutan/ *Depreciation tarif*	*Group assets*	*Tangible property class*
Perabot / perlengkapan kantor	4 tahun/ years	25%	*Group I*	*Furniture / fixtures office*
Perabot / perlengkapan rumah dinas	4 tahun/ years	25%	*Group I*	*Furniture / fixture house official*
Perabot / perlengkapan mess	4 tahun/ years	25%	*Group I*	*Furniture / fixture mess*
Mesin kantor	4 tahun/ years	25%	*Group I*	*Office machine*
Komputer	4 tahun/ years	25%	*Group I*	*Computer*
Kendaraan	4 tahun/ years	25%	*Group I*	*Vehicle*
Perabot / perlengkapan kantor	8 tahun/ years	12,5%	*Group II*	*Office equipments / supplies*
Perabot / perlengkapan rumah dinas	8 tahun/ years	12,5%	*Group II*	*Home office equipments / supplies*
Kendaraan	8 tahun/ years	12,5%	*Group II*	*Vehicle*
Bangunan kantor	20 tahun/ years	5%	*Fixed*	*Office building*
Bangunan rumah dinas	20 tahun/ years	5%	*Fixed*	*Home office building*
Bangunan mess	20 tahun/ years	5%	*Fixed*	*Boarding house building*
Bangunan gudang	20 tahun/ years	5%	*Fixed*	*Wwarehouse building*
Bangunan lainnya	20 tahun/ years	5%	*Fixed*	*Other building*

Hak atas tanah tidak disusutkan. Aset yang sudah tidak digunakan lagi dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, laba atau rugi yang diperoleh/ diderita dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

ISAK 25 menyatakan bahwa hak atas tanah tidak disusutkan kecuali terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Penerapan interpretasi ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Fixed assets and depreciation *(continued)*

The costs after the initial revenue such as component replacement and significant inspection, are acknowledged in in the amount recorded as fixed assets when it is very likely the economic benefits in the future shall flow to the Bank and those costs can be measured reliably. The remaining of recorded amount of reimbursed component costs or the previous inspection costs its acknowledgement is stopped. The daily maintenance cost of fixed assets shall be acknowledged as liability at the occurrence.

Land shall be acknowledged in the amount of revenue cost and shall not be decreased. Certain liabilities related to revenues or extended land title right shall be postponed and amortized using shorter linear method throughout the year between land title right or land economic age. This deferred liability shall be presented in the account of "Other Assets" in balance sheet.

Estimated useful lives of the assets as follows:

Rights on lands is not depreciated. Assets, which no longer been used were set out from the group of fixed assets, and profit/ losss gained/suffered is reported in the respective profit/ loss annual report.

ISAK 25 states that land right is not depreciated unless there is contrary evidence indicates that the extentions or renewal of land likely or definitely not to be obtained. The adoption of this interpretation does not have significant impact to the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

PSAK 48 (Revisi 2014) tentang Penurunan Nilai Aset mensyaratkan bahwa nilai tercatat aset tetap dikaji ulang setiap tanggal neraca untuk menilai apakah aset tetap tersebut nilai tercatatnya lebih tinggi dari jumlah yang dapat diperoleh kembali *(recoverable amount)* dari aset tetap tersebut.

Jika nilai tercatat dari aset tetap melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut, nilai tercatat aset tetap harus diturunkan menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap tersebut.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

q. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak yang diperoleh Bank dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset.

Pengeluaran selanjutnya yang jumlahnya signifikan akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan dimasa mendatang. Pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Amortisasi diakui pada laporan laba rugi berdasarkan masa manfaat ekonomis yang berkisar antara 4 sampai dengan 8 tahun dengan menggunakan metode garis lurus sejak tanggal dimana aset siap untuk digunakan. Aset tidak berwujud disajikan dalam akun "Aset lain-lain".

r. Aset dalam penyelesaian

Aset tetap dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ketika aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap digunakan, akumulasi biaya perolehan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sebenarnya.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan aset tetap siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

p. Fixed assets and depreciation *(continued)*

PSAK 48 (Revised 2014) about Asset Decreased Value requires that the recorded value of fixed assets still to be reviewed on each balance sheet date to appreciate whether the said fixed assets the recorded value is higher than the recoverable amount value from the said fixed assets.

If the recorded value of fixed assets exceeds the estimated recoverable amount value of the fixed asset, the recorded fixed asset value must be lowered to become the recoverable amount value of the said fixed assets.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

q. Intangible asset

Intangible asset consist of software obtained by Bank and recorded in the amount of revenue costs minus accumulated amortization and accumulated loss of the asset decreased value.

Further expenses with significant amount shall be capitalized only when those expenses increasing the related asset economic benefits in the future. Other expenses shall be imputed at the occurrence.

Amortization is recognized in profit or loss based on the useful lives of the items ranging from 4 to 8 years using the straight-line method from the date on which the assets are ready for use. Intangible assets are presented under "Other assets" account.

r. Construction in progress

Fixed assets in settlement shall be stated in the amount of revenues and presented as part of fixed assets. When assets in settlement have been settled and ready to be used, the accumulated revenue costs shall be reclassified to real fixed asset account.

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalized as assets under construction. These costs are reclassified to the appropriate fixed asset account when the construction is completed and the asset is ready to use. Depreciation is charged from this date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Beban tangguhan

Beban tangguhan merupakan nilai tercatat atas pengadaan IT yang proses pengerjaannya melalui tender. Bank akan melakukan pembayaran pada saat penyerahan Berita Acara Pekerjaan telah selesai dilakukan.

t. Pajak di bayar dimuka

Uang muka pajak merupakan jumlah uang muka pajak badan dibayar sendiri dan pajak penghasilan yang telah dibayarkan yang dapat diperhitungkan pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya.

u. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih atas penyelesaian kredit yang diberikan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai penurunan nilai. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Selisih lebih antara saldo kredit yang tidak dapat ditagih dengan nilai agunan yang diambil alih tersebut dibebankan pada cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya sehubungan dengan pemeliharaan dan perolehan Aset tersebut dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Laba atau rugi yang terjadi akibat realisasi penjualan agunan diambil alih dilaporkan sebagai pendapatan atau beban periode berjalan.

Penagihan atas kredit macet diserahkan ke Lembaga pelelangan Negara. Pengambilalihan agunan kredit nasabah dilakukan melalui Kantor Lelang untuk nasabah yang jaminannya diserahkan ke Lembaga pelelangan Negara dan dicatat sebesar nilai terendah antara nilai taksiran aset menurut Lembaga pelelangan dan saldo pinjaman yang belum dilunasi. Dalam hal nilai taksiran aset lebih rendah dari saldo pinjaman, maka selisih dari saldo pinjaman yang tidak dapat ditagih lagi, dikurangkan dari cadangan kerugian penurunan nilai kredit.

Agunan yang diambil alih tidak disusutkan dan beban-beban sehubungan dengan perolehan dan pemeliharaan aset tersebut dibebankan pada saat terjadinya. Selisih antara nilai tercatat dan hasil penjualan dari agunan yang diambil alih diakui sebagai laba atau rugi pada saat penjualan agunan yang diambil alih dan diakui sebagai pendapatan atau beban non operasional dalam laporan laba rugi. Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset lain-lain" pada neraca.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

s. Deferred expenses

Deferred costs are the recorded values on IT procurement with its working process through tender. Bank shall perform payment at the time the submission of Work Minutes has been completely performed.

t. Prepaid tax

Prepaid tax payment are income corporate taxes that have been paid and the income tax has been paid to be taken into account in the current year and next year.

u. Foreclosed collateral

Foreclosed collateral related to the settlement of loans shall bestated based on net realisable value. The net realisable value is the fair value of foreclosed collateral after being deducted with the estimated release expense. The surplus balances between the loans balance that cannot be collected with the foreclosed collaterals shall be charged to Allowance for impairment losses. Expenses in relation to acquisition and maintenance of the foreclosed collaterals shall be charged to the on going operation. Gains or losses which arised from the realization of foreclosed collateral selling shall be reported as income or expense in such periode.

The claim over stuck credit shall be submitted to Lembaga pelelangan Negara (the State auction Institution). Taking over the customer's credit collateral shall be performed through the Auction Office on customer whose collateral submitted to the State auction Institution and shall be recorded at the lowest value between the estimated asset value according to the auction Institution and outstanding loan balance. In the case the estimated asset value is lower than the loan balance, then the difference of the loan balance no longer able to be claimed, shall be deducted from the reserve of decreased credit value loss.

The collateral taken over shall not be able to be decreased and the liabilities related to the revenues & maintenances of the assets shall be borne at the time of the occurrence. The difference between the written value and the proceeds from the sale of taken over collateral shall be acknowledged as profit or loss at the time of taken over collateral sale and shall be acknowledge as income or nonoperational liability in profit loss report. The collateral taken over shall be presented in the account of "Other assets" in the balance sheet.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Agunan yang diambil alih (lanjutan)

Pada setiap tanggal neraca, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

v. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 dan 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi konsolidasian. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

u. Foreclosed collateral *(continued)*

The Group assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

v. Identification and Impairment of assets

The estimated period between a loss occurring and its identification is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 months and 12 months, in exceptional cases, longer periods are warranted.

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognised are not included in a collective assessment of impairment.

The amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognised in the consolidated income statement. If a loan or held-to-maturity investment has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai (lanjutan)

Sebagai panduan praktis, dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*colateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berperluang terjadi atau tidak.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit (yaitu berdasarkan proses pemeringkatan yang mempertimbangkan jenis aset, industri, lokasi geografis, jenis agunan, status tunggakan, dan faktor-faktor relevan lainnya).

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kontraktual atas aset didalam kelompok tersebut dan kerugian historis yang pernah dialami atas aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut. Kerugian historis yang pernah dialami disesuaikan berdasarkan data terkini dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya dan menghilangkan pengaruh yang ada pada historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Estimasi terhadap perubahan arus kas masa datang dari kelompok aset harus mencerminkan dan memiliki arah yang konsisten dengan perubahan data terkait yang dapat diobservasi dari satu periode ke periode berikutnya (seperti perubahan tingkat pengangguran, harga properti, harga komoditas, status pembayaran, atau faktor-faktor lainnya yang merupakan indikasi timbulnya kerugian dalam kelompok aset keuangan tersebut serta besarannya). Metodologi dan asumsi yang digunakan dalam mengestimasi arus kas masa datang dikaji ulang secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara taksiran kerugian dengan jumlah kerugian aktualnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Identification and Impairment of assets *(continued)*

As a practical expedient, the Bank may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price. The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

For the purposes of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics (that is, on the basis of the Banks grading process that considers asset type, industry, geographical location, collateral type, past-due status and other relevant factors).

Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of the contractual cash flows of the assets in the group and historical loss experience for assets with credit risk characteristics similar to those in the group. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

Estimates of changes in future cash flows for groups of assets should reflect and be directionally consistent with changes in related observable data from period to period (for example, changes in unemployment rates, property prices, payment status, or other factors indicative of changes in the probability of losses in the Group and their magnitude). The methodology and assumptions used for estimating future cash flows are reviewed regularly by the Banks to reduce any differences between loss estimates and actual loss experience.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Identifikasi dan Pengukuran Penurunan Nilai (lanjutan)

Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Bank menggunakan model statistik dari tren *probability of default* di masa lalu, waktu pemulihan dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kondisi kredit saat ini mungkin menyebabkan kerugian aktual lebih besar atau lebih kecil dari pada yang dihasilkan oleh model statistik. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu pemulihan yang diharapkan di masa datang secara berkala dibandingkan dengan hasil aktual yang diperoleh untuk memastikan bahwa model statistik yang digunakan masih memadai.

Penyisihan kolektif untuk kredit yang dikelompokan sebagai dalam perhatian khusus, kurang lancar diragukan dan macet dihitung setelah dikurangi dengan nilai agunan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat (biaya perolehan amortisasi).

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised finansial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Identification and Impairment of Assets *(continued)*

In evaluating the collective decreased value, the Bank uses statistic model of the probability of default trend in the past, restoration time, and the total loss occurring, adjusted with the management consideration on whether the current economic condition and credit condition may cause larger or smaller actual loss than that produced by statistic model. Default level, loss level, and restoration time to be expected in the future are periodically compared to the actual result obtained in order to assure that the statistic model being used is still sufficient.

Collecting setting aside for credit categorized in special attention, not smooth in doubt and stuck shall be counted after deducted by the allowed collateral value according to the provision of Bank Indonesia. The calculation of setting aside the decreased value loss is based on the recorded value (amortization revenue cost).

The loss by decreased value on financial assets recorded in the amortized revenue cost shall be measured in the amount of difference between the value recorded as financial asset and the current estimated cash flow value in the future discounted using the initial effective rate of the financial asset.

The calculation of the current value of the future estimated cash flow on the collateralized financial assets reflects the cash flow that can be produced from the collateral takeover deducted by costs to obtain and sell the collateral, regardless whether the takeover has the possibility to occur or not. The occurring loss shall be acknowledged in the profit or loss report and recorded in the decreased value loss account on the financial assets recorded in the amortized revenue cost. The interest income on financial assets experiencing decreased value is still acknowledged on the basis of the interest rate used to discount the future cash flow in the measurement of decreased value loss. When the occurrence happening after decreased value causes the total decreased value loss to decrease, the decreased value loss previously acknowledged must be restored and the restoration shall be acknowledged in the profit or loss report.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Identifikasi dan Pengukuran Penurunan Nilai (lanjutan)

Jika persyaratan kredit, piutang atau investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai ukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Bank mencatat taksiran kerugian atas transaksi rekening administratif sesuai dengan PBI.

Aset produktif Bank meliputi giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, Efek-efek, kredit, penyertaan, yang mempunyai risiko kredit (bank garansi), serta aset produktif yang berasal dari kegiatan perbankan syariah.

Komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit terdiri atas fasilitas kartu kredit kepada nasabah yang belum digunakan, garansi yang diterbitkan.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan taksiran atas transaksi rekening administratif dibentuk berdasarkan hail evaluasi terhadap kolektibilitas dari masing-masing aset produktif dan transaksi rekening administratif yang mempunyai risiko kredit sesuai dengan PBI tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Evaluasi manajemen atas kolektibilitas masing-masing aset produktif dan transaksi rekening administratif dilakukan berdasarkan sejumlah faktor, termasuk keadaan ekonomi/prospek usaha saat ini maupun yang diantisipasi untuk masa yang akan datang, kondisi keuangan, kemampuan membayar serta faktor-faktor lain yang relevan.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, cadangan kerugian penurunan aset produktif dan transaksi rekening administratif adalah sebagai berikut:

1). Cadangan umum sekurang-kurangnya 1% dari aset produktif transaksi rekening administratif yang digolongkan lancar.

2). Cadangan khusus untuk aset produktif dan transaksi rekening administratif.

w. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan Liabilitas Bank yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai Liabilitas Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. Identification and Impairment of Assets *(continued)*

If the credit requirements, receivables, or investments owned up to its due time is renegotiated or modified because the debtor or publisher experiencing financial difficulty, then the measuring decreased value and the initial effective interest rate used before the requirements shall be amended.

The bank records the estimated loss on the administrative account in accordance with the PBI.

The Bank productive assets includes the clearing in other banks, stocks, credits, participations as well as productive assets coming from sharia banking activities.

Commitment and contingency having credit risk consist of credit card facility to customer not yet used and the published guarantee.

Reserve for the loss of decrease value of productive assets and estimation on administrative account transaction shall be established based on the evaluation results to the collectability of each productive asset and administrative account transaction having credit risk according to the PBI on Public Bank Asset Quality Appreciation.

Management evaluation on the collectability of each productive asset and administrative account transaction shall be performed based on a number of factors, including the current economic condition/business prospect as well as those anticipated in the time to come, financial condition, capability to pay and other relevant factors.

In accordance with the provisions of Bank Indonesia, the reserve for the loss of decreased productive assets and administrative account transaction is as follows:

1). *Common reserve is at least 1% of the productive assets of administrative account transaction categorized as smooth.*

2). *Special reserve for productive assets and administrative account transaction.*

w. Liabilities Immediately payable

Liabilities immediately payable represent obligations to Third parties based on contract or order by those having authority that have to be settled immediately. These are stated at the amounts payable by the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Simpanan nasabah

Giro, tabungan dan deposito berjangka diklasifikasikan sebagai Liabilitas lain, yang diakui pada nilai wajar pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan nasabah dan biaya transaksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Giro merupakan dana nasabah yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui bilyet giro dan cek.

Giro dinyatakan sebesar nilai terhutang kepada pemegang giro. Tabungan merupakan dana nasabah yang dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu. Tabungan dinyatakan sebesar nilai terhutang kepada pemegang tabungan.

Deposito berjangka dan deposito *on call* merupakan dana deposan dinyatakan sebesar nilai nominal. Pencairan Deposito sebelum tanggal jatuh tempo dikenakan biaya administrasi kepada deposan, bunga dihitung sampai dengan saat pencairan.

Sertifikat deposito dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi bunga yang belum diamortisasi.

Simpanan termasuk simpanan Syariah dan investasi tidak terikat yang terdiri dari:

1). Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yad-adhamanah* yakni titipan dana dalam bentuk giro dan tabungan pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan pendapatan bonus.

2). Dana Syirkah Temporer dalam bentuk tabungan mudharabah yang merupakan simpanan dana pihak lain yang memberikan pemilik dana imbalan bagi hasil dari pendapatan unit Syariah atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

3). Dana Syirkah Temporer dalam bentuk deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang memberikan pemilik dana imbalan bagi hasil dari pendapatan unit Syariah atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Deposit from customers

Current accounts, saving, and time deposits are classified as other liabilities, which are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from customers and transaction cost that are an integral part of the effective interest rate.

Current accounts are customers' fund which can be used as a payment tools and can be withdrawn at anytime by bilyet giro and cheque.

Current account is stated on the debted value of the current account holder. Savings is customers' fund, which can be withdrawn referring to selected clauses. Savings accounts is stated on the debted value of the saving holder.

Time deposits and on call deposits are depositor funds that are stated on nominal value. Deposits withdrawn before the due date are charged to Depositor, interest deposit was calculated until the withdrawal date.

Certificates of deposit are stated at their nominal value less unamortized interest.

Deposits include Sharia deposits and unrestricted investments consist of the following:

1). *Wadiah which is a wadiah yad-adhamanah savings and demand deposits on which the customer may receive bonus income.*

2). *Temporary Syirkah Fund in the form of mudharabah savings which entitle the customer to receive a share of the Sharia unit's income in return for the usage of the funds in accordance with the defined terms (nisbah).*

3). *Temporary Syirkah Fund in the form of mudharabah time deposits which entitle the customer to receive a share of the Sharia unit's income for the usage of the funds in accordance with the pre-defined terms (nisbah).*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Simpanan dari bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain dalam bentuk giro, tabungan, *interbank call money* dan deposito berjangka. Semuanya dinyatakan sesuai jumlah liabilitas terhadap bank lain.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai Liabilitas lain, yang diakui pada nilai wajar pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan nasabah dan biaya transaksi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

z. Obligasi yang diterbitkan

Obligasi yang diterbitkan merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Bank yang diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan obligasi dikurang dari jumlah obligasi.

Obligasi yang diterbitkan dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya-biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

aa. Pendapatan dan beban bunga

Secara prospektif, untuk seluruh instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan dengan pendapatan bunga yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, pendapatan maupun beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau Liabilitas keuangan. Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan syarat dan ketentuan dari kontraktual instrumen keuangan dan biaya tambahan yang timbul untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

y. Deposit from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of current account, savings, interbank call money and time deposits. These are stated at the amount due to the other banks.

Deposits from other banks are classified as other liabilities, which are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from customers and transaction cost that are an integral part of the effective interest rate.

z. Bond Issued

Bond issued are bonds issued by the Bank which are classified as financial liabilities and measured at amortized cost. Incremental costs that can be attributed directly to the bonds issuance are deducted from the total amount of bonds issued.

Bond issued are measured at amortised cost using the effective interest rate method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on initial recognition and costs that are an integral part of the effective interest rate.

aa. Income and interest expenses

Prospectively, for all financial instruments measured at amortised cost, interest bearing financial assets classified as available-for-sale, interest income or expense is recorded using the effective interest rate method, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payment or receipts through the expected life of the financial statement or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. The calculation takes into account all contractual term of the financial instrument and include any fees or incremental cost that are directly attributable to the instrument and are an integral part of the effective interest rate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Konvensional

Pendapatan dan beban bunga diakui dengan metode akrual. Pendapatan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) dicatat sebagai tagihan kontinjensi dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima secara tunai (*cash basis*).

Pendapatan bunga yang ditangguhkan dari kredit yang direstrukturisasi diakui sebagai pendapatan secara proporsional pada saat diterima pembayaran angsuran pokok.

Pada saat kredit diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi.

Penerimaan tunai atas kredit yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laba rugi.

Syariah

Pendapatan operasi utama terdiri dari pendapatan dari *murabahah* dan *istishna,* pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah,* pendapatan dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dan pendapatan lainnya.

Pendapatan dari transaksi *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang. Bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat angsuran diterima secara tunai (*cash basis*). Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari Giro *Wadiah* Bank Indonesia dan pendapatan dari penempatan pada bank Syariah lain. Pendapatan operasi utama lainnya diakui pada saat diterima.

ab. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit dan merupakan bagian integral dari suku bunga efektif atas aset keuangan atau Liabilitas keuangan diakui sebagai bagian atau pengurang dari biaya perolehan kredit dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

aa. Income and interest expenses *(continued)*

Conventional

Income and interest expenses are acknowledged based on an accrual method. Interest income on earning assets which is clasified as non performing loan (substandard, questioned, and stagnant) are recorded as contingency collection and recognized as income when it is received in cash (cash basis).

The deffered interest income of restructured loan is recognized as interest income proportionnally at the time of the payment of basic installment is accepted.

When a loan is classified as non-performing, any interest income previously recognized and accrued but not yet collected is recoveryd against interest income. The recoveryd interest income is recognized as a contingent receivable.

Cash receipts from loans classified as doubtful or loss are applied to reduce the loan principal first. The excess of cash receipts over the loan principal on these loans is recognized as interest income in the statement of income.

Sharia

Main sharia operating income consists of income from murabahah and istishna transactions, income from profit sharing of mudharabah and musyarakah financing, income from ijarah muntahiyah bittamlik and others income.

Income from istishna is recognized upon delivery of goods. Profit sharing from mudharabah and musyarakah financing is recognized upon collection (cash basis). Other main operating income consists of income derived from Bank Indonesia Wadiah Current Account and placements with other Sharia banks. Other main operating income is recognized upon collection.

ab. Fee and commission income

Commission income of commission and significant commission related directly with credit giving activity and as integral part of effective interest rate on financial assets or financial liabilities shall be acknowledged as part or reduction of the credit obtaining cost and shall be acknowledged as interest income by means of amortization using effective interest rate method.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Pendapatan provisi dan komisi (lanjutan)

Pendapatan provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan pemberian kredit, termasuk provisi yang terkait kegiatan ekspor, impor, provisi atas manajemen kas dan provisi atas jasa diakui pada saat jasa diberikan. Atas komitmen kredit yang tidak diharapkan adanya penarikan kredit, provisi dari komitmen kredit tersebut diakui berdasarkan metode garis lurus selama jangka waktu komitmen.

ac. Program imbalan kerja

Bank menerapkan PSAK 24 (revisi 2013), "Imbalan Kerja", efektif sejak 1 Januari 2015, menggantikan PSAK 24 (revisi 2010) "Imbalan Kerja". Dengan diterapkan PSAK 24 (revisi 2013), maka Bank menghentikan penggunaan pendekatan koridor dalam perhitungan keuntungan dan kerugian aktuarial di periode pelaporan pada penghasilan komprehensif lain.

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Program pensiun manfaat pasti

Sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No.64/KEPDIR/2012 tanggal 12 Desember 2012. Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya dengan jumlah kontribusi sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun pekerja dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada Dana Pensiun merupakan kontribusi Bank.

Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri ini mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner OJK No.KEP-527/NB.1/2013 tanggal 27 September 2013.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ab. Fee and commission income *(continued)*

Commission and other commissions not related to credit giving, including commissions related to the activities of export, import, commissions on cash management and commission on services shall be acknowledged when the services are given. On the credit commitment not expecting the existence of withdrawal, the commission shall be acknowledged based on straight line method as long as the period.

ac. Employee benefit plan

The Bank implement PSAK 24 (revised 2013), "Employee Benefits", effective January 1, 2015, replacing PSAK 24 (revised 2010) "Employee Benefits". With the application of PSAK 24 (revised 2013), the Bank stopped using the corridor approach in calculating actuarial gains and losses in the reporting period on other comprehensive income.

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Short-term employee benefits are recognized when payable to the employees based on accrual basis.

Defined benefit pension plan

In accordance with the decision of the Directors of PT Bank Riau Kepri as the founder of Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri No.64/KEPDIR/2012 dated December 12, 2012 .The Bank established a defined benefit pension plan for all of its permanent employees with contributions of 5% of employees' basic pension salaries being paid by the employees and the remaining required contributions being paid by the Bank.

Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri was approved by OJK in decree No.KEP-527/NB.1/2013 dated September 27, 2013.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program pensiun manfaat pasti (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti dikelola oleh Bank dengan iuran terdiri iuran normal dan iuran tambahan. untuk iuran normal dengan kontribusi pegawai adalah sebesar 5,00% dan kontribusi bank sebesar 8,05% dari penghasilan dasar pensiun (PhDP), sedangkan iuran tambahan merupakan sisa dana yang diperlukan untuk mendanai program tersebut yang disesuaikan dengan hasil perhitungan aktuaria.

Program pensiun iuran pasti

Sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama No.022/DLK/1/2013 tanggal 24 Juni 2013, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) pada tanggal 24 Juni 2013 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai bank.

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut.

Beban imbalan kerja yang harus disediakan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003, dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuaria berdasarkan metode *projected unit credit* . Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban ketika akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial yang belum diakui untuk masing-masing karyawan pada akhir periode sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai kini liabilitas manfaat pasti (*defined benefit obligation*) atau 10% dari nilai wajar aset program (*fair value of plan assets*).

Program imbalan pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun yang biasanya tergantung pada umur, masa kerja dan kompensasi.

Jumlah kontribusi karyawan dalam program pensiun ini ditetapkan sebesar 5% dari gaji dasar karyawan yang bersangkutan dan sisanya ditanggung oleh Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ac. Employee benefit plan *(continued)*

Defined benefit pension plan *(continued)*

Defined benefit pension plan is managed by Bank with contribution which consist of normal contribution and additional contribution. For normal contribution with employer's contribution is 5,00% and Bank Contribution is 8,05% from pensionable earnings (PhDP), while additional contributions is the remainder of the necessary funds to finance the program that is tailored to the results of actuarial calculations.

Defined contribution pension plan

In accordance cooperation agreement document No.022/DLK/1/2013 dated June 24, 2013 the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46)" dated June 24, 2013 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees.

The cost of providing employee benefits under Law No.13/2003 ("the Law") dated March 25, 2003 is determined using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the defined benefit obligation or 10% of fair value of plan assets at that date (defined benefit obligation) or 10% from fair value of plan asset.

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement which usually depends on one or more factors, such as age, years of service and total compensation.

The total employee contribution in this pension program is 5% of the basic salary of the corresponding employee and the remaining required to fund the plan is borne by the Bank.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Beban Liabilitas masa lampau diakui secara langsung di laporan laba rugi, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (periode *vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara metode garis lurus sepanjang periode *vesting* .

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial untuk setiap program pada setiap akhir periode pelaporan sebelumnya yang jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial melebihi 10% dari imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program pada tanggal tersebut maka kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan.

Pemupukan dana pensiun berasal dari iuran pemberi kerja dan pegawai aktif sebesar 15% dan 5% dari gaji pokok setelah dikurangi setoran iuran program pensiun manfaat pasti.

Program Tunjangan Hari Tua

Program Tunjangan Hari Tua dikelola oleh Bank. Kontribusi pegawai adalah sebesar 2,00% dari penghasilan karyawan dan sisa dana yang diperlukan untuk mendanai program tersebut dikontribusi oleh Bank. Imbalan Tunjangan Hari Tua berupa pembayaran jumlah lump-sum yang diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain, yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.04/KEPDIR/2004 tanggal 5 Januari 2004 yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.98-A/KEPDIR/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penghargaan Pensiun PT Bank Riau Kepri.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ac. Employee benefit plan *(continued)*

Defined contribution pension plan *(continued)*

Past service costs are recognized immediately in the statement of income, unless the payments of the benefits are conditional on whether the employees remain working for a specified period of time (vesting period). In this case, the past service costs are amortized on a straight-line method over the vesting period.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of government bonds (considering currently there is no deep market for highquality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions for each plan at the end of the previous reporting period that exceed whichever is higher of 10% of the present value of defined benefit obligation or 10% of the fair value of plan assets at that date are charged or credited to the statement of income over the average remaining service life of the covered employees.

Fertilization of pension fund comes from the contributions of employers and active employees of 15% and 5% of the basic salary after deducting the contribution fee of the defined benefit plan.

Mutual aid pension plan

The Old Day Benefit Program is managed by the Bank. Employee contribution is 2.00% of the employee's income and the remaining funds required to fund the program are contributed by the Bank. Remuneration of Old-Age Benefit in the form of payment of lump-sum amounts granted to employees entering retirement age or stopping working for other reasons, as stipulated in Directors Decree No.04/KEPDIR/2004 dated January 5th, 2004 which was last amended by Decision Letter of Directors No. .98-A / KEPDIR / 2010 dated October 29th, 2010 regarding Pension Award PT Bank Riau Kepri.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Program imbalan kerja (lanjutan)

Program Tunjangan Hari Tua (lanjutan)

Perjanjian kerja sama antara Bank dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang Pengelolaan Program Tunjangan Hari Tua Kumpulan No.54/DIR/BR/2005 dan No.067.SJ.U.0805 tanggal 18 Agustus 2005.

Program Penghargaan Masa Bakti

Program Penghargaan Masa Bakti dikelola sendiri oleh Bank dan diatur dalam peraturan program PMB yang terakhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri No.010/KEPDIR/2019 tanggal 27 Februari 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepegawaian. Imbalan PMB berupa piagam dan uang tunai yang besarnya telah diputuskan dalam SK Direksi tersebut kepada pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk masa kerja 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan 30 tahun.

Program Masa Persiapan Pensiun

Program Masa Persiapan Pensiun dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Program Cuti Besar

Program Cuti Besar dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang memiliki masa kerja di atas 5 tahun dan kelipatannya untuk penggantian hak cuti besar.

Tantiem

Bank membuat penyisihan atas tantiem berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selisih antara jumlah yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut disahkan oleh RUPS.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ac. Employee benefit plan *(continued)*

Mutual aid pension plan *(continued)*

The cooperation agreement between the Bank and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) About the Program Management Annuities set No.54/DIR/BR/2005 and No.067.SJ.U.0805 dated August 18th, 2005.

Future Award Program

The Service Period Award Program is managed solely by the Bank and regulated in the latest PMB program regulations stipulated by Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri No. 010/KEPDIR/2019 dated February 27, 2019 concerning the Employee Company Manual (BPP). PMB rewards in the form of a charter and cash the amount of which has been decided in the Decree of the Board of Directors to employees who have fulfilled the requirements for tenure of 15 years, 20 years, 25 years and 30 years.

Pension Preparation Period Program

Program preparation pension is self-managed by the Bank and is an employee benefit plan for employees who will enter pension age.

Long Service Leave Allowance

A Long Service Leave Allowance is self-managed by the Bank for employee who have a service life of over 5 years and multiples for replacement of annual leave rights.

Management Tantiem

The Bank sets aside for dividends based on the estimation of management and to be put into account of profits losses of the current year. The dividends shall be paid to the Board of Directors and Commissioners after obtaining the approval in the Annual General Meeting (AGM). The difference between the amount estimated by the management and the amount legalized by shareholders shall be borne or credited in the period wherein the dividends legalized by AGM.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Program imbalan kerja (lanjutan)

Bonus/ Jasa produksi

Bank membuat penyisihan atas jasa produksi berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Jasa produksi akan dibayarkan kepada pegawai setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selisih antara jumlah yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disyahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana jasa produksi tersebut disahkan oleh RUPS.

ad. Pembagian Dividen/ Laba Bersih

Penggunaan laba bersih ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengacu kepada perundang-undangan berlaku.

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada tanggal dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ae. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan dan disajikan sebesar nilai bersihnya setelah dikompensasikan dengan kewajiban pajak kini. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Semua perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk pelaporan keuangan dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pendapatan pajak tangguhan dengan metode liabilitas (*liability method*). Tarif pajak yang berlaku saat ini dipakai untuk menentukan pajak tangguhan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ac. Employee benefit plan *(continued)*

Bonus/ Production service

The Bank sets aside for production service based on the estimation of management and to be put into account of profits losses of the current year. The production service shall be paid to the Board of Directors and Commissioners after obtaining the approval in the Annual General Meeting (AGM). The difference between the amount estimated by the management and the amount legalized by shareholders shall be borne or credited in the period wherein the production service legalized by AGM.

ad. Earning of Prior Year Income

The earning of Prior Income certainly by General Meeting Of Stockholders with refer to regulation by the Law.

Dividend distribution to the shareholders is recognized as a liability in the financial statements at the date when the dividend distribution is approved by the shareholders.

ae. Income Tax

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the year and are presented at net value after offset against current tax liabilities. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statements of financial position date. Changes in the carrying amounts of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are recognized in the current year's statement of comprehensive income, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Deferred income tax is provided, using the balance liability method, for temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes. The effective tax rate is used to determine deferred tax.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ae. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dapat dikompensasi dengan aset pajak tangguhan yang diakui tersebut.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diterima atau, jika Bank mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut diterima.

Efektif tanggal 1 Januari 2015, Bank menerapkan PSAK 46 (Penyesuaian 2014), yang mengharuskan Bank untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (kewajiban) yang diakui dalam laporan posisi keuangan, dan transaksi- transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan. PSAK ini juga mensyaratkan entitas untuk mencatat kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan beserta bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi komprehensif.

af. Laba Bersih Per Saham

Berdasarkan PSAK 56 (Penyesuaian 2014) tentang "Laba Per Saham" (LPS), adalah data yang banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan. Laba bersih per lembar saham seri A dan Seri B dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham seri A dan B yang beredar pada periode bersangkutan.

ag. Informasi Segmen

Bank menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan oleh bagian akuntansi kepada pengambil keputusan operasional.

Bank mengidentifikasikan segmen operasi sebagai suatu komponen dari entitas:

a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ae. Income Tax *(continued)*

A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deferred tax asset can be utilized.

Amendments to tax obligations are recorded when an Tax Assessment Letter ("SKP") is received or, for amounts appealed against by the Bank, when the result of the appeal is determined.

Effective on January 1st, 2015, the Bank applied PSAK 46 (Adjustment 2014), which requires the Bank to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statements of financial position; and transactions and other events of the current period that are recognized in the financial statements. The revised PSAK also prescribes an entity to present the underpayment/overpayment of income tax, including its interest/penalty, if any, as part of "Tax Expense Current" in the statement of comprehensive income.

af. Earning Per Share

According to PSAK 56 (Adjustment 2014) concerning "Earning per Share" nett operational income and nett income per piece of A series and B series of shares was calculated by deviding nett income with average amount of A series and B series of shares which is outstanding at the related period.

ag. Business Segmen Information

The Bank determines and presents operating segments based on the information that is internally provided by accounting department to the chief operating decision maker.

The Bank defines an operating segment as acomponent of an entity:

a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ag. Informasi Segmen (lanjutan)

c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

Segmen geografis meliputi penyediaan jasa di dalam lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis Bank adalah Riau dan selain Riau.

ah. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Pertimbangan profesional dan estimasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya dimasa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ag. Business Segmen Information *(continued)*

c. for which discrete financial information is available.

Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of banking conventional and sharia.

A geographical segment is engaged in providing services within a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of segments operating in other economic environments. The Bank's geographical segments are Riau and other than Riau.

ah. Use of Significant Accounting Estimates and Judgesment

The preparation of financial statements in conformity with Financial Accounting Standards in Indonesia requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from those estimates.

The most significant uses of judgment and estimates are as follows:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continues to be prepared on the going concern basis.

Fair value of financial instruments

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ah. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan (lanjutan)

Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Penurunan Nilai Kredit Yang Diberikan dan Piutang

Bank meninjau kredit yang diberikan dan piutang secara individu pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas dimasa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Bank membuat justifikasi tentang situasi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih agunan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal dimasa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

Klasifikasi Pada Investasi Yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Bank mengklasifikasikan aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Klasifikasi memerlukan pertimbangan signifikan untuk memiliki investasi tersebut sampai dengan jatuh tempo. Dalam membuat pertimbangan ini, Bank mengevaluasi intense dan kemampuan untuk memiliki investasi tersebut hingga jatuh tempo.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ah. Use of Significant Accounting Estimates and Judgesment *(continued)*

Fair value of financial instruments *(continued)*

The judgment include considerations of liquidity and model inputs such as volatility and discount rates, prepayment rates and default rate assumptions.

Impairment losses on loans and receivables

The Bank reviews its loans and receivables individually at each statement of financial position date to assess whether an impairment loss should be recorded in the statement of comprehensive income. In particular, judgment by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss. In estimating these cash flows, the Bank makes judgments about the borrower's financial situation and the net realizable value of collateral.

Deffered Taxes Assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategics.

Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rates and others.

Classification to held-to-maturity Investment

The Bank classifies non derivative financial assets with fixed and determinable payments and fixed maturity as held-to-maturity investments. This classification requires significant judgement to hold such investments to maturity. In making this judgement, the Bank evaluates its intention and ability to hold such investments to maturity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ah. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Klasifikasi Pada Investasi Yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (lanjutan)

Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai tersebut dimasa mendatang.

Penurunan nilai efek dimiliki hingga jatuh tempo

Bank meninjau efek yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo pada setiap tanggal posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai.

Penurunan nilai efek dimiliki hingga jatuh tempo

Dalam menentukan pertimbangan, Bank mengevaluasi diantaranya faktor, pergerakan harga pasar historis dan jangka waktu serta lama perpanjangan dimana nilai wajar dari investasi kurang dari biayanya.

Penurunan nilai atas aset tidak produktif

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai pada aset non-finansial kapan saja terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat pada suatu aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Faktor-faktor yang dianggap penting oleh Bank yang dapat memicu adanya ulasan atas penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

a) Kinerja dibawah rata-rata yang signifikan yang relatif terhadap hasil historis atau proyeksi hasil operasi yang diharapkan dimasa yang akan datang;

b) Perubahan yang signifikan dari cara penggunaan aset yang diperoleh atau strategi untuk bisnis secara keseluruhan; dan

c) Tren negatif industri dan ekonomi yang signifikan.

Penyusutan dan estimasi masa manfaat dari aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan untuk selain bangunan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen Bank mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ah. Use of Significant Accounting Estimates and Judgesment *(continued)*

Classification to held-to-maturity Investment *(continued)*

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, as reflected in changes in the provision for impairment in the future.

Impairment of held-to-maturity securities

Bank reviews securities classified held to maturity at each financial position date to assess whether there is an impairment in value.

Impairment of held-to-maturity securities

In making this judgment, the Bank evaluates, among others factors, historical market price movements and duration and the extent to which the fair value of the investment is less than the cost.

Impairment of non-productive assets

Bank assesses impairment on non productive assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the followings:

a). *Significant underperfomance relative to expected historical or projected future operating results;*

b). *Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and*

c). *Significant negative industry or economic trends.*

Depreciation and estimated useful life of fixed assets

The costs of fixed asset are depreciated on a straight-line basis for buildings and for other than buildings over their estimated useful lives. The Bank's management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ah. Penggunaan Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Penyusutan dan estimasi masa manfaat dari aset tetap (lanjutan)

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

ai. Penyajian Standar Akuntansi Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2020, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku yang relevan dengan operasi Bank yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

a. PSAK 71: "Instrumen Keuangan".

PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”, mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen. PSAK ini juga mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur pelunasan dipercepat yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah terutang.

Bank telah menerapkan PSAK 71 mulai 1 Januari 2020.

Aset keuangan

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi hanya jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan

b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ah. Use of Significant Accounting Estimates and Judgesment *(continued)*

Depreciation and estimated useful life of fixed assets *(continued)*

Changes in the expected level of the usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of the assets, and therefore future depreciation changes could be revised.

ai. Presentation of Financial Accounting Standards

On January 1, 2020, there were new standards and adjustments or amendments to several still valid standards that were relevant to the Bank's operations which were effective since that date, namely as follows:

a. SFAS 71: “Financial Instrument”.

PSAK No. 71, “Financial Instruments”, prescribes the classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of the contractual cash flows and the entity's business model; the expected credit loss method for impairment that produces information that is more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedges that better reflect the entity's risk management by introducing more general terms based on management's judgment. This PSAK also provides that financial assets with an prepayment feature that could result in negative compensation qualify as contractual cash flows arising from payments of principal and interest on the amount due.

The Bank has implemented PSAK 71 starting January 1, 2020.

Financial assets

A financial asset is measured at amortized cost only if both of the following conditions are met:

a. it is held within a business model whose objective is to hold assets in order to collect contractual cash flows, and

b. The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ai. Penyajian Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

a. PSAK 71: "Instrumen Keuangan" (lanjutan).

Berikut ini ikhtisar perubahan-perubahan penting:

- Kategori aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo (*Held To Maturity*/ HTM) dan tersedia untuk dijual (*Available For Sale*/ AFS) telah dihapus.

- Kategori aset baru yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*Fair Value Other Comprehensive Income*/ FVOCI) diperkenalkan. Hal ini berlaku untuk instrumen utang dengan karakteristik arus kas kontraktual yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga dan dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan.

- Kategori aset baru untuk investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan yang diukur pada FVOCI diperkenalkan.

Liabilitas keuangan

Klasifikasi liabilitas keuangan Bank tidak berubah. Liabilitas keuangan tetap diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*Financial Liability at Amortised Cost*/ FLAC). Kriteria untuk menetapkan liabilitas keuangan di FLAC dengan menerapkan opsi nilai wajar juga tetap tidak berubah.

Perubahan penurunan nilai atas aset keuangan

Penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 mensyaratkan model kerugian kredit ekspektasian, menggantikan metodologi model *incurred loss* sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2014). Perubahan penting dalam kebijakan akuntansi Bank dalam penurunan nilai atas aset keuangan dijelaskan

Bank menerapkan pendekatan tiga tahap untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian (*Expected Credit Losses*/ ECL) pada instrumen utang yang dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi dan FVOCI. Aset bermigrasi melalui tiga tahap berikut berdasarkan perubahan kualitas kredit sejak pengakuan awal:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ai. Presentation of Financial Accounting Standards *(continued)*

a. SFAS 71: "Financial Instrument" (continued).

The following summarises the key changes:

- *The held to maturity (HTM) and available for sale (AFS) financial asset categories were removed.*

- *A new asset category measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI) was introduced. This applies to debt instruments with contractual cash flow characteristics that are solely payments of principal and interest and held in a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets.*

- *A new asset category for non-traded equity investments measured at FVOCI was introduced.*

Financial liabilities

Classification of financial liabilities remains unchanged for the Bank. Financial liabilities continue to be measured at either amortized cost or FLAC. The criteria for designating a financial liability at FLAC by applying the fair value option also remains unchanged.

Changes to impairment of financial assets

The PSAK 71 impairment requirements are based on an expected credit loss model, replacing the incurred loss methodology model under PSAK 55 (revised 2014). Key changes in the Bank's accounting policy for impairment of financial assets are listed below.

The Bank applies a three-stage approach to measuring expected credit losses (ECL) on debt instruments accounted for at amortized cost and FVOCI. Assets migrate through the following three stages based on the change in credit quality since initial recognition:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ai. Penyajian Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

a. PSAK 71: "Instrumen Keuangan" (lanjutan).

Perubahan penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

i) Tahap 1: ECL 12 bulan

Untuk eksposur yang tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal dan bukan merupakan kredit yang pada awalnya mengalami penurunan nilai, bagian dari ECL sepanjang umurnya terkait dengan probabilitas kejadian default yang terjadi dalam 12 bulan ke depan diakui.

ii) Tahap 2: ECL sepanjang umurnya - kredit tidak mengalami penurunan nilai

Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal tetapi tidak mengalami penurunan nilai, maka ECL sepanjang umurnya diakui.

iii) Tahap 3: ECL sepanjang umurnya - kredit mengalami penurunan nilai

Aset keuangan dinilai sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak yang merugikan terhadap perkiraan arus kas masa depan dari aset tersebut telah terjadi. Sebagaimana menggunakan kriteria yang sama seperti dalam PSAK 55 (revisi 2014), maka metodologi Bank untuk penyisihan spesifik tetap tidak berubah. Untuk aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai kredit, ECL sepanjang umurnya diakui dan pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif pada biaya perolehan diamortisasi (setelah dikurangi penyisihan) dan bukan jumlah tercatat bruto.

b. PSAK 73: “Sewa”.

PSAK No. 73, “Sewa”, menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (1) sewa jangka pendek dan (2) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai rendah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ai. Presentation of Financial Accounting Standards *(continued)*

a. SFAS 71: “Financial Instrument” (continued).

Changes to impairment of financial assets *(continued)*

i) Stage 1:12 months ECL

For exposures where there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition and that are not credit impaired upon origination, the portion of the lifetime ECL associated with the probability of default events occurring within the next 12 months is recognized.

ii) Stage 2: Lifetime ECL - not credit impaired

For credit exposures where there has been a significant increase in credit risk since initial recognition but that are not credit impaired, a lifetime ECL is recognized.

iii) *Stage 2: Lifetime ECL - not credit impaired*

Financial assets are assessed as credit impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that asset have occurred. As this uses the same criteria as under PSAK 55 (revised 2014), the Bank’s methodology for specific provisions remains unchanged. For financial assets that have become credit impaired, a lifetime ECL is recognized and interest revenue is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost (net of provision) rather than the gross carrying amount.

b SFAS 73: “Lease”.

PSAK No. 73, “Leases”, establishes the principles for recognizing, measuring, presenting and disclosing leases by introducing a single accounting model which requires the recognition of right-of-use assets and lease liabilities. There are 2 optional exceptions to the recognition of lease assets and liabilities, namely: (1) short-term leases and (2) leases with low underlying assets.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ai. Penyajian Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

b. PSAK 73: "Sewa". (lanjutan)

Pada tahun berjalan, Bank telah menerapkan PSAK 73 (diterbitkan oleh DSAK IAI pada tahun 2017) yang mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Berbeda dengan akuntansi lessee, persyaratan untuk akuntansi lessor sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK 73 pada Laporan Keuangan dijelaskan di bawah ini.

Tanggal penerapan awal PSAK 73 untuk Bank adalah 1 Januari 2020. Bank telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK 73. Dengan demikian, informasi komparatif yang disajikan untuk tahun 2019 tidak disajikan kembali sebagaimana dilaporkan sebelumnya, pada PSAK 30 dan interpretasi terkait.

a. Dampak definisi baru dari sewa

- Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa atas dasar jika penyewa memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

- Bank menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang diterapkan dalam PSAK 73 untuk semua kontrak yang dicatat atau diubah pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Dalam persiapan untuk pertama kali penerapan PSAK 73, Bank telah melakukan proyek implementasi. Proyek tersebut telah menunjukkan bahwa definisi baru dari PSAK 73 tidak akan secara signifikan mengubah lingkup kontrak Bank untuk memenuhi definisi dari sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ai. Presentation of Financial Accounting Standards *(continued)*

b. SFAS 73: "Lease". (continued)

In the current year, the Bank has implemented PSAK 73 (issued by DSAK IAI in 2017) which became effective on January 1, 2020.

PSAK 73 implements new requirements or amendments with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to the accounting for lessees by eliminating the difference between operating and financing leases and requires the recognition of use rights assets and the recognition of lease liabilities at inception of the lease for all leases, except for short-term leases and low value asset leases In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged The impact of the adoption of PSAK 73 on Financial Statements is described below.

The initial application date of PSAK 73 for Banks is January 1, 2020. The Bank has implemented PSAK 73 using a modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact of the initial application of PSAK 73. Therefore, the comparative information presented for 2019 is not restated as previously reported, in PSAK 30 and related interpretations.

a. The impact of the new definition of lease

- *The main change from the definition of a lease has to do with the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract is, or contains a lease on the basis that the lessee has the right to control the use of the asset for a specified period of time in exchange for consideration. This is the difference in determining whether a contract is, or contains a lease based on PSAK 30, with the concept of risk and benefit.*

- *The Bank applies the definition of leases and related guidelines applied in PSAK 73 to all contracts recorded or amended on or after January 1, 2020. In preparation for the first implementation of PSAK 73, the Bank has undertaken an implementation project. The project has demonstrated that the new definition of PSAK 73 will not significantly change the scope of the Bank's contract to meet the definition of a lease.*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ai. Penyajian Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

b. PSAK 73: "Sewa". (lanjutan)

a. Dampak definisi baru dari sewa (lanjutan)

- Bank menggunakan cara praktis yang terdapat pada panduan transisi dalam PSAK 73, yaitu penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang hampir sama.

b. Dampak pada akuntansi lessee

- Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Liabilitas sewa merupakan jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Biaya aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

Bangunan	:	10 tahun/*year*	*Building*
Kendaraan	:	5 tahun/*year*	*Vehicle*
Perlengkapan, mesin dan peralatan kantor	:	5 tahun/*year*	*Office equipment, machinery and equipment*

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 48 Penurunan Nilai Aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ai. Presentation of Financial Accounting Standards *(continued)*

b SFAS 73: "Lease". (continued)

a. The impact of the new definition of lease (continued)

- *The Bank uses the practical method contained in the transition guidance in PSAK 73, namely the use of a single discount rate for lease portfolios with almost the same characteristics.*

b. Impact on the lessee's accounting

- *The Bank applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and leases of low value assets. The Bank recognizes lease obligations to make lease payments and use rights assets that represent the right to use the underlying asset.*

The bank recognizes the use rights assets on the inception date of the lease. Usage assets are measured at cost, less accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for each remeasurement of the lease liabilities. Lease liabilities represent the amount of lease payments accrued at the end of the lease term. which is discounted using an incremental borrowing rate The cost of use rights assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, recovery costs and lease payments made on or before the start date of the lease less lease incentives received. The straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset, as follows:

If ownership of the leased asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payment reflects the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. Use rights assets are tested for impairment in accordance with PSAK 48 Impairment of Assets Value.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ai. Penyajian Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

b. PSAK 73: "Sewa". (lanjutan)

Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dengan durasi kurang dari 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini ditunjukkan pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ai. Presentation of Financial Accounting Standards *(continued)*

b SFAS 73: "Lease". (continued)

On the commencement date of the lease, the Bank recognizes lease obligations measured at the present value of future lease payments to be made during the lease term. Lease payments include fixed payments (including fixed payments on substance) less lease incentive receivables, variable lease payments that are index dependent. or the interest rate, and the amount expected to be paid under the residual value collateral. Lease payments also include the fair exercise price of the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank exercising the termination of the lease payment. Variable leases that do not depend on indexes or interest rates are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the incremental loan interest rate of the lessee at the inception date of the lease because the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the increase in interest and less lease payments made. In addition, the carrying amount of the lease liability is remeasured if there are modifications, changes in the term of the lease, changes in lease payments, or changes in the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases with a duration of less than 12 months and leases of low value assets, as well as elements of the lease, partially or wholly do not apply the recognition principles stipulated by PSAK 73 will be treated the same as operating leases in PSAK 30. The bank will recognize the lease payments. on a straight-line basis over the lease term in the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is shown under general and administrative expenses in the income statement.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ai. Penyajian Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

b. PSAK 73: "Sewa". (lanjutan)

Bank menyajikan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi pada PSAK 30, yang tidak diungkapkan dalam laporan posisi keuangan. Penerapan pencatatan PSAK 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), Bank:

- Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;
- Mencatat penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan
- Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah telah terjadi peningkatan signifikan dalam risiko kredit untuk aset keuangan sejak pengakuan awal dengan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang umur yang diharapkan antara tanggal pelaporan dan tanggal pengakuan awal.

Dalam menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank menggunakan sistem penilaian risiko kredit internal, peringkat risiko eksternal dan informasi perkiraan untuk menilai memburuknya kualitas kredit dari suatu aset keuangan.

Bank menilai apakah risiko kredit pada aset keuangan telah meningkat secara signifikan berdasarkan individual atau kolektif. Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit bersama, dengan mempertimbangkan jenis instrumen, peringkat risiko kredit, tanggal pengakuan awal, sisa umur jatuh tempo, industri dan faktor relevan lainnya.

Jumlah ECL diukur sebagai probabilitas nilai kini tertimbang dari seluruh *cash shortfall* atas umur yang diharapkan dari aset keuangan yang didiskontokan pada tingkat bunga efektif awalnya. *Cash shortfall* adalah selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang harus dibayar oleh Bank dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Jumlah kerugian diakui dengan menggunakan penyisihan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ai. Presentation of Financial Accounting Standards *(continued)*

b SFAS 73: "Lease". (continued)

The Bank presents leases previously classified as operating leases under PSAK 30, which are not disclosed in the statement of financial position. The application of PSAK 73 listing applies to all leases (except as stated earlier), the Bank:

- *Presentation of use rights assets as part of property, plant and equipment and lease liabilities are presented as part of other liabilities in the statement of financial position, measured at the present value of future lease payments;*
- *Record the depreciation of the use rights assets and the interest on the lease liability in the income statement and comprehensive income;*
- *Separating the total payment amount into principal (presented in financing activities) and interest (presented in operating activities) in the cash flow statement.*

At each reporting date, the Bank assesses whether there has been a significant increase in credit risk for financial assets since initial recognition by comparing the risk of default occurring over the expected life between the reporting date and the date of initial recognition.

In determining whether credit risk has increased significantly since initial recognition, the Bank uses its internal credit risk grading system, external risk ratings and forecast information to assess deterioration in credit quality of a financial asset.

The Bank assesses whether the credit risk on a financial asset has increased significantly on an individual or collective basis. For the purposes of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped on the basis of shared credit risk characteristics, taking into account instrument type, credit risk ratings, date of initial recognition, remaining term to maturity, industry and other relevant factors.

The amount of ECL is measured as the probability-weighted present value of all cash shortfalls over the expected life of the financial asset discounted at its original effective interest rate. The cash shortfall is the difference between all contractual cash flows that are due to the Bank and all the cash flows that the Bank expects to receive. The amount of the loss is recognized using a allowance for impairment losses.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ai. Penyajian Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

Bank mempertimbangkan pengalaman kerugian historisnya dan menyesuaikannya dengan data yang dapat diobservasi saat ini. Selain hal tersebut, Bank menggunakan perkiraan yang wajar dan mendukung kondisi ekonomi masa depan termasuk pertimbangan untuk mengestimasi jumlah kerugian penurunan nilai ekspektasian. PSAK 71 memperkenalkan penggunaan faktor-faktor ekonomi makro yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada tingkat pengangguran, suku bunga, produk domestik bruto, inflasi dan harga properti komersial, dan mensyaratkan evaluasi baik saat ini serta perkiraan arah siklus ekonomi. Memasukkan informasi *forward looking* dapat menambah tingkat justifikasi mengenai dampak perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi akan mempengaruhi ECL. Metodologi dan asumsi termasuk setiap perkiraan kondisi ekonomi masa depan yang ditelaah secara berkala.

Jika, pada periode berikutnya, kualitas kredit meningkat dan membaik maka setiap peningkatan risiko kredit yang sebelumnya dinilai signifikan sejak awal, selanjutnya penyisihan kerugian penurunan nilai berubah dari ECL sepanjang umur menjadi ECL 12 bulan.

Dalam hal kategori aset yang baru untuk instrumen utang yang diukur pada FVOCI, pengukuran ECL didasarkan pada pendekatan tiga tahap sebagaimana diterapkan pada aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi. Bank mengakui penyisihan kerugian pada laporan laba rugi, dengan jumlah yang diakui pada penghasilan komprehensif lain, tanpa mengurangi jumlah tercatat aset di laporan posisi keuangan.

Secara keseluruhan, penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 menghasilkan pengakuan kerugian kredit lebih awal dibandingkan dengan PSAK 55 (revisi 2014).

Penyajian dan pengukuran CKPN berdasarkan PSAK 71 Konvensional yang telah diberlakukan pada awal tahun 2020 yang bersumber dari cadangan umum (ekuitas) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Disiingkat "PT Bank Riau Kepri" berdasarkan Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH. tanggal 22 April 2019 Nomor 12 adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ai. Presentation of Financial Accounting Standards *(continued)*

The Bank considers its historical loss experience and adjusts this for current observable data. In addition, the Bank uses reasonable and supportable forecasts of future economic conditions including experienced judgement to estimate the amount of an expected impairment loss. PSAK 71 introduces the use of macroeconomic factors which include, but is not limited to, unemployment, interest rates, gross domestic product, inflation and commercial property prices, and requires an evaluation of both the current and forecast direction of the economic cycle. Incorporating forward looking information increases the level of judgement as to how changes in these macroeconomic factors will affect ECL. The methodology and assumptions including any forecasts of future economic conditions are reviewed regularly.

If, in a subsequent period, credit quality improves and reverses any previously assessed significant increase in credit risk since origination, then the allowance for impairment losses reverts from lifetime ECL to 12-months ECL.

In the case of the new asset category for debt instruments measured at FVOCI, the measurement of ECL is based on the three-stage approach as applied to financial assets at amortized cost. The Bank recognises the provision charge in profit or loss, with the corresponding amount recognized in other comprehensive income, with no reduction in the carrying amount of the asset in the statement of financial position.

Overall, impairment under PSAK 71 results in earlier recognition of credit losses than under PSAK 55 (revised 2014).

Presentation and measurement of CKPN based on Conventional PSAK 71 which has been implemented in early 2020 sourced from general reserves (equity) based on the Deed of the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Abbreviated "PT Bank Riau Kepri" based on the Deed Notary Pupung Mulyantini, SH., MH. dated April 22, 2019 Number 12 is as follows:

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ai. Penyajian Standar Akuntansi Keuangan (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

ai. Presentation of Financial Accounting Standards *(continued)*

Aset Keuangan/ *Financial Assets*	Neraca/ *Balance*		PSAK 71		Selisih/ *Difference*	
	Nilai Tercatat/ *Recorded Value*	CKPN	Nilai Tercatat/ *Recorded Value*	CKPN	Nilai Tercatat/ *Recorded Value*	CKPN
• Penempatan pada Bank Indonesia/ *Placement with Bank Indonesia*	2.063.932.401.310	-	2.063.932.401.310	-	-	-
• Penempatan pada Bank Lain/ *Placements with Other Banks*	72.444.925.663	-	72.444.925.663	48.586.662	-	48.586.662
• Tagihan Spot dan Derivatif *Spot and Derivative Bill*	-	-	-	-	-	-
• Efek-efek yang dimiliki *Securities owned*	3.657.401.036.530	-	3.657.401.036.530	13.554.283.042	-	13.554.283.042
• Efek-efek Repo *Repo Securities*	-	-	-	-	-	-
• Tagihan Reverse Repo *Reverse Repo Bill*	-	-	-	-	-	-
• Tagihan Akseptasi *Acceptance bills*	-	-	-	-	-	-
• Kredit yang diberikan *Loan*	15.665.107.320.964	429.251.581.492	15.665.107.320.964	604.381.873.184	-	175.130.291.692
• Aset Keuangan Lainnya *Other Financial Assets*	1.655.783.335	100.000.000	1.655.783.335	100.000.000	-	-
Jumlah/ Total	**21.460.541.467.802**	**429.351.581.492**	**21.460.541.467.802**	**618.084.742.889**	**-**	**188.733.161.397**

PT Bank Riau Kepri telah menerapkan PSAK 71 untuk perhitungan dan penyajian CKPN dan PSAK 73 untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa.

PT Bank Riau Kepri has implemented PSAK 71 for the calculation and presentation of CKPN and PSAK 73 for recognition, measurement, presentation and disclosure of leases.

3. KAS

3. CASH

	2021	**2020**	
Rupiah			*Rupiah*
Kas	605.487.340.900	811.198.576.886	*Cash*
Kas ATM	99.517.250.000	96.695.900.000	*Cash in ATM*
Jumlah	705.004.590.900	907.894.476.886	*Total*

	2021	**2020**	
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	12.488.539.338	3.451.986.650	*United States Dollar*
Dolar Singapura	1.714.625.140	2.687.009.945	*Saudi Arabia Riyal*
Euro	185.776.664	198.712.978	*Euro*
Jumlah	14.388.941.141	6.337.709.573	*Total*
Total	**719.393.532.041**	**914.232.186.459**	*Total*

4. GIRO PADA BANK INDONESIA / *4. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA*

	2021	2020	
Rupiah	2.037.686.383.554	1.491.669.376.730	*Rupiah*
Dolar Amerika Serikat	5.059.637.500	4.987.750.000	*United States Dollar*
Jumlah	**2.042.746.021.054**	**1.496.657.126.730**	*Total*

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The minimum statutory reserves (GWM) of the Bank as of December 31st, 2021 and 2020 are as follows:

GWM - BI	2021	2020	*GWM - BI*
GWM Rupiah - Konvensional	3,50%	3,50%	*Rupiah GWM - Conventional*
GWM Valas	4,00%	4,00%	*Forex GWM*
GWM Rupiah - UUS	3,50%	3,50%	*GWM Rupiah - UUS*

PADG (Peraturan Anggota Dewan Gubernur) No.20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagaimana terakhir dirubah dengan PADG No.21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Perubahan ketiga PADG (Peraturan Anggota Dewan Gubernur) No.20/10/PADG/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

PADG (Regulation of the Members of the Board of Governors) No.20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. As lastly amended by PADG No.21/27/PADG/2019 dated 26 December 2019 Concerning the third Amendment to the PADG (Regulation of the Members of the Board of Governors) No.20/10/PADG/2018 concerning Statutory Reserves in Rupiahs and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Realisasi GWM:	2021	2020	*Realisasi GWM:*
GWM Rupiah - Konvensional	8,93%	6,50%	*Rupiah GWM - Conventional*
GWM Valas	5,96%	30,34%	*Forex GWM*
GWM Rupiah - UUS	4,07%	4,05%	*GWM Rupiah - UUS*

5. GIRO PADA BANK LAIN / *5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

Tidak terdapat giro pada bank lain kepada Pihak berelasi.

No related party in current accounts with other banks.

a. Berdasarkan mata uang / *a. By currency*

	2021	2020	
Rupiah	63.417.284.193	66.954.617.822	*Rupiah*
Mata uang asing			*Foreign currencies*
Dolar Amerika Serikat	19.029.216.538	35.478.655.922	*United Stated Dollar*
Dolar Singapura	3.165.345.427	15.296.432.935	*Singapore Dollar*
Euro	3.155.059.905	3.717.987.893	*Euro*
Jumlah	88.766.906.063	121.447.694.571	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.445.146)	(1.957.779)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**88.760.460.917**	**121.445.736.792**	*Total - net*

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS *(continued)*

b. Berdasarkan mata uang dan nama bank

b. By currency and counterparty bank

	2021	2020	
Rupiah			*Rupiah*
Bank Pembangunan Daerah			*Government Develop. Bank*
PT Bank DKI	2.403.642.708	3.971.208	*PT Bank DKI*
PT Bank Central Asia, Tbk	52.707.916.806	49.358.979.573	*PT Bank Central Asia, Tbk*
PT Bank Muamalat, Tbk	-	269.189.367	*PT Bank Muamalat, Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	3.437.048.906	3.808.713.253	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	885.187.007	3.981.622.849	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	-	-	*PT Bank Rakyat Indonesia Syariah*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	3.156.594.758	8.270.094.013	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank CIMB Niaga, Tbk	-	-	*PT Bank CIMB Niaga, Tbk*
PT Bank Mega, Tbk	19.279.167	525.521.538	*PT Bank Mega, Tbk*
PT Bank BNI Syariah	-	529.130.793	*PT Bank BNI Syariah*
PT Bank Syariah Mandiri (Persero),Tbk	-	207.395.228	*PT Bank Syariah Mandiri (Persero),Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia (BSI)	807.614.841	-	*PT Bank Syariah Indonesia (BSI)*
Jumlah Rupiah	63.417.284.193	66.954.617.822	*Total in Rupiah*

	2021	2020	
Mata uang asing			*Foreign currency*
Bank Umum			*Commercial Banks*
UOB Singapura	106	15.296.432.935	*UOB Singapura*
PT Bank Central Asia, Tbk	1.001.757.914	789.916.992	*PT Bank Central Asia, Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	3.832.759.353	2.988.880.525	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
Standard Chartered	17.360.044.593	31.699.858.404	*Standard Chartered*
Standard Chartered Jerman	3.155.059.905	3.717.987.893	*Standard Chartered Jerman*
Jumlah	25.349.621.871	54.493.076.749	*Currency*
Total	**88.766.906.063**	**121.447.694.571**	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
cadangan kerugian penurunan nilai	(6.445.146)	(1.957.779)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**88.760.460.917**	**121.445.736.792**	*Total - net*

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

c. Average interest rate per annum

	2021	2020	
Rupiah	0,00% - 3,00%	0,00% - 3,00%	*Rupiah*
Mata uang asing	0% - 0,75%	0,00% - 0,75%	*Foreign currencies*

Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang di blokir atau yang digunakan sebagai agunan.

There is no balance of clearing in other bank blocked or used as collateral.

5. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

d. Kolektibilitas

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen bank, kolektibilitas atas giro pada bank lain seluruhnya lancar. Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya giro pada bank lain serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS *(continued)*

d. Collectibility

Based on the review and evaluation of bank management, the collectibility of current accounts with other banks is entirely current. The Bank's management believes that the allowance for impairment losses established is adequate to cover possible losses from uncollectible current accounts with other banks and has been calculated in accordance with Bank Indonesia and the Financial Services Authority regulations.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

6. PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

	2021	2020	
Penempatan pada Bank Indonesia	2.875.770.885.839	459.670.000.000	*Placement with Bank Indonesia*
Penempatan pada Bank Lain	458.610.393.708	157.321.941.034	*Placement with Others Bank*
	3.334.381.279.547	616.991.941.034	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(6.589.425)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**3.334.381.279.547**	**616.985.351.609**	*Total - net*

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat dibedakan berdasarkan jenis dan nama bank, mata uang dan jatuh tempo yang dapat dirinci sebagai berikut:

Placements with Bank Indonesia and other banks can be differentiated based on the type and name of the bank, currency and maturity which can be specified as follows:

a. Berdasarkan jenis dan nama bank

a. By type and bank

	2021	2020	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
Intervensi Bank Indonesia			*Bank Indonesia Intervention*
FASBI/FASBIS - BI	2.875.770.885.839	459.670.000.000	*FASBI/FASBIS - BI*
Jumlah Bank Indonesia	2.875.770.885.839	459.670.000.000	*Total Bank Indonesia*

	2021	2020	
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)			*Mudharabah Investment Certificate Inter Bank (SIMA)*
- Bank Kalsel Syariah	-	75.000.000.000	*Bank Kalsel Syariah -*
- Bank Kaltim Kaltara	75.000.000.000	50.000.000.000	*Bank Kaltim Kaltara -*
- Bank Jawa Barat Banten Syariah	20.000.000.000	30.000.000.000	*Bank Jawa Barat - Banten Syariah*
- Bank Jatim Syariah	150.000.000.000	-	*Bank Jatim Syariah -*
Jumlah SIMA	245.000.000.000	155.000.000.000	*Total SIMA*

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

6. *PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS* *(continued)*

a. Berdasarkan jenis dan nama bank (lanjutan)

a. By type and bank *(continued)*

	2021	2020	
Interbank call money			*Interbank call money*
- Bank Lampung	100.000.000.000	-	*Bank Lampung* -
- Bank Sulteng	40.000.000.000	-	*Bank Sulteng* -
Jumlah Interbank call money	140.000.000.000	-	*Total Interbank call money*
Deposito berjangka			*Time deposit*
- Bank Kaltim Kaltara	71.262.500.000	-	*Bank Kaltim Kaltara* -
Jumlah Deposito berjangka	71.262.500.000	-	*Total Time Deposit*
Tabungan			*Savings Account*
BPR Karimun	-	-	*BPR Karimun*
PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan),Tbk	2.347.893.708	2.321.941.034	*PT Bank Syariah Mandiri (Perseroan),Tbk*
Jumlah Tabungan	2.347.893.708	2.321.941.034	*Total Savings Account*
Jumlah	3.334.381.279.547	616.991.941.034	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(6.589.425)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - net	**3.334.381.279.547**	**616.985.351.609**	*Total - net*

b. Berdasarkan mata uang

b. By currency

	2021	2020	
Rupiah			*Rupiah*
Deposit on call	-	-	*Deposit on call*
Interbank call money	140.000.000.000	-	*Interbank call money*
Tabungan	2.347.893.708	2.321.941.034	*saving*
Deposito berjangka	-	-	*Timed deposits*
FASBI/FASBIS - BI	2.875.770.885.839	459.670.000.000	FASBI/FASBIS - BI
Sertifikat Investasi Mudharabah	245.000.000.000	155.000.000.000	*Mudharabah Investment Certificate*
Jumlah dalam rupiah	3.263.118.779.547	616.991.941.034	*Total in rupiah*
Dollar Amerika Serikat			*United Stated Dollar*
Deposito berjangka	71.262.500.000	-	*Timed deposits*
Jumlah	3.334.381.279.547	616.991.941.034	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(6.589.425)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**3.334.381.279.547**	**616.985.351.609**	*Total - net*

c. Berdasarkan saat jatuh tempo

c. *By remaining period to maturity date*

	2021	2020	
< 1 bulan	2.875.770.885.839	-	*< 1 month*
1-3 bulan	211.262.500.000	-	*1-3 month*
9-12 bulan	247.347.893.708	616.991.941.034	*9-12 month*
	3.334.381.279.547	616.991.941.034	
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(6.589.425)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**3.334.381.279.547**	**616.985.351.609**	*Total - net*

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun

	2021	2020	
Rupiah	0% - 4,00%	0,00% - 3,00%	*Rupiah*
Mata uang asing	0% - 0,75%	0,00% - 0,75%	*Foreign currencies*

Bank tidak memiliki transaksi dengan Pihak berelasi semua transaksi hanya dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen bank, kolektibilitas atas penempatan pada bank lain seluruhnya lancar. Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya penempatan pada bank lain.

6. *PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS* *(continued)*

d. Average interest rate per annum

Bank has no transaction with privileged relation party for all transactions are only with third party.

Based on the review and evaluation of bank management, the collectability of placements with other banks is entirely current. The Bank's management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible placements with other banks.

7. EFEK-EFEK

Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-7/D.03/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 dalam Kondisi Pandemi Covid-19. Bank menerapkan panduan perlakuan akuntansi terkait PSAK 71 - Instrumen Keuangan dan PSAK 68 - Pengukuran Nilai Wajar sebagai berikut:

Penerapan PSAK 68

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan volatilitas dan penurunan signifikan volume transaksi di bursa efek dan mempengaruhi pertimbangan (*judgement*) bank dalam menentukan nilai wajar dari surat berharga. Bank telah menerapkan:

1. Menunda penilaian yang mengacu pada harga pasar (*mark to market*) untuk Surat Utang Negara dan surat-surat berharga lain yang diterbitkan Pemerintah termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, selama 6 (enam) bulan. Selama masa penundaan, Bank dapat menggunakan harga kuotasian tanggal 31 Maret 2020 untuk penilaian surat-surat berharga tersebut.

2. Menunda penilaian yang mengacu pada harga pasar (*mark to market*) untuk surat-surat berharga lain selama 6 (enam) bulan sepanjang Bank meyakini kinerja penerbit (*issuer*) SSB tersebut dinilai baik sesuai kriteria tertentu yang Bank tetapkan. Selama masa penundaan, Bank dapat menggunakan harga kuotasian tanggal 31 Maret 2020 untuk penilaian surat-surat berharga tersebut. Apabila Bank menganggap kinerja *issuer* tidak/kurang baik, maka Bank dapat melakukan penilaian berdasarkan model sendiri dengan menggunakan berbagai asumsi, antara lain suku bunga, *credit spread*, risiko kredit *issuer*, dan sebagainya.

7. *MARKETABLE SECURITIES*

Financial Services Authority Letter Number S-7/D.03/2020 dated April 14, 2020 regarding the Application of PSAK 71 and PSAK 68 in the Condition of the Covid-19 Pandemic. The Bank applies accounting treatment guidelines related to PSAK 71 - Financial Instruments and PSAK 68 - Fair Value Measurement as follows:

Application of PSAK 68

The Covid-19 pandemic has caused volatility and a significant decrease in transaction volume on the stock exchange and has affected bank judgments in determining the fair value of securities. The Bank has implemented:

1. *Postponing the assessment that refers to market prices (mark to market) for Government Securities and other securities issued by the Government, including securities issued by Bank Indonesia, for 6 (six) months. During the deferral period, the Bank may use the quoted price as of March 31, 2020 for the valuation of these securities.*

2. *Postpone the assessment that refers to the market price (mark to market) for other securities for 6 (six) months as long as the Bank believes that the performance of the SSB issuer is considered good according to certain criteria set by the Bank. During the deferral period, the Bank may use the quoted price as of March 31, 2020 for the valuation of these securities. If the Bank considers that the issuer's performance is not good/unfavorable, then the Bank can make an assessment based on its own model using various assumptions, including interest rates, credit spreads, issuer credit risk, and so on.*

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

3. Melakukan pengungkapan yang menjelaskan perbedaan perlakuan akuntansi yang mengacu pada panduan OJK dengan SAK sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 68.

7. *MARKETABLE SECURITIES* *(continued)*

3. Make disclosures that explain the difference in accounting treatment that refers to the OJK guidelines with SAK as required in PSAK 68.

a. Klasifikasi jenis dan tujuan investasi / **a. *Classification based on type and invesment***

	2021	2020	
SBPM obligasi tersedia untuk dijual	2.832.345.764.349	975.433.915.084	*SBPM bonds available for sale*
SBPU tersedia untuk dijual	-	-	*SBPU available for sale*
SBPU reksadana dimiliki hingga jatuh tempo	1.167.610.229.785	3.109.914.262.295	*SBPU mutual fund held-to-maturity*
Sukuk BI diperdagangkan	1.207.402.000.000	1.572.719.000.000	*BI Sukuk is traded*
SBPM SBSN PD/SM dimiliki hingga jatuh tempo	30.000.000.000	30.000.000.000	*SBPM SBSN PD / SM held to maturity*
SBPM SBSN PD/SM HTM Premium	1.025.997.595	1.459.461.206	*SBPM SBSN PD / SM HTM Premium*
Jumlah Efek-efek	5.238.383.991.729	5.689.526.638.585	*Total marketable securities*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(897.156.165)	(5.545.008.417)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**5.237.486.835.564**	**5.683.981.630.168**	*Total - net*

b. Klasifikasi berdasarkan jatuh tempo / ***b. Classification to maturity***

	2021	2020	
• Sampai dengan 1 bulan	-	-	*Less than 1 month* •
• Lebih dari 1 s/d 12 bulan	5.238.383.991.729	5.689.526.638.585	*More than 1 s/d 12 month* •
Jumlah	**5.238.383.991.729**	**5.689.526.638.585**	*Total*

c. Rincian Efek-efek / ***c. Detail of marketable secuties***

1). SBPM obligasi tersedia untuk dijual/ *SBPM obligation available for sale*

Efek-efek / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat / *Carring Value*
			2021		
FR0065	28-Feb-13	15-May-33	6,63%	20.000.000.000	20.124.940.995
FR0065	28-Feb-13	15-May-33	6,63%	6.137.000.000	6.177.177.770
SPNS14012022	16-Jul-21	14-Jan-22	3,15%	100.000.000.000	100.000.000.000
SPNS12022022	28-Sep-21	12-Feb-22	2,88%	100.000.000.000	100.000.000.000
SPNS12022022	28-Sep-21	12-Feb-22	2,88%	100.000.000.000	100.000.000.000
PBS027	1-Oct-20	15-May-23	4,59%	23.136.000.000	23.457.657.454
PBS027	11-Feb-21	15-May-23	4,60%	40.000.000.000	40.805.735.619
PBS027	11-Feb-21	15-May-23	4,61%	40.000.000.000	40.809.104.765
PBS027	9-Mar-21	15-May-23	4,69%	20.000.000.000	20.441.703.014
PBS027	10-Mar-21	15-May-23	4,67%	25.000.000.000	25.548.255.767
PBS027	12-Mar-21	15-May-23	4,76%	20.000.000.000	20.454.298.579
PBS027	16-Mar-21	15-May-23	4,66%	5.000.000.000	5.110.506.351
PBS027	22-Mar-21	15-May-23	4,76%	25.000.000.000	25.579.114.520
PBS027	6-Jul-21	15-May-23	4,24%	40.000.000.000	40.979.862.167
PBS027	16-Jul-21	15-May-23	4,12%	40.000.000.000	40.982.016.872
PBS027	16-Jul-21	15-May-23	4,05%	40.000.000.000	40.969.024.012
PBS027	29-Jul-21	15-May-23	3,99%	40.000.000.000	40.991.704.285

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

c. Rincian Efek-efek (lanjutan)

1). SBPM obligasi tersedia untuk dijual (lanjutan)

7. *MARKETABLE SECURITIES* *(continued)*

c. Detail of marketable secuties *(continued)*

1). SBPM obligation available for sale *(continued)*

Efek-efek / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat / *Carring Value*
			2021		
SR014	6-Jul-21	10-Mar-24	4,56%	25.000.000.000	25.496.598.015
SR014	5-Oct-21	10-Mar-24	4,32%	45.000.000.000	45.960.706.722
SR014	11-Oct-21	10-Mar-24	4,29%	20.000.000.000	20.429.195.738
SR014	11-Oct-21	10-Mar-24	4,29%	40.000.000.000	40.858.391.476
SR014	12-Oct-21	10-Mar-24	4,30%	40.000.000.000	40.860.500.742
SR014	12-Oct-21	10-Mar-24	4,31%	40.000.000.000	40.861.207.123
SR014	12-Oct-21	10-Mar-24	4,30%	40.000.000.000	40.860.500.742
SR014	19-Oct-21	10-Mar-24	4,26%	47.000.000.000	48.016.618.201
SR014	19-Oct-21	10-Mar-24	4,27%	25.000.000.000	25.541.365.466
SR014	10-Nov-21	10-Mar-24	4,21%	40.000.000.000	40.888.300.687
PBS031	2-Aug-21	15-Jul-24	4,22%	45.000.000.000	44.919.493.917
PBS031	3-Aug-21	15-Jul-24	4,35%	40.000.000.000	39.946.706.789
PBS031	3-Aug-21	15-Jul-24	4,36%	45.000.000.000	44.942.999.985
SR015	15-Dec-21	10-Sep-24	4,32%	45.000.000.000	45.615.848.913
SR015	16-Dec-21	10-Sep-24	4,42%	40.000.000.000	40.549.653.014
PBS026	1-Oct-20	15-Oct-24	5,31%	23.936.000.000	25.028.990.342
PBS026	1-Oct-20	15-Oct-24	5,28%	25.000.000.000	26.133.098.638
PBS026	11-Dec-20	15-Oct-24	4,97%	40.000.000.000	41.783.123.300
PBS026	16-Mar-21	15-Oct-24	5,23%	20.000.000.000	20.998.943.789
PBS026	4-Oct-21	15-Oct-24	4,50%	45.000.000.000	47.451.053.584
PBS026	6-Oct-21	15-Oct-24	4,53%	45.000.000.000	47.458.519.167
PBS026	11-Oct-21	15-Oct-24	4,50%	45.000.000.000	47.466.143.253
PBS017	26-Nov-20	15-Oct-25	5,31%	40.000.000.000	41.432.764.243
PBS017	26-Nov-20	15-Oct-25	5,44%	40.000.000.000	41.477.419.338
PBS017	26-Nov-20	15-Oct-25	5,47%	40.000.000.000	41.488.505.451
PBS017	14-Jan-21	15-Oct-25	5,45%	23.306.000.000	24.186.229.732
PBS017	14-Jan-21	15-Oct-25	5,39%	25.000.000.000	25.932.453.140
PBS017	11-Feb-21	15-Oct-25	5,42%	40.000.000.000	41.517.597.519
PBS017	11-Feb-21	15-Oct-25	5,43%	40.000.000.000	41.520.486.970
PBS017	7-May-21	15-Oct-25	5,55%	40.000.000.000	41.593.142.551
PBS017	1-Nov-21	15-Oct-25	4,93%	45.000.000.000	46.824.230.258
PBS017	25-Nov-21	15-Oct-25	4,80%	45.000.000.000	46.848.489.532
PBS017	2-Dec-21	15-Oct-25	4,78%	40.000.000.000	41.650.943.238
PBS017	2-Dec-21	15-Oct-25	4,79%	45.000.000.000	46.857.582.799
PBS017	6-Dec-21	15-Oct-25	4,77%	40.000.000.000	41.655.726.774
PBS017	6-Dec-21	15-Oct-25	4,79%	45.000.000.000	46.863.086.282
PBS017	7-Dec-21	15-Oct-25	4,82%	30.000.000.000	31.243.451.095
PBS032	2-Aug-21	15-Jul-26	5,02%	40.000.000.000	40.105.045.732
PBS032	3-Aug-21	15-Jul-26	5,09%	40.000.000.000	40.113.818.351
PBS032	26-Aug-21	15-Jul-26	5,07%	25.000.000.000	25.067.447.510
PBS032	26-Aug-21	15-Jul-26	5,11%	1.889.000.000	1.894.299.882
PBS032	27-Aug-21	15-Jul-26	5,00%	45.000.000.000	45.113.041.514
PBS032	30-Aug-21	15-Jul-26	5,01%	30.000.000.000	30.076.120.430
PBS032	3-Sep-21	15-Jul-26	4,99%	40.000.000.000	40.098.755.011
PBS032	3-Sep-21	15-Jul-26	5,01%	45.000.000.000	45.113.794.770
PBS032	8-Sep-21	15-Jul-26	5,02%	25.000.000.000	25.063.516.041
PBS032	29-Nov-21	15-Jul-26	4,74%	45.000.000.000	45.092.768.346
PBS032	29-Nov-21	15-Jul-26	4,74%	40.000.000.000	40.082.460.752
PBS032	1-Dec-21	15-Jul-26	4,74%	45.000.000.000	45.092.947.823
PBS032	7-Dec-21	15-Jul-26	4,76%	45.000.000.000	45.093.894.249
PBS032	7-Dec-21	15-Jul-26	4,75%	40.000.000.000	40.083.354.092

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

7. *MARKETABLE SECURITIES* *(continued)*

c. Rincian Efek-efek (lanjutan)

c. Detail of marketable secuties *(continued)*

1). SBPM obligasi tersedia untuk dijual (lanjutan)**/ *SBPM obligation available for sale*** *(continued)*

Efek-efek / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	2021 Nilai Nominal / *Nominal Value*	2021 Nilai Tercatat / *Carring Value*
PBS003	5-Nov-21	15-Jan-27	5,46%	45.000.000.000	46.148.198.301
PBS003	5-Nov-21	15-Jan-27	5,45%	40.000.000.000	41.020.300.994
PBS030	5-Jul-21	15-Jul-28	5,92%	20.000.000.000	20.096.485.014
PBS030	26-Aug-21	15-Jul-28	5,83%	21.000.000.000	21.097.058.319
				2.716.404.000.000	2.772.044.477.828
Obligasi Korporasi (Perusahaan) - Tersedia Untuk Dijual (Non Bank)					
Obligasi Brklnjtn. I Timah Thp. I Th. 2017 Seri B	27-Oct-17	28-Sep-22	8,10%	8.000.000.000	8.050.797.195
Obligasi Brklnjtn. I Timah Thp. I Th. 2017 Seri B	27-Oct-17	28-Sep-22	8,10%	10.000.000.000	10.063.496.494
Obligasi Brklnjtn. I Timah Thp. I Th. 2017 Seri B	10-Jan-18	28-Sep-22	8,04%	14.000.000.000	14.073.672.695
Obligasi Brklnjtn. I Timah Thp. I Th. 2017 Seri B	2-Feb-18	28-Sep-22	7,97%	15.000.000.000	15.060.707.216
Obligasi Brklnjtn. I Timah Thp. I Th. 2017 Seri B	2-Feb-18	28-Sep-22	7,97%	13.000.000.000	13.052.612.920
				60.000.000.000	60.301.286.521
TOTAL BONDS				**2.776.404.000.000**	**2.832.345.764.349**

2). SBPU Reksadana dimiliki hingga jatuh tempo/ *SBPU mutual fund held-to-maturity*

Efek-efek / *Marketable Security*	2021 Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Nilai Nominal / *Nominal Value*
RR SBN 7 HR / VR0047	27-Dec-21	3-Jan-22	3,50%	84.981.321.846
RR SBN 7 HR / VR0051	27-Dec-21	3-Jan-22	3,50%	84.851.337.771
RR SBN 7 HR / VR0062	29-Dec-21	5-Jan-22	3,50%	130.413.472.733
RR SBN 7 HR / VR0062	29-Dec-21	5-Jan-22	3,50%	130.413.472.733
RR SBN 7 HR / VR0062	29-Dec-21	5-Jan-22	3,50%	130.413.472.733
RR SBN 7 HR / VR0062	29-Dec-21	5-Jan-22	3,50%	130.413.472.733
RR SBN 7 HR / VR0058	31-Dec-21	7-Jan-22	3,50%	119.065.446.390
RR SBN 7 HR / VR0058	31-Dec-21	7-Jan-22	3,50%	119.065.446.390
RR SBN 7 HR / VR0039	31-Dec-21	7-Jan-22	3,50%	118.996.393.228
RR SBN 7 HR / VR0039	31-Dec-21	7-Jan-22	3,50%	118.996.393.228
TOTAL PENEMPATAN RR SBN				**1.167.610.229.784**

3). Sukuk BI diperdagangkan/ *BI Sukuk is traded*

Efek-efek / *Marketable Security*	2021 Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Nilai Nominal / *Nominal Value*
SUKUK01-000378	29-Dec-21	5-Jan-22	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000379	29-Dec-21	5-Jan-22	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000380	29-Dec-21	5-Jan-22	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000381	29-Dec-21	5-Jan-22	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000382	29-Dec-21	5-Jan-22	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000383	29-Dec-21	5-Jan-22	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000384	29-Dec-21	5-Jan-22	3,50%	103.480.000.000
SUKUK01-000385	29-Dec-21	5-Jan-22	3,50%	91.062.000.000
SUKUK01-000386	31-Dec-21	7-Jan-22	3,50%	65.330.000.000
SUKUK01-000387	31-Dec-21	7-Jan-22	3,50%	65.330.000.000
SUKUK01-000388	31-Dec-21	7-Jan-22	3,50%	65.330.000.000
SUKUK01-000389	31-Dec-21	7-Jan-22	3,50%	65.330.000.000
SUKUK01-000390	31-Dec-21	7-Jan-22	3,50%	65.330.000.000
SUKUK01-000391	31-Dec-21	7-Jan-22	3,50%	65.330.000.000
				1.207.402.000.000

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

7. *MARKETABLE SECURITIES* *(continued)*

c. Rincian Efek-efek (lanjutan)

c. *Detail of marketable secuties* *(continued)*

4). SBPM SBSN PD/SM dimiliki hingga jatuh tempo/ *SBPM SBSN PD/SM is held to maturity*

Efek-efek / *Marketable Security*	2021 Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Nilai Nominal / *Nominal Value*
PBS026 - SBSN PBS026	25-Aug-20	15-Oct-24	5,25%	10.000.000.000
PBS026 - SBSN PBS026	29-Sep-20	15-Oct-24	5,19%	10.000.000.000
PBS 027 - SBSN PBS027	29-Sep-20	15-May-23	4,53%	10.000.000.000
				30.000.000.000

5). PREMIUM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - SBPM SBSN PD/SM HTM

Efek-efek / *Marketable Security*	2021 Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Premium
PBS026 - SBSN PBS026	25-Aug-20	15-Oct-24	5,25%	366.532.258
PBS026 - SBSN PBS026	29-Sep-20	15-Oct-24	5,19%	384.328.473
PBS027 - SBSN PBS027	29-Sep-20	15-May-23	4,53%	275.136.864
				1.025.997.595
Jumlah Efek-efek/ *Total Marketable Security*				**5.238.383.991.728**

1). SBPM obligasi tersedia untuk dijual/ *SBPM obligation available for sale*

Efek-efek / *Marketable Security*	2020 Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Nilai Nominal / *Nominal Value*	Nilai Tercatat / *Carring Value*
Surat Utang Negara (SUN)					
FR0065	28-Feb-13	15-May-33	6,63%	20.000.000.000	20.404.920.679
FR0065	28-Feb-13	15-May-33	6,63%	6.137.000.000	6.262.143.213
PBS26	1-Oct-20	15-Oct-24	5,31%	23.936.000.000	25.127.271.486
PBS26	1-Oct-20	15-Oct-24	5,28%	25.000.000.000	26.242.540.444
PBS26	15-Oct-20	15-Oct-24	5,34%	20.000.000.000	21.003.932.163
PBS26	11-Dec-20	15-Oct-24	5,34%	40.000.000.000	42.065.857.732
PBS27	1-Oct-20	15-May-23	4,59%	23.136.000.000	24.068.552.398
PBS17	26-Nov-20	15-Oct-25	5,31%	40.000.000.000	41.325.126.055
PBS17	26-Nov-20	15-Oct-25	5,44%	40.000.000.000	41.329.085.120
PBS17	26-Nov-20	15-Oct-25	5,47%	40.000.000.000	41.330.067.454
SPN12210304	14-Aug-20	4-Mar-21	3,40%	100.000.000.000	100.000.000.000
SPN12210304	14-Aug-20	4-Mar-21	3,40%	100.000.000.000	100.000.000.000
SPN12210304	3-Sep-20	4-Mar-21	3,30%	100.000.000.000	100.000.000.000
SPN12210603	27-Aug-20	4-Mar-21	3,40%	8.824.000.000	8.824.000.000
SPNS14042021	13-Nov-20	14-Apr-21	3,15%	50.000.000.000	50.000.000.000
SPNS09062021	11-Dec-20	14-Apr-21	3,15%	100.000.000.000	100.000.000.000
TOTAL GOVERNMENT BONDS				737.033.000.000	747.983.496.743
Obligasi Korporasi (Perusahaan) - Tersedia Untuk Dijual (Non Bank)					
Obligasi Brklnjtn. I Timah Thp. I Th. 2017 Seri B	27-Oct-17	28-Sep-22	8,10%	8.000.000.000	7.962.905.509
Obligasi Brklnjtn. I Timah Thp. I Th. 2017 Seri B	27-Oct-17	28-Sep-22	8,10%	10.000.000.000	9.953.631.887
Obligasi Brklnjtn. I Timah Thp. I Th. 2017 Seri B	10-Jan-18	28-Sep-22	8,04%	14.000.000.000	13.927.751.982
Obligasi Brklnjtn. I Timah Thp. I Th. 2017 Seri B	2-Feb-18	28-Sep-22	7,97%	15.000.000.000	14.913.805.228
Obligasi Brklnjtn. I Timah Thp. I Th. 2017 Seri B	2-Feb-18	28-Sep-22	7,97%	13.000.000.000	12.925.297.864
Obligasi Brklnjtn. II PNM Tahap II Tahun 2018 Seri	23-Apr-18	13-Apr-23	8,25%	9.000.000.000	9.131.630.592
Obligasi Brklnjtn. II PNM Tahap II Tahun 2018 Seri	24-Apr-18	13-Apr-23	8,11%	10.000.000.000	10.134.517.391
Obligasi Brklnjtn. II PNM Tahap II Tahun 2018 Seri	24-Apr-18	13-Apr-23	8,11%	10.000.000.000	10.134.517.391
Obligasi Brklnjtn. II PNM Tahap II Tahun 2018 Seri	16-May-18	13-Apr-23	8,13%	6.000.000.000	6.081.673.982
Obligasi Brklnjtn. I PNM Tahap II Tahun 2016 Seri	9-Jul-18	3-Nov-21	8,03%	10.000.000.000	10.169.569.672
Obligasi Brklnjtn. I PNM Tahap II Tahun 2016 Seri	9-Jul-18	3-Nov-21	8,03%	2.000.000.000	2.033.913.935
Obligasi Brklnjtn. I Hutama Karya Tahap II Th. 201	11-Dec-17	6-Jun-27	7,18%	5.000.000.000	5.079.478.510
TOTAL CORPORATE BONDS - NON BANK				112.000.000.000	112.448.693.943

7. EFEK-EFEK (lanjutan) / **7. *MARKETABLE SECURITIES*** *(continued)*

c. Rincian Efek-efek (lanjutan) / ***c. Detail of marketable secuties*** *(continued)*

1). SBPM obligasi tersedia untuk dijual (lanjutan)**/ *SBPM obligation available for sale*** *(continued)*

Efek-efek / *Marketable Security*	Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	2020 Nilai Nominal / *Nominal Value*	2020 Nilai Tercatat / *Carring Value*
Obligasi Korporasi (Perusahaan) - Tersedia Untuk Dijual (Bank)					
Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015	11-Jul-17	8-Jan-21	9,11%	13.000.000.000	12.803.829.286
Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015	15-Dec-17	8-Jan-21	7,86%	10.000.000.000	9.728.367.645
Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015	12-Jul-18	8-Jan-21	8,45%	8.000.000.000	7.828.928.966
Obligasi Brklnjtn. I Bank Sulselbar Thp II Tahun 20	18-Sep-17	3-Nov-21	8,16%	10.000.000.000	10.171.643.012
Obligasi Brklnjtn. I Bank BJB Thp. I Th. 2017 Seri I	28-Mar-18	6-Dec-22	7,47%	20.000.000.000	20.071.167.949
Obligasi II Bank Maluku Malut Th. 2017 Seri C	12-Dec-17	8-Dec-22	8,75%	10.000.000.000	10.178.753.056
Obligasi II Bank Maluku Malut Th. 2017 Seri C	12-Jul-18	8-Dec-22	8,53%	8.000.000.000	8.128.861.229
Obligasi II Bank Maluku Malut Th. 2017 Seri C	16-Jul-18	8-Dec-22	8,75%	5.000.000.000	5.089.369.029
Obligasi II Bank Maluku Malut Th. 2017 Seri C	29-Aug-18	8-Dec-22	8,80%	1.000.000.000	1.017.455.907
Obligasi II Bank Maluku Malut Th. 2017 Seri C	9-Oct-18	8-Dec-22	8,96%	5.000.000.000	5.097.755.150
Obligasi Brklnjtn. I Bank BRI Tahap II Th. 2016 Ser	22-Dec-17	4-Feb-21	7,08%	15.000.000.000	14.848.046.932
Obligasi Brklnjtn. I Bank DKI Tahap I Th. 2016	21-Mar-18	30-Jun-21	7,60%	10.000.000.000	10.037.546.237
TOTAL CORPORATE BONDS - BANK				115.000.000.000	115.001.724.398
TOTAL BONDS				**964.033.000.000**	**975.433.915.084**

2). SBPU Reksadana dimiliki hingga jatuh tempo/ *SBPU mutual fund held-to-maturity*

Efek-efek / *Marketable Security*	2020 Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Nilai Nominal / *Nominal Value*
RR SBN 7 HR / VR0054	28-Dec-20	4-Jan-21	3,75%	238.591.925.000
RR SBN 7 HR / VR0054	28-Dec-20	4-Jan-21	3,75%	238.591.925.000
RR SBN 7 HR / VR0058	28-Dec-20	4-Jan-21	3,75%	143.035.350.000
RR SBN 7 HR / VR0038	29-Dec-20	5-Jan-21	3,75%	238.131.750.000
RR SBN 7 HR / FR0040	29-Dec-20	5-Jan-21	3,75%	303.839.000.000
RR SBN 7 HR / FR0040	29-Dec-20	5-Jan-21	3,75%	303.839.000.000
RR SBN 7 HR / VR0042	29-Dec-20	5-Jan-21	3,75%	237.238.725.000
RR SBN 7 HR / VR0042	29-Dec-20	5-Jan-21	3,75%	237.238.725.000
RR SBN 7 HR / VR0042	29-Dec-20	5-Jan-21	3,75%	237.238.725.000
RR SBN 7 HR / VR0062	30-Dec-20	6-Jan-21	3,75%	237.710.200.000
RR SBN 7 HR / VR0062 & FR0056	30-Dec-20	6-Jan-21	3,75%	263.269.117.295
RR SBN 7 HR / VR0049	30-Dec-20	13-Jan-21	3,52%	239.549.900.000
RR SBN 7 HR / VR0049	30-Dec-20	13-Jan-21	3,52%	191.639.920.000
TOTAL PENEMPATAN RR SBN				**3.109.914.262.295**

3). Sukuk BI diperdagangkan/ *BI Sukuk is traded*

Efek-efek / *Marketable Security*	2020 Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Nilai Nominal / *Nominal Value*
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000082	30-Sep-20	4-Jan-21	3,85%	75.000.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000086	7-Oct-20	6-Jan-21	3,84%	72.727.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000089	14-Oct-20	13-Jan-21	3,85%	36.900.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000093	21-Oct-20	20-Jan-21	3,84%	47.619.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000097	27-Oct-20	26-Jan-21	3,83%	50.000.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000101	4-Nov-20	3-Feb-21	3,82%	126.984.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000105	11-Nov-20	10-Feb-21	3,82%	99.704.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000109	18-Nov-20	17-Feb-21	3,82%	60.000.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000113	25-Nov-20	24-Feb-21	3,57%	50.000.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK03 - 000115	2-Dec-20	4-Jan-21	3,55%	25.740.000.000

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

7. *MARKETABLE SECURITIES* *(continued)*

c. Rincian Efek-efek (lanjutan)

c. Detail of marketable secuties *(continued)*

3). Sukuk BI diperdagangkan (lanjutan)***/ BI Sukuk is traded*** *(continued)*

Efek-efek / *Marketable Security*	2020 Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Nilai Nominal / *Nominal Value*
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000116	2-Dec-20	3-Mar-21	3,57%	56.980.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK03 - 000118	8-Dec-20	5-Jan-21	3,55%	29.955.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK03 - 000119	16-Dec-20	13-Jan-21	3,55%	72.080.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000120	16-Dec-20	17-Mar-21	3,57%	200.000.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK03 - 000122	23-Dec-20	20-Jan-21	3,54%	125.000.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000123	23-Dec-20	24-Mar-21	3,56%	125.000.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK01 - 000124	30-Dec-20	6-Jan-21	3,75%	119.030.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK02 - 000125	30-Dec-20	13-Jan-21	3,52%	50.000.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK03 - 000126	30-Dec-20	27-Jan-21	3,54%	100.000.000.000
Sukuk BI No. Reff SUKUK04 - 000127	30-Dec-20	31-Mar-21	3,56%	50.000.000.000
Jumlah Efek-efek / *Total Marketable Security*				**1.572.719.000.000**

4). SBPM SBSN PD/SM dimiliki hingga jatuh tempo/ ***SBPM SBSN PD/SM is held to maturity***

Efek-efek / *Marketable Security*	2020 Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Nilai Nominal / *Nominal Value*
PBS026 - SBSN PBS026	25-Aug-20	15-Oct-24	5,25%	10.000.000.000
PBS026 - SBSN PBS026	29-Sep-20	15-Oct-24	5,19%	10.000.000.000
PBS027 - SBSN PBS027	29-Sep-20	15-May-23	4,53%	10.000.000.000
				30.000.000.000

5). PREMIUM SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - SBPM SBSN PD/SM HTM

Efek-efek / *Marketable Security*	2020 Penempatan / *Placement*	Jatuh Tempo / *Due Date*	Bunga / *Interest*	Premium
PBS026 - SBSN PBS026	25-Aug-20	15-Oct-24	5,25%	488.612.583
PBS026 - SBSN PBS026	29-Sep-20	15-Oct-24	5,19%	512.508.895
PBS027 - SBSN PBS027	29-Sep-20	15-May-23	4,53%	458.339.728
				1.459.461.206
Jumlah Efek-efek/ *Total Marketable Security*				**5.689.526.638.585**

d. Kolektibilitas Efek-efek sebagai berikut:

d. Collectibility of marketable securities is as follow:

	2021	**2020**	
Lancar	5.238.383.991.729	5.689.526.638.585	*Current*
Macet	-	-	*Loss*
Jumlah	5.238.383.991.729	5.689.526.638.585	*Total*
Dikurangi:			*Less allowance for*
CKPN Efek-efek	(897.156.165)	(5.545.008.417)	*impairment losses*
Jumlah - bersih	**5.237.486.835.564**	**5.683.981.630.168**	*Total - nett*

Keuntungan/ kerugian yang belum direalisasi atas Efek-efek dan obligasi dalam kelompok tersedia untuk dijual setelah pajak tangguhan dirinci sebagai berikut:

Unrealized gains/ losses on availabel for sale marketable securities and Government Bonds net of deferred tax detail is as follows:

7. EFEK-EFEK (lanjutan) / **7. *MARKETABLE SECURITIES*** *(continued)*

	2021	2020	
Keuntungan (kerugian) bersih yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar dari Efek-efek tersedia untuk dijual	2.862.580.837	(881.271.782)	*Unrealized gains (loss) net on changes in fair value of available for sale marketable securities*
Pajak tangguhan	(629.767.784)	193.879.792	*Deffered tax*
Jumlah	**2.232.813.053**	**(687.391.990)**	*Total*

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH / ***8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING***

Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah seluruhnya diberikan dalam mata uang Rupiah sebagai berikut:

All loans and sharia financing were granted in Rupiah Currency and detail from that detail are as follows:

	2021	2020	
Modal kerja	1.728.704.791.013	1.624.915.341.559	*Working capital*
Investasi	2.400.323.925.834	2.363.909.297.693	*Investment*
Konsumtif	14.755.885.284.282	14.972.124.418.133	*Consumer*
Jumlah	18.884.914.001.129	18.960.949.057.385	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(496.609.862.319)	(527.308.458.214)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.388.304.138.811**	**18.433.640.599.171**	*Total - net*

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas / ***a. By type and collectibility***

Konvensional dan syariah / *Conventional and sharia*

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
	2021					
Modal kerja/ *Working capital*						
Pihak berelasi/ *Related parties*	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ *Third parties*	1.506.607.471.246	39.070.713.195	935.343.809	1.931.909.086	180.159.353.677	1.728.704.791.013
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(20.230.858.545)	(7.780.769.896)	(593.725.467)	(1.049.666.903)	(111.311.653.933)	(140.966.674.744)
Investasi/ *Investment*						
Pihak berelasi/ *Related parties*	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ *Third parties*	2.204.496.434.442	32.813.959.797	264.204.039	280.244.649	162.469.082.907	2.400.323.925.834
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(27.225.297.721)	(6.137.839.226)	(143.454.757)	(107.627.959)	(107.149.772.990)	(140.763.992.653)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas (lanjutan)

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

a. By type and collectibility *(continued)*

Konvensional dan syariah (lanjutan)/ *Conventional and sharia (continued)*

2021

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Konsumtif/ *Consumer*						
Pihak berelasi/ *Related parties*	902.461.763	-	-	-	-	902.461.763
Pihak ketiga/ *Third parties*	14.303.130.770.187	266.004.452.010	9.245.160.975	11.218.090.639	165.384.348.709	14.754.982.822.519
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(19.636.663.361)	(49.673.912.844)	(7.544.949.566)	(10.043.124.447)	(127.980.544.704)	(214.879.194.922)
Jumlah/ *total*	17.948.044.318.011	274.296.603.036	2.162.579.033	2.229.825.065	161.570.813.666	18.388.304.138.811
Jumlah Pihak berelasi/ *Related parties total*	902.461.763	-	-	-	-	902.461.763
Jumlah Pihak ketiga/ *Third parties total*	18.014.234.675.875	337.889.125.002	10.444.708.823	13.430.244.374	508.012.785.293	18.884.011.539.366
Jumlah/ *total*	18.015.137.137.638	337.889.125.002	10.444.708.823	13.430.244.374	508.012.785.293	18.884.914.001.129
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(67.092.819.627)	(63.592.521.966)	(8.282.129.790)	(11.200.419.309)	(346.441.971.627)	(496.609.862.319)
Jumlah bersih/ net	**17.948.044.318.011**	**274.296.603.036**	**2.162.579.033**	**2.229.825.065**	**161.570.813.666**	**18.388.304.138.811**

Konvensional dan syariah / *Conventional and sharia*

2020

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Modal kerja/ *Working capital*						
Pihak berelasi/ *Related parties*	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ *Third parties*	1.358.517.952.030	74.825.118.226	359.132.927	1.549.596.602	189.663.541.774	1.624.915.341.559
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(19.398.845.052)	(18.187.529.086)	(200.084.003)	(880.420.106)	(103.977.989.933)	(142.644.868.180)
Investasi/ *Invesment*						
Pihak berelasi/ *Related parties*	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ *Third parties*	2.127.740.756.494	56.424.849.662	658.608.404	699.103.678	178.385.979.455	2.363.909.297.693
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(35.635.469.410)	(20.139.778.473)	(525.544.732)	(581.442.716)	(128.188.435.977)	(185.070.671.308)

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas (lanjutan)

a. By type and collectibility *(continued)*

Konvensional dan syariah (lanjutan)/ *Conventional and sharia (continued)*

2020

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Konsumtif/ *Consumer*						
Pihak berelasi/ *Related parties*	2.470.082.839	-	-	-	-	2.470.082.839
Pihak ketiga/ *Third parties*	14.501.435.233.312	302.391.482.538	3.540.352.769	5.868.072.338	156.419.194.337	14.969.654.335.294
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(27.786.063.686)	(60.045.151.233)	(2.341.881.979)	(4.724.000.892)	(104.695.820.936)	(199.592.918.726)
Jumlah/ *total*	17.907.343.646.527	335.268.991.634	1.490.583.386	1.930.908.904	187.606.468.720	18.433.640.599.171
Jumlah Pihak berelasi/ *Related parties total*	2.470.082.839	-	-	-	-	2.470.082.839
Jumlah Pihak ketiga/ *Third parties total*	17.987.693.941.836	433.641.450.426	4.558.094.100	8.116.772.618	524.468.715.566	18.958.478.974.546
Jumlah/ *total*	17.990.164.024.675	433.641.450.426	4.558.094.100	8.116.772.618	524.468.715.566	18.960.949.057.385
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(82.820.378.148)	(98.372.458.792)	(3.067.510.714)	(6.185.863.714)	(336.862.246.846)	(527.308.458.214)
Jumlah bersih/ net	**17.907.343.646.527**	**335.268.991.634**	**1.490.583.386**	**1.930.908.904**	**187.606.468.720**	**18.433.640.599.171**

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sector

Konvensional / *Conventional*

2021

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian/ *Agriculture, labor and agriculture medium*	1.663.030.136.240	41.185.196.514	905.079.658	723.005.931	117.616.036.270	1.823.459.454.613
Pertambangan/ *Mining*	196.182.381	-	-	-	989.875.252	1.186.057.633
Industri pengolahan/ *Manufacturing*	20.998.217.859	789.628.600	-	98.650.000	13.140.006.166	35.026.502.625
Listrik, gas dan air/ *Electricity, gas and water*	54.546.598.215	-	-	-	-	54.546.598.215
Konstruksi/ *Construction*	860.447.105.336	-	-	47.500.000	28.461.615.213	888.956.220.549
Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurants and hotels*	774.579.553.708	21.760.900.923	34.632.929	702.679.520	111.801.231.163	908.878.998.243
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	11.989.201.946	166.381.778	-	-	3.192.693.981	15.348.277.705

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector *(continued)*

Konvensional (lanjutan)/ *Conventional (continued)*

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
			2021			
Jasa dunia usaha/ *Bussiness service*	2.578.907.792	93.663.646	-	-	2.007.834.667	4.680.406.105
Jasa sosial dan masyarakat/Social *service and public*	88.117.538.158	4.927.487.758	-	414.556.076	10.378.397.690	103.837.979.682
Lain-lain/ Other	9.664.633.175.553	185.158.218.567	7.463.424.147	10.791.500.682	162.391.389.875	10.030.437.708.824
Jumlah/ total	13.141.116.617.188	254.081.477.786	8.403.136.734	12.777.892.209	449.979.080.277	13.866.358.204.194
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(59.079.409.779)	(62.417.095.906)	(6.861.063.401)	(10.881.284.338)	(299.566.517.180)	(438.805.370.604)
Jumlah - bersih/ *Total - net*	**13.082.037.207.409**	**191.664.381.880**	**1.542.073.333**	**1.896.607.871**	**150.412.563.097**	**13.427.552.833.591**

Syariah / *Sharia*

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
			2021			
Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian/ *Agriculture, labor and agriculture medium*	63.246.860.678	321.500.645	169.352.952	-	39.171.436.711	102.909.150.986
Pertambangan/ *Mining*	-	-	-	-	-	-
Industri pengolahan/ *Manufacturing*	2.897.223.753	0	-	-	34.391.065	2.931.614.818
Listrik, gas dan air/ *Electricity, gas and water*	187.499.998	-	-	-	-	187.499.998
Konstruksi/ *Construction*	74.469.009.772	-	-	-	1.692.419.282	76.161.429.054
Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurants and hotels*	47.598.180.707	718.142.253	90.482.309	-	9.282.097.036	57.688.902.305
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	584.778.737	-	-	-	550.036.526	1.134.815.263
Jasa dunia usaha/ *Bussiness service*	25.101.563.996	77.397.279	-	225.762.208	1.396.771.008	26.801.494.491
Jasa sosial dan masyarakat/Social *service and public*	10.326.383.353	1.123.339.040	0	-	547.713.048	11.997.435.441
Lain-lain/ Other	4.649.609.019.456	81.567.267.999	1.781.736.828	426.589.957	5.358.840.340	4.738.743.454.579
Jumlah/ total	4.874.020.520.450	83.807.647.216	2.041.572.089	652.352.165	58.033.705.016	5.018.555.796.935

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector *(continued)*

Syariah (lanjutan)/ *Sharia (continued)*

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
	2021					
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(8.013.409.848)	(1.175.426.060)	(1.421.066.389)	(319.134.971)	(46.875.454.447)	(57.804.491.715)
Jumlah - bersih/ *Total - net*	**4.866.007.110.602**	**82.632.221.156**	**620.505.700**	**333.217.194**	**11.158.250.569**	**4.960.751.305.220**

Konvensional dan syariah / *Conventional and Sharia*

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
	2021					
Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian/ *Agriculture, labor and agriculture medium*	1.726.276.996.918	41.506.697.159	1.074.432.610	723.005.931	156.787.472.981	1.926.368.605.599
Pertambangan/ *Mining*	196.182.381	-	-	-	989.875.252	1.186.057.633
Industri pengolahan/ *Manufacturing*	23.895.441.612	789.628.600	-	98.650.000	13.174.397.231	37.958.117.443
Listrik, gas dan air/ *Electricity, gas and water*	54.734.098.213	-	-	-	-	54.734.098.213
Konstruksi/ *Construction*	934.916.115.108	-	-	47.500.000	30.154.034.495	965.117.649.603
Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurants and hotels*	822.177.734.415	22.479.043.176	125.115.238	702.679.520	121.083.328.199	966.567.900.548
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi/*Transportation, warehousing and communication*	12.573.980.683	166.381.778	-	-	3.742.730.507	16.483.092.968
Jasa dunia usaha/ *Bussiness service*	27.680.471.788	171.060.925	-	225.762.208	3.404.605.675	31.481.900.596
Jasa sosial dan masyarakat/Social *service and public*	98.443.921.511	6.050.826.798	-	414.556.076	10.926.110.738	115.835.415.123
Lain-lain/ Other	14.314.242.195.009	266.725.486.566	9.245.160.975	11.218.090.639	167.750.230.215	14.769.181.163.403
Jumlah/ total	18.015.137.137.638	337.889.125.002	10.444.708.823	13.430.244.374	508.012.785.293	18.884.914.001.129
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(67.092.819.627)	(63.592.521.966)	(8.282.129.790)	(11.200.419.309)	(346.441.971.627)	(496.609.862.319)
Jumlah - bersih/ *Total - net*	**17.948.044.318.011**	**274.296.603.036**	**2.162.579.033**	**2.229.825.065**	**161.570.813.666**	**18.388.304.138.811**

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector *(continued)*

Konvensional / *Conventional*

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
			2020			
Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian/ *Agriculture, labor and agriculture medium*	1.524.723.633.751	75.824.879.014	695.335.588	904.888.397	130.893.750.706	1.733.042.487.456
Pertambangan/ *Mining*	1.593.133.791				1.217.564.662	2.810.698.453
Industri pengolahan/ *Manufacturing*	23.747.560.122	1.858.579.616	0	69.948.338	12.697.041.780	38.373.129.856
Listrik, gas dan air/ *Electricity, gas and water*	69.167.442.152		-	-	0	69.167.442.152
Konstruksi/ *Construction*	817.145.197.078	650.607.499	-	-	30.890.651.719	848.686.456.296
Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurants and hotels*	757.600.842.020	39.678.714.016	226.361.199	1.162.742.180	120.750.736.945	919.419.396.360
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	13.281.639.708	2.326.883.985	-	-	2.310.068.605	17.918.592.298
Jasa dunia usaha/ *Bussiness service*	3.730.473.614	124.999.994	-	17.427.059	1.818.468.181	5.691.368.848
Jasa sosial dan masyarakat/Social *service and public*	87.357.498.801	6.410.820.349		5.416.663	11.143.170.875	104.916.906.688
Lain-lain/ Other	12.053.603.086.298	269.632.249.545	2.389.697.350	5.076.436.602	152.022.349.305	12.482.723.819.100
Jumlah/ total	15.351.950.507.335	396.507.734.018	3.311.394.137	7.236.859.239	463.743.802.778	16.222.750.297.507
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(81.157.580.546)	(97.839.498.182)	(2.644.433.018)	(5.774.681.461)	(284.822.700.171)	(472.238.893.378)
Jumlah - bersih/ *Total - net*	**15.270.792.926.789**	**298.668.235.836**	**666.961.119**	**1.462.177.778**	**178.921.102.607**	**15.750.511.404.128**

Syariah / *Sharia*

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
			2020			
Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian/ *Agriculture, labor and agriculture medium*	43.663.291.191	1.452.953.985	23.436.286	-	41.724.861.118	86.864.542.580
Pertambangan/ *Mining*				-		-
Industri pengolahan/ *Manufacturing*	2.018.460.948			-	35.057.732	2.053.518.680
Listrik, gas dan air/ *Electricity, gas and water*	50.000.000					50.000.000

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector *(continued)*

Syariah (lanjutan) / *Sharia (continued)*

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
	2020					
Konstruksi/ *Construction*	73.335.960.596				1.694.135.948	75.030.096.544
Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurants and hotels*	39.671.327.340	681.200.149	72.608.258	88.277.643	9.662.389.032	50.175.802.422
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi/ *Transportation, warehousing and communication*	672.821.117	-	-	-	550.036.526	1.222.857.643
Jasa dunia usaha/ *Bussiness service*	4.638.104.765	114.002.177			1.405.818.865	6.157.925.807
Jasa sosial dan masyarakat/Social *service and public*	9.635.787.947				552.393.594	10.188.181.541
Lain-lain/ Other	2.464.527.763.436	34.885.560.097	1.150.655.419	791.635.736	5.100.219.973	2.506.455.834.661
Jumlah/ total	2.638.213.517.340	37.133.716.408	1.246.699.963	879.913.379	60.724.912.788	2.738.198.759.878
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(1.662.797.602)	(532.960.610)	(423.077.696)	(411.182.253)	(52.039.546.675)	(55.069.564.836)
Jumlah - bersih/ *Total - net*	**2.636.550.719.738**	**36.600.755.798**	**823.622.267**	**468.731.126**	**8.685.366.113**	**2.683.129.195.042**

Konvensional dan syariah / *Conventional and Sharia*

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
	2020					
Pertanian, perburuhan dan sarana pertanian/ *Agriculture, labor and agriculture medium*	1.568.386.924.942	77.277.832.999	718.771.874	904.888.397	172.618.611.824	1.819.907.030.036
Pertambangan/ *Mining*	1.593.133.791	-	-	-	1.217.564.662	2.810.698.453
Industri pengolahan/ *Manufacturing*	25.766.021.070	1.858.579.616	-	69.948.338	12.732.099.512	40.426.648.536
Listrik, gas dan air/ *Electricity, gas and water*	69.217.442.152	-	-	-	-	69.217.442.152
Konstruksi/ *Construction*	890.481.157.674	650.607.499	-	-	32.584.787.667	923.716.552.840
Perdagangan, restoran dan hotel/ *Trading, restaurants and hotels*	797.272.169.360	40.359.914.165	298.969.457	1.251.019.823	130.413.125.977	969.595.198.782
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi/Transportati *warehousing and communication*	13.954.460.825	2.326.883.985	-	-	2.860.105.131	19.141.449.941
Jasa dunia usaha/ *Bussiness service*	8.368.578.379	239.002.171	-	17.427.059	3.224.287.046	11.849.294.655

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector *(continued)*

Konvensional dan syariah (lanjutan)/ *Conventional and Sharia (continued)*

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
	2020					
Jasa sosial dan masyarakat/Social *service and public*	96.993.286.748	6.410.820.349	-	5.416.663	11.695.564.469	115.105.088.229
Lain-lain/ Other	14.518.130.849.734	304.517.809.642	3.540.352.769	5.868.072.338	157.122.569.278	14.989.179.653.761
Jumlah/ total	17.990.164.024.675	433.641.450.426	4.558.094.100	8.116.772.618	524.468.715.566	18.960.949.057.385
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(82.820.378.148)	(98.372.458.792)	(3.067.510.714)	(6.185.863.714)	(336.862.246.846)	(527.308.458.214)
Jumlah - bersih/ *Total - net*	**17.907.343.646.527**	**335.268.991.634**	**1.490.583.386**	**1.930.908.904**	**187.606.468.720**	**18.433.640.599.171**

c. Berdasarkan jatuh tempo

c. Based on maturity

	2021	**2020**	
Jangka waktu			*Term*
Kurang s/d 1 tahun	1.417.615.566.786	1.286.409.448.247	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	1.353.206.880.585	1.253.427.411.989	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	3.642.837.133.346	3.803.597.456.144	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	12.471.254.420.412	12.617.514.741.005	*More than 5 years*
Jumlah	18.884.914.001.129	18.960.949.057.385	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(496.609.862.319)	(527.308.458.214)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.388.304.138.811**	**18.433.640.599.171**	*Total - net*

d. Berdasarkan jangka waktu perjanjian kredit

d. Based on term of credit agreements

	2021	**2020**	
Jangka waktu			*Term*
Kurang s/d 1 tahun	226.697.486.479	235.611.832.538	*Less than 1 year*
1 tahun s.d 2 tahun	163.438.629.424	144.168.755.247	*1-2 years*
2 tahun s.d 5 tahun	3.129.058.825.495	3.177.644.658.397	*2-5 years*
Lebih dari 5 tahun	15.365.719.059.731	15.403.523.811.203	*More than 5 years*
Jumlah	18.884.914.001.129	18.960.949.057.385	*Total*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(496.609.862.319)	(527.308.458.214)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.388.304.138.811**	**18.433.640.599.171**	*Total - net*

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

e. Berdasarkan pihak

e. Based on parties

	2021	2020	
Pihak berelasi	902.461.763	2.470.082.839	*Related parties*
Pihak ketiga	18.884.011.539.366	18.958.478.974.546	*Third parties*
Jumlah	18.884.914.001.129	18.960.949.057.385	*Amount to*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(496.609.862.319)	(527.308.458.214)	*Allowance for impairment losses*
Jumlah - bersih	**18.388.304.138.811**	**18.433.640.599.171**	*Total - net*

f. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

f. Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019

POJK No.11/POJK.03/2020, tanggal 13 Maret 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur mikro, kecil dan menengah, yang meliputi: a. kebijakan penetapan kualitas aset; dan b. kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan.

POJK No. 11 / POJK.03.2020, dated 13 March 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019. Banks can implement policies that support economic growth stimuli for debtors affected by the spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) including micro debtors, small and medium enterprises, which include: a. asset quality determination policy; and b. credit and financing restructuring policies.

Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-7/D.03/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 dalam Kondisi Pandemi Covid-19. Bank menerapkan panduan perlakuan akuntansi terkait PSAK 71 - Instrumen Keuangan dan PSAK 68 - Pengukuran Nilai Wajar sebagai berikut:

Financial Services Authority Letter Number S-7/D.03/2020 dated April 14, 2020 regarding the Application of PSAK 71 and PSAK 68 in the Condition of the Covid-19 Pandemic. The Bank applies accounting treatment guidelines related to PSAK 71 - Financial Instruments and PSAK 68 - Fair Value Measurement as follows:

Penerapan Stimulus dan PSAK 71

Application of Stimulus and PSAK 71

Mengacu pada POJK No.11/POJK.03/2020 serta panduan (*guideline*) Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) pada tanggal 2 April 2020 tentang Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Penerapan PSAK 8 - Peristiwa setelah Periode Pelaporan dan PSAK 71 - Instrumen Keuangan, dapat disampaikan agar Bank:

Referring to POJK No.11/POJK.03/2020 and the guideline of the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) on April 2, 2020 regarding the Impact of the Covid-19 Pandemic on the Implementation of PSAK 8 - Events after the Reporting Period and PSAK 71 - Financial Instruments, can be submitted so that the Bank:

a. Mematuhi dan melaksanakan POJK No.11/POJK.03/2020 dan secara proaktif mengidentifikasi debitur-debitur yang selama ini berkinerja baik namun menurun kinerjanya karena terdampak Covid-19.

a. Complying with and implementing POJK No.11/POJK.03/2020 and proactively identifying debtors who have been performing well but whose performance has decreased due to the impact of Covid-19.

b. Menerapkan skema restrukturisasi mengacu pada hasil asesmen yang akurat disesuaikan dengan profil debitur dengan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan hanya diberikan pada debitur-debitur yang benar-benar terdampak Covid-19.

b. *Implementing a restructuring scheme refers to accurate assessment results adjusted to the debtor profile with a maximum period of 1 (one) year and is only given to debtors who are really affected by Covid-19.*

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

f. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (lanjutan)

c. Menggolongkan debitur-debitur yang mendapatkan skema retrukturisasi dalam ***Stage-1*** dan tidak diperlukan tambahan CKPN.

d. Melakukan identifikasi dan *monitoring* secara berkelanjutan serta berjaga-jaga untuk tetap melakukan pembentukan CKPN apabila debitur-debitur yang telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi tersebut berkinerja baik pada awalnya, diperkirakan menurun karena terdampak Covid-19, dan tidak dapat pulih pasca restrukturisasi/dampak Covid-19 berakhir.

Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri Nomor 042/KEPDIR/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 026/KEPDIR/2020 Tentang Kebijakan Kredit Atau Pembiayaan Terkait Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 tanggal 30 Juni 2021. Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri Nomor 101/KEPDIR/2020 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 026/KEPDIR/2020 tentang Kebijakan Kredit atau Pembiayaan Terkait Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 tanggal 29 Desember 2020. Surat Keputusan Direksi Nomor 026/KEPDIR/2020 tentang Kebijakan Kredit atau Pembiayaan Terkait Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 tanggal 7 April 2020.

Jumlah kredit yang diberikan yang telah direstrukturisasi Bank akibat Covid -19 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan POJK No. 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 realisasi restrukturisasi kredit terkait covid 19 sebanyak 2.444 debitur dan 1.694 debitur dengan plafond / baki debet Rp1.138.025.055.806 dan Rp863.530.735.968. Total penundaan sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp238.826.147.238 dan Rp116.876.433.070 dengan skeme perpanjangan jangka waktu, penundaan pokok, penundaan bunga, serta penundaan pokok dan bunga.

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

f. Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 *(continued)*

c. *Classify debtors who get a restructuring scheme in Stage-1 and no additional CKPN is required.*

d. *Carry out identification and monitoring on an ongoing basis and take precautions to continue to establish CKPN if the debtors who have received the restructuring facility perform well at first, are expected to decline due to the impact of Covid-19, and cannot recover after the restructuring/impact of Covid-19 ends.*

Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Number 042/KEPDIR/2021 concerning the Second Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 026/KEPDIR/2020 concerning Credit or Financing Policy Regarding the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 dated June 30, 2021. Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Number 101/KEPDIR/2020 concerning Amendment to the Decree of the Board of Directors Number 026/KEPDIR/2020 concerning Credit or Financing Policy Regarding the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 dated December 29, 2020. Decree of the Board of Directors Number 026/KEPDIR/2020 concerning Credit or Financing Policy Regarding the Impact of the Spread Coronavirus Disease 2019 April 7, 2020.

The number of loans that have been restructured by the Bank due to Covid-19 based on OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 dated March 13, 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 and POJK No. 48/POJK.03/2020 dated December 1, 2020 concerning Amendments to OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019, until December 31, 2021 and 2020, the realization of credit restructuring related to covid 19 was 2,444 debtors and 1,694 debtors with a debit limit/ balance of Rp. 1,138,025,055,806 and Rp.863,530,735,968. The total delays until December 31, 2021 and 2020 are Rp. 238,826,147,238 and Rp. 116.876,433,070 with the scheme of extension of time period, deferment of principal, deferral of interest, as well as deferral of principal and interest.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

f. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (lanjutan)

Pembayaran atau setoran pokok kredit dari debitur per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.485.736.151 atau 1.492 debitur dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.002.023.411 atau 88 debitur.

Adapun mengenai rincian realisasi kredit direstrukturisasi per 31 Desember 2021 terkait Covid-19, sebagai berikut:

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

f. Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 *(continued)*

Principal payments or deposits from debtors as of December 31, 2021 amounted to Rp. 38,485,736,151 or 1,492 debtors and as of December 31, 2020, of Rp. 35,0002,023,411 or 88 debtors.

As for the details of the restructured credit realization as of December 31, 2021 related to Covid-19, as follows:

1). Total Debitur Terdampak Covid-19 / ***Total Debtors Affected by Covid-19***

2021

Segmen	Jumlah debitur	Baki Debet (Rp)	Penundaan Pokok (Rp)	Penundaan Bunga (Rp)	Total Penundaan Pokok & Bunga (Rp)
Korporasi / *Corporation*	8	1.227.172.283.353	17.500.000.000	26.258.877.968	43.758.877.968
Menengah / *Intermediate*	344	190.061.393.173	9.129.129.999	2.247.455.853	11.376.585.851
Kecil / *Small*	7.835	524.352.172.148	233.879.921.539	58.487.421.993	292.367.343.532
Konsumer / *Consumer*	1.498	181.913.433.145	6.980.026.970	1.742.990.021	8.723.016.991
Total	**9.685**	**2.123.499.281.820**	**267.489.078.508**	**88.736.745.835**	**356.225.824.343**

2). Realisasi Restruk Covid - 19 / ***Realization of Covid-19 Restrictions***

2021

Segmen	Jumlah debitur	Baki Debet (Rp)	Penundaan Pokok (Rp)	Penundaan Bunga (Rp)	Total Penundaan Pokok & Bunga (Rp)
Korporasi / *Corporation*	7	745.392.510.925	72.896.351.251	8.166.211.269	81.062.562.520
Menengah / *Intermediate*	105	82.240.535.119	5.049.790.838	960.068.138	6.009.858.976
Kecil / *Small*	1.750	236.151.721.331	101.100.626.533	29.949.175.917	131.049.802.450
Konsumer / *Consumer*	582	74.240.288.431	13.886.045.657	6.817.877.634	20.703.923.292
Total	**2.444**	**1.138.025.055.806**	**192.932.814.279**	**45.893.332.959**	**238.826.147.238**

3). Rincian Realisasi Restruk covid-19 / ***Details of the Realization of the Covid-19 Restruct***

2021

No. / *Num.*	Jenis Restrukturisasi / *Types of Restructuring*	Jumlah Debitur / *Number of Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / *Debit Tray (in Rupiah)*	Total Penundaan / *Total Delays*
1.	*Grace Period:*			
	a. penundaan pokok / *principal delay*	956	237.829.000.954	100.127.220.303
	b. penundaan bunga / *postponement of interest*	54	136.794.898.637	8.639.754.742
	c. penundaan pokok dan bunga / *postponement of principal and interest*	781	627.378.521.344	130.059.172.193
2.	Penurunan suku bunga / *Interest rate reduction*	4	9.740.000.000	-
3.	Perpanjangan jangka waktu/*Extension of time period*	649	126.282.634.870	-
4.	Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest arrears*	-	-	-
5.	Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest arrears*	-	-	-
6.	Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan / *Additional credit/financing facilities*	-	-	-
7.	Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara / *Conversion of credit/financing into Temporary Equity Participation*	-	-	-
	Total	**2.444**	**1.138.025.055.806**	**238.826.147.238**

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

8. *LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING* *(continued)*

f. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (lanjutan)

f. *Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019* *(continued)*

4). Saldo Realisasi Debitur Terdampak Covid-19 / *Actual Balance of Debtors Affected by Covid-19*

2021

Segmen	Jumlah debitur	Baki Debet (Rp)	Penundaan Pokok (Rp)	Penundaan Bunga (Rp)	Total Penundaan Pokok & Bunga (Rp)
Korporasi / *Corporation*	5	509.731.146.042	72.324.167.445	8.149.519.449	80.473.686.894
Menengah / *Intermediate*	65	44.017.119.582	4.520.839.710	655.455.668	5.176.295.378
Kecil / *Small*	1.101	126.505.584.027	86.404.668.387	23.931.948.209	110.336.616.596
Konsumer / *Consumer*	321	37.107.101.955	10.890.257.381	3.866.979.525	14.757.236.906
Total	**1.492**	**717.360.951.606**	**174.139.932.923**	**36.603.902.851**	**210.743.835.775**

5). Rincian Saldo Realisasi Debitur Terdampak Covid-19 / *Details of the Realized Balance of Debtors Affected by Covid-19*

2021

No. / *Num.*	Jenis Restrukturisasi / *Types of Restructuring*	Jumlah Debitur / *Number of Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / *Debit Tray (in Rupiah)*	Total Penundaan / *Total Delays*
1.	*Grace Period:*			
	a. penundaan pokok / *principal delay*	708	191.028.728.704	93.418.502.155
	b. penundaan bunga / *postponement of interest*	39	134.562.290.842	8.341.433.580
	c. penundaan pokok dan bunga / *postponement of principal and interest*	547	343.866.096.507	108.983.900.039
2.	Penurunan suku bunga / *Interest rate reduction*	3	3.968.856.777	-
3.	Perpanjangan jangka waktu/*Extension of time period*	195	43.934.978.777	-
4.	Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest arrears*	-	-	-
5.	Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest arrears*	-	-	-
6.	Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan / *Additional credit/financing facilities*	-	-	-
7.	Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara / *Conversion of credit/financing into Temporary Equity Participation*	-	-	-
	Total	**1.492**	**717.360.951.606**	**210.743.835.775**

6). Rincian Kumulatif Realisasi Debitur Restrukturisasi Terdampak Covid-19 berdasarkan wilayah / *Details of Cumulative Realization of Covid-19 Affected Restructuring Debtors by region*

2021

Jenis / *Type*	Wilayah Riau / *Riau Region*		Wilayah Kepri / *Kepri region*		Total	
	Jumlah Debitur / *Number of Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / *Debit Tray (in Rupiah)*	Jumlah Debitur / *Number of Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / *Debit Tray (in Rupiah)*	Jumlah Debitur / *Number of Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / *Debit Tray (in Rupiah)*
Korporasi / *Corporation*	5	509.731.146.042	-	-	5	509.731.146.042
Menengah / *Intermediate*	38	25.129.964.647	27	18.887.154.935	65	44.017.119.582,00
Kecil / *Small*	746	82.228.167.340	355	44.277.416.687	1.101	126.505.584.027
Konsumer / *Consumer*	139	13.930.604.046	182	23.176.497.909	321	37.107.101.955
Total	**928**	**631.019.882.075**	**564**	**86.341.069.531**	**1.492**	**717.360.951.606**

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

f. Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (lanjutan)

f. Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 *(continued)*

1). Rincian Realisasi Restrukturisasi / *Restructuring Realization Details*

2020

No. / *Num.*	Jenis Restrukturisasi / *Types of Restructuring*	Jumlah Debitur / *Number of Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / *Debit Tray (in Rupiah)*	Total Penundaan / *Total Delays*
1.	*Grace Period:*			
	a. penundaan pokok / *principal delay*	925	236.646.220.975	10.807.781.110
	b. penundaan bunga / *postponement of interest*	44	7.334.791.121	168.264.028
	c. penundaan pokok dan bunga / *postponement of principal and interest*	650	608.606.790.471	105.900.387.932
2.	Penurunan suku bunga / *Interest rate reduction*	-	-	-
3.	Perpanjangan jangka waktu/*Extension of time period*	75	10.942.933.401	-
4.	Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest arrears*	-	-	-
5.	Pengurangan tunggakan bunga / *Reduction of interest arrears*	-	-	-
6.	Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan / *Additional credit/financing facilities*	-	-	-
7.	Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara / *Conversion of credit/financing into Temporary Equity Participation*	-	-	-
	Total	**1.694**	**863.530.735.968**	**116.876.433.070**

2). Rincian Kumulatif Realisasi Debitur Restrukturisasi Terdampak Covid-19 berdasarkan wilayah / *Details of Cumulative Realization of Covid-19 Affected Restructuring Debtors by region*

2020

Jenis / *Type*	Wilayah Riau / *Riau Region*		Wilayah Kepri / *Kepri region*		Total	
	Jumlah Debitur / *Number of Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / *Debit Tray (in Rupiah)*	Jumlah Debitur / *Number of Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / *Debit Tray (in Rupiah)*	Jumlah Debitur / *Number of Debtors*	Baki Debet (dalam Rupiah) / *Debit Tray (in Rupiah)*
Korporasi / *Corporation*	5	600.000.000.000	-	-	5	600.000.000.000
Menengah / *Intermediate*	38	35.936.766.058	22	16.250.809.930	60	52.187.575.988
Kecil / *Small*	877	113.025.184.503	379	49.891.978.587	1.256	162.917.163.090
Konsumer / *Consumer*	161	20.242.712.622	212	28.183.284.268	373	48.425.996.890
Total	**1.081**	**769.204.663.183**	**613**	**94.326.072.785**	**1.694**	**863.530.735.968**

g. Berdasarkan kolektibilitas

Klasifikasi risiko berdasarkan kolektibilitas kredit terakhir mengacu kepada kriteria Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yaitu:

a. prosfek usaha;
b. kinerja *(performace)* debitur dan
c. kemampuan membayar.

g. Based on colectibility

Risk classification based on credit collectibility last refers to the criteria of the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation (OJK) Number 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 Concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. Credit quality is determined based on assessment factors, namely:

a. business prospect;
b. debtor performance and
c. ability to pay.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

g. Berdasarkan kolektibilitas (lanjutan)

Komponen dalam faktor penilaian tersebut mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai kualitas aset Bank.

Penilaian kualitas Aset Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan POJK No.19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Klasifikasi risiko dapat dirinci sebagai berikut:

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

g. Based on colectibility *(continued)*

The component in the valuation factor refers to the laws and regulations regarding the quality of the Bank's assets.

Assessment of the quality of Assets of Commercial Banks conducting business activities based on sharia principles, based on POJK No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 concerning Assets Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as amended by POJK No.19/POJK.03/2018 dated September 20, 2018 concerning Amendment to Financial Services Authority Regulation No.16/POJK.03/2014 concerning Assessment of Asset Quality of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Risks clasification detailed as follows:

		2021		
Klasifikasi risiko / *Risk Clasification*	Persentase / *Percentage*	Baki Debet/ *Debit Balance*	CKPN / *Allowance for Impairment losses*	Jumlah-Bersih/*Total-Net*
Lancar/*Current*	97,61%	18.015.137.137.638	(67.092.819.627)	17.948.044.318.011
Perhatian Khusus/ *Special Mention*	1,49%	337.889.125.002	(63.592.521.966)	274.296.603.036
Kurang Lancar/ *Substandar*	0,01%	10.444.708.823	(8.282.129.790)	2.162.579.033
Diragukan *Doubtfull*	0,01%	13.430.244.374	(11.200.419.309)	2.229.825.065
Macet/ Loss	0,88%	508.012.785.293	(346.441.971.627)	161.570.813.666
Jumlah/ *Total*	**100,00%**	**18.884.914.001.129**	**(496.609.862.319)**	**18.388.304.138.811**

		2020		
Klasifikasi risiko / *Risk Clasification*	Persentase / *Percentage*	Baki Debet/ *Debit Balance*	CKPN / *Allowance for Impairment losses*	Jumlah-Bersih/*Total-Net*
Lancar/*Current*	97,14%	17.990.164.024.675	(82.820.378.148)	17.907.343.646.527
Perhatian Khusus/ *Special Mention*	1,82%	433.641.450.426	(98.372.458.792)	335.268.991.634
Kurang Lancar/ *Substandar*	0,01%	4.558.094.100	(3.067.510.714)	1.490.583.386
Diragukan *Doubtfull*	0,01%	8.116.772.618	(6.185.863.714)	1.930.908.904
Macet/ Loss	1,02%	524.468.715.566	(336.862.246.846)	187.606.468.720
Jumlah/ *Total*	**100,00%**	**18.960.949.057.385**	**(527.308.458.214)**	**18.433.640.599.171**

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

h. Kisaran suku bunga

1). Tingkat suku bunga Kredit Konsumer

Tingkat suku bunga Kredit Aneka Guna (KAG) diatur berdasarkan Surat Edaran No.035/SE/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Aneka Guna (KAG) PT Bank Riau Kepri sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Edaran No.023/SE/2019 tanggal 09 September 2019 tentang Perubahan Keempat Surat Edaran No.035/SE/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Aneka Guna (KAG) PT Bank Riau Kepri.

Tingkat suku bunga Pemberian kredit pemilikan rumah berdasarkan Surat Edaran No.49/SE/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Riau Kepri sebagaimana diubah dengan Surat Edaran No.026/SE/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Perubahan Pertama Surat Edaran No.49/SE/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Riau Kepri. Surat Edaran ini menindaklanjuti pemberlakuan Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri No.48/KEPDIR/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Konsumer.

Tingkat suku bunga Surat Edaran No.50/SE/2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) PT Bank Riau Kepri. Surat Edaran ini menindaklanjuti pemberlakuan Surat Keputusan Direksi PT Bank Riau Kepri No.48/KEPDIR/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Konsumer.

Tingkat suku bunga Pemberian Kredit Pegawai PT Bank Riau Kepri Surat Edaran No.030/SE/2019, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Pegawai PT Bank Riau Kepri. Surat Edaran ini menindaklanjuti pemberlakuan dan penetapan Keputusan Direksi No.48/KEPDIR/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Konsumer.

***8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING** (continued)*

h. Range of loan interest rates

1). The Interest Rate of Consumer Credit

The interest rates for Assorted Credit (KAG) are regulated based on Circular Letter No.035/SE/2017 dated August 22, 2017 concerning Technical Guidelines for the Distribution of Miscellaneous Use Loans (KAG) of PT Bank Riau Kepri as last amended by Circular No.023/SE/2019 dated September 9, 2019 concerning the Fourth Amendment of Circular Letter No.035/SE/2017 dated August 22, 2017 concerning Technical Guidelines for the Distribution of Miscellaneous Credit (KAG) of PT Bank Riau Kepri.

The interest rate for housing loans based on Circular Letter No.49/SE/2016 dated December 16, 2016 concerning Technical Guidelines for Distribution of PT Bank Riau Kepri Home Loans (KPR) as amended by Circular Letter No.026/SE/2019 dated September 24, 2019 concerning the First Amendment to Circular Letter No.49/SE/2016 dated December 16, 2016 concerning Technical Guidelines for the Distribution of Housing Loans (KPR) of PT Bank Riau Kepri. This Circular follows up on the implementation of the Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri No.48/KEPDIR/ 2016 dated August 8, 2016 concerning the Consumer Segment Credit Book (BPP).

The interest rate of Board of Directors, No.50/SE/2016, dated December 16th, 2016 about Technical Guidelines For Motorcycle Loan (KKB) PT Bank Riau Kepri. Circulation letter is to follow up the implementation of Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri No.48/KEPDIR/2016 dated August 8th, 2016 about Company Book Instruction (BPP) Consumer Loan.

The interest rate of PT Bank Riau Kepri Employee Loans Employee Circular Letter No.030/SE/2019, dated October 14, 2019 concerning Technical Instructions for PT Bank Riau Kepri Employee Loans. This Circular follows up on the enactment and determination of the Board of Directors Decree No.48/KEPDIR/2016 dated August 8, 2016 concerning the Corporate Segment Credit Book (BPP) for Consumer Segments.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

h. Kisaran suku bunga (lanjutan)

1). Tingkat suku bunga Kredit Konsumer (lanjutan)

Tingkat suku bunga Kredit Aneka Guna (KAG) diatur berdasarkan Surat Edaran No.035/SE/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Aneka Guna (KAG) PT Bank Riau Kepri sebagaimana diubah dengan Surat Edaran No.023/SE/2019 tanggal 09 September 2019 tentang Perubahan Keempat Surat Edaran No.035/SE/2017 tanggal 22 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Aneka Guna (KAG) PT Bank Riau Kepri.

Perubahan terakhir berdasarkan Surat Edaran No.001/SE/2020, Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Aneka Guna Bank Riau Kepri, tanggal 13 Januari 2020.

2). Tingkat suku bunga Kredit Komersial:

Tingkat suku bunga Kredit Komersial ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi No.19/SE/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Suku Bunga, Biaya-Biaya dan Pelunasan Kredit Segmen Komersial PT Bank Riau Kepri.

3). Tingkat suku bunga Kredit Segmen Mikro, Kecil & Menengah:

Tingkat suku bunga Kredit Segmen Mikro, Kecil & Menengah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi No.002/SE/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Kredit Sekmen, Mikro, Kecil dan Menengah PT. Bank Riau Kepri.

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

h. Range of loan interest rates *(continued)*

1). The Interest Rate of Consumer Credit (continued)

The interest rates for Assorted Credit (KAG) are regulated based on Circular Letter No.035/SE/2017 dated August 22, 2017 concerning Technical Guidelines for the Distribution of Miscellaneous Use Loans (KAG) of PT Bank Riau Kepri as amended by Circular No.023/SE/2019 dated September 9, 2019 concerning the Fourth Amendment of Circular Letter No.035/SE/2017 dated August 22, 2017 concerning Technical Guidelines for the Distribution of Miscellaneous Credit (KAG) of PT Bank Riau Kepri.

The latest changes are based on Circular No. 001 / SE / 2020, Regarding Technical Instructions for Miscellaneous Loan Distribution for Bank Riau Kepri, January 13, 2020.

2). The Interest rate of Commercial Credit:

The interest rate of Commercial Credit is determined based on Circular Letter No.9/SE/2017 dated May 9th, 2017 on Interest Rates, Expenses and Commercial Loan Segment Loan PT Bank Riau Kepri.

3). The Interest rate of micro, small and medium scale enterprises credit:

The interest rates for Micro, Small & Medium Segments are determined based on the Directors Circular Letter No.002/SE/2021 concerning Technical Guidelines for Implementing Loans for Segments, Micro, Small and Medium Enterprises of PT. Bank Riau Riau Kepri.

	2021	2020	
Kredit komersil	11% - 15%	11% - 15%	*Commercial credit*
Kredit mikro	5,5% - 20%	5,5% - 21%	*Micro credits*
Kredit konsumer	10,5% - 16,43%	10,5% - 16,43%	*Consumer credits*
Kredit sindikasi	5,80% - 11,25%	5,80% - 11,25%	*Syndication credit*

i. Kredit bermasalah berdasarkan jenis
Kolektibilitas 3, 4 dan 5

i. Non performing loans by type
Colectibility 3, 4 and 5

	2021		2020		
	Kredit bermasalah/ *Non performing loans*	CKPN/ *Allowance for impairment losses*	Kredit bermasalah/ *Non performing loans*	CKPN/ *Allowance for impairment losses*	
Modal kerja	183.026.606.572	(112.955.046.303)	191.572.271.303	(105.058.494.042)	*Working capital*
Investasi	163.013.531.595	(107.400.855.706)	179.743.691.537	(129.295.423.425)	*Invesment*
Konsumtif	185.847.600.323	(145.568.618.717)	165.827.619.444	(111.761.703.807)	*Consumer*
Jumlah	**531.887.738.490**	**(365.924.520.726)**	**537.143.582.284**	**(346.115.621.274)**	*Total*

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

i. Kredit bermasalah berdasarkan jenis (lanjutan)

Rasio kredit bermasalah kotor terhadap total kredit dan rasio kredit bermasalah bersih terhadap total kredit sebagai berikut:

	2021	2020	
Kredit bermasalah kotor	2,82%	2,83%	*Non performing loans gross*
Kredit bermasalah bersih	0,88%	1,01%	*Non performing loans netto*

Bank melakukan langkah-langkah untuk menekan jumlah kredit bermasalah dengan cara melakukan *monitoring* terhadap penyelesaian kredit bermasalah, melakukan pendekatan secara persuasif terhadap debitur yang bermasalah dan mempertahankan kualitas kredit yang tidak bermasalah agar tidak menjadi bermasalah dengan melakukan selektif dengan tingkat kehati-hatian dalam pemberian kredit baru.

j. Kredit yang direstrukturisasi

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam rangka penyelamatan kredit bermasalah, terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, dalam bentuk perpanjangan jangka waktu kredit, kapitalisasi tunggakan kedalam pokok, penurunan suku bunga dan kapitalisasi bunga.

Saldo kredit yang direstrukturisasi sebelum CKPN pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp1.152.747.129.741 dan Rp1.102.363.863.311 dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

i. Non performing loans by type *(continued)*

The ratio of gross non-performing loans to total loans and the ratio of net non-performing loans to total loans is as follows:

Bank carries out steps to repress the amount of credits with problems by means of monitoring the settlement for credits with problems, performing persuasive approarches to debtors with problems and maintaining quality credit with no problems in order not to become a problem by performing selection with high level of prudency in providing new credits.

j. The restructured loans

Restructured loans is attempt repairs to Bank in the process save problem credits, to the debtors has difficulties for fully their liabilities, with schemes as extension loan period, capitalization of default, interest rate reduction, capitalization of interest.

The restructured credit balances before CKPN as of December 31, 2021 and 2020 amounted to Rp1,152,747,129,741 and Rp1,102,363,863,311 with the following details:

By type and collectibility

2021

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Modal kerja/ *Working capital*						
Pihak berelasi/ *Related parties*	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ *Third parties*	95.250.769.596	9.780.022.274	181.481.862	627.633.418	6.509.770.970	112.349.678.120
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(2.874.952.562)	(1.140.949.561)	(152.334.898)	(265.595.505)	(4.941.255.693)	(9.375.088.219)
Sub.Jumlah/ Sub.*Total*	92.375.817.034	8.639.072.713	29.146.964	362.037.913	1.568.515.277	102.974.589.901

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

j. Kredit yang direstrukturisasi (lanjutan)

j. The restructured loans *(continued)*

2021

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Investasi/ Invesment						
Pihak berelasi/ *Related parties*	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ *Third parties*	985.547.311.232	9.075.476.377	143.745.168	124.819.893	5.579.649.431	1.000.471.002.101
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(15.783.875.500)	(501.409.236)	(77.113.806)	(5.260.622)	(4.045.107.667)	(20.412.766.831)
Sub.Jumlah/ Sub.*Total*	969.763.435.732	8.574.067.141	66.631.362	119.559.271	1.534.541.764	980.058.235.270
Konsumtif/ Consumer						
Pihak berelasi/ *Related parties*	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ *Third parties*	33.258.205.640	4.657.072.301	16.545.329	232.148.222	1.762.478.028	39.926.449.520
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(281.350.275)	(440.907.537)	(5.090.822)	(124.370.849)	(1.206.193.786)	(2.057.913.269)
Sub.Jumlah/ Sub.*Total*	32.976.855.365	4.216.164.764	11.454.507	107.777.373	556.284.242	37.868.536.251
Total Baki debet	1.114.056.286.468	23.512.570.952	341.772.359	984.601.533	13.851.898.429	1.152.747.129.741
Total CKPN	(18.940.178.337)	(2.083.266.334)	(234.539.526)	(270.856.127)	(10.192.557.146)	(31.845.768.319)
Jumlah/*Total-net*	**1.095.116.108.131**	**21.429.304.618**	**107.232.833**	**589.374.557**	**3.659.341.283**	**1.120.901.361.422**

2020

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
Modal kerja/ *Working capital*						
Pihak berelasi/ *Related parties*	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ *Third parties*	121.498.584.608	9.247.835.508	-	287.861.823	3.374.098.385	134.408.380.324
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(2.284.632.687)	(3.279.612.587)	-	(3.799.509)	(1.959.885.846)	(7.527.930.629)
Sub.Jumlah/ Sub.*Total*	119.213.951.921	5.968.222.921	-	284.062.314	1.414.212.539	126.880.449.695
Investasi/ Invesment						
Pihak berelasi/ *Related parties*	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ *Third parties*	864.335.289.837	10.736.599.679	-	-	2.652.137.926	877.724.027.442
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(17.621.465.930)	(3.433.725.057)	-	-	(2.045.653.808)	(23.100.844.795)
Sub.Jumlah/ Sub.*Total*	846.713.823.907	7.302.874.622	-	-	606.484.118	854.623.182.647

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

j. Kredit yang direstrukturisasi (lanjutan)

j. The restructured loans *(continued)*

Jenis / *Type*	Lancar / *Current*	DPK / *Special Mention*	KL / *Substandart*	Diragukan / *Doubtful*	Macet / *Loss*	Total / *Amount to*
			2020			
Konsumtif/ Consumer						
Pihak berelasi/ *Related parties*	-	-	-	-	-	-
Pihak ketiga/ *Third parties*	40.001.028.752	4.495.712.421	138.896.361	-	45.595.818.011	90.231.455.545
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for impairment losses*	(2.561.326.281)	(1.106.429.551)	(126.663.959)	-	(751.681.667)	(4.546.101.458)
Sub.Jumlah/ Sub.*Total*	37.439.702.471	3.389.282.870	12.232.402	-	44.844.136.344	85.685.354.087
Total Baki debet	1.025.834.903.197	24.480.147.608	138.896.361	287.861.823	51.622.054.322	1.102.363.863.311
Total CKPN	(22.467.424.898)	(7.819.767.195)	(126.663.959)	(3.799.509)	(4.757.221.321)	(35.174.876.882)
Jumlah/*Total-net*	**1.003.367.478.299**	**16.660.380.413**	**12.232.402**	**284.062.314**	**46.864.833.001**	**1.067.188.986.429**

k. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

k. Allowance for impairment losses

	2021	2020	
Saldo awal CKPN	527.308.458.214	488.448.253.601	*Beginning balance*
Koreksi CKPN atas Penerapan PSAK 71	-	175.130.291.692	*Correction of the Application of PSAK 71*
Beban CKPN	34.560.517.284	44.517.709.516	*CKPN expense*
Pemulihan CKPN	(65.259.113.179)	(180.787.796.596)	*Reserve recovery*
Saldo akhir CKPN	496.609.862.319	527.308.458.214	*Ending balance*
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)	649.174.946.859	705.425.163.218	*Asset allowance writen-off*
Kurang CKPN atas PPKA	152.565.084.541	178.116.705.004	*Disadvantages CKPN on PPKA*
Rasio CKPN atas PPKA	76%	75%	*CKPN to PPKA Ratio*

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan serta telah dihitung berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Management believes that the allowance for possible losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible loans and has been calculated based on Bank Indonesia regulations.

l. Kredit hapus buku

l. Write off loans

Pada tahun 2021 dan 2020 tidak terdapat kredit yang dihapus bukukan, saldo kredit hapus buku disajikan dalam laporan rekening administratif.

In 2021 and 2020 there were no written-off credits, write-off credit balances were presented in the administrative account statement.

	2021	2020	
Saldo kredit hapus buku	270.321.991.295	278.321.414.505	*Ending Balance*
Penerimaan kembali	7.999.423.210	6.406.101.597	*Receipt of credit*

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan

- Agunan kredit

  Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh perbankan.

- Kredit modal kerja dan investasi

  Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan barang-barang modalnya.

- Kredit kepada "Karyawan Bank Riau Kepri"

  Kredit yang diberikan kepada karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan, rumah dan keperluan lainnya yang dibebani bunga, jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dengan mempertimbangkan sisa masa kerja dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan dengan tingkat bunga kredit kepada karyawan berkisar sebesar 8%. Kredit kepada karyawan Bank berdasarkan SK Direksi No.108/KEPDIR/2011 tanggal 30 Desember 2011. SK Direksi tersebut telah mengalami perubahan yaitu SK Direksi PT Bank Riau Kepri No.108/KEPDIR/2013 tanggal 30 Oktober 2013 dan perubahan kedua berdasarkan SK Direksi No.10/KEPDIR/2016 tanggal 12 Februari 2016. Penerbitan Surat Keputusan Direksi No.48/KEPDIR/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Segmen Konsumer dan Surat Edaran.

  Terakhir kredit kepada Karyawan Bank Riau Kepri berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 030/SE/2019 tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Pegawai Bank Riau Kepri. Surat Edaran No.48/SE/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Pegawai Bank Riau Kepri tanggal 16 Desember 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- Kredit konsumsi

  Kredit konsumsi terdiri atas kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.

- Kredit program pemerintah dan kredit *chanelling*

  Kredit program Pemerintah yang disalurkan dengan sistem *chanelling.*

8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING *(continued)*

m. *Other significant information relating to loans*

- *Loan collateral*

  Loan using time deposit as collateral, bound collateral by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell and by other guarantees generally acceptable to the bank.

- *Working capital and investment loans*

  Working capital and investment loans given to debtor for working capital and capital assets required.

- *Employee Bank Riau Kepri loans*

  Loans granted to Bank employees constitute credit to purchase vehicles, houses and other necessities bearing interest, for a period of 1 (one) to 15 (fifteen) years taking into account the remaining working period and repaid through salary deductions every month at an interest rate of credit to employees is around 8%. Credit to Bank employees based on Directors Decree No.108 / KEPDIR / 2011 dated December 30, 2011. The Directors Decree has been amended, namely the Decree of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri No.108 / KEPDIR / 2013 dated 30 October 2013 and the second amendment based on the Decree of the Board of Directors No .10 / KEPDIR / 2016 dated 12 February 2016. Issuance of Directors Decree No.48 / KEPDIR / 2016 dated 8 August 2016 concerning Consumer Segment Credit Company Guidelines (BPP) and Circular Letters.

  Last credit to Bank Riau Kepri Employees based on Directors Circular Letter Number 030/SE/2019 dated October 14, 2019 Concerning Technical Instructions for Bank Riau Kepri Employee Loans. Circular Letter No. 48/SE/2016 concerning Technical Instructions for Bank Riau Kepri Employee Credit Distribution on December 16, 2016, are no longer valid.

- *Consumer loans*

  Consumer loans consists of house property loans, motor vehicles loans and other individual loans.

- *Government program loans and channelling loans*

  Government program loans has been channelled using chanelling system.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan)

- Kredit Sindikasi

Per 31 Desember 2021:	Plafond	Baki debet	*As of Desember 31, 2021:*
PT PLN (Persero) Tbk.	100.000.000.000	53.571.428.571	*PT PLN (Persero) Tbk.*
PT Perkebunan Nusantara V	300.000.000.000	201.729.524.033	PT Perkebunan Nusantara V
PT Jasamarga Manado Bitung	200.000.000.000	146.981.839.916	*PT Jasamarga Manado Bitung*
PT MNC Land Tbk	300.000.000.000	290.499.500.120	*PT MNC Land Tbk*
PT Pemalang Batang Tol Roac	225.000.000.000	221.456.250.000	*PT Pemalang Batang Tol Road*
PT Waskita Bumi Wira	150.000.000.000	146.932.636.165	*PT Waskita Bumi Wira*
PT Marga Trans Nusantara	300.000.000.000	281.959.654.947	*PT Marga Trans Nusantara*
PT JTD Jaya Pratama	197.636.071.468	18.375.248.050	*PT JTD Jaya Pratama*
Jumlah	**1.772.636.071.468**	**1.361.506.081.803**	*Total*

Per 31 Desember 2020:	Plafond	Baki debet	*As of Desember 31, 2020:*
PT PLN (Persero) Tbk.	100.000.000.000	67.857.142.857	*PT PLN (Persero) Tbk.*
PT Perkebunan Nusantara V	300.000.000.000	214.605.876.631	PT Perkebunan Nusantara V
PT Jasamarga Manado Bitung	200.000.000.000	113.197.751.520	*PT Jasamarga Manado Bitung*
PT MNC Land Tbk	300.000.000.000	291.999.500.120	*PT MNC Land Tbk*
PT Pemalang Batang Tol Roac	225.000.000.000	223.228.125.000	*PT Pemalang Batang Tol Road*
PT Waskita Bumi Wira	150.000.000.000	147.227.385.685	*PT Waskita Bumi Wira*
PT Marga Trans Nusantara	300.000.000.000	282.666.468.375	*PT Marga Trans Nusantara*
PT JTD Jaya Pratama	197.636.071.468	20.507.914.513	*PT JTD Jaya Pratama*
Jumlah	**1.772.636.071.468**	**1.361.290.164.701**	*Total*

- Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Menurut laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tangal 31 Desember 2021 dan 2020 yang disampaikan kepada Bank Indonesia tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan, baik pihak berelasi maupun pihak ketiga.

Peraturan OJK No.38/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, BMPK kepada pihak tidak terkait yaitu penyediaan dana kepada satu peminjam atau satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% dari Modal Inti (tier 1) Bank. BMPK kepada pihak terkait seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% dari Modal Bank.

a. Satu Peminjam selain Pihak Terkait; atau

b. Satu Kelompok Peminjam selain Pihak Terkait; ditetapkan paling tinggi 25% dari Modal Inti *(tier)* Bank.

***8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING** (continued)*

m. *Other significant information relating to loans (continued)*

- *Syndicated Loans*

- *Legal Linding Limit (BMPK) for Bank*

In Maximum Lending Limit Report (BMPK) on December 31st, 2021 and 2020 to Bank Indonesia there is no violation or collision of the allowed maximum lending limit, both to related party nor third party.

OJK Regulation No.38/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.03/2018 dated December 26, 2018 concerning Maximum Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks, BMPK to unrelated parties, namely the provision of funds to one borrower or one group of borrowers who are not related parties is set at a maximum of 25% from Core Capital (tier 1) of the Bank. BMPK to related parties the entire portfolio of funds to related parties with the Bank is set at a maximum of 10% of Bank Capital.

a. One Borrower other than Related Parties; or

b. One Borrower Group other than Related Parties; determined at a maximum of 25% of Tiered Capital of the Bank.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN, PIUTANG DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (lanjutan)

m. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan (lanjutan)

Saldo deposito nasabah Bank (DPK) yang diblokir dan digunakan sebagai jaminan pinjaman sebesar Rp12.868.700.000 dan Rp13.564.000.000 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

***8. LOANS, SHARIA RECEIVABLES AND FINANCING** (continued)*

m. *Other significant information relating to loans (continued)*

The balance of bank customers deposit (DPK) which blocked as the guarantee of lowance amounted to Rp12.868.700.000 and Rp13.564.000.000 as at December 31st, 2021 and 2020.

9. PENYERTAAN SAHAM

Akun ini merupakan penyertaan saham yang ditempatkan pada 3 (tiga) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan perusahaan daerah (Ventura). Penyertaan pada BPR dalam kondisi laba, sedangkan pada Perusahaan Ventura dalam kondisi rugi. Pada tahun 2021 Penyertaan kepada BPR Tanjung Balai Karimun diterima kembali. Persentase kepemilikan dan jumlah nominal penyertaan sebagai berikut:

9. INVESTMENT IN SHARES

This account represents investment in shares placed in 3 (three) Rural Banks (BPR) and regional companies (Ventura). Investments in BPR are in a profit condition, while in Venture Companies are in a loss condition. In 2021 the participation in Tanjung Balai Karimun BPR was accepted again. The percentage of ownership and the nominal amount of participation are as follows:

Keterangan/*Description*	Bagian penyertaan / *Share of investment*	Tanggal Penyertaan / *Date of investment*	Kualitas / *Quality*	Nominal Penyertaan 31/12/2021 / *Participation Amount 31/12/2021*	Nominal Penyertaan 31/12/2020 / *Participation Amount 31/12/2020*
BPR Gemilang/ Kateman	1,38%	21-Nov-07	Laba	200.000.000	200.000.000
PD BPR Rokan Hilir	0,91%	02-Oct-07	Laba	200.333.335	200.333.335
BPR Karimun	0,00%	18-Jun-03	Laba	-	100.000.000
PT Sarana Ventura	7,76%	30-May-07	Rugi	1.155.450.000	1.155.450.000
Jumlah / *Total*				**1.555.783.335**	**1.655.783.335**
CKPN/ *Allowance for impairment losses*				-	(100.000.000)
Jumlah bersih/ *Total net*				**1.555.783.335**	**1.555.783.335**

10. ASET TETAP

Berikut ini adalah aset tetap kepemilikan langsung yang dimiliki oleh Bank:

10. FIXED ASSETS

Following is the direct ownership of fixed assets by the bank:

	2021				
	Saldo Awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Increase*	Pengurangan/ *Decrease*	Reklasifikasi/ Penyesuaian *Reclasification/ Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Harga perolehan/ *Cost of Acquisition*					
Tanah/*Land*	88.385.416.600	-	-	-	88.385.416.600
Bangunan/*Building*	316.996.973.764	-	-	-	316.996.973.764
Mesin dan Peralatan Kantor/ *Machine and office equipment*	253.839.737.902	24.303.197.295	1.287.981.701	-	276.854.953.496
Kendaraan/ *Vehicle*	26.118.097.387	1.671.126.000	603.750.000	-	27.185.473.387
Sub. Jumlah/ *Sub.Total*	685.340.225.653	25.974.323.295	1.891.731.701	-	709.422.817.247

10. ASET TETAP (lanjutan) / ***10. FIXED ASSETS*** *(continued)*

	2021				
	Saldo Awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Increase*	Pengurangan/*Decrease*	Reklasifikasi/ Penyesuaian *Reclasification/ Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Aset dalam penyelesaian/ ***Construction in progress***					
Tanah dan Bangunan / *Land and Building*	955.505.600	-	-		955.505.600
Mesin dan Peralatan Kantor/ *Machine and office equipment*	10.896.426.298	3.068.328.978	3.293.443.490		10.671.311.786
Sub. Jumlah/ *Sub.Total*	**11.851.931.898**	**3.068.328.978**	**3.293.443.490**	**-**	**11.626.817.386**
Jumlah/ *Total*	**697.192.157.551**	**29.042.652.273**	**5.185.175.191**	**-**	**721.049.634.633**
Akumulasi Penyusutan/ ***Accumulated Depreciation***					
Bangunan / *Building*	86.445.756.385	15.742.219.403	-	-	102.187.975.788
Mesin dan Peralatan Kantor/ *Machine and office equipment*	171.613.348.080	33.554.522.542	325.827.810	-	204.842.042.813
Kendaraan/ *Vehicle*	13.967.990.379	3.123.378.163	3.535.159	-	17.087.833.383
Sub. Jumlah/ *Sub.Total*	**272.027.094.844**	**52.420.120.108**	**329.362.969**	**-**	**324.117.851.984**
Jumlah/ *Total*	**425.165.062.707**				**396.931.782.650**

	2020				
	Saldo Awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Increase*	Pengurangan/*Decrease*	Reklasifikasi/ Penyesuaian *Reclasification/ Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Harga perolehan/ ***Cost of Acquisition***					
Tanah/*Land*	88.385.416.600	-	-	-	88.385.416.600
Bangunan/*Building*	317.083.545.964	-	86.572.200	-	316.996.973.764
Mesin dan Peralatan Kantor/ *Machine and office equipment*	229.287.683.321	42.562.649.847	18.010.595.266	-	253.839.737.902
Kendaraan/ *Vehicle*	25.245.227.385	1.537.367.000	664.496.998		26.118.097.387
Sub. Jumlah/ *Sub.Total*	660.001.873.270	44.100.016.847	18.761.664.464	-	685.340.225.653

10. ASET TETAP (lanjutan) ***10. FIXED ASSETS*** *(continued)*

	2020				
	Saldo Awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Increase*	Pengurangan/*Decrease*	Reklasifikasi/ Penyesuaian *Reclasification/ Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*
Aset dalam penyelesaian/					
Construction in progress					
Tanah dan Bangunan / *Land and Building*	2.184.292.600	5.254.328.000	6.483.115.000	-	955.505.600
Mesin dan Peralatan Kantor/ *Machine and office equipment*	13.163.397.718	8.186.028.420	10.452.999.840	-	10.896.426.298
Sub. Jumlah/ *Sub.Total*	**15.347.690.318**	**13.440.356.420**	**16.936.114.840**	**-**	**11.851.931.898**
Jumlah/ *Total*	**675.349.563.588**	**57.540.373.267**	**35.697.779.304**	**-**	**697.192.157.551**
Akumulasi Penyusutan/					
Accumulated Depreciation					
Bangunan / *Building*	70.963.803.933	15.576.814.479	94.862.027	-	86.445.756.385
Mesin dan Peralatan Kantor/ *Machine and office equipment*	157.316.984.140	33.130.648.429	18.834.284.489	-	171.613.348.080
Kendaraan/ *Vehicle*	11.800.763.812	3.792.991.891	1.625.765.324	-	13.967.990.379
Sub. Jumlah/ *Sub.Total*	**240.081.551.885**	**52.500.454.799**	**20.554.911.840**	**-**	**272.027.094.844**
Jumlah/ *Total*	**435.268.011.703**				**425.165.062.707**

Aset tetap berupa gedung, kendaraan dan inventaris tertentu lainnya diasuransikan atas kemungkinan risiko kebakaran, kecelakaan dan risiko lain. Aset tetap tersebut diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp450.220.358.136 kepada Askrindo , PT Askrida, Bumiputera, Bumida, Tripakarta, Bumiputramuda, Jasindo, Parolamas dan Takaful. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari kebakaran dan gempa bumi.

Fixed assets in the form of buildings, vehicles and certain other inventories are insured against possible risks of fire, accident and other risks. The fixed assets are insured with a sum insured of Rp450,220,358,136 to Askrindo, PT Askrida, Bumiputera, Bumida, Tripakarta, Bumiputramuda, Jasindo, Parolamas and Takaful. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from fire and earthquake.

Beban penyusutan aset tetap dan inventaris per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp50.808.421.776 dan Rp49.681.006.659,-.

Depreciation as December 31st, 2021 and 2020 respectively amounting to Rp50.808.421.776,- and Rp49.681.006.659,- .

11. ASET PAJAK TANGGUHAN

Pajak tangguhan terjadi disebabkan adanya perbedaan waktu (*temporary difference*) dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan.

Aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya "perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian". Jika beban yang diakui secara fiskal lebih kecil dari beban yang diakui secara komersil (koreksi beda waktu positif) maka selisih tersebut akan mengakibatkan adanya pengakuan beban pajak yang lebih kecil secara komersil pada masa yang akan datang, sehingga selisih tersebut akan menghasilkan "Aset pajak tangguhan".

Liabilitas pajak tangguhan (*deferred tax liabilities*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya "perbedaan temporer" kena pajak. Jika beban yang diakui secara fiskal lebih besar dari beban yang diakui secara komersil (koreksi beda waktu negatif) maka selisih tersebut akan mengakibatkan adanya pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersil pada masa yang akan datang, sehingga selisih tersebut akan menghasilkan "Liabilitas pajak tangguhan".

11. DEFERRED TAX ASSETS

The Deffered tax created incause of temporary differences and Income recognition method and certain expensess to follow accounting by tax determination.

The deferred tax assets is total income taxs recoverable in the future period such result of "temporary difference that can be reduce from the balance of loss compensation". If expense recognized by fiscal way less than the sum charge in comercial way (correction of positif difference time) then difference mentioned will effect tax expense recognition more less in commercial way in the future period, so that difference mentioned will produce "Deferred tax assets".

The deferred tax liabilities is the amount of income tax payable for the future periode as the effect of "temporary difference" of taxable income. If expense acknowledge in fiscal way fiscal higher than the sum charge in commercial way (correction of negative difference time negatif) so the difference mentioned will result tax expense recognition higher in the future period, so that difference mentioned will produce" deffered tax liabilities".

	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	Reklasifikasi / *Reclassification*	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *credited to statement of profit or loss*	31 Desember 2021/ *December 31, 2021*	
Aset pajak tangguhan					***Deffered tax assets***
Kewajiban jasa produksi	22.966.497.146		(4.106.331.962)	18.860.165.184	*Liabilities production services*
Kewajiban imbalan pasca kerja	6.601.828.536		(870.528.268)	5.731.300.268	*Post-employment benefits obligation*
Kekurangan CKPN kredit atas PPKA kredit	(39.185.675.101)		5.621.356.502	(33.564.318.599)	*Lack of credit CKPN over PPKA credit*
Saldo kredit hapus buku	42.831.931.045		(1.759.873.106)	41.072.057.939	*Write-off credit balance*
CKPN penyertaan	-	-	-	-	*Inclusion CKPN*
	33.214.581.626	**-**	**(1.115.376.835)**	**32.099.204.792**	

11. ASET PAJAK TANGGUHAN (lanjutan) / *11. DEFERRED TAX ASSETS (continued)*

	31 Desember 2019/ *December 31, 2019*	Reklasifikasi / *Reclassification*	Dikreditkan ke laporan laba rugi/ *credited to statement of profit or loss*	31 Desember 2020/ *December 31, 2020*	
Aset pajak tangguhan					***Deffered tax assets***
Kewajiban jasa produksi	17.382.557.542		5.583.939.604	22.966.497.146	*Liabilities production services*
Kewajiban imbalan pasca kerja	7.804.936.562		(1.203.108.026)	6.601.828.536	*Post-employment benefits obligation*
Kekurangan CKPN kredit atas PPKA kredit	(47.522.771.349)		8.337.096.249	(39.185.675.101)	*Lack of credit CKPN over PPKA credit*
Saldo kredit hapus buku	50.274.174.314		(7.442.243.269)	42.831.931.045	*Write-off credit balance*
CKPN penyertaan	25.000.000		(25.000.000)	-	*Inclusion CKPN*
	27.963.897.068	**-**	**5.250.684.558**	**33.214.581.626**	

12. ASET LAIN-LAIN / *12. OTHER ASSETS*

	2021	2020	
Pendapatan bunga yang masih akan diterima:			*Interest income still revenue accrual:*
Penempatan pada bank lain	154.283.085	15.845.014	*Marketable securities interest*
Bunga Efek-Efek	36.656.854.052	19.153.764.020	*and bank of placement*
Bunga kredit yang diberikan	109.241.884.023	111.604.714.848	*Loans interest*
Pendapatan provisi dan fee	315.613.825	341.515.506	*Privision / fee*
Margin dan bagi hasil yang akan diterima	15.142.101.136	10.230.527.593	*Margin and profit sharing to be received*
	161.510.736.121	141.346.366.981	
Uang muka dan beban dibayar dimuka:			*Advances and expenses prepaid:*
Sewa dibayar dimuka	1.906.963.338	3.061.754.113	*Prepaid rent*
Beban yang ditangguhkan	11.688.407.228	14.671.639.331	*Deferred expenses*
Persekot biaya	227.718.660	388.036.441	*Prepaid to calcul. with expenses*
Premi asuransi dibayar dimuka	83.840.222.613	54.081.334.152	*Prepaid Insurance*
Persekot pembelian	-	497.421.379	*Prepaid purchasing*
Uang jaminan yang dibayar	2.105.648.300	2.097.434.300	*Paid guarantee*
Persekot lainnya	4.538.613.474	5.037.607.944	*Other prepaid*
	104.307.573.613	79.835.227.660	
Lain-lain:			*Other:*
Tagihan *principle acquirer*	197.182.278.029	197.693.254.744	*Billing of principle acquirer*
Kerugian dan kecurangan dalam penyelesaian	1.570.310.866	1.873.336.568	*Loss and fraud on the process*
Nota debet dalam penyelesaian	286.284.890	1.307.567.452	*Debet note in progress*
Selisih kas ATM dalam penyelesaian	849.561.266	896.150.000	*ATM in progress*
Pembayaran lainnya dalam penyelesaian yadib	514.941.193	143.208.210	*Others payment in progress*

12. ASET LAIN-LAIN (lanjutan) / *12. OTHER ASSETS (continued)*

	2021	2020	
Lain-lain (lanjutan) :			*Other (continued):*
Tagihan pembayaran affinity kartu kredit dalam penyelesaian	10.455.165	10.455.165	*Billing of credit card affinity payment in progress*
Persediaan alat tulis dan lainnya	7.227.050.667	6.710.596.498	*Inventory of stationery and others*
Piutang sewa dan jasa, net	2.042.122.825	2.073.237.951	*Rent receivables, service, net*
Aset hak guna	25.105.238.189	27.543.313.918	*Right of Use Assets*
Pos-pos debet dalam penyelesaian lainnya	37.420.188.980	13.655.007.329	*Others debet account in progress*
	272.208.432.070	251.906.127.834	
Jumlah	**538.026.741.803**	**473.087.722.475**	*Total*

13. LIABILITAS SEGERA / *13. LIABILITIES PAYABLE ON DEMAND*

	2021	2020	
Kiriman uang dan inkaso	76.250.328.668	79.593.789.193	*Clearing and RTGS*
Jasa produksi karyawan	85.728.023.561	104.393.168.843	*Bonuses for employee*
Beban masih harus dibayar	81.369.241.509	94.605.781.534	*Accrued expenses*
Setoran-setoran lain	86.433.390.369	103.450.291.626	*Others prepaid deposits*
Bunga deposito	12.815.622.546	27.165.716.094	*Deposit interest*
Bagi hasil	4.717.939.987	4.929.040.556	*Profit sharing*
Tantiem pengurus	9.525.335.951	11.599.240.983	*Management Tantiem*
Kewajiban *principle aqcuirer*	224.370.491.109	251.613.799.836	*Liability of priciple aqcurier*
Setoran jaminan jatuh tempo	23.614.132.407	23.433.611.710	*Cash collateral in due dated*
Penampungan SPMU/SP2D Yadi	-	13.069.046.162	*Escrow SPMU / SP2D paid*
Warkat kredit kliring	10.861.111.215	11.996.920.961	*Lofty Credit clearing*
Kewajiban transaksi Telkomsel	923.400.470	866.864.450	*Payable transaction Telkomsel*
Rekening tabungan ditutup	438.885.365	438.511.697	*Saving account has been closed*
Setoran tagihan kartu kredit	27.991.000	27.991.000	*Deposit from credit card Affinity*
Setoran kredit kelolaan	18.492.690	16.212.500	*Payment credit process*
Rekening giro yang ditutup	9.633.792	9.513.792	*Current account has been closed*
Liabilitas segera lainnya	49.911.278.715	42.315.736.031	*Others current liabilities*
Jumlah	**667.015.299.353**	**769.525.236.968**	*Total*

Liabilitas kepada pemerintah merupakan liabilitas Bank sebagai bank persepsi dalam rangka penerimaan pajak dan bukan pajak dari wajib pajak/ wajib setor, yang secara periodik dilimpahkan ke rekening kas negara di Bank Indonesia, serta penampungan dana-dana lain yang segera disetorkan.

Liability to the government is the liability of the Bank as the perception bank in the framework of tax and nontax revenues by the taxpayer/ deposit obligation periodically shall be transferred to the state cash account in Bank Indonesia, as well as the accommodation of other funds immediately to be deposited.

Liabilitas lainnya merupakan titipan kiriman uang yang akan diteruskan dari bank lain, titipan nasabah, titipan gaji dan pensiun yang akan dibayar.

Other liability is deposited money delivery to be forwarded from other banks, customer deposits, and salary and pension deposits to be paid.

14. SIMPANAN DARI NASABAH / *14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

	2021	2020	
Akun ini terdiri dari:			*This account consist of:*
Pihak berelasi	4.108.669.004.308	2.087.398.721.909	*Related parties*
Pihak ketiga	21.507.063.681.296	20.055.245.681.415	*Third parties*
Jumlah	**25.615.732.685.604**	**22.142.644.403.324**	*Total*
Simpanan terdiri dari:			*This savings consist of:*
Giro	5.607.379.900.206	3.453.031.902.292	*Current account*
Tabungan	7.449.292.829.276	6.352.385.268.653	*Savings*
Deposito berjangka	12.559.059.956.121	12.337.227.232.379	*Time deposit*
Jumlah	**25.615.732.685.604**	**22.142.644.403.324**	*Total*

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku. Ketentuan program penjaminan yang terakhir adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008. Pembayaran premi LPS oleh Bank tahun berjalan lihat catatan No.39 atas laporan keuangan.

Based on the Laws No. 24 dated September 22nd, 2004 effective as of September 22nd, 2005, Deposit Guarantor Institution (LPS) shall be established to guarantee certain liabilities of public banks based on the prevailing guaranteeing program. The latest provision of the guaranteeing program is based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No.66 year 2008 dated October 13th, 2008. Payment of LPS premiums by the Bank for the current year see note No.39 to the financial statements.

a. Giro / *a. Current accounts*

	2021	2020	
Konvensional			***Conventional***
Pihak berelasi			*Related parties*
Giro non bank - sektor pemerintahan	4.063.689.166.162	2.063.407.487.804	*Current account with non bank- government sector*
Giro non bank-sektor bukan pemerintah	76.822.886	13.592.532	*Current account with non bank- non government sector*
Sub jumlah	4.063.765.989.048	2.063.421.080.336	*Sub total*
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro non bank-sektor perorangan dan lembaga pemerintah	1.455.819.165.173	1.321.680.256.273	*Current account with non bank-personal and government sector*
Giro dari kredit yang diberikan	50.112	316.268	*Current account from loans*
Sub jumlah	1.455.819.215.284	1.321.680.572.541	*Sub total*
Jumlah Giro Konvensional	**5.519.585.204.332**	**3.385.101.652.877**	*Total Giro Conventional*

Syariah			***Sharia***
	2021	**2020**	
Pihak berelasi			*Related parties*
Giro *wadiah* non bank-sektor bukan pemerintah	-	-	Current account with Wadiah *non bank-government sector*
Pihak ketiga			*Third parties*
Giro *wadiah* non bank-sektor swasta/ perorangan dan pemerintah	61.659.309.216	62.434.065.784	*Current account with Wadiah non bank-private/personal, government.*
Giro *mudharabah*	26.135.386.658	5.496.183.630	*Mudharabah Giro*
Jumlah Giro Syariah	**87.794.695.874**	**67.930.249.415**	*Total Giro Sharia*
Jumlah Giro	**5.607.379.900.206**	**3.453.031.902.292**	*Total Giro*

14. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan)

a. Giro (lanjutan)

Perincian Giro Sektor Pemda Tingkat I dan II:

14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS *(continued)*

a. Current accounts *(continued)*

Current account of government sector level I and II:

	2021	2020	
Konvesional			***Conventional***
Provinsi Riau	846.200.968.953	453.733.651.479	*Riau province*
Kabupaten Karimun	51.835.267.507	59.115.732	*Karimun regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	164.527.446.864	27.197.401.704	*Indragiri Hilir regency*
Kabupaten Anambas	45.853.575.583	7.782.477.713	*Anambas regency*
Kabupaten Rokan Hulu	71.789.128.920	287.682.794	*Rokan Hulu regency*
Kabupaten Lingga	92.787.113.052	96.629.287.964	*Lingga regency*
Kota Batam	44.897.693.135	85.164.806.488	*Batam city*
Kabupaten Bintan	121.893.481.632	123.237.244.898	*Bintan regency*
Kabupaten Natuna	38.867.896.389	1.349.579.096	*Natuna regency*
Kabupaten Rokan Hilir	201.478.730.347	85.723.580.948	*Rokan Hilir regency*
Kabupaten Kampar	48.962.553.223	58.572.194.330	*Kampar regency*
Kabupaten Kuantan Singingi	106.308.038.460	57.796.984.972	*Kuantan Singingi regency*
Kabupaten Kep. Meranti	13.325.006.198	248.459.217	*Meranti Island regency*
Kabupaten Pelalawan	119.920.353.642	151.027.480.121	*Pelalawan regency*
Provinsi Kepulauan Riau	4.595.367.389	2.656.143.962	*Kepulauan Riau province*
Kota Tanjung Pinang	48.767.932.067	34.507.702.999	*Tanjung Pinang city*
Kabupaten Bengkalis	1.168.575.762.066	144.649.973.806	*Bengkalis regency*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	441.084.877.687	249.136.972.154	*Siak Sri Indrapura regency*
Kota Dumai	142.993.736.590	180.523.375.675	*Dumai city*
Kabupaten Indragiri Hulu	288.748.818.551	300.798.788.271	*Indragiri Hulu regency*
Kota Pekanbaru	275.417.907	2.324.583.480	*Pekanbaru city*
Sub jumlah	4.063.689.166.162	2.063.407.487.804	*Sub total*
Sektor non Bank, swasta/ perorangan	1.455.896.038.170	1.321.694.165.073	*Sector non Bank, private/ personal*
Jumlah Giro Konvensional	**5.519.585.204.332**	**3.385.101.652.877**	*Total Giro Conventional*

Perincian Giro Sektor Pemda Tingkat I dan II:

Current account of government sector level I and II:

	2021	2020	
Syariah			***Sharia***
Lembaga Pemerintah	4.360.589.163	1.448.598.888	*Government institution*
Perusahaan	59.929.261.846	38.582.477.408	*The company*
Yayasan, Badan sosial dan Ormas	22.292.378.137	25.754.086.027	*Foundation, social institution and ormas*
Koperasi	178.864.452	966.167.086	*Cooperation*
Perorangan	869.390.641	1.015.651.269	*Individual*
Sektor swasta lainnya	164.211.636	163.268.737	*Other private sector*
Jumlah Giro Syariah	**87.794.695.874**	**67.930.249.415**	*Total Giro Sharia*
Jumlah Giro	**5.607.379.900.206**	**3.453.031.902.292**	*Total Giro*

14. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan) / *14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)*

a. Giro (lanjutan) / *a. Current accounts (continued)*

Rincian giro berdasarkan mata uang: / *Current account based on foreign currency:*

	2021	2020	
Mata uang			*Currency*
IDR	5.594.230.775.584	3.440.437.459.982	*IDR*
USD	10.283.845.482	9.675.316.271	*USD*
SGD	2.799.000.537	2.915.900.961	*SGD*
EUR	66.278.604	3.225.079	*EUR*
Jumlah	**5.607.379.900.206**	**3.453.031.902.292**	*Total*

b. Tabungan / *b. Savings*

	2021	2020	
Konvensional			***Conventional***
Pihak berelasi			*Related parties*
Tabungan Sinar	3.623.449.795	2.763.457.709	*Sinar saving*
Tabungan Simpeda	23.702.555	826.802.600	*Simpeda saving*
Sub jumlah	3.647.152.350	3.590.260.309	*Sub total*
Pihak ketiga			*Third parties*
Tabungan Sinar	4.745.635.049.201	4.413.821.005.892	*Sinar saving*
Tabungan Simpeda	766.530.674.552	683.051.091.604	*Simpeda saving*
Tabunganku	36.016.225.062	33.938.032.093	*My saving*
Tabungan Haji Dhuha	3.513.568.494	3.574.404.149	*Dhuha Hajj Saving*
Sub jumlah	5.551.695.517.308	5.134.384.533.738	*Sub total*
Jumlah	**5.555.342.669.658**	**5.137.974.794.047**	*Total*
Syariah			***Sharia***
Pihak berelasi			*Related parties*
Tabungan Sinar Syariah	9.461.615.541	9.054.069.414	*Sinar Sharia Saving*
Tabungan Ib Dhuha	36.926.554	32.226.136	*Ib Dhuha Saving*
Sub jumlah	9.498.542.095	9.086.295.551	*Sub total*
Pihak ketiga			*Third parties*
Tabungan Sinar Syariah	1.804.912.823.572	1.129.880.456.012	*Sinar Sharia Savings*
Tabungan Ib Dhuha	79.538.793.951	75.443.723.043	*Ib Dhuha Saving*
Sub jumlah	1.884.451.617.523	1.205.324.179.056	*Sub total*
Jumlah tabungan syariah	**1.893.950.159.618**	**1.214.410.474.606**	*Total sharia savings*
Jumlah tabungan	**7.449.292.829.276**	**6.352.385.268.653**	*Total Savings*

c. Deposito berjangka / *c. Time deposits*

	2021	2020	
Berdasarkan mata uang			***Based on currency***
Konvensional			***Conventional***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi	27.373.320.814	9.957.085.714	*Related parties*
Pihak ketiga	8.901.267.864.403	10.014.720.673.318	*Third parties*
Sub jumlah	8.928.641.185.217	10.024.677.759.032	*Sub total*
Mata uang asing			*Foreign Currency*
Pihak berelasi	-	-	*Related parties*
Pihak ketiga	72.116.294.211	88.391.554.608	*Third parties*
Sub jumlah	72.116.294.211	88.391.554.608	*Sub. Total*

14. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan) / ***14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*** *(continued)*

c. Deposito berjangka (lanjutan) / ***c. Time deposits*** *(continued)*

	2021	2020	
Berdasarkan mata uang			***Based on currency***
Syariah			***Sharia***
Rupiah			*Rupiah*
Pihak berelasi:			*: Related parties*
Deposito *Mudharabah* sek. swasta/ perorangan	4.384.000.000	1.344.000.000	*Time deposits Mudharabah for non private /personal*
Pihak ketiga:			*: Third parties*
Deposito *Mudharabah* sek. swasta/perorangan	2.452.692.847.853	1.509.328.320.547	*Time deposits Mudharabah for non private /personal*
Deposito *Mudharabah* sektor lembaga pemerintah	1.101.225.628.840	713.485.598.192	*Time deposits Mudharabah for goverment institution sector*
Sub jumlah	3.558.302.476.693	2.224.157.918.739	*Sub total*
Jumlah deposito berjangka	**12.559.059.956.121**	**12.337.227.232.379**	*Total time deposits*

Berdasarkan jangka waktu			***Based on time period***
Konvensional	**2021**	**2020**	***Conventional***
1 bulan	2.073.967.173.830	1.559.057.603.305	*1 month*
3 bulan	1.412.859.366.488	2.831.186.873.750	*3 months*
6 bulan	1.141.679.274.667	3.598.889.477.717	*6 months*
12 bulan	4.350.055.001.987	2.101.565.196.411	*12 months*
12 bulan lebih	22.196.662.457	22.370.162.457	*more than 12 months*
Jumlah	**9.000.757.479.428**	**10.113.069.313.640**	*Total*
Syariah			***Sharia***
1 bulan	2.375.848.131.146	1.518.564.073.192	*1 month*
3 bulan	786.939.420.000	459.509.570.000	*3 months*
6 bulan	92.451.500.000	94.783.950.000	*6 months*
12 bulan	303.063.425.547	151.300.325.547	*12 months*
Jumlah	3.558.302.476.693	2.224.157.918.739	*Total*
Jumlah deposito berjangka	**12.559.059.956.121**	**12.337.227.232.379**	*Total time deposits*

Perincian Deposito Sektor Pemda Tingkat I dan II: / *Deposits of government sector level I and II:*

	2021	2020	
Konvensional			***Conventional***
Provinsi Riau	3.906.653.064	1.634.376.524	*Riau Province*
Provinsi Kepulauan Riau	-	-	*Kepulauan Riau Province*
Kota Dumai	-	-	*Dumai City*
Kabupaten Pelalawan	-	-	*Pelalawan regency*
Kabupaten Kep. Meranti	15.000.000.000	-	*Meranti Islands Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	25.000.000	25.000.000	*Indragiri Hulu regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	3.235.109.000	3.081.150.440	*Indragiri Hilir regency*
Kabupaten Lingga	3.438.815.000	3.438.815.000	*Lingga regency*
Kabupaten Karimun	807.743.750	807.743.750	*Karimun regency*
Sub jumlah	26.413.320.814	8.987.085.714	*Sub total*
Sektor non Bank, swasta/ perorangan	8.974.344.158.614	10.104.082.227.926	*Sector non-Bank, private/ personal*
Jumlah	**9.000.757.479.428**	**10.113.069.313.640**	*Total*

14. SIMPANAN DARI NASABAH (lanjutan) / ***14. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*** *(continued)*

c. Deposito berjangka (lanjutan) / ***c. Time deposits*** *(continued)*

Perincian Deposito Sektor Pemda Tingkat I dan II (lanjutan): / *Deposits of government sector level I and II (continued):*

	2021	2020	
Syariah			***Sharia***
Sektor pemerintah	1.101.225.628.840	713.485.598.192	*Goverment institution sector*
Sektor swasta lainnya	2.457.076.847.853	1.510.672.320.547	*Other private sector*
Jumlah Syaria	**3.558.302.476.693**	**2.224.157.918.739**	*Total Syaria*
Jumlah deposito berjangka	**12.559.059.956.121**	**12.337.227.232.379**	*Total time deposits*

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 057/SE/2021 tanggal 27 September 2021 Tentang Bunga Tabungan, Giro dan Deposito Berjangka PT Bank Riau Kepri. Kisaran tingkat suku bunga antara 0,00% s/d 3,50% untuk Konvensional.

Based on the Directors Circular No. 057 / SE / 2021 dated September 27, 2021 concerning Interest in Savings, Current Accounts and Time Deposits of PT Bank Riau Kepri. Interest rates range between 0.00% to 3.50% for Conventional.

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 066/SE/2021 tanggal 2 November 2021 Tentang Nisbah Giro, Tabungan, Deposito Mudharabah dan Bonus Giro Wadiah PT Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah. Kisaran tingkat suku nisbah dan bonus antara 0,00% s/d 33% untuk Syariah.

Based on the Circular Letter of the Board of Directors No. 066/SE/2021 dated November 2, 2021 concerning Current Account Ratio, Savings, Mudharabah Deposit and Wadiah Current Account Bonus of PT Bank Riau Kepri Sharia Business Unit. The range of the ratio and bonus rates is between 0.00% to 33% for Sharia.

Upaya dan kebijakan manajemen untuk menjaga agar deposan tetap menempatkan dananya pada Bank yaitu dengan cara memberikan suku bunga yang bersaing dengan bank lain, dengan memberikan insentif kepada nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk tabungan dengan program undian sinar tebar milyar yang diundi secara periodik dan menambah fasilitas layanan sehingga nasabah mendapat kemudahan bertransaksi.

The efforts and policies by the management in order to maintain the depositors to remain placing their funds in the bank are by means of providing interest rate competing with other banks, providing incentives to customers placing their funds in the form of saving with the program of sinat tebar milyar lottery to be allotted periodically and by adding service facilities resulting in the customers obtaining easiness in performing their transactions.

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN / ***15. DEPOSITS FROM OTHERS BANK***

a. Berdasarkan hubungan pihak / ***a. Based on related parties***

	2021	2020	
Pihak berelasi	-	-	*Related parties with bank*
Pihak ketiga	1.040.800.354.219	1.958.767.697.599	*Third parties with bank*
Jumlah	**1.040.800.354.219**	**1.958.767.697.599**	*Total*

b. Berdasarkan jenis dan hubungan / ***b. Based on type and relationship***

	2021	2020	
Giro			***Giro***
Konvensional			*Conventional*
Pihak berelasi	-	-	*Related parties with bank*
Pihak ketiga	21.147.972.921	23.005.457.091	*Third parties with bank*
Sub Jumlah	21.147.972.921	23.005.457.091	*Sub total*

15. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan) / ***15. DEPOSITS FROM OTHERS BANK*** *(continued)*

b. Berdasarkan jenis dan hubungan (lanjutan) / ***b. Based on type and relationship*** *(continued)*

	2021	2020	
Tabungan			***Savings***
Konvensional			*Conventional*
Pihak berelasi	-	-	*Related parties with bank*
Pihak ketiga	14.977.381.298	12.607.240.507	*Third parties with bank*
Sub Jumlah	14.977.381.298	12.607.240.507	*Sub total*
Deposito			***Deposit***
Konvensional			*Conventional*
Pihak berelasi	-	-	*Related parties with bank*
Pihak ketiga			*Third parties with bank*
1 bulan	32.025.000.000	27.975.000.000	*1 month*
3 bulan	17.000.000.000	7.500.000.000	*3 months*
6 bulan	6.500.000.000	22.000.000.000	*6 months*
12 bulan	22.000.000.000	17.300.000.000	*12 months*
> 12 bulan	-	-	*> 12 months*
	-	-	
Syariah			*Sharia*
Pihak berelasi			*Related parties with bank*
Pihak ketiga			*Third parties with bank*
1 bulan	11.150.000.000	6.850.000.000	*1 month*
3 bulan	-	17.000.000.000	*3 months*
6 bulan	-	38.000.000.000	*6 months*
12 bulan	-	-	*12 months*
Sub Jumlah	88.675.000.000	136.625.000.000	*Sub total*
SERTIFIKAT MUDHARABAH ANTAR BANK (SIMA)	-	200.000.000.000	*MUDHARABAH CERTIFICATE OF INTER BANK (SIMA)*
DOC Bank Lain	1.000.000.000	11.530.000.000	*Other bank documents*
Interbank Call Money (ICM)	915.000.000.000	1.575.000.000.000	*Interbank Call Money (ICM)*
	1.040.800.354.219	**1.958.767.697.599**	

16. PINJAMAN YANG DITERIMA / ***16. BORROWING***

	2021	2020	
Pinjaman Dana Kelolaan	463.081.663	1.100.078.585	*Chanelling*
Piutang Murabahah Perorangan			*Personal Murabahah Receivables*
Anuitas KPR FLPP	52.932.431.837	31.086.316.245	*KPR FLPP Annuity*
Pinjaman Dana FLPP			*FLPP Fund Loans*
Kemenpera	17.441.180.070	19.705.612.660	*Minister for KPR*
Pinjaman LPDB	-	11.887.516.667	*LPDB Loans*
Dana KPR Sejahtera PPDPP	80.605.806.167	50.129.580.012	*KPR Sejahtera PPDPP Fund*
Jumlah	**151.442.499.737**	**113.909.104.169**	*Total*

a. Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau

Pinjaman dari Pemerintah Provinsi Riau terdiri dari MoU No.68/MoU/2002 tanggal 2 Oktober 2002 dan No.69/MoU/2002 tanggal 3 Oktober 2002.

a. Loans from Government of Riau Province

Loans from the Government of Riau Province consists of MoU No.68/MOU/2002 dated October 2nd, 2002 and 69/MOU/2002 dated October 3rd, 2002.

16. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pusat Pembiayaan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Bank No.18/SK.9/HK.02.04/06/2014 dan No.091/PKO/2014 tanggal 12 Juni 2014 Tentang penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka pembiayaan kredit pemilikan rumah sejahtera, bahwa sebelumnya kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian kerja sama operasional No.17/SK.9/HK.02.04/12/2013 dan No.113/PKO/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pusat Pengelolaan dan Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan Bank No.HK.02.03.-SG/15 dan No.111/PKO/2016 tanggal 30 September 2016 tentang penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit pemilikan rumah sejahtera bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)

Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3) tanggal 6 September 2016 bahwa surat No.72/DIR/2016 tanggal 26 Januari 2016 Bank telah mendapat persetujuan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-UMKM).

Plafon pinjaman yang diberikan kepada Bank sebesar Rp64.464.000.000 dengan tujuan, modal kerja pinjaman/pembiayaan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang tersebar di Seluruh Wilayah Provinsi Riau dan Kepri melalui Kantor Cabang dan Cabang Pembantu. Jangka Waktu selama 60 bulan atau 5 tahun terhitung sejak tanggal pencairan.

Tingkat suku bunga:

a. Pinjaman/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau koperasi sektor riil:
   1. LPDB-KUMKM kepada Bank: 6 % pertahun sliding;
   2. Bank kepada koperasi (sektor riil) atau UMKM: point a + maksimal 11% pertahun sliding.

***16. BORROWING** (continued)*

b. Center for Housing Ministry of Housing of the Republic of Indonesia.

Operation agreement between the Center for Public Housing Republic of Indonesia with Bank No.18/SK.9/ HK.02.04/06/2014 and No.091/ PKO/2014 dated June 12nd, 2014 on the distribution of funds liquidity facility in order to finance housing finance mortgages prosperous, that before the two sides have signed a cooperation agreement operational No.17/SK.9/ HK.02.04/12/2013, No.113/ PKO/2013 dated December 30th, 2013.

Operation agreement between the Management Center and the Housing Finance Ministry of Public Works and Public Housing Republic of Indonesia with Bank No.HK.02.03.-SG/15 and No.111/PKO/2016 dated September 30th, 2016 on the distribution of funds liquidity facility in order to finance housing in the context of the acquisition of homes by Housing Loan welfare for low-income people.

c. Institute for Cooperative and Micro, Small and Medium Business Revolving Fund Management (LPDB-KUMKM)

Notice of Approval in Principle (SP3) on 6 September 2016 that the No.72/DIR/2016 dated January 26th, 2016 the Bank has received approval from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia, Institute of Cooperative Management Revolving Fund of Cooperatives and Micro, Small and Medium scale (LPDB-UMKM).

The plafon of loans granted to the Bank amounted Rp64.464.000.000 with purpose, working capital loans / financing to cooperatives and micro, small and medium scale spread across the whole territory of the province of Riau and Riau Islands through Branch Offices and Branches. the periode of 60 months or 5 years from the date of disbursement.

The interest rate:

a Loans/ financing for Micro, Small and Medium scale (UMKM) atau cooperative real sector
   1 LPDB-KUMKM for Bank: 6 % per year sliding;
   2 Bank to cooperative real sector or UMKM: point a + maximum 11% per annum sliding.

16. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) (lanjutan)

b. Pinjaman/Pembiayaan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP)-Kop. Primer:
1. LPDB-KUMKM kepada Bank: 4% pertahun sliding;
2. Bank kepada KSP/USP-Kop.Primer: point a + maksimal 6% pertahun sliding;
3. KSP/USP-Kop.Primer kepada UMKM (anggota): sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSP/USP.

d. Pinjaman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Perjanjian Kerjasama Operasional antara Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Unit Usaha Syariah, berdasarkan perjanjian nomor: 92/PKS/Sg/2019 dan nomor: 065/PKO/2019 tanggal 19 Desember 2019, Tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera/ Rumah Sejahtera Syariah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

***16. BORROWING** (continued)*

***c. Institute for Cooperative and Micro, Small and Medium Business Revolving Fund Management (LPDB-KUMKM)** (continued)*

b Loans / Financing to Savings and Loans Cooperatives (KSP) or Savings and Loans Units (USP) -Kop. Primary:
1 LPDB-KUMKM for Bank: 4 % per annum sliding;
2 Bank to KSP/USP-Primary cooperative: point a + maximum 6% per annum sliding;
3 KSP/USP-Primary cooperative toUMKM (member): in accordance with the applicable provisions on KSP/USP.

d. Loans from the Ministry of Public Works and Public Housing

Operational Cooperation Agreement between the Center for Housing Financing Fund Management of the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia and PT. Regional Development Bank Riau Kepri Sharia Business Unit, based on agreement number: 92 / PKS / Sg / 2019 and number: 065 / PKO / 2019 dated 19 December 2019, regarding the Distribution of Funds for Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) through Credit / Financing for Home Prosperity / Rumah Sejahtera Syariah for Low-Income Communities.

17. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Rincian laporan transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha bank adalah sebagai berikut:

A. Komitmen

	2021	2020	
Tagihan komitmen			*Commitment claim*
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-	*1. Uncollection credit facilities*
Jumlah	**-**	**-**	*Total*

	2021	2020	
Kewajiban komitmen			*Commitment liabilities*
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik			*1. Uncollection credit facilities from clients*
BUMN	98.270.475.967	85.394.123.369	*BUMN*
Lainnya	335.096.416.601	350.501.315.461	*Others*
Jumlah	433.366.892.568	435.895.438.830	*Total*
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik	-	-	*2. Others loans facilities*
Jumlah	**433.366.892.568**	**435.895.438.830**	*Total*

17. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Statement the transaction quality of commitment and contingencies in bank activities are as follow:

A. Commitments

17. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan) / *17. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)*

B. Kontinjensi / *B. Contingencies*

	2021	2020	
Tagihan kontinjensi			*Contingencies claim*
1. Garansi yang diterima	-	-	*1. Guarantee receivable*
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian			*2. Interest income in process*
Bunga kredit yang diberikan	522.666.649.929	479.009.875.196	*Interest loans*
Bunga lainnya		-	*Other loans*
Jumlah	**522.666.649.929**	**479.009.875.196**	*Total*
Kewajiban kontinjensi			*Contingencies liabilities*
1. Garansi yang diberikan	30.137.587.834	36.799.431.815	*1. Guarantee extended*
2. Lainnya	-	-	*2. Others*
Jumlah	**30.137.587.834**	**36.799.431.815**	*Total*

C. Lainnya / *C. Others*

	2021	2020	
1. Penerusan kredit	223.777.300.201	224.162.321.451	*1. Distribution chanelling credit*
2. Aset produktif yang dihapus buku			*2. Write-off productive asset*
Aset produktif:			*Productive Asset:*
Kredit yang diberikan	270.321.991.295	278.321.414.505	*Loans*
Lainnya	259.275.000	259.275.000	*Others*
Aset produktif yang dihapus buku yang dipulihkan atau berhasil ditagih:			*Write-off productive asset has repaired or successfully billed:*
Kredit yang diberikan	66.451.044.631	78.398.783.188	*Loans*
Lainnya	-	-	*Others*
Jumlah	**560.809.611.127**	**581.141.794.144**	*Total*

18. PERPAJAKAN / *18. TAXATION*

	2021	2020	
a. Utang Pajak			***a. Taxes Payable***
PPh Pasal 4(2)	5.011.401.147	9.874.877.629	*Income Tax Art 4 (2)*
PPh Pasal 21	9.964.247.317	3.678.580.590	*Income Tax Art 21*
PPh Pasal 23	325.212.066	214.852.102	*Income Tax Art 23*
PPh Pasal 25	2.851.069.000	1.430.840.000	*Income Tax Art 25*
PPh Pasal 29	13.565.633.280	26.119.808.880	*Income Tax Art 29*
PPN Keluaran	168.802.349	171.217.274	*VAT Out*
Lainnya	149.772.434	56.337.630	*Others*
Jumlah	**32.036.137.593**	**41.546.514.105**	*Total*

b. Manfaat (Beban) Pajak / ***b. Taxes Benefit (Expenses)***

	2021	2020	
Beban pajak kini	(126.372.383.280)	(171.864.077.880)	*Current expenses tax*
Beban pajak tahun lalu	(7.226.922.537)	(42.077.623.596)	*Last year's tax expenses*
Pajak tangguhan	(485.609.050)	5.056.804.766	*Deferred tax*
Jumlah	**(134.084.914.867)**	**(208.884.896.710)**	*Total*

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Manfaat (Beban) Pajak (lanjutan)

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laba rugi Bank dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

18. TAXATION *(continued)*

b. Taxes Benefit (Expenses) *(continued)*

A reconciliation of profit before income tax according to the Bank's profit or loss with the estimated taxable income is as follows:

	2021	2020	
Laba sebelum pajak	**515.098.352.913**	**672.854.536.014**	*Profit before tax*
Koreksi Fiskal			*Fiscal corrections*
Beda temporer			*Temporary differences*
Selisih kurang antara Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) dan CKPN atas aset produktif	25.551.620.463	11.974.380.394	*The difference is insufficient between the Provision for Asset Quality Assessment (PPKA) and CKPN on productive assets*
Penerimaan kredit hapus buku	(7.999.423.210)	(6.406.101.597)	*Receipt of write-off credit*
Jasa produksi - bersih	(18.665.145.283)	34.862.938.678	*Production services - net*
Imbalan kerja - bersih	(3.956.946.673)	(1.211.434.720)	*Employee benefits - net*
Jumlah beda temporer	(5.069.894.702)	39.219.782.755	*Total*
Beda permanen			*Permanent differences*
Tenaga kerja, umum dan administrasi.	28.401.891.082	21.659.166.051	*Employee, general and administration*
Tantiem pengurus	9.525.335.951	11.599.240.983	*Management Tantiem*
Beban operasional lainnya	12.491.817.450	21.464.328.268	*Others operating expenses*
Pendapatan non operasional	(253.613.836)	(12.469.830)	*Non operating income*
Beban non operasional	14.226.035.346	14.415.770.425	*Non operating expenses*
Jumlah beda permanen	64.391.465.993	69.126.035.897	*Total*
Jumlah koreksi fiskal	**59.321.571.290**	**108.345.818.652**	*Total fiscal of corection*
Penghasilan kena pajak	574.419.924.203	781.200.354.667	*Taxable income*
Pembulatan	**574.419.924.000**	**781.200.354.000**	*Rounding*
• Pajak kini tahun 2021 - 22%	126.372.383.280		*Current tax in 2021* •
• Pajak kini tahun 2020 - 22%	-	171.864.077.880	*Current tax in 2020* •
Jumlah pajak kini	**126.372.383.280**	**171.864.077.880**	*Current tax amount*
Pajak dibayar dimuka			*Prepaid taxes*
PPh Pasal 25	112.806.750.000	145.744.269.000	*Income taxes article 25*
Jumlah pajak dibayar dimuka	**112.806.750.000**	**145.744.269.000**	*Total*
Pajak kurang (lebih) bayar	**13.565.633.280**	**26.119.808.880**	*Taxes (overpayment) less paid*

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara yang ditentukan sendiri oleh Bank. Jumlah tersebut mungkin berbeda dengan jumlah penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan badan.

In these financial statements, the amount of taxable income is based on preliminary calculations made on a self assessment basis by the Bank. These amounts may differ from taxable income reported in the corporate income tax return.

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Manfaat (Beban) Pajak (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 19 Juni 2020 . Aturan tersebut telah menetapkan antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pemeriksaan pajak tahun buku 2016 dan 2017 :

Bank telah membayar kekurangan pajak tahun pajak 2016, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp12.814.256.410,-

Bank telah membayar kekurangan pajak tahun pajak 2017, berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp29.263.367.186,- sehingga total pajak kurang bayar berjumlah Rp42.077.623.596,-

***18. TAXATION** (continued)*

***b. Taxes Benefit (Expenses)** (continued)*

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) of the Republic of Indonesia Number 1 of 2020 which became Law (UU) Number 2 of 2020, and stipulated Government Regulation (PP) Number 30 of 2020 concerning Tariff Reduction Income Tax for Domestic Entity Taxpayers in the Form of a Public Company and is effective from the date of promulgation, which is June 19, 2020. The regulation has stipulated, among other things, a reduction in the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments from the original 25% to 22% for the 2020 and 2021 fiscal years and 20% from the 2022 tax year onwards, as well as a further reduction in the tax rate of 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements.

Fiscal year 2016 and 2017 tax audits:

The Bank has paid the tax underpayment for the 2016 tax year, based on the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) dated 21 December 2020 amounting to Rp12,814,256,410, -

The bank has paid the tax underpayment for the 2017 tax year, based on the Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) dated December 21, 2020 amounting to Rp29,263,367,186, so the total underpayment tax is Rp42,077,623,596, -

19. IMBALAN KERJA

Bank memberikan imbalan kerja jangka panjang dan pasca kerja lainnya kepada para karyawan yang memenuhi syarat terdiri dari program, Cuti Besar, Penghargaan Masa Bhakti (PMB), Tunjangan Hari Tua (THT), Masa Persiapan Pensiun (MPP), Program Pensiun Iuran Pasti, pensiun manfaat pasti (Dana pensiun), dengan rincian sebagai berikut:

Valuasi aktuaria atas imbalan kerja PT Bank Riau Kepri per 31 Desember 2021 dilakukan oleh PT Sienco Aktuarindo Utama, berdasarkan Laporan Aktuaria Valuasi Imbalan Kerja Nomor: 060/LA-IK/KKAICS/I-2022 Tanggal 28 Januari 2022. Jumlah liabiities (asset) netto yang diakui pada Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2021 adalah Rp66.476.333.754.

19. EMPLOYEE BENEFIT

Bank provides long-term benefits and postemployment benefits to all qualified employees which consist of Annual Leave, Service Pay Benefit (PMB), (THT), Pension Preparation Period (MPP), defined dues pension, defined benefit pension (Dapen), are as follows:

The actuarial valuation of the employee benefits of PT Bank Riau Kepri as of December 31, 2021 is carried out by PT Sienco Aktuarindo Utama, based on the Actuarial Report on the Valuation of Employee Benefits Number: 060/LA-IK/KKAICS/I-2022 dated January 28, 2022. Total net liabilities (assets) recognized in the Statement of Financial Position as of December 31, 2020 is Rp66,476,333,754.

19. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Kewajiban imbalan pasca kerja yang disajikan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2021 dan 2020 tidak termasuk Program Imbalan Kerja selain PPMP dan THT (Program Pensiun Manfaat Pasti) sebesar Rp26.051.364.855 dan Rp30.008.311.528 karena Bank sudah bekerjasama dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perjanjian Tentang Pengelolaan Program Tunjangan Hari Tua Kumpulan No.54/DIR/BR/2005 dan No.067.SJ.U.0805 tanggal 18 Agustus 2005. Kemudian Addendum I Tanggal 8 September 2006.

Karena pengelolaan THT diserahkan pada PT Asuransi Jiwasraya, maka Liabilitas (aset) Neto yang diakui pada Laporan Posisi Keuangan terdiri dari:

Diluar program pensiun tersebut diatas PT Bank Riau Kepri menempatkan program iuran pasti yang dikelola oleh DPLK BNI dengan saldo 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp138.390.304.539 dan Rp120.233.680.412 dan program tunjangan hari tua yang dikelola PT Asuransi Jiwasraya dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp81.074.883.775 dan Rp77.190.681.798.

***19. EMPLOYEE BENEFIT** (continued)*

The obligation for post-employment benefits presented in the financial statements as of December 31, 2021 and 2020 does not include Employee Benefits Programs other than PPMP and THT (Definite Benefit Pension Program) of Rp.26,051,364,855 and Rp.30,008,311,528 because the Bank has collaborated with PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Agreement on Management of Group Old Age Allowance Program No.54/DIR/BR/2005 and No.067.SJ.U.0805 dated 18 August 2005. Then Addendum I dated 8 September 2006.

However, due to the management of ENT handed over to PT Asuransi Jiwasraya, the Net Liabilities (assets) recognized in the Financial Position Report consist of:

Apart from the pension program mentioned above, PT Bank Riau Kepri places a defined contribution program managed by DPLK BNI with a balance of December 31, 2021 and 2020 of Rp. 138,390,304,539 and Rp. 120,233,680,412 and an old-age benefit program managed by PT Asuransi Jiwasraya with a balance of Rp. December 31, 2021 and 2020 amounting to Rp. 81,074,883,775 and Rp. 77,190,681,798.

	2021	2020	
Disajikan dalam neraca			*Expressed on the balance sheet*
Imbalan cuti besar	13.730.884.691	16.627.127.329	*Long services leave allowance*
Imbalan penghargaan masa bakti	12.320.480.164	13.381.184.199	*Future Award Program*
Jumlah	**26.051.364.855**	**30.008.311.528**	*Total*

Disajikan pada Laporan Aktuaria Valuasi Imbalan Kerja: *Employee Benefits Valuation Actuarial Report:*

	2021	2020	
Imbalan pasca kerja	40.424.968.899	33.493.166.770	*Post-employment benefits*
Imbalan cuti besar	13.730.884.691	16.627.127.329	*Long services leave allowance*
Imbalan penghargaan masa bakti	12.320.480.164	13.381.184.199	*Future Award Program*
Jumlah	**66.476.333.754**	**63.501.478.298**	*Total*

	2021	2020	
Imbalan pasca kerja:			*Post-employment benefits:*
Saldo liabilitas (aset) awal	33.493.166.770	29.546.111.576	*Begining Balance*
Biaya tahun berjalan	6.480.480.015	6.330.100.396	*Currents services cost*
Jumlah yang diakui pada OCI	1.711.210.214	4.639.772.593	*The amount recognized in OCI*
Pembayaran manfaat	(1.259.888.100)	(7.022.817.795)	*Benefit payment*
Saldo liabilitas (aset) akhir	**40.424.968.899**	**33.493.166.770**	*Ending balance*
Beban Imbalan pasca kerja:			*Post-employment benefit costs:*
Beban jasa kini	4.278.644.093	4.862.213.247	*Current cost*
Biaya jasa lalu vested	-	(536.784.957)	*Past service costs vested*
Beban bunga	2.201.835.922	2.004.672.106	*Inters cost*
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lain	-	-	*Remeasurement other employee benefit*
Jumlah	**6.480.480.015**	**6.330.100.396**	*Total*

19. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***19. EMPLOYEE BENEFIT*** *(continued)*

Imbalan cuti besar / *Long services leave allowance*

Beban liabilitas imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi pada tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *Amount recognized in the statement of profit or loss in rescpect of the post-employement benefit are as follows:*

	2021	2020	
Beban jasa kini	5.849.315.751	5.328.256.137	*Current cost*
Biaya jasa lalu vested	-	231.510.477	*Past service costs vested*
Beban bunga	951.277.370	1.081.854.301	*Inters cost*
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lain	(4.838.920.509)	516.739.634	*Remeasurement other employee benefit*
Jumlah	**1.961.672.612**	**7.158.360.549**	*Total*

Jumlah liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: / *The amount of post-employment benefits liabilities recognized in the financial statements are as follows:*

	2021	2020	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	13.730.884.691	16.627.127.329	*Present value of unfunded*

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut: / *Movements in the presents value of finacial position arising from post-employement benefit are as follows:*

	2021	2020	
Saldo awal	16.627.127.329	18.631.344.930	*Begining Balance*
Beban jasa kini	1.961.672.612	5.328.256.137	*Currents services cost*
Biaya jasa lalu vested	-	231.510.477	*Past service costs vested*
Beban bunga	-	1.081.854.301	*Interest cost*
Pembayaran manfaat	(4.857.915.250)	(9.162.578.150)	*Benefit payment*
Keuntungan (kerugian) aktuarial	-	516.739.634	*Actuarial gain (loss)*
Saldo akhir	**13.730.884.691**	**16.627.127.329**	*Ending balance*

Program penghargaan masa bakti / *Future Award Program*

Beban liabilitas imbalan pascakerja diakui pada laporan laba rugi pada tahun berjalan adalah sebagai berikut: / *Amount recognized in the statement of profit or loss in rescpect of the post-employement benefit are as follows:*

	2021	2020	
Beban jasa kini	10.232.768.206	9.412.658.785	*Current cost*
Biaya jasa lalu vested	-	130.217.146	*Past service costs vested*
Beban bunga	746.814.542	884.565.087	*Inters cost*
Pengukuran kembali imbalan jangka panjang lain	(7.570.889.783)	(7.433.572.037)	*Remeasurement other employee benefit*
Jumlah	**3.408.692.965**	**2.993.868.981**	*Total*

Jumlah liabilitas imbalan pascakerja yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut: / *The amount of post-employment benefits liabilities recognized in the financial statements are as follows:*

	2021	2020	
Nilai kini kewajiban yang tidak didanai	12.320.480.164	13.381.184.199	*Present value of unfunded*

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut: / *Movements in the presents value of finacial position arising from post-employement benefit are as follows:*

19. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***19. EMPLOYEE BENEFIT*** *(continued)*

Program penghargaan masa bakti (lanjutan) / *Future Award Program (continued)*

	2021	2020	
Saldo awal	13.381.184.199	12.588.401.318	*Begining Balance*
Beban jasa kini	10.232.768.206	9.412.658.785	*Currents services cost*
Biaya jasa lalu vested	-	130.217.146	*Past service costs vested*
Beban bunga	746.814.542	884.565.087	*Interest cost*
Pembayaran manfaat	(4.469.397.000)	(2.201.086.100)	*Benefit payment*
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(7.570.889.783)	(7.433.572.037)	*Actuarial gain (loss)*
Saldo akhir	**12.320.480.164**	**13.381.184.199**	*Ending balance*

Program Tunjangan Hari Tua / *Mutual aid pension plan*

Perjanjian kerja sama antara Bank dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tentang Pengelolaan Program Tunjangan Hari Tua Kumpulan No.54/DIR/BR/2005 dan No.067.SJ.U.0805 tanggal 18 Agustus 2005.

The cooperation agreement between the Bank and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) About the Program Management Annuities set No.54/DIR/BR/2005 and No.067.SJ.U.0805 dated August 18th, 2005.

Program Masa Persiapan Pensiun / *Program Preparation Pension*

Program Masa Persiapan Pensiun dikelola sendiri oleh Bank dan merupakan program imbalan kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Program preparation pension is self-managed by the Bank and is an employee benefit plan for employees who will enter pension age.

Program Pensiun Iuran Pasti / *Defined Contribution Pension Plan*

Sesuai dengan dokumen perjanjian kerjasama No.022/DLK/1/2013 tanggal 24 Juni 2013, Bank mengadakan perjanjian kerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) pada tanggal 24 Juni 2013 tentang pengelolaan program pensiun iuran pasti bagi pegawai bank.

In accordance cooperation agreement document No.022/DLK/1/2013 dated June 24th, 2013 the Bank entered into a cooperation agreement with "Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46)" dated June 24th, 2013 regarding defined contribution pension plan for the Bank's employees.

Program Pensiun Manfaat Pasti / *Pension Plan*

Program pensiun manfaat pasti dikelola oleh Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Pension Plan managed by Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri.

Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan format POJK No.LAI-01/KAP-AJ/I/22 tanggal 31 Januari 2022 dan No.LAI-01/KAP-AJ/I/21 tanggal 20 Januari 2021 serta format PSAK No.00004/2.1055/AU.1/08/0842-2/1/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 dan No.00001/2.1055/AU.1/08/0842-1/1/I/2021 tanggal 20 Januari 2021.

The Financial Statements of the Riau Kepri Regional Development Bank Pension Fund for the years ended 31 December 2021 and 2020 have been audited by another independent auditor with the POJK format report No. LAI-01/KAP-AJ/I/22 dated 31 January 2022 and No. LAI-01/KAP-AJ/I/21 dated January 20, 2021 and the format of PSAK No.00004/2.1055/AU.1/08/0842-2/1/I/2022 dated January 31, 2022 and No.00001/2.1055/AU. 1/08/0842-1/1/I/2021 dated January 20, 2021.

	2021	2020	
Laporan nilai kini aktuarial			*Actuarial present value statement*
• Jumlah aset neto	440.276.255.933	425.711.779.757	*Total net assets* •
• Selisih kewajiban aktuaria	(29.962.978.933)	(15.941.848.812)	*difference actuarial liability* •
Kewajiban aktuaria akhir tahun	**410.313.277.000**	**409.769.930.945**	*Actuary liability at the year end*
Iuran normal bulanan			*Monthly normal contribution*
• Iuran Normal Peserta	1.501.767.325	1.553.799.200	*Attendance* •
• Iuran Normal Pemberi kerja	5.097.313.368	4.461.601.760	*Job provider* •
	6.599.080.693	**6.015.400.960**	

19. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Status aset (liabilitas) program imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Jumlah aset neto			*Total net assets*
• Aset neto awal tahun	425.711.779.757	397.201.915.914	*Net assets beginning of year* •
• Penyesuaian	-	-	*Adjustment* •
• Kenaikan (penurunan) aset bersih	14.564.476.176	28.509.863.843	*Increase (decrease) in net assets* •
Aset neto akhir tahun	**440.276.255.933**	**425.711.779.757**	*Net assets end of year*

Aset Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau terutama terdiri dari obligasi, Efek-efek dan deposito berjangka.

Rekonsiliasi atas perubahan aset (liabilitas) imbalan kerja selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Kenaikan (penurunan) aset bersih			*Increase (decrease) in net assets*
• Hasil usaha bersih	32.250.822.611	28.057.923.593	*Operation Income* •
• Peningkatan (penurunan) nilai investasi	(4.894.815.146)	11.782.467.822	*Increase(decrease) of investment value* •
• Kontribusi pemberi kerja	6.599.080.693	6.015.400.960	*Contribution of the companyn* •
• Imbalan yang dibayarkan	(19.390.611.982)	(17.345.928.532)	*Paid reward* •
• Pengurangan aset netto lainnya	-	-	*Decreasing of net others asset* •
Jumlah	**14.564.476.176**	**28.509.863.843**	*Total*

Pendapatan (biaya) imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020	
Hasil usaha			*Increase (decrease) in net assets*
• Hasil usaha investasi	39.832.650.654	35.550.587.220	*Investment Income* •
• Beban investasi	(353.997.463)	(340.862.729)	*Investment Expense* •
• Beban operasional	(7.379.269.004)	(7.064.378.806)	*Operating expenses* •
• Pendapatan dan beban lain-lain	151.438.424	111.310.728	*Income and other Expense* •
• Pajak penghasilan	-	(198.732.820)	*Income Tax* •
Jumlah hasil usaha bersih	**32.250.822.611**	**28.057.923.593**	*Total of net Income* •

Penyusunan Laporan Aktuaris Dana Pensiun Bank Riau Kepri per 31 Desember 2020 berdasarkan laporan aktuaria PT Dian Artha Tama Aktuaria dengan laporannya No.011/LA/DAT/I/2021 tanggal 19 Januari 2021.

Jumlah kewajiban yang berkaitan dengan program pensiun Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Riau secara keseluruhan sebagai berikut:

19. *EMPLOYEE BENEFIT* *(continued)*

Pension Plan (continued)

The employee benefits assets (liabilities) status as of December 31st, 2021 and 2020 are as follows:

Pension Fund assets of Bank Pembangunan Daerah Riau consist mainly of bonds, marketable securities and time deposits.

Following are the reconciliation of the movements of employee benefit assets (liabilities) during the year:

Employee benefits income (expenses) for the periods ended December 31st, 2021 and 2020 are as follows:

Preparation of the Bank Riau Kepri Pension Fund Actuary Report as of December 31, 2020 based on the actuarial report of PT Dian Artha Tama Aktuaria with its report No.011/LA/DAT/I/2021 dated January 19, 2021.

Total liabilitiy related to Pension Fund of Development Bank of Riau Regional overall are as follows:

19. IMBALAN KERJA (lanjutan)

19. EMPLOYEE BENEFIT *(continued)*

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Pension Plan (continued)

	2021	2020	
• Kekayaan untuk pendanaan	440.276.255.933	425.711.779.757	*Wealth for funding* •
• Liabilitas Solvabilitas	410.313.277.000	409.769.930.945	*Solvency Liability* •
• Nilai Kini Aktuaria	410.313.277.000	409.769.930.945	*Current Value of Actuarial* •
• Surplus (Defisit)	29.962.978.933	15.941.848.812	*Surplus (Deficit)* •
• Rasio/ kualitas pendanaan	107,30%	103,89%	*Funding ratio / quality* •

Iuran Normal 21,80% tahun 2021 dan 21,80% tahun 2020 terhadap Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).

Normal Contribution 21.80% in 2021 and 21.80% in 2020 towards Basic Pension Income (PhDP).

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria atas seluruh imbalan kerja di atas adalah:

Key assumptions used in the actuarial calculation for all types of employee benefits are:

• Bunga teknis	8% per tahun	*Actuarial interest rate* •
• Kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun	Tidak diasumsikan	*Annual salary growth rate* •
• Kenaikan Berkala Manfaat Pensiun	5% tiap dua tahun	*Periodic Increase in Pension Benefits* •
• Tingkat Mortalitas	GAM - 1971	*Mortality rate* •
• Tingkat cacat	0,1% per tahun	*Disability rate* •
• Tingkat pengunduran diri	0,05% per tahun	*Resignation rate* •
• Metode pembiayaan	*Attained Age Normal Cost*	*Cost method* •
• Selisih usia suami-istri	5 Tahun	*Different age* •

20. LIABILITAS LAIN-LAIN

20. OTHER LIABILITIES

	2021	2020	
Setoran jaminan bank garansi	12.108.652.961	13.953.136.153	*Bank guarantee collateral deposit*
Rek. perantara sistem dan ATM	8.252.175	5.896.839.545	*Attemt & ATM system account*
Beban bunga yang akan dibayar	333.611.054	1.170.533.333	*Interest expense will be paid*
Pos kredit dalam penyelesaian	27.703.106.835	16.596.123.057	*Account credit in progress*
Kredit kelolaan belum disalurkan	25.746.532	879.578.983	*Undirected loans*
Pendapatan bunga ditangguhkan	-	387.568.407	*Income deferred of interest*
Titipan jaminan kunci save deposit	668.250.000	610.500.000	*Save deposit guarantee*
Provisi	-	-	*Provision*
Selisih pasiva dalam penyelesaian	3.836.480.150	3.629.546.196	*Difference passiva in progress*
Liabilitas sewa	5.701.184.748	5.624.147.122	*Lease liabilities*
Lainnya	9.063.422.888	15.208.646.828	*Other*
Jumlah	**59.448.707.344**	**63.956.619.625**	*Total*

Setoran jaminan bank garansi adalah setoran penerbitan bank garansi yang belum jatuh tempo terdiri dari Setoran jaminan BG Penawaran, BG Pelaksanaan, BG Uang muka dan BG Pemeliharaan.

Deposit for bank guarantee collateral is the deposit for bank guarantee issuance not yet on due date consisting of the Deposit of Offering BG collateral, Application BG, Down payment BG and Maintenance BG.

Provisi bank garansi merupakan biaya perolehan yang diatribusi kepada nilai kredit (nilai wajar).

Provision is the cost of revenues attributed to the credit value (fair value).

21. MODAL SAHAM

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank telah dilakukan penyesuaian modal yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Riau Kepri, Akta No.1156 tanggal 29 November 2018, yang dibuat oleh Notaris Devi Ananji, S.H., M.Kn. Dalam akta tersebut juga ditetapkan modal dasar perseroan berjumlah Rp4.000.000.000.000 terbagi atas 40.000.000 saham yang terdiri dari 34.000.000 saham seri A dengan nilai nominal saham sebesar Rp100.000 dan 6.000.000 saham seri B dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp100.000.

Bank mengeluarkan 2 jenis saham yang terdiri dari saham seri A dan seri B. Saham seri A berhak menerima deviden terlebih dahulu, memiliki hak suara dalam mengajukan usul pencalonan anggota direksi dan komisaris perseroan serta dewan pengawas syariah serta dapat memiliki saham seri B dan memiliki 10 hak suara dalam setiap lembar.

Saham seri B merupakan saham yang berhak menerima dividen dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi, setelah pemegang saham seri A serta memiliki 1 hak suara dalam setiap lembarnya.

Dari modal dasar tersebut per 31 Desember 2007 telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak 5.160.400 lembar saham seri A dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp516.040.000.000.

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Bank Riau Kepri Akta No.277, tanggal 26 Desember 2008, yang dibuat Notaris Yondri Darto, SH Notaris di Batam, telah setor tambahan modal perseroan sebesar Rp63.156.800.000 sehingga dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham yaitu sebanyak 5.791.968 lembar saham seri A sehingga modal disetor per 31 Desember 2008 sebesar Rp579.196.800.000.

Pada tahun 2009 terdapat penambahan modal disetor sebesar Rp89.106.300.000, sehingga jumlah modal disetor Bank per 31 Desember 2009 menjadi Rp668.303.100.000 sebagaimana surat Direksi Bank Riau Kepri kepada Bank Indonesia, No.13/DIR/2010, tanggal 05 Januari 2010, tentang Laporan Perubahan Modal Disetor.

21. SHARE CAPITAL

To comply with the provisions of Law No.40 of 2007 dated 16 August 2007 concerning Limited Liability Companies, the Bank's Articles of Association have been adjusted to the capital as stated in the Deed on the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Bank Riau Kepri, Deed No.1156 dated 29 November 2018 , made by Notary Devi Ananji, SH, M.Kn. The deed also stipulates that the company's authorized capital is Rp.4,000,000,000,000 divided into 40,000,000 shares consisting of 34,000,000 series A shares with a share nominal value of Rp100,000 and 6,000,000 series B shares with a nominal value per share. in the amount of IDR 100,000.

The Bank issues 2 types of shares consisting of shares series A and shares series B. Shares series A shall be entitled to receive dividend first, have voting rights in forwarding votes for the candidates of the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the limited liability company as well as sharia supervisory board and able to possess shares series B and have 10 votes in each page.

Share series B is share entitled to received dividend and the remaining assets in liquidity process, after the share series A holder, as well having 1 vote in each page.

That authorized capital as of December 31st, 2007 has been placed and fully paid by shareholders that is 5.160.400 Seri A shares with total nominal Rp516.040.000.000.

Then based on the Minutes of Meeting Deed of Bank Riau Kepri, Deed No.277, dated December 26, 2008, Drawn up by Notary Yondri Darto, SH. Notary in Batam, have approved the fully paid additional of Rp63.156.800.000 so that from the authorized capital has been placed and fully paid by shareholders as much as 5.791.968 Seri A shares as of December 31st, 2008 Rp579.196.800.000.

In the year 2009 there are addition paid up capital amount Rp89.106.300.000 so that total paid capital Bank Riau Kepri per December 31st, 2009 to become amount Rp668.303.100.000 based on latter Director Bank Riau Kepri to Bank Indonesia, No.13/DIR/2010, date on January 5th, 2010, about change of paid in capital Statements.

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Bank sesuai akta No.53 tanggal 31 Desember 2010 oleh Notaris Fery Bakti, SH, direalisasikan penambahan modal disetor Bank sebesar Rp79.641.000.000. Jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham per 31 Desember 2010 dan 2009 sesuai dengan perubahan anggaran dasar yang diaktakan dengan akta No.06 tanggal 8 Januari 2010 oleh Notaris Fery Bakti, SH masing-masing sebesar 7.479.441 dan 6.683.031 lembar saham seri A dengan nilai nominal saham sebesar Rp100.000 per lembar saham atau masing-masing sebesar Rp747.944.100.000 dan Rp668.303.100.000. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp79.641.000.000 telah dicatat sesuai dengan administrasi Bank Indonesia berdasarkan surat No.13/25/DPIP/Prz/Pbr tanggal 25 April 2011 perihal perubahan modal disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham.

Perubahan modal disetor selanjutnya, sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang tercantum dalam Berita Acara Rapat dengan akta No.45 tanggal 30 Mei 2011 yang diaktakan oleh Notaris Fery Bakti, SH menyetujui besar modal disetor Bank per 31 Desember 2011 menjadi Rp826.873.900.000 atau 8.268.739 lembar saham.

Tambahan modal disetor tahun 2011 sebesar Rp78.929.800.000 Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp78.929.800.000 telah dicatat sesuai dengan administrasi Bank Indonesia berdasarkan surat No.13/25/DPIP/Prz/Pbr tanggal 25 April 2011 perihal perubahan modal disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham.

Pada RUPSLB tanggal 31 Mei 2011 diputuskan perubahan anggaran dasar sebagaimana akta No.47 tanggal 31 Mei 2011 oleh Notaris Fery Bakti, SH mengenai persetujuan dan pengesahan perubahan modal disetor Bank dari Rp826.873.900.000 meningkat menjadi Rp840.073.900.000. Kenaikan modal sebesar Rp13.200.000.000 berasal dari setoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp12.000.000.000 dan setoran Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura berupa tanah dengan nilai Rp1.200.000.000.

Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp13.200.000.000 telah dicatat dan ditatausahakan sesuai dengan administrasi Bank Indonesia berdasarkan surat No.14/12/DPB1/APBU/Pbr tanggal 7 Februari 2012 perihal Tambahan Setoran Modal dan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham.

21. SHARE CAPITAL *(continued)*

Based on changed of amendment of the Bank with notarial deed No.53 dated December 31st, 2010 by notaries Fery Bakti, SH of paid up capital in the Bank in the amount of Rp79.641.000.000. The total capital placed and deposited fully paid by the shareholders per the December 31st, 2010 and 2009 in accordance with the amendment of articles of association deeded by deed number 06 dated January 8th, 2010 by Notary Fery Bakti, SH respectively in the amount of 7.479.441 and 6.683.031 share certificates series A with share nominal value in the amount of Rp100.000 per share certificate or each in the amount of Rp747.944.100.000 and Rp668.303.100.000. Additional placed of capital and paid up capital amounted of Rp79.641.000.000 has been recorded in the administration of Bank Indonesia based on the letter No.13/25/DPIP/Prz/Pbr dated April 25th, 2011 on the subject of changes in deposited capital dan fully paid by the shareholders, respectively.

Changes in deposited capital based on General Meeting Of Shareholders, notarial deed No.45 dated on May 30th, 2011 by notaries Fery Bakti, SH accepted its authorized fully paid up capital of Bank as of December 31st, 2011 was changed to become Rp826.873.900.000 or 8.268.739 share.

Paid up capital in 2011 amounted Rp78.929.800.000 Additional placed of capital and paid up capital amounted of Rp78.929.800.000 has been recorded in the administration of Bank Indonesia based on the letter No.13/25/DPIP/Prz/Pbr dated April 25th, 2011 on the subject of changes in deposited capital dan fully paid by the shareholders, respectively.

On Extraordinary General Meeting (EGM), Based on amandment of the Bank of notarial deed No.47 on May 31st, 2011 by Fery Bakti, SH about approvement and legalization changing of authorized Bank capital from Rp826.873.900.000 to become Rp840.073.900.000. That capital raise amounting to Rp13.200.000.000 which are from the goverment of Kepulauan Riau province paid up amount Rp12.000.000.000 and land from the regional goverment of Siak Sri Indrapura was appraisal value are amounting to Rp1.200.000.000.

Additional placed of capital and paid up capital amounted of Rp13.200.000.000 has been recorded in the administration of Bank Indonesia based on the letter No.14/12/DPB1/APBU/Pbr dated February 7th, 2012 on the subject of Additional paid up capital and changing of shareholders composition.

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Modal disetor kembali ditingkatkan sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan akta No.45 tanggal 15 Juni 2012 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum. Berdasarkan akta tersebut posisi modal disetor Bank berubah dari Rp826.873.900.000 menjadi Rp840.073.900.000. Perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Bank Indonesia. Dengan demikian jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sebesar 8.400.739 lembar saham seri A dengan nilai nominal saham sebesar Rp100.000 per lembar saham atau sebesar Rp840.073.900.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat dengan akta No.60 tanggal 26 Juni 2012 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum, penambahan modal disetor sebesar Rp54.800.900.000 sehingga posisi modal disetor Bank telah berubah dari Rp840.073.900.000 menjadi Rp894.874.800.000. Berdasarkan surat dari Bank Indonesia mengenai Laporan Perubahan Modal Disetor Bank dengan No.14/52/DPB1/APBU/Pbr tanggal 28 Desember 2012, Bank telah mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia atas tambahan modal sebesar Rp54.800.900.000 yang telah ditata usahakan sesuai dengan administrasi Bank Indonesia.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank No.60 tanggal 26 Juni 2012 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum menerangkan bahwa telah disetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham sebesar Rp7.500.000.000 dari Kabupaten Anambas, perubahan tersebut merubah susunan modal ditempatkan yang semula sebesar Rp894.874.800.000 berubah menjadi Rp902.374.800.000.

Berdasarkan surat dari Bank Indonesia No.15/5/DPB1/APBU/Pbr tanggal 14 Januari 2013 mengenai Laporan Perubahan Modal Bank Riau Kepri, dijelaskan bahwa Bank telah mendapatkan pengesahan dari Bank Indonesia atas perubahan modal tersebut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank No.68 tanggal 26 Juni 2013 yang diaktakan oleh Notaris Refizal, SH, M.Hum menerangkan bahwa telah menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp54.771.300.000 sehingga posisi modal disetor Bank telah berubah dari Rp902.374.800.000 menjadi Rp957.146.100.000. Laporan perubahan modal disetor tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia berdasarkan surat No.15/9/DPKP/Pbr tanggal 17 September 2013.

***21. SHARE CAPITAL** (continued)*

Change Deposited Capital Based on General Meeting Of Shareholders (GMOS) were notarial deed No.45 dated on June 15th, 2012 by notaries Refizal, SH, M.Hum mentioned its authorized fully paid up capital of Bank was changed from Rp826.873.900.000 to become Rp840.073.900.000. That changed has been approved and recorded in the administration of Bank Indonesia. Therefore, total capital of share which placement and fully paid up by the shareholders are respectively in the amount of 8.400.739 share certificates series A with share nominal value in the amount of Rp100.000 per share certificate or each in the amount of Rp840.073.900.000.

Based on Meeting declare decision were notarial deed No.60 dated on June 26th, 2012 by notaries Refizal, SH, M.Hum, paid up capital amount to Rp54.800.900.000 mentioned its authorized fully paid up capital of Bank as of December 31st, 2012 was changed from Rp840.073.900.000 to become Rp894.874.800.000. Based on Letter of Bank Indonesia on the subject of Additional paid up capital and changing of shareholders composition with No.14/52/DPB1/APBU/Pbr dated December 28th, 2012, Bank has confirmed from Bank Indonesia about additional paid up capital amount to Rp54.800.900.000 was has been recorded in the administration of Bank Indonesia.

Based on the minutes of meeting of Bank deed No.60 dated on June 26th, 2012 by notarial Refizal, SH, M.Hum disclouse about additional paid up and fully paid capital by shareholders amounted to Rp7.500.000.000 from Anambas regional goverment, that changed was changing that additional fully paid with beginning are amounting to Rp894.874.800.000 to become Rp902.374.800.000.

Based on letter from Bank Indonesia No.15/5/DPB1/APBU/Pbr dated on Januari 14th, 2013 about changing report of Bank Riau Kepri capital placement and fully paid up, explained that Bank has obtain confirmation from Bank Indonesia as that changing.

Based on the minutes of meeting of Bank deed No.68 dated on June 26th, 2013 by notarial Refizal, SH, M.Hum disclouse about additional paid up and fully paid capital by shareholders amounted to Rp54.771.300.000 mentioned its authorized fully paid up capital of Bank as of December 31st, 2013 was changed from Rp902.374.800.000 to become Rp957.146.100.000. However that changed has approved and recorded in the administration of Bank Indonesia letter No.15/9/DPKP/Pbr on September 17th, 2013.

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Bank No.02 tanggal 1 Juni 2014 yang diaktakan oleh Notaris Fery Bakti, SH menerangkan bahwa telah disetujui penambahan modal disetor tahun 2013 sebesar Rp19.641.800.000.

Realisasi modal disetor pada tahun 2014 sebesar Rp19.641.800.000 sehingga total modal disetor bank per 31 Desember 2014 menjadi sebesar Rp976.787.900.000. Perubahan modal disetor bank telah disetujui Kantor OJK Provinsi Riau berdasarkan surat OJK No.S-139/KO.5411/2014 tanggal 9 September 2014.

Berdasarkan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Riau Kepri No.7 tanggal 8 November 2014 yang dibuat oleh notaris Fery Bakti, SH disetujui penambahan modal disetor pemerintah kota Batam sebesar Rp42.940.400.000 dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp10.000.000.000. Sebagaimana juga dinyatakan pada akta pernyataan keputusan rapat Bank No.06 tanggal 2 Desember 2014 yang dibuat oleh notaris Fery Bakti, SH menyetujui penambahan modal disetor tersebut diatas sehingga total modal disetor menjadi Rp1.029.728.300.000.

Penambahan modal disetor bank sebesar Rp52.940.400.000 dari semula sebesar Rp976.787.900.000 menjadi sebesar Rp1.029.728.300.000 telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat No.S-42/KO.5411/2015 tanggal 13 April 2015.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank yang dibuat oleh notaris Devi Ananji, SH., MKn, No.767 tanggal 20 Mei 2015 telah disetujui penambahan penyertaan modal oleh pemegang saham sebesar Rp19.475.000.000 dan telah dilaporkan kepada Kantor OJK berdasarkan surat bank No.433/DIR/2015 tanggal 23 Juni 2015.

Penambahan penyertaan modal oleh pemegang saham sebesar Rp19.475.000.000 telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat No.S-103/KO.5411/2015 tanggal 3 Agustus 2015, sehingga jumlah modal disetor bank per 31 Desember 2016 menjadi Rp1.049.203.300.000.

21. SHARE CAPITAL *(continued)*

Based on the the minute of the Extraordinary General Meeting of Bank No.02 on June 1st, 2014 by the deed of the Public Notary Fery Bakti, SH explained, that have been approved the increasing of paid in capital in the year 2013 amounted to Rp19.641.800.000.

Realization of paid-in capital in 2014 amounted to Rp19.641.800.000 bringing the total paid up capital of the bank at December 31st, 2014 amounted to Rp976.787.900.000. Changes in capital the bank has approved the Office of the OJK Riau Province by letter No.S-139/KO.5411/2014 dated September 9th, 2014.

Based on the minutes of the Extraordinary General Meeting of Bank No.7 on November 8th, 2014 made by notary Fery Bakti, SH approved additional paid-in capital amounted Rp42.940.400.000 Batam city government and the Government of the District of Rp10.000.000.000 Kepulauan Meranti. As also stated in the Deed of Bank Riau Kepri No.06 on December 2nd, 2014 made by notary Fery Bakti, SH agreed to increase the paid up capital of the above so that the total paid up capital be paid up capital of Rp1.029.728.300.000.

Increasing of paid in capital amounted Rp52.940.400.000 from Rp976.787.900.000 to Rp1.029.728.300.000 was recorded in the administrative supervision of the OJK under letter No. S-42/KO.5411/2015 dated April 13rd, 2015.

Based on the Bank's Deed made by notary Ananji Devi, SH., MKn, No.767 on May 20th, 2015 has approved the increase in capital by shareholders of Rp19.475.000.000 and has been reported to the office of OJK by letter bank No.433/DIR/2015 dated June 23rd, 2015.

The additional of capital participation by the share holders amounted to Rp19.475.000.000 had been recorded in the controlling administration of the OJK based the letter No.S-103/KO.5411/2015 dated August 3rd, 2015, so that the amount of paid up by the bank at December 31st, 2016 become amounted to Rp1.049.203.300.000.

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Bank yang dibuat oleh Notaris Feri Mondro, SH., M.Kn. No.1 tanggal 3 April 2017, sebagaimana akta tersebut telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, Kementerian Republik Indonesia, dengan suratnya No.AHU-AH.01.03-0124357 dan No.AHU-AH.01.03-0124358 tanggal 5 April 2017, telah disetujui penambahan penyertaan modal oleh pemegang saham berupa penambahan modal disetor sebesar Rp8.700.100.000 dan dividen saham sebesar Rp45.285.540.454, dan telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan surat bank No.319/DIR/2017 tanggal 21 April 2017 dan Nomor 672/DIR/2017 tanggal 12 September 2017. Telah disetujui penambahan modal disetor sebesar Rp7.700.000.000 sehingga modal disetor per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.056.903.300.

Penambahan penyertaan modal oleh pemegang saham berupa penambahan modal disetor sebesar Rp10.850.000.000 termasuk didalamnya sebesar Rp10.683.700.000 telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat No.S-1924/KO.053/2018 tanggal 31 Desember 2018, dan telah diakui sebagai modal disetor (modal saham). Bank mengakui sisa penambahan modal disetor sebesar Rp1.000.000.000 dalam liabilitas lain-lain dan sebesar Rp100.000 dalam tambahan modal disetor, karena belum memenuhi persyaratan kelengkapan dan pengesahan dari DPRD, serta belum dapat ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK. Posisi modal disetor bank per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.067.587.000.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" disingkat "PT Bank Riau Kepri" Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH., MH. tanggal 11 September 2019 Nomor 18 dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0095448.AH.01.02.Tahun 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Riau Kepri ditetapkan di Jakarta tanggal 17 November 2019. Modal dasar perseroan berjumlah Rp4.000.000.000.000 (Empat Triliun Rupiah). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.082.760.800.000 (Satu Triliun Delapan puluh Dua Miliar Tujuh ratus Enam puluh Juta Delapan ratus Ribu Rupiah).

Perubahan modal disetor Bank disetujui oleh OJK berdasarkan surat OJK No.S-1085/KO.053/2019 tanggal 8 Agustus 2019 perihal Laporan Perubahan Modal Disetor PT BPD Riau Kepri telah tercatat dalam tata usaha OJK, sehingga modal disetor Bank menjadi Rp1.077.760.700.000 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

***21. SHARE CAPITAL** (continued)*

Based on the Deed of Bank's Meeting Decision Statement made by Notary Feri Mondro, SH., M.Kn. No.1 dated April 3rd, 2017, as the deed has been recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of the Republic of Indonesia, with its letter No.AHU-AH.01.03-0124357 and No.AHU-AH.01.03-0124358 dated 5th April 2017, was approved by the additional share capital by shareholders in the form of additional paid-up capital amounting to Rp8.700.100.000 and dividends of shares amounting to Rp45.285.540.454, and has been reported to OJK based on bank letter No.319/DIR/2017 dated 21st April 2017 and No.672/DIR/2017 dated September 12th, 2017. It has been approved that the additional paid up capital of IDR 7,700,000,000 so that the paid up capital as of December 31, 2017 is IDR 1,056,903,300.

The addition of capital participation by the shareholders in the form of additional paid-up capital of Rp10.850.000.000 including Rp10.683.700.000 has been administered in the administration of OJK supervision based on letter No.S-1924/KO.053/2018 dated December 31th, 2018, and has been recognized as paid up capital (share capital). The Bank recognizes the remaining of paid-up capital of Rp1.000.000.000 in other liabilities and amounting to Rp100.000 in additional paid-in capital, as it has not fulfilled the requirements of the completeness and approval of the DPRD, and has not yet been administered in OJK supervision administration. The position of paid up capital of the bank as of December 31, 2018 amounting to Rp1.067.587.000.000.

Based on Deed of the Decree of the Limited Liability Company Meeting "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" abbreviated "PT Bank Riau Kepri" Notarial Deed Pupung Mulyantini, SH., MH. dated 11 September 2019 Number 18 and was approved based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU -0095448.AH.01.02. 2019 About Approval of the Amendment to the Articles of Association of the Limited Liability Company PT Bank Riau Kepri established in Jakarta on November 17, 2019. The authorized capital of the company amounted to Rp4,000,000,000,000 (Four Trillion Rupiah). Issued and fully paid capital of Rp1,082,760,800,000 (One Trillion Eighty Two Billion Seven hundred Sixty Million Eight hundred Thousand Rupiah).

Changes to the Bank's paid-up capital were last approved by OJK based on OJK's letter No. S-1085 / KO.053 / 2019 dated 8 August 2019 regarding PT BPD Riau Kepri's Changed Capital Change Report has been recorded in the OJK administration, so that the Bank's paid up capital is Rp1,077,760,700,000 (one trillion seventy-seven billion seven hundred and sixty million seven hundred thousand rupiah).

21. MODAL SAHAM (lanjutan)

Perubahan modal disetor Bank disetujui oleh OJK berdasarkan surat OJK No.S-1569/KO.053/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Laporan Perubahan Modal Disetor PT BPD Riau Kepri telah tercatat dalam tata usaha OJK, sehingga modal disetor Bank menjadi Rp1.082.760.700.000 (satu triliun delapan puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Penambahan modal disetor PT Bank Riau Kepri sebesar Rp17.700.000.000,- (tujuh belas miliar tujuh ratus juta rupiah). Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah), telah dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Luar Biasa PT Bank Riau Kepri, Akta No. 12 tanggal 8 Juli 2020, yang dibuat Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH.

Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Riau Kepri, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri, Akta No. 02 tanggal 03 Desember 2020, yang dibuat Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH.

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Riau Kepri tersebut telah didata oleh sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0082456.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020.

Perubahan modal disetor Bank terakhir disetujui oleh OJK berdasarkan surat OJK No. S-715/KO.053/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Laporan Perubahan Modal Disetor PT BPD Riau Kepri telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK, sehingga modal disetor Bank menjadi Rp1.100.460.700.000 (satu triliun seratus miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Penambahan modal disetor PT Bank Riau Kepri tahun 2021 sebesar Rp2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK, dengan surat OJK nomor S-330/KO.053/2021 tanggal 20 Agustus 2021 sehingga modal disetor Bank posisi 31 Desember 2021 menjadi Rp1.103.160.700.000 (satu triliun seratus tiga miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perubahan nama Pemegang Saham seri B yang semula atas nama Koperasi Karyawan Bank Riau Kepri menjadi Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri, telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK, dengan surat OJK nomor S-330/KO.053/2021 tanggal 20 Agustus 2021.

21. SHARE CAPITAL *(continued)*

The change in paid up capital of the Bank was approved by OJK based on OJK letter No. S-1569 / KO.053 / 2019 dated 31 December 2019 regarding PT BPD Riau Kepri's Changed Capital Change Report has been recorded in the OJK administration, so that the Bank's paid up capital is Rp1,082,760,700,000 (one trillion eighty-two billion seven hundred sixty million seven hundred thousand rupiahs).

The additional paid-in capital of PT Bank Riau Kepri is IDR 17,700,000,000 (seventeen billion seven hundred million rupiah). Bengkalis Regency Government amounting to Rp.10,000,000,000 (ten billion rupiah) and Indragiri Hilir Regency Government amounting to Rp.7,700,000,000, - (seven billion seven hundred million rupiah), have been carried out based on the Deed of Statement of the Resolution of the Extraordinary Meeting of PT Bank Riau Kepri Deed No. 12 dated 8 July 2020, made by Notary Pupung Mulyantini, SH, MH.

Amendment to the Articles of Association of PT Bank Riau Kepri, based on the Deed of Decision of the Shareholders outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri, Deed No. 02 dated December 3, 2020, made by Notary Pupung Mulyantini, SH, MH.

Approval of the Amendment to the Articles of Association of PT Bank Riau Kepri has been recorded by the Legal Entity Administration system in accordance with the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0082456.AH.01.02.Tahun 2020 dated 10 December 2020.

The last change in the Bank's paid-in capital was approved by OJK based on OJK letter No. S-715 / KO.053 / 2020 dated 8 December 2020 regarding the Report on Changes in Paid-in Capital of PT BPD Riau Kepri has been administered in the OJK supervisory administration, so that the Bank's paid-up capital is IDR 1,100,460,700,000 (one trillion one hundred billion four hundred sixty million seven hundred thousand rupiah).

The additional paid-in capital of PT Bank Riau Kepri in 2021 amounting to IDR 2,700,000,000 (two billion seven hundred million rupiah) originating from the Indragiri Hilir Regency Government, has been administered in the administration of OJK supervision, with OJK letter number S-330/KO. 053/2021 dated August 20, 2021 so that the paid-up capital of the Bank as of December 31, 2021 will be Rp1,103,160,700,000 (one trillion one hundred three billion one hundred sixty million seven hundred thousand rupiah).

The change in the name of the Series B Shareholder which was originally in the name of the Bank Riau Kepri Employee Cooperative to the Riau Kepri Amanah Sharia Consumer Cooperative, has been administered in the OJK supervision administration, with OJK letter number S-330/KO.053/2021 dated 20 August 2021.

21. MODAL SAHAM (lanjutan) / ***21. SHARE CAPITAL*** *(continued)*

Komposisi kepemilikan modal disetor per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Composition of Authorized capital December 31st, 2021 are as follow:

Perkiraan/ Akun	Lembar saham / *per share*	Nilai Per lembar saham (Rp) / *par value (Rp)*	Jumlah Nilai Saham (Rp) / *Value of share (Rp)*
Modal Dasar / *Authorized capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	34.000.000	100.000	3.400.000.000.000
Saham Seri B / *Share of B series*	6.000.000	100.000	600.000.000.000
Jumlah / *total*	40.000.000		4.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan disetor penuh / *Issued and fully paid up capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	11.001.607	100.000	1.100.160.700.000
Saham Seri B / *Share of B series*	30.000	100.000	3.000.000.000
Jumlah / *total*	11.031.607		**1.103.160.700.000**

No.	Pemegang Saham/ *Shareholders*	% Kepemilikan / *% ownership*	Lembar saham / *per share*	Nilai Per lembar saham (Rp) / *par value (Rp)*	Jumlah Nilai Saham (Rp) / *Value of share (Rp)*
1.	Provinsi Riau	38,00%	4.191.682	100.000	419.168.200.000
2.	Kota Pekanbaru	1,36%	150.000	100.000	15.000.000.000
3.	Kabupaten Kampar	9,53%	1.051.812	100.000	105.181.200.000
4.	Kabupaten Bengkalis	11,93%	1.316.062	100.000	131.606.200.000
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	0,58%	64.007	100.000	6.400.700.000
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	6,15%	678.772	100.000	67.877.200.000
7.	Kabupaten Siak Sri Indrapura	2,97%	327.110	100.000	32.711.000.000
8.	Kota Dumai	0,47%	52.030	100.000	5.203.000.000
9.	Kabupaten Pelalawan	2,90%	319.668	100.000	31.966.800.000
10.	Kabupaten Rokan Hulu	0,75%	82.807	100.000	8.280.700.000
11.	Kabupaten Rokan Hilir	3,37%	371.351	100.000	37.135.100.000
12.	Kabupaten Kuantan Singingi	1,38%	152.086	100.000	15.208.600.000
13.	Kabupaten Bintan	3,45%	380.789	100.000	38.078.900.000
14.	Kota Batam	4,53%	500.000	100.000	50.000.000.000
15.	Kabupaten Karimun	0,65%	71.900	100.000	7.190.000.000
16.	Kabupaten Natuna	3,08%	339.381	100.000	33.938.100.000
17.	Kota Tanjung Pinang	0,76%	83.913	100.000	8.391.300.000
18.	Kabupaten Kep. Meranti	5,44%	600.000	100.000	60.000.000.000
19.	Kabupaten Lingga	0,63%	70.000	100.000	7.000.000.000
20.	Provinsi Kepulauan Riau	1,09%	120.000	100.000	12.000.000.000
21.	Kabupaten Kepulauan Anambas	0,71%	78.237	100.000	7.823.700.000
22.	Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	0,27%	30.000	100.000	3.000.000.000
	Jumlah / *Total*	**100,00%**	**11.031.607**		**1.103.160.700.000**

Komposisi kepemilikan modal disetor per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Composition of Authorized capital December 31st, 2020 are as follow:

Perkiraan/ Akun	Lembar saham / *per share*	Nilai Per lembar saham (Rp) / *par value (Rp)*	Jumlah Nilai Saham (Rp) / *Value of share (Rp)*
Modal Dasar / *Authorized capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	34.000.000	100.000	3.400.000.000.000
Saham Seri B / *Share of B series*	6.000.000	100.000	600.000.000.000
Jumlah / *total*	40.000.000		4.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan disetor penuh / *Issued and fully paid up capital*			
Saham Seri A / *Share of A series*	10.974.607	100.000	1.097.460.700.000
Saham Seri B / *Share of B series*	30.000	100.000	3.000.000.000
Jumlah / *total*	11.004.607		**1.100.460.700.000**

21. MODAL SAHAM (lanjutan) / *21. SHARE CAPITAL (continued)*

No.	Pemegang Saham/ *Shareholders*	% Kepemilikan / *% ownership*	Lembar saham / *per share*	Nilai Per lembar saham (Rp) / *par value (Rp)*	Jumlah Nilai Saham (Rp) / *Value of share (Rp)*
1.	Provinsi Riau	38,09%	4.191.682	100.000	419.168.200.000
2.	Kota Pekanbaru	1,36%	150.000	100.000	15.000.000.000
3.	Kabupaten Kampar	9,56%	1.051.812	100.000	105.181.200.000
4.	Kabupaten Bengkalis	11,96%	1.316.062	100.000	131.606.200.000
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	0,58%	64.007	100.000	6.400.700.000
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	5,92%	651.772	100.000	65.177.200.000
7.	Kabupaten Siak Sri Indrapura	2,97%	327.110	100.000	32.711.000.000
8.	Kota Dumai	0,47%	52.030	100.000	5.203.000.000
9.	Kabupaten Pelalawan	2,90%	319.668	100.000	31.966.800.000
10.	Kabupaten Rokan Hulu	0,75%	82.807	100.000	8.280.700.000
11.	Kabupaten Rokan Hilir	3,37%	371.351	100.000	37.135.100.000
12.	Kabupaten Kuantan Singingi	1,38%	152.086	100.000	15.208.600.000
13.	Kabupaten Bintan	3,46%	380.789	100.000	38.078.900.000
14.	Kota Batam	4,54%	500.000	100.000	50.000.000.000
15.	Kabupaten Karimun	0,65%	71.900	100.000	7.190.000.000
16.	Kabupaten Natuna	3,08%	339.381	100.000	33.938.100.000
17.	Kota Tanjung Pinang	0,76%	83.913	100.000	8.391.300.000
18.	Kabupaten Kep. Meranti	5,45%	600.000	100.000	60.000.000.000
19.	Kabupaten Lingga	0,64%	70.000	100.000	7.000.000.000
20.	Provinsi Kepulauan Riau	1,09%	120.000	100.000	12.000.000.000
21.	Kabupaten Anambas	0,71%	78.237	100.000	7.823.700.000
22.	Kopkar Bank Riau (Seri B)	0,27%	30.000	100.000	3.000.000.000
	Jumlah / *Total*	**100,00%**	**11.004.607**		**1.100.460.700.000**

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

	2021	2020	
Dana setoran modal	2.084.940.000	2.084.940.000	*Paid Capital*
Provinsi Riau	405	405	*Riau Province*
Kota Pekanbaru	18.217	18.217	*Pekanbaru City*
Kota Tanjung Pinang	35.731	35.731	*Tanung Pinang City*
Kota Batam	11.793	11.793	*Batam City*
Kabupaten Kampar	18.574	18.574	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	29.804	29.804	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	11.089	11.089	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	102.548	2.700.102.548	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Bintan	22.286	22.286	*Bintan Regency*
Kabupaten Pelalawan	72.657	72.657	*Pelalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	37.421	37.421	*Rokan Hilir Regency*
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	2.000.000.000	-	*Riau Kepri Amanah Sharia Consumer Cooperative (Series B)*
Jumlah	**4.085.300.525**	**4.785.300.525**	*Total*

Tambahan modal disetor Pemegang Saham seri B Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri sebesar Rp2.000.000.000,- telah dilakukan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri, Akta No. 22 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH.

The additional paid-up capital for the Series B Shareholders of the Amanah Riau Kepri Sharia Consumer Cooperative in the amount of Rp. 2,000,000,000 has been made based on the Deed of Minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri, Deed No. 22 dated 18 June 2021, made by Notary Pupung Mulyantini, SH, MH.

22. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Rencana Tambahan modal disetor Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp4.000.000.000,- berupa tanah seluas 2.000 m2 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri, Akta No. 22 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum direalisasikan.

Rincian mutasi tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

***22. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL** (continued)*

Plan for additional paid-up capital by the Government of Natuna Regency in the amount of Rp4,000,000,000,- in the form of land with an area of 2,000 m2 based on the Deed of Minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri, Deed No. 22 dated 18 June 2021, made by Notary Pupung Mulyantini, SH, MH. However, as of December 31, 2021, it has not been realized.

The details of additional paid-in capital mutations as of December 31st, 2021 and 2020 are as follows:

Mutasi tambahan modal disetor per 31 Desember 2021

Mutation of Additional Paid-in Capital as of December 31st, 2021

Pemegang Saham / *Shareholders*	2021			
	Saldo awal tahun / *Beginning balance*	Penambahan / *Additional*	Reklasifikasi ke modal/ *Reclasification to paid capital*	Saldo Akhir Tahun / *Ending balance*
Dana setoran modal	2.084.940.000	-	-	2.084.940.000
Provinsi Riau	405	-	-	405
Kota Pekanbaru	18.217	-	-	18.217
Kota Tanjung Pinang	35.731	-	-	35.731
Kota Batam	11.793	-	-	11.793
Kabupaten Kampar	18.574	-	-	18.574
Kabupaten Bengkalis	29.804	-	-	29.804
Kabupaten Indragiri Hulu	11.089	-	-	11.089
Kabupaten Indragiri Hilir	2.700.102.548	-	- 2.700.000.000	102.548
Kabupaten Bintan	22.286	-	-	22.286
Kabupaten Pelalawan	72.657	-	-	72.657
Kabupaten Rokan Hilir	37.421	-	-	37.421
Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri (Seri B)	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000
Jumlah / Total	**4.785.300.525**	**2.000.000.000**	**- 2.700.000.000**	**4.085.300.525**

Mutasi tambahan modal disetor per 31 Desember 2020

Mutation of Additional Paid-in Capital as of December 31st, 2020

Pemegang Saham / *Shareholders*	2020			
	Saldo awal tahun / *Beginning balance*	Penambahan / *Additional*	Reklasifikasi ke modal/ *Reclasification to paid capital*	Saldo Akhir Tahun / *Ending balance*
Dana setoran modal	2.084.940.000	-	-	2.084.940.000
Provinsi Riau	405	-	-	405
Kota Pekanbaru	18.217	-	-	18.217
Kota Tanjung Pinang	35.731	-	-	35.731
Kota Batam	11.793	-	-	11.793
Kabupaten Kampar	18.574	-	-	18.574
Kabupaten Bengkalis	10.000.029.804		- 10.000.000.000	29.804
Kabupaten Indragiri Hulu	11.089	-	-	11.089
Kabupaten Indragiri Hilir	7.700.102.548	2.700.000.000	- 7.700.000.000	2.700.102.548
Kabupaten Bintan	22.286	-	-	22.286
Kabupaten Pelalawan	72.657	-	-	72.657
Kabupaten Rokan Hilir	37.421	-	-	37.421
Jumlah / Total	**19.785.300.524**	**2.700.000.000**	**- 17.700.000.000**	**4.785.300.525**

23. SALDO LABA / *23. RETAINED EARNINGS*

	2021	2020	
Telah ditentukan penggunaannya	1.622.420.554.773	1.436.832.699.051	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	455.259.363.458	538.216.586.168	*Unappropriated*
Jumlah	**2.077.679.918.231**	**1.975.049.285.220**	*Total*

Saldo laba telah ditentukan penggunaannya / ***Appropriated retained earnings***

	2021	2020	
- Cadangan umum	1.622.420.554.773	1.436.832.699.051	*General reserves* -
- Cadangan tujuan	-	-	*Purpose reserves* -
Jumlah	1.622.420.554.773	1.436.832.699.051	*Total*

Cadangan Umum / ***General reserves***

Penggunaan cadangan umum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengacu kepada perundang-undangan serta digunakan untuk menutup kerugian Bank.

The general reserves certainly by General Meeting Of Stockholders with refer to regulation by the Law and used for covered Bank losses.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tahun buku 2020 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Riau Kepri yang dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH.MH tanggal 18 Juni 2021 Nomor 21. RUPS memutuskan:

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the financial year 2020 based on the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri made by Notary Pupung Mulyantini, SH.MH dated June 18, 2021 Number 21. The GMS decided:

- Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2020;
- *Approved the 2020 Fiscal Year Annual Report;*

- Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen perseroan tahun buku 2020;
- *Approved the allocation of the use of the company's net profit and distribution of dividends for the 2020 financial year;*

  a. Menyetujui penggunaan cadangan jasa produksi pegawai 22,5% dan tantiem pengurus 2,5%;
  a. Approved the use of reserves for employee production services of 22.5% and management bonuses of 2.5%;

  b. Menyetujui untuk tahun buku 2021 komposisi cadangan jasa produksi pegawai dan tantiem pengurus sama dengan tahun buku 2020;
  b. Approved for the 2021 financial year the composition of the reserves for production services for employees and management bonuses is the same as for the 2020 financial year;

- Menyetujui Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2021 sebesar Rp21.000.000.000 (duapuluh satu miliar rupiah) kepada pemegang saham seri A;
- *Approved the Provision of Partnership Development Funds for 2021 in the amount of Rp. 21,000,000,000 (twenty one billion rupiahs) to series A shareholders;*

- Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri tahun buku 2021;
- *Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to establish a Public Accounting Firm to audit the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for the 2021 financial year;*

- Menyetujui besarnya anggaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Riau Kepri Tahun 2021 adalah sebesar Rp40.657.354.983,-.
- *Approved that the remuneration budget for the Board of Commissioners and Directors of PT Bank Riau Kepri in 2021 is IDR 40,657,354,983, -.*

23. SALDO LABA (lanjutan)

Saldo laba telah ditentukan penggunaannya (lanjutan)

Cadangan Umum (lanjutan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tahun buku 2019 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Tahun Buku 2019 PT Bank Riau Kepri dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH.MH tanggal 08 Juli 2020 Nomor 11. RUPS memutuskan:

- Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019;
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun buku 2019;
- Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun 2020;
- Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Tahun Buku 2020;
- Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Riau Kepri Tahun 2020.

***23. RETAINED EARNINGS** (continued)*

***Appropriated retained earnings** (continued)*

***General reserves** (continued)*

The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2019 financial year based on the Decision Statement of the 2019 Annual Meeting of PT Bank Riau Kepri was made by Notary Pupung Mulyantini, SH.MH dated July 8, 2020 Number 11. The GMS decided:

- *Approval of the 2019 Annual Report;*
- *Determination of the Use of the Company's Net Profits for the 2019 financial year;*
- *Approval for the Provision of Partnership Development Fund for 2020;*
- *Determination of the Public Accounting Firm for the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri for the 2020 financial year;*
- *Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Directors of PT Bank Riau Kepri in 2020.*

Cadangan umum	**2021**	**2020**	*General reserves*
Saldo awal	1.436.832.699.051	1.501.956.562.377	*Beginning balance*
Penambahan	185.587.855.722	123.609.298.071	*Addition*
Koreksi CKPN penerapan PSAK 71	-	(188.733.161.397)	*Correction of CKPN application of PSAK 71*
Saldo akhir	**1.622.420.554.773**	**1.436.832.699.051**	*Ending balance*

Saldo laba belum ditentukan penggunaannya / ***Unappropriated retained earnings***

	2021	**2020**	
Saldo awal	538.216.586.168	383.270.192.043	*Beginning balance*
Pembagian laba	(463.969.639.304)	(309.023.245.178)	*Profit sharing*
Koreksi saldo laba	(1.021.452)	-	*Correction of retained earnings*
Laba tahun berjalan	381.013.438.046	463.969.639.304	*Current year income*
Saldo akhir	**455.259.363.458**	**538.216.586.168**	*Ending balance*

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Tahun Buku 2020 PT Bank Riau Kepri dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH.MH tanggal 18 Juni 2021 Nomor 21. RUPS memutuskan alokasi penggunaan laba bersih tahun buku 2020 sesuai dengan yang diusulkan sebesar Rp463.969.639.304,-

- Dividen, komposisi 60% senilai Rp278.381.783.582,-
- Cadangan umum, komposisi 40% senilai Rp185.587.855.722,-

Based on the Decision Statement of the 2020 Fiscal Year Annual Meeting of PT Bank Riau Kepri made by Notary Pupung Mulyantini, SH.MH on 18 June 2021 Number 21. The GMS decided the allocation of the use of net profit for the 2020 financial year in accordance with the proposed Rp463,969,639,304,-

- *Dividend, composition 60% worth Rp278.381.783.582,-*
- *General reserve, 40% composition worth Rp185.587.855.722,-*

24. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH / *24. INTEREST AND SHARIA INCOME*

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah adalah sebagai berikut:

Interest income comprises interest income and Sharia income are as follows:

	2021	2020	
Bunga kredit yang diberikan	1.585.759.821.555	1.809.966.087.138	*Interest loans*
Bunga efek-efek yang dimiliki	184.782.990.797	200.088.062.110	*Interest securities owned*
Jasa giro Bank Indonesia	6.260.540.924	2.221.976.340	*Current accounts of Bank Indonesia*
Bunga dan jasa giro penempatan pada bank lain	4.980.966.311	35.655.922.877	*Interest and demand deposits for placements with other banks*
Jumlah pendapatan bunga	1.781.784.319.588	2.047.932.048.466	*Total interest income*

	2021	2020	
Pendapatan dari efek-efek yang dimiliki	82.597.421.557	38.347.609.291	*Income from securities owned*
Jasa giro Bank Indonesia	1.169.789.006	297.170.283	*Current accounts of Bank Indonesia*
Bagi hasil sertifikat investasi *mudharabah* bank	3.300.051.690	2.805.571.485	*Revenue share of investment certificates mudharabah bank*
Bagi hasil penempatan *mudharabah*	1.000.667.031	39.915.438	*Mudharabah profit sharing*
Pendapatan marjin *murabahah*	304.940.475.002	194.630.539.552	*Margin income of murabahah*
Pendapatan *rahn, Ijarah* dan Multijasa	24.091.040.873	21.014.370.642	*Rahn, Ijarah and Multijasa Income*
Bagi hasil pembiayaan *musyarakah*	14.968.681.745	11.727.830.348	*Musyarakah profit sharing loan*
Jumlah pendapatan syariah	432.068.126.903	268.863.007.039	*Total sharia income*
Jumlah	**2.213.852.446.491**	**2.316.795.055.505**	*Total*

25. BEBAN BUNGA DAN SYARIAH / *25. INTEREST AND SHARIA EXPENSES*

Beban bunga terdiri dari beban bunga dan syariah sebagai berikut:

Interest expenses consist of interest expense and sharia are as follows:

	2021	2020	
Bunga deposito berjangka	583.599.732.758	678.515.001.856	*Time deposit*
Bunga simpanan bank	4.165.724.444	18.282.409.581	*Interest expenses to Bank*
Bunga giro	82.805.234.135	89.770.770.160	*Current account expenses*
Bunga tabungan	48.663.868.190	47.200.033.262	*Savings expenses*
Bunga pinjaman yang diterima	772.990.675	1.438.011.889	*Interest expenses to Bank Ind*
Premi asuransi	48.741.853.018	44.637.017.127	*Insurance premium*
Jumlah beban bunga	768.749.403.220	879.843.243.876	*Total interest expenses*
Bagi hasil deposito *mudharabah*	131.917.968.626	109.879.763.450	*Nisbah share income for deposit*
Bagi hasil tabungan *mudharabah*	9.741.127.746	11.500.360.151	*Nisbah share income for savings*
Bonus *wadiah* non bank	1.022.087.810	971.604.233	*Non bank wadiah bonus*
Bonus simpanan lainnya *wadiah*	328.440.963	185.649.227	*Other savings bonuses are wadiah*
Bonus deposito *mudharabah* bank lain	1.405.483.075	1.841.957.502	*Other bank mudharabah deposit bonus*
Beban bagi hasil sertifikat IMA	251.708.333	97.319.444	*IMA certificate profit sharing expenses*
Premi asuransi	8.581.328.004	5.582.560.852	*Insurance Premium*
Bunga pinjaman yang diterima	208.344.105	88.709.107	*Interest expenses to Bank Ind*
Jumlah beban syariah	153.456.488.663	130.147.923.966	*Total sharia expenses*
Provisi dan komisi	243.677.558	1.162.303.427	*Fee and commision*
Jumlah	**922.449.569.440**	**1.011.153.471.269**	*Total*

26. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *26. OTHERS OPERATING INCOME*

	2021	2020	
Pendapatan administrasi	72.736.487.752	55.676.465.347	*Saving administration*
Provisi dan komisi selain kredit	40.573.378.056	31.435.940.265	*Non credit fee and commission*
Pendapatan restitusi biaya	9.518.723.538	14.512.854.318	*Cost restitution of income*
Pemulihan CKPN aset	70.128.198.522	189.056.843.422	*CKPN recovery assets*
Kredit hapus buku	7.999.423.210	6.406.101.597	*Loans written-off income*
Pendapatan fee	3.595.560.335	2.827.405.013	*Profit of obligation sales*
Keuntungan penjualan efek-efek	2.729.874.656	17.291.439.720	*Net profit of obligation sales*
Provisi dan komisi bank lain	5.000.000	31.900.000	*Credit fees and commissions*
Dividen dari penyertaan	10.667.481	13.209.123	*Dividends investments*
Selisih kurs	48.044.562	1.329.102.344	*Exchange rate gaps*
Jumlah	**207.345.358.112**	**318.581.261.149**	*Total*

27. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF / *27. ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES OF VALUE PRODUCTIVE ASSETS*

	2021	2020	
Kredit yang diberikan	34.627.281.173	44.517.709.516	*Loans*
Giro pada bank lain	3.397.463	1.957.778	*Current account with other banks*
Kelonggaran tarik	388.002.114	152.979.890	*Pull clearance*
Jumlah	**35.018.680.750**	**44.672.647.185**	*Total*

28. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA / *28. OTHER OPERATING EXPENSES*

a. Beban Umum dan Administrasi / *a. General and Administrative Expenses*

	2021	2020	
Promosi usaha	37.728.992.800	28.471.597.382	*Promotion expenses*
Beban sewa	31.632.842.696	34.221.567.050	*Rent expensess*
Perjalanan dinas	7.974.357.986	5.458.676.451	*Travelling expenses*
Listrik, air, telepon	27.847.126.252	28.104.576.559	*Electricity, water, telephone*
Keperluan kantor	24.400.140.191	21.894.496.739	*Office supplies*
Pengkajian dan pengembangan usaha	29.970.138.353	34.840.689.724	*Research and development*
Beban premi asuransi	12.037.436.948	12.093.560.940	*Insurance premium*
Pajak-pajak selain PPh Badan	1.661.409.493	1.717.060.548	*Tax exp. except income taxes*
Pemeliharaan aset tetap:			*Fixed assets maintenance:*
- Bangunan	15.404.277.235	10.616.154.423	*Building -*
- Inventaris	9.993.100.918	9.901.343.809	*Equipments -*
- Kendaraan	4.809.186.581	3.965.034.087	*Vehicle -*
Penyusutan:			*Depreciation:*
- Bangunan	15.633.908.758	15.555.429.081	*Building -*
- Inventaris golongan I	28.469.724.073	27.163.978.219	*Equipment group I -*
- Inventaris golongan II	6.704.788.944	6.961.599.359	*Equipment group II -*
Amortisasi beban tangguhan	5.445.488.676	5.752.712.245	*Deferred expenses amortization*
Penyusutan aset hak guna	16.063.623.152	13.869.529.095	*Depreciation of use rights assets*
Bunga liabilitas sewa	590.817.831	634.015.268	*Lease liability interest*
Beban umum dan administrasi lain	12.890.518.366	10.474.999.389	*Others general and administration*
Jumlah	**289.257.879.253**	**271.697.020.369**	*Total*

28. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (lanjutan) / ***28. OTHER OPERATING EXPENSES*** *(continued)*

b. Beban Tenaga Kerja / ***b. Employee expenses***

	2021	2020	
Imbalan kerja dan tunjangan Pegawai	151.857.284.408	148.455.777.930	*Employees' salaries & allowance*
Imbalan kerja dan tunjangan Direksi	4.968.728.000	3.707.500.000	*Director's salaries & allowance*
Honor Dewan Komisaris	1.619.000.000	2.180.500.000	*Board of comisioners fee*
Tantiem pengurus	9.525.335.951	11.599.240.983	*Management Tantiem*
Jasa produksi	85.728.023.560	104.393.168.843	*Employee bonuses*
Tunjangan hari raya	38.562.703.050	38.197.604.000	*Hari raya allowance*
Iuran pensiun, astek, THT	47.212.119.243	40.927.797.788	*Pension, labour insurance, THT*
Tunjangan PPh pasal 21	35.187.060.814	28.109.633.954	*Allowance of income tax 21*
Uang makan pegawai	46.849.432.000	46.567.490.000	*Employee meal expenses*
Pendidikan dan pelatihan	5.748.964.332	13.237.612.422	*Education & training benefits*
Penghargaan dan jasa masa bakti	3.408.692.965	2.993.868.981	*The inauguration of the Bank official*
Perawatan kesehatan	19.235.401.291	16.386.295.549	*Health care benefits*
Beban cuti	13.145.892.212	16.638.201.671	*Leave benefits*
Pakaian dinas	42.526.234.300	19.682.274.870	*Uniform*
Beban lembur	5.715.551.632	4.991.490.350	*Over time payment*
Tenaga kerja outsourcing	45.088.094.334	40.221.956.685	*Outsourcing employee*
Olah raga	2.237.000.055	1.904.920.648	*Sports*
Uji penilaian	97.013.671	10.694.000	*Assestment test*
Seleksi calon pegawai	517.096.978	55.113.600	*Employee recruitment selection*
Uang makan siswa magang	616.577.000	434.504.000	*Meal of student work*
Ibadah Haji	-	-	*Hajj*
Beban imbalan pascakerja	10.194.037.685	9.448.978.594	*Employee benefit expenses*
Tenaga kerja lainnya	5.343.918.005	15.249.901.115	*Other employee expenses*
Jumlah	**575.384.161.486**	**565.394.525.982**	*Total*

c. Lainnya / ***c. Others***

	2021	2020	
Jasa penagihan kredit	3.583.034.084	4.096.541.272	*Collector and loans service*
Pembinaan kemitraan	21.000.000.000	21.000.000.000	*Pathnership*
Pengamanan dan Penertiban	4.678.584.527	4.407.370.978	*Security and safety expenses*
Penyelesaian kredit dan perkara	1.620.528.603	234.335.515	*Credit clearance and court matters*
Rapat kerja	3.584.532.381	2.411.606.064	*Business meeting expenses*
Beban profesional	1.763.090.122	1.665.543.103	*Profesional fee*
Hidangan ringan pegawai	2.602.516.371	2.128.428.600	*snack employee*
Peresmian kantor	79.285.849	170.095.100	*Office grand opening*
Honorarium pihak ekstern	161.274.986	527.699.100	*Exsternal parties honorarium*
Santunan kematian/ cacat pegawai dan keluarga	796.226.485	554.665.000	*Donation of employee*
Imbalan penghimpunan dana	132.500.000	172.009.500	*Fund-raising rewards*
Penerbitan kartu kredit Pemerintah	-	4.400.000	*Government credit card issuance*
Operasional lainnya	7.750.983.425	7.847.866.426	*Other operating*
Jumlah	**47.752.556.833**	**45.220.560.658**	*Total*

28. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (lanjutan)

Bank membentuk penyisihan cadangan estimasi atas beban tantiem pengurus dan jasa produksi pada tahun 2021 dan 2020. Estimasi tersebut telah dicatat dan dibebankan pada periode tersebut. Pembayaran akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

Persetujuan penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan tahun 2021 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tahun buku 2020 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Tahun Buku 2020 PT Bank Riau Kepri dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH. MH tanggal 18 Juni 2021 Nomor 21.

Persetujuan penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan tahun 2020 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) tahun buku 2019 berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Tahun Buku 2019 PT Bank Riau Kepri dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH. MH tanggal 08 Juli 2020 Nomor 11.

Saldo kewajiban pembinaan kemitraan, yang disajikan pada kewajiban segera, per 31 Desember 2021 sebesar Rp38.497.983.916,- dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.892.361.564,-.

***28. OTHER OPERATING EXPENSES** (continued)*

The Bank establishes the setting aside of estimation reserve on the management dividend liability and the production service in 2021 and 2020. The estimation has been recorded and charged to that period. The payment shall be performed after obtaining the approval from the General Meeting of Shareholders.

Approval for the provision of the 2021 Partnership Development Fund based on the General Meeting of Shareholders. The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the financial year 2020 based on the Decision Statement of the Annual Meeting for the Financial Year 2020 of PT Bank Riau Kepri made by Notary Pupung Mulyantini, SH. MH dated June 18, 2021

Approval for the provision of Partnership Development Fund for 2020 based on the General Meeting of Shareholders. The Annual General Meeting of Shareholders (GMS) for the 2019 financial year based on the Decision of the 2019 Annual Meeting of PT Bank Riau Kepri was made by Notary Pupung Mulyantini, SH.MH on July 8, 2020 Number 11.

The balance of partnership development obligations, which is presented in immediate liabilities, as of December 31, 2021, is Rp. 38,497,983,916,- and as of December 31, 2020, is Rp. 41,892,361,564,-.

29. PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL

29. NON OPERATING INCOME (EXPENSES)

	2021	2020	
Pendapatan non operasional			***Non operating income***
Sewa	458.479.092	436.822.729	*Rent*
Keuntungan penjualan aset tetap	700.000	3.730.600	*Gains of fixed assets sales*
Lain-lain	11.969.247.729	6.074.460.241	*Others income*
Jumlah	**12.428.426.821**	**6.515.013.570**	*Total*
Beban non operasional			***Non operating expenses***
Denda yang dibayar	24.452.355	432.500.000	*Fine has been paid*
Iuran keanggotaan	15.675.848.022	12.086.039.072	*Member fee*
Lain-lain	32.964.730.372	18.380.029.674	*Others expenses*
Jumlah	**48.665.030.749**	**30.898.568.746**	*Total*
Jumlah - bersih	**(36.236.603.928)**	**(24.383.555.176)**	*Total - net*

Pos denda merupakan beban bank atas pembayaran denda yang dibayarkan kepada Bank Indonesia, denda keterlambatan atas setoran pajak dan beban keterlambatan kartu kredit serta denda lainnya.

Penalty post is the liability of the bank for penalty payment payable to Bank Indonesia, penalty for delay on tax deposit and liability of credit card delay and for other penalty.

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/ atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

30. RELATED PARTY TRANSACTIONS

In normal business activities, the Bank conducts transactions with related parties due to ownership and / or management relationships. All transactions with related parties have been carried out with mutually agreed policies and terms.

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) ***30. RELATED PARTY TRANSACTIONS*** *(continued)*

No	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan istimewa/ *Nature of relationship*	Transaksi/ *Transaction*
1.	Provinsi Riau / *Riau Province*	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
2.	Kabupaten Bengkalis / *Bengkalis Regional Goverment*	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
3.	Kabupaten Siak Sri Indrapura	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
4.	Kabupaten Pelalawan	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
5.	Kabupaten Indragiri Hulu	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
6.	Kabupaten Indragiri Hilir	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
7.	Kota Pekanbaru	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
8.	Kota Dumai	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)* dan Deposito (*Time deposit).*
9.	Kabupaten Bintan	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
10.	Kabupaten Rokan Hilir	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro (*current account*) dan Deposito (*time deposit*).
11.	Kabupaten Kuantan Singingi	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
12.	Kota Tanjung Pinang	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
13.	Kabupaten Kep. Meranti	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
14.	Provinsi Kepulauan Riau	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
15.	Kabupaten Kampar	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
16.	Kabupaten Lingga	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
17.	Kabupaten Karimun	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
18.	Kota Batam	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account) dan* Simpanan Deposito *(time deposit)*
19.	Kabupaten Natuna	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
20.	Kabupaten Rokan Hulu	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
21.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Pemegang Saham / *Shareholders*	Simpanan Giro *(current account)*
22.	Karyawan kunci / *Key Employees*	Direksi, Komisaris, Pemimpin Cabang, Pemimpin Divisi serta anggota keluarga dekat dengan orang-orang tersebut / *Directors, Commissioners, Heads of Branches, Heads of Divisions and close members of the families of such individuals*	Tabungan (*saving),* deposito *(time deposit)* dan Kredit yang diberikan *(Loans)*
23.	PD. BPR Rokan Hilir	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan *(saving),* Simpanan Giro *(current account)*
24.	PD Tuah Sekata	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account),* Simpanan Deposito *(Time deposits)*
25.	PT Penjaminan Kredit Daerah Prop. Riau	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account),* Simpanan Tabungan *(saving)* dan Simpanan Deposito *(Time deposits)*
26.	PT PER	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)* dan Simpanan Deposito *(Time deposits)*
27.	Riau Airlines	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)*

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) ***30. RELATED PARTY TRANSACTIONS*** *(continued)*

No	Pihak-pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat hubungan istimewa/ *Nature of relationship*	Transaksi/ *Transaction*
28.	PD BPR Rohul	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan *(saving)*
29.	PT Yastera	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)* dan Pinjaman *(Loan)*
30.	PD Rokan Hulu Jaya	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Tabungan (*saving* Simpanan Giro (*current account*)
31.	BPR Dana Amanah	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama / *Owned by the ultimate shareholders.*	Simpanan Giro *(current account)*

Dalam kegiatan usahanya, Bank juga mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

In the normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties. These transactions and balances include the following:

	2021	2020	
ASET			*ASET*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah			*Loans and Sharia funds*
Karyawan kunci	902.461.763	2.470.082.839	*Key management*
% terhadap jumlah aset	0,0029%	0,0088%	*% with compare to total asset*
LIABILITAS			*LIABILITIES*
Simpanan nasabah			*Deposits from customer*
Simpanan dari nasabah (catatan 14)	4.108.669.004.308	2.087.398.721.909	*% with compare to total liabilities (Note 14)*
% terhadap jumlah liabilitas	14,89%	8,31%	
Simpanan bank lain			*Deposits from customer*
Simpanan dari bank lain (catatan 15)	-	-	*Deposits from other Bank (Note 15)*
% terhadap jumlah liabilitas	0,00%	0,00%	*% with compare total liabilities*

Simpanan dari nasabah tersebut merupakan simpanan dari manajemen kunci, pemerintah daerah dan Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama.

Deposit from customer represent deposits from key management, province and regional goverment and The company which owned share by the ultimate shareholders.

Simpanan dari bank lain merupakan simpanan dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang sahamnya dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama.

Deposit from other Bank represent deposits from Bank Perkreditan Rakyat (BPR) which owned share by the ultimate shareholders.

Komitmen dan kontinjensi

Commitment and contingencies

Tidak terdapat saldo komitmen dan kontinjensi kepada pihak berelasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

There were no commitments and contingencies to related parties for the year ended December 31st, 2021 and 2020.

Kompensasi terhadap personil manajemen kunci Bank (diluar dari Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

Compensation of key management personnel of the Bank (excluded from Commisioners and Director) are follows:

30. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

30. RELATED PARTY TRANSACTIONS *(continued)*

Komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Commitment and contingencies *(continued)*

	2021	2020	
Gaji	11.344.110.000	10.294.490.000	*Salary*
Tunjangan	5.630.236.000	5.253.143.000	*Allowance*
Jasa produksi	8.783.902.046	5.295.685.242	*Production bonuses*
Imbalan jangka panjang	1.963.789.926	1.791.465.398	*Long-term benefit*
Jumlah	**27.722.037.972**	**22.634.783.640**	*Total*

31. INFORMASI SEGMEN

31. SEGMENT INFORMATION

Bank mempertimbangkan jenis usaha sebagai segmen utama dan lokasi geografis sebagai segmen sekunder.

The Bank considers the nature of its business as the primary segment and geographical areas as the secondary segment.

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha yang utama dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the primary segment information of the Bank is set out in the table below:

	2021	2020	
Aset konvensional	23.049.148.405.194	23.339.297.701.343	*Conventional assets*
Aset syariah	8.113.375.794.231	5.078.844.637.856	*Sharia assets*
Jumlah	31.162.524.199.425	28.418.142.339.199	*Total*
Eliminasi/ penyesuaian	(382.838.418.910)	(218.176.558.127)	*Elimination/ adjustment*
Jumlah	30.779.685.780.515	28.199.965.781.072	*Total*
Pendapatan operasional *)			*Operating income *)*
Konvensional	1.969.238.584.391	2.343.720.632.502	*Conventional*
Syariah	450.607.627.481	263.233.705.582	*Sharia*
Jumlah	2.419.846.211.872	2.606.954.338.084	*Total*
Eliminasi/ penyesuaian	1.351.592.731	28.421.978.570	*Elimination/adjustment*
Jumlah	2.421.197.804.603	2.635.376.316.654	*Total*
Pendapatan operasional bersih**)			*Operating income - nett **)*
Konvensional	1.433.513.060.228	1.593.632.223.250	*Conventional*
Syariah	306.682.227.164	143.571.582.948	*Sharia*
Jumlah	1.740.195.287.392	1.737.203.806.198	*Total*
Eliminasi/penyesuaian	(241.447.052.229)	(112.980.960.813)	*Elimination/adjustment*
Jumlah	1.498.748.235.163	1.624.222.845.385	*Total*

*) Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga dan syariah, dan pendapatan operasional lainnya.

**) Pendapatan operasional bersih terdiri dari pendapatan bunga dan syariah, dan pendapatan operasional lainnya dikurangi beban bunga dan syariah.

*) *Operating Income consist of interest and sharia income and other operating income.*

**) *Net operating income consists of interest income and sharia, and other operating income minus interest expense and sharia.*

Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha sekunder dari Bank disajikan dalam tabel di bawah ini:

Information concerning the secondary segment information of the Bank is set out in the table below:

31. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / ***31. SEGMENT INFORMATION*** *(continued)*

	2021	2020	
Aset			***Assets***
Kota Pekanbaru	19.935.731.373.642	15.024.776.683.927	*Pekanbaru City*
Kabupaten Kampar	1.063.531.871.033	1.311.169.801.372	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	795.352.225.069	1.012.923.271.721	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	739.349.077.697	898.360.133.663	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	456.521.246.907	609.187.491.512	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	1.066.412.481.064	1.204.553.344.243	*Siak Sri Indrapura Regency*
Kota Dumai	626.527.827.828	753.308.523.181	*Dumai City*
Kabupaten Pelalawan	644.126.549.014	769.370.795.721	*Pelalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hulu	927.471.362.568	1.101.934.870.014	*Rokan Hulu Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	983.291.283.843	1.121.215.645.516	*Rokan Hilir Regency*
Kabupaten Kuantan Singingi	561.134.303.976	693.847.100.330	*Kuantan Singingi Regency*
Kota Batam	925.330.195.064	1.038.428.522.572	*Batam City*
Kabupaten Karimun	431.692.541.750	490.891.014.105	*Karimun Regency*
Kabupaten Natuna	428.594.171.433	521.194.084.675	*Natuna Regency*
Kota Tanjung Pinang	951.988.170.819	1.104.440.779.853	*Tanjung Pinang City*
Kabupaten Kep. Meranti	408.268.610.539	517.215.232.876	*Kepulauan Meranti Regency*
Kabupaten Bintan	199.091.100.550	233.201.809.430	*Bintan Regency*
Kota Jakarta	18.109.806.629	12.123.234.488	*Jakarta City*
Jumlah	31.162.524.199.425	28.418.142.339.199	*Total*
Eliminasi/penyesuaian	(382.838.418.910)	(218.176.558.127)	*Elimination/adjustment*
Jumlah	**30.779.685.780.515**	**28.199.965.781.072**	*Total*

	2021	2020	
Simpanan Nasabah dan Bank Lain			***Deposit from costumer and Other Bank***
Kota Pekanbaru	10.405.644.984.879	9.062.089.806.298	*Pekanbaru City*
Kabupaten Kampar	670.928.748.934	611.053.146.009	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	1.978.055.994.108	825.190.566.020	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	778.753.553.857	765.870.767.508	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	562.503.994.968	457.914.333.868	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	1.058.170.811.331	844.299.647.730	*Siak Sri Indrapura Regency*
Kota Dumai	531.719.356.520	578.802.509.274	*Dumai City*
Kabupaten Pelalawan	472.972.123.271	456.085.995.595	*Pelalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hulu	514.997.433.348	371.842.265.131	*Rokan Hulu Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	867.824.213.345	754.483.049.927	*Rokan Hilir Regency*
Kabupaten Kuantan Singingi	625.131.152.527	586.926.236.210	*Kuantan Singingi Regency*
Kota Batam	720.841.227.090	735.575.412.532	*Batam City*
Kabupaten Karimun	400.506.205.824	316.363.114.937	*Karimun Regency*
Kabupaten Natuna	280.611.894.886	231.490.940.708	*Natuna Regency*
Kota Tanjung Pinang	968.876.367.647	904.947.650.625	*Tanjung Pinang City*
Kabupaten Kep. Meranti	197.258.823.566	196.903.501.340	*Kepulauan Meranti Regency*
Kabupaten Bintan	267.570.373.826	248.986.088.671	*Bintan Regency*
Kota Jakarta	5.354.165.779.896	6.152.587.068.539	*Jakarta City*
Jumlah	**26.656.533.039.823**	**24.101.412.100.923**	*Total*

31. INFORMASI SEGMEN (lanjutan) / ***31. SEGMENT INFORMATION*** *(continued)*

Pendapatan operasional / ***Operating Income***

	2021	2020	
Kota Pekanbaru	1.028.630.289.161	884.679.686.075	*Pekanbaru City*
Kabupaten Kampar	139.607.548.853	170.480.427.077	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	94.133.981.353	116.292.583.875	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	96.318.018.554	136.138.235.746	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	59.881.603.032	89.268.320.709	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	123.663.810.673	148.330.728.179	*Siak Sri Indrapura Regency*
Kota Dumai	78.232.092.846	94.835.232.645	*Dumai City*
Kabupaten Pelalawan	92.531.755.777	98.899.036.602	*Pelalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hulu	117.678.467.638	170.618.454.644	*Rokan Hulu Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	108.888.893.935	128.665.830.676	*Rokan Hilir Regency*
Kabupaten Kuantan Singingi	71.685.471.714	91.682.822.764	*Kuantan Singingi Regency*
Kota Batam	109.759.964.667	134.617.503.741	*Batam City*
Kabupaten Karimun	56.692.014.939	64.319.897.229	*Karimun Regency*
Kabupaten Natuna	51.872.033.302	60.947.905.466	*Natuna Regency*
Kota Tanjung Pinang	114.453.371.170	125.026.728.790	*Tanjung Pinang City*
Kabupaten Kep. Meranti	49.943.684.517	64.646.829.178	*Kepulauan Meranti Regency*
Kabupaten Bintan	25.225.932.813	27.082.180.455	*Bintan Regency*
Kota Jakarta	647.276.928	421.934.233	*Jakarta City*
Jumlah	2.419.846.211.872	2.606.954.338.084	*Total*
Eliminasi/penyesuaian	(205.993.765.381)	(290.159.282.579)	*Elimination/adjustment*
Jumlah	**2.213.852.446.491**	**2.316.795.055.505**	*Total*

Laba sebelum pajak / ***Income before Taxes***

	2021	2020	
Kota Pekanbaru	(298.902.954.105)	(349.293.495.553)	*Pekanbaru City*
Kabupaten Kampar	69.691.160.113	86.693.013.760	*Kampar Regency*
Kabupaten Bengkalis	70.997.874.198	75.867.815.795	*Bengkalis Regency*
Kabupaten Indragiri Hulu	60.699.847.618	95.018.444.466	*Indragiri Hulu Regency*
Kabupaten Indragiri Hilir	40.024.367.648	62.258.750.506	*Indragiri Hilir Regency*
Kabupaten Siak Sri Indrapura	67.842.773.824	93.988.431.808	*Siak Sri Indrapura Regency*
Kota Dumai	48.708.210.550	61.305.704.866	*Dumai City*
Kabupaten Pelalawan	51.309.922.081	57.942.230.945	*Pelalawan Regency*
Kabupaten Rokan Hulu	42.907.298.739	87.271.397.652	*Rokan Hulu Regency*
Kabupaten Rokan Hilir	55.543.120.846	79.854.670.994	*Rokan Hilir Regency*
Kabupaten Kuantan Singingi	43.454.609.884	58.630.291.232	*Kuantan Singingi Regency*
Kota Batam	47.153.875.813	62.799.936.858	*Batam City*
Kabupaten Karimun	27.685.223.686	30.620.889.188	*Karimun Regency*
Kabupaten Natuna	17.763.023.272	29.493.191.653	*Natuna Regency*
Kota Tanjung Pinang	51.459.032.039	74.708.199.971	*Tanjung Pinang City*
Kabupaten Kep. Meranti	18.411.375.112	15.123.738.608	*Kepulauan Meranti Regency*
Kabupaten Bintan	12.451.544.931	26.711.644.327	*Bintan Regency*
Kota Jakarta	85.557.644.757	13.479.092.849	*Jakarta City*
	512.757.951.006	662.473.949.922	
Eliminasi/ penyesuaian	2.340.401.907	10.380.586.092	*Elimination/ adjustment*
Jumlah	**515.098.352.913**	**672.854.536.014**	*Total*

32. LABA PER SAHAM / ***32. EARNING PER SHARE***

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih kepada pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Earning per share is calculated by dividing net income attributable to shareholders by the weighted average number of common shares outstanding during the year.

32. LABA PER SAHAM (lanjutan) / ***32. EARNING PER SHARE*** *(continued)*

	2021	2020	
Laba bersih setelah pajak	381.013.438.046	463.969.639.304	*Income after tax*
Rata2 tertimbang modal disetor	1.101.810.700.000	1.090.135.700.000	*Average paid in capital*
Laba bersih per saham	34.581	42.561	*Net profit per share*

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN / ***33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION***

Bank telah mengimplementasikan prosedur manajemen risiko sesuai dengan Penilaian tingkat kesehatan bank umum terakhir berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.03.2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan SE OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Bank harus mengelola serta melakukan mitigasi risiko sesuai ruang lingkup aktivitas bisnisnya.

The Bank has implemented risk management procedures in accordance with the latest commercial bank soundness assessment based on POJK Number 37/POJK.03.2019 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports and SE OJK Number 9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports . Banks must manage and mitigate risks according to the scope of their business activities.

Bank memiliki pengungkapan terhadap risiko di bawah ini yang berasal dari aktivitas bisnis dan instrumen keuangan:

The Bank has exposures to the following risks from financial instruments:

a. Risiko Kredit / *Credit Risk*
b. Risiko Pasar / *Market Risk*
c. Risiko Likuiditas / *Liquidity Risk*
d. Risiko Operasional / *Operating Risk*
e. Risiko Hukum / *Law Risk*
f. Risiko Reputasi / *Reputation Risk*
g. Risiko Stratejik / *Strategic Risk*
h. Risiko Kepatuhan / *Compliance Risk*

Catatan di bawah ini menyajikan informasi mengenai eksposur Bank terhadap setiap risiko di atas, tujuan, kebijakan dan proses yang dilakukan oleh Bank dalam mengukur dan mengelola risiko.

The following notes present information about the Bank's exposure to each of the above risks, the Bank's objectives and policies for measuring and managing risk.

Kerangka manajemen risiko / ***Risk management framework***

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko. Komite Pemantau Risiko merupakan pemantau risiko tertinggi di Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko tersebut menyetujui dan memonitor pelaksanaan kerangka dan kebijakan manajemen risiko Bank. Komite Pemantau Risiko tersebut mengadakan pertemuan secara rutin untuk menilai kinerja dari setiap portofolio kredit dan mendiskusikan masalah-masalah risiko. Dewan Komisaris mendelegasikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk implementasi strategi manajemen risiko.

Organization of the Bank's risk management involves oversight from the Commissioners, Directors, and the Risk Monitoring Committee. The Risk Monitoring Committee is the highest risk authority in the Commissioners' level. They approves and monitors the implementation of risk management policies and framework of the Bank. The Risk Monitoring Committee meets every month to assess the performance of the respective credit portofolios and discuss risk issues. Commissioners delegate authority to Board of Directors to implement the risk management strategy.

Komite Manajemen Risiko dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang ada di Bank. Komite Manajemen Risiko tersebut terdiri dari semua anggota Direksi dan senior manajer eksekutif. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Utama.

The Risk Management Committee is established by the Board of Directors and is responsible for managing risk of the Bank. The Risk Management Committee comprises of all members of the Board of Directors and senior management executives. It is chaired by President Director.

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Kebijakan manajemen risiko ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang dihadapi Bank, menetapkan batasan risiko dan pengendalian yang sesuai, serta mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar, produk, dan jasa yang ditawarkan. Melalui pelatihan serta standar dan prosedur pengelolaan, Bank mengembangkan lingkungan pengendalian yang taat dan konstruktif, dimana semua karyawan memahami tugas dan kewajiban mereka.

Komite Audit Bank memiliki tanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dan untuk menelaah kecukupan kerangka manajemen risiko yang terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). SKAI secara berkala maupun sesuai kebutuhan, menelaah pengendalian dan prosedur manajemen risiko dan melaporkan hasilnya ke Komite Audit Bank.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan nasabah atau Pihak ketiga gagal memenuhi kewajibannya.

Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan-kebijakan dan proses-proses yang meliputi kriteria pemberian kredit, tujuan dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio. Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio kredit Bank yang memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas kredit.

Bank terus melanjutkan untuk mengelola dan mengawasi secara aktif kualitas portofolio pinjaman yang diberikan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit secara efektif, penyempurnaan prosedur dan pengembangan system dalam upaya menjaga dampak negatif yang diakibatkan oleh kredit bermasalah.

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

Risk management framework *(continued)*

The Bank's risk management policies are established to identify and analyze the risks faced by the Bank, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to limits. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions, products and services offered. The Bank, through its training and management standards and procedures, aims to develop a disciplined and constructive control environment, in which all employees understand their roles and obligations.

The Bank's Audit Committee is responsible for monitoring compliance with the Bank's risk management policies and procedures, and for reviewing the adequacy of the risk management framework in relation to the risks faced by the Bank. The Bank's Audit Committee is assisted in these functions by Internal Audit. Internal Audit undertakes both regular and ad-hoc reviews of risk management controls and procedures, the results of which are reported to the Bank's Audit Committee.

a. *Credit Risk*

Credit risk is defined as the risk of losses associated with the possibility that a customer or unrelated party fail to meet its obligation.

Credit risk is managed through established policies and processes covering credit acceptance criteria, credit origination and approval, pricing, monitoring, problem loan management and portfolio management. The Bank also closely monitors the development of its loan portfolios, to enable the Bank initiate a preventive action in a timely manner when there is a deterioration in credit quality.

Bank continued to actively manage and monitor the loan portfolio quality by improving credit risk management policies effectively, improving procedures and systems development in an effort to keep the negative impact caused by non-performing loans (NPL).

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Bank telah mengimplementasikan upaya disetiap tahap yang berhubungan dengan aktifitas penagih hutang untuk meningkatkan proses penagihan dan memperkuat pemantauan kegiatan penagihan. Beberapa upaya telah dilakukan Bank untuk mengantisipasi hal tersebut seperti pengaturan tentang pembagian tugas dan fungsi karyawan untuk penagihan. Bank juga telah meminta setiap unit kantor menyusun rencana tindakan atau action untuk melakukan lelang, restrukturisasi kredit dan langkah-langkah konkrit lainnya dalam penyelesaian kredit bermasalah. Namun upaya yang dilakukan Bank belumlah maksimal. Bank masih membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk mengupayakan hal tersebut, terutama Bank yang berada di daerah kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

Bank belum melakukan perjanjian dengan agen penagihan (pihak ketiga) untuk membantu upaya Bank dalam melakukan penagihan, begitu juga dengan karyawan Bank yang masih perlu diberikan pelatihan dalam melakukan pekerjaan penagihan baik mengenai tata cara penagihan dan kode etik dalam melakukan penagihan. Divisi yang membidangi kredit bekerjasama dengan divisi terkait telah membentuk tim investigasi dan penyelesaian kredit bermasalah, serta secara rutin melakukan penagihan dan pembinaan kepada debitur.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas kredit atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Untuk aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk liabilitas kontinjensi, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus Bank bayarkan dalam hal timbul kewajiban atas instrumen yang diterbitkan. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah sebesar jumlah fasilitas yang belum ditarik dari nilai penuh fasilitas kredit yang telah disepakati (*committed*) kepada nasabah.

Berikut ini menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit Bank atas instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan dan komitmen dan kontinjensi (rekening administratif), tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau jaminan kredit lainnya.

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

a. *Credit Risk* *(continued)*

The Bank has implemented efforts at each stage relating to debt collection activities to improve the collection process and strengthen monitoring of collection activities. Several attempts have been made by the Bank to anticipate such matters such as arrangements on the distribution of duties and functions of employees for billing. The Bank has also asked each office unit to prepare an action plan or action to conduct auctions, credit restructuring and other concrete steps in the settlement of non-performing loans. However, the Bank's efforts have not been maximized. Banks still need a lot of human resources to work on it, especially Banks located in regencies, districts and sub-districts.

The Bank has not entered into an agreement with a collection agency (third party) to assist the Bank's efforts in collecting billing, as well as any Bank employees who still need to be trained in conducting both billing work and billing codes. The division in charge of credit in cooperation with related divisions has established a team of investigation and settlement of problem loans, and routinely collect and coach to the debtor.

Management Information Systems (MIS) are in place and cover a sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing for timely measures to be taken to counteract for any possible deterioration in credit quality or to minimize credit losses.

i. Maximum exposure to credit risk

For financial assets recognized on the statement of financial position, the maximum exposure to credit risk equals their carrying amount. For contingent liabilities, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the obligations of the instruments issued are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the un-drawn committed credit facilities granted to customers.

The following presents the Bank's maximum exposure to credit risk of statements of financial position and off balance sheet financial instruments, without taking into account of any collateral held or other credit enhancement.

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. *Credit Risk* *(continued)*

	2021	2020	
Laporan posisi keuangan:			*Statement of financial position:*
Giro pada Bank Indonesia	2.042.746.021.054	1.496.657.126.730	*Current account with Bank Indonesia*
Giro pada Bank lain	88.760.460.917	121.445.736.792	*Current account with other Bank*
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	3.334.381.279.547	616.985.351.609	*Placement with Bank Indonesia and other Bank*
Efek-efek	5.237.486.835.564	5.683.981.630.168	*Marketable securities*
Kredit yang diberikan, neto	18.388.304.138.811	18.433.640.599.171	*Loans, net*
Penyertaan, neto	1.555.783.335	1.555.783.335	*Investment, net*
Aset lain-lain	538.026.741.803	473.087.722.475	*Other assets*
Jumlah	**29.631.261.261.032**	**26.827.353.950.281**	*Total*

	2021	2020	
Komitmen dan kontinjensi - diluar laporan posisi keuangan:			*Commitment and contingencies off balanced sheet*
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	433.366.892.568	435.895.438.830	*Credit facilities to debtors that have not been used*
Bank garansi yang diterbitkan	30.137.587.834	36.799.431.815	*Bank guaranteed issued*
Jumlah	**30.094.765.741.434**	**27.300.048.820.926**	*Total*

Berdasarkan No.37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. SE OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional. Laporan Bank Umum Konvensional disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan mengenai pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko.

Based on No.37 / POJK.03 / 2019 dated 19 December 2019 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports. SE OJK Number 9 / SEOJK.03 / 2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports. Conventional Commercial Bank reports submitted to the Financial Services Authority explain disclosure of risk exposures and application of risk management.

Pengelompokkan wilayah/ *Grouping Area*

Wilayah / *Area*	Wilayah/ Area				
	Wilayah/area 1	Wilayah/area 2	Wilayah/area 3	Wilayah/area 4	Wilayah/area 5
Pekanbaru	✓	-	-	-	-
Kampar	✓	-	-	-	-
Bengkalis	✓	-	-	-	-
Indragiri Hulu	✓	-	-	-	-
Indragiri Hilir	✓	-	-	-	-
Siak Sri Indrapura	✓	-	-	-	-
Dumai	✓	-	-	-	-
Pelalawan	✓	-	-	-	-
Rokan Hulu	✓	-	-	-	-
Rokan Hilir	✓	-	-	-	-
Kuantan Singingi	✓	-	-	-	-
Batam	-	✓	-	-	-
Karimun	-	✓	-	-	-

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. *Credit Risk* *(continued)*

Pengelompokkan wilayah/ *Grouping Area*

Wilayah / *Area*	Wilayah/ Area				
	Wilayah/area 1	Wilayah/area 2	Wilayah/area 3	Wilayah/area 4	Wilayah/area 5
Natuna, Bintan dan Anambas	-	✓	-	-	-
Tanjung Pinang	-	✓	-	-	-
Kepulauan Meranti	✓	-	-	-	-
Lingga	-	✓	-	-	-
Diluar Riau dan Kepulauan Riau	-	-	✓	-	-

ii. Analisis risiko konsentrasi kredit

Bank melakukan pengungkapan kuantitatif atas pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan CKPN dengan melalui pendekatan yang akan digunakan berdasarkan sektor ekonomi (dalam jutaan rupiah):

ii. Concentration of credit risk analysis

The Bank has been quantitive disclosure of allowance for impairment losses (AFIL) as individual and colective, with statistic method was using in that calculating of allowance for impairment losses based on Economic Sector (In Millions of Rupiah):

Per 31 Desember 2021 / *As of December 31, 2021* :

Wilayah / *Area*	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / After Due Date			
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ *Agriculture, Forest and Fishing*	2.033.910	41.507	158.585	11.070	8.709	97.493
Pertambangan dan penggalian/*Mining and excavating*	1.187	-	990	1	-	834
Industri pengolahan/ *Manufacture industry*	31.579	790	6.888	312	55	5.729
Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan teknis/ *Professional, Scientific and Technical Activities*	2.048	-	1.488	5	-	1.269
Penyewaan, tenagakerja, dan Usaha Lainnya/ *Rental, employment, and Other Businesses*	15.413	723	4.495	259	31	3.467
Saldo dipindahkan/ *balance carry forward to next page*	2.084.137	43.020	172.445	11.647	8.795	108.792

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan) / ***33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION*** *(continued)*

a. Risiko Kredit (lanjutan) / **a. *Credit Risk*** *(continued)*

Per 31 Desember 2021 / *As of December 31, 2021* :

Wilayah / *Area*	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / After Due Date			
Pindahan/balance carry *forward from previous page*	2.084.137	43.020	172.445	11.647	8.795	108.792
Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	61.714	-	6.207	894	-	7.188
Konstruksi/*Construction*	1.255.808	-	30.202	19.710	-	15.526
Perdagangan besar dan eceran/*Commerce and retail*	633.051	19.443	114.323	9.741	2.771	73.495
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/*Acomodation and food supply*	382.845	3.036	7.588	5.439	704	5.552
Transportasi, pergudangan dan komunikasi/ *Transport, Warehousing and Communication*	14.067	166	2.550	109	1	1.378
Perantara keuangan/ *Financial Intermediaries*	53.433	-	15	909	-	9
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan/*Real estate, rental and company service*	5.194	169	1.014	36	0	895
Jasa Lainnya/ *Other Services*	96.851	4.377	10.997	1.005	283	7.029
Jasa pendidikan /*Education service*	2.708	385	-	21	-	-
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial/*Healthy service and sociality activation*	10.524	1.236	164	103	-	19
Jasa ke masyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya/ *Social service, social culture, entertainment and individual*	423	-	364	0	-	364
Saldo dipindahkan/ *balance carry forward to next page*	4.600.754	71.833	345.870	49.616	12.554	220.245

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan) / *33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION (continued)*

a. Risiko Kredit (lanjutan) / ***a. Credit Risk*** *(continued)*

Per 31 Desember 2021 / *As of December 31, 2021* :

Wilayah / *Area*	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 1	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 2	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Stage 3
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / After Due Date			
Pindahan/balance carry *forward from previous page*	4.600.754	71.833	345.870	49.616	12.554	220.245
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ *Individual service to serve housekeeping*	7.993	52	170	93	16	112
Bukan Lapangan Usaha/ *Not job opportunity*	14.808.649	266.004	185.948	22.339	47.065	145.474
Lainnya/*Others*	12.654.875	-	-	-	-	-
Jumlah/ *Total*	**32.072.271**	**337.889**	**531.988**	**72.047**	**59.634**	**365.832**

Per 31 Desember 2020/ *As of December 31, 2020* :

Wilayah / *Area*	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual / *Individual CKPN*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif / *Collective CKPN*	Tagihan yang dihapus buku / *Written-off Receivable*
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / After Due Date			
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan/ *Agriculture, Forest and Fishing*	1.915.198	77.301	174.242	13.689	22.123	115.914
Pertambangan dan penggalian/*Mining and excavating*	2.879	-	1.218	23	-	950
Industri pengolahan/ *Manufacture industry*	40.701	1.859	12.802	474	372	9.393
Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan teknis/ *Professional, Scientific and Technical Activities*	7.215	125	2.237	135	-	1.878
Penyewaan, tenagakerja, dan Usaha Lainnya/ *Rental, employment, and Other Businesses*	11.037	2.070	194	171	193	131
Listrik, Gas dan Air/ *Electricity, Gas and Water*	69.326	-	22	1.530	-	19
Saldo dipindahkan/ *balance carry forward to next page*	2.046.356	81.354	190.715	16.023	22.688	128.284

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan) / ***33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION*** *(continued)*

a. Risiko Kredit (lanjutan) / **a. *Credit Risk*** *(continued)*

Per 31 Desember 2020/ *As of December 31, 2020* :

Wilayah / *Area*	Tagihan / *Receivable*	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai / *Impaired Receivable*		Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual / *Individual CKPN*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif / *Collective CKPN*	Tagihan yang dihapus buku / *Written-off Receivable*
		Belum jatuh Tempo / *Due Date Not Yet*	Telah jatuh Tempo / After Due Date			
Pindahan/balance carry *forward from previous page*	2.046.356	81.354	190.715	16.023	22.688	128.284
Konstruksi/*Construction*	1.269.959	651	32.563	22.670	573	15.688
Perdagangan besar dan eceran/*Commerce and retail*	659.626	37.150	124.573	9.927	8.281	74.265
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum/*Acomodation and food supply*	370.501	3.223	7.390	7.438	1.256	5.656
Transportasi, pergudangan dan komunikasi/ *Transport, Warehousing and Communication*	19.811	2.327	2.860	893	552	1.566
Perantara keuangan/ *Financial Intermediaries*	2.746.815	-	16	5.557	7	-
Real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan/*Real estate, rental and company service*	5.574	173	1.139	41	13	1.019
Jasa Lainnya/ *Other Services*	516	-	358	1	-	-
Jasa pendidikan /*Education service*	3.012	-	49	33	-	27
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial/*Healthy service and sociality activation*	13.050	824	485	284	3	25
Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya/ *Social service, social culture, entertainment and individual*	96.869	4.895	10.908	1.801	1.212	7.101
Jasa perorangan yang melayani rumah tangga/ *Individual service to serve housekeeping*	4.792	692	259	123	27	239
Bukan Lapangan Usaha/ *Not job opportunity*	15.039.762	302.352	165.828	29.737	58.729	111.125
Lainnya/*Others*	7.030.888	-	-	-	-	100
Jumlah/ *Total*	**29.307.531**	**433.641**	**537.144**	**94.527**	**93.341**	**345.094**

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki karakteristik yang sejenis yang dapat menyebabkan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi ataupun kondisi lainnya.

Bank mendorong adanya diversifikasi dari portofolio kreditnya pada berbagai wilayah industri, dan produk kredit sebagai upaya untuk meminimalisasi risiko kredit.

Pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko yang mencakup pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak Bank secara individual (dalam jutaan rupiah):

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

a. *Credit Risk* *(continued)*

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

The Bank encourages the diversification of its credit portfolio among a variety of industries, and credit product in order to minimize the credit risk.

Described the disclosure of risk exposure and risk management which includes the disclosure of net charges based on the remaining term of the contract Bank individually (in millions of rupiah):

Per 31 Desember 2021/ *As of December 31, 2021* :

Kategori Portofolio/*Portfolio Category*	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/*Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 s.d 3 tahun/ > 1 to 3 years	> 3 s.d 5 tahun/ > 3 to 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Non-Kontraktual/ Non-Contractual
Tagihan Kepada Pemerintah/*Goverment billed*	7.593.528	1.239.223	1.109.183	154.665	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Bill to Public entity sector*	60.191	-	250.972	53.685	-
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claims to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank/ *Billing to the Bank*	547.377	-	-	-	-
Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Loans with house guarantee*	74.721	91.029	26.888	105.968	-
Kredit Beragun Properti Komersial /*Loans with commercial property guarantee*	1.950	-	-	-	-
Kredit Pegawai/Pensiunan/ *Loans of employee or retired*	577.194	6.371.137	2.292.663	4.946.554	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Receivable to Micro business, small business and Retail Portfolio*	1.148.222	892.169	179.805	37.170	-

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. *Credit Risk* *(continued)*

Per 31 Desember 2021 (lanjutan)/ *As of December 31, 2021 (continued)* :

Kategori Portofolio/*Portfolio Category*	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/*Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 s.d 3 tahun/ > 1 to 3 years	> 3 s.d 5 tahun/ > 3 to 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Non-Kontraktual/ Non-Contractual
Tagihan Kepada Korporasi/ *Receivable to the Corporation*	127.062	338.157	1.019.924	105.481	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo/*With due dated*	2.636	9.103	15.249	138.789	-
Aset Lainnya/*Other assets*	-	-	-	-	1.919.824
Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)/ *Exposure in Sharia Business Unit (if it exist)*	-	-	-	-	-
Jumlah/ *Total*	**10.132.881**	**8.940.817**	**4.894.684**	**5.542.313**	**1.919.824**

Per 31 Desember 2020/ *As of December 31, 2020* :

Kategori Portofolio/*Portfolio Category*	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/*Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 s.d 3 tahun/ > 1 to 3 years	> 3 s.d 5 tahun/ > 3 to 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Non-Kontraktual/ Non-Contractual
Tagihan Kepada Pemerintah/*Goverment billed*	7.418.403	-	-	-	-
Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik/*Bill to Public entity sector*	37.757	95.166	67.920	237.308	-
Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional *Claims to The Multilateral Development Banks and International Institutions*	-	-	-	-	-
Tagihan Kepada Bank/ *Billing to the Bank*	344.188	49.583	-	-	-
Kredit Beragun Rumah Tinggal/*Loans with house guarantee*	1.493	17.206	37.332	206.967	-
Kredit Beragun Properti Komersial */Loans with commercial property guarantee*	-	-	-	1.029	-
Kredit Pegawai/Pensiunan/ *Loans of employee or retired*	91.497	859.281	1.829.860	11.677.416	-
Tagihan Kepada Usaha Mikro,Usaha Kecil dan Portofolio Ritel/*Receivable to Micro business, small business and Retail Portfolio*	175.691	869.441	882.977	184.107	-

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a. *Credit Risk* *(continued)*

Per 31 Desember 2020 (lanjutan)/ *As of December 31, 2020 (continued)* :

Kategori Portofolio/*Portfolio Category*	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Jangka Waktu Kontrak/*Net Billing Based on Contract Term*				
	< 1 tahun/ < 1 year	> 1 s.d 3 tahun/ > 1 to 3 years	> 3 s.d 5 tahun/ > 3 to 5 years	> 5 tahun/ > 5 years	Non-Kontraktual/ Non-Contractual
Tagihan Kepada Korporasi/ *Receivable to the Corporation*	125.704	17.801	23.464	1.363.492	-
Tagihan yang Telah Jatuh Tempo/*With due dated*	129.873	30.288	16.139	14.967	-
Aset Lainnya/*Other assets*	-	-	-	-	1.848.114
Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)/ *Exposure in Sharia Business Unit (if it exist)*	-	-	-	-	-
Jumlah/ *Total*	**8.324.606**	**1.938.765**	**2.857.691**	**13.685.286**	**1.848.114**

Penambahan diversifikasi ini berdasarkan rencana strategi Bank, sektor target, kondisi ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, sumber pendanaan, dan proyeksi pertumbuhan. Konsentrasi kredit yang diberikan berdasarkan jenis, sektor ekonomi, jatuh tempo, jangka waktu perjanjian kredit, Pihak berelasi dan kolektibilitas diungkapkan pada tabel diatas.

The extent of diversification is based on the Bank's strategic plan, target sectors, current economic conditions, government policy, funding sources and growth projections. Concentration of credit risk of loans receivable by type, economic sector, maturity, term of credit agreement, related party and collectibility is disclosed in table above.

Dalam hal pengendalian risiko kredit, Bank telah melaksanakan beberapa tahapan berikut:

- Menyediakan modal yang cukup untuk menutup risiko Bank dapat menyediakan modal baik dalam rangka memenuhi rasio kecukupan modal maupun dalam meng-*cover* risiko secara keseluruhan. Dalam hal ini Bank Riau Kepri telah menghitung ATMR Risiko Kredit dengan pendekatan standar dalam laporan KPMM.
- Memelihara kualitas aset produktif.
- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi.
- Meningkatkan efisiensi proses manajemen kredit.
- Meningkatkan budaya kredit yang sehat.
- Mempersiapkan bisnis yang cepat tanggap.

In the frame of controlling credit risk, Bank was doing for several step is as follow:

- *Providing sufficient capital to cover the risk Bank can provide the capital both in the framework of meeting the capital adequacy ratio as well as to cover the risk as a whole. In this case Bank Riau Kepri have contacted the Credit Risk ATMR with standard approach in the KPMM report.*
- *Maintaining productive asset quality.*
- *Supervising the active Board of Commissioners and Directors.*
- *Improving the credit management efficiency.*
- *Improving healthy credit culture.*
- *Providing quicker business response.*

b. Risiko Pasar

b. *Market Risk*

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivatif dari kedua jenis risiko pasar tersebut misalnya perubahan harga opsi.

Market risk is the risk arising from adverse movement in market variables in portfolios held by the Bank that could incur losses for the Bank (adverse movement). Market variables are defined as interest rates and exchange rates, including derivatives of these two types of market risk, i.e., change in option prices.

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko pasar ada di aktivitas fungsional Bank dan kegiatan *treasury* . Aktivitas ini mencakup penempatan dalam bentuk Efek-efek dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis lainnya) dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan melakukan kontrol atas eksposur risiko pasar dalam parameter yang dapat diterima, serta memaksimalkan tingkat pengembalian atas risiko.

Risiko pasar dikelola melalui kebijakan yang komprehensif dan kerangka limit untuk mengukur dan memonitor nilai risiko berdasarkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) oleh Bank. Limit dari risiko pasar ditetapkan pada tingkat *bank-wide* dan dilaporkan serta dipantau oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko setiap hari. *Management Action Triggers* (*MAT*) membantu manajemen pada saat tingkat risiko mencapai batasan-batasan tertentu.

ALCO berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk mengambil keputusan atas kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko pasar dan likuiditas. Divisi Pasar dan Risiko Likuiditas bertanggungjawab untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar di Bank berdasarkan kerangka yang disetujui oleh ALCO.

Secara keseluruhan, risiko pasar dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

i. Risiko nilai tukar

Merupakan penjumlahan dari nilai absolute dari selisih bersih aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan liabilitas baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

Bank wajib mengelola dan memelihara PDN paling tinggi 20% dari modal pada tengah hari kerja dan akhir hari kerja sepanjang hari berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan PBI No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 Tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum.

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

b. *Market Risk* *(continued)*

Market risk exists in both bankwide and treasury activities. These activities include placement in securities and money market, equity participation in other financial institutions, provisions of funds (loans and other similar forms), funding and issuance of debt instruments, and trade financing activities.

The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return on risk.

Market risk is managed through a comprehensive policy and limit framework to measure and monitor the amount of risk based on risk appetite of the Bank. Market risk limits are set at bankwide level and are reported and monitored by Compliance and Risk Management on a daily basis. Management Action Triggers (MAT) helps to sensitize the management in case the risk level is reaches certain thresholds.

ALCO acts as the apex senior management forum charged to take all decisions on policy regarding market and liquidity risk management. Market Risk is responsible for identifying, measuring, monitoring and controlling market risk in the Bank based on framework approved by ALCO.

On overall, market risk is divided into two following risks:

i. Value exchange risk

It is the total amount of the absolute value from the net difference of assets and liabilities in the balance sheet for every foreign exchange plus the net difference of receivables and payables both as commitments as well as contingencies in administrative account for every foreign exchange all of which are stated in rupiah.

The bank is compulsory to manage and maintain PDN at the highest 20% of the capital in the middle of the working day and at the end of the working day all day in accordance with PBI No.17/5/PBI/2015, dated may 29th, 2015 concerning the Fourth Change on Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 Concerning Public Bank Net Foreign Exchange Position.

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko nilai tukar (lanjutan)

Bank harus menetapkan limit internal *Net Open Position* (*NOP*) secara konsisten dalam rangka mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terutama dalam hal seluruh limit internal yang ditetapkan dan telah digunakan.

Perhitungan rasio Posisi Devisa Netto Bank dapat disajikan sebagai berikut:

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

b. Market Risk *(continued)*

i. Value exchange risk (continued)

The bank must decide on the limit internal Net Open Position (NOP) consistently in the framework of preventing the occurrence of exceeding the limit decided upon by the prevailing regulations, especially in the case of all internal limits decided and already used.

Calculated for Position Nett Deivizen Ratio at the Bank prepared as follow:

	2021	2020	
Aset Valuta Asing			*Foreign exchange asset*
Mata uang Euro			*Euro Currency*
Kas	185.776.664	198.712.978	*Cash*
Giro pada Bank lain	3.155.059.905	3.717.987.893	*Current account with other bank*
Jumlah	3.340.836.569	3.916.700.870	*Total*
Mata uang Dolar Amerika			*United State Dollar Currency*
Kas	12.488.539.338	3.451.986.650	*Cash*
Giro Bank Indonesia	5.059.637.500	4.987.750.000	*Current account with BI*
Giro pada Bank lain	19.029.216.538	35.478.655.922	*Current account with other bank*
Penempatan bank lain			*Placement to other Bank*
Deposito	71.262.500.000	-	*Deposit*
Pendapatan bunga yang akan diterima pada bank lain	2.850.500	-	*Interest income accrual with other Bank*
Tagihan Akseptasi	-	-	*Acceptances Receivable*
Jumlah	107.842.743.876	43.918.392.572	*Total*
Mata uang Dolar Singapura			*Singapore Currency*
Kas	1.714.625.140	2.687.009.945	*Cash*
Giro pada Bank lain	3.165.345.427	15.296.432.935	*Current account with other bank*
Penempatan bank lain			*Placement to other Bank*
Deposito	-	-	*Deposit*
Jumlah	4.879.970.567	17.983.442.879	*Total*

	2021	2020	
Liabilitas valuta Asing			*Foreign exchange liabilities*
Mata uang Euro			*Euro Currency*
Giro	66.278.604	3.225.079	*Current account*
Jumlah	66.278.604	3.225.079	*Total*
Mata USD			*United State Dollar Currency*
Giro	10.283.845.482	9.675.316.271	*Current account*
Deposito	70.205.835.613	86.394.644.250	*Deposit*
Efek-efek lainnya	-	-	*SBL-Interbank Call Money*
KU Yakim TT	-	421.500	*KU Yakim TT*
Bunga deposito masih harus dibayar	19.125.572	58.049.121	*Accrued deposit interest*
Beban bunga pinjaman bank	-	-	*Bank loan interest expense*
Kewajiban akseptasi	-	-	*acceptances Liabilities*
Jumlah	80.508.806.667	96.128.431.141	*Total*

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

33. *LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION* *(continued)*

b. Risiko Pasar (lanjutan)

b. *Market Risk* *(continued)*

i. Risiko nilai tukar (lanjutan)

i. Value exchange risk (continued)

	2021	2020	
Liabilitas valuta Asing			*Foreign exchange liabilities*
Mata SGD			*Singapore Currency*
Giro perseorangan dan Perusahaan	2.799.000.537	2.915.900.961	*Individual current account*
Deposito perorangan	1.910.458.598	1.996.910.358	*Individual deposit*
Liabilitas (Bunga Dep YMH)	412.793	735.220	*Liabilities (Accrued Deposit Interest)*
Jumlah	4.709.871.928	4.913.546.539	*Total*
Posisi Devisa Netto (PDN)			*Netto of Devisa Position*
Mata uang Euro	3.274.557.964	3.913.475.792	*Euro Currency*
Mata uang Dolar Amerika	27.333.937.209	52.210.038.569	*United State Dollar Currency*
Mata uang Dolar Singapura	170.098.640	13.069.896.340	*Singapore Currency*
Jumlah PDN	30.778.593.813	69.193.410.701	*Total PDN*
Jumlah PDN (dalam jutaan Rupiah)	30.779	69.193	*Total PDN (in millions Rupiah)*
Jumlah Modal (dalam jutaan Rupiah)	3.147.228	3.017.586	*Total Capital (in millions Rupiah)*
Rasio % PDN	0,98%	2,29%	*PDN ratio (%)*

Perhitungan Rasio PDN menyesuaikan dengan perhitungan data terbaru.

The calculation of PDN ratio, adjusts to the latest data calculation.

ii. Risiko tingkat suku bunga

ii. Interest rate risk

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi Bank yang mengandung risiko suku bunga.

Interest rate risk is the potential loss incurred from adverse movement in market interest rates with respect to a Bank position or transaction carrying interest rate risk.

Bank belum mengelola risiko suku bunga, sehingga Bank belum melakukan perhitungan atas risiko tingkat suku bunga Bank.

The Bank was not to carry out interest rate risk, with the result that Bank have not did calculated to Bank interest rate risk.

Tabel di bawah ini menyajikan portofolio Bank (tidak termasuk portofolio yang diperdagangkan) pada nilai tercatatnya, yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *re-pricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual (disajikan dalam jutaan rupiah):

The table below summarizes the Bank's nontrading portfolios at carrying amounts, categorized by the earlier of contractual re-pricing or maturity dates (expressed in million rupiah):

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

ii. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

b. Market Risk *(continued)*

ii. Interest rate risk (continued)

Akun/ *Account*	2021				
	Nilai tercatat (dalam jutaan Rupiah / *in million Rp) / Carrying amount*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate (dalam jutaan rupiah / in million rupiah)*			
		≤ 3 bulan/ *≤ 3 months*	3 - 12 bulan/ *Months*	12 - 24 bulan/ *Months*	> dari 24 bulan/ *More then 24*
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia / *Current accounts in Bank Indonesia*	2.042.746	2.042.746	-	-	-
Giro pada Bank Lain / *Current accounts in other Bank*	88.767	88.767	-	-	-
Penempatan pada Bank lain / *Placement in other Bank*	458.610	458.610	-	-	-
Surat-Efek-efek/ *Marketable securities*	5.238.384	2.375.012	-	-	2.863.372
Kredit yang diberikan/ *Loans*	18.884.914	-	226.697	163.439	18.494.778
Penyertaan/ *Investment*	1.556	-	-	-	1.556
Aset lain-lain/ *Other Assets*	538.027	-	538.027	-	-
Jumlah/ *Total*	27.253.004	4.965.136	764.724	163.439	21.359.705
Liabilitas/ *Liabilities*					
Simpanan nasabah/ *Deposit from customer*	25.615.733	19.706.287	5.887.249	22.197	-
Simpanan dari bank lain/ *Deposit from others* Banks	1.040.800	1.012.300	28.500	-	-
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond issued*	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	1.514.425	1.514.425	-	-	-
Jumlah/ *Total*	28.170.958	22.233.012	5.915.749	22.197	-
Pengaruh dari derivatif untuk manajemen Risiko/ *Effect of derrivatives held for risk management*	-	-	-	-	-
Selisih/ *Difference*	(917.954)	(17.267.877)	(5.151.025)	141.242	21.359.705

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

ii. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

b. *Market Risk* *(continued)*

ii. Interest rate risk (continued)

Akun/ *Account*	2020				
	Nilai tercatat (dalam jutaan Rupiah / *in million Rp) / Carrying amount*	Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate (dalam jutaan rupiah / in million rupiah)*			
		< dari 3 bulan/ *Less then 3 months*	3 - 12 bulan/ *Months*	12 - 24 bulan/ *Months*	> dari 24 bulan/ *More then 24 months*
Aset/ *Assets*					
Giro pada Bank Indonesia / *Current accounts in Bank Indonesia*	1.496.657	1.496.657	-	-	-
Giro pada Bank Lain / *Current accounts in other Bank*	121.448	121.448	-	-	-
Penempatan pada Bank lain / *Placement in other Bank*	157.322	157.322	-	-	-
Surat Efek-efek/ Marketable securities	5.689.527	4.175.653	965.804	-	548.069
Kredit yang diberikan/ *Loans*	18.960.949	-	1.286.409	1.253.427	16.421.112
Penyertaan/ *Investment*	1.656	-	-	-	1.656
Aset lain-lain/ *Other Assets*	473.088	-	473.088	-	-
Jumlah/ *Total*	26.900.646	5.951.080	2.725.301	1.253.427	16.970.837
Liabilitas/ *Liabilities*					
Simpanan nasabah/ *Deposit from customer*	22.142.644	16.173.735	5.946.539	22.370	-
Simpanan dari bank lain/ *Deposit from* others Banks	1.958.768	1.881.468	77.300	-	-
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond issued*	0	0			
Pinjaman yang diterima/ *Borrowings*	1.139.091	1.139.091	-	-	-
Jumlah/ *Total*	25.240.503	19.194.294	6.023.839	22.370	-
Pengaruh dari derivatif untuk manajemen Risiko/ *Effect of derrivatives held for risk management*	-	-	-	-	-
Selisih/ *Difference*	1.660.143	(13.243.214)	(3.298.538)	1.231.057	16.970.837

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko pasar, bank telah menyelesaikan beberapa tahap sebagai berikut:

- Melakukan identifikasi suku bunga secara tepat pada setiap penggunaan dana bank baik aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas bank secara keseluruhan.
- Melakukan *mark to market.*
- Setiap penempatan terhadap bank *counterparty* dilakukan kajian risiko oleh Divisi Manajemen Risiko terhadap fasilitas *credit line* yang akan diberikan.
- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi serta setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan instruksi dan rekomendasi Komite Aset dan Liabilitas (ALCO).

In the frame of implementation and controlling market risk, Bank has done several step is as follows:

- *Performing the interest rate identification accurately in every use of bank finance both for certain functional activities as well as bank activities as a whole.*
- *Performing mark to market.*
- *Every allocation on bank counterparty is done by risk evaluation by the Risk Management Division to the credit line facilities given.*
- *Active supervision on the active Board of Commissioners and Directors and every transaction is done in accordance with the instructions and recommendations by the Asset and Liability Committee (ALCO).*

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo dan menutup posisi di pasar. Risiko likuiditas merupakan risiko yang terpenting pada bank umum dan perlu dikelola secara berkesinambungan.

Asset and Liability Committee (ALCO) berperan sebagai forum manajemen senior tertinggi untuk memonitor situasi likuiditas Bank. ALCO bertanggungjawab untuk menentukan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan aset dan liabilitas Bank sejalan dengan prinsip kehati-hatian manajemen risiko dan peraturan yang berlaku.

ALCO menyetujui kerangka limit, mempertimbangkan struktur laporan posisi keuangan jangka panjang dari Bank. ALCO juga menyetujui asumsi likuiditas dan skenario *stress testing* yang akan diterapkan.

Bank mengelola risiko likuiditas melalui analisis perbedaan jatuh tempo likuiditas dan rasio-rasio likuiditas. Risiko likuiditas diukur dan dipantau secara harian berdasarkan kerangka kerja limit risiko likuiditas. Kerangka kerja digunakan untuk mengelola situasi likuiditas Bank pada kondisi normal (*business-as-usual*) dan kejadian kondisi *stress*. Rencana pendanaan darurat likuiditas (*liquidity contingency plan*) telah disusun untuk mempersiapkan Bank jika terjadi krisis likuiditas.

Eksposur terhadap Risiko Likuiditas

Analisis kesenjangan likuiditas untuk memberikan pandangan terhadap ketidaksesuaian arus kas masuk terkait dengan arus kas keluar di setiap saat. Kondisi ini dikelola secara terpusat oleh Tresuri yang mempunyai akses dan otorisasi secara langsung ke *interbank*, nasabah besar (*institusional*) dan *professional market* yang lainnya, dalam upaya membantu aktivitas bisnis Bank di pengumpulan dana dan pemberian kredit.

Salah satu rasio likuiditas adalah rasio dari aset likuid bersih terhadap liabilitas 1 bulan. Untuk tujuan ini, aset yang bersifat likuid termasuk kas dan setara kas dan Efek-efek berperingkat investasi, yang diperdagangkan secara aktif dan likuid di pasar dikurangi dengan simpanan dari bank dan komitmen yang jatuh tempo dalam satu bulan mendatang.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rasio dari aset likuid bersih terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

c. *Liquidity Risk*

Liquidity risk is the risk that the Bank is unable to meet its obligation associated with financial liabilities at due date. Liquidity risk is the most important risk to a commercial bank and as such needs to be managed on an on-going basis.

The Asset and Liability Committee (ALCO), which acts as the apex body entrusted to monitor liquidity situation of the Bank. ALCO is in charge of determining the policy and strategy of the Bank's asset and liabilities in line with the principles of prudent risk management and applicable regulatory requirements.

ALCO approves the limit framework, deliberates on the long term structural statement of financial position positioning of the Bank. In addition, ALCO approves all liquidity assumption and stress testing scenarios.

The Bank manages liquidity risk through liquidity gap analysis and liquidity ratios. Liquidity risk is measured and monitored on a daily basis based on liquidity risk limit framework. The framework manages the liquidity situation of the Bank under both a business-as-usual and stress event. Liquidity contingency plan is in place to prepare the Bank in the case of a liquidity crisis.

Exposure to Liquidity risk

Liquidity gap analysis provides insight as to the mismatch of expected cash inflows vis-à-vis outflows on any given day. This is centrally managed within Treasury which has direct and authorized access to interbank, wholesale, and other professional markets, to supplement core banking activities of lending and deposit taking.

One of liquidity ratios is net liquid assets to 1 month liabilities. For this purpose, net liquid assets are considered as including cash and cash equivalents and investment grade debt securities for which there is an active and liquid market less any deposits from banks and commitments maturing within next month.

As at December 31st, 2021 and 2020, the ratio of net liquid assets to deposits from customers were as follows:

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

c. Liquidity Risk *(continued)*

	2021	2020	
Kas dan setara kas	6.185.287.738.706	3.149.328.948.794	*Cash and cash equivalent*
Efek-efek yang tersedia untuk dijual	2.832.345.764.349	975.433.915.084	*Marketable securities available for sell*
Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	1.198.636.227.380	3.141.373.723.501	*Marketable securities available for held-to-maturity*
Simpanan dari Bank lain	(1.040.800.354.219)	(1.958.767.697.599)	*Deposit from other Banks*
Jumlah aset liquid bersih	**9.175.469.376.216**	**5.307.368.889.780**	*Total net liquid assets*

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, rasio dari aset likuid bersih terhadap simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

As at December 31st, 2021 and 2020, the ratio of net liquid assets to deposits from customers were as follows:

	2021	2020	
Simpanan dari nasabah	25.615.732.685.604	22.142.644.403.324	*Deposit from customer*
Rasio aset likuid bersih terhadap simpanan dari nasabah	36%	24%	*Ratio of net liquid assets to deposit from customers*

Kebijakan likuiditas Bank ditujukan untuk memastikan bahwa kebutuhan dana dapat dipenuhi, baik untuk membayar deposito pada saat jatuh tempo atau untuk kewajiban penarikan nasabah atau untuk memenuhi fasilitas kredit yang belum digunakan.

Bank's liquidity policy is purposed to ensure that funding requirements can be met, either to pay customer withdrawals or unused loan facilities.

Pengelolaan dan pemantauan posisi likuiditas Bank berada dalam tanggung jawab Bagian *Asset and Liabilities Management* di Divisi *Treasury*. Sumber dana dan waktu jatuh tempo deposito dikelola untuk menghindari adanya dana yang menganggur dan menentukan jumlah serta instrumen aset likuid yang tepat untuk menjamin tingkat likuiditas yang terkendali secara terus menerus.

Managing and monitoring the Bank's liquidity position is the responsibility for Asset and Liabilities Management Group in Division of Treasury. Sources of funds and maturity of time deposits maturing managed to prevent idle funds and determine the appropriate amount of liquid assets instrument to ensure a controlled level of liquidity continuously.

Nilai nominal arus masuk/arus keluar yang disajikan pada tabel di bawah ini merupakan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan terkait dengan pokok dan bunga atas liabilitas keuangan. Pengungkapan instrumen derivatif menunjukkan nilai bersih derivatif yang dapat diselesaikan secara neto, juga arus masuk dan keluar bruto untuk derivatif yang diselesaikan secara bersamaan (misalnya, kontrak berjangka valuta asing).

The nominal inflow/outflow disclosed in the following table represents the contractual undiscounted cash flows relating to the principal and interest on the financial liability or commitment. The disclosure for derivatives shows a net amount for derivatives that are net settled, but a gross inflow and outflow amount for derivatives that have simultaneous gross settlement (e.g. currency forward).

Bank telah membangun model pengukuran risiko likuiditas untuk mengukur risiko likuiditas dari portofolio aset dan kewajiban Bank, dan memberikan jaminan keamanan tambahan berdasarkan skenario terbaik (*best case*), terburuk (*worst case*) dan paling mungkin terjadi (*most probable case*).

The Bank has developed a liquidity risk measurement model to measure the liquidity risk of the Bank's assets and liabilities portfolio, and to provide additional security guarantees based on best case, worst case and most probable case scenarios.

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko likuiditas, Bank telah menerapkan beberapa langkah berikut:

- Menganalisa perilaku portofolio aset dan portofolio liabilitas.
- Memenuhi ketentuan otoritas moneter seperti pemeliharaan GWM Primer maupun GWM Sekunder baik dalam rupiah maupun valuta asing.
- Pengawasan aktif dari Komisaris dan Direksi.

- Memiliki rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*).
- *Monitoring* Likuiditas yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko setiap bulannya dari laporan keuangan, sehingga dapat diambil langkah-langkah mitigasi risiko likuiditas.

d. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan dari proses internal, faktor manusia dan sistem atau dari kejadian-kejadian eksternal.

Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank, dari mulai Kantor Pusat sampai cabang kecil di seluruh Indonesia. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian financial, keselamatan karyawan dan reputasi Bank.

Komponen utama Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko Operasional yang dijalankan berkesinambungan yaitu:

1. Akuntabilitas yang jelas

   Semua pihak di Bank menjalankan penugasan terkait dengan perannya masing-masing dalam pengelolaan risiko operasional.

   Direksi seperti halnya Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka kerja pengelolaan Risiko operasional secara menyeluruh serta pelaksanaannya.

   Unit bisnis dan fungsi *support* sebagai pemilik dari proses pengelolaan risiko dan fungsi Pengendalian Internal yang ada pada setiap *Risk Taking Unit* (RTU) berperan sebagai lini pertahanan lapis pertama dalam penegakan pengelolaan risiko operasional sehari-hari. Mereka bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengelola, memitigasi dan melaporkan Risiko Operasional.

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

c. *Liquidity Risk* *(continued)*

In the frame of liquidity risk control applied, Bank was doing several steps is as follows:

- *To analyzed behaviour of asset and liabilities portfolio.*
- *To considerate regulation of monetery otority likes Primery and secondary of statutory reserve maintenance in Rupiah or foreign exchange.*
- *Surveillance on active Board of Commissioners and Directors.*
- *By having contingencies funding plan.*

- *Liquidity monitoring by Risk Mangement Division for monthly from financial report, and then can take procedure of mitigate the liquidity risk.*

d. *Operational Risk*

Operational risk is defined as the risk of losses resulting from inadequate or failure of internal control processes, people and systems or from external events.

This type of risk is inherent in every business processes, operational activities, systems and products of Bank, from Head Office Units to micro branches located in remote areas of Indonesia. Failure to manage operational risks correctly could lead to financial losses, employee safety and reputation of the Bank.

Major components of Operational Risk Management Framework which are being consistently practiced are:

1. *The right accountability*

   All parties in the Bank are designated for their respective roles in the management of operational risk.

   The Board of Directors as well as the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of the overall operational risk management framework as well as its execution.

   Business unit and supporting unit as the owner of risk management process and Internal Control functions in each Risk Taking Units act as the first line of defence in day-today execution / implementation of operational risk management. They are responsible to identify, manage, mitigate and reports on Operational Risk.

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

d. Risiko operasional (lanjutan)

1. Akuntabilitas yang jelas (lanjutan)

Divisi Manajemen Risiko bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan dan Hukum berperan sebagai pertahanan lapis kedua.

Divisi Manajemen Risiko berfungsi dalam perancangan, pendefinisian, pengembangan dan pemeliharaan kerangka kerja risiko operasional secara keseluruhan, memantau penerapan kerangka kerja oleh RTU, memastikan kecukupan kontrol atas kebijakan dan prosedur, serta berperan sebagai koordinator/fasilitator atas aktivitas pengelolaan risiko operasional yang efektif.

Sedangkan Satuan Kerja Auditor Internal (SKAI) secara independen berperan sebagai pertahanan lapis ketiga.

2. Siklus pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko operasional, Bank mengacu kepada kerangka *Basel Accord* II, Ketentuan Bank Indonesia serta *International Best Practices*. Pengelolaan risiko operasional meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko operasional.

Disamping melakukan proses manajemen risiko terhadap risiko yang melekat dalam aktivitas *existing*, Bank juga melakukan penerapan manajemen risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai dengan jenis risiko yang telah ditetapkan dalam POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti yang salah satunya mengatur mengenai produk dan aktivitas Bank.

Bank telah mengalokasikan kebutuhan modal risiko operasional berdasarkan Basel Committee on Banking Supervision dan SE OJK No.24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

d. *Operational Risk* *(continued)*

1. *The right accountability (continued)*

Risk Management Division together with Compliance and Legal Division act as the second line of defence.

Risk Management Division function to design, defining, develop and maintaining the overall operational risk management framework, monitor the RTU's adherence to the framework, ensuring the control adequacy of policies and procedures, and act as the coordinator/facilitator of the overall operational risk management activities to ensure its effectiveness.

Meanwhile, the Work of Internal Auditors Unit (SKAI) are independently doing the role as the third line of defence.

2. *Operational Risk Management Cycle*

In order to implement operational risk management, Bank made reference to Basel Accord II, Bank Indonesia Regulations and International Best Practices. Operational risk management encompasses the identification, measurement, monitoring and operational control processes.

In addition take risk management process against the risks inherent in the existing activity. Bank also take a risk management implementation comprehensively of new products and activities issuing plan in accordance with the type of risk that has been established in POJK No.18/POJK.03/2016 dated March 16th, 2016 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks and SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 dated September 1st, 2016 regarding Application of Risk Management for Commercial Banks and SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 dated July 14th, 2016 on Business Activities of Commercial Banks Based on core capital, one of which regulates the Bank's products and activities.

The Bank has allocated operational risk capital requirements based on the Basel Committee on Banking Supervision and SE OJK No.24/SEOJK.03/2016 dated July 14, 2016 concerning Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk using the Basic Indicator Approach (PID).

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

d. Risiko operasional (lanjutan)

2. Siklus pengelolaan Risiko Operasional (lanjutan)

Bank menggunakan pendekatan *Basic Indicator* dan saat ini masih melakukan pengembangan terhadap perhitungan penyisihan modal dengan metode *Standardlized Approach* serta pengumpulan data risiko yang digunakan dalam perhitungan beban modal Risiko Operasional dengan menggunakan pendekatan yang lebih kompleks (*Advanced Measurement Approach*).

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko operasional, Bank telah menerapkan langkah berikut:

- Pengawasan aktif Komisaris dan Direksi.
- Memiliki kebijakan, prosedur dan proses untuk mengendalikan atau memitigasi risiko operasional sesuai dengan kompleksitas operasional bank.
- Adanya tindak lanjut atas hasil temuan Audit Intern dan Ekstern.

e. Risiko Hukum

Bank mengelola risiko hukum dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank dengan pihak ketiga didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank dari segi hukum. Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis dalam bisnis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Bank telah membentuk Divisi Hukum dan *Corporate Secretary* sebagai salah satu strategi pengendalian internal Bank terhadap potensi risiko hukum.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank. Bank mengelola risiko reputasi dengan memastikan kesesuaian antara aktivitas kegiatan usaha Bank bersama-sama dengan aktivitas lain sehingga reputasi Bank tetap terjaga.

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

d. Operational Risk *(continued)*

2. *Operational Risk Management Cycle (continued)*

Bank using Basic Indicator approach and methodology, is currently doing a development of the capital allowance calculation by method of Standardize Approach and the collection of risk data collection risk capital charges using a more complex approach (Advanced Measurement Approach).

In the frame of applied and controlling operational risk, Bank was doing several steps is as follows:

- *Surveillance on active Board of Commissioners and Directors.*
- *By having the policies, procedures and process to control or mitigate the operational risks in accordance with the complexity of the bank operation.*
- *The existence of follow-ups on the results of Intern and Extern Audit findings.*

e. Law Risk

The Bank manages the legal risks by making sure that all activities and relations of the Bank business activities with third party shall be based on the regulations and requirements that is able to protect the interests of the Bank from legal aspects. The legal risk is the risk resulted from the existence of weaknesses in the judicial aspect in business, among them resulted from the existence of lawsuit, the absence of supportive rules of laws the weaknesses in the bond such as not meeting the requirements for the validity of contract and the bond of collateral is not perfect. The Bank has formed Legal Division and Corporate Secretary as one of the strategies of the Bank's internal control against legal risk potential.

f. Reputation Risk

Risk reputation is the risk, among others, resulted from the existence of negative publication related to the Bank's business activities or negative perception toward the Bank. The Bank manages the reputation risk by making sure that the appropriateness between the Bank's business activities and other activities resulting in the Bank's reputation is still being maintained.

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

g. Risiko Stratejik

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. Bank mengelola risiko strategis melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh Direksi dan Komite-Komite yang telah dibentuk.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perudang-undangan dan ketentuan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- Tindakan mengelola Risiko Kepatuhan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan

- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pengendalian Penyelewengan

Dalam hal pelaksanaan dan pengendalian risiko penyelewengan, Bank telah menerapkan beberapa langkah berikut:

- Pengelolaan operasional Bank tidak tergantung pada kebijakan seseorang.
- Pengelola Bank dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, maupun keluarganya.
- Manajemen Bank memahami dan senantiasa mewaspadai jenis-jenis risiko yang melekat dalam kegiatan usaha Bank yang dipimpinnya.

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

g. Strategi Risk

The strategic risk is the risk among them resulted from the existence of determining and implementing inaccurate Bank's strategies, inaccurate business decision taking or the lack of responsiveness of the Bank towards external changes. The Bank manages the strategic risks through the process of consideration and decision taking for every strategic policy collectively and comprehensively by Board of Directors ad Committees already formed.

h. Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising resulted from the Bank not complying and/or not implementing the prevailing rules of laws and provisions, including the Sharia (Islamic Rules) Principal for Public Bank and Sharia Business Unit. The Bank implements the Compliance Function, the Bank Compliance Function includes the acts to:

- *Manifest the performance of Compliant Culture in all organizational levels and business activities of the Bank;*
- *Perform in managing Compliance Risk shall be done by referring to the provisions of Bank Indonesia concerning Risk Management for Public Bank;*
- *Make sure that the policies, provisions, systems, and procedures as well as business activities performed by the Bank has been in accordance with the provisions of Bank Indonesia and the prevailing rules of laws, including Sharia Principal for Sharia Public Bank and Sharia Business Units; and*
- *Make sure the compliance of the Bank to the commitment made by the Bank to Bank Indonesia and/or other supervising authorities in charge.*

Deviation Control

In the framework of applied and controlling deviation risk, Bank was doing several steps is as follows:

- *Managing operational of Bank is not depending on ones decision.*
- *Bank management in operate activities in the circumstance carrying out things for personal, family or group benefit.*

- *The managemen of Bank realize and always aware of any kind of risk stick in bank activity managed by them.*

33. PRAKTEK MANAJEMEN RISIKO YANG DIJALANKAN (lanjutan)

Pengendalian Penyelewengan (lanjutan)

- Pemilik Bank memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan banknya.
- Pemilik mayoritas menyerahkan pengelolaan Bank kepada manajemen profesional.
- Senantiasa diupayakan meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga bisa berkonsentrasi dalam bekerja.
- Senantiasa dilaksanakan pendidikan dan pelatihan termasuk pembinaan moral dan keagamaan dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan, iman dan *taqwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa.

33. LICENCES MANAGEMENT RISK IN OPERATION *(continued)*

Deviation Control *(continued)*

- *The owner of Bank have a strong comitment to develop their bank.*
- *The majority owner have submitted to carry out Bank to the professional management.*
- *Continously make an effort to increase official prosperity to make an effect of contrentration in doing work .*
- *Always carrying out education and training including building moral and religious in the framework on increasing ability, beliveness and obey the Only God.*

34. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Sebagian besar instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan disajikan menggunakan nilai wajar. Berikut ini adalah perbandingan antara nilai tercatat seperti yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan dan nilai wajar laporan keuangan.

Pada tabel berikut ini, instrumen keuangan telah dialokasikan berdasarkan klasifikasinya. Kebijakan akuntansi penting pada Catatan 2 menjelaskan bagaimana setiap kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur dan bagaimana pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian atas nilai wajar (perubahan nilai wajar instrumen keuangan) diakui.

Pengelompokan aset keuangan telah diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diperdagangkan; aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo; pinjaman yang diberikan dan piutang; dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Demikian halnya dengan setiap liabilitas keuangan juga telah diklasifikasikan menjadi yang diperdagangkan dan biaya perolehan diamortisasi.

Nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan informasi yang tersedia dan belum diperbaharui untuk merefleksikan perubahan keadaan pasar setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Tabel berikut ini merupakan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (dalam jutaan rupiah).

34. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

A significant number of financial instruments are carried at fair value in the statements of financial position. Below is the comparison of the carrying amounts, as reported on the financial position, and the fair value of financial statements.

In the following table, financial instruments have been allocated based on their classification. The significant accounting policies in Note 2 describe how the categories of the financial assets and financial liabilities are measured and how income and expenses, including fair value gains and losses (changes in fair value of financial instruments), are recognized.

Financial asset classes have been allocated into trading; held to maturity; loans and receivables and available for sale financial assets. Similarly, each class of financial liability has been allocated into trading and at amortized cost.

The fair value are based on relevant information available as at the statements of financial position date and have not been updated to reflect changes in market condition after the statements of financial position date.

The table below sets out the carrying amount and fair values of the Bank financial assets and liabilities as at December 31st, 2021 and 2020 (in millions rupiah).

34. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES *(continued)*

Perkiraan/ *Account*	2021						
	Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	diperdagangkan / *trading*	dimiliki hingga jatuh tempo/ *held-to-maturity*	pinjaman diberikan/ *Loans*	tersedia untuk dijual/ *Available for sale*	amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Aset keuangan							
Kas/*Cash*	-	-	719.394	-	-	719.394	719.394
Giro pada Bank Indonesia/*Current account with Bank Indonesia*	-	-	2.042.746	-	-	2.042.746	2.042.746
Giro pada bank lain/*Current account with others Bank*	-	-	88.760	-	-	88.760	88.760
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/*Placement with Bank Indonesia and other Banks*	-	-	3.334.381	-	-	3.334.381	3.334.381
Efek-efek/ *Marketable securities*	1.207.402	1.198.636	-	2.832.346	-	5.238.384	5.238.384
Kredit yang diberikan/ *Loan receivables*	-	-	18.388.304	-	-	18.388.304	18.388.304
Penyertaan saham/ *Investment in share of stocks*	-	-	1.556	-	-	1.556	1.556
Aset lain-lain / *Other assets*	-	-	538.027	-	-	538.027	538.027
Liabilities keuangan							
Kewajiban segera/ *Current liabilities*	-	-	-	-	667.015	667.015	667.015
Simpanan nasabah/ *Deposit from customer*	-	-	-	-	25.615.733	25.615.733	25.615.733
Simpanan dari Bank lain */Deposits from other Banks*	-	-	-	-	1.040.800	1.040.800	1.040.800
Obligasi yang diterbitkan / *Bond issued*	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima / *Borrowing*	-	-	-	-	151.442	151.442	151.442
Liabilitas lain-lain / *Other liabilities*	-	-	-	-	59.449	59.449	59.449

34. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES *(continued)*

Perkiraan/ *Account*	2020						
	Nilai tercatat / *Carrying amount*						
	diperdagangkan / *trading*	dimiliki hingga jatuh tempo/ *held-to-maturity*	pinjaman diberikan/ *Loans*	tersedia untuk dijual/ *Available for sale*	amortisasi lainnya/ *Other amortized*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	Nilai wajar/ *Fair value*
Aset keuangan							
Kas/*Cash*	-	-	914.232	-	-	914.232	914.232
Giro pada Bank Indonesia/*Current account with Bank Indonesia*	-	-	1.496.657	-	-	1.496.657	1.496.657
Giro pada bank lain/*Current account with others Bank*	-	-	121.446	-	-	121.446	121.446
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/*Placement with Bank Indonesia and other Banks*	-	-	616.985	-	-	616.985	616.985
Efek-efek/ *Marketable securities*	1.572.719	3.141.374	-	975.434	-	5.689.527	5.689.527
Kredit yang diberikan/ *Loan receivables*	-	-	18.433.641	-	-	18.433.641	18.433.641
Penyertaan saham/ *Investment in share of stocks*	-	-	1.556	-	-	1.556	1.556
Aset lain-lain/ *Other assets*	-	-	473.088	-	-	473.088	473.088
Liabilities keuangan							
Kewajiban segera/ *Current liabilities*	-	-	-	-	769.525	769.525	769.525
Simpanan nasabah/ *Deposit from customer*	-	-	-	-	22.142.644	22.142.644	22.142.644
Simpanan dari Bank lain /*Deposits from other Banks*	-	-	-	-	1.958.768	1.958.768	1.958.768
Obligasi yang diterbitkan/ *Bond issued*	-	-	-	-	-	-	-
Pinjaman yang diterima/ *Borrowing*	-	-	-	-	113.909	113.909	113.909
Liabilitas lain-lain/ *Other liabilities*	-	-	-	-	63.957	63.957	63.957

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, kecuali Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan yang mempunyai risiko nilai wajar, piutang pembiayaan konsumen, obligasi yang diterbitkan, dan pinjaman yang diterima, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair values:

The fair value of financial assets and liabilities, except for held to maturity marketable securities, loans with fair value risk, consumer financing receivables, bonds issued, and borrowings, approximated to the carrying amount largely due to short-term maturities of these instruments and/or repricing frequently.

34. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar Efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo dan obligasi yang diterbitkan ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal laporan.

Nilai wajar pinjaman yang diberikan yang mempunyai risiko nilai wajar, piutang pembiayaan konsumen, dan pinjaman yang diterima dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal laporan.

Nilai wajar investasi dalam saham dinilai sebesar biaya perolehannya karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

34. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES *(continued)*

The fair value of held to maturity marketable securities and bonds issued was determined on the basis of quoted market price as of reporting date.

The fair value of loans with fair value risk, consumer financing receivables, and borrowing are determined by discounting cash flows using market interest rate as at reporting date.

The fair value of investments in shares is carried at cost due to its fair value cannot be reliably measured.

35. RASIO KEUANGAN

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum, terakhir berdasarkan POJK Nomor 34/POJK.03.2016 tanggal 22 September 2016 Tentang Perubahan Peraturan OJK Nomor 11/POJK/03.2016 tanggal 29 Januari 2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Terakhir Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016, Tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Penilaian tingkat kesehatan bank umum terakhir berdasarkan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dan SE OJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

35. FINANCIAL RATIOS

Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) for Commercial Banks, based on POJK Number 34 / POJK.03.2016 dated 22 September 2016 concerning Amendments to OJK Regulation Number 11 / POJK / 03.2016 dated 29 January 2016 Concerning Minimum Capital Requirements for Commercial Banks.

Finally, Financial Services Authority Circular Letter Number 11 / SEOJK.03 / 2018 dated 15 August 2018 concerning Amendments to SEOJK Number 42 / SEOJK.03 / 2016 dated 28 September 2016, Concerning Guidelines for Calculating Risk-Weighted Assets (RWA) for Credit Risk Using Standard Approach.

The latest assessment of the soundness of commercial banks is based on POJK Number 37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports and SE OJK Number 9/SEOJK.03/2020 concerning Transparency and Publication of Conventional Commercial Bank Reports.

(dalam jutaan Rupiah)	**2021**	**2020**	*(in millions Rupiah)*
a. Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)		*a. Risk Weighted Assets*	
1) Setelah memperhitungkan Risiko Kredit	12.175.240	11.923.906	*After Credit Risk*
2) Setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional	14.906.485	14.456.804	*After Credit Risk and Operational Risk*
3) Setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Operasional, dan Risiko Pasar	14.937.265	14.525.997	*After Credit Risk, Operational Risk and Market Risk*
Komponen Modal			*Capital Componen*
Modal Inti	2.995.038	2.868.537	*Principle Capital*
Modal Pelengkap	152.190	149.049	*Capital Completion*
Total Modal	3.147.228	3.017.586	*Total Capital*

35. RASIO KEUANGAN (lanjutan) / ***35. FINANCIAL RATIOS*** *(continued)*

b. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) / *b. Capital Adequacy Ratio*

	2021	2020	
1) Setelah memperhitungkan Risiko Kredit	25,85%	25,31%	*After Credit Risk*
2) Setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Operasional	21,11%	20,87%	*After Credit Risk and Operational Risk*
3) Setelah memperhitungkan Risiko Kredit, Operasional, dan Risiko Pasar	21,07%	20,77%	*After Credit Risk, Operational Risk and Market Risk*

c. Rasio keuangan lain / *c. Other financial ratios*

1). Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1,77%	1,96%	*Productive assets with problems against total productive assets*
2). Laba sebelum pajak dibanding dengan rata-rata total aset (ROA)	1,93%	2,54%	*Income before taxes compared with average total assets (ROA)*
3). Laba bersih setelah pajak dibanding dengan rata-rata ekuitas (ROE)	12,49%	15,94%	*Income after taxes compared with average total equity (ROE)*
4). Beban operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO)	77,23%	73,54%	*Operating expenses compared with operating income (BOPO)*
5). Beban terhadap pendapatan (CIR)	63,87%	61,48%	*Cost To Income (CIR)*
6). Pendapatan bunga dikurangi beban bunga dibanding dengan rata-rata aset produktif *(Net Interest Margin)*	4,64%	5,32%	*Net interest Income compared with average productive assets (Net Interest Margin)*
7). Kredit yang diberikan dibanding dengan dana pihak ketiga (LDR)	73,72%	85,63%	*Loan compared with related parties fund (LDR)*
8). Kredit bermasalah dibanding dengan total kredit (NPL-Kotor)	2,82%	2,83%	*Non performance loan compared with total loans (NPL-Gross)*
9). Kredit bermasalah - CKPN kredit bermasalah terhadap total kredit (NPL-Bersih)	0,88%	1,01%	*Non performing loans - CKPN Non performing loans compare with total loans (NPL-Net)*
10). CKPN aset keuangan terhadap total aset produktif	1,68%	1,98%	*CKPN of financial assets to total productive assets*

35. RASIO KEUANGAN (lanjutan) / ***35. FINANCIAL RATIOS*** *(continued)*

d. Kepatuhan / *d. Compliance*

	2021	2020	
Persentase pelanggaran BMPK			*Percentage of BMPK violations*
i. Pihak terkait	0,00%	0,00%	*i. Related Parties*
ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	*ii. Unrelated Parties*
Persentase pelampauan BMPK			*Percentage of exceeding BMPK*
i. Pihak terkait	0,00%	0,00%	*i. Related Parties*
ii. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	*ii. Unrelated Parties*
Giro Wajib Minimum (GWM)			*Statutory Reserves (GWM)*
i. Bank Umum Konvensional			*Conventional Commercial Banks*
GWM Rupiah	8,93%	6,50%	*GWM main rupiah*
GWM Valas	5,96%	30,34%	*GWM foreign exchange*
ii. Bank Umum Syariah dan UUS			*i. Sharia Commercial Bank and UUS*
GWM Rupiah	4,07%	4,05%	*GWM main rupiah*
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,98%	2,29%	*Overall Net Foreign Exchange Position*

36. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN / ***36. SIGNIFICAN AGREEMENT***

1. Program "*Co-branding*" Kartu Kredit / ***1. Credit Card "Co-branding" Program***

Berdasarkan perjanjian No.166/CPMA/17 dan No.057/PKS/2017 tanggal 20 September 2017, Bank dan PT Bank Mega Tbk. melakukan kerjasama Co-Branding Pemasaran Kartu Kredit, dengan lingkup perjanjian sebagai berikut:

a. PT Bank Mega Tbk. menerbitkan kartu Co-Branding dan melakukan proses kegiatan kartu kredit pada umumnya antara lain persetujuan kartu kredit, operasional, layanan nasabah dan penagihan.

b. Bank melakukan pemasaran kartu Co-Branding meliputi:
   - Memasarkan, melakukan sosialisasi dan mempromosikan kartu Co-Branding;
   - Memberikan manfaat tambahan khusus untuk pemegang kartu Co-Branding melalui program Co-Branding;
   - Melakukan pelayanan nasabah.

Based on the agreement No.166/CPMA/17 and No.057/PKS/2017 dated September 20th, 2017, the Bank and PT Bank Mega Tbk. cooperating with Credit Card Marketing Co-Branding, with scope of agreement as follows:

a. PT Bank Mega Tbk. issuing Co-Branding cards and conducting credit card activities in general include credit card approval, operations, customer service and billing.

b. Banks conducting Co-Branding card marketing include:
   - *Marketing, socializing and promoting Co-Branding cards;*
   - *Provide special additional benefits to Co-Branding card holders through Co-Branding program;*
   - *Conducting customer service.*

36. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

1. Program "*Co-branding*" Kartu Kredit (lanjutan)

Profit sharing berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pembagian pendapatan Bank yang akan diterima dari PT Bank Mega Tbk. meliputi:
   - Annual fee: pembagian proporsi pendapatan 50% untuk Bank dan 50% untuk PT Bank Mega Tbk.
   - Seluruh pemegang kartu kredit Bank Visa dikenakan biaya annual fee kecuali pegawai (beserta kartu tambahan) Bank.
   - Late charge: pembagian proporsi pendapatan 50% untuk Bank dan 50% untuk PT Bank Mega Tbk.
   - Overlimit fee: pembagian proporsi pendapatan 50% untuk Bank dan 50% untuk PT Bank Mega Tbk.
   - Net interest margin: pembagian proporsi pendapatan 5% untuk Bank dan 95% untuk PT Bank Mega Tbk.
   - Admin fee: sejumlah Rp5.000.000 per bulan akan dikenakan kepada Bank. Apabila target pertumbuhan account pada pasal 8 tercapai, maka jumlah admin fee ini akan dikembalikan (*refund*) sepenuhnya kepada Bank. Pencapaian target akan dievaluasi setiap tahun, sesuai tanggal target pencapaian di pasal 8 pada perjanjian ini.
   - Biaya akuisisi akan diberikan kepada Bank untuk setiap kartu Co-Branding yang disetujui untuk kartu regular dan gold sebesar Rp140.000 per kartu.

b. Pembagian pendapatan profit sharing yang tersebut di atas dibayarkan setiap bulan oleh PT Bank Mega Tbk. kepada Bank paling lambat 20 hari kalender pada bulan berikutnya.

c. Jika pada 20 hari kalender sebagaimana yang dijelaskan pada ayat 2 pasal ini jatuh pada hari libur maka pembayaran pendapatan profit sharing tersebut di atas dibayarkan pada hari kerja pertama berikutnya.

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 60 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan 30 September 2022.

36. SIGNIFICAN AGREEMENT *(continued)*

1. Credit Card "Co-branding" Program *(continued)*

Profit sharing under the agreement is as follows:

a. Bank revenues to be received from PT Bank Mega Tbk. include:
   - *Annual fee: division of 50% revenue proportion for Bank and 50% for PT Bank Mega Tbk.*
   - *All Bank Visa credit card holders are charged annual fee fee except for employees (along with additional cards) of the Bank.*
   - *Late charge: division of 50% revenue proportion for Bank and 50% for PT Bank Mega Tbk.*
   - *Overlimit fee: division of 50% revenue proportion for Bank and 50% for PT Bank Mega Tbk.*
   - *Net interest margin: division of 5% revenue proportion for Bank and 95% for PT Bank Mega Tbk.*
   - *Admin fee: Rp5.000.000 per month will be charged to the Bank. If the account growth target in Article 8 is reached, then the amount of this admin fee will be fully refunded to the Bank. Achievement of targets will be evaluated annually, as per the date of achievement targets in article 8 of this agreement.*
   - *The acquisition fee will be given to the Bank for each Co-Branding card approved for regular and gold cards of Rp140,000 per card.*

b. The sharing of profit sharing profit mentioned above is paid monthly by PT Bank Mega Tbk. to the Bank no later than 20 calendar days of the following month.

c. If on the 20 calendar days referred to in paragraph 2 of this Article falls on a holiday, the above profit sharing payments payments are paid on the first subsequent business day.

This agreement is valid for a period of 60 months, starting from October 1st 2017 to September 30th 2022.

36. PERJANJIAN YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2). Perjanjian penyelenggaraan Anjungan Tunai Mandiri/ ATM Bersama

Pada tanggal 3 Oktober 2003, Bank mengadakan perjanjian penyelenggaraan ATM Bersama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis dengan perjanjian No.30/DIR/BPDR/X/2003. Perjanijan tersebut berlaku selama 36 bulan dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya sepanjang tidak ada perubahan dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut, Bank akan mendapatkan manfaat jaringan ATM Bersama di lebih dari 31.000 ATM di seluruh Indonesia.

36. SIGNIFICAN AGREEMENT *(continued)*

2). Joint Automatic Teller Machine/ ATM Agreement

On October 3rd, 2003, the Bank entered into a Joint ATM agreement with PT Artajasa Pembayaran Elektronis No.30/DIR/BPDR/X/2003 That agreement is for a period of 36 month dan will be automaticly renew for period of 1 year, if there is not changed of that agreement. Based on this agreement, the Bank will utilize a joint ATM network of 31.000 ATM units throughout Indonesia.

37. KONDISI EKONOMI

Kondisi ekonomi di Indonesia telah mempengaruhi operasi Bank dan diperkirakan masih akan mempengaruhi operasi Bank dimasa mendatang. Meskipun terdapat peningkatan pada indikator ekonomi tertentu namun perbankan Indonesia masih berada pada aktivitas pemberian kredit yang terbatas.

Apabila kondisi ekonomi memburuk, dalam hal depresiasi Rupiah atau peningkatan suku bunga yang signifikan dapat berakibat buruk terhadap kemampuan nasabah Bank (peminjam dan pihak-pihak yang mengadakan kontrak dengan Bank) untuk memenuhi Liabilitasnya pada saat jatuh tempo yang akan mempunyai konsekuensi negatif terhadap profitalitas dan kecukupan modal Bank.

Perbaikan ekonomi dan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa faktor seperti tindakan moneter dan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan pihak lainnya serta tindakan-tindakan lain diluar pengendalian dari Bank. Oleh karena itu tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah dan pemegang saham.

37. CONDITION ECONIMIC

The condition of economy in Indonesia estimated will influence bank operation and the future. Though there are increasing in certain economical indicator but indonesian banks still in limited issuing credit activity.

When ever economic condition decrease badly, rupiah depreciation and significantly increasing or interest rate happened, it will cause the ability of the relation tu fulfil their liabilities to the bank (debtors and direction accomplish contract with bank). This circum stances will effect the bank profitabilities in insufficient fund.

The improvement of economy recovery depending to several factor like meansures monetery and fiscal implemented by Indonesia government and other parties in outside bank controling. So it's not possible to certain future impact of economy condition toward liquidity and profit of bank and relation for assets, including the relation and share holders to belong influence for.

38. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

Berdasarkan Keputusan Presiden No.26 tahun 1998 yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN (SKB BI dan BPPN) No.30/270/KEP/DIR dan No.1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998, Pemerintah telah menjamin Liabilitas tertentu dari seluruh bank umum yang berbadan hukum Indonesia.

38. SAVING GUARANTY BOARD (LPS)

Based on Decree of Precident number 26, 1998 in behaviourd to pass decree of the Minister of Finance of the Republic Indonesia date January 28th, 1998 and eldest BPPN (SKB BI and BPPN) No.30/270/KEP/DIR and number 1/BPPN/1998 dated March 6th, 1998, Government alredy guarantee liabilities to be certain for all general bank law bend Indonesia.

38. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) (lanjutan)

Berdasarkan perubahan terakhir Keputusan Menteri Keuangan No.179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000, jaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan 31 Januari 2001 dan dapat diperpanjang dengan sendirinya setiap 6 (enam) bulan berikutnya secara terus menerus, kecuali apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Program Penjaminan atau jangka waktu perpanjangannya. Menteri Keuangan mengumumkan pengakhiran dan atau perubahan Program Penjaminan tersebut untuk diketahui oleh umum. Atas penjaminan ini Pemerintah membebankan premi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 tanggal 26 Mei 2000 tentang "Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum", telah diperbarui dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.84/KMK.06/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang "Syarat Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum". Perubahan tersebut antara lain mengenai pembayaran premi penjaminan yang sebelumnya dibayarkan melalui Badan Penyehatan Perbankan, diubah menjadi dibayarkan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.05/2005 tanggal 3 Maret 2005, terhitung sejak tanggal 18 April 2005 jenis Liabilitas bank umum yang dijamin berdasarkan program penjaminan Pemerintah meliputi giro, tabungan, deposito berjangka dan pinjaman yang diterima dari bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antar bank.

Program penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum Periode 1 Juli sampai dengan 21 September 2005.

Sebagai pengganti UP3, Pemerintah telah membentuk lembaga independen yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Undang-Undang No.24 tahun 2004 tersebut dengan Perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2009, tentang "Lembaga Penjaminan Simpanan" tanggal 13 Januari 2009.

38. SAVING GUARANTY BOARD (LPS) *(continued)*

Based ending addendum to be able decree of the Minister of Finance number 179/KMK.017/2000 dated May 26th, 2000, guarantee beavioured mentioned since January 26th, 1998 up to January 31st, 2001 and to be able to continue automatically every next 6 (six) month continuously, except if in 6 (six) month before ending period guarante program or period to lengthen. The Minister of Finance announce that ending or addendum of guarentee program as explanation to the public. Above this guarentee the government free premi in calculated based on percentage arranged.

The decree of the Minister of Finance of Republic Indonesia No.179/KMK. 017/2000 dated May 26th, 2000 in front "condition and arrangement guarentee government against payered general bank" alredy in new with the decree of the Minister of Finance of Republic Indonesia No.84/KMK.06/2004 dated February 27th, 2004 in front "Condition and arrangement guarentee government against payered general bank". Addendum mentioned among other to hit payer guarentee premium before in payment to Bank recovery board in addendum refering payment to Government guarantee implementation unit (UP3).

In accordance with decree of the Minister of Finance No.17/PKM.05/2005 dated March 3rd, 2005, starting from April 18th, 2005 sort of liabilities of general bank guarenteed based on government guarentee program including current account, saving. Time deposits and borrowing for other bank in bend transaction money market of inter bank.

The program guarentee government UP3 already ended dated on September 22nd, 2005, as in obviously in decree of the minister of finance No.68/PMK.05/2005 dated August 10th, 2005 in front calculated and payer premium government guarentee program against payment liabilities general bank period July 1st up to September 21st, 2005.

As a substitute for UP3, the Government has formed an independent institution namely the Deposit Insurance Agency (LPS) based on Law No. 24 of 2004 dated September 22nd, 2004 concerning the Deposit Insurance Agency, where the LPS guarantees public funds including funds from other banks in the form of demand deposits, deposits, certificates of deposit, savings and or other forms equivalent. Law No.24 of 2004 with Amendments through the Law of the Republic of Indonesia No. 7 of 2009, concerning the "Deposit Insurance Agency" dated January 13th, 2009.

38. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank. Berdasarkan Surat Edaran LPS No 13 Tahun 2018 tanggal 10 September 2018.

Pembayaran Premi Penjaminan Dana Pihak Ketiga kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) oleh PT Bank Riau Kepri atas pembayaran penyesuaian premi untuk periode 01 Januari 2020 s/d 30 Juni 2020 dan Pembayaran Premi Awal Periode 01 Juli 2020 s/d 31 Desember 2020 sebesar Rp21.108.008.404,-.

Pembayaran Premi Penjaminan Dana Pihak Ketiga kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) oleh PT Bank Riau Kepri atas pembayaran penyesuaian premi untuk periode 01 Januari 2021 s/d 30 Juni 2021 dan Pembayaran Premi Awal Periode 01 Juli 2021 s/d 31 Desember 2021 sebesar Rp21.251.068.959,- dan Rp21.151.726.422,-.

38. SAVING GUARANTY BOARD (LPS) *(continued)*

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 of 2008 dated October 13th, 2008 concerning the amount of deposit guaranteed by LPS. The amount of deposits guaranteed by LPS is deposits up to Rp2,000,000,000 per customer per bank. Based on LPS Circular Letter No. 13 of 2018 dated September 10th, 2018.

Payment of Third Party Fund Guarantee Premium to the Deposit Insurance Corporation (LPS) by PT Bank Riau Kepri for payment of premium adjustments for the period January 01st, 2020 to June 30th, 2020 and Early Premium Payment for the period July 01st, 2020 to December 31st, 2020 of IDR 21.108,008,404, -.

Payment of Third Party Fund Guarantee Premiums to the Deposit Insurance Corporation (LPS) by PT Bank Riau Kepri for premium adjustment payments for the period 01 January 2021 to 30 June 2021 and Initial Premium Payments for the period 01 July 2021 to 31 December 2021 amounting to Rp21,251,068,959,- and Rp21,151,726,422,-.

39. INFORMASI LAINNYA

Konversi PT Bank Riau Kepri Menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Disingkat "PT Bank Riau Kepri" Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH. MH tanggal 22 April 2019 Nomor 13. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" yang dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, SH. MH Akta tanggal 09 Februari 2018 Nomor 11, menyetujui atas alternatif modal dalam rangka pelaksanaan *spin off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah adalah Holding Company dan besaran penyertaan modal yang dapat disertakan Bank Riau Kepri di Bank Umum Syariah Riau Kepri adalah sebesar minimal menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Disingkat "PT Bank Riau Kepri" berdasarkan Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH. MH tanggal 19 Agustus 2019 Nomor 09. Menyetujui Dewan Komisaris untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan Gubernur Riau sebagai pemegang saham terbesar PT Bank Riau Kepri terkait penetapan Steering Committee Konversi PT Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah.

39. OTHER INFORMATION

Conversion of PT Bank Riau Kepri to PT Bank Riau Kepri Syariah

Based on Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" Abbreviated "PT Bank Riau Kepri" Notarial Deed Pupung Mulyantini, SH.MH dated April 22nd, 2019 Number 13. General Meeting of Shareholders (GMS) approved the conversion Bank Riau Kepri became a Sharia Commercial Bank.

Based on the Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Company "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" made by Notary Pupung Mulyantini, SH.MH Deed dated February 9th, 2018 Number 11, approved the alternative capital in the context of implementing the Sharia Business Unit spin-off into Sharia Commercial Bank is a Holding Company and the amount of capital investment that can be included by Bank Riau Kepri in Sharia Riau Kepri Commercial Bank is at a minimum according to applicable regulations.

Based on Deed of Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Company "Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri" abbreviated "PT Bank Riau Kepri" based on Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH. MH dated August 19th, 2019 Number 09. Approve the Board of Commissioners to first consult with The Governor of Riau as the largest shareholder of PT Bank Riau Kepri related to the establishment of the PT Bank Riau Kepri Conversion Steering Committee into Bank Riau Kepri Syariah.

39. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

Konversi PT Bank Riau Kepri Menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah (lanjutan)

Konversi PT Bank Riau Kepri menjadi Bank Riau Kepri Syariah telah dilakukan kerjasama dengan Tazkia Consulting, Karim Consulting Indonesia dan Core Banking System IT Konversi BUS oleh PT Multi Polar Tecnology. PT Bank Riau Kepri telah melakukan sosialisasi Kebijakan Konversi dan Pelatihan-pelatihan Akad-akad Bank Syariah pada jaringan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kedai.

Rencana konversi menjadi Bank Umum Syariah

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 22 April 2019 memutuskan PT Bank Riau Kepri akan di konversi dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Menindaklanjuti hal tersebut, Direksi menerbitkan Surat Keputusan Tentang Tim *Project Management* Konversi PT Bank Riau Kepri menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah dan Tim *Counterpart Management* yang akan mendampingi *Project Management Office* (*PMO*) dalam bekerja.

Dalam menetapkan strategi pencapaian kerja terhadap pekerjaan konversi syariah, Bank telah menyusun program kerja sebagai acuan pengukuran pencapaian kerja.

Terdapat 12 (dua belas) bidang yang menjadi sasaran kerja tim yaitu:

- Bidang Sumber Daya Insani dan Training
- Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Publikasi Konversi
- Bidang Pengembangan Produk Pembiayaan (BPP, SOP, SK & SE)
- Bidang Pengalihan Aset Pembiayaan
- Bidang Pengembangan Produk Dana, Jasa dan Treasuri (BPP, SOP, SK & SE)
- Bidang Pengalihan Aset Treasury dan Liabilitas (DPK)
- Bidang Sharia Values, Culture dan Service
- Bidang Pengadaan Infrastruktur dan Supporting
- Bidang Teknologi Informasi, Akuntansi dan Pelaporan
- Bidang Perizinan System Pembayaran dan Kelembagaan

39. OTHER INFORMATION *(continued)*

Conversion of PT Bank Riau Kepri to PT Bank Riau Kepri Syariah *(continued)*

Conversion of PT Bank Riau Kepri to Bank Riau Kepri Syariah has been carried out in collaboration with Tazkia Consulting, Karim Consulting Indonesia and Core Banking IT System BUS Conversion by PT Multi Polar Tecnology. PT Bank Riau Kepri has conducted socialization on the Conversion Policy and Sharia Bank Contracts Training in the network of Branch Offices, Sub-Branch Offices and Shops.

The conversion plan to become a Sharia Commercial Bank

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on April 22nd, 2019 decided that PT Bank Riau Kepri would convert from a Conventional Commercial Bank (BUK) to a Sharia Commercial Bank (BUS).

Following up on this, the Board of Directors issued a Decree on the Project Management Team for the conversion of PT Bank Riau Kepri to PT Bank Riau Kepri Syariah and the Counterpart Management Team who will accompany the Project Management Office (PMO) in their work.

In determining work achievement strategies for sharia conversion work, the Bank has formulated a work program as a reference for measuring work achievement.

There are 12 (twelve) areas that are the target of teamwork, namely:

- *Human Resources and Training*
- *Field of Education, Socialization and Conversion Publication*
- *Financing Product Development Sector (BPP, SOP, SK & SE)*
- *Financing Asset Transfer Division*
- *Fund Product Development, Services and Treasury (BPP, SOP, SK & SE)*
- *Transfer of Treasury Assets and Liabilities (DPK)*
- *Sharia Values, Culture and Service*
- *Infrastructure Procurement and Supporting Sector*
- *Information Technology, Accounting and Reporting*
- *Payment System and Institutional Licensing Sector*

39. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

Rencana konversi menjadi Bank Umum Syariah (lanjutan)

Terdapat 12 (dua belas) bidang yang menjadi sasaran kerja tim yaitu (lanjutan):

- Bidang Legal Konversi, Legal Corporate, Legal Product dan Perizinan Konversi
- Bidang Penyusunan Pedoman (BPP, SOP, SK dan SE) Non Bisnis

Konversi Bank Riau Kepri menjadi Bank Umum Syariah direncanakan pada semester - I tahun 2021.

Pada saat konversi, seluruh item pada aktiva dan pasiva bank secara bertahap beralih sepenuhnya ke aktivitas syariah dengan berkoordinasi di setiap unit kerja bidang kredit/ pembiayaan dan DPK.

Inventarisir aset produktif untuk dialihkan ke aset berbasis syariah termasuk perlakuan pencatatan dan pembentukan cadangan, bank memiliki waktu transisi selama 360 hari sejak resmi berkonversi dengan menyiapkan *scenario financial* terkait potensi aset yang masih memerlukan waktu yang lebih panjang.

Penyelesaian yang sedang dan akan diselesaikan mencakup dan tidak terbatas pada : pengakuan dan pencatatan penempatan antar bank, surat berharga yang dimiliki, penyertaan, kartu kredit, kredit/ pembiayaan yang diberikan baik kolektabilitas lancar maupun bermasalah yang dalam proses konversi belum dapat dikonfimasikan secara langsung termasuk pengelolaan kredit/ pembiayaan yang telah dihapus buku dan pencatatan komitmen serta kontinjensi yang menjadi hak dan kewajiban bank, akan dilakukan secara komprehensif termasuk pembentukan cadangan kerugian bila potensi tersebut diperlukan.

Pengelolaan kewajiban bank terhadap pihak ketiga dan pihak lainnya yang menjadi tanggung jawab bank dalam bentuk konfirmasi tertulis baik secara individual maupun kolektif atas nama pemerintah daerah, korporasi dan bentuk lain yang dilakukan dan akan dilakukan sejalan dengan program dukungan nasabah dalam proses konversi yang dilakukan untuk seluruh rekening kewajiban yang dikelola bank kepada pihak ketiga dan pihak lainnya yang menjadi sebagian lampiran pengajuan izin ke otoritas dan secara bertahap akan dipenuhi sesuai komitmen yang akan disiapkan oleh bank.

Pengaturan penggolongan identifikasi nomor nasabah (CIF) dan pengaturan kembali penomoran kantor yang disesuaikan dengan keberadaan kantor di wilayah kerja bank dan penempatan lokasi yang lebih terdistribusi.

39. OTHER INFORMATION *(continued)*

The conversion plan to become a Sharia Commercial Bank *(continued)*

There are 12 (twelve) areas that are the target of teamwork, namely (continued):

- *Conversion Legal, Corporate Legal, Legal Product and Conversion Licensing Areas*
- *Non-Business Guidelines (BPP, SOP, SK and SE) Division*

The conversion of Bank Riau Kepri to Sharia Commercial Banks is planned for the first semester of 2021.

At the time of conversion, all items in the bank's assets and liabilities gradually switch to sharia activities in coordination with each working unit in the credit / financing and deposits sectors.

Inventory of earning assets to be transferred to assets based on sharia, including recording treatment and formation of reserves, banks have a transition time of 360 days from the official conversion by preparing financial scenarios related to potential assets that still require a longer time.

Settlements that are being and will be completed include but are not limited to: recognition and recording of interbank placements, securities owned, investments, credit cards, credit / financing provided both current and non-performing collectabilities which in the conversion process cannot be directly confirmed including management credit / financing that has been written off and the recording of commitments and contingencies that are the rights and obligations of the bank, will be carried out comprehensively including the formation of reserves for losses if the potential is required.

Management of bank liabilities to third parties and other parties which are the responsibility of the bank in the form of written confirmation both individually and collectively on behalf of local governments, corporations and other forms carried out and will be carried out in line with customer support programs in the conversion process carried out for all accounts obligations that are managed by the bank to third parties and other parties that are part of the attachment to application for licenses to the authorities and will gradually be fulfilled according to the commitments that will be prepared by the bank.

Arrangements for classification of customer identification numbers (CIF) and rearrangement of office numbering in accordance with the presence of offices in the bank's working area and more distributed location placements.

39. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

Rencana konversi menjadi Bank Umum Syariah (lanjutan)

Memastikan pemenuhan ketentuan terkait pengelolaan likuiditas dan ketentuan lainnya terkait operasional persiapan konversi menjadi bank syariah tetap menjadi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

Intensitas sosialisasi, edukasi dan bimbingan teknis kegiatan operasional syariah ke seluruh pegawai dilakukan guna memastikan kompetensi setiap pegawai telah mendukung program konversi.

Kelengkapan prasyarat mengajuan izin termasuk kesiapan teknis teknologi telah dipastikan siap untuk disubmit ke OJK.

Penyesuaian *corporate identity* yang baru diharapkan semakin mendukung proses konversi.

Target Jangka Menengah

Target jangka menengah Bank terdiri dari:

a. Mendorong inovasi produk dan perluasan ragam layanan berbasis *digital* untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkokoh citra Bank Riau Kepri di mata nasabah serta meningkatkan pendapatan Bank.

b. Memperluas *delivery channel* melalui pengembangan jaringan kantor, *e-channel* sejalan dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap *e-banking* dan Laku Pandai untuk memperkuat posisi Bank Riau Kepri sebagai Bank pilihan bagi masyarakat Riau dan Kepulauan Riau.

c. Peningkatan modal dengan memanfaatkan dukungan Pemegang Saham, sehingga daya saing Bank Riau Kepri meningkat.

d. Peningkatan kualitas tata kelola, kepatuhan dan pengelolaan risiko melalui:

   1. Memastikan stabilitas likuiditas
   2. Memperkuat permodalan
   3. Meningkatkan tata kelola dan kepatuhan yang efektif
   4. Mengelola risiko untuk memberi nilai tambah

***39. OTHER INFORMATION** (continued)*

***The conversion plan to become a Sharia Commercial Bank** (continued)*

Ensuring compliance with the provisions related to liquidity management and other provisions related to operational preparations for conversion to a sharia bank remains an obligation that must be fulfilled.

The intensity of socialization, education and technical guidance on sharia operational activities to all employees is carried out to ensure that the competence of each employee supports the conversion program.

Completeness of the pre-requisites for submitting a permit, including the technical readiness of technology, has been confirmed to be ready to be submitted to the OJK.

It is hoped that the new corporate identity adjustment will further support the conversion process.

Medium Term Targets

The Bank's medium-term targets consist of:

a. Encouraging product innovation and expanding the range of digital-based services to improve service quality and strengthen the image of Bank Riau Kepri in the eyes of customers and increase the Bank's revenue.

b. Expanding delivery channels through the development of office networks, e-channels in line with the increasing public interest in e-banking and Laku Pandai to strengthen the position of Bank Riau Kepri as the Bank of choice for the people of Riau and Riau Islands.

c. Increase in capital by utilizing the support of Shareholders, so that the competitiveness of Bank Riau Kepri increases.

d. Improving the quality of governance, compliance and risk management through:

   1. Ensuring liquidity stability
   2. Strengthen capital
   3. Promote effective governance and compliance
   4. Manage risk to add value

39. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

Perubahan Modal Disetor

Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Riau Kepri, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Riau Kepri, Akta No. 02 tanggal 03 Desember 2020, yang dibuat Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH. Modal Perseroan yang telah dikeluarkan 11.004.608 (sebelas juta empat ribu enam ratus delapan) lembar saham seri A dan seri B dengan jumlah nominal Rp1.100.460.800.000,- (satu triliun seratus miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Riau Kepri tersebut telah didata oleh sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0082456.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020.

Perubahan modal disetor Bank terakhir disetujui oleh OJK berdasarkan surat OJK No. S-715/KO.053/2020 tanggal 8 Desember 2020 perihal Laporan Perubahan Modal Disetor PT BPD Riau Kepri telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK, sehingga modal disetor Bank menjadi Rp1.100.460.700.000 (satu triliun seratus miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah). Modal disetor tersebut sesuai dengan laporan posisi keuangan PT Bank Riau Kepri pada tanggal 31 Desember 2020.

Penyajian modal disetor tersebut terdapat selisih Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor Tahun 2020, Tentang Perubahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap PT Bank Riau Kepri, yang sedang diproses.

Permasalahan Hukum

Terdapat kasus hukum dan pemberitaan negatif yang terkait dengan Komisaris Utama Bank. Kasus tersebut juga sudah dikonfirmasi oleh OJK Pekanbaru kepada Bank sebagaimana surat OJK No. SR-151/KO.053/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Negatif Komisaris Utama Bank. Atas surat OJK tersebut, Bank telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada OJK dengan No. 962/MR.01/DIR/2020 tanggal 23 Desember 2020, perihal Pemberitahuan dan Permohonan Arahan yang ditujukan kepada Gubernur selaku pemegang saham pengendali.

***39. OTHER INFORMATION** (continued)*

Changes in Paid-in Capital

Amendment to the Articles of Association of PT Bank Riau Kepri, based on the Deed of Decision of the Shareholders outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri, Deed No. 02 dated December 3rd, 2020, made by Notary Pupung Mulyantini, SH, MH. The Company's issued capital was 11,004,608 (eleven million four thousand six hundred eight) series A and B series shares with a nominal amount of IDR 1,100,460,800,000, - (one trillion one hundred billion four hundred and sixty million eight hundred thousand rupiah). Approval of the Amendment to the Articles of Association of PT Bank Riau Kepri has been recorded by the Legal Entity Administration system in accordance with the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0082456.AH.01.02.Tahun 2020 dated December 10th, 2020.

The last change in the Bank's paid-in capital was approved by OJK based on OJK letter No.S-715/KO.053/2020 dated December 8th, 2020 regarding the Report on Changes in Paid-in Capital of PT BPD Riau Kepri has been administered in the OJK supervisory administration, so that the Bank's paid-up capital is IDR 1,100,460,700,000 (one trillion one hundred billion four hundred sixty million seven hundred thousand rupiah). The paid-up capital is in accordance with the financial position report of PT Bank Riau Kepri on December 31st, 2020.

The presentation of paid-in capital is a difference of IDR 100,000 (one hundred thousand rupiah), namely for the Indragiri Hilir Regency Government in accordance with the Draft Regional Regulation of Indragiri Hilir Regency Number 2020, Concerning Changes in Equity Participation of the Indragiri Hilir Regency Government in PT Bank Riau Kepri, which is being processed .

Legal Issues

There are legal cases and negative news related to the President Commissioner of the Bank. This case has also been confirmed by OJK Pekanbaru to the Bank as stated in OJK letter No. SR-151 / KO.053 / 2020 dated 23 December 2020 regarding the Negative Notification of the President Commissioner of the Bank. For the OJK letter, the Bank has followed up by sending a letter to OJK with No. 962 / MR.01 / DIR / 2020 dated 23 December 2020, regarding Notification and Request for Direction addressed to the Governor as the controlling shareholder.

39. INFORMASI LAINNYA (lanjutan)

Permasalahan Hukum (lanjutan)

Terkait kasus hukum tersebut diatas tidak terdapat pengaruh reputasi negatif dari pemilik Bank. Sebagai bank yang dimiliki oleh PEMDA Tingkat I/II di Provinsi Riau dan Kepri, Bank Riau Kepri memiliki kredibilitas yang kuat di mata nasabah. Juga kasus hukum tersebut tidak berpengaruh terhadap reputasi dan kelangsungan usaha Bank, karena penetapannya sebagai tersangka adalah kasus yang terjadi pada saat yang bersangkutan belum menjabat sebagai Komisaris Utama Bank, namun tetap menjadi perhatian dari manajemen.

Perkara Perdata

Pada akhir tahun 2021, terdapat 17 (tujuh belas) kasus perdata yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri.

Perkara Pidana

Pada akhir tahun 2021, terdapat 14 (lima belas) kasus perkara pidana yang masih dalam proses penyidikan.

39. OTHER INFORMATION *(continued)*

Legal Issues *(continued)*

Regarding the legal case mentioned above, there was no negative reputation influence from the owner of the Bank. As a bank owned by PEMDA Level I / II in Riau and Kepri Provinces, Bank Riau Kepri has strong credibility in the eyes of customers. Also, the legal case does not affect the reputation and business continuity of the Bank, because the determination of him as a suspect is a case that occurred when the person concerned was not the President Commissioner of the Bank, but it remains the concern of management.

Civil Case

At the end of 2021, there were 17 (seventeen) civil cases that were still in the trial process at the District Court.

Criminal Case

At the end of 2021, there were 14 (fifteen) criminal cases that were still under investigation.

40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Tahun 2021 PT Bank Riau Kepri menerima surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan (SKP) tahun pajak 2018 yang telah ditetapkan dengan surat No.00005/206/18/218/21 tanggal 22 Desember 2021. yaitu pajak kurang bayar sebesar Rp17.133.126.500 dan denda administrasi sebesar Rp7.483.749.655 dengan total sebesar Rp24.616.876.155. Jumlah yang telah dibayar pada tanggal 20 Januari 2022 sebesar Rp23.905.608.866 (jumlah tersebut dibebankan pada laporan tahun buku 2022).

Perkembangan persiapan Konversi PT Bank Riau Kepri menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah berdasarkan Laporan Progress Konversi PT Bank Riau Kepri tanggal 10 Januari 2022, penyiapan dokumen izin konversi BRK menjadi BRK syariah yang terdiri dari 16 dokumen perizinan konfersi sesuai SE OJK No. 02/SEOJK.03/2017 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah telah diselesaikan. Sampai saat ini izin konfersi PT Bank Riau Kepri menjadi PT Bank Riau Kepri Syariah belum diterima dari Otoritas Jasa Keuangan.

40. EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE

In 2021 PT Bank Riau Kepri received a tax assessment letter for underpayment of income tax (SKP) for the 2018 fiscal year which was stipulated by letter No. 00005/206/18/218/21 dated December 22, 2021. namely tax underpayment of Rp. 17,133,126. 500 and an administrative fine of Rp.7,483,749,655 for a total of Rp.24,616.876,155. The amount that has been paid on January 20, 2022 is Rp.23,905,608,866 (the amount is charged to the 2022 financial year report).

The development of the preparation for the conversion of PT Bank Riau Kepri to PT Bank Riau Kepri Syariah based on the Conversion Progress Report of PT Bank Riau Kepri dated January 10, 2022, the preparation of the permit document for converting BRK to BRK sharia which consists of 16 conversion licensing documents according to SE OJK No. 02/SEOJK.03/2017 concerning Changes in Business Activities of Conventional Commercial Banks to Islamic Commercial Banks has been completed. Until now, the permit for the conversion of PT Bank Riau Kepri to PT Bank Riau Kepri Syariah has not been received from the Financial Services Authority.

41. KELANGSUNGAN USAHA

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona" setelah ditemukannya beberapa orang teridentifikasi terpapar virus corona ("Covid-19"). Kondisi darurat tersebut bersamaan dengan situasi perekonomian dalam negeri di awal tahun 2020, antara lain dengan melemahnya nilai tukar Rupiah.

Meningkatnya penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) secara global maupun domestik, menimbulkan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dan kemampuan nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan dalam memenuhi kewajiban kredit yang diberikan dan pembiayaan kepada Bank. Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku dunia usaha, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang diharapkan dapat memacu stabilitas perekonomian nasional.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi tersebut, Bank telah menyiapkan kebijakan restrukturisasi kredit yang diberikan dan pembiayaan bagi nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan yang terdampak COVID-19 melalui Kebijakan perusahaan perihal Perlakuan Khusus Nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan yang Terkena Dampak *Coronaviruses* (COVID-19).

Kebijakan tersebut mengatur ketentuan yang terkait antara lain, kriteria nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan terdampak, sektor usaha yang terdampak COVID-19, mekanisme dan skema restrukturisasi, kewenangan memutus, penetapan kualitas kredit yang diberikan dan pembiayaan, monitoring, pelaporan kepada regulator serta jurnal akuntansi. Kebijakan disusun mengacu pada POJK No.11/POJK.03/2020 dan POJK No.48/POJK.03/2020 serta ketentuan internal Bank lainnya. Usulan restrukturisasi kredit yang diberikan dan pembiayaan terdampak COVID-19 dilakukan secara selektif serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga terlaksananya *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Secara umum, Bank telah menyusun skema restrukturisasi dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Perpanjangan jangka waktu kredit yang diberikan dan pembiayaan.
b. Penundaan/pengurangan pembayaran pokok dan atau margin/ujrah/bagi hasil

41. BUSINESS CONTINUITY

In early 2020, the National Disaster Management Agency of the Republic of Indonesia (BNPB RI) announced the enactment of the "Status of Certain Disaster Emergency Situations Due to Corona Virus" after the discovery of several people identified as having been exposed to the corona virus ("Covid-19"). This emergency condition coincided with the domestic economic situation in early 2020, among others, with the weakening of the Rupiah exchange rate.

The increasing spread of the corona virus disease 2019 (COVID-19) globally and domestically has had a direct or indirect impact on the performance and ability of credit customers given and financing in fulfilling credit obligations provided and financing to the Bank. As a form of government support for business actors, the government has issued policies which are expected to spur national economic stability.

In order to support the government's efforts to maintain economic stability, the Bank has prepared a policy for restructuring loans provided and financing for credit customers who are given and financing affected by COVID-19 through company policies regarding special treatment for credit customers given and financing Affected by Coronaviruses (COVID-19).

The policy regulates related provisions, among others, criteria for credit customers and affected financing, business sectors affected by COVID-19, restructuring mechanisms and schemes, decision authority, determination of credit quality and financing, monitoring, reporting to regulators and accounting journals. . Policies are prepared referring to POJK No.11/POJK.03/2020 and POJK No.48/POJK.03/2020 as well as other internal Bank regulations. The proposal for restructuring of loans and financing affected by COVID-19 is carried out selectively and prioritizes the principle of prudence and maintains the implementation of Good Corporate Governance (GCG) properly. In general, the Bank has prepared a restructuring scheme with the following mechanism:

a. *Extension of the credit period and financing.*
b. *Postponement / reduction of principal and / or margin / ujrah / profit sharing payments*

41. KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)

Dalam pelaksanaan relaksasi kredit yang diberikan dan pembiayaan, Bank melakukan *assesment* secara komprehensif terhadap nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan yang mengajukan permohonan restrukturisasi kredit yang diberikan dan pembiayaan terdampak COVID-19 untuk menghindari *free rider* (moral hazard) dan meminimalkan risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran. Begitupun dengan pemberian stimulus yang hanya dapat diberikan kepada nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank dan regulator.

Dalam kaitan dengan kondisi pandemi COVID19 yang tengah berlangsung, Bank melakukan sejumlah penyesuaian pada mekanisme monitoring kredit yang diberikan dan pembiayaan, baik terhadap nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan secara entitas maupun portofolio. Sejumlah penyesuaian ini dilakukan agar hasil monitoring senantiasa dapat memberikan *early warning signal* sehingga penetapan mitigasi risiko dapat tepat guna dalam menjaga kualitas kredit yang diberikan dan pembiayaan selama masa pandemi COVID-19.

Penyesuaian mekanisme monitoring kredit yang diberikan dan pembiayaan dilakukan melalui:

1. Analisa *watchlist* terhadap seluruh nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan, terutama entitas nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan yang berada pada sektor usaha terdampak Covid-19 dengan mengacu pada POJK 48/2020 (sebagai penyesuaian atas POJK 11/2020) dan ketentuan internal Bank. Output *watchlist* untuk nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan yang berpotensi mengalami penurunan kinerja disertai dengan *action plan* yang dimonitoring pelaksanaannya secara berkelanjutan.

2. Pengendalian pencairan/ penambahan/ perpanjangan plafond kredit yang diberikan dan pembiayaan terhadap nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi kredit yang diberikan dan pembiayaan (terutama yang melalui skema Stimulus Perekonomian Nasional POJK 48/2020 [sebagai penyesuaian atas POJK 11/2020]), sehingga tujuan restrukturisasi dapat dicapai dengan tepat guna.

3. Melakukan *stress testing* secara berkala dengan skenario melibatkan aspek kondisi Pandemi COVID-19 sebagai pendukung *judgemental decision making.*

4. Melaksanakan *post facto review* nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan restrukturisasi terdampak Covid-19 untuk menghindari moral hazard dan meminimalkan risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran serta memantau keberlangsungan usaha/kemampuan nasabah kredit yang diberikan dan pembiayaan.

41. BUSINESS CONTINUITY *(continued)*

In the implementation of relaxation of loans and financing, the Bank conducts a comprehensive assessment of credit customers who are given and financing who apply for restructuring of loans and financing affected by COVID-19 to avoid free riders (moral hazard) and minimize the risk of improperly targeted restructuring. Likewise with the provision of stimuli that can only be given to credit customers and financing that meets the criteria set by the Bank and regulators.

In connection with the ongoing COVID19 pandemic conditions, the Bank has made a number of adjustments to the monitoring mechanism for loans and financing, both for credit customers and entity and portfolio financing. A number of adjustments were made so that the results of monitoring can always provide an early warning signal so that the determination of risk mitigation can be effective in maintaining the quality of loans and financing during the COVID-19 pandemic.

Adjustments to the credit monitoring mechanism provided and financing are carried out through:

1. *Watchlist analysis of all credit and financing customers, especially credit customer entities provided and financing that are in the business sector affected by Covid-19 with reference to POJK 48/2020 (as an adjustment to POJK 11/2020) and the Bank's internal regulations. The output watchlist for credit and financing customers that have the potential to experience a decline in performance is accompanied by an action plan that is monitored on an ongoing basis.*

2. *Control of disbursement / addition / extension of credit ceilings provided and financing for credit customers provided and financing that is carried out by restructuring of loans and financing (especially through the National Economic Stimulus scheme POJK 48/2020 [as an adjustment to POJK 11/2020]), so that the objectives of restructuring can be achieved efficiently.*

3. *Perform regular stress testing with scenarios involving aspects of the COVID-19 pandemic as a support for judgmental decision making.*

4. *Carry out a post facto review of credit customers given and restructuring financing affected by Covid-19 to avoid moral hazard and minimize the risk of improperly targeted restructuring as well as to monitor business continuity / ability of credit customers and financing.*

41. KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)

Bank senantiasa melakukan review atas pelaksanaan mekanisme monitoring kredit yang diberikan dan pembiayaan ditengah kondisi Pandemi COVID-19 sehingga penyesuaian dapat dilakukan pada kesempatan pertama saat terjadi perubahan kondisi Pandemi COVID-19 dengan mengacu pada peraturan pemerintah dan regulator yang berlaku.

Selanjutnya Bank melakukan review terhadap kecukupan cadangan kerugian/CKPN atas kredit yang diberikan dan pembiayaan yang dilakukan restrukturisasi COVID-19 untuk mengantisipasi potensi risiko kredit di masa mendatang.

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa Perseroan tidak mengalami dampak signifikan pertanggal laporan posisi keuangan karena tidak signifikan eksposur tersebut.

41. BUSINESS CONTINUITY *(continued)*

The Bank constantly reviews the implementation of the credit monitoring mechanism provided and financing in the midst of the COVID-19 Pandemic so that adjustments can be made at the first opportunity when conditions change for the COVID-19 Pandemic by referring to applicable government and regulatory regulations.

Furthermore, the Bank conducts a review of the adequacy of the allowance for losses / CKPN on loans and financing that is under restructuring for COVID-19 to anticipate potential credit risks in the future.

The management of the Company stated that the Company did not experience a significant impact on the statement of financial position because it was not a significant exposure.

42. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 15 Februari 2022.

42. THE COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is responsible for the presentation and preparation of financial statements that were completed on February 15, 2022.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN / *INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT*

Kantor Akuntan Publik
Bustaman, Ezeddin & Putranto
Akuntan Publik Terdaftar dan Konsultan Manajemen
Izin Usaha No. : 1029/KM.1/2017

Kantor Pusat :
Gedung Sentra Kramat Blok B No. 18, Jl. Kramat Raya No. 7-9
Telp. 021-3156131 • Fax. 021-3148966, Jakarta Pusat 10450
www.kapbep.com • E-mail : infokap@kapbep.com

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. : 00001/2.1151/AU.1/07/0332-3/1/II/2022

Kepada Yth. / To
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi /
Shareholders, Board of Commissioners and Directors
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri
Pekanbaru – Riau

Laporan atas Laporan Keuangan

Report on the financial statements

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri as of which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, and the statement of comprehensive income, changes in equity and cash flow for the years ended, and summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether do to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditor's responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audits in accordance with standards on auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement.

Kantor Cabang :
Jl. Bhakti No. 61, Asrama Haji Tabing, Telp. 0751-7055101 • Fax. 0751-7059924
Padang 25171. E-mail : henryputranto@kapbep.com • henryakuntan@yahoo.co.id

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri as of December 31, 2021 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standars.

KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto

Elviana Ezeddin, CA, CPA
NRAP / *License Acc.* : AP.0332

15 Februari 2022 / *February 15th, 2022*

00001

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left bank

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left bank

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left bank

bankriaukepri
tumbuh kembangkan usaha

Call Center 1500470

Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri,
Jl. Jend. Sudirman No. 462
Pekanbaru 28116

Telp. : 0761-47070
Fax. : 0761-42389

bankriaukepri.co.id

bankriaukepri.co.id